SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Bogor Tahun 2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024;

b. bahwa dengan adanya dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, maka perlu dilakukan reformulasi kebijakan dan rencana pembangunan daerah pada tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65);
26. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB IV Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD
TAHUN 2024

Pasal 4

Sistematika penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024, meliputi:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2024

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

2. Ketentuan BAB VII Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari Renja:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Inspektorat Daerah;
d. Dinas Pendidikan;
e. Dinas Kesehatan;
f. Dinas Sosial;
g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
h. Dinas Lingkungan Hidup;
i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
j. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
n. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
o. Dinas Tenaga Kerja;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
r. Dinas Perhubungan;
s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
t. Satuan Polisi Pamong Praja;
u. Dinas Perumahan dan Permukiman;

v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
x. Badan Pendapatan Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
aa. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
dd. Kecamatan Bogor Tengah;
ee. Kecamatan Bogor Selatan;
ff. Kecamatan Bogor Barat;
gg. Kecamatan Bogor Utara;
hh. Kecamatan Bogor Timur;
ii. Kecamatan Tanah Sareal; dan
jj. Rumah Sakit Umum Daerah.

3. Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOTA BOGOR
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (HAN)
Pembina Tk.I

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR : 25 TAHUN 2024
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024.

A. SEKRETARIAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Renja Setda Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan dokumen perencanaan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2024 dan perubahan alokasi APBD Tahun 2024 yang disebabkan karena adanya perubahan perubahan kebijakan daerah serta Percepatan penyelesaian prioritas pembangunan daerah yang berimplikasi pada perubahan kerangka ekonomi, keuangan daerah dan rencana prioritas pembangunan pada tahun 2024. Adapun lingkup perubahan meliputi : penambangan/pengurangan sub kegiatan; perubahan target kinerja baik IKU RPD/RPJMD, IKU Renstra, IKK outcome

atau output; Perubahan Struktur Anggaran Belanja dan Kegiatan; Penyesuaian output pada subkegiatan yang terkait dengan DAK, Dana Insentif Fisikal, DBHCHT, dan sebagainya; Penyesuaian kebijkan sesuai dengan regulasi terbaru yang medukung sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah semester I tahun 2024 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja semester I pada Renja Setda Kota Bogor Tahun 2024. Tahap penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Tahapan proses penyusunan dan sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Setda Kota Bogor Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Tahun 2024

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2024, meliputi :

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 dan capaian kinerja pelaksanaan APBD Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 sampai dengan triwulan kedua;
2. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian target sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah

tahun 2024, dengan mempertimbangkan hasil dari refocusing APBD Sekretariat Daerah Tahun 2024;

3. Terjadinya perubahan arah kebijakan pada tingkat pusat dan provinsi Jawa Barat serta Kota Bogor yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sekretariat Daerah Tahun 2022;
5. Penambahan/pengurangan/pergeseran rincian subkegiatan karena adanya efisiensi dan penuntasan prioritas pembangunan
6. Perubahan Pagu Program/kegiatan/ subkegiatan seiring dengan penambahan/pengurangan/ pergeseran sub kegiatan

1.3. Dasar Hukum Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 meliputi :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional
14) Peraturan Presiden No 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
20) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif
21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
22) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
23) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
24) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.
25) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2023;
26) Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2023;

27) Peraturan Walikota Bogor Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2019-2024;
28) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
29) Peraturan Walikota Bogor Nomor 155 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 155);
30) Peraturan Wali Kota Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 28);
31) Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024;
32) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
33) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
34) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
35) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
36) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
37) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

38) Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 900.1/Kep.209-BKAD/2-24 tentang Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Dan Kegiatan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;

39) Peraturan Walikota Bogor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun sebagai pedoman dan arah bagi Sekretariat Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kota Bogor dan berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah adalah :

1. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2023.
2. menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah.
3. mengakomodir perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa perubahan pengurangan dan pergeseran aggaran kegiatan.
4. menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2024, disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023 DAN TRIWULAN 2 TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023, Triwulan 2 Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
2.4. Riview terhadap Rancangan awal RKPD
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Sekretariat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 73 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor tahun 2024 sampai dengan semester satu, Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat Daerah Kota Bogor sampai dengan semester dua tahun 2024 sesuai dengan RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi capaian kinerja sampai tahun 2024 Triwulan II dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Evaluasi capaian IKU Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Bogor Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5			6			7		8		9 = 7+8		10=9/6 x 100%	
				K		Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Tingkat Pemanfaatan sistem informasi dalam pengadaan barang dan jasa**	**29**	**poin**	**6.151.905.794**	**29**	**poin**	**877.990.250**		**83.185.654**		**117.376.458**		**200.562.112**	**97.88**	
			Tingkat Kematangan UKPBJ	**40**	**poin**		**40**	**poin**								-	
			Tingkat Pemenuhan JF PPBJ di lingkungan UKPBJ	**9**	**poin**		**9**	**poin**								-	
I	**4.01.03 .2.03**	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Indeks Kepuasan Penerima Layanan UKPBJ**	**3.4**	**poin**	**6.151.905.794**	**3.4**	**poin**	**877.990.250**		**83.185.654**		**117.376.458**		**200.562.112**		
1	4.01.03. 2.03.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	12	Dokumen	3.055.579.788	12	Dokumen	607.890.250	3	54.823.444	3	92.339.668	6	147.163.112	50.00	24.21%
2	4.01.03. 2.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	Dokumen	1.986.962.006	12	Dokumen	160.000.000	3	23.420.210	3	25.036.790	6	48.457.000	50.00	30.29%
3	4.01.03. 2.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	276	Orang	1.109.364.000	276	Orang	110.100.000	26	4.942.000	14	-	40	4.942.000	14.49	4.49%
JUMLAH BAGIAN PBJ									**877.990.250**		**83.185.654**		**117.376.458**		**200.562.112**		**22.84%**
	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota**	**A**	**poin**	**98.709.300**	**A**	**poin**	**98.709.300**		**11.765.000**		**16.633.270**		**28.398.270**		**28.77%**
II	**4.01.01 .2.01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota**	**A**	**poin**	**98.709.300**	**A**	**poin**	**98.709.300**		**11.765.000**		**16.633.270**		**28.398.270**		**28.77%**
4	4.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	62.858.800	2	Dokumen	62.858.800	-	8.495.000	1	7.866.770	1	16.361.770	50.00	26.03%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5			6			7		8		9 = 7+8		10=9/6 x 100%	
				K		Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	35.850.500	3	Laporan	35.850.500	-	3.270.000	2	8.766.500	2	12.036.500	66.67	33.57%
	4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase kegiatan PD yang terealisasi sesuai rencana**	**94**	**%**	**204.870.900**	**94**	**%**	**204.870.900**		**6.825.000**		**51.619.493**		**58.444.493**		**28.53**
III	**4.01.03.2.02**	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**prosentase PD yang menyampaikan laporan realisasi keuangan dan progres fisik secara tepat**	**100**	**%**	**204.870.900**	**100**	**%**	**204.870.900**	**100**	**6.825.000**	**100**	**51.619.493**	**100**	**58.444.493**		**28.53**
6	4.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	0	Dokumen	-	-	Dokumen	-		-		-	-			
7	4.01.03.2.02.02	Sub Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Laporan	51.923.500	4	Laporan	51.923.500	1	3.555.000	1	28.625.000	2	32.180.000	50.00	61.98
8	4.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	Laporan	152.947.400	12	Laporan	152.947.400	3	3.270.000	3	22.994.493	6	26.264.493	50.00	17.17
JUMLAH BAG. ADBANG						**303.580.200**			**303.580.200**		**18.590.000**		**68.252.763**		**86.842.763**		**28.61**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kematangan Organisasi**	**48.7**	**poin**	**677.360.100**	**48.7**	**poin**	**677.360.100**		**107.871.363**		**55.529.578**		**163.400.941**		**24.12**
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota	**A**	**poin**		**A**	**poin**									
			Nilai Rata-rata IKM Pelayanan Publik	**3.55**	**poin**		**3.55**	**poin**									
IV	**4.01.01.2.13**	**Kegiatan Penataan Organisasi**	**Persentase PD yang mempunyai nilai kematangan organisasi minimal tinggi**	**83.33**	**%**	**677.360.100**	**83.33**	**%**	**677.360.100**		**107.871.363**		**55.529.578**		**163.400.941**		**24.12**
			Nilai AKIP Komponen Pelaporan Kinerja	**12.5**	**poin**		**12.5**	**poin**									
			Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PMPRB	**20**	**%**		**20**	**%**									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5			6			7		8		9 = 7+8		10=9/6 x 100%	
				K		Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase PD yang memiliki nilai IKM ≥ 3,35	**50**	**%**		**50**	**%**									
9	4.01.01.2.13.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	70	Dokumen	281.411.200	70	Dokumen	281.411.200	1	27.341.901	5	18.462.568	6	45.804.469		16.28
10	4.01.01.2.13.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7	Laporan	102.077.400	7	Laporan	102.077.400	1	44.179.817	0	17.986.500	1	62.166.317		60.90
11	4.01.01.2.13.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6	Dokumen	293.871.500	6	Dokumen	293.871.500	2	36.349.645	2	19.080.510	4	55.430.155		18.86
		JUMLAH BAGIAN ORGANISASI				**677.360.100**			**677.360.100**		**107.871.363**		**55.529.578**		**163.400.941**		**24.12**
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP**	**100**	**%**	**2.383.702.000**	**100**	**%**	**2.383.702.000**		**387.325.276**		**762.499.648**		**1.149.824.924**		**48.24**
			Persentase Penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)	**100**	**%**		**100**	**%**									
V	**4.01.02.2.03**	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai permohonan, dan pendokumentasian serta pengelolaan informasi hukum**	**100**	**%**	**2.383.702.000**	**100**	**%**	**2.383.702.000**		**387.325.276**		**762.499.648**	0.00	**1.149.824.924**	0.00	**48.24**
			Persentase terfasilitasinya perkara hukum sesuai permohonan	**100**	**%**		**100**	**%**									
12	4.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	525	Dokumen	791.090.700	200	Dokumen	791.090.700	130	126.723.166	130	245.101.500	260	Rp 371.824.666	130.00	47.00
13	4.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	90	Kasus	1.282.783.500	40	Kasus	1.282.783.500	7	226.316.310	7	379.858.408	14	606.174.718	35.00	47.25
14	4.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300	Dokumen	309.827.800	125	Dokumen	309.827.800	5	34.285.800	5	137.539.740	10	171.825.540	8.00	55.46

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5			6			7		8		9 = 7+8		10=9/6 x 100%	
				K		Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		JUMLAH BAGIAN HUKUM DAN HAM				**2.383.702.000**			**2.383.702.000**		**387.325.276**		**762.499.648**		**1.149.824.924**		**48.24**
	2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase sengketa tanah yang difasilitasi sesuai SOP**	**100**	**%**	**80.148.400**	**100**	**%**	**80.148.400**		**9.371.000**		**21.055.894**		**30.426.894**		**37.96**
VI	**2.10.01.2.01**	**Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan**	**100**	**%**	**80.148.400**	**100**	**%**	**80.148.400**		**9.371.000**		**21.055.894**		**30.426.894**		**37.96**
15	2.10.04.02.01.01	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Dokumen	80.148.400	3	Dokumen	80.148.400	1	9.371.000	1	21.055.894	2	30.426.894		37.96
	2 13 04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase kelurahan yang melaksanakan pemutakhiran profil kelurahan**	**100**	**%**	**31.077.800**	**100**	**%**	**31.077.800**		**Rp -**		**-**		**-**		**0.00**
VII	**2.13.04.2.01**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase kelurahan yang berpredikat Swakarya**	**88**	**%**	**31.077.800**	**73**	**%**	**31.077.800**		**Rp -**		**-**		**-**		**0.00**
16	2.13.04.2.01.11	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa/Kelurahan	68	Dokumen	31.077.800	68	Dokumen	31.077.800		Rp -		-		-		0.00
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan**	**100**	**%**	**1.218.926.200**	**100**	**%**	**1.218.926.200**		**Rp 152.478.841**		**482.010.857**		**634.489.698**		**52.05**
			Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai perjanjian kerjasama	**92,5**	**%**		**92,5**	**%**									
			Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencapai target	**3,45**	**poin**		**3,45**	**poin**									
		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Tata Kelola Pengadministrasian Pemerintahan dan Kewilayahan sesuai ketentuan**	**100**	**%**	**1.218.926.200**	**100**	**%**	**1.218.926.200**		**Rp 152.478.841**		**482.010.857**		**634.489.698**		**52.05**
			Persentase Rekomendasi / Laporan bahan kebijakan Pelaksanaan Otonomi daerah	**100**	**%**		**100**	**%**									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5			6			7		8		9 = 7+8		10=9/6 x 100%	
				K		Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			yang ditindaklanjuti														
18	4.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5	Dokumen	182.163.100	5	Dokumen	182.163.100	1	35.355.228	1	122.719.500	2	158.074.728	40	86.78
19	4.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5	Dokumen	245.210.000	5	Dokumen	245.210.000	-	21.606.800	1	52.466.200	1	74.073.000	20	30.21
20	4.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	Dokumen	791.553.100	3	Dokumen	791.553.100	-	95.516.813	3	306.825.157	3	402.341.970	100	50.83
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai perjanjian kerjasama**	**90**	**%**	**456.884.700**	**90**	**%**	**456.884.700**		**102.384.800**		**212.015.579**		**314.400.379**		**68.81**
VIII	**4 01 02 2.04**	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase kerjasama dalam negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama**	**92,5**	**%**	**456.884.700**	**92,5**	**%**	**456.884.700**		**102.384.800**		**212.015.579**		**314.400.379**		**68.81**
			Persentase kerjasama luar negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama	**92,5**	**%**		**92,5**	**%**									
21	4.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	80	Dokumen	283.184.800	80	Dokumen	283.184.800	29	96.505.300	25	92.285.394	54	188.790.694		66.67
22	4.01.02.2.04.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2	Dokumen	164.526.400	2	Dokumen	164.526.400	0	3.456.000	0	119.730.185	0	123.186.185		74.87
23	4.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	Laporan	9.173.500	1	Laporan	9.173.500	0	2.423.500	0	-	0	2.423.500		26.42
JUMLAH BAGIAN PEMERINTAHAN						**1.787.037.100**			**1.787.037.100**		**264.234.641**		**715.082.330**		**979.316.971**		**54.80**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**	**3.55**	**poin**	**42.165.665.058**	**3.55**	**poin**	**64.162.688.417**		**12.138.862.803**		**12.836.300.904**		**24.975.163.707**		**38.92**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5			6			7		8		9 = 7+8		10=9/6 x 100%	
				K		Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	**100**	**%**		**100**	**%**									
IX	**4.01.01.2.02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah**	**Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100**	**%**	**42.165.665.058**	**100**	**%**	**42.165.665.058**	**100**	**12.138.862.803**	**100**	**12.836.300.904**	**100**	**24.975.163.707**	**100**	**59.23**
24	4.1.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	orang/ bulan	42.005.846.058	175	orang/ bulan	42.005.846.058	175	12.138.862.803	175	12.836.300.904	175	24.975.163.707	100	59.46
	4.1.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	159.819.000	2	Laporan	159.819.000	0	24.490.000	1	46.955.000	1	71.445.000	50	
X	**4.01.01.2.05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**379.646.000**	**100**	**%**	**379.646.000**	**100**	**-**	**100**	**95.691.000**	**100**	**95.691.000**	**100.00**	**25.21**
25	4.01.01.2.05.01	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket	379.646.000	5	Paket	379.646.000	0	-	2	95.691.000	2	95.691.000	40.00	25.21
XI	**4.01.01.2.06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.822.655.700**	**100**	**%**	**2.822.655.700**	**100**	**670.948.880**	**100**	**1.184.598.063**	**100**	**1.855.546.943**	**100**	**65.74**
26	4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	174.630.000	1	Paket	174.630.000	0	-	1	174.622.000	1	174.622.000	100.00	100.00
27	4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3	Paket	501.612.700	3	Paket	501.612.700	0	-	3	492.374.244	3	492.374.244	100.00	98.16
28	4.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	Paket	896.043.000	7	Paket	896.043.000	2	462.055.800	2	360.346.060	4	822.401.860	57.14	91.78
29	4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	150.000.000	6	Paket	150.000.000	3	142.006.740	0	-	3	142.006.740	50.00	94.67

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5			6			7		8		9 = 7+8		10=9/6 x 100%	
				K		Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
30	4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	1.100.370.000	4	Laporan	1.100.370.000	1	66.886.340	1	157.255.759	2	224.142.099	50.00	20.37
XII	**4.01.01.2.07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**%**	**2.836.049.100**	**100**	**%**	**2.836.049.100**	**100**	**15.856.000**	**100**	**2.247.551.180**	**100**	**2.263.407.180**	**100**	**79.81**
31	4.01.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	63	Unit	428.711.100	63	Unit	428.711.100	2	4.420.000	10	167.440.000	12	171.860.000	19.05	40.09
32	4.01.01.2.07.0007	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	69	Unit	2.407.338.000	69	Unit	2.407.338.000	10	11.436.000	20	2.080.111.180	30	2.091.547.180	43.48	86.88
XIII	**4.01.01.2.08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**%**	**Rp 3.096.701.200.000**	**100**	**%**	**Rp 3.096.701.200**	**100**	**Rp 1.824.832.625**	**100**	**Rp 1.724.007.239**	**100**	**3.548.839.864**	**100**	**114.60**
33	4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	89.298.000	1	Laporan	89.298.000	0	-	0	7.425.000	0	7.425.000	-	8.31
34	4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	2.408.107.500	1	Laporan	2.408.107.500	0	574.604.435	0	551.704.385	0	1.126.308.820	-	46.77
35	4.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	599.295.700	1	Laporan	599.295.700	1	200.747.500	1	276.133.900	1	476.881.400	100.00	79.57
36	4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	Laporan	4.104.342.544	14	Laporan	4.104.342.544	3	1.049.480.690	3	888.743.954	6	1.938.224.644	42.86	47.22
XIV	**4.01.01.2.09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup Setda berkondisi baik**	**100**	**%**	**6.875.055.850**	**100**	**%**	**6.875.055.850**	**100**	**945.066.633**	**100**	**2.120.752.237**	**100**	**3.065.818.870**		**44.59**
37	4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	unit	918.713.300	20	unit	918.713.300	20	103.380.000	20	193.617.103	20	296.997.103	100.00	32.33

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5			6			7		8		9 = 7+8		10=9/6 x 100%	
				K		Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
38	4.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	unit	1.698.180.300	22	unit	1.698.180.300	22	282.134.316	22	391.072.781	22	673.207.097	100.00	39.64
39	4.01.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	95	Unit	127.400.000	95	Unit	127.400.000	0	-	75	88.449.000	75	88.449.000	78.95	69.43
40	4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1500	unit	1.051.991.200	1500	unit	1.051.991.200	600	27.910.000	600	434.165.500	1200	462.075.500	80.00	43.92
41	4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	2.654.931.050	3	Unit	2.654.931.050	3	473.786.867	3	1.013.447.853	3	1.487.234.720	100.00	56.02
42	4.01.01.2.09.10	Sub KegiatanPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	423.840.000	2	Unit	423.840.000	2	57.855.450	0	-	2	57.855.450	100.00	13.65
XV	**4.01.01.2.11**	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah'**	**100**	**%**	**2.539.792.609**	**100**	**%**	**2.539.792.609**	**100**	**543.422.884**	**100**	**697.099.032**	**100**	**1.240.521.916**	**100**	**48.84**
43	4.01.01.2.11.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/ Bulan	181.755.551	2	Orang/ Bulan	181.755.551	2	51.260.884	2	12.873.732	2	64.134.616	100.00	35.29
44	4.01.01.2.11.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5	Paket	349.380.800	5	Paket	349.380.800	0	-	1	192.063.300	1	192.063.300	20.00	54.97
45	4.01.01.2.11.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	Orang	40.000.000	8	Orang	40.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0.00
46	4.01.01.2.11.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/ Bulan	1.968.656.258	2	Orang/ Bulan	1.968.656.258	2	492.162.000	2	492.162.000	2	984.324.000	100.00	50.00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5			6			7		8		9 = 7+8		10=9/6 x 100%	
				K		Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
XVI	**4.01.01.2.12**	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggan sekretariat daerah**	**100**	**%**	**3.447.122.900**	**100**	**%**	**3.447.122.900**	**100**	**375.793.751**	**100**	**1.570.280.844**	**100**	**1.946.074.602**	**100**	**56.46**
47	4.01.01.2.12.01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10	Paket	1.049.039.000	10	Paket	1.049.039.000	4	103.313.551	3	570.670.194	7	673.983.745	70.00	64.25
48	4.01.01.2.12.02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10	Paket	917.657.000	10	Paket	917.657.000	4	119.387.150	3	213.409.600	7	332.796.750	70.00	36.27
49	4.01.01.2.12.04	Sub Kegiatn Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	14	Paket	1.480.426.900	14	Paket	1.480.426.900	5	153.093.050	4	786.201.050	9	939.294.100	64.29	63.45
JUMLAH BAGIAN UMUM						**Rp 64.162.688.417.00**			**Rp 64.162.688.417.00**		**Rp 16.514.783.576.00**		**Rp 22.476.280.499.00**		**38.991.064.082**		**60.77**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	**100**	**%**	**1.246.057.950**	**100**	**%**	**1.246.057.950**	**100**	**182.263.200**	**100**	**300.019.026**	**100**	**482.282.226**	**100**	**38.70**
XVII	**4.01.01.2.14**	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	**100**	**%**	**1.246.057.950**	**100**	**%**	**1.246.057.950**	**100**	**182.263.200**	**100**	**300.019.026**	**100**	**482.282.226**	**100**	**38.70**
50	4.01.01.2.14.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan	423.416.000	12	Laporan	423.416.000	3	33.602.500	3	58.288.049	9	91.890.549	75.00	21.70
51	4.01.01.2.14.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Laporan	638.701.500	12	Laporan	638.701.500	3	102.943.800	3	202.007.177	9	304.950.977	75.00	47.75
52	4.01.01.2.14.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan	183.940.450	12	Laporan	183.940.450	3	45.716.900	3	39.723.800	9	85.440.700	75.00	46.45
JUMLAH BAGIAN PROKOMPIM						**Rp 1.246.057.950**			**Rp 1.246.057.950**		**Rp 182.263.200**		**Rp 300.019.026**		**482.282.226**		**38.70**
	01.06.2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5			6			7		8		9 = 7+8		10=9/6 x 100%	
				K		Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	01.06.2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kelurahan**	**75**	**%**	**100.000.000**	**75**	**%**	**100.000.000**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	**0**	**0.00**
XVIII	**2.13.05.2.01**	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif**	**75**	**%**	**100.000.000**	**75**	**%**	**100.000.000**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	**0**	**0.00**
53	2.13.05.2.01.0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**90**	**%**	**100.000.000**	**90**	**%**	**100.000.000**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**	**0.00**
	2.13.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penataan dan pembangunan desa/kelurahan**	**100**	**%**	**100.000.000**	**100**	**%**	**100.000.000**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**	**0.00**
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1	Unit	100.000.000	1	Unit	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rekomendasi kebijakan bina mental yang ditindaklanjuti**	**100**	**%**	**34.253.860.450**	**100**	**%**	**34.253.860.450**	**100**	**6.224.853.870**	**100**	**8.536.394.210**		**14.761.248.080**	**43.09**	**43.09**
			Persentase rekomendasi kebijakan kesejahteraan yang ditindaklanjuti	**100**	**%**		**100**	**%**		**100**		**100**					
XIX	**4.01.02.2.02**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Kebijakan bina mental spritual, yang disusun dan diimplementasikan**	**100**	**%**	**34.253.860.450**	**100**	**%**	**34.253.860.450**	**100**	**6.224.853.870**	**100**	**8.536.394.210**		**14.761.248.080**	**43.09**	**43.09**
			Persentase kebijakan kesejahteraan	**100**	**%**		**100**	**%**		**100**		**100**					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5			6			7		8		9 = 7+8		10=9/6 x 100%	
				K		Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			rakyat yang diimplementasika														
54	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3	Dokumen	10.411.277.640	3	Dokumen	10.411.277.640	1	1.985.966.170	1	3.421.541.210	2	5.407.507.380	66.67	51.94
55	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	7	Dokumen	23.392.582.810	7	Dokumen	23.392.582.810	4	4.205.344.200	1	4.986.691.400	5	9.192.035.600	71.43	39.29
56	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5	Dokumen	450.000.000	5	Dokumen	450.000.000	1	33.543.500	1	128.161.600	2	161.705.100	40.00	35.93
JUMLAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						**Rp 34.453.860.450**			**Rp 34.453.860.450**		**Rp 6.224.853.870**		**Rp 8.536.394.210**		**Rp 14.761.248.080**		**42.84**
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
		SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase BUMD yang Sehat**	**50**	**%**	**431.419.700**	**50**	**%**	**431.419.700**		**35.812.500**		**64.246.286**		**100.058.786**		**25.29**
			Tingkat Inflasi Tahunan	**2-4**	**poin**		**2-4**	**poin**									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5			6			7		8		9 = 7+8		10=9/6 x 100%	
				K		Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
XX	**4.01.03.2.01**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti**	**90**	**%**	**431.419.700**	**90**	**%**	**431.419.700**		**35.812.500**		**64.246.286**		**100.058.786**	**-**	**23.19**
57	4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dokumen	234.889.000	4	Dokumen	234.889.000	1	17.159.500	1	42.234.600	2	59.394.100	50.00	25.29
58	4.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	Laporan	112.091.700	2	Laporan	112.091.700	-	13.315.500	1	10.314.900	1	23.630.400	50.00	21.08
59	4.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	2	Laporan	84.439.000	2	Laporan	84.439.000	-	5.337.500	1	11.696.786	1	17.034.286	50.00	20.17
		JUMLAH BAGIAN PEREKONOMIAN							**Rp 431.419.700**		**Rp 35.812.500**		**Rp 64.246.286**		**100.058.786**		**23.19**
SEKRETARIAT DAERAH									**Rp 106.323.696.167**		**Rp 23.818.920.080**		**Rp 33.095.680.798**		**56.914.600.885**		**53.53**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bogor didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bogor

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Realisasi Capaian s.d. Semester 2 Tahun 2024
				2020	2021	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik			NA	NA	71-73	76,9	NA	53,16	99,57	76,90	Belum tercapai
2	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah			80	83	91	97,6	89,13	92,84	93,77	97,40	Belum tercapai
3	Indeks Kematangan Organisasi			NA	NA	45,69	49	NA	NA	48	48,58	Belum tercapai
4	Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan			8,16	8,16	8,7	-	8,16	8,16	8,26	NA	Belum tercapai
5	Nilai Kualitas Pelayanan Publik			NA	NA	8,5	-	8,4	8,29	9,72	NA	Belum tercapai
6	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik			NA	NA	82,5	95,4	86,02	82,5	87,05	95,17	Belum tercapai
7	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik			NA	NA	4,5	4,61	4,38	4,44	4,14	4,48	Belum tercapai
8	Persentase tersusunnya perundangan daerah yang sinkron dan sinergis			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Belum tercapai
9	Nilai EKPPD			3,12	3,15	3,17	3,2	NA	NA	3,4	3,45	Belum tercapai
10	Persentase kelurahan berkinerja baik			NA	76%	81%	86%	NA	80%	91%	86%	Belum tercapai
11	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah			NA	NA	80,1	81	NA	NA	73,43	83,10	Belum tercapai
12	Persentase Kebijakan bidang pengelolaan bina mental spritual yg diimplementasikan			NA	NA	85%	100%	NA	NA	85%	100%	Belum tercapai
13	Persentase Kebijakan bidang kesejahteraan sosial yg diimplementasikan			NA	NA	85%	91,67%	NA	NA	85%	91,67%	Belum tercapai
14	Persentase kebijakan perekonomian yang diimplemantasikan			NA	NA	80%	100%	NA	NA	80%	80%	Belum tercapai
15	Persentase sengketa tanah yg selesai sesuai SOP			NA	NA	83%	87%	NA	NA	100%	86,76%	Belum tercapai

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah, telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Bogor tahun 2019-2024, telaahan terhadap Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bogor, maka diperoleh isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kota Bogor, yaitu :

a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

   Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkup Sekretariat Daerah masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kurangnya kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, kurang intensnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, kurang optimalnya penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan pengadaan barang dan jasa.

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Bogor diantaranya dilaksankan melalui pembinaan mental keagamaan. Pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai agama yang terwujud dalam perilaku yang bermoral.

c. Sinergitas dan koordinasi perumusan kebijakan kesejahteraan masyarakat yan meliputi Kemiskinan, pengangguran dan masalah social lainnya.

   Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari Isu kemiskinan, Penerataan pendaoatan, dan pengangguran. Kemiskinan ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kota Bogor. Kemiskinan akan menyebabkan timbulnya masalah sosial antara lain anak jalanan, anak

putus sekolah, gelandangan dan lainnya sehingga perlu atensi pemerintah untuk penanggulangan hal tersebut. Pengguran di kota bogor terlihat dari tingginya tingkat pengguran terbuka. Tingginya kemiskina dan pengguran yag ada di kota bogor menyebbekan pemeratan kesejahteraan / distribusi pendapatnan dan ketimpangan cukup tinggi, hal ini memerlukan koordinasi lintas sector dan sinergitas perumusan kebijakan dalam penanganan dan peningkatan masalah kesejahteraan sosial

d. Sinergitas dan kordinasi perumusan Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pada potensi sumber daya lokal

   Isu penguatan perekonomian masyarakat berbasis pada peningkatan potensi sumber daya lokal di masa pandemi covid 19 melanda Indonesia dan seluruh dunia yang mengakibatkan hampir lumpuhnya perekonomian dunia. Penguatan potensi lokal dilakukan melalui pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah agar mampu bertahan bahkan menjadi sumber pendapatan yang terus berjalan di saat-saat yang sulit.

e. Masih cukup banyak terjadi sengketa kepemilikan lahan dan sengketa peruntukan penggunaan lahan. Sengketa kepemilikan tanah sering kali disebabkan karena kurang pahamnya masyarakat tentang peraturan kepemilikan tanah. Terjadinya sengketa secara tidak langsung akan menghambat perekonomian masyarakat. Banyaknya kasus pertanahan bisa menghambat jalannya pembangunan. Pembangunan jalan baru sering kali terkendala dalam pembebasan lahan. Hal tersebut menghambat penambahan akses jalan untuk mendukung laju perekonomian.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Bogor yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal Perubahan RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3.
Riview Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024 Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				**80,148,400**	**75,648,400**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**75,648,400**	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		**Persentase sengketa tanah yg difasilitasi sesuai SOP**	**100%**	**80,148,400**	**75,648,400**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		**Persentase sengketa tanah yg difasilitasi sesuai SOP**	**100%**	**75,648,400**	
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan**	**100%**	**80,148,400**	**75,648,400**	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan**	**100%**	**75,648,400**	

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	80,148,400	75,648,400	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	75,648,400	Penyesuaian APBD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Bagian Pemerintahan)				**31,077,800**	**20,400,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**20,400,000**	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		**Persentase kelurahan yang melaksanakan pemutakhiran profil kelurahan**	**100**	**31,077,800**	**20,400,000**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Kelurahan yang melaksanakan pemutakhiran profil kelurahan**	**100**	**20,400,000**	
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		**Persentase kelurahan berkinerja baik**	**86**	**31,077,800**	**20,400,000**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		**Persentase Kelurahan yang ber-predikat Swakarya**	**73**	**20,400,000**	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Profil Desa/Kelurahan	68	31,077,800	20,400,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Profil Desa/Kelurahan	68	20,400,000	Penyesuaian APBD
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
SEKRETARIAT DAERAH					**1,613,453,100**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**1,638,243,100**	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**Persentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan**	**100%**	**1,675,810,900**	**1,613,453,100**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan**	**100%**	**1,638,243,100**	
		Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencapai target	**3,5 poin**					**Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencapai target**	**3,5 poin**		

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai perjanjian kerjasama	**90%**					**Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai perjanjian kerjasama**	**90%**		
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase Tata Kelola Pengadministrasian Pemerintahan dan Kewilayahan sesuai ketentuan	100%			**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**		Persentase Tata Kelola Pengadministrasian Pemerintahan dan Kewilayahan sesuai ketentuan	100%		
		Persentase Rekomendasi / Laporan bahan kebijakan Pelaksanaan Otonomi daerah yang ditindaklanjuti	80%	**1,218,926,200**	**1,178,648,400**			Persentase Rekomendasi / Laporan bahan kebijakan Pelaksanaan Otonomi daerah yang ditindaklanjuti	80%	**1,207,848,400**	
Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	182,163,100	171,935,300	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5	171,935,300	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	245,210,000	305,960,000	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5	305,960,000	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	791,553,100	700,753,100	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	729,953,100	Penyesuaian APBD
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah		**Persentase kerjasama dalam negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama**	**90%**	**456,884,700**	**434,804,700**	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**		**Persentase kerjasama dalam negeri yang diimplementasikan sesuai dengan**	**90%**	**430,394,700**	

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
								Perjanjian Kerjasama			
		Persentase kerjasama luar negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama	**90%**					**Persentase kerjasama luar negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama**	**90%**		
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	80 Dokumen	283,184,800	265,604,800	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	80 Dokumen	265,524,800	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	164,526,400	160,026,400	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	155,696,400	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen	9,173,500	9,173,500	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen	9,173,500	Penyesuaian APBD
TOTAL BAGIAN PEMERINTAHAN				**1,787,037,100**	**1,709,501,500**					**1,734,291,500**	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
SEKRETARIAT DAERAH					**2,754,472,600**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**2,754,471,300**	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP**	**100%**	**2,414,879,400**	**2,754,472,600**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP**	**100**	**2,754,471,300**	
		Persentase Penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)	**100%**					**Persentase Penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)**	**100**		

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		**Persentase Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai permohonan, dan pendokumentasian serta pengelolaan informasi hukum**	**100%**	**2,414,879,400**	**2,754,472,600**	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Persentase Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai permohonan, dan pendokumentasian serta pengelolaan informasi hukum**	**100**	**2,754,471,300**	
		Persentase terfasilitasinya perkara hukum sesuai permohonan	**100%**					**Persentase terfasilitasinya perkara hukum sesuai permohonan**	**100**		
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	200 Dokumen	822,268,100	926,249,900	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	200	926,249,500	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	125 Dokumen	309,827,800	409,827,800	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	125	409,883,400	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	50 Kasus	1,282,783,500	1,418,394,900	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	50	1,418,338,400	Penyesuaian APBD
TOTAL BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA				**2,414,879,400**	**2,754,472,600**					**2,754,471,300**	
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**200,000,000**	**BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**200,000,000**	

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		**Presentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif**	**70%**	**100,000,000**	**100,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Presentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif**	**65%**	100,000,000	
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif**	**70%**	100,000,000	100,000,000	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif**	**70%**	100,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	100,000,000	Penyesuaian APBD
PROGRAM PENATAAN DESA		**Penyelenggaraan penataan desa**	**90%**	**100,000,000**	**100,000,000**	**PROGRAM PENATAAN DESA**		**Presentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif**	**90%**	**100,000,000**	
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa		***Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penataan dan pembangunan desa/kelurahan***	**90%**	100,000,000	100,000,000	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**		**Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif**	**90%**	100,000,000	

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	100,000,000	100,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	100,000,000	Penyesuaian APBD
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**Presentase rekomendasi kebijakan bina mental yang ditindaklanjuti**	**100%**	**31,050,046,950**	**37,468,700,250**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Presentase rekomendasi kebijakan bina mental yang ditindaklanjuti**	**100%**	**35,887,369,310**	
		Presentase rekomendasi kebijakan kesejahteraan yang ditindaklanjuti	**100%**					**Presentase rekomendasi kebijakan kesejahteraan yang ditindaklanjuti**	**1**	**0**	
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		**Presentase Kebijakan bina mental spritual, yang disusun dan diimplementasikan**	**90%**	**31,050,046,950**	**37,468,700,250**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	**Presentase Kebijakan bina mental spritual, yang disusun dan diimplementasikan**	**100%**	**35,887,369,310**	
		Presentase kebijakan/rekomendasi kebijakan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	**90%**			**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Presentase kebijakan/rekomendasi kebijakan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan**	**100%**		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3 Dokumen	10,411,277,640	11,626,186,640	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3 Dokumen	10,374,870,400	Penyesuaian APBD

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	7 Dokumen	20,188,769,310	25,477,769,310	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	7 Dokumen	25,147,754,610	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	450,000,000	364,744,300	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	364,744,300	Penyesuaian APBD
TOTAL BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				**31,250,046,950**	**37,668,700,250**					**36,087,369,310**	

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**303,580,200**	**273,770,200**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**273,770,200**	
SEKRETARIAT DAERAH				**303,580,200**	**273,770,200**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**273,770,200**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota**	**A Poin**	**98,709,300**	**69,579,300**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota**	**A Poin**	**69,579,300**	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota**	**A Poin**	**98,709,300**	**69,579,300**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota**	**A Poin**	**69,579,300**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	62,858,800	33,728,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	33,728,800	Penyesuaian APBD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	35,850,500	35,850,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	35,850,500	Penyesuaian APBD
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		**Persentase kegiatan PD yang terealisasi sesuai rencana**	**94%**	**204,870,900**	**204,190,900**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase kegiatan PD yang terealisasi sesuai rencana**	**97,5%**	**204,190,900**	
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		**prosentase PD yang menyampaikan laporan realisasi keuangan dan progres fisik secara tepat**	**100%**	**204,870,900**	**204,190,900**	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**prosentase PD yang menyampaikan laporan realisasi keuangan dan progres fisik secara tepat**	**100%**	**204,190,900**	
Sub Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Dokumen	51,923,500	51,923,500	Sub Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Dokumen	51,923,500	Penyesuaian APBD

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Dokumen	152,947,400	152,267,400	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Dokumen	152,267,400	Penyesuaian APBD
TOTAL BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				**303,580,200**	**273,770,200**					**273,770,200**	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
SEKRETARIAT DAERAH				**431,419,700**	**384,649,400**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**384,649,400**	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		**Presentase BUMD yang Sehat**	**50%**	**431,419,700**	**384,649,400**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Presentase BUMD yang Sehat**	**50%**	**384,649,400**	
		tingkat Inflasi Tahunan	**2-4**					**tingkat Inflasi Tahunan**	**2-4**		
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		**Persentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjut**	**90%**	**431,419,700**	**384,649,400**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**Persentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjut**	**90%**	**384,649,400**	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	234,889,000	209,645,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	209,645,000	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Dokumen	112,091,700	99,176,400	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Dokumen	99,176,400	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	84,439,000	75,828,000	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan	2 Dokumen	75,828,000	Penyesuaian APBD

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
								Ekonomi Mikro Kecil			
TOTAL BAGIAN PEREKONOMIAN				**431,419,700**	**384,649,400**					**384,649,400**	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
SEKRETARIAT DAERAH				-	-	**SEKRETARIAT DAERAH**				-	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		**Tingkat Pemanfaatan sistem informasi dalam pengadaan barang dan jasa**	**40 Poin**	**877,990,250**	**800,589,250**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Tingkat Pemanfaatan sistem informasi dalam pengadaan barang dan jasa**	**40 Poin**	**800,589,250**	
		Tingkat Kematangan UKPBJ	**25 - 27 Poin**					**Tingkat Kematangan UKPBJ**	**29 Poin**		
		Tingkat Pemenuhan JF PPBJ di lingkungan UKPBJ	**6 - 7 Poin**				Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	**Tingkat Pemenuhan JF PPBJ di lingkungan UKPBJ**	**9 Poin**		
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		**Indeks Kepuasan Penerima Layanan UKPBJ**	**3,35 Poin**	**877,990,250**	**800,589,250**	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Indeks Kepuasan Penerima Layanan UKPBJ**	**3,35 Poin**	**800,589,250**	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	12 Dokumen	607,890,250	602,760,250	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	12 Dokumen	602,760,250	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	160,000,000	160,000,000	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	160,000,000	Penyesuaian APBD

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	260 Orang	110,100,000	37,829,000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	260 Orang	37,829,000	Penyesuaian APBD
TOTAL BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				**877,990,250**	**800,589,250**					**800,589,250**	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
SEKRETARIAT DAERAH					**607,028,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**607,028,000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Indeks Kematangan Organisasi**	**46,52 poin**	**677,360,100**	**607,028,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**48,70**	**Indeks Kematangan Organisasi**	**46,11 Poin**	**607,028,000**	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota	**A Poin**				**81.00**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota**	**80,01 Poin**		
		Nilai Rata-rata IKM Pelayanan Publik	**3.55 Poin**				**3.58**	**Nilai Rata-rata IKM Pelayanan Publik**	**3,52 Poin**		
Kegiatan Penataan Organisasi		**Nilai AKIP Komponen pelaporan kinerja**	**12.25 Poin**	**677,360,100**	**607,028,000**	**Kegiatan Penataan Organisasi**		**Nilai AKIP Komponen pelaporan kinerja**	**12.25 Poin**	**607,028,000**	
		Persentase PD yang melaksanakan PMPRB	**15%**					**Persentase PD yang melaksanakan PMPRB**	**15%**		
		Persentase PD yang memiliki nilai kematangan organisasi minimal tinggi	**69.40%**					**Persentase PD yang memiliki nilai kematangan organisasi minimal tinggi**	**69.40%**		
		Pesentase PD yang memiliki nilai IKM >= 3.35	**44%**					**Pesentase PD yang memiliki nilai IKM >= 3.35**	**44%**		

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	70 Dokumen	281,411,200.00	231,180,200	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	70 Dokumen	231,180,200	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7 Dokumen	293,871,500	281,079,400	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7 Dokumen	281,079,400	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6 Dokumen	102,077,400	94,768,400	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6 Dokumen	94,768,400	Penyesuaian APBD
TOTAL BAGIAN ORGANISASI				**677,360,100**	**607,028,000**					**607,028,000**	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
SEKRETARIAT DAERAH				**62,280,115,452**	**70,956,864,148**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**68,174,556,260**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**	**3,52 poin**	**62,280,115,452**	**70,956,864,148**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**	**3,52 poin**	**68,174,556,260**	
Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah		**Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**42,165,665,058**	**45,467,834,334**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah**		**Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**47,473,909,646**	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 orang	42,005,846,058	45,308,015,334	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 orang	47,314,090,646	Penyesuaian APBD

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	159,819,000	159,819,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	159,819,000	Penyesuaian APBD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**379,646,000**	**379,646,000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**379,646,000**	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	379,646,000	379,646,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	379,646,000	Penyesuaian APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100%**	**2,822,655,700**	**4,344,251,700**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100%**	**3,368,242,900**	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	174,630,000	324,630,000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	244,629,700	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	501,612,700	801,612,700	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	501,612,700	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	896,043,000	1,476,043,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	1,221,250,500	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	150,000,000	296,962,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	3 Paket	250,000,000	Penyesuaian APBD

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
								Penggandaan yang Disediakan			
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1,100,370,000	1,445,004,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1,150,750,000	Penyesuaian APBD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100%**	**2,836,049,100**	**3,949,213,300**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100%**	**2,836,049,100**	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	428,711,100	1,119,192,500	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	428,711,100	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Paket	2,407,338,000	2,830,020,800	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Paket	2,407,338,000	Penyesuaian APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**7,201,043,744**	**7,557,193,864**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**7,241,652,764**	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	89,298,000	89,298,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	89,298,000	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,408,107,500	2,408,107,500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,408,107,500	Penyesuaian APBD

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	599,295,700	1,039,773,100	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	724,232,000	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	4,104,342,544	4,020,015,264	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	4,020,015,264	Penyesuaian APBD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase BMD lingkup Setda berkondisi baik**	**100%**	**6,875,055,850**	**9,258,724,950**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD lingkup Setda berkondisi baik**	**100%**	**6,875,055,850**	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	918,713,300	1,092,713,300	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	918,713,300	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	1,698,180,300	1,898,180,300	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	1,698,180,300	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Mebel yang Dipelihara	95 Unit	127,400,000	223,400,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Mebel yang Dipelihara	95 Unit	127,400,000	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1500 Unit	1,051,991,200	1,461,591,200	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1500 Unit	1,051,991,200	Penyesuaian APBD

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2,654,931,050	3,924,000,150	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2,654,931,050	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	423,840,000	658,840,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	423,840,000	Penyesuaian APBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**		**5,986,915,509**	**7,955,541,509**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**		**6,510,628,509**	
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		**Persentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**2,539,792,609**	**2,539,792,609**	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Persentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**2,539,792,609**	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	181,755,551	181,755,551	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	181,755,551	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	349,380,800	349,380,800	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	349,380,800	Penyesuaian APBD

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	40,000,000	40,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	40,000,000	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1,968,656,258	1,968,656,258	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1,968,656,258	Penyesuaian APBD
Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggan sekretariat daerah**		**3,447,122,900**	**5,415,748,900**	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggan sekretariat daerah**		**3,970,835,900**	
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	1,049,039,000	2,230,796,000	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	1,496,763,000	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	917,657,000	743,526,000	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	743,646,000	Penyesuaian APBD
Sub Kegiatn Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	14 Paket	1,480,426,900	2,441,426,900	Sub Kegiatn Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	14 Paket	1,730,426,900	Penyesuaian APBD
TOTAL BAGIAN UMUM				**68,267,030,961**	**78,912,405,657**					**74,685,184,769**	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
SEKRETARIAT DAERAH						**SEKRETARIAT DAERAH**					

Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Pelayanan keprotokolandan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**1,246,057,950**	**1,371,910,150**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pelayanan keprotokolanda n Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**1,371,910,150**	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi Pimpinan sesuai standar	**100%**	**1,246,057,950**	**1,371,910,150**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi Pimpinan sesuai standar	**100%**	**1,371,910,150**	
Fasilitasi Keprotokolan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	423,416,000	590,016,000	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	578,016,000	Penyesuaian APBD
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	638,701,500	609,676,500	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	621,676,500	Penyesuaian APBD
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	12 Laporan	183,940,450	172,217,650	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	12 Laporan	172,217,650	Penyesuaian APBD
TOTAL BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				**1,246,057,950**	**1,371,910,150**					**1,730,426,900**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kualitas rencana pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Bogor ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan setiap misi yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Lebih lanjut, sasaran Sekretariat Daerah Kota Bogor tersebut juga harus sinergis mendukung pencapaian sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dan pencapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan. Berikut ini adalah keterhubungan sasaran-sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Bogor dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Tabel 3.1

Sandingan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Renstra Perubahan Prrovinsi Jawa Barat dan Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2024

Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024		Sasaran Renstra Perubahan Provinsi Jawa Barat 2018-2023		Sasaran Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bogor 2019-2024	
S.7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	S.1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan daerah lintas sektor	S.1.1	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi, Penataan Per-UU, penataan tatalaksana, akuntabilitas

					kinerja dan pelayanan publik
S.10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	S.2	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	S.1.2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
				S.1.3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor
			Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	S.2.1	Meningkatnya bina mental spiritual masyarakat
		S.3		S.3.1	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
		S.4	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	S.4.1	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang Perekonomian

3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bogor.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 Kota Bogor memiliki Visi*:* ***"Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga"*** Kemudian diturunkan menjadi 3 (tiga) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat.
2. Mewujudkan Kota Bogor Cerdas.
3. Mewujudkan Kota Bogor Sejahtera.

Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor adalah sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif mendukung dalam

mewujudkan Misi “Mewujudkan Kota Bogor Cerdas” dan “Mewujudkan Kota Bogor Sejahtera”

Demi terwujudnya Visi Misi Kota Bogor dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024 serta untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, Sekretariat Daerah Kota Bogor **memiliki 4 (empat) Tujuan** :

Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

TUJUAN 1 :“ Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor” dengan ***Indikator Kinerja Tujuan*** sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

   Untuk mencapai tujuan sebagai mana di tetapkan di atas maka ada 3 (tiga) Sasaran yaitu :

   1. Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi, Penataan Perundang-undangan, penataan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik, dengan Indikator Kinerja Sasaran:
      a. Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik (nilai)
      b. Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (%)
      c. Indeks Kematangan Organisasi
      d. Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (nilai)
      e. Indeks Pelayanan Publik (nilai)
      f. Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik
      g. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik
      h. Persentase tersusunnya perundangan daerah yang sinkron dan sinergis (%)
   2. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dengan Indikator Kinerja Sasaran:
      a. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) (nilai)
      b. Persentase kelurahan berkinerja baik (%)

3. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor, dengan Indikator Kinerja Sasaran:
   a. Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerah

TUJUAN 2 :" Terwujudnya mental spiritual masyarakat yang berkualitas", dengan ***Indikator Kinerja Tujuan*** sebagai berikut:

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai).

Untuk mencapai tujuan sebagai mana di tetapkan di atas maka ada 1 (satu) Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya bina mental spiritual masyarakat, Indikator Kinerja Sasaran:
   a. Persentase Kebijakan bidang pengelolaan bina mental spritual yg diimplementasikan (%)

Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

TUJUAN 1 :" Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Bogor" dengan ***Indikator Kinerja Tujuan*** sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan

Untuk mencapai tujuan sebagai mana di tetapkan di atas maka ada 1 (satu) Sasaran yaitu :

Meningkatnya Kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat, dengan Indikator Kinerja Sasaran:

a. Persentase Kebijakan bidang kesejahteraan sosial yg diimplementasikan (%)

TUJUAN 2 :" Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah" dengan ***Indikator Kinerja Tujuan*** sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

   Untuk mencapai tujuan sebagai mana di tetapkan di atas maka ada 2 (dua) Sasaran yaitu :

   1. Meningkatnya Kualitas kebijakan bidang perekonomian, dengan Indikator Kinerja Sasaran:

      a. Persentase Kebijakan bidang perekonomian yang diimplementasikan (%)

   2. Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan urusan pertanahan, dengan Indikator Kinerja sasaran :

      a. Persentase sengketa tanah sesuai SOP

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Capaian					Target Kinerja
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas										
1,1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor		Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	poin	NA	B	B	B	BB	A	A
1.1.1		Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi, Penataan Perundang-undangan, penataan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik (nilai)	poin	NA	NA	NA	53.16	69,7	76,9	76,9
1.1.2			Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (%)	%	84,51	87,91	89,13	92.84	93,77	97,40	97,50
1.1.3			Indeks Kematangan Organisasi (PMDN 99 Tahun 2018) (nilai)	poin	NA	44.9	NA	NA	48	48,58	48,7
1.1.4			Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (nilai)	poin	NA	NA	8.16	8.16	8,26	NA	-
1.1.5			Indeks Pelayanan Publik (nilai)	poin	NA	NA	8.40	8.29	9,72	NA	-
			Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	poin	NA	NA	86,02	82,15	87,50	95,17	95,3
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	poin	4,17	4,33	4,38	4,44	4,14	4,48	4,60
1.1.6			Persentase tersusunnya perundangan daerah yang sinkron dan sinergis (%)	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Capaian					Target Kinerja
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.7		Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) (nilai)	poin	3,39	NA	NA	NA	3,40	3,425	3,45
1.2.1			Persentase kelurahan berkinerja baik (%)	%	NA	NA	NA	80	85	86	91
1.2.2		Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerah	Nilai	NA	NA	NA	NA	73,43	A	A
2,1	Terwujudnya mental spiritual masyarakat yang berkualitas		Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	poin	NA	NA	68.51	72.39	79,16	79,98	72,5
2.1.1		Meningkatnya bina mental spiritual masyarakat	Persentase Kebijakan bidang pengelolaan bina mental spritual yg diimplementasikan (%)	%	NA	NA	NA	NA	85	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Capaian					Target Kinerja
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera										
3,1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Bogor		Angka Kemiskinan	poin	5,93	5,77	6,88	9,71	7,10	6,67	6,21
3.1.1.		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan bidang kesejahteraan sosial yg diimplementasikan (%)	%	NA	NA	NA	NA	85	90	90
4,1	Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	Poin	6,14	6,04	-0,53	3,69	5,65	5,10	6,04
4.1.1.		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang diimplemantasikan (%)	%	NA	NA	NA	NA	80	80	100
4.1.2		Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan urusan pertanahan	Persentase sengketa tanah yg selesai sesuai SOP (%)	%	73,91	72	60	83	80	86,76	87

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2023 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 7 program, 22 kegiatan, dan 60 sub kegiatan. Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini ini terdiri dari 11 kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Penataan Organisasi, yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Sub Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dan Sub Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusinan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu Sub

Kegiatan Pengadaan Mebel dan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 6 (Enam) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
i. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
j. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
k. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan,

Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.

2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Program ini terdiri dari 4 Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penataam Administrasi Pemerintahan, Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
b. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dan Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
d. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.

3) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

4) Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, yang terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan

Profil Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa sera Lomba Desa dan Kelurahan

5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

6) Program Penataan Desa

Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa.

7) Program Perekonomian dan Pembangunan.

Program ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program, Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dan Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2019-2024, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bogor. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Namun secara khusus, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bogor.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Bogor;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Bogor;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada tahun 2023 adalah sebanyak 7 (tujuh) program, 22 kegiatan, dan 60 sub kegiatan.
2. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 118.599.263.879,- (Seratus Delapan Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) meningkat dari Pagu Awal APBD Tahun 2024 sejumlah Rp. 107.155.402.611,- (Seratus Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) atau meningkat Rp. 11.443.861.268. Seluruh dana bersumber dari dana APBD Kota Bogor. Ada pun Rekapitulasi Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Bogor disajikan dalam Tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Bogor

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1,036,044,846**	**877,990,250**	**800,589,250**			**1,036,044,846**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1,036,044,846**	**877,990,250**	**800,589,250**			**1,036,044,846**
	4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Tingkat Pemanfaatan sistem informasi dalam pengadaan barang dan jasa**		**40 poin**		**40 poin**	**1,036,044,846**	**877,990,250**	**800,589,250**		**40 poin**	**1,036,044,846**
			Tingkat Kematangan UKPBJ		**26-28 %**		**29 %**					**26 - 28 %**	
			Tingkat Pemenuhan JF PPBJ di lingkungan UKPBJ		**7-8 poin**		**9 poin**					**7 - 8 poin**	
I	***4.01.03.2.03***	***Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	***Indeks Kepuasan Penerima Layanan UKPBJ***		***3.35 poin***		***3.35 poin***	***1,036,044,846***	***877,990,250***	***800,589,250***		***3,4 poin***	***1,036,044,846***
1	4.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	12	Dokumen	12	Dokumen	736,044,846	607,890,250	602,760,250	APBD	12 Dokumen	736,044,846
2	4.01.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		12	Dokumen	12	Dokumen	160,000,000	160,000,000	160,000,000	APBD	12 Dokumen	160,000,000
3	4.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		260	Orang	260	Orang	140,000,000	110,100,000	37,829,000	APBD	276 Orang	140,000,000
JUMLAH BAGIAN PBJ									**877,990,250**	**800,589,250**			**1,036,044,846**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**94,554,300**	**98,709,300**	**69,579,300**			**110,000,000**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**94,554,300**	**98,709,300**	**69,579,300**			**110,000,000**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**		**A**	**poin**	**A**	**poin**	**94,554,300**	**98,709,300**	**69,579,300**		**A**	**110,000,000**
II	***4.01.01.2.01***	***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Setda***		***A***	***poin***	***A***	***poin***	***94,554,300***	***98,709,300***	***69,579,300***		***A***	***110,000,000***
4	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	2	Dokumen	2	Dokumen	58,703,800	62,858,800	33,728,800	APBD	3 Dokumen	65,000,000
5	4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	Laporan	2	Laporan	35,850,500	35,850,500	35,850,500		3 Laporan	45,000,000
	4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase kegiatan PD yang terealisasi sesuai rencana**		**94**	**%**	**97,5**	**%**	**186,936,100**	**204,870,900**	**204,190,900**		**93%**	**202,000,000**
III	***4.01.03.2.02***	***Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	***prosentase PD yang menyampaikan laporan realisasi keuangan dan progres fisik secara tepat***		***100***	***%***	***100***	***%***	***186,936,100***	***204,870,900***	***204,190,900***		***100%***	***202,000,000***
6	4.01.03.2.02.02	Sub Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		4	Laporan	4	Laporan	51,923,500	51,923,500	51,923,500	APBD	4 Laporan	57,000,000
7	4.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		12	Laporan	12	Laporan	135,012,600	152,947,400	152,267,400		12 Laporan	145,000,000
JUMLAH BAGIAN ADBANG									**281,490,400**	**303,580,200**	**273,770,200**			**312,000,000**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**951,174,300**	**677,360,100**	**607,028,000**			**1,050,000,000**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**951,174,300**	**677,360,100**	**607,028,000**			**1,050,000,000**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kematangan Organisasi**		**46,52**	**poin**	**48,70**	**poin**	**951,174,300**	**677,360,100**	**607,028,000**		**46,11 poin**	**1,050,000,000**
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota		**81.00**	**(A) poin**	**81.00**	**(A) poin**					**A poin**	
			Nilai Rata-rata IKM Pelayanan Publik		**3.55**	**poin**	**3.58**	**poin**					**3,45 poin**	
IV	***4.01.01.2.13***	***Kegiatan Penataan Organisasi***	***Nilai AKIP Komponen pelaporan kinerja***		***12.25***	***poin***	***12.25***	***poin***	***951,174,300***	***677,360,100***	***607,028,000***		***69.40%***	***1,050,000,000***
			Persentase PD yang melaksanakan PMPRB		***20***	***%***	***20***	***%***					***12,25 poin***	
			Persentase PD yang memiliki nilai kematangan organisasi minimal tinggi		***83,33***	***%***	***83,33***	***%***					***10%***	
			Pesentase PD yang memiliki nilai IKM >= 3.35		***50***	***%***	***50***	***%***					***44%***	
8	4.01.01.2.13.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	70	Dokumen	70	Dokumen	301,811,400	281,411,200.00	231,180,200	APBD	70	350,000,000
9	4.01.01.2.13.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		7	Laporan	7	Laporan	300,391,400	293,871,500	281,079,400	APBD	7	350,000,000
10	4.01.01.2.13.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		6	Dokumen	6	Dokumen	348,971,500	102,077,400	94,768,400	APBD	6	350,000,000
JUMLAH BAGIAN ORGANISASI									**951,174,300**	**677,360,100**	**607,028,000**			**1,050,000,000**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**2,376,100,900**	**2,414,879,400**	**2,754,471,300**			**3,000,000,000**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**2,376,100,900**	**2,414,879,400**	**2,754,471,300**			**3,000,000,000**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP**		**100**	**%**	**100**	**%**	**2,376,100,900**	**2,414,879,400**	**2,754,471,300**		95%	**3,000,000,000**
			Persentase Penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)		**100**	**%**	**100**	**%**					100%	
V	***4.01.02.2.03***	***Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	***Persentase Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai permohonan, dan pendokumentasian serta pengelolaan informasi hukum***		***100***	***%***	***100***	***%***	***2,376,100,900***	***2,414,879,400***	***2,754,471,300***		*100%*	***3,000,000,000***
			Persentase terfasilitasinya perkara hukum sesuai permohonan		***100***	***%***	***100***	***%***					*100%*	
11	4.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	200	Dokumen	200	Dokumen	531,906,000	822,268,100	926,249,500	APBD	200 dokumen	1,000,000,000
12	4.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		125	Dokumen	125	Dokumen	330,086,000	309,827,800	409,883,400	APBD	125 dokumen	1,000,000,000
13	4.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		40	kasus	50	kasus	1,514,108,900	1,282,783,500	1,418,338,400	APBD	40 kasus	1,000,000,000
JUMLAH BAGIAN HUKUM DAN HAM									**2,376,100,900**	**2,414,879,400**	**2,754,471,300**			**3,000,000,000**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**383,000,000**	**111,226,200**	**96,048,400**			**435,000,000**
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**150,000,000**	**80,148,400**	**75,648,400**			**175,000,000**
	2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase sengketa tanah yang difasilitasi sesuai SOP**		**100**	**%**	**100**	**%**	**150,000,000**	**80,148,400**	**75,648,400**		**100%**	**175,000,000**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
VI	***2.10.01.2.01***	***Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan***		***100***	***%***	***100***	***%***	***150,000,000***	***80,148,400***	***75,648,400***		***100%***	***175,000,000***
14	2.10.04.02.01.01	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	3	Dokumen	3	Dokumen	150,000,000	80,148,400	75,648,400	APBD	3 Dokumen	175,000,000
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**233,000,000**	**31,077,800**	**20,400,000**			**260,000,000**
	2 13 04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase kelurahan yang melaksanakan pemutakhiran profil kelurahan**		**100**	**%**	**100**	**%**	**233,000,000**	**31,077,800**	**20,400,000**		**100%**	**260,000,000**
VII	***2.13.04.2.01***	***Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa***	***Persentase kelurahan yang berpredikat Swakarya***		***88***	***%***	***88***	***%***	***233,000,000***	***31,077,800***	***20,400,000***		***100%***	***260,000,000***
15	2.13.04.2.01.11	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa/Kelurahan		68	Dokumen	68	Dokumen	68,000,000	31,077,800	20,400,000	APBD	68 Dokumen	60,000,000
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**2,129,670,900**	**1,675,810,900**	**1,638,243,100**			**2,455,487,500**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**2,129,670,900**	**1,675,810,900**	**1,638,243,100**			**2,455,487,500**
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan**		**100**	**%**	**100**	**%**	**2,129,670,900**	**1,675,810,900**	**1,638,243,100**		**100%**	**2,455,487,500**
			Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencapai target		**3.4**	**poin**	**3.5**	**poin**					**3,22 Point**	
			Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai perjanjian kerjasama		**90**	**%**	**90**	**%**					**90%**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
VIII	***4.01.02.2.01***	***Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan***	***Persentase Tata Kelola Pengadministrasian Pemerintahan dan Kewilayahan sesuai ketentuan***		***100***	***%***	***100***	***%***	***1,584,452,800***	***1,218,926,200***	***1,207,848,400***		***100%***	***1,855,385,910***
			Persentase Rekomendasi / Laporan bahan kebijakan Pelaksanaan Otonomi daerah yang ditindaklanjuti		***80***	***%***	***80***	***%***					***80%***	
17	4.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	5	Dokumen	3	Dokumen	300,000,000	182,163,100	171,935,300	APBD	5 Dokumen	343,750,000
18	4.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		5	Dokumen	3	Dokumen	470,000,000	245,210,000	305,960,000	APBD	5 Dokumen	400,000,000
19	4.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3	Dokumen	3	Dokumen	814,452,800	791,553,100	729,953,100	APBD	3 Dokumen	1,111,635,910
IX	***4 01 02 2.04***	***Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah***	***Persentase kerjasama dalam negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama***		***90***	***%***	***90***	***%***	***545,218,100***	***456,884,700***	***430,394,700***		***90%***	***600,101,590***
			Persentase kerjasama luar negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama		***90***	***%***	***90***	***%***					***90%***	
20	4.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	80	Dokumen	80	Dokumen	304,692,800	283,184,800	265,524,800	APBD	80 Dokumen	335,174,950
21	4.01.02.2.04.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		2	Dokumen	2	Dokumen	179,687,500	164,526,400	155,696,400	APBD	2 Dokumen	198,000,000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
22	4.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		1	Laporan	1	Laporan	60,837,800	9,173,500	9,173,500	APBD	1 Laporan	66,926,640
JUMLAH BAGIAN PEMERINTAHAN									**2,512,670,900**	**1,787,037,100**	**1,734,291,500**			**2,890,487,500**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**66,656,106,470**	**68,267,030,961**	**74,685,184,769**			**68,841,127,832**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**66,656,106,470**	**68,267,030,961**	**74,685,184,769**			**68,841,127,832**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**		**A**	**poin**	**A**	**poin**	**66,656,106,470**	**68,267,030,961**	**74,685,184,769**		**A Poin**	**68,841,127,832**
			Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		**100**	**%**	**100**	**%**					**100%**	**8,250,761,748**
X	***4.01.01.2.02***	***Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah***	***Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN***		***100***	***%***		***%***	***39,708,438,859***	***42,165,665,058***	***47,473,909,646***		***100%***	***40,833,956,748***
23	4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	185	Orang		Orang	39,548,619,859	42,005,846,058	47,314,090,646	APBD	185 orang	40,833,956,748
24		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Laporan		Laporan	159,819,000	159,819,000	159,819,000			151,659,000
XI	***4.01.01.2.05***	***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah***		***100***	***%***		***%***	***531,796,000***	***379,646,000***	***379,646,000***		*100%*	***600,000,000***
25	4.01.01.2.05.01	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	5	Paket	5	Paket	531,796,000	379,646,000	379,646,000	APBD	5	600,000,000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
XII	***4.01.01.2.06***	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah***		***100***	***%***	***100***	***%***	***3,281,473,800***	***2,822,655,700***	***3,368,242,900***		***100%***	***3,479,355,420***
26	4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	1	Paket	1	Paket	174,630,000	174,630,000	244,629,700	APBD	1	195,000,000
27	4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3	Paket	3	Paket	501,612,700	501,612,700	501,612,700	APBD	3	549,903,700
28	4.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7	Paket	7	Paket	896,103,100	896,043,000	1,221,250,500	APBD	7	1,075,323,720
29	4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6	Paket	6	Paket	300,000,000	150,000,000	250,000,000	APBD	3 Paket	250,000,000
30	4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4	Laporan	4	Laporan	1,409,128,000	1,100,370,000	1,150,750,000	APBD	4 Laporan	1,409,128,000
XIII	***4.01.01.2.07***	***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD***		***100***	***%***	***100***	***%***	***3,292,978,090***	***2,836,049,100***	***2,836,049,100***		***100%***	***2,800,000,000***
31	4.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	63	Unit	63	Unit	685,910,500	428,711,100	428,711,100	APBD		900,000,000
32	4.01.01.2.07.07	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		69	Unit	69	Unit	2,607,067,590	2,407,338,000	2,407,338,000	APBD		1,900,000,000
XIV	***4.01.01.2.08***	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan***		***100***	***%***	***100***	***%***	***4,313,693,208***	***7,201,043,744***	***7,241,652,764***	APBD	***100%***	***4,583,611,416***

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
33	4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	1	Laporan	1	Laporan	99,303,000	89,298,000	89,298,000	APBD	1 laporan	99,303,000
34	4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	Laporan	1	Laporan	2,325,155,000	2,408,107,500	2,408,107,500	APBD	1 laporan	2,450,000,000
35	4.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	Laporan	1	Laporan	599,295,700	599,295,700	724,232,000	APBD		719,154,840
36	4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		14	Laporan	14	Laporan	1,289,939,508	4,104,342,544	4,020,015,264	APBD	12 Laporan	1,315,153,576
XV	***4.01.01.2.09***	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase BMD lingkup Setda berkondisi baik***		***100***	***%***	***100***	***%***	***8,253,920,800***	***6,875,055,850***	***6,875,055,850***			***8,293,442,500***
37	4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	20	unit	20	unit	941,749,600	918,713,300	918,713,300	APBD		950,975,700
38	4.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		22	unit	22	unit	2,616,893,600	1,698,180,300	1,698,180,300	APBD	22 unit	1,842,466,800
39	4.01.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		95	Unit	95	Unit	128,000,000	127,400,000	127,400,000	APBD	1 Paket	150,000,000
40	4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1500	unit	1500	unit	1,143,453,500	1,051,991,200	1,051,991,200	APBD	1500 unit	1,350,000,000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
41	4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	3 Unit	2,999,984,100	2,654,931,050	2,654,931,050	APBD	2 Paket	3,500,000,000
42	4.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 Unit	2 Unit	423,840,000	423,840,000	423,840,000	APBD	2 Unit	500,000,000
XVI	***4.01.01.2.11***	***Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	***Persentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***		***100 %***	***100 %***	***2,645,256,813***	***2,539,792,609***	***2,539,792,609***		***100%***	***2,673,895,068***
43	4.01.01.2.11.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	195,937,255	181,755,551	181,755,551	APBD	2 Orang/Bulan	184,509,180
44	4.01.01.2.11.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		5 Paket	5 Paket	400,663,300	349,380,800	349,380,800	APBD	9 Paket	440,729,630
45	4.01.01.2.11.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		8 Orang	8 Orang	80,000,000	40,000,000	40,000,000	APBD		80,000,000
46	4.01.01.2.11.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	1,968,656,258	1,968,656,258	1,968,656,258	APBD		1,968,656,258

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
XVII	***4.01.01.2.12***	***Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	***Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggan sekretariat daerah***		***100***	***%***	***100***	***%***	***4,628,548,900***	***3,447,122,900***	***3,970,835,900***			***5,576,866,680***
47	4.01.01.2.12.01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	10	Paket	10	Paket	1,480,426,900	1,049,039,000	1,496,763,000	APBD		2,028,288,000
48	4.01.01.2.12.02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		10	Paket	10	Paket	1,457,882,000	917,657,000	743,646,000			1,749,458,400
49	4.01.01.2.12.04	Sub Kegiatn Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		14	Paket	14	Paket	1,690,240,000	1,480,426,900	1,730,426,900	APBD		1,799,120,280
	JUMLAH BAGIAN UMUM								**66,656,106,470**	**68,267,030,961**	**74,685,184,769**			**77,091,889,580**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1,638,486,450**	**1,246,057,950**	**1,371,910,150**			**1,806,000,000**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1,638,486,450**	**1,246,057,950**	**1,371,910,150**			**1,806,000,000**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pelayanan keprotokolandan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**		**100**			**%**	**1,638,486,450**	**1,246,057,950**	**1,371,910,150**		**100%**	**1,806,000,000**
XVIII	***4.01.01.2.14***	***Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	***Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi Pimpinan sesuai standar***		***100***			***%***	***1,638,486,450***	***1,246,057,950***	***1,371,910,150***		***100%***	***1,806,000,000***
50	4.01.01.2.14.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	12	Laporan	12	Laporan	559,996,000	423,416,000	578,016,000	APBD	12 Laporan	616,000,000
51	4.01.01.2.14.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi		12	Laporan	12	Laporan	849,440,000	638,701,500	621,676,500	APBD	12 Laporan	935,000,000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
			Komunikasi Pimpinan											
52	4.01.01.2.14.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12	Laporan	12	Laporan	229,050,450	183,940,450	172,217,650	APBD	12 Laporan	255,000,000
JUMLAH BAGIAN PROKOMPIM									**1,638,486,450**	**1,246,057,950**	**1,371,910,150**			**1,806,000,000**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**200,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**			**200,000,000**
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**200,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**			**200,000,000**
	2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Penyelenggaraan penataan desa**		**90**	**%**	**90**	**%**	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**		**1 Unit**	**100,000,000**
XIX	***2.13.02.2.01***	***Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa***	***Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penataan dan pembangunan desa/kelurahan***		***90***	***%***	***90***	***%***	***100,000,000***	***100,000,000***	***100,000,000***			***100,000,000***
53	2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	1	Unit	1	Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000	APBD	1 Unit	100,000,000
	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Presentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif**		**65**	**%**	**65**	**%**	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**		**90%**	**100,000,000**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
XX	***2.13.05.2.01***	***Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif***		***70 %***		***70 %***	***100,000,000***	***100,000,000***	***100,000,000***		***100%***	***100,000,000***
54	2.13.05.2.01.07	Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	1 Laporan		1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	APBD	1 Laporan	100,000,000
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**36,147,323,840**	**31,050,046,950**	**35,887,369,310**			**#REF!**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**36,147,323,840**	**31,050,046,950**	**35,887,369,310**			**#REF!**
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rekomendasi kebijakan kesejahteraan yang ditindaklanjuti**		**85** %		**85** %	**36,147,323,840**	**31,050,046,950**	**35,887,369,310**		85%	**10,446,552,600**
			Persentase rekomendasi kebijakan kesejahteraan yang ditindaklanjuti		**85** %		**85** %						
XXI	**4.01.02.2.02**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Kebijakan Bina Mental Spiritual yang diimplementasikan**		**90** %		**90** %	**36,147,323,840**	**31,050,046,950**	**35,887,369,310**		**90%**	**10,446,552,600**
			Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial yang diimplementasikan		90 %		90 %						25,261,703,840

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
55	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	3	Dokumen	3	Dokumen	10,500,000,000	10,411,277,640	10,374,870,400		**3 Dokumen**	10,446,552,600
56	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		7			Dokumen	25,197,323,840	20,188,769,310	25,147,754,610		**7 Dokumen**	**24,811,703,840**
57	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		5			Dokumen	450,000,000	450,000,000	364,744,300		**5 Dokumen**	**450,000,000**
JUMLAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									**36,347,323,840**	**31,150,046,950**	**35,987,369,310**			**35,808,256,440**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**588,624,800**	**431,419,700**	**384,649,400**			**583,278,700**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**588,624,800**	**431,419,700**	**384,649,400**			**583,278,700**
	4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase BUMD yang Sehat**		**50**	**%**	**50**	**%**	**588,624,800**	**431,419,700**	**384,649,400**		**50%**	**583,278,700**
			Tingkat Inflasi Tahunan		**2-4**	**poin**		**poin**					**2-4**	
XXII	**4.01.03.2.01**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti**		**90**	**%**	**90**	**%**	**588,624,800**	**431,419,700**	**384,649,400**			583,278,700
58	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		4	Dokumen	4	Dokumen	333,882,000	234,889,000	209,645,000			294,802,000
59	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		2	Laporan	2	Laporan	154,806,700	112,091,700	99,176,400			138,476,700
60	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		2	Dokumen	2	Dokumen	99,936,100	84,439,000	75,828,000			150,000,000
JUMLAH BAGIAN PEREKONOMIAN									**588,624,800**	**431,419,700**	**384,649,400**			**583,278,700**
SEKRETARIAT DAERAH									**111,351,978,060**	**107,155,402,611**	**118,599,263,879**			**123,577,957,066**

BAB V
PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kota Bogor.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bogor merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan kegiatan administrasi Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Bogor.

Sekretariat Daerah dapat berperan dalam merumuskan kebijakan publik sehingga diharapkan akan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, juga diharapkan mampu mengimplementasilkan profesionalismenya dengan berpikir rasional, memiliki komitmen dan etika, baik sebagai fasilitator maupun advisor perumusan kebijakan publik. Sebagai fasilitator Sekretariat Daerah diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas, Lembaga Teknis Daerah dapat berjalan selaras, serasi dan seimbang dalam suatu mekanisme kerja yang sistematis dan terpadu.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa secara pribadi.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan ***political will*** pimpinan organisasi.

Demikian semoga Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bogor ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah Kota Bogor.

B. SEKRETARIAT DPRD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kota Bogor Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sekretariat DPRD Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Sekretariat DPRD

Kota Bogor Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan dan target kinerja.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor yaitu "**Mewujudkan Kota Bogor yang Ramah Keluarga"**. Disamping itu dalam rangka penyelarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota bogor dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan dokumen Renja 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bogor tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum :

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
7. Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Thun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 25.
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor l Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
31. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 33 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
33. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2024.
34. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);

35. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 156 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 156).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan atau dasar dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewajibannya secara terarah, efisien, dan efektif, selain itu dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatan kesekretariatan dan pelayanan kedewanan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2024;
2. Sebagai rencana dalam memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan;
3. Sebagai sarana mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2024;
4. Merupakan rencana dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD .

Adapun tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA Perubahan) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor yaitu :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mulai dari awal perencanaan;
2. Mewujudkan pelayanan tugas dan wewenang kedewanan yang aspiratif, transparan, akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam bentuk rancangan rencana

kerja;

4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan;
5. Dasar untuk melaksanakan program-program dan kegiatan kedewanan.

1.4 Sistematika Rencana Kerja

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024 s.d Tw II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SEKRETARIAT DPRD Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA SEKRETARIAT DPRD s.d Tw II
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SEKRETARIAT DPRD
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SEKRETARIAT DPRD
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SEKRETARIAT DPRD
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 s.d Tw II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2024 s.d Tw II dan Capaian RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Bogor

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Sekretariat DPRD Kota Bogor.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Setelah dilakukan pengukuran kinerja, dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bogor 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2024 s.d Triwulan II

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
											I		II					
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
	4.02		SEKRETARIAT DPRD			159.282.000.000		135.282.869.495		157.056.024.573	22,44	35.239.555.171	21,38	33.582.924.644	43,82	68.822.479.815		
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
	4.02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	156.000.000	A	79.289.231	A	128.674.900		30.033.600		18.884.400		48.918.000		38,02
				Nilai Rata- rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,50	87.428.000.000	3,40	84.535.469.917	3,50	84.219.942.173		21.551.129.657		20.681.405.147		42.232.534.804		50,15
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
	4.02.01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	156.000.000	A	79.289.231	A	128.674.900		30.033.600		18.884.400	-	48.918.000	-	38,02
			Sub Kegiatan															
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	71.300.000	2	19.484.754	3	104.611.400	1	23.667.400	1	12.858.900	2	36.526.300	66,67	34,92
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1	7.030.000	1	5.258.489	0	-		-			0	-	0	0,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	1	19.880.000	1	12.065.894	0	-		-			0	-	0	0,00
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1	7.030.000	1	4.793.450	0	-		-			0	-	0	0,00
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	1	19.880.000	1	12.726.329	0	-		-			0	-	0	0,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	18.840.000	3	14.807.811	3	13.455.500	0	3.629.300	1	3.288.600	1	6.917.900	33,33	51,41
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	14	12.110.000	14	10.152.504	14	10.608.000	3	2.736.900	3	2.736.900	6	5.473.800	42,86	51,60
																Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	20,41	19,70
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100**	**9.960.000.000**	**100**	**9.779.356.042**	**100**	**10.832.322.545**	**25%**	**3.267.308.259**	**25%**	**3.267.517.697**	**100**	**6.534.825.956**	**100,00**	**60,3**
		Sub Kegiatan															
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	9.880.000.000	55	9.700.715.792	55	10.436.196.745	55	3.187.998.359	55	3.210.669.697	110	6.398.668.056	200	61,3
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	16	22.510.000	16	22.381.300	16	72.636.800	16	5.658.000	16	5.658.000	32	11.316.000	200	15,5
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	128.770.000	0	0	12	128.770.000	3	19.827.000	3	16.650.000	6	36.477.000	50	28,3
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	7.060.000	1	6.701.500	1	9.402.000	0	4.500.000	0	-	0	4.500.000	0	47,8
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	15.000.000	2	14.936.250	2	21.648.000	1	12.430.000	0	-	1	12.430.000	50	57,4
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	30.540.000	18	30.302.900	18	158.661.000	4	36.894.900	4	34.540.000	8	71.434.900	44	45,0
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	5.000.000	1	4.318.300	1	5.008.000	0	-	0	-	0	-	0	0,0
															Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**77,8**	**36,5**
															Predikat kinerja	**Tinggi**	**Sangat Rendah**
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**												-		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**846.000.000**	**100**	**727.249.765**	**100**	**458.042.500**	**25%**	**87.790.848**	**25%**	**65.048.307**	**100**	**152.839.155**	**100,00**	**33,3**
															-		
		Sub Kegiatan													-		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi	55	10.340.000	55	6.056.923	55	6.129.000	55	855.000	55	936.000	110	1.791.000	200,0	29,2

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
											I		II					
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	80	836.000.000	80	721.192.842	80	451.913.500	15	86.935.848	15	64.112.307	30	151.048.155	37,5	33,4
																Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	118,75	31,32
																Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN												-		
																-		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**4.320.000.000**	**100**	**2.356.285.999**	**100**	**2.986.112.100**	**25%**	**707.289.853**	**25%**	**680.327.079**	**100**	**1.387.616.932**	**100,00**	**46,4**
																-		
			Sub Kegiatan													-		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	400.000.000	1	196.642.605	1	215.231.500	1	214.216.000	0	-	1	214.216.000	100,0	99,5
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	121.000.000	1	659.090.310	1	755.184.000	0,25	184.123.500	0,25	184.768.500	0,5	368.892.000	50,0	48,8
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	100.000.000	1	186.324.422	1	179.473.100	0,25	51.207.075	0,25	36.840.789	0,5	88.047.864	50,0	49,0
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	800.000.000	1	589.891.800	1	309.965.400	0,25	49.012.345	0,25	79.609.104	0,5	128.621.449	50,0	41,5
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	800.000.000	1	182.495.100	1	486.922.100	0	-	0,5	206.697.500	0,5	206.697.500	50,0	42,4
			Penyediaan bahan bacan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	100	400.000.000	100	29.729.590	100	324.460.000	25	65.262.000	25	66.338.000	50	131.600.000	50,0	40,5
			Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	500.000.000	1	463.251.000	1	500.710.000	0,25	104.631.433	0,25	105.249.686	0,50	209.881.119	50,0	41,9
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	110.000.000	1	48.861.172	1	64.166.000	0,25	38.837.500	0	823.500	0,25	39.661.000	0,0	0,0
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	150.000.000	0	-	1	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0,0	0,0
																Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	44,44	40,4
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**												-		
															-		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**2.300.000.000**	**100**	**1.797.794.038**	**100**	**1.182.471.100**	**25%**	**136.710.000**	**25%**	**138.495.000**	**100**	**275.205.000**	**100,00**	**23,2**
															-		
		Sub Kegiatan													-		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	200.000.000	3	39.568.000	3	275.000.000	1	135.450.000	2	137.235.000	3	272.685.000	100,0	99,1
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19	2.100.000.000	19	1.758.226.038	19	907.471.100	0	1.260.000	0	1.260.000	0	2.520.000	0,0	0,2
															Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**50,0**	**49,7**
															Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
															-		
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**												-		
															-		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**10.498.000.000**	**100**	**9.182.464.860**	**100**	**10.326.167.508**	**25%**	**2.764.322.468**	**25%**	**2.068.698.437**	**100**	**4.833.020.905**	**100**	**46,8**
															-		
		Sub Kegiatan													-		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	28.000.000	2	10.011.389	2	7.715.000	0,50	1.668.300	0,50	1.801.800	1	3.470.100	50,0	44,9
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.794.000.000	12	2.652.192.220	12	3.004.800.000	3	669.590.841	3	655.515.569	6	1.325.106.410	50,0	44,1
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	767.000.000	12	144.368.420	12	174.340.000	0	-	0	-	0	-	0,0	0,0
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	6.907.000.000	12	6.375.892.831	12	7.139.312.508	3	2.093.063.327	3	1.411.381.068	6	3.504.444.395	50,0	49,0
															Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**37,50**	**34,5**
															Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
															-		
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**												-		
															-		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**7.671.000.000**	**100**	**7.619.362.648**	**100**	**4.439.747.100**	**25%**	**1.529.586.800**	**25%**	**1.349.093.052**	**100**	**2.878.679.852**	**100**	**64,8**
															-		
		Sub Kegiatan													-		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	1.339.000.000	28	1.769.184.157	28	1.399.069.700	7	322.328.074	7	323.584.916	14	645.912.990	50,0	46,1
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	1.300.000.000	50	1.107.476.860	50	891.027.400	15	199.707.900	15	252.478.100	30	452.186.000	60,0	50,7
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di peliharan / di rehabilitasi	1	-	0	-	1	871.654.000	0,25	292.266.979	0,25	469.600.850	0,5	761.867.829	0,0	0,0
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	3.184.000.000	1	4.742.701.631	1	1.277.996.000	0,25	715.283.847	0,25	303.429.186	0,500	1.018.713.033	50,0	79,7
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	12	1.561.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,0	0,0
															Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**32,00**	**35,3**
															Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
															-		
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**												-		
															-		
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase laporan keuangan yg disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan**	**100**	**47.133.000.000**	**100**	**48.851.144.665**	**100**	**49.797.469.320**	**25%**	**12.378.815.680**	**25%**	**11.725.088.428**	**100**	**24.103.904.108**	**100,00**	**48,4**
															-		
		Sub Kegiatan													-		
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	46.779.000.000	50	47.890.372.680	50	48.477.469.320	50	12.256.315.680	50	11.521.315.680	100	23.777.631.360	200,0	49,0
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5	850.000.000	5	917.022.300	5	1.120.000.000	2	122.500.000	2	197.500.000	4	320.000.000	80,0	28,5
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	400.000.000	50	43.749.685	50	200.000.000	0	-	0	6.272.748	0	6.272.748	0,0	3,1
															Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**93,3**	**26,9**
															Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
											I		II					
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														
			Layanan Administrasi DPRD	**Persentase Layanan operasional DPRD yang optimal**	**100**	**4.700.000.000**	**100**	**4.221.811.900**	**100**	**4.197.610.000**	**25%**	**679.305.749**	**25%**	**1.387.137.147**	**100**	**2.066.442.896**	**100,00**	**49,2**
			Sub Kegiatan													-		
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1	500.000.000	1	915.107.990	1	1.060.160.000	0,25	329.346.855	0,25	202.904.854	0,5	532.251.709	50,0	50,2
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	3.500.000.000	12	2.568.072.681	12	2.893.164.000	3	291.073.144	3	1.128.037.543	6	1.419.110.687	50,0	49,0
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	700.000.000	12	738.631.229	12	244.286.000	3	58.885.750	3	56.194.750	6	115.080.500	50,0	47,1
																Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**50,0**	**48,8**
																Predikat Kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
																Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**58,2**	**35,9**
																Predikat kinerja	**Rendah**	**Sangat Rendah**
			PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**												-		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu Sesuai Prolegda**	**90**	**12.571.000.000**	**85**	**7.429.417.469**	**85**	**10.036.132.000**		**1.878.782.271**		**1.792.874.657**	**57,14**	**3.671.656.928**	**67,22**	**37**
				Prosentase Perda yang Disosialisasikan	**100**	**10.922.000.000**	**100**	**7.628.202.320**	**100**	**8.698.137.800**		**1.100.728.960**		**1.465.066.102**	**100,00**	**2.565.795.062**	**100,00**	**29**
				Prosentase Rapat dan Risalah Rapat yang Berkualitas	**85**	**48.205.000.000**	**83**	**35.610.490.558**	**84**	**53.973.137.700**		**10.678.880.683**		**9.624.694.338**	**-**	**20.303.575.021**	**-**	**38**
																-		
			KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**												-		
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Persentase Dokumen Raperda dan Peraturan DPRD Yang Disetujui**	**95**	**12.571.000.000**	**85,00**	**7.429.417.469**	**90**	**10.036.132.000**	**18,72**	**1.878.782.271**	**17,86**	**1.792.874.657**	**57,14**	**3.671.656.928**	**63,49**	**36,5**
			Sub Kegiatan													-		
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	1.366.000.000	10	421.406.686	17	627.471.400	0	-	0	-	0	-	0,0	0,0
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10	9.774.000.000	10	6.094.141.861	10	7.999.176.600	3	1.875.588.271	3	1.040.437.005	6	2.916.025.276	60,0	36,4
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	1.430.000.000	3	913.868.922	4	1.409.484.000	0	3.194.000	2	752.437.652	2	755.631.652	50,0	53,6
																Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**36,67**	**30,0**
																Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan**	**100**	**2.088.000.000**	**100**	**582.823.432**	**100**	**2.028.439.500**	**25%**	**-**	**25%**	**-**	**100**	**-**	**100,00**	**0,0**
		Sub Kegiatan															
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	730.000.000	2	284.059.042	2	676.609.500	0	-	0	-	0	-	0,0	0,0
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	728.000.000	2	274.764.990	2	666.915.000	0	-	0	-	0	-	0,0	0,0
		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	728.000.000	1	23.999.400	1	684.915.000	0	-	0	-	0	-	0,0	0,0
															Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**-**	**-**
															Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yg ditindaklanjuti**	**100**	**7.613.000.000**	**100**	**3.916.924.062**	**100**	**8.897.494.000**	**25%**	**1.311.222.454**	**25%**	**2.162.346.096**	**100**	**3.473.568.550**	**100,00**	**39,0**
		Sub Kegiatan													-		
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh	1	715.000.000	1	263.981.241	1	665.815.000	0	0	0,80	502.405.995	0,8	502.405.995	80,0	75,4
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3	6.343.000.000	3	3.380.407.317	3	7.634.282.000	0,75	1.308.577.454	0,75	1.192.523.588	1,5	2.501.101.042	50,0	32,7
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	555.000.000	1	272.535.504	1	597.397.000	0	2.645.000	1	467.416.513	1	470.061.513	100,0	78,6
															Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**76,67**	**62,3**
															Predikat kinerja	**Tinggi**	**Rendah**
															-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
										I		II					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**												-		
															-		
		Peningkatan Kapasitas DPRD	**Persentase Layanan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana**	**100**	**10.922.000.000**	**100**	**7.628.202.320**	**100**	**8.698.137.800**	**25%**	**1.100.728.960**	**25%**	**1.465.066.102**	**100**	**2.565.795.062**	**100,00**	**29,5**
															-		
		Sub Kegiatan													-		
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggraaan Orientasi DPRD	1	-	0	-	1	812.385.000	0	3.663.160	0	3.703.000	0	7.366.160	0,0	0,0
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	5.371.000.000	6	2.206.689.601	6	3.823.005.300	0	50.773.500	1	408.101.802	1	458.875.302	16,7	12,0
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan	12	3.961.000.000	12	4.016.830.092	12	3.086.999.500	3	850.484.500	3	829.623.000	6	1.680.107.500	50,0	54,4
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10	71.000.000	10	2.000.000	10	27.000.000	0	2.000.000	0	-	0	2.000.000	0,0	7,4
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	706.000.000	8	506.899.380	8	558.558.000	8	138.558.000	8	138.998.700	16	277.556.700	200,0	49,6
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	732.000.000	12	861.052.902	12	340.190.000	3	47.250.000	3	68.040.000	6	115.290.000	50,0	33,8
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	80.000.000	1	34.730.345	1	50.000.000	0,25	7.999.800	0,75	16.599.600	1	24.599.400	100,0	49,2
															Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**59,52**	**29,5**
															Predikat kinerja	**Rendah**	**Sangat Rendah**
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Persentase Anggota DPRD yang melaksanakan Penyerapan Aspirasi Masyarakat**	**100**	**3.640.000.000**	**100**	**3.057.777.858**	**100**	**2.940.556.000**	**25%**	**966.821.300**	**25%**	**-**	**100**	**966.821.300**	**100,00**	**32,8**
															-		
		Sub Kegiatan													-		
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	715.000.000	1	166.665.458	1	30.556.000	0	3.621.300	0	-	0	3.621.300	0,0	11,8
		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	2.925.000.000	3	2.891.112.400	3	2.910.000.000	1	963.200.000	0	-	1	963.200.000	33,3	33,1
															Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**16,67**	**22,4**
															Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
											I		II					
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
																-		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN												-		
																-		
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase dokumen kode etik DPRD yg disusun sesuai peraturan perUUan	100	2.877.000.000	100	803.393.425	100	2.722.524.100	25%	309.834.400	25%	428.449.230	100	738.283.630	100,00	27,1
																-		
			Sub Kegiatan													-		
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2	2.877.000.000	0	-	2	250.832.100	0	0	0	-	0	-	0,0	0,0
			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3	2.547.000.000	3	803.393.425	3	2.471.692.000	0,75	309.834.400	0,75	428.449.230	1,5	738.283.630	50,0	29,8
																Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	25,00	14,9
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terpenuhi	100	31.987.000.000	100	27.249.571.781	100	37.384.124.100	25%	8.091.002.529	25%	7.033.899.012	100	15.124.901.541	100,00	40,4
																-		
			Sub Kegiatan													-		
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas	5	29.963.000.000	5	25.011.197.438	5	31.456.808.000	0,75	6.681.800.367	0,75	6.244.344.174	1,5	12.926.144.541	30,0	41,0
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3	46.000.000	3	12.103.286	3	75.190.000	0	-	0,75	4.999.800	0,75	4.999.800	25,0	6,6
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4	1.978.000.000	4	2.226.271.057	4	5.852.126.100	1	1.409.202.162	0,50	784.555.038	1,5	2.193.757.200	37,5	37,4
																Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	30,83	28,4
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
																Rata-rata capaian kinerja Program (%)	35,1	26,8
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	46,65	31,36
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sumber: Data Olahan Setwan, 2024

Realisasi belanja Sekretariat DPRD Kota Bogor s.d Triwulan II sebesar Rp 68.822.479.815 atau 43.82% dari anggaran sebesar Rp 157.056.024.573 sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.1 di atas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bogor

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bogor ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :
   a) Jumlah SDM dan tingkat pendidikan sudah memadai dengan komposisi pendidikan tingkat Sarjana 60% (aparatur yang memadai);
   b) Aset sarana dan prasarana yang memadai;
   c) Anggaran yang memadai;
   d) Peran serta dukungan DPRD.
2. Faktor Penghambat :
   a) Kompetensi sumber daya manusia (tenaga kerja) yang masih kurang;
   b) Perkembangan teknologi yang belum bisa dipahami oleh pegawai;
   c) Adanya perkembangan aplikasi yang sangat cepat sehingga membutuhkan keahlian khusus.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bogor s.d Triwulan II

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Capaian s.d Triwulan II Tahun 2024	Predikat
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor		Indeks Reformasi Birokrasi	A	-	Belum Tercapai
	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat DPRD Kota Bogor	82	-	Belum Tercapai
	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100	-	Belum Tercapai

Sumber: Data Olahan Setwan Kota Bogor, 2024

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan Perubahan RENJA Tahun 2024 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bogor

Isu-isu yang penting terkait dengan penyelenggaran Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dapat dirangkum sebagaimana disajikan pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

FAKTOR INTERNAL PERANGKAT DAERAH		FAKTOR EKSTERNAL PERANGKAT DAERAH	
KEKUATAN	**KELEMAHAN**	**PELUANG**	**TANTANGAN**
eksistensi lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan	kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan	dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat
dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter serta yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan	tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan dan pelayanan publik ke depan	makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan
kemandirian dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku		terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan	

dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi			

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD tentunya mendasarkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD yang telah disusun karena menjadi acuan dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD. Dimana Renstra PD berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan RPJMD dan RKPD. Program dan kegiatan yang diusulkan tersebut dalam upaya mengakomodir rencana kerja DPRD dan Sekretariat DPRD guna mendukung fungsi pembentukan produk hukum daerah, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan terhadap penegakkan peraturan daerah maupun kebijakan daerah yang lain. Rencana program kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bogor pada tahun 2024 secara umum sama dengan program kegiatan yang telah disusun dalam RKPD Kota Bogor.

Adapun program yang akan dilaksanakan di tahun 2024 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

2.5 Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja Perubahan PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD Kota Bogor. Renja Perubahan PD disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perubahan PD sebagaimana dimaksud diatas selanjutnya digunakan oleh Kepala Bappeda dalan penyusunan rancangan RKPD Perubahan Kota Bogor. Rancangan akhir RKPD Perubahan disusun berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Penyusunan RKPD Perubahan dan Renja Perubahan PD (sampai dengan rancangan akhir) mengikuti tahapan penyusunan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun RKPD/Renja PD.
2. Penyusunan Awal Rancangan RKPD dan Rancangan Awal Renja PD.
3. Musrenbang Desa/Kelurahan.
4. Musrenbang Kecamatan.
5. Forum PD Kab/Kota.
6. Musrenbang Kab/Kota.

7. Perumusan Rancangan Akhir RKPD dan Renja PD.

Usulan program dan kegiatan yang diterima selanjutnya akan di sesuaikan dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD untuk selanjutnya akan dicantumkan sebagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berjalan oleh Sekretariat DPRD Kota Bogor. Selain itu usulan Program dan Kegiatan Masyarakat juga diperoleh melalui mekanisme Aspirasi Masyarakat yang disampaikan melalui forum Reses Anggota DPRD Kota Bogor.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, Sekretariat DPRD dituntut untuk dapat bersinergi dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD. Pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam bentuk fasilitasi-fasilitasi baik secara administratif maupun keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Kota Bogor dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 s/d 2024 akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bogor.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bogor

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari Misi yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di

masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Isu-isu dan Analisis Strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2019-2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas								
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor		Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	A
		Sasaran 1 : Meningkatnya KualitasTatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat DPRD Kota Bogor	NA	NA	80,1	81	82
		Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam ranga menunjang kinerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80%	84%	86%	88%	90%

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga			
MISI : Mewujudkan Kota Yang Cerdas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor			
	Sasaran 1 :		
	Meningkatnya KualitasTatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Mensikronkan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan organisasi
			Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
			Menjamin dan memastikan kualitas perencanaan dan pengendalian program/ kegiatan Sekretariat DPRD dan ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan standar kebutuhan
	Sasaran 2 :		
	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi kinerja DPRD	Memastikan ketepatan waktu dan kemudahan dalam pelayanan tugas dan fungsi DPRD
			Mensinergikan hubungan kerja antara Legislatif dan Eksekutif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

Sumber: Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019- 2024

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagaimana telah diuraikan dalam tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD bahwa setelah penetapan visi dan misi, tujuan mengarahkan perumusan sasaran dan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam perumusan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2024, disusun berdasarkan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka penyusunan program dan kegiatan harus disesuaikan dengan peraturan tersebut.

Setelah dilakukan pemetaan dan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang telah tersusun maka pada Sekretariat DPRD Tahun 2024 terdapat 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
9. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
12. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
17. Fasilitasi Kunjungan Tamu
18. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

21. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

22. Pengadaan Mebel

23. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

25. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

26. Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor

27. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

28. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

29. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

30. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

31. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

32. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

33. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

34. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

9) Layanan Administrasi DPRD

35. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

36. Fasilitasi Fraksi DPRD

37. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

10) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

38. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

39. Pembahasan Rancangan Perda

40. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik

11) Pembahasan Kebijakan Anggaran

41. Pembahasan KUA dan PPAS
42. Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
43. Pembahasan Laporan Semester

12) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

44. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
45. Pengawasan Penggunaan Anggaran
46. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

13) Peningkatan Kapasitas DPRD

47. Orientasi DPRD
48. Pendalaman Tugas DPRD
49. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
50. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
51. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
52. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
53. Penyusunan Program Kerja DPRD

14) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

54. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
55. Pelaksanaan Reses

15) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

56. Penyusunan Kode Etik DPRD
57. Pengawasan Kode Etik DPRD

16) Fasilitasi Tugas DPRD

58. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
59. Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD
60. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2024

No.	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.611.400
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.455.500
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.608.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.757.158.670
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.636.800
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.402.000
7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	21.648.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	158.661.000
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.008.000
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	109.138.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.129.000
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	545.818.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	215.231.500

No.	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	755.184.000
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	179.473.100
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	309.965.400
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	486.922.100
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	324.460.000
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	500.710.000
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	64.166.000
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
22	Pengadaan Mebel	471.400.000
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.148.367.300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.715.000
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.004.800.000
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.340.000
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.103.761.008
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.497.861.700
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	891.027.400
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.660.974.420
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.277.996.000

No.	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
32	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	48.477.469.320
33	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.120.000.000
34	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000
	Layanan Administrasi DPRD	
35	Fasilitasi Fraksi DPRD	1.060.160.000
36	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2.843.164.000
37	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	244.286.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
38	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	321.533.100
39	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8.321.304.300
40	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	1.393.294.600
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
41	Pembahasan KUA dan PPAS	676.609.500
42	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	666.915.000
43	Pembahasan Laporan Semester	22.728.000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
44	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	549.730.000
45	Pengawasan Penggunaan Anggaran	8.060.482.000
46	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	497.744.000

No.	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
	Peningkatan Kapasitas DPRD	
47	Orientasi DPRD	657.597.000
48	Pendalaman Tugas DPRD	1.966.850.000
49	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.737.114.500
50	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27.000.000
51	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	558.558.000
52	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	540.190.000
53	Penyusunan Program Kerja DPRD	50.000.000
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
54	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	30.556.000
55	Pelaksanaan Reses	1.942.500.000
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
56	Penyusunan Kode Etik DPRD	250.832.100
57	Pengawasan Kode Etik DPRD	2.471.692.000
	Fasilitasi Tugas DPRD	
58	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	29.435.603.700
59	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	75.190.000
60	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.651.929.100
	Jumlah	**153.827.662.018**

BAB V

PENUTUP

Perubahan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bogor tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Sekretariat DPRD Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan penyelenggaraan pelayanan kepada DPRD Kota Bogor sesuai dengan tugas pokok dan fungsnya. Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam RENJA Sekretariat DPRD tahun 2024 mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA Sekretariat DPRD sebagai tindaklanjut dari penyempurnaan RENSTRA Tahun 2019-2024 yang berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Bogor. Program dan kegiatan di Sekretariat DPRD merupakan implementasi dari pernyataan arah kebijakan Wali Kota.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, jika dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Semoga Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan, terutama dapat memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bogor dalam mewujudkan Visi yaitu **“MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA RAMAH KELUARGA”.**

C. Inspektorat

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Renja dimaksud berfungsi untuk menterjemahkan dan menjabarkan perencanaan strategis lima tahunan yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bogor menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Bogor

Tahun 2024. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar
1.1
Hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

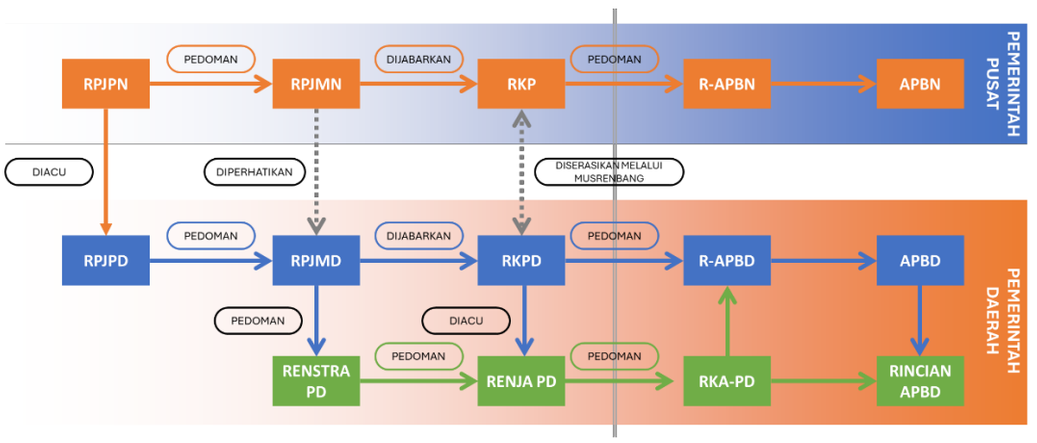

Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bogor selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bogor dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat in-line dengan arah kebijakan Pembangunan Nasional. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka Dokumen Rencana Kerja perubahan Inspektorat Kota Bogor disusun berdasarkan kebijakan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Bogor Tahun 2024 yang

didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD Kota Bogor tahun 2005-2025 dan RPJMD Perubahan Kota Bogor tahun 2019-2024. Berikut Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar
1.2

Arsitektur kinerja dokumen perencanaan
Perangkat Daerah

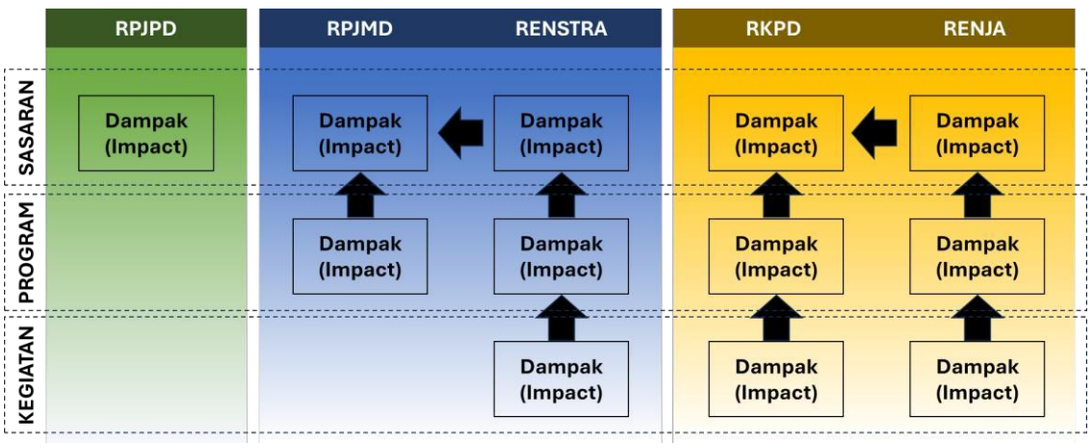

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 677);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2023/Nomor 57 Tambahan Lembaran Negera Nomor 6866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TujuanPembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
21. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-

2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 tengan Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 48);
38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan UrusaN Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 118);Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2021);
42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.

43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2024.
44. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024.
45. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
46. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
47. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
48. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
49. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
50. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
51. 52. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
52. 53. Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 900.1/Kep.209-BKAD/2-24 tentang Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Dan Kegiatan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 000.7/2945- Bapperida tanggal 01 Juli 2024 Surat Edaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Inspektorat Daerah Kota Bogor berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan

(selama triwulan II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Inspektorat Daerah Kota Bogor mempunyai peran dalam mewujudkan visi melalui misi kedua yaitu "**Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas"**. Makna mewujudkan Kota Bogor yang cerdas memiliki arti tatakelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang kolaboratif, transparan, dan melayani. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Terkait dengan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam mendukung Visi dan Misi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan dan monitoring penerapan SPIP;
2. Penyusunan dan penyempumaan norma, standar dan prosedur pemeriksaan;
3. Penyusunan PKPT berbasis risiko;
4. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melalui koordinasi dan sinergitas antar APIP, BPK, BPKP, Kemenpan RB dan instansi lainnya maupun dengan Objek Pemeriksaan;
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi APIP;
6. Memantapkan peran Inspektorat Daerah dalam pemberian jasa konsultasi;
7. Mengembangkan deteksi dini (Early Warning System) sebagai tindakan pencegahan dalam pengadaan barang/jasa khususnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik dan Pendampingan tenaga ahli dalam pelaksanaan pengawasan;
8. Pemberian fasilitas Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Penyelenggaraan Pengembangan Sumberdaya Aparatur secara Mandiri kepada APIP.

Selain hal diatas Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 sebagai dasar untuk menjaga konsistensi antara

perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Inspektorat Tahun 2024 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan

Triwulan II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

2.1.1 Evaluasi Kinerja Sasaran

2.1.2 Evaluasi Kin erja Program dan Kegiatan

2.2 Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

3.2 Matrik Rencana Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor

Tahun 2024

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang rumusan sasaran yang akan dicapai dan program/kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan organisasi. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah merupakan alat (*tools*) untuk mengukur sejauh mana capaian indicator baik itu program dan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi kepala perangkat daerah dalam mengeluarkan kebijakan apabila terdapat ketidaksesuaian aktifitas dalam menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran perangkat daerah.

2.1.1. EVALUASI KINERJA SASARAN

Evaluasi kinerja sasaran merupakan penilaian atau peninjauan target kinerja organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang akan menghasilkan sebuah kebijakan atau strategi organisasi. Indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2024, sampai dengan semester I masih terdapat 4 (empat) indicator yang belum terdapat hasil capaiannya dikarenan masih dalam tahap proses penilaian. Berikut disampaikan hasil evaluasi kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2024 sampai dengan semester I pada table 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

Capaian Indikator Utama (IKU)

Inspektorat Daerah Kota Bogor

Semester I Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI SEMESTER I TAHUN 2024	%	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	1.1	Level kapabilitas APIP	Level	3 (3.296)	3 (3.296)	-	-	Belum dilakukan Penilaian Oleh BPKP
		1.2	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Point	85.22	82	-	-	Belum dilakukan Penilaian Oleh Setda
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	2.1	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	-	-	Belum dilakukan Penilaian Oleh BPKP
		2.2	Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Point	16.94	22.5	-	-	Belum dilakukan penilaian oleh KemenPAN-RB
		2.3	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Persen	76.18	75.5	89.69	118.79	Penilaian sampai dengan semester I

Pencapaian Kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Level kapabilitas APIP**

   Pada tahun 2023 capaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor berada pada level 3 dengan nilai 3,052 berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh BPKP Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023 perihal : Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023. Apabila diukur antara realisasi dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan, terdapat kenaikan sebesar 1,73 persen dari nilai target sebesar 3.000. Sedangkan untuk Tahun 2024 belum ada capai sampai dengan semester II dikarenakan masih dalam tahap pengumpulan berkas untuk dilakukan verifikasi oleh BPKP Provinsi Jawa Barat.

2. **Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah**

   Pada Tahun 2023 capaian Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah mendapatkan nilai 85,22 dari target 81. Hasil realisasi tersebut berdasarkan dengan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kota Bogor Nomor : 000.8.6/7B.Org

perihal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023. Sedangkan untuk Tahun 2024 belum ada capaian sampai dengan semester II dikarenakan masih dalam proses persiapan penilaian secara mandiri oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor.

3. Level Maturitas SPIP

Pada tahun 2023 capaian Level Maturitas SPIP berada pada level 3 dengan nilai 3,296 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh BPKP Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023 perihal : Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023. Sedangkan untuk Tahun 2024 belum ada capai sampai dengan semester II dikarenakan masih dalam tahap pengumpulan berkas untuk dilakukan verifikasi oleh BPKP Provinsi Jawa Barat.

4. Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota

Pada tahun 2023 capaian Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota, Inspektorat Daerah Kota Bogor mendapatkan nilai evaluasi akuntabilitas sebesar 19,94 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor Nomor : 700/551-itda perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023. Sedangkan untuk Tahun 2024 belum ada capaian sampai dengan semester II dikarenakan masih dalam proses persiapan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor.

5. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Pada tahun 2023 capaian indeks Persepsi Anti Korupsi pada Inspektorat Daerah Kota Bogor mendapatkan nilai sebesar 76,18 dari target sebesar 75. Sedangkan untuk tahun 2024 sampai dengan semester II telah dilakukan penyebaran kuasioner terhadap penerima pelayanan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) orang dengan mendapatkan nilai 89,69 atau setara dengan kategori A (baik).

Pada target sasaran kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk Tahun 2024 dilakukan penyesuaian target (shadow target) antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah, hal tersebut pun sesuai dengan arahan dari KemenPAN-RB bahwa apabila terdapat realisasi capaian tahun 2023 yang sudah melebihi target tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian target yang dilakukan sifatnya tidak merubah target yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan seperti halnya dokumen rencana strategis maupun dokumen rencana kerja perangkat daerah, diterangkan pula oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat hal tersebut hanya berupa challenge dari Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan capaian kinerjanya. Berikut disampaikan Target Kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 yang dituangkan pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Penyesuaian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR TARGET	SATUAN	TAHUN 2023	REALI TAHUN 2024	SHADOW TARGET TAHUN 202	%
1	Meningkatnya kualitas kapabilitas tata kelola pelayanan APIP Inspektorat Daerah	1.1 Level	Level	Level (3.296)	3 3	3 (3.310)	0.42
		1.2 Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Point	Point 85.22	85.82	85.5	4.27
			Level	Level 3	3 3	3	0.00
2	Meningkatnya Maturitas akuntabilitas kinerja SPIP dan keuangan pemerintah daerah	2.1 Level	Point	Point 16.94 22.5		22.5	0.00
		2.2 Nilai hasil Evaluasi	Persen	Persen 76.18		77	1.99

2.1.2. EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk menunjang kinerja sasaran tersebut perlu dilakukan evaluasi sejauh mana ketercapaian setiap indicator program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja khususnya Tahun 2024. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dapat dilakukan setiap per triwulan

atau per semester, kemudian hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi kepala perangkat daerah untuk memastikan bahwa target indikator kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dapat dicapai atau tidak melihat dari kondisi pada tahun berjalan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 sampai dengan semester I disajikan pada table 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024
Sampai Dengan Semester I

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI (SMT I)	%
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	3.4	3.54	104.12
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	A		
		Gap Analysis Komptensi	Persen	14.2		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah	Persen	100	55	54.55
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	3	50.00
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	3	60.00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai regulasi	Persen	100	80	80.00
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	53	53	100.00
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	17	6	35.29
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	0	0.00
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	53	0	0.00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	Persen	100	37	36.84
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2	50.00
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	2	33.33

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI (SMT I)	%
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100.00
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	2	28.57
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0.00
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**Persen**	**100**	**1**	**1.16**
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	1	100.00
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	67	0	0.00
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19	0	0.00
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**46**	**46.16**
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	7	3	42.86
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	3	50.00
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup Inspektorat berkondisi baik**	**Persen**	**100**	**33**	**33.00**
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	100.00
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	92	19	20.65
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	0	0.00
6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"**	**Persen**	**78**	**0**	**0.00**
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	**Persen**	**78**	**0**	**0.00**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI (SMT I)	%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas internal	Persen	90	0	0.00
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal	Persen	90	0	0.00
		Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	96	0	0.00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase capaian target pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persen	100	0	0.00
		Persentase capaian target pengawasan keuangan daerah	Persen	100	0	0.00
		Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	kegiatan	2	0	0.00
		Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	kegiatan	2	0	0.00
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	6	2	33.33
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	36	0	0.00
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	100.00
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	2	200.00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan pengaduan yang diselesaikan sesuai kewenangan	Persen	100	60	60.00
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugianrnnnegara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	1	100.00
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	1	0	0.00
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	Persen	100	0	0.00
		Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	Unit Kerja	1	3	300.00
		Persentase Capaian MCP KPK	Persen	96		0.00
6.01.03.2.02	Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Manajemen Risiko	Persen	90	0	0.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI (SMT I)	%
		Jumlah Unit Kerja yang dilakukan pendampingan Pelaksanaan RB bidang penguatan pengawasan dan pembangunan ZI menuju WBK	Unit Kerja	11		0.00
		Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan Evaluasi MCP KPK Pemerintah Kota Bogor	kegiatan	2	1	50.00
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	36	0	0.00
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	36	1	2.78
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	36	0	0.00

Sehubungan dengan adanya *Shadow Target* pada indicator kinerja utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bogor, perlu dilakukan penyesuaian target untuk mencapai penyesuaian target yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah khususnya pada indicator program. Berikut disampaikan pada table 2.4 terkait penyesuaian target program yang terdapat di Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Tabel
2.2
Penyesuaian Target Indikator
Program Inspektorat Daerah
Kota Bogor Tahun 2024

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	SHADOW TARGET TAHUN 2024	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	3.41	3.5	3.5	0
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	AA (90,75)	A (80)	AA (91)	13.75
		Gap Analysis Komptensi	Persen	14.2	13.5	14.2	5.19
2	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang mendapatkan Hasil	Persen	94.44	80	97.2	21.5

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	SHADOW TARGET TAHUN 2024	%
		Evaluasi SAKIP minimal "BB"					
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Persen	100	80	100	25
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal	Persen	80.53	90	90	0
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal	Persen	90.72	91	92	1.1
		Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	100	96	100	4.17
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Aistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	Persen	100	100	100	0
		Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	Unit Kerja	4	2	3	50
		Persentase Capaian MCP KPK	Persen	86	95	86	-9.47

2.2. REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2024 sampai dengan semester I serta setelah dilakukan Analisa atas pelaksanaan kegiatan, maka terdapat beberapa sub kegiatan perlu dilakukan pergeseran anggaran dan penambahan anggaran untuk mendukung aktifitas pembinaan dan pengawasan dibeberapa sub kegiatan seperti :

1. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN diajukan untuk penambahan anggaran, hal tersebut disebabkan adanya kebijakan yang dikeluarkan melalui Kementrian Keuangan terkait penganggaran Tunjangan Hari Raya yang sebelumnya pada anggaran murni belum teranggarkan serta untuk memfasilitasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor.
2. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya diajukan untuk penambahan anggaran, hal tersebut digunakan untukpemeliharaan ruang penyimpanan barang milik daerah sebagai bentuk pengamanan asset Pemerintah Kota Bogor.
3. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya diajukan untuk penambahan anggaran, hal tersebut diajukan untuk pengadaan alat pengukur kelembaban udara diruangan penyimpanan barang milik daerah.

Selain dengan penambahan anggaran tersebut Inspektorat Daerah Kota Bogor di tahun 2024 melakukan pergeseran anggaran yang terdapat dibeberapa sub kegiatan seperti :

1. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya dilakukan pergeseran anggaran yang semula untuk pengadaan tablet PC pada anggaran murni dialihkan untuk pengadaan laptop.
2. Pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilakukan pengurangan anggaran untuk aktifitas sertifikasi ISO 37001:2016 terkait Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp18.110.000,-
3. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dilakukan pengurangan anggaran untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp10.320.000,-
4. Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dilakukan pengurangan anggaran untuk Belanja Alat Tulis Kantor, Honorarium Narasumber, Belanja Kursus Singkat / Pelatihan, dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp145.293.000,-
5. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilakukan pengurangan anggaran untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp31.337.700,-
6. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilakukan pengurangan anggaran untuk Belanja Penyediaan Bahan Logistik sebesar Rp13.756.190,-
7. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dilakukan pengurangan anggaran untuk Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp13.175.000,-
8. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilakukan pengurangan anggaran untuk Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Biaya Tiket Pesawat dan Biaya Penginapan sebesar Rp161.602.000,-

9. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilakukan pengurangan anggaran untuk Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp9.600.000,-
10. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilakukan pengurangan anggaran untuk Belanja Pemeliharaan Komputer sebesar Rp8.280.000,-
11. Pada Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dilakukan pengurangan anggaran untuk

    Belanja Cetak, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar

    Rp19.860.800,-
12. Pada Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal dilakukan pengurangan anggaran untuk Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp10.000.000,-
13. Pada Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian KerugianrnnNegara/Daerah dilakukan pengurangan anggaran untuk Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp2.806.000,-
14. Pada Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dilakukan pengurangan anggaran untuk Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp10.798.000,-
15. Pada Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan pengurangan anggaran untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp133.936.000,-
16. Pada Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi

Birokrasi dilakukan pengurangan anggaran untuk Belanja Perjalanan Dinas sebesar

Rp43.946.000,-

Berikut disampaikan Analisa evaluasi Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor pada table 2.3.

Tabel
2.3
Analisa Rencana Kerja Inspektorat
Daerah
Tahun 2024
Semester I

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Rencana Kerja Sampai Dengan Semester I				Hasil Analisa Kebutuhan				
				Kinerja		Anggaran		Target Kinerja	Anggaran Perubahan	Tambah/Kurang	%	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi					
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	3.4	3.5	22,456,935,516	12,372,709,277	3.4	24,175,749,404	1,718,813,888	7.65	
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	A				A				
		Gap Analysis Komptensi	Persen	14.2				14.2				
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah	Persen	100	54.5454 545	168,672,200	8,664,000	100	150,562,200	(18,110,000)	(10.74)	
6.01.01.2.01.0001	Jumlah Daerah	Jumlah	Doku	6	3	6,547	1,404	6	6,547	-	-	
6.01.01.2	Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja	Lapor	5	3	24.40	4.400	5	4.400	(18,11	(11	Efisiensi Anggaran
6.01.01.2	Administrasi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah tepat waktu regulasi	Pers	10	8	17,47(,	10,72(	10	21,0(4,	3,5(8,8	20.	
6.01.01.2	Penyediaan Tunjangan Asn	Jumlah Penerima Tunjangan ASN	Oran pula	5	5	17.421	10,707	53	21,030	3,609.1	20	Pemenuhan kebutuhan pegawai
6.01.01.2	Koordinasi Laporan Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Laporan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes	Lapor	1	6	8,(8(	4,(48	17	8,(8(	(0,32	(19	Efisiensi
6.01.01.	Administrasi Perangkat	Persentase kebutuhan perangkat	Pers	10	8(.(	88,(8(	4(8,(09	10	(48,(40	(145,29	(18.	
6.01.01.2	Bimbingan Implementasi Peraturan-Undangan	Jumlah Pengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Undangan	Oran	5	3	88,(8(	4(8,(0(	53	(,(8(,4	(145.29	(16	Efisiensi
6.01.01.	Administrasi Perangkat	Persentase kebutuhan perangkat	Pers	10	33.3	(,(0(,8(	4,(8(,(37	10		(1,208.4	(100	
6.01.01.2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan Kantor Disediakan	Pake	4	2	1(0,88	4(,(88	4	8(,(88	(31.33	(24	Efisiensi

		Indikator Kinerja Program		Rencana Keria Sampai Kineria				Target Kineria	Hasil Anggaran	Tambah/Kurang	Keterangan
				Target	Realisasi						
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	2	68,504,900	14,245,498	6	54,748,710	(13,756,190)	(20.08)	Efisiensi Anggaran
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0.38329579	57,710,000	22,120,000	1	44,535,000	(13,175,000)	(22.83)	Efisiensi Anggaran
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	2	854,003,000	211,610,002	7	692,401,000	(161,602,000)	(18.92)	Efisiensi Anggaran
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	101,590,000	-	1	101,590,000	-	-	
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**Persen**	**100**	**1.14942529**	**952,540,900**	**616,154,000**	**100**	**981,126,300**	**28,585,400**	**3.00**	
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	1	660,000,000	616,154,000	1	660,000,000	-	-	
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	67	0	88,439,600	-	67	88,439,600	-	-	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19	0	204,101,300	-	19	232,686,700	28,585,400	14.01	Pemenuhan Kebutuhan peralatan dan mesin lainnya
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**30.7692308**	**633,701,279**	**267,222,398**	**100**		**(633,701,279)**	**(100.00)**	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	7	2	190,647,695	61,081,438	7	190,647,695	-	-	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	2	443,053,584	206,140,960	6	433,453,584	(9,600,000)	(2.17)	Efisiensi Anggaran
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup Inspektorat berkondisi baik**	**Persen**	**100**	**33**	**1,131,321,600**	**184,145,071**	**100**	**1,228,246,600**	**96,925,000**	**8.57**	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Rencana Kerja Sampai Dengan Semester I				Hasil Analisa Kebutuhan				
				Kinerja		Anggaran		Target Kinerja	Anggaran Perubahan	Tambah/Kurang	%	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi					
6.01.01.2.09.0001	Pemeliharaan, Perawatan, Pengadaan, Pembayaran Pajak, Perpanjangan Kendaraan	Jumlah Operasional yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Atau Kendaraan Perizinannya	Unit	7	1	488,190	92,915	7	488,190,0	-	-	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	92	19	75,900,000	16,482,150	92	67,620,000	(8,280,000)	(10.91)	Efisiensi Anggaran
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	0	787,231,600	74,847,300	1	892,436,600	105,205,000	13.36	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Pengawasan	Persen	78	0			78	245,707,200	(43,464,800)	(15.03)	
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Persen	78	0			78				
		Persentase tindak lanjut	Persen	90				90				
		Persentase tindak lanjut	Persen	90				90				
		Persentase Pengelolaan Keuangan	Persen	95	0			95				
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase capaian target	Persen	100	0			100	224,549,200	(29,860,800)	(11.74)	
		Persentase capaian target	Persen					100				
		Jumlah pemantauan kegiatan tindak lanjut		2				2				
		Jumlah pemantauan kegiatan tindak lanjut rekomendas		2				2				
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	6	2	20,092,400	5,050,000	6	20,092,400	-	-	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	36	0	16,990,000	-	36	16,990,000	-	-	

		Indikator Kinerja		Rencana Keria Sampai				Hasil			
			Kineria	Target	Realisasi			Target Kineria	Anggaran	Tambah/Kurang	Keterangan
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	88,749,600	63,760,000	1	68,888,800	(19,860,800) (22.38)	Efisiensi Anggaran
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakat an	1	2	128,578,000	56,123,000	1	118,578,000	(10,000,000) (7.78)	Efisiensi Anggaran
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase laporan pengaduan yang diselesaikan sesuai kewenangan**	**Persen**	**100**	**50**	**34,762,000**	**19,820,000**	**100**	**21,158,000**	**(13,604,000) (39.13)**	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugianrnnnegara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	1	23,964,000	19,820,000	1	21,158,000	(2,806,000) (11.71)	Efisiensi Anggaran
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	1	0	10,798,000	-	1	-	(10,798,000) (100.00)	Efisiensi Anggaran
6.01.03	**Program Perumusan**							**Persentase**	**100**		
Perangkat		**Jumlah Unit Kerja yang**	**Persen**	**100**	**0**				**(177,882,000)**	**(29.67)**	
		Kerja	**Unit**	**1**					**1**		
		diusulkan untuk									
		Persentase Capaian							**95**		
6.01.03.2.02	**Pendampingan Dan Asistensi**							**Persentase**	**90**		
Perangkat			**Persen**	**90**	**0**				**(177,882,000)**	**(29.67)**	
		Jumlah Unit Kerja yang	**Unit**						**11**		
		Kerja		**11**							
		dilakukan									
		Jumlah kegiatan									
		kegiatan koordinasi,		**2**					**2**		
		monitoring dan									
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	36	0	442,054,000	113,725,000	36	308,118,000	(133,936,000) (30.30)	Efisiensi Anggaran
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	36	1	109,181,000	12,130,000	36	65,235,000	(43,946,000) (40.25)	Efisiensi Anggaran

	Indikator Kinerja Program		Rencana Kerja Sampai Kineria		Target Kineria	Hasil Anggaran	Tambah/Kurang	Keterangan
			Target	Realisasi				
6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	360	48,364,000 10,480,000	36	48,364,000	-	-
JUMLAH BELANJA DAERAH								

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

Rencana program dan kegiatan merupakan indicator keberhasilan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan perangkat daerah untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan Pemerintah Kota Bogor. Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Nomor : 000.7/2945 – Bapperida Tanggal 01 Juli 2024 perihal Surat Edaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kota Bogor berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Indikator Kinerja				Rencana Keria Tahun Kineria				Perse ntase
				Murni	Perubahan			Kineria
6.01.01 Kepuasan Pelayanan	**Program Penunjang Urusan**		**Indeks**	**3.5**		**22,456,935,516**	**24,175,749,404**	**0.00 7.65**
	Indeks	**3.5**						
	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah			**AA**				**12.50**
	Gap Analysis Kompetensi			**13.5**				**0.00**
6.01.01.2.01 Persentase pemenuhan	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat**		**Persen**	**100**	**100**	**168,672,200**	**150,562,200**	**0.00 -10.74**
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	6,547,800	6,547,800	0.00	0.00
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	162,124,400	144,014,400	0.00	-11.17
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai regulasi**	**Persen**	**100**	**100**	**17,475,225,337**	**21,074,074,304**	**0.00**	**20.59**
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima	Orang /	53	53	17,421,625,337	21,030,794,304	0.00	20.72
6.01.01.2.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Bulanan/ SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan/ Triwulana Semesteran SKPD	Lapora	1	1	53,600	43,280	0.0	-
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**887,033,000**	**741,740,000**	**0.00**	**-16.38**
6.01.01.2.	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang	Jumlah Orang yang Bimpingan Teknis Peraturan Perundang-	Orang	5	5	887,033 000	741,740 000	0.0	-
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**1,208,441,200**	**988,570,310**	**0.00**	**-18.19**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Rencana Kerja Tahun 2024				Persentase Perubahan (%)	
				Kinerja		Anggaran			
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Kinerja	Anggaran
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan	Jumlah Paket Peralatan dan Disediakan	Paket	4	4	126,633,200	95,295,600	0.00	-24.7
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan yang Disediakan	Paket	6	6	68,504,000	54,748,000	0.00	-
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Barang Penggandaan	Jumlah Paket Barang Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	57,710,000	44,535,000	0.00	-
6.01.01.2.06.0005	Penyelenggaraan Koordinasi Dan Konsultasi Ke	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi SKPD	Lapora	7	7	854,003,000	692,401,000	0.00	-
6.01.01.2.06.0006	Pemerintahan Pada Skpd	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokum	1	1	101,590,000	101,590,000	0.00	0.
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**Persen**	**100**	**100**	**952,540,900**	**981,126,300**	**0.00**	**3.00**
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	u ni	1	1	660,000,000	660,000,000	0.00	0.00
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Disediakan	Un	6	6	88,439,000	88,439,000	0.00	0.00
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan	Jumlah Unit Peralatan dan	Un it	1 9	1 9	204,101,300	232,686,700	0.00	14.01
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**633,701,279**	**624,101,279**	**0.00**	**-1.51**
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Lapora n	7	7	190,647,695	190,647,695	0.00	0.00
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Lapora n	6	6	443,053,584	433,453,584	0.00	-2.17
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup Inspektorat berkondisi baik**	**Persen**	**100**	**100**	**1,131,321,600**	**1,228,246,600**	**0.00**	**8.57**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Rencana Kerja Tahun 2024				Persentase Perubahan (%)	
				Kinerja		Anggaran			
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Kinerja	Anggaran
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	268,190,000	268,190,000	0.00	0.00
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	92	92	75,900,000	67,620,000	0.00	-10.91
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	1	787,231,600	892,436,600	0.00	13.36
6.01.02 Program Penyelenggaraan					**97.2**	**289,172,000**	**245,707,200**	**21.50**	
Persentase PD yang		**Persen**	**80**					**-15.03**	
		Persentase penanganan			**10**			**25.00**	
		Persentase tindak lanjut			**90**			**0.00**	
		Persentase tindak lanjut			**92**			**1.10**	
		Persen	**91**						
		Persentase Pengelolaan			**10**			**4.17**	
		Persen	**96**						
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan					**100**	**254,410,000**	**224,549,200**	**0.00**	
Persentase capaian target		**Persen**	**100**					**-11.74**	
Internal									
		Persentase capaian target			**100**			**0.00**	
		Jumlah pemantauan tindak lanjut	**2**		**2**			**0.00**	
		kegiatan							
		Jumlah pemantauan tindak lanjut	**2**		**2**			**0.00**	
		kegiatan							
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	6	6	20,092,400	20,092,400	0.00	0.00
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Laporan	36	36	16,990,000	16,990,000	0.00	0.00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Rencana Kerja Tahun 2024				Persentase Perubahan (%)	
				Kinerja		Anggaran			
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Kinerja	Anggaran
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Laporan	1	1	88,749,600	68,888,800	0.00	-22.3
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan	Jumlah Kesepakatan	Kesepakatan	1	1	128,578,000	118,578,000	0.00	-7.78
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan pengaduan yang diselesaikan sesuai kewenangan	Persen	100	100	34,762,000	21,158,000	0.00	-39.13
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugianrnnnegara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	1	23,964,000	21,158,000	0.00	-11.71
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	1	1	10,798,000	-	0.00	-100.00
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan,	Persentase Perangkat Daerah	Persen	100	100	599,599,000	421,717,000	0.00	-29.67
		Jumlah Unit Kerja yang diusulkan	Unit Kerja		3			50.00	
		Persentase Capaian MCP KPK			98			-9.47	
6.01.03.2.02	Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah			90	599,599,000	421,717,000	0.00	-29.67
		Jumlah Unit Kerja yang dilakukan	Unit Kerja		11			0.00	
		pendampingan Pelaksanaan							
		Jumlah kegiatan koordinasi,	kegiatan		2			0.00	
		monitoring							
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	36	36	442,054,000	308,118,000	0.00	-30.30
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	Perangkat Daerah	36	36	109,181,000	65,235,000	0.00	-40.25

	Indikator Kinerja		Rencana Keria Tahun Kineria			Perse ntase
			Murni	Perubahan		Kineria
6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	36 48,364,000	36 0.00		48,364,000 0.00
JUMLAH BELANJA DAERAH						

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Perangkat Daerah yang efektif, optimal, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen, dan disiplin yang tinggi dari Perangkat Daerah dan stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

D. DINAS PENDIDIKAN

BAB I	PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, baik antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan manajemen pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan.. Pendidikan dirumuskan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha yang berbasis sumber daya lokal.

Sehubungan dengan itu, Dinas Pendidikan Kota Bogor sebagai Instansi Pemerintah Daerah Kota Bogor yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan yang setiap tahunnya menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Pada awal tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Bogor menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk tahun anggaran 2024 dimaksudkan sebagai acuan pokok kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bogor yang disesuaikan dengan Renstra 2019-2024 atau dikembangkan dengan pertimbangan munculnya issue-issue strategis yang perlu diantisipasi, sehingga dapat melakukan upaya/terobosan perbaikan program kegiatan yang menuju kepada pola efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

A. Persiapan penyusunan;
B. Penyusunan rancangan awal;
C. Penyusunan rancangan;
D. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
E. Perumusan rancangan akhir; dan
F. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renja RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).

22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2018);

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);

26. Peraturan Walikota Bogor Nomor 155 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 20 Seri D);

27. Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 63 Seri E).

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai pedoman :

a. Pelaksanaan Pelayanan Perangkat;
b. Pelaksanaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan;
c. Penyusunan Rencana Anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun lalu

1.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
1.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Sasaran
3.2 Tujuan
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD pada dan Renstra SKPD pada tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Kota Bogor sebagai bentuk keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran program tersebut, masing - masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;	Rata-rata Lama Sekolah	10,74	10,64	99,07
		Harapan Lama Sekolah	13,83	13,45	97,25
	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;	APS 7-12	98,80	91,92	93,04
		APS 13-15	78,8	89,48	113,55
		APM PAUD/RA	37,5	35,5	94,67
		APM SD/MI/Paket A	99,66	89,95	90,26
		APM SMP/Mts/Paket B	86	83,1	96,63
2	Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntable	Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	A	A	100,00
	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Pendidikan Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas	78	73,52	94,26

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Bogor terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas
penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan penyelenggaraan pendidikan antara lain : Pemerintah,

DPRD, LSM, Dewan Pendidikan, organisasi profesi, dan sektor swasta, dan masyarakat / wali murid;

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan pendidikan dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dalam menyusun konsep dan kebijakan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat melalui mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan pendidikan di tingkat Kabupaten / Kota, Propinsi, dan di tingkat pusat oleh Bappeda dan Dinas Pendidikan serta Depdiknas

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan di bidang pendidikan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan lingkup Dinas Pendidikan Kota Bogor meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan pendidikan, meliputi : Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah (RPDK) data pokok pendidikan (DATADIK), dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan pendidikan;
3. Meningkatnya koordinasi perencanaan pendidikan dalam lingkup SKPD (Dinas Pendidikan);
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi melalui Jardiknas.

Namun demikian peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan pendidikan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan
2. Masih lambatnya informasi dalam hal permintaan RENJA oleh Bappeda sebagai lembaga perencanaan,sementara harus secepatnya diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat sedangkan perencanaan sangat diperlukan data yang akurat dengan waktu yang memadaai sehingga tidak terkesan terburu – buru;
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara SKPD dengan Bappeda;

4. Internal SKPD (Disdik): lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar Bidang dalam SKPD dan rendahnya kapasitas serta komitmen masing – masing bidang pada proses perencanaan pendidikan;

Disamping itu Dinas Pendidikan Kota Bogor khususnya masih merasakan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pendidikan.

BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1 Sasaran

Dirumuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tentunya memperhatikan kondisi layanan pendidikan (profil) di Kota Bogor, sehingga akan diketahui awal dan akhir pencapaian dari masing-masing indikator pendidikan. Dengan kata lain sasaran akan memberikan informasi perubahan apa dan seberapa besar perubahan yang terjadi di Bidang Pendidikan di Kota Bogor. Sasaran yang akan dicapai dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikutu;

a. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan di semua jenjang
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
c. Menyediakan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khusunya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (Dimas).
d. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
e. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang pendidikan
f. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
g. Meningktkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan.

3. 2 Tujuan

Untuk meoperasionalkan visi dan misi sehingga menjadi lebih konkrit, maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi sebagai berikut :

a. Tujuan yang dirumuskan untuk mencapai misi 1 (menuntaskan wajib belajar 12 tahun) adalah :
    1. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan di semua jenjang.
    2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Menyediakan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atauu tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khusunya bagi masyarakat putus sekolah melalu penyelnggaraan pendidikan Non Formal dan Informal.

b. Tujuan yang dirumuskan untuk mencapai misi 2 (meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan) adalah :
   1. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
   2. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang pendidikan.
   3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

c. Tujuan yang dirumuskan untuk mencapai misi 3 (meningkatkan kualitas sumber daya Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam upaya mewujudkan layanan pendidikan yang baik) adalah :
   Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam renstra disusun berdasarkan hasil analisis layanan pendidikan yang dijabarkan dan diformulasikan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Dalam Undang-undang No. 25/2004 tentang SPPN disebutkan secara jelas bahwa setiap rencana kerja (Renja) SKPD harus berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD sehingga untuk memudahkan penyusunannya, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra SKPD khusunya Renstra Disdik Kota Bogor ini telah diselaraskan dengan Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007.

Perumusan program dan kegiatan dimulai dengan memformulasikan prioritas kebijakan yang akan menjadi panduan penyusunan target/sasaran. Setelah kegiatan disusun berdasarkan sasaran yang akan dicapai, maka ditentukan program yang dapat menaungi kegiatan tersebut yang sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Secara garis besar, Rencana kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Bogor dapat diklasifikasikan atas dua kelompok, yaitu Rencana non program, kegiatan yang menyangkut kegiatan administrasi perkantoran dan Rencana Program, yaitu kegiatan yang berhubungan langsung dengan upaya peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan.

3.2.1 Rencana non program, yaitu kegiatan yang menyangkut kegiatan administrasi perkantoran, yang meliputi:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.2.2 Rencana Program, yaitu kegiatan yang berhubungan langsung dengan upaya peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan, yang meliputi:

- Program Pengelolaan Pendidikan

Rumusan Rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2024 Dinas Pendidikan Kota Bogor dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
RKPD PERUBAHAN 2024
DINAS PENDIDIKANKOTA BOGOR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
						DINAS PENDIDIKAN				634.315.428.750,00	831.474.016.086,00	843.129.167.733,00				358.987.553.820,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				634.315.428.750,00	831.474.016.086,00	843.129.167.733,00				358.987.553.820,00
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				634.315.428.750,00	831.474.016.086,00	843.129.167.733,00				358.987.553.820,00
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A 3.50 Poin	3.50 A Poin	384.598.947.300,00	438.105.996.277,00	454.628.801.564,00				23.640.800.000,00
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	100 %	100 %	107.800.000,00	77.860.000,00	77.860.000,00				100.000.000,00
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	107.800.000,00	77.860.000,00	67.660.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah Lingkup Perangkat Daerah	A Point	A Point	368.550.308.960,00	427.595.102.450,00	427.595.102.450,00				200.000.000,00
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3500 Orang/bulan	4240 Orang/bulan	368.474.189.060,00	427.518.862.550,00	444.121.137.837,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD		0,00
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	76.119.900,00	76.239.900,00	76.239.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	6.607.535.500,00	5.519.516.600,00	5.519.516.600,00				7.645.800.000,00
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	199.997.500,00	162.302.500,00	162.302.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		220.000.000,00

	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	151.154.000,00	122.686.100,00	122.686.100,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		220.000.000,00
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	324.225.000,00	249.975.000,00	216.225.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		186.000.000,00
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	14.841.000,00	14.841.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19.800.000,00
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.874.870.000,00	2.665.831.000,00	2.665.831.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.000.000.000,00
	1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	3.039.289.000,00	2.303.881.000,00	2.280.961.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000.000,00
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 %	100 %	4.597.653.700,00	429.809.800,00	429.809.800,00				9.300.000.000,00
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	100 Unit	4.597.653.700,00	429.809.800,00	423.209.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9.300.000.000,00

	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	1.152.998.640,00	2.443.836.427,00	2.443.836.427,00				2.430.000.000,00
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	522.650.000,00	387.660.835,00	387.660.835,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00

	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	630.348.640,00	2.056.175.592,00	2.050.175.592,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.680.000.000,00
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100 %	100 %	3.582.650.500,00	2.039.871.000,00	2.039.871.000,00				3.965.000.000,00
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	189.200.000,00	141.900.000,00	141.900.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		170.000.000,00
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	449.552.500,00	369.125.000,00	369.125.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		495.000.000,00
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	2.943.898.000,00	1.528.846.000,00	1.528.846.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.300.000.000,00
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/ MTs/ Paket B APK SD / MI/ Paket A APK PAUD/ RA	52,00 114,3 106.00 % % angka	106.00 114,3 52,00 angka % %	249.716.481.450,00	393.368.019.809,00	388.500.366.169,00				335.346.753.820,00

	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sarana Prasarana Sekolah SD berkondisi baik Persentase SD Terakreditasi A Persentase Sekolah (SD) Sehat (%) Persentase siswa SD miskin yang mendapatkan Bantuan Sosial Siswa Miskin	0.39 % 24 % 25 siswa 55 % 79 % 96 %	0.35 % 24 % 78 % 96 %	154.387.600.000,00	209.481.079.076,00	209.481.079.076,00				267.250.000.000,00
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000.000,00
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah										
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	3 Ruang	1.700.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.700.000.000,00
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	7 Unit	3.500.000.000,00	5.029.149.500,00	5.579.149.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		4.500.000.000,00
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah										
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	4.044.288.800,00	2.831.832.400,00	3.127.832.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000.000,00
	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	13 Unit	3.200.000.000,00	1.860.896.500,00	1.860.896.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000.000,00
	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar										
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13693 Peserta Didik	13693 Peserta Didik	4.314.600.000,00	21.831.320.000,00	22.033.820.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja		5.000.000.000,00
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	212 Peserta Didik	212 Peserta Didik	212.002.800,00	235.515.700,00	235.515.700,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		950.000.000,00
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar										
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	94 Orang	94 Orang	241.456.800,00	3.154.534.240,00	2.938.922.680,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar										
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	150 Orang	870.000.000,00	502.210.800,00	502.210.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah										

							Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	280 Satuan Pendidikan	281 Satuan Pendidikan	650.050.000,00	332.316.600,00	332.316.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	210 Satuan Pendidikan	208 Satuan Pendidikan	47.000.000.000,00	131.050.216.840,00	121.322.184.760,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja		140.000.000.000,00
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	522 Orang	522 Orang	1.262.851.600,00	818.919.600,00	818.919.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.550.000.000,00
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru										
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	33 Ruang	15 Ruang	26.500.000.000,00	11.200.000.000,00	11.200.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34.500.000.000,00
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik										
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	280 Satuan Pendidikan	281 Satuan Pendidikan	1.252.350.000,00	824.020.600,00	824.020.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.300.000.000,00
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah										
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	110 Ruang	99 Ruang	59.040.000.000,00	28.210.146.296,00	31.149.762.296,00	Kota Bogor, Semua Kecamata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65.000.000.000,00

													n, Semua Kel/Desa			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sarana Prasarana Sekolah SMP berkondisi baik Persentase Sekolah (SMP) Sehat (%) Persentase siswa SMP miskin yang mendapatkan Bantuan Sosial Siswa Miskin Persentase SMP Terakreditasi A	14 Siswa 4,20 % 60 % 78 % 95,6 %	24 % 4,20 % 78 % 95,6 %	74.786.242.890,00	143.965.626.823,00	143.965.626.823,00				43.429.068.000,00
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)										
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	2 Unit	33.000.000.000,00	58.528.373.421,00	56.623.947.321,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0,00
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah										
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	254.530.000,00	0,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000,00
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium										
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	508.438.000,00	0,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		650.000.000,00
	1	01	02	2.02	0010	Pembangunan Fasilitas Parkir										

							Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	254.530.000,00	0,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		650.000.000,00
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah										
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	85 Ruang	85 Ruang	11.663.938.000,00	7.472.682.168,00	7.472.682.168,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.500.000.000,00
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	9 Unit	2.299.462.490,00	1.386.828.800,00	1.386.828.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.440.000.000,00
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah										
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1.941.612.500,00	1.004.405.190,00	1.004.405.190,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.500.000.000,00
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah										
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	2.655.000.000,00	0,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.000.000.000,00
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama										

							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18382 Peserta Didik	1042 Peserta Didik	8.479.900.000,00	33.315.440.000,00	35.654.036.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja Insentif Fiskal		10.080.785.000,00
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	6625 Peserta Didik	6625 Peserta Didik	1.376.500.000,00	1.377.987.600,00	1.377.987.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.582.975.000,00
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	85 Orang	85 Orang	9.000.000,00	2.369.588.360,00	2.369.588.360,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.200.000.000,00
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450 Orang	450 Orang	910.000.000,00	665.234.800,00	665.234.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.001.000.000,00
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah										
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	126 Satuan Pendidikan	126 Satuan Pendidikan	813.500.000,00	530.091.100,00	530.091.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		950.000.000,00

	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	9.177.120.000,00	36.294.386.084,00	36.959.386.084,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja		10.510.183.000,00
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	336 Orang	336 Orang	577.500.000,00	476.148.500,00	476.148.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		664.125.000,00
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik										
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	42016 Satuan Pendidikan	42016 Satuan Pendidikan	865.211.900,00	544.460.800,00	544.460.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.200.000.000,00
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Sarana Prasarana PAUD/TK berkondisi baik Persentase Sekolah (PAUD/TK) Sehat Persentase TK Terakreditasi A	21 % 46 % 71 % 80 %	18 % 46 % 77 %	10.581.516.160,00	17.680.205.652,00	17.680.205.652,00				12.670.000.000,00
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD										
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	1.892.200.000,00	538.543.000,00	538.543.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		2.950.000.000,00

	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD										
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	350.000.000,00	283.696.500,00	283.696.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD										
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	299 Peserta Didik	299 Peserta Didik	787.024.360,00	9.842.636.152,00	9.738.039.552,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP PAUD DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja		800.000.000,00
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD										
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1500 Orang	1500 Orang	5.571.240.000,00	5.149.440.000,00	5.149.440.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.700.000.000,00
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD										
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	540 Orang	540 Orang	1.136.149.800,00	931.198.000,00	931.198.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.300.000.000,00
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD										
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	400 Satuan Pendidikan	400 Satuan Pendidikan	281.926.600,00	281.926.600,00	265.728.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		720.000.000,00

	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD										
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	2 Satuan Pendidikan	0,00	235.060.000,00	235.060.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP PAUD		250.000.000,00
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD										
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	708 Orang	708 Orang	562.975.400,00	417.705.400,00	417.705.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000,00
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase LKP (Lembaga Kursus Pendidikan) yang terakredita Persentase PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang terakreditasi	33 Satdik 37 %	35 Satdik 38 %	9.961.122.400,00	22.241.108.258,00	22.241.108.258,00				11.997.685.820,00
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan										
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1364 Peserta Didik	1364 Peserta Didik	2.968.550.000,00	17.910.420.000,00	18.019.920.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja		3.000.000.000,00
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	240 Orang	240 Orang	1.073.500.000,00	1.053.600.000,00	1.053.599.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.200.000.000,00
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										

							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	280 Orang	280 Orang	421.079.800,00	231.874.100,00	231.873.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		450.000.000,00
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	41 Satuan Pendidikan	41 Satuan Pendidikan	1.041.238.800,00	736.480.800,00	736.480.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.620.000.000,00
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	1 Satuan Pendidikan	0,00	406.570.000,00	406.570.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		410.000.000,00
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	82 Orang	82 Orang	140.000.000,00	92.197.000,00	92.197.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00
	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	2.500.000.000,00	653.527.558,00	653.527.558,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.703.343.820,00
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											

							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	7000 Peserta Didik	7000 Peserta Didik	176.438.800,00	176.438.800,00	176.438.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
	1	01	02	2.04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah										
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	1.640.315.000,00	980.000.000,00	980.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		264.342.000,00
	J U M L A H									**634.315.428.750,00**	**831.474.016.086,00**	**843.129.167.733,00**				**358.987.553.820,00**

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan tahun 2024, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2024 dengan mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2019 - 2024

Peran perencanaan tingkat Kabupaten di era otonomi dalam rangka meningkatkan pengembangan Pendidikan sangat penting, baik bagi propinsi maupun nasional. Kerena hanya Kabupaten yang dapat melihat adanya kesenjangan tingkat kemajuan pendidikan wilayahnya. Disamping itu, masalah-masalah pendidikan yang paling mendasar dalam pengembangan sumber daya manusia Kabupaten merupakan sumbangan yang berharga dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan baik tingkat propinsi maupun nasional

Dukungan masyarakat secara umum diperlukan karena berbagai hasil pendidikan akan dimanfaatkan atau berdampak pada kepentingan kehidupan masyarakat. Dukungan kuat dari pemerintah didasarkan pada kewajibannya sebagai pemberi jaminan terhadap kelangsungan pendidikan masyarakat. Perencanaan pembangunan dibidang pendidikan disusun berdasarkan ketersediaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Pendidikan, dengan mendasar pada kerangaka regulasi yang berlaku.

Semoga Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai

tujuan pembangunan Pendidikan Kota Bogor Tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

E. DINAS KESEHATAN

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bogor mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.

Prioritas Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024 diarahkan pada 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; dan 5) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024 mengikuti sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
19. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 159 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 159).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan kesehatan di Kota Bogor. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024.
2. Menetapkan Strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan serta program dan kegiatan Tahun 2024.
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah dan

menciptakan efisiensi, efektif dan berkeadilan serta berkelanjutan dalam alokasi sumberdaya pada pembangunan kesehatan di Kota Bogor.

4. Mewujudkan keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan 2024 Dinas Kesehatan Kota Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB 5 PENUTUP

BAB 2
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Penanganan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024 melalui 5 program 19 kegiatan, dan 67 sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 256.274.623.739 dan serapan anggaran sebesar 92,39% (Rp. 236.759.762.099) yang bersumber dari APBD maupun diluar APBD. Penjabaran program-program dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kesehatan untuk mendukung misi 1 dan 2 RPJMD Kota Bogor 2019-2024 yaitu mewujudkan kota bogor yang sehat dan mewujudkan kota bogor yang cerdas adalah sebagai berikut :

2.1.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Tabel 2. 1 Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2022

INDIKATOR	2022		CAPAIAN (%)
	TARGET	REALISASI	
Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	65,00	73,26	87,29%
Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	3,00	3,72	76,02%
Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	3,20	3,89	78,49%
Persentase Balita berstatus gizi normal	86,30	85,86	99,49%
Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	90,00	71,32	79,24%
Prevalensi Hipertensi	7,20	7,46	103,6%
Case Fatality Rate Covid-19	1,20	0,11	190,84%
Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	0,12	0,16%	131,40%
Akses sanitasi terhadap air bersih	99,40	98,93%	99,53%
Akses jamban sehat	82,00	82,36%	100,4%
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	93,00	96,11	103,35%

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat diintervensi oleh 4 (empat) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

    1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

       Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap 3 (tiga) puskesmas meliputi Puskesmas Tegal Gundil, Puskesmas Tanah Sareal, dan Puskesmas Pembantu Bogor Baru.

    2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

       Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Farmasi/Cold Room.

    3) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

       Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar tersedianya biaya listrik P-2/TM kantor pemerintah besar, DED Puskesmas dan Labkesda, Mobil Promkes, Pusling Roda Dua, Air bersih PDAM untuk Pusat Isolasi, Air Galon aqua galon+isi untuk Pusat Isolasi, Cover Hp anti air untuk Pusat Isolasi, Emergency lamp untuk Pusat Isolasi, Feasibility Study RSUD Baru, Feasibility Study untuk Lokasi Puskesmas, Kabel Roll untuk Pusat Isolasi, Payung untuk Pusat Isolasi, Pulsa untuk Pusat Isolasi, Termometer Ruang dan Kelembaban untuk Pusat Isolasi, dan Termometer suhu berkabel untuk Pusat Isolasi.

    4) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

       Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar tersedianya Set Gawat Darurat termasuk EKG, Set Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Set Laboratorium, Set Perawatan Pasca Persalinan, Set Persalinan, dan Alat TCM guna memenuhi kebutuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik pada Puskesmas di Kota Bogor.

    5) Pengadaan Obat, Vaksin

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk menjamin ketersediaan obat-obatan dan vaksin sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan dasar di 25 Puskesmas se-Kota Bogor yang meliputi pelayanan reguler dan pelayanan obat untuk program kesehatan seperti penyakit tuberkulosis, penyakit hipertensi dan diabetes, serta penyakit lainnya.

Pemenuhan ketersediaan obat di Puskesmas telah dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan obat, pengadaan, penyimpanan serta pendistribusian obat. Pada tahun 2022 ditargetkan pemenuhan obat dengan tingkat ketersediaan selama 18 bulan mencapai 97%, yang dapat dipenuhi dari Anggaran APBD sebesar Rp. 2.124.577.085 dan Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kefarmasian sebesar Rp. 2.792.051.000.

Capaian realisasi hasil pengadaan obat sebesar 98,9%. Silpa dari anggaran APBD disebabkan oleh terdapat satu jenis obat (prednison tablet) yang tidak dapat dilakukan pengadaan dikarenakan terjadi kekosongan obat ditingkat penyedia. Sedangkan, penyebab silpa anggaran DAK Fisik dikarenakan oleh persediaan obat pada awal tahun 2022 masih memadai, dan perencanaan kebutuhan obat masih mengacu pada pemakaian obat tahun 2021 dengan pemakaian rata rata perbulan masih sekitar 30% – 50% dari pemakaian rata rata perbulan pada masa sebelum kondisi pandemi covid-19, sehingga jumlah alokasi DAK Fisik Pelayanan Kefarmasian tidak digunakan seluruhnya. Selain itu, keterbatasan masa kedaluarsa obat yang tersedia di tingkat penyedia hanya memungkingkan pengadaan untuk *buffer stok* sebesar 6 – 12 bulan.

6) Pengadaan Bahan Habis Pakai

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar terpenuhinya kebutuhan bahan habis pakai dalam menunjang program penyakit menular dan tidak menular. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pengadaan bahan habis pakai yaitu 1) penyediaan alat deteksi dini penyakit tidak menular bagi 612 posbindu di 25 Puskesmas Kota Bogor

berupa *alcohol swab, blood glucose test strip,* dan *blood lancet safety*; 2) Pengadaan *Catridge TCM*; 3) Pengadaan Reagen HIV/Syphilis Duo; 4) Pengadaan bahan habis pakai untuk laboratorium kesehatan daerah, penganan covid-19, kegiatan penyakit menular, dan kegiatan pusat isolasi non fasyankes; serta 5) Pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan Vaksinasi.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

      Tujuan dari sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah untuk meningkatkan jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu : 1) Workshop penanganan kegawatdaruratan maternal; 2) Update APN; 3) Orientasi simatneo, MPDN, dan E-Kohort tingkat Kab/Kota; 4) Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP) yang dilaksanakan melalui kegiatan upaya Kesehatan lingkungan dan Kesehatan kerja; 5) *Inhouse Training* maternal neonatal bagi tenaga kesehatan di RS Kab/Kota dan Puskesmas (OJT USG Obstetri Dasar dan Terbatas bagi dokter); 6) Orientasi SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital).

   2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

      Tujuan dari sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah untuk meningkatkan jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin yaitu : 1) Koordinasi dan diseminasi program kesehatan keluarga; dan 2) Pertemuan Pengkajian Audit Maternal Perinatal (AMP).

   3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

      Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir yaitu : 1) Orientasi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, dan

Bayi Baru Lahir pada masa pandemi; dan 2) Workshop penanganan kegawatdaruratan neonatal.

4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

   Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pelayanan kesehatan balita yaitu penguatan Puskesmas Ramah Anak dan Mampu Pelayanan KTA/P yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan pada balita sesuai standar.

5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

   Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu : 1) Rapat Koordinasi Tim pelaksana penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah; 2) Penjaringan peserta didik kelas 1, 7 dan 10 oleh Puskesmas di Kota Bogor; 3) Rapat Koordinasi penjaringan kesehatan anak sekolah pada usia pendidikan dasar; dan 4) Penjaringan siswa kelas 10 yang mendapat pelayanan kesehatan.

6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

   Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu : 1) Penyediaan Media KIE : Brosur Penyakit Tidak Menular; 2) Pembuatan Buku Pedoman Kesehatan : Penyakit Tidak Menular, dengan tujuan sebagai acuan secara berjenjang bagi pengelola program, pemegang program dan kader posbindu PTM untuk dapat menyelenggarakan program P2PTM secara optimal; 3) Pemantapan Tata Laksana Program Indera; 4) Refreshing Pencatatan dan Pelaporan : Pamong Walari melalui Aplikasi Pamong Walagri; 5) Workshop Penyakit Degeneratif/ Pernapasan/ Imunologi/ Kanker dan Kelainan Darah; 6) Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi Surveilans Kasus PTM; dan 7) Kegiatan Sosialisasi dan Deteksi FR PTM bagi Masyarakat Umum dan Khusus.

7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

   Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu : 1) Orientasi Pelayanan Kesehatan Santun

Lansia; dan 2) Workshop Kader Posbindu Lansia, dengan tujuan agar kader posbindu lansia mampu melaksanakan administrasi posbindu lansia, mampu memberikan informasi kesehatan kepada lansia, dan mampu melakukan kegiatan posbindu lansia.

8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah dilaksanakannya tindak lanjut berupa rujukan dari Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) ke Puskesmas atas masyarakat yang berpotensi sakit PTM agar segera mendapatkan penanganan kesehatan di FKTP sesuai standar kesehatan sehingga diperoleh prognosa kesembuhan

yang lebih baik. Penderita Hipertensi maupun pasien kronis PTM lainnya mendapatkan tata laksana penanganan kesehatan sesuai standar serta dilakukan kohort dan pemantauan ketat untuk mencegah timbulnya komplikasi atas PTM yang dimiliki, serta meminimalisir kecacatan yang ditimbulkan maupun kematian. Penanggulangan PTM yang dilakukan membutuhkan adanya pencatatan kasus PTM yang komprehensif dan berkualitas melalui system aplikasi yang terhubung antara Puskesmas maupun FKTP lainnya dengan seluruh Rumah Sakit se Kota Bogor, sehingga dibutuhkan dukungan pendanaan berupa : 1) Penyediaan Media KIE : Blanko Form Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular, Brosur Penyakit Tidak Menular, Lembar Balik - Penyakit Tidak Menular; 2) Penyediaan Buku Saku : Manual Book Surveilance PTM; 3) Refreshing Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Surveilance PTM RS; 4) Workshop Penyakit Degeneratif; dan 5) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer : Honor Petugas Entri Data Surveilance PTM RS (Non ASN).

9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Tujuan sub kegiatan ini untuk menekan timbulnya penyakit Diabetes Melitus (DM) pada masyarakat yang pada prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk terjadinya keluhan pada penderitanya, dimulai dengan kondisi faktor risiko yang dialami seperti obesitas, tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, kadar kolesterol tinggi yang dialami

seseorang secara bersamaan, namun jika kondisi tersebut dibiarkan berlangsung lama dan tidak diintervensi, maka akan berkembang menjadi PTM seperti DM, Hipertensi, Stroke, dll, sehingga dibutuhkan penguatan atas kegiatan deteksi dini maupun tata laksana penanganan kasus yang sesuai standar, dengan dukungan melalui sub kegiatan ini, yaitu : 1) Penyediaan Blanko Form Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular; 2) Refreshing Pencatatan dan Pelaporan FR PTM Melalui Aplikasi SI PTM; 3) Pertemuan Integrasi Program dalam Akselerasi Pencapaian SPM; dan 4) Refreshing Tata Laksana Penanganan DM di Tingkat FKTP.

10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Tujuan sub kegiatan ini untuk meningkatkan penanganan terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan profesi dan keilmuan tenaga kesehatan agar menjadi satu kesatuan konsep perawatan

atau pengobatan khususnya dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat. Seluruh Puskesmas di Kota Bogor telah menjalankan Program ACT *(Assertive community Treatment)* yang berkerjasama dengan RS. Marzuki Mahdi, Dinas Sosial maupun pihak Kelurahan berupa pelayanan rujukan Kesehatan Jiwa maupun pendampingan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kekambuhan ODGJ yang telah stabil.

Telah terbentuk Desa Siaga Sehat Jiwa sebanyak 17 kelurahan dibawah pendampingan FIK UI (Fakultas Ilmu Keperawatan Jiwa UI). Kegiatan tersebut membutuhkan dukungan dana yang diperoleh dari sub kegiatan ini melalui : 1) Penyediaan Media KIE : Brosur Kesehatan Jiwa, dengan tujuan untuk membantu dalam penyajian informasi sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan sasaran dalam meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan jiwa khususnya skizofrenia melalui media KIE leaflet; dan 2) Pemantapan Program Assertive Community Traetment (ACT).

11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit Tuberkulosis sehingga dapat menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 1) Pertemuan Virtual Penguatan SITB, dengan tujuan memberikan penjelasan kepada pengelola data dan pemangku kebijakan di Fasyankes terkait pencatatan dan pelaporan data TB pada SITB. 2) Pertemuan Virtual Monitoring dan Evaluasi TB, dengan tujuan mengevaluasi kegiatan program TB pada Triwulan 1 di Kota Bogor dan meningkatkan layanan TB di Puskesmas se-Kota Bogor.

Kegiatan untuk mencapai sub kegiatan ini secara spesifik didukung dengan berbagai kegiatan antara lain : 1) Peningkatan kapasitas SDM Puskesmas dan Rumah sakit serta klinik yang ada di Kota Bogor. 2) Melakukan pertemuan dengan fasyankes untuk menyepakati alur pelayanan mulai dari jejaring Puskesmas, Puskesmas dan Rumah Sakit, serta pengembalian pasien ke FKTP. 3) Berbagai pertemuan dilakukan untuk membangun system pelayanan TB di Kota Bogor, agar tujuan dan indikator dapat tercapai. 4) Pelaksanaan penandatangan MoU dengan RS yang belum memiliki MoU dengan Dinas Kesehatan, sehingga pada

Tahun 2022 seluruh RS telah berMoU dengan Dinas Kesehatan. dan 5) Kolaborasi dengan elemen masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penelusuran kasus TB yang *Lost Follow up.* Kegiatan penelusuran ini menjadi kunci penting juga dalam penanggulangan TB

12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yaitu : 1) Penguatan SIHA Virtual dengan tujuan agar peserta mampu menerapkan aplikasi SIHA 1.7 pada layanan di Kota Bogor, baik dari segi pencatatan maupun pelaporan. 2) Refresh Layanan HIV Virtual dengan tujuan meningkatkan pelayanan program HIV/AIDS dan IMS di 25 Puskesmas, 9 Rumah Sakit, dan Lapas.

Ruang lingkup kegiatan HIV pada tahun 2022 melibatkan Puskesmas, Rumah Sakit dan LSM, koordinasi dan komunikasi berjalan dengan baik menjadi kunci keberhasilan pencapaian SPM HIV pada tahun 2022. Keberhasilan ini dapat dilihat dari Seluruh RS pada tahun 2022 telah berMOU dengan Dinas Kesehatan untuk bersedia menjadi tempat pelayanan tes HIV. Serta adanya penambahan pelayanan PDP sebanyak 5 Faskes. Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM juga berdampak luar biasa dalam pencapaian Indikator serta pencapaian SPM HIV. Dukungan dari LSM penjangkau dan pendamping juga berperan dalam pencapaian di HIV.

13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

    Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar tersedianya pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum dan khusus saat terjadi bencana dan keadaaan darurat lainnya sehingga dapat melakukan kesiapsiagaan pertolongan pertama.

14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

    Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi : 1) Pengadaan Makanan Tambahan (APBD) dengan tujuan untuk pemulihan dan menjaga status gizi kelompok rawan melalui pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan). 2) Sosialisasi Bulan Penimbangan Balita (BOK Stunting), dengan tujuan untuk meningkatkan peran lintas sektor dalam menggerakkan kegiatan Bulan Penimbangan Balita sehingga sasaran Balita yang ditimbang tercapai maksimal. 3) Validasi Hasil Pengukuran (BOK

    Stunting), dengan tujuan diperolehnya data antropometri balita stunting yang valid di kelurahan lokus hasil bulan penimbangan balita. 4) Pelatihan surveilans gizi untuk kader (e-PPGBM), dengan tujuan meningkatkan kapasitas kader dalam kegiatan Surveilans Gizi. 5) Evaluasi hasil pengukuran, dengan tujuan untuk menggali faktor pencetus dan faktor keberhasilan penanganan stunting. 6) Diseminasi dan publikasi hasil pengukuran dengan tujuan untuk mempublikasikan kondisi status gizi Balita di Kota Bogor 7)

Pertemuan koordinasi surveilans gizi untuk petugas. 8) Sosialisasi ruang laktasi di fasilitas umum. 9) Rapat koordinasi lintas program dalam pemantauan tumbuh kembang balita cegah stunting, dengan tujuan terkoordinasinya pemantauan tumbuh kembang termasuk pencegahan dan penanganan stunting untuk lintas program. 10) Orientasi pemberian tablet tambah darah remaja putri bagi lintas sektor. dan 11) Pengadaan Antropometri Kit.

Kegiatan lainnya yang mendukung program pelayanan Kesehatan gizi masyarakat adalah upaya program kesehatan lingkungan melalui kegiatan diantaranya : 1) Peningkatan Kapasitas Petugas terkait penyehatan air dan sanitasi. 2) Pertemuan Koordinasi Percepatan ODF dan 5 Pilar STBM tingkat Kecamatan. 3) Pertemuan Koordinasi Percepatan ODF dan 5 Pilar STBM tingkat Kota. 4) Pendampingan keberlanjutan SBS/pendampingan Intervensi kesehatan lingkungan.

15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar meningkatnya pelayanan kesehatan kerja dan olahraga. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi : 1) Cetak Buku Pedoman Kesehatan Kerja dengan tujuan agar tersedianya buku saku penyelenggaraan POS Upaya Kesehatan Kerja (POS UKK) bagi Petugas Kesehatan; 2) Pertemuan Perencanaan dan Monev Program Kesehatan Kerja; 3) Pertemuan Perencanaan dan Monev Program Kesehatan Olahraga; 4) Pemberian honorarium instruktur senam dengan tujuan agar terlaksananya kegiatan senam pagi untuk seluruh karyawan di Dinas Kesehatan.

16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, udara, air, dan tanah. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi :

1) Belanja alat/bahan untuk kegiatan desinfeksi dan pengelolaan limbah medis pusat isolasi; 2) Belanja bahan plastik kuning untuk pengelolaan limbah medis vaksinasi massal; 3) Cetak buku kesehatan lingkungan; 4) Pelatihan

Wirausaha sanitasi; 5) Workshop sistem pelaporan berbasis web program kesehatan lingkungan bagi sanitarian puskesmas; 6) Pemeriksaan kualitas air, makanan pusat isolasi dengan tujuan agar terlaksananya pengawasan kualitas air dan makanan pada pusat isolasi; 7) Pemutakhiran data sanitasi; 8) Pengelolaan limbah medis vaksinasi massal Covid-19; 9) Pengelolaan limbah medis pusat isolasi; 10) Penyediaan jasa laundry linen infeksius pusat isolasi non fasyankes; 11) Penyediaan jasa laundry linen vaksinasi massal; 12) Pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pengelolaan Limbah B3 (BOK); 13) Pertemuan percepatan penarikan / penghapusan alat kesehatan bermerkuri (BOK); 14) Pemeriksaan kualitas air minum.

17) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

    Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan adalah pengadaan *roll up banner*. Tujuan dari pengadaan *roll up banner* adalah agar tersedianya alat bantu dalam menampilkan pesan atau informasi kesehatan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait informasi kesehatan dan dapat membentuk perilaku masyarakat yang patuh dalam menerapkan perilaku sehat dikehidupan sehari-hari.

18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

    Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar tercapainya penguatan kegiatan dan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas dan terselenggaranya wadah untuk mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas Kota Bogor.

19) Pengelolaan Surveilans Kesehatan

    Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar tersedianya biaya pengembangan Website P3MS sehingga data pelaksanaan imunisasi dapat diperoleh secara cepat dan akurat.

20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ODMK yaitu : 1) Pertemuan Sosialisasi Pelaporan Online Program Kesehatan Jiwa; dan 2) Pertemuan Tata Laksana Gangguan Mental Emosional.

21) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu 1) Penyediaan Media KIE : Brosur Kesehatan Jiwa; dan 2) Pertemuan Pengenalan ASSIST - Deteksi Dini NAPZA dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang Napza, dan dapat berperan serta dalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa dan Napza di FKTP dan masyarakat, meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan Napza di lingkungan masyarakat umum dan masyarakat khusus, serta mampu melakukan deteksi dini khususnya dengan instrument ASSIST.

22) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar terlaksananya monitoring dan evaluasi pada pengelolaan upaya kesehatan khusus meliputi pelayanan kesehatan haji, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, rekam medis, laboratorium, radiografer, program PIS-PK, quickwins, dan Puskesmas Rawat Inap.

23) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan penanganan terintergrasi dan terkoordinasi antara fasyankes dalam pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu : 1) Koordinasi lintas program tentang penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa dan NAPZA tingkat Kota; 2) Koordinasi Program Penyakit Tidak Menular serta masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA bagi Petugas Puskesmas; 3) Bimtek Pelaksanaan Kegiatan PTM dan Keswa NAPZA ke Puskesmas; 4) Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Tidak Menular di Puskesmas; 5) Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Tidak Menular di Rumah Sakit; 6) Pembentukan kader PAMONG

WALAGRI OPD di wilayah puskesmas; 7) Bimtek Penyakit Menular (TB, HIV, Surveilans, DBD Zoonosis, dan Imunisasi); 8) Pertemuan koordinasi fasyankes (TB, HIV dan Imunisasi); 9) Pertemuan Programmer ISPA Diare; dan 10) Penyelidikan Epidemiologi KLB dan Covid-19.

24) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar terlaksananya pengelolaan jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di fasilitas kesehatan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat meliputi : 1) Penyediaan Jasa Konsultasi Administrasi Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin. 2) Penyediaan Jasa Konsultasi Pemeliharaan Aplikasi Dikaper Kota Bogor. 3) Pemeliharaan dan Pengelolaan Aplikasi PBI APBD Kota Bogor. 5) Rapat Koordinasi Lintas Sektor Program Jaminan Kesehatan Dalam penguatan *Universal Coverage*. 6) Rekonsiliasi Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin. 7) Rekonsiliasi klaim premi PBI APBD Kota Bogor. 8) Monev Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin di Fasyankes Tingkat I. 9) Monev Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin di Fasyankes Tingkat II. 10) Dialog Stakeholder Program Jaminan Kesehatan. 11) Verifikasi data Jaminan Kesehatan Kota Bogor oleh Kader Kesehatan. 12) Penyediaan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BU Kelas 3 (PD Pemda dan Bankeu Prov Jabar tahun 2021/2022). 13) Penyediaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 (Bantuan Iuran 2022).

25) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Tujuan dari penyelenggaraan kota sehat yaitu agar tercapainya kondisi kota untuk hidup bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya program-program dari berbagai sektor yang berdampak kepada meningkatnya sarana produktivitas serta ekonomi masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan kelompok kerja kecamatan dan kelurahan sehat dan koordinasi pelaksanaan kegiatan kota sehat yang

dilaksanakan masyarakat, pemerintah, dan unsur non pemerintah. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi : 1) Kegiatan Pembinaan Forum Kota Sehat; dan 2) Rapat Koordinasi Kota Sehat

26) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar tersedianya honorarium kegiatan Imunisasi Covid-19 sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja petugas dalam memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat di Kota Bogor.

27) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar terlaksananya pembinaan mutu dan akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Bogor. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota yaitu : 1) Pertemuan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen dengan tujuan agar terlaksananya penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan dan capaian kinerja pelayanan puskesmas dalam merencanakan persiapan akreditasi sehingga puskesmas memiliki kesiapan menuju akreditasi, serta sebagai salah satu upaya evaluasi dan peningkatan mutu dan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; 2) Pertemuan Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko dengan tujuan agar terciptanya budaya keselamatan pasien dan petugas yang ada di puskesmas sehingga mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan standar dan berjalan dengan baik; 3) Pertemuan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di FKTP dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas puskesmas terkait penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi dan mewujudkan keselamatan pasien yang pada akhirnya akan berdampak pada efisiensi manajemen puskesmas dan peningkatan kualitas pelayanan; 4) Pertemuan Evaluasi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan 5) Pertemuan Evaluasi Tim Pembina Mutu Akreditasi Dinas Kesehatan.

28) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah yaitu : 1)

Fogging Fokus untuk hasil PE Positif yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan DBD; 2) Penguatan penggunaan Aplikasi Detektif Covid-19 yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas surveilans tentang pencatatan dan pelaporan data Covid-19, *tracing* kasus konfirmasi covid-19 di masing-masing wilayah kerja, dan meningkatkan kemampuan penggunaan aplikasi Allrecord PCR; 3) Kegiatan Penguatan pelaporan Covid-19 menggunakan Aplikasi SILACAK; 4) Kegiatan Pertemuan Monev HPISP, dengan tujuan terlaksananya monitoring dan evaluasi Program HPISP di Puskesmas Kota Bogor serta menyusun rencana tindak lanjut pada tahun 2023; 5) Kegiatan Pertemuan Monev Imunisasi; 6) Pertemuan Monev POPM Cacingan;

7) Pertemuan Penguatan DBD; 8) Pertemuan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis; 9) Pemusnahan Limbah Medis; 10) Belanja Kuota Internet dengan tujuan untuk menunjang kegiatan *tracer* dalam melaksanakan *tracking* kasus covid-19 di Kota Bogor.

29) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi : 1) Workshop Gawat Darurat Medis dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan dalam menyikapi peristiwa gawat darurat sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya saat terjadinya kegawatdaruratan medis. 2) Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Cloud Server e-SIR Bogor Sehat, dan 3) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan e-SIR Bogor Sehat di Faskes.

30) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan intervensi lanjut PIS-PK yang berintegrasi dengan program kesehatan di Puskesmas serta tercapainya penguatan kegiatan dan pelaporan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

   1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

      Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar terlaksananya penyusunan profil kesehatan Kota Bogor Tahun 2021, pengadaan Buku Saku Profil Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021, dan sosialisasi Aplikasi Satu Data Kesehatan Jawa Barat untuk mewujudkan Satu Data Kesehatan Indonesia.

   2) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

      Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar sistem informasi puskesmas (SIMPUS) di Kota Bogor dapat terkelola dengan baik serta terlaksananya penyebarluasan informasi baik melalui media online, radio, cetak, dan online nasional. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan yaitu : 1) Publikasi Media Online sebanyak 132 kali tayang; 2) Publikasi Media Radio sebanyak 33 kali tayang;

      3) Publikasi Media Radio, cetak, dan online nasional sebanyak 22 kali tayang; 4) Pelaksanaan Konferensi Pers yang diikuti oleh 40 orang wartawan dari media cetak maupun online; dan 5) Pengembangan SIMPUS *bridging* dengan Aplikasi SATUSEHAT Indonesia dan Pcare Versi 4.0.

   3) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

      Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar tersedianya *Server* SIMPUS, terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan LAN Dinkes guna menunjang pelaksanaan sistem informasi kesehatan dan jaringan internet di lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor.

4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

      Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar terbina dan terkendalinya fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di Kota Bogor, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan di seluruh fasilitas Kesehatan. Adapun kegiatan

yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan yaitu : 1) Pertemuan Evaluasi Pelaporan Data Rumah Sakit di RS Online; 2) Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi Kesiapan RS di Masa Pandemi Covid-19; dan 3) Pertemuan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, dan Pengawasan Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Kota Bogor.

2) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan yaitu 1) Monitoring dan Evaluasi RS Darurat Pusat Isolasi Covid-19. 2) Monitoring dan Evaluasi Rujukan Lintas Batas. 3) Monitoring dan Evaluasi Tata Laksana Pasien Covid. 4) Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan di Fasilitas Kesehatan. 5) Rapat Koordinasi Stakeholder Rujukan. 6) Workshop Persiapan RS Darurat Pusat Isolasi Covid-19.

2.1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tabel 2. 2 Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2022

INDIKATOR	2022		CAPAIAN (%)
	TARGET	REALISASI	
Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	90	92,00%	102,2%
Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	88	100,00%	113,6%
Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	81	83,12%	102,6%

Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan diintervensi oleh 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
   1) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan profesionalitas tenaga kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target yaitu pertemuan pembinaan, update data STR, dan tindaklanjut setelah diterbitkannya izin praktek oleh DPMPTSP yaitu penyerahan STR asli ke Dinas Kesehatan.

2. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

   1) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

      Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar tersedianya dokumen perencanaan yang valid dan reliable, sehingga dapat digunakan dalam pemenuhan dan pendistribusian sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan, yang berdampak kepada tersedianya sumber daya manusia kesehatan guna menunjang peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan perencanaan telah dilaksanakan pada awal tahun di seluruh UPTD maupun bidang-bidang pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya dikompilasi menjadi perencanaan Dinas. Sedangkan upaya pendistribusian sumber daya manusia kesehatan telah dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember.

   2) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

      Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan sumberdaya manusia dalam melaksanakan pelayanan, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun kantor dinas kesehatan. Sasaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sumber daya manusia kesehatan yang sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu sebanyak 79 orang. Adapun pemenuhan sumberdaya manusia telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desember.

   3) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia kesehatan, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal. Sasaran kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan yaitu sejumlah 148 dokumen. Adapun pembinaan dan pengawasan dilaksanakan Pada Triwulan II dan Triwulan IV.

3. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis pejabat fungsional agar tersedianya sumberdaya manusia yang sesuai standar. Adapun sasaran sub kegiatan ini adalah 87 orang tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya dan telah terealisasi sebanyak 299 orang tenaga kesehatan yang telah ditingkatkan kompetensinya. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi yaitu pada bulan Juli sampai dengan Desember 2022.

2.1.3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Tabel 2. 3 Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman Tahun 2022

INDIKATOR	2022		CAPAIAN (%)
	TARGET	REALISASI	
Persentase Produsen Perbekalan kesehatan Rumah tangga (PKRT) dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	85%	100%	117,6%
Persentase Penggunaan Obat Rasional	79%	79%	100%
Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	92%	92,81%	101%

Pelaksanaan program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman diintervensi oleh 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
    1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

       Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar pangan olahan yang diproduksi oleh IRTP memiliki izin produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta untuk meningkatkan keamanan dan mutu produk IRTP yang akan beredar di masyarakat melalui peningkatan efektifitas pengawasan pre-market pangan industri rumah tangga sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini berupa bimbingan teknis keamanan pangan dan pemeriksaan sarana IRTP.
2. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
    1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

       Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas petugas sanitarian dalam melakukan pengawasan, dan pembinaan pada tempat pengelolaan makanan, meningkatkan pengetahuan bagi pemilik, penanggung jawab, dan karyawan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) seperti Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum, dan meningkatnya para pengusaha untuk memiliki Laik Higiene Sanitasi Pangan atau legalitas dalam perizinan. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah penanggung jawab program petugas sanitarian puskesmas sebanyak 55 orang, penanggung

jawab pengelola tempat pengelolaan makanan sebanyak 50 Jasa Boga, Para Pelaku Usaha Rumah Makan/Restoran (100 Rumah Makan/Restoran), dan Pelaku Usaha Depot Air Minum sebanyak 50 Depot Air Minum.

3. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
    1) Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

       Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar meningkatkan kapasitas bagi petugas sanitarian, dalam pengawasan, dan pembinaan pada tempat pengelolaan makanan; meningkatkan pengetahuan bagi pedagang makanan Jajanan dan Sentra Makanan tentang pengolahan makanan; terbinanya Pedagang Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan; dan meningkatkan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat.
4. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
    1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

       Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan post-market sesuai dengan pedoman dan meningkatkan keamanan dan mutu produk pangan industri rumah tangga yang beredar sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional.

       Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini berupa pengawasan sarana produksi IRTP, *sampling* dan pengujian produk pangan industri rumah tangga, pengawasan iklan produk pangan olahan serta desk CAPA iklan pangan olahan, serta monitoring dan tindak lanjut pengawasan sarana IRTP, label dan iklan pangan.

2.1.4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Tabel 2. 4 Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2022

INDIKATOR	2022		CAPAIAN (%)
	TARGET	REALISASI	
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	8,00	10,29	128,6%
Predikat Kota Sehat	Swastisaba Wiwerda	Tidak dapat mengikuti penilaian Kota Sehat	0

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diintervensi oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

    1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

    Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi: 1) Rapat koordinasi penguatan wilayah dalam mendukung program kesehatan Germas (BOK); 2) Pertemuan Koordinasi Petugas Promkes Puskesmas Terkait Program-Program Inovasi Kesehatan dan Germas; 3) Pertemuan Advokasi dan Koordinasi Jejaring Kerja dan Mitra Potensial Mendukung Germas; 4) Pertemuan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan/Ormas dalam Mendukung Implementasi Germas dan Program Kesehatan Lainnya; 5) Pembinaan UKBM dalam Upaya Mendukung Germas; 6) Intervensi Promosi Kesehatan dalam Upaya Mendukung Germas di Berbagai Tatanan; 7) Kampanye Germas melalui Penguatan dan Pengembangan Kampung Germas; 8) Pertemuan Penguatan UKBM Lainnya; 9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan GERMAS di Tk. Kota;

    10) Kampanye Massif Perubahan Perilaku Masyarakat di Berbagai Tatanan; 11) Monev pelaksanaan inovasi pemberdayaan masyarakat melalui program ngariung sehat; 12) Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan melalui kegiatan

Mobil Curhat; 13) Sosialisasi dan Penguatan Peran Pemegang Kebijakan dalam Pengembangan Kelurahan/RW Siaga Aktif; 14) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Germas di Tk. Kota; 15) Penguatan Kelompok Germas Masyarakat dengan Saka Bakti Husada; 16) Pendampingan penerapan Germas di semua tatanan dengan OPD Pembina; 17) Optimalisasi Peran Saka Bakti Husada Kota Bogor; 18) Pembinaan dan Pendampingan Implementasi RW Siaga Strata Pratama; 19) Pembinaan dan Pendampingan Saka Bakti Husada; 20) Pengadaan format - format dalam implementasi, pengawasan dan penegakan KTR; 21) Pertemuan Penguatan Tim Pembina KTR dan OPD Lainnya; 22) Pengadaan Penanda Kawasan Tanpa Rokok di 9 Kawasan; 23) Monitoring dan evaluasi penerapan KTR di angkutan kota; 24) Monitoring dan Evaluasi Promosi Kesehatan Puskesmas dalam implementasi germas dan program kesehatan lainnya; 25) Monitoring dan Evaluasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit dalam mendukung Pelaksanaan Germas; 26) Monitoring dan Evaluasi penerapan KTR di 8 kawasan; 27) Rapat teknis Persiapan kegiatan HTTS tingkat Kota Bogor; 28) Rapat teknis Persiapan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan KTR tingkat Kota Bogor; 29) Pengadaan Media Spanduk; 30) Pendampingan Penerapan Germas di OPD pembina dengan institusi binaannya; 31) Sidak Terpadu Tim Pembina KTR Kota dan Kecamatan; 32) Pertemuan Penguatan Jejaring Kemitraan Potensial dalam Program PHBS, Germas, dan Program Kesehatan Lainnya; 33) Pertemuan Sosialisasi Pengukuran Kebugaran Jasmani melalui Aplikasi SIPGAR; 34) Pelaksanaan Germas Melalui Penguatan Penerapan Perda KTR di 9 kawasan; 35) Orientasi Promosi Kesehatan dalam upaya pencegahan stunting dan edukasi gizi seimbang; 36) Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi Karyawan.

2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

    1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi : 1) Penyediaan Sarana Posyandu di Lokasi Lomba; 2) Kampanye PHBS, Germas, dan Program Kesehatan lainnya tingkat Kota Bogor; 3) Penyediaan Poster Aneka Tema Kesehatan; 4) Penyediaan Form Monev Germas; 5) Penguatan Implementasi Germas di Puskesmas; 6) Rapat Teknis Persiapan Monev Germas; 7) Penguatan Implementasi Germas di Lingkungan Pemerintah / OPD; 8) Penyediaan Media Leaflet; dan 9) Penyediaan Spanduk.

3. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

   Rincian kegiatan pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

   a. Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan Kader Kelurahan Siaga Aktif

      Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan apresiasi pada kinerja Kader Kelurahan Siaga sehingga diharapkan dapat memotivasi peningkatan strata Kelurahan Siaga Aktif di Kota Bogor dengan sasaran kegiatan sebanyak 476 Orang Kader Kelurahan Siaga per bulan.

   b. Penyediaan jasa tenaga kesehatan kader Posbindu

      Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja kader Posbindu sehingga diharapkan dapat memotivasi peningkatan strata Posbindu dengan sasaran kegiatan sebanyak 2.918 orang Kader Posbindu per bulan.

   c. Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan Kader Posyandu

      Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan motivasi kepada kader Posyandu sehingga dapat meningkatkan strata Posyandu berupa meningkatnya persentase Posyandu aktif, dengan sasaran kegiatan sebanyak 5.375 orang perbulan di 979 Posyandu.

d. Penyediaan BOP RW Siaga Covid-19

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran serta dan peran aktif RW siaga terutama dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19, termasuk pengawasan kegiatan warga di lingkup RW dengan sasaran kegiatan sebanyak 3.876 RW Siaga Covid-19 selama 5 bulan.

2.1.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 2. 5 Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2022

INDIKATOR	2022		CAPAIAN (%)
	TARGET	REALISASI	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	A	A	100%
Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3.40	3,36	98,82%

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, diintervensi oleh 5 (lima) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi : 1) Monitoring dan Evaluasi Perencanaan terdiri dari Evaluasi Capaian RPJMD, IKU, IKK, dan Laporan Monev RKPD; dan 2) Penyediaan Dokumen Perencanaan terdiri dari RPJMD Perubahan, Renstra Perubahan, Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA, P-RKA, dan DPPA Tahun 2022.
   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data capaian penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi : 1) Monitoring dan Evaluasi Capaian SPM Bidang Kesehatan; 2) Monitoring dan Evaluasi Capaian IKM; dan 3) Penyediaan Laporan

Monitoring dan Evaluasi Kinerja terdiri dari LKPJ, LPPD, dan LKIP Tahun 2021.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN bertujuan untuk memenuhi gaji dan tunjangan (TPP) PNS tahun 2022 sebanyak 14 bulan (Gaji 12 bulan ditambah Gaji ke 13 dan 14). Sasaran dari sub kegiatan ini adalah PNS aktif pada Dinas Kesehatan sebanyak 84 orang dan PNS aktif pada 26 UPTD sebanyak 747 orang, dengan total sasaran sejumlah 831 orang. Adapun jenis tunjangan yang diberikan kepada PNS aktif di Dinas Kesehatan dan UPTD Labkesda yaitu TPP beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja, sedangkan untuk PNS aktif pada 25 UPTD Puskesmas yaitu TPP Kondisi kerja.

2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Rincian kegiatan pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. Belanja Hibah Kesehatan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat melalui lembaga atau organisasi kemasyarakatan baik dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat dalam rangka menunjang pencapaian program kesehatan Pemerintah Kota Bogor.

b. Penguatan Tim Keuangan Dinas Kesehatan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Tim Keuangan Dinkes dalam penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan daerah.

c. Penguatan Penerapan Pola PPK BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda

Tujuan kegiatan ini adalah agar terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pendampingan e-BLUD, rekonsiliasi laporan keuangan BLUD, Bimbingan Teknis Penerapan

PPK BLUD, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran, Pendampingan Penatausahaan Keuangan dari BKAD dan KPP Pratama, dan Pendampingan Penerapan QRIS BJB di UPTD.

d. Rapat koordinasi dengan Lintas Sektor

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dalam penyusunan regulasi penerapan PPK BLUD di UPTD Puskesmas dan Labkesda Kota Bogor.

e. Fotokopi dan Penjilidan Laporan Kegiatan serta Laporan Keuangan

Tujuan kegiatan ini adalah agar tersedianya dokumen dan laporan dalam bentuk hard copy.

f. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Bogor

Tujuan kegiatan ini adalah agar tersedianya Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Bogor.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan, pemenuhan infrastruktur didalam kegiatan operasional perkantoran dan untuk menunjang kelancaran kegiatan sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Sasaran pelaksanaan sub kegiatan ini adalah lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor dan pusat isolasi non fasyankes pada BPKP Ciawi.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor baik di lingkup Dinas Kesehatan, pusat isolasi non fasyankes pada BPKP Ciawi, dan dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Terlaksananya belanja pengadaan kertas untuk akselerasi vaksinasi.

b. Terlaksananya belanja ATK untuk kebutuhan operasional kantor.
c. Terlaksananya belanja ATK kegiatan vaksinasi Covid-19.
d. Terlaksananya belanja fotocopi berkas vaksinasi Covid-19.
e. Terlaksananya belanja pulsa modem untuk kegiatan vaksinasi Covid-19.

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam penyediaan peralatan rumah tangga di lingkup Dinas Kesehatan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi belanja pengadaan alat rumah tangga/kebersihan pada kantor dinas kesehatan.

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman dalam pelaksanaan kegiatan baik lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor, pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan pada pusat isolasi non fasyankes pada BPKP Ciawi.

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional perjalanan dinas baik luar dan dalam Kota Bogor. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Terlaksananya perjalanan dinas luar kota yang digunakan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi kegiatan.
b. Terlaksananya perjalanan dinas luar kota untuk menghadiri pertemuan/ undangan.
c. Terlaksananya perjalanan dinas luar kota untuk pengiriman sampel pemeriksaaan.
d. Terlaksananya perjalanan dinas luar kota untuk pengiriman pada pusat isolasi non fasyankes.
e. Terlaksananya perjalanan dinas luar kota untuk merujuk pasien.
f. Terlaksananya perjalanan dinas luar kota untuk pengambilan BHP/ vaksin, dll
g. Terlaksananya perjalanan dinas dalam kota untuk kegiatan monitoring dan bimtek ke fasyankes ataupun

instansi. Adapun kegiatan ini dilaksanakan oleh tenaga non PNS.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

      Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar terpenuhinya operasional kantor yang berkaitan dengan ketersediaan listrik, air, wifi, dan telepon. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

      a. Terlaksananya penyediaan listrik di kantor dinas kesehatan.
      b. Terlaksananya penyediaan air PDAM di kantor dinas kesehatan.
      c. Tersedianya penyediaan telepon di kantor dinas kesehatan.
      d. Tersedianya fasilitas zoom meeting di kantor dinas kesehatan.
      e. Tersedianya pulsa untuk modem dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

   2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

      Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar terpenuhinya jasa pendukung di bidang keuangan maupun umum, sehingga tugas dan fungsi sub bagian tersebut dapat berjalan dengan baik. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

      a. Terlaksananya penyediaan jasa keamanan selama 1 tahun sebanyak 5 (lima) orang melalui pihak ke-3.
      b. Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan/OB selama 1 tahun sebanyak 6 (enam) orang melalui pihak ke-3.
      c. Terlaksananya penyediaan jasa driver/sopir selama 1 tahun sebanyak 6 (enam) orang melalui pihak ke-3.
      d. Tersedianya tenaga pramusaji selama 1 tahun sebanyak 2 (dua) orang melalui pihak ke-3.
      e. Terlaksananya penyediaan jasa PKWT front office selama 1 tahun sebanyak 2 (dua) orang melalui swakelola.
      f. Tersedianya tenaga administrasi perkantoran selama 1 tahun sebanyak 4 (empat) orang.

g. Tersedianya tenaga IT selama 1 tahun sebanyak 3 (tiga) orang melalui swakelola.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar terpenuhinya kebutuhan operasional dalam penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Telah terlaksananya perpanjangan STNK mobil operasional Dinas Kesehatan sebanyak 18 kendaraan;
b. Telah terlaksananya jasa servis kendaraan roda 4 angkut penumpang (minibus) penggantian pelumas dan suku cadang, dll

2) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar terlaksananya pemeliharaan asset dan perlengkapan/sarana prasarana kantor yang menunjang pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut

a. Terlaksananya pemeliharaan APAR di kantor Dinas Kesehatan;
b. Terlaksananya pemeliharaan genset di kantor Dinas Kesehatan;
c. Terlaksananya pemeliharaan AC di kantor Dinas Kesehatan;
d. Terlaksananya pemeliharaan computer/notebook di kantor Dinas Kesehatan;
e. Terlaksananya pemeliharaan mobile PCR dan vaksinasi;
f. Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kesehatan pada mobile PCR;
g. Terlaksananya pemeliharaan airpufier dan hepafilter pada Dinas Kesehatan.

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tujuan dilaksanakan sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya serta pemenuhan infrastruktur didalam kegiatan operasional perkantoran. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Terlaksananya pemeliharaan halaman/taman Kantor Dinas Kesehatan selama tahun 2022.
b. Terlaksanakannya rehabilitasi *pantry* sekretariat yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2022.
c. Terlaksananya rehabilitasi toilet pada seluruh bidang, yaitu bidang SDK, kesmas, yankes dan P2P yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2022.
d. Terlaksananya rehabilitasi toilet umum (laki-laki) di lantai 2 dengan spesifikasi sesuai kebutuhan (difabel, dll) yang telah dilaksanakan selama bulan Agustus 2022.
e. Terlaksananya rehabilitasi toilet umum pada Gedung A (Sekretariat) baik toilet laki-laki dan perempuan yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2022.
f. Terlaksananya rehabilitasi pembuatan ventilasi pada ruangan Sekretaris Dinas yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2022.
g. Terlaksananya rehabilitasi ruangan renlap berupa pemasangan kaca film pada sekat yang telah dilaksanakan pada bulan November 2022.
h. Terlaksananya pemeliharaan Gedung tidak bertingkat di lantai 1 dan 2 sesuai dengan kebutuhan (perbaikan atap bocor, dll) selama tahun 2022.

Tabel 2. 6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Bogor

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	55	102.3	65	65.10	99.8%	60	60	100.0%
		Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	2.8	3.47	3.00	4.56	48.0%	2.90	2.90	100.0%
		Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	3	3.58	3.2	5.12	40.0%	3.10	3.10	100.0%
		Persentase Balita berstatus gizi normal	87	83.3	86,3	85.86	100.5%	86.60	86.60	100.0%
		Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	90	72	90	19.84	22.0%	90.00	90.00	100.0%
		Prevalensi Hipertensi	8.40	6.62	7.2	7.46	103.6%	7.90	7.90	100.0%
		Case Fatality Rate Covid-19	0.50	1.2	1.2	0.94	121.7%	1.10	1.10	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	0.14	0.11%	0.14	0.16	114.3%	0.13	0.13	100.0%
		Akses sanitasi terhadap air bersih	100	99%	100.00	98.93	98.9%	99.60	99.60	100.0%
		Akses jamban sehat	86	76.34%	86.00	76.70	89.2%	84.00	84.00	100.0%
		Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	96.30	90.46	95	98.11	103.3%	94.00	94.00	100.0%
1.02.02.201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	0.72	0.67	0.70	0.71	100.0%	0.71	0.71	100.0%
		Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	86	60	84.75	100	118.0%	85	85	100.0%
		Jumlah Pusat Isolasi non-fasyankes Covid-19	0	2	1	1	100.0%	1	0	0.0%
1.02.02.201.0002	Peembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang di bangun	2	NA	NA	NA	NA	3	2	66.7%
1.02.02.201.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana,	2	NA	NA	NA	NA	1	1	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar								
1.02.02.201.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4	3	3	3	100%	20	20	100.0%
1.02.02.201.00011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.02.201.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	169	NA	21	NA	NA	242	242	100.0%
1.02.02.201.0014	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.201.0015	Pengadaan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaa Alat Uji dan Kalibrasi pada Unir Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional Maintainance Center	231	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.02.201.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	24,606	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.02.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100%	100	100	100.0%
		Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)	3700	3054	3500	12061	345%	3600	3600	100.0%
		Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	100	91.53	96	98.55	1.03	100	100	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	96.30	90.46	93	96.11	103%	96.20	96.20	100.0%
		Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi	57	47	49	51	104%	55	55	100.0%
		Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar *(SPM)*IKU	100	96.7	100	100	100.0%	100	100	100.0%
		Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU	100	94.9	100	100	100.0%	100	100	100.0%
		Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM)	100	99.7	100	100	100.0%	100	100	100.0%
		Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM)	100	94.1	100	100	100.0%	100	100	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9.70	5.33	10.10	7	130.7%	9.80	9.8	100.0%
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	46.6	100	70	70.0%	100	100	100.0%
		Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	62.36	100	104	104.0%	100	100	100.0%
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100.0%	100	100	100.0%
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	101.85	100	101	101.0%	100	100	100.0%
		Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	104.45	100	102	102.0%	100	100	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	76.34	100	131	131.0%	100	100	100.0%
		Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	50.6	100	107	107.0%	100	100	100.0%
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	92.7	100	109	109.0%	100	100	100.0%
		Prevalensi Covid-19	≤ 3,1 %	3.39	≤ 3,5 %	3	85.7%	≤ 3,2 %	≤ 3,2 %	100.0%
		Persentase imunisasi Covid-19	70	102%	70	93.91	134%	70	70	100.0%
		Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF	3	0	1	3	0	2	2	100.0%
1.02.02.202.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19309	18604	19309	18,799	97.4%	19309	19309	100.0%
1.02.02.202.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18432	17426	18432	17,672	95.9%	18432	18432	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.202.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17630	17428	17630	17,576	99.7%	17630	17630	100.0%
1.02.02.202.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84824	79694	84824	84,726	99.9%	84824	84824	100.0%
1.02.02.202.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152023	35694	152023	170,996	112.5%	152023	152023	100.0%
1.02.02.202.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	755429	471086	755429	755,433	100.0%	755429	755429	100.0%
1.02.02.202.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	103954	66840	103954	72,485	69.7%	103954	103954	100.0%
1.02.02.202.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71575	56411	61350	61,450	100.2%	67315	67315	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.202.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17402	17801	17042	17,059	100.1%	17402	17402	100.0%
1.02.02.202.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1578	1184	1352	1,777	131.4%	1465	1465	100.0%
1.02.02.202.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19888	9568	19936	19,936	100.0%	19912	19912	100.0%
1.02.02.202.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24267	12108	24267	408	1.7%	24267	24267	100.0%
1.02.02.202.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	NA	1	1	100.0%	1	1	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.202.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	NA	1	1	100.0%	1	1	100.0%
1.02.02.202.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	NA	1	1	100.0%	1	1	100.0%
1.02.02.202.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	NA	1	1	100.0%	1	1	100.0%
1.02.02.202.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	NA	2	1	50.0%	8	8	100.0%
1.02.02.202.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	NA	1	1	100.0%	1	1	100.0%
1.02.02.202.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	NA	1	1	100.0%	1	1	100.0%
1.02.02.202.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	39580	NA	23748	1	0.0%	31664	31664	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.202.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30	NA	20	25	125.0%	25	25	100.0%
1.02.02.202.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15	NA	15	1	6.7%	15	15	100.0%
1.02.02.202.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	NA	1	1	100.0%	1	1	100.0%
1.02.02.202.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	57	NA	49	44	89.8%	55	55	100.0%
1.02.02.202.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	NA	1	1	100.0%	1	1	100.0%
1.02.02.202.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	NA	1	1	100.0%	1	1	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.202.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19888	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.02.202.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	555	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.02.202.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	47	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.02.203	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Berbasis Smart Health	95%	95.6	75	75	100.0%	85%	85%	100.0%
1.02.02.203.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	NA	1	1	100.0%	1	1	100.0%
1.02.02.204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	88%	81.24%	84.00	81.24	96.71%	86%	86%	100.0%
1.02.02.204.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu	60	NA	60	47	78.33%	60	60	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		(INM) Pelayanan kesehatan								
1.02.02.204.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	6	NA	6	6	100.00%	6	6	100.0%
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	100	89.7	90	89.7	99.67%	95	95	100.0%
		Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	100	-	88	-	0%	100	100	100.0%
		Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	95	97.4	81	97.4	120.2%	90	90	100.0%
1.02.03.201	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	100	89.7	90	89.7	99.7%	95	95	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.03.201.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	150	NA	150	NA	NA	150	150	100.0%
1.02.03.202	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMK yang Dibutuhkan Sesuai dengan Dokumen	95	28%	81	28%	0%	90	90	100.0%
1.02.03.202.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	NA	26	NA	NA	26	26	100.0%
1.02.03.202.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	150	NA	79	NA	NA	26	26	100.0%
1.02.03.202.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	NA	140	NA	NA	225	225	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.03.203	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga yang Mendapat Pengembangan Kompetensi	289	242	262	242	92.4%	280	280	100.0%
1.02.03.203.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	92	NA	87	25	28.7%	275	275	100.0%
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	90%	50%	85%	50%	58.8%	86%	86%	100.0%
		Persentase Penggunaan Obat Rasional	83%	80%	79%	80%	101.3%	82%	82%	100.0%
		Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	96%	64%	92%	64%	69.6%	94%	94%	100.0%
1.02.04.201	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terpenuhinya standar persyaratan perizinan apotek, toko obat dan UMOT	80.00	NA	NA	NA	NA	75.00	75.00	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04.201.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.04.202	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Usaha produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang bersertifikat	16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.04.202.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	2	NA	NA	NA	NA	2	2	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04.203	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang bersertifikat	95	90	95	99	104.2%	93	93	100.0%
1.02.04.203.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	175	NA	172	172	100.0%	175	175	100.0%
1.02.04.204	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene	63	74.7%	50	50.00	100.0%	62	62	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04.204.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	NA	1	NA	NA	1	1	100.0%
1.02.04.205	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase PMJ dan Sentra yang diterbitkan stiker pembinaan	58	0	54	0	0	56	56	100.0%
1.02.04.205.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	NA	1	NA	NA	1	1	100.0%
1.02.04.206	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk	Jumlah Usaha Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri	10	10	10	10	100%	10	10	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rumah Tangga yang diperiksa								
1.02.04.206.01	Pemeriksaan *Post Market* pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	45	NA	40	NA	NA	40	40	100.0%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	11	7.35	8	10.29	129%	9	9	100.0%
		Predikat Kota Sehat	Swastisaba Wiwerda	Tahun 2021 tidak ada penilaian	Swastisaba Wiwerda	Tahun 2021 tidak ada penilaian	Tahun 2021 tidak ada penilaian	Swastisaba Wiwerda	Swastisaba Wiwerda	100.0%
1.02.05.201	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	50	0.96%	30	0.96%	0%	40	40	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.05.201.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	56	NA	14	NA	NA	56	56	100.0%
1.02.05.202	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang memiliki capaian persentase rumah tangga ber PHBS ≥ target PHBS tingkat kota	70	72.1	55	72.1	68.9%	60	60	100.0%
1.02.05.202.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	8	NA	4	NA	NA	4	4	100.0%
1.02.05.203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	6	41.8	5.8	41.8	721%	9	9	100.0%
1.02.05.203.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5	NA	5	NA	NA	5	5	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	3.5	3.23	3.4	3.23	95.0%	3.5	3.5	100.0%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	A	BB	A	BB	100%	A	A	100.0%
1.02.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	A	BB	A	BB	100%	A	A	100.0%
1.02.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	6	100%	6	6	100.0%
1.02.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	4	4	4	100%	6	6	100.0%
1.02.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
1.02.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	923	655	835	835	100.0%	923	923	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16	16	16	16	NA	16	16	100.0%
1.02.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100.0%
1.02.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	NA	1	NA	NA	1	1	100.0%
1.02.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	NA	2	NA	NA	1	1	100.0%
1.02.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	NA	1	NA	NA	1	1	100.0%
1.02.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	NA	3	NA	NA	4	4	100.0%
1.02.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	NA	1	NA	NA	1	1	100.0%
1.02.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan	100	100	100	100	100%	100	100	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		pemerintahan sesuai RKBMD								
1.02.01.207.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	122	NA	NA	NA	NA	132	132	100.0%
1.02.01.207.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	78	NA	NA	NA	NA	103	103	100.0%
1.02.01.207.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100.0%
1.02.01.207.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	164	NA	NA	NA	NA	0	0	#DIV/0!
1.02.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100.00	100	100.0%	100	100	100.0%
1.02.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	NA	1	1	100.0%	1	1	100.0%

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	NA	1	1	100.0%	1	1	100.0%
1.02.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100	100	100	100	100.0%	100	100	100.0%
1.02.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44	NA	13	13	100.0%	24	24	100.0%
1.02.01.209.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1015	NA	435	435	100.0%	103	103	100.0%
1.02.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	NA	3	3	100.0%	3	3	100.0%
1.02.01.210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100	71.95	100	71.95	72.0%	100	100	100.0%
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	26	26	26	26	100%	26	26	100.0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bogor disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD pada Peraturan Daerah No. 92 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota No 475 Tahun 2008, dibandingkan dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor terdiri atas sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Fokus pelayanan yang diberikan bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi.

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2022 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

a. APBD Kota Bogor sebesar Rp 616.480.300,- (enam ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah); dan

b. APBN sebesar Rp 111.959.800,- (seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Tabel 2. 7 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	APBD	146.959.700,-
		APBN	111.959.800,-
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	APBD	35.010.000,-
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	APBD	34.999.800,-
4	Pelayanan Kesehatan Balita	APBD	34.999.900,-
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	APBD	30.000.000,-
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	APBD	85.219.200,-
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	APBD	29.999.900,-
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	APBD	79.300.800,-
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	APBD	13.840.000,-
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	APBD	10.480.000,-
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	APBD	50.000.000,-
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	APBD	65.671.000,-
Total		**APBD**	**616.480.300,-**
		APBN	**111.959.800,-**

Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi terkait penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan ini diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Terlambatnya pelaporan SPM selalu menjadi masalah utama, karena terlambatnya pengumpulan data dari level terbawah atau Puskesmas, sehingga berimbas pada pelaporan di tingkat Dinas Kesehatan;
b. Perbedaan sasaran atau target capaian yang ditetapkan oleh kementrian kesehatan berdasarkan data estimasi sehingga perubahan target seringkali terjadi di tengah tahun berjalan;
c. Data penjaringan kesehatan untuk kegiatan pelayanan anak usia sekolah dihitung pertahun ajaran baru sehingga pendataan tahun 2022 masih berlangsung sampai dengan bulan juni 2023. Sehingga

pengisian data untuk pelayanan anak usia sekolah seringkali baru terisi di triwulan akhir;

d. Pengumpulan data capaian tidak hanya berasal dari puskesmas namun dari seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bogor, meliputi Rumah Sakit dan klinik. Seringkali pelaporan tersebut terlambat dilaporkan sehingga pengisian capaian di triwulan akhir lebih besar dari bulan sebelumnya;
e. Perhitungan pencapaian mutu layanan dihitung berdasarkan pengadaan yang dilakukan oleh program terkait, bila pengadaan tidak dilaksanakan atau tidak ada di Kabupaten/Kota maka capaian dianggap nol;
f. Perencanaan dan Penganggaran SPM sejalan dengan penganggaran kegiatan, tidak dikhususkan ke dalam anggaran SPM. Namun Kegiatan yang dijalankan sudah sejalan dengan indikator yang ada dalam SPM.

Solusi yang dapat diberikan pada permasalahan diatas diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Menyamakan persepsi mengenai data sasaran pada awal tahun, sehingga tidak terjadi perubahan target sasaran di tengah tahun berjalan;
b. Melakukan bimbingan teknis pada puskesmas terkait pelaporan data layanan kesehatan;
c. Peningkatan SDM yang terlatih di bidangnya;
d. Memperkuat serta menyamakan persepsi mengenai DO dan Data dasar Jumlah penduduk untuk Prevalensi Program;
e. Menyepakati batas waktu pengumpulan Laporan puskesmas untuk semua program sebelum tgl 05.

Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Bogor

No	Indikator	SPM	IKK	Target			Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Angka usia harapan hidup		√	73.69	73,96	73.93	73,61	73.82	74.13	74.15	74.18	
2	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs		√	4.75	10.2	10.10	10,66	5.33	3.25	9.80	9.70	
3	Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)		√	4.31	4.42	4.09	3,74	4.77	4.82	3.98	3.98	
4	cakupan desa siaga aktif		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup		√	55	70	65	74,50	96.7	73.26	60	55	
6	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup		√	2.90	3.10	3.00	3.15	3.47	3.72	2.90	2.80	
7	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup		√	3.35	3.30	3.20	3.36	3.58	3.89	3.10	3.00	
8	Rasio rumah sakit per satuan penduduk		√	0.02	0.02	0.02	0.02	0.20	0.02	0.02	0.02	
9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		√	0.80	0.84	0.88	1.33	1.35	1.53	0.92	0.96	
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		√	97.00	98.00	99.00	93.10	94.90	96.10	100.00	100.00	
11	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)		√	85	86	90	87	89.7	92	95	100	

No	Indikator	SPM	IKK	Target			Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
12	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk		√	0.66	0.67	0.70	0.67	0.67	0.71	0.71	0.72	
13	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		√	99.00	90	92	63.20	72.1	98.53	100	100	
14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		√	97.00	97.50	98.00	7.90	91.5	96.55	98.50	99.00	
16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		√	0	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	1 kasus	2.77	≥ 3/100.000 penduduk usia < 15 tahun	≥ 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun	
17	Cakupan pneumonia balita yang ditangani		√	100	60	70	24,25	100	78.77	80	100	
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		√	100	70	80	58,88	100	107.12	100	100	
19	Prevalensi Hipertensi		√	9.30	6.50	7.20	6.40	6.62	7.46	7.90	8.40	
20	Prevalensi Diabetes Militus		√	2.35	2	2	2.08	2	2.05	2.05	2.05	
21	Persentase kesembuhan TB Paru		√	86	81.22	84.5	60.84	44.24	84.38	86.5	87.5	

No	Indikator	SPM	IKK	Target			Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
22	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)		√	65.00	62.50	62.00	19.78	50	135.07	61.50	60.00	
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
24	Angka bebas jentik nyamuk DBD		√	95.30	95.40	95.60	50.03	92	94.49	95.70	96.00	
25	Persentase penemuan penderita diare pada balita		√	100	100	100	21	18	93.13	100	100	
26	Persentase desa/kelurahan yang berpotensi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
27	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		√	<0,5	<0,5	<0,5	0,42	<0,5	0.46	<0,5	<0,5	
28	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		√	100	100	100	100	96.11	102.46	100	100	
29	Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)		√	80	85	90	72	85	92	95	100	
30	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)		√	24	31	38	97,83	91.53	109.47	100	100	
31	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)		√	96	92	93	91,1	90.46	96.11	96.2	96.3	

No	Indikator	SPM	IKK	Target			Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
32	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi		√	8 (2 pusk)	16 (4 pusk)	100.00	8	8	104.08	100	100	
33	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar *(SPM)*IKU	√	√	100	100	100	93,61	96.70	97.36	100	100	
34	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU	√	√	100	100	100	93,14	94.90	95.88	100	100	
35	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM)	√	√	100	100	100	96,63	99.70	99.69	100	100	
36	Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM)	√	√	100	100	100	78,84	94.10	94.42	100	100	
37	Persentase Komplikasi Kebidanan yang dideteksi dan ditangani		√	75	76	77	74.30	80.59	80.4	80.5	81	
38	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
39	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat		√	100	100	100	84	93.8	100	100	100	

No	Indikator	SPM	IKK	Target			Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
40	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		√	100	100	100	100	100	131.3	100	100	
41	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
42	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
43	Rasio daya tampung Rumah sakit terhadap jumlah penduduk		√	0.19	0.19	0.19	0.19	0.280	0.29	0.29	0.29	
44	Persentase Rumah sakit Rujukan tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi		√	90	95	100	85.71	82	95.45	100	100	
45	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√	√	100	100	100	51.00	46.6	100	100	100	
46	Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√	√	100	100	100	18.78	65	104.26	100	100	
47	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√	√	100	100	100	60.20	100	100	100	100	
48	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√	√	100	100	100	68.80	101.9	103.63	100	100	

No	Indikator	SPM	IKK	Target			Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
49	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√	√	100	100	100	88.50	104.5	103.69	100	100	
50	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	√	√	100	100	100	88.40	76.3	131.43	100	100	
51	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	√	√	100	100	100	104.10	50.6	110.65	100	100	
52	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	√	√	100	100	100	95.70	92.7	109.07	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangungan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah tersebut di masa datang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 92 Tahun 2018 Dinas Kesehatan mempunyai Tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : (a). Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan Sumber daya kesehatan; (b). Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; (c). Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan; (d). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; (e). Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; (f). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bogor, masih menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

1. Masih adanya kematian pada ibu, bayi, dan balita.

   Pada tahun 2022 rasio kematian ibu 73.26 per 100.000 kelahiran hidup belum mencapai target yaitu masih diatas 65 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2022 rasio kematian bayi 3.72 per 1.000 kelahiran hidup belum mencapai target yaitu masih diatas 3 per 1.000 kelahiran hidup. Adapun rasio kematian balita pada tahun 2022 mencapai 3.89 per 1.000 kelahiran hidup juga belum mencapai target 3.2 per 1.000 kelahiran hidup. Oleh sebab itu, kematian ibu, bayi, dan balita masih menjadi tantangan dan fokus penyelesaian permasalahan kesehatan.

2. Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus.

Masih banyaknya kasus *loss to follow up* di Kota Bogor yaitu sebanyak 248 kasus, dimana sebanyak 142 kasus *loss to follow up* tersebut berasal dari RS Swasta. Angka Keberhasilan Pengobatan TB semua kasus adalah kasus yang ditemukan pada Tahun 2021, pada saat itu pencatatan kasus TB belum teratur di SITB, kemudian belum adanya sistem pengembalian kasus TB ke Faskes Tingkat Pertama, belum ada koordinasi antara RS dengan Puskesmas, sehingga ketika pasien tidak kembali ke RS untuk pengobatan, tidak ada petugas yang melakukan penelusuran kasus TB. Selain itu juga pencatatan di SITB yang belum baik sehingga terdapat beberapa kasus yang double input pada aplikasi SITB. Evaluasi hasil akhir pengobatan pasien banyak yang belum di evaluasi terutama di rumah sakit karena pencatatan manual yang belum optimal.

3. Akses sanitasi terhadap air bersih.

Berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) masih ditemukan sarana air yang tidak memenuhi syarat Kesehatan yaitu sarana yang memiliki risiko tinggi dan sangat tinggi terutama untuk sarana air jaringan non perpipaan. Untuk sarana air jaringan perpipaan (PDAM), tidak semua masyarakat dapat mengakses sarana tersebut, karena kondisi sosio-ekonomi masyarakat, sudah memiliki sumber air lain (non PDAM), dan jangkauan air PDAM ke masyarakat. Selain itu pada uji petik pemeriksaan kualitas air, masih ditemukannya bakteri coliform / e.coli dalam air.

4. Pengelolaan data informasi kesehatan masih belum optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan.

Pengelolaan data dan informasi belum terintegrasi atau satu pintu dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rujukan, dan Dinas Kesehatan.

5. Akuntabilitas Kinerja dalam Tata Kelola Pemerintahan.

Pemanfaatan perencanaan dan penggangaran dan evaluasi kinerja belum dioptimalkan dalam penyusunan program/kegiatan secara terpadu dalam pencapaian kinerja.

6. Belum tercapainya indikator Predikat Kota Sehat.

Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan memiliki 2 indikator, salah satu diantaranya adalah indikator Predikat Kota Sehat. Target indikator ini tidak dapat tercapai karena Kota Bogor tidak bisa mengikuti penilaian Kota Sehat. Hal tersebut disebabkan karena tidak

terpenuhinya persyaratan minimal jumlah kelurahan ODF yaitu 80% kelurahan harus sudah mencapai ODF di Kota Bogor, sedangkan pada tahun 2022 Kota Bogor baru memiliki 2 kelurahan yang sudah ODF dari 68 Kelurahan yang ada di Kota Bogor. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu dengan upaya kegiatan Kesehatan lingkungan melalui percepatan ODF yaitu dengan ditetapkannya SK Walikota tentang Penetapan Kelurahan Lokus Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan atau ODF di 68 kelurahan, SK Walikota tentang Satuan Tugas Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan Tingkat Kota Bogor melalui rereongan akses sanitasi jamban keluarga (RASAJAGA), pemicuan 5 pilar STBM di 68 kelurahan, validasi data rumah BABS, rapat koordinasi lintas sector dalam rangka penguatan kelembagaan tingkat kota, tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan, penyusunan dan pengiriman proposal pada CSR (corporate social responsibility) untuk percepatan ODF, serta pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi baik bersumber anggaran APBD, APBN dan CSR.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2. 9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Bogor

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Bogor	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	55 Per 100.000 kelahiran hidup	103.615.563.533,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Bogor	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	55 Per 100.000 kelahiran hidup	122.663.666.298,00	
			Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	2.8 per 1.000 kelahiran hidup				Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	2.8 per 1.000 kelahiran hidup		
			Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	3 per 1.000 kelahiran hidup				Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	3 per 1.000 kelahiran hidup		
			Persentase Balita	87%				Persentase Balita	87%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			berstatus gizi normal					berstatus gizi normal			
			Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	90%				Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	90%		
			Prevalensi Hipertensi	8.4%				Prevalensi Hipertensi	8.40%		
			Case Fatality Rate Covid-19	0.10%				Case Fatality Rate Covid-19	0.10%		
			Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	0.14%				Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	0.14%		
			Akses sanitasi terhadap air bersih	100%				Akses sanitasi terhadap air bersih	100%		
			Akses jamban sehat	86%				Akses jamban sehat	90%		
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan	96.30%				Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan	99.80%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			Kesehatan Nasional					Kesehatan Nasional			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	0.72	30.933.206.503,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	0.72	24.108.157.043,00	
			Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	86				Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	86%		
	Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2	9.109.632.000,00	Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1	4.808.985.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2	5.352.966.000,00	Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0	159.446.490,00	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4	829.217.200,00	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4	1.008.241.200,00	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga	3	830.685.600,00	Sub Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas	3	779.654.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan					Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan			
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	169	2.219.648.084,00	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	169	3.320.335.173,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kota Bogor	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional	231	346.870.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kota Bogor	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional	231	396.673.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			Maintainance Center					Maintainance Center			
	-	-	-	-	-	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	140	61.855.000,00	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	12.204.495.619,00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	13.432.702.280,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			yang disediakan					yang disediakan			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kota Bogor	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	24606 Keluarga	39.692.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kota Bogor	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	24606 Keluarga	27.765.000,00	
	-	-	-	-	-	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas	1 Paket	112.498.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
								Kesehatan			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	70.721.170.230,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	96.745.427.655,00	
			Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)	3700				Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)	3700		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	100				Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	100		
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	96.30				Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	99,80		
			Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi	57				Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi	57		
			Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar	100				Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar	100				Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar	100		
			Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	100				Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	100		
			Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100				Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100		
			Persentase Balita Sangat Pendek dan	9.70				Persentase Balita Sangat Pendek dan	22,85		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			Pendek (Stunting)					Pendek (Stunting)			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
			Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100				Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100		
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
			Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100				Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100				Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100		
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100		
			Prevalensi Covid-19	≤ 3,1 %				Prevalensi Covid-19	≤ 3,1 %		
			Persentase imunisasi Covid-19	70				Persentase imunisasi Covid-19	70		
			Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF	3				Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF	68		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19309	109.649.900,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19309	5.600.000,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Bogor	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18432	177.527.800,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Bogor	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18432	0,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Bogor	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17630	55.699.900,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Bogor	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17630	183.750.000,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Bogor	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84824	27.499.800,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Bogor	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84824	6.799.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152023	18.849.900,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152023	3.600.000,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Bogor	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	755429	172.756.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Bogor	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	755429	71.356.000,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Bogor	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	103954	88.717.800,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Bogor	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	103954	5.700.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Bogor	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71575	73.748.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Bogor	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71575	10.200.000,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Bogor	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17402	15.392.200,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Bogor	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17402	1.613.467.200,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1578	26.280.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1578	26.280.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Kota Bogor	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	47	9.450.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Kota Bogor	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	47	34.358.000,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19888	43.600.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40454	1.684.032.136,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19888	17.700.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19888	17.700.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayann Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24267	41.900.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayann Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24267	84.650.000,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Kota Bogor	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	555	57.500.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Kota Bogor	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	555	31.900.000,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat	1	121.500.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat	1	310.800.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	6.773.665.900,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	6.775.932.400,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	151.594.900,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	25.500.000,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1	205.731.500,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1	1.115.671.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Kesehatan Lingkungan		Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Kesehatan Lingkungan		Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	171.590.500,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	400.808.700,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	4.999.900,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	4.999.900,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	9.775.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	66.917.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	39580	11.610.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	39580	11.610.000,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Bogor	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30	8.995.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Bogor	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30	76.117.800,00	
	-	-	-	-	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1.206.967.105,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	1	55.458.285.900,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	15	81.678.191.784,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			Kesehatan Masyarakat					Kesehatan Masyarakat			
						Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kota Bogor	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1	4.680.000,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	471.559.400,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	325.566.000,00	
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1	16.305.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
								Fasilitas Kesehatan Lainnya			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	57	185.610.900,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	57	134.220.000,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	5.650.709.700,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	128.729.700,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Bogor	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu	1	559.270.330,00	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Bogor	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit	1	559.270.330,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	123.747.000,00	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Berbasis Smart Health	95%		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Berbasis Smart Health	95%	1.658.707.200,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1.872.715.400,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1.658.707.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Kota Bogor	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	88%	88.471.400,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota		Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	88%	151.374.400,00	
	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	165	78.360.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	165	141.263.000,00	
	Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	10.111.400,00	Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	10.111.400,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	100	746.703.200,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Bogor	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	100	3.793.080.130,00	
			Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	100				Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	100		
			Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	95				Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	100		
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase Tenaga Kesehatan yang Mempunyai STR (Surat	100	3.600.000,00	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase Tenaga Kesehatan yang Mempunyai STR (Surat	100	3.600.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			Tanda Registrasi)					Tanda Registrasi)			
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	3.600.000,00	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	3.600.000,00	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah SDMK yang Dibutuhkan Sesuai dengan Dokumen	95	44.140.200,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah SDMK yang Dibutuhkan Sesuai dengan Dokumen	95	2.394.637.740,00	
			Rasio tenaga medis per	0.96				Rasio tenaga medis per	0.96		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			satuan penduduk					satuan penduduk			
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	13.237.200,00	Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	13.237.200,00	
	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	150	25.092.000,00	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	150	2.192.993.040,00	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan	1	5.811.000,00	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan	1	188.407.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga yang Mendapat Pengembangan Kompetensi	289	698.963.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga yang Mendapat Pengembangan Kompetensi	289	1.394.842.390,00	
	Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	92	698.963.000,00	Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	289	1.394.842.390,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	90%	263.918.100,00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	100%	873.649.100,00	
			Persentase Penggunaan Obat Rasional	83%				Persentase Penggunaan Obat Rasional	83%		
			Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	96%				Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	100%		
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Terpenuhinya standar persyaratan perizinan apotek, toko obat dan UMOT	80	19.251.600,00	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Terpenuhinya standar persyaratan perizinan apotek, toko obat dan UMOT	80	82.981.600,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80	19.251.600,00	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80	82.981.600,00	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu		Jumlah Usaha produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas	16	10.185.200,00	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu		Jumlah Usaha produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas	16	10.185.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Perusahaan Rumah Tangga		1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang bersertifikat			Perusahaan Rumah Tangga		1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang bersertifikat			
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	2	10.185.200,00	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	2	10.185.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang bersertifikat	95.00	66.890.400,00	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang bersertifikat	100	437.777.400,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi PanganIndustri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentuyang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	175	66.890.400,00	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi PanganIndustri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentuyang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	175	437.777.400,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene	63	87.591.000,00	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Bogor	Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene	63	82.191.000,00	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	1	87.591.000,00	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	1	82.191.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Persentase PMJ dan Sentra yang diterbitkan stiker pembinaan	58	69.999.900,00	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Bogor	Persentase PMJ dan Sentra yang diterbitkan stiker pembinaan	58	69.999.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	69.999.900,00	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	69.999.900,00	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah Usaha Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	10	10.000.000,00	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Usaha Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	10	190.514.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Bogor	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	45	10.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Bogor	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	45	190.514.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	11	12.591.070.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Bogor	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	11	13.843.122.000,00	
			Predikat Kota Sehat	Swastisaba Wiwerda			Kota Bogor	Predikat Kota Sehat	Swastisaba Wiwerda		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	50	2.340.000,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bogor	Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	50%	56.968.000,00	
	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	56	2.340.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	56	56.968.000,00	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kelurahan yang memiliki capaian persentase rumah tangga ber PHBS ≥ target PHBS tingkat kota	70	189.619.100,00	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase kelurahan yang memiliki capaian persentase rumah tangga ber PHBS ≥ target PHBS tingkat kota	70	164.990.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	8	189.619.100,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	8	164.990.000,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	6.0	12.399.111.200,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	6%	13.621.164.000,00	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5	12.399.111.200,00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5	13.621.164.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bogor	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	3.5	146.729.200.205,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bogor	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	3.76	10.496.172.799,00	
		Kota Bogor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	A			Kota Bogor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	AA		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	A	319.331.500,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	AA	159.268.100,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	211.526.500,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	104.536.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	107.805.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	54.731.300,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100	128.253.931.339,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100	1.582.570.000,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	1	1.518.370.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bogor	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi	16	1.518.370.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			Keuangan SKPD					keuangan SKPD			
	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		64.200.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	64.200.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	5.684.946.745,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	3.122.847.745,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	316.392.500,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	316.392.500,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	326.317.570,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	326.317.570,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	288.902.575,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	288.902.575,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	2.624.590.100,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1.323.675.100,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1	2.128.744.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1	867.560.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
			Konsultasi SKPD					Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100	8.579.232.281,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100	1.406.643.382,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	122	319.602.483,00	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	122	578.011.583,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	78	1.252.077.300,00	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	78	2.309.752.900,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	6.000.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	164	1.007.552.498,00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	164	828.631.799,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	1.329.844.840,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	2.119.690.072,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	698.200.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	698.200.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	631.644.840,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.421.490.072,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100	2.561.913.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100	2.105.153.500,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44	588.500.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44	455.100.000,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1,015	837.563.500,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1,015	514.203.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8	1.135.850.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8	1.135.850.000,00	
	Puskesmas Bogor Selatan				4.303.136.310,00	Puskesmas Bogor Selatan				4.848.310.900,00	
	Puskesmas Bondongan				3.220.411.733,00	Puskesmas Bondongan				4.000.194.199,00	
	Puskesmas Cipaku				3.715.642.227,00	Puskesmas Cipaku				4.814.544.550,00	
	Puskesmas Pulo Armyn				2.608.469.842,00	Puskesmas Pulo Armyn				3.422.931.029,00	
	Puskesmas Bogor Timur				4.887.022.052,00	Puskesmas Bogor Timur				5.633.087.496,00	
	Puskesmas Pancasan				2.552.646.371,00	Puskesmas Pancasan				3.067.159.250,00	
	Puskesmas Gang Kelor				2.949.324.301,00	Puskesmas Gang Kelor				3.890.014.985,00	
	Puskesmas Pasir mulya				3.468.463.548,00	Puskesmas Pasir mulya				4.320.312.472,00	
	Puskesmas Sindang Barang				4.573.463.741,00	Puskesmas Sindang Barang				5.868.946.183,00	
	Puseksmas Semplak				3.491.043.963,00	Puseksmas Semplak				4.171.967.910,00	
	Puskesmas Warung Jambu				3.379.926.759,00	Puskesmas Warung Jambu				4.154.766.072,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	Puskesmas Bogor Utara				4.670.023.798,00	Puskesmas Bogor Utara				5.575.851.124,00	
	Puskesmas Kayu Manis				2.976.588.505,00	Puskesmas Kayu Manis				3.826.791.707,00	
	Puskesmas Kedung Badak				3.048.445.202,00	Puskesmas Kedung Badak				3.972.875.728,00	
	Puskesmas Tanah Sareal				3.249.408.899,00	Puskesmas Tanah Sareal				3.581.172.653,00	
	Puskesmas Mekarwangi				3.150.550.205,00	Puskesmas Mekarwangi				4.054.348.456,00	
	Puskesmas Lawang Gintung				2.105.925.796,00	Puskesmas Lawang Gintung				2.899.722.117,00	
	Puskesmas Tegal Gundil				2.829.654.180,00	Puskesmas Tegal Gundil				3.448.179.660,00	
	Puskesmas Belong				915.677.727,00	Puskesmas Belong				1.250.093.945,00	
	Puskesmas Sempur				2.050.793.114,00	Puskesmas Sempur				2.662.357.771,00	
	Puskesmas Bogor Tengah				2.434.521.745,00	Puskesmas Bogor Tengah				2.906.414.494,00	
	Puskesmas Pondok Rumput				1.554.209.631,00	Puskesmas Pondok Rumput				2.048.367.659,00	
	Puskesmas Merdeka				2.506.677.917,00	Puskesmas Merdeka				3.251.622.532,00	
	Puskesmas Gang Aut				1.424.718.665,00	Puskesmas Gang Aut				2.018.592.457,00	
	Puskesmas Mulyaharja				2.396.688.059,00	Puskesmas Mulyaharja				3.027.394.467,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Kesehatan										
	LABKESDA				1.055.508.289,00	LABKESDA				1.078.911.705,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program / kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil pengumpulan informasi, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang di tujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum PD), dan Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 10 Usulan Musrembang Tahun 2024

No	Uraian Usulan	Bidang	Alamat	Volume	Satuan	Pagu Biaya	Sub Kegiatan
~~1~~	~~Sering terjadinya mayarakat yang sakit dan membutuhkan oksigen di setiap RW belum memiliki inventaris Tabung Oksigen~~	~~Sosial Budaya~~	~~Jl. Padasuka No. 05 RT. 001 RW. 012~~	~~12~~	~~Unit~~	-	
2	Pengadaan Timbangan Digital Bayi, Meja dan kursi, lemari plastik, tempat tidur hamil, alat ukur bayi/dewasa	Sosial Budaya	Jl. Melati Raya No.K-10, RT.03/RW.12, Kayu Manis, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16169, Indonesia	10	Unit	7.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

No	Uraian Usulan	Bidang	Alamat	Volume	Satuan	Pagu Biaya	Sub Kegiatan
3	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengukur Tumbuh Kembang Balita (Posyandu) di Wilayah RW 001 s/d RW 010	Sosial Budaya	Jl. H.T. Sobari No.3-8, RT.07/RW.01, Semplak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16114, Indonesia	10	Paket	7.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4	Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan	Sosial Budaya	Jl. Ledeng	1	Set	7.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
~~5~~	~~Alat Kesehatan dan Logistik Lainnya (Meja & Kursi)~~	~~Sosial Budaya~~	~~Jl. Ledeng No.4, RT.01/RW.04, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia~~	~~2~~	~~Paket~~	-	
~~6~~	~~Pembangunan gedung PONED dengan posisi di depan PUSKESMAS TANAH SAREAL~~	~~Sosial Budaya~~	~~Jl. Kesehatan, RT.02/RW.02, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161, Indonesia~~	~~200~~	~~m^2~~	-	
~~7~~	~~Pengadaan peralatan sapras kesehatan di pustu sindangrasa sebagai fasilitas pelayanan kesehatan meliputi 1 mobil siaga/ ambulance,kursi ,meja,dll.~~	~~Sosial Budaya~~	~~RT.02/RW.09, Sindangrasa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16145, Indonesia~~	~~25~~	~~Unit~~	-	

No	Uraian Usulan	Bidang	Alamat	Volume	Satuan	Pagu Biaya	Sub Kegiatan
8	Dengan kondisi peralatan kesehatan seadanya sehingga pelayanan kesehatan Posyandu dan Poswindu kurang maksimal	Sosial Budaya	Jl. Rancamaya, RT.03/RW.09, Harjasari, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16138, Indonesia	1	paket	7.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9	Penyediaan alat kesehatan posyandu	Sosial Budaya	RT 001/016, RT.04/RW.16, Katulampa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16144, Indonesia	1	posyandu	7.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tabel 2. 11 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2024

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
1	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	pulo empang kebon manggis rt.01 rw.12, RT.01/RW.12, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	7.000.000
2	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Paledang Blok Masjid No.8, RT.02/RW.10, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000
3	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Polisi No.1, RT.04/RW.08, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	7.000.000
4	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	9QWV+49F, Gg. Sukmaraharja, RT.05/RW.05, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Indonesia	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
5	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	kp kebon manggis, RT.03/RW.04, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	7.000.000
6	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Merdeka No.50, RT.04/RW.01, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat	7.000.000
7	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Blk. Sukalaya Jl. Paledang No.50, RT.01/RW.07, Kp. Parung Jambu, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	7.000.000
8	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Paledang Blok Beton No.13, RT.5/RW.09, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
9	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Ir. H. Juanda No.58, RT.01/RW.11, Kp. Parung Jambu, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	7.000.000
10	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	9QWV+CP8, Jl. Kb. Manggis, RT.02/RW.12, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	7.000.000
11	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Ledeng Blok Swadaya 2 No.6, RT.02/RW.10, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000
12	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Gerakan Indonesia Raya	BOGOR SELATAN	Sosial Budaya	1	PAKET	Dinas Kesehatan	Gg. Harapan Baru 1 No.54, RT.05/RW.05, Mulyaharja, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16135, Indonesia	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
13	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Amanat Nasional	BOGOR BARAT	Sosial Budaya	1	paket	Dinas Kesehatan	16113, Jl. Kelurahan No.1, RT.03/RW.03, Bubulak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16115, Indonesia	7.000.000
14	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Panaragan Kidul No.38, RT.01/RW.06, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000
15	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Ciwaringin Gg. Tanjung No.41, RT.04/RW.05, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	7.000.000
16	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Sancang Dalam Blok Madrasah No.16, RT.2/RW.07, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16128, Indonesia	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
17	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	9QVW+Q5R, RT.01/RW.13, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	7.000.000
18	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Persatuan Pembangunan	TIMTENG	Sosial Budaya	20	pcs	Dinas Kesehatan	Jl. Roda, RT.02/RW.06, Babakan Ps., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16126, Indonesia	7.000.000
19	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Gerakan Indonesia Raya	BOGOR SELATAN	Sosial Budaya	1	PAKET	Dinas Kesehatan	Jl. Pahlawan 3 No.5, RT.02/RW.08, Empang, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16133, Indonesia	7.000.000
20	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Gerakan Indonesia Raya	BOGOR SELATAN	Sosial Budaya	1	PAKET	Dinas Kesehatan	Jl. Empang Blok Wahir No.49, RT.02/RW.11, Empang, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia	7.000.000
21	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Gerakan Indonesia Raya	TIMTENG	Sosial Budaya	4	Unit	Dinas Kesehatan	Ciburial Indah No. 96 RT. 03/RW.04, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
22	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Suryakencana No.156, RT.01/RW.10, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	7.000.000
23	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Paledang No.4, RT.02/RW.02, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	7.000.000
24	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Amanat Nasional	BOGOR BARAT	Sosial Budaya	25000000	Rp	Dinas Kesehatan	Jl. Loji Kp. No.213, RT.01/RW.13, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Indonesia	7.000.000
25	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Amanat Nasional	BOGOR BARAT	Sosial Budaya	25000000	Rp	Dinas Kesehatan	Jl. Cilendek No.35, RT.03/RW.06, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	7.000.000
26	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Amanat Nasional	BOGOR BARAT	Sosial Budaya	1	paket	Dinas Kesehatan	Jl. H.T. Sobari No.3-8, RT.07/RW.01, Semplak, Kec.	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
								Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16114, Indonesia	
27	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Amanat Nasional	BOGOR BARAT	Sosial Budaya	1	paket	Dinas Kesehatan	Jl. H.T. Sobari No.3-8, RT.07/RW.01, Semplak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16114, Indonesia	7.000.000
28	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Paledang Kp.lebak sari, Rt.03/03 No.20, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia	7.000.000
29	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	BOGOR UTARA	Sosial Budaya	15	paket	Dinas Kesehatan	Jalan KS. Tubun No. 234, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, RT.01/RW.04, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16151, Indonesia	7.000.000
30	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai NasDem	BOGOR BARAT	Sosial Budaya	12	item	Dinas Kesehatan	Jl. Menteng No.57, RT.01/RW.02, Menteng, Kec.	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
								Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16111, Indonesia	
31	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Amanat Nasional	BOGOR BARAT	Sosial Budaya	1	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Cemplang lama No.17, RT.01/RW.13, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16114, Indonesia	7.000.000
32	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Amanat Nasional	BOGOR BARAT	Sosial Budaya	1	paket	Dinas Kesehatan	16113, Jl. Kelurahan No.1, RT.03/RW.03, Bubulak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16115, Indonesia	7.000.000
33	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Amanat Nasional	BOGOR BARAT	Sosial Budaya	1	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Loji Kp. No.24, RT.01/RW.13, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Indonesia	7.000.000
34	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Mantarena No.12, RT.03/RW.03, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
35	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Panaragan Kidul No.30, RT.03/RW.04, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000
36	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Panaragan Kidul No.2, RT.04/RW.02, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000
37	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Kpknl Bogor, Jl. Veteran, RT.01/RW.05, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000
38	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Veteran Blok Kepatihan No.35, RT.01/RW.01, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
39	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Panaragan Penggilingan No.1, RT.03/RW.07, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000
40	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Cimanggu Kecil No.12A, RT.01/RW.07, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	7.000.000
41	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Ciwaringin II No.3, RT.04/RW.03, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	7.000.000
42	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	CQ7Q+FH8, RT.02/RW.04, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
43	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Merdeka No.96, RT.02/RW.02, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	7.000.000
44	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Ciwaringin No.1, RT.03/RW.08, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	7.000.000
45	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Cimanggu Kecil No.4, RT.01/RW.11, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	7.000.000
46	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Re. Martadinata No.35, RT.01/RW.09, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
47	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Tentara Pelajar Blok Pasama No.6, RT.02/RW.12, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	7.000.000
48	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Ciwaringin Gg. Tanjung No.6, RT.01/RW.10, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	7.000.000
49	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Gg. Kepatihan No.7, RT.05/RW.01, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000
50	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Ledeng Blok Mekar Sari No.13, RT.01/RW.07, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
51	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	CQ5P+22V, RT.01/RW.05, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia	7.000.000
52	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Perintis Kemerdekaan Kebon Jahe No.13, RT.03/RW.03, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000
53	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Perintis Kemerdekaan No.69, RT.01/RW.04, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000
54	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	Paket	Dinas Kesehatan	Gg. Amil No.18, RT.02/RW.06, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
55	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Veteran No.15, RT.03/RW.02, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000
56	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Gerakan Indonesia Raya	TIMTENG	Sosial Budaya	2	Unit	Dinas Kesehatan	Ciburial Indah RT.03/RW.04, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia	7.000.000
57	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Gerakan Indonesia Raya	BOGOR SELATAN	Sosial Budaya	1	PAKET	Dinas Kesehatan	Jl. Cikaret Blok A No.8, RT.04/RW.01, Cikaret, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia	7.000.000
58	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Gerakan Indonesia Raya	BOGOR SELATAN	Sosial Budaya	1	PAKET	Dinas Kesehatan	Jl. Batu Tulis No.34, RT.03/RW.14, Bondongan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16131, Indonesia	7.000.000
59	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Gerakan	BOGOR SELATAN	Sosial Budaya	1	PAKET	Dinas Kesehatan	Jl. Sedane No.24, RT.01/RW.14, Empang, Kec.	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
		Indonesia Raya						Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia	
60	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Gerakan Indonesia Raya	BOGOR SELATAN	Sosial Budaya	1	PAKET	Dinas Kesehatan	Gg. Aster No.5, RT.01/RW.14, Bondongan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16131, Indonesia	7.000.000
61	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Amanat Nasional	BOGOR BARAT	Sosial Budaya	1	paket	Dinas Kesehatan	Jl. H.T. Sobari No.3-8, RT.07/RW.01, Semplak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16114, Indonesia	7.000.000
62	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	CQ5M+W62, RT.01/RW.09, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000
63	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	9QVW+FRJ, Jalan, RT.03/RW.01, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
64	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Kebon Pala No. 10A RT 004/011, RT.01/RW.09, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	7.000.000
65	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Kp. Gudang No.11, RT.03/RW.06, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	7.000.000
66	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Padasuka No.115-117, RT.02/RW.04, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	7.000.000
67	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	9QVX+8VP, RT.01/RW.02, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
68	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Lawang Seketeng No.7, RT.01/RW.07, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	7.000.000
69	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Semboja No.05, RT.02/RW.08, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	7.000.000
70	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Gg. Aut No.13, RT.4/RW.3, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	7.000.000
71	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Padasuka No.28, RT.02/RW.05, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
72	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	9RR2+CX4, RT.03/RW.12, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	7.000.000
73	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Padasuka No.6, RT.01/RW.11, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	7.000.000
74	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Lawang Saketeng No.88, RT.01/RW.08, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	7.000.000
75	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Golongan Karya	TIMTENG	Sosial Budaya	1	Paket	Dinas Kesehatan	RT.04/RW.03, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	7.000.000
76	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Persatuan	TIMTENG	Sosial Budaya	50	Tabung	Dinas Kesehatan	Jl. Roda I No.59, RT.03/RW.08, Babakan Ps., Kecamatan Bogor Tengah,	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
		Pembangunan						Kota Bogor, Jawa Barat 16126, Indonesia	
77	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Gg. Sekolah No.2, RT.01/RW.01, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	7.000.000
78	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Amanat Nasional	BOGOR BARAT	Sosial Budaya	1	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Cijahe RT.03/RW.13, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16113, Indonesia	7.000.000
79	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Perumahan Bogor Baru No.1, RT.01/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	7.000.000
80	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	1	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Malabar No.4, RT.01/RW.02, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
81	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Danau Limboto Dalam No.36, RT.01/RW.04, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	7.000.000
82	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Danau Sampang No.47, RT.01/RW.03, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	7.000.000
83	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Malabar Blok Maxindo No.37, RT.01/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	7.000.000
84	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Malabar No.3, RT.01/RW.09, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	7.000.000

No	Kamus	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Pagu Biaya
85	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	TIMTENG	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Rumah Sakit I No.1, RT.01/RW.08, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	7.000.000
86	Penyediaan Alat Kesehatan	Partai Keadilan Sejahtera	BOGOR SELATAN	Sosial Budaya	1	unit	Dinas Kesehatan	Jalan Cipete Raya, RW.06, Mulyaharja, Bogor Selatan	7.000.000
87	Perbaikan Puskesmas	Partai Persatuan Pembangunan	TIMTENG	Sosial Budaya	192	m2	Dinas Kesehatan	RT.02/RW.09, Sindangrasa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16145, Indonesia	50.000.000
TOTAL									**652.000.000**

BAB 3
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Konsep pembangunan Kota Bogor 2019-2024 sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Visi Kota Bogor pada tahun 2019-2024 adalah **"Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga"**. Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup **Kota Bogor** yang mana meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. **Kota Yang Ramah Keluarga** dapat diartikan sebagai berikut :

Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, sosial masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.

Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Kota Bogor lima tahun kedepan ditekankan kepada kerjasama antara Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Demikian juga dari sisi sumber anggaran/ pembiayaan yang berasal dari APBN/APBD, dana umat, pinjaman, kerjasama dengan badan usaha. Peningkatan pelayanan kesehatan berupa terobosan inovatif guna mempermudah, mempercepat dan meringankan biaya

pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah provinsi juga berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat golongan ekonomi lemah / masyarakat miskin.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Bogor 2019-2024 terdiri dari 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat yang terkait bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat
   a. Tujuan

      Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang Sehat
   b. Sasaran
      1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
      2) Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
   c. Strategi
      1) Mendorong upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, profesional dan bermutu,
      2) Peningkaan pelayanan kesehatan dalam penanganan Covid-19,
      3) Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan promotif serta penyehatan lingkungan

2. Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas
   a. Tujuan

      Terwujudnya Pemerintah yang Cerdas dan Melayani (s*mart government*)
   b. Sasaran

      Terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif, efesien, dan akuntabel
   c. Strategi

      Mengembangkan sistem pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada kebijakan Permendagri 18 Tahun 2017, Permendagri 18 Tahun 2020, dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik oleh Pusat maupun Daerah. Berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sesuai Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan kebijakan yang ditetapkan adalah :

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, dan Program Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022-2024

No	Misi	Tujuan	Sasaran Pembangunan	Program
1	Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya Keluarga Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Terwujudnya Pola Hidup Sehat di Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2	Mewujudkan Kota yang Cerdas	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada saat rancangan awal RKPD Tahun 2024 terdapat 5 Program, 22 Kegiatan, dan 76 Sub Kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Akan tetapi, di Bulan Juni 2023 terdapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri RI untuk melakukan pemutakhirkan Sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilakukan pemutakhirkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan pemutakhiran

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11	Pengadaan Mebel
				12	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
				13	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
				18	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
				19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20	Pembangunan Puskesmas
				21	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				22	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
				23	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
				24	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				25	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
				26	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				27	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
				29	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
					Minuman ke Fasilitas Kesehatan
		7	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
				36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
				37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
				42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
				43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
				44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				46	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
				48	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
				50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
				51	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				52	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				53	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasion
				54	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				55	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
				56	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				57	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
				58	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
				59	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
				60	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
				61	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
		8	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	58	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		9	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
				60	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	61	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
		11	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	62	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				63	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
				64	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		12	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	65	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
			Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	13	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	66	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		14	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	67	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
		15	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	68	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		16	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	69	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		17	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	70	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
		18	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	71	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	19	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
		20	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		21	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

BAB 4

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Bogor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						**259.164.284.395,00**							**817.679.563,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**151.669.690.327,00**							**256.817.679.563,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**151.669.690.327,00**							**256.817.679.563,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**			**3,76 Poin AA Nilai**	**10.496.172.799,00**							**140.519.731.081,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah*	A Nilai			AA Poin	159.268.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan		311.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	104.536.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	6 Dokumen	190.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja				6 Laporan	54.731.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	6 Laporan	121.440.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN*	100 %			100 %	1.582.570.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	100 Persen 94,00 Persen	129.172.977.232,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1030 Orang/bulan	105.184.841.168,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-	1338 orang/bulan	127.702.317.232,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				16 Dokumen	1.518.370.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	16 Dokumen	1.355.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	64.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	3 Laporan	115.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah*	100 %			100 %	3.122.847.745,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	100 %	4.571.819.475,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	316.392.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	1 Paket	345.780.400,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	326.317.570,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	1 Paket	356.604.075,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	288.902.575,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	1 Paket	317.780.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.323.675.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	1 Paket	2.584.999.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	867.560.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	2 Laporan	966.655.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*	100 %			100 %	1.406.643.382,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	100 %	1.895.527.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				122 Unit	578.011.583,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	4 Unit	318.398.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				78 Unit	2.309.752.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	-	6 Unit	1.376.656.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				164 Unit	828.631.799,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUAT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	72 Unit	200.472.400,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										AN SISTEM KESEHATAN						
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %			100 %	2.119.690.072,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	100 %	2.119.399.506,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	698.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	3 Laporan	736.550.234,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.421.490.072,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	7 Laporan	1.382.849.272,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik*	100 %			100 %	2.105.153.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	100 Persen	2.448.447.068,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				44 Unit	455.100.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	17 Unit	650.895.361,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1015 Unit	514.203.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	480 Unit	797.611.047,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	1.135.850.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan	4 Unit	999.940.660,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19 Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Akses sanitasi terhadap air bersih Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Prevalensi Hipertensi Persentase Balita berstatus gizi normal***	**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per**			**0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran 8,40 % 87,00 % 90 % 90,00 % 99,80**	**122.663.666.298,00**						**- 0,14 % 100,00 % 2,7 Per 1000 Kelahiran Hidup 2,9 Per 1000 Kelahiran Hidup 54,5 Per 100.000 Kelahiran 8,4 % 87,10 % - 90,00 % 100 %**	**96.314.410.423,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	**100.000 Kelahiran**			**%**									
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Rasio*	1 Fasilitas 0,72 Per 30.000 penduduk 86 %			86 % 0,72 Per 30.000 penduduk	24.108.157.043,00				-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Labkesda, PSC	33.073.275.116,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Puskesmas Per 30,000 penduduk											Gesit 119, Dinas Kesehatan dan Masyarakat		
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	4.808.985.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Labkesda, PSC Gesit 119, Dinas Kesehatan dan Masyarakat	0 Unit	187.985.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				0 Unit	159.446.490,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Labkesda, PSC Gesit 119, Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Unit	7.370.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				4 Unit	1.008.241.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Labkesda, PSC Gesit 119, Dinas Kesehatan dan Masyarakat	3 Unit	866.509.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				3 Unit	779.654.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Labkesda, PSC Gesit 119, Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Unit	264.744.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				169 Unit	3.320.335.173,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK FISIK-BIDANG KESEHAT	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Labkesda, PSC Gesit 119, Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Unit	27.890.700,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										AN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN						
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				231 Unit	396.673.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Labkesda, PSC Gesit 119, Dinas Kesehatan dan Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				140 Unit	61.855.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Labkesda, PSC Gesit 119, Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 Unit	277.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	13.432.702.280,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHA	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Labkesda, PSC Gesit 119, Dinas Kesehatan dan Masyarakat	10 Paket	24.052.101.416,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										TAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA						
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				24606 Keluarga	27.765.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Labkesda, PSC Gesit 119, Dinas Kesehatan dan Masyarakat	8695 Keluarga	26.324.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	112.498.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - DANA BOK- BOK DINAS- BOK KABUPATEN/ KOTA	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Labkesda, PSC Gesit 119, Dinas Kesehatan dan Masyarakat	275 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 %			100 % 100 % 68 kelurahan 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 %	96.745.427.655,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat		61.146.989.499,00	DINAS KESEHATAN
			sembarangan (SBS) atau	100 % 100 %			100 % 11,85									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			*ODF "Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)" Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan*	100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %			% 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Covid-19 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			standar *Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar													
			Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19309 Orang	5.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	19400 Orang	82.550.000,00	DINAS KESEHATA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18432 Orang	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) %	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	18518 Orang	33.180.000,00	DINAS KESEHATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17630 Orang	183.750.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	17893 Orang	287.837.200,00	DINAS KESEHATA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				84824 Orang	6.799.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	85207 Orang	141.130.000,00	DINAS KESEHATA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan				152023 Orang	3.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	149682 Orang	98.465.000,00	DINAS KESEHATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kesehatan Sesuai Standar						Kel/Desa							
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				755429 Orang	71.356.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	737301 Orang	190.031.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				103954 Orang	5.700.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	72485 Orang	94.464.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				71575 Orang	10.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	71484 Orang	81.122.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17402 Orang	1.613.467.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	17.445 Orang	16.931.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan				1578 Orang	26.280.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	1578 Orang	28.908.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jiwa Berat Sesuai Standar						a							
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40454 Orang	1.684.032.136,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	38688 Orang	98.995.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				24267 Orang	84.650.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	24267 Orang	55.584.300,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										UPATEN/ KOTA						
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	310.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	1 Dokumen	22.006.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	6.775.932.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	1 Dokumen	5.815.968.379,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan				1 Dokumen	25.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	2 Dokumen	150.137.500,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Olahraga													
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1.115.671.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	3 Dokumen	249.540.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	400.808.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	1 Dokumen	57.448.800,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										KOTA						
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	4.999.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	66.917.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	1 Dokumen	31.320.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										BOK KABUPATEN/KOTA						
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				39580 Orang	11.610.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	60000 Orang	12.771.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				30 Orang	76.117.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	35 Orang	9.849.500,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1.206.967.105,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				15 Dokumen	81.678.191.784,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	2 Dokumen	52.061.671.900,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										HASIL TEMBAKAU (CHT), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI						
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	4.680.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	325.566.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	2 Dokumen	319.796.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	16.305.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				57 Unit	134.220.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	93 Unit	137.463.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	128.729.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	1 Dokumen	232.987.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit				1 Unit	559.270.330,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	1 Unit	751.808.100,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)													
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				19888 Orang	17.700.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	7960 Orang	39.312.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				555 Orang	31.900.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	2237 Orang	24.400.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				47 Orang	34.358.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	1939 Orang	8.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	123.747.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Berbasis Smart Health*	95 %			95 %	1.658.707.200,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	10 Buah	1.985.490.608,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1.658.707.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Mayarakat	3 Dokumnen	1.985.490.608,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar*	88,00 %			88,00 %	151.374.400,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	75,00 %	108.655.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				165 Unit	141.263.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	25 Unit	103.669.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				6 Dokumen	10.111.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	2 Dokumen	4.986.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan***	**96 % 95 % 100 %**			**100 % 100 % 100.00 %**	**3.793.080.130,00**						**96 Persen 96 Persen**	**2.262.625.280,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga Kesehatan yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)*	100,0 %			100,0 %	3.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berday	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Tenaga Kesehatan	90 Persen	3.412.800,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											a Saing					
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	3.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Tenaga Kesehatan	150 Dokumen	3.412.800,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	*Jumlah SDMK yang Dibutuhkan Sesuai dengan Dokumen Rasio tenaga medis per satuan penduduk*	95 % 0,96 Rasio			95 % 2.97 Rasio	2.394.637.740,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Tenaga Kesehatan	96,0 Persen	1.980.712.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	13.237.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Tenaga Kesehatan	35 Dokumen	125.227.200,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				150 Orang	2.192.993.040,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Tenaga Kesehatan	12900 Orang	1.760.618.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	188.407.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berda	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Tenaga Kesehatan	600 Dokumen	94.867.200,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											ya Saing					
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	*Jumlah Tenaga yang Mendapat Pengembangan Kompetensi*	289 SDMK			289 SDMK	1.394.842.390,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Tenaga Kesehatan	100 Persen	278.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				289 Orang	1.394.842.390,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Tenaga Kesehatan	290 Orang	278.500.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan Persentase Pengguna***	**96,00 % 83 % 90,00 %**			**100 % 100 % 83 %**	**873.649.100,00**							**241.522.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			an Obat Rasional													
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Terpenuhinya standar persyaratan perizinan apotek, toko obat dan UMOT*	-			80 %	82.981.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60 Sarana	9.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				80 Dokumen	82.981.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60 Dokumen	9.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	*Jumlah Usaha produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah*	-			16 Sarana	10.185.200,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan	5 Sarana	6.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Tangga yang bersertifikat*										Rumah Tangga			
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				2 Dokumen	10.185.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	10 Dokumen	6.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang bersertifikat*	-			100 %	437.777.400,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	225 Sarana	59.022.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				175 Dokumen	437.777.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	225 Sarana	59.022.200,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene*	-			63 %	82.191.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	84 Sarana	108.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan				1 Dokumen	82.191.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Dokumen	108.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Persentase PMJ dan Sentra yang diterbitkan stiker pembinaan*	-			58 %	69.999.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Sentra Makanan Jajanan	500 Sarana	48.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	69.999.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	48.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah Usaha Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa*	-			10 Sarana	190.514.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	94,5 Persen	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				45 Unit	190.514.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	33 Unit	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**			**11 % Swastisab a Wiwerda Predikat**	**13.843.122.000,00**							**17.479.390.579,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*	-			50 %	56.968.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Instansi Pemerintah	30 Persen	86.269.467,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				56 Dokumen	56.968.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/ KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	86.269.467,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase kelurahan yang memiliki capaian persentase rumah tangga target PHBS tingkat kota*	-			70 %	164.990.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor	70,50	393.135.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi				8 Dokumen	164.990.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor	3 Dokumen	393.135.100,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						Kel/Desa							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-			6 %	13.621.164.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	25 Puskesmas 87,00% 42,00 persen	16.999.986.012,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya				5 Dokumen	13.621.164.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	2 Dokumen	16.999.986.012,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Masyarakat (UKBM)							UPATEN/ KOTA						
		PUSKESMAS BOGOR SELATAN						**4.848.310.900,00**							**2.891.638.409,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.848.310.900,00**							**2.891.638.409,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.848.310.900,00**							**2.891.638.409,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi***	**3.50 Poin A Nilai**			**3,76 Poin AA Nilai**	**4.342.781.380,00**							**2.891.638.409,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah													
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	4.342.781.380,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 Persen	2.891.638.409,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.342.781.380,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berday	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	2.891.638.409,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											a Saing					
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19*** **Prevalensi** ***Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)*** **Akses** ***sanitasi terhadap air bersih*** **Rasio** ***Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup*** **Rasio** ***Kematian Balita per***	**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14**			**0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**	**487.554.520,00**						**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1000 Kelahiran hidup Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Prevalensi Hipertensi Persentase Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehat	**% 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**			**8,40 % 87,00 % 90 % 90,00 % 99,80 %**							**% 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			an Nasional													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi* *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walik*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %			100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11.85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3, 1	487.554.520,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ota)" Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ibu hamil sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid-19 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota)*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional(12 IKS)* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				472 Orang	15.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				451 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6896 Orang	19.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				72 Orang	3.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Pembangu nan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				45 Orang	2.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	102.887.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	14.700.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Lingkungan									Masyarakat				
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	11.175.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Pembangu nan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	47.240.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	173.427.520,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Pembangu nan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan				1 Laporan	800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemberian Obat Massal)													
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				72 Orang	3.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Pembangu nan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				45 Orang	800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	2.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	81.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**			**11 % Swastisab a Wiwerda Predikat**	**17.975.000,00**						**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-			6 %	17.975.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	17.975.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												berbasis potensi lokal				
		PUSKESMAS CIPAKU						**4.814.544.550,00**							**3.370.629.892,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.814.544.550,00**							**3.370.629.892,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.814.544.550,00**							**3.370.629.892,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**			**3.76 Poin AA Nilai**	**3.717.365.030,00**							**3.370.629.892,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	3.717.365.030,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	3.370.629.892,00	PUSKESMAS CIPAKU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.717.365.030,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	3.370.629.892,00	PUSKESMAS CIPAKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	*Case Fatality Rate Covid-19* *Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)* *Akses sanitasi terhadap air bersih* *Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup* *Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup* *Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup* *Prevalensi Hipertensi* *Persentase*	86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran			0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran Hidup 8,40 % 87,00 % 90 % 90,00 % 99,80 %	1.059.104.520,00						86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahir	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional											**an**		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 %			100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang 100 % 100 %	1.059.104.520,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 %	0,00	PUSKESMAS CIPAKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS)* **(Program Unggulan Walikota)"* *Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar*	100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %			100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3, 1							100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kesehatan sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid-19 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) Persentase*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar *Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19												
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				165 Orang	21.450.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				838 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai				6863 Orang	16.550.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMA	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Standar							S		Masyarakat				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				60 Orang	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				18 Orang	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	405.431.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				14 Dokumen	22.950.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				29 Dokumen	14.875.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				124 Dokumen	80.190.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskes				92 Dokumen	279.333.520,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMA	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			mas							S		Masyarakat				
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan				10 Laporan	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				60 Orang	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				18 Orang	2.700.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				10 Dokumen	5.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				96 Dokumen	188.900.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**			**11 % Swastisab a Wiwerda Predikat**	**38.075.000,00**						**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-			6 %	38.075.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS CIPAKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		/Kota														
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				8 Dokumen	38.075.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS CIPAKU
		PUSKESMAS BONDONGAN						**4.000.194.199,00**							**2.534.913.800,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANA**						**4.000.194.199,00**							**2.534.913.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		N DASAR														
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.000.194.199,00**							**2.534.913.800,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**			**3,76 Poin AA Nilai**	**3.280.995.679,00**							**2.534.913.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	3.280.995.679,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	2.534.913.800,00	PUSKESMAS BONDONGAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.280.995.679,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	2.534.913.800,00	PUSKESMAS BONDONGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19*** ***Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)*** ***Akses sanitasi terhadap air bersih*** ***Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup*** ***Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup*** ***Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup*** ***Prevalensi Hipertensi***	**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**			**0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran 8,40 % 87,00 % 90 % 90,00 % 99,80 %**	**694.748.520,00**						**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per**	**729.485.946,00**	PUSKESMAS BONDONGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional											**100.000 Kelahiran**		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB*	100 % 100 % 100 %			100 % 57 Faskes 3 keluraha	694.748.520,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan	Masyarakat	100 % 100 % 100 %	729.485.946,00	PUSKESMAS BONDONGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*yang dilakukan penyelidikan*				n									
			*epidemiologi < 24 jam Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF "Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)" Pelayanan*	57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %			3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11.85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3 , 1					Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid-19 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call													
			Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat*													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional(12 IKS)* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				758 Orang	19.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		20.475.000,00	PUSKESMAS BONDONGAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				647 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		3.990.000,00	PUSKESMAS BONDONGAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3831 Orang	30.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		31.500.000,00	PUSKESMAS BONDONGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Selatan, Empang							
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				108 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		5.670.000,00	PUSKESMAS BONDONGAN
	1.02.02.2.0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.0012															
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				931 Orang	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		3.150.000,00	PUSKESMAS BONDONGAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	151.715.000,00	Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Empang Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		159.300.750,00	PUSKESMAS BONDONGAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	17.450.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		18.322.500,00	PUSKESMAS BONDONGAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	15.975.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		16.773.750,00	PUSKESMAS BONDONGAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	67.490.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		70.864.500,00	PUSKESMAS BONDONGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Selatan, Empang Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret							
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	207.043.520,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikare	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		217.395.696,00	PUSKESMAS BONDONGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									t							
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		4.646.250,00	PUSKESMAS BONDONGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.575.000,00	PUSKESMAS BONDONGAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				108 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		5.670.000,00	PUSKESMAS BONDONGAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				11 Orang	1.650.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor Selata	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.732.500,00	PUSKESMAS BONDONGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									n, Empang Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret							
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	3.300.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		3.465.000,00	PUSKESMAS BONDONGAN
	1.02.02.2.0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.0046															
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	157.100.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		164.955.000,00	PUSKESMAS BONDONGAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**			**11 % Swastisab a Wiwerda Predikat**	**24.450.000,00**						**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**25.675.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-			6 %	24.450.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	25.675.500,00	PUSKESMAS BONDONGAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	24.450.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang Kota Bogor, Bogor Selata	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		25.675.500,00	PUSKESMAS BONDONGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									n, Cikaret							
		PUSKESMAS LAWANG GINTUNG						**2.899.722.117,00**							**2.203.722.086,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.899.722.117,00**							**2.203.722.086,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.899.722.117,00**							**2.203.722.086,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**			**3.76 Poin AA Nilai**	**2.126.012.053,00**							**2.139.706.586,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah*	100 %			100 %	55.826.456,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	35.133.900,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	2.888.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				37 Paket	43.969.756,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Paket	35.133.900,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16 Paket	8.967.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*	100 %			100 %	13.312.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	50.850.600,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	13.312.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	7 Unit	50.850.600,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %			100 %	16.467.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	0,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	16.467.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik*	100 %			100 %	8.760.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	0,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	8.760.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	2.031.645.597,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	2.053.722.086,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.031.645.597,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	2.053.722.086,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Saing					
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19*** **86 %** ***Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)*** **95,00 %** ***Akses sanitasi terhadap air bersih*** **2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup** ***Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup*** **1,00 %** ***Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran*** **87,00 %** **8,40 %** **100,00 %** **90,00 %** **0,14 %** **3,00**				**0,10 %** **0,14 %** **100,00 %** **2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup** **3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup** **55,00 Per**	**742.335.064,00**							64.015.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			hidup ***Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup*** ***Prevalensi Hipertensi*** ***Persentase Balita berstatus gizi normal*** ***Akses jamban sehat*** ***Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus*** ***Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional***	**Per 1000 Kelahiran Hidup** **55,00 Per 100.000 Kelahiran**			**100.000 Kelahiran** **8,40 %** **87,00 %** **90 %** **90,00 %** **99,80 %**									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah*	1 Fasilitas 0,72 Per 30.000 penduduk 86 %			86 %	55.633.544,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		64.015.500,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit	23.641.000,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,				15 Paket	55.633.544,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	3 Paket	40.374.500,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan						Kel/Desa							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF "Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %			100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3	686.701.520,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	720.035.346,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			*Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)" Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai*				, 1								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid-19 Persentase Layanan Sistem													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota)* *Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Melitus yang													
			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				702 Orang	29.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		30.712.500,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Bogor, Bogor Selatan, Pakuan							
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				670 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		3.990.000,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Bogor, Bogor Selatan, Pakuan							
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5376 Orang	22.150.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota	DAK NON FISIK - DANA BOK- BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		23.257.000,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Bogor, Bogor Selatan, Pakuan							
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				720 Orang	7.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		7.560.000,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Bogor, Bogor Selatan, Pakuan							
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				75 Orang	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		3.150.000,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Bogor, Bogor Selatan, Pakuan							
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	127.799.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota	DAK NON FISIK - DANA BOK- BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		134.188.950,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Bogor, Bogor Selatan, Pakuan							
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	20.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		21.210.000,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	13.475.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		14.148.000,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	67.640.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		71.022.000,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	240.562.520,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		252.590.646,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		4.646.250,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.680.000,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				720 Orang	7.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		7.560.000,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				75 Orang	2.700.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota Bogor,	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		2.835.000,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Bogor Selatan, Pakuan							
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	4.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota	DAK NON FISIK - DANA BOK- BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		4.620.000,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Bogor, Bogor Selatan, Pakuan							
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	131.300.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota	DAK NON FISIK - DANA BOK- BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		136.865.000,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Bogor, Bogor Selatan, Pakuan							
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	95 %			-	0,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-	95 %	93.820.146,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSK	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup	-		93.820.146,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										ESMAS		Masyarakat				
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**			**11 % Swastisaba Wiwerda Predikat**	**31.375.000,00**						**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**32.943.750,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-			6 %	31.375.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	32.943.750,00	PUSKESMS LAWANGINTUNG
	1.02.05.2.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	03.0001															
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	31.375.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	DAK NON FISIK - DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		32.943.750,00	PUSKESMAS LAWANGGINTUNG
		PUSKESMAS BOGOR TIMUR						**5.633.087.496,00**							4.268.633.607,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.633.087.496,00**							4.268.633.607,00	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.633.087.496,00**							4.268.633.607,00	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**			**3.76 Poin AA Nilai**	**4.946.099.976,00**							**4.268.633.607,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	4.946.099.976,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	4.268.633.607,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.946.099.976,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	4.268.633.607,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	*Case Fatality Rate Covid-19* *Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)* *Akses sanitasi terhadap air bersih* *Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup* *Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup* *Rasio Kematian*	86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 %			0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per	669.012.520,00						86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000	81.390.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Prevalensi Hipertensi Persentase Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	**3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**			**100.000 Kelahiran 8,40 % 87,00 % 90 % 90,00 % 99,80 %**							**Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi* *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikо*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %				100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3, 1	669.012.520,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	81.390.750,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ta)" Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ibu hamil sesuai standar													
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar *Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)* *Persentase imunisasi Covid-19* *Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)* *Persentase Masyarakat*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional(12 IKS) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan*														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			sesuai standar Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19												
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1056 Orang	25.350.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1008 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10319 Orang	43.900.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1105 Orang	3.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				227 Orang	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	179.399.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	14.700.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		15.435.000,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	11.175.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	58.390.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup	Masyarakat		61.309.500,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Masyarakat				
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	174.673.520,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		4.646.250,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Masyarakat				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				145 Orang	3.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			44 Orang	1.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	2.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	136.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Keluraha n Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**		**11 % Swastisab a Wiwerda Predikat**	**17.975.000,00**							**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-		6 %	17.975.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	17.975.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
		PUSKESMAS PULO ARMYN					**3.422.931.029,00**								**2.608.469.842,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.422.931.029,00**								**2.608.469.842,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.422.931.029,00**								**2.608.469.842,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**		**3.76 Poin AA Nilai**	**2.614.158.509,00**								**2.608.469.842,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %		100 %	2.614.158.509,00				Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	2.608.469.842,00	PUSKESMAS PULO ARMYN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	2.614.158.509,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	2.608.469.842,00	PUSKESMAS PULO ARMYN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19***	**86 %**	**0,10 %**	**777.397.520,00**							**86 %**	**0,00**	
			Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	**95,00 %**	**0,14 %**								**95,00 %**		
			Akses sanitasi terhadap air bersih	**2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup**	**100,00 %**								**2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup**		
			Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	**1,00 %**	**2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup**								**1,00 %**		
			Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	**87,00 %**	**3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup**								**87,00 %**		
			Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	**8,40 %**	**55,00 Per 100.000 Kelahiran**								**8,40 %**		
			Prevalensi Hipertensi	**100,00 %**	**8,40 %**								**100,00 %**		
			Persentase Balita berstatus gizi normal	**90,00 %**	**87,00 %**								**90,00 %**		
			Akses jamban sehat	**0,14 %**	**90 %**								**0,14 %**		
			Angka	**3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup**	**90,00 %**								**3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup**		
				55,00 Per 100.000 Kelahiran	**99,80 %**								**55,00 Per 100.000 Kelahiran**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/keluraha n mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF "Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS)*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang	100 % 57 Faskes 3 keluraha n 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 %	777.397.520,00			-	Reform asi Sistem Keseha tan Daerah Pening kata n Kualit as Hidup Masyar akat	Masyara kat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang	0,00	PUSKE SMAS PULO ARMYN
			**(Program Unggulan Walikota)"* *Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar*	3 keluraha n 98 % "d 3 , 1 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3 , 1								3 keluraha n 98 % "d 3 , 1 100 % 100 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar *Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar* *Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar* *Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)*	100 % 100 % 95 %									100 % 100 % 95 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase imunisasi Covid-19 *Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)* *Persentase Masyarakat yang memiliki*													
			Jaminan Kesehatan Nasional(12 IKS)* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan*						%					

%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pelayanan TBC sesuai standar *Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar* *Prevalensi Covid-19*													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			150 Orang	19.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			40 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1567 Orang	25.550.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			144 Orang	7.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			40 Orang	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	194.327.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	20.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	18.475.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	77.190.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	255.780.520,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			16 Laporan	1.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			144 Orang	7.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			25 Orang	3.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	4.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	132.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**11 % Swastisab a Wiwerda Predikat**	**31.375.000,00**							**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**0,00**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-		6 %	31.375.000,00			-		Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	31.375.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Tajur Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari								
		PUSKESMAS BOGOR TENGAH					**2.906.414.494,00**								**2.548.747.822,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.906.414.494,00**								**2.548.747.822,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.906.414.494,00**								**2.548.747.822,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**		**3.76 Poin AA Nilai**	**2.511.252.974,00**							**3.50 Poin A Nilai**	**2.526.656.485,00**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*	100 %		100 %	77.063.500,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	19.785.500,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			5 Unit	77.063.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	5 Unit	19.785.500,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %		100 %	72.936.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	82.591.584,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan		72.936.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Laporan	82.591.584,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik*	100 %		100 %	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	25.531.579,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	37 Unit	25.531.579,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %	100 %	2.361.252.974,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	2.398.747.822,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	2.361.252.974,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	2.398.747.822,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**	***Case Fatality Rate Covid-19 Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Akses sanitasi terhadap air bersih***	**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup**	**0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup**	**377.186.520,00**								**22.091.337,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		MASYARAKAT	***Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Prevalensi Hipertensi Persentase Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang***	**1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**	**p 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran 8,40 % 87,00 % 90 % 90,00 % 99,80 %**										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			memiliki Jaminan Kesehatan Nasional													
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	*Cakupan desa/keluraha n mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF "Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Progra m Unggula n Walikota*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 keluraha n 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	100 % 57 Faskes 3 keluraha n 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100,00 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3 , 1	377.186.520,00				Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	194.159.400,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			)" Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar Persentase anak usia pendidikan												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid-19 *Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)* *Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan*														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kesehatan jiwa sesuai standar *Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi yang*														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			198 Orang	5.850.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		6.435.000,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			189 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		4.180.000,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1542 Orang	12.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		13.200.000,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		705 Orang	3.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		3.960.000,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		977 Orang	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		2.200.000,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	43.859.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		48.244.900,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	14.700.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		16.170.000,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	9.875.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		10.862.500,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	31.620.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		34.782.000,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 Dokumen	192.607.520,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan		1 Laporan	800.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		880.000,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Tengah, Cibogor								
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			977 Orang	3.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		977 Orang	1.050.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.105.000,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	2.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		2.420.000,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	45.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		49.720.000,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**		**11 % Swastisaba Wiwerda Predikat**	**17.975.000,00**							**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**19.772.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/K	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-		6 %	17.975.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		Masyarakat	-	19.772.500,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ota														
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	17.975.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		19.772.500,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
		PUSKESMAS SEMPUR					**2.662.357.771,00**								2.145.832.770,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.662.357.771,00**								2.145.832.770,00	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.662.357.771,00**								2.145.832.770,00	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**		**3.76 Poin AA Nilai**	**1.974.470.951,00**								**2.100.092.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah*	100 %		100 %	24.126.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi		Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	0,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	24.126.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi		Pegawai di Lingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*	100 %		100 %	45.703.700,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		-	100 %	104.259.800,00	PUSKESMAS SEMPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		6 Unit	45.703.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-	15 Unit	104.259.800,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %	100 %	1.904.640.851,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	1.995.832.770,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja		1.904.640.851,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	¤ Masyarakat	1 Unit Kerja	1.995.832.770,00	PUSKESMAS SEMPUR
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19*** ***Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)*** ***Akses sanitasi terhadap air bersih*** ***Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup*** ***Rasio Kematian***	**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per**	**0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**	**663.211.820,00**								**45.740.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Balita per 1000 Kelahiran hidup	**100.000 Kelahiran**		**8,40 %**										
			Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup			**87,00 %**										
			Prevalensi Hipertensi			**90 %**										
			Persentase Balita berstatus gizi normal			**90,00 %**										
			Akses jamban sehat			**99,80 %**										
			Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus													
			Persentase Masyarakat yang memilik													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			i Jaminan Kesehatan Nasional													
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk*	1 Fasilitas 0,72 Per 30.000 penduduk 86 %		86 % 0,72 Per 30.000 penduduk	80.057.300,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		Masyarakat		45.740.200,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaa			1 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			n Oleh Puskesmas													
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			22 Unit	14.666.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	15 Unit	25.216.000,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di			23 Paket	65.391.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	2 Paket	20.524.200,00	PUSKESMAS SEMPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitas Kesehatan yang disediakan													
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi* *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99.80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3 ,	583.154.520,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	0,00	PUSKESMAS SEMPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bogor Anjang Sehat (BAS) **(Program Unggulan Walikota)"* *Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar* *Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid-19 Persentase Layanan Sistem												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan*													
			pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar *Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini*													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			HIV sesuai standar *Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			629 Orang	19.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		601 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		5700 Orang	22.650.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		900 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		1 Orang	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dokumen	111.731.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	17.450.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	15.775.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	46.340.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 Dokumen	207.583.520,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca		1 Laporan	1.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			97 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1 Orang	2.700.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	3.300.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	113.900.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	95 %	-	0,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-	95 %	94.965.696,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen	0,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-		94.965.696,00	PUSKESMAS SEMPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**		**11 % Swastisaba Wiwerda Predikat**	**24.675.000,00**							**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-		6 %	24.675.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS SEMPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	24.675.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPUR
		PUSKESMAS GANG AUT					**2.018.592.457,00**								**1.048.593.716,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.018.592.457,00**								**1.048.593.716,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.018.592.457,00**								**1.048.593.716,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**		**3.76 Poin AA Nilai**	**1.457.056.937,00**								**992.345.716,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah*	100 %		100 %	71.005.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi		Pegawai dilingkup Puskesmas	100 %	7.117.728,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	4.610.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai dilingkup Puskesmas	2 Paket	7.117.728,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Paket	52.928.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai dilingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6 Paket	11.925.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai dilingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1.540.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi		Pegawai dilingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*	100 %		100 %	15.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	86.634.272,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			1 Unit	15.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	15 Unit	86.634.272,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %		100 %	9.325.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi		Pegawai dilingkup Puskesmas	100 %	0,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2 Laporan	9.325.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi		Pegawai dilingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik*	100%		100%	4.830.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Reformasi Birokrasi		Pegawai dilingkup Puskesmas	100%	0,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkualitas Dan Berdaya Saing					
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			7 Unit	4.830.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi		Pegawai dilingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100%		100%	1.356.896.937,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		Masyarakat	100%	898.593.716,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1.356.896.937,00			PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	1 Unit Kerja	898.593.716,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	*Case Fatality Rate Covid-19* *Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)* *Akses sanitasi terhadap air bersih* *Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup* *Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup* *Rasio Kematian Ibu per 100.000*	86% 95,00% 2,80Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00% 87,00% 8,40% 100,00% 90,00% 0,14% 3,00Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00Per 100.000 Kelahiran	0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran 8,40 % 87,00 % 90 % 90,00 % 99,80 %	543.560.520,00						56.248.000,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kelahiran Hidup *Prevalensi Hipertensi* *Persentase Balita berstatus* *gizi normal* *Akses jamban sehat* *Angka Keberhasilan* *Pengobatan Pasien TB* *Semua Kasus* *Persentase Masyarakat* *yang memiliki Jaminan* *Kesehatan Nasional*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	*1 Fasilitas 0,72 Per 30.000 penduduk 86 %*		86 % 0,72 Per 30.000 penduduk	49.840.000,00					Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		56.248.000,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			2 Unit	49.840.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit	56.248.000,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi* *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 100 % 100 % 100 % 100% 95 %	100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d	493.720.520,00				Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 100 % 100% 100 % 100% 95%	3.708.000,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Anjang Sehat (BAS) **(Program Unggulan* *Walikota)"* *Pelayanan kesehatan balita* *mendapatkan pelayanan* *kesehatan balita sesuai* *standar* *Pelayanan kesehatan Bayi* *Baru Lahir mendapatkan* *pelayanan kesehatan Bayi* *Baru Lahir sesuai standar* *Pelayanan kesehatan Ibu* *Bersalin*													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar *Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar*													
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar *Persentase Balita Sangat*													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid-19 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) Persentase ODGJ berat yang mendapatka*											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			n *pelayanan kesehatan jiwa* *sesuai standar* *Persentase orang dengan* *resiko terinfeksi HIV* *mendapatkan pelayanan* *deteksi dini HIV sesuai* *standar* *Persentase orang terduga* *TBC yang mendapatkan* *pelayanan TBC sesuai* *standar* *Persentase orang usia 15-59*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar *Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar *Prevalensi Covid-19*													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			360 Orang	15.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			400 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Paledang								
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		5600 Orang	19.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai		1 Orang	3.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		3.708.000,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Standar					Paledang								
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			1 Orang	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dokumen		106.895.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen		14.700.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Lingkungan					Paledang								
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	13.475.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	44.590.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Paledang								
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 Dokumen	175.585.520,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Paledang								
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	800.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1 Orang	3.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1 Orang	1.050.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	2.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGAUT
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	81.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Paledang								
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Prediket at Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**		**11 % Swastisaba Wiwerda Predikat**	**17.975.000,00**							**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-		6 %	17.975.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS GANGAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	17.975.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGAUT
		PUSKESMAS BELONG					**1.250.093.945,00**								**780.197.707,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**1.250.093.945,00**								**780.197.707,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**1.250.093.945,00**								**780.197.707,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**		**3.76 Poin AA Nilai**	**852.733.013,00**								**727.972.707,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah*	100 %		100 %	38.649.488,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi		Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	37.473.104,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	8.729.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi		Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Paket	2.098.500,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	19.522.688,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi		Pegawai di Lingkup Puskesmas	3 Paket	28.710.804,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	9.103.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi		Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Paket	5.204.300,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1.293.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi		Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Paket	1.459.500,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*	100 %		100 %	33.346.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi		Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	33.397.500,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Unit	7.060.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Reformasi Birokrasi		Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Unit	16.569.700,00	PUSKESMAS BELONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berdaya Saing					
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			5 Unit	26.286.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	3 Unit	16.827.800,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik*	100 %		100 %	5.610.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berday	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	8.730.000,00	PUSKESMAS BELONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										a Saing						
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			22 Unit	5.610.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	13 Unit	8.730.000,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %		100 %	775.127.425,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	630.197.707,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	775.127.425,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	630.197.707,00	PUSKESMAS BELONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19*** ** *Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)*** ** *Akses sanitasi terhadap air bersih*** ** *Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup*** ** *Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup*** ** *Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup*** ** *Prevalensi Hipertensi***	**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**		**0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran 8,40 % 87,00 % 90 % 90,00 % 99,80 %**	**386.310.932,00**							52.225.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	*Jumlah Pusat Isolasi non-fasyankes Covid-19 Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk*	1 Fasilitas 0,72 Per 30.000 penduduk 86 %		1 Fasilitas 86 % 0,72 Per 30.000 penduduk	70.994.412,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		52.225.000,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan			1 Unit	30.438.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BELONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas						sa								
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
			Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1 Unit	3.722.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	2 Unit	4.248.200,00	PUSKESMAS BELONG	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan															
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			1 Paket	36.834.412,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	5 Paket	47.976.800,00	PUSKESMAS BELONG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			yang disediakan													

	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi* *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Wali kota)"* *Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Pelayanan*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %		100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3 , 1	315.316.520,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	331.082.346,00	PUSKESMAS BELONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid-19 *Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) Persentase ODGJ berat*													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19												
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			139 Orang	3.900.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		4.095.000,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			169 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		3.990.000,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			680 Orang	5.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		6.090.000,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			695 Orang	1.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.890.000,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			450 Orang	1.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.050.000,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	62.807.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		65.947.350,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	11.950.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		12.547.500,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	12.275.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		12.888.750,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	21.380.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		22.449.000,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	136.279.520,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		143.093.496,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		4.646.250,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	400.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		420.000,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.02	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	.0040															
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			52 Orang	1.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.890.000,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			45 Orang	500.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		525.000,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	1.100.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.155.000,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	46.100.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		48.405.000,00	PUSKESMAS BELONG
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYAR**	***Persentase Kelurahan Siaga***	**Swastisaba Wiwerda Predikat**		**11 % Swastisab a Wiwerda**	**11.050.000,00**							**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**11.602.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		AKAT BIDANG KESEHATAN	***Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**11 %**		**Predikat**										
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-		6 %	11.050.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		Masyarakat	-	11.602.500,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			1 Dokumen	11.050.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyar		Masyarakat		11.602.500,00	PUSKESMAS BELONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(UKBM)								akat					
		PUSKESMAS MERDEKA					**3.251.622.532,00**								**2.218.149.509,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.251.622.532,00**								**2.218.149.509,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.251.622.532,00**								**2.218.149.509,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**		**3.76 Poin AA Nilai**	**2.561.898.012,00**							**2.218.149.509,00**		
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah*	100 %		100 %	49.422.275,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	15.729.180,00	PUSKESMAS MERDEKA	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	3.231.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS MERDEKA	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	30.890.275,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Paket	15.729.180,00	PUSKESMAS MERDEKA	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	15.301.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS MERDEKA	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*	100 %		100 %	30.462.333,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	56.212.800,00	PUSKESMAS MERDEKA	
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			2 Unit	30.462.333,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	6 Unit	56.212.800,00	PUSKESMAS MERDEKA	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %		100 %	69.915.992,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	78.058.020,00	PUSKESMAS MERDEKA	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	69.915.992,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Laporan	78.058.020,00	PUSKESMAS MERDEKA	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %		100 %	2.412.097.412,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	2.068.149.509,00	PUSKESMAS MERDEKA	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	2.412.097.412,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Panaragan	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	2.068.149.509,00	PUSKESMAS MERDEKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19*** ***Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)*** ***Akses sanitasi terhadap air bersih*** ***Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup*** ***Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup*** ***Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup*** ***Prevalensi Hipertensi***	**86 %** **95,00 %** **2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup** **1,00 %** **87,00 %** **8,40 %** **100,00 %** **90,00 %** **0,14 %** **3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup** **55,00 Per 100.000 Kelahiran**		**0,10 %** **0,14 %** **100,00 %** **2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup** **3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup** **55,00 Per 100.000 Kelahiran** **8,40 %** **87,00 %** **90 %** **90,00 %** **99,80 %**	**665.049.520,00**						**86 %** **95,00 %** **2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup** **1,00 %** **87,00 %** **8,40 %** **100,00 %** **90,00 %** **0,14 %** **3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup** **55,00 Per 100.000 Kelahiran**	**33.252.476,00**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah*	1 Fasilitas 0,72 Per 30.000 penduduk 86 %		86 %	0,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Fasilitas 0,72 Per 30.000 penduduk 86 %	0,00	PUSKESMAS MERDEKA	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			1 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MERDEKA	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 %		100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang	665.049.520,00				Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Pening	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 %	28.730.300,00	PUSKESMAS MERDEKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			epidemiologi *< 24 jam* *Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi* *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Wali kota)* " *Pelayanan kesehatan balita mendapatk*	9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %		100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3, 1						kata n Kualitas Hidup Masyarakat		9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			an pelayanan kesehatan balita sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid -19 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar *Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan*													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				508 Orang	9.750.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		487.500,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.02.2.0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.0002															
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			485 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		190.000,00	PUSKESMAS MERDEKA	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			5637 Orang	28.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.440.000,00	PUSKESMAS MERDEKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			714 Orang	1.850.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		92.500,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			459 Orang	1.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		50.000,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	172.571.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		8.628.550,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	17.450.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		872.500,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	10.375.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		518.750,00	PUSKESMAS MERDEKA	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	54.940.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		2.747.000,00	PUSKESMAS MERDEKA	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	250.938.520,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		8.024.750,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		221.250,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	1.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		60.000,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			75 Orang	1.850.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		92.500,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.02.2.02	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	.0041															
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		50 Orang	900.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		45.000,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	3.300.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		165.000,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	101.900.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		5.095.000,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	95 %		-	0,00			-		Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-	95 %	4.522.176,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0 Dokumen	0,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan	-		4.522.176,00	PUSKESMAS MERDEKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Kualitas Hidup Masyarakat				
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**		**11 % Swastisab a Wiwerda Predikat**	**24.675.000,00**							**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**1.233.750,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-		6 %	24.675.000,00			-		Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	1.233.750,00	PUSKESMAS MERDEKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	24.675.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.233.750,00	PUSKESMAS MERDEKA
		PUSKESMAS SEMPLAK					**4.171.967.910,00**								**3.601.298.720,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.171.967.910,00**								**3.601.298.720,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**4.171.967.910,00**								**3.601.298.720,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**		**3.76 Poin AA Nilai**	**3.521.158.390,00**								**3.601.298.720,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %		100 %	3.521.158.390,00				-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor	100 %	3.601.298.720,00	PUSKESMAS SEMPLAK
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang			1 Unit Kerja	3.521.158.390,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor	1 Unit Kerja	3.601.298.720,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan						Kel/Desa							
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19*** **86 %** ***Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)*** **95,00 %** ***Akses sanitasi terhadap air bersih*** **2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup** ***Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup*** **1,00 %** ***Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup*** **87,00 %** ***Rasio Kematian Ibu per 100.000***	**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**	**0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran 8,40 % 87,00 % 90 % 90,00 % 99,80 %**	**626.134.520,00**						**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahira**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kelahiran Hidup Prevalensi Hipertensi Persentase Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional											**n**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi* *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	100 % 57 Faskes 3 keluraha n 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3 , 1	626.134.520,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 keluraha n 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			m Ungulan Walikota)" Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar *Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar* *Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Pers*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			enta se imun isasi Covi d-19 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase*											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Melitus yang											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			702 Orang	19.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			670 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									r, Bogor Barat, Curug Mekar Kota Bogor, Bogor Barat, Curug			Masyarakat				
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1916 Orang	19.650.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									r Barat, Curug Mekar Kota Bogor, Bogor Barat, Curug							
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			54 Orang	3.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Bar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									at, Curug Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu							
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			94 Orang	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar Kota Bogo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									r, Bogor Barat, Curug							
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	161.771.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar Kota Bogo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								r, Bogor Barat, Curug								
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	17.450.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar Kota Bogo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								r, Bogor Barat, Curug								
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	12.175.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar Kota Bogo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									r, Bogor Barat, Curug							
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	53.890.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar Kota Bogo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									r, Bogor Barat, Curug							
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	206.323.520,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar Kota Bogo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								r, Bogor Barat, Curug								
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar Kota Bogo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									r, Bogor Barat, Curug							
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	1.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar Kota Bogo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									r, Bogor Barat, Curug							
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			54 Orang	3.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar Kota Bogo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									r, Bogor Barat, Curug							
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			94 Orang	2.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar Kota Bogo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								r, Bogor Barat, Curug								
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	3.300.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar Kota	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Bogor, Bogor Barat, Curug							
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	111.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mek	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								ar								
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Keluarhan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**		**11 % Swastisab a Wiwerda Predikat**	**24.675.000,00**							**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-		6 %	24.675.000,00			-		Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyar	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												akat				
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	24.675.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar Kota Bogor,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Bogor Barat, Curug							
		PUSKESMAS PANCASAN					**3.067.159.250,00**								**2.552.646.371,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.067.159.250,00**								**2.552.646.371,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.067.159.250,00**								**2.552.646.371,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**		**3.76 Poin AA Nilai**	**2.565.393.730,00**								**2.552.646.371,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %		100 %	2.565.393.730,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	2.552.646.371,00	PUSKESMAS PANCASAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	2.565.393.730,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	2.552.646.371,00	PUSKESMAS PANCASAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19 Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Akses sanitasi terhadap air bersih Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Rasio Kematian Balita per***	**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000**		**0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran 8,40 %**	**484.015.520,00**						**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahi**	**604.670.992,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1000 Kelahiran hidup Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Prevalensi Hipertensi Persentase Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki	**Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**	**87,00 % 90 % 90,00 % 99,80 %**							**ran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jaminan Kesehatan Nasional													
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Jumlah*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 %	100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang 100 % 100 % 100 %	484.015.520,00					Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 %	508.676.296,00	PUSKESMAS PANCASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			fasilitas kesehatan yang terakreditasi *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS)*	100 % 100 % 3700 Orang	100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 %								100 % 100 % 3700 Orang		
			(Program Unggulan Wali kota)* *" Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan* ***kesehatan balita*	3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3 ,1								3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid-19 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota) *Persentase Masyarakat yang memiliki*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jaminan Kesehatan Nasional(12 IKS)* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			sesuai standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			120 Orang	15.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		16.380.000,00	PUSKESMAS PANCASAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			651 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup	Masyarakat		3.990.000,00	PUSKESMAS PANCASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda			Masyarakat				
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatka			965 Orang	16.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkat	Masyarakat		16.800.000,00	PUSKESMAS PANCASAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			1130 Orang	3.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		3.780.000,00	PUSKESMAS PANCASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kuda							
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			10 Orang	1.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.050.000,00	PUSKESMAS PANCASAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	100.955.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		106.002.750,00	PUSKESMAS PANCASAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	14.700.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		15.435.000,00	PUSKESMAS PANCASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kuda							
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	10.975.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		11.523.750,00	PUSKESMAS PANCASAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan			1 Dokumen	51.390.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamata	DAK NON FISIK-DANA	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	Masyarakat		53.959.500,00	PUSKESMAS PANCASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						n, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	BOK-BOK PUSKESMAS		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat				
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	171.670.520,00		Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		180.254.046,00	PUSKESMAS PANCASAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		4.646.250,00	PUSKESMAS PANCASAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	800.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		840.000,00	PUSKESMAS PANCASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kuda							
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			133 Orang	3.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		3.780.000,00	PUSKESMAS PANCASAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			10 Orang	2.100.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		2.205.000,00	PUSKESMAS PANCASAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	2.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		2.310.000,00	PUSKESMAS PANCASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kuda							
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	81.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		85.720.000,00	PUSKESMAS PANCASAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	95 %		0,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-	95 %	95.994.696,00	PUSKESMAS PANCASAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen	0,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-		95.994.696,00	PUSKESMAS PANCASAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**11 % Swastisab a Wiwerda Predikat**	**17.750.000,00**							**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**18.637.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-		6 %	17.750.000,00				-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	18.637.500,00	PUSKESMAS PANCASAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	17.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		18.637.500,00	PUSKESMAS PANCASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS PASIR MULYA					**4.320.312.472,00**								**3.610.686.725,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.320.312.472,00**								**3.610.686.725,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**4.320.312.472,00**								**3.610.686.725,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai***	**3.50 Poin A Nilai**		**3.76 Poin AA Nilai**	**3.668.006.952,00**								**3.610.686.725,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah													
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %		100 %	3.668.006.952,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	3.610.686.725,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	3.668.006.952,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	3.610.686.725,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19 Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Akses sanitasi terhadap air bersih Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Rasio Kematian Balita per***	**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000**		**0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran 8,40 %**	**627.630.520,00**						**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1000 Kelahiran hidup Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Prevalensi Hipertensi Persentase Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehat	**Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**	**87,00 % 90 % 90,00 % 99,80 %**							**Kelahiran**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			an Nasional													
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah fasilitas*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 %		100 % 57 Faskes 3 keluraha n 3700 Orang 100 % 100 % 100 %	627.630.520,00			-	Reformasi Sistem Kesehata n Daerah Peningkat a n Kualitas Hidup Masyarak at	Masy araka t	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 %	0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kesehatan yang terakreditasi *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS)* **(Program Unggulan Walikota)"* *Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Pelayanan kesehatan*	100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %		100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3, 1							100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan													
			pelayanan Ibu hamil sesuai standar *Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan*													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) *Persentase imunisasi Covid-19* *Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase orang dengan*														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar *Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan*													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			755 Orang	13.650.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			740 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			897 Orang	29.050.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			1025 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			841 Orang	1.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Bogor Barat, Loji							
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	157.907.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	17.450.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	12.175.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Batu Kota Bogor, Bogor Barat, Loji							
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	60.240.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	207.583.520,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Bogor Barat, Loji							
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	1.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			125 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1 Orang	3.150.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Bogor Barat, Loji							
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	3.300.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	101.900.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**		**11 % Swastisab a Wiwerda Predikat**	**24.675.000,00**							**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-		6 %	24.675.000,00			-		Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	24.675.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
		PUSKESMAS GANG KELOR					**3.890.014.985,**								**2.034.197.96**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								00							**9,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.890.014.985,00**								**2.034.197.969,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.890.014.985,00**								**2.034.197.969,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**		**3.76 Poin AA Nilai**	**2.951.038.465,00**								**2.034.197.969,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %		100 %	2.951.038.465,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	2.034.197.969,00	PUSKESMAS GANG KELOR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	2.951.038.465,00		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	2.034.197.969,00	PUSKESMAS GANG KELOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19*** ***Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)*** ***Akses sanitasi terhadap air bersih*** ***Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup*** ***Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup*** ***Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup*** ***Prevalensi Hipertensi***	**86 %** **95,00 %** **2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup** **1,00 %** **87,00 %** **8,40 %** **100,00 %** **90,00 %** **0,14 %** **3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup** **55,00 Per 100.000 Kelahiran**	**0,10 %** **0,14 %** **100,00 %** **2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup** **3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup** **55,00 Per 100.000 Kelahiran** **8,40 %** **87,00 %** **90 %** **90,00 %** **99,80 %**	**914.301.520,00**							**86 %** **95,00 %** **2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup** **1,00 %** **87,00 %** **8,40 %** **100,00 %** **90,00 %** **0,14 %** **3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup** **55,00 Per 100.000 Kelahiran**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi* *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Ungg*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3 , 1	914.301.520,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	0,00	PUSKESMAS GANG KELOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ulan Walikotaj" Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar *Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*													
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) *Persentase imunisasi Covid-19* *Persentase Layanan Sistem Rujukan*													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Konseling dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar *Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan*													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				999 Orang Orang	23.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANG KELOR
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			954 orang Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANG KELOR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			6477 orang Orang	26.150.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANG KELOR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai			820 Orang Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANG KELOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Standar													
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			1091 Orang Orang	3.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANG KELOR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen Dokumen	401.363.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANG KELOR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen Dokumen	17.450.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANG KELOR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen Dokumen	12.275.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGKELOR
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen Dokumen	66.640.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGKELOR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen Dokumen	208.598.520,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANGKELOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANG KELOR	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca			1 Dokumen Laporan	1.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANG KELOR	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			93 Orang Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANG KELOR
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			12 Orang Orang	1.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANG KELOR
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen Dokumen	3.300.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANG KELOR
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen Dokumen	130.700.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANG KELOR
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**		**11 % Swastisab a Wiwerda Predikat**	**24.675.000,00**							**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-		6 %	24.675.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS GANG KELOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen Dokumen	24.675.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS GANG KELOR
		PUSKESMAS SINDANG BARANG					**5.868.946.183,00**								**3.084.759.600,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**5.868.946.183,00**								**3.084.759.600,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**5.868.946.183,00**								**3.084.759.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**		**3.76 Poin AA Nilai**	**4.575.238.663,00**							**3.50 Poin A Nilai**	**3.084.759.600,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %		100 %	4.575.238.663,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	3.084.759.600,00	PUSKESMAS SINDANG BARANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	4.575.238.663,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	3.084.759.600,00	PUSKESMAS SINDANGBARANG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19*** ** *Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)*** ** *Akses sanitasi terhadap air bersih*** ** *Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup*** ** *Rasio Kematian* **	**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per**		**0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran 8,40**	**1.255.632.520,00**						**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per**	**240.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Balita per 1000 Kelahiran hidup Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Prevalensi Hipertensi Persentase Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memilik	**1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**		**% 87,00 % 90 % 90,00 % 99,80 %**						**1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			i Jaminan Kesehatan Nasional													

	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi* *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Wali kota)*"* *Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %		100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3, 1	1.255.632.520,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	240.000,00	PUSKESMAS SINDANG BARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kesehatan balita sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			standar *Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)* *Persentase imunisasi Covid -19* *Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)* *Persentase*													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional(12 IKS)* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1227 Orang	29.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualita	Masyarakat		0,0	PUSKESMAS SINDANG BARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												s Hidup Masyarakat				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			60 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,0	PUSKESMAS SINDANGBARANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			13826 Orang	38.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,0	PUSKESMAS SINDANGBARANG
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			1309 Orang	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		150.000,0	PUSKESMAS SINDANGBARANG
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				143 Orang	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,0	PUSKESMAS SINDANGBARANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	533.159.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,0	PUSKESMAS SINDANGBARANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	22.950.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,0	PUSKESMAS SINDANGBARANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	17.575.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,0	PUSKESMAS SINDANGBARANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	96.440.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,0	PUSKESMAS SINDANGBARANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	279.233.520,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS SINDANGBARANG
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS SINDANGBARANG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan			1 Laporan	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS SINDANGBARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			155 Orang	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		90.000,00	PUSKESMAS SINDANGBARANG
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			143 Orang	3.900.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SINDANGBARANG
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	5.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SINDANGBARANG
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	208.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SINDANG BARANG
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	95 %				0,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	95 %	0,00	PUSKESMAS SINDANG BARANG
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	0,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SINDANGBARANG
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**			**11 % Swastisaba Wiwerda Predikat**	**38.075.000,00**						**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-			6 %	38.075.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS SINDANGBARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Daerah Kabupaten/Kota										Hidup Masyarakat				
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	38.075.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS SINDANGBARANG
		PUSKESMAS BOGOR UTARA						**5.575.851.124,00**							**3.883.666.122,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN**						**5.575.851.124,00**							**3.883.666.122,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DASAR														
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.575.851.124,00**							**3.883.666.122,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**		**3.76 Poin AA Nilai**	**4.680.529.604,00**								**3.883.666.122,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %		100 %	4.680.529.604,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	3.883.666.122,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.680.529.604,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	3.883.666.122,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19***	**86 %**			**0,10 %**	**870.646.520,00**						**86 %**	**2.992.500,00**	
			Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	**95,00 %**			**0,14 %**							**95,00 %**		
			Akses sanitasi terhadap air bersih	**2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup**			**100,00 %**							**2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup**		
			Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	**1,00 %**			**2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup**							**1,00 %**		
			Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	**87,00 %**			**3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup**							**87,00 %**		
			Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	**8,40 %**			**55,00 Per 100.000 Kelahiran**							**8,40 %**		
			Prevalensi Hipertensi	**100,00 %**			**8,40 %**							**100,00 %**		
				90,00 %			**87,00 %**							**90,00 %**		
				0,14 %			**90 %**							**0,14 %**		
				3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup			**90,00 %**							**3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup**		
				55,00 Per 100.000 Kelahiran			**99,80 %**							**55,00 Per 100.000 Kelahiran**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi* *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS)*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang			100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 98 % 99,80 %	870.646.520,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang	2.992.500,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			*(Program Unggulan Walikota)" Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar	3 kelurahan 98 % "d 3,1 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %		100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3,1%							3 kelurahan 98 % "d 3,1 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid-19 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar *Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1306 Orang	29.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1306 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7401 Orang	37.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1294 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2643 Orang	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	324.383.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	17.450.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	15.775.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	67.290.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	209.023.520,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				200 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				17 Orang	2.850.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		2.992.500,00	PUSKESMA BOGOR UTARA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	3.300.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	140.300.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**			**11 % Swastisab a Wiwerda Predikat**	**24.675.000,00**						**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-			6 %	24.675.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Daerah Kabupaten/Kota										Hidup Masyarakat				
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	24.675.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
		PUSKESMAS TEGAL GUNDIL						**3.448.179.660,00**							**2.334.431.545,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN**						**3.448.179.660,00**							**2.334.431.545,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DASAR														
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.448.179.660,00**							**2.334.431.545,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**		**3.76 Poin AA Nilai**	**2.831.682.347,00**								**2.334.431.545,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah*	100 %		100 %	25.214.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	49.992.500,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	4.873.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.497.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	3 Paket	19.996.200,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.843.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	2 Paket	29.996.300,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*	100 %		100 %	41.011.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	49.561.300,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL	
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			5 Unit	41.011.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	6 Unit	49.561.300,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %		100 %	60.948.220,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	49.999.195,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Dan Berdaya Saing					
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	60.948.220,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Laporan	49.999.195,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik*	100 %			100 %	14.030.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	14.030.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	2.690.478.127,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	2.184.878.550,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.690.478.127,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	2.184.878.550,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19 Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Akses sanitasi terhadap air bersih Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Rasio Kematian***	**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per**			**0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran 8,40**	**598.522.313,00**						**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per**	**71.258.250,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Balita per 1000 Kelahiran hidup	**100.000 Kelahiran**			**% 87,00 %**							**1000 Kelahiran Hidup**		
			Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup				**90 % 90,00 %**							**55,00 Per 100.000 Kelahiran**		
			Prevalensi Hipertensi				**99,80 %**									
			Persentase Balita berstatus gizi normal													
			Akses jamban sehat													
			Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus													
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kesehatan Nasional													
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Rasio*	1 Fasilitas 0,72 Per 30.000 penduduk 86 %			86 % 0,72 Per 30.000 penduduk	8.781.793,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Fasilitas 0,72 Per 30.000 penduduk 86 %	0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Puskesmas Per 30,000 penduduk													
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	8.781.793,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah fasilitas*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 %			100 % 57 Faskes 3 keluraha n 3700 Orang 100 % 100 %	589.740.520 ,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 %	71.258.250,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kesehatan yang terakreditasi													
			*Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF "Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)" Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan*	70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %		100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3 , 1					Hidup Masyarakat		70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			balita sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid-19 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar *Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			standar Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar													
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1980 Orang	21.450.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				489 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7000 Orang	32.750.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1025 Orang	3.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1044 Orang	1.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	146.987.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	14.700.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		15.435.000,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	13.275.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	48.740.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		51.177.000,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	173.413.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		4.646.250,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1025 Orang	3.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1044 Orang	1.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	2.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	117.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	95 %		-	0,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-	95 %	0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL	
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARA**	***Persentase Kelurahan***	**Swastisaba Wiwerda Pr edikat**			**11 % Swastisab a Wiwerd**	**17.975.000,00**						**Swastisaba Wiwerda Pr edikat**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAT BIDANG KESEHATAN	***Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**11 %**		**a Predikat**								**11 %**		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-		6 %	17.975.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	17.975.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyar	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												akat				
		PUSKESMAS WARUNG JAMBU						**4.154.766.072,00**							**2.560.797.140,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.154.766.072,00**							**2.560.797.140,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.154.766.072,00**							**2.560.797.140,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai***	**3.50 Poin A Nilai**		**3,76 Poin AA Nilai**		**3.391.528.552,00**							**2.560.797.140,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah													
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %		100 %	3.391.528.552,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	2.560.797.140,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	3.391.528.552,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	2.560.797.140,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
2.	**1.02.02**	**PROGRAM**	***Case***	**86 %**		**0,10 %**	**738.562.52**						**86 %**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	***Fatality Rate Covid-19***	**95,00 %**		**0,14 %**	**0,00**						**95,00 %**		
			Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	**2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup**		**100,00 %**							**2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup**		
			Akses sanitasi terhadap air bersih	**1,00 %**		**2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup**							**1,00 %**		
			Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	**87,00 %**		**3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup**							**87,00 %**		
			Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	**8,40 %**		**55,00 Per 100.000 Kelahiran**							**8,40 %**		
			Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	**100,00 %**		**8,40 %**							**100,00 %**		
			Prevalensi Hipertensi	**90,00 %**		**87,00 %**							**90,00 %**		
			Persentase	**0,14 %**		**90 %**							**0,14 %**		
				3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup		**90,00 %**							**3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup**		
				55,00 Per 100.000 Kelahiran		**99,80 %**							**55,00 Per 100.000 Kelahiran**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi* *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walik*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %		100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3, 1	738.562.520,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ota)" Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ibu hamil sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang													

			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid-19 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko*											

			terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining											

			kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19												
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				315 Orang	40.950.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				535 Orang	25.700.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				108 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Cipari gi Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8 Orang	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Cipari gi Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	170.099.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	17.450.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	15.775.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				6 Dokumen	70.640.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar			Masyarakat				
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				5 Dokumen	208.123.520,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi Kota Bogor, Bogor Utara, Cilu ar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	1.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				108 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi Kota Bogo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									r, Bogor Utara, Ciluar			Masyarakat				
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				18 Orang	2.700.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
	1.02.02.2.0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.0044															
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	3.300.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	161.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**			**11 % Swastisab a Wiwerda Predikat**	**24.675.000,00**						**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-		6 %	24.675.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4 Dokumen	24.675.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi Kota Bogor, Bogor Utar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									a, Ciular							
		PUSKESMAS TANAH SAREAL						**3.581.172.653,00**							**3.249.679.899,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.581.172.653,00**							**3.249.679.899,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.581.172.653,00**							**3.249.679.899,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**		**3.76 Poin AA Nilai**		**3.250.179.133,00**							**3.249.679.899,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah													
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	3.250.179.133,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	3.249.679.899,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.250.179.133,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berday	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	3.249.679.899,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											a Saing					
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19*** ** *Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)*** ** *Akses sanitasi terhadap air bersih*** ** *Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup*** ** *Rasio Kematian Balita per 1000***	**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahi**		**0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran 8,40 % 87,00 % 90 % 90,00 % 99,80 %**	**319.718.520,00**						**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahi**	**335.704.446,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kelahiran hidup Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Prevalensi Hipertensi Persentase Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan	**ran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**								**ran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nasional													
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi* *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 %		100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3, 1	319.718.520,00				Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 %	335.704.446,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			*mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)" Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan*	100 % 95 %									100 % 95 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid-19 *Persentase Layanan*											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			standar *Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar* *Prevalensi Covid-19*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		7 Orang	5.850.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		6.142.500,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		168 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		3.990.000,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		334 Orang	18.900.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		19.845.000,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		20 Orang	1.800.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.890.000,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		1 Orang	1.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.050.000,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dokumen	54.995.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		57.744.750,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	11.950.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		12.547.500,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	9.675.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		10.158.750,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	22.940.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		24.087.000,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 Dokumen	142.483.520,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		149.607.696,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		4.646.250,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1 Laporan	400.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		420.000,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		14 Orang	1.800.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.890.000,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		8 Orang	600.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		630.000,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	1.100.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.155.000,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	38.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		39.900.000,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL	
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	***Persentase Kelurahan Siaga***	**Swastisaba Wiwerda Predikat**	**11 % Swastisab a Wiwerda**	**11.275.000,00**							**Swastisaba Wiwerda Predikat**	**11.838.750,00**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIDANG KESEHATAN	***Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**11 %**	**Predikat**								**11 %**			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-	6 %	11.275.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	11.838.750,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat		1 Dokumen	11.275.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyara	Masyarakat		11.838.750,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(UKBM)								kat					
		PUSKESMAS PONDOK RUMPUT					**2.048.367.659,00**							**1.240.293.750,00**		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.048.367.659,00**							**1.240.293.750,00**		
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.048.367.659,00**							**1.240.293.750,00**		
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup***	**3.50 Poin A Nilai**		**3.76 Poin AA Nilai**	**1.312.338.334,00**							**1.213.427.750,00**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah													
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah*	100 %	100 %	80.052.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	45.696.900,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	22.318.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	35.989.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pegawai di Lingkup Puskesmas		7 Paket	45.696.900,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	21.745.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*	100 %	100 %	40.993.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	30.214.800,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		4 Unit	40.993.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	4 Unit	30.214.800,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	14.664.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	15.567.112,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	14.664.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Laporan	15.567.112,00	PUSKESMA PONDOK RUMPUT	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik*	100 %		100 %	31.690.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	31.655.188,00	PUSKESMA PONDOK RUMPUT	
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		67 Unit	31.690.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	32 Unit	31.655.188,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %	100 %	1.144.937.934,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	1.090.293.750,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1.144.937.934,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	1.090.293.750,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19*** ***Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)*** ***Akses sanitasi terhadap air bersih*** ***Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup*** ***Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup*** ***Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup*** ***Prevalensi Hipertensi***	**86 %** **95,00 %** **2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup** **1,00 %** **87,00 %** **8,40 %** **100,00 %** **90,00 %** **0,14 %** **3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup** **55,00 Per 100.000 Kelahir**	**0,10 %** **0,14 %** **100,00 %** **2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup** **3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup** **55,00 Per 100.000 Kelahiran** **8,40 %** **87,00 %** **90 %** **90,00 %** **99,80 %**	**724.979.325,00**							**26.866.000,00**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	**an**												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah*	1 Fasilitas 0,72 Per 30.000 penduduk 86 %	86 %	257.688.805,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		26.866.000,00	PUSKESMA PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		17 Unit	27.777.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMA PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis		1 Paket	229.910.905,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	3 Paket	26.866.000,00	PUSKESMA PONDOK RUMPUT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan													
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF "Kunjungan*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang	100 % 57 Faskes 3 keluruhan 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 100 %	467.290.520,00				Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang	512.853.072,00	PUSKESMA PONDOK RUMPUT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS)													
			**(Program Unggulan Walikota)" Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan*	3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3 , 1							3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid-19 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			standar *Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita Diabetes Melitus*													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		440 Orang	7.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		8.580.000,00	PUSKESMA PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		440 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		4.180.000,00	PUSKESMA PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		646 Orang	15.200.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		16.720.000,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		717 Orang	1.800.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.980.000,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		10 Orang	1.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.100.000,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dokumen	194.423.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		213.865.300,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	11.950.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkata n Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		13.145.000,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	9.775.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkata n Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		10.752.500,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	26.390.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		29.029.000,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 Dokumen	134.177.520,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		146.429.272,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		4.867.000,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1 Laporan	250.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		275.000,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.0	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.0040															
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		717 Orang	1.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.980.000,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		10 Orang	1.200.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.320.000,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	1.100.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.210.000,00	JSKESMA PONDOK UMPUT	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	52.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		57.420.000,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	95 %		-	0,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-	95 %	101.731.872,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-		101.731.872,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**		**11 % Swastisaba Wiwerda Predikat**	**11.050.000,00**						**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**12.155.000,00**		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-		6 %	11.050.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	12.155.000,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
	1.02.05.2.03.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0001															
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	11.050.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		12.155.000,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT	
		PUSKESMAS KEDUNG BADAK					**3.972.875.728,00**								**2.166.514.090,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.972.875.728,00**								**2.166.514.090,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.972.875.728,00**								**2.166.514.090,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**	**3,76 Poin AA Nilai**		**3.057.591.208,00**							**2.166.514.090,00**		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %	100 %		3.057.591.208,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		100 %	**2.166.514.090,00**		PUSKESMAS KEDUNG BADAK
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja		3.057.591.208,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		1 Unit Kerja	**2.166.514.090,00**		PUSKESMAS KEDUNG BADAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	*Case Fatality Rate Covid-19* *Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)* *Akses sanitasi terhadap air bersih* *Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup* *Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup* *Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup* *Prevalensi Hipertensi* *Persentase Balita berstatus gizi normal* *Akses jamban sehat* *Angka*	86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran	0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran 8,40 % 87,00 % 90 % 90,00 % 99,80 %	890.609.520,00						86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran	1.475.969.296,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional													
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes		100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang	890.609.520,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes	1.475.969.296,00		PUSKESMAS KEDUNG BADAK
			Jumlah fasilitas kesehatan	100 % 100 % 70 %		100 % 100 % 100 %				Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas		100 % 100 % 70 %			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			yang terakreditasi *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"* *Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Pelayanan kesehatan Bayi Baru*	9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3, 1				Dan Berdaya Saing	Hidup Masyarakat		9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase imunisasi Covid-19 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			standar *Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase warga negara usia 60 tahun*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1189 Orang	27.300.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		28.665.000,00	PUSKESMAS KEDUNG BADAK
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1135 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		3.990.000,00	PUSKESMAS KEDUNG BADAK
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1135 Orang	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KEDUNG BADAK
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		9263 Orang	30.400.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		31.920.000,00	PUSKESMAS KEDUNG BADAK
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		1182 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		11.340.000,00		PUSKESMAS KEDUNG BADAK
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		1316 Orang	3.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		3.150.000,00	PUSKESMAS KEDUNG BADAK	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	347.411.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		364.781.550,00	PUSKESMAS KEDUNG BADAK
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	17.450.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		18.332.500,00	PUSKESMAS KEDUNG BADAK
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	15.875.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		Masyarakat		16.668.750,00	PUSKESMAS KEDUNG BADAK
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	66.890.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		Masyarakat		961.048.746,00	PUSKESMAS KEDUNG BADAK
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	212.458.520,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KEDUNGBADAK
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		4.646.250,00	PUSKESMAS KEDUNGBADAK
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	1.200.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.260.000,00	PUSKESMAS KEDUNG BADAK
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			145 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		5.670.000,00	PUSKESMAS KEDUNG BADAK
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			115 Orang	6.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		6.300.000,00	PUSKESMAS KEDUNG BADAK
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	3.300.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		3.465.000,00	PUSKESMAS KEDUNG BADAK
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	140.300.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		14.731.500,00	PUSKESMAS KEDUNG BADAK
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**11 % Swastisaba Wiwerda Predikat**	**24.675.000,00**						**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**25.908.750,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-	6 %	24.675.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	25.908.750,00	PUSKESMAS KEDUNG BADAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kota														
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 Dokumen	24.675.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		25.908.750,00		PUSKESMAS KEDUNG BADAK
		PUSKESMAS KAYU MANIS					**3.826.791.707,00**							**3.054.247.356,00**		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG**					**3.826.791.707,00**							**3.054.247.356,00**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.826.791.707,00**								**3.054.247.356,00**	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	*Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah*	3.50 Poin A Nilai		3.76 Poin AA Nilai	2.988.086.187,00								3.054.247.356,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %		100 %	2.988.086.187,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %		3.054.247.356,00	PUSKESMAS KAYU MANIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	2.988.086.187,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	3.054.247.356,00	PUSKESMAS KAYU MANIS	
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19*** **Prevalensi** ***Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)*** ***Akses sanitasi terhadap air bersih*** ***Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup*** ***Rasio Kematian Balita per***	**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000**		**0.10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran 8,40 %**	**814.030.520,00**						**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1000 Kelahiran hidup Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Prevalensi Hipertensi Persentase Balita berstatus gizi normal Akses jamban sehat Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki	**Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**	**87,00 % 90 % 90,00 % 99,80 %**						**Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran**			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jaminan Kesehatan Nasional													
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Jumlah*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 %	100 % 57 Faskes 3 keluraha n 3700 Orang 100 % 100 % 100 %	814.030.520,00				Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 %	0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			fasilitas kesehatan yang terakreditasi *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)"* *Pelayanan kesehatan balita mendapatk*	100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3, 1							100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			an pelayanan kesehatan balita sesuai standar *Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar* *Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar* *Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid-19 Persentase Layanan Sistem Rujukan												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Konseling dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1 Orang	35.100.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1 Orang	42.450.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		1 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		1 Orang	2.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dokumen	258.947.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	17.450.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	15.490.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	77.490.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 Dokumen	205.028.520,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00		PUSKESMAS KAYU MANIS
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1 Laporan	1.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00		PUSKESMAS KAYU MANIS
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1 Orang	1.350.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	135.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS	
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**11 % Swastisab a Wiwerda Predikat**	**24.675.000,00**							**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**0,00**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sehat													
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-	6 %	24.675.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 Dokumen	24.675.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS	
		PUSKESMAS MEKARWANGI				**4.054.348.45**								**3.201.452.46**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							6,00							**2,00**		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.054.348.456,00**							**3.201.452.462,00**		
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**4.054.348.456,00**							**3.201.452.462,00**		
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat***	**3.50 Poin A Nilai**		**3.76 Poin AA Nilai**	**3.228.650.936,00**							**3.201.452.462,00**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daerah													
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %		100 %	3.228.650.936,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	3.201.452.462,00	PUSKESMAS MEKARWANGI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	3.228.650.936,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	3.201.452.462,00	PUSKESMAS MEKARWANGI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA**	***Case Fatality Rate Covid-19 Prevalensi Orang dengan Gangguan***	**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahira**		**0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup**	**801.022.520,00**							**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KESEHATAN MASYARAKAT	*Jiwa Berat (ODGJ)* *Akses sanitasi terhadap air bersih* *Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup* *Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup* *Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup* *Prevalensi Hipertensi* *Persentase Balita berstatus gizi normal* *Akses jamban sehat* *Angka*	n Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran		3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran 8,40 % 87,00 % 90 % 90,00 % 99,80 %							% 87,00 % 8,40 % 100,00 % 90,00 % 0,14 % 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup 55,00 Per 100.000 Kelahiran			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus													
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi* *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS)* **(Program*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %		100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3 1	801.022.520,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3 , 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	0,00	PUSKESMAS MEKARWANGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			m Ung gula n Wali kota)" Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar													
			Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase imunisasi Covid-19 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar *Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar*												
			Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatka													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			n pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			500 Orang	37.050.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MEKARWANGI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MEKARWANGI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1 Orang	37.300.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MEKARWANGI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			1 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MEKARWANGI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			1 Orang	3.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS MEKAR WANGI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	262.199.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat			0,00	PUSKESMAS MEKAR WANGI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	17.450.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MEKARWANGI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	12.275.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MEKARWANGI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	60.340.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MEKAR WANGI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	213.883.520,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MEKAR WANGI
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MEKAR WANGI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	1.200.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MEKAR WANGI
	1.02.02.2.0	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.0040															
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MEKAR WANGI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1 Orang	1.200.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MEKAR WANGI
	1.02.02.2.0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.0044															
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	3.300.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MEKAR WANGI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	132.800.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MEKAR WANGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**		**11 % Swastisab a Wiwerda Predikat**	**24.675.000,00**							**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-		6 %	24.675.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	0,00	PUSKESMAS MEKARWANGI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	24.675.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MEKARWANGI
		PUSKESMAS MULYAHARJA					**3.027.394.467,00**								**2.093.032.811,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.027.394.467,00**								**2.093.032.811,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**					**3.027.394.467,00**								**2.093.032.811,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KESEHATAN														
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**		**3,76 Poin AA Nilai**	**2.399.296.947,00**								**2.093.032.811,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Dae	*Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat*	100 %		100 %	40.129.800,00				-	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	0,00	PUSKESMAS MULYAHARJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		rah	*daerah*													
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	40.129.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas		0,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*	100 %		100 %	48.871.100,00			-	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	77.223.000,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang			3 Unit	48.871.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	5 Unit	77.223.000,00	PUSKESMAS MULYAHARJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Disediakan						Kel/Desa							
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %		100 %	37.699.100,00			-	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	55.077.000,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	37.699.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Laporan	55.077.000,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta	*Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik*	100 %		100 %	23.300.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 %	17.700.000,00	PUSKESMAS MULYAHARJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		han Daerah														
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			45 Unit	23.300.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Reformasi Birokrasi	Pegawai di Lingkup Puskesmas	26 Unit	17.700.000,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %		100 %	2.249.296.947,00			-		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	1.943.032.811,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	2.249.296.947,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1Unit Kerja	1.943.032.811,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Case Fatality Rate Covid-19 Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Akses sanitasi terhadap air bersih Rasio Kematian***	**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 %**		**0,10 % 0,14 % 100,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup**	**610.122.520,00**							**86 % 95,00 % 2,80 Per 1000 Kelahiran Hidup 1,00 % 87,00 % 8,40 %**	**628.286.872,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bayi per 1.000 kelahiran hidup ***Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup*** ***Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup*** ***Prevalensi Hipertensi*** ***Persentase Balita berstatus gizi normal*** ***Akses jamban sehat*** ***Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien***	**100,00 %** **90,00 %** **0,14 %** **3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup** **55,00 Per 100.000 Kelahiran**		**p 55,00 Per 100.000 Kelahiran** **8,40 %** **87,00 %** **90 %** **90,00 %** **99,80 %**							**100,00 %** **90,00 %** **0,14 %** **3,00 Per 1000 Kelahiran Hidup** **55,00 Per 100.000 Kelahiran**			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			TB Semua Kasus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional													
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah*	1 Fasilitas 0,72 Per 30.000 penduduk 86 %		86 %	0,00			-	Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 Fasilitas 0,72 Per 30.000 penduduk 86 %	0,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			1 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0,00	PUSKESMAS MULYAHARJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi* *Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF* *"Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor*	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %		100 % 57 Faskes 3 kelurahan 3700 Orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11,85 % 70 % 100 % 99,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % "d 3, 1	610.122.520,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 % 100 % 100 % 57 Faskes 100 % 100 % 70 % 9,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3700 Orang 3 kelurahan 98 % "d 3, 1 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	628.286.872,00	PUSKESMAS MULYAHARJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			*Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)" Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar *Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar* *Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase imunisasi Covid-19 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam(Program Unggulan Walikota) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(*												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			12 IKS) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentas												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			e orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi Covid-19													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			135 Orang	17.550.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		18.472.500,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			40 Orang	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		3.914.000,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			5966 Orang	21.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		22.042.000,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			37 Orang	1.850.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.905.500,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			5 Orang	1.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.030.000,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	218.219.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		224.765.570,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	14.700.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		15.141.000,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	10.975.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		11.304.250,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	53.440.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		54.508.000,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	172.513.520,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		177.688.802,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			18 Dokumen	4.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		4.557.750,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		824.000,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			37 Orang	1.850.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.905.500,00	PUSKESMAS MULYAHARJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			12 Orang	1.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.854.000,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan			1 Dokumen	2.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		2.266.000,00	PUSKESMAS MULYAHARJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			reproduksi						Selatan, Mulyaharja							
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	83.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		86.108.000,00	PUSKESMAS MULYAHARJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Keluarahan Siaga Aktif Mandiri Predikat Kota Sehat***	**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**		**11 % Swastisaba Wiwerda Predikat**	**17.975.000,00**							**Swastisaba Wiwerda Predikat 11 %**	**18.514.250,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri*	-		6 %	17.975.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	18.514.250,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	17.975.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		18.514.250,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH					**1.078.911.705,00**								**1.583.262.434,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**1.078.911.705,00**								**1.583.262.434,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATA**					**1.078.911.705,00**								**1.583.262.434,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		N														
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah***	**3.50 Poin A Nilai**		**3,76 Poin AA Nilai**	**1.078.911.705,00**								**1.583.262.434,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	100 %		100 %	1.078.911.705,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berku	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	100 %	1.583.262.434,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											alitas Dan Berdaya Saing					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1.078.911.705,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	1 Unit Kerja	1.583.262.434,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	J U M L A H						**352.959.215.916,00**								**613.738.175.717,00**	

BAB 5
PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (RENJA) merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya akan dijadikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mempedomani dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah di tetapkan guna mencapai visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024 merupakan rencana kerja dan target yang ingin dicapai pada tahun 2024 dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Prinsip-prinsip yang perlu dianut dalam penyusunan rencana kerja antara lain adalah kemitraan, transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, peningkatan partisipasi masyarakat, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Kemitraan berarti setiap pelaku haruslah dipandang sejajar, tidak ada pihak yang dipandang lebih tinggi atau lebih rendah. Transparansi berarti adanya keterbukaan, secara lebih kongkrit adanya akses untuk mendapatkan informasi yang benar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Akuntabilitas adalah prinsip yang menunjukkan setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra PerubahanDinas Kesehatan Kota Bogor. Kinerja Dinas Kesehatan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi dan misi serta strategi Dinas Kesehatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024 ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan kebijakan Pemerintah Kota Bogor dalam menyusun RKPD dan RAPBD di Kota Bogor.

F. DINAS SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan membagi dokumen perencanaan pembangunan tersebut berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Bogor adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kota Bogor.

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Kota Bogor mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja SKPD dapat dikerjakan secara stimultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD. Dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Kewenangan dan tugas fungsi Dinas Sosial harus dilaksanakan secara bertanggungjawab. Artinya sebagai konsekuensi dari pemberian hak dan kewenangan, penyelenggara pemerintahan dituntut melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional agar Visi dan Misi Kota Bogor dan Dinas dapat terwujud penuh. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya penyelenggara pemerintahan harus sadar untuk tidak hanya berorientasi pada hasil tetapi juga pada kebenaran dan kewajaran dalam proses pencapaiannya. Setiap upaya yang menggunakan sumber daya masyarakat, perlu diselenggarakan secara transparan. Penyelenggaran pemerintahan daerah yang bertanggungjawab dan transparan akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, maka Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Bogor mempunyai kedudukan yang strategis dalam upaya mendukung penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan tahunan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2024 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan urusan wajib sosial di Kota Bogor yang berpedoman kepada Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

2. Renja Dinas Sosial Kota Bogor merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan wajib Sosial. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja ini dapat diketahui pencapaian kinerja RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Kota Bogor sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2024 tidak terlepas dari tahapan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 360 dan pasal 361 ayat 3.
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Walikota Bogor No. 104 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor.
18. Peraturan Walikota Bogor No. 88 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan wali Kota Nomor 83 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)Tahun 2022.

19. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2024 Tanggal 22 Agustus 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 Kota Bogor adalah :

Maksud :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan Dinas Sosial Kota Bogor yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Tujuan :

a. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bogor tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kota Bogor.
b. Merumuskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan Dinas Sosial Kota Bogor selama tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Bogor sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN berisi :

1.1 Latar belakang, berisikan penjelasan tentang renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perubahan SKPD, serta ditindaklanjuti dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan hukum, memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD .

1.3 Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Sebagai acuan dalam menuangkan Program/kegiatan ke dalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
3. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah kedalam program dan kegiatan bidang sosial.
4. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.

1.4 Sistematika penulisan. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja peruabhan SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 berisi :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023 Tahun lalu dan capaian

Renstra Perubahan Perangkat Daerah, menguraikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perubahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun lalu serta realisasi Renstra Perubahan SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**,** menguraikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam SPM dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, menguraikan tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian RPJMD dan capaian program nasional (SPM), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN berisi :

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat Kajian terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD, memuat Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dijadikan dasar atas rumusan tujuan dan fungsi SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan, menjelaskan rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2022 dan prakiraan maju (Tahun n+1).

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA
DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Sosial sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial pada Tahun 2023 memiliki 6 program, 15 kegiatan, dan 43 sub kegiatan. Adapun capaian realisasi keuangan dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebesar Rp.12.532.542.651,- atau 94.48%.

2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didalamnya terdapat :

1. 6 (enam) kegiatan pokok
2. 15 (lima belas) sub kegiatan pendukung.

Kegiatan-kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dengan rincian capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RPJMD 2019-2024)

Program	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	A	100%
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3.40	3.54	104%

2.1.1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai rincian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RPJMD 2019-2024)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	A	100%

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai 3 (tiga) sub kegiatan :

Tabel 2.3.
Capaian Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RPJMD 2019-2024)

No	Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

2.1. 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mempunyai rincian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Capaian Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RPJMD 2019-2024)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100	100	100%

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mempunyai 1 (satu) sub kegiatan :

Tabel 2.5.
Capaian Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RPJMD 2019-2024)

No	Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100%

2.1. 1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai rincian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (RPJMD 2019-2024)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat Daerah	100	100	100%

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai 1 (satu) sub kegiatan :

Tabel 2.7.
Capaian Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (RPJMD 2019-2024)

No	Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%

2.1.1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai rincian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RPJMD 2019-2024)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
Pengadaan Barang Milik Daerah P Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah enunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100	100	100%

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mempunyai 1 (satu) sub kegiatan :

Tabel 2.8.
Capaian Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (RPJMD 2019-2024)

No	Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	100%

2.1.1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai rincian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.10.
Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RPJMD 2019-2024)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 3 (tiga) sub kegiatan :

Tabel 2.11.
Capaian Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (RPJMD 2019-2024)

No	Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%

2.1.1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai rincian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.12.
Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RPJMD 2019-2024)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100	100	100%

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 3 (tiga) sub kegiatan :

Tabel 2.9.
Capaian Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (RPJMD 2019-2024)

No	Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100%

2.1. Program Perlindungan dan Jaminan sosial 2.

Pada tahun 2023 program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki capaian kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya (RPJMD 2019-2024)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase jumlah PMKS yang tertangani	100%	100%	100%
	Persentase KK Miskin	19,26%	19,26%	100%
	Persentase penurunan anak terlantar (SPM)	100%	95,45%	95.45%

Program perlindungan dan jaminan sosial didalamnya memiliki 2 (dua) kegiatan pokok dengan 6 (enam) sub kegiatan pendukung. Kegiatan-kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut:

2.1. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 2.1

Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar mempunyai 3 (tiga) sub kegiatan :

Tabel 2.14.
Capaian Sub Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar (RPJMD 2019-2024)

No	Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	90	90	100%
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	90	90	100%
3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	90	90	100%

2.1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.2

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah mempunyai 3 (tiga) sub kegiatan :

Tabel 2.15.
Capaian Sub Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah (RPJMD 2019-2024)

No	Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100%
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	29.700 Orang	29.450 Orang	99.1%
3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	50 Orang	0 Orang	Refokusing

2.1. Program Rehabilitasi Sosial 3.

Program Rehabilitasi Sosial memiliki capaian kinerja program sebagai berikut :

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Program Rehabilitasi Sosial (RPJMD 2019-2024)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
Program Rehabilitasi	Prosentase anjal, Gepeng dan WTS	100%	100%	100%

Sosial	yang direhabilitasi			
	Prosentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)			
	ProsentasePenyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina			
	Persentase Kasus Kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos			
	Jumlah Lansia yang berdaya			

Program Rehabilitasi Sosial didalamnya memiliki 2 (dua) kegiatan pokok dengan 4 (empat) sub kegiatan pendukung. Kegiatan-kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut:

2.1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 3.1 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial memiliki 5 (lima) sub kegiatan :

Tabel 2.17.
Capaian sub Kegiatan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (RPJMD 2019-2024)

No	Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
1	Penyediaan Sandang	360 orang	360 Orang	100%
2	Penyediaan Alat Bantu	50 Orang	50 Orang	100%
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Orang	360 Orang	100%
4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	360 Orang	360 Orang	100%
5	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	360 Orang	360 Orang	100%

2.1. 3.2 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial terdapat 6 (enam) sub kegiatan :

Tabel.18
Capaian sub Kegiatan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (RPJMD 2019-2024)

No	Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	240 Orang	240 Orang	100%
2	Pemberian Layanan Kedaruratan	50 Orang	50 Orang	100%
3	Penyediaan Sandang	360 Orang	360 Orang	100%
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	360 Orang	360 Orang	100%
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	720 Orang	720 Orang	100%
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	150 Orang	150 Orang	100%

2.1.4 Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana memiliki capaian kinerja program sebagai berikut :

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Program Penanganan Bencana (RPJMD 2019-2024)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase

Program Penanganan Bencana	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	99.71	99,71%

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota memiliki 2 kegiatan :

2.1. 4.1 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota

Pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota mempunyai 4 (empat) sub kegiatan :

Tabel. 19.
Capaian sub kegiatan pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota (RPJMD 2019-2024)

No	Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
1	Penyediaan Makanan	500 orang	500 orang	100%
2	penyediaan Sandang	70 Orang	70 Orang	100%
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2 Unit	2 Unit	100%
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	100 Orang	100 Orang	100%
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	70 Orang	70 Orang	100%

2.1. 4.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Pada Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota mempunyai 1 (satu) sub kegiatan

Tabel. 19.
Capaian sub kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota (RPJMD 2019-2024)

No	Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	75 Orang	75 Orang	100%

2.1.5. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial memiliki capaian kinerja program sebagai berikut :

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Sosial (RPJMD 2019-2024)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
Pemberdayaan Sosial	Peresentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif	100%	100%	100%
	Peresentase Partisipasi Relawan penyuluh sosial yang aktif	75 Orang	75%	100%

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota memiliki 2 kegiatan :

2.1.5.1 Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pada Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki capaian kinerja program sebagai berikut :

Tabel. 21.
Capaian sub kegiatan pada Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (RPJMD 2019-2024)

No	Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Lembaga	5 Lembaga	100%

2.1.5.2 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Pada Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota memiliki capaian kinerja program sebagai berikut :

Tabel. 21.
Capaian sub kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota (RPJMD 2019-2024)

No	Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	90 Orang	100%
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Lembaga	130 Lembaga	100%
3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	25 Sertifikat	25 Sertifikat	100%

2.1.6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan memiliki capaian kinerja program sebagai berikut :

Tabel 2.22.
Capaian Kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (RPJMD 2019-2024)

Program/Keg	Indikator Kinerja	Targe	Realisas	Prosenta

iatan		t 2023	i 2023	se
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	100	100%

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota memiliki 1 (satu) kegiatan :

2.1. 6.1 Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota mempunyai 1 (satu) sub kegiatan :

Tabel. 23.
Capaian sub kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota (RPJMD 2019-2024)

No	Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Prosentase
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100	100	100%

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bogor

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang biasanya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi sangat mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Permasalahan yang biasa timbul dalam kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial adalah :

1. Identitas penduduk PMKS/PSKS yang tidak jelas;
2. Masih banyak penduduk PMKS/PSKS yang berpindah-pindah tempat tinggal;
3. Kerahasiaan data kesehatan khususnya data pengidap HIV/AIDS yang dapat menyulitkan pendataan;
4. Penyerahan hasil pendataan PMKS/PSKS yang tidak tepat waktu;
5. Dalam penanganan Orang Terlantar di perjalanan masih

ada kelayan yang tidak mengerti prosedur perihal perlu adanya surat keterangan dari kepolisian sebagai dasar pembuatan surat pengantar untuk dirujuk ke UPTD Terminal Baranangsiang bagi antar kota dalam Provinsi Jawa Barat dan ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bagi antar kota luar Provinsi Jawa Barat;

6. Dalam penanganan korban bencana alam masih ada laporan dari wilayah yang tidak akurat datanya. Selain itu ada juga kejadian yang dilaporkan tetapi bukan disebabkan bencana alam, atau jenis bencana tidak terkait langsung dengan Tupoksi Dinas Sosial Kota Bogor yang melaksanakan tanggap darurat pendistribusian natura. Hal ini banyak menimbulkan kesalahpahaman antara Dinas dengan Wilayah;
7. Kesulitan penampungan/penyimpanan hasil razia terutama untuk anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
8. Kesulitan metode yang diguanakan dalam memberikan pembinaan kepada PMKS dikarenakan kualitas SDM di bidang sosial sangat kurang;
9. Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
10. Penitipan anak jalanan, gelandangan dan pengemis melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan anak sangat terbatas jumlahnya;
11. PMKS yang diikutsertakan dalam pembinaan sering menolak untuk disertakan baik dari dirinya sendiri maupun keluarganya;
12. Fenomena PMKS yang ada di jalanan cenderung tidak pernah berkurang dan cenderung selalu bertambah;
13. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Tugas Pokok WKSBM, adanya pemikiran masyarakat bahwa WKSBM akan menjadi lembaga yang tumpang tindih dengan tugas organisasi yang telah ada di Kelurahan;
14. Adanya kendala di lapangan dalam pelayanan terhadap masyarakat dari pihak terkait, contohnya pelayanan rumah sakit.

Adapun upaya penanganan masalah meliputi :

1. Melakukan koordinasi dengan Kelurahan-kelurahan se-Kota Bogor;
2. Melaksanakan pengecekan sampai ke wilayah RT/RW;
3. Koordinasi dengan lintas sektoral melalui instansi terkait (Dinas Kesehatan Kota Bogor);
4. Melakukan monitoring pendataan dengan sistem jemput

bola ke wilayah;

5. Melakukan koordinasi dengan Bina Mitra Kepolisian setempat untuk menindaklanjuti bila ada kelayan yang tidak mengerti prosedur perihal perlu adanya surat keterangan dari kepolisian sebagai dasar pembuatan surat pengantar untuk dirujuk;
6. Terkadang bagi kelayan yang sudah tua/anak-anak yang terlantar, difasilitasi dengan mengantar ke tempat asalnya;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi yang menangani kebencanaan terkait pemberian bantuan dan melakukan sosialisasi mengenai kondisi Daerah Rawan Bencana;
8. Mengadakan pembinaan dan pelatihan peningkatan SDM kepada TAGANA yang membantu penanggulangan bencana alam;
9. Perekrutan SDM yang berlatar belakang ilmu sosial dan meningkatkan kualitas SDM yang sudah ada dengan mengirimkan PNS mengikuti Diklat;
10. Mengusulkan permohonan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
11. Penggunaan skala prioritas dengan mengutamakan warga asli Kota Bogor yang dititipkan;
12. Studi kasus koordinasi dengan Dinas Sosial Kota/Kabupaten lain dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
13. Memberikan pemahaman/pengertian kepada PMKS dan keluarganya dan terus melaksanakan kegiatan razia dan program pengentasan PMKS;
14. WKSBM merupakan kegiatan yang sinergis antara organisasi-organisasi masyarakat yang mana masing-masing organisasi berjalan sesuai dengan tupoksi organisasinya dan WKSBM sebagai wadah dari semua aspirasi maupun permasalahan yang ada di masyarakat;
15. Pihak pemerintah akan mengadakan sosialisasi dengan pihak rumah sakit dalam pelayanan masalah sosial.

Setiap organisasi pada umumnya menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang biasanya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada di luar kendali organisasi tetapi sangat mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisa lingkungan strategis digunakan teknik analisis SWOT

(*Strength, Weakness, Opportunity, Threat)* dengan sudut pandang Dinas Sosial Kota Bogor.

A. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang akan menjadi kekuatan dan kelemahan Dinas, Sosial Kota Bogor. Kajian internal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di dalam Dinas Sosial Kota Bogor yang meliputi Kekuatan ***(****Strength)* dan Kelemahan ***(****Weakness).*

1. Kekuatan *(Strength)*
   a. Memiliki tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang jelas, yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bogor 53 Tahun 2021.
   b. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.
   c. Memiliki koordinasi yang baik dengan pihak luar yang terkait.
   d. Memiliki rencana dan program kerja yang sudah tersusun dengan baik.
2. Kelemahan *(Weakness)*
   a. Pelaksanaan program yang belum optimal
   b. Terbatasnya sarana dan prasarana
   c. Efektifitas komunikasi dan koordinasi antar bidang dan sub bidang belum berjalan dengan baik
   d. Pelayanan sosial kepada masyarakat yang belum optimal

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial Kota Bogor. Kajian eksternal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di luar Dinas Sosial Kota Bogor yang meliputi Peluang ***(****Opportunity)* dan Ancaman *(Threat).*

1. Peluang *(Opportunity)*
   a. Tersedianya lembaga-lembaga masyarakat di bidang usaha kesejahteraan sosial dalam mengangani masalah sosial
2. Ancaman (*Threat*)
   a. Semakin bertambahnya angka kemiskinan
   b. Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terbatas

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan yang berasal dari masyarakat diperoleh dari hasil musrembang di tingkat Kecamatan, usulan-usulan tersebut disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial dan Kota Bogor. Dinas Sosial Kota Bogor membuat program dan kegiatan yang merupakan kegiatan prioritas dinas, sehingga pada tahun berikutnya aspirasi masyarakat dapat terealisasikan. Pada Rencana Kerja tahun 2024 usulan dari Masyarakat melalui musrembang tingkat kecamatan yang masih sedang dalam proses

Program strategis pertama Dinas Sosial Kota Bogor, yaitu :

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

   Penanganan Anak terlantar :

   Rujukan Anak Terlantar/Penjangkauan anak terlantar memberikan pelayanan terhadap penanganan anak terlantar dalam pemenuhan kebutuhan dasar dalam hal jaminan kesehatan perlindungan menuju kemandirian dan Adopsi Anak Terlantar melaksanakan fasilitasi pola kejelasan hukum asuh dan pemenuhan menuju kemandirian dalam penanganan tangung jawab orang tua asuh;

   Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

   Tingkat kemiskinan Kota Bogor untuk Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2023 adalah sebesar 6,67%. Nilai ini menunjukkan penurunan dari tahun 2022 sebesar 0,43%. Tingkat kemiskinan terus menurun dibandingkan saat pandemi covid-19, namun masih belum menyentuh di angka sebelum terjadi pandemi. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kota Bogor berjumlah 74,95 ribu orang, berkurang sebanyak 4,2 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada 2022 yang sebesar 79,15 ribu orang.

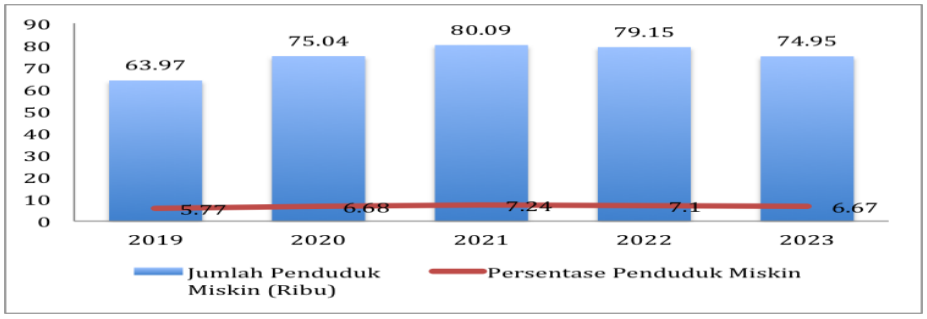

Tingkat kemiskinan Kota Bogor tahun 2023 dibawah tingkat kemiskinan nasional dan Jawa Barat. Sebagai daerah yang didominasi daerah perkotaan, tingkat kemiskinan Kota

Bogor sudah lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional khusus daerah perkotaan. Hal ini ditunjukkan Grafik di bawah ini:

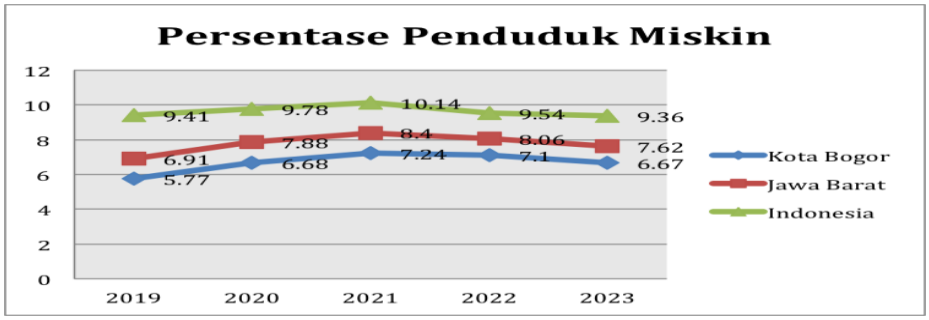

Jaring pengaman sosial menjadi hal penting dalam menjaga kemiskinan tidak semakin parah. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelengaraan kesejahteraan sosial. Angka DTKS dan nilai bantuan sosial di Kota Bogor terus bertambah terutama semenjak pandemi covid 19 merebak. Berikut Data perkembangan DTKS dan berbagai bantuan sosial di Kota Bogor

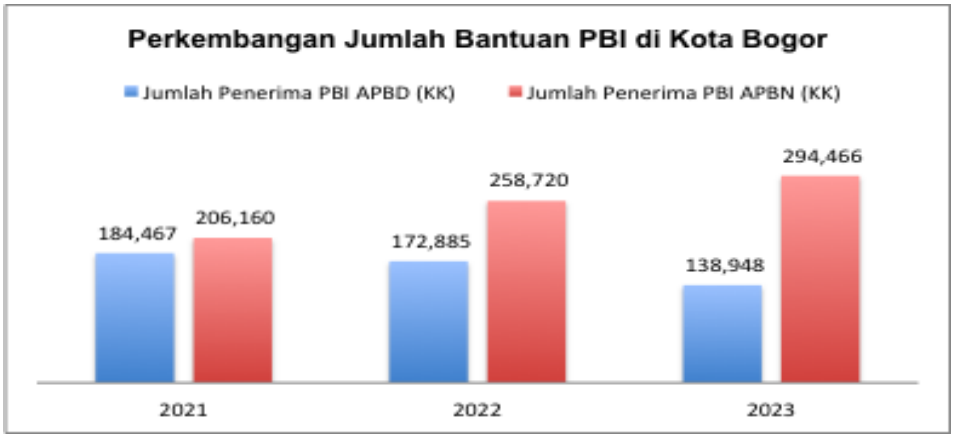

Untuk itu diperlukan koordinasi antara Dinas Sosial, aparat kelurahan dan kecamatan serta pendamping dan pilar pilar sosial lainnya agar penerima bantuan menurun atau banyak yang graduasi. Untuk graduasi ini diperlukan kegiatan untuk menambah pendapatan.

Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan penduduk kondisi rentan, termasuk penyandang disabilitas, orang terlantar dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk seperti itu biasanya memiliki kesempatan yang sangat

terbatas dalam sektor pekerjaan formal dan tidak memiliki sumber pekerjaan alternatif lain untuk menunjang ekonomi keluarga..

Percepatan penanggulangan dan penghapusan kemiskinan di Kota Bogor utamanya dilakukan dengan mentransformasi kehidupan dan kesejahteraan kelompok miskin. Upaya untuk mewujudkan hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bogor dengan menjalankan Program penanggulangan dan Penghapusan Kemiskinan dengan fokus pada penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah kecamatan kota Bogor, khususnya pada desil 1 (satu) dengan jumlah mencapai 13.755 orang, dengan kondisi data sebagai berikut ;

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Bogor Selatan	3.868
2	Kecamatan Bogor Barat	2.458
3	Kecamatan Tanah sareal	2.274
4	Kecamatan Bogor Utara	2.189
5	Kecamatan Bogor Tengah	1.603
6	Kecamatan bogor Timur	1.363
Jumlah		13.755

Berdasarkan data Kemenko PMK sebesar 5.722 kepala rumah tangga penduduk miskin ekstrem kota Bogor hanya lulusan Sekolah Dasar dan sebesar 3.745 lulusan setara Sekolah Menengah Pertama. Dan 3.340 berpendidikan Sekolah Menengah Atas, sedangkan yang tamat Perguruan Tinggi hanya sebanyak 24 orang sisanya adalah yang tidak menamatkan pendidikan . Penduduk miskin ekstrem memiliki rasio ketergantungan lebih tinggi, Akses penduduk miskin ekstrem terhadap akses sanitasi layak lebih rendah dibanding penduduk miskin.

Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kota Bogor

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

(i) penurunan beban pengeluaran masyarakat;
(ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta
(iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Selanjutnya ketiga strategi utama tersebut, diperinci ke dalam program-program action plan. Berikut program penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang

dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Sosial :

a. Penurunan beban pengeluaran masyarakat, Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu:
   1) Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako. (Pemerintah Pusat)
   2) Pendataan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah.
   3) Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

b. Peningkatan pendapatan masyarakat
   Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
   1) Peningkatan akses pekerjaan, melalui program penempatan akses pekerjaan, bantuan individu/kelompok (KUBE),
   2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program pelatihan/Bimtek.
   3) Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses bantuan modal usaha.
   4) Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan
      serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.

c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan
   Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
   1) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan melaui Bantuan Siswa Miskin (BSM) , layanan dan infrastruktur kesehatan melaui jaminan kesehatan PBI APBD, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
   2) Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

2. Program Rehabilitasi Sosial

a. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melaksanakan pemberian kesempatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan dasar kemandirian bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, Jumlah Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis, Lansia terlantar yang Ditangani sebanyak 148 orang. Pemberian rehabilitasi sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. Jumlah Kelompok Minoritas, Eks Narapidana dan Penyakit Sosial Lainnya yang jumlah penderita HIV/AIDS, WTS yang dibina dalam 1 (satu) Tahun, sebanyak 14 orang.

b. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah memberikan pelayanan fasilitas terhadap keterlantara sebelum melaksanakan reunifikasi keluarga diberikan kebutuhan pelayanan dasar serta bimbingan teknis spritual bagi PPKS yang berada atau ditangani dirumah singgah.

   Terlayaninya PPKS dan Orang Terlantar di rumah Singgah sebnayak 226 orang dalam 1 (satu Tahun).

c. Langkah kongkrit kegiatan rehabilitasi sosial :

   1. Pembuatan Perwali Disabilitas
   2. Untuk tahun 2024 APBD kota Bogor Menyiapkan
      a. Tongkat kaki
      b. Kruk Ketiak
      c. Kursi Roda Cerebral Palsy
      d. Kursi Roda Dewasa
   3. Kursi Roda Dewasa yang di ajukan melalui Musrembang
   4. Kursi Roda Dewasa yang di ajukan berdasarkan Pokir Dewan
   5. Untuk pengajuan alat bantu dengar di ajukan ke STIS dan Yayasan peduli Tuna Daksa
   6. Dan kursi Roda Dewasa yang diajukan ke STIS

3. Program Pemberdayaan Sosial

Program pemberdayaan sosial melaksanakan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota. Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang/Barang adalah sebanyak 5 dokumen. Sedangkan, jumlah potensi sumber kesejhateraan sosial

yang diberdayakan berjumlah 96 orang dan 121 Lembaga.

4. Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Program pemeliharaan Taman makam pahlawan melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan nassional Kabupaten/Kota dengan melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana makam dan pemeliharaan taman makam pahlawan. Terdapat 1 lokasi makam dengan jumlah 1069 makam.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
   Persentase penyusunan dokumen perencanaan (Renja OPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu.
2) Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH); Tersedianya rekomendasi penerima hibah/bansos.

6. Program Penangan Bencana

Program penanganan bencana melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota serta menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota. Jumlah korban bencanaalam yang tertangani sebanyak 2786 orang dan jumlah masyarakat yang diberdayakan terhadap kesiapsiagaan bencana sosial sebanyak 259 orang.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah secara umum di Kota Bogor mengalami perubahan paradigma terutama masalah Sosial sehingga memberikan peluang untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan.

Sejalan dengan berbagai upaya perbaikan kondisi ekonomi makro, yang meliputi upaya penanggulangan kemiskinan. Secara umum pelaksanaan berbagai kegiatan di dalam ketiga klaster tersebut berjalan dengan baik.

Salah satu klaster yang dilaksanakan adalah bertujuan untuk memberikan kemandirian, mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya dimana berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin. PKH dimaksudkan untuk menjaga agar anak-anak dari rumah tangga miskin tetap berada di sekolah sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya serta memelihara kesehatan balita agar tidak masuk katagori stanting serta ibu yang sedang hamil agar pertumbuhan anak dimasa golden years dapat optimal mulai dilakukan saat anak masih dalam kandungan, program penanganan ATM (Aids, TBC, Malaria).

Tahun 2022 kebijakan Dinas Sosial Kota Bogor diarahkan kepada penurunan angka kemiskinan, angka stanting guna peningkatan kesejahteraan sosial serta turut berperan aktif dalam pemulihan ekonomi akibat bencana sosial (*covid*-19). Sesuai dengan kebijakan nasional yang memprioritaskan perbaikan kondisi ekonomi makro mapun mikro, yang meliputi upaya penanggulangan kemandiriaan untuk pengurangan angka kemiskinan.

Secara eksplisit Kebijakan Dinas Sosial Kota Bogor tidak lepas dengan kewenangan yang ada yaitu pembenahan aspek Sumber Daya Manusia, berupa :

a. Pemberian bimbingan teknis dasar bagi Karang Taruna, PSM, Tagana, LK3, LKS/ Panti atau Yayasan.
b. Sosialiasi/ Pelatihan lanjutan bagi Karang Taruna, PSM, Tagana, LK3, LKS/ Panti atau Yayasan.
c. Pengrekutan/ pengkaderan untuk Karang Taruna, PSM, Tagana,LK3, LKS/ Panti atau Yayasan.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bogor

3.2.1. Tujuan dan Sasaran tercantum pada Misi 2 yaitu Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas dengan Indikator Kinerja pada pada Dinas Sosial dengan Prosentase peningkatan Kunjungan Taman Makam Pahlawan, dengan Sasaran Meningkatnya Kunjungan ke Taman Makam

Pahlawan terdapatnnya Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

3.2.2. Tujuan dan Sasaran pada Misi 2 yaitu Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas dengan Indikator Kinerja pada pada Dinas Sosial dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dengan Indikator Tujuan Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah. dengan Sasaran Meningkatnya KualitasTatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah, terdapatnnya Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) adalah Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah dengan nilai 80.01.

3.2.3. Tujuan dan Sasaran pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera,Tujuan 1: Penanganan Masyarakat Miskin melalui Pelayanan Sosial yang Tepat Sasaran, dengan Indikator Kinerja pada pada Dinas Sosial dengan Prosentase Pelayanan Sosial yang Tepat Sasaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dengan Sasaran Sasaran :(1). Meningkatnya kemandirian PPKS, (2). Meningkatnya peran serta PSKS, Terdapatnnya Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) adalah Indikator Sasaran sebagai berikut : (1). Prosentase peningkatan Jumlah PPKS yang tertangani 100%, (2). Prosentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Adapun penjabaran dari tujuan Rencana Kerja tersebut adalah :

1. Memberikan ruang, penguatan dan membuka akses organisasai kemasyarakatan, para pekerja sosial dan relawan, terkait partisipasi penanganan kemiskinan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar ataupun keterkaitan Kebencanaan.
2. Meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan dan fungsi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima pelayanan.
3. Memberikan kesempatan menuju kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainya (PPKS) (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks-Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks-narapidana, dan penyakit sosial lainnya)
4. Memberikan Pemenuhan akses (APLIKASI SOLID, Pelayanan SLRT) untuk kebutuhan dasar dalam pelayanan PKH, kebutuhan perlindungan kesehatan/PBI dan memberikan kemandirian

masyarakat rawan sosial/ miskin di Kota Bogor

5. Melaksanakan Pencegahan, penanganan dan pemenuhan dasar bagi yang terkena korban kebencanaan yang terjadi di Kota Bogor
6. Perawatan, Pemeliharaan serta memberikan fasilitas pemanfaatan Taman Makam Pahlawan Bogor
7. Mendukung dan berpasrtisipasi terkait penanganan program/ kegiatan isu strategis atau lainya seperti (1) Penanganan Stanting, (2) Penanganan ATM (aids, TBC, Malaria), (3) dan Lainya
8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas

Sasaran Strategis sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tahunan. Dalam kondisi ideal penerapan sasaran akan sangat baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai jangka panjang waktu penyampaiannya jelas, berorientasi pada hasil nyata.

Adapun penjabaran sasaran dari Dinas Sosial Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1) Organisasai kemasyarakatan, para pekrjsa sosial/ telawan, terkait partisipasi penanganan kemisikan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar dan Tagana.
2) Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan).
3) Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainya (PPKS) (anak terlantar, anjal, gepeng, WTS, eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya).
4) Masyarakat miskin di Kota Bogor yang membutuhkan atau yang harus ditangani dalam rangka pemenuhan jaminan kesehatan (PBI, masyarakat penerima bantuan sosial keluarga miskin).
5) Masyarkat yang terkena korban dampak kebencanaan yang terjadi di Kota Bogor.
6) Perawatan , Pemeliharaan serta memberikan fasilitasi pemanfaatan taman makam pahlawan Kota Bogor.
7) Masyarakat yang butuh terkait penanganan program/ kegiatan isu strategis atau lainya seperti : (1). Penanganan Stanting, (2) Penanganan ATM (aids, TBC, Malaria), (3) Lainnya
8) Akuntabilitas kinerja dinas (RPJM, Renstra, Renja, RKPD, Dokumen lainya)

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan kemudian dirumuskan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi) berupa serangkaian kebijakan dan program, kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai misi yang ada, maka kegiatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2020-2024 diarahkan kepada penurunan angka kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Berikut ini akan dijelaskan keterkaitan dan keselarasan antara misi, sasaran serta pencapaiannya melalui kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bogor dalam kurun waktu 2020 - 2024,adalah meningkatkan jangkauan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang sering disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sejalan dengan dilaksanakannya Undang-undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; maka penyelenggaraan Pemerintah secara umum di Kota Bogor mengalami perubahan paradigma terutama masalah Sosial sehingga memberikan peluang untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bogor maka diirumuskan cara mencapai tujuan dan sasaran berupa serangkaian kebijakan dan Program. Adapun rincian pagu anggaran seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

Pagu Perubahan Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial
Kota Bogor tahun 2024

NO	PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN	PAGU RKPD SIPD (Entry 12-7-2024)

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3
	DINAS SOSIAL	**17,467,158,152**
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**53,881,000**
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43,999,900
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,799,800
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,081,300
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**9,475,083,769**
	4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,443,626,769
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**643,200,377**
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31,457,000
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21,610,707
	7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	323,440,700
	8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44,128,770
	9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254,020,200
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**245,837,600**
	10. Pengadaan Mebel	80,662,000
	11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165,175,600
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1,146,575,924**
	12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221,379,285

	13. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116,157,479
	14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	809,039,160
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**498,107,800**
	15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	272,190,000
	16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103,459,800
	17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	122,458,000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**272,736,800**
7	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,194,000
	18. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1,194,000
8	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	271,542,800
	19. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	183,687,000
	20. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	67,349,600
	21. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	20,506,200
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**1,536,379,300**
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1,139,063,300

	22. Penyediaan Sandang	52,480,000
	23. Penyediaan Alat Bantu	896,112,300
	24. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	98,400,000
	25. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	84,871,000
	26. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	7,200,000
10	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	397,316,000
	27. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	31,200,000
	28. Pemberian Layanan Kedaruratan	234,000,000
	29. Penyediaan Sandang	29,536,000
	30. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	6,380,000
	31. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	52,800,000
	32. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	43,400,000
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**2,398,084,182**
11	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	67,379,800
	33. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	20,163,800
	34. Rujukan Anak-Anak Terlantar	22,134,000
	35. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	25,082,000

12	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2,330,704,382
	36. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	822,409,900
	37. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	402,489,400
	38. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1,105,805,082
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**1,147,124,600**
13	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	730,595,600
	39. Penyediaan Makanan	608,481,100
	40. Penyediaan Sandang	80,128,500
	41. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2,287,600
	42. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	24,053,400
	43. Pelayanan Dukungan Psikososial	15,645,000
14	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	16,529,000
	44. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	416,529,000
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**50,146,800**
15	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	50,146,800
	45. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	50,146,800

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2024 ini, telah diupayakan menjabarkan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2020-2024. Renja Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2024 merupakan kelanjutan Renstra-SKPD Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2020-2024 yang merupakan langkah atau kegiatan pokok sesuai dengan apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dengan adanya Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2024 maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang akan dibuat setelah tahun anggaran dapat lebih objektif karena rencana tingkat capaian (target) kegiatan telah ditetapkan pada awal tahun kerja. Selanjutnya dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Bogor ini dapat memacu kinerja seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Bogor dan dapat bertanggungjawab untuk merealisasikan rencana tingkat capaian (target).

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2024 ini disusun dengan harapan semoga segala yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan selalu mendapat ridho Tuhan Yang maha Esa.

Lampiran : Perubahan Renja 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BOGOR
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS SOSIAL							**12.185.098.038,00**	**15.333.997.721,00**	**17,467,158,152**							**3.657.659.500,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.185.098.038,00	15.333.997.721,00	17,467,158,152							3.657.659.500,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							12.185.098.038,00	15.333.997.721,00	**17,467,158,152**							3.657.659.500,00	
##	**1**	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URU**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**			**A**	**A Nilai**	**A Nilai**	**9.956.499.038,00**	**11.241.297.221,00**	**12,062,686,470**							**2.242.659.500,00**	

						SAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Lingkup Perangkat Daerah**																
	1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**-**		**A**	**A Nilai**	**A Nilai**	**11.549.700,00**	**53.881.000,00**	**53,881,000**			**-**	**Reformasi Birokrasi**	**-**		**0,00**	**DINAS SOSIAL**
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.999.900,00	43.999.900,00	43,999,900	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

		6	1	1	06																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.799.800,00	3.799.800,00	3,799,800	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	3.750.000,00	6.081.300,00	6,081,300	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL
	1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat**	**Prosentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	**-**			**100 %**	**100 %**	**8.087.211.825,00**	**8.378.629.720,00**	**9,475,083,769**			**-**	**Reformasi Birokrasi**	**-**		**57.000.000,00**	**DINAS SOSIAL**

						Daerah																	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	8.039.925.925,00	8.330.253.820,00	9,443,626,769	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	47.285.900,00	48.375.900,00	31,457,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			57.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**-**			**100 %**	**100 %**	**544.814.477,00**	**726.470.377,00**	**643,200,377**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi**	**-**		**781.659.500,00**	**DINAS SOSIAL**
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.610.707,00	21.610.707,00	21,610,707	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			21.659.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	212.925.000,00	387.040.700,00	323,440,700	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	44.128.770 ,00	44.128.770 ,00	44,128,770	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)	Mempe rkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transf ormasi Pelaya nan Publik	Reform asi Birokr asi			60.000.000,00	DIN AS SO SIA L
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	266.150.000,00	273.690.200,00	254,020,200	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)	Mempe rkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transf ormasi Pelaya nan Publik	Reform asi Birokr asi			350.000.000,00	DIN AS SO SIA L
	1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah sesuai**	**-**			**100 %**	**100 %**	**193.464.600,00**	**303.464.400,00**	**245,837,600**			**-**	**Reformasi Birokrasi**	**-**		**300.000.000,00**	**DINAS SOSIAL**

						Urusan Pemerintah Daerah	**RKBMD**																		
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	81.085.200,00	131.085.200,00	80,662,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	23 Unit	112.379.400,00	172.379.200,00	165,175,600	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**			**100 %**		**647.310.636,00**	**1.171.775.924,00**	**1,146,575,924**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelaya**	**Reformasi Birokrasi**	**-**		**204.000.000,00**	**DINAS SOSIAL**

																	nan Publik						
	1	0 6	0 1	2. 0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		173.380.000,00	221.379.285,00	221,379,285	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			204.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 1	2. 0 8	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan		120.105.976,00	116.157.479,00	116,157,479	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 1	2. 0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan				12 Lapo		353.824.660,00	834.239.160,00	809,039,	Kota Bogor,	Dana Tran	-	Reformasi			0,00	DINAS

							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				ran				160	Bogor Tengah, Ciwaringin	sfer Umum-Dana Alokasi Umum		Birokrasi				SOSIAL
	1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik**	**-**			**100 %**		**472.147.800,00**	**607.075.800,00**	**498,107,800**			**-**	**Reformasi Birokrasi**	**-**		**900.000.000,00**	**DINASSOSIAL**
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan				10 Unit		235.080.000,00	272.190.000,00	272,190,000	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	DINASSOSIAL

							Pajaknya																
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				140 Unit		114.609.800,00	114.609.800,00	103,459,800	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	DINASSOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		122.458.000,00	220.276.000,00	122,458,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINASSOSIAL
##	**1**	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Prosentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif Prosentase Partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif**			**100 % 85 %**	**100 % 85 %**	**100 % 85 %**	**229.549.800,00**	**353.549.800,00**	**272,736,800**							**250.000.000,00**	
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	

						Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif	-			121 Lembaga		5.494.000,00	5.494.000,00	1,194,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				20 Dokumen		5.494.000,00	5.494.000,00	1,194,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			50.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif	-			100 %		224.055.800,00	348.055.800,00	271,542,800			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang		111.200.000,00	235.200.000,00	183,687,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Lembaga Kesejahter				0 Lembaga		92.349.600,00	92.349.600,00	67,349,600	Kota Bogor, Semua	PENDAPATAN	-	Peningkatan Kualit			0,00	DINAS SO

							aan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota								Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD)		as Hidup Masyarakat				SIAL
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																	
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten /Kota				20 Sertifikat		20.506.200,00	20.506.200,00	20,506,200	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			50.000.000,00	DINAS SOSIAL

##	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Prosentase Anjal, Gepeng, dan WTS yang Direhabilitasi 2. Prosentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya) 3. Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina 4. Persentase Kasus Kekerasan			100 % 100 % 100 % 100 % Orang	100 % 100 % 100 % 100 % Orang	100 % 100 % 100 % 100 % Orang	813.519.300,00	1.547.179.300,00	1,536,379,300							990.000.000,00	

							dan traficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos 5. Jumlah Lansia yang Berdaya															
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	Prosentase Penurunan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-			100 %		405.403.300,00	1.139.063.300,00	1,139,063,300			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-		510.000.000,00	DINAS SOSIAL

						Panti Sosial																	
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang																	
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten /Kota				350 Orang		52,480,000.00	52.480.000,00	52,480,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan				74 Orang		212.452.300,00	896.112.300,00	896,112,300	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			250.000.000,00	DINAS SOSIAL

							Kabupaten /Kota																
	1	0 6	0 4	2. 0 1	00 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten /Kota				984 Orang		98.400.000 ,00	98.400.000 ,00	98,400,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 4	2. 0 1	00 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang				100 Orang		34.871.000 ,00	84.871.000 ,00	84,871,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			50.000.000,00	DINAS SOSIAL

							an Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota																	
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota				72 Orang		7.200.000,00	7.200.000,00	7,200,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase Penurunan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-			100 %		408.116.000,00	408.116.000,00	397,316,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-		480.000.000,00	DINAS SOSIAL

						Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial												Saing						
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				288 Orang		31.200.000,00	31.200.000,00	31,200,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedarurata				2400 Orang		240.000.000,00	240.000.000,00	234,000,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manus	Peningkatan Kualitas Hidup Masya			300.000.000,00	DINAS SOSIAL

							n Kewenangan Kabupaten /Kota									Kel/Desa	(PAD)	ia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	rakat				
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang																	
							Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten /Kota				130 Orang		29.536.000,00	29.536.000,00	29,536,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar				360 Orang		6.380.000,00	6.380.000,00	6,380,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			10.000.000,00	DINAS SOSIAL

							Panti Kewenangan Kabupaten /Kota											Dan Berdaya Saing					
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten /Kota				576 Orang		57.600.000,00	57.600.000,00	52,800,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																	
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				100 Orang		43.400.000,00	43.400.000,00	43,400,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			45.000.000,00	DINAS SOSIAL

							Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten /Kota																
##	**1**	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**1. Prosentase Penurunan Anak Terlantar 2. Prosentase KK Miskin 3. Prosentase Jumlah PMKS yang Tertangani**			**100% 19,26% 100%**	**100% 18,46% 100%**	**100% 19,26% 100%**	**843.175.100,00**	**973.175.000,00**	**2,398,084,182**							**175.000.000,00**	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Prosentase Penurunan Anak Terlantar	-			100%		67.379.800,00	67.379.800,00	67,379,800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-		175.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																	

							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten /Kota				90 Orang		20.163.800 ,00	20.163.800 ,00	20,163,800	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																	
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten /Kota				90 Orang		22.134.000 ,00	22.134.000 ,00	22,134,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																	
							Jumlah Anak Terlantar yang				90 Orang		25.082.000 ,00	25.082.000 ,00	25,082,000	Kota Bogor, Semua Kecam	PENDAPATAN ASLI	Meningkatkan Sumbe	Peningkatan Kualitas			50.000.000,00	DINAS SOSIA

							Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten /Kota								atan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	r Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Hidup Masyarakat				L
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Jumlah fakir miskin yang divalidasi Melalui Aplikasi SOLID Prosentase Jumlah Fakir Miskin yang Divalidasi Melalui Aplikasi SOLID	-			100 % 6900 Orang		775.795.300,00	905.795.200,00	2,330,704,382			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata				6900 Orang		597.070.000,00	727.069.900,00	822,409,900	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL

	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				32000 Keluarga		153.959.200,00	153.959.200,00	402,489,400	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah Insentif Fiskal	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang		24.766.100,00	24.766.100,00	1,105,805,082	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL

##	**1**	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten /Kota**			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**292.208.000,00**	**1.168.649.600,00**	**1,147,124,600**							**0,00**	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana	-			100 %		148.075.000,00	735.950.600,00	730,595,600			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																	

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang		139.208.500,00	608.481.100,00	608,481,100	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang		4.383.500,00	80.128.500,00	80,128,500	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL

	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																			
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Unit		2.287.600,00	2.287.600,00	2,287,600	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang		1.145.400,00	24.053.400,00	24,053,400	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																			
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial				10 Orang		1.050.000,00	21.000.000,00	15,645,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL

							Kewenangan Kabupaten /Kota																	
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Prosentase Jumlah Penanganan dan Penanggulangan Bencana oleh TAGANA	-			100 %		144.133.000,00	432.699.000,00	416,529,000			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan				75 Orang		144.133.000,00	432.699.000,00	416,529,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL

						Kabupaten /Kota																
##	**1**	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Prosentase pengelolaan taman Makam Pahlawan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		**50.146.800,00**	**50.146.800,00**	**50,146,800**						**0,00**	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Luas area terpelihara Taman Makam Pahlawan	-			1061 Unit 33500 m2		50.146.800,00	50.146.800,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman				1077 Makam		50.146.800,00	50.146.800,00	50,146,800	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL

							Makam Pahlawan Kabupaten/Kota											Berkualitas Dan Berdaya Saing						
	JUMLAH																						

G. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) merupakan bagian dari dokumen perencanaan perangkat daerah. Renja Perubahan memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah lingkup kabupaten/kota.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-Perangkat Daerah kabupaten/kota. Penilaian sebagaimana dimaksud, digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (sampai dengan Triwulan II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031;
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor

Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019–2024;
33. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2019-2024;
34. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan WaliKota Bogor Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2019-2024;
35. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 79 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) DKPP Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam Perubahan Rencana Strategis DKPP Kota Bogor Tahun 2019-2024;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian selama Tahun 2024 yang mencakup rencana capaian kinerja (target) pada tahun tersebut untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Perubahan RENJA DKPP Kota Bogor Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kota Bogor, antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kota Bogor.

1.3. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Perubahan RENJA DKPP Kota Bogor Tahun 2024 mengikuti sistematika penyusunan laporan RENJA DKPP Kota Bogor Tahun 2024, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Perangkat Daerah, proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah, keterkaitan antara RENJA Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, RENJA Perangkat Daerah, dengan RENJA K/L dan RENJA Provinsi/Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I tahun berjalan (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada laporan kinerja Semester I Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

- Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Wali Kota Bogor yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Bogor 2019-2024. Dukungan terhadap misi Kota Bogor diuraikan melalui tujuan dan sasaran dinas dengan indikator tujuan dan sasaran yang mewakili pada setiap misi. Uraian dari tujuan dan sasaran tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Untuk Tahun 2024, target kinerja pada tujuan dan sasaran kinerja dinas telah disesuaikan karena beberapa target indikator kinerja sudah terlampaui pada Tahun 2023. Penyesuaian target tersebut dicantumkan dalam Berita Acara Penyesuaian Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam rangka Penyusunan Renja Perubahan 2023 dan Renja 2024.

Tabel 1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	REALISASI KINERJA s.d. Semester I TAHUN 2024
Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat				
Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pangan yang sehat dan berkualitas.		Indeks Ketahanan Pangan (Nilai)	76,91	-
	Sasaran 1: Meningkatnya pemanfaatan pangan yang beragam, sehat dan aman sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Indeks Pemanfaatan Pangan (Nilai)	76,64	-
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**TARGET KINERJA TAHUN 2024**	**REALISASI KINERJA s.d. Semester I TAHUN 2024**
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas				
Tujuan 1: Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	A	-
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks reformasi birokrasi lingkup PD (Nilai)	82	-
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera				
Tujuan 1: Terwujudnya pemerataan akses pangan masyarakat		Indeks Keterjangkauan Pangan	82,30	-
	Sasaran 1: Tersedianya pangan yang beragam, dalam jumlah cukup dan terdistribusi merata, dengan harga terjangkau	Indeks Keterjangkauan Pangan (Nilai)	82,30	-
Tujuan 2: Terwujudnya aktifitas perekonomian di sektor pertanian dan perikanan		Distribusi Persentase PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Atas Dasar Harga Konstan (%)	0,66	-
	Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Perikanan	PDRB sektor pertanian/ kehutanan dan perikanan Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	270,76	-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, 2023

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan oleh 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan pemerintahan bidang pangan, sedangkan urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, serta urusan pemerintahan bidang pertanian. Masing-masing urusan tersebut mengampu beberapa program dan kegiatan.

2.1.1. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PANGAN

Urusan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilaksanakan melalui 4 (empat) program, 6 (enam) kegiatan, dan 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 5.768.765.255,-. Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan sampai dengan Semester I Tahun 2024, telah terealisasi keuangan sebesar Rp 60.036.050,-. Realisasi fisiknya mencapai sekitar 10%. Masing-masing indikator program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.

Capaian Program Urusan Bidang Pangan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024

No.	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
1.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	2.400	-	-
		Ketersediaan Protein (gram/kap/hari)	63	-	-
		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (poin)	83,7	-	-
2.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)	15,08	-	-
3.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi (%)	95,3	-	-

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat mempunyai 3 indikator kinerja, antara lain: Ketersediaan Energi, Ketersediaan Protein dan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Dari seluruh indikator program tersebut, belum dapat diketahui capaian targetnya, karena perhitungan dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat diimplementasikan dalam 3 (tiga) kegiatan, antara lain sebagai berikut :

1. **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi**

   Dalam kegiatan ini terdapat dua sub kegiatan, antara lain:

   a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

      Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun, dilaksanakan dengan indikator output : Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun. Beberapa aktivitas yang dilakukan untuk mencapai target indikator output tersebut, adalah: (1) Kajian Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Kota Bogor; dan (2) Rapat Koordinasi Konsumsi Pangan Tk. Kota Bogor. Sampai dengan Semester I Tahun 2024, aktivitas ini belum dilaksanakan karena jadwal pelaksanaannya adalah di Triwulan III dan IV.

   b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal

      Dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, dilaksanakan beberapa aktivitas, sebagai berikut:

      - Sosialisasi B2SA;

- Lomba Cipta Menu (LCM) B2SA Tk. Kota dan Provinsi;
- Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan B2SA dalam rangka mengikuti LCM B2SA Tk. Provinsi

Sampai dengan Semester I Tahun 2024, aktivitas ini belum terlaksana karena jadwal pelaksanaannya adalah di Triwulan III dan IV.

2. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Dalam kegiatan ini terdapat tiga sub kegiatan, antara lain:

a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) Kota Bogor adalah memberi gambaran ketersediaan baik produksi, impor maupun stok, dan penggunaan serta ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk wilayah Kota Bogor.

Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah Kota Bogor dengan menggunakan data sekunder, yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), OPD terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Perikanan, dan Bidang Ketahanan Pangan). Jangka waktu pelaksanaan adalah 2 (dua) bulan, yaitu: bulan Agustus s.d. September 2024.

b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini, antara lain:

- Gelar Pangan Murah; bertujuan untuk menyediakan bahan pangan yang murah dan berkualitas untuk masyarakat, mempermudah akses pangan bagi

masyarakat, mempengaruhi harga pasar agar tidak terlalu fluktuatif, dan menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen. GPM telah dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali dari rencana sebanyak 32 kali. Aktivitas GPM dilaksanakan di seluruh Kecamatan se-Kota Bogor.

• Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada bulan Maret 2024. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Rapat Koordinasi HBKN adalah untuk melihat kesiapan ketersediaan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis menjelang perayaan hari besar keagamaan Hari Raya Idul Fitri.

• Pemberian bantuan pangan untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan; dengan anggaran bersumber dari Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah). Bantuan direncanakan akan diberikan pada bulan Agustus-Oktober 2024 kepada Penerima Manfaat sebanyak kurang lebih 4.700 KK Miskin di 63 Kelurahan se-Kota Bogor yang masuk dalam data P3KE. Setiap penerima manfaat akan menerima paket bantuan yang berisi 9 komoditas pangan. Saat masih dilaksanakan proses pengadaan untuk bantuan pangan tersebut.

c. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

Kenaikan dan gejolak harga yang terjadi pada komoditas pangan akan menurunkan kesejahteraan rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah dan memicu kenaikan laju inflasi. Di Kota Bogor, harga komoditas bahan pangan yang sering mengalami fluktuasi harga, antara lain: beras, jagung, kedelai tepung terigu, gula pasir, minyak goreng, bawang, cabe, telur, dan daging. Untuk itu dilakukan pemantauan secara berkala agar harga pangan stabil, karena stabilnya harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

Sampai dengan Semester I Tahun 2024, pelaksanaan pemantauan harga pangan di tingkat grosir dan pengecer dilakukan setiap hari selama 6 (enam) bulan. Komoditas pangan yang dipantau harganya sebanyak 13 komoditi, antara lain: beras premium, beras medium, kedelai biji kering (impor), bawang merah, bawang putih bonggol, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi murni, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir curah/lokal, minyak goreng kemasan sederhana, dan tepung terigu curah.

3. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota terdapat satu sub kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pada Tahun 2024, target pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kota Bogor sebanyak 572 kg dalam bentuk beras. Pengadaan CPPD akan dirasionalisasi pada Renja perubahan 2024.

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan mempunyai 1 indikator kinerja, yaitu: persentase pemenuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan daerah (%). Pada Tahun 2024, targetnya adalah 57,14%. Sampai dengan Semester I Tahun 2024, target ini belum dapat diketahui capaiannya karena kegiatan belum dilaksanakan.

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan, yaitu:

1. **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

   Dalam kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yaitu: Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya. Aktivitas dalam sub kegiatan ini adalah Rehabilitasi Lantai Jemur kepada Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebanyak 1 (satu) paket. Pelaksanaan pekerjaan direncanakan pada Triwulan III.

Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan mempunyai 1 indikator kinerja, yaitu: persentase jumlah penduduk rawan pangan (%). Pada Tahun 2024, target persentase jumlah penduduk rawan pangan adalah 15,08%. Sampai dengan Semester I Tahun 2024, target ini belum dapat diketahui capaiannya karena akan dihitung pada akhir tahun.

Program Penanganan Kerawanan Pangan diimplementasikan dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1. **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**

   Dalam kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yaitu: Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan pangan di suatu wilayah. Peta ini penting karena menjadi indikator kinerja pembangunan pangan di daerah.

   Penyusunan peta FSVA menghasilkan laporan analisis yang mencakup: sebaran daerah rentan dan tahan pangan, faktor penyebab kerentanan pangan, rekomendasi kebijakan dan program untuk pengentasan daerah rentan pangan.

   Penyusunan peta FSVA Kota Bogor sampai dengan akhir Semester I TA 2024 masih dalam tahap pelaksanaan

pekerjaan, dimana penyusunannya mengacu kepada Panduan Penyusunan Peta FSVA yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional.

2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

Pemerintahan Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban penanganan urusan ketahanan pangan yang bersifat pemantauan terhadap situasi pangan dan gizi wilayah, seperti: (1) melakukan identifikasi kelompok rawan pangan di kabupaten; (2) melakukan penanganan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten; (3) melakukan pencegahan dan pengendalian, serta penanggulangan masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan, mutu, gizi, ketersediaan dan keamanan pangan; (4) melakukan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten untuk penyusunan kebijakan ketahanan pangan tingkat provinsi dan nasional. Pemantauan ini merupakan bagian dari Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang berfungsi sebagai instrument/alat *early warning system* (sistem peringatan/deteksi dini), sehingga situasi pangan dan gizi wilayah tetap terkendali.

Untuk pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi sangat dibutuhkan peran aktif semua OPD terkait (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bappeda, Dinas Kesehatan, DisKUKMdagin, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Satpol-PP, BPBD, 6 Kecamatan se-Kota Bogor dan BPS) yang memiliki akses dalam pembinaan di masyarakat dari mulai pembinaan dan pengawasan ibu hamil/proses kehamilan, kelahiran dan pasca kelahiran sampai dengan proses pertumbuhan tingkat anak-anak,

remaja dan dewasa yang sangat dipengaruhi oleh kondisi gizi yang bersangkutan. Setiap OPD sesuai tusi berperan aktif dalam penyediaan data untuk penghitungan analisis kewaspadaan pangan dan gizi, mengingat kondisi pangan dan gizi dimulai dari insan berada di dalam kandungan (*stunting*).

Dalam sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota terdapat aktivitas untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi indikator ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan.

Lokasi kegiatan berada di wilayah Kota Bogor. Sampai dengan Semester I Tahun 2024, telah terlaksana:

- Rapat Koordinasi SKPG tanggal 10 Mei 2024;
- Sosialisasi Hasil SKPG tanggal 17 Mei 2024

Hasil analisis SKPG dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu: Aspek Ketersediaan Pangan, Aspek Akses Pangan dan Aspek Pemanfaatan Pangan. Untuk Kota Bogor, aspek ketersediaan pangan tidak diperhitungkan. Berdasarkan hasil kajian, untuk wilayah-wilayah non tanaman pangan seperti wilayah perkebunan, nelayan, peternakan dan perkotaan, harga beras merupakan indikator yang kuat untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan dan atau kerawanan pangan dan gizi karena pola konsumsi pangan wilayah ini cenderung pola tunggal beras (WFP,2016), sehingga berdasarkan hal tersebut pada analisis SKPG untuk wilayah perkotaan hanya menggunakan aspek akses pangan dan pemanfaatan pangan.

Aspek akses pangan dilihat dari harga 6 komoditas pangan di tingkat konsumen yang meliputi harga beras, jagung, minyak goreng, gula pasir, daging ayam dan telur ayam. Harga 6 komoditas pangan tersebut dijadikan indikator untuk melihat situasi pangan dan gizi dari segi akses pangan pada setiap kecamatan di

Kota Bogor. Perhitungan dari segi aspek akses pangan dilihat dari harga pangan bulan berjalan dengan harga pangan 3 bulan sebelumnya. Situasi waspada dapat terjadi karena adanya fluktuasi harga pada bulan berjalan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya.

Aspek akses pangan setiap bulan pada tingkat kecamatan di Kota Bogor Tahun 2024 akan divisualisasikan melalui peta SKPG.

b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dalam sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan intervensi bantuan pangan menggunakan dana APBD dan Dana Insentif Fiskal. Intervensi bantuan pangan dari dana APBD, diberikan kepada kepada warga kelurahan prioritas 2 dan 3 yang terindikasi rawan pangan berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA Kota Bogor. Kelurahan yang termasuk prioritas 2 adalah Kelurahan Cimahpar, sedangkan prioritas 3 adalah Kelurahan Balumbangjaya dan Kencana.

Data warga Kelurahan Cimahpar, Balumbangjaya dan Kencana yang akan diberi bantuan, diambil dari data Desil 1 dari Dinas Sosial. Selanjutnya diverifikasi ke kelurahan untuk memastikan keakuratannya.

Bantuan pangan diberikan dalam bentuk paket dimana satu paket terdiri dari beras 5 kg dan telur 10 butir. Bantuan yang disalurkan sebanyak 275 paket, terdiri dari: 100 paket untuk kelurahan Cimahpar, 100 paket untuk kelurahan Kencana dan 75 paket untuk Balumbang Jaya.

Intervensi bantuan pangan dari Dana Insentif Fiskal, diberikan selain berdasarkan hasil kajian prioritas 2 dan 3 dan 4, juga berdasarkan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Penerima manfaat dipastikan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah.

Jumlah paket bantuan yang diberikan adalah 2.400 paket, yang dibagikan kepada 26 kelurahan dengan jumlah penerima manfaat bervariasi dari masing-masing kelurahan. Paket bantuan yang diberikan terdiri dari: beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, ayam 1 kg, dan telur 15 butir.

Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai 1 indikator kinerja, yaitu: prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi. Pada Tahun 2024, target indikator tersebut adalah 95,3%. Sampai dengan Semester I Tahun 2024, capaian target tersebut belum dapat diketahui karena akan diperhitungkan pada akhir tahun.

Program Pengawasan Keamanan Pangan diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan, yaitu:

1. **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota hanya melaksanakan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, yang di dalamnya terdapat uji mutu pangan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar cemaran atau Bahan Tambahan Pangan (BTP) berbahaya yang terkandung dalam makanan. Pelaksanaan kegiatan dimulai Bulan Pebruari sampai dengan Desember 2024.

   Sampel pangan yang diuji terdiri dari pangan segar asal tumbuhan dan pangan olahan non kemasan, sebanyak 9

jenis, yang diperoleh dari pedagang di Pasar Bogor, Pasar Sukasari, Pasar Padasuka, Pasar Kebon Kembang dan Pasar Merdeka. Parameter yang diujikan, antara lain: formalin, pewarna sintetis, pestisida, Pb dan *E. coli*.

2.1.2. URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN

Penanganan Urusan Pertanian dilaksanakan melalui 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 15 (lima belas) sub kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 9.701.509.606,00. Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Semester I Tahun Anggaran 2024 tercapai realisasi keuangan sebesar Rp 400.459.871,00 atau 4,13%.

Capaian kinerja pada masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.

Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanian s.d. Semester I Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura (%)	50,19	-	-
		Persentase pemenuhan sarana peternakan (%)	49,54	-	-
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pengelolaan kawasan LP2B (%)	12	-	-
		Persentase pemeliharaan prasarana pertanian (%)	90	-	-
3.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	-2,24	-	-

	VETERINER	Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar (%)	18	-	-
4.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan sawah yang dikendalikan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)(%)	39,25	-	-
5.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Capaian Bina Kelompok Tani (%)	93,25	-	-

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian mempunyai 2 (dua) indikator, yaitu: persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura dan persentase pemenuhan sarana peternakan. Indikator-indikator ini masing-masing mengakomodir bidang pertanian dan peternakan. Indikator yang digunakan untuk bidang pertanian adalah persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura dengan target 50,19%. Target ini merupakan angka rata-rata, yang dipenuhi dari persentase pemenuhan sarana benih padi, benih palawija, benih sayuran, bibit biofarmaka, bibit tanaman hias dan tanaman buah, *mini green house vegetable ponds*, hidroponik, jaring burung, pupuk serta jaringan irigasi. Angka rata-rata tersebut dapat diketahui pada saat perhitungan di akhir tahun anggaran.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian mengampu 3 (tiga) kegiatan, antara lain:

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Sarana Pertanian yang termasuk dalam sub kegiatan ini antara lain adalah Pupuk Bersubsidi, Kartu Tani, dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

- Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya berada dalam pengawasan negara dengan harga yang sudah disubsidi oleh Pemerintah dengan sasarannya adalah petani yang sudah membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pupuk yang disubsidi adalah Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik yang diproduksi oleh BUMN, yaitu: PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Petrokimia Gresik.

Sasaran penyaluran pupuk bersubsidi adalah diterapkannya pemupukan berimbang spesifik lokasi di tingkat petani, untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi serta memperbaiki kualitas hasil komoditas pertanian.

Pada Tahun 2024, Kota Bogor mendapat alokasi pupuk bersubsidi sekitar 99,35% dari RDKK yang diajukan oleh para petani. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan Bulan Agustus 2024 masih rendah, karena terkendala oleh tata cara penebusan, dimana seharusnya penebusan sudah harus menggunakan kartu tani, namun di Kota Bogor masih secara manual. Rincian penyaluran pupuk tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi s.d. Semester I Tahun Anggaran 2024

No.	JENIS PUPUK	RDKK (kg)	ALOKASI (kg)	PERSENTASE (%)	PENYALURAN s.d. JUNI 2024 (kg)
1.	Urea	77.700	79.700	102,57	8.445
2.	SP36	0	0	0	0
3.	ZA	0	0	0	0
4.	NPK	44.700	41.900	93,74	4.004
5.	Organik	0	0	0	0
	Jumlah	**122.400**	**121.600**	**99,35**	**12.449**

- Kartu Tani

  Kartu tani adalah sebuah alat transaksi berupa kartu debit multifungsi yang memuat informasi tentang profil petani, luas lahan, kebutuhan sarana produksi pertanian (Saprotan), informasi panen, maupun sebagai alat transaksi yang bisa digunakan untuk transfer, tarik tunai, pembayaran, pembelian, pinjaman dan yang lebih utama sebagai data penerima subsidi dan bantuan pemerintah. Kartu tani dapat digunakan juga untuk memonitoring penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

  Sasaran kartu tani adalah petani yang sudah membuat RDKK dan tergabung dalam kelompok tani. Petani yang belum tergabung dalam kelompok dihimbau untuk masuk dalam kelompok yang terdekat dengan domisili/tempat tinggal.

  Manfaat kartu tani antara lain: memiliki database petani yang tersaji lebih akurat dan terintegrasi dan informasi luas lahan pertanian per komoditas per wilayah; menyalurkan subsidi dan bantuan sosial lainnya lebih tepat sasaran; ketersediaan saprotan bersubsidi/nonsubsidi; kemudahan akses pembiayaan (KUR); menumbuhkan kebiasaan menabung (tidak konsumtif); biaya simpanan lebih ringan; mendapatkan program Prona (BPN).

  Kartu tani yang sudah diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri sebanyak 600 kartu akan tetapi yang sudah terdistribusi berjumlah 560 kartu, sisa kartu sebesar 40 adalah *reject* karena yang bersangkutan sudah meninggal atau pindah rumah. Dalam setiap kartu tertera kode kios masing-masing wilayah, sehingga tidak bisa membeli di sembarang tempat.

  Pada Tahun 2024, dari tiga kios yang sudah ditunjuk secara resmi, hanya satu kios masih aktif, yaitu Kios Tani Mandiri di Kelurahan Situ Gede, Kecamatan

Bogor Barat. Upaya untuk menambah jumlah kios pengecer agar lebih memudahkan petani di luar Kecamatan Bogor Barat menebus pupuk telah dilakukan, akan tetapi belum membuahkan hasil. Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2024, penebusan pupuk oleh petani ada yang sudah menggunakan kartu tani, namun ada pula yang masih menggunakan cara manual.

- Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

  Pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian untuk mengatasi kerugian petani. Premi asuransi yang dibayarkan adalah sebesar Rp.180.000,-/Ha/MT. Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp.144.000,-/Ha/MT dan sisanya swadaya petani Rp.36.000,-/Ha/MT.

  Pada Tahun 2024 Kota Bogor mendapat target seluas 170 Ha, dan tetapi hanya 81 Ha dari hasil verifikasi dan validasi yang dicover AUTP, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kembali. Rencananya AUTP akan direalisasikan pada bulan September.

Terkait dengan sarana pertanian tersebut di atas, dilaksanakan 1 (satu) aktivitas, yaitu:

- Pengadaan Sistem Infomasi data pembaharuan sumberdaya pertanian real time

  Pengadaan Sistem Infomasi data pembaharuan sumberdaya pertanian real time dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Kota Bogor untuk memonitoring dan mengevaluasi kelompok tani, baik jumlah, kelas kelompoknya, bantuan yang diterima, baik yang bersumber dari Kementerian Pertanian maupun dari APBD Kota dan sejauh mana pemanfaatannya.

  Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2024, pengadaan Sistem Informasi ini sampai pada tahap uji coba aplikasi kepada penyuluh di wilayah.

b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Beberapa aktivitas yang dilaksanakan dalam sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, antara lain:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pertanian (Musrembang dan Pokir)

  Penyediaan peralatan dan perlengkapan pertanian dilaksanakan dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat melalui Musrembang dan Pokir. Peralatan dan perlengkapan tersebut terdiri dari: mesin potong rumput 4 tak 1 unit, cangkul 5 unit, gunting stek 5 buah, handsprayer kapasitas 5 liter 2 unit, garpu 5 buah, kored/cengkrong 5 buah, Cabe Merah/Kriting 10 sachet, cabe rawit 30 sachet, caisim 50 sachet, kangkung spesifikasi: kangkung 50 sachet, timun 50 sachet, tomat 50 sachet.

  Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2024, penyediaan peralatan dan perlengkapan pertanian masih dalam proses pengadaan. Diperkirakan akan selesai pada bulan Juli 2024.

- Pengadaan Pupuk

  Pengadaan pupuk dimaksudkan untuk memberikan bantuan berupa pupuk non subsidi kepada kelompok tani dan Kampung Durian di Kota Bogor.

  Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2024, aktivitas ini masih dalam proses pengadaan. Diperkirakan akan selesai pada bulan Juli 2024.

2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota

a. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Sub kegiatan ini lebih difokuskan kepada pencapaian target indikator program yang kedua, yaitu: persentase pemenuhan sarana peternakan, dengan target 49,54%. Target ini merupakan angka rata-rata, yang dipenuhi dari persentase pemenuhan kebutuhan pakan ternak (unggas), sarana bibit unggas dan hasil Inseminasi Buatan (IB) pada sapi.

Beberapa aktivitas yang dilaksanakan dalam sub kegiatan ini, antara lain:

- Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKb)

  Inseminasi Buatan (IB) adalah salah satu teknik reproduksi buatan yang bisa digunakan pada hewan ternak, umumnya ruminansia besar. Di Kota Bogor penerapan IB dilaksanakan pada sapi perah dan sapi potong. Pelaksanaan IB di Kota Bogor disinkronkan dengan program unggulan Kementerian Pertanian, yaitu SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) yang mulai dicanangkan pada tahun 2020. SIKOMANDAN juga bertujuan untuk menambah populasi sapi dan kerbau dalam rangka memenuhi produksi daging sapi dan kerbau secara nasional.

- Pengadaan Bibit Ternak (kambing) untuk Pokir

  Tujuan pengadaan Bibit Ternak (kambing) adalah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga dari hasil budidaya ternak. Kambing yang akan dibudidayakan adalah sekitar umur 20 minggu. Kambing ini akan didistribusikan ke lokasi pokir Tahun 2024, yaitu KWT Munjul Ceria, Kel. Kayumanis.

- Pengadaan Bibit Lebah untuk Pokir

  Budidaya lebah madu (*Urban Bee*) di daerah perkotaan masih menjadi salah satu solusi bagi upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pasca pandemi Covid-19. Hasil dari budidaya lebah madu ini berupa madu dan propolis sangat bernilai ekonomi dan mempunyai nilai jual yang tinggi.

  Pada Tahun 2024, diberikan bantuan untuk budidaya lebah madu kepada 1 (satu) kelompok,

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (lebah trigona) untuk Urban Farming

  Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (lebah trigona) dimaksudkan sebagai bantuan kepada kelompok tani penggiat urban farming.

  Updating Data Ternak

  Updating data ternak dimaksudkan untuk memantau jumlah populasi ternak yang ada di Kota Bogor, baik yang dibudidayakan oleh masyarakat maupun yang masuk dan keluar Kota Bogor melalui jalur perdagangan. Ternak yang dipantau adalah sapi pedaging, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam ras, ayam bukan ras dan itik.

  Pemantauan ini berguna juga untuk mengetahui sebaran populasi ternak per Kelurahan, sehingga memudahkan dalam pemantauan kesehatannya.

b. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman

   Pada sub kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman, aktivitas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   - Pengadaan Benih Padi, Sayuran, Bibit Buah, Bibit Tanaman Hias dan Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka)

     Pengadaan benih padi, sayuran, bibit buah, tanaman

hias, dan tanaman obat-obatan dimaksudkan untuk ketersediaan pembibitan yang ada di lahan kebun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebar kepada masyarakat tani yang wilayahnya mendapat kehormatan mewakili Kota Bogor dalam ajang lomba baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional dan lomba-lomba di wilayah Kota Bogor. Selain di lokasi lomba, benih dan bibit disalurkan untuk kegiatan yang mendukung Gerakan Bogor Berkebun.

- Pengadaan Pemeliharaan Tanaman Pangan dan Peralatan

  Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan pemberian pupuk baik pupuk kimia maupun organik. Selain itu pengendalian hama penyakit baik secara alami maupun kimia dengan menggunakan furadan dan curacron.

- Pelaksanaan Ubinan Tanaman Pangan dan Hortikultura

  Survey ubinan tanaman pangan dan palawija bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai produktivitas (hasil per hektar) komoditas tanaman pangan (padi dan palawija) serta informasi pendukung lainnya, seperti metode penanaman, penggunaan pupuk dan penanggulangan OPT, dan lain-lain.

  Metode yang digunakan dalam ubinan adalah: hasil panen x 1600 dan diperoleh hasil produktivitasnya. Tanaman yang disurvey terdiri dari tanaman pangan dan palawija seperti padi, jagung, ubi jalar dan ubi kayu. Sampel ubinan yang paling penting untuk Kota Bogor adalah sampel ubinan padi yang merupakan salah satu dari kegiatan UPSUS Pajale dan merupakan data pendukung produksi padi di Kota Bogor. Pada Tahun 2024 target hasil ubinan padi (produktivitas) adalah 7,25 ton per hektar.

- Gerakan Tanam Cabe

  Dalam rangka mendukung pogram pengendalian inflasi Kota Bogor, maka dilakuan penyebaran dan penanam bibit cabe di seluruh wilayah Kota Bogor (68 Kelurahan).

- Bogor Agro Eduwisata Farm dan Nurseri (BERSERI)

  Pembangunan Bogor edu agro wisata "BERSERI" dimaksudkan sebagai tempat untuk edukasi masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan sehari-hari serta inovasi-inovasi terbaru di bidang ini. Salah satu komponen utama dari proyek ini adalah pembangunan nurseri (ruang pembenihan & pembibitan) dan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan modern guna mendukung kegiatan penelitian dan praktik pertanian. Kelengkapan sarana dan prasarana nursery dan laboratorium ini diharapkan membantu kegiatan edukasi dan wisata bagi masyarakat dan kelompok tani khususnya di Kota Bogor dan masyarakat dari luar Kota Bogor. Sampai dengan akhir Semester I TA 2024, proyek BERSERI masih dalam proses pengadaan.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai 2 (dua) indikator, yaitu: persentase pengelolaan kawasan LP2B dan persentase pemeliharaan prasarana pertanian. Target indikator persentase pengelolaan kawasan LP2B Tahun Anggaran 2024 adalah 10%, sedangkan target indikator persentase pemeliharaan prasarana pertanian adalah 85%. Capaian kinerja kedua indikator tersebut baru dapat diketahui pada akhir tahun anggaran.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian mengampu 2 (dua) kegiatan, antara lain:

1. Pengembangan Prasarana Pertanian

a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B

Pada tahun 2024, sub kegiatan ini tidak memiliki aktivitas dikarenakan keterbatasan anggaran.

2. Pembangunan Prasarana Pertanian

a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan sarana pelayanan masyarakat yang mengemban 3 fungsi, yaitu:

- **Fungsi teknis;** yaitu sebagai penghasil produk daging yang **ASUH** (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)
- **Fungsi ekonomis;** yaitu sebagai unit penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).dan penyerapan tenaga kerja.

Tabel berikut menggambarkan target, perubahan target serta realisasi retribusi RPH sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Tabel 6.

Rincian Target PAD Awal dan Perubahan Tahun 2024

No.	JENIS RETRIBUSI	TARGET		s.d JUNI 2024		
		AWAL	PERUBAHAN	REALISASI	% (target awal)	% (target perubahan)
1	Retribusi pemotongan sapi/kerbau	589.560.000	618.240.000	374.400.000	63,50	60,56
2	Retribusi pemotongan unggas	24.480.000	68.214.000	21.100.000	86,19	30,93

3	Retribusi pemotongan kambing/ domba	35.960.000	13.546.000	21.500.000	59,79	158,72
	JUMLAH	**650.000.000**	**700.000.000**	**417.000.000**	**64,15**	**59,57**

Perubahan target PAD di RPH dilakukan setelah mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian PAD RPH sampai dengan Semester I Tahun 2024.

Fungsi sosial; yaitu memberikan ketentraman batin kepada masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit zoonosis dan keracunan makanan (*Food Born Disease* dan *Food Born Intoxication*) melalui penyediaan daging yang ASUH, serta menjadi tempat alternatif peningkatan kesejahteraan dan solusi bagi masyarakat sekitar RPH.

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mengampu 3 (tiga) kegiatan, antara lain:

1. **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota**

   a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

      Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan tersedianya hewan/ternak yang sehat (bebas penyakit zoonosis), mendeteksi penyakit hewan secara dini dan mencegah kasus penyakit hewan menular. Beberapa aktivitas yang telah dilaksanakan antara lain:

      - Pelaksanaan *Biosecurity* (Desinfeksi Kandang dan Lingkungan) dalam upaya Pengendalian Penyakit Flu Burung

Pelaksanaan desinfeksi kandang dan lingkungan dilaksanakan 2 putaran dalam setahun. Masing-masing putaran dilakukan di 34 kelurahan. Tujuannya adalah untuk menurunkan jumlah bakteri patogen agen penyebab penyakit di lapangan. Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan potensi terjadinya penyakit hewan ternak.

- Pencegahan Penyakit Rabies

  Rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat ditularkan ke manusia melalui gigitan hewan yang terkena penyakit rabies seperti anjing, kucing, kera dan beberapa hewan berdarah panas lainnya. Pada manusia rabies merupakan *culdesac* atau *dead end,* yaitu tidak dapat ditularkan ke manusia lain. Sampai dengan sekarang belum pernah ditemukan kasus rabies pada hewan di Kota Bogor. Namun upaya pencegahan rabies tetap harus dilakukan karena secara geografis Kota Bogor terletak berdekatan dengan kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi yang merupakan daerah positif rabies. Beragam upaya pencegahan penyakit rabies telah dilakukan sejak awal tahun sampai dengan Semester I Tahun 2024, yaitu: berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor jika ditemukan kasus Gigitan oleh Hewan Pembawa Rabies (HPR) pada manusia dan vaksinasi rabies pada HPR.

- Tindakan Preventif, Kuratif dan Suportif pada Penyakit Hewan Menular/Tidak Menular

  Penyakit pada hewan dapat dikategorikan menjadi penyakit menular dan tidak menular, serta dapat diklasifikasikan lagi menjadi penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya) dan penyakit non zoonosis. Rata-rata penyakit-penyakit tersebut dapat dicegah dan/atau diobati, tetapi ada pula penyakit yang tidak dapat diobati sehingga harus dilakukan vaksinasi atau

peningkatan imunitas seperti pemberian suplemen vitamin untuk mencegah/ menurunkan tingkat morbiditas/mortalitas penyakit-penyakit tertentu.

Pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner untuk ternak-ternak dan hewan kesayangan di Kota Bogor, antara lain: pemberian vitamin (preventif dan suportif), pengobatan hewan (tindakan kuratif).

- Pelayanan Kesehatan Hewan

  Pelayanan kesehatan hewan berupa pengobatan terhadap hewan sakit dan pencegahan terhadap penyakit pada unggas. Pengobatan dilakukan terhadap beberapa kasus penyakit seperti penyakit-penyakit infeksius dan non infeksius, gangguan pencernaan, gangguan reproduksi dengan pemberian vitamin, antibiotik, obat cacing dan antiparasit.

  Pelayanan Kesehatan Hewan di Istana Bogor dan Kuntum Nursery. Istana Bogor bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam penanganan kesehatan hewan yang ada di Istana Bogor, antara lain: kuda, rusa totol, domba, unggas hias, burung Merak, burung kicau, angsa, itik, ayam, kura-kura, kucing dan kelinci. Pelayanan berupa pengobatan, vaksinasi, pemeriksaan laboratorium dan memberikan informasi tentang manajemen pemeliharaan hewan/ternak yang baik dan benar. Selain Istana Bogor di Kota Bogor terdapat tempat wisata Agro Edukasi yaitu Kuntum Nursery. Salah satu aktivitasnya adalah wisata ternak/unggas dimana pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan hewan/ternak. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan hewan/ternak yang ada seperti ternak sapi, kuda, kerbau, domba, kambing, unggas, burung, musang, kelinci dan marmut.

- Pemeriksaan Ektoparasit dan Endoparasit

Endoparasit maupun ektoparasit dapat mempengaruhi tingkat produksi ternak seperti penurunan susu pada ternak perah atau pertambahan bobot tubuh yang lambat pada ternak pedaging. Oleh sebab itu upaya pencegahan (preventif) maupun pengobatan (kuratif) sangat diperlukan dalam mencegah dan mengatasi, baik endo maupun ektoparasit.

Salah satu jenis penyakit endoparasit yang paling umum pada ruminansia yaitu cacingan. Penyakit ini pada umumnya jarang menimbulkan penyakit yang serius bahkan kematian akan tetapi menyebabkan hambatan pertumbuhan berat badan sehingga secara ekonomis dapat merugikan peternak. Untuk mengetahui ada tidaknya infestasi didalam tubuh ternak tersebut maka perlu dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis. Adapun yang diperiksa di Puskeswan adalah feses ternak ruminansia.

- Pemberian Rekomendasi Keluar Masuk Hewan

Dalam rangka pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, PP No. 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan, dipandang perlu melakukan penertiban terhadap pemasukan ternak ke Kota Bogor. Pemeriksaan ini diharapkan dapat terus dilakukan dalam rangka penertiban hewan yang masuk ke Kota Bogor sesuai dengan kondisi sesungguhnya, sehingga hewan yang masuk tidak membawa bibit penyakit.

2. Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

a. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

- Bursa Hewan Qurban

  Pada tahun 2024 Bursa Hewan Qurban (BHQ) kembali dilaksanakan setelah tahun sebelumnya sempat vakum karena merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak ruminansia. Aktivitas ini bekerjasama dengan Puslitbangnak Bogor. Selain untuk penjualan ternak qurban, BHQ juga merupakan salah satu cara pengawasan dan pencegahan masuknya PMK ke Kota Bogor, mengingat sebagian besar ternak yang dijual di Kota Bogor berasal dari luar Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat.

- Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban di Lapak (Ante Mortem)

  Aktivitas ini dilaksanakan pada saat menjelang sampai dengan Hari Raya Idul Adha, dimana banyak hewan ternak, yaitu sapi dan domba/kambing, yang masuk ke Kota Bogor dari berbagai daerah untuk dijual sebagai hewan qurban, selain dari Kota Bogor sendiri.

  Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, DKPP bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Polbangtan sebagai petugas pemeriksaan kesehatan hewan dan daging kurban. Selain pemeriksaan, dilakukan pula sosialisasi kepada pedagang hewan kurban mengenai hewan yang layak dijual dan kesehatan hewan selama masa penjualan atau selama masa penampungan dengan memperhatikan kesejahteraan hewan.

  Pemeriksaan dilakukan untuk memantau kondisi fisik hewan qurban. Kriteria hasil pemeriksaan meliputi sehat dan tidak sehat dan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat hewan kurban secara syariat. Jika ditemukan hewan yang tidak layak jual, akan diberikan himbauan pada pedagang untuk tidak menjual hewan tersebut. Apabila ada hewan yang

berpenyakit, sebaiknya tidak dicampur dengan hewan yang sehat.

3. Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

a. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Pangan Asal Hewan (PAH) adalah bahan yang mudah terkontaminasi oleh mikroba patogen. Mikroba dalam pangan asal hewan bisa berupa bakteri, virus, parasit dan protozoa. Bahaya mikrobiologi pada bahan pangan dapat berasal dari lingkungan penjualan atau penyajian yang tidak bersih, pekerja yang kotor dan menderita penyakit infeksi, peralatan atau wadah yang tidak bersih dan kontaminasi silang antara makanan yang telah dimasak dengan bahan mentah.

Terkait dengan hal tersebut, dilakukan beberapa aktivitas, antara lain:

- Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Pangan Asal Hewan (PAH) pada Hari Raya Idul Adha 1444H

  Pengawasan kesehatan dan keamanan Pangan Asal Hewan pada Hari Raya Idhul Adha meliputi pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* dilaksanakan bekerjasama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Kota Bogor dan Politeknik Pengembangan Pertanian (POLBANGTAN) Bogor.

  Dari hasil pemeriksaan *postmortem* terhadap ternak yang telah dipotong masih ditemui ternak yang menderita *Helminthiasis* (kecacingan) terutama cacing hati (*Fasciola sp*), hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca. Berdasarkan hasil pemeriksaan *postmortem* umumnya daging aman, sehat dan layak dikonsumsi.

- Audit Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

Produk hewan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan diproduksi di unit usaha asal hewan yang menerapkan sistem penjaminan keamanan pangan serta dibuktikan dengan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Sampai dengan Tahun 2022, Kota Bogor telah memiliki 12 unit usaha yang bersertifikat NKV.

- Pemberian Surat Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Produk Hewan dan Non Pangan Asal Hewan

  Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tusi untuk memberikan rekomendasi pengeluaran dan pemasukan produk hewan dan non pangan asal hewan. Produk asal hewan antara lain: potongan daging, ayam beku, susu UHT, susu bubuk, minuman mengandung susu dan susu fermentasi, produk olahan daging ayam, produk olahan daging sapi, telur, dan sebagainya. Sedangkan produk non pangan asal hewan, antara lain: bulu bebek dan bulu angsa.

b. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan pengambilan dan pengujian sampel produk peternakan untuk diuji di laboratorium sebagai upaya monitoring dan *surveillance*. Pengambilan sampel dilakukan oleh petugas kesmavet yang telah memiliki sertifikat PPC (Petugas Pengambil Contoh).

Pemeriksaan dilakukan terhadap sampel, yang berasal dari pasar tradisional dan sentra peternakan sapi perah di Kota Bogor. Jenis pengujian adalah pengujian mikroba dengan parameter *E.coli* dan *Salmonella,sp.* Untuk masing-masing parameter, jenis sampel yang diuji terdiri dari: daging sapi, daging ayam, telur ayam dan

susu sapi. Uji laboratorium dilakukan di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH).

Tingginya tingkat cemaran mikroba pada pangan asal hewan menandakan banyak mikroba yang mengontaminasi produk pangan. Kontaminasi mikroba ini dapat terjadi saat hewan berada di peternakan, sebelum dan sesudah pemotongan, hingga saat transaksi penjual dan konsumen. Pemeliharaan hewan dan manajemen kandang yang tidak benar dapat menyebabkan terjadinya infeksi mikroba. Perlakuan hewan sebelum pemotongan juga berpengaruh terhadap jumlah mikroba yang terdapat dalam daging. Ternak yang baru diangkut dari luar kota hendaknya tidak dipotong sebelum cukup istirahat, karena akan meningkatkan jumlah bakteri dalam daging dibandingkan dengan ternak yang istirahatnya cukup. Pemotongan hewan juga menentukan tingkat cemaran mikroba. Mikroba dapat ditularkan melalui pekerja ataupun alat yang digunakan.

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian hanya mempunyai 1 (satu) indikator, yaitu: persentase luas lahan sawah yang dikendalikan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Target pada Tahun 2024 adalah sebesar 39,25% (50 Ha dari 127,4 Ha luas baku sawah di Kota Bogor), dimana baru dapat dihitung pada akhir tahun. Program ini mengampu 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**

   a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

      Brigade Proteksi Tanaman (BPT) merupakan salah satu kelembagaan perlindungan tanaman yang berperan langsung dalam gerakan pengendalian Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT) di lapangan. BPT dibentuk dengan tujuan untuk membantu petani dalam mengendalikan OPT di daerah sumber serangan dan eksplosi serangan OPT. Dalam pelaksanaannya BPT dapat dibantu oleh Regu Pengendali Hama (RPH) atau petani setempat. Dalam operasional pengendalian, petugas harus bersentuhan langsung dengan bahan pengendalian, baik bahan pengendali alami/hayati maupun bahan pengendali kimia.

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Brigade Proteksi Tanaman (BPT), antara lain: 1) optimalnya gerakan pengendalian OPT secara dini; 2) meningkatnya peran serta masyarakat tani dalam upaya pengendalian OPT; 3) optimalnya penyediaan sarana pengendalian OPT; dan 4) terinventarisasinya stok pestisida dan sarana pengendalian OPT.

Operasional BPT di Kota Bogor dilaksanakan melalui:

- Penyediaan sarana pengendalian OPT

Sarana pengendalian OPT diperlukan sebagai cadangan (*buffer stock*) untuk antisipasi bila terjadi sumber serangan OPT di lapangan yang melebihi ambang pengendalian. Sarana ini dapat dimobilisasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Mengingat pentingnya sarana tersebut, maka pada tahun 2024 DKPP melaksanakan pengadaan sarana berupa pestisida sebanyak 1 paket.

- Penguatan Regu Pengendali Hama (RPH)

Regu Pengendali Hama (RPH) adalah kelompok petani yang telah diberikan pelatihan tentang pemanfaatan pestisida secara bijaksana untuk mengendalikan OPT di lapangan. Penguatan RPH merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan RPH. Dalam rangka penguatan RPH, pada Tahun 2024 telah dilaksanakan pertemuan sebanyak 1 kali.

Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian mempunyai 1 (satu) indikator, yaitu: Cakupan Bina Kelompok Tani, dengan satuan persen (%). Indikator ini mengukur persentase kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Pengertian bantuan disini merujuk kepada bantuan dana maupun bantuan berupa pembinaan.

Pada Tahun 2024, target cakupan bina kelompok tani adalah 93,25%. Tingginya target ini merupakan penyesuaian atas hasil evaluasi pada tahun 2023, dimana capaian targetnya 93,08%.. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kelompok tani aktif yang mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19. Program Penyuluhan Pertanian mengampu 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

   Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa melaksanakan aktivitas yang didanai dari APBD Kota Bogor, yaitu: Pelatihan Bagi Penyuluh Pertanian.

b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

   Sub kegiatan ini memiliki beberapa aktivitas sebagai berikut: Bimtek Budidaya Jamur (bulan Maret), Bimtek Inovasi Terknologi Pertanian (Hidroponik) (bulan Maret), Bimtek Pasca Panen Hasil pertanian (bulan Juni), Bimtek Peningkatan kapasitas kelembagaan petani (bulan Juni), Workshop pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian (bulan Februari) dan Workshop Teknis Urban Farming.

c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Aktivitas dalam sub kegiatan ini, adalah pembuatan kebun contoh, yang dilaksanakan di lokasi KWT, antara lain: KWT lokasi lomba Hatinya PKK, KWT Munjul Ceria, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal (lomba P2WKSS). Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November 2024.

Bantuan ini diberikan karena tidak adanya kebun contoh dengan sistem pertanian terpadu di KWT yang mengikuti Lomba Tingkat Provinsi/Nasional, karena pada umumnya pertanian di Kota Bogor dilakukan di lahan sempit. Dengan adanya kebun contoh diharapkan dapat memotivasi petani dan penyuluh pertanian dalam menambah ilmu pengetahuan serta dapat meningkatkan perekonomian keluarga sehingga produksi pertanian meningkat.

2.1.3. URUSAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penanganan Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, 3 (tiga) kegiatan, dan 4 (empat) sub kegiatan, dengan total alokasi anggaran Rp 9.701.509.606,00. Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tercapai realisasi keuangan sebesar Rp 400.459.871,00 atau 4,13%.

Capaian dari masing-masing indikator program sampai dengan Semester I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.

Capaian Indikator Program Urusan Kelautan dan Perikanan sampai dengan Semester I Tahun 2024

NO.	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan	6,5	-	-
2.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan	3	-	-

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Indikator pada program ini adalah persentase peningkatan produksi perikanan. Produksi perikanan di Kota Bogor, meliputi: produksi ikan konsumsi dan produksi ikan hias. Target persentase peningkatan produksi perikanan Tahun 2024 adalah sebesar 7,5%. Capaian target tersebut baru dapat dihitung pada akhir tahun anggaran.

Dalam rangka pencapaian target tersebut, dilaksanakan 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, yaitu:

1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

    a. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

    • Workshop Budidaya Ikan Hias

    Workshop Budidaya Ikan Hias dilaksanakan pada bulan Mei 2024, dengan peserta sebanyak 30 orang. Narasumber berasal dari pembudidaya ikan hias, dan penyuluh perikanan dari Balai Riset Pengembangan Budidaya Air Tawar (BRPBAT).

    • Dempond Budidaya Ikan Hias

Dempond ikan hias yang diberikan kepada masyarakat berupa akuarium dan rak beserta instalasinya dan indukan ikan hias koi beserta pakan ikan.

- Workshop Budidaya Ikan Konsumsi

Dilaksanakan pada bulan Juli 2024, dengan peserta sebanyak 30 orang. Narasumber Workshop Budidaya Ikan Konsumsi antara lain: pembudidaya ikan konsumsi, dan penyuluh perikanan dari Balai Riset Pengembangan Budidaya Air Tawar (BRPBAT).

- Dempond Budidaya Ikan Konsumsi

Dempond merupakan tindak lanjut dari Pelatihan Budidaya Ikan Konsumsi sebagai praktek lapangan bagi peserta pelatihan. Dempond budidaya ikan konsumsi diberikan kepada Pokdakan yang telah mengikuti workshop budidaya ikan konsumsi dan bersedia menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Dempond yang diserahkan ke masyarakat berupa kolam terpal beserta instalasinya, benih ikan lele dan pakan ikan.

- Budidaya Ikan dengan Sistem Budikdamber (Budidaya Ikan dalam Ember)

Budikdamber mengadaptasi teknik budidaya aquaponik yang memadukan antara budidaya ikan dan sayuran dalam satu wadah berupa ember. Sistem ini dapat diterapkan di wilayah perkotaan yang memiliki lahan sempit. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit dapat mendukung ketersediaan pangan berupa ikan dan sayuran. Pengadaan Budikdamber Tahun 2024 disalurkan kepada KWT yang mengikuti lomba Hatinya PKK, KWT Munjul Ceria, Kelurahan Kayumanis (Lomba P2WKSS), dan mengakomodir usulan Pokir DPRD Kota Bogor.

2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

   a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output yang dihasilkan dari sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- Pengadaan Pakan Ikan

Penyediaan pakan ikan diperuntukkan untuk kegiatan budidaya ikan di Balai Benih Ikan (BBI), Kelurahan Kencana dan Holding Ground Ikan Hias di Terminal Agribisnis (TA) Rancamaya serta fasilitasi ke masyarakat khususnya kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) sebagai bentuk stimulan dengan harapan dapat menekan biaya operasional kegiatan budidaya ikan. Pakan ikan yang diperuntukkan untuk BBI dan TA, yaitu: cacing sutera, blood worm, artemia dan pakan pabrikan. Sedangkan pakan ikan yang diberikan kepada masyarakat/Pokdakan, yaitu: cacing sutera dan pakan pabrikan.

- Pengadaan Obat Ikan

Penyediaan obat ikan meliputi garam ikan, ovaprim dan velvet orange.

- Pengadaan Indukan Ikan

Salah satu bentuk fasilitasi ke Pokdakan adalah pemberian indukan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi. Jenis indukan yang diberikan, antara lain: ikan hias corydoras, ikan nila dan ikan lele.

- Uji Sampel Mutu Pakan Ikan

Pengujian kimiawi terhadap pakan ikan buatan dimaksudkan untuk mengetahui kandungan zat gizi pakan. Kandungan gizi yang diuji meliputi kadar protein, lemak, karbohidrat, abu, serat dan kadar air. Pelet yang baik kadar airnya tidak lebih dari 10%. Selain itu, kandungan abu dan seratnya masing-masing kurang dari 5%. Untuk kadar protein, lemak dan karbohidratnya menyesuaikan jenis dan umur ikan yang akan diberi pakan. Sebagai patokan, pakan buatan yang baik pada

umumnya harus mengandung protein lebih dari 25%, lemak tidak lebih dari 8% dan karbohidrat sekitar 12%.

Pengambilan sampel pakan ikan dilakukan di toko-toko pakan dan pakan mandiri yang dibuat oleh kelompok. Pengujian dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan IPB dengan parameter yang diujikan yaitu kadar karbohidrat, serat kasar dan protein.

- Pengadaan Peralatan Perikanan

Penyediaan peralatan pendukung diantaranya sair, mesin hi blow, portable water pump, ph meter, plastik ikan, happa, peralatan listrik dan mesin pompa air.

- Pengadaan Budikdamber

Pengadaan Budikdamber untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mendukung kegiatan lomba.

Sarana dan prasarana barang milik daerah (BMD) yang menjadi tanggung jawab DKPP, yaitu:

1. Balai Benih Ikan (BBI)

Balai Benih Ikan (BBI) yang berlokasi di Kelurahan Kencana difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembenihan ikan konsumsi, khususnya lele, nila dan gurame. Benih ikan yang dihasilkan disalurkan kepada pembudidaya ikan/masyarakat yang membutuhkan bantuan benih dalam rangka mendukung peningkatan produksi ikan di Kota Bogor.

Sarana Produksi yang tersedia di BBI, yaitu: indukan ikan lele sangkuriang (55 ekor betina dan 10 ekor jantan), indukan ikan gurame (6 ekor betina dan 2 ekor jantan), dan indukan ikan nila (600 ekor jantan dan 200 ekor betina).

2. Holding Ground di Terminal Agribisnis Rancamaya

Ikan hias yang dibudidayakan di Holding Ground TA Rancamaya yaitu Corydoras albino dan Corydoras sterbay.

3. Depo Pemasaran Ikan Hias di Jalan Binamarga

Depo Pemasaran Ikan Hias (DPIH) di Jalan Binamarga merupakan kios pemasaran ikan hias, tanaman hias air dan perlengkapannya. Saat ini kondisi bangunan depo banyak yang rusak parah sehingga melalui anggaran perubahan tahun 2024 diharapkan dapat membantu rehabilitasi bangunan depo.

b. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengambilan sampel ikan dan lingkungan budidaya dilakukan di kolam pembudidaya ikan yang sumber airnya berasal dari aliran sungai langsung tanpa menggunakan kolam tandon. Pengujian sampel dilaksanakan di Laboratorium Saraswanti Indo Genetech (SIG) di daerah Yasmin Bogor.

Tujuan dari pengujian sampel tersebut adalah untuk mengetahui kadar residu logam berat dan kandungan bakteri *E. coli* pada ikan yang dibudidayakan oleh Pokdakan. Jika positif mengandung logam berat, maka akan dilakukan pembinaan kepada Pokdakan agar tidak menggunakan air langsung dari sungai. Air harus ditampung terlebih dahulu dalam kolam penampungan dikarenakan air sungai umumnya mengandung residu logam dan bakteri. Selain itu juga ditekankan kepada Pokdakan agar wajib menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). CBIB memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis dari mulai proses pembenihan, pembesaran dan pembuatan pakan ikan.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator pada program ini adalah persentase peningkatan produk olahan hasil perikanan, dengan target 3% pada Tahun

2024. Dalam rangka pencapaian target tersebut, telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

   a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

      Pada sub kegiatan ini, dilaksanakan beberapa aktivitas, antara lain:

      • Pelatihan *Sanitation Standard Operating Procedure* (SSOP) dan *Good Manufacturing Practices* (GMP)

      SSOP dan GMP menjadi landasan dasar dalam menjamin mutu dan keamanan pangan produk perikanan. Sehubungan dengan hal tersebut, DKPP mengadakan Pelatihan SSOP dan GMP, yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para pengolah perikanan bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip dasar SSOP dan GMP yang dituangkan dalam panduan mutu.

      Hasil yang diharapkan dari pelatihan tersebut adalah adanya pemahaman dan kemauan serta kemampuan pengolah untuk menerapkan SSOP dan GMP di Unit Pengolahan Ikan (UPI) sesuai dengan karakteristik produk olahan. Beberapa kendala dalam penerapan SSOP dan GMP adalah keterbatasan prasarana UPI, seperti bangunan yang perlu dilengkapi dan di desain (*layout*) sesuai dengan kebutuhan yang memerlukan biaya cukup tinggi, belum seimbang dengan penghasilan yang didapat dari penjualan produk, sehingga perlu dilakukan kolaborasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Indikator dalam penerapan SSOP dan GMP, yaitu telah dimilikinya Sertifikat GMP.

      Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah dilaksanakannya monitoring dan pendampingan penerapan SSOP dan GMP. Monitoring dan

pendampingan yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) melihat kesesuaian ruang produksi dengan panduan mutu unit pengolahan ikan; (2) melihat kondisi sanitasi ruang produksi dibandingkan dengan kartu kendali mutu; (3) melihat kesesuaian hasil produk olahan terhadap standar-standar cara pengolahan ikan yang baik.

- Bimtek SNI Produk Hasil Perikanan

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan bentuk kesesuaian atau rekomendasi produk akhir yang layak diterima konsumen. SNI tidak hanya pada produk non pangan tetapi juga ada SNI khusus produk olahan hasil perikanan sehingga produk perikanan mempunyai daya saing.

Tujuan dari pelaksanaan Bimtek SNI ini adalah sebagai berikut: (a) pengolah memahami standarisasi dalam SNI; dan (b) pengolah mempunyai minat dan komitmen untuk menerapkan SNI.

Kendala yang dihadapi oleh pengolah produk perikanan terhadap sertifikasi SNI yaitu UPI belum memiliki sertfikat kelayak pengolah (GMP) karena persyaratan utama dalam pengusulan SNI adalah telah memiliki sertifikat kelayakan pengolah.

- Pengawasan Produk Hasil Perikanan

Kegiatan pengawasan dilakukan secara langsung ke pasar tradisional dan pasar modern dengan mengambil beberapa sampel produk ikan yang akan dilakukan uji laboratorium pada laboratorium yang sudah memiliki sertifikasi dari KAN (Komite Akreditasi Nasional.

Uji laboratorium dilakukan di Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM), dengan parameter uji formalin. Sampel ikan diambil dari Pasar Bogor dan Pasar Merdeka.

Jika uji sampel ikan tersebut menunjukkan hasil positif, Bidang Perikanan akan melakukan koordinasi dengan pihak PD Pasar Pakuan Jaya selaku Pembina Pedagang Pasar. Adapun langkah-langkah pengendalian yang diusulkan kepada pihak PD pasar Pakuan Jaya adalah sebagai berikut: (1) melakukan penelusuran asal muasal barang yang disuplai kepada pedagang pasar; (2) melakukan pengecekan rapid tes sewaktu-waktu pada saat produk akan masuk ke pasar; dan (3) memberikan pernyataan secara administrasi kepada para pedagang terkait penggunaan formalin.

- Pendampingan Mutu Produk Perikanan Sesuai dengan SNI

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengupayakan pendampingan terhadap produk yang dihasilkan agar mutu secara laboratorium sesuai dengan persyaratan mutu pada Standar Nasional Indonesia.

- Peningkatan Konsumsi Ikan

Target konsumsi ikan tingkat Kota Bogor tahun 2024 adalah 31.749.711 kg. Capaian Kinerja tingkat konsumsi ikan ini dihitung secara tahunan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian konsumsi ikan adalah pelaksanaan promosi Gemarikan, bazar ikan dan peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas).

- Safari Gemarikan

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) adalah upaya mengkampanyekan makan ikan kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan. Kegiatan Gemarikan dilaksanakan melalui APBD dan Non APBD, dimana pada Tahun Anggaran 2024 difokuskan kepada upaya penanganan dan pencegahan stunting.

Paket Gemarikan yang diberikan berupa olahan ikan, yaitu: ikan jambrong krispy, abon ikan dan ikan tongkol

serta otak-otak bandeng. Diharapkan kegiatan ini mampu menambah wawasan masyarakat tentang gizi ikan dan minat untuk selalu mengkonsumsi ikan.

- Bazar Produk Olahan Hasil Perikanan

Dalam rangka upaya peningkatan pemasaran produk hasil perikanan, DKPP melakukan kegiatan bazar setiap Hari Selasa pekan kedua bertempat di Instalasi Perikanan Cibalagung. Peserta bazar merupakan binaan DKPP Kota Bogor. Program Bazar ini dimulai sejak Bulan Januari 2024. Dampak dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya pendapatan UMKM dan tersalurkannya produk ikan kepada konsumen dengan harga terjangkau dan bermutu baik.

- Pelatihan Produk Olahan Hasil Perikanan

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, yaitu: meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan sebagai penyangga atau buffer bagi ketersediaan produk perikanan. Permintaan bahan baku usaha pengolahan ikan mempunyai peran menstabilkan harga ikan, baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya, serta mampu menampung produksi terutama pada musim produksi ikan melimpah. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan oleh terintegrasikan kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan.

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sampai dengan Semester I Tahun 2024 dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2024

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
		BIDANG URUSAN : NON URUSAN									

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
I.	X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A poin	BB poin	A poin	A poin	100,00%	A poin	- poin	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,55 poin	3,42 poin	3,52 poin	3,52 poin	100,00%	3,55 poin	- poin	-
1.	X.XX.1.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup	A poin	BB poin	A poin	A poin	100,00%	A poin	- poin	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Perangkat Daerah								
	X.XX.1.2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 dokumen	- Dokumen	-
	X.XX.1.2.01.01	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan		7 laporan	7 laporan	100,00%	5 laporan	- laporan	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.	**X.XX.1.2.02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100,00 %**	**100,00%**	**100 %**	**- %**	**-**
	X.XX.1.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 orang/ bln		75 orang/ bln	73 orang/ bln	100,00%	78 orang/ bln	- orang / bln	-
3	**X.XX.1.2.06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**98,3 %**	**#REF!**	**100 %**	**- %**	**-**

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			perangkat daerah								
	X.XX.1.2.06.01	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket		1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	- paket	-
	X.XX.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket		1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	- paket	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			yang Disediakan								
	X.XX.1.2.06.03	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket		1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	- paket	-
	X.XX.1.2.06.04	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	- paket	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	X.XX.1.2.06.05	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	paket		2 paket	2 paket	100,00%	1 paket	- paket	-
	X.XX.1.2.06.08	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan		1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	- laporan	-
	X.XX.1.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	laporan		1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	- laporan	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD								
4	**X.XX.1.2.07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**0,00 %**	**100 %**	- %	-
	X.XX.1.2.07.06	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	39 unit	21 unit	unit	unit		10 unit	- unit	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Lainnya yang Disediakan								
5	**X.XX.1.2.08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**100,00%**	**100 %**	50 %	-
	X.XX.1.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	3 laporan		1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	- laporan	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Sumber Daya Air dan Listrik	, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
	X.XX.1.2.08.04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan		1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	- laporan	-
6.	**X.XX.1.2.09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat**	**100 %**	**N/A**	**100 %**	**100,00 %**	**100,00%**	**100 %**	**- %**	**-**

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**daerah berkondisi baik**								
	X.XX.1.2.09.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit		14 unit	14 unit	100,00%	12 unit	- unit	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	X.XX.1.2.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit		106 unit	106 unit	100,00%	76 unit	- unit	-
	X.XX.1.2.09.11	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	3 unit		1 unit	1 unit	100,00%	3 unit	- unit	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Direhabilitasi								
	2.09	**URUSAN PANGAN**									
II.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI**	**Ketersediaan energi**	**2.281 kkal/kap/hr**	**2.230 kkal/kap/hr**	**2.247 kkal/kap/hr**	**2.403 kkal/kap/hr**	**106,94%**	**2.400 kkal/kap/hr**	**- kkal/kap/hr**	**-**

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (M3)	Ketersediaan Protein	65,7 gram/kap/hr	63,6 gram/kap/hr	64,3 gram/kap/hr	81,2 gram/kap/hr	126,28%	63 gram/kap/hr	- gram/kap/hr	-
7.	2.09.03.2.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka	Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	829.936.422 kg	N/A	264.885.336 kg	248.579.285 kg	93,84%	276.335.938 kg	- kg	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									
	2.09.03.2.01.01	Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3 laporan		1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	- laporan	-
	2.09.03.2.01.03	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan	3 laporan		1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	- laporan	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya								
	2.09.03.2.01.04	Sub kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	3 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	- dokumen	-
8	**2.09.03.2.02**	**Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan**	**Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**	**12,5 %**	**0 %**	**12,50 %**	**1,04 %**	**8,29 %**	**12,50 %**	**- %**	**-**

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kabupaten/Kota									
	2.09.03.2.02.03	Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	38,18 ton	- ton	0,829 ton	0,829 ton	100,00%	0,572 ton	- ton	-
II.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN**	**Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi**	**72,81 Poin**	**70,56 Poin**	**71,3 Poin**	**81,7 Poin**	**114,59%**	**82,7 Poin**	**- Poin**	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		MASYARAKAT (M1)									
9	2.09.03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi Energi	2150 kkal/kap/hari	2088,72 kkal/kap/hari	2040 kkal/kap/hari	2089 kkal/kap/hari	102,40%	2100 kkal/kap/hari	- kkal/kap/hari	-
			Konsumsi Protein	57 gram/kap/hari	61,16 gram/kap/hari	55 gram/kap/hari	61,2 gram/kap/hari	111,27%	56 gram/kap/hari	- gram/kap/hari	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2.09.03.2.04.01	Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	- dokumen	-
	2.09.03.2.04.02	Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi	3 laporan		1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	- laporan	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
III	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan**	**15.81 %**	**16,41 %**	**16,21 %**	**16,36 %**	**99,07 %**	**16,01 %**	**- %**	**-**
11	**2.09.04.2.02**	**Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah wilayah rawan pangan yang di intervensi**	**41,67 %**	**N/A**	**8,33 %**	**33,33 %**	**400,00%**	**25 %**	**- %**	**-**

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2.09.04.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	3 laporan		1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	- laporan	-
	2.09.04.2.02.02	Sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan	3 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	- dokumen	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								
IV.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan**	**95 %**	**93,75 %**	**94 %**	**94,68 %**	**100,72%**	**95 %**	**- %**	**-**

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			yang aman dikonsumsi								
12	2.09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang diawasi	40 produk	N/A	40 produk	20 produk	50,00 %	40 produk	- produk	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2.09.05.2.01.05	Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	3 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	- dokumen	-
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHA**									

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		N BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
V.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan	9 %	4,68 persen	5,5 %	5,11 %	92,91 %	6,5 %	- %	-
13	3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan kapasitas kelompok	20 %	N/A	20 %	28 %	140,00%	24 %	- %	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	3.25.04.2.02.04	Sub kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7 kelompok		7 kelompok	10 kelompok	142,86%	2 kelompok	- kelompok	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
14	**3.25.04.2.04**	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Pemanfaatan sarana prasarana pembudidayaan ikan**	**75 %**	**N/A**	**25 %**	**29,45 %**	**117,80%**	**50 %**	**- %**	-
	3.25.04.2.04.02	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3 unit		2 unit	2 unit	100,00%	3 unit	- unit	-
	3.25.04.2.04.04	Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan	Jumlah Hasil Ikan dan	3 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	- dokumen	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan Budidaya dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan								
VI.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN**	**Persentase Peningkatan Produk Olahan**	**4 %**		**2 %**	**2 %**	**100,00%**	**3 %**	**- %**	**-**

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		HASIL PERIKANAN	**Hasil Perikanan**								
15.	**3.25.06.2.02**	**Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Presentase Usaha Pengolahan Ikan (UPI) yang menerapkan *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) dan *Good Manufactu***	**12 %**	**N/A**	**4 %**	**4 %**	**100,00%**	**4 %**	- %	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			***ring Practices* (GMP)**								
	3.25.06.2.02.01	Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan	6 unit usaha		2 unit usaha	2 unit usaha	100,00%	2 unit usaha	- unit usaha	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko								

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		URUSAN PERTANIAN									
VII.	3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura	100 %		10,35 %	24,22 %	234,01%	39,46 %	- %	-
			Persentase pemenuhan sarana peternakan	100 %		17,13 %	17,75 %	103,62%	33,33 %	- %	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
16.	**3.27.02.2.01**	**Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase kelompok yang menggunakan sarana pertanian dengan baik**	**49,37 %**	**N/A**	**49,37 %**	**49,37 %**	**100,00%**	**52,46 %**	**- %**	**-**
	3.27.02.2.01.01	Sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas,	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	3 laporan		1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	- laporan	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Teknologi dan Spesifik Lokasi	Teknologi dan Spesifik Lokasi								
	3.27.02.2.01.02	Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 laporan		1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	- laporan	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
17	3.27.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Jumlah jenis Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan yang dikelola	3 Jenis	N/A	3 Jenis	3 Jenis	100,00%	3 Jenis	- Jenis	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kabupaten/Kota	**Jumlah jenis Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang dikelola**	**12 Jenis**	**N/A**	**12 Jenis**	**3 Jenis**	**25,00 %**	**12 Jenis**	**- Jenis**	**-**
	3.27.02.2.02.02	Sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	- Dokumen	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	3.27.02.2.02.03	Sub kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	- Dokumen	-
18	**3.27.02.2.05**	**Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah**	**Persentase peningkatan populasi ternak**	**0 %**	**N/A**	**1,75 %**	**3,7 %**	**213,01%**	**%**	**- %**	**-**

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kabupaten/ Kota									
	3.27.02.2.05.03	Sub kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/ Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	- ekor		0 ekor	0 ekor	0,00%	ekor	- ekor	-
VIII.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase pengelolaan kawasan LP2B**	**12,20 %**		**5 %**	**5 %**	**100,00%**	**10 %**	**- %**	**-**

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		PRASARANA PERTANIAN									
			Persentase pemeliharaan prasarana pertanian	**90 %**		**80 %**	**80 %**	**100,00%**	**85 %**	**- %**	**-**
19	**3.27.03.2.01**	**Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**	**59 Ha**	**N/A**	**59 Ha**	**59 Ha**		**59 Ha**	**- Ha**	**-**
	3.27.03.2.01.02	Sub kegiatan Penyusunan Peta Lahan	Peta Lahan Pertanian Pangan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	- dokumen	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Berkelanjutan/ LP2B								
20	**3.27.03.2.02**	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Terpeliharanya Prasarana Pertanian**	**1 unit**	**1 unit**	**1 unit**	**1 unit**	**100,00%**	**1 unit**	**- unit**	**-**
	3.27.03.2.02.07	Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	- unit	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
IX.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-2,24 %		-2,14 %	2,14 %	-100,00%	-2,19 %	- %	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar (%)	18 %	14,33 %	20 %	19 %	105,00%	18,5 %	- %	-
21	3.27.04.2.01	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah	Jumlah hewan terperiksa	2.200 ekor	N/A	2.200 ekor	2.595 ekor	117,95%	2.300 ekor	- ekor	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota									
	3.27.04.2.01.01	Sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3 laporan		1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	- laporan	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
22	**3.27.04.2.02**	**Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah hewan yang diterbitkan SKKH**	**2.000 Ekor**	**N/A**	**2.000 Ekor**	**2.203 Ekor**	**110,15%**	**2.100 Ekor**	**- Ekor**	**-**
	3.27.04.2.02.02	Sub kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan	3 laporan		1 laporan	100,00 % laporan	100,00%	1 laporan	- laporan	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Hewan dan Produk Hewan	dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan								
22	**3.27.04.2.04**	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Peningkatan pengawasan penerapan persyaratan teknis unit usaha produk peternakan**	**75 %**	**N/A**	**58,33 %**	**50 %**	**85,71 %**	**66,67 %**	**- %**	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	3.27.04.2.04.02	Sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3 laporan		1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	- laporan	-
	3.27.04.2.04.04	Sub kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	3 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	- dokumen	-
X.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN**	**Persentase luas lahan sawah yang dikendalika**	**39,25 %**		**39,25 %**	**39,25 %**	**100,00%**	**39,25 %**	**- %**	**-**

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		GAN BENCANA PERTANIAN	**n dari Organisme Penggangg u Tumbuhan (OPT)**								
23	**3.27.05.2 .01**	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian Kabupaten/Kot a**	**Luas lahan sawah yang terkendali dari serangan OPT**	**50 Ha**	**44 Ha**	**50 Ha**	**50 Ha**	**100,0 0%**	**50 Ha**	**- Ha**	-
	3.27.05.2. 01.01	Sub kegiatan Pengendalian Organisme	Jumlah Luas Serangan	50 Ha	44 Ha	50 Ha	50 Ha	100,0 0%	50 Ha	- Ha	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan								
XI.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Capaian Bina Kelompok Tani**	**76,62 %**	**71,43 %**	**75,87 %**	**89,4 %**	**117,83%**	**90,21 %**	**- %**	**-**

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
24	**3.27.07.2.01**	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah kelompok tani yang naik kelas**	**30 kelompok**	**4 kelompok**	**5 kelompok**	**34 kelompok**	**680,00%**	**5 kelompok**	**- Kelom-pok**	**-**
	3.27.07.2.01.01	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 unit		3 unit	3 unit	100,00%	3 unit	- unit	-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I tahun berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	3.27.07.2.01.02	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 unit		5 unit	0 unit	0,00%	5 unit	- unit	-
	3.27.07.2.01.03	Sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	12 unit		4 unit	3 unit	75,00 %	3 unit	- unit	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan SKPD didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai perangkat daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar (urusan pangan) dan urusan pilihan (urusan pertanian serta kelautan dan perikanan), tidak memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM), maupun NSPK. Oleh sebab itu, analisis kinerja pelayanan SKPD hanya dapat didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tercantum dalam Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020. Secara ringkas indikator kinerja beserta capaian kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9.

Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sampai dengan Semester I Tahun 2024

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Capaian		S.d. Semester I Tahun 2024		
			2020	2021	Target	Capaian	%
INDIKATOR KINERJA KUNCI							
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,7	75,84	70,56	83,7	-	-

2.	Penguatan cadangan pangan (ton)	8,18	-	-	10	-	-
3.	Kontribusi sektor pertanian/kehutan-an dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%)	0,66	0,69	0,7	0,651	-	-
No.	**Indikator**	**Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)**	**Capaian**		**S.d. Semester I Tahun 2024**		
			2020	**2021**	**Target**	**Capaian**	**%**
5.	Kontribusi sektor pertanian/kehutan-an dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)	0,74	0,76	0,78	0,68	-	-
6.	Produksi sektor pertanian (padi)(ton)	5.498	4.186	5.496	3.401,20	-	-
III.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
A.	**FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**						
1.	**PANGAN**						
1.	Ketersediaan pangan utama	231,01	231,2	156,18	151,84	-	-
2.	Ketersediaan energi perkapita	2.592,90	2.375	2.230	2,400	-	-
3.	Ketersediaan protein perkapita	110,3	68	63,6	63	-	-
4.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	93,96	90,81	93,75	95,3	-	-

C.	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN						
1.	**PERTANIAN**						
1.	Produktivitas padi per hektar	7,12	7,18	7,28	7,33	-	-
2.	Cakupan bina kelompok petani	69,35	75,08	76,37	93,25	-	-
3.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-2,72	19,83	-2,1	-2,24	-	-
4.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	13,14	13,4	11,72	13,91	-	-
2.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
1.	Produksi Ikan Konsumsi (ton)	5.063,14	5.150,99	5.205,69	5.303,70	-	-
2.	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/th)	28.599.839	28.899.474	29.991.190	31.749.711	-	-
3.	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) wilayah kabupaten/kota (sumber data: One data KKP)	5063,14	5.150,99	5.205,69	5.303,70	-	-

Pada tabel di atas, terlihat bahwa semua capaian kinerja IKK belum dapat diketahui sampai dengan Semester I Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh perhitungan yang menggunakan data akhir tahun.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian;

2. Kurang optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

3. Rendahnya daya saing beberapa produk pertanian, peternakan dan perikanan;

4. Kurangnya kualitas SDM pertanian, peternakan dan perikanan;

5. Rendahnya kesejahteraan/pendapatan petani di sektor pertanian, peternakan dan perikanan;

6. Terbatasnya akses petani ke permodalan dan teknologi;

7. Terbatasnya aset dan infrastruktur pertanian, peternakan dan perikanan;

8. Kurang optimalnya kelembagaan pertanian, peternakan dan perikanan;

9. Terbatasnya kompetensi aparatur;

10. Pola konsumsi pangan masyarakat yang belum memenuhi kaidah B2SA, dengan dominasi konsumsi sumber energi karbohidrat yang berasal dari beras dan terigu;

11. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kaidah gizi seimbang B2SA;

12. Rendahnya akses dan daya beli masyarakat terhadap pangan berkualitas akibat tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pangan atau adanya gejolak harga pangan;

13. Ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah karena produksi dalam Kota Bogor tidak mencukupi kebutuhan masyarakat;

14. Masih ditemukannya pangan tidak aman dan tidak layak konsumsi;

15. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hygiene dan sanitasi pada bahan pangan asal hewan;

16. Masih adanya bahan pangan asal hewan yang terkena cemaran;

17. Kurangnya pengetahuan sikap dan keterampilan (PSK) petani;

18. Teknik budidaya ikan belum dilaksanakan dengan baik;

19. Sarana prasarana belum memadai;

20. Produk perikanan mudah terkontaminasi bahan berbahaya;

21. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk konsumsi ikan rendah;

22. Frekuensi sosialisasi produk perikanan kurang;

23. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan hewan;

24. Kurangnya tenaga medis/paramedis veteriner;

25. Terbatasnya sarana prasarana kesehatan hewan;

2.4 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Barat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pembangunan pertanian sampai dengan Semester I tahun berjalan;

  2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja;

  3. Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi melalui dokumen perencanaan strategis kementerian/lembaga pusat dan dinas provinsi, dilakukan agar terdapat sinkronisasi antara Kementerian terkait, Dinas Provinsi, dan Kota Bogor. Identifikasi Tujuan dalam Renstra K/L dan Provinsi dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut (Tabel 10) :

Tabel 10.

Sinkronisasi Tujuan Kementerian/Lembaga, Dinas Provinsi Jawa Barat dengan Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor

Renstra KL dan Dinas Provinsi	**Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor**

Renstra Teknokratik Kementerian Pertanian RI **Tujuan:** 1. Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Petani 2. Meningkatnya Ketahanan Pangan 3. Meningkatnya daya saing dengan mengembangkan Inovasi IPTEK Pertanian 4. Berkembangnya Sarana Prasarana Pertanian yang Bernilai Ekonomi 5. Mengembangkan Sistem Perkarantinaan Pertanian 6. Mengembangkan Kapasitas SDM dan Pemberdayaan Petani 7. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian **Sasaran:** 1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi petani 2. Pemenuhan kebutuhan pangan strategis nasional 3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional 4. Peningkatan kualitas dan keamanan pangan strategis nasional 5. Pemanfaatan inovasi dan teknologi pertanian 6. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan 7. Pengendalian penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan 8. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional 9. Birokrasi kementerian pertanian yang efektif dan efisien 10. Pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	**Tujuan:** 1. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, efektif, efisien dan akuntabel (Smart Governance) 3. Menurunkan presentase penduduk rawan pangan 4. Mempertahankan Tingkat Ketersediaan Pangan **Sasaran:** 1. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, sehat dan aman sesuai angka kecukupan gizi (AKG) 2. Terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel 3. Menurunnya prosentase penduduk rawan pangan 4. Tersedianya pangan yang beragam, dalam jumlah yang cukup, dan terdistribusi merata dengan harga terjangkau **Program:** 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan 5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 8. Program Penyediaan dan

Renstra Teknokratik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI **Tujuan:** 1. Berdaulat di laut untuk mewujudkan *Legal, Reported, Regulated Fishing* (LRRF) 2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkeadilan untuk generasi sekarang dan akan datang 3. Meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan **Sasaran:** 1. Masyarakat KP yang Meningkat Kesejahteraannya 2. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berdaulat 3. Pengelolaan SDKP secara berkelanjutan dan berdaya saing 4. Tersedianya kebijakan yang berkualitas 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan 6. Tersedianya SDMKP, inovasi teknologi dan riset yang berdaya saing 7. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif 8. ASN KKP yang profesional 9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang andal 10. Birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima 11. Pengelolaan anggaran yang berkualitas	Pengembangan Prasarana Pertanian 9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 11. Program Penyuluhan Pertanian
Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat **Tujuan:** 1. Pemenuhan Ketersediaan Pangan **Sasaran:** 1. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pangan Dan Gizi 2. Meningkatnya Produksi Peternakan" dan 3. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	

Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat **Tujuan:** 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura **Sasaran:** 1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat **Tujuan:** 1. Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan **Sasaran:** 1. Meningkatnya Produksi serta nilai tambah dan daya saing produk Kelautan dan Perikanan; 2. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Kota Bogor, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, telah merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya (Kebijakan dan Program) yang disajikan secara lengkap dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor. Namun seiring dengan perjalanan waktu, target tujuan dan sasaran dalam Renstra harus disesuaikan akibat adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan capaian target pada Tahun 2020. Perubahan tersebut dicantumkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Pada Misi I Renstra 2019-2024, tujuan yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang berkualitas”. Tujuan ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai sasaran dalam Misi I RPJMD, yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”. Dalam Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2019-2024,

tujuan dinas dirubah agar lebih selaras dengan sasaran RPJMD menjadi "Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pangan yang sehat dan berkualitas".

Indikator yang digunakan adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP), dimana nilai IKP dapat menggambarkan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, dalam artian kebutuhan masyarakat akan pangan yang berkualitas dan bergizi tinggi untuk hidup sehat, aktif dan produktif, terpenuhi. Skor IKP Kota Bogor selama tiga tahun berturut-turut termasuk kelompok sangat tahan pangan. Skor IKP pada Tahun 2019 adalah 74,07, Tahun 2020 72,40, dan Tahun 2021 74,53.

Sasaran yang digunakan seiring dengan perubahan tujuan tersebut adalah "Meningkatnya pemanfaatan pangan yang beragam, sehat dan aman sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)" dengan indikator Indeks Pemanfaatan Pangan. Indeks Pemanfaatan Pangan merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Ketahanan Pangan. Indeks Pemanfaatan Pangan menggambarkan seberapa besar pangan yang ada di wilayah tersebut dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Pada Misi II, terdapat perubahan tujuan dan sasaran dalam rangka keselarasan dengan sasaran dalam Misi II RPJMD, yaitu "Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan Melayani (*Smart Government*). Tujuan pada Renstra awal adalah "Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian dan Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel". Dalam Renstra Perubahan tujuan ini dirubah menjadi "Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor", dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang

bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Tahun 2022-2024, DKPP mentargetkan nilai A dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Tujuan "Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor" memiliki sasaran "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi lingkup Perangkat Daerah". Target yang berusaha dicapai oleh dinas pada Tahun 2022-2024 berturut-turut adalah 80,01, 81 dan 82.

Pada Misi III, terdapat penambahan dan perubahan pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penambahan ini merupakan implikasi dari dimasukkannya beberapa program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ke dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Tujuan 1 tidak mengalami perubahan nomenklatur, namun indikator dirubah menjadi Indeks Keterjangkauan Pangan. Pemilihan indikator ini dirasa lebih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya pemerataan akses pangan. Indeks Keterjangkauan Pangan menggambarkan kemampuan untuk memperoleh atau mengakses cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Kemampuan mengakses ini terkait dengan ketersediaan pangan, distribusi serta daya beli masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, maka sasaran yang digunakan adalah "Tersedianya pangan yang beragam, dalam jumlah cukup dan terdistribusi merata, dengan harga terjangkau".

Tujuan II dalam Misi III Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah "Terwujudnya aktifitas perekonomian di sektor pertanian dan perikanan". Indikator yang digunakan adalah Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan (%). Sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut

adalah Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Perikanan dengan indikator PDRB sektor pertanian/kehutanan dan perikanan Atas Dasar Harga Konstan.

3.3. Prioritas Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2019-2024. Dalam Perubahan Renstra dimaksud banyak dilakukan perubahan indikator program akibat adanya pemetaan nomenklatur Program, Kegiatan dan sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri 090 Tahun 2019, Kemendagri 050 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 Tahun 2021. Selain perubahan indikator, terdapat penyesuaian target bagi program-program yang masih menggunakan indikator lama. Penyesuaian ini dilakukan karena terdampak oleh pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 dan 2021 yang sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan. Target yang tercantum dalam Perubahan Renstra telah dipertimbangkan serasional mungkin karena pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 membutuhkan waktu yang cukup panjang. Renja DKPP Tahun Anggaran 2024 telah menggunakan indikator dan target baru yang tercantum dalam Perubahan Renstra.

Dalam Renja Perubahan Tahun 2024 akan dilaksanakan 11 (sebelas) program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan, sebagaimana yang tercantum dalam Renja DKPP 2024.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2024 membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp 34.006.099.768,00 (*tiga puluh empat milyar enam juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah),* untuk pelaksanaan 11 (sebelas) program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan. Anggaran ini berasal dari APBD Kota Bogor. Rincian pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN									
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede		Rp. 13.930.000				Rp. 13.930.000	Rp. 15.000.000
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.006.242.500				Rp. 4.006.242.500	Rp. 50.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar		Rp. 560.000				Rp. 560.000	Rp. 15.000.000
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 35.300.000				Rp. 35.300.000	Rp. 50.000.000
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota									
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0					Rp. 50.000.000
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi									
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku		Rp. 30.421.800				Rp. 30.421.800	Rp. 45.000.000
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.761.752				Rp. 40.761.752	Rp. 75.000.000
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN									
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan									
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.650.000				Rp. 12.650.000	Rp. 50.000.000
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Waringin Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak		Rp. 1.036.502.500				Rp. 1.036.502.500	Rp. 100.000.000
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.070.000				Rp. 5.070.000	Rp. 50.000.000
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN									
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota									
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.267.703				Rp. 19.267.703	Rp. 50.000.000
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku		Rp. 1.150.000				Rp. 1.150.000	Rp. 3.000.000
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku		Rp. 3.800.000				Rp. 3.800.000	Rp. 7.000.000
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.033.402.359				Rp. 15.033.402.359	Rp. 14.157.873.772
2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku		Rp. 50.336.000				Rp. 50.336.000	Rp. 65.000.000
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku		Rp. 23.112.900				Rp. 23.112.900	Rp. 120.000.000
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku		Rp. 32.746.600				Rp. 32.746.600	Rp. 85.000.000
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku		Rp. 19.247.300				Rp. 19.247.300	Rp. 80.000.000
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku		Rp. 25.003.800				Rp. 25.003.800	Rp. 175.000.000
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku		Rp. 14.541.400				Rp. 14.541.400	Rp. 35.000.000
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku		Rp. 372.714.000				Rp. 372.714.000	Rp. 800.000.000
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku		Rp. 1.690.000	Rp. 15.143.000			Rp. 16.833.000	Rp. 200.000.000
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku		Rp. 392.353.500				Rp. 392.353.500	Rp. 350.000.000
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku		Rp. 1.141.483.448				Rp. 1.141.483.448	Rp. 450.000.000
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku		Rp. 302.308.600				Rp. 302.308.600	Rp. 450.000.000
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku		Rp. 63.656.000				Rp. 63.656.000	Rp. 70.000.000
2	09	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku		Rp. 49.980.000				Rp. 49.980.000	Rp. 65.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil									
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 62.306.800				Rp. 62.306.800	Rp. 250.000.000
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan									
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 947.206.300	Rp. 0			Rp. 947.206.300	Rp. 1.000.000.000
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.950.000				Rp. 20.950.000	Rp. 100.000.000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil									
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 61.597.600				Rp. 61.597.600	Rp. 150.000.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 520.000.000	Rp. 75.000.000			Rp. 595.000.000	Rp. 262.999.600
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 123.501.500				Rp. 123.501.500	Rp. 246.197.200
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota									
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 151.496.000				Rp. 151.496.000	Rp. 1.100.000.000
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 217.887.106	Rp. 7.014.938.000			Rp. 7.232.825.106	Rp. 400.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian									
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak		Rp. 184.638.700	Rp. 1.178.785.000			Rp. 1.363.423.700	Rp. 1.000.000.000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota									
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 92.558.800				Rp. 92.558.800	Rp. 145.000.000
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.491.000				Rp. 14.491.000	Rp. 50.000.000
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner									
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 51.618.300				Rp. 51.618.300	Rp. 55.000.000
3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.770.300				Rp. 40.770.300	Rp. 50.000.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota									
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.981.900				Rp. 9.981.900	Rp. 20.000.000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian									
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.479.800				Rp. 9.479.800	Rp. 60.000.000
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 49.039.800				Rp. 49.039.800	Rp. 100.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 436.477.700				Rp. 436.477.700	Rp. 55.000.000
Jumlah									**Rp. 25.722.233.768**	**Rp. 8.283.866.000**			**Rp. 34.006.099.768**	**Rp. 22.707.070.572**

Kota Bogor,.....
Kepala DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Ir. H. Chusnul Rozaqi, M.M.
NIP. 196711041994031010

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2024 ini, merupakan hasil evaluasi dari Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2024 sampai dengan akhir Semester I (bulan Juni 2024). Rencana Kerja ini berisi langkah-langkah atau kegiatan pokok sesuai dengan apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu triwulanan atau tahunan.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Kota Bogor, maka pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian harus mencapai tujuan Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pangan yang sehat dan berkualitas; Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor; Terwujudnya pemerataan akses pangan masyarakat; dan Terwujudnya aktifitas perekonomian di sektor pertanian dan perikanan. Disadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah tugas yang ringan. Namun dengan tekad dan kerja keras, bahu membahu dan terus meningkatkan kerjasama di antara semua pelaku pembangunan, diyakini tujuan tersebut dapat dicapai.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2024, maka diharapkan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang akan dibuat setelah tahun anggaran dapat lebih obyektif karena rencana tingkat capaian (target) kegiatan telah ditetapkan pada awal tahun kerja dan dievaluasi tingkat capaian Semester I. Selanjutnya dengan adanya Rencana Kerja ini dapat memacu kinerja seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor dan dapat bertanggung jawab untuk merealisasikan rencana tingkat capaian (target).

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Perlu memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh instansi teknis di atasnya.

2. Perlu adanya penyusunan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut juga diperlukan apabila ketersediaan anggaran terbatas, sehingga kegiatan yang menjadi prioritas dan dibutuhkan oleh masyarakat lebih diutamakan.

3. Perlu memperhatikan azas efesiensi dan efektiftifitas dalam menggunakan anggaran yang ada.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2024 ini disusun dengan harapan semoga segala yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat Ridho Allah SWT.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.Berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (Renstra Dinas Lingkungan Hidup).

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional. Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor disusun berdasarkan RKPD Kota Bogor, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, serta berpedoman pada Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Renja Provinsi Jawa Barat.

Proses penyusunan Renja Perubahan tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2019-2024 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan kedalam RKPD Perubahan tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada RKPD Kota Bogor Tahun 2024.

Selanjutnya Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bogor.

1.2 Landasan Hukum

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor yang dibebani tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan daerah Kota Bogor di bidang Lingkungan Hidup, yang eksistensi dan kewenangannya dinyatakan secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, yang tertuang di dalam beberapa produk perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Rebublik Indonesia Nomor 48510
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan lembaran Negara Nomor : 5059);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara Nomor : 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E)
11. Peraturan Walikota Nomor 162 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahunan ini adalah untuk memberi gambaran informasi Program, kegiatan-kegiatan serta rencana Anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor pada tahun 2024, baik Belanja Tidak Langsung maupun pelaksanaan Belanja Langsung.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana kerja ini adalah untuk :

1. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2024 yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat Kota Bogor;
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 yang berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Bogor Tahun 2023;
3. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.
4. Peningkatan kualitas perencanaan terhadap program dan kegiatan yang sistimatis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan antisipasi dampak perubahan iklim
5. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, keterkaitan antara Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan dokumen RKPD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor serta ditindaklanjuti dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor serta susunan garis besar dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Lalu dan Capaian Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada penyusunan Renja Perubahan sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun lalu dan realisasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mengacu pada laporan kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan / atau realisasi APBD untuk Dinas yang bersangkutan.

Tabel yang perlu disajikan dalam bagian ini adalah tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor dan Pencapaian Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (tabel 1).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor

Berisikan uraian mengenai :

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor.
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

c. Dampaknya terhadap pencapaian RPJMD dan terhadap capaian program nasional seperti SPM.
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampiran tabel berikut, Tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai :

a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor tahun 2024 dan prakiraan maju (tahun n+1), sebagaimana tabel 2.

Bab IV. Penutup.

Berisikan uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 serta Capaian Program sesuai dengan perubahan Renstra DLH serta RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 mencakup 11 (sebelas) Program dengan sasaran dan indikator kinerja Sebagai berikut :

Tabel 2.1. Realisasi Capaian pada Dinas Lingkungan Hidup Semester I Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (RP)	Realisasi	%
1	**Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**					
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.717.003.000,00	122.114.430,00	7.11
			optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.824.500.000,00	251.245.800,00	13.77
			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.476.379.800,00	412.443.906,00	27.94
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	4.340.787.489,00	2.022.995.417,00	46.6
2	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000,00	11.761.500,00	9.8
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.103.496.042,00	19.431.783.760,00	60.53
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	109.920.000,00	46.060.000,00	41.9
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	450.056.600,00	438.977.600,00	97.54
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.686.800,00	56.449.550,00	66.66
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	362.400.000,00	112.425.000,00	31.02
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.015.099,00	90.364.000,00	90.35
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.670.801,00	186.614.334,00	49.15
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	937.055.600,00	287.250.000,00	30.65
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.355.000,00	155.350.597,00	43.84

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.134.057.688,00	22.219.250.300,00	51.51
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.154.045.689,00	9.005.993.771,00	28.91
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	496.788.000,00	60.661.500,00	12.21
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	358.307.500,00	57.860.150,00	16.15
3	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**					
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	330.000.000,00	98.054.000,00	29.71
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	443.000.000,00	76.314.500,00	17.23
4	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**					
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan				

		Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	850.000.000,00	308.700.000,00	36.32
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	150.000.000,00	0.00	0
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	100.000.000,00	0.00	0
5	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**					
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	150.000.000,00	0.00	0
6	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya**					

	dan Beracun (Limbah B3)					
		Penyimpanan Sementara Limbah B3				
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	250.000.000,00	31.019.200,00	12.41
7	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**					
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	150.000.000,00	98.922.300,00	65.95
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat aterhadap PPLH kabupaten/Kota	30.000.000,00	11.555.800,00	38.52
8	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan**					

	Hidup untuk Masyarakat					
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	300.000.000,00	170.987.800,00	57
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	109.999.900,00	3.895.100,00	3.54
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup	200.000.000,00	79.042.400,00	39.52
9	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**					
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	550.000.000,00	4.680.000,00	0.85

10	**Program Pengelolaan Persampahan**					
		Pengelolaan Sampah				
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1.145.286.000,00	421.389.056,00	36.79
			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	222.502.500,00	181.165.000,00	81.42
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.427.817.200,00	315.866.880,00	13.01
J U M L A H					**56.771.193.651,00**	**44.73**

Tabel 2.2. Target dan Capaian Realisasi Indikator Sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN
1. Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	37,17	46,67	125.56	2.793.360.000
	Indeks Kualitas Udara	79,72	95,92	120.32	
2. Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	81,3	79,03	97.21	31.997.441.202
	Persentase Reduksi Sampah	7,8	7,81	100.128	

3. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	81	82.60	101.97	78.510.536.415
4. Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	600.150.000
TOTAL					126.912.130.708

Dari tabel diatas dapat terlihat capaian realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023.

Faktor-faktor penyebab tercapaianya kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan :

A. Program Pengelolaan Persampahan

a. Pada Tahun 2023 reduksi sampah dapat terealisasi sebesar 7,81% dari target sebesar 7,8 atau mencapai 100,28%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, persentase reduksi sampah dapat terealisasi sebesar 98,87%. Reduksi sampah merupakan upaya mengelola sampah yang tidak terangkut ke TPA dengan pengelolaan sampah berbasis Reduce Reuse Recycle (3R). Capaian reduksi sampah dihasilkan dari 30 lokasi pengelolaan sampah di TPS 3R yang berasal dari pengelolaan sampah organik dan sampah an organik serta dari Bank Sampah yang ada di Kota Bogor sebanyak 147 Bank Sampah Unit (BSU) yang berada di setiap Kelurahan di Kota Bogor. Capaian reduksi sampah diperoleh dari jumlah sampah yang direduksi di sumber sampah sebesar 52.61 ton/hari dibandingkan dengan jumlah keseluruhan timbulan sampah sebesar 673.663 ton/hari.

Pada Tahun 2023 Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA dapat terealisasi sebesar 79,03% dari target sebesar 81,30% atau mencapai 97,15%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD

B. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- Kolaborasi kegiatan antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan beberapa lembaga/komunitas lingkungan diantaranya adalah:
  a. Kerjasama Pemerintah Kota Bogor (Dinas Lingkungan Hidup) dengan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup Harmoni dengan pemberiaan hibah Hibah Bansos untuk mendukung program pemerintah dalam kegiatan membantu mengedukasi masyarakat mengenai lingkungan hidup dengan kegiatan:
     - Pengadaan Sarana Prasarana
     - Kegiatan Pembekalan
     - Sosialisasi Sampah Rokok
     - Sosialisasi Keselamatan Masyarakat
     - Pembinaan
     - Sarasehan Remaja Peduli Lingkungan
  b. Bekerjasama dengan Plastic Smart Cities WWF Indonesia melaksanakan Rapat Koordinasi Bank Sampah Kota Bogor Bersama WWF. Kegiatan dilaksanakan di Bogor Creative Center Kota Bogor pada tanggal 04 Juli 2023 yang dihadiri oleh WWF Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Ketua ASOBSI DPD Kota Bogor dan 45 Bank Sampah Unit di Kota Bogor pada kegiatan tersebut pihak WWF Indonesia menyerahkan bantuan dan dukungan berupa media sosialisasi kepada 30 Bank Sampah. (catatan: Anggaran dari WWF)
  c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Tingkat Kota Bogor

     Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat dilaksanakan pada hari senin sd selasa tanggal 18-19 Desember 2023 di Villa Kebon Asri Pasir Jaya Kec. Cigombong Kabupaten Bogor yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta memberdayakan masyarakat (peserta) untuk dapat ikut bergerak melakukan pengelolaan sampah mulai dari sumbernya sehingga nantinya terbentuk RT bebas sampah di setiap kelurahan yang ada di Kota Bogor sasaran dari kegiatan ini adalah perwakilan (RT/RW/LPM) Kecamatan, Bank Sampah Unit (BSU), Bank Sampah Induk (BSI) dan TPS-3R berjumlah 25 Orang.

d. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, salah satu upaya untuk meningkatkan layanan bank sampah dilakukan penyediaan sarana berupa kantong pilah anorganik serta dilaksanakannya edukasi melalui kegiatan Sosialisasi pemilahan sampah organik dan anorganik serta Pembentukan Bank Sampah. Berdasarkan Data Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2023 ini telah terbentuk 17 Bank Sampah baru di Kota Bogor.

e. PENGHARGAAN RAKSA PRASADA

Penghargaan Raksa Prasada merupakan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dianugrahkan kepada individu/kelompok masyarakat/lembaga pendidikan/kabkota serta dunia usaha yang telah berkontribusi pada pelestarian Lingkungan.

Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup dengan melaksanakan:

a. Peringatan Hari Besar Lingkungan Hidup yaitu Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (*World Environment Day)* dengan tema *"Beat Plastic Pollution"* yakni seruan untuk bertindak guna menangai sampah plastik dan mencari solusi terkait polusi plastik yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 bertempat di Alun-ALun Kota Bogor dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan serta pentingnya tindakan masyarakat untuk melakukan aksi pengurangan sampah plastik. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu berupa:
   - Penyerahan *Reverse Vending Machine* (RVM) atau Mesin Penukaran Botol Plastik pasca konsumsi dari Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan
   - Plogging dari siswa/I sekolah, Kwarcab Pramuka dan Komunitas Penggiat Lingkungan
   - Lomba Mewarnai Tingkat Sekolah Dasar
   - Stand Pameran dari Komunitas Lingkungan

- Talk Show dengan tema'Solusi Untuk Polusi Plastik" dengan narasumber dari DLH dan Komunitas Sabtu (Komunitas Lingkungan)

b. Kegiatan Plogging Rutin oleh karyawan/i Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor setiap Jumat

c. Kegiatan Penyuluhan juga dilakukan atas permohonan dari pihak lembaga pendidikan dan masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup (Pengelolaan Sampah) diantaranya dibeberapa sekolah di Kota Bogor seperti SD, SMP dan SMA BPK Penabur Bogor, SD Bogor Raya, SD Polisi, SD Rimba 3 dll.

C. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan

Indeks Kualitas Air tahun 2023 mencapai 46,67 poin dari target 37,17 poin dengan capaian 125,56%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian indeks kualitas air yaitu telah tercapai 122,27%. Capaian tersebut walaupun sangat baik tapi menurun 4,72 Poin dari tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya sumber pencemar di titik lokasi pemantauan air sungai yang didominasi oleh sampah yang berasal dari limbah domestik permukiman masyarakat di sepanjang aliran sungai, limbah dari kegiatan café/restoran/rumah makan di lokasi situ, serta adanya beberapa rumah yang membuang air limbah buangan biologis seperti kakus (berbentuk tinja manusia) atau yang biasa disebut sebagai limbah hitam langsung ke badan sungai. Selain itu juga pada lokasi pengujian situ gede dan situ panjang berdekatan dengan lahan pertanian sehingga dari kegiatan pertanian tersebut dapat mempengaruhi kualitas air situ.

Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai pada 30 lokasi di DAS Ciliwung, DAS Cisadane, dan Sungai Angke. Pengujian tersebut dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional untuk Air Sungai dan Sejenisnya Kelas 2.

Penentuan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor Tahun 2023 ini dilakukan dengan menggunakan metode Indeks Pencemar (IP) dengan menggunakan 8 parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Posfat dan Fecal Coliform (Permen LHK No.27 Tahun 2021) dari lokasi hulu, tengah dan hilir pada 10 lokasi pemantauan (3 sungai dan 7 anak sungai) di kota Bogor. Nilai Indeks Pencemar (IP) tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dengan mengalikan bobot nilai Indeks dengan persentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II.

Dengan menurunnya nilai IKA tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, menunjukkan bahwa limbah domestik atau rumah tangga serta kegiatan/usaha yang menghasilkan limbah tanpa dilakukan pengolahan yang dibuang ke sungai semakin meningkat. Untuk meningkatkan nilai IKA atau mempertahankan agar tidak semakin menurun, telah dilaksanakan berbagai upaya yaitu adanya kewajiban untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan baik yang berasal dari kegiatan masyarakat ataupun dari kegiatan usaha. Selain itu juga bagi air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ serta jika air limbah yang sudah diolah tidak dapat dibuang ke badan air permukaan terdekat, maka pilihan lain dalam membuang air limbah adalah dengan bekerja sama dengan pihak lain yang mengolah air limbah atau memanfaatkaanya kembali untuk menyiram tanaman atau untuk penyiraman toilet.

Untuk mengurangi limbah yang berasal dari air limbah buangan biologis seperti kakus (berbentuk tinja manusia), Pemerintah Kota Bogor masih terus berupaya untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS). Bagi masyarakat yang tidak mempunyai septic tank dan yang masih mempunyai kebiasaan BABS, maka pemerintah berupaya menyediakan sarana MCK Komunal yang dilengkapi IPAL Komunal. Selain itu di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dinyatakan bahwa setiap orang atau badan yang membangun permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan system terpusat dalam skala komunal atau

kawasan. Selain itu juga dilaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan atau usaha yang telah memiliki dokumen (SPPL/UKL-UPL/Amdal) yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup serta melaksanakan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai.

Indeks Kualitas Udara tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 95,92 poin atau tercapai 120,32%, dan jika dibandingkan target akhir RPJMD yaitu sebesar 120,16%. Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) komponen utama: Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO2) dan sulfur dioksida (SO2). Namun dalam prakteknya dapat juga hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO2 dan SO2. Dalam hal ini, parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar ataupun bahan bakar lain yang mengandung sulfur.

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait yaitu transportasi, ketersediaan ruang terbuka hijau, pengawasan penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan, serta dukungan pihak lain seperti masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, faktor alam juga dapat mempengaruhi kualitas udara, seperti meteorologi dan bencana (kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi).

Capaian IKU tahun 2023 menurun 3,04 poin dari tahun sebelumnya, hal ini salah satunya disebabkan adanya polusi dari asap kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan penggunaan bahan bakar meningkat serta kandungan gas CO juga meningkat. Limbah asap pabrik dan industri juga merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industry tersebut berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta dapat mengakibatkan pencemaran udara, air dan tanah. Selain itu, aktivitas rumah tangga juga memiliki andil yang tinggi dalam menyumbang

pencemaran udara. Kegiatan rumah tangga tersebut seperti pembakaran sampah sembarangan.

Upaya peningkatan kualitas udara yaitu pada tahun 2023 dilakukan pembinaan dan pengawasan intensif terhadap industri/kegiatan/usaha, pengujian kualitas udara ambien melalui metoda passive sampler pada lokasi-lokasi industri, permukiman, komersil/perkantoran dan kendaraan bergerak (transportasi), pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) 4 (empat) lokasi yaitu Kelurahan Empang dan Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Tanah Sareal dan Kelurahan Ciluar selain itu, upaya selanjutnya yaitu melalui pembangunan pedestrian untuk jalur sepeda dan pejalan kaki, pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor secara gratis kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor beroda dua dan roda empat, surat edaran untuk menekan polusi udara yaitu menerapkan kebijakan 4 in 1 bagi kendaraan roda empat yang masuk ke lingkungan perkantoran di Lingkup Pemkot Bogor, Aparatur wilayah melakukan pengawasan dan melarang masyarakat untuk membakar sampah, pembangunan taman-taman lingkungan lainnya, pelaksanaan aksi penanaman pohon, serta adanya himbauan untuk penggunaan kendaraan listrik.

- Penghargaan yang diperoleh oleh Kampung Iklim yang menjadi binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, yaitu : Penghargaan Tingkat Utama untuk Proklim RW 07 Kelurahan Empang dan RW 10 Kelurahan Ciluar, serta Penghargaan Tingkat Madya Proklim RW 07 Kelurahan Tanah Sareal.

  Tahun 2023 pembinaan proklim dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu Kelurahan Empang dan Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Tanah Sareal dan Kelurahan Ciluar. Dari 4 (empat) lokasi binaan proklim hanya tiga yang di daftarkan ke SRN KLHK karena ketiga lokasi binaan ini sudah memenuhi kualifikasi dari Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan.

D. Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH).

   a. Berdasarkan UU no 32 Tahun 2009 tentang PPLH Bab XII bahwa kepala daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepala

daerah bisa melimpahkan kewenangannya kepada instansi bidang pengelolaan lingkungan dan didalam Perda No 1 Tahun 2014 Tentang PPLH Bab XII bahwa Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan atas pelaksanaan ketentuan dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH. Dalam pelaksanaan pengawasan Walikota melimpahkan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

- Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Bogor bertujuan meningkatkan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Bogor. Hasil dari kegiatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan tahun 2023 ini telah dibuatkan Berita Acara (BA) sebanyak 147 Kegiatan/Usaha dan telah ditegur melalui surat teguran 1 sebanyak 84 Kegiatan Usaha, teguran 2 sebanyak 40Kegiatan Usaha dan Teguran III sebanyak 14 Kegiatan usaha serta ketaatan pelaku usaha 114 kegiatan usaha.

E. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- Pengadaan bibit tanaman Rambutan, Kemang, Mangga, Sukun, Nangka, Durian, Alpukat, Sengon dan Pala. Bibit tanaman ini didistribusikan kepada Masyarakat, yaitu SDN Bondongan, RW.13 dan RW.08 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal, Korem 0606 Suryakancana, Danau Bogor Raya dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SeKota Bogor.
  - Jumlah dan Jenis Bibit Tanaman

No	Jenis Barang Jasa	Volume	Satuan
1	Rambutan	100	Pohon
2	Kemang	50	Pohon
3	Mangga Harum Manis	100	Pohon
4	Sukun	50	Pohon
5	Nangka/Cempedak	50	Pohon
6	Durian Sitokong	77	Pohon
7	Alpukat	50	Pohon
8	Sengon	50	Pohon
9	Pala	50	Pohon
	Jumlah	577	Pohon

F. Pengendalian bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Telematika (Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIMPELA B3)

Maksud kegiatan dari Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Limbah B3 di Kota Bogor (SIMPELA B3) untuk memfasilitasi kegiatan usaha di Kota Bogor yang menghasilkan Limbah B3. Sasaran kegiatan berikut adalah memperbarui Sistem Informasi Pelaporan Limbah B3 (SIMPELA B3), sesuai dengan pencatatan dan pelaporan, serta neraca ter-update dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Output kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelaporan Limbah B3 (SIMPELA B3) di Kota Bogor.
b. Tersedia Laporan Bulanan dan Neraca Limbah B3.
c. Laporan yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah Buku Manual SIMPELA B3. Laporan dicetak hitam putih, ukuran kertas A5 dengan softcover berwarna, sebanyak 30 eksemplar.

- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sampah Spesifik Rumah Tangga di Kota Bogor)

  Maksud kegiatan Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sampah Spesifik Rumah Tangga di Kota Bogor ini adalah menginvetarisasi dan mengidentifikasi sampah spesifik yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 di lingkungan sekolah negeri tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan pusat perbelanjaan (*mall*) di wilayah Kota Bogor.
- Mendapatkan penghargaan Juara ke-3 di ajang Bogor Innovation Award 2023 Nama Inovasi: Aplikasi SIMPELA B3 (Sistem Informasi Pelaporan Limbah B3).

G. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Tahun 2023 terdapat sejumlah 16 pengaduan dugaan pencemaran yang masuk dari masyarakat kita tindak lanjuti untuk dilakuan verifikasi oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup, dan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kendala dari pelaksanaan pengawasan ini adalah tidak tenaga pejabat pengawasan lingkunganya mempunyai kewenangan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman, mengambil sampel, memerikasa peralatan, memeriksa instansi dan/atau alat transportasi

serta menghentikan pelanggaran tertentu, selain itu kurangnya tenaga dibidang pengawasan.

Selain itu permasalahan lainnya adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kegiatan usaha yang harus dipantau dengan jumlah aparatur pelaksana pemantauan. Namun upaya yang dillakukan secara maksimal dengan meningkatkan pemantauan dan pengawasan pada pelaku usaha dalam hal ketaatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan berpedoman pada dokumen dan peraturan perundangan yang berlaku, maka pengendalian beban pencemaran lingkungan diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan sasaran pemantauan dapat berjalan sebagaimana mestinya

H. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- Rukun Tetangga Peduli Lingkungan

  Kegiatan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kota Bogor dilaksanakan melalui program kegiatan Bogorku Bersih yang setiap tahunnya dilaksanakan di Kota Bogor. Untuk Tahun 2023 kegiatan Bogorku Bersih dimulai sejak bulan Februari sampai bulan November 2023 yang diikuti oleh 782 peserta dengan perincian peserta :

  - 680 RT
  - 34 SD
  - 34 SMP
  - 24 Bank Sampah
  - 10 RT Bebas Sampah

  Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan penghargaan kepada RT terbaik yang memenangkan lomba kebersihan Bogorku Bersih sehingga Kota Bogor bisa bebas dari permasalahan sampah. Puncak kegiatan penganugrahan Bogorku Bersih dilaksanakan pada tanggal 27 November 2023 di IPB International Convention Center (IICC) Botani Square. Kategori yang dilombakan adalah:

  1. Permukiman Teratur
  2. Permukiman Swadaya
  3. Permukiman Tepi Sungai
  4. RT Bebas Sampah
  5. Bank Sampah
  6. Sekolah

I. Perencanaan Lingkungan Hidup

Penyusunan Dokumen RPPLH yang merupakan dokumen perencanaan memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu (30) tahun. berdasarkan amanat dari Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/ PLA.3/11/2016 dengan melakukan inventarisasi Lingkungan Hidup untuk memperoleh data dan informasi Sumber Daya Alam dengan tujuan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya sektor Pembangunan Kota Bogor yang berdampak terhadap pengunaan sumber daya alam dan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Berikut ini merupakan kendala atau permasalahan dan pencapaian kinerja :

A. Permasalahan di bidang Pengendalian, Pencemaran Lingkungan Konservasi dan Perubahan iklim

Nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara

- Kualitas air dipengaruhi oleh sifat fisika, kimia dan biologi yang terkandung didalamnya. Perubahan kualitas air dapat dipengaruhi oleh Iklim, Geologi, vegetasi, aktivitas manusia dan waktu.
- Nilai Indeks kualitas Air sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu cuaca/kondisi lingkungan pada saat dilakukan pengujian kualitas air, beban pencemaran yang masuk ke badan sungai, ataupun perilaku masyarakat yang membuang sampah ke badan sungai
- Nilai Indeks Kualitas Air pada anak Sungai Ciliwung, Cisadane dan Angke, dipengaruhi oleh berbagai pencemaran terhadap sungai tersebut. Selain limbah dari industri, limbah domestik menjadi sumber pencemar terbesar pada sungai anak Ciliwung, Cisadane dan Angke di Kota Bogor. Hasil inventarisasi sumber pencemaran air yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kegiatan domestik menyumbang, sisanya kegiatan industry, rumah sakit,pertanian serta peternakan.

- Capaian IKU tahun 2023 menurun 3,04 poin dari tahun sebelumnya, hal ini salah satunya disebabkan adanya polusi dari asap kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan penggunaan bahan bakar meningkat serta kandungan gas CO juga meningkat. Limbah asap pabrik dan industri juga merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industry tersebut berupa zat yang berbahaya .

B. Permasalahan yang dihadapi Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diantaranya:
   - Kendala dari pelaksanaan pengawasan ini adalah Tidak ada Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PLHD) yang mempunyai kewenangan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman, mengambil sampel, memerikasa peralatan, memeriksa instansi dan/atau alat transportasi serta menghentikan pelanggaran tertentu.
   - Dokumen Lingkungan yang dimiliki biasanya hanya sebagai alat untuk menempuh perijinan sehingga pelaku kegiatan tidak menjalankan kewajiban yang tercantum dalam dokumen lingkungan.
   - Masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran terkait pelaksanaan izin Lingkungan dan izin PPLH.

   Upaya :
   - Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat fungsional pengawas lingkungan hidup.
   - Menyediakan format pelaporan yang mudah diimplementasikan oleh pelaku kegiatan/usaha.
   - Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup

C. Permasalahan yang dihadapi Bidang Pengelolaan Persampahan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diantaranya

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah di sumber;
- Menurunya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di Bank Sampah, sehingga banyak Bank Sampah yang sudah tidak beroperasional lagi.
- Banyaknya penghasil sampah baik dari pelaku usaha maupun rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah dengan baik;
- Kurangnya sosialisasi masalah pengelolaan sampah

Upaya

- Mengajak kepada warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan;
- Melakukan sosialisasi pembinaan masyarakat dan sosialisasi pembinaan Bank Sampah agar masyarakat mau memilah sampah di sumber sampah;
- Membuat lomba Bank Sampah dan RW bersih dengan harapan masyarakat terpacu untuk memilah sampah dan membuat Bank Sampah;
- Melakukan Pembinaan/Sosialisasi kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah;
- Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung program kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program/kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2023, diperoleh faktor – faktor sebagai berikut:

a. Faktor – faktor pendukung pemenuhan target kinerja program/kegiatan yaitu :
   - Dukungan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, yang bersumber dari APBD .

- Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana;
- Kerjasama lintas sektor untuk mempercepat ketercapaian sasaran program dan kegiatan;
- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan persampahan.

b. Faktor – faktor penghambat pemenuhan target kinerja program/kegiatan yaitu :
   - Masih rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
   - Terbatasnya luasan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan yang dapat digunakan untuk mempertahan kan berlangsunya proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
   - Semakin meningkatnya jumlah usaha / kegiatan yang berpotensi mencemari / merusak lingkungan sehingga menjadi tantangan bagi Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor untuk pemantauan dan pengawasan LH.
   - Terkait tantangan bidang persampahan, dimasa datang permasalahannya akan semakin berat dengan meningkatnya jumlah penduduk yang akan berdampak pada timbulan sampah, kualitas dan kuantitas alat angkut sampah yang belum optimal.

c. Peluang

   Adapun peluang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam pengembangan pelayanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu adalah :

   1. Adanya koordinasi antar OPD lain di tingkat daerah, provinsi maupun nasional
   2. Adanya dana DAK bidang LH atau Bankeu Provinsi Jawa Barat yang dapat mendorong kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

3. Kepedulian dan keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana corporate social Responsibility (CSR).
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Isu lingkungan merupakan isu global sehingga pelaku usaha dituntut untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Tabel 2.3. (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (tahun berjalan)*

Provinsi/Kabupaten/Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

NO					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	-				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	0,01	NA	0,01	0,01	100	0,01	0,01	100
						Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	0,02	NA	0,02	0,02	100	0,02	0,01	50

						Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	**100**	**NA**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,01**	**0**
						Presentase Sarana PendukungTPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang tersedia	**100**	**NA**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,01**	**0**
1	**03**	**04**	**201**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan**	**100**	**NA**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,01**	**0**
1	03	04	201	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3300	NA	0,01	0,01	100	3300	0,01	0
1	03	04	201	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	10	NA	0,02	0,02	100	10	0,02	0
1	03	04	201	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	337658	NA	100	100	100	306266	100	0
1	03	04	201	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	150	NA	128	123	96%	145	96	78
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,000**	**1**	**100**	**2**
2	**11**	**02**	**201**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Presentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,000**	**1**	**100**	**2**

2	11	02	201	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	NA	1	100	100,000	1	1	1
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	1
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Air Indeks kualitas Udara**	**IKA : 38,17 IKU : 79,81**	-	**IKA : 36,17 IKU : 79,629**	**IKA : 51,39 IKU : 98,36**	**IKA : 142,1 IKU : 123,52**	**IKA : 37.17 IKU : 79,72**	**IKA : 142,1 IKU : 123,52**	**100**
						Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	**7,98**		**7,11**	**7,11**	**100**	**7,72**	**7,98**	**1**
2	**11**	**03**	**201**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Presentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu**	**60**	**NA**	**60**	**80**	**80**	**60**	**60**	**100**
						Presentase kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	**90**	**NA**	**90**	**100**	**100**	**90**	**90**	**100**
						Presentase Jumlah Persetujuan teknis air limbah atau emisi udara Kegiatan /usaha	**90**	**NA**	**90**	**100**	**100**	**90**	**90**	**100**
						Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	**3**	**NA**	**3**	**7**	**233**	**3**	**233**	**100**
2	11	03	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	2	2	2	100	2	100	1

2	11	03	201	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	1		**100**	1	100	1
2	**11**	**03**	**203**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan**	**1**	**NA**	**1**	**1**	**100**	**1**	**100**	**1**
2	11	03	203	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	NA	1	1	100	1	**100**	1
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)**	0,5	0	0,5	0,516	103,2	0,5	103,2	2
2	**11**	**04**	**201**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi**	0,3	0	0,3	0,3	100	0,3	03	2
2	11	04	201	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	NA	1	1	100	1	100	1
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3**	**70**	**30**	**50**	**60**	**120**	**70**	**120**	**1**
2	**11**	**05**	**201**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3**	**70**	**30**	**50**	**60**		**70**	**70**	**1**
2	11	05	201	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	1	1	1	100	1	100	NA

2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**38**	**37**	**34**	**54,55**	**160.44**	**38**	**39**	**1**
2	**11**	**06**	**201**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**156**	**102**	**134**	**134**	**100**	**149**	**100**	**1**
2	11	06	201	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	NA	1	1	100	1	1	1
2	11	06	201	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	NA	1	1	1	1	1	1
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha**	**40**	**11**	**30**	**31,49**	**104,97**	**40**	**104,97**	**1**
2	**11**	**08**	**201**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan**	**90**	**NA**	**90**	**94**	**104,4**	**90**	**104,4**	**1**
						Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	**20**	**NA**	**20**	**40**	**200**	**30**	**200**	**1**
2	**11**	**08**	**201**	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	10	NA	8	40	400	10	400	1

2	**11**	**08**	**201**	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50	NA	NA	NA	NA	50	50	1
2	**11**	**08**	**201**	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	**Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat**	**300**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**200**	**200**	**1**
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan**	**10,29**	**5,29**	**7,94**	**16,8**	**211,57**	**9,26**	**211,57**	**1**
						Persentase sekolah Adiwiyata (%)	**38**	**30**	**33**	**33**	**100**	**35**	**35**	**1**
2	**11**	**09**	**201**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah RT/Masyarakat/Lemabaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**	**300**	**NA**	**300**	**611**	**203,7**	**300**	**203,7**	**1**
2	11	09	201	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16	NA	16	8	50	16	50	1
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1**
2	**11**	**10**	**201**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota**	**Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1**

2	11	10	201	01	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1	100	100	100	100	1	100	1
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Reduksi Sampah (%)**	7,20	6,89	6,8	7,8	114,7	6,8	114,7	1
						Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	78	77,04	77	81,3	105,58	77,5	105,58	1
						Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48,8	48,8	48,8	48,8	100	48,8	48,8	1
						Persentase peningkatan retribusi persampahan	2,1	2,1	2,1	2,86	136,19	2,1	136,19	1
2	**11**	**11**	**201**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R**	**100**	**NA**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1**
						Presentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	**50**	**NA**	**50**	**50**	**100**	**50**	**100**	**1**
						Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	**78**	**77,04**	**77**	**81,2**	**105,58**	**77,5**	**105,58**	**1**
2	11	11	201	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3	NA	2	3	100	2	100	1
2	11	11	201	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Terlaksananya Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pemngangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	530	522	525	536,403	102,17	526	102,17	1

2	11	11	201	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarna Penanganan Sampah untuk kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir	9	7	8	8	100	8	100	1
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**A**	**100**	**A**	**A**		**A**	**A**	
						Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah	**3,5**		**3,4**	**3,507**	**103,15**	**3,5**	**103,15**	
2	**11**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH**	**A**	**100**	**A**	**A**		**A**	**A**	
2	11	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	0	3	4	133	3	4	1
2	11	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	0	7	8	114	7	8	1
2	**11**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1**
2	11	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	302	304	304	304	1,000	302	302	1
2	**11**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,000**	**100**	**100**	**3**
2	11	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	100	5	5	100	5	100	41
2	11	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	100	2	2	100	2	100	101

2	11	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	100	4	4	100	4	100	102
2	11	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	100	1	1	100	1	100	201
2	**11**	**01**	**207**		**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3**
2	11	01	207	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	NA	10	10	1,000	10	10	1
2	**11**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100	NA	100	100	1,000	100	100	1
2	11	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	1,000	12	36	3
2	11	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	1,000	12	36	3
2	11	1	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	135	100	100	100	100	135	100	1
2	11	1	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	100	1

2	11	1	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	NA	6	8	133,3	6	133,3	1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terlihat dalam tabel T-C.30 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
b. Pelaksanaan kebijakan dukungan bidang lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
d. Pelaksanaa administrasi dibidang lingkungan hidup;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di dinas Lingkungan Hidup yaitu :

a. Penyelenggaraan urusan umum, keuangan, dan penyusunan rencana Kegiatan
b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota Bogor,
c. Melaksanakan inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan
d. Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kota Bogor,
e. Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kota Bogor,
f. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk kelembagaan kemasyarakatan Daerah kota Bogor,
g. Pemberian penghargaan lingkungan hidup daerah kota Bogor,
h. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
i. penyelesaian pengaduan, dan
j. pengelolaan sampah.

Tabel 2.4 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

Kota Bogor

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasai Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2020 (thn n-2)	**2021 (thn n-1)**	**2022 (thn n)**	**2023 (thn n+1)**	**2024 (thn n+1)**	**2021(thn n-2)**	**2022 (thn n-1)**	**2023 (thn n)**	**2024 (thn n+1)**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	NA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	NA	0,01	0,01	0,01	
		NA	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	NA	0,02	0,02	0,02	
		NA	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	
		NA	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	NA	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	Indeks Kualitas Air	49,67	35,17	36,17	37,17	38,17	51,67	56,33	37,17	38,17	

	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											
		Indeks Kualitas Udara	85,900	79,532	79,626	79,720	79,814	81,76	80,09	79,720	79,814	
		7,72	3,92	5,87	7,11	7,72	7,98	-	3,92	7,72	7,98	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	NA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	NA	30	40	50	60	70	120	30	50	60	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU	26	30	34	38	39	100	50	38	39	

		LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota										
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	NA	20	20	30	40	50	10	20	40	50	
			10	20	30	40	50	11	10	40	50	
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	NA	5,29	6,62	7,94	9,26	10,59	3,97	5,29	9,26	10,59	
		NA	31	33	35	36	38	30	31	36	38	
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	NA	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	6,89	7,61	7,0	7,2	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten / Kota	74,00	74,50	75,00	75,20	75,50	75,85	81,19	77,50	78	

		NA	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	
		NA	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NA	3,2	3,34	3,34	3,4	3,5	3,2	3,2	3,4	3,5	
		NA	B	BB	BB	A	A	BB	BB	A	A	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detil bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah.

Dengan terbitnya UU tersebut tidak banyak terjadi perubahan terhadap pembagian urusan antara Pemerintah yang berimplikasi terhadap perubahan sub-sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota. Oleh karenanya, dari sisi kewenangan tidak terjadi perubahan yang sangat drastis terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan bidang lingkungan hidup dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH akan dipaparkan berdasarkan Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat sesuai dengan perwali nomor 17 tahun 2021.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, serta UPTD Tempat Pemprosesan Akhir Sampah.

Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini publik yang harus segera dicari penyelesaiannya. Isu ini dapat berskala makro atau skala mikro. Isu-isu yang berkembang di masyarakat harus didukung oleh data-data yang valid, sehingga bukan isu yang tanpa dasar.

Strategis merupakan hal sangat penting, mendasar dan prioritas yang menghasilkan efek tertentu dan sangat menentukan kondisi selanjutnya.

Isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup

adalah adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan. Antisipasi terhadap kondisi ini pada masa depan adalah dengan melakukan berbagai tindakan yang tepat serta menjalankan aturan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Isu lainnya adalah mengatasi semakin meningkatnya pencemaran lingkungan dan pemanasan suhu udara akibat polusi yang ditimbulkan oleh semakin meningkatnya kendaraan bermotor dan proporsi ruang terbangun. Oleh karena itu diperlukan integrasi dengan tantangan transportasi dan tata ruang yang ramah lingkungan.

Adapun permasalahan mendesak yang harus segera ditangani terkait dengan kondisi lingkungan di Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Kinerja pengelolaan sampah yang perlu ditingkatkan

Permasalahan yang terjadi adalah pengelolaan sampah yang belum terpadu. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya di kota-kota besar, permasalahan yang timbul terutama karena

a. Besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi
b. Keterbatasan untuk pembuangan akhir sampah, sampai saat ini Kota Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) masih terletak di Kabupaten Bogor.
c. Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta bau yang tidak sedap , Sampah yang dihasilkan di Kota Bogor berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industry. Secara umum, peningkatan pelayanan sampah di Kota Bogor didukung oleh peningkatan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah dan disertai

peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R (*Reduce, Reuse, Recyle*) .

2. Masalah Pencemaran Air

a. Pencemaran Air Permukaan

Air permukaan adalah badan air yang terbuka yang dapat berupa sungai atau situ. Sumber pencemaran terhadap air permukaan di Kota Bogor terutama adalah pabrik, rumah sakit, pusat perbelanjaan, restoran, dan rumah tangga yang membuang limbahnya langsung ke badan air. Limbah tersebut dapat menurunkan kualitas fisik, kimia dan biologis air sungai atau situ.

Hasil pemantauan parameter pencemaran di bagian hilir, tengah dan hulu sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung beserta anak-anak sungainya dimana masih ada yang menunjukan bahwa kandungan BOD, COD, kekeruhan dan coli tinja pada titik pemantauan relative tinggi. Demikian juga hasil pengukuran pada inlet dan outlet Situ Gede dan Situ Panjang. Kandungan coli tinja yang tinggi menyebabkan badan air tersebut tidak layak untuk keperluan rumah tangga, terutama mandi dan mencuci bahan makanan.

3. Masalah Pencemaran Udara dan Kebisingan

Pencemaran udara dapat berupa meningkatnya kandungan debu, polutan atau timbulnya bau yang tidak sedap di udara. Debu timbul dari aktivitas transportasi dan kegiatan pembangunan fisik yang menimbulkan penimbunan, pembongkaran bangunan. Pencemaran udara akibat debu sifatnya fluktuatif, dan intensitasnya tinggi terutama pada musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan relative rendah karena partikel debu akan larut oleh air hujan.

Polutan udara umumnya bersumber dari sisa pembakaran sumber energi dalam aktifitas permukiman, transportasi dan industri. Polutan yang banyak menjadi masalah dari aktivitas terutama adalah CO, Timbal (Pb), Hidrokarbon, SO2, H2S dan NH3.

Sumber utama pencemaran udara dan kebisingan di Kota Bogor adalah aktivitas transportasi. Tingginya arus tranportasi terutama angkutan umum telah menimbulkan pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan. Berdasarkan uji pemantauan di beberapa lokasi sample menunjukan bahwa peningkatan kandungan NO2 pada beberapa lokasi telah melampaui baku mutu lingkungan. Demikian juga untuk senyawa lain seperti CO dan Hidrocarbon.

Berdasarkan hasil pemantauan selama tiga tahun terakhir tingkat kebisingan yang terjadi di Kota Bogor disebabkan oleh aktivitas transportasi dan industri.

4. Pencegahan Dampak Lingkungan

Upaya untuk meminimalkan dampak yang terjadi serta menghindari penurunan kualitas lingkungan maka upaya preventif harus dilakukan mengingat perbaikan lingkungan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Upaya pencegahan dimulai dari awal aktivitas antara lain: Rencana Pembangunan di Kota Bogor diharuskan dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa: AMDAL, UPL-UKL, SPPL yang dapat membantu Pemda dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi bahan acuan pengawasan. Pemantauan dan pengawasan dari pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dilakukan setiap tahun untuk kegiatan atau usaha dan dituangkan dalam monitoring dan evaluasi.

Mengacu Pasal 22 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Pasal 22 angka (1) tersebut menentukan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal/UKL/UPL. Amdal merupakan bagian dari sistem perencanaan, Amdal/UKL/UPL seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan dan gambaran yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan timbul oleh sebuah kegiatan.

5. Pengendalian Perubahan Iklim

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia menandatangani Perjanjian Paris pada kesempatan pertama tanggal 22 April 2016 di New York. Penandatanganan dilanjutkan dengan proses ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement. Berdasarkan Paris Agreement, Indonesia menargetkan penurunan emisi (Nationally Determined Contribution) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional. Komitmen Indonesia di tingkat internasional tersebut ditindaklanjuti dengan kebijakan nasional maupun daerah.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi jangka menengah, yang mana Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

   Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (under-standing), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur.Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan permasalahan hal tersebut faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misikepala daerah wakil kepala daerah, seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi :. Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Lingkungan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih.	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Kota bogor yang Sehat	1. Semakin tingginya tingkat pembangunan akan berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, pencemaran lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. 2. Pemberdayaan masyarakat yang masih belum optimal. 3. Belum sinerginy aprogram pengelolaan lingkungan hidup antar sector terkait. 4. Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya.	1. Belum terbarukannya regulasi ditingkat daerah mengenai perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. 2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Masih kurang memadainya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 5. Masih kurangnya sarana dan prasarana lingkungan hidup. 6. Belum adanya masterplan pengelolaan.	1. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang RTRW. 3. Tersedianya APBD. 4. Telah dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. 5. Adanya kemitraan dengan pihak swasta dalam mengelola lingkungan hidup.

a. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup telah sesuai dengan Program/Kegiatan yang ada di RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024.
2. Hasil analisa kebutuhan untuk tahun 2024 telah menggunakan Kepmendagri nomer 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi

dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

3. Setelah dilakukan pemetaan terhadap Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 semua kegiatan telah terdefinisikan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklaturnya

Tabel 2.6. (T-C. 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Kota Bogor**	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	**0,01**		**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Kota Bogor**	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	**0,01**	1.060.880.000	
			Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	**0,02**				Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	**0,02**	**1.787.899.700**	
			Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	**100**				Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	**100**	1.466.019.800	
			Presentase Sarana TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang tersedia	**100**				Presentase Sarana TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang tersedia	**100**	**8.599.933.589**	

	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan**	**100**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan**	**100**		
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3300 Rumah Tangga	1.100.000.000	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3850 Rumah Tangga	1.060.880.000	
2	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	10 Unit	375.000.000	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	10 Unit	**1.787.899.700**	
3	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	321580 Rumah tangga	1.476.379.800	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	337658 Rumah tangga	1.466.019.800	
4	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah Sarana TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang disediakan	145 Unit	19.495.734.844	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah Sarana TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang disediakan	150 Unit	**8.599.933.589**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	-				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					
II	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Kota Bogor	**Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS**	**100**		**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Bogor**	**Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS**	**100**		
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Bogor	**Presentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku**	**100**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Presentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku**	**100**		

5	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	400.000.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	235.840.000	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah Dokumen KLHS yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku**	**1 Dokumen**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah Dokumen KLHS yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku**	**1 Dokumen**		
6	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Bogor	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	450.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Bogor	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	443.000.000	
III	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Bogor**	**Indeks Kualitas Air**	**37,17 Poin**		**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Bogor**	**Indeks Kualitas Air**	**38,17 Poin**		
		Kota Bogor	**Indeks Kualitas Udara**	**79,72 Poin**			**Kota Bogor**	**Indeks Kualitas Udara**	**79,81 Poin**		
		Kota Bogor	**Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**	**7,72%**			**Kota Bogor**	**Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**	**7,98%**		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Presentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu**	**60**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Presentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu**	**60**		
		Kota Bogor	**Presentase kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu**	**90**			**Kota Bogor**	**Presentase kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu**	**90**		
		Kota Bogor	**Presentase Jumlah Persetujuan teknis air limbah atau emisi udara Kegiatan /usaha**	**90**			**Kota Bogor**	**Presentase Jumlah Persetujuan teknis air limbah atau emisi udara Kegiatan /usaha**	**90**		

		Kota Bogor	**Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor**	**3 Lokasi**			**Kota Bogor**	**Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor**	**3 Lokasi**		
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	850.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	790.948.000	
8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	150.000.000	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	**Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan**	**1 Dokumen**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan**	**1 Dokumen**		
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	100.000.000	
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	-	**Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)**	0,5		**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kota Bogor**	**Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)**	0,5		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**-**	**Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi**	**0,3**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi**	**0,3**		
10	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	199.999.980	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000	

V	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**-**	**Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3**	60%		**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Kota Bogor**	**Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3**	70%		
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	**-**	**Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3**	60%		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Kota Bogor**	**Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3**	70%		
11	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	300.000.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	146.536.400	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	**38%**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Kota Bogor**	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	**39%**		
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**-**	Jumlah Kegiatan dan/ atau Usaha berizin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehubungan atas ketaatan terhadap dokumen dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan	**149 Keg/Usaha**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	Jumlah Kegiatan dan/ atau Usaha berizin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehubungan atas ketaatan terhadap dokumen dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan	**156 Keg/Usaha**		
12	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Bogor	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Bogor	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	150.000.000	

VII	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**	**Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha**	**40**		**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha**	**50**		
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**Presentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan**	**90%**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Presentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan**	**90%**		
			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	**25 Lembaga**				**Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup**	**30 Lembaga**		
14	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bogor	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	10 Lembaga	500.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bogor	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	10 Lembaga	248.500.000	
15	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50 Dokumen	109.999.900	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50 Dokumen	7.851.500	
16	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	350 Orang	300.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	250 Orang	193.500.000	
VIII	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	-	**Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan**	**9,26%**		**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan**	**10,58%**		
			Persentase sekolah Adiwiyata (%)	**36%**				**Persentase sekolah Adiwiyata (%)**	**38%**		

	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	**Jumlah RT/Masyarakat/Lemabaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**	**300 Orang**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah RT/Masyarakat/Lemabaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**	**300 Orang**		
17	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16 Entitas	800.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16 Entitas	507.325.000	
IX	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	-	**Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti**	**100%**		**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Bogor**	**Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti**	**100%**		
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	-	**Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti**	**100%**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota**	**Kota Bogor**	**Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti**	**100%**		
18	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	100%	30.000.000	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	100%	30.000.000	
X	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-	**Persentase Reduksi Sampah (%)**	**7**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Reduksi Sampah (%)**	**7,2**		
			Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	**77,5%**				**Persentase Volume sampah terangkut ke TPA**	**78%**		
			Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	**48,8**				**Persentase Jalur Wilayah Penyapuan**	**48,8**		

			Persentase peningkatan retribusi persampahan	**2,1**				**Persentase peningkatan retribusi persampahan**	**2,1**		
	Pengelolaan Sampah	-	**Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R**	**100%**		**Pengelolaan Sampah**	-	**Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R**	**100%**		
			Presentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	**50%**				**Presentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah**	**50%**		
			Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	**77,5%**				**Persentase Volume sampah terangkut ke TPA**	**78%**		
19	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 laporan	1.200.000.000	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 laporan	1.132.084.500	
20	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	526 Ton	222.502.500	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	530 Ton	222.502.500	
21	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 unit	13.500.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	9 unit	7.707.335.000	
XI	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	-	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**A**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	-	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**A**		

			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah	**3,4**				**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah**	**3,5**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH**	**A**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH**	**A**		
22	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		
23	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	120.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	118.990.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100%**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100%**		
24	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	302 Orang	30.982.545.745	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	302 Orang	35.504.690.038	
25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor			109.920.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor			109.920.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100%**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100%**		
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	550.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	443.606.600	
27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	99.995.010	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	84.686.800	
28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	400.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	362.400.000	
29	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.015.099	

30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	736.130.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	379.670.801	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100%**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100%**		
31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	808.089.862	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	593.543.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**		
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	391.883.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	354.355.000	
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.008.326.740	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.962.107.688	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100%**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100%**		
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	135 Unit	34.354.391.977	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	135 Unit	27.252.603.689	
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	800.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	496.788.000	

36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	342.640.000	
			JUMLAH		**154.470.899.858**	**JUMLAH**				**134.236.173.304**	

b. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Kegiatan yang merupakan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang masuk forum Musrembang baik tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2024 terdapat dalam tabel T-C.32

Usulan-usulan tersebut telah sesuai dengan isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup yaitu adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dalam hal ini terkait dengan pengelolaan persampahan.

Tabel 2.7. (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Bogor Jawa Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				

	Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	Jl. Ciremei Ujung No.3, RT.01/RW.02, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	100 m²	Ketersediaan lahan
		Jl. Palupuh Raya No.3, RT.01/RW.02, Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	29x38x30	Ketersediaan lahan
	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	Jl. Sindang Barang Pengkolan RT.01/04, RT.06/RW.04, Sindangbarang, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	108 m²	
		Jl. Pahlawan I No.34, RT.05/RW.07, Bondongan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16131, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	45 m²	
	Penyediaan Sarana Persampahan	Jl. Ardio Blok Belimbing No.17, RT.03/RW.02, Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	0	
		Jl. Cemplang Baru Utama No.20a, RT.02/RW.11, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Ciremei Ujung Blok Cempaka No.1, RT.4/RW.12, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	6 unit	
		Jl. Semplak No.97, RT.01/RW.09, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	

		Jl. Cilendek No.63 B, RT.01/RW.08, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Menteng No.113, RT.02/RW.12, Menteng, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16111, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		BARANANGSIANG INDAH	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	10 unit	
		BARANANGSIANG INDAH	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	5 unit	
		DUKUH JAWA RT 03 RW 06 KELURAHAN CIKARET	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	4 unit	
		jalan sindang barang pengkolan RT 01 RW.04, Sindangbarang, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	11 unit	
		Gg. Nasedin No.1, RT.02/RW.02, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Moh. A. Salmun No.54, RT.02/RW.02, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	

		CQ3Q+8RM, Jl. Paledang, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		RT.01,02,03,04,05,06/RW.15, Empang. Kec. Bogor Selatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2 unit	
		BARANANGSIANG INDAH	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	10 unit	
		Jl. Ciremei Ujung No.6, RT.05/RW.02, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	10 Buah	
		Jl. Rancamaya No.8, RT.03/RW.07, Rancamaya, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16139, Indonesia (Usulan Mardiyanto, S.Pi)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3	
		Jl. Katu Lampa No.27, RT.11/RW.04, Katulampa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16144, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	100 unit	
		Jl. Ciburial Indah, RT.03/RW.04, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3	
		Gg. Gotong Royong Blok Masjid No.9, RT.02/RW.01, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		CQFC+MGJ, Gg. Cendana, RT.01/RW.03, Cilendek Bar., Kec.	Penyediaan Sarana dan	1 unit	

		Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Prasarana Pengelolaan Persampahan		
		CQF9+M7R, Jl. Blok Tempe, RT.02/RW.04, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Gg. Makam No.26, RT.03/RW.05, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Gg. Baitussalam No.46, RT.03/RW.07, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Cilendek Indah No.3, RT.03/RW.06, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Gg. Baitussalam No.11, RT.03/RW.07, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Cemplang Baru No.57, RT.01/RW.12, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Cijahe No.6, RT.03/RW.13, Semplak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16114, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Ciremei Ujung No.12, RT.04/RW.08, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	5 unit	

			Persampahan		
		Jl. Pendekar No.31, RT.3/RW.16, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Mekar Saluyu 1 No.22, RT.02/RW.17, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jalan Cimanggu No.5, RT.02/RW.18, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Rancamaya No.21, RT.01/RW.13, Kp. Parung Jambu, Harjasari, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16138, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2 unit	
		Jl. Ciburial Indah, RT.03/RW.04, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	60 unit	
		9RP4+8R9, Jl. Wr. Bandrek, RT.03/RW.05, Bondongan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16131, Indonesia (Usulan Mardiyanto, S.Pi)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Ardio No.55, RT.06/RW.01, Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		Jl. Perumahan Bogor Baru Blok F3 No.1, RT.01/RW.01, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	1 Paket	

			Persampahan		
		Jl. Veteran Gg. Kepatihan No.V, RT.03/RW.01, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		Jl. Paledang Blok Beton No.34, RT.2/RW.01, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		Jl. Roda I No.8, RT.03/RW.08, Babakan Ps., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16126, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		CR44+528, RT.01/RW.01, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16128, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		Jl. Sempur No.1, RT.01/RW.01, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		Jl. Ir. H. Juanda No.98, RT.01/RW.01, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		Jl. Arsitek F. Silaban No.15, RT.02/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		Jl. Ciremei Ujung No.155, RT.02/RW.05, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	6 unit	

			Persampahan		
		Jl. M.A Salmun No.26, RT.03/RW.06, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	300	
		Jl. Raya Semplak No.12, RT.01/RW.10, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Rancamaya No.100, RT.02/RW.1, Rancamaya, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16139, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	10.000.000	
		Jl. Kp. Anyar No.52, RT.02/RW.06, Muarasari, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16137, Indonesia (Usulan Mardiyanto, S.Pi)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Unit	
		Jl. Pajajaran Perum Danau Bogor Raya No.33, RT.03/RW.05, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16151, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	7 Buah	
		RT06 RW02 Kelurahan Cibuluh	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Unit	
		Baranangsiang Indah	Prasarana Daur Ulang Sampah	2 Unit	
		Jl. Baranangsiang 4 No.29, RT.03/RW.10, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154, Indonesia	Prasarana Daur Ulang Sampah	1 Paket	
		8RMM+5FR, RT.005/RW.01, Bojongkerta, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16139, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	1 Unit	

			Persampahan		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
	Pengelolaan Sampah	Pasar Gembrong Batutulis	Kajian Potensi Sampah Pasar	1 laporan	
		Kelurahan Rangga Mekar	Kajian Potensi Bangkit Sampah Rumah Tangga	1 laporan	
	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Perumahan Baranangsiang Indah (BSI)	Prasarana Daur Ulang Sampah	50 Orang	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				

	Penyimpanan Sementara Limbah B3				
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kota Bogor	Kajian Sistem Tanggap Darurat dalam pengelola B3 dan Limbah B3	1 Dokumen	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2023 adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen Renja Perubahan ini memuat informasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, meliputi program kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan rencana tingkat capaian (target) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2023. Program dan kegiatan yang disasar tersebut tidak lepas dari kerangka kebijakan nasional sehingga perlu untuk menelaahnya dan menyesuaikan dengan kebijakan baik tingkat nasional maupun provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan Kota Bogor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Bogor yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan daerah harus sejalan dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional maka diperlukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi.

Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 akan mengacu pada Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 yang sedang disusun oleh pemerintah pusat dan juga perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 berpedoman pada perencanaan jangka panjang dan jangka menengahnya dengan mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Sedangkan pada tingkat provinsi Jawa Barat, tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023, Provinsi Jawa Barat berpedoman pada dokumen RPJMD 2018-2023 serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Pembangunan Jawa Barat tahun 2023 dengan Visi dan misi nya ” Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi:.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang mempunyai fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mempunyai kewenangan pada 11 sub bidang yaitu :

Tabel 3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

K.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	RPPLH provinsi.	RPPLH kabupaten/kota.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	KLHS untuk KRP provinsi.	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
			Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11.	Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (*landfill gas*) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.		pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Strategi merupakan aturan atau arahan untuk mencapai misi dan tujuan yang dapat meliputi kegiatan atau program secara keseluruhan. Strategi dibangun melalui pemanfaatan semua kekuatan (sumberdaya) dan peluang secara optimal serta memperhatikan semua kelemahan dan ancaman sebagai bahan koreksi. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dengan memanfaatkan semua kelebihan dan meminimumkan kelemahan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Tabel berikut menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Berikut indikator sasaran, dan target kinerja sasaran untuk 5 tahun ke depan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, sehingga bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN			TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat										
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	**Tujuan :** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	NA	NA	55,45	54,53	51,37	52,35	54,53
		Sasaran : Indeks Kualitas Air	Point	49,60	51,67	56,33	49,70	36,17	37,17	38,17
		Sasaran : Indeks Kualitas Udara	Point	85,86	81,76	80,09	86,00	79,63	79,72	79,81
	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	**Sasaran :** Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	%	73,00	74,37	74,00	74,50	77,0	77,5	78,0
		Sasaran : Persentase Reduksi Sampah	%	6,30	6,89	7,61	6,60	6,8	7,0	7,2

Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas										
Tujuan 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	**Tujuan :** Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Poin	B	BB	BB	BB	A	A	A
		Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	NA	NA	NA	NA	80,01	81	82
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera										
Tujuan 3 : Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	**Tujuan :** Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100
		Sasaran : Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan paparan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut misi yang terkait dengan urusan pemerintah urusan lingkungan hidup adalah misi ke 1 Mewujudkan Kota Bogor yang sehat dan Misi 2 Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas dan Misi 2 Mewujudkan Kota Bogor yang sejahtera .

Adapun Tujuan dari misi 1 adalah terwujudnya masyarakat yang sehat dan lingkungan yang berkualitas

Mengacu kepada kerangka di atas, dalam upaya mewujudkan visi dan misi terkait khusus urusan Lingkungan Hidup, serta, berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Dinas LH Kota Bogor, memfokuskan kepada pencapaian dua tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah di atas, yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup,dimana diterjemahkan dalam bidang lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air dan udara, melalui Indikator Kinerja Organisasi: Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas yang menjadi tupoksi Dinas LH ditetapkan ada 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase reduksi sampah.
3. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air.

4. Terkendalinya sumber sumber pencemar udara

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara dalah Indeks Kualitas udara.

5. Meningkatkan Kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 1 (satu) melalui 9 (Sembilan) program yaitu : (1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, (3) Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3), (4) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadapizin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH, (5) Program Peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, (6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, (7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, (8) Program Pengelolaan Persampahan dan (9) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Adapun Tujuan dari misi 2 adalah :

Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government)*, yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu:

1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 2 (dua) melalui 1 (satu) program yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tujuan Misi 3 adalah Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Untuk mencapai tujuan Misi 3 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada (1) satu sasaran yaitu, Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 3 (tiga) yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Setelah dilakukan pemetaan sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 maka disepakati bahwa dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2024 terdiri dari 11 program 17 kegiatan, dan 34 sub kegiatan yang telah sesuai dengan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Total Kebutuhan dana/Pagu Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 adalah sebesar Rp. 134.236.173.304,- (Seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam juta serratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah).

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota

maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.33:

Tabel 3.3. (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Provinsi/Kabupaten/Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN**	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	**Kota Bogor**	**0,01**				**0,01**	

	PERSAMPAHAN REGIONAL								
		Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi		**0,02**				**0,02**	
		Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan		**100**				**100**	
		Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi		**100**				**100**	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan**	**Kota Bogor**	**100**				**100**	
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	3.300 Rumah Tangga	1.060.880.000	APBD		3.850 Rumah Tangga	1.166.968.000
2	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Dioptimalisasi	Kota Bogor	10 Unit	1.787.899.700	APBD		10 Unit	1.966.689.670
3	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	321.580 Rumah tangga	1.466.019.800	APBD		337.658 Rumah tangga	1.612.621.780

4	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	Kota Bogor	145 Unit	8.599.933.589	APBD		150 Unit	9.489.926.948
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		-						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		-						
II	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS**	-	**100**				**100**	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Presentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku**	-	**100**				**100**	
5	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Bogor	100%	235.840.000	APBD		100%	259.424.000
6	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Bogor	1 Dokumen	443.000.000	APBD		100%	-

III	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Air**	-	**37,17 Point**				**38,17 Point**	
		Indeks Kualitas Udara		**79,72 Point**				**79,81 Point**	
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		**7,72 %**				**7,98 %**	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Presentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu**	-	**60%**				**60%**	
		Presentase kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu		**90%**				**90%**	
		Presentase Jumlah Persetujuan teknis air limbah atau emisi udara Kegiatan /usaha		**90%**				**90%**	
		Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor		**3 Lokasi**				**3 Lokasi**	
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan	Kota Bogor	2 Dokumen	790.948.000	APBD		2 Dokumen	870.042.000

	Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							
8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bogor	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	165.000.000
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan**	-	**1 Dokumen**				**1 Dokumen**	
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	110.000.000
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)**	-	0,5				0,5	

	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi**	**-**	**0,3**				**0,3**	
10	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kota Bogor	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
V	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3**	**-**	60%				70%	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3**	**-**	60%				70%	
11	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kota Bogor	1 Laporan	146.536.400	APBD		1 Laporan	161.190.040

VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	**-**	**38%**				**39%**	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dan/ atau Usaha berizin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehubungan atas ketaatan terhadap dokumen dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan	**-**	**149 Keg/Usaha**				**156 Keg/Usaha**	
12	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	1 laporan	150.000.000	APBD		1 laporan	165.000.000
VII	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN**	**Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha**	**-**	**40%**				**50%**	

	PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan**	**-**	**50%**				**90%**	
		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup		**25 Lembaga**				**30 Lembaga**	
13	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kota Bogor	1 Lembaga	248.500.000	APBD		10 Lembaga	273.350.000
14	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bogor	50 Dokumen	7.851.500	APBD		50 Dokumen	100.000.000

15	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Bogor	300 Orang	193.500.000	APBD		250 Orang	212.850.000
VIII	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan**	-	**9,26%**				**10,59%**	
		Persentase sekolah Adiwiyata (%)		**36%**				**38%**	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah RT/Masyarakat/Lemabaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**	-	300 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ KSM				300 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah / KSM	
16	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Bogor	16 Entitas	507.325.000	APBD		16 Entitas	558.057.500

IX	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti**	-	**100%**				**100%**	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	**Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti**	-	**100%**				**100%**	
17	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Kota Bogor	100%	30.000.000	APBD		100%	33.000.000
X	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Reduksi Sampah (%)**	-	**7**				**7,2**	
		Persentase Volume sampah terangkut ke TPA		**77,5%**				**78%**	
		Persentase Jalur Wilayah Penyapuan		**48,8**				**48,8**	
		Persentase peningkatan retribusi persampahan		**2,1**				**2,1**	

	Pengelolaan Sampah	**Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R**	-	**100%**				**100%**	
		Presentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah		**50%**				**50%**	
		Persentase Volume sampah terangkut ke TPA		**77,5%**				**78%**	
18	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	3 laporan	1.132.084.500	APBD		3 laporan	1.245.292.950
19	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	526 Ton	222.502.500	APBD		526 Ton	244.752.750
20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan	Kota Bogor	8 unit	7.707.335.000	APBD		9 unit	8.478.068.500

	TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir							
XI	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	-	**A**				**A**	
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah		**3,4**				**3,5**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH**	-	**7 Dokumen**				**7 Dokumen**	
21	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	7 Dokumen	118.990.000	APBD		7 Dokumen	130.889.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**		**100%**				**100%**	
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kota Bogor	302 Orang	109.920.000	APBD		302 Orang	120.912.000

23	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	302 Orang	35.504.690.038	APBD		302 Orang	39.055.159.042
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**		**100%**				**100%**	
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	100%	443.606.600	APBD		100%	487.967.260
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	100%	84.686.800	APBD		100%	93.155.480
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	100%	362.400.000	APBD		100%	398.640.000
27	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bogor	100%	100.015.099	APBD		100%	110.016.609
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	100%	379.670.801	APBD		100%	417.637.881
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	-	**100%**				**100%**	
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	Kota Bogor	12 unit	593.543.600	APBD		12 unit	652.897.960

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	-	**100%**				**100%**	389.790.500
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	354.355.000	APBD		12 Laporan	389.790.500
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	42.962.107.688	APBD		12 Laporan	47.258.318.457
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	-	**100%**				**100%**	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	100 Unit	27.252.603.689	APBD		100 Unit	29.977.864.058
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	1 Unit	496.788.000	APBD		1 Unit	546.466.800

		yang Dipelihara/Direhabilitasi							
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bogor	6 Unit	342.640.000	APBD		6 Unit	376.904.000
					134.236.173.304				**147.263.853.984**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.Seluruh kegiatan yang dikembangkan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam membuat rencana program dan kegiatan ini, pada dasarnya jenis belanja yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu Belanja Tidak Langsung yang meliputi gaji dan tunjangan bagi pegawai serta Belanja Langsung yang merupakan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. Untuk membiayai kedua jenis belanja tadi, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan Dana APBD Kota Bogor.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2024 yaitu :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
   1) Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      a. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
      b. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
      c. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
      d. Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   1) Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
   2) Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

      Sub Kegiatan :

      a) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
   1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
      b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
   2) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
   1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      a) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dab beracun (Limbah B3)
   1) Penyimpanan Sementara Limbah B3

      Sub Kegiatan :

      a) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH)
   1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      a) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
   1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      a) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
      b) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
      c) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
   1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
   1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota

      Sub Kegiatan :

      a) Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
10. Program Pengelolaan Persampahan
   1) Kegiatan Pengelolaan Sampah

      Sub Kegiatan :

      a) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

b) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.1. Renja Perubahan 2024 Dinas Lingkungan Hidup

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	**Kota Bogor**	**0,01**		Bidang Pengelolaan Persampahan
		Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi		**0,02**		
		Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan		**100**		

		Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi		**100**		
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan**	**Kota Bogor**	**100**		
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	3300 Rumah Tangga	1.060.880.000	
2	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	Kota Bogor	10 Unit	1.787.899.700	
3	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	337658 Rumah tangga	1.466.019.800	
4	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	Kota Bogor	150 Unit	8.599.933.589	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		-			

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		-			
II	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS**	Kota Bogor	**100**		Bidang Tata Lingkungan
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Presentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku**	Kota Bogor	**100**		
5	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Bogor	1 Dokumen	235.840.000	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen KLHS yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku**	**Kota Bogor**	**1 Dokumen**		
6	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Bogor	100%	443.000.000	
III	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN**	**Indeks Kualitas Air**	-	**38,17 Poin**		Bidang PPLKPI

	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
		Indeks Kualitas Udara		**79,81 Poin**		
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		**7,98%**		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Presentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu**	-	**60**		
		Presentase kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu		**90**		
		Presentase Jumlah Persetujuan teknis air limbah atau emisi udara Kegiatan /usaha		**90**		
		Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor		**3 Lokasi**		
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Bogor	2 Dokumen	790.948.000	

8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bogor	1 Dokumen	150.000.000	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan**	-	**1 Dokumen**		
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	1 Dokumen	100.000.000	
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)**		0,5		Bidang PPLKPI
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi**		**0,3**		
10	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		1 Dokumen		

V	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3**		70%		Bidang PPLKPI
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3**		70%		
11	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		1 Laporan	146.536.400	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	**-**	**39%**		Bidang PPHL
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin	Jumlah Kegiatan dan/ atau Usaha berizin Lingkungan dari Pemerintah	**-**	**156 Keg/Usaha**		

	Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota sehubungan atas ketaatan terhadap dokumen dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan				
12	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	1 laporan	150.000.000	
VII	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha**	**-**	**40**		Bidang Tata Lingkungan
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan**	**-**	**90%**		
		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang		**25 Lembaga**		

		mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup				
13	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kota Bogor	10 Lembaga	248.500.000	
14	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bogor	50 Dokumen	7.851.500	
15	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Bogor	250 Orang	193.500.000	
VIII	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan**	-	**10,59%**		Bidang Tata Lingkungan
		Persentase sekolah Adiwiyata (%)		**38%**		
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	**Jumlah RT/Masyarakat/Lemabaga Masyarakat /Dunia**	-	**300 Orang**		

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**				
16	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Bogor	16 Entitas	507.325.000	
IX	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti**	-	**100%**		Bidang Tata Lingkungan
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	**Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti**	-	**100%**		
17	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	100%	30.000.000	

		yang Ditindaklanjuti/Ditangani				
X	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Reduksi Sampah (%)**	-	**7,20**		Bidang Pengelolaan Persampahan
		Persentase Volume sampah terangkut ke TPA		**78%**		
		Persentase Jalur Wilayah Penyapuan		**48,8**		
		Persentase peningkatan retribusi persampahan		**2,1**		
	Pengelolaan Sampah	**Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R**	-	**100%**		
		Presentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah		**50%**		
		Persentase Volume sampah terangkut ke TPA		**78%**		
18	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	2 laporan	1.132.084.500	

19	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	530 Ton	222.502.500	
20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Bogor	8 unit	7.707.335.000	
XI	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	-	**A**		Sekretariat
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah		**3,5**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH**	-	**A**		

21	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	7 Dokumen	118.990.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**		**100%**		
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	302 Orang	35.504.690.038	
23	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kota Bogor	302 Orang	109.920.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**		**100%**		
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	5 Paket	443.606.600	
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	2 Paket	84.686.800	
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	2 Paket	362.400.000	

27	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bogor	2 Paket	100.015.099	
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	1 Paket	379.670.801	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	Kota Bogor	**100%**		
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	10 unit	593.543.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	-	**100%**		
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	354.355.000	
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	42.962.107.688	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	-	**100%**		
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	135 Unit	27.252.603.304	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bogor	1 Unit	496.788.000	
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bogor	10 Unit	342.640.000	
				JUMLAH	**134.236.173.304**	

BAB V
P E N U T U P

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2024 yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan (fisik) maupun secara administrasi. Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah disusun.

Penyusunan Renja Perubahan ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Diharapkan Renja Perubahan ini dapat bermanfaat sebagai pedoman operasional bagi aparat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan diperlukan konsistensi dan disiplin yang kuat dari setiap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk merealisasikan Rencana Kerja Perubahan ini agar terciptanya Kota Bogor yang bersih, nyaman dan berwawasan lingkungan. .

I. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor Kota Bogor Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan Dinas untuk sisa periode tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2024 merupakan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan provinsi. Oleh karena itu substansi Perubahan Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi, serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Bogor.

Penyusunan Perubahan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2024 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Diskominfo Kota Bogor Tahun 2019-2024, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Wali Kota Bogor sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Keterkaitan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

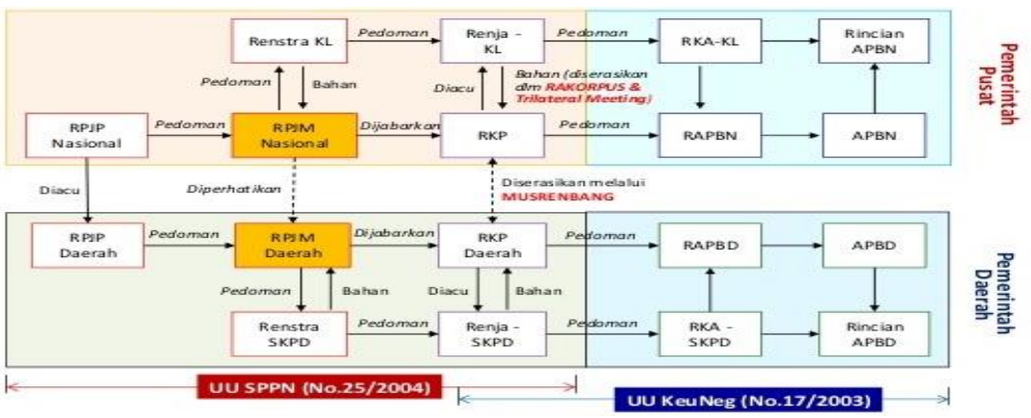

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Rancangan Renja disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan serta pendanaan dalam Renja 2024 disusun berdasarkan:

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
c. program prioritas yang tertuang dalam Misi II Kota Bogor yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas.

Selanjutnya Renja Diskominfo Kota Bogor tahun 2024 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Diskominfo Kota Bogor tahun 2024, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2024 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo Kota Bogor untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat: (6-67/2019);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2019-2024 (Noreg Peraturan Daerah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat: (5/49/2022);

25. Peraturan Wali Kota Bogor tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024;
26. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 42).
27. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 34 Tahun 2023 Tanggal 18 Agustus 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2023

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tahun 2024 dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada sisa periode Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tahun 2024 adalah :

1. Mengakomodir perubahan yang terjadi sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan organisasi berupa perubahan target kinerja, pengurangan dan pergeseran aggaran kegiatan.
2. Sebagai bahan dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kegiatannya pada tahun 2024 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada Rencana Strategis.
4. Sebagai bahan acuan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan dan kinerja sasaran di tahun 2024 pada akhir tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Diskominfo Kota Bogor yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, Bab ini memuat informasi evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfo Kota Bogor sampai dengan triwulan II dan capaian Renstra Diskominfo, Analisis kinerja pelayanan Diskominfo, Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Bogor, Reviu terhadap rancangan awal perubahan dan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan yaitu telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Diskominfo Kota Bogor, serta perencanaan program dan kegiatan Diskominfo Kota Bogor.

Bab VI Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup, Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada Tahun 2024, total pagu anggaran murni pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor berjumlah Rp. 19.610.698.595,- (sebilan belas milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). Jumlah anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan anggaran untuk pengadaan bandwith yang baru dianggrakan 2/3 dari kebutuhan setahun dan layanan kehumasan yang baru dianggarkan 1/3 dari kebutuhan setahun. Sehingga pada pergeseran anggaran di triwulan pertama tahun 2024, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor mendapatkan tambahan anggaran untuk sub kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan sebesar Rp. 992.250.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sub kegiatan Layanan hubungan Media sebesar Rp. 1.947.940.000,- (satu milyar sembilan ratus empat pulu tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total penambahan sebesar Rp. 2.940.190.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh juta serratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 22.550.888.595,- (dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas komunikasi dan Informatilka Kota Bogor sampai dengan triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut.:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I		II					
								K	Murni (Rp.)	Pergeseran (Rp.)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6 =7		9= 8/5*100	
					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar													
2	16				Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika													
2	16	01			Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	8.349.600	8.349.600		-		-		-		-
						Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	3,55	14.675.152.104	14.675.152.104		4.149.548.183		4.199.533.518		8.349.081.701	-	56,89
2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	8.349.600	8.349.600		-		-		-		-
2	16	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	8.349.600	8.349.600		-			-	-	-	-
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	11.750.141.043	11.750.141.043	25	3.307.897.640		3.482.559.715	25	6.790.457.355	25,00	57,79
2	16	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	59	11.685.353.043	11.685.353.043	59	3.294.027.640	59	3469779715	118	6.763.807.355	200,00	57,88
2	16	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	12	64.788.000	64.788.000	3	13.870.000	3	12.780.000	6	26.650.000	50,00	41,13
2	16	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	317.067.700	317.067.700	25	141.627.970		50.100.951	25	191.728.921	25,00	60,47

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I		II					
								K	Murni (Rp.)	Pergeseran (Rp.)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6 =7		9= 8/5*100	
2	16	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.119.200	6.119.200		1.511.000		1.530.000	-	3.041.000	-	49,70
2	16	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penye-diaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	95.305.700	95.305.700		23.999.000		21.468.824	-	45.467.824	-	47,71
2	16	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penye-diaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	15.072.800	15.072.800		10.691.500		1.880.000	-	12.571.500	-	83,41
2	16	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	200.570.000	200.570.000		105.426.470		25.222.127	-	130.648.597	-	65,14
2	16	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penun-jang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	%	100	62.194.569	62.194.569	25	-		61.466.000	25	61.466.000	25,00	98,83
2	16	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	59.564.569	59.564.569		-	3	59.528.000	3	59.528.000	100	99,94
2	16	01	2.07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2.630.000	2.630.000		-	2	1.938.000	2	1.938.000	100	73,69
2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	2.260.198.792	2.260.198.792	25	617.627.372		526.119.352	25	1.143.746.724	25,00	50,60
2	16	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia-an Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	9.000.000	9.000.000		802.062		812.018	-	1.614.080	-	17,93
2	16	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penye-diaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia-an Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.251.198.792	2.251.198.792		616.825.310		525.307.334	-	1.142.132.644	-	50,73
2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliha-raan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yg terpelihara sesuai RPBMD	%	100	285.550.000	285.550.000	25	82.395.201		79.287.500	25	161.682.701	25,00	56,62

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I		II					
								K	Murni (Rp.)	Pergeseran (Rp.)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6 =7		9= 8/5*100	
2	16	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliha-raan dan Pajak Kendaraan Perora-ngan Dinas atau Kenda-raan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	223.340.000	223.340.000	3	70.605.201	3	62.037.500	6	132.642.701	46,15	59,39
2	16	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Peme-liharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	62.210.000	62.210.000	12	11.790.000	12	17.250.000	24	29.040.000	48,00	46,68
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi publik	Level	Cukup Informatif	1.635.454.289	3.583.394.289		658.578.940		951.687.562		1.610.266.502		44,94
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	%	100	953.823.600	2.901.763.600		568.053.000		772.252.600	-	1.340.305.600	-	46,19
						Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan website	%	68	355.506.132	355.506.132		75.625.540		139.534.012	-	215.159.552	-	60,52
						Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	100	326.124.557	326.124.557		14.900.400		39.900.950	-	54.801.350	-	16,80
						Persentase PPID PD yang aktif	%	100	-	-		-		-	-	-	-	
2	16	02	2.01	0005	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	3	355.506.132	355.506.132	1	75.625.540		139.534.012	1	215.159.552	33,33	60,52
2	16	02	2.01	0006	Sub Kegiatan Pelaya-nan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	326.124.557	326.124.557		14.900.400		39.900.950	-	54.801.350	-	16,80
2	16	02	2.01	0007	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	4	953.823.600	2.901.763.600	4	568.053.000	4	772.252.600	8	1.340.305.600	200,00	46,19
2	16	03			Program Aplikasi Informatika	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indeks	3,50	-	-		-		-		-	-	
						Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Indeks	3,30	59.067.600	59.067.600		3.030.000		5.000.000		8.030.000	-	13,59
						Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3,50	2.381.852.402	3.374.102.402		414.447.958		1.219.144.060		1.633.592.018	-	48,42

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I		II					
								K	Murni (Rp.)	Pergeseran (Rp.)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6 =7		9= 8/5*100	
						Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	Indeks	3,00	422.168.700	422.168.700		206.922.500		85.626.378		292.548.878	-	69,30
2	16	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Domain, Sub Domain, dan IP Address milik Pemerintah Kota Bogor	%	100	67.220.000	67.220.000		280.800		21.995.760	-	22.276.560	-	33,14
						Persentase Perangkat Daerah yang terhubung Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor	%	100	1.595.916.602	2.588.166.602		235.830.560		937.884.000	-	1.173.714.560	-	-
						Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4									-	
						Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur	Level	4									-	
2	16	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	67.220.000	67.220.000		280.800		21.995.760	-	22.276.560	-	33,14
2	16	03	2.01	0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	138	1.595.916.602	2.588.166.602		235.830.560		937.884.000	-	1.173.714.560	-	45,35
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4	-	-		-		-		-	-	
						Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4									-	
						Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	Level	4									-	
						Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	4									-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I		II				
								K	Murni (Rp.)	Pergeseran (Rp.)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6 =7		9= 8/5*100	
						Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Level	4									-	
						Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	4									-	
						Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4									-	
						Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	Level	4									-	
						Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	Level	4									-	
						Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4	59.067.600	59.067.600		3.030.000		5.000.000		8.030.000	-	13,59
						Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4	-	-		-		-		-	-	
						Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4									-	
						Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	Level	4									-	
						Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	Level	4									-	
						Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Level	4									-	
						Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Level	3	217.468.400	217.468.400		5.520.000		70.520.500		76.040.500	-	34,97

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I		II				
								K	Murni (Rp.)	Pergeseran (Rp.)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6 =7		9= 8/5*100	
						Tingkat kematangan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tahun	1	422.168.700	422.168.700		206.922.500		85.626.378		292.548.878	-	69,30
						Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Level	3	149.593.800	149.593.800		148.872.438		-		148.872.438	-	99,52
						Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	4	351.653.600	351.653.600		23.944.160		188.743.800		212.687.960	-	60,48
						Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	3	-	-		-		-		-	-	
						Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Level	4	-	-		-		-		-	-	
						Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	Level	4	-	-		-		-		-	-	
2	1 6	0 3	2.0 2	00 03	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	217.468.400	217.468.400		5.520.000		70.520.500	-	76.040.500	-	34,97
2	1 6	0 3	2.0 2	00 04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	31.328.000	31.328.000		31.328.000		-	-	31.328.000	-	100,00
2	1 6	0 3	2.0 2	00 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	5	118.265.800	118.265.800		117.544.438		-	-	117.544.438	-	99,39
2	1 6	0 3	2.0 2	00 07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	1	351.653.600	351.653.600		23.944.160	1	188.743.800	1	212.687.960	100	60,48
2	1 6	0 3	2.0 2	00 10	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	422.168.700	422.168.700		206.922.500		85.626.378	-	292.548.878	-	69,30

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I		II					
								K	Murni (Rp.)	Pergeseran (Rp.)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6 =7		9= 8/5*100	
2	16	03	2.02	0012	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	2	59.067.600	59.067.600		3.030.000	1	5.000.000	1	8.030.000	50	13,59
2	20				Bidang Urusan Statistik													
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	84	174.647.500	174.647.500		50.426.150		119.115.150	-	169.541.300	-	97,08
						Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	%	3	148.351.300	148.351.300		1.550.000		45.452.759	-	47.002.759	-	31,68
2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan standar	%	84	73.044.000	73.044.000		-		68.997.000	-	68.997.000	-	94,46
						Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan	%	84	148.351.300	148.351.300		1.550.000		45.452.759	-	47.002.759	-	31,68
						Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data	Paket	1	101.603.500	101.603.500		50.426.150		50.118.150	-	100.544.300	-	98,96
2	20	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Dokumen	1	54.133.300	54.133.300		-		-	-	-	-	-
2	20	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Orang	131	73.044.000	73.044.000		-	117	68.997.000	117	68.997.000	89	94,46
2	20	02	2.01	0003	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik Sektoral yang dihimpun	Dokumen	1	94.218.000	94.218.000		1.550.000		45.452.759	-	47.002.759	-	49,89
2	20	02	2.01	0005	Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1	101.603.500	101.603.500		50.426.150	1	50.118.150	1	100.544.300	100	98,96
2	21				Bidang Urusan Persandian													
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	2	105.655.100	105.655.100		2.549.600		43.720.870		46.270.470	-	43,79

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I		II					
								K	Murni (Rp.)	Pergeseran (Rp.)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6 =7		9= 8/5*100	
2	2 1	0 2	2.0 1		Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI	%	83	105.655.100	105.655.100		2.549.600		43.720.870	-	46.270.470	-	43,79
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Kebijakan	1							-		-	
2	2 1	0 2	2.0 1	00 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	105.655.100	105.655.100		2.549.600		43.720.870	-	46.270.470	-	43,79
JUMLAH									19.610.698.595	22.550.888.595		5.487.053.331		6.669.280.297		12.156.333.628		53,91

2.2. EVALUASI KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR TRIWULAN II TAHUN 2024

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator anggaran belanja Triwulan II Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah tercapai baik dengan tingkat capaian sebesar 53,91% (lima puluh tiga koma sembilan puluh satu persen).

Adapun Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4. sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Triwulan II Tahun 2024

No	Urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	TARGET	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
I	**INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)**				
1	Persentase penyediaan data Statistik Sektoral	%	85	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
2	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	Level 2	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
3	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	nilai	82	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
4	Nilai Indeks Evaluasi SPBE	Index	2,99	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
5	IKM layanan pengaduan masyarakat	%	85	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
II	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
2	Hasil Penilaian SPBE	Index	2,99	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
3	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	%	41	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
4	Persentase Keterbukaan Informasi public	%	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
5	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	%	75,33	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
	URUSAN STATISTIK				

No	Urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	TARGET	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	Ada	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
2	Data basis pembangunan daerah	ada/tidak	Ada	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
3	Buku ”Kota Bogor Dalam Angka”	ada/tidak	Ada	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
4	Buku ”PDRB”	ada/tidak	Ada	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
	URUSAN PERSANDIAN				
1	Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email daerah	%	80	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	83	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
III	**INDIKATOR PROGRAM**				
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	85	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
2	Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	%	0,5	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
3	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	Level 2	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	nilai	A	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
5	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	point	3,5	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
6	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Index	2,74	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
7	Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Index	3,3	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
8	Nilai aspekTeknologi Informasi dan Komunikasi	index	2,36	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
9	Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	Index	3	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
10	Nilai Keterbukaan Informasi publik	Level	Cukup Informatif	-	Hasil pengukuran di akhir tahun

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

Diskominfo Kota Bogor sebagai Perangkat Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal maupun secara eksternal antara lain:

1. Penyediaan Ruang Server yang Layak;
2. Penyediaan layanan pusat penanggulangan bencana (DRC);
3. Kurangnya SDM TIK yang kompeten;
4. Lokasi penempatan ruang server masih belum memenuhi standar;
5. Layanan konektivitas dan jaringan belum stabil;
6. Penerimaan pengaduan non kedaruratan (call center) hanya berlaku di jam kerja dan hari kerja sedangkan layanan kedaruratan (NTPD) beroperasi selama 24 jam setiap hari selama setahun;
7. Belum menjadi satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral;
8. Sistem Informasi yang dibangun di Perangkat daerah belum sesuai standar sesuai Peraturan Wali Kota;
9. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap perkembangan TIK yang cukup pesat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfo Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan tata kelola kelembagaan;
2. Meningkatkan kapasitas infrastruktur TIK;
3. Meningkatkan Layanan Interoperabilitas;
4. Kerjasama Informasi dengan Media Massa;
5. Menyediakan sarana dan prasarana keamanan informasi;

6. Mengatasi kesenjangan waktu pelayanan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik;
7. Meningkatkan kerjasama pengelolaan satu data statistik sektoral yang berkualitas melalui komunikasi dan pertukaran data;
8. Menciptakan tata kelola profesional dengan tertib administrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran.
9. Mengintegrasikan sistem informasi dan database Perangkat Daerah;
10. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan;
11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
12. Mengembangkan muatan e-Government.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD

Rancangan awal Perubahan RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan Perubahan RKPD sebagai panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan metode teknokratik dan partisipatif.

Pada Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor lebih memaksimalkan dan meningkatkan peran Dinas dalam hal pengelolaan Komunikasi dan Informatika dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 26.927.194.502,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua rupiah). Namun berdasarkan hasil review yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka anggaran berkurang menjadi Rp. 24.033.186.835,- (dua puluh empat milyar tiga puluh tiga juta setarus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupah).

Adapun yang mengalami pengurangan anggaran adalah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan menyesuaikan dengan hasil perhitungan kebutuhan oleh BKPDM, sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan menunda pembelian sarana dan prasarana Gedung, sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan menunda pembelian infrastruktur server, dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik dengan mengakomodir sebagian usulan pemeliharaan cctv disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun secara lengkap terlihat pada tabel 2.3. berikut ini:

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024 Kota Bogor

KODE KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	RANCANGAN AWAL RKPD		HASIL ANALISI KEBUTUHAN		KETERANGAN
				TARGET INDIKATOR	ANGGARAN	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN	
	Dinas Komunikasi dan Informatika				26.927.194.502		24.033.186.835	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika				26.554.373.902		23.660.366.235	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.55 Point A Poin	16.374.365.498	3.55 Point A Poin	15.693.232.210	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah Lingkup Perangkat Daerah	A Nilai	8.349.600	A Nilai	8.349.600	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	8.349.600	7 Dokumen	8.349.600	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	13.199.840.037	100 %	12.715.670.949	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ bulan	13.147.042.037	59 Orang/ bulan	12.662.872.949	Menyesuaikan dengan perhitungan kebutuhan dari BKPSDM
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	52.798.000	12 Laporan	52.798.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	421.102.500	100 %	364.138.300	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	6.119.200	1 Paket	6.119.200	

KODE KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	RANCANGAN AWAL RKPD		HASIL ANALISI KEBUTUHAN		KETERANGAN
				TARGET INDIKATOR	ANGGARAN	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan					
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.265.500	1 Paket	92.265.500	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.072.800	1 Paket	15.218.600	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	307.645.000	1 Laporan	250.535.000	Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 %	201.514.569	100 %	61.514.569	
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	59.564.569	3 Unit	59.564.569	
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	141.950.000	3 Unit	1.950.000	Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.260.198.792	100 %	2.260.198.792	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	9.000.000	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.251.198.792	1 Laporan	2.251.198.792	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase Barang Milik Daerah yg terpelihara sesuai RPBMD	100 %	283.360.000	100 %	283.360.000	

KODE KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	RANCANGAN AWAL RKPD		HASIL ANALISI KEBUTUHAN		KETERANGAN
				TARGET INDIKATOR	ANGGARAN	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	223.340.000	13 Unit	223.340.000	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	60.020.000	50 Unit	60.020.000	
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		Nilai Keterbukaan Informasi publik	Menuju Informatif Level	3.553.654.289	Menuju Informatif Level	3.553.654.289	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan website Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP Persentase PPID PD yang aktif	100 % 68 % 100 % 100 %	3.553.654.289	100 % 68 % 100 % 100 %	3.553.654.289	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	344.226.132	3 Dokumen	344.226.132	
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	317.664.557	1 Dokumen	317.664.557	

KODE KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	RANCANGAN AWAL RKPD		HASIL ANALISI KEBUTUHAN		KETERANGAN
				TARGET INDIKATOR	ANGGARAN	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN	
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	2.891.763.600	4 Layanan	2.891.763.600	
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Nilai aspek penerapan manajemen SPBE Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,0 Index 3,3 Index 3,7 Index 3,5 Index	6.626.354.115	3,0 Index 3,3 Index 3,7 Index 3,5 Index	4.413.479.736	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Domain, Sub Domain, dan IP Address milik Pemerintah Kota Bogor Persentase Perangkat Daerah yang terhubung Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	100 % 100 % 4 Level 4 Level	2.936.031.802	100 % 100 % 4 Level 4 Level	2.934.345.652	
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	66.540.000	1 Dokumen	66.540.000	
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	138 Unit	2.869.491.802	138 Unit	2.867.805.652	

2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 3 Level 4 Level 3 Level 4 Level 4 Level 1 Tahun 3 Level 4 Level 4 Level	3.690.322.313	4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 3 Level 4 Level 3 Level 4 Level 4 Level 1 Tahun 3 Level 4 Level 4 Level	1.479.134.084	

			Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE Tingkat kematangan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE					

KODE KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	RANCANGAN AWAL RKPD		HASIL ANALISI KEBUTUHAN		KETERANGAN
				TARGET INDIKATOR	ANGGARAN	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN	
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	517.420.400	1 Unit	210.208.400	Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyeleng-garaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	31.328.000	1 Dokumen	31.328.000	
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	5 Perangkat Daerah	2.320.452.013	5 Perangkat Daerah	416.540.184	Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	350.035.600	1 Unit	349.971.200	
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komuni-kasi Pemerintah Daerah	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	413.028.700	1 Dokumen	413.028.700	
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	2 Dokumen	58.057.600	2 Dokumen	58.057.600	
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				267.165.500		267.165.500	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia) Persentase ketersediaan data statistik sektoral	6 % 89 %	267.165.500	6 % 89 %	267.165.500	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data Persentase PD yg menyediakan	89 % 1 paket 89 %	267.165.500	89 % 1 paket 89 %	267.165.500	

KODE KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	RANCANGAN AWAL RKPD		HASIL ANALISI KEBUTUHAN		KETERANGAN
				TARGET INDIKATOR	ANGGARAN	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN	
			data statistik sektoral sesuai dengan standar					
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	80 Orang	71.344.000	80 Orang	71.344.000	
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	94.218.000	1 Dokumen	94.218.000	
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	101.603.500	1 Unit	101.603.500	
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				105.655.100		105.655.100	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level 2 Level	105.655.100	Level 2 Level	105.655.100	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI	1 Kebijakan 83 %	105.655.100	1 Kebijakan 83 %	105.655.100	

KODE KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	RANCANGAN AWAL RKPD		HASIL ANALISI KEBUTUHAN		KETERANGAN
				TARGET INDIKATOR	ANGGARAN	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	105.655.100	1 Laporan	105.655.100	

2.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Diskominfo Kota Bogor akan mengkaji dan menambah usulan program dan kegiatan dari masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Diskominfo Kota Bogor dalam pembuatan program kegiatan berusaha untuk memperhatikan usulan-usulan dalam pelaksanaan Musrembang Kecamatan sedangkan untuk usulan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Bogor maka usulan kegiatan tersebut diarahkan kepada Dinas yang terkait.

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas dibidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, diharapkan bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat Indonesia yang informatif.

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Sebagai leading sektor dibidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan berfokus pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah merancang dan menyusun berbagai program/kegiatan berazaskan pada peningkatan jangkauan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Tujuan dan Sasaran ditetapkan untuk mencapai Visi Wali Kota Bogor sebagai visi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu VISI ***"Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga"*** dalam MISI yang kedua yaitu "**Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**".

Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Misi Kedua tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor adalah **"Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart Government*)"**.

Sedangkan sasaran yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah **"Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel"** dan "**Meningkatnya kualitas** layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta **pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)".**

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor adalah sebagai berikut :

Tujuan 1	:	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
Sasaran *1*	:	Tersedianya data statistik sectoral
Sasaran 2	:	Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi
Sasaran 3	:	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah
Tujuan *2*	:	Peningkatan kualitas smart government
Sasaran *1*	:	Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam renja ini adalah demi pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Selain itu faktor penunjang lainnya adalah pencapaian target renstra Perangkat Daerah dan wujud nyata pengimplementasian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor pada Tahun 2023 semula akan melaksanakan 3 urusan yang terbagi ke dalam 5 program, 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan, bertambah pada perubahan renja menjadi 39 sub kegiatan dengan penambahan sub Kegiatan Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi.

Adapun rincian urusan, program dan sub kegiatan tergambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Bogor

Kode Kegiatan	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja / Output	Hasil Analisi Kebutuhan			catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				TARGET capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				24.033.186.835				
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika				23.660.366.235				
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.55 Point A Poin	15.693.232.210			-	-
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah Lingkup Perangkat Daerah	A Nilai	8.349.600			-	-
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	8.349.600			-	-
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	12.715.670.949			-	-
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ bulan	12.662.872.949		Menyesuaikan dengan perhitungan kebutuhan dari BKPSDM	-	-

Kode Kegiatan	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja / Output	Hasil Analisi Kebutuhan			catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				TARGET capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyu-sunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	52.798.000			-	-
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	364.138.300			-	-
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.119.200			-	-
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.265.500			-	-
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.218.600			-	-
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.535.000		Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	-	-
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 %	61.514.569			-	-
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	59.564.569			-	-
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Diskominfo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Unit	1.950.000		Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	-	-

Kode Kegiatan	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja / Output	Hasil Analisi Kebutuhan			catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				TARGET capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.260.198.792			-	-
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000			-	-
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.251.198.792			-	-
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penun-jang Urusan Peme-rintahan Daerah		persentase Barang Milik Daerah yg terpelihara sesuai RPBMD	100 %	283.360.000			-	-
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	223.340.000			-	-
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	60.020.000			-	-
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		Nilai Keterbukaan Informasi publik	Menuju Informatif Level	3.553.654.289			-	-

Kode Kegiatan	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja / Output	Hasil Analisi Kebutuhan			catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				TARGET capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan website Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP Persentase PPID PD yang aktif	100 % 68 % 100 % 100 %	3.553.654.289			-	-
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	344.226.132			-	-
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	317.664.557			-	-
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	2.891.763.600			-	-
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Nilai aspek penerapan manajemen SPBE Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,0 Index 3,3 Index 3,7 Index 3,5 Index	4.413.479.736			-	-

Kode Kegiatan	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja / Output	Hasil Analisi Kebutuhan			catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				TARGET capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Domain, Sub Domain, dan IP Address milik Pemerintah Kota Bogor Persentase Perangkat Daerah yang terhubung Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	100 % 100 % 4 Level 4 Level	2.934.345.652			-	-
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	66.540.000			-	-
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	138 Unit	2.867.805.652			-	-
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijak-	4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level	1.479.134.084			-	-

Kode Kegiatan	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja / Output	Hasil Analisi Kebutuhan			catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				TARGET capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			an Internal terkait Audit TIK Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data Tingkat Kematangan Kebijak-an Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data Tingkat Kematangan	4 Level 3 Level 4 Level 3 Level 4 Level 4 Level 1 Tahun 3 Level 4 Level 4 Level					

Kode Kegiatan	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja / Output	Hasil Analisi Kebutuhan			catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				TARGET capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Pembangunan Aplikasi SPBE Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data Tingkat Kematangan Penera-pan Manajemen Layanan SPBE Tingkat Kematangan Penera-pan Manajemen Risiko SPBE Tingkat kematangan Pengem-bangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komuni-kasi Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghu-bung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE						
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	210.208.400		Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	-	-
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	31.328.000			-	-
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	5 Perangkat Daerah	416.540.184		Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	-	-

Kode Kegiatan	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja / Output	Hasil Analisi Kebutuhan			catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				TARGET capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	349.971.200			-	-
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	413.028.700			-	-
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	2 Dokumen	58.057.600			-	-
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				267.165.500				
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia) Persentase ketersediaan data statistik sektoral	6 % 89 %	267.165.500			-	-
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data Persentase PD yg menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan standar	89 % 1 paket 89 %	267.165.500			-	-
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	0			-	-

Kode Kegiatan	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja / Output	Hasil Analisi Kebutuhan			catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				TARGET capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	dan Diseminasi Data Statistik Sektoral								
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasi-tas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	80 Orang	71.344.000			-	-
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	94.218.000			-	-
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	101.603.500			-	-
2.21	Urusan Pemerintah-an Bidang Persandian				105.655.100				
2.21.02	Program Penyeleng-garaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level 2 Level	105.655.100			-	-
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informa-si Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI	1 Kebijakan 83 %	105.655.100			-	-
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keama-nan Informasi Peme-rintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	105.655.100			-	-

Kode Kegiatan	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja / Output	Hasil Analisi Kebutuhan			catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				TARGET capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sama dengan Rencana Kerja semula, pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor pada Tahun 2024 akan melaksanakan 3 urusan yang terbagi ke dalam 5 program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

Program yang mendukung tujuan ada 4 (empat) program sedangkan 1 (satu) program sebagai pendukung. Program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sedangkan program yang medukung capaian sasaran yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program penyelenggaraan statistik sektoral, dan Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasiInformasi.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang direncanakan pada perubahan tahun 2024 sebesar Rp. 24.033.186.835 (dua puluh empat milyar tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

Secara rinci, dapat dijealskan dalam tabel 4 berikut :

Tabel 4. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

KODE URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (RP)	RINCIAN AKTIVITAS
1			2	3	4	5	6	7
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				24.033.186.835	
2.16			Urusan Komunikasi dan Informatika				23.660.366.235	
2.16	01		Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	8.349.600	
				Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	3,55	15.684.882.610	
2.16	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	8.349.600	
2.16	01	2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	8.349.600	Penyusunan dokumen rencana kerja dan laporan perangkat Daerah sebanyak 7 dokumen
2.16	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	12.715.670.949	
2.16	01	2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	59	12.662.872.949	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun
2.16	01	2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen	12	52.798.000	- Penyusunan laporan keuangan bulanan sebanyak 12 laporan - Honorarium PA - Honorarium PPK SKPD - Honorarium Bendahara
2.16	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	364.138.300	

KODE URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (RP)	RINCIAN AKTIVITAS
1			2	3	4	5	6	7
2.16	01	2.06.01	Sub Kegiatan Penyedia-an Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.119.200	Belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.16	01	2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	92.265.500	Belanja ATK dan kertas, belanja bahan komputer, belanja alat kebersihan, belanja karangan bunga, belanja air mineral galon
2.16	01	2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	15.218.600	Belanja penggandaan dan cetak
2.16	01	2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	250.535.000	Belanja makanan dan minuman rapat dan belanja perjalanan dinas biasa
2.16	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	%	100	61.514.569	
2.16	01	2.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	59.564.569	Belanja laptop dan rak arsip
2.16	01	2.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1.950.000	Prasarana ruang media center
2.16	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	2.260.198.792	
2.16	01	2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	9.000.000	Belanja tagihan telepon
2.16	01	2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.251.198.792	Belanja Honorarium Non ASN dan Belanja Iuran BPJS Non ASN untuk 46 orang selama 13 bulan

KODE URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (RP)	RINCIAN AKTIVITAS
1			2	3	4	5	6	7
2.16	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yg terpelihara sesuai RPBMD	%	100	283.360.000	
2.16	01	2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perora-ngan Dinas atau Kenda-raan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	223.340.000	Pembayaran Pajak Kendaraan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 13 kendaraan
2.16	01	2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	60.020.000	Pemeliharaan Alat Pendingin AC, Pemeliharaan Personal Computer, Pemeliharaan Printer
2.16	02		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi publik	Level	Cukup Informatif	3.553.654.289	
2.16	02	2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	%	100	2.891.763.600	
				Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan website	%	68	344.226.132	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	100	317.664.557	
				Persentase PPID PD yang aktif	%	100	-	
2.16	02	2.01.05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	3	344.226.132	- Pembuatan Booklet Smart City 316 buku - Pembuatan Konten Multimedia 2 kegiatan - Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Kota Bogor dan Kanal Digital Sipatahunan

KODE URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (RP)	RINCIAN AKTIVITAS
1			2	3	4	5	6	7
2.16	02	2.01.06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	317.664.557	- Buku untuk Dokumen PPID/Keterbukaan Informasi Publik 315 buku - Sewa Aplikasi NTPD 112 - Penyediaan Pengelolaan Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat - Jasa Konsultasi Pengembangan dan Perawatan Aplikasi Sibadra (Pengaduan Masyarakat)
2.16	02	2.01.07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	4	2.891.763.600	- Publikasi pada Media Cetak Lokal Halaman Berwarna 40 tayangan - Honorarium Tim Akselerasi Pembangunan 3 orang 12 bulan - Publikasi pada media online nasional 60 tayangan - Kegiatan jumpa pers - Redaktur menulis - Publikasi pada Media Online Lokal Halaman Berwarna 250 tayangan
2.16	03		Program Aplikasi Informatika	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indeks	3,50	-	
				Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Indeks	3,30	58.057.600	
				Nilai aspekvTeknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3,50	3.942.393.436	
				Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	Indeks	3,00	413.028.700	
2.16	03	2.01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan	Persentase Pengelolaan Domain, Sub Domain, dan IP	%	100	66.540.000	

KODE URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (RP)	RINCIAN AKTIVITAS
1			2	3	4	5	6	7
			Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Address milik Pemerintah Kota Bogor				
				Persentase Perangkat Daerah yang terhubung Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor	%	100	2.867.805.652	
				Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level	4		
				Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur	level	4		
2.16	03	2.01.02	Sub Kegiatan Penatalak-sanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penye-lenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten	Jumlah Dokumen Penatalaksa-naan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	66.540.000	Sewa colocation server C Panel Kota Bogor dan Sub Domain Kota Bogor untuk 1 tahun
2.16	03	2.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	138	2.867.805.652	- Pengadaan bandwidth 600 Mbps selama 12 bulan - Pengadaan perangkat alat jaringan - Pemeliharaan dan penataan jaringan internet fiber optik
2.16	03	2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4	-	
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	4		
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	Level	4		

KODE URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (RP)	RINCIAN AKTIVITAS
1			2	3	4	5	6	7
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	4		
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Level	4		
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	4		
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4		
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	Level	4		
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	Level	4		
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	4	58.057.600	
				Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	4	-	
				Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	4		
				Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	Level	4		
				Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	Level	4		

KODE URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (RP)	RINCIAN AKTIVITAS
1			2	3	4	5	6	7
				Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Level	4		
				Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Level	3	210.208.400	
				Tingkat kematangan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tahun	1	413.028.700	
				Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Level	3	447.868.184	
				Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	4	349.971.200	
				Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	3	-	
				Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Level	4	-	
				Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	Level	4	-	
2.16	03	2.02.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	210.208.400	Sewa Data Center (Collocation) 1 paket
2.16	03	2.02.04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	31.328.000	Belanja Lisensi Zoom Meeting selama 1 tahun
2.16	03	2.02.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	5	416.540.184	Pemeliharaan CCTV Kota Bogor

KODE URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (RP)	RINCIAN AKTIVITAS
1			2	3	4	5	6	7
2.16	03	2.02.07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	1	349.971.200	- Lisensi Hak Pakai Webmail Kota Bogor - Sewa Layanan Colocation Server Webmail - Pengembangan Super Apps Layanan Publik Kota Bogor versi Mobile - Penyediaan Layanan Whatsapp Business API - Sosialisasi Pengembangan Aplikasi
2.16	03	2.02.10	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	413.028.700	- Penyediaan Layananan Multimedia Bogor Green Room Pimpinan Daerah selama 1 tahun - Pemeliharaan Perangkat Multimedia Bogor Green Room untuk 1 tahun
2.16	03	2.02.12	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	2	58.057.600	Pendampingan Evaluasi SPBE 2024
2.20			Urusan Statistik				267.165.500	
2.20	02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektora	%	84	172.947.500	
				Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	%	3	94.218.000	
2.20	02	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yg menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan standar	%	84	71.344.000	
				Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan	%	84	94.218.000	
				Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data	Paket	1	101.603.500	

KODE URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (RP)	RINCIAN AKTIVITAS
1			2	3	4	5	6	7
2.20	02	2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengum-pulan, Pengolahan, Analisis dan disemi-nasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Dokumen	1	-	sub kegiatan direfocusing
2.20	02	2.01.02	Sub Kegiatan Pening-katan kapasitas SDM Pemda dalam Pening-katan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Orang	131	71.344.000	Sosialisasi Portal Data untuk 1 kegiatan dengan target 131 orang
2.20	02	2.01.03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik Sektoral yang dihimpun	Dokumen	1	94.218.000	Penyusunan Metadata Statistik Sektor 1 dan Sektor 2 (total 2 buku)
2.20	02	2.01.05	Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur statistik	Unit	1	101.603.500	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Portal Data untuk 1 aplikasi
2.21			Urusan Persandian				105.655.100	
2.21	02		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	2	105.655.100	
2.21	02	2.01	Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI	%	83	105.655.100	
				jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Kebijakan	1		
2.21	02	2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	105.655.100	- Sosialisasi Keamanan Informasi untuk 150 orang - Lisensi Antivirus untuk 9 lisensi - Lisensi SSL untuk 1 lisensi - Lisensi Firewall untuk 1 lisensi

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas serta memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya guna mendukung tercapainya target perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan-usulan dari para pemangku kepentingan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam melaksanakan dan mengimplementasikannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai bagian dari manajemen kerja, kedudukan perencanaan kerja menjadi suatu *issue* yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan Misi dan Pencapaian Visi Organisasi.

Perencanaan kerja merupakan proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ RENJA) sebagai penjabaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Didalam Rencana Kerja ditetapkan Rencana Capaian Kerja Tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran strategis yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Perubahan dilakukan seiring dengan adanya Perubahan dan kebijakan anggaran (Rencana Kerja Anggaran/RKA) yang merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Tahun 2024 Perubahan merupakan Rencana Kerja tahun ke lima dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Peroide (Tahun 2019-2024), berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 (tahun berjalan atau tahun n), serta target yang akan dicapai pada Tahun 2024

serta perkiraan maju Rencana Kerja Tahun 2025.

Diawali dengan pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis di Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan

Kewenangan Otonomi Pemerintah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang Menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang pemuda dan Olahraga;
b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemuda dan Olahraga;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (lembaran daerah kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D), Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021) dan Peraturan Walikota Bogor Nomor tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan struktur di lingkungan Dinas Pemuda dan olah raga.

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri atas:

A. Kepala Dinas;
B. Sekretaris membawahkan:
   1. Jabatan Struktural
      1.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   2. Kelompok Jabatan Fungsional
      2.1 Perencana Muda
      2.2 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda
   3. Jabatan Pelaksana
      3.1 Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
      3.2 Bendahara

3.3 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
3.4 Pengelola Bahan Perencanaan
3.5 Pengelola Keuangan
3.6 Verifikator Data Laporan Keuangan
3.7 Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
3.8 Pengelola Kepegawaian
3.9 Pengadministrasian Umum
3.10 Pramu Kebersihan

C. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional
1.1 Analis Kebijakan Muda
1.2 Analis Kebijakan Pertama
2. Jabatan Pelaksana
2.1 Penyuluh Kepemudaan
2.2 Pengembang Sarana dan Prasarana
2.3 Pengelola Data
2.4 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

D. Bidang Pembudayaan Olah Raga, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional
1.1 Analis Kebijakan Muda
1.2 Analis Kebijakan Pertama
1.3 Teknik tata Bangunan dan Perumahan Muda
2. Jabatan Pelaksana
2.1 Penyuluh Olahraga
2.2 Pengembang Sarana dan Prasarana
2.3 Pengelola data
2.4 Pengelola Penataan sarana dan Prasarana
2.5 Pengadministrasi sarana dan Prasarana

E. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan fungsional
1.1 analis Kebijakan Muda
1.2 Asisten Pelatih Olahraga Pelaksana Pemula
1.3 Asisten Pelatih Olahraga Pelaksana
1.4 Asisten Pelatih Olahraga Pelaksana Lanjutan
1.5 Asisten Pelatih Olahraga Penyelia
1.6 Pelatih Olahraga Pertama

1.7 Pelatih Olahraga Muda

1.8 Pelatih Olahraga Madya

2. Jabatan Pelaksana

2.1 Analis Keolahragaan

2.2 Penyuluh Olahraga

2.3 Pengelola data

2.4 Pelatih Atlet

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan jabatan dan bertanggung jawab masing-masing. Jumlah pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor per awal Juli 2023 berdasarkan golongan dan unit kerjanya sebanyak 49 orang berdasarkan Struktural Jabatan dalam simpeg,sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan

Tabel. 1

No	Status	Jumlah
1	Golongan IV	7 Orang
2	Golongan III	29 Orang
3	Golongan II	9 Orang
Jumlah		**45 Orang**

(sumber data : Kepegawaian Dispora per bulan Juli 2024)

2. Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Struktural Jabatan

Tabel. 2

No	Status	Jumlah
1	Esselon II	1 Orang
2	Esselon III	4 Orang
3	Esselon IV	1 Orang
4	Jabatan Fungsional	8 Orang
5	Pelaksana	31 Orang
Jumlah		**45 Orang**

(sumber data : Kepegawaian Dispora per bulan Juli 2024)

3. Karyawan NON ASN

Tabel. 3

No	Status	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	1 Orang
2	Sopir	2 Orang
3	Tenaga Kebersihan	2 Orang
4	Tenaga Keamanan	2 Orang
Jumlah		**7 Orang**

(sumber data : Kepegawaian Dispora per bulan Juli 2024)

Sesuai Peraturan Walikota Bogor Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

a. Tugas Manajerial:

1. Memimpin pelaksanaan tugas Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, Bidang Pembudayaan Olah Raga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
2. Mendistribusikan pekerjaan mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. Memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

b. Tugas Teknis:

1. Merumuskan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pemuda dan olah raga;
2. Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga;
4. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi dalam pelaksanaan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, bidang pembudayaan olah raga, dan bidang peningkatan prestasi olah raga;
5. Melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga yang berkaitan dengan bidang pemuda dan olah raga seizin wali kota;
6. Melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran meliputi:
    a) Menyusun rka-skpd dinas;
    b) Menyusun dpa-skpd dinas;
    c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    d) Melaksanakan anggaran dinas;
    e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    f) Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
    g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    h) Menandatangani surat perintah membayar;
    i) Mengelola utang dan piutang daerah kota yang menjadi tanggung jawab dinas;

j) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dinas;

k) Mengawasi pelaksanaan anggaran dinas;

l) Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah;

m) Menetapkan pejabat lainnya lingkup dinas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah kota;

n) Menyusun anggaran kas satuan kerja perangkat daerah;

o) Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

p) Menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah;

q) Menyusun dokumen pemberian hibah bantuan sosial;

r) Menyusun dokumen permintaan, pengesahan, pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, bendahara umum daerah melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut; dan

s) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;

7. Melaksanakan tugas selaku pengguna barang meliputi:

a) Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah lingkup dinas;

b) Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban apbd dan perolehan lainnya yang sah;

c) Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

d) Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

e) Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

f) Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

g) Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada wali kota melalui pengelola barang;

h) Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

i) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

j) Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang;

8. Melaksanakan monitoring penerapan sp, menetapkan dokumen sop, dan penyusunan skm pada dinas;

9. Menetapkan perjanjian kinerja lingkup dinas; dan

10. Merumuskan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah,

laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan laporan lainnya lingkup dinas.

2. SEKRETARIS

a. Tugas Manajerial :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
2. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan serta mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. Mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas;
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

b. Tugas Teknis :

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana anggaran, penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan Dinas dan Sekretariat;
2. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset lingkup Dinas, dan kerumahtanggaan;
3. Mengoordinasikan penghimpunan data, informasi, dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan;
4. Mengoordinasikan penyusunan naskah rancangan produk hukum daerah di bidang Pemuda dan Olahraga;

5. Melaksanakan fasilitasi pemberian informasi kepada masyarakat dan melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat;
6. Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi:
   a) Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran-Tambah Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
   b) Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
   c) Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
   d) Melaksanakan fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
   e) Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang meliputi:
   a) Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
   b) Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
   c) Meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
   d) Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
   e) Mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;

f) Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;

g) Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;

h) Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan;

i) Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;

j) Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan

k) Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna;

8. Mengoordinasikan penyusunan dan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, gaji, dan tunjangan penghasilan pegawai;
9. Mengoordinasikan penyusunan pelaporan keuangan dan dana yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan bantuan lainnya, laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, tahunan/neraca dinas, dan insidentil serta melaksanakan analisis prognosis realisasi anggaran;
10. Mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu lingkup Dinas;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan tanggapan pemeriksaan;
12. Mengoordinasikan penyusunan SOP, SP, SKM, dan perjanjian kinerja lingkup Dinas;
13. Mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Dinas; dan
14. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan laporan lainnya lingkup Dinas.

Sekretaris membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;

b. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Dinas;

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu:

a. Tugas Manajerial :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas bawahan;

3. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

5. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;

6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan;

7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

b. Tugas Teknis :

1. Menyusun konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, Barang Milik Daerah, dan kerumahtanggaan lingkup Dinas;

4. Melaksanakan penatausahaan barang pengguna meliputi:

a) Menyusun rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah lingkup Dinas;

b) Membuat usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c) Mengoordinir pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;

d) Membuat konsep pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

e) Membuat rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;

f) Membuat usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;

g) Mengoordinasikan penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;

h) Meneliti Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;

i) Mengoordinasikan pembuatan Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;

j) Membuat laporan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan k) Menverifikasi laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna.

5. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan aset Dinas;

6. Menyusun usulan peningkatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan latihan (diklat), atau pelatihan teknis, magang, tugas belajar, izin belajar, dan lainnya lingkup Dinas;

7. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengelolaan Sumber Daya Manusia meliputi validasi data pegawai, pengurusan administrasi kepegawaian meliputi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, usulan pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami, Kartu Pegawai, kartu kepesertaan Badan Pengelola Jaminan Pegawai, dan pengelolaan SIMPEG, serta administrasi kepegawaian lainnya;

8. Mengelola penyediaan informasi kepada masyarakat dan menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat;

9. Melaksanakan koordinasi pembinaan kepegawaian lingkup Dinas;

10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;

11. Menghimpun Sasaran Kerja Pegawai lingkup Dinas;

12. Menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

13. Menyusun perjanjian kinerja dan konsep SOP lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

14. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA

Tugas Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda meliputi *:*

1) memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
2) menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Keuangan;
6) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dan penyetoran pendapatan;
7) mengelola gaji dan tunjangan pegawai;

8) memproses dan menghimpun laporan keuangan dan dana-dana yang bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Bantuan lainnya;
9) melaksanakan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah lingkup Dinas meliputi verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, penyiapan SPM, verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, pelaksanaan fungsi akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan.
10) membuat laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, tahunan/neraca Dinas;
11) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Keuangan;
12) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Sub Bagian Keuangan;
13) menyusun Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan;
14) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
15) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Sub Bagian Keuangan;
16) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3. PERENCANA MUDA

Tugas Perencana Muda meliputi *:*

1) memimpin pelaksanaan tugas Perencanaan dan Pelaporan;
2) menyusun rencana kerja Perencanaan dan Pelaporan;
3) mendistribusikan pekerjaan dan memberiarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4) berkoordinasi dan mengevaluasi hasil kerja bersama dengan Analis Perencanaan dan Pelaporan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Perencanaan dan Pelaporan;
6) menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan laporan lainnya lingkup Dinas;

7) melaksanakan koordinasi dengan bidang dan seksi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
8) mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) lingkup Dinas;
9) melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sector dalam perencanaan kegiatan;
10) menghimpun data, informasi, dan dokumentasi sebagai bahan penyusun evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas;
11) menghimpun laporan kegiatan yang bersumber dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan bantuan lainnya;
12) memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas;
13) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan dan Pelaporan;
14) menghimpun bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Lingkup Dinas;
15) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Lingkup Dinas;
16) menyusun Perjanjian Kinerja Perencana Muda dan menghimpun Perjanjian Kinerja lingkup Dinas;
17) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
18) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta lingkup Dinas;
19) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

C. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA

Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda meliputi :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda yang meliputi Sub kegiatan

Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda, Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda dan Sarana dan Prasarana Kepemudaan;

2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
5. Merumuskan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas/hasil kerja bawahan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda, Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda dan Sarana Prasarana Kepemudaan;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda;
10. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk bela negara, kompetisi dan apresiasi pemuda, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja, serta pemberian kesempatan untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi;
11. Mengkoordinasikan Kegiatan Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
12. Mengkoreksi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;

13. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
14. Menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
15. Menyusun perjanjian kinerja Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
16. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
17. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

1. ANALIS KEBIJAKAN MUDA yang membidangi kemitraan dan kewirausahaan kepemudaan :
   memimpin pelaksanaan tugas Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
   1) menyusun rencana kerja Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
   2) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
   3) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
   4) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
   5) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas SeksiKepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
   6) menyusun bahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula dan Pemuda Kader;

7) melaksanakan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda;
8) memfasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan/atau forum kepemimpinan pemuda sesuai dengan minta, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah;
9) memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kegiatan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan/atau bantuan akses modal;
10) memfasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi melalui kegiatan pelatihan, pendampingan dan/atau forum kepeloporan pemuda;
11) mengembangkan kepeloporan pemuda yang berkarakter sesuai dengan karakter daerah;
12) melaksanakan tugas koordinasi lintas sektoral untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
13) melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan dengan dunia usaha;
14) memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha;
15) memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara organisasi kepemudaan dengan organisasi kepemudaan negara lain;
16) Pemenuhan Hak setiap Pemuda melalui perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses pengembangan diri, penggunaan sarana dan prasarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;
17) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;

18) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPDSeksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
19) menyusun Perjanjian Kinerja Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
20) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
21) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
22) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2. *ANALIS KEBIJAKAN MUDA yang membidangi organisasi kepemudaan dan kepramukaan :*
   1) memimpin pelaksanaan tugas Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
   2) menyusun rencana kerja Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
   3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
   4) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
   5) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
   6) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
   7) mendorong peran aktif pemuda dalam menumbuh kembangkan aspek etika, moralitas, iman, ketaqwaan, ketahanan mental spiritual dan/atau kesadaran hukum;
   8) memberikan bimbingan teknis pelayanan kepemudaan kepramukaan dan standarisasi organisasi kepemudaandalam rangka memperkuat wawasan

kebangsaan, kewarganegaraan, dan pelestarian lingkungan hidup;

9) memfasilitasi upaya dan kegiatan yang bertujuan membina pemuda sebagai agen perubahan dalam pembangunan daerah dan nasional;
10) memberdayakan pemuda melalui kegiatan yang memberikan perlindungan dari pengaruh destruktif, membuka akses untuk pengembangan diri, advokasi, pelayanan yang tidak diskriminatif, serta melibatkan pemuda dalam tahapan pelaksanaan program kepemudaan;
11) Memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi;
12) Melaksanakan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
13) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada organisasi kepemudaan, kepramukaan dan standarisasi organisasi kepemudaan dalam bentuk sosialisasi, invitasi, pameran, saresehan, pagelaran, gebyar pemuda, jambore dan atau dalam bentuk lainnya;
14) Melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan dalam hal keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
15) Melaksanakan pendataan dan pembaharuan data organisasi kepemudaan dan kepramukaan berbasis Elektronik;
16) Melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan yang bergerak dalam ruang lingkup kepelajaran di jenjang menengah dan kemahasiswaan;
17) Melaksanakan verifikasi, monitoring, pembinaan, evaluasi dan pelaporan hibah bansos;
18) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta bahan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;

19) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
20) Menyusun Perjanjian Kinerja Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
21) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
22) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
23) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3. KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN
1) memimpin pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
2) menyusun rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4) engevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
6) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
7) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta bahan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
8) melaksanakan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
9) mendata sarana Prasarana Kepemudaan;
10) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;

11) menyusun Perjanjian Kinerja Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
12) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
13) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
14) melaksanakan tugas kedinasan lainnya

D. KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAH RAGA

1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembudayaan Olah Raga yang meliputi Seksi Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga, Seksi Olah Raga Rekreasi, Masyarakat dan Layanan Khusus, serta Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
2. Mengoordinasikan penyusunan rencanakerja Bidang Pembudayaan Olah Raga;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan member arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga;
5. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
6. merumuskan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang pembudayaan olah raga;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas/hasil kerjabawahan Bidang Pembudayaan Olah Raga;
8. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Seksi Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga, Seksi Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus, serta Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
9. menyusun standar dan criteria pengelolaan Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga, Seksi Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus, serta Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
10. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise dibidang pengelolaan Olah Raga pendidikan, Olah Raga rekreasi masyarakat, pengelolaan pembinaan sentra olah raga dan sekolah khusus Olah Raga, pengembangan olah raga

tradisional dan layanan khusus serta Sarana dan Prasarana Olah Raga;

11. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan Olah Raga;
12. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, dan analisis, di bidang pembudayaan Olah Raga;
13. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
14. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bidang Pembudayaan Olah Raga;
15. mengoordinasikan menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Bidang Pembudayaan Olah Raga;
16. mengoordinasikan dan menyusun perjanjian kinerja Bidang Pembudayaan Olah Raga;
17. melaksanakan koordinasi denganinstansi terkait;
18. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
19. melaksanakan monitoring,evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pembudayaan Olah Raga;
20. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

1. *KEPALA SEKSI OLAH RAGA PENDIDIKAN, SENTRA OLAH RAGA DAN KEMITRAAN OLAH RAGA*
    1) memimpin pelaksanaan tugas Seksi Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;
    2) menyusun rencana kerja Seksi Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;
    3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
    4) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
    5) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan Seksi Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;

6) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas SeksiOlah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;
7) menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan kompetisi pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
8) menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan Olah Raga pendidikan yang terkait dengan pembinaan dan kompetisi pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
9) melaksanakan supervisi pengelolaan Olah Raga pendidikan yang terkait dengan pembinaan dan kompetisi pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
10) melaksanakan sinkronisasi dan pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga serta Sekolah Olah Raga yang di selenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha;
11) melaksanakan fasilitasi kemitraan dalam dan luar negeri;
12) melaksanakan bimbingan dan pengembangan karier atlet;
13) melaksanakan bimbingan teknis dibidang kemitraan dalam dan luar negeri dan pengembangan karier atlet;
14) melaksanakan supervisi dibidang kemitraan dalam dan luar negeri dan pengembangan karier atlet;
15) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta bahan Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Seksi Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;
16) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Seksi Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;
17) menyusun Perjanjian Kinerja Seksi Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;

18) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
19) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Seksi Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;
20) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2. KEPALA SEKSI OLAH RAGA REKREASI, MASYARAKAT DAN LAYANAN KHUSUS

1) memimpin pelaksanaan tugas Seksi Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
2) menyusun rencana kerja Seksi Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan Seksi Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
6) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Seksi Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
7) memfasilitasi pengembangan Olah Raga rekreasi masyarakat dan layanan khusus;
8) melaksanakan penyelenggaraan olah raga massal dan kesehatan olah raga;
9) melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Olah Raga petualangan, Olah Raga tantangan, Olah Raga wisata dan pengembangan ruang publik Olah Raga;
10) penyelenggaraan dan pengembangan festival Olah Raga tradisional, Olah Raga usia dini, Olah Raga usia lanjut dan olah raga khusus;
11) melaksanakan pembinaan dan kompetisi Olah Raga penyadang cacat;

12) melaksanakan penyelenggara bimbingan teknis pengembangan Olah Raga rekreasi masyarakat dan layanan khusus;
13) melaksanakan monitoring dan evaluasi Olah Raga rekreasi masyarakat dan layanan khsusus;
14) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)sertabahan Survei Kepuasan Masyarakat Seksi Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
15) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Seksi Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
16) menyusun Perjanjian Kinerja Seksi Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
17) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
18) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Seksi Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
19) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3. KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

1) memimpin pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
2) menyusun rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
6) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
7) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta bahan Survei

Kepuasan Masyarakat Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;

8) melaksanakan pendataan sarana dan Prasarana Olah Raga;
9) merencanakan, mengembangkan, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana Olah Raga;
10) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
11) menyusun Perjanjian Kinerja Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
12) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
13) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
14) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

E. KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA

1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga yang meliputi Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan, Seksi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi dan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
2. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
3. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
5. merumuskan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang peningkatan prestasi Olahraga;
6. mengevaluasi pelaksanaan tugas/hasilkerja bawahan Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
7. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembibitan,Iptek dan Tenaga Keolahragaan, Seksi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi dan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
8. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembibitan,Iptek dan Tenaga Keolahragaan, Seksi Promosi

Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi dan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;

9. memantau menganalisa mengevaluasi dan melaporkan Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan, Seksi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi dan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
10. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di Seksi Pembibitan,Iptek dan Tenaga Keolahragaan, Seksi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi dan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
11. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan, Seksi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi dan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
12. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
13. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
14. mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
15. mengoordinasikan dan menyusun perjanjian kinerja Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
16. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
17. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
18. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
19. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

1. KEPALA SEKSI PEMBIBITAN, IPTEK DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN

1) memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
2) menyusun rencana kerja Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan;

3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
6) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
7) melaksanakan pemanduan bakat dan kompetisi atlit usia muda, peningkatan mutu pelatih, peningkatan mutu instruktur, peningkatan mutu tenaga pendukung;
8) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pemnaduan bakat dan kompetisi usia muda, peningkatan mutu pelatih, peningkatan mutu instruktur, peningkatan mutu tenaga pendukung;
9) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, peningkatan mutu pelatih, peningkatan mutu instruktur, peningkatan mutu tenaga pendukung;
10) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta bahan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
11) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Kelah Ragaan;
12) menyusun Perjanjian Kinerja Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
13) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
14) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
15) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2. *KEPALA SEKSI PROMOSI OLAH RAGA, PENGHARGAAN DAN OLAH RAGA PRESTASI*

1) memimpin pelaksanaan tugas Seksi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi;
2) menyusun rencana kerja Seksi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi;
3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan Seksi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi;
6) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Seksi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi;
7) memfasilitasi Pengelolaan Kejuaraan dan Pekan Olah Raga prestasi tingkat daerah, nasional, internasional dan promosi Olah Raga;
8) menyiapkan pelaksanaan pengelolaan Pekan Olah Raga prestasi tingkat daerah, nasional, internasional dan promosi Olah Raga;
9) menyiapkan norma,standar,prosedur dan kriteria Olah Raga prestasi tingkat daerah, nasional, internasional dan promosi Olah Raga;
10) melaksanakan bimbingan teknis Olah Raga prestasi tingkat daerah, nasional, internasional dan promosi Olah Raga;
11) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pekan Olah Raga prestasi tingkat daerah, nasional, internasional dan promosi Olah Raga;
12) melaksanakan penyelenggaraan penghargaan olah raga bagi atlit berprestasi;
13) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)serta bahan Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Seksi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi;

14) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Seksi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi;
15) menyusun Perjanjian Kinerja Seksi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi;
16) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
17) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Seksi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah RagaPrestasi;
18) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3. KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

1) memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
2) menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
6) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas SeksiPembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
7) menyiapkan Standarisasi Organisasi keolahragaan;
8) memfasilitasi pengembangan organisasi keolahragaan;
9) menyiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria organisasi keolahragaan;
10) melaksanakan pembinaan dan peningkatan Organisasi Keolahragaan;

11) melaksanakan verifikasi, monitoring, pembinaan, evaluasi dan pelaporan hibah bansos;
12) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan organisasi keolahragaan;
13) melaksanakan peningkatan kerja sama organisasi keolahragaankabupaten/kota dengan lembaga terkait;
14) melaksanakan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi;
15) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta bahan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Seksi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
16) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Seksi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
17) menyusun Perjanjian Kinerja Seksi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
18) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
19) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Seksi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
20) melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

1.2. Landasan Hukum

Rencana kerja ini disusun berdasarkan landasan hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Bogor.
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 tahun 2019 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi kewajiban Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai perencana dan perumus kebijakan sebagian urusan kepemudaan dan keolahraga sesuai Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
2. Sebagai alat ukur dalam pelaksanaan program Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor pada tahun 2024;

3. Untuk mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional;
4. Untuk memberikan gambaran hasil akhir yang akan dicapai atas visi dan misi Pemuda dan Olahraga tahun 2019-2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dokumen rancangan akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rentra PD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Tabel. TC.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja PD dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2023

URUSAN PEMERINTAH	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
									TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
2	4						5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												**87.862.835.217**	**83.468.636.913**	**95%**
	1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga**	**Poin**	**A**	**BB**		**11.516.077.361**	**10.960.460.924**	**95%**
							Nilai Rata Rata Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Dinas Pemuda dan Olahraga	**Poin**	**3,40**	**3,40**	**100**			
			1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Nilai AKIP Lingkup Perangkat Daerah**	**Nilai**	**A**	**BB**		**24.746.200**	**24.746.200**	**100%**
					1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100	24.746.200	24.746.200	**100%**
			2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Persen**	**100**	**98**	**98**	**8.576.862.917**	**8.402.726.431**	**98%**
					2	Sub Kegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	49	49	100	8.576.862.917	8.402.726.431	**98%**
			3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**554.950.900**	**423.227.255**	**76%**
					3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	**100**	38.974.000	38.974.000	**100%**
					4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	**100**	96.337.700	94.721.300	**98%**
					5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	**100**	33.355.500	33.355.500	**100%**
					6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	**100**	64.350.000	35.940.000	**56%**
					7	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	**100**	49.907.700	49.896.475	**100%**
					8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang – undangan yang disediakan	Dokumen	2	2	**100**	17.600.000	14.715.000	**84%**
					9	Sun Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket /Bahan Material yang disediakan	Paket	0	0	**0**	0	0	**0%**
					10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	**100**	254.426.000	155.624.980	**61%**
			4	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**896.480.100**	**861.457.496**	**96%**
					11	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	0	0	**0**	0	0	**0%**
					12	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	29	29	**100**	896.480.100	861.457.496	**96%**
			5	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**1.288.587.244**	**1.080.124.842**	**84%**
					13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	3	3	**100**	927.657.300	766.548.624	**83%**
					14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	3	3	**100**	67.865.400	66.820.850	**98%**
					15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	7	7	**100**	293.064.544	246.755.368	**84%**

			6	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**174.450.000**	**168.178.700**	**96%**
					16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaeraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	2	**100**	174.450.000	168.178.700	**96%**
	2	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**					**Predikat Kota Layak Pemuda (Permen PORA No 11 Tahun 2017)**	**Predikat**	**50 Persen Menuju Kota Layak**	**50 Persen Menuju Kota Layak Pemuda**	**100**	**2.096.992.500**	**1.847.377.687**	**88%**
							Persentase Pemuda Pelopor Yang Aktif Menggerakkan Kegiatan Kepemudaan	**Persen**	**0**	**0**	**0**			**0%**
			7	**Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**			**Persentase Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**1.489.691.500**	**1.249.061.687**	**84%**
					17	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Orang	30	30	100	0	0	**0%**
					18	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Orang	70	120	171%	291.880.300	186.075.300	**64%**
					19	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Orang	100	100	100	356.599.500	303.777.100	**85%**
					20	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten / Kota yang terkelola dan termanfaatkan	Unit	2	2	100	400.000.000	353.291.287	**88%**
					21	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan	Orang	56	30	54%	441.211.700	405.918.000	**92%**
			8	**Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**			**Jumlah OKP yang terbina**	**OKP**	**5**	**5**	100	**607.301.000**	**598.316.000**	**99%**
					22	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	Dokumen	1	1	100	607.301.000	598.316.000	**99%**
	3	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**					**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**Persen**	**100**	**100**	100	**1.040.894.400**	**1.031.495.000**	**99%**
			9	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**			**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**Persen**	**100**	**100**	100	**1.040.894.400**	**1.031.495.000**	**99%**
					23	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	laporan	1	1	100	50.894.400	41.495.000	**82%**
					24	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	lembaga	1	1	100	990.000.000	990.000.000	**100%**
	4	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**					**Prosentase Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)**	**Persen**	**49**	**56,91**	116,1429	**73.208.870.956**	**69.629.303.302**	**95%**
							Rasio Ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan (Per 916,052 Penduduk)	**Per 916,052**	**0,00173 4:2,08**	**0.003264: 2,08**	188			
							Persentase Kawasan GOR yang tersedia sesuai dengan standart nasional / lokal	**Persen**	**49,98**	**49,98**	100			
			10	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah**			**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan**	**Persen**	**100**	**100**	100	**26.267.413.900**	**22.797.995.335**	**87%**
					25	Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan	Unit	5	5	100	280.917.300	228.243.005	**81%**
					26	Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	dokumen	1	1	100	235.688.200	203.256.080	**86%**
					27	Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	2	2	100	25.750.808.400	22.366.496.250	**87%**

			11	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**			**Jumlah Perolehan Medali Tingkat Provinsi**	**Medali**	**5**	**241**	4820	**42.065.934.500**	**42.054.720.700**	**100%**
					28	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	Orang	300	350	117%	239.684.500	230.720.700	**96%**
					29	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	500	505	101	39.575.000.000	39.575.000.000	**100%**
					30	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Penghargaan	Orang	72	76	106%	2.251.250.000	2.249.000.000	**100%**
			12	**Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Jumlah Perolehan Medali**	**Medali**	**5**	**5**	100	**883.778.400**	**849.379.200**	**96%**
					31	Sub Kegiatan 03.202.01. Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	2	2	100	351.005.800	349.405.800	**100%**
					32	Sub Kegiatan 03.202.03. Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	Orang	264	274	104%	532.772.600	499.973.400	**94%**
			13	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persen**	**100**	**100**	100	**3.991.744.156**	**3.927.208.067**	**98%**
					33	Sub kegiatan 03.205.02 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	4	4	100	1.389.158.600	1.365.840.200	**98%**
					34	Sub Kegiatan 03.205.03. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	6	6	100	2.602.585.556	2.561.367.867	**98%**

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD

No	Indikator	SPM	IKK	Target			Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	persentase penurunan jumlah pemuda pengguna narkoba, psikotropika dan minuman keras			5	5	5	5	5	100	100	
2	persentase prmuda pelopor yg aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan			20	20	20	20	20	100	100	
3	persentase sarana prasaranaolahraga yg tersedia sesuai dgn standar nasional/lokal			33.34	50.01	66.64	33.34	50.01	66.64	83.33	
4	rasio ketersediaan SDM tenaga keolahragaan			0,001552:2,08	0,001661:2,08	0,001180:2,08	0,001552:2,08	0,003264:2,08	100	100	

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Bogor sebagai Kota Layak Pemuda, Kota Prestasi

dan berbudaya Olahraga di tahun 2022 dan 2023 sudah menunjukan peningkatan yang baik.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas, antara lain :

a. Masih perlu ditingkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Keolahragaan.
b. Kurangnya Optimalisasi pengembangan olahraga pendidikan, rekreasi dan disabilitas.
c. Kurangnya Optimalisasi pembinaan olahraga prestasi pelajar dan mahasiswa.
d. Perbaikan manajemen pembinaan olahraga.
e. Kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Olahraga masih banyak yang belum layak menjadi standar Nasional
f. Partisipasi masyarakat dalam berolahraga masih perlu ditingkatkan.
g. Angka Kebugaran Masyarakat perlu ditingkatkan;
h. Kurangnya inovasi dan keratifitas pemuda.
i. Masih Tingginya Angka Kenakalan Remaja.
j. Kurangnya Kreativitas Pemuda.
k. Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda terhadap pembangunan masih perlu ditingkatkan.
l. Masih minimnya kader pemuda berbasis gender.

Dengan melihat permasalahan diatas maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor merumuskan cara penanganan yang akan dilaksanakan tahun 2024 antara lain, sebagai berikut :

1. Usulan peningkatan anggaran biaya urusan kepemudaan dan olahraga diharapkan akan mempengaruhi capaian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. Untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana Olahraga serta meningkatkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat dan berkompeten dalam pengelolaan kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga merencanakan usulan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta mengusulkan pegawai berpotensi kepada

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor untuk diberikan pendidikan sesuai dengan program dan kegiatan yang diperlukan;

2.4. Program pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Program Kepemudaan dan keolahragaan serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan mengacu kepada Program :

a. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
b. Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
c. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024, adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024)

   Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019-2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dimana dokumen tersebut memperhatikan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang perlu direncanakan dan dilaksanakan pertahunnya;

2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

   Rencana yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan yang ada di Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor mengacu pada Prioritas Pembangunan pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Visi dan Misi Pembangunan Nasional disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (NAWACITA) dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas nasional. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, terdiri dari 5 (lima) prioritas, yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Infrastruktur dan Pemetaan Wilayah;
3. Nilai Tambah Sektoril, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
4. Ketahanan Pangan, Air, energi dan Lingkungan Hidup;
5. Stabilitas Ketahanan dan Keamanan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 Kota Bogor selain untuk mendukung tercapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga sesuai dengan priritas pembangunan daerah kota bogor, antara lain :

a. Pemetaan Pemenuhan akses pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang berkualitas;
b. Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM);
c. Percepatan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan;
d. Penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal;
e. Penguatan Reformasi Birokrasi;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) PD

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Periode 2019 – 2024 , Dinas Pemuda dan Olahraga mengemban beberapa tugas diantaranya adalah pertama mengemban sebagian misi pertama Kota Bogor yaitu *"Mewujudkan Kota Yang Sehat "* Suatu Kondisi yang bersih,nyaman,aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintahan Daerah Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan kualitas lingkungan, baik fisik ,sosial dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi yang bersih, nyaman, aman dan sehat.

Tujuan dari Misi 1 yaitu : *Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas*, sasarannya *Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat*, dengan indikator sasaran *Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga.*

Tugas kedua adalah mengemban sebagian misi kedua kota Bogor yaitu *" Mewujudkan Kota Yang Cerdas"*adalah Kota yang bisa mengelola sumber daya alam dan Manusia, sehingga warganya dapat hidup aman,nyaman, produktif dan berkelanjutan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan Kota. Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (under-standing), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kota Cerdas bukan "Kota" ditambah "Teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

Tujuan dari Misi 2 yaitu : *Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan berdasarkan (smart people),* sasarannya *Meningkatnya Kualitas Generasi Muda,* dengan indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Generasi Muda, dengan indikator sasaran *Indeks Pembangunan Pemuda*.

Tugas ketiga adalah mengemban sebagian misi ketiga Kota Bogor yaitu *" Mewujudkan Kota Yang Sejahtera"*adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat,

peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

Tujuan dari Misi 3 yaitu : *Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat,* sasarannya *Menurunnya Tingkat Pengangguran*, dengan indikator sasaran *Tingkat Pengangguran Terbuka.*

Berikut ini disajikan Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan strategi Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2019-2024, sebagai berikut :

VISI, MISI,TUJUAN,SASARAN DAN STRATEGI KOTA BOGOR TERKAIT DENGAN OPD YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA

	RPJMD KOTA BOGOR														
NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAN				
				AWAL	AKHIR				URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat	Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat												
		Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga	45	53	Meningkatnya kebugaran masyarakat melalui pembudayaan olahraga pada masyarakat	Kepemudaan dan Keolahragaan	Kepemudaan dan Keolahragaan	Kepemudaan dan Keolahragaan	Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga	45	47	49	51	53
										Rasio Ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan	0,001552:2,08	0,001661:2,08	0,001734:2,08	0,001808:2,08	0,001887:2,08
										Persentase sarana prasarana olahraga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (%)	33,34	33,34	50,1	66,67	83,3
										Jumlah sarana prasarana olahraga tingkat nasional/lokal yang terbangun	0	1	2	1	1

RPJMD KOTA BOGOR														
NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAN				
				AWAL	AKHIR				URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
2	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan berkarakter (smart People)	Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan berkarakter (smart people)	Indek Pembangunan Pemuda	NA	67,05										
		Meningkatnya kualitas generasi muda	Indek Pembangunan Pemuda			Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penuatan karakter, prestasi, kreativitas dan inovasi generasi muda	Kepemudaan dan Keolahragaan	Kepemudaan dan Keolahragaan	Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase penurunsn jumlsh pemuda pengguna narkoba, psikotropika, dan minuman keras	0	5	5	5	5
										Persentase pemuda pelopor yang aktif menggerakan kegiatan kepemudaan	0	0	20	20	20
										Predikat Kota Layak Pemuda (Permenpora No. 11 Tahun 2017)	30% menuju KLP	40% menuju KLP	50% menuju KLP	75% menuju KLP	KLP
							Peningkatan Olahraga Prestasi	Kepemudaan dan Keolahragaan	Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah Perolehan Medali Tingkat Internasional	0	0	1	1	1
										Jumlah Perolehan Medali Tingkat Nasional	0	0	1	1	1
										Jumlah Perolehan Medali Tingkat Jawa Barat	0	0	13	11	15

	RPJMD KOTA BOGOR													
NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAN				
				AWAL	AKHIR				URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
3	Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat													
		Menurunnya Tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,28	35		Kepemudaan dan Keolahragaan	Kepemudaan dan Keolahragaan	Kepemudaan dan Keolahragaan	jumlah Wirausaha muda pemula	0	35	35	35	35

Berikut ini disajikan bagan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

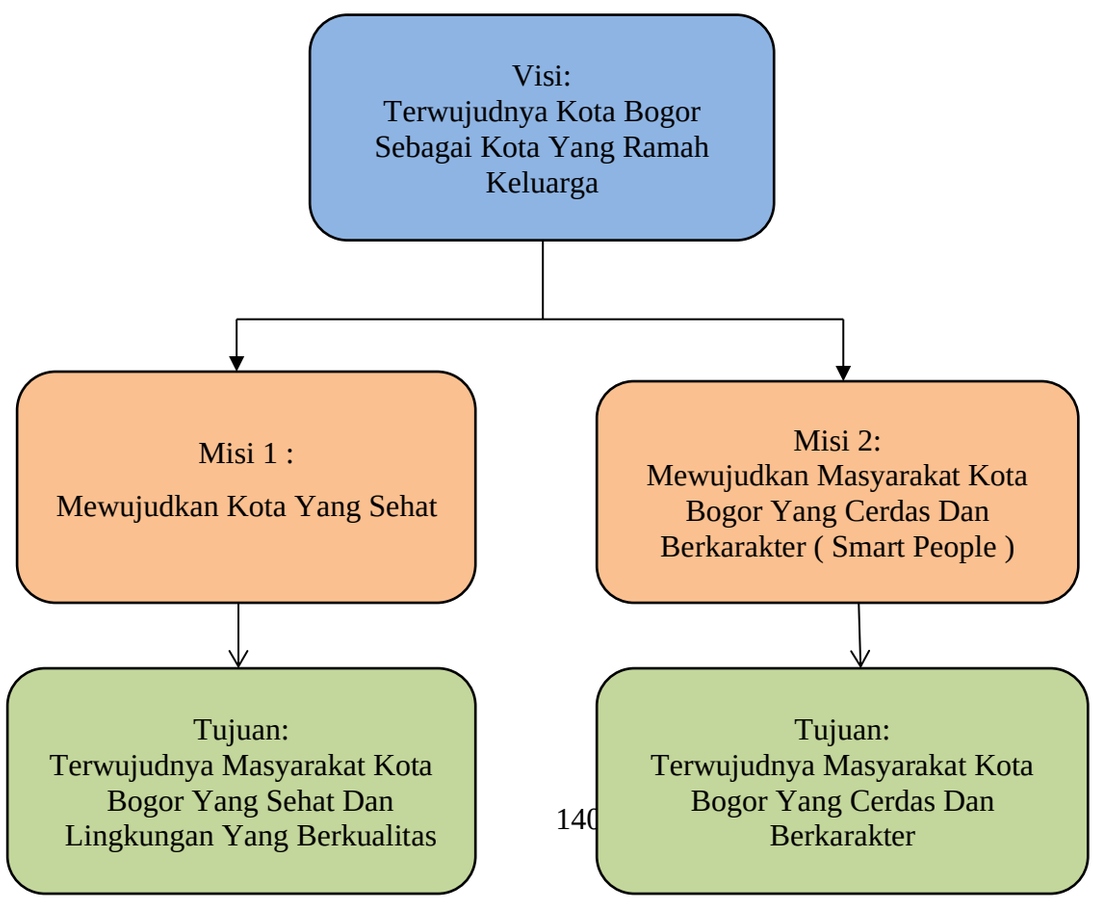

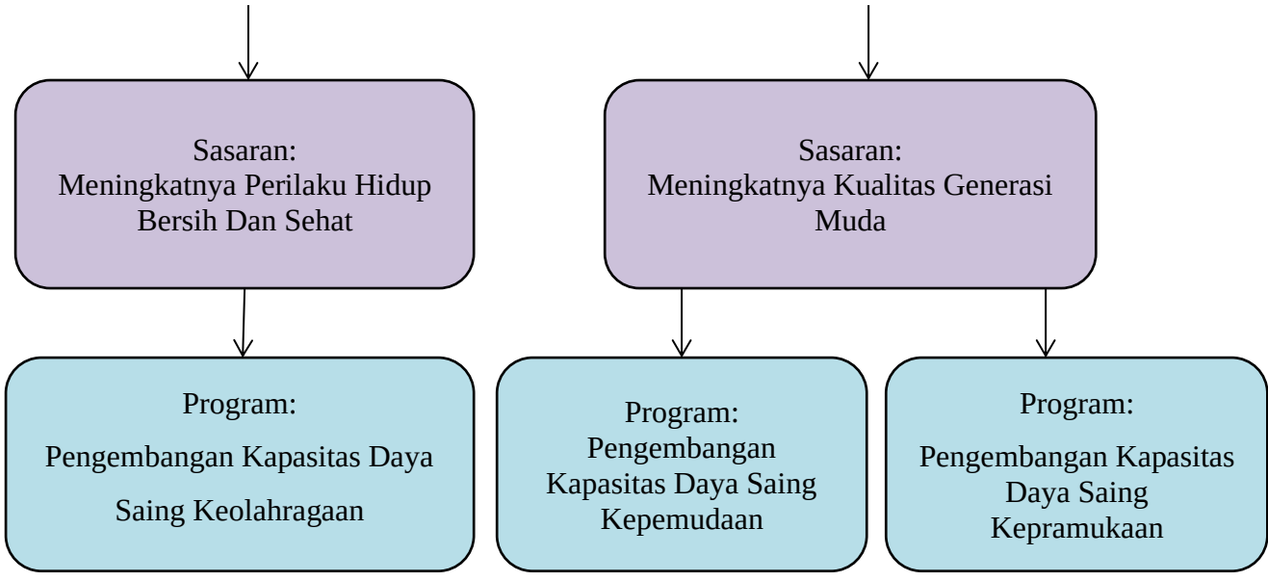
Sasaran:
Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat
Sasaran:
Meningkatnya Kualitas Generasi Muda
Program:
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program:
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program:
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan

Sasaran dan Target Kerja Sasaran dari Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 Perubahan disajikan pada matrik, sebagai berikut :

Tabel T-C.27

Program, Kegiatan dan sub kegiatan	LOKASI KEGIATAN		INDIKATOR/OUTPUT		TARGET INDIKATOR		ANGGARAN		
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN
2	3		4		5		6		7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga**	**Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga**	**A**	**A**	**11,865,829,385**	**14,154,106,463**	**2,288,277,078**
	Kota Bogor	**Kota Bogor**	**Nilai Rata Rata Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Dinas Pemuda dan Olahraga**	**Nilai Rata Rata Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Dinas Pemuda dan Olahraga**	**3.52**	**3.52**			
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	**100**	**100**	**8,668,399,560**	**9,703,708,188**	**1,035,308,628**
Sub Kegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	57	8,668,399,560	9,703,708,188	**1,035,308,628**
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**1,268,971,900**	**1,636,481,900**	**367,510,000**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	30,272,600	30,272,600	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	61,459,200	61,459,200	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	33,250,500	33,250,500	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	176,640,000	176,640,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	31,497,600	31,497,600	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	935,852,000	1,303,362,000	**367,510,000**
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**100**	**113,241,300**	**713,241,300**	**600,000,000**
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	1	0	600,000,000	**600,000,000**
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	1	113,241,300	113,241,300	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**1,668,336,625**	**1,953,795,075**	**285,458,450**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	3	1,341,068,545	1,541,068,545	**200,000,000**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	3	60,900,000	60,900,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	7	7	266,368,080	351,826,530	**85,458,450**

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik**	**Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik**	**100**	**100**	**146,880,000**	**146,880,000**	**0**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaeraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaeraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	2	146,880,000	146,880,000	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Predikat Kota Layak Pemuda (Permen PORA No 11 Tahun 2017)**	**Predikat Kota Layak Pemuda (Permen PORA No 11 Tahun 2017)**	**80 Persen Menuju Kota Layak Pemuda**	**80 Persen Menuju Kota Layak Pemuda**	**946,119,800**	**1,146,119,800**	**0**
	Kota Bogor	**Kota Bogor**	**Persentase Pemuda Pelopor Yang Aktif Menggerakkan Kegiatan Kepemudaan**	**Persentase Pemuda Pelopor Yang Aktif Menggerakkan Kegiatan Kepemudaan**	**30**	**30**			
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan**	**100**	**100**	**446,119,800**	**646,119,800**	**0**
Sub Kegiatan 02.201.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	70	70	0	0	**0**
Sub Kegiatan 02.201.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	30	30	70,310,800	70,310,800	
Sub Kegiatan 02.201.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	100	100	375,809,000	575,809,000	200,000,000
Kegiatan 02.202 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Jumlah OKP yang terbina**	**Jumlah OKP yang terbina**	**5**	**5**	**500,000,000**	**500,000,000**	**0**
Sub Kegiatan 02.202.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	1	1	500,000,000	500,000,000	
Program 04 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**100**	**100**	**900,000,000**	**900,000,000**	**0**
Kegiatan 04.201 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**100**	**100**	**900,000,000**	**900,000,000**	**0**
Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	1	1	900,000,000	900,000,000	
Program 03 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Rasio Ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan (Per 916,052 Penduduk)**	**Rasio Ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan (Per 916,052 Penduduk)**	**0,003264: 2,08**	**0,003264: 2,08**	**7,340,134,800**	**17,153,525,000**	**9,813,390,200**
Kegiatan 03.202 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Jumlah Perolehan Medali**	**Jumlah Perolehan Medali**	**15**	**15**	**525,884,800**	**308,374,800**	**-217,510,000**
Sub Kegiatan 03.202.03. Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	264	178	525,884,800	308,374,800	**-217,510,000**
Kegiatan 03.203 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Jumlah Perolehan Medali Tingkat Provinsi**	**Jumlah Perolehan Medali Tingkat Provinsi**	**9**	**9**	**6,814,250,000**	**16,845,150,200**	**10,030,900,200**
Sub Kegiatan 03.203.01 Seleksi Atlet Daerah	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	400	400	68,202,100	68,202,100	
Sub Kegiatan 03.203.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	500	500	6,346,047,900	13,131,047,900	**6,785,000,000**
Sub Kegiatan 03.203.04. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Penghargaan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Penghargaan	92	158	400,000,000	3,645,900,200	**3,245,900,200**

Program 03 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Prosentase Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)**	**Prosentase Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)**	**58**	**58**	**4,356,474,800**	**3,913,886,900**	**-442,587,900**
	Kota Bogor	**Kota Bogor**	**Persentase Kawasan GOR yang tersedia sesuai dengan standart nasional / lokal**	**Persentase Kawasan GOR yang tersedia sesuai dengan standart nasional / lokal**	**100**	**100**			
Kegiatan 03.201 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan**	**100**	**100**	**2,641,266,400**	**1,948,678,500**	**-692,587,900**
Sub Kegiatan 03.201.02. Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kota Bogor	-	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1	0	292,957,900	0	**-292,957,900**
Sub Kegiatan 03.201.03. Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	1	2,348,308,500	1,948,678,500	**-399,630,000**
Kegiatan 03.205 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**100**	**100**	**1,715,208,400**	**1,965,208,400**	**250,000,000**
Sub kegiatan 03.205.02 Sub Kegiatan Permberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	5	5	869,560,700	869,560,700	
Sub Kegiatan 03.205.03. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	6	6	845,647,700	1,095,647,700	**250,000,000**
							25,408,558,785	**37,267,638,163**	**11,659,079,378**

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan dilaksankan pada Tahun 2024

Tabel.6

Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024

ANGGARAN MURNI RENCANA KERJA PERANGAT DAERAH

TAHUN 2024

NO.	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			
			INDIKATOR KINERJA	TARGET		PAGU ANGGARAN
				QYT	SATUAN	
1	2	3	8	9		10
1	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Prosentase Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)**	**58**	**Persen**	**28.470.358.072**
			Rasio Ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan	**0,003264:2,08**	**Per 916,052 Penduduk**	
			Persentase Kawasan GOR yang tersedia sesuai dengan standart nasional / lokal	**100**	**Persen**	
	2.19.03.2.03	**Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Perolehan Medali**	**9**	**Medali**	**11.989.139.212**
1	2.19.03.2.03.01	Sub Kegiatan: Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	400	Orang	140.889.800
2	2.19.03.2.03.03	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	500	Orang	11.448.249.412
3	2.19.03.2.03.04	Sub Kegiatan: Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah olahragawan berprestasi Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan	82	Orang	400.000.000
	2.19.03.2.05	**Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**100%**	**Persen**	**3.809.369.260**
4	2.19.03.2.05.02	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan hasil pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	5	Laporan	1.300.000.000
5	2.19.03.2.05.03	Sub Kegiatan: Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai	6	Unit	2.509.369.260

	2.19.03.2.02	**Kegiatan: Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/Kota**	**Jumlah perolehan medali**	**9**	**Medali**	**871.849.600**
6	2.19.03.2.02.01	Sub Kegiatan: Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	2	Dokumen	218.601.600
7	2.19.03.2.02.03	Sub Kegiatan: Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	264	Orang	653.248.000
	2.19.03.2.01	**Kegiatan: Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan**	**0%**	**Persen**	**11.800.000.000**
8	2.19.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan Termanfaatkan	1	Unit	11.500.000.000
9	2.19.03.2.01.02	Sub Kegiatan: Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen penyelenggaraan kompetisi olahraga oleh perkumpulan olahraga dan satuan pendidikan dasar	5	Dokumen	300.000.000
2	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga**	**A**	**Point**	**12.928.631.688**
			Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan	**3,50**	**Point**	
	2.19.01.2.08	**Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**Persen**	**1.565.576.465**
10	2.19.01.2.08.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	Laporan	1.341.068.545
11	2.19.01.2.08.03	Sub Kegiatan: Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Laporan	60.900.000
12	2.19.01.2.08.04	Sub Kegiatan: Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	7	Laporan	163.607.920

	2.19.01.2.02	**Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**7.799.419.323**
13	2.19.01.2.02.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan AS	57	Orang	7.799.419.323
	2.19.01.2.09	**Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**	**Pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**Persen**	**146.880.000**
14	2.19.01.2.09.01	Sub Kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	Unit	146.880.000
	2.19.01.2.06	**Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan dasar perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**2.106.579.000**
15	2.19.01.2.06.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponenn instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	30.272.600
16	2.19.01.2.06.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	Paket	68.809.900
17	2.19.01.2.06.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2	Paket	402.690.000
18	2.19.01.2.06.05	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	33.259.000
19	2.19.01.2.06.09	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1.538.297.000
20	2.19.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	Paket	33.250.500
	2.19.01.2.07	**Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**Persen**	**1.310.176.900**
21	2.19.01.2.07.06	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	23	Unit	1.310.176.900

3	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Predikat Kota layak pemuda (Permenpora No 11 Tahun 2017)**	**80%**	**Menuju KLP Predikat**	**2.070.499.800**
			Persentase Pemuda Pelopor yang Aktif Menggerakkan Kegiatan Kepemudaan	**30**	**Persen**	
	2.19.02.2.01	**Kegiatan: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan**	**100**	**Persen**	**1.570.499.800**
22	2.19.02.2.01.01	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	30	Orang	160.487.800
23	2.19.02.2.01.02	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wira Usaha Pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	70	Orang	298.054.000
24	2.19.02.2.01.03	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda kader Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	100	Orang	**1.111.958.000**
	2.19.02.2.02	**Kegiatan: Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah OKP yang terbina**	**5**	**OKP**	**500.000.000**
25	2.19.02.2.02.02	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	1	Dokumen	500.000.000
4	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase organisasi kepramukaan yang dibina**	**100**	**%**	**1.675.420.000**
	2.19.04.2.01	**Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase organisasi kepramukaan yang dibina**	**100**	**Persen**	**1.675.420.000**
26	2.19.04.2.01.05	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1	Laporan	175.420.000
27	2.19.04.2.01.08	Sub Kegiatan: Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	Jumlah organisasi yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan	1	Lembaga	1.500.000.000
TOTAL PAGU MURNI			**TOTAL PAGU PERUBAHAN**			**45.144.909.560**

Selanjutnya dalam rangka pencapaian meningkatkan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor,

maka ditetapkan Target Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 dan 2024 Perubahan pada sarana yang ada, sebagai berikut :

Tabel. 7

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4
KODE REKENING 4.1.2.02.09			
1	WISMA	-	-
2	RUANG DIKLAT	-	-
3	INDOOR A	134,500,000	189,700,000
4	INDOOR B	56,000,000	56,000,000
5	LAP. OLAHRAGA TERBUKA	24,275,000	24,275,000
	-Lap Voly	3,275,000	3,275,000
	-Lap Sepak bola	19,500,000	19,500,000
	-Lap Softball	1,500,000	1,500,000
6	PANGGUNG TERBUKA	20,000,000	20,000,000
7	LAP. SEMI INDOOR	115,500,000	115,500,000
8	STADION PAJAJARAN	200,500,000	200,500,000
	-Lintasan Atlentik	3,000,000	3,000,000
	-Sepak bola	197,500,000	197,500,000
9	KOLAM RENANG	533,565,000	478,365,000
10	GEDUNG SERBA GUNA	63,000,000	63,000,000
11	PANAHAN	960,000	960,000
12	PANJAT TEBING	500,000	500,000
13	ANGKAT BESI	600,000	600,000
14	ANGGAR	600,000	600,000
15	Lapangan Sepak Bola Rumput Sintesis di Kecamatan	21,800,000.00	79,750,000
16	Gedung Olahraga Indoor di Kecamatan	71,950,000.00	14,000,000
17	Lapangan Olahraga Outdoor di Kecamatan	6,250,000.00	6,250,000
	JUMLAH	1,250,000,000	1,250,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Tahun 2024 Perubahan secara Detail kami sajikan pada Tabel. 4.1. sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan sub kegiatan	LOKASI KEGIATAN		INDIKATOR/OUTPUT		TARGET INDIKATOR		ANGGARAN				
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN	Perubahan yang di ACC	JUMLAH PERUBAHAN YANG DI ACC
2	3		4		5		6		7		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga**	**Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga**	**A**	**A**	**11,865,829,385**	**14,154,106,463**	**2,288,277,078**		**12,694,409,824**
	Kota Bogor	**Kota Bogor**	**Nilai Rata Rata Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Dinas Pemuda dan Olahraga**	**Nilai Rata Rata Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Dinas Pemuda dan Olahraga**	**3.52**	**3.52**					
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	**100**	**100**	**8,668,399,560**	**9,703,708,188**	**1,035,308,628**		**9,546,979,999**
Sub Kegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	57	8,668,399,560	9,703,708,188	**1,035,308,628**	**878,580,439**	**9,546,979,999**
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**1,268,971,900**	**1,636,481,900**	**367,510,000**		**1,218,971,900**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	30,272,600	30,272,600			30,272,600

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	61,459,200	61,459,200			61,459,200
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	33,250,500	33,250,500			33,250,500
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	176,640,000	176,640,000			176,640,000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	31,497,600	31,497,600			31,497,600
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	935,852,000	1,303,362,000	**367,510,000**	**0**	**885,852,000**
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**100**	**113,241,300**	**713,241,300**	**600,000,000**		**113,241,300**
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	1	0	600,000,000	**600,000,000**	**0**	**0**
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	1	113,241,300	113,241,300			**113,241,300**
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**1,668,336,625**	**1,953,795,075**	**285,458,450**		**1,668,336,625**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	3	1,341,068,545	1,541,068,545	**200,000,000**	**0**	**1,341,068,545**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	3	60,900,000	60,900,000			**60,900,000**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	7	7	266,368,080	351,826,530	**85,458,450**	**0**	**266,368,080**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaeraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaeraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	2	146,880,000	146,880,000			**146,880,000**
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Predikat Kota Layak Pemuda (Permen PORA No 11 Tahun 2017)**	**Predikat Kota Layak Pemuda (Permen PORA No 11 Tahun 2017)**	**80 Persen Menuju Kota Layak Pemuda**	**80 Persen Menuju Kota Layak Pemuda**	**946,119,800**	**1,146,119,800**	**0**		
	Kota Bogor	**Kota Bogor**	**Persentase Pemuda Pelopor Yang Aktif Menggerakkan Kegiatan Kepemudaan**	**Persentase Pemuda Pelopor Yang Aktif Menggerakkan Kegiatan Kepemudaan**	**30**	**30**					**1,146,119,800**
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan**	**100**	**100**	**446,119,800**	**646,119,800**	**0**		**646,119,800**
Sub Kegiatan 02.201.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	70	70	0	0	**0**		**0**
Sub Kegiatan 02.201.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	30	30	70,310,800	70,310,800			**70,310,800**
Sub Kegiatan 02.201.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	100	100	375,809,000	575,809,000	200,000,000	**200,000,000**	**575,809,000**
Kegiatan 02.202 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Jumlah OKP yang terbina**	**Jumlah OKP yang terbina**	**5**	**5**	**500,000,000**	**500,000,000**	**0**		**500,000,000**
Sub Kegiatan 02.202.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	1	1	500,000,000	500,000,000			**500,000,000**

Program 04 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**100**	**100**	**900,000,000**	**900,000,000**	**0**		**900,000,000**
Kegiatan 04.201 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**100**	**100**	**900,000,000**	**900,000,000**	**0**		**900,000,000**
Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	1	1	900,000,000	900,000,000			**900,000,000**
Program 03 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Rasio Ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan (Per 916,052 Penduduk)**	**Rasio Ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan (Per 916,052 Penduduk)**	**0,003264: 2,08**	**0,003264: 2,08**	**7,340,134,800**	**17,153,525,000**	**9,813,390,200**		**12,466,134,800**
Kegiatan 03.202 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Jumlah Perolehan Medali**	**Jumlah Perolehan Medali**	**15**	**15**	**525,884,800**	**308,374,800**	**-217,510,000**		**525,884,800**
Sub Kegiatan 03.202.03. Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	264	178	525,884,800	308,374,800	**-217,510,000**	**0**	**525,884,800**
Kegiatan 03.203 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Jumlah Perolehan Medali Tingkat Provinsi**	**Jumlah Perolehan Medali Tingkat Provinsi**	**9**	**9**	**6,814,250,000**	**16,845,150,200**	**10,030,900,200**		**11,940,250,000**
Sub Kegiatan 03.203.01 Seleksi Atlet Daerah	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	400	400	68,202,100	68,202,100			**68,202,100**
Sub Kegiatan 03.203.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	500	500	6,346,047,900	13,131,047,900	**6,785,000,000**	**2,500,000,000**	**8,846,047,900**
Sub Kegiatan 03.203.04. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Penghargaan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Penghargaan	92	158	400,000,000	3,645,900,200	**3,245,900,200**	**2,626,000,000**	**3,026,000,000**

Program 03 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Prosentase Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)**	**Prosentase Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)**	**58**	**58**	**4,356,474,800**	**3,913,886,900**	**-442,587,900**		**3,813,886,900**
	Kota Bogor	**Kota Bogor**	**Persentase Kawasan GOR yang tersedia sesuai dengan standart nasional / lokal**	**Persentase Kawasan GOR yang tersedia sesuai dengan standart nasional / lokal**	**100**	**100**					
Kegiatan 03.201 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan**	**100**	**100**	**2,641,266,400**	**1,948,678,500**	**-692,587,900**		**1,948,678,500**
Sub Kegiatan 03.201.02. Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kota Bogor	-	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1	0	292,957,900	0	**-292,957,900**		**0**
Sub Kegiatan 03.201.03. Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	1	2,348,308,500	1,948,678,500	**-399,630,000**		**1,948,678,500**
Kegiatan 03.205 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Kota Bogor**	**Kota Bogor**	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**100**	**100**	**1,715,208,400**	**1,965,208,400**	**250,000,000**		**1,865,208,400**
Sub kegiatan 03.205.02 Sub Kegiatan Permberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	5	5	869,560,700	869,560,700			**869,560,700**
Sub Kegiatan 03.205.03. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kota Bogor	Kota Bogor	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	6	6	845,647,700	1,095,647,700	**250,000,000**	**150,000,000**	**995,647,700**
							25,408,558,785	**37,267,638,163**	**11,659,079,378**	**6,354,580,439**	**31,020,551,324**

BAB V
PENUTUP

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka Satuan Kerja Perangkat daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Perumusan Perencanaan Kerja Tahun Anggaran 2024 Perubahan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor bertolak ukur pada potensi sumber daya manusia dan aset yang terbatas. Hal tersebut berdampak pada munculnya permasalahan yang memiliki kompleksitas cukup tinggi. Permasalahan Perencanaan Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 Perubahan adalah terletak pada sumber daya manusia sebagai perencana dan ketersediaan dana untuk membiayai sosialisasi program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, serta kemampuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor dalam menjalin kerjasama yang baik antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor dengan mitra kerjanya.

K. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen Perubahan Renja merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan perubahan Renja sangat di tentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengoordinasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan

fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah semester I tahun 2024 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja semester I pada Renja Disparbud Kota Bogor Tahun 2024. Tahap penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Disparbud Kota Bogor Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataaan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifkasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2024 untuk memberikan arahan dan pedoman penentuan program dan kegiatan pada perubahan anggaran Disparbud Kota Bogor Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Bogor secara berkesinambungan.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja tahun 2024 adalah:

1. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan disparbud tahun 2024.

2. menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah.
3. mengakomodir perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa perubahan pengurangan dan pergeseran aggaran kegiatan.
4. menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISPARBUD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPARBUD KOTA BOGOR
BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARBUD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebagai Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor pada Tahun 2024 mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2024.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Disparbud Kota Bogor tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Disparbud Kota Bogor tahun 2024 sampai dengan triwulan II, juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Disparbud Kota Bogor sampai dengan triwulan II tahun 2024 sesuai dengan RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024.

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Disparbud Kota Bogor

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2019-2024 Disparbud Kota Bogor sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Disparbud Kota Bogor
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	
								I		II									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15= 14/5x100%	
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
	2,22	**BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN**			**69.318.964.696**		**11.857.556.547**		**2.704.160.499**		**3.577.637.639**		**6.281.798.138**						
	2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**A poin**		**A poin**				**A**									
			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan lingkup Perangkat Daerah	**3.74 poin**	**37.365.537.046**	**3.74 poin**	**9.999.558.147**		**2.573.730.499**		**2.944.617.331**		**5.518.347.830**						
	2.22.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan**	**100 %**	**12.939.800**	**100 %**	**1.500.000**		**-**		**-**		**-**						
1	*2.22.01.2.01.0001*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*5 dokumen*	*12.939.800*	*5 dokumen*	*1.500.000*		*-*		*-*		*--*						
	2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100 %**	**28.770.282.696**	**100 %**	**7.853.007.166**	**100%**	**2.238.185.967**	**10%**	**2.308.191.396**		**4.546.377.363**						
2	*2.22.01.2.02.0001*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*36 orang/ bulan*	*28.770.886.696*	*35 orang/ bulan*	*7.783.611.166*	*34*	*2.224.096.167*	*36*	*2.294.198.196*		*4.518.294.363*						
3	*2.22.01.2.02.0007*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*24 laporan*	*69.396.000*	*12 laporan*	*69.396.000*	*3*	*14.089.800*	*3*	*13.993.200*		*28.083.000*						

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	
								I		II									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15= 14/5x100%	
	2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100 %**	**2.814.860.300**	**100 %**	**566.910.000**		**94.690.490**		**164.757.800**		**259.448.209**						
4	*2.22.01.2.06.0002*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	*3 paket*	*365.076.100*	*1 paket*	*97.139.100*		*59.061.600*		*5.411.000*		*64.472.600*						
5	*2.22.01.2.06.0005*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*3 paket*	*59.819.800*	*1 paket*	*16.470.900*		-		*12.325.000*		*12.325.000*						
6	*2.22.01.2.06.0006*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*3 dokumen*	*38.400.000*	*1 dokumen*	*12.000.000*		*1.900.000*		*2.850.000*		*4.750.000*						
7	*2.22.01.2.06.0009*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*3 laporan*	*2.351.564.400*	*1 laporan*	*441.300.000*		*33.728.809*		*144.171.800*		*177.900.609*						
	2.22.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan BMD sesuai RKBMD**	**100 %**	**814.143.000**	**100 %**	**115.787.200**	**100**	**79.619.000**		**28.450.00**		**108.069.000**						
8	*2.22.01.2.07.0011*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*32 unit*	*814.143.000*	*5 unit*	*115.787.200*		*79.619.000*		*28.450.00*		*108.069.000*						
	2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**3.016.391.850**	**100 %**	**1.042.629.981**		**98.235.997**		**239.970.185**		**338.206.182**						
9	*2.22.01.2.08.0002*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*3 laporan*	*726.523.310*	*1 laporan*	*348.003.785*		*42.589.500*		*44.325.234*		*86.914.734*						
10	*2.22.01.2.08.0004*	*Penyediaan Jasa Pelayanan*	*Jumlah Laporan*	*3 laporan*	*2.289.868.540*	*1 laporan*	*694.626.196*		*55.646.497*		*195.644.951*		*251.291.448*						

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	
								I		II									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15= 14/5x100%	
		Umum Kantor	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*																
	2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	**100 %**	**1.936.919.400**	**100 %**	**419.723.800**		**62.999.126**		**203.247.950**	*100*	**266.247.076**						
11	*2.22.01.2.09.0002*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*15 unit*	*460.570.000*	*15 unit*	*192.690.000*		*32.985.000*		*44.211.300*		*77.196.300*						
12	*2.22.01.2.09.0006*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*105 unit*	*533.111.600*	*105 unit*	*89.500.800*		*12.175.000*		*40.655.000*		*52.830.000*						
13	*2.22.01.2.09.0009*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi*	*2 unit*	*943.237.800*	*1 unit*	*137.533.000*		*17.839.126*		*118.381.650*		*136.220.776*						
	2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri / Lomba/ Sayembara Karyaseni**	**42 event**	**3.878.025.800**	**42 event**	**952.463.400**	**4**	**31.610.000**		**405.754.308**		**437.364.308**						
	2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan**	**6 kegiatan**	**2.789.320.700**	**2 kegiatan**	**326.360.000**		**-**		**-**		**-**						
14	*2.22.02.2.01.0001*	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	*6 kegiatan*	*2.789.320.700*	*2 kegiatan*	*226.360.000*		-		-		-						
15	*2.22.02.2.01.0002*	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*50 orang*	*126.250.000*	*50 orang*	*100.000.000*		-		-		-						
	2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian**	**Jumlah Kegiatan**	**3**	**1.088.705.100**	**1 kegiatan**	**626.103.400**		**31.610.000**		**405.754.308**		**437.364.308**						

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	
								I		II									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15= 14/5x100%	
		Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan**	**kegiatan**															
16	*2.22.02.2.02.0001*	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*	*6 objek*	*1.088.705.100*	*2 objek*	*626.103.400*		*31.610.000*		*405.754.308*		*437.364.308*						
	2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional**	**76,65 %**	**3.036.415.100**	**76,65 %**	**40.795.000**		**-**		**40.590.000**		**40.590.000**						
	2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah pelaku dan lembaga seni yang dibina/ difasilitasi**	**30 orang/ lembaga**	**3.036.415.100**	**20 orang/ Lembaga**	**40.795.000**		**-**		**40.590.000**		**40.590.00**						
17	*2.22.03.2.01.03*	*Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*30 lembaga*	*3.036.415.100*	*20 orang/ Lembaga*	*40.795.000*		-		*40.590.00*		*40.590.000*						
	2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah ketersediaan SDM Pembinaan Sejarah**	**50 orang**	**31.624.000**	**50 orang**	**31.624.000**		**-**		**-**		**-**						
	2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaku sejarah yang terbina**	**5o orang**	**31.624.000**	**50 orang**	**31.624.000**		**-**		**-**		**-**						
18	*2.22.04.2.01.0001*	*Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota*	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*	*30 orang*	*31.624000*	*30 orang*	*31.624.000*		-		-		-						
	2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan**	**32 unit**	**8.319.924.750**	**32 unit**	**650.678.000**	**32 unit**	**97.610.000**		**96.000.000**		**193.610.000**						
	2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota**	**Jumlah cagar budaya yang dilestarikan**	**32 objek**	**8.319.924.750**	**32 objek**	**650.678.000**	**32 objek**	**97.610.000**	**32 objek**	**96.000.000**		**193.610.000**						
19	*2.22.05.2.02.0001*	*Pelindungan Cagar Budaya*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi*	*32 objek*	*8.319.924.750*	*32 objek*	*650.678.000*	*32 objek*	*97.610.000*		*96.000.000*		*193.610.000*						

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	
								I		II									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15= 14/5x100%	
	2.22.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase peningkatan kunjungan ke museum**	**55,72 %**	**16.687.420.000**	**55,72 %**	**182.420.000**		**1.210.000**		**90.676.000**		**91.886.000**						
	2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota**	**Jumlah kunjungan masyarakat ke museum**	**202.436 orang**	**16.687.420.000**	**202.436 orang**	**182.420.000**	**47.381**	**1.210.000**		**90.676.000**		**91.886.000**						
20	*2.22.06.2.01.0005*	*Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang di Revitalisasi*	*1 unit*	*16.687.420.000*	*1 unit*	*182.420.000*		*1.210.000*		*90.676.000*		*91.886.000*						
		URUSAN PILIHAN			**6.663.513.660**		**1.073.450.300**		**142.901.830**		**353.084.256**		**495.986.086**						
		BIDANG URUSAN PARIWISATA			**6.663.513.660**		**1.073.450.300**		**142.901.830**		**353.084.256**		**495.986.086**						
	3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Tingkat Hunian akomodasi**	**70,46 %**	**1.276.189.500**	**70,46 %**	**109.999.900**	**56,14 %**	**-**	**%**	**190.802.100**		**-**						
			Persentase Kunjungan Wisatawan	**23,67 %**		**23,67 %**		**15,80%**		**%**									
	3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah daya Tarik wisata baru**	**1 daya tarik**	**1.276.189.500**	**1 daya tarik**	**109.999.900**		**-**		**171.050.100**		**-**						
21	*3.26.02.2.01.0009*	*Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota*	*3 dokumen*	*1.276.189.500*	*1 dokumen*	*109.999.900*	-	-		-		-						
	3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Kunjungan wisatawan**	**6.399.090 orang**	**2.655.655.360**	**6.399.090 orang**	**464.190.700**	**1.143.314 orang**	**46.808.100**	**1.476.767 orang**	**92.323.700**	**2.620.081 orang**	**139.131.800**						
	3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kunjungan wisatawan**	**6.399.090 orang**	**2.655.655.360**	**6.399.090 orang**	**464.190.700**	**1.143.314 orang**	**46.808.100**	**- orang**	**92.323.700**	**2.620.081 orang**	**139.131.800**						
22	*3.26.03.2.01.01*	*Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik&Media Lainnya Baik Dalam & Luar Negeri*	*4 dokumen*	*457.343.800*	*1 dokumen*	*186.489.100*	-	-		*3.850.000*		*3.850.000*						
23	*3.26.03.2.01.02*	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik*	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran*	*9 laporan*	*1.832.921.500*	*4 laporan*	*228.898.000*	-	*3.160.100*		*88.473.700*		*91.633.800*						

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	
								I		II									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15= 14/5x100%	
		Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	*Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*																
24	*3.26.03.2.01.03*	*Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*4 dokumen*	*365.390.060*	*1 dokumen*	*48.803.600*	*-*	*43.648.000*	*-*	*-*		*43.648.000*						
	3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar**	**67 produk**	**14.684.800**	**67 produk**	**14.684.800**	**21 produk**	**-**	**- produk**	**-**		**-**						
	3.26.04.2.01	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kraetif**	**7 kegiatan**	**14.684.800**	**1 kegiatan**	**14.684.800**	**1 kegiatan**	**-**	**- kegiatan**	**-**		**-**						
25	*3.26.04.2.01.0003*	*Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif*	*1 laporan*	*14.684.800*	*1 laporan*	*14.684.800*	*-*	*-*		*-*		*-*						
	3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**persentase SDM pariwisata yang disertifikasi**	**0,83 %**	**2.716.984.000**	**0,83 %**	**508.639.700**	**-**	**96.093.730**	**-**	**260.760.556**		**356.854.286**						
			jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	**67 pelaku**		**67 pelaku**		**3**											
	3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya**	**300 orang**	**2.716.984.000**	**100 orang**	**431.650.400**	**-**	**96.093.730**	**-**	**260.760.556**		**356.854.286**						
			Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru	**67 pelaku**		**30 orang**		**3**											
26	*3.26.05.2.01.0005*	*Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*3 laporan*	*635.630.600*	*100 orang*	*83.800.000*	*-*	*45.538.830*		*-*		*45.538.830*						
27	*3.26.05.2.01.0008*	*Pengembangan Kapasitas*	*Jumlah SDM Pariwisata*	*100 orang*	*606.773.000*	*100 orang*	*25.000.000*	*-*	*50.554.900*		*-*		*50.554.900*						

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	
								I		II									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15= 14/5x100%	
		SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	*yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*																
28	*3.26.05.2.01.0009*	*Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata*	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata*	*150 orang*	*1.374.580.400*	*100 orang*	*50.000.000*	-	-		*211.260.556*		*211.260.556*						
29	*3.26.05.2.01.0010*	*Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*200 orang*	*100.000.000*	*1 laporan*	*272.850.400*	-	-		*49.500.000*		*49.500.00*						
	3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi**	**135 orang**	**164.974.600**	**100 orang**	**76.989.300**	**-**	**-**		**-**		**-**						
30	*3.26.05.2.02.0001*	*Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	*120 orang*	*164.974.600*	*40*	*76.989.300*	-	-		-		-						
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					**60.307.100.802**		**12.931.006.847**		**2.847.062.329**		**3.930.721.895**		**6.777.784.224**						

Dari data tabel 2.1 di atas evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024 Disparbud Kota Bogor masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan yang menyebabkan masih belum terlihatnya progres pancapaian target indikator program.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disparbud sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Disparbud Kota Bogor Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Disparbud Kota Bogor sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersaji pada tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Disparbud Kota Bogor
sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran 2024	Realisasi Pagu
			Qty	Satuan		
1	3	4	5		6	7
	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN				**11.857.556.547**	**6.281.784.138**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai hasil evaluasi LKIP Perangkat Daerah**	**A**	**point**	**9.380.645.741**	**4.570.889.767**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan**	**100**	**persen**	**1.500.000**	**0**
1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*5*	*dokumen*	1.500.000	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan**	**100**	**persen**	**7.853.007.166**	**4.546.377.363**
2	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*36*	*Orang/ bulan*	*7.783.611.166*	*4.518.294.363*
3	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*12*	*laporan*	*69.396.000*	*28.083.000*
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**persen**	**566.910.000**	**259.448.209**
4	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	*1*	*paket*	*97.139.100*	*64.472.600*
5	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1*	*paket*	*16.470.900*	*12.325.000*
6	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1*	*dokumen*	*12.000.000*	*4.750.000*

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran 2024	Realisasi Pagu
			Qty	Satuan		
1	3	4	5		6	7
7	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1*	*laporan*	*441.300.000*	*177.900.609*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan penyediaan BMD sesuai RKBMD**	**100**	**persen**	**115.787.200**	**108.069.000**
8	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*5*	*unit*	*115.787.200*	*108.069.000*
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**persen**	**1.042.629.981**	**338.206.182**
9	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1*	*laporan*	*348.003.785*	*86.914.734*
10	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1*	*laporan*	*694.626.196*	*251.291.448*
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	**85**	**persen**	**419.723.800**	**266.247.076**
11	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*15*	*Unit*	*192.690.000*	*77.196.300*
12	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*105*	*unit*	*89.500.800*	*52.830.000*
13	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi*	*1*	*unit*	*137.533.000*	*136.220.776*
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri / Lomba/ Sayembara Karyaseni**	**42**	**event**	**952.463.400**	**437.364.308**
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan**	**2**	**kegiatan**	**326.360.000**	**0**
14	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	*2*	*objek*	*226.360.000*	*0*
15	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*50*	*orang*	*100.000.000*	*0*
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan**	**1**	**kegiatan**	**626.103.400**	**437.364.308**
16	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*	*2*	*objek*	626.103.400	437.364.308
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional**	**76,64**	**persen**	**40.795.000**	**40.590.000**
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah pelaku dan lembaga seni yang dibina/ difasilitasi**	**20**	**orang/ lembaga**	**40.795.000**	**40.590.000**
17	*Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*20*	*lembaga*	40.795.000	40.590.000
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**Jumlah ketersediaan SDM Pembinaan Sejarah**	**50**	**orang**	**31.642.000**	**0**
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah	**Jumlah pelaku sejarah yang terbina**	**50**	**orang**	**31.642.000**	**0**

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran 2024	Realisasi Pagu
			Qty	Satuan		
1	3	4	5		6	7
	Kabupaten/Kota					
18	*Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota*	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*	*30*	*orang*	31.642.000	0
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan**	**32**	**objek**	**650.678.000**	**193.610.000**
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	**Jumlah cagar budaya yang dilestarikan**	**32**	**objek**	**650.678.000**	**193.610.000**
19	*Pelindungan Cagar Budaya*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi*	*32*	*objek*	650.678.000	193.610.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Persentase peningkatan kunjungan ke museum**	**55,72**	**%**	**182.420.000**	**91.886.000**
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Jumlah kunjungan masyarakat ke museum**	**202.436**	**Orang**	**182.420.000**	**91.886.000**
20	*Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi*	*1*	*unit*	182.420.000	91.886.000
	BIDANG URUSAN PARIWISATA				**1.073.450.300**	**495.986.086**
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Tingkat Hunian akomodasi**	**70,46**	**%**	**109.999.900**	**0**
		Persentase Kunjungan Wisatawan	**23,67**	**%**		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	**Jumlah daya tarik wisata baru**	**1**	**daya tarik wisata**	**109.999.900**	**0**
21	*Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota*	*1*	*dokumen*	109.999.900	-
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Jumlah Kunjungan wisatawan**	**6.399.090**	**wisatawan**	**464.190.700**	**139.131.800**
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Kunjungan wisatawan**	**6.399.090**	**wisatawan**	**464.190.700**	**139.131.800**
22	*Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik&Media Lainnya Baik Dalam & Luar Negeri*	*1*	*dokumen*	*186.489.100*	*3.850.000*
23	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	*4*	*laporan*	*228.898.000*	*91.633.800*
24	*Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*1*	*dokumen*	*48.803.600*	*43.648.000*
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	**Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar**	**67**	**produk**	**14.684.800**	**0**
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**Jumlah kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kraetif**	**1**	**kegiatan**	**14.684.800**	**0**
25	*Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif*	*1*	*laporan*	14.684.800	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**persentase SDM pariwisata yang disertifikasi**	**0,83**	**persen**	**484.574.900**	**356.854.286**
		jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	**67**	**orang**		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya**	**100**	**orang**	**463.849.400**	**356.854.286**
		Jumlah SDM ekraf yang ditingkatkan kualitasnya	**30**	**orang**		

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran 2024	Realisasi Pagu
			Qty	Satuan		
1	3	4	5		6	7
26	*Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*100*	*Orang*	*150.895.200*	*45.538.830*
28	*Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI*	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*	*100*	*orang*	*51.009.900*	*50.554.900*
29	*Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata*	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata*	*100*	*orang*	*211.944.300*	*211.260.556*
30	*Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*1*	*laporan*	*50.000.000*	*49.500.000*
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi**	**100**	**orang**	**20.725.500**	**0**
31	*Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	*40*	*orang*	*20.725.500*	*0*
J U M L A H					**12.931.006.847**	**6.777.784.224**

Dari tabel 2.2 menggambarkan bahwa total pagu Disparbud Kota Bogor senilai Rp. 12.931.006.847. dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 6.777.784.224.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Disparbud Kota Bogor

Penyelenggaraan pelayanan Disparbud adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 166 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

Analisis Kinerja Pelayanan Disparbud Kota Bogor didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Disparbud Kota Bogor
Triwulan II Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Capaian s.d Triwulan II Tahun 2024
Terwujudnya pelestarian budaya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya	Presentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya	76,54 %	76,52 %

Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Disparbud	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah	82 Nilai	-
Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor	Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor	Persentase kunjungan wisatawan	23,67 %	17,62 %
		Jumlah Kunjungan wisatawan	6.339.090 Orang	2.620.081 orang
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Bogor	Jumlah Pelaku ekonomi Kreatif baru	67 pelaku	9 pelaku

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Disparbud sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersebut di atas masih belum ada yang tercapai sehingga masih membutuhkan upaya untuk mencapai terget yang telah di tentukan, begitu juga dengan indikator kinerja program masih perlu upaya untuk mencapai target, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Program Disparbud Kota Bogor
Triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Target	Capaian s.d Triwulan II
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup perangkat daerah	A Nilai	A Nilai
	Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lingkup perangkat daerah	3.52 poin	3,47 poin
Pengembangan Kebudayaan	Jumlah keragaman jenis event/ festival/ pasanggiri/ lomba/ sayembara karyaseni	42 event	31 event
Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional	76,54 %	76,52 %
Pembinaan Sejarah	Jumlah ketersediaan SDM pembinaan sejarah	50 orang	-
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	32 unit	32 unit
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	70,46 %	60,74 %
	Persentase kunjungan wisatawan	23,67 %	17,62 %
Program Pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	6.399.090 orang	2.620.081 orang
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	67 produk	40 produk

kekayaan intelektual			
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	0,83 %	0,14 %
	Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru	67 pelaku	9 pelaku

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya.

Berdasarkan Perubahan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Disparbud Kota Bogor Tahun 2024

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**15.991.890.746**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**12.127.845.024**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah**	**A poin**	**9.533.480.646**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah**	**A poin**	**10.589.718.624**
			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan lingkup Perangkat Daerah	**3.50 poin**				**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan lingkup Perangkat Daerah**	**3.74 poin**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**A poin**	**1.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**A poin**	**-**
1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*5 dokumen*	*1.500.000*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*5 dokumen*	*-*
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**100 %**	**7.210.942.281**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**100 %**	**8.561.466.913**
2	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*35 orang/ bulan*	*7.141.546.281*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*36 orang/ bulan*	*8.492.703.913*
3	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*12 laporan*	*69.396.000*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*12 laporan*	*68.763.000*
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional**	**100 %**	**777.306.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional**	**100 %**	**506.110.400**

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			perangkat daerah					**perangkat daerah**		
4	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	*1 paket*	*108.339.400*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	*1 paket*	*95.599.100*
5	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 paket*	*19.790.700*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 paket*	*16.470.900*
6	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 dokumen*	*12.000.000*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 dokumen*	*12.000.000*
7	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 laporan*	*27.495.000*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 laporan*	-
8	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 laporan*	*609.681.000*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 laporan*	*382.040.400*
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase pemenuhan penyediaan BMD sesuai RKBMD**	**95 %**	**182.335.800**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase pemenuhan penyediaan BMD sesuai RKBMD**	**95 %**	**115.787.200**
9	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*4 unit*	*182.335.800*	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*4 unit*	*115.787.200*
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100 %	**933.074.665**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100 %	**986.630.311**
10	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber*	*Kota Bogor, Bogor Utara,*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa*	*1 laporan*	*372.003.785*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber*	*Kota Bogor, Bogor Utara,*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa*	*1 laporan*	*292.004.115*

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Daya Air dan Listrik	*Tegal Gundil*	*Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*			*Daya Air dan Listrik*	*Tegal Gundil*	*Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		
11	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 laporan*	*561.070.880*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 laporan*	*694.626.196*
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	100 %	**428.321.800**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	100 %	**419.723.800**
12	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*15 unit*	*189.930.000*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*15 unit*	*192.690.000*
13	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*105 unit*	*101.858.800*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*105 unit*	*89.500.800*
14	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi*	*2 unit*	*137.533.000*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi*	*2 unit*	*137.533.000*
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		**jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri / Lomba/ Sayembara Karyaseni**	**21 event**	**1.724.483.600**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		**jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri / Lomba/ Sayembara Karyaseni**	**42 event**	**877.463.400**
7	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan**	**2 kegiatan**	**326.360.000**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan**	**2 kegiatan**	**251.360.000**
15	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	*2 objek*	*226.360.000*	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	*2 objek*	*151.360.000*
16	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan*	*Kota Bogor, Semua*	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia,*	*50 orang*	*100.000.000*	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan*	*Kota Bogor, Semua*	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia,*	*50 orang*	*100.000.000*

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pranata Kebudayaan	*Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*			*Pranata Kebudayaan*	*Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*		
8	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan**	**3 kegiatan**	**1.398.123.600**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan**	**3 kegiatan**	**626.103.400**
17	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*	*3 kegiatan*	*1.398.123.600*	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*	*3 kegiatan*	*626.103.400*
IV	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		**Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional**	**10 %**	**80.595.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		**Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional**	**76,65 %**	**40.795.000**
9	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pelaku dan lembaga seni yang dibina/ difasilitasi**	**20 orang/ Lembaga**	**80.595.000**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pelaku dan lembaga seni yang dibina/ difasilitasi**	**20 orang/ Lembaga**	**40.795.000**
18	*Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*20 Lembaga*	*80.595.000*	*Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*20 Lembaga*	*40.795.000*
V	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**		**Jumlah Ketersediaan SDM pembinaan sejarah**	**50 orang**	**31.642.000**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**		**Jumlah Ketersediaan SDM pembinaan sejarah**	**50 orang**	**31.642.000**
10	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		***Jumlah pelaku sejarah yang terbina***	**50 orang**	**31.642.000**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		***Jumlah pelaku sejarah yang terbina***	**50 orang**	**31.642.000**
19	*Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*	*50 orang*	*31.642.000*	*Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*	*50 orang*	*31.642.000*
VI	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		**Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan**	**25 unit**	**650.711.500**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		**Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan**	**32 unit**	**495.806.000**
11	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota**		**Jumlah cagar budaya yang dilestarikan**	**25 objek**	**650.711.500**	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota**		**Jumlah cagar budaya yang dilestarikan**	**32 objek**	**495.806.000**
20	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Bogor, Semua	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi*	*20 objek*	650.711.500	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Bogor, Semua	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi*	*32 objek*	495.806.000

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kecamatan, Semua Kelurahan					Kecamatan, Semua Kelurahan			
VII	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**		**Persentase peningkatan kunjungan ke museum**	**25 %**	**3.970.978.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**		**Persentase peningkatan kunjungan ke museum**	**55,72 %**	**92.420.000**
12	**Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota**		**Jumlah kunjungan masyarakat ke museum**	**130.000 orang**	**3.970.978.000**	**Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota**		**Jumlah kunjungan masyarakat ke museum**	**130.000 orang**	**92.420.000**
21	*Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang di Revitalisasi*	*1 unit*	3.970.978.000	*Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang di Revitalisasi*	*1 unit*	92.420.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				**2.541.476.600**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**889.364.000**
VIII	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**Tingkat Hunian akomodasi**	**70 %**	**692.449.600**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**Tingkat Hunian akomodasi**	**70,46 %**	**100.679.900**
			Persentase Kunjungan Wisatawan	**10 %**				**Persentase Kunjungan Wisatawan**	**23,67 %**	
13	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah daya Tarik wisata baru**	**1 daya Tarik wisata**	**109.999.900**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah daya Tarik wisata baru**	**1 daya Tarik wisata**	**100.679.900**
22	*Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota*	1 dokumen	109.999.900	*Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota*	1 dokumen	100.679.900
14	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata**	**1 kawasan**	**199.999.900**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata**	**1 kawasan**	**-**
23	*Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*1 dokumen*	*199.999.900*	*Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*1 dokumen*	-
15	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola**	**1 destinasi**	**132.449.900**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola**	**1 destinasi**	**-**

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*1 laporan*	*132.449.900*	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*1 laporan*	-
16	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah pelaku usaha yang dibina dan difasilitasi**	***30 pelaku***	**250.000.000**	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah pelaku usaha yang dibina dan difasilitasi**	***30 pelaku***	**-**
25	*Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/ kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah usaha yang dibina dan diawasi*	*1 usaha*	*250.000.000*	*Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/ kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah usaha yang dibina dan diawasi*	*1 usaha*	-
IX	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**Jumlah kunjungan wisatawan**	**5.062.449 orang**	**869.612.500**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**Jumlah kunjungan wisatawan**	**5.062.449 orang**	**354.724.700**
16	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Kunjungan wisatawan**	**5.062.449 orang**	**869.612.500**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Kunjungan wisatawan**	**5.062.449 orang**	**354.724.700**
25	*Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*1 Dokumen*	335.620.900	*Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*1 Dokumen*	97.868.700
26	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	*2 Kegiatan*	385.188.000	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	*2 Kegiatan*	209.646.000
27	*Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	*2 Promosi*	148.803.600	*Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	*2 Promosi*	47.210.000
X	**PROGRAM PENGEMBANGAN**		**Jumlah jenis produk**	**40 Produk**	**14.684.900**	**PROGRAM PENGEMBANGAN**		**Jumlah jenis produk**	**40 Produk**	**14.110.000**

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		**ekonomi kreatif yang terserap pasar**			**EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**		**ekonomi kreatif yang terserap pasar**		
17	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**		***Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi HKI***	**12 Pelaku**	**14.684.900**	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**		***Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi HKI***	**12 Pelaku**	**14.110.000**
28	*Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif*	*1 laporan*	14.684.900	*Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif*	*1 laporan*	14.110.000
XI	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**persentase SDM pariwisata yang disertifikasi**	**0,83 %**	**964.729.600**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**persentase SDM pariwisata yang disertifikasi**	**0,83 %**	**419.849.400**
			jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	**30 pelaku**				**jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru**	**30 pelaku**	
18	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya**	**750 orang**	**921.219.000**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya**	**750 orang**	**419.849.400**
			Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru	**30 pelaku**				**Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru**	**30 pelaku**	
29	*Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*1 laporan*	339.344.200	*Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*1 laporan*	106.895.200
30	*Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*	*95 orang*	281.325.100	*Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*	*95 orang*	51.009.900
31	*Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata*	*150 orang*	250.549.700	*Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata*	*150 orang*	211.944.300
32	*Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	Kota Bogor, Semua Kecamatan,	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi*	*30 orang*	50.000.000	*Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	Kota Bogor, Semua Kecamatan,	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi*	*30 orang*	50.000.000

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Semua Kelurahan	*Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*				Semua Kelurahan	*Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*		
19	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**		**Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi**	**200 orang**	**43.510.600**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**		**Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi**	**200 orang**	**-**
33	*Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	*40 orang*	43.510.600	*Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	*40 orang*	-
					18.533.367.346					**13.017.209.024**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPARBUD KOTA BOGOR

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2024 sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, maka dirumuskan Program dan Kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan indikator kinerja program (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah (2) Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan lingkup Perangkat Daerah, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

   3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

   4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya

   5. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan indikator kinerja program Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
    2) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
    1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

C. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dengan indikator kinerja program Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

D. Program Pembinaan Sejarah, dengan indikator kinerja program Jumlah Ketersediaan SDM pembinaan sejarah, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota

E. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan indikator kinerja program Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

    1) Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya

F. Program Pengelolaan Permuseuman, dengan indikator kinerja program Persentase peningkatan kunjungan ke museum, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
    1) Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

G. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan indikator kinerja program (1) tingkat hunian akomodasi (2) Persentase kunjungan wisatawan, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
    1) Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

H. Program Pemasaran Pariwisata, dengan indikator kinerja program Jumlah Kunjungan Wisatawan, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
    1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
    2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota
    3) Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

I. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan indikator kinerja program (1) Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi (2) Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
3) Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
4) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
   1) Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Tabel 4.1.
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							**18.533.367.346**	**12.931.006.847**	**13.017.209.024**	**-5.516.158.322**							**17.146.020.515**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.991.890.746**	**11.857.556.547**	**12.127.845.024**	**-3.864.045.722**							**14.346.020.515**	
	2,22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**15.991.890.746**	**11.857.556.547**	**12.127.845.024**	**-3.864.045.722**							**14.346.020.515**	
1	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya**				**21 Event**	**42 Event**	**1.724.483.600**	**952.463.400**	**877.463.400**	**-847.020.200**							**1.900.000.000**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan*				2 kegiatan	2 kegiatan	326.360.000	326.360.000	251.360.000	-75.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pelaku seni budaya dan masyarakat		400.000.000	DI PA DA KE
	2.22.02.2.01.0001	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*				*2 Objek*	*2 Objek*	*226.360.000*	*226.360.000*	*151.360.000*	*-75.000.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*250.000.000*	DI PA DA KE
	2.22.02.2.01.0002	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*				*50 Orang*	*50 Orang*	*100.000.000*	*100.000.000*	*100.000.000*	*0*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*150.000.000*	DI PA DA KE
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan*				3 kegiatan	3 kegiatan	1.398.123.600	626.103.400	626.103.400	-772.020.200			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor		1.500.000.000	DI PA DA KE
	2.22.02.2.02.0001	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*				*2 Objek*	*2 Objek*	*1.398.123.600*	*626.103.400*	*626.103.400*	*-772.020.200*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*1.500.000.000*	DI PA DA KE
2	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional**				**10,00%**	**76,65%**	**80.595.000**	**40.795.000**	**40.795.000**	**-39.800.000**							**100.000.000**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya	*Jumlah pelaku dan lembaga seni yang*				20 orang/	20 orang/	80.595.000	40.795.000	40.795.000	-39.800.000			Revolusi	Peningkatan	para pelaku		100.000.000	DI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		dalam Daerah Kabupaten/Kota	*dibina/ difasilitasi*				lembaga	lembaga							Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor			PA DA KE
	2.22.03.2.01.0003	*Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				*20 lembaga*	*20 lembaga*	*80.595.000*	*40.795.000*	*40.795.000*	*-39.800.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*100.000.000*	DI PA DA KE
3	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah Ketersediaan SDM pembinaan sejarah**				**50 orang**	**50 orang**	**31.642.000**	**31.642.000**	**31.642.000**	**0**							**50.000.000**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaku sejarah yang terbina*				50 orang	50 orang	31.642.000	31.642.000	31.642.000	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pelestari peninggalan sejarah		50.000.000	DI PA DA KE
	2.22.04.2.01.0001	*Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota*	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*				*50 Orang*	*50 Orang*	*31.642.000*	*31.642.000*	*31.642.000*	*0*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*50.000.000*	DI PA DA KE
4	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan**				**25 unit**	**32 unit**	**650.711.500**	**650.678.000**	**495.806.000**	**-154.905.500**							**800.000.000**	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	*Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan*				25 objek	32 objek	650.711.500	650.678.000	495.806.000	-154.905.500			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor		800.000.000	DI PA DA KE
	2.22.05.2.02.0001	*Pelindungan Cagar Budaya*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi*				*25 Objek*	*32 Objek*	*650.711.500*	*650.678.000*	*495.806.000*	*-154.905.500*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*800.000.000*	DI PA DA KE
5	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase peningkatan kunjungan ke museum**				**25,00%**	**55,72%**	**3.970.978.000**	**182.420.000**	**92.420.000**	**-3.878.558.000**							**0**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	*Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota*				130000 orang	130000 orang	3.970.978.000	182.420.000	92.420.000	-3.878.558.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup	Masyarakat kota bogor dan luar kota bogor		0	DI PA DA KE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																Masyarakat				
	2.22.06.2.01.0005	*Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi*				*1 Unit*	*1 Unit*	*3.970.978.000*	*182.420.000*	*92.420.000*	*-3.878.558.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*0*	*DI PA DA KE*
6	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**				**A Point**	**A Point**	**9.533.480.646**	**9.999.558.147**	**10.589.718.624**	**1.056.237.978**							**11.496.020.515**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah*				A point	A point	1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Disparbud Kota Bogor		3.000.000	DI PA DA KE
	3.26.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*1.500.000*	*1.500.000*	*0*	*-1.500.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*3.000.000*	*DI PA DA KE*
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN*				100%	100%	7.210.942.281	7.853.007.166	8.561.466.913	1.350.524.632			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Disparbud Kota Bogor		8.656.020.515	DI PA DA KE
	3.26.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				*35 Orang/ bulan*	*35 Orang/ bulan*	*7.141.546.281*	*7.783.611.166*	*8.492.703.913*	*1.351.157.632*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*8.581.020.515*	*DI PA DA KE*
	3.26.01.2.02.0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triuulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triuulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triuulanan/ Semesteran SKPD*				*12 Laporan*	*12 Laporan*	*69.396.000*	*69.396.000*	*68.763.000*	*-633.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*75.000.000*	*DI PA DA KE*
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah*				100%	100%	777.306.100	566.910.000	506.110.400	-271.195.700			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Disparbud Kota Bogor		837.000.000	DI PA DA KE
	3.26.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				*1 Paket*	*1 Paket*	*108.339.400*	*97.139.100*	*95.599.100*	*-12.740.300*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*150.000.000*	*DI PA DA KE*

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
													Desa		*Transformasi Pelayanan Publik*					
	3.26.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				*1 Paket*	*1 Paket*	*19.790.700*	*16.470.900*	*16.470.900*	*-3.319.800*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*25.000.000*	
	3.26.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*12.000.000*	*12.000.000*	*12.000.000*	*0*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*12.000.000*	
	3.26.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				*1 Laporan*	*1 Laporan*	*27.495.000*	*0*	*0*	*-27.495.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*50.000.000*	
	3.26.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				*1 Laporan*	*1 Laporan*	*609.681.000*	*441.300.000*	*382.040.400*	*-227.640.600*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*600.000.000*	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*				100%	100%	182.335.800	115.787.200	115.787.200	-66.548.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Disparbud Kota Bogor		200.000.000	
	3.26.01.2.07.0011	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				*15 Unit*	*15 Unit*	*182.335.800*	*115.787.200*	*115.787.200*	*-66.548.600*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*200.000.000*	
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah*				100%	100%	933.074.665	1.042.629.981	986.630.311	53.555.646			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Disparbud Kota Bogor		1.200.000.000	
	3.26.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				*1 Laporan*	*1 Laporan*	*372.003.785*	*348.003.785*	*292.004.115*	*-79.999.670*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*500.000.000*	
	3.26.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa*				*1 Laporan*	*1 Laporan*	*561.070.880*	*694.626.196*	*694.626.196*	*133.555.316*	*Kota Bogor,*	*PENDAPATAN*	*Memperkuat*	*Reformasi*			*700.000.000*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan										*Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*ASLI DAERAH (PAD)*	*Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Birokrasi Reformasi Birokrasi*				PA DA KE
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik*				100%	100%	428.321.800	419.723.800	419.723.800	-8.598.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Disparbud Kota Bogor		600.000.000	DI PA DA KE
	3.26.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				*16 Unit*	*16 Unit*	*188.930.000*	*192.690.000*	*192.690.000*	*3.760.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*250.000.000*	DI PA DA KE
	3.26.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				*85 Unit*	*85 Unit*	*101.858.800*	*89.500.800*	*89.500.800*	*-12.358.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*150.000.000*	DI PA DA KE
	3.26.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				*1 Unit*	*1 Unit*	*137.533.000*	*137.533.000*	*137.533.000*	*0*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*200.000.000*	DI PA DA KE
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.541.476.600**	**1.073.450.300**	**889.364.000**	**-1.652.112.600**							**2.800.000.000**	
	3,26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**2.541.476.600**	**1.073.450.300**	**889.364.000**	**-1.652.112.600**							**2.800.000.000**	
1	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase kunjungan wisatawan**				**10,00%**	**23,67%**	**692.449.600**	**109.999.900**	**100.679.900**	**-591.769.700**							**780.000.000**	
			Tingkat Hunian Akomodasi				**70,00%**	**70,46%**												
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah daya tarik wisata baru*				1 daya tarik	1 daya tarik	109.999.900	109.999.900	100.679.900	-9.320.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	pemangku kepentingan kepariwisataan		150.000.000	DI PA DA KE
	3.26.02.2.01.0009	*Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya*				*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*109.999.900*	*109.999.900*	*100.679.900*	*-9.320.000*	*Kota Bogor, Semua*	*PENDAPATAN ASLI*	*Meningkatkan Sumber Daya*	*Pembangunan Infrastruktur*			*150.000.000*	DI PA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota										*Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*DAERAH (PAD)*	*Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal*				*DA KE*
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	*Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata*				1 kawasan	1 kawasan	199.999.800	0	0	-199.999.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	pemangku kepentingan kepariwisataan		220.000.000	DI PA DA KE
	3.26.02.2.02.0002	*Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota*				*2 Dokumen*	*1 Dokumen*	*199.999.800*	*0*	*0*	*-199.999.800*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal*			*220.000.000*	*DI PA DA KE*
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola*				2 destinasi	2 destinasi	132.449.900	0	0	-132.449.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur	pemangku kepentingan kepariwisataan		135.000.000	DI PA DA KE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal				
	3.26.02.2.03.0006	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*				*1 Laporan*	*1 Laporan*	*132.449.900*	*0*	*0*	*-132.449.900*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal*			*135.000.000*	
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah pelaku usaha yang dibina dan difasilitasi*				30 pelaku	30 pelaku	250.000.000	0	0	-250.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Pelaku usaha pariwisata		275.000.000	
	3.26.02.2.04.0007	*Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/ kota*	*Jumlah usaha yang dibina dan diawasi*				*1 Usaha*	*1 Usaha*	*250.000.000*	*0*	*0*	*-250.000.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal*			*275.000.000*	
2	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah kunjungan wisatawan**				**5.062.449**	**6.399.090**	**869.612.500**	**464.190.700**	**354.724.700**	**-514.887.800**							**925.000.000**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							orang	orang												
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	*Jumlah Kunjungan Wisatawan*				5062449 orang	6.399.090 orang	869.612.500	464.190.700	354.724.700	-514.887.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Wisatawan nusantara dan mancanegara		925.000.000	DI PA DA KE
	3.26.03.2.01.0003	*Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*				*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*335.620.900*	*186.489.100*	*97.868.700*	*-237.752.200*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal*			*350.000.000*	*DI PA DA KE*
	3.26.03.2.01.0006	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*				*2 Kegiatan*	*2 Kegiatan*	*385.188.000*	*228.898.000*	*209.646.000*	*-175.542.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal*			*400.000.000*	*DI PA DA KE*
	3.26.03.2.01.0007	*Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*				*2 Promosi*	*2 Promosi*	*148.803.600*	*48.803.600*	*47.210.000*	*-101.593.600*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah*			*175.000.000*	*DI PA DA KE*

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal				
3	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar**				**40 Produk**	**67 Produk**	**14.684.900**	**14.684.800**	**14.110.000**	**-574.900**							**20.000.000**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi HKI*				12 Pelaku	12 Pelaku	14.684.900	14.684.800	14.110.000	-574.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Pelaku ekonomi kreatif		20.000.000	DI PA DA KE
	3.26.04.2.02.0003	*Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif*				*1 Laporan*	*1 Laporan*	*14.684.900*	*14.684.800*	*14.110.000*	*-574.900*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal*			*20.000.000*	*DI PA DA KE*
4	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**persentase SDM pariwisata yang disertifikasi**				**0,83%**	**0,83%**	**964.729.600**	**484.574.900**	**419.849.400**	**-544.880.200**							**1.075.000.000**	
			jumlah pelaku ekonomi kreatif baru				**30 orang**	**67 orang**												
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya*				750 orang	750 orang	921.219.000	463.849.400	419.849.400	-501.369.600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif		1.025.000.000	DI PA DA KE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3.26.05.2.01.0005	*Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*				*1 Laporan*	*1 Laporan*	*339.344.200*	*150.895.200*	*106.895.200*	*-232.449.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*350.000.000*	*DI PA DA KE*
	3.26.05.2.01.0008	*Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI*	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*				*95 Orang*	*30 Orang*	*281.325.100*	*51.009.900*	*51.009.900*	*-230.315.200*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*300.000.000*	*DI PA DA KE*
	3.26.05.2.01.0009	*Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata*	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata*				*150 Orang*	*40 Orang*	*250.549.700*	*211.944.300*	*211.944.300*	*-38.605.400*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*300.000.000*	*DI PA DA KE*
	3.26.05.2.01.0010	*Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*				*30 Orang*	*30 Orang*	*50.000.000*	*50.000.000*	*50.000.000*	*0*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*75.000.000*	*DI PA DA KE*
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi*				200 orang	200 orang	43.510.600	20.725.500	0	-43.510.600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pelaku ekonomi kreatif		50.000.000	DI PA DA KE
	3.26.05.2.02.0001	*Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*				*40 Orang*	*30 Orang*	*43.510.600*	*20.725.500*	*0*	*-43.510.600*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*50.000.000*	*DI PA DA KE*
	JUMLAH								**18.533.367.346**	**12.931.006.847**	**13.017.209.024**	**5.516.158.322**							**17.146.020.515**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2024 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2024, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor pada Tahun 2024 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor.

L. DINAS KUKM DAGIN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2024 dilakukan perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip- prinsip yang meliputi merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan bersama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor memandang perlu untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024.

Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan RKPD 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
3. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 167 Tahun 2021 tentang Tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor
4. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 46).

5. Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 28).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan perubahan Renja adalah

1. Memberikan informasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024;
2. Menjabarkan perubahan indikator knerja kegiatan berdasarkan Perubahan RKPD Tingkat Kota Bogor Tahun 2024
3. Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja kegiatan yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan dan pagu indikatif kegiatan.

Tujuan

Adapun tujuannya adalah sebagai dasar penyusunan Perubahan DPA Tahun 2024 sekaligus pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2024 yang terdiri dari 8 (delapan) bab disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antar Renja PD dengan Dokumen RKD, Renstra Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini dijelaskan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja di Tahun 2022 ditujukan untuk mengindentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor serta hambatan dan permasalahan yang terjadi .Tercapai atau tidaknya pelaksanaan dari program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja Perangkat Daerah, dimana laporan tersebut merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2024 merupakan pelaksanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Adapun penyusunan Perubahan Renja Dinas Tahun 2024 memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan berikut pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikendaki;
c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya

Selain hal diatas penyusunan perubahan Renja Dinas Tahun 2024 memperhatikan juga hal berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perubahan perencanaan tahun 2024;
b. Memperhatikan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Pada Tahun 2024, Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor sampai dengan Triwulan 2 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Evaluasi RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor

Triwulan 2 Tahun 2024

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV															
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2		3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16	17
			Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						2.392.485.800	555	477.130.000		32.050.000		-		-	555	509.180.000	#DIV/0!	21,3	555	509.180.000	#DIV/0!	#DIV/0!					

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																I		II		III		IV												
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
							Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							**2.392.485.800**	**555**	**477.130.000**	**6**	**32.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**561**	**509.180.000**	**#DIV/0!**	**21,3**	**561**	**509.180.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV														
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17
							PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan koperasi berizin	80,00	%				80,00	%	88.320.000	-	-	1	3.500.000	-	-	-	-	1	3.500.000	1,25	4	1	3.500.000	1,25	#DIV/0!				

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																	I		II		III		IV														
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16	17
							Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Persentase KoperasiberIzin Usaha Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam	2,24	%				2,27	%	88.320.000	-	-	1	3.500.000	-	-	-	-	**1**	**3.500.000**	**44**	**3,96**	**1**	**3.500.000**	**44,6429**	**#DIV/0!**				

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV															
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2		3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16	17
			Kabupaten/Kota																												

| | | |

| | | |

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV														
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17
							PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase Koperasi yang Sehat**	**10,71**	**%**				**10,71**	**%**	**146.519.900**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**	-	-		**0**	**#DIV/0!**				

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																I		II		III		IV																
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17
							Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	3,37	%		3,37	%	146.519.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**	-	-		**0**	**#DIV/0!**				

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
															I		II		III		IV															
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16	17
							dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																														

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Ket.
																		I		II		III		IV																									
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV															
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17	
Predikat kinerja																															

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV													
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.			
1	2						3	4	5			6		7			8			9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16	17
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di	30,00	%				30,00	%	638.957.000	315	341.855.000	-	10.700.000	-	-	-	-	315	352.555.000	1050	55,2	315	352.555.000	1050	#DIV/0!				

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV															
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2		3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16	17
			koperasi asal																												

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																	I		II		III		IV															
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17	
							Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Persentase Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	42,09	%		42,09	%	638.957.000	315	341.855.000	-	10.700.000	-	-	-	-	**315**	**352.555.000**	**748,396**	**55,2**	**315**	**352.555.000**	**748,396**	**#DIV/0!**				

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
															I		II		III		IV															
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16	17
							Kabupaten/Kota																													

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV														
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17
							Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompete	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				410	Orang	638.957.000	315	341.855.000	-	10.700.000	-	-	-	-	**315**	**352.555.000**	**76,8293**	**55,2**	**315**	**352.555.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Nilai Pagu DPA sebesar 378.063.000	

No	Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
													I		II		III		IV																	
						K		Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2			3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17			
				nsi SDM Koperasi																																	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																			
Predikat kinerja																																			

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.			
1	2						3	4	5			6		7			8		9			10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Koperasi Aktif**	**17,21**	**%**				**17,21**	**%**	**187.091.000**	**-**	**-**	**-**	**2.020.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.020.000**	**0**	**1,08**	**-**	**2.020.000**		**0**	**#DIV/0!**				

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV															
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16	17
							Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	2,24	%					2,24	%	187.091.000	-	-	-	2.020.000	-	-	-	-	-	**-**	**2.020.000**	**0**	**1,08**	**-**	**2.020.000**			**0**	**#DIV/0!**				

| | | |

						Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	30,00	%					30,00	%	1.148.116.000	240	133.255.000	-	-	-	-	-	-	**240**	**133.255.000**	**800**	**11,6**	**240**	**133.255.000**	**800**	**#DIV/0!**		
						Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro							100	Unit Usaha	338.030.000	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		Refocusing

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV														
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		17
							Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				70	Unit Usaha	313.926.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!			Refocusing	

						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro						150	Orang	183.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		Refocusing
						Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata						48346	Unit Usaha	105.070.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		Nilai pagu DPA sebesar 50.000.000

| | | |

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.					
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100			16		17		
							Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan jumlah skala usaha menjadi usaha kecil	15,00	%		15,00	%	24.930.000	-	-	-	8.020.000	-	-	-	-	**-**	**8.020.000**	**-**	**32,2**	**-**	**8.020.000**		**0**	**#DIV/0!**				

| | | |

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
															I		II		III		IV																
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17
							PERDAGANGAN	**Perdagangan**																														

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV														
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		17	
							Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaku Usaha Sektor Perdagangan yang Memahami Regulasi yang Berlaku					40,00	%	277.160.000	1	33.660.000	-	-	-	-	-	-	**1**	**33.660.000**	**2,5**	**12,1**	**1**	**33.660.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		17		
							Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						5	Dokumen	277.160.000	1	33.660.000	-	-	-	-	-	-	**1**	**33.660.000**	**20**	**12,1**	**1**	**33.660.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Nilai pagu DPA sebesar 33.840.000	

No	Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
													I		II		III		IV																
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16	17			
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																		
Predikat kinerja																																		
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG	Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<9,00	%			<9,00	%	142.325.000	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	#VALUE!	0	1	-	#VALUE!	#DIV/0!				

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
															I		II		III		IV																
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17
							PENTING	yang stabil dan terjangkau																														

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.					
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17			
							Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	<9,00	%				<9,00	%	142.325.000	-	-	1	-	-	-	-	-	**1**	**-**	**#VALUE!**	**0**	**1**	**-**	**#VALUE!**	**#DIV/0!**								

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV															
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2		3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16	17
			Kabupaten/Kota																												

| | | |

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV															
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																															
Predikat kinerja																															
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Nilai Realisasi Ekspor**	**### ### ###**	**USD**			**75.763.689,97**	**USD**	**137.589.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-**	**0**	**#DIV/0!**				

| | | |

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
															I		II		III		IV																
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17
							KONSUMEN																														

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																		
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.						
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100			16		17				
							Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Kesesuaian data dan Akurasi ukuran	75,03	%				75,03	%	452.031.700	2.194	56.326.500		4.900.000	-	-	-	-	**2.194**	**61.226.500**	**2924,16**	**13,5**	**####**	**61.226.500**		**2924,16**	**#DIV/0!**					

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang						60500	Unit	295.461.700	2.134	26.216.500	-	4.900.000	-	-	-	-	**2.134**	**31.116.500**	**3,52727**	**10,5**	**####**	**31.116.500**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Nilai pagu DPA sebesar 57.541.800	

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17
							Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina						200	Orang	156.570.000	60	30.110.000	-	-	-	-	-	-	**60**	**30.110.000**	**30**	**19,2**	**60**	**30.110.000**	**#DIV/0!**		**#DIV/0!**			Nilai pagu DPA sebesar 30.290.000	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																						
Predikat kinerja																																						

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																	I		II		III		IV														
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16	17
							PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Pelaku Usaha yang difasilitasi pemasarannya	24,27	%				24,27	%	691.664.000	25	83.257.975	-	-	-	-	-	-	25	83.257.975	103,008	12	25	83.257.975	103,008	#DIV/0!		

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV														
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.				
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17
							Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk yang difasilitasi promosi dan pemasarannya	990	Produk					240	Produk	691.664.000	25	83.257.975	-	-	-	-	-	-	**25**	**83.257.975**	**10,4167**	**12**	**25**	**83.257.975**		**2,52525**	**#DIV/0!**				

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																	I		II		III		IV																	
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17	
								Persentase pelaku usaha yg melaksanakan pemasaran melalui E-Commerce/TPMSE	10,00	%					10,00	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**#####**	-	-		**0**	**#DIV/0!**				

| | | |

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
															I		II		III		IV												
								K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2					3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16	17
							Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	**A**	**Poin**		**A**	**Poin**	**2.869.680.100**	**-**	**413.129.200**		**156.790.082**		**-**		**-**	**-**	**569.919.282**	**#VALUE!**	**19,9**	**-**	**569.919.282**	**#VALUE!**	**#DIV/0!**				
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100	%		100	%	13.187.699.871	100	3.906.437.803	100	3.938.831.474	-	-	-	-	**200**	**7.845.269.277**	**200**	**59,5**	**200**	**7.845.269.277**	**200**	**#DIV/0!**				

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																		
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17	
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							69	Orang	13.123.499.871	69	3.896.957.803	69	3.929.351.474	-	-	-	-	**69**	**7.826.309.277**	**100**	**59,6**	**69**	**7.826.309.277**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Nilai pagu DPA sebesar 12.646.031.555	

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		17		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi						12	Laporan	64.200.000	3	9.480.000	3	9.480.000	-	-	-	-	**6**	**18.960.000**	**50**	**29,5**	**6**	**18.960.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Nilai pagu DPA sebesar 47.160.000	

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
															I		II		III		IV															
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16	17
								Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD																														

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV														
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		17	
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	%				100	%	2.869.680.100	23	413.129.200	26	156.790.082	-	-	-	-	**48**	**569.919.282**	**48,3871**	**19,9**	**48**	**569.919.282**	**48,3871**	**#DIV/0!**				

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																	I		II		III		IV															
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17
							Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						4	Paket	36.618.000	1	7.925.000	1	8.638.000	-	-	-	-	**2**	**16.563.000**	**50**	**45,2**	**2**	**16.563.000**	**#DIV/0!**		**#DIV/0!**			Nilai pagu DPA sebesar 36.618.000	

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							4	Paket	172.200.000	1	38.510.200	1	14.925.700	-	-	-	-	**2**	**53.435.900**	**50**	**31**	**2**	**53.435.900**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Nilai pagu DPA sebesar 101.395.500	

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																							
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100				16		17	
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							4	Paket	144.327.400	1	23.595.800	1	14.402.000	-	-	-	-	**2**	**37.997.800**	**50**	**26,3**	**2**	**37.997.800**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**							Nilai pagu DPA sebesar 92.652.900	

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV														
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		17		
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						2	Paket	182.820.000	-	1.980.000	1	11.250.000	-	-	-	-	**1**	**13.230.000**	**50**	**7,24**	**1**	**13.230.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				Nilai pagu DPA sebesar 64.455.000	

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																							
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100				16		17											
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							4	Paket	224.333.700	1	50.703.540	1	17.005.400	-	-	-	-	**2**	**67.708.940**	**50**	**30,2**	**2**	**67.708.940**	**#DIV/0!**		**#DIV/0!**										Nilai pagu DPA sebesar 123.425.800	

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV															
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							1	Dokumen	63.000.000	-	3.000.000	-	4.500.000	-	-	-	-	**-**	**7.500.000**	**0**	**11,9**	**-**	**7.500.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				Nilai pagu DPA sebesar 47.000.000

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV															
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16	17
							Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							12	Laporan	123.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Refocusing	

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		17	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12	Laporan	1.923.081.000	3	287.414.660	3	86.068.982	-	-	-	-	**6**	**373.483.642**	**50**	**19,4**	**6**	**373.483.642**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Nilai pagu DPA sebesar 638.172.000	

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV														
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.			
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100	%				100	%	552.817.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**	-	-		**0**	**#DIV/0!**				

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																		
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17		
							Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							57	Unit	552.817.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**					Refocusing		

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17			
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90	%				90	%	784.745.890	25	339.866.610	25	273.029.186	-	-	-	-	**50**	**612.895.796**	**55,5556**	**78,1**	**50**	**612.895.796**	**55,5556**	**#DIV/0!**						

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV															
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		17	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12	Laporan	429.173.250	3	63.757.212	3	65.837.868	-	-	-	-	**6**	**129.595.080**	**50**	**30,2**	**6**	**129.595.080**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Nilai pagu DPA sebesar 411.535.065	

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV														
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.				
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		17
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	355.572.640	3	276.109.398	3	207.191.318	-	-	-	-	**6**	**483.300.716**	**50**	**136**	**6**	**483.300.716**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Nilai pagu DPA sebesar 948.194.792	

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV															
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik	90	%					90	%	1.274.366.000	26	172.124.200	29	397.624.938	-	-	-	-	**54**	**569.749.138**	**60,0907**	**44,7**	**54**	**569.749.138**	**60,0907**	**#DIV/0!**				

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																					
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100				16		17	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasio	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharа dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						43	Unit	451.680.000	7	92.375.000	7	99.190.865	-	-	-	-	**14**	**191.565.865**	**32,5581**	**42,4**	**14**	**191.565.865**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Nilai pagu DPA sebesar 455.440.000	

No	Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																I		II		III		IV															
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2							3	4	5				6		7				8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16	17
								nal atau Lapangan																															

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							50	Unit	124.630.000	18	36.770.000	18	25.890.000	-	-	-	-	**36**	**62.660.000**	**72**	**50,3**	**36**	**62.660.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Nilai pagu DPA sebesar 124.630.000	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan							5	Unit	698.056.000	-	42.979.200	3	272.544.073	-	-	-	-	**3**	**315.523.273**	**60**	**45,2**	**3**	**315.523.273**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Nilai pagu DPA sebesar	

No	Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																I		II		III		IV															
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2							3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16	17
								Kantor dan Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																													319.966.000	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																					
Predikat kinerja																																					

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV														
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17
							PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	***Persentase Peningkatan IKM yang produktif***	**4,00**	**%**				**4,00**	**%**	**685.694.000**	**-**	**179.845.000**	**-**	**56.689.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**236.534.000**	**0**	**34,5**	**-**	**236.534.000**	**0**	**#DIV/0!**				

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV														
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.				
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17
							Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri yang menerapkan standart produk	20,00	%				20,00	%	685.694.000	-	179.845.000	-	56.689.000	-	-	-	-	**-**	**236.534.000**	**0**	**34,5**	**-**	**236.534.000**		**0**	**#DIV/0!**				

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV														
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17
							Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				3	Dokumen	233.672.000	3	137.600.000	-	-	-	-	-	-	**3**	**137.600.000**	**100**	**58,9**	**3**	**137.600.000**	**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		Dinkumdagin		Nilai pagu DPA sebesar 143.720.000	

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV																
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17
							Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran						7	Dokumen	452.022.000	1	42.245.000	2	56.689.000	-	-	-	-	**3**	**98.934.000**	**42,8571**	**21,9**	**3**	**98.934.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinkumdagin	Nilai pagu DPA sebesar 136.130.500

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																I		II		III		IV															
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17
							Masyarakat	Serta Masyarakat																														

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV																	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17			
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																															
Predikat kinerja																															

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																		I		II		III		IV														
									K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16		17
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	***Persentase Jumlah perusahaan yang berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)***	**27,61**	**%**				**27,61**	**%**	**100.000.000**	-	-		-		-		-	-	-	**0**	**0**	-	-		**0**	**#DIV/0!**				

					Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Perusahaan yang sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*	11,80	%					11,80	%	100.000.000	-	-		-		-		-	-	-	**0**	**0**	-	-	**0**	**#DIV/0!**		

| | | |

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV															
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		16		17
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																															
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																															

2.1.1. Urusan Koperasi dan UMKM

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggoataan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
   1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, dengan uraian sebagai berikut:
   (1) Pelatihan Perkoperasian 2 Angkatan (Pokir Bogor Tengah)

   Maksud dan Tujuan dilaksanakannya Pelatihan Perkoperasian 2 Angkatan (Pokir Bogor Tengah) adalah Memperkuat pemahaman tentang Perkoperasian bagi anggota masyarakat serta meningkatkan pemahaman kepada anggota masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Perkoperasian 2 Angkatan (Pokir Bogor Tengah) adalah anggota masyarakat Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah, sebanyak 150 orang anggota masyarakat, dengan Peserta Kegiatan Pelatihan Perkoperasian 2 Angkatan (Pokir Bogor Tengah) ini adalah 150 orang anggota masyarakat Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah. Narasumber Kegiatan Pelatihan Perkoperasian 2 Angkatan (Pokir Bogor Tengah) adalah dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dan Lapenkop Nasional Kegiatan Pelatihan Perkoperasian dilaksanakan pada:

   Hari : Senin-Kamis
   Tanggal : 8-11 Januari 2024
   Tempat : Rizen Padjajaran Hotel
   Jl. Bina Marga II, Bogor

   (2) Pelatihan Perkoperasian 2 Angkatan (Pokir Bogor Utara)

   Maksud dan Tujuan dilaksanakannya Pelatihan Perkoperasian 2 Angkatan (Pokir Bogor Utara) adalah Memperkuat pemahaman tentang Perkoperasian bagi anggota masyarakat serta meningkatkan pemahaman terkait Perkoperasian kepada anggota masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Perkoperasian 2 Angkatan (Pokir Bogor Utara) adalah anggota masyarakat Kelurahan Cibuluh Kecamatan Bogor Utara, sebanyak 120 orang anggota

masyarakat. Narasumber Kegiatan Pelatihan Perkoperasian 2 Angkatan (Pokir Bogor Utara) adalah dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dan Lapenkop Nasional. Peserta Kegiatan Pelatihan Perkoperasian 2 Angkatan (Pokir Bogor Utara) ini adalah 120 orang anggota masyarakat Kelurahan Cibuluh Kecamatan Bogor Utara.

Kegiatan Pelatihan Perkoperasian dilaksanakan pada:

Hari : Selasa-Rabu
Tanggal : 23-24 Januari 2024
Tempat : Rizen Padjajaran Hotel
Jl. Bina Marga II, Bogor

(3) Pelatihan Perkoperasian (Pokir Bogor Barat)

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya Pelatihan Perkoperasian (Pokir Bogor Barat) adalah Memperkuat pemahaman tentang Perkoperasian bagi anggota masyarakat serta meningkatkan pemahaman kepada anggota masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Perkoperasian (Pokir Bogor Barat) adalah anggota masyarakat Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat, sebanyak 45 orang anggota masyarakat. Narasumber Kegiatan Pelatihan Perkoperasian (Pokir Bogor Barat) adalah dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dan Lapenkop Nasional. Peserta Kegiatan Pelatihan Perkoperasian (Pokir Bogor Barat) ini adalah 45 orang anggota masyarakat Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat.

Kegiatan Sosialisasi Perkoperasian KPEK Semplak dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Waktu : 17 Januari 2024
Tempat : Rizen Padjajaran Hotel Jl. Bina Marga II, Bogor

(4) Study Tiru (Pokir Bogor Tengah)

Maksud dan tujuan diadakannya Study Tiru ini adalah:

a) Agar peserta dapat menambah Wawasan dan Pengetahuan tentang Perkoperasian
b) Mampu Mensosialisasikan dan Mengapresiasikan Kemajuan yang Diperoleh dari Study Tiru di masyarakat Kelurahan Babakan Pasar, Bogor Tengah.
c) Agar peserta dapat mencontoh tentang kemajuan dan perkembangan koperasi yang ada di DI Yogyakarta.

d) Membentuk kader koperasi yang tangguh dan berdedikasi tingggi terhadap insan koperasi.

Peserta Study Tiru Tahun 2024 adalah 25 (Dua puluh lima) orang, dengan 17 (Tujuh Belas) orang dari masyarakat Kelurahan Babakan Pasar, Bogor Tengah dan 8 (Delapan) dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Hari/ Tanggal : Jumat s/d Senin, 12 - 15 Januari 2024

Tempat :

1. Dinas Koperasi dan UKM DI Yogyakart
   Jl. HOS Cokroaminoto No.162, Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta
2. Koperasi Pasar Gemah Ripah Jalan Wates KM.5, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta.

(5) Study Tiru (Pokir Bogor Barat)

Maksud dan tujuan diadakannya Study Tiru ini adalah:

a) Agar peserta dapat menambah Wawasan dan Pengetahuan tentang Perkoperasian
b) Mampu Mensosialisasikan dan Mengapresiasikan Kemajuan yang Diperoleh dari Study Tiru di masyarakat Kelurahan Bubulak, Bogor Barat.
c) Agar peserta dapat mencontoh tentang kemajuan dan perkembangan koperasi yang ada di Pangandaran.
d) Membentuk kader koperasi yang tangguh dan berdedikasi tingggi terhadap insan koperasi.

Peserta Study Tiru Tahun 2024 adalah 27 (Dua puluh tujuh) orang, dengan 19 (Sembilan Belas) orang dari masyarakat Kelurahan Bubulak, Bogor Barat dan 8 (delapan) dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal :Kamis s/d Sabtu, 18 - 20 Januari 2024

Tempat : Koperasi Unit Desa (KUD) ”MINARASA”
Jl. Pantai Batukaes Desa Batukaras
Kab. Pangandaran Provinsi Jawa Barat

(6) Study Tiru (Pokir Bogor Utara)

Maksud dan tujuan diadakannya Study Tiru ini adalah:

a) Agar peserta dapat menambah Wawasan dan Pengetahuan tentang Perkoperasian

b) Mampu Mensosialisasikan dan Mengapresiasikan Kemajuan yang Diperoleh dari Study Tiru di masyarakat Kelurahan Cibuluh, Bogor Utara.

c) Agar peserta dapat mencontoh tentang kemajuan dan perkembangan koperasi yang ada di Garut.

d) Membentuk kader koperasi yang tangguh dan berdedikasi tingggi terhadap insan koperasi.

Peserta Study Tiru Tahun 2024 adalah 39 (Tiga puluh Sembilan) orang, dengan 31 (Tiga Puluh Satu) orang dari masyarakat Kelurahan Cibuluh, Bogor Utara dan 8 (Delapan) dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal :Kamis s/d Sabtu, 25 - 27 Januari 2024

Tempat : Koperasi Unit Desa (KUD) Bayongbong
Jl. Raya Bayongbong, Kabupaten Garut

(7) Sosialisasi Perkoperasian di Wilayah (Musrenbang)

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Perkoperasian Di Wilayah (Musrenbang):

1. Meningkatkan pemahaman, wawasan dan pengetahuan tentang Perkoperasian di wilayah.
2. Untuk mendidik dan menambah kesadaran masyarakat di wilayah menjadi anggota Koperasi.
3. Menghindari Praktek Bank Keliling, Bank emok, dan Pinjaman Online.
4. Menghidupkan kembali keberadaan KPEK di tiap-tiap wilayah Kelurahan.

Kegiatan Sosialisasi Perkoperasian Di Wilayah (Musrenbang) dilaksanakan pada:

No	Hari/Tanggal/Jam	Kelurahan	Tempat
1	Senin, 10 Juni 2024 Jam 08.30 s.d 11.30	Kelurahan Panaragan (Bogor Tengah)	Aula Kelurahan Panaragan
	Senin, 10 Juni 2024 Jam 13.00 s.d 16.00	Kelurahan Semplak (Bogor Barat)	Aula Kelurahan Semplak

No	Hari/Tanggal/Jam	Kelurahan	Tempat
2	Selasa, 11 Juni 2024 Jam 08.30 s.d 11.00	Kelurahan Empang (Bogor Selatan)	Aula Kelurahan Empang

Narasumber Kegiatan Sosialisasi Perkoperasian di Wilayah (Musrenbang) adalah dari DPRD Kota Bogor dan Lembaga Pendidikan Perkoperasian Nasional.

Peserta Kegiatan Sosialisasi Perkoperasian di Wilayah (Musrenbang) ini adalah di 3 Kelurahan, Kelurahan Panaragan sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) orang Peserta, Kelurahan Semplak sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) orang peserta, Kelurahan Empang sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) orang peserta yang terdiri dari:

- Pengurus dan Anggota Koperasi
- Ketua RT, RW dan Tokoh Masyarakat
- ASN Kelurahan

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota

   1.1. Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undang Kewenangan Kabupaten/ Kota, dapat diuraikan sebagai berikut:

   1) Sosialisasi Peraturan Walikota Bogor tentang Perkoperasian di Kota Bogor

      Tujuan Sosialisasi Peraturan Perkoperasian, Kepatuhan Hukum dan Penerapan Sanksi di Kota Bogor:

      1. Meningkatnya kualitas dan kapasitas dalam mengelola koperasi terhadap regulasi tentang regulasi perkoperasian
      2. Memberikan pemahaman dan menciptakan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan koperasi serta memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi
      3. Memberikan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro.

Sasaran dari kegiatan Sosialisasi Peraturan Walikota Bogor tentang Perkoperasian adalah Pengurus dan Pengawas Koperasi sebanyak 100 Orang, terdiri dari Koperasi TNI, Koperasi POLRI, Koperasi Karyawan, Koperasi Pegawai Republik Indonesia, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Syariah, Koperasi Konsumen, Koperasi Masyarakat, Koperasi Pasar dan Koperasi yang beranggotakan UMKM Kota Bogor. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Walikota Bogor tentang Perkoperasian dihadiri oleh 100 (Seratus) Orang Pengurus atau Pengawas Koperasi,

kegiatan Sosialisasi Peraturan Walikota Bogor tentang Perkoperasian dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Waktu : 22 Mei 2024
Tempat : Ruang Rapat Paseban Sri Baduga
Balaikota Bogor
Jl. Ir. H. Juanda No. 10, Kelurahan Pabaton

Narasumber kegiatan Sosialisasi Peraturan Walikota Bogor tentang Perkoperasian berasal dari Lapenkopnas, DPRD Kota Bogor, Dekopinda Kota Bogor, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, dan Kepala Bidang Koperasi dengan materi sebagai berikut:

a) Sosialisasi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK);
b) Sosialisasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi; dan
c) Sosialisasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 49 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro.

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan

dan Koordinasi dengan Para Pemagku Kepentingan, didukung dengan beberapa Kegiatan sebagai berikut:

1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Digital (Pokir)

Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis, perusahaan berlomba-lomba meningkatkan kualitasnya untuk mencapai tujuan keuntungan/laba semaksimal mungkin. Begitupun dalam penumbuhan Usaha Mikro tentunya banyak faktor yang mengakibatkan Usaha Mikro dapat naik kelas atau tidak. Naik kelas dalam arti Usaha Mikro tersebut mempunyai kompetensi dan kualitas produk yang bisa bersaing di pasar global. Usaha Mikro harus bisa berinovasi dan berkolaborasi dalam meningkatkan skala usahanya. Dalam perjalanannya tentunya banyak kendala yang dihadapi. Perkembangan teknologi sangat cepat seiring dengan kebutuhan akan informasi dan pertumbuhan tingkat kecerdasan manusia. Saat ini telah banyak sistem informasi yang digunakan untuk menunjang dan menyelesaikan suatu permasalahan yang biasanya timbul dalam suatu organisasi, perusahaan atau instansi pemerintahan.Tentunya kedepan dengan memahami teknologi, Usaha Mikro dapat bersinergi dengan UMKM di Indonesia sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan Usaha Mikro untuk bisa bersaing dipasar global. Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Digital diharapkan dapat mendorong Usaha Mikro untuk mengembangkan usahanya.

(a) Maksud dan Tujuan

- Para Pelaku Usaha Mikro Melek Teknologi
- Mampu berinovasi dan mendukung produktivitas serta meningkatkan daya saing
- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

(b) Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Digital selama 1 (satu) hari pada:

Har /Tanggal : Selasa, 23 Januari 2024
Waktu : 08.00 s.d Selesai
Tempat : Hotel Rizen Padjajaran
Jl. Bina Marga II Kota Bogor

(c) Peserta

Peserta Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Digital bagi UMKM ini adalah UMKM Kota Bogor berjumlah sebanyak 60 (enam puluh) orang.

(2) Pelatihan Pemberdayaan UMKM (Pokir)

Dalam rangka pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan produktivitas Usaha Mikro yang memiliki peran sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional. Meskipun dari segi kuantitas perkembangan UMKM cukup signifikan, namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar keberadaannya dapat lebih solid dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Sebagai unit usaha yang jumlahnya paling besar UMKM dirasakan masih belum mampu memenuhi harapan yang diinginkan untuk menjadi salah satu pemain penting dalam penciptaan pasar baru bagi produk-produk unggulan Kota Bogor. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya secara komprehensif dan berkesinambungan untuk makin meningkatnya produktivitas UMKM. Pelatihan Pemberdayaan bagi UMKM akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya saing, pertumbuhan, dan peningkatan produksi bagi UMKM.

Maksud dan Tujuan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan UMKM adalah:

• Terciptanya Usaha Unggulan di Kota Bogor

• Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan UMKM (Pokir) dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Januari 2024

Waktu : 08.00 s.d selesai

Tempat: Hotel Rizen Padjajaran Jl. Bina Marga IIBogor

Peserta Pelatihan Pengembangan UMKM ini adalah UMKM Kota Bogor berjumlah sebanyak 80 (delapan puluh) orang.

(3) Pelatihan Pengembangan UMKM (Pokir)

Maksud dan Tujuan

• Memberikan semangat dan motivasi UMKM

• Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Kegiatan Pelatihan Pengembangan UMKM ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Januari 2024
Waktu : 08.00 s.d selesai
Tempat : Hotel Rizen Padjajaran Jl. Bina Marga II Bogor

Peserta Pelatihan Pengembangan UMKM ini adalah UMKM Kota Bogor berjumlah sebanyak 100 (seratus) orang.

(4) Pelatihan Pemasaran Bagi UMKM (Musrenbang)

Maksud dan Tujuan

- Meningkatnya daya saing, kualitas, kreativitas, dan kapasitas produksi UMKM yang mengikuti pelatihan
- Peningkatan nilai tambah suatu produk
- mengkomunikasikan tentang informasi produk yang di hasilkan kepada konsumen, mulai dari kelebihannya, fitur serta berbagai informasi detail tentang produk.
- Mempunya strategi harga, strategi produk dan strategi promosi.
- Memberikan semangat dan motivasi UMKM
- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Kegiatan Pelatihan Pemasaran bagi UMKM ini di bagi 2 (dua) angkatan, dilaksanakan selama 1 (satu) hari setiap angkatannya, pada:

1. Angkatan Pertama
   Hari/Tanggal: Kamis, 20 Juni 2024
   Waktu : 08.00 Wib s/d selesai
   Tempat : Aula Kantor Kecamatan Bogor utara
   Jl. Gagalur Raya No. 02 tegalgundil Bogor
2. Angkatan kedua
   Hari/Tanggal: Senin, 24 Juni 2024
   Waktu : 08.00 Wib s/d selesai
   Tempat : Aula Kantor kecamatan Bogor Barat
   Jl. KH Tb Palak No. 319 Bogor

Peserta Pelatihan Pemasaran #Musrenbang berjumlah 216 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Angkatan Pertama sebanyak 111 orang, terdiri dari:

- Kelurahan Cibogor, 24 orang
- Kelurahan Sindangsari, 7 orang
- Kelurahan Baranangsiang, 50 orang
- Kelurahan Cibuluh, 30 orang

Angkatan Kedua sebanyak 105 orang, terdiri dari:

- Kelurahan Curug Mekar, 15 orang

- Kelurahan Cilendek Barat, 30 orang
- Kelurahan Gunung Batu, 10 orang
- Kelurahan Semplak, 20 orang
- Kelurahan Kayumanis, 30 orang

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil

   1.1. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi, yang dapat di uraikan sebagai berikut:

   (1) Pelatihan Teknologi Terapan Untuk UMKM dan Kewirausahaan

   Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis, perusahaan berlomba-lomba meningkatkan kualitasnya untuk mencapai tujuan keuntungan/laba semaksimal mungkin. Begitupun dalam penumbuhan Usaha Mikro tentunya banyak faktor yang mengakibatkan Usaha Mikro dapat naik kelas atau tidak. Naik kelas dalam arti Usaha Mikro tersebut mempunyai kompetensi dan kualitas produk yang bisa bersaing di pasar global. Usaha Mikro harus bisa berinovasi dan berkolaborasi dalam meningkatkan skala usahanya. Dalam perjalanannya tentunya banyak kendala yang dihadapi.Perkembangan teknologi sangat cepat seiring dengan kebutuhan akan informasi dan pertumbuhan tingkat kecerdasan manusia. Saat ini telah banyak sistem informasi yang digunakan untuk menunjang dan menyelesaikan suatu permasalahan yang biasanya timbul dalam suatu organisasi, perusahaan atau instansi pemerintahan.Tentunya kedepan dengan memahami teknologi, Usaha Mikro dapat bersinergi dengan UMKM di Indonesia sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan Usaha Mikro untuk bisa bersaing dipasar global.Pelatihan Teknologi Terapan untuk UMKM dan Kewirausahaan diharapkan dapat mendorong Usaha Mikro untuk mengembangkan usahanya.

   Maksud dan Tujuan

- Para Pelaku Usaha Mikro dapat memahami teknologi yang mudah dan murah untuk mendukung usahanya
- Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kewirausahaan
- Mampu berinovasi dan mendukung produktivitas serta meningkatkan daya saing
- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Kegiatan Pelatihan Teknologi Terapan untuk UMKM dan Kewirausahaan diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada:
Hari / Tanggal : Senin - Selasa, 29 – 30 Mei 2024
Waktu : 08.00 s.d selesai
Tempat : Majlis Raudatul Atfal Kel. Cimahpar BoUt
Peserta kegiatan ini adalah para pengusaha mikro Kota Bogor, pada hari pertama berjumlah sebanyak 60 (enam puluh) orang dan pada hari kedua berjumlah 20 (dua puluh) orang.

(2) Pelatihan Teknologi Terapan Untuk UMKM dan Kewirausahaan Angkatan kedua

1. Maksud dan Tujuan
   - Para Pelaku Usaha Mikro dapat memahami teknologi yang mudah dan murah untuk mendukung usahanya
   - Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kewirausahaan
   - Mampu berinovasi dan mendukung produktivitas serta meningkatkan daya saing
   - Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

2. Kegiatan Pelatihan Teknologi Terapan untuk UMKM dan Kewirausahaan angkatan kedua diselenggarakan selama 1 (satu) hari pada:
   Hari / Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
   Waktu : 08.00 s.d selesai
   Tempat : DinKUKMDagin Kota Bogor (Mako 2)
   Jl. Dadali II No. 3 Kota Bogor

Peserta kegiatan ini adalah para pengusaha mikro di dalam zona PKL Kota Bogor, berjumlah sebanyak 65 (enam puluh lima) orang.

2.1.2. Urusan Perdagangan

Program Peningkatan Sarana Distribusi

Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.
   1.1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dapat diuraikan sebagai berikut:
      (1) Sosialisasi Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

      Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini antara lain:
      - Meningkatkan presentase pelaku usaha sektor perdagangan yang memahami regulasi;
      - Meningkatkan Presentase Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan.

      Waktu Pelaksanaan
      Hari : Jumat
      Tanggal : 19 Januari 2024
      Tempat : Rizen Hotel, Jl. Binamarga II, Kota Bogor

      Peserta Sosialisasi Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebanyak 42 Peserta dari Pelaku Usaha Hotel dan 3 Peserta dari Distributor di wilayah Kota Bogor.

      Narasumber pada kegiatan ini dari Kementerian Perdagangan RI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Anggota IAI.

Program Stabilitasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

1.1. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegritasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Dalam Sub Kegiatan ini, tidak adanya dukungan anggaran dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA), sehingga Tahun 2024 terkait dengan penambahan database pedagang pasar belum bisa dilakukan kembali terhadap pasar-pasar lainnya. Namun secara tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pemantauan harga barang kebutuhan pokok di 2 (dua) Pasar Pantauan tetap dilakukan. Dalam mengakomodir Tugas dan Fungsi daripada urusan bidang perdagangan yang dipertegas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, instansi yang membidang perdagangan tugas pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota, dilakukan Pemantauan, Verifikasi dan Pelaporan secara rutin. Pemantauan Harga Barang kebutuhan Pokok dalam rangka Early Warning System, dimana untuk mengetahui harga hari sebelumnya dibandingkan dengan harga saat ini, sehingga dapat terlihat trend secara mingguan, bulanan dan pada saat hari-hari besar. Kemudian, Hasil dari Pemantauan harga tersebut dapat dijadikan untuk mengambil kebijakan dan keputusan di Tingkat Pemangku Kepentingan berdasarkan Analisa-analisa yang dapat dilakukan, seperti analisa Kuantitatif dan Analisa Kualitatif.

Pemantauan, Verifikasi dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dilakukan di Lokasi 2 (dua) Pasar Pantauan di Kota Bogor yaitu Pasar Kebon Kembang dan Pasar Baru Bogor. Pemantauan, Verifikasi dan Pelaporan Harga pada Triwulan 1 (Periode Januari s/d Maret) Tahun 2024 dilakukan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali dan menghasilkan laporan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) laporan. Verifikasi dilakukan setiap hari kerja, hasil laporan diinput kedalam sistem/aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan RI, Aplikasi Silinda Jabar yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian dilaporkan juga kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor, Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) Kota Bogor, Badan Intelijen Negara, Intel Polri dan TNI. Sedangkan target jumlah laporan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dalam rencana strategis Tahun 2024 sebanyak 150 (seratus lima puluh) laporan.

1.2. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Dalam Sub Kegiatan ini, pada Tahun 2024 tidak adanya dukungan anggaran dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA).

1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Operasi Pasar Murah (OPM) Bersubsidi

Kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) Bersubsidi menjelang hari raya lebaran, dimana terlaksana berkat Kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor. Kegiatan OPM Bersubsidi ini dilakukan sebanyak 1 (Satu) kali setiap tahunnya, sedangkan di Kota Bogor dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 04 April 2024. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat memberikan subsidi pembelian paket sembako yang diperuntukkan penjualannya kepada masyarakat Kota Bogor, kemudian agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses Dinas yang membidangi perdagangan Kota Bogor biasa dan rutin menyediakan dana pendamping. Dana Pendamping yang disediakan oleh Dinas sebesar Rp.32.754.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah). Penjelasan terkait kegiatan tersebut, sebagai berikut:

1) Sasaran Penerima

   Sasaran penerima adalah masyarakat di kota bogor dengan kuota sebanyak 5.372 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua) paket, yang disalurkan di 2 (dua) titik lokasi sesuai permintaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, sedangkan di kota bogor telah ditentukan lokasinya di kecamatan bogor utara dan kecamatan tanah sareal.

   Pembagian kuota yang disalurkan sebagai berikut:

   a) Kecamatan Bogor Utara sebanyak 2.686 paket;
   b) Kecamatan Tanah Sareal sebanyak 2.686 paket.

   Yang disalurkan secara kolektif oleh Pihak Kecamatan dan Kelurahan setempat.

2) Jenis Komoditas

   Adapun komoditas tersebut terdiri dari:

   a) Beras Premium, 5 kg;
   b) Gula Pasir, 2 kg;
   c) Minyak Goreng, 2 liter.

3) Biaya Subsidi dan Penetapan Harga Penjualan

Total Nilai Paket adalah Rp. 146.700,- / paket

Biaya subsidi yang diputuskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, adalah:

a. Beras 5 kg, subsidi sebesar Rp. 23.000,-
b. Gula Pasir 2 kg, subsidi Rp. 14.700,-
c. Minyak Goreng, subsidi Rp. 8.000,-
d. Total Subsidi Rp. 45.700,-. Sedangkan, Nilai Penjualan Rp. 101.000,- / paket.

4) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan di Kota Bogor, sebagai berikut:

- Pendistribusian ke Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Tanah Sareal pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024;
- Pelaksanaan OPM secara Simbolis dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Setda Kota Bogor di Kantor Kecamatan Bogor Utara.

Tempat pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) Bersubsidi di Kota Bogor dilaksanakan di 2 (dua) titik lokasi, yaitu:

NO	Nama Tempat	Alamat
1.	Kecamatan Bogor Utara	Jl. Gagalur I No. 2, Kel. Tegal Gundil
2.	Kecamatan Tanah Sareal	Jl. Kb. Pedes No.20, RT.04/RW.03, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor

1). Kerjasama dengan Bulog Cabang Bogor (tidak adanya dukungan anggaran)

Untuk melaksanakan Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok khususnya pada komoditi Beras SPHP dengan penjualan secara langsung kepada masyarakat dengan harga dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini dilakukan dalam rangka antisipasi kenaikan harga beras yang diakibatkan elnino (musim hujan dan phenomena elnino) mengganggu masa tanam disentra produksi dan juga sebagai langkah intevensi Pemerintah Daerah membantu meringankan beban masyarakat. Kerjasama dengan Bulog Cabang Bogor Dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) kali. Adapun tanggal pelaksanaannya, sebagai berikut:

- Hari Selasa, 20 februari 2024, Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara;

- Hari Rabu, 21 februari 2024, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur;
- Hari Kamis, 22 februari 2024, Kel. Margajaya, Kec. Bogor Barat;
- Hari Jumat, 23 februari 2024, Kel. Kedung Badak RW.04, Kel. Tanah Sareal;
- Hari Senin, 26 februari 2024, Kel. Gunung Batu, Kec. Bogor Barat;
- Hari Selasa, 27 februari 2024, Kel. Loji Kec. Bogor Barat;
- Hari Rabu, 28 februari 2024, Kel. Kayumanis (lapangan tansar), Kec. Tanah Sareal;
- Hari Kamis, 29 februari 2024, Kel. Kertamaya, Kec. Bogor Selatan;
- Hari Jumat, 01 Maret 2024, Kec Bogor Selatan;
- Hari Senin, 04 Maret 2024, Kel. Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan;
- Hari Selasa, 05 Maret 2024, Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara;
- Hari Rabu, 06 Maret 2024, Kel Sukadamai, Kec. Tanah Sareal;
- Hari Kamis, 07 Maret 2024, Kel. Sempur, Kec. Bogor Tengah;
- Hari Jumat, 08 Maret 2024, Kel. Kebon Kalapa, Kec. Bogor Tengah.

2). Kerjasama dengan GS The Fresh (tidak adanya dukungan anggaran)

Pelaksanaan Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok dan Rumah Tangga dengan penjualan secara langsung kepada masyarakat dengan harga dibawah Harga Pasar atau Ritel. Hal ini dilakukan dalam rangka antisipasi kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan juga sebagai langkah intevensi Pemerintah Daerah membantu meringankan beban masyarakat dari kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok dan rumah tangga. Dilaksanakan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali. Adapun tanggal pelaksanaannya, sebagai berikut:

1	Hari Rabu, 13 Maret 2024	Kel. Menteng, Kec. Bogor Barat
2	Hari Jumat, 15 Maret 2024	Kel. Loji, Kec. Bogor Barat
3	Hari Senin, 18 Maret 2024	Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur
4	Hari Rabu, 20 Maret 2024	Kel. Sindangrasa, Kec. Bogor Timur
5	Hari Jumat, 22 Maret 2024	Kel. Rancamaya, Kec. Bogor Selatan
6	Hari Selasa, 26 Maret 2024	Kel. Cibogor, Kec. Bogor Tengah
7	Hari Rabu, 27 Maret 2024	Kel. Ciparigi, Kec. Bogor Utara
8	Hari Senin, 01 April 2024	Kel. Panaragan, Kec. Bogor Tengah

9	Hari Rabu, 03 April 2024	Kel. Tanah Sareal, Kec. Tanah Sareal
10	Hari Senin, 13 Mei 2024	Kel. Sempur, Kec. Bogor Tengah
11	Hari Rabu, 15 Mei 2024	Kel. Situgede, Kec. Bogor Barat
12	Hari Senin, 17 Mei 2024	Kel. Gunung Batu, Kec. Bogor Barat
13	Hari Selasa, 21 Mei 2024	Kel. Bubulak, Kec. Bogor Barat
14	Hari Rabu, 22 Mei 2024	Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Barat
15	Hari Senin, 27 Mei 2024	Kel. Ciluar, Kec. Bogor Utara
16	Hari Selasa, 28 Mei 2024	Kel. Bojong Kerta, Kec. Bogor Selatan
17	Hari Kamis, 30 Mei 2024	Kel. Harjasari, Kec. Bogor Selatan
18	Hari Jumat, 31 Mei 2024	Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal
19	Hari Rabu, 5 juni 2024	Kel. Mekarwangi, Kec. Tanah Sareal
20	Hari Kamis, 6 Juni 2024	Kel. Kedung Jaya, Kec. Tanah Sareal
21	Hari Senin, 10 Juni 2024	Kel. Ciwaringin, Kec. Bogor Tengah
22	Hari Selasa, 11 Juni 2024	Kel Babakan, Kec. Bogor Tengah
23	Hari Kamis, 13 Juni 2024	Kel. Kedunghalang, Kec. Bogor Utara;
24	Hari Jumat, 14 Juni 2024	Kel. Sindangrasa, Kec. Bogor Timur

Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

   1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dapat diuraikan sebagai berikut:

   Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kewenangan penyelenggaraan urusan metrologi legal yaitu tera, tera ulang dan pengawasan menjadi kewenangan kabupaten/kota sehingga bagi masing-masing kabupaten/kota menjadi wajib (bersifat mandatory)

untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Di Kota Bogor urusan mengenai Kemetrologian dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Bogor dalam upaya memberikan Pelayanan Kemetrologian kepada masyarakat. Pelayanan Kemetrologian di Kota Bogor terdiri dari Pelayanan Tera maupun Pelayanan Tera Ulang UTTP (Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya). Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang terdiri dari:

1) Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP di 68 Kelurahan

Pada Januari s/d Maret Tahun 2024 untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP di 68 Kelurahan baru dilaksanakan di Kecamatan Bogor Tengah selama 1 (satu) hari masing-masing kelurahan dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	JUMLAH UTTP	JUMLAH WAKTU
1	**KECAMATAN BOGOR TENGAH**			
	Kelurahan Gudang	06 Mei 2024	132	50
	Kelurahan Babakan	07 Mei 2024	23	13
	Kelurahan Babakan Pasar	08 Mei 2024	41	9
	Kelurahan Paledang	13 Mei 2024	41	11
	Kelurahan Panaragan	14 Mei 2024	72	22
	Kelurahan Kebon Kelapa	15 Mei 2024	48	13
	Kelurahan Ciwaringin	16 Mei 2024	34	9
	Kelurahan Cibogor	17 Mei 2024	40	14
	Kelurahan Pabaton	20 Mei 2024	28	9
	Kelurahan Sempur	21 Mei 2024	22	9
	Kelurahan Tegalega	22 Mei 2024	22	10
JUMLAH			**503**	**169**

2) Pelayanan Ter/Tera Ulang UTTP di 8 Pasar Taradisional

No.	Lokasi Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah UTTP yang di tera/tera ulang	Jumlah Waktu
1.	Pasar Baru Bogor	17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 dan 26 April 2024	407	77
2.	Pasar Padasuka	02 dan 03 Mei 2024	45	8
3.	Pasar Merdeka	03, 04, 05, 06, 07 dan 10 Juni 2024	155	65

3) Selain Pelayanan di Kelurahan dan Pasar Tradisional, UPTD Metrologi Legal Kota Bogor melaksanakan Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP di kantor, di luar kantor dan di tempat UTTP terpakai, tempat UTTP terpasang tetap, gudang importir, pabrik, atau laboratorium lain. Total keseluruhan jumlah UTTP yang telah dilaksanakan mulai Bulan April s.d Juni 2024 sejumlah 10.247 UTTP/289 WTU, untuk wilayah Kota Bogor sejumlah 1.603 UTTP/277 WTU.
4) Pelaksanaan Verifikasi standar ukuran merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pada setiap tahunnya pada peralatan yang digunakan di unit Metrologi Legal. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penera/ pranata laboratorium untuk memastikan standar ukuran mampu tertelusur secara kemetrologian dan memenuhi syarat teknis. Syarat teknis ini meliputi syarat administrasi terdiri dari nama produsen, merek, tipe, kelas akurasi dan petunjuk penggunaan, spesifikasi teknis terdiri dari bahan standar ukuran, syarat kemetrologian terdiri dari ketidakpastian pengukuran, serta prosedur verifikasi standar ukuran. Dengan adanya kegiatan verifikasi ini, diharapkan UTTP yang ada di UPTD Metrologi Legal Kota Bogor dapat terverifikasi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat digunakan untuk melakukan pelayanan tera dan tera ulang di Kota Bogor secara optimal. Kegiatan verifikasi standar ukuran ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Verifikasi internal peralatan standar adalah cara membandingkan peralatan standar yang diuji oleh penera dengan peralatan standar ke tingkat yang lebih tinggi (Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan RI). Sedangkan verifikasi eksternal adalah dengan membawa peralatan yang akan diuji ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini ditujukan ke Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan RI.

   Pada Tahun 2024 UPTD Kota Bogor baru menganggarkan verifikasi peralatan standar yang dilakukan secara internal untuk Anak Timbangan Kelas M1 dengan kapasitas 20 mg s/d 10 kg berjumlah 62 unit.

5) Verifikasi Eksternal Peralatan Standar ke Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan IV (UPTP IV)/Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (Balai SNSU) Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan RI di Bandung. Verifikasi eksternal peralatan standar terhadap Anak Timbangan Kelas F1, F2, M1,

Bejana Ukur Standar Kelas III, Gelas Ukur, Labu Ukur, Bourje, Meter Kerja, Tongkat Ukur, Thermometer Gelas, Digital Thermometer, Analog Thermometer dan Digital Stopwatch sebanyak 49 Unit.

1.2. Sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sosialisasi Metrologi Legal di Wilayah Kota Bogor

Pertumbuhan UMKM yang demikian pesat dan memiliki peran sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional. Meskipun dari segi kuantitas perkembangan UMKM cukup signifikan, namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan pengetahuan tentang Ketentuan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Ukur, Takar, Timbang agar produk umkm dapat lebih terpercaya di segi Ukur, Takar, Timbangnya dan bermanfaat bagi UMKM. Sebagai unit usaha yang jumlahnya paling besar UMKM dirasakan masih belum mampu memenuhi harapan yang diinginkan untuk menjadi salah satu pemain penting dalam penciptaan pasar baru bagi produk-produk unggulan Kota Bogor. Seiring dengan pertumbuhan pasar, persaingan industry, dan kompetisi global, pelaku UMKM harus terus meningkatkan kompetensinya untuk mampu tumbuh dengan baik

Menyadari pentingnya Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal ini dan dalam rangka mendorong UMKM agar dapat Mengukurkur, Mentakar, Menimbang Produknya, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian melalui Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen memasukan kegiatan Sosialisasi Metrologi Legal.

Melalui Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Ketentuan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, serta Perlengkapannya (UTTP) ini, diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan Mengukurkur, Mentakar, Menimbang Produknya.

Untuk mendorong UMKM agar dapat memanfaatkan Ketentuan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, serta Perlengkapannya (UTTP) diperlukan dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Dan pada kesempatan ini kegiatan ini didukung oleh Kementrian Perdagangan.

Untuk itu agar UMKM Kota Bogor memahami tentang ketentuan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, serta Perlengkapannya (UTTP) ini, kami melaksanakan kegiatan Pelatihan Sosialisasi Metrologi Legal bagi UMKM Kota Bogor.

(a) Maksud dan Tujuan

Terciptanya UMKM Yang memahami tentang ketentuan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, serta Perlengkapannya (UTTP) ini, kami melaksanakan kegiatan Pelatihan Sosialisasi Metrologi Legal bagi UMKM Kota Bogor.

(b) Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Februari 2024
Waktu : 08.00 Wib s/d selesai
Tempat : Hotel Rizen Pajajaran Bogor
Jl. Bina Marga II Kota Bogor

(c) Peserta

Peserta Pelatihan Sosialisasi Metrologi Legal sebanyak 50 (Lima Puluh) orang.

- Merupakan anak muda dan Pelaku UMKM se-Kota Bogor.
- Persyaratan: KTP Kota Bogor dan Pelaku UMKM Kota Bogor

Program Pengembangan Ekspor

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   1.1. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, dapat diuraikan sebagai berikut:
      1) Monitoring dan Evaluasi Ke IKM

         Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha dan pemasaran, hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pemasaran selain pemasaran skala lokal, nasional maupun internasional serta untuk mengetahui potensi eksportir baru.

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
    1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Penggunaan Produk Dalam Negeri Tingkat Kabupaten/Kota, dengan uraian sebagai berikut:
        1) Pameran Innacraft Tahun 2024
            a. Dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 s.d 3 Maret 2024 bertempat di Jakarta Convention Center (JCC).
            b. Dalam kegiatan pameran yang terdiri dari 1.000 stand ini selain diikuti oleh hampir seluruh perwakilan Pemerintah dan Dekranasda Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, pengrajin binaan BUMN dan BUMD juga diikuti oleh para pelaku usaha kerajinan dan fashion unggulan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
            c. Dalam kesempatan Pameran Innacraf 2024 tersebut Pamerintah Kota Bogor melalui Dinkukmdagin dan Dekranasda Kota Bogor ikut serta dengan menempati 1 (satu) buah stand dengan special desain stand (seluruh stand dibangun mandiri) dengan menempati stand di nomor 112 yang berada di Hall B khusus untuk anjungan Provinsi Jawa Barat. Adapun para peserta pameran yang mengisi stand Kota Bogor terdiri dari 2 (dua) pelaku usaha kerajinan dan fashion unggulan binaan Dekranasda Kota Bogor yang sebelumnya telah dipilih dan dikurasi secara langsung oleh Ketua dan Tim Dekranasda Kota Bogor antara lain adalah:
                1. House Of Talitha (Tas)
                2. Simple Eight (Fashion)
            d. Kegiatan Pameran Innacraft 2024 dibuka secara langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia RI Bpk. Teten Masduki yang dihadiri oleh perwakilan pejabat dari masing-masing Provinsi, Kab/Kota serta Ketua Dekranasda di seluruh Indonesia.
            e. Dalam Pemeran Inacraft 2024 stand Kota Bogor menampilkan 2 jenis produk unggulan yang dipamerkan oleh para pengrajin yang ikut serta, beberapa produk yang ditampilkan adalah Baju dan Tas

f. Stand Kota Bogor juga merupakan salah satu stand yang banyak dikunjungi oleh pengunjung hal ini terlihat dari transaksi yang terjadi selama pameran dari seluruh pengrajin yang ikut serta tercatat jumlah total penjualan langsung selama 5 (lima) hari kegiatan sebesar ± Rp. 30.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dan ini belum termasuk dengan pesanan dari pihak buyer yang secara langsung memesan dan akan menghubungi para pengrajin pasca pameran.

2) Pameran Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB)

a. Kegiatan Pameran produk unggulan kabupaten/ kota se Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 28-30 Juni 2024 bertempat di bertempat di Trans Studio Mall Jl. Gatot Subroto No.289A Bandung;

b. Selain pameran juga dilaksanakan peragaan fashion show oleh kepala daerah kabupaten/ kota se – Jawa Barat dan Ketua Dekranasda Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat. Kegiatan Lomba Fashion Show oleh Kepala Daerah dan Ketua Dekranasda 27 kabupaten/kota se- Jawa Barat dilaksanakan tanggal 30 Juni 2024 bertempat di The Trans Luxury Hotel Jl. Gatot Subroto No.289 Bandung;

c. Pekan Kerajinan Jawa Barat berisikan Sinergi Memperkuat Ekonomi Hijau, Keuangan Digital, dan Inklusif serta Iklim Investasi Untuk Kemandirian Ekonomi Jawa Barat Yang Berkelanjutan;

d. Dalam kegiatan pameran PKJB tahun 2024 dipamerkan 40 stand terdiri dari 27 binaan Dekranasda Kabupaten / kota, stan yang lainnya merupakan binaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan binaan Kementerian Peratahanan RI. Dekranasda Kota Bogor mempromosikan 2 pengrajin binaannya yaitu Batik Organik dan Itando. Pameran dagang produk unggulan Kota Bogor memamerkan produk batik organik dari PT. Karya Satu Rumah dan produk Kulit dari CV. Itando yang memamerkan produk tas. Selain pameran juga dilaksankan juga Fashion Show dari Kota Bogor yang diperagakan oleh Pj. Walikota Bogor dan Pj. Ketua Dekranasda Kota Bogor serta tim mengangkat produk unggulan batik organik bernuansa Negara Jerman (warna hitam, merah dan kuning).

2.1.3. URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 279.850.500,-

Dalam pelaksanan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan tercapai realisasi keuangan sebesar Rp. 283.732.800 atau 91,94%.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota
   1.1. Sub Kegiatan Koordnasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
      1) Kursus Singkat/Pelatihan Kerajinan Alas Kaki dan Pelatihan Olahan Pangan Minuman
         (a) Maksud dan Tujuan
            (1) Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Peserta dalam membuat Olahan Pangan dan Kerajinan;
            (2) Meningkatkan Pengetahuan Peserta Tentang Produk yang memiliki Kualitas yang baik.

         (b) Waktu dan Tempat
            Hari/Tanggal : Kamis-Jumat, 25-26 Januari 2024
            Tempat : 1) Hotel Grand Pangrango
                Jl. Pajajaran No.32
                2) Posyantek Saung Inovasi Bogor Utara
                (Praktek Pelatihan Alas Kaki)

         (c) Peserta
            Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) hari:
            Hari Pertama dilaksanakan dengan penjelasan Materi tentang Kewirausahaan dan Regulasi Perijinan Industri.
            Hari Kedua pelaksanaan kegiatan Praktek Pembuatan Oroduk sesuai minat pelaku usaha yang terdiri dari:
            (1) Pelatihan Olahan Pangan Minuman sejumlah 20 Orang;
            (2) Pelatihan Olahan Pangan/Kripik Tempe sejumlah 20 Orang;

(3) Peserta Pelatihan Kerajinan Alas Kaki sejumlah 40 Orang.

(d) Narasumber

Narasumber dan Materi:

(1) Drs. Wigati Handayani,MS.i. dengan Materi Kewirausahaan dan Perijinan;

(2) Rachmawati, STP dari CV. Impro Karya Mandiri dengan Materi Praktek Pengolahan Tempe;

(3) Juwita dari Posyantek Kecamatan Bogor Utara dengan Materi Praktek Pelatihan Produk Pengolahan Minuman;

(4) Nizae Kasi dengan Materi Praktek Pembuatan Alas Kaki.

1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut:

1) Pelatihan Kemasan di Lokasi Lomba PKK

Di wilayah Kelurahan Kebon Pedes Sebanyak 30 Orang. dimana kegiatan ini dapat Menjelaskan Tentang Manfaat kemasan yang aman, menarik dan sesuai dengan produk-produk yang dimiliki pelaku industri kecil dan Memberikan pendampingan kepada pelaku industri kecil tentang pentingnya kemasan untuk menambah daya tarik produk dipasaran.

(a) Dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024 di Wilayah Kelurahan Kebon Pedes;

2) Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Pelatihan Kemasan (pokir untuk wilayah babakan pasar)

(a) Maksud dan Tujuan

(1) Memberikan Pendampingan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha kecil tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk olahan pangan.

(2) Menjelaskan tentang manfaat kemasan yang aman, menarik dan sesuai dengan produk-produk yang dimiliki pelaku ushaa kecil.

(b) Waktu dan Tempat

Hari/tanggal : Selasa, 23 Januari 2024

Tempat : Hotel Grand Pangrango
Jl. Pajajaran No. 32 Bogor

(c) Narasumber

(1) Anggota Komisi 2 DPRD Kota Bogor menyampaikan materi tentang Kewirausahaan.
(2) Ibu Rachmawati, STP dari CV. Impro Karya Mandiri memberikan materi tentang Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal.
(3) Ibu Juwita dari Posyantek Kecamatan Bogor Utara menyampaikan materi tentang Peran dan Fungsi Kemasan Dalam Meningkatkan Kualitas Produk.

1.2. PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DINAS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dalam melaksanakan Capaian Keuangan sampai dengan Triwulan 2 Tahun Anggaran 2024, yang menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Belanja Pembangunan Kota Bogor (APBD serta Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp. 17.710.198.162,- dengan Capaian Realisasi Anggaran sebesar Rp. 10.534.991.968,- atau mencapai 59,49%

REALISASI KEUANGAN SD JUNI 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN	Sd Juni 2024	%	Sisa Pagu Anggaran
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.646.031.555	12.646.031.555	7.826.309.277	61,89%	4.819.722.278
JUMLAH I (GAJI)		12.646.031.555	12.646.031.555	7.826.309.277	61,89%	4.819.722.278
2	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**					
2.1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.000.000	21.000.000	3.500.000	16,67%	17.500.000
3	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**					
13.1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	59.830.000	59.830.000	9.830.000	16,43%	50.000.000
4	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**					

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN	Sd Juni 2024	%	Sisa Pagu Anggaran
4.1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	378.063.000	378.063.000	352.555.000	93,25%	25.508.000
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**					
5.1	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	44.040.000	44.040.000	2.020.000	4,59%	42.020.000
JUMLAH II (BIDANG KOPERASI)		**502.933.000**	**502.933.000**	**367.905.000**	**73,15%**	**135.028.000**
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**					
6.1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	50.000.000	50.000.000	-	0,00%	50.000.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	192.280.000	192.280.000	133.255.000	69,30%	59.025.000
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**					

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN	Sd Juni 2024	%	Sisa Pagu Anggaran
7.1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	24.930.000	384.081.250	8.020.000	2,09%	376.061.250
JUMLAH III (BIDANG UMKM)		**267.210.000**	**626.361.250**	**141.275.000**	**22,55%**	**485.086.250**
8	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**					
8.1	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	57.541.800	57.541.800	31.116.500	54,08%	26.425.300
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	30.290.000	30.290.000	30.110.000	99,41%	180.000
9	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**					
9.1	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	33.840.000	33.840.000	33.660.000	99,47%	180.000
10	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**					
10.1	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	32.754.000	32.754.000	13.300.000	40,61%	19.454.000
JUMLAH IV (UPTD Metrologi)		**57.541.800**	**57.541.800**	**31.116.500**	**54,08%**	**26.425.300**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN	Sd Juni 2024	%	Sisa Pagu Anggaran
JUMLAH V (BIDANG PPDNPKTN)		**96.884.000**	**96.884.000**	**77.070.000**	**79,55%**	**19.814.000**
11	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**					
11.1	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	89.951.000	89.951.000	83.257.975	92,56%	6.693.025
JUMLAH VI (BIDANG PROMIJA)		**89.951.000**	**89.951.000**	**83.257.975**	**92,56%**	**6.693.025**
12	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
12.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	47.160.000	47.160.000	18.960.000	40,20%	28.200.000
12.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.618.000	36.618.000	16.563.000	45,23%	20.055.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.395.500	101.395.500	53.435.900	52,70%	47.959.600
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	92.652.900	92.652.900	37.997.800	41,01%	54.655.100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.455.000	64.455.000	13.230.000	20,53%	51.225.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	123.425.800	123.425.800	67.708.940	54,86%	55.716.860
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.000.000	47.000.000	7.500.000	15,96%	39.500.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN	Sd Juni 2024	%	Sisa Pagu Anggaran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	638.172.000	638.172.000	373.483.642	58,52%	264.688.358
12.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411.535.065				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	948.194.792	948.194.792	483.300.716	50,97%	464.894.076
12.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	455.440.000	455.440.000	191.565.865	42,06%	263.874.135
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.630.000	124.630.000	62.660.000	50,28%	61.970.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	319.966.000	319.966.000	315.523.273	98,61%	4.442.727
JUMLAH VII (SEKRETARIAT)		**3.410.645.057**	**3.410.645.057**	**1.771.524.216**	**51,94%**	**1.639.120.841**
13	**PROGRAM PERNCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**					
13.1	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksnaan Pembangunan Sumber daya Industri	143.720.000	143.720.000	137.600.000	95,74%	6.120.000
	Koordinasi , Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	136.130.500	136.130.500	98.934.000	72,68%	37.196.500
JUMLAH VIII (INDUSTRI)		**279.850.500**	**279.850.500**	**236.534.000**	**84,52%**	**43.316.500**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN	Sd Juni 2024	%	Sisa Pagu Anggaran
JUMLAH II + III + IV + V + VI + VII + VIII (KEGIATAN)		**4.705.015.357**	**5.064.166.607**	**2.708.682.691**	**53,49%**	**2.355.483.916**

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan koperasi, usaha kecil, menengah perdagangan dan perindustrian selaras dengan tujuan pembangunan daerah di Kota Bogor yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang ditandai oleh meningkatnya berbagai indikator sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Kota Bogor; meningkatnya kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, dan antar kelompok masyarakat. Agar pembangunan koperasi, usaha kecil, menengah perdagangan dan perindustrian dapat berhasil sesuai dengan tujuannya, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor harus tanggap terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala untuk mewujudkan koperasi, usaha kecil, menengah perdagangan dan perindustrian di Kota Bogor yang lebih baik.

Selanjutnya hasil identifikasi potensi permasalahan tersebut dipetakan menjadi permasalahan pokok, permasalahan dan akar masalah. Permasalahan Pokok merupakan masalah yang bersifat makro. Selanjutnya penyebab yang spesifik dari permasalahan pokok sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan sebagai permasalahan. Sementara, perumusan akar masalah dilakukan dengan mencari beberapa penyebab dari permasalahan yang lebih rinci. Pemetaan permasalahan lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan pemetaan permasalahan di atas, maka permasalahan pada urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kapabilitas SDM pelaku IKM;
2. Masih Lemahnya kemampuan dan inovasi pemanfaatan teknologi produksi oleh IKM;
3. Proses produksi yang inefisien karena faktor penggunaan bahan baku dan tenaga kerja yang menyebabkan lemahnya daya saing harga produk;
4. Masih terbatasnya model dan strategi bisnis yang dikembangkan oleh pelaku IKM;
5. Masih terbatasnya kemampuan pemasaran karena kekurangan kemampuan pelaku IKM membangun jejaring pemasaran;
6. Masih Rendahnya Produktivitas Industri Kecil dan menengah;
7. Masih Rendahnya Kualitas Produksi Industri Kecil Dan Menengah;

Sedangkan permasalahan pada urusan perdagangan, adalah sebagai berikut:

1. Gejolak Inflasi yang cukup tinggi ;
2. Belum optimalnya perumusan kebijakan di sector perdagangan yang berorientasi pada penerapan Transaksi Perdagangan melalui sistem elektronik (TPMSE) ;
3. Masih lemahnya pengendalian perizinan usaha perdagangan ;
4. Masih belum optimalnya penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Bogor;
5. Belum optimalnya pertumbuhan ekspor di Kota Bogor

Dan permasalahan pada urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Permasalahan yang dihadapi sebagaimana yang dituangkan didalam perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2020-2024 yaitu : Masih lemahnya daya saing ekonomi masyarakat

2.4. Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas koperasi, usaha kecil, menengah perdagangan dan perindustrian Kota Bogor dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, dengan arahan Kepala Dinas terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk berdasarkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor. Renja Perubahan 2024 berpedoman pada RKPD Perubahan Tahun 2024 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Daerah yang relevan. Perubahan Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor tahun 2024 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renha, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam rancangan Renja.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BOGOR

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase Peningkatan koperasi berizin	80,00 Persen	**88.320.000,00**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**		Persentase Peningkatan koperasi berizin	60,00 Persen	**21.000.000,00**	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Koperasi berIzin Usaha Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam	2,27 Persen	88.320.000,00	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Koperasi berIzin Usaha Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam	2,27 Perse	21.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	88.320.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	21.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi Berkualitas	10 persen	**158.551.900.00**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		Persentase Koperasi Berkualitas	10,15 persen	**59.830.000,00**	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	3,37 persen	158.551.900.00	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	3,37 persen	**59.830.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kot		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	25 unit usaha	158.551.900.00	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kot		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 unit usaha	59.830.000,00	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi yang Sehat	10,71 Persen	**146.519.900,00**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		Persentase Koperasi yang Sehat	15,20 Persen	**0**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	3,37 Persen	146.519.900 ,00	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	3,37 Persen	0	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	25 Unit Usaha	146.519.900 ,00	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	25 Unit Usaha	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	30,00 Persen	**638.957.000,00**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	47,18 Persen	**359.863.000,00**	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	42,09 Persen	638.957.000,00	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	42,09 Persen	**359.863.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas danKompetensi SDM Koperasi		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas	410 Orang	638.957.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas danKompetensi SDM Koperasi		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas	275 orang	359.863.000,00,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi Aktif	17,21 Persen	**187.091.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		Persentase Koperasi Aktif	21,45 Persen	**44.040.000,00**	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah		Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	2,24 Persen	187.091.000,00	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	2,24 Persen	44.040.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/ Kota										
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	110 Unit Usaha	187.091.000,00	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15 Unit Usaha	44.040.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM)		Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	25,00 Persen	**1.148.116.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	53,00 Persen	**192.280.000,00**	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku		Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	30,00 Persen	1.148.116.000,00	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	30,00 Persen	192.280.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kepentingan										
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		umlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	338.030.000,00	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	0	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	70 Unit Usaha	313.926.000,00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	70 Unit Usaha	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi danSinkronisasi dengan Para PemangkuKepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		umlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	183.810.000,00	Koordinasi danSinkronisasi dengan Para PemangkuKepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		umlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	0	
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		umlah Unit Usaha Mikro Terdata	48346 Unit Usaha	105.070.000,00	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		umlah Unit Usaha Mikro Terdata	48346 Unit Usaha	50.000.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan	100 Orang	207.280.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100 Orang	192.280.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		Kewirausahaan			UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan					
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha Mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	15,00 Persen	24.930.000,00	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		**Persentase Usaha Mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya**	**22,00 Persen**	**384.081.250,00**	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala		Persentase peningkatan jumlah skala usaha menjadi usaha kecil	15,00 Persen	24.930.000,00	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha**		Persentase peningkatan jumlah skala usaha menjadi usaha kecil	15,00 Persen	384.081.250,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Usaha Menjadi Usaha Kecil					**Menjadi Usaha Kecil**					
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknolog		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	24.930.000,00	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknolog		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	384.081.250,00	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	1,80 Persen	277.160.000,00	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**		Persentase Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	3,13 Persen	**33.840.000,00**	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Pelaku Usaha Sektor Perdagangan yang Memahami Regulasi yang Berlaku	40,00 Persen	277.160.000,00	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**		Persentase Pelaku Usaha Sektor Perdagangan yang Memahami Regulasi yang Berlaku	40,00 Persen	33.840.000,00	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi	5 Dokumen	277.160.000,00	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	33.840.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Perdagangan								
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau	<9,00 Persen	142.325.000,00	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau	<9,00 Persen	**14.310.000,00**	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar		koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	<9,00 Persen	142.325.000,00	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**		koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	<9,00 Persen	**14.310.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/ Kota										
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	150 Laporan	95.000.000,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	150 Laporan	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler danPasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	47.325.000,00	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler danPasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	14.310.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai Realisasi Ekspor	75.763.689,97USD	137.589.000,00	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		Nilai Realisasi Ekspor	142.433.793,75 USD	**0**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor	2,10 Persen	137.589.000,00	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor	2,10 Persen	**0**	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		umlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor	6 Pelaku Usaha	137.589.000,00	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor	40 Pelaku Usaha	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
			Unggulan					Unggulan			
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentse Kesuaian data dan Akurasi Ukuran	13,15 Persen	452.031.700,00	**PROGRAM STANDARDISASI DANPERLINDUNGAN KONSUMEN**		Persentse Kesuaian data dan Akurasi Ukuran	39,32 Persen	**86.324.300,00**	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Kesesuaian data dan Akurasi ukuran	75,03 Persen	452.031.700,00	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**		Persentase Kesesuaian data dan Akurasi ukuran	75,03 Persen	86.324.300,00	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	60500 Unit	295.461.700,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	60500 Unit	56.034.300,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Lega		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	156.570.000,00	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Lega		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	60 Orang	30.290.000,00	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Produk Pelaku Usaha yang difasilitasi pemasarannya	24,27 Persen	691.664.000,0	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		Persentase Produk Pelaku Usaha yang difasilitasi pemasarannya	60,70 Persen	**89.951.000,00**	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Produk yang difasilitasi promosi dan pemasarannya Persentase pelaku usaha yg melaksanakan pemasaran	240 Produk 10,00 Persen	691.664.000,00	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**		Jumlah Produk yang difasilitasi promosi dan pemasarannya Persentase pelaku usaha yg melaksanakan pemasaran	240 Produk 10,00 Persen	**89.951.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			melalui E-Commerce/TPMSE					melalui E-Commerce/ TPMSE			
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	80 UMKM	691.664.000,00	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	80 UMKM	89.951.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					**19.455.003.061,00**					**17,273,396,309**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat**	**3.50 Poin**	**18.669.309.061,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat**	**A 3.61 Poin**	**17.463.725.986,00**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	**100 %**	**13.187.699.871,00**			**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	**100 %**	**14.201.954,354,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	13.123.499.871,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang / bulan	**14.164.034.354,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	64.200.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	**37.920.000,00**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	2.869.680.100,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	**1.079.078.800,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.618.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.618.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	172.200.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	101.395.500,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	144.327.400,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	86.212.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	182.820.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	64.455.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	224.333.700,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	123.159.400,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	63.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	47.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	123.300.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu		umlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.923.081.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	620.238.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100 Persen**	**552.817.200,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100 Persen**	**0**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	57 Unit	552.817.200,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	**0**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**90 %**	**784.745.890,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**90 %**	**1.282.656.832,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	429.173.250,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	361.535.120,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	355.572.640,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	921.121.712,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik**	**90 %**	**1.274.366.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**ersentase Barang Milik Daerah lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik**	**90 %**	**900.036.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	451.680.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	455.440.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	atau Lapangan										
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	50 Unit	124.630.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	698.056.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	319.966.000,00	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		**Persentase Peningkatan IKM yang produktif**	**4,00 Persen**	**685.694.000,00**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**Persentase Peningkatan IKM yang produktif**	**7,80 Persen**	**257.510.500,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota		Persentase Industri yang menerapkan standart produk	20,00 Persen	685.694.000,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Industri yang menerapkan standart produk	20 Persen	**257.510.500,00**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	233.672.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	138.080.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan	7 Dokumen	452.022.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		umlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan	7 Dokumen	119.430.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Serta Masyarakat		Industri dan Peran Serta Masyarakat					Industri dan Peran Serta Masyarakat			
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		**Persentase Jumlah perusahaan yang berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**27,61 %**	**100.000.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**		**Persentase Jumlah perusahaan yang berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**27,61 %**	0	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin		**Persentase Perusahaan yang sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri**	**11,80 %**	**100.000.000,00**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri**		**Persentase Perusahaan yang sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**11,80 %**	**0**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota		**Nasional (SIINas)**			**(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**					
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan	1 Dokumen	100.000.000,00	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis	1 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri			melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					pemerintah pusat			
TOTAL					**23.548.258.561,00**					**19.006.756.036,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Rapat Koordinasi serta pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kota.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan,terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.

Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut **"Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga"**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

1. **Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat**

   Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2. **Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**

   Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

   Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya *(sensing)*, memahami kondisi permasalahannya *(understanding)*, dan mengatur/mengambil tindakan *(acting)* berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- **Tujuan**

Dalam upaya mewujudkan visi dan Misi kedua, dan ketiga Kota Bogor yang telah ditetapkan oleh Wali Kota, diturunkan ke dalam beberapa tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) sebagai arahan saat pelaksanaannya.

a. Tujuan pemerintah Kota Bogor untuk mendukung Misi kedua yang berkaitan dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah: Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dimana target capaiannya pada tahun 2024 sebesar Poin A
b. Sedangkan untuk mendukung ketercapaian Misi ketiga yang berkaitan dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yaitu: Terwujudnya Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator PDRB Atas Dasar Harga Konstan dimana target capaiannya pada tahun 2024 sebesar 36.950 Triliyun Rupiah

- **Sasaran**

a) Sasaran untuk masing-masing tujuan pada Misi 2 adalah: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah.
b) Sedangkan pada Misi ketiga sasaran dari tujuan adalah:
   1. Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota;

2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing;
3. Meningkatnya sektor perdagangan;
4. Meningkatnya sektor perindustrian.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka setiap sasaran ditetapkan sasaran indikator yang akan menjadi target pencapaian misi kepala daerah. Perubahan sasaran indikator dan target pencapaian misi kepala daerah didasari pada penyesuaian terhadap pergeseran kewenangan, penetapan indikator yang bersifat outcome dan atau impact, perkembangan terkini serta penempatan sasaran dan indikator yang lebih sesuai untuk pencapaian misi kepada daerah yang nantinya diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain and change) menuju terwujudnya koperasi, perdagangan dan industri lebih baik dan lebih sejahtera.

Penetapan tujuan, sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas							
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor		Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	A
	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	N/A	N/A	80,01	80,10	80,20

Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera							
Terwujudnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi		PDRB atas Dasar Harga Konstan	32,084	33,229	35,013	36,950	39,181
	1. Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota	Persentase Koperasi yang Berdaya saing	6,44	8,76	11,36	14,39	18,94
	2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing	1. UMKM naik kelas	0	31	31	60	100
		2. Persentase UMKM yang mengakses kredit	N/A	N/A	3	4	5
	3. Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	-7,92	2,72	2,72	2,72	2,72
	4. Meningkatnya sektor perindustrian	PDRB sektor perindustrian	-0,83	4,46	4,46	4,46	4,46

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	Indikator Tujuan							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	BB	A	A	A	A
2	PDRB atas Dasar Harga Konstan	30,414	32,084	33,229	35,013	36,950	39,181	39,181
	Indikator Sasaran							
1	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	80,01	80,10	80,20	80,20
2	Persentase Koperasi yang Berdaya saing	3,03	6,44	8,76	11,36	14,39	18,94	18,94
3	UMKM naik kelas	N/A	0	31	31	60	100	191
4	Persentase UMKM yang mengakses kredit	N/A	N/A	N/A	3	4	5	5
5	PDRB sektor perdagangan	2,99	-7,92	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
6	PDRB Sektor Perindustrian	7,21	-0,83	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
	Indikator Program							
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	B	BB	BB	A	A	A	A
2	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,31	3,34	3,34	3,40	3,40	3,50	3,50
3	Persentase Peningkatan koperasi berizin	N/A	0%	20%	40%	60%	80%	80%
4	Persentase Koperasi Berkualitas	N/A			8,00	9,00	10,00	10
5	Persentase Koperasi yang Sehat	N/A	3,37	3,37	5,00	8,57	10,71	21,43

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
6	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	N/A	25	30	30	30	30	30
7	Persentase Koperasi Aktif	83	3,44	6,88	10,33	13,77	17,21	17,21
8	Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	N/A	5	10	15	20	25	25
9	Persentase Usaha Mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	N/A	N/A	N/A	13	14	15	15
10	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai dengan ketentuan	11,17	21,00	24,12	22,00	22,50	23,00	23
11	Persentase Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	0,26	1,03	3,15	1,60	1,70	1,80	1,8
12	Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau	3,00	4,00	4,02	<9	<9	<9	<9
13	Nilai Realisasi Ekspor	99.283.771,63	70.929.918,12	99.874.168,96	72.857.513,06	74.205.377,05	75.763.689,97	75763689,97
14	Persentse Kesuaian data dan Akurasi Ukuran	2,59	10,82	13,21	11,92	12,52	13,15	13,15
15	Persentase Produk Pelaku Usaha yang difasilitasi pemasarannya	N/A	19,00	28,01	21,64	22,96	24,27	24,27
16	Persentase Peningkatan IKM yang produktif	8,11	-2,99	-5,93	2,20	3,00	4,00	4
17	Persentase Jumlah Perusahaan yang berizin dalam Sistem Informasi Industri	N/A	N/A	N/A	11,79	19,70	27,61	27,61

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	Nasional (SIINas)							
	Indikator Kegiatan							
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup PD	N/A	BB	BB	**A**	**A**	**A**	**A**
2	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	80	80	100	100	100	100
4	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100	100	101	100	100	100	100
5	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	80	100	101	85	90	90	90
6	Persentase Barang Milik Daerah lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik	80	100	101	85	90	90	90
7	Persentase Koperasi berIzin Usaha Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam	N/A	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
8	Jumlah Kantor Cabang yang berizin	N/A	N/A	N/A	1	1	1	3
9	Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	N/A	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
10	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	N/A	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
11	Persentase Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	N/A	42,09	42,09	42,09	42,09	42,09	42,09
12	Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	N/A	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
13	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	N/A	10	15	20	25	30	30
14	Persentase peningkatan jumlah skala usaha menjadi usaha kecil	N/A	N/A	N/A	13	14	15	15
15	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi syarat komitmen dalam memperoleh IUPP dan IUTS	2	42,86	64,71	23	24	25	25
16	Persentase Gudang yang Memiliki tanda Daftar	33,33	0	40,00	41,00	41,50	42,00	
17	Jumlah Penerima Waralaba dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	N/A	N/A	1	1	1	1	3
18	Jumlah Pengecer dan Penjual Langsung yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C di tingkat Kota	N/A	N/A	1	0	0	5	6
19	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Bahan Berbahaya	N/A	N/A	N/A	1	1	1	
20	Peningkatan Sarana dan prasarana pasar rakyat yang memadai	0	0	7,14	0	0	0	30
21	Persentase Pelaku Usaha sektor Perdagangan yang memahami regulasi yang berlaku	N/A	5,40	5,59	25	30	40	40
22	koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	3,00	4,00	4,02	<9	<9	<9	<9
23	Jumlah pengawasan Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan	N/A	N/A	N/A	1	1	1	3
2	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi	16,01	-25,86	0,59	1,60	1,85	2,10	2,1

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
4	Ekspor							
25	Persentase Kesesuaian data dan Akurasi ukuran	2,59	10,82	13,21	75,01	75,02	75,03	75,03
26	Jumlah Produk yang difasilitasi promosi dan pemasarannya	N/A	150	240	240	240	240	990
27	Persentase pelaku usaha yg melaksanakan pemasaran melalui E-Commerce/TPMSE	N/A	18,99	10	10	10	10	10
28	Persentase Industri yang menerapkan standart produk	N/A	0	17,00	17,70	18,00	20,00	20,00
29	Persentase Perusahaan yang sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	N/A	N/A	N/A	10,60	11,20	11,80	11,8
	Indikator Sub Kegiatan							
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	0	0	1	1
2	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	56	56	72	75	81	81
3	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	N/A	N/A	N/A	3	4	4	4
4	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	N/A	N/A	N/A	2	4	4	4
5	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	2	4	4	4
6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	2	1	1	1
7	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	N/A	N/A	N/A	2	2	2	2

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	Disediakan							
8	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	4	4	4	4
9	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	N/A	N/A	1	12	12	12
10	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	1	12	12	12
11	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	0	0	2	2
12	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	0	0	15	15
13	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	1	3	10	10
14	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	20	25	25	25
15	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	12	12	12	12
16	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	1	0	12	12
17	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	1	12	12	12
18	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	N/A	N/A	N/A	0	23	25	25

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
19	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	N/A	N/A	15	25	25	25
20	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	N/A	N/A	30	50	50	50
21	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	N/A	N/A	N/A	4	5	5	5
22	Jumlah Usaha Simpan Pinjamdan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	5	5	5	15
23	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	1	1	1	3
24	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	20	20	20	20	25	105
25	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	20	20	20	20	25	105
26	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	N/A	20	20	20	20	25	105

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
27	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	N/A	N/A	N/A	0	20	25	45
28	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	N/A	N/A	N/A	396	400	410	1206
29	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	100	105	110	315
30	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	N/A	N/A	N/A	0	200	200	400
31	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	N/A	N/A	N/A	100	200	350	650
32	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	N/A	N/A	N/A	100	100	100	300
33	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	N/A	N/A	N/A	3	100	100	203
34	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	N/A	N/A	N/A	345	70	70	485
35	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	N/A	N/A	N/A	25	150	150	325

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
36	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	N/A	N/A	N/A	52	0	0	52
37	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	N/A	N/A	N/A	100	100	100	300
38	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	N/A	N/A	N/A	10	10	10	30
39	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba(STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	N/A	1	1	1	3
40	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	1	0	0	5	6
41	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	N/A	N/A	N/A	0	0	1	1
42	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	N/A	N/A	N/A	0	0	1	1
43	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distribusi B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	N/A	N/A	N/A	0	1	2	3

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	maupun Produsen B2 (P-B2)							
44	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	1	0	0	0	0
45	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	0	0	0	0	0
46	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	N/A	N/A	N/A	5	5	5	15
47	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	2	12	12	12
48	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	30	90	100	100	120	150	560
49	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1	0	0	1	2	2	5
50	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	N/A	N/A	N/A	1	0	0	1
51	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	N/A	N/A	N/A	1	1	1	3
52	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	N/A	N/A	N/A	1	1	1	3

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%							
53	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang dibina	N/A	N/A	N/A	62	30	30	122
54	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	N/A	N/A	N/A	0	2	2	4
55	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	N/A	N/A	N/A	0	40	40	80
56	Jumlah Pelaku Ekspor yang Dibina	N/A	N/A	N/A	46	150	150	346
57	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5,469	48.519	59.262	59.500	60.000	60.500	60500
58	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	N/A	N/A	N/A	171	200	200	571
59	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	70	70	80	220
60	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	N/A	N/A	N/A	0	20	25	45
61	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	N/A	N/A	N/A	1	2	3	6
62	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	N/A	N/A	N/A	0	2	1	3

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
63	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	N/A	N/A	N/A	0	3	3	6
64	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	N/A	N/A	N/A	2	3	3	8
65	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	N/A	N/A	N/A	1	1	1	3
66	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	N/A	N/A	N/A	6	6	7	19
67	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah - Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem	N/A	N/A	N/A	0	1	1	2

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	OSS							

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilakasanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor yang direncanakan untuk periode tahun 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daeral Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Sir Pinjam dan Pembukaan Kantor Cab Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Kope dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan da Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
3.	Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewena Kabupaten/ Kota
4.	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kopera yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Kop
5.	Pemberdayaa Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yan Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tan , Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
6.	Pemberdayaa Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Us Mikro
			Pemberdayaan Kelembagaan Potens Pengembangan Usaha Mikro
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
			Penyusunan Basis Data Usaha Mikr

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Peningkatan Pemahaman Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompete SDM UMKM dan Kewirausahaan me Pendidikan dan Pelatihan
7.	Pengembanga Umkm	Pengembangan Usaha Mik dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasara Sumber Daya Manusia, serta Desain Teknologi
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribus Perdagangan Masyarakat d Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Penge Sarana Distribusi Perdagangan
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Pentir	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pe pada Pasar Rakyat yang Terinte dalam Sistem Informasi Perdagangan
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler Pasar Khusus yang Berdampak dal (Satu) Kabupaten/Kota
10	Program Pengembanga Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Misi Dagang bagi Produk E Unggulan
11	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi L
12	Program Penggunaan Dan Pemasara Produk Dalan Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
13	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengka Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi d Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lai
		Penyediaan Jasa Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Su Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan U Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan M Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Ge Kantor dan Bangunan Lainnya
14	Perencanaan dan Pembangunar Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
15	Pengendalian Izin Usaha Indust	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasa Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan u sektor perindustrian dalam ra penerbitan perizinan berusaha berbasis melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sis Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Rencana program dan kegiatan dalam Dokumen Rencana Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah , Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2024, dimana masuk pada URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH) URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN (URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN dan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN), dapat terlihat pada matrik di bawah ini:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							**23.548.258.561,00**	**17.351.046.912,00**	**19.006.756.036,00**	**-4.541.502.525,00**				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.392.485.800,00**	**770.143.000,00**	**1.061.094.250,00**	**-1.331.391.550,00**				
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**2.392.485.800,00**	**770.143.000,00**	**1.061.094.250,00**	**-1.331.391.550,00**				
1,	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Peningkatan koperasi berizin**				**80,00 Persen**	**60,00 Persen**	**88.320.000,00**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**61.680.000,00**				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	*Persentase Koperasi berizin Usaha Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam*				2,27 Persen	2,27 Persen	88.320.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-67.320.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	88.320.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-67.320.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kabupaten/ Kota													untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
2,	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Berkualitas**				**10,00 Persen**	**10,15 Persen**	**158.551.900,00**	**59.830.000,00**	**59.830.000,00**	**41.448.100,00**				
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaa	*Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi*				3,37 Persen	3,37 Persen	158.551.900,00	59.830.000,00	59.830.000,00	-98.721.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		nnya dalam Daerah Kabupaten / Kota														potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				25 Unit Usaha	20 Unit Usaha	158.551.900,00	59.830.000,00	59.830.000,00	-98.721.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang sehat**				**10,71 Persen**	**15,20 %**	**146.519.900,00**	**0,00**	**0,00**	**53.480.100,00**				
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	*Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya*				3,37 Persen	3,37 %	146.519.900,00	0,00	0,00	-146.519.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																daerah berbasis potensi lokal
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	146.519.900,00	0,00	0,00	-146.519.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal**				**30,00 Persen**	**47,18 Persen**	**638.957.000,00**	**378.063.000,00**	**359.863.000,00**	**111.043.000,00**				
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	*Persentase Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan*				42,09 Persen	42,09 %	638.957.000,00	378.063.000,00	359.863.000,00	-279.094.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastr

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																uktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDm Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				410 Orang	275 Orang	638.957.000,00	378.063.000,00	359.863.000,00	-279.094.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5,	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**				**17,21 Persen**	**21,45 Persen**	**187.091.000,00**	**44.040.000,00**	**44.040.000,00**	**12.909.000,00**				
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten /Kota	*Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi*				2,24 Persen	2,24 Persen	187.091.000,00	44.040.000,00	44.040.000,00	-143.051.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonom

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																i daerah berbasis potensi lokal
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				110 Unit Usaha	15 Unit Usaha	187.091.000,00	44.040.000,00	44.040.000,00	-143.051.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6,	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun**				**25,00 Persen**	**53,00 %**	**1.148.116.000,00**	**242.280.000,00**	**192.280.000,00**	**151.884.000,00**				
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan*				30,00 Persen	30 %	1.148.116.000,00	242.280.000,00	192.280.000,00	-955.836.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	338.030.000,00	0,00	0,00	-338.030.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	313.926.000,00	0,00	0,00	-313.926.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				150 Orang	150 Orang	183.810.000,00	0,00	0,00	-183.810.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				48346 Unit Usaha	48346 Unit Usaha	105.070.000,00	50.000.000,00	0,00	-105.070.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				100 Orang	100 Orang	207.280.000,00	192.280.000,00	192.280.000,00	-15.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7,	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**persentase Usaha Mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya**				**15,00 Persen**	**22,00 %**	**24.930.000,00**	**24.930.000,00**	**384.081.250,00**	**75.070.000,00**				
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase peningkatan jumlah skala usaha menjadi usaha kecil*				15,00 Persen	15 %	24.930.000,00	24.930.000,00	384.081.250,00	359.151.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	24.930.000,00	24.930.000,00	384.081.250,00	359.151.250,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**21.155.772.761,00**	**16.580.903.912,00**	**17.945.661.786,00**	**-3.210.110.975,00**				
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**1.700.769.700,00**	**244.376.800,00**	**224.425.300,00**	**-1.476.344.400,00**				
1,	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan**				**1,80 Persen**	**3,13 Persen**	**277.160.000,00**	**33.840.000,00**	**33.840.000,00**	**22.840.000,00**				
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase Pelaku Usaha Sektor Perdagangan yang Memahami Regulasi yang Berlaku*				40,00 Persen	40,00 Persen	277.160.000,00	33.840.000,00	33.840.000,00	-243.320.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				5 Dokumen	1 Dokumen	277.160.000,00	33.840.000,00	33.840.000,00	-243.320.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2,	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau**				**<9,00 Persen**	**<9,00 Persen**	**142.325.000,00**	**32.754.000,00**	**14.310.000,00**	**57.675.000,00**				
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota	*koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu*				<9,00 Persen	<9,00 Persen	142.325.000,00	32.754.000,00	14.310.000,00	-128.015.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				150 Laporan	150 Laporan	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota				2 Laporan	1 Laporan	47.325.000,00	32.754.000,00	14.310.000,00	-33.015.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
3,	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai Realisasi Ekspor**				**75.763.689,97 USD**	**142.433.793,75 USD**	**137.589.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.589.000,00**				
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang	*Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor*				2,10 Persen	2,1 Persen	137.589.000,00	0,00	0,00	-137.589.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota														lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				6 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	137.589.000,00	0,00	0,00	-137.589.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Kesuaian data dan Akurasi Ukuran**				**13,15 Persen**	**39,32 Persen**	**452.031.700,00**	**87.831.800,00**	**86.324.300,00**	**47.968.300,00**				
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase Kesesuaian data dan Akurasi ukuran*				75,03 Persen	75,03 Persen	452.031.700,00	87.831.800,00	86.324.300,00	-365.707.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																ekonomi daerah berbasis potensi lokal
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				60500 Unit	60500 Unit	295.461.700,00	57.541.800,00	56.034.300,00	-239.427.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				200 Orang	60 Orang	156.570.000,00	30.290.000,00	30.290.000,00	-126.280.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
5,	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Produk Pelaku Usaha yang difasilitasi pemasarannya**				**24,27 Persen**	**60,70 Persen**	**691.664.000,00**	**89.951.000,00**	**89.951.000,00**	**108.336.000,00**				
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah Produk yang difasilitasi promosi dan pemasarannya* *Persentase pelaku usaha yang melaksanakan*				10,00 Persen 240 Produk	10,00 Persen 240 Produk	691.664.000,00	89.951.000,00	89.951.000,00	-601.713.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pemasaran melalui E-Commerce/TPMSE												Berkeadilan	berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota				80 UMKM	80 UMKM	691.664.000,00	89.951.000,00	89.951.000,00	-601.713.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**19.455.003.061,00**	**16.336.527.112,00**	**17.721.236.486,00**	**-1.733.766.575,00**				
1,	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat**				**3.50 A Poin**	**A 3.61 Poin**	**18.669.309.061,00**	**16.056.676.612,00**	**17.463.725.986,00**	**1.630.690.939,00**				
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN*				100 %	100 %	13.187.699.871,00	12.693.191.555,00	14.201.954.354,00	1.014.254.483,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/bulan	66 Orang/bulan	13.123.499.871,00	12.646.031.555,00	14.164.034.354,00	1.040.534.483,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan				12 Laporan	12 Laporan	64.200.000,00	47.160.000,00	37.920.000,00	-26.280.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			n/Semesteran SKPD													
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah*				100 %	100 %	2.869.680.100,00	1.103.719.200,00	1.079.078.800,00	-1.790.601.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	36.618.000,00	36.618.000,00	36.618.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	172.200.000,00	101.395.500,00	101.395.500,00	-70.804.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	144.327.400,00	92.652.900,00	86.212.900,00	-58.114.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	182.820.000,00	64.455.000,00	64.455.000,00	-118.365.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	224.333.700,00	123.425.800,00	123.159.400,00	-101.174.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	63.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	-16.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	123.300.000,00	0,00	0,00	-123.300.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.923.081.000,00	638.172.000,00	620.238.000,00	-1.302.843.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*				100 Persen	100 Persen	552.817.200,00	0,00	0,00	-552.817.200,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				57 Unit	0 Unit	552.817.200,00	0,00	0,00	-552.817.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				90 %	90 %	784.745.890,00	1.359.729.857,00	1.282.656.832,00	497.910.942,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Pelayanan Publik	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	429.173.250,00	411.535.065,00	361.535.120,00	-67.638.130,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				12 Laporan	12 Laporan	355.572.640,00	948.194.792,00	921.121.712,00	565.549.072,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSF	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Reformasi Birokrasi Reformasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kantor yang Disediakan										a Kel/Desa	ER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik*				90 %	90 %	1.274.366.000,00	900.036.000,00	900.036.000,00	-374.330.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan				43 Unit	43 Unit	451.680.000,00	455.440.000,00	455.440.000,00	3.760.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pajak dan Perizinannya												an Publik	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	124.630.000,00	124.630.000,00	124.630.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	3 Unit	698.056.000,00	319.966.000,00	319.966.000,00	-378.090.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
2,	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Peningkatan IKM yang produktif**				**4,00 Persen**	**7,80 Persen**	**685.694.000,00**	**279.850.500,00**	**257.510.500,00**	**164.306.000,00**				
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	*Persentase Industri yang menerapkan standar produk*				20,00 Persen	20,00 Persen	685.694.000,00	279.850.500,00	257.510.500,00	-428.183.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan PembangunanSumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				3 Dokumen	3 Dokumen	233.672.000,00	143.720.000,00	138.080.000,00	-95.592.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Berkeadilan	s potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
	.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Perasn Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				7 Dokumen	7 Dokumen	452.022.000,00	136.130.500,00	119.430.500,00	-332.591.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase Jumlah perusahaan yang berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**				**27,61 %**	**27,61 %**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000.000,00**				
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota	*Persentase Perusahaan yang sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*				11,80 %	11,80 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																an daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat													
	J U M L A H								**23.548.258.561,00**	**17.351.046.912,00**	**19.006.756.036,00**	**-4.541.502.525,00**				

BAB V
PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2024 telah disusun dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan Perangkat Daerah.

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 15 Program dengan 20 kegiatan 36 sub kegiatan.

Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja Perangkat Daerah ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor .

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor untuk Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra Dinas tahun 2019-2024 . Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor .

Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor pada tahun 2024,

dokumen perubahan Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bogor umumnya untuk mewujudkan Good Governance di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor pada khususnya.

Demikian Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan dan merupakan penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Secara umum Renja merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang terukur dan terarah dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang

terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara opimal. Kualitas dokumen rencana kerja ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta merupakan cerminan kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah.

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sendiri mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dilakukan dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sebagai hasil pemikiran yang strategis untuk menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat tentang perlunya pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

Dalam penyusunan rencana kerja dibutuhkan sinergitas baik internal maupun eksternal antar instansi dalam upaya mendukung pemecahan permasalahan salah satu program prioritas Kota Bogor yang menjadi

komitmen bersama khususnya terkait dengan penyediaan prasarana transportasi, prasarana air minum dan air limbah dan terkait Penataan ruang dan bangunan Selain langkah koordinatif perlu juga dilakukan upaya mendorong partisipatif masyarakat melalui penjaringan aspirasi yang dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi sehingga terbentuk satu kesatuan pemikiran satu kesatuan pemahaman yang utuh dan terpadu dalam upaya menjawab berbagai dinamisasi persoalan yang berkembang di masyarakat sesuai dengan kewenangan dan urusan wajib yang harus dilaksanakan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang menjadi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Rangkaian program telah disusun untuk mencapai maksud tersebut yang dituangkan dalam naskah Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tahun 2019 - 2024.

Rencana Strategis memaparkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Kota Bogor secara umum. Sehingga untuk mendapat gambaran yang lebih detail dari proses pembangunan tersebut perlu dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bogor. RPJMD tersebut bagi PERANGKAT DAERAH akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH. Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bogor, dan RKPD ini akan dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase (Covid-19) UU No. 17 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dalam putusannya bahw PERPU No. 1 Tahun 2020 hany berlaku 2 tahun atau tidak berlku lagi

sejak Presiden RI mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi covid-19 telah berakhir di Indonesia yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2024. Sampai bulan Juli 2024 Keputusan tentang Perpu No.1 tahun 2020 belum terbit sehingga Perpu no 1 tahun 2024 bisa dikatakan masih digunakan.

penjabaran RPJMD kedalam RKPD Kota Bogor akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor. Sedangkan bagi Perangkat Daerah, berdasarkan Renja Perangkat Daerah disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sebagai Perangkat Daerah Kota Bogor yang dibebani tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan daerah Kota Bogor di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang eksistensi dan kewenangannya dinyatakan secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, yang tertuang di dalam beberapa produk perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Permendagri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor No 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bogor 2011 – 2031;
9. Peratuan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peratuan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 tanggal 10 September 2019;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
14. Peraturan Walikota Bogor Nomor 62 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor;
15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 168 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor;

16. Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingk ungan Pemerintah Kota Bogor
17. Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019-2024 Tanggal 3 Juni 2022.
18. Surat Keputusan Wali Kota Bogor No 900.1/Kep.209-BKAD/2-24 tentang Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 tanggal 1 Juli 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2024 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan

periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada Januari 2024 dan berakhir pada Desember 2024. Selain itu, Renja juga menggambarkan keterkaitan sub kegiatan, kegiatan, program dengan sasaran dan tujuan yang ditransformasikan ke dalam Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Terakhir, Renja adalah sebagai wadah sinkronisasi untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis Tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatannya pada tahun 2024 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada Rencana Strategis Perubahan.
2. Sebagai bahan acuan untuk mengevaluasi indikator sasaran dan indikator kinerja tahun 2024 pada akhir tahun.

3. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
4. Sebagai standar baku penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) atau tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGS (Suistanable Development Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- ✓ Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- ✓ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- ✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baikdalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai denggan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSNAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023, dan realisasi Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan/ atau realisasi APBD untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersaji dalam table dibawah ini:

Table 1. Evaluasi Hasil Renja DPUPR s.d. Triwulan II Tahun 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	20
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**202.438.573.158**	**220.268.615.421**								
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**202.438.573.158**	**220.268.615.421**	**0,12**	**27.329.227.008**	**0,17**	**37.073.273.886**	**0,29**	**64.402.500.894**	**0,29**	**64.402.500.894**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**202.438.573.158**	**220.268.615.421**	**0,12**	**27.329.227.008**	**0,17**	**37.073.273.886**	**0,29**	**64.402.500.894**	**0,29**	**64.402.500.894,00**
1,	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**3,50 A Point Point**	**3,50 A Point Point**	**47.877.097.937**	**48.721.376.600**	**0,19**	**9.234.044.936**	**0,44**	**21.644.204.383**	**0,63**	**30.878.249.319**	**0,63**	**30.878.249.319,00**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN***	**100 %**	**100 %**	**19.030.875.133**	**20.265.247.596**	**0,28**	**5.589.935.193**	**0,28**	**5.625.760.675**	**0,55**	**11.215.695.868**	**0,55**	**11.215.695.868,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang/ bulan	116 Orang/ bulan	18.856.815.133	20.091.187.596	0,28	5.575.515.193	0,28	5.586.430.675	**0,56**	**11.161.945.868**	0,56	11.161.945.868,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	174.060.000	174.060.000	0,08	14.420.000	0,23	39.330.000	**0,31**	**53.750.000**	0,31	53.750.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan Kebutuhan kepegawaian perangkat daerah***	**100 %**	**100 %**	**79.151.000**	**79.151.000**	**0,97**	**77.148.800**	**0**	**-**	**0,97**	**77.148.800**	**0,97**	**77.148.800,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	79.151.000	79.151.000	0,97	77.148.800	0	-	**0,97**	**77.148.800**	0,97	77.148.800,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah***	**82.5 %**	**82.5 %**	**3.869.121.900**	**3.272.428.100**	**0,26**	**856.952.850**	**0,19**	**630.281.150**	**0,45**	**1.487.234.000**	**0,45**	**1.487.234.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	99.906.600	99.906.600	0,99	99.013.000	0,00	-	**0,99**	**99.013.000**	0,99	99.013.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.282.899.800	1.282.899.800	0,44	562.817.450	0,27	350.695.000	**0,71**	**913.512.450**	0,71	913.512.450,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	867.448.500	650.354.700	0,08	53.930.900	0,07	43.805.000	**0,15**	**97.735.900**	0,15	97.735.900,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	49.668.000	49.668.000	0,00	-	0,50	24.672.000	**0,50**	**24.672.000**	0,50	24.672.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	119.869.000	119.869.000	0,87	103.735.500	0,13	15.240.000	**0,99**	**118.975.500**	0,99	118.975.500,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.449.330.000	1.069.730.000	0,04	37.456.000	0,18	195.869.150	**0,22**	**233.325.150**	0,22	233.325.150,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD***	**N/A %**	**N/A %**	**14.993.882.700**	**14.993.882.700**	**0,12**	**1.869.045.000**	**0,82**	**12.261.102.000**	**0,94**	**14.130.147.000**	**0,94**	**14.130.147.000,00**
	Pengadaan Alat Besar													
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	14.993.882.700	14.993.882.700	0,12	1.869.045.000	0,82	12.261.102.000	**0,94**	**14.130.147.000**	0,94	14.130.147.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	0	0			#DIV/0!	-	**#DIV/0!**	**-**	#DIV/0!	0,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemenuhan Kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	**100 %**	**100 %**	**4.605.430.032**	**4.714.212.032**	**0,13**	**610.691.599**	**0,26**	**1.213.289.134**	**0,39**	**1.823.980.733**	**0,39**	**1.823.980.733,00**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	846.321.488	736.493.488	0,10	74.040.835	0,16	120.677.682	**0,26**	**194.718.517**	0,26	194.718.517,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	3.759.108.544	3.977.718.544	0,13	536.650.764	0,27	1.092.611.452	**0,41**	**1.629.262.216**	0,41	1.629.262.216,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik***	**88 %**	**88 %**	**5.298.637.172**	**5.396.455.172**	**0,04**	**230.271.494**	**0,35**	**1.913.771.424**	**0,40**	**2.144.042.918**	**0,40**	**2.144.042.918,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90 Unit	90 Unit	402.732.000	402.732.000	0,06	24.685.485	0,13	53.347.809	**0,19**	**78.033.294**	0,19	78.033.294,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	85 Unit	85 Unit	4.090.405.172	4.090.405.172	0,05	205.586.009	0,45	1.860.423.615	**0,51**	**2.066.009.624**	0,51	2.066.009.624,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	600.000.000	697.818.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	205.500.000	205.500.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
2,	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%) Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)**	**1 53,79 94,23 Lokasi % %**	**1 53,79 94,23 Lokasi % %**	**33.869.408.400**	**46.826.033.196**	**0,10**	**4.796.646.706**	**0,00**		**0,10**	**4.796.646.706**	**0,10**	**4.796.646.706,00**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah dokumen perencanaan SDA yang disusun (perbandingan jumlah dokumen yang tersusun terhadap rencana pembangunan dan pemeliharaan SDA) Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani Panjang Sungai yang berkondisi baik***	**111.1922 KM 1 Lokasi 20 Dokumen**	**111.1922 KM 1 Lokasi 20 Dokumen**	**23.162.608.400**	**36.119.233.196**	**0,10**	**3.452.820.437**	**0,14**	**4.958.299.870**	**0,23**	**8.411.120.307**	**0,23**	**8.411.120.307,00**
	Normalisasi/Restorasi Sungai													
		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	942 KM	942 KM	1.428.582.400	1.428.582.400	0,07	105.000.000	0,15	210.000.000	**0,22**	**315.000.000**	0,22	315.000.000,00
	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing													
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	4968 KM	4968 KM	15.134.026.000	15.556.434.845	0,03	422.408.845	0,03	525.657.150	**0,06**	**948.065.995**	0,06	948.065.995,00
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing													
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	4975 KM	4975 KM	5.000.000.000	17.339.792.236	0,16	2.730.987.877	0,24	4.222.642.720	**0,40**	**6.953.630.597**	0,40	6.953.630.597,00
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai													
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	20 Dokumen	16 Dokumen	1.600.000.000	1.794.423.715	0,11	194.423.715	0,00	-	**0,11**	**194.423.715**	0,11	194.423.715,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)***	**57.04 %**	**57.04 %**	**10.706.800.000**	**10.706.800.000**	**0,13**	**1.343.826.269**	**0,24**	**2.571.103.103**	**0,37**	**3.914.929.372**	**0,37**	**3.914.929.372,00**
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5541 KM	5541 KM	0	0		-	#DIV/0!	-	**#DIV/0!**	**-**	#DIV/0!	0,00
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan													
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	162 KM	162 KM	10.706.800.000	10.706.800.000	0,13	1.343.826.269	0,24	2.571.103.103	**0,37**	**3.914.929.372**	0,37	3.914.929.372,00
3,	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap ari minum melalui SPAM Bukan Jaringan perpipaan Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap ari minum melalui SPAM Jaringan perpipaan**	**67,40 70,42 % %**	**67,40 70,42 % %**	**0**	**0**		-	#DIV/0!	-	**#DIV/0!**	**-**	#DIV/0!	**0,00**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan***	**253546 SR**	**253546 SR**	**0**	**0**		**-**	**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**	**0,00**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		Bukan Jaringan Perpipaan;												
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	33 Orang	33 Orang	0	0		-	#DIV/0!	-	**#DIV/0!**	**-**	#DIV/0!	0,00
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan													
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	4 Unit	0 Unit	0	0		-	#DIV/0!	-	**#DIV/0!**	**-**	#DIV/0!	0,00
4,	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak (%) Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman (%)**	**73,10 8,55 % %**	**73,10 8,55 % %**	**19.948.669.600**	**20.283.276.721**	**0,05**	**969.209.426**	**0,01**	**176.707.960**	**0,06**	**1.145.917.386**	**0,06**	**1.145.917.386,00**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Aman Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak***	**185196 Rumah Tangga 21661 Rumah Tangga**	**185196 Rumah Tangga 21661 Rumah Tangga**	**19.948.669.600**	**20.283.276.721**	**0,05**	**969.209.426**	**0,01**	**176.707.960**	**0,06**	**1.145.917.386**	**0,06**	**1.145.917.386,00**
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman													
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	125 M³/Hari	125 M³/Hari	1.724.670.000	2.274.670.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat													
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	160 M³/Hari	160 M³/Hari	560.000.000	803.922.500	0,30	243.922.500	0,00	-	**0,30**	**243.922.500**	0,30	243.922.500,00
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja													
		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1100 Rumah Tangga	1100 Rumah Tangga	1.537.929.000	1.437.929.000	0,04	59.362.800	0,00		**0,04**	**59.362.800**	0,04	59.362.800,00
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	84 Penyelenggara	84 Penyelenggara	0	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	**#DIV/0!**	-	#DIV/0!	0,00
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja													
		Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	0	**#DIV/0!**	-	#DIV/0!	0,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1.226.680.000	1.226.680.000	0,38	466.242.505	0,14	176.707.960	**0,52**	**642.950.465**	0,52	642.950.465,00
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat													
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	450 Rumah Tangga	450 Rumah Tangga	14.899.390.600	14.540.075.221	0,01	199.681.621	0,00	-	**0,01**	**199.681.621**	0,01	199.681.621,00
5,	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase dokumen perencanaan sda yang disusun Persentase Drainase yang berkondisi baik**	**100,00 27,75 % %**	**100,00 27,75 % %**	**19.456.368.000**	**22.581.543.051**	0,17	**3.814.801.051**	**0,02**	**426.334.443**	**0,19**	**4.241.135.494**	**0,19**	**4.241.135.494,00**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Panjang Drainase yang dipelihara Panjang drainse yang dibangun/ ditingkatkan***	**380 M 8.00 M**	**380 M 8.00 M**	**19.456.368.000**	**22.581.543.051**	0,17	**3.814.801.051**	**0,02**	**426.334.443**	**0,19**	**4.241.135.494**	**0,19**	**4.241.135.494,00**
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan													
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4000 Sistem Drainase Perkotaan	4000 Sistem Drainase Perkotaan	9.209.816.000	10.214.985.450	0,11	1.134.795.450	0,01	70.374.000	**0,12**	**1.205.169.450**	0,12	1.205.169.450,00
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan													
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4000 Sistem Drainase Perkotaan	4000 Sistem Drainase Perkotaan	7.271.388.000	9.297.086.891	0,28	2.585.698.891	0,02	199.846.713	**0,30**	**2.785.545.604**	0,30	2.785.545.604,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan													
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	20 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000.000	1.094.306.710	0,09	94.306.710	0,00	-	**0,09**	**94.306.710**	0,09	94.306.710,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan													
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	3290 Sistem Drainase Perkotaan	1725 m Sistem Drainase Perkotaan	1.975.164.000	1.975.164.000	0,00	-	0,08	156.113.730	**0,08**	**156.113.730**	0,08	156.113.730,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
6,	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF** **Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan** **Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)terhadap IMB yang dikeluarkan**	**12,00** **90,00** **98,00** **%** **%** **%**	**12,00** **90,00** **98,00** **%** **%** **%**	**2.656.612.000**	**9.281.303.362**	0,00	-	0,72	**6.705.691.362**	**0,72**	**6.705.691.362**	0,72	**6.705.691.362,00**
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	***Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)terhadap IMB yang dikeluarkan*** ***Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan***	**90 %** **96.00** **%**	**90 %** **96.00** **%**	**2.656.612.000**	**9.281.303.362**	0,00	-	**0,72**	**6.705.691.362**	**0,72**	**6.705.691.362**	**0,72**	**6.705.691.362,00**
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.795.440.000	8.420.131.362	0,00	-	0,79	6.624.691.362	**0,79**	**6.624.691.362**	0,79	6.624.691.362,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung													
		Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	2 Orang	2 Orang	105.172.000	105.172.000	0,00	-	0,00		-	-	0,00	0,00
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	1 Dokumen	756.000.000	756.000.000	0,00	-	0,11	81.000.000	**0,11**	**81.000.000**	0,11	81.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
7,	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentasae jembatan yang ditingkatkan Persentase jembatan yang terbangun Persentase pembanguan/ peningkatan jalur pedestrian Persentasae jalan yang dipelihara Persentasae jalan yang terbangun	58,09 64,00 66,00 74,00 90,00 % % % % %	58,09 64,00 66,00 74,00 90,00 % % % % %	76.755.417.221	71.239.087.941	0,12	8.453.530.389	0,11	8.119.655.738	0,23	16.573.186.127	0,23	16.573.186.127,00
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentasae jalan yang ditingkatkan* *Persentasae jalan yang terbangun* *Persentase jembatan yang ditingkatkan* *Persentase jembatan yang terbangun* *Persentase jalan yang dipelihara* *Persentase jalan yang ditingkatkan* *Persentase jalan yang terbangun* *Persentase jembatan yang ditingkatkan* *Persentase jembatan yang terbangun* *Persentase pembanguan/ peningkatan jalur pedestrian*	58.09 % 64.00 % 66.00 % 74 % 90.00 %	58,09 % 58.09 % 64,00 % 64.00 % 66,00 % 66.00 % 74 % 74,00 % 90,00 % 90.00 %	76.755.417.221	71.239.087.941	0,12	8.453.530.389	0,11	8.119.655.738	0,23	16.573.186.127	0,23	16.573.186.127,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		Persentase pembangunan/peningkatan jalur pedestrian												
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan							#DIV/0!				-	0,00	0
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	30 Dokumen	20 Dokumen	7.751.428.536	8.245.419.606	0,06	499.031.070	0,00	10.890.000	**0,06**	**509.921.070**	0,06	509.921.070,00
	Pembangunan Jalan											-		
		Panjang Jalan yang Dibangun	10 KM	10 KM	8.668.144.000	2.619.885.750	0,11	290.181.750	0,10	251.026.500	**0,21**	**541.208.250**	0,21	541.208.250,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	Rekonstruksi Jalan												0,00	0
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	11 KM	11 KM	22.100.000.000	22.331.369.893	0,09	1.898.853.893	0,03	677.505.150	**0,12**	**2.576.359.043**	0,12	2.576.359.043,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan												0,00	0
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	79 KM	79 KM	5.723.935.879	6.231.670.386	0,08	507.734.507	0,09	556.191.030	**0,17**	**1.063.925.537**	0,17	1.063.925.537,00
	Pemeliharaan Rutin Jembatan												0,00	0
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	138 Jembatan	138 Jembatan	1.625.000.000	1.625.000.000	0,21	336.143.097	0,28	456.479.382	**0,49**	**792.622.479**	0,49	792.622.479,00
	Rehabilitasi Jembatan													
		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	50 Jembatan	50 Jembatan	2.386.908.806	3.165.573.806	0,25	778.665.000	0,00	-	**0,25**	**778.665.000**	0,25	778.665.000,00
	Pembangunan Jembatan												0,00	0
		Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Jembatan	10 Jembatan	3.500.000.000	2.020.168.500	0,05	97.624.500	0,01	14.400.000	**0,06**	**112.024.500**	0,06	112.024.500,00
	Pemeliharaan Rutin Jalan													
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	579 KM	579 KM	25.000.000.000	25.000.000.000	0,16	4.045.296.572	0,25	6.153.163.676	**0,41**	**10.198.460.248**	0,41	10.198.460.248,00
8,	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik**	**100,00 %**	**100,00 %**	**375.000.000**	**435.994.550**	0,14	**60.994.500**	**0,00**	**680.000**	**0,14**	**61.674.500**	**0,14**	**61.674.500,00**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	***Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi (jumlah tenaga terampil yang bersertifikasi terhadap jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan)***	**50 %**	**50 %**	**200.000.000**	**200.000.000**	0,00	**-**	**0,00**	**680.000**	**0,00**	**680.000**	**0,00**	**680.000,00**
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis													
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	50 Orang	200.000.000	200.000.000	0,00	-	0,00	680.000	**0,00**	**680.000**	0,00	680.000,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi***	**N/A %**	**N/A %**	**100.000.000**	**160.994.550**	0,38	**60.994.500**	**0,00**	**-**	**0,38**	**60.994.500**	**0,38**	**60.994.500,00**
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi													
		Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	0	0		-	#DIV/0!	-	**#DIV/0!**	**-**	#DIV/0!	0,00
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota											-		
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	160.994.550	0,38	60.994.500	0,00	-	**0,38**	**60.994.500**	0,38	60.994.500,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	***Persentase penyedia jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi***	**10.33 %**	**10.33 %**	**75.000.000**	**75.000.000**	0,00	-	**0,00**	-	-	-	**0,00**	**0,00**
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi													
		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1 Lembaga	1 Lembaga	75.000.000	75.000.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
9,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase (%) Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang**	**100,00 %**	**100,00 %**	**1.500.000.000**	**900.000.000**	0,00	-	**0,00**	-	-	-	**0,00**	**0,00**
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	***Persentase (%) Jumlah RRTR yang disusun terhadap jumlah RRTR yang harus disusun sesuai RTRW***	**100 %**	**100 %**	**900.000.000**	**300.000.000**	0,00	-	**0,00**	-	-	-	**0,00**	**0,00**
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota											-		
		Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	**#DIV/0!**	-	#DIV/0!	0,00
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota											-		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2024				REALISASI TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D. TW II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD	
			TARGET 2024		PAGU ANGGARAN		TRIWULAN I		TRIWULAN II					
			SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	300.000.000	0,00	-	0,00	-	-	-		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang													
		Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	3 Orang	3 Orang	300.000.000	0		-	#DIV/0!	-	**#DIV/0!**	**-**	#DIV/0!	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase (%) Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Permanfaatan ruang Daerah***	**100 %**	**100 %**	**300.000.000**	**300.000.000**	0,00	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang													
		Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase (%) Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah***	**100 %**	**100 %**	**300.000.000**	**300.000.000**	0,00	-	**0,00**	-	-	-	**0,00**	**0,00**
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang													
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00

Dari data tabel 1 di atas evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan semester satu, masih belum terlihat adanya progress pencapaian target indikator program, sebab masih terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya hampir seluruh indikator program baru dapat di ukur pada akhir tahun.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPUPR Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sampai dengan semester satu Tahun 2024 tersaji pada tabel 2. sebagai berikut.

Table 2. Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor s.d. Triwulan II Tahun 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2024			REALISASI ANGGARAN SEMESTER I
			TERGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**202.438.573.158**	**220.268.615.421**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**202.438.573.158**	**220.268.615.421**	**64.402.500.894**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**202.438.573.158**	**220.268.615.421**	**64.402.500.894**
1,	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**3,50 A Point Point**	**47.877.097.937**	**48.721.376.600**	**30.878.249.319**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN***	**100 %**	**19.030.875.133**	**20.265.247.596**	**11.215.695.868**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang/ bulan	18.856.815.133	20.091.187.596	**11.161.945.868**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD	1 Laporan	174.060.000	174.060.000	**53.750.000**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan Kebutuhan kepegawaian perangkat daerah***	**100 %**	**79.151.000**	**79.151.000**	**77.148.800**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	79.151.000	79.151.000	**77.148.800**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah***	**82.5 %**	**3.869.121.900**	**3.272.428.100**	**1.487.234.000**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2024			REALISASI ANGGARAN SEMESTER I
			TERGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.906.600	99.906.600	**99.013.000**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.282.899.800	1.282.899.800	**913.512.450**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	867.448.500	650.354.700	**97.735.900**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	49.668.000	49.668.000	**24.672.000**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	119.869.000	119.869.000	**118.975.500**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.449.330.000	1.069.730.000	**233.325.150**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD***	**N/A %**	**14.993.882.700**	**14.993.882.700**	**14.130.147.000**
	Pengadaan Alat Besar					
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	10 Unit	14.993.882.700	14.993.882.700	**14.130.147.000**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemenuhan Kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	**100 %**	**4.605.430.032**	**4.714.212.032**	**1.823.980.733**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	846.321.488	736.493.488	**194.718.517**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2024			REALISASI ANGGARAN SEMESTER I
			TERGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	3.759.108.544	3.977.718.544	**1.629.262.216**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik***	**88 %**	**5.298.637.172**	**5.396.455.172**	**2.144.042.918**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90 Unit	402.732.000	402.732.000	**78.033.294**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	85 Unit	4.090.405.172	4.090.405.172	**2.066.009.624**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	600.000.000	697.818.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	205.500.000	205.500.000	-
2,	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani** **Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)** **Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)**	**1** **53,79 %** **94,23**	**33.869.408.400**	**46.826.033.196**	**4.796.646.706**
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah dokumen perencanaan SDA yang disusun (perbandingan jumlah dokumen yang tersusun terhadap rencana pembangunan dan pemeliharaan SDA)*** ***Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani Panjang Sungai yang berkondisi baik***	**111.1922 KM** **1 Lokasi** **20 Dokumen**	**23.162.608.400**	**36.119.233.196**	**8.411.120.307**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2024			REALISASI ANGGARAN SEMESTER I
			TERGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7
	Normalisasi/Restorasi Sungai					
		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	942 KM	1.428.582.400	1.428.582.400	**315.000.000**
	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing					
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	4968 KM	15.134.026.000	15.556.434.845	**948.065.995**
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing					
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	4975 KM	5.000.000.000	17.339.792.236	**6.953.630.597**
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai					
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	16 Dokumen	1.600.000.000	1.794.423.715	**194.423.715**
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)***	**57.04 %**	**10.706.800.000**	**10.706.800.000**	**3.914.929.372**
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5541 KM	0	0	-
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	162 KM	10.706.800.000	10.706.800.000	**3.914.929.372**
3,	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap ari minum melalui SPAM Bukan Jaringan perpipaan** **Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap ari minum melalui SPAM Jaringan perpipaan**	**67,40 %** **70,42 %**	**0**	**0**	-

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2024			REALISASI ANGGARAN SEMESTER I
			TERGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan;***	**253546 SR**	**0**	**0**	-
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					
		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	33 Orang	0	0	-
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan					
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	0 Unit	0	0	-
4,	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak (%)** **Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman (%)**	**73,10 %** **8,55 %**	**19.948.669.600**	**20.283.276.721**	**1.145.917.386**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Aman*** ***Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak***	**185196 Rumah Tangga** **21661 Rumah Tangga**	**19.948.669.600**	**20.283.276.721**	**1.145.917.386**
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman					
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	125 M^3/Hari	1.724.670.000	2.274.670.000	-
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat					

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2024			REALISASI ANGGARAN SEMESTER I
			TERGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	160 M^3/Hari	560.000.000	803.922.500	**243.922.500**
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja					
		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1100 Rumah Tangga	1.537.929.000	1.437.929.000	**59.362.800**
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					
		Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	84 Penyelenggara	0	0	-
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja					
		Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	0 Unit	0	0	-
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1.226.680.000	1.226.680.000	**642.950.465**
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat					
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	450 Rumah Tangga	14.899.390.600	14.540.075.221	**199.681.621**
5,	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase dokumen perencanaan sda yang disusun** **Persentase Drainase yang berkondisi baik**	**100,00 %** **27,75 %**	**19.456.368.000**	**22.581.543.051**	**4.241.135.494**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Panjang Drainase yang dipelihara*** ***Panjang drainse yang dibangun/ ditingkatkan***	**380 M** **8.00 M**	**19.456.368.000**	**22.581.543.051**	**4.241.135.494**
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2024			REALISASI ANGGARAN SEMESTER I
			TERGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4000 Sistem Drainase Perkotaan	9.209.816.000	10.214.985.450	**1.205.169.450**
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4000 Sistem Drainase Perkotaan	7.271.388.000	9.297.086.891	**2.785.545.604**
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan					
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	10 Dokumen	1.000.000.000	1.094.306.710	**94.306.710**
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan					
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1725 m Sistem Drainase Perkotaan	1.975.164.000	1.975.164.000	**156.113.730**
6,	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF** **Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan** **Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)terhadap IMB yang dikeluarkan**	**12,00** **90,00** **98,00**	**2.656.612.000**	**9.281.303.362**	**6.705.691.362**
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	***Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%) terhadap IMB yang dikeluarkan*** ***Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan***	**90 %** **96.00 %**	**2.656.612.000**	**9.281.303.362**	**6.705.691.362**
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2024			REALISASI ANGGARAN SEMESTER I
			TERGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.795.440.000	8.420.131.362	**6.624.691.362**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung					
		Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	2 Orang	105.172.000	105.172.000	-
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	756.000.000	756.000.000	**81.000.000**
7,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentasae jembatan yang ditingkatkan** **Persentase jembatan yang terbangun** **Persentase pembanguan/ peningkatan jalur pedestrian** **Persentasae jalan yang dipelihara** **Persentasae jalan yang terbangun**	**58,09 %** **64,00 %** **66,00 %** **74,00 %** **90,00 %**	**76.755.417.221**	**71.239.087.941**	**16.573.186.127**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2024			REALISASI ANGGARAN SEMESTER I
			TERGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	***Persentasae jalan yang ditingkatkan Persentasae jalan yang terbangun*** ***Persentasae jembatan yang ditingkatkan*** ***Persentasae jembatan yang terbangun*** ***Persentase jalan yang dipelihara*** ***Persentase jalan yang ditingkatkan Persentase jalan yang terbangun*** ***Persentase jembatan yang ditingkatkan*** ***Persentase jembatan yang terbangun*** ***Persentase pembanguan/ peningkatan jalur pedestrian*** ***Persentase pembangunan/peningkatan jalur pedestrian***	**58,09 %** **58.09 %** **64,00 %** **64.00 %** **66,00 %** **66.00 %** **74,00 %** **90,00 %** **90.00 %**	**76.755.417.221**	**71.239.087.941**	**16.573.186.127**
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					-
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	20 Dokumen	7.751.428.536	8.245.419.606	**509.921.070**
	Pembangunan Jalan					-
		Panjang Jalan yang Dibangun	10 KM	8.668.144.000	2.619.885.750	**541.208.250**
	Rekonstruksi Jalan					
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	11 KM	22.100.000.000	22.331.369.893	**2.576.359.043**
	Pemeliharaan Berkala Jalan					
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	79 KM	5.723.935.879	6.231.670.386	**1.063.925.537**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2024			REALISASI ANGGARAN SEMESTER I
			TERGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan Rutin Jembatan					
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	138 Jembatan	1.625.000.000	1.625.000.000	**792.622.479**
	Rehabilitasi Jembatan					
		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	50 Jembatan	2.386.908.806	3.165.573.806	**778.665.000**
	Pembangunan Jembatan					
		Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Jembatan	3.500.000.000	2.020.168.500	**112.024.500**
	Pemeliharaan Rutin Jalan					
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	579 KM	25.000.000.000	25.000.000.000	**10.198.460.248**
8,	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik**	**100,00 %**	**375.000.000**	**435.994.550**	**61.674.500**
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	***Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi (jumlah tenaga terampil yang bersertifikasi terhadap jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan)***	**50 %**	**200.000.000**	**200.000.000**	**680.000**
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis					
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	200.000.000	200.000.000	**680.000**
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi***	**N/A %**	**100.000.000**	**160.994.550**	**60.994.500**
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi					
		Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	0	0	-
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota					-
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	160.994.550	**60.994.500**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2024			REALISASI ANGGARAN SEMESTER I
			TERGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	***Persentase penyedia jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi***	**10.33 %**	**75.000.000**	**75.000.000**	-
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi					
		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1 Lembaga	75.000.000	75.000.000	-
9,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase (%) Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang**	**100,00 %**	**1.500.000.000**	**900.000.000**	-
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	***Persentase (%) Jumlah RRTR yang disusun terhadap jumlah RRTR yang harus disusun sesuai RTRW***	**100 %**	**900.000.000**	**300.000.000**	-
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota					-
		Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	300.000.000	0	-
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota					-
		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	300.000.000	300.000.000	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang					
		Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	3 Orang	300.000.000	0	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase (%) Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Permanfaatan ruang Daerah***	**100 %**	**300.000.000**	**300.000.000**	-

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2024			REALISASI ANGGARAN SEMESTER I
			TERGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang					
		Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase (%) Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah***	**100 %**	**300.000.000**	**300.000.000**	-
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	-

2.3 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPUPR KOTA BOGOR

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Bogor yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 168 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

Analiasis Kinerja Pelayanan DPUPR Kota Bogor pada hasil penyesuaian dan penyepakatan beberapa Target Indikator Kinerja Makro, IKK, IKK dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah.

A. Indikator Kinerja Utama

Table 3. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator KinerjaUtama	Satuan	Target 2024	Capaian s.d. Semester I Tahun 2024	Predikat
1	Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang aman	%	67,4	-	Belum tercapai
2	Pereentase Jalan Berkondisi Mantap	%	90	-	Belum tercapai

B. Indikator Kinerja Kunci

Table 4 .Indikator Kinerja Kunci

No.	Aspek/Focus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Capaian s.d. Semester I Tahun 2024	Predikat
1	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	0,817	-	0,875
2	Panjang Jalan yang Memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter)	Meter	93516,19	-	523,38
3	persentaee irigasi kota dalam kondisi baik	Persen	52,62	-	53,79
4	Rasio jaringan irigasi	Point	0,81	-	3574
5	Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik	Persen	94,81	-	97,62

Hasil analisis dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan semester satu Tahun 2022 tersebut di atas masih belum dapat di ukur ketercapaiannya, begitu juga dengan Indikator Kinerja Kunci yang masih belum dapat di ukur ketercapaiannya.

C. Target Program

Table 5. Target Program

Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indiaktor Kinerja Tujuan / Sarana Program		Satuan	Target Kinerja 2024	Capaian
Misi 1	Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat					
Tujuan 1	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yeng berkualitas					
Sasaran 3	Meningkatnya kualltas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman					
Program 1.1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem alr llmbah yang layak (%)	%	75,10	-
Sasaran 4	Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan / atau kerusakan Lingkungan					
Program 1.1.4.1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA}		Persentaae Sungai yang berkondlsi baik (%)	%	97,62	-
Misi 2	Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas					
Tujuan 2	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayanl (Smart government)					
Sasaran 1	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel					
Program 2.2.1.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelpyanan Lingkup Perangkat Daerah	Point	3,55	-
Misi 3	Mewujudkan Kota Bogor Yaiig SeJahtera					
Tujuan 2	Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah					
Sasaran 2	Meningkatnya kualltae ruang yang mendukung pertunibuhan ekonomi					
Program 3.2.2.1	PROORAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (% terhadap IMB yang dikeluarkan)	%	100	-
			Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%] terhadap IMB yang dikeluarkan	%	100	-

Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indiaktor Kinerja Tujuan / Sarana Program		Satuan	Target Kinerja 2024	Capaian
Sasaran 3 :	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi					
Program 3.2.2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	%	Persentasae jalan yang terbangun	%	*90*	-
		%	Persentasae jalan yang ditingkatkan	%	90	-

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun

Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Table 6. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kota Bogor

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**A**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Nilai LKIP Dinas PUPR** Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	**A** 100	
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah*	100		*Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	0	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah*	100	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	DPUPR Kota Bogor	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	DPUPR Kota Bogor
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.030.875.133	*Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN*	*100%*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	20.219.241.932	*Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN*	*100%*	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.856.815.133	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 OB	DPUPR Kota Bogor	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.045.181.932	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	196 OB	DPUPR Kota Bogor
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	174.060.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	174.060.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	1 Laporan	

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Triwulanan/Semesteran SKPD					Triwulanan/Semesteran SKPD		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.151.000	Persentase pemenuhan Kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	100%		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.151.000	Persentase pemenuhan Kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	100%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	79.151.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	79.151.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.869.121.900	*Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah*	*82,50%*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	3.272.428.100	*Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah*	*82,50%*	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.906.600	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	DPUPR Kota Bogor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.906.600	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	DPUPR Kota Bogor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.282.899.800	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	DPUPR Kota Bogor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	1.282.899.800	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	DPUPR Kota Bogor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	867.448.500	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	DPUPR Kota	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	650.354.700	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	DPUPR Kota

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Bogor					Bogor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.668.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	DPUPR Kota Bogor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.668.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	DPUPR Kota Bogor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	119.869.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	DPUPR Kota Bogor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	119.869.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	DPUPR Kota Bogor
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.449.330.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	DPUPR Kota Bogor	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.069.730.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	DPUPR Kota Bogor
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.993.882.700	*Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*	*40%*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	14.993.882.700	*Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*	*100%*	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				DPUPR Kota Bogor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				DPUPR
Pengadaan Alat Besar	14.993.882.700	*Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan*	10 unit		Pengadaan Alat Besar	14.993.882.700	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	10 unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.605.430.032	*Persentase pemenuhan penyediaan jasa*	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.714.212.032	Persentase pemenuhan penyediaan jasa	100%	

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		penunjang urusan pemerintah daerah					penunjang urusan pemerintah daerah		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	846.321.488	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	48 Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	736.493.488	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.759.108.544	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	24 Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.977.718.544	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.298.637.172	*Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik*	88%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	5.396.455.172	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	88%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	402.732.000	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	90 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	402.732.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90 unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	4.090.405.172	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	85 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	4.090.405.172	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	85 unit	

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	697.818.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205.500.000	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	6 unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205.500.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**33.869.408.400**	***Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)***	**94,23%**		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**46.826.033.196**	**Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)**	**94,23%**	
		Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	*53,79%*				*Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)*	*53,79%*	
		Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	1 Lokasi (Situ Anggalena)				Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	1 Lokasi (Situ Panjang)	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam	23.162.608.400	*Jumlah dokumen perencanaan SDA yang disusun (perbandingan jumlah dokumen yang tersusun*	20 dokumen		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam	36.119.233.196	Jumlah dokumen perencanaan SDA yang disusun (perbandingan jumlah dokumen yang tersusun	16 dokumen	

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		*terhadap rencana pembangunan dan pemeliharaan SDA)*			1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		terhadap rencana pembangunan dan pemeliharaan SDA)		
		Panjang Sungai yang berkondisi baik	111,1922 Km				Panjang Sungai yang berkondisi baik	111,1922 Km	
		Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	1 Lokasi (Situ Leutik)				Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	1 Lokasi (Situ Leutik)	
Normalisasi/Restorasi Sungai	1.428.582.400	*Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi*	9,42 km		Normalisasi/restorasi sungai	1.428.582.400	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	9,42km	
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	15.134.026.000	*Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan*	49,68 km		Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	15.556.434.845	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	49,68 km	
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.000.000.000	*Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi*	49,75 km		Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	17.339.792.236	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	49,75 km	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.600.000.000	*Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun*	20 dokumen		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.794.423.715	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	16 dokumen	
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	-	*Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara*	20,14 km		Operasi dan pemeliharaan sungai	-	Panjang sungai yang dioperasikan dan di pelihara	20,14km	

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.706.800.000	*Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)*	57,04%		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.706.800.000	Persentase irigasi yang berkondisi baik(%)	57,04%	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi*	55,41 km		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	55,41 km	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	10.706.800.000	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara*	1,62 km		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	10.706.800.000	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,62 km	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum		*Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum Bukan Jaringan Perpipaan;*	67,40%		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum		Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	67,40%	
		Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum Bukan Jaringan Perpipaan;	70,42%				Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum Bukan Jaringan Perpipaan;	70,42%	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan*	253.546 SR		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	253.546 SR	

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		dan Bukan Jaringan Perpipaan;					dan Bukan Jaringan Perpipaan		
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	*Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*	33 Orang		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	*Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*	33 Orang	
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	0	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi*	4 Unit		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	0	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi*	0 Unit	
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**19.948.669.600**	***Persentase (%) rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak***	**73,10 %**		**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**20.283.276.721**	**Persentase (%) rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak**	**73,10 %**	
		Persentase (%) rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman	8,55 %				Persentase (%) rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman	8,55 %	

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.948.669.600	*Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak*	21.661 Rumah Tangga		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.283.276.721	Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	21.661 Rumah Tangga	
		Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Aman	185.196 Rumah Tangga				Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Aman	185.196 Rumah Tangga	
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.724.670.000	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun*	125 M^3 /hari		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.274.670.000	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun*	125 M^3 /hari	
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	560.000.000	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan*	160 M^3 /hari		Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	803.922.500	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan*	160 M^3 /hari	
Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	1.537.929.000	*Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja*	1.100 Rumsh Tangga		Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	1.437.929.000	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	1.100 Rumah Tangga	

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	*Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya*	84 Penyelenggara		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	*Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya*	84 Penyelenggara	
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	0	*Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja*	3 unit		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	0	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	3 unit	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	*Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara*	1 unit		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 unit	
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	0	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar*	450 Rumah Tangga		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	0	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar*	450 Rumah Tangga	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**1.500.000.000**	***Persentase (%) Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang***	**100%**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**900.000.000**	**Persentase (%) Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana tata ruang**	**100%**	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	900.000.000	*Persentase (%) Jumlah RRTR yang disusun terhadap jumlah RRTR yang harus disusun sesuai RTRW*	100.00 %		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	300.000.000	Persentase (%) Jumlah RRTR yang disusun terhadap jumlah RRTR yang harus disusun sesuai RTRW	100.00 %	

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, RTRW Kabupaten/Kota	300.000.000	*Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota*	3 dokumen		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, RTRW Kabupaten/Kota	0	*Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota*	3 dokumen	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, RDTR Kabupaten/Kota	300.000.000	*Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota*	3 dokumen		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, RDTR Kabupaten/Kota	300.000.000	*Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota*	3 dokumen	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	300.000.000	*Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi*	3 orang		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	0	*Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi*	3 orang	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	*Persentase (%) Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Permanfaatan ruang Daerah*	100%		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000.000	Persentase (%) Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Permanfaatan ruang Daerah	100%	
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	300.000.000	*Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang*	1 Dokumen		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	300.000.000	*Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang*	1 Dokumen	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	*Persentase (%) Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan uang Daerah*	100%		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	Persentase (%) Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan uang Daerah	100%	

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	300.000.000	*Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang*	1 Dokumen		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	300.000.000	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**2.656.612.000**	***Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan***	**90%**		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**9.281.303.362**	**Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan**	**90%**	
		Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)terhadap IMB yang dikeluarkan	98%				Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)terhadap IMB yang dikeluarkan	98%	
		Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF	12%				Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF	12%	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.656.612.000	*Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)terhadap IMB yang dikeluarkan*	98%		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	9.281.303.362	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)terhadap IMB yang dikeluarkan	9%	

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF	12%				Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF	12%	
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.795.440.000	*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	8.420.131.362	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	-	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	105.172.000	*Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya*	2 Orang		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	105.172.000	JumlahDokumen Perencanaan, Pembangun dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan	756.000.000	*Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana*	1 dokumen		Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	756.000.000	Jumlah dokumen Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		*Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG*							
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	76.755.417.221	*Persentasae jembatan yang ditingkatkan*	58,09%		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	81.663.629.405	*Persentasae jembatan yang ditingkatkan*	58,09%	
		Persentasae jembatan yang terbangun	64.00 %				*Persentasae jembatan yang terbangun*	64.00 %	
		Persentase pembanguan/ peningkatan jalur pedestrian	66.00 %				*Persentase pembanguan/ peningkatan jalur pedestrian*	66.00 %	
		Persentase jalan yang dipelihara	74.00 %				*Persentase jalan yang dipelihara*	74.00 %	
		Persentasae jalan yang terbangun	90.00 %				*Persentasae jalan yang terbangun*	90.00 %	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	76.755.417.221	Persentasae jalan yang ditingkatkan	58,09%		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	81.663.629.405	Persentasae jalan yang ditingkatkan	58,09%	
		Persentasae jalan yang terbangun	58,09%				Persentasae jalan yang terbangun	58,09%	
		Persentasae jembatan yang ditingkatkan	64,00%				Persentasae jembatan yang ditingkatkan	64,00%	

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Persentasae jembatan yang terbangun	64,00%				Persentasae jembatan yang terbangun	64,00%	
		Persentase jalan yang dipelihara	74,00%				Persentase jalan yang dipelihara	74,00%	
		Persentase pembanguan/ peningkatan jalur pedestrian	90,00%				Persentase pembanguan/ peningkatan jalur pedestrian	90,00%	
		Persentase pembangunan/peningkatan jalur pedestria	90,00%				Persentase pembangunan/peningkatan jalur pedestria	90,00%	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	7.751.428.536	*Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian*	30 Dokumen		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	6.669.961.070	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	20 Dokumen	
Pembangunan Jalan	8.668.144.000	*Panjang Jalan yang Dibangun*	10.0 km		Pembangunan Jalan	2.619.885.750	Panjang Jalan yang Dibangun	10.0 km	
Rekonstruksi Jalan	22.100.000.000	*Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan*	11.00 km		Rekonstruksi Jalan	24.331.369.893	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	11.00 km	
Rehabilitasi Jalan	-	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi*			Rehabilitasi Jalan	0	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		
Pemeliharaan Berkala Jalan	5.723.935.879	*Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala*	79 km		Pemeliharaan Berkala Jalan	16.231.670.386	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	79 km	

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.625.000.000	*Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin*	138 m		Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.625.000.000	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	138m	
Rehabilitasi Jembatan	2.386.908.806	*Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi*	50 Jembatan		Rehabilitasi Jembatan	3.165.573.806	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	50 Jembatan	
Pembangunan Jembatan	3.500.000.000	*Panjang Jembatan yang Dibangun*	10 Jembatan		Pembangunan Jembatan	2.020.168.500	Panjang Jembatan yang Dibangun	10 Jembatan	
Pemeliharaan Rutin Jalan	25.000.000.000	*Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin*	579 km		Pemeliharaan Rutin Jalan	25.000.000.000	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	579 km	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	375.000.000	*Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik*	100%		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	435.994.550	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	100%	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200.000.000	*Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi (jumlah tenaga terampil yang bersertifikasi terhadap jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan)*	50%		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200.000.000	Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi (jumlah tenaga terampil yang bersertifikasi terhadap jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan)	50%	
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	200.000.000	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan*	50 orang		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	200.000.000	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50 orang	

RANCANAGAN AWAL RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA DPUPR 2024				
Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Uraian	Pagu	Indikator	Target	Lokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	*Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi*	100%		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	160.994.550	Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	100%	
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruks		*Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan*	1 Perangkat Pendukung		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha		Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 dokumen	
Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	100.000.000	*Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan*	1 dokumen		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	160.994.550	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1 dokumen	
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	75.000.000	*Persentase penyedia jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi*	10,33%		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	75.000.000	Persentase penyedia jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	10,33%	
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	75.000.000	*Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk*	1 Lembaga		Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	75.000.000	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 orang	
TOTAL	202.438.573.158					230.647.151.221			

Berdasarkan tabel di atas terlihat ada perbedaan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan adalah karena:

a. Adanya analisis kebutuhan tingkat Kota sehingga ada prioritas pendanaan yang mengharuskan setiap Perangkat daerah melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan skala prioritas.

b. Mulai berlakunya K eputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

c. Serta sudah berlakunya Susunan SOTK Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor;

Perbedaan rumusan kegiatan antara RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan adalah karena adanya Penyesuaian/refocusing anggaran pada beberapa Kegiatan, yaitu:

a. Penambahan Anggaran :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Perubahan	Bertambah
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.856.815.133	20.045.181.932	1.188.366.799
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.759.108.544	3.977.718.544	218.610.000
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000	697.818.000	97.818.000
4.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai			

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Perubahan	Bertambah
	pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	15.134.026.000	15.556.434.845	422.408.845
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.000.000.000	17.339.792.236	12.339.792.236
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1.600.000.000	1.794.423.715	194.423.715
5.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.724.670.000	2.274.670.000	550.000.000
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	560.000.000	803.922.500	243.922.500
6.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	9.209.816.000	10.214.985.450	1.005.169.450
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	7.271.388.000	9.297.086.891	2.025.698.891
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000	1.094.306.710	94.306.710
7.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan			

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Perubahan	Bertambah
	(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.795.440.000	8.420.131.362	6.624.691.362
8.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
	Rekonstruksi Jalan	22.100.000.000	24.331.369.893	2.231.369.893
	Pemeliharaan Berkala Jalan	5.723.935.879	16.231.670.386	10.507.734.507
	Rehabilitasi Jembatan	2.386.908.806	3.165.573.806	778.665.000
9.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	100.000.000	160.994.550	60.994.550

b. Pengurangan Anggaran

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Perubahan	Berkurang
1.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	867.448.500	650.354.700	217.093.800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.449.330.000	1.069.730.000	379.600.000
2.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	846.321.488	736.493.488	109.828.000
3.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**			
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1.537.929.000	1.437.929.000	100.000.000
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	14.899.390.600	14.540.075.221	359.315.379
4.	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**			

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Perubahan	Berkurang
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	7.751.428.536	6.669.961.070	1.081.467.466
	Pembangunan Jalan	8.668.144.000	2.619.885.750	6.048.258.250
	Pembangunan Jembatan	3.500.000.000	2.020.168.500	1.479.831.500
5.	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**			
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	300.000.000	0	300.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	300.000.000	0	300.000.000

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja. Pada dasarnya program dinas tidak terlepas dari kebijakan nasional maupun propinsi, namum program dibuat dan disusun sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah berdasarkan dinamisasi kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat yang berkembang. Kebijakan Daerah tentunya harus mendukung juga kebijakan Nasional begitu pulan sebaliknya, sehingga terjalain satu kesatuan sinergitas dan kesinambungan pembangunan nasional tersebut.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor yang mempunyai fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pembagian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sub urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana Tabel berikut:

Table 7. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014

No	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota
1	Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Pengembangan danpengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas Daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.	A. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. b. Pengembangan danpengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
2	Air Minum	Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi,ndan SPAM untukkepentingan strategis nasional.	Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota.	Pengelolaan dan pengembangan SPAM dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
3	Air Limbah	Penetapan pengembangan Sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional. Pengelolaan dan pengembangan Sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan Sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem air limbah domestik regional.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem pengelolaan air limbah domestik dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
4	Drainase	Penetapan pengembangan sistem drainase secara nasional. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lintas Daerah provinsi, dan sistem drainase untuk kepentingan strategis nasional.	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota.	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
5	Jalan	Pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional. Penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.	Penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan Provinsi.	Penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan Kabupaten/ Kota.

No	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota
6	Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing. Pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi. Pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi luar negeri	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Provinsi.	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kabupaten/ Kota. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional. Pelaksanaan kerja sama penataan ruang antarnegara.	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Provinsi	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Kabupaten/ Kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Strategi merupakan aturan atau arahan untuk mencapai misi dan tujuan yang dapat meliputi kegiatan atau program secara keseluruhan. Strategi dibangun melalui pemanfaatan semua kekuatan (sumberdaya) dan peluang secara optimal serta memperhatikan semua kelemahan dan ancaman sebagai bahan koreksi. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dengan memanfaatkan semua kelebihan dan meminimumkan kelemahan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Perumusan Tujuan, Strategis, dan Arah Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tahun 2019-2024 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1.Tercapainya infrastruktur permukiman yang baik, sehat dan berkualitas.

Indikator Tujuan :

1.1 Angka Universal Akses air minum dan air limbah.
1.2 Persentase penyediaan infrastruktur pemukiman yang berkondisi baik.
1.3 Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik.

Sasaran:

1.1.1 Meningkatnya pelayanan air minum dan air limbah.
1.2.1 Meningkatnya infrastruktur pemukiman yang berkondisi baik.
1.3.1 Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air

Indikator Sasaran:

1.1.1.1 persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman.
1.1.1.2 Persentase rumahtangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik yang aman
1.2.1.1 Persentase jalan lingkungan pemukiman yang berkondisi baik
1.3.1.1 Persentase irigasi/ saluran/ sungai yang berkondisi baik

2. Tercapainya layananan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Indikator Tujuan :

2.1 Nilai Rata-raa Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah.

Sasaran:

2.1.1 Meningkatnya akuntabilitas Dinas PUPR.

Indikator Sasaran:

2.1.1.1 Nilai LKIP Dinas PUPR.

3. Terciptanya kualitas ruang dan infrastruktur kebinamargaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Indikator Tujuan :

3.1 Persentase Kesesuaian indiktator program RDTR dengan RTRW
3.2 Persentase jalan yang berkondisi mantap (baik dan sedang).

Sasaran:

3.1.1 Meningkatnya pengendalian tata ruang kota.
3.2.1 Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur kebinamargaan.

Indikator Sasaran:

3.1.1.1 Persentase (%) realisasi rencana struktur ruang sesuai RDTR.
3.1.1.2 Persentase kesesuaian dan keteraturan mendirikan bangunan.
3.2.1.1 Persentase jalan yang berkondisi mantap.

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun alokasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2024 mengacu pada :

a. Keterkaitan dengan Penangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
b. Visi dan Misi Walikota Bogor Tahun 2019-2024
c. Pengembangan jaringan jalan yang merupakan simpul simpul kemacetan di Kota Bogor.
d. Pencapaian SDGs (Suistainable Development Goals) untuk indikator terkait pemenuhan kebutuhan air minum dan air limbah.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, terdiri dari 9 (Sembilan) Program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 56 (Lima Puluh Enam) Sub Kegiatan dan semua kegiatan tersebar di seluruh wilayah Kota Bogor. Dengan total anggaran Rp230.647.151.221 (terbilang: Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh satu Rupiah).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Uraian rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 selengkapnya dapat di lihat pada tabel 11 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraaan Maju Tahun 2024 dibawah ini:

Table 8. Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**330.678.591.894,00**	**202.438.573.158,00**	**230.647.151.221,00**	**-110.409.976.473,00**							**352.411.728.862,00**	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**330.678.591.894,00**	**202.438.573.158,00**	**230.647.151.221,00**	**-110.409.976.473,00**							**352.411.728.862,00**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**330.678.591.894,00**	**202.438.573.158,00**	**48.675.370.936,00**	**-110.409.976.473,00**							**352.411.728.862,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**3,50 A Point Point**	**3,50 A Point Point**	**48.692.258.375,00**	**47.877.097.937,00**	**48.675.370.936,00**	**8.213.570.477,00**							**56.905.828.852,00**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN*	100 %	100 %	18.371.820.775,00	19.030.875.133,00	20.219.241.932,00	1.893.426.821,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	ASN Dinas PUPR		22.192.918.852,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang/ bulan	116 Orang/ bulan	18.175.380.775,00	18.856.815.133,00	20.045.181.932,00	1.915.806.821,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			19.992.918.852,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	196.440.000,00	174.060.000,00	174.060.000,00	-22.380.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan kepegawaian perangkat daerah*	100 %	100 %	95.276.400,00	79.151.000,00	79.151.000,00	-16.125.400,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Non ASN Dinas PUPR		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	95.276.400,00	79.151.000,00	79.151.000,00	-16.125.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah*	82.5 %	82.5 %	5.286.240.200,00	3.869.121.900,00	3.272.428.100,00	-2.013.812.100,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		6.357.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	99.906.600,00	99.906.600,00	99.906.600,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.881.514.100,00	1.282.899.800,00	1.282.899.800,00	-598.614.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	867.448.500,00	867.448.500,00	650.354.700,00	-217.093.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			990.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	779.758.000,00	49.668.000,00	49.668.000,00	-730.090.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			420.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	119.869.000,00	119.869.000,00	119.869.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			137.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.537.744.000,00	1.449.330.000,00	1.069.730.000,00	-468.014.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*	N/A %	N/A %	16.360.082.700,00	14.993.882.700,00	14.993.882.700,00	-1.366.200.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		18.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Alat Besar															
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	15.360.082.700,00	14.993.882.700,00	14.993.882.700,00	-366.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			17.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	100 %	2.494.826.728,00	4.605.430.032,00	4.714.212.032,00	2.219.385.304,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		2.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	846.321.488,00	846.321.488,00	736.493.488,00	-109.828.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	1.648.505.240,00	3.759.108.544,00	3.977.718.544,00	2.329.213.304,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik*	88 %	88 %	6.084.011.572,00	5.298.637.172,00	5.396.455.172,00	-687.556.400,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		6.795.410.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90 Unit	90 Unit	402.732.000,00	402.732.000,00	402.732.000,00	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	85 Unit	85 Unit	4.460.179.572,00	4.090.405.172,00	4.090.405.172,00	-369.774.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	697.818.000,00	97.818.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	621.100.000,00	205.500.000,00	205.500.000,00	-415.600.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			685.410.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%) Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)**	**1 Lokasi 53,79 % 94,23 %**	**1 Lokasi 53,79 % 94,23 %**	**50.206.800.000,00**	**33.869.408.400,00**	**46.826.033.196,00**	**-5.756.800.000,00**							**44.450.000.000,00**	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen perencanaan SDA yang disusun (perbandingan jumlah dokumen yang tersusun terhadap rencana pembangunan dan pemeliharaan SDA) Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani Panjang Sungai yang berkondisi baik*	111.1922 KM 1 Lokasi 20 Dokumen	111.1922 KM 1 Lokasi 20 Dokumen	38.500.000.000,00	23.162.608.400,00	36.119.233.196,00	-2.380.766.804,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		32.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Normalisasi/Restorasi Sungai															
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	942 KM	942 KM	1.500.000.000,00	1.428.582.400,00	1.428.582.400,00	-71.417.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing															
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	4968 KM	4968 KM	25.000.000.000,00	15.134.026.000,00	15.556.434.845,00	-9.443.565.155,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			17.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing															
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	4975 KM	4975 KM	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	17.339.792.236,00	7.339.792.236,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai															
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	20 Dokumen	16 Dokumen	2.000.000.000,00	1.600.000.000,00	1.794.423.715,00	-205.576.285,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)*	57.04 %	57.04 %	11.706.800.000,00	10.706.800.000,00	10.706.800.000,00	-1.000.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	-		12.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan															
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5541 KM	5541 KM	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan															

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	162 KM	162 KM	10.706.800.000,00	10.706.800.000,00	10.706.800.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			12.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap ari minum melalui SPAM Bukan Jaringan perpipaan Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap ari minum melalui SPAM Jaringan perpipaan**	**67,40 70,42 %**	**67,40 70,42 %**	**1.160.463.200,00**	**0,00**	**0,00**	**269.536.800,00**							**1.430.000.000,00**	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan;*	253546 SR	253546 SR	1.160.463.200,00	0,00	0,00	-1.160.463.200,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.430.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)															
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	33 Orang	33 Orang	160.876.000,00	0,00	0,00	-160.876.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan															
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	4 Unit	0 Unit	999.587.200,00	0,00	0,00	-999.587.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak (%) Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman (%)**	**73,10 8,55 % %**	**73,10 8,55 % %**	**16.529.397.600,00**	**19.948.669.600,00**	**20.283.276.721,00**	**8.249.535.500,00**							**24.778.933.100,00**	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Aman Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak*	185196 Rumah Tangga 21661 Rumah Tangga	185196 Rumah Tangga 21661 Rumah Tangga	16.529.397.600,00	19.948.669.600,00	20.283.276.721,00	3.753.879.121,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		24.778.933.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman															
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	125 M^3/Hari	125 M^3/Hari	1.999.670.000,00	1.724.670.000,00	2.274.670.000,00	275.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat															
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	160 M³/Hari	160 M³/Hari	1.500.000.000,00	560.000.000,00	803.922.500,00	-696.077.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja															
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1100 Rumah Tangga	1100 Rumah Tangga	1.850.000.000,00	1.537.929.000,00	1.437.929.000,00	-412.071.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			1.063.912.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)															
	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	84 Penyelenggara	84 Penyelenggara	272.734.000,00	0,00	0,00	-272.734.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja															
	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	1.800.000.000,00	0,00	0,00	-1.800.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			1.980.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)															
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1.740.000.000,00	1.226.680.000,00	1.226.680.000,00	-513.320.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat															
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	450 Rumah Tangga	450 Rumah Tangga	7.366.993.600,00	14.899.390.600,00	14.540.075.221,00	7.173.081.621,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-REGULER DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			15.535.020.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase dokumen perencanaan sda yang disusun Persentase Drainase yang berkondisi baik**	**100,00 27,75 % %**	**100,00 27,75 % %**	**29.750.000.000,00**	**19.456.368.000,00**	**22.581.543.051,00**	**1.350.000.000,00**							**31.100.000.000,00**	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang Drainase yang dipelihara Panjang drainse yang dibangun/ ditingkatkan*	380 M 8.00 M	380 M 8.00 M	29.750.000.000,00	19.456.368.000,00	22.581.543.051,00	-7.168.456.949,00			-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		31.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan															
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4000 Sistem Drainase Perkotaan	4000 Sistem Drainase Perkotaan	12.000.000.000,00	9.209.816.000,00	10.214.985.450,00	-1.785.014.550,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			13.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan															
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4000 Sistem Drainase Perkotaan	4000 Sistem Drainase Perkotaan	12.000.000.000,00	7.271.388.000,00	9.297.086.891,00	-2.702.913.109,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			13.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan															

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	20 Dokumen	10 Dokumen	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.094.306.710,00	-905.693.290,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan															
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	3290 Sistem Drainase Perkotaan	1725 m Sistem Drainase Perkotaan	3.750.000.000,00	1.975.164.000,00	1.975.164.000,00	-1.774.836.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)terhadap IMB yang dikeluarkan**	**12,00 90,00 98,00 % % %**	**12,00 90,00 98,00 % % %**	**4.779.012.600,00**	**2.656.612.000,00**	**9.281.303.362,00**	**272.587.400,00**							**5.051.600.000,00**	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)terhadap IMB yang dikeluarkan Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan*	90 % 96.00 %	90 % 96.00 %	4.779.012.600,00	2.656.612.000,00	9.281.303.362,00	4.502.290.762,00			-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		5.051.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	3.824.896.000,00	1.795.440.000,00	8.420.131.362,00	4.595.235.362,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung															
	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	2 Orang	2 Orang	198.116.600,00	105.172.000,00	105.172.000,00	-92.944.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG															

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	1 Dokumen	756.000.000,00	756.000.000,00	756.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			831.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentasae jembatan yang ditingkatkan Persentase jembatan yang terbangun Persentase pembanguan/ peningkatan jalur pedestrian Persentasae jalan yang dipelihara Persentasae jalan yang terbangun**	**58,09 64,00 66,00 74,00 90,00 % % % % %**	**58,09 64,00 66,00 74,00 90,00 % % % % %**	**177.685.660.119,00**	**76.755.417.221,00**	**71.239.087.941,00**	**9.002.206.791,00**							**186.687.866.910,00**	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentasae jalan yang ditingkatkan Persentasae jalan yang terbangun Persentasae jembatan yang ditingkatkan Persentasae jembatan yang terbangun Persentase jalan yang dipelihara Persentase jalan yang ditingkatkan Persentase jalan yang terbangun Persentase jembatan yang ditingkatkan Persentase jembatan yang terbangun Persentase pembanguan/ peningkatan jalur pedestrian Persentase pembangunan/peningkatan jalur pedestrian*	58.09 % 64.00 % 66.00 % 74 % 90.00 %	58,09 % 58.09 % 64,00 % 64.00 % 66,00 % 66.00 % 74 % 74,00 % 90,00 % 90.00 %	177.685.660.119,00	76.755.417.221,00	71.239.087.941,00	-106.446.572.178,00			-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		186.687.866.910,00	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan															
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	30 Dokumen	20 Dokumen	13.588.969.919,00	7.751.428.536,00	8.245.419.606,00	-5.343.550.313,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			14.947.866.910,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
Pembangunan Jalan															
	Panjang Jalan yang Dibangun	10 KM	10 KM	30.500.000.000,00	8.668.144.000,00	2.619.885.750,00	-27.880.114.250,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			33.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rekonstruksi Jalan															
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	11 KM	11 KM	55.000.000.000,00	22.100.000.000,00	22.331.369.893,00	-32.668.630.107,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			55.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Berkala Jalan															

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	79 KM	79 KM	20.071.690.200,00	5.723.935.879,00	6.231.670.386,00	-13.840.019.814,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			22.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Rutin Jembatan															
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	138 Jembatan	138 Jembatan	1.625.000.000,00	1.625.000.000,00	1.625.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jembatan															

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	50 Jembatan	50 Jembatan	8.400.000.000,00	2.386.908.806,00	3.165.573.806,00	-5.234.426.194,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			9.240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Jembatan															
	Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Jembatan	10 Jembatan	23.500.000.000,00	3.500.000.000,00	2.020.168.500,00	-21.479.831.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Rutin Jalan															

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	579 KM	579 KM	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik**	**100,00 %**	**100,00 %**	**375.000.000,00**	**375.000.000,00**	**435.994.550,00**	**-17.500.000,00**							**357.500.000,00**	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi (jumlah tenaga terampil yang bersertifikasi terhadap jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan)*	50 %	50 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis															

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi*	N/A %	N/A %	100.000.000,00	100.000.000,00	160.994.550,00	60.994.550,00			-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi															

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota															
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	160.994.550,00	110.994.550,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase penyedia jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi*	10.33 %	10.33 %	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		82.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi															
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1 Lembaga	1 Lembaga	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			82.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Persentase (%) Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang**	**100,00 %**	**100,00 %**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**900.000.000,00**	**150.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase (%) Jumlah RRTR yang disusun terhadap jumlah RRTR yang harus disusun sesuai RTRW*	100 %	100 %	900.000.000,00	900.000.000,00	300.000.000,00	-600.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		990.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota															
	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota															

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang															
	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	3 Orang	3 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase (%) Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Permanfaatan ruang Daerah*	100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang															
	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase (%) Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah*	100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang															
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**330.678.591.894,00**							**347.231.708.262,00**

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						**330.678.591.894,00**							**347.231.708.262,00**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**330.678.591.894,00**							**347.231.708.262,00**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah***	**3,50 Point A Point**			**A Point 3,50 Point**	**48.692.258.375,00**						**3,50 Point A Point**	**56.905.828.852,00**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN*	100 %	100		100 %	18.371.820.775,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	ASN Dinas PUPR	100 %	22.192.918.852,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		186		113 Orang/bulan	18.175.380.775,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	ASN Dinas PUPR		19.992.918.852,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	196.440.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	ASN Dinas PUPR		2.200.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan kepegawaian perangkat daerah*	50 %	50%		100 %	95.276.400,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Non ASN Dinas PUPR	50 %	110.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		50 Paket		1 Paket	95.276.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Non ASN Dinas PUPR		110.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah*	82.5 %	82,50%		82.5 %	5.286.240.200,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat	82.5 %	6.357.500.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket	99.906.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat		110.000.000,00

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15 Paket		12 Paket	1.881.514.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat		2.200.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket		9 Paket	867.448.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat		990.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		3 Paket	779.758.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat		420.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		2 Paket	119.869.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat		137.500.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan		4 Laporan	1.537.744.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat		2.500.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*	N/A %	40%		N/A %	16.360.082.700,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat	N/A %	18.700.000.000,00
Pengadaan Alat Besar													
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		5 Unit		10 Unit	15.360.082.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat		17.600.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1.000.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat		1.100.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	100%		100 %	2.494.826.728,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 %	2.750.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100%		48 Laporan	846.321.488,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat		850.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		24 Laporan	1.648.505.240,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat		1.900.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik*	88 %	88%		88 %	6.084.011.572,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat	88 %	6.795.410.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8 Unit		90 Unit	402.732.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat		450.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		34 Unit		85 Unit	4.460.179.572,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat		5.000.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		2 Unit	600.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat		660.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	621.100.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Reformasi Birokrasi	Masyarakat		685.410.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	***Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%) Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)***	**-**	**1 Lokasi 51,45 % 93,47 %**		**1 Lokasi 53,79 % 94,23 %**	**50.206.800.000,00**						**-**	**45.550.000.000,00**

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen perencanaan SDA yang disusun (perbandingan jumlah dokumen yang tersusun terhadap rencana pembangunan dan pemeliharaan SDA)* *Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani* *Panjang Sungai yang berkondisi baik*	-	16 Dokumen		20 Dokumen 1 Lokasi 111.1922 KM	38.500.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	-	32.350.000.000,00
Normalisasi/Restorasi Sungai													
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		9,17		942 KM	1.500.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.650.000.000,00
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing													
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan		48,8 km		4968 KM	25.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		17.500.000.000,00
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi		48,8 km		4975 KM	10.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		11.000.000.000,00
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai													
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		16 Dokumen		20 Dokumen	2.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		2.200.000.000,00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)*	-	61,25		57.04 %	11.706.800.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	-	-	13.200.000.000,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		2 km		5541 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastr uktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	-		1.100.000.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan													
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		77,6 km		162 KM	10.706.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastr uktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	-		12.100.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	***Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan perpipaan Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan***	**70,42 % 67,40 %**	64,28%		**67,40 % 70,42 %**	**1.160.463.200,00**						**70,42 % 67,40 %**	**1.430.000.000,00**

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan;*	2249528 SR	243,8 SR		253546 SR	1.160.463.200,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	253546 SR	1.430.000.000,00
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		30		33 Orang	160.876.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		330.000.000,00
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan													
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				4 Unit	999.587.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.100.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	***Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman (%)*** ***Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak (%)***	**73,10 %** **8,55 %**	5,2% 69,91%		**8,55 %** **75,10 %**	**16.529.397.600,00**						**73,10 %** **8,55 %**	**16.943.912.500,00**

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Aman Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak*	185196 Rumah Tangga 21661 Rumah Tangga	179,95 Rumah Tangga 169,057 Rumah Tangga		21661 Rumah Tangga 185196 Rumah Tangga	16.529.397.600,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat	185196 Rumah Tangga 21661 Rumah Tangga	16.943.912.500,00
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman													
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				125 M^3/Hari	1.999.670.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		2.200.000.000,00
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat													
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan				160 M^3/Hari	1.500.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.650.000.000,00
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				1100 Rumah Tangga	1.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.063.912.500,00
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya				84 Penyelenggara	272.734.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		550.000.000,00
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja													
	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				3 Unit	1.800.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.980.000.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1.740.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		1.800.000.000,00
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat													
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				450 Rumah Tangga	7.366.993.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat		7.700.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	***Persentase dokumen perencanaan sda yang disusun Persentase Drainase yang berkondisi baik***	**27,75 % 100,00 %**	27,46%		**100,00 % 27,75 %**	**29.750.000.000,00**						**27,75 % 100,00 %**	**32.600.000.000,00**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang Drainase yang dipelihara Panjang drainse yang dibangun/ ditingkatkan*	380 M 8.00 M	378 m 6 m		380 M 8.00 M	29.750.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat	380 M 8.00 M	32.600.000.000,00

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan													
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		3/4,34 m		4000 Sistem Drainase Perkotaan	12.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		13.200.000.000,00
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan													
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		4 m		4000 Sistem Drainase Perkotaan	12.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		13.200.000.000,00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				20 Dokumen	2.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		2.200.000.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan													
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				3290 Sistem Drainase Perkotaan	3.750.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		4.000.000.000,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	***Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)terhadap IMB yang dikeluarkan*** ***Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF*** ***Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan***	**98,00 %** **33,00 %** **90,00 %**	86% 10% 94%		**98,00 %** **12,00 %** **90,00 %**	**4.779.012.600,00**						**98,00 %** **12,00 %** **90,00 %**	**5.051.600.000,00**

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)terhadap IMB yang dikeluarkan Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan*	96.00 % 90 %	86%		96.00 % 90 %	4.779.012.600,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat	96.00 % 90 %	5.051.600.000,00
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	3.824.896.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		4.000.000.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung													
	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				2 Orang	198.116.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah	Masyarakat		220.000.000,00

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
										berbasis potensi lokal			
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	756.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		831.600.000,00

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	***Persentasae jalan yang dipelihara Persentasae jalan yang terbangun Persentasae jembatan yang ditingkatkan Persentase jembatan yang terbangun Persentase pembanguan/ peningkatan jalur pedestrian Persentasae jalan yang ditingkatkan***	**66,00 % 90,00 % 74,00 % 90,00 % 64,00 % 58,09 %**			**74,00 % 90,00 % 58,09 % 64,00 % 66,00 % 90,00 %**	**177.685.660.119,00**						**66,00 % 90,00 % 74,00 % 90,00 % 64,00 % 58,09 %**	**186.687.866.910,00**
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentasae jalan yang ditingkatkan Persentasae jalan yang terbangun Persentasae jembatan yang ditingkatkan Persentasae jembatan yang terbangun Persentase jalan yang dipelihara Persentase pembanguan/ peningkatan jalur pedestrian*	66.00 % 90.00 % 90.00 % 74 % 64.00 % 58.09 %	86% 86% 56,97% 72% 50%		90.00 % 90.00 % 58.09 % 64.00 % 74 % 66.00 %	177.685.660.119,00			-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat	66.00 % 90.00 % 90.00 % 74 % 64.00 % 58.09 %	186.687.866.910,00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		58 Dokumen		30 Dokumen	13.588.969.919,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		14.947.866.910,00
Pembangunan Jalan													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
	Panjang Jalan yang Dibangun		4 km		10 KM	30.500.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		33.000.000.000,00
Rekonstruksi Jalan													
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		3,2 km		11 KM	55.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		55.500.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan													
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		72 km		79 KM	20.071.690.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		22.000.000.000,00

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
Pemeliharaan Rutin Jembatan													
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		72 km		138 Jembatan	1.625.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		2.000.000.000,00
Rehabilitasi Jembatan													
	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi		20 m		50 Jembatan	8.400.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		9.240.000.000,00
Pembangunan Jembatan													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
	Jumlah Jembatan yang Dibangun		13 m		10 Jembatan	23.500.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		25.000.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan													
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		72 km		579 KM	25.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		25.000.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	***Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik***	**100,00 %**	100%		**100,00 %**	**375.000.000,00**						**100,00 %**	**412.500.000,00**
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi (jumlah tenaga terampil yang bersertifikasi terhadap jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan)*	100 %	81%		50 %	200.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi	Masyarakat	50 %	220.000.000,00

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
										daerah berbasis potensi lokal			
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis													
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi		200 orang		50 Orang	200.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		220.000.000,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi*	N/A %			N/A %	100.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat	N/A %	110.000.000,00
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		55.000.000,00
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota													
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		55.000.000,00
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase penyedia jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi*	10.33 %			10.33 %	75.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat	10.33 %	82.500.000,00

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi													
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				1 Lembaga	75.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		82.500.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	***Persentase (%) Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang***	**100,00 %**	60%		**100,00 %**	**1.500.000.000,00**						**100,00 %**	**1.650.000.000,00**
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase (%) Jumlah RRTR yang disusun terhadap jumlah RRTR yang harus disusun sesuai RTRW*	100 %	50%		100 %	900.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat	100 %	990.000.000,00
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota		1 Dokumen		3 Dokumen	300.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Pembangu nan Infrastr uktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		330.000.000,00
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota													
	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				3 Dokumen	300.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Pembangu nan Infrastr uktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		330.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang													

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				3 Orang	300.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		330.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase (%) Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Permanfaatan ruang Daerah*	100 %	60%		100 %	300.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat	100 %	330.000.000,00
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang													
	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		330.000.000,00

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase (%) Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan uang Daerah*	100 %	55,56%		100 %	300.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Pembangu nan Infrastr uktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat	100 %	330.000.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang													
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen		1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Pembangu nan Infrastr uktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat		330.000.000,00
						330.678.591.894,00							**347.231.708.262,00**

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2024 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai bulan Juni 2024 Triwulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwal Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan. Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bogor tahun 2024 dan bersifat indikatif. Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah kota Bogor.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tahun 2024 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar Rp28.208.578.063,00 atau 13,93 % dari anggaran murni Rp202.438.573.158,00 menjadi anggaran perubahan Rp230.647.151.221,00, perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2024.

N. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan pembangunan daerah yang merupakan proses penyusunan program dan kegiatan pada jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib Menyusun rencana kerja dan rencana kerja perubahan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Perencanaan pembangunan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah. Perencanaan pembangunan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan demikian, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2024 ini diharapkan memiliki sinergitas dengan program serta kegiatan Pemerintah Kota Bogor guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bogor. Renja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2024 ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, baik dalam program dan kegiatan maupun penganggaran Renja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2024.

Di samping untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2024 ini juga dimaksudkan untuk terselenggaranya tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui perencanaan dan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Mentri Dalam Negeri nomor 050/5889 Tahun 2021;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
13. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024;
15. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Propinsi Jawa

Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Nomor 45);

19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
23. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 171 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berupa penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan kota Bogor 2019–2024.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mencakup indikator kinerja, sasaran dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA BOGOR TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Perubahan Tahun lalu dan capaian Renstra 2019-2024

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor

Dalam melaksanakan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan sesuai indikator yang telah ditetapkan. Hal tersebut berguna untuk penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024. Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan meliputi; perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program kegiatan.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor tahun 2023, serta progres pencapaian kinerja Perubahan Renstra Periode 2019-2024 sehingga dapat teridentifikasi sejauh mana Program Dinas Arsip dan Perpustakaan melaksanakan program dan kegiatan, pada umumnya realisasi program dan kegiatan telah dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra sebelumnya tahun 2019-2024 akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	
			K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	3	4	5		6			7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan																		
	Bidang Urusan Perpustakaan																		
	Program Pembinaan Perpustakaan	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota**	**100**	**2.449.000.000**	**100**	**%**	**309.720.772**	**100**	**500.000.000**	**100**	**480.783.200**	**400,00**	**953.895.400**	**100**	**190,78**		**1.263.616.172**		**1**
		Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/ perpustakaan keliling/taman bacaan	**76**		**40**	**%**		**56**		**100**		**268,00**		**179**					
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupetn/Kota	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/ perpustakaan keliling/taman bacaan	1700	2.449.000.000	381	Orang	309.720.772	500	500.000.000	96,16	480.783.200	**220,16**	**1.512.693.300**	**19**	**302,54**	**601**	**1.822.414.072**	**35,36215529**	**74,41**
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50	1.344.000.000	152	Perpustakaan	98.661.200	50	230.000.000	95,24	219.050.000	**190,24**	617.999.100	**190**	**268,70**	**342**	**716.660.300**	**684,4782609**	**53,32**
	Pengembangan Bahan Pustaka	Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	5736	1.105.000.000	4014	Eksemplar	109.412.500	3776	270.000.000	96,94	261.733.200	**1.473,94**	276.695.100	**3**	**102,48**	**5.488**	**386.107.600**	**1**	**34,94**
													Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**96,52**	**302,54**			**0**	**34,94**
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

	Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan																	
	Bidang Urusan Kearsipan																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KABUPATEN / KOTA	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**100**	**11.073.000.000**	**95,31**	**%**	**11.940.366.947**	**100**	**9.400.133.143**	**100**	**9.569.665.739**	**144,69**	**14.905.736.666**	**144,69**	**158,57**		**26.846.103.613**	**0**	**242,45**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen	100	25.000.000	100	%	6.878.400	100	10.000.000	100	10.000.000	**187,08**	19.898.492	**187,08**	**198,98**		**26.776.892**	-	**107,11**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	25.000.000	4	%	6.878.400	4	10.000.000	100	10.000.000	**187,08**	19.898.492	**4.677,00**	**198,98492**		**26.776.892**	-	**107,11**
													Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**1669,59**	**198,98**			**0,00**	**107**
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	100	7.022.000.000	100	%	7.259.090.003	100	6.955.477.863	97,92	6.810.516.346	**172,92**	**11.947.218.734**	**172,9158655**	**171,77**	**273**	**19.206.308.737**	**272,9158655**	**273,52**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12	7.022.000.000	12	Bulan	7.259.090.003	12	6.955.477.863	97,92	6.810.516.346	**106,92**	11.947.218.734	**890,9655454**	**171,77**	**119**	**19.206.308.737**	**990,9655454**	**273,52**
													Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**890,97**	**171,77**			**631,94**	**273,52**
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	50.000.000	0		-	0	15.000.000	12,18	1.827.000	**24**	**3.654.000**	**24**	**24,36**	**24**	**3.654.000**	**24,36**	**7,31**
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	50.000.000	0		-	0	15.000.000	12,18	1.827.000	**24**	3.654.000	**24**	**24,36**	**24**	**3.654.000**	**24,36**	**7,31**
													Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**24,36**	**24,36**			**24,36**	**7,31**
													Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan Operasional perangkat Daerah	100	791.000.000	95,21		771.219.992	100	804.226.440	92,17	741.216.147	**124,82**	**1.295.039.773**	**124,8151055**	**161,0292461**	**220**	**2.066.259.765**	**220,0251055**	**261,22**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	100	39.000.000	100		10.398.500	100	26.598.400	100,00	26.598.400	**100,00**	36.143.400	**100**	**135,8856172**	**200**	**46.541.900**	**200**	**119,34**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	84.000.000	100		39.473.300	100	61.540.000	90,16	55.482.000	**90,16**	95.707.000	**90,1559961**	**155,519987**	**190**	**135.180.300**	**190,1559961**	**160,93**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	100	58.000.000	100		7.820.600	100	67.925.100	93,96	63.819.300	**93,96**	85.386.400	**93,95540088**	**125,7066975**	**194**	**93.207.000**	**193,9554009**	**160,70**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	33.000.000	95,13		367.102.000	100	114.440.800	90,25	103.280.300	**122,22**	196.489.900	**122,2177962**	**171,70**	**217**	**563.591.900**	**217,3477962**	**1707,85**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	100	31.000.000	100		14.749.800	100	32.845.800	75,64	24.845.800	**75,64**	36.490.400	**75,64376572**	**111,0960914**	**176**	**51.240.200**	**175,6437657**	**165,2909677**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Negeri)	100	659.000.000	94,30		331.675.792	100	500.876.340	93,27	467.190.347	**125,24**	660.978.333	**125,2445889**	**131,96**	**220**	**992.654.125**	**219,5445889**	**150,63**
													Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**101,20**	**138,64**			**199,44**	**410,79**
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100	439.000.000	99,29		2.967.853.000	100	202.453.500	99,85	202.145.440	**100,00**	**202.145.440**	**100**	**99,84783666**	**199**	**3.169.998.440**	**199,29**	**722,10**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit peralatan gedung	100	36.000.000	99,29		2.967.853.000	100	36.197.200	100,00	36.196.000	**100,00**	36.196.000	**100**	**99,99668483**	**199**	**3.004.049.000**	**199,29**	**8344,58**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-		-	-	166.256.300	99,82	165.949.440		165.949.440						
													Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**100,00**			**199,29**	**8344,58**
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**ST**			**ST**	**ST**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang operasional	100	1.078.000.000	65,35		780.095.864	100	1.291.469.580	76,80	991.897.117	**134,90**	**1.742.129.612**	**134,90**	**134,90**	**200**	**2.522.225.476**	**200,2451333**	**233,97**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	676.000.000	37,91		129.296.728	100	668.572.500	62,78	419.756.038	**109,09**	729.353.774	**109,0912016**	**109,09**	**147**	**858.650.502**	**147,0012016**	**127,02**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	402.000.000	86,67		380.515.730	100	592.457.080	96,57	572.141.079	**170,95**	1.012.775.838	**170,9450139**	**170,95**	**258**	**1.393.291.568**	**257,6150139**	**346,59**
													Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**140,02**	**140,02**			**200,69**	**3479,35**
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentasee BMD Dinas Arsip dan Perpustakaan berkondisi baik	100	1.371.000.000	85,52		403.950.094	100	578.714.000	92,66	536.241.889	**147,61**	**844.019.919**	**147,61**	**145,84**	**233**	**1.247.970.013**	**233,1345497**	**91,03**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	154.000.000	88,98		145.371.400	100	153.380.000	93,46	143.341.700	**166,49**	255.367.400	**166,49**	**166,49**	**255**	**400.738.800**	**255,4683701**	**260,22**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	87.000.000	68,87		107.778.800	100	142.100.000	81,38	115.645.500	**116,06**	164.924.300	**116,06**	**116,06**	**185**	**272.703.100**	**184,9309571**	**313,45**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	301.000.000	100		50.020.000	100	142.600.000	96,66	137.841.697	**143,41**	204.505.394	**143,41**	**143,41**	**243**	**254.525.394**	**243,410601**	**84,56**
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	1.069.000.000	98,61		100.779.894	100	140.634.000	99,13	139.412.992	**171,44**	227.683.522	**171,44**	**161,90**	**270**	**328.463.416**	**270,0518102**	**30,73**
													Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**157,43**	**152,65**			**237,40**	**156,00**
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Program Pengelolaan Arsip	**Persentase PD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib/baku**	**100**	**1.278.000.000**	**98,41**		**313.691.000**	**100**	**176.595.800**	**99,87**	**176.359.800**	**155,39**	**352.719.200**	**155,39**	**199,73**	**-**	**666.410.200**	**0**	**52,14**
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang dilakukan audit yang bernilai baik	100	771.000.000	97,12		166.705.400	100	105.286.400	99,78	105.050.400	**169,36**	210.100.800	**169,36**	**199,55**	**266**	**376.806.200**	**266,4778554**	**48,87**
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan digunakan	100	349.000.000	97,32		72.710.000	100	51.756.400	100,00	51.756.400	**200,00**	103.512.800	**200**	**200,00**	**297**	**176.222.800**	**297,3236254**	**50,49**
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas yang Dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	100	179.000.000	100		49.780.000	100	53.530.000	99,56	53.294.000	**199,12**	106.588.000	**199,12**	**199,12**	**299**	**156.368.000**	**299,1227293**	**87,36**
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten / Kota	Hasil Pengawasan Arsip Dinamis kewenangan	100	243.000.000	99,83		44.215.400	100	-			-	-	**0**	-	**100**	**44.215.400**	**99,83**	**18,20**
													Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**99,56**	-			**192,55**	**51,41**
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	-			**Sangat Tinggi**	**Rendah**
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dibuatkan	100	304.000.000	99,95		73.670.000	100	-	**100**		**100,00**	-	**100**	-	**200**	**73.670.000**	**199,95**	**24,23**
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100	304.000.000	99,95		73.760.000	100	-	100		**100,00**	-	**100**	-	**200**	**73.760.000**	**199,95**	**24,26**
													Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	-			**0,00**	**24**
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	-			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat	Jumlah PD yang dilakukan pengawasan kearsipan	100	144.000.000	99,90		73.315.600	100	71.309.400	100	71.309.400	**200,00**	**142.618.800**	**200**	**200,00**	**300**	**215.934.400**	**299,9**	**149,95**
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	100	144.000.000	99,90		73.315.600	100	71.309.400	100	71.309.400	**200,00**	142.618.800	**200**	**200,00**	**300**	**215.934.400**	**299,9**	**149,95**
													Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**200,00**	**200,00**			**0,00**	**150**
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	**Prosentase Arsip Statis yang diselamatkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan**	**100**	**250.000.000**	**0**		**-**	**100**	**103.265.200**	**96,32**	**99.462.000**	**189,25**	**195.429.000**	**92,94**	**189,25**	**-**	**195.429.000**	**0**	**78,17**
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilakukan autentifikasi dan dialih mediakan	100	353.000.000	0		-	100	103.265.200	96,32	99.462.000	**189,25**	195.429.000	189,25	**189,25**	**189**	**195.429.000**	**189,2537655**	**55,36**
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	100	353.000.000	0		-	100	103.265.200	96,32	99.462.000	**189,25**	195.429.000	189,25	**189,25**	**189**	**195.429.000**	**189,2537655**	**55,36**
													Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**134,32**	**184,58**	**189,25**		**189,25**	**184,58**
													Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
													RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	**134,32**	**184,58**			**170,45**	**1198,99**
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

Sumber : Laporan triwulanan evaluasi RKPD Tahun 2023

Hasil evaluasi Renja tahun 2023 diatas menjadi bahan pertimbangan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2024 agar pencapaian target baik fisik maupun keuangan terealisasi secara maksimal. Keberhasilan pencapaian kinerja program/kegiatan di tahun 2024 tidak terlepas dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor. Faktor faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan tersebut adalah:

a. Adanya koordinasi, dukungan, dan komitmen pimpinan dan pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor dalam melaksanakan program dan kegiatan secara optimal sesuai Rencana Kerja Perubahan;
b. Konsisten atas target waktu dan target capaian dari program dan kegiatan yang sudah direncanakan;
c. Adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakat, perguruan tinggi, instansi terkait, dan lembaga pemerintah lainnya terhadap berbagai kegiatan perpustakaan dan kearsipan;
d. Adanya dukungan anggaran untuk tercapainya layanan yang ada di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor;
e. Adanya inovasi-inovasi dan pengembangan di bidang perpustakaan dan kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
f. Adanya sarana prasarana yang mencukupi sebagai pendukung dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang kearsipan dan perpustakaan dalam mendukung layanan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor;

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor yang telah ditetapkan. Evaluasi capaian Indikator kinerja Utama dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2023 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kota Bogor

TUJUAN SASARAN*)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-			REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-	
			2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat Kota Bogor	Nilai Indeks Literasi Masyarakat	Kategori	NA	3,02 (Sangat rendah)	60 (Sedang)	69 (Sedang)	79 (Sedang)	95.34 (sangat tinggi)	52 (Sedang)
Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Perpustakaan ber Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Kota Bogor	Persentase Perpustakaan ber-standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Persen	4,67	11,67	15,00	16	17,50	16,10	18,53
Tujuan 2 : Terwujudnya Pengelolaan Arsip yang berkualitas	Kualitas Pengelolaan Arsip	Kategori	91,08 (Sangat Memuaskan)	77,5 (Sangat Baik)	81,5 (Memuaskan)	82,5 (Memuaskan)	83,5 (Memuaskan)	81,5 (Memuaskan)	81,94 (Memuaskan)
Sasaran 2.1 : Optimalisasi Pengelolaan Arsip Daerah	Nilai Rata-rata hasil pengawasan kearsipan internal	Kategori	C (38,58)	C (45,64)	CC (54,57)	B (79)	A (100)	CC (54,57)	A (88,12)
Sasaran 2.2 : Meningkatnya tata kelola Dinas Arsip dan Perpustakaan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	NA	NA	80,01	81	82	61,85	81,44

Sumber : LKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode sebelumnya. terdapat 1 (dua) indikator sasaran yang mencapai/melebihi target dan 2 (dua) indikator sasaran yang tidak mencapai target. Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2023 telah disusun program dan kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 10.745.022.181.- (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 10.050.448.539.- (Sepuluh Miliar Lima Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 93.54%.

Kinerja pelayanan kearsipan dan perpustakaan menjadi hal yang sangat penting guna menilai seberapa jauh layanan yang diberikan oleh perpustakaan dalam memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat. Disisi lain kinerja juga penting sebagai evaluasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan perpustakaan. Dengan adanya penilaian terhadap kinerja tersebut, maka upaya untuk memperbaiki kinerja pelayanan perpustakaan bisa dilakukan secara teratur dan sistematis.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Dinas Arsip dan Pepustakaan Kota Bogor dalam rentang tahun 2020-2024 perlu dilakukan agar perkiraan anggaran/pendanaan pelayanan dalam Renstra selanjutnya bisa lebih tepat sasaran dan terserap optimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi meliputi :

Urusan Kearsipan

1. Kelengkapan sarana kearsipan pada masing-masing Perangkat Daerah belum memadai sejak penciptaaan sampai penyusutan;
2. Bimbingan teknis pengelolaan arsip di setiap Perangkat Daerah;
3. Peralatan untuk alih media arsip tidak tersedia;
4. Penyusutan arsip terhambat proses birokrasi yang lama;
5. Anggaran yang belum memadai;

6. SDM di bidang kearsipan (arsiparis) jumlahnya sangat sedikit tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, baik di Dinas arsip dan perpustakaan maupun di Perangkat Daerah lainnya;
7. Belum sempurnanya aplikasi pengelolaan arsip secara elektronik;

Urusan Perpustakaan

1. Anggaran yang tersedia untuk sarana perpustakaan belum memadai;
2. Apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan masih rendah;
3. SDM pengelola perpustakaan masih rendah baik mutu maupun jumlah;
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang perpustakaan;
5. Sistem informasi pengelolaan perpustakaan masih menggunakan aplikasi umum dari Perpusnas sehingga kalau ada permasalahan teknis respon penyelesaiannya sangat lambat;

Mengantisipasi pengembangan teknologi, kerja sama layanan perpustakaan dan kearsipan.

2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Adapun perbandingan antara RKPDP 2024 dengan Program dan Kegiatan 2024 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor sebagai berikut :

Tabel 2.4.1

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERUBAHAN PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA BOGOR TAHUN 2024

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				QYT	SATUAN	PAGU ANGGARAN APBD 2024	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	**2.23.02**	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota**	**100**	**%**	**388.748.200**	**100**	**364.924.400**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
			Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/ perpustakaan keliling/taman bacaan	**56**	**%**		**76**		
	2.23.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/ perpustakaan keliling/taman bacaan**	**500**	**Orang**	**388.748.200**		**364.924.400**	
		Sub Kegiatan							

	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50	Perpustakaan	190.641.900		190.641.900	
	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	3776	Eksemplar	177.502.500		174.282.500	
2	**2.24.01**	**Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**9.755.287.835**	**A**	**10.670.468.741**	
	2.24.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi**	**100**	**%**	**10.000.000**		**10.000.000**	
		Sub Kegiatan							
	2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	10.421.600		10.425.200	
	2.24.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi**	**100**	**%**	**7.092.158.704**		**8.114.352.795**	
		Sub Kegiatan							
	2.24.01.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	7.031.107.404		8.064.801.495	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Terpenuhinya Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD			61.051.300		49.551.300	
	2.24.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase pemenuhan kebutuhan Operasional perangkat Daerah	100	%	529.908.500		450.334.400	
		Sub Kegiatan							
	2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	100	%	9.925.000		23.004.200	
	2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	%	61.540.000		39.832.600	
	2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	100	%	42.171.100		68.852.500	
	2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	%	128.300.800		31.748.000	
	2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	100	%	32.771.600		15.047.100	
	2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Negeri)	100	%	255.200.000		271.850.000	
	2.24.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**%**	**36.197.200**		**62.242.400**	
		Sub Kegiatan							
	2.24.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit peralatan gedung kantor	100	%	36.197.200		59.726.400	

		Pengadaan Mebel						2.516.000	
	2.24.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang operasional**	**100**	**%**	**1.291.469.580**		**1.243.009.346**	
		Sub Kegiatan							
	2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	%	678.387.500		427.868.330	
	2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	%	613.082.080		815.141.016	
	2.24.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase BMD Dinas Arsip dan Perpustakaan berkondisi baik**	**100**	**%**	**527.080.000**		**790.104.600**	
		Sub Kegiatan							
	2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	%	153.380.000		121.030.000	
	2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	%	142.100.000		87.700.000	
	2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	%	142.600.000		68.280.000	
	2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	%	89.000.000		513.094.600	
3	2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase PD yang menyelenggarakan**	**79**	**%**	**324.787.800**	**100**	**380.288.200**	

			kearsipan secara tertib/baku						
	2.24.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah PD yang dilakukan audit yang bernilai baik**	**28**	**PD**	**154.135.600**		**380.288.200**	
		Sub Kegiatan							
	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan digunakan	35000	Berkas	51.756.400		274.480.000	
	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	59080	Berkas	53.530.000		84.760.000	
	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan	48.849.200		21.048.200	
		Jumlah				10.328.186.143		11.415.681.341	

Sumber : RKPD Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2024

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

a. Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 adalah :

1. Prioritas Nasional 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Arah Kebijakan :

a. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan menggutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
b. Peningkatan Kualitas/Ketersediaan Air untuk mendukung Kebutuhan Ekonomi
c. Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kulaitas Konsumsi Pangan
d. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman dan Kelautan
e. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
f. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
g. Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi

2. Prioritas Nasional 2 : Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Arah Kebijakan :

a. Pembangunan Wilayah Papua
b. Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku
c. Pembangunan Wiayah Pulau Sulawesi
d. Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera
e. Pengembangan Wilayah Pulau Jawa – Bali
f. Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
g. Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan

3. Prioritas Nasional 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Arah Kebijakan :

a. Meningkatan Produktifitas dan Daya Saing
b. Mengentaskan Kemiskinan

c. Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
d. Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Memperkuat Tata Cara Kelola Kependudukan
e. Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Nasional
f. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
g. Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

4. Prioritas Nasional 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Budaya

Arah Kebijakan :

a. Memperkuat Moderasi Beragama
b. Meningkatkan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas
c. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila
d. Meningkatkan Pemajuan Pelestarian Kebudayaan

5. Prioritas Nasional 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Arah Kebijakan :

a. Transformasi Digital
b. Energi dan Ketenagalistrikan
c. Infrastruktur Pelayanan Dasar
d. Infrastruktur Ekonomi
e. Infrastruktur untuk Mendirikan Perkotaan

6. Prioritas Nasional 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Arah Kebijakan :

a. Pembangunan Rendah Karbo
b. Peningkatan Kualitas Hidup Lingkungan
c. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik

Arah Kebijakan :

a. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
b. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

c. Konsolidasi Demokrasi
d. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
e. Penegakan Hukum Nasional

Sebagaimana kebijakan nasional yang tertuang pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 diatas, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor urusan kearsipan mendukung Prioritas Nasional yang ke- 7 berbunyi "Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik" .

a. Kebijakan Provinsi Jawa Barat terdiri dari 3 (Tiga) Program yaitu :
    - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    - Program Pengelolaan Arsip;
    - Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip ;

Sedangkan urusan Perpustakaan mendukung Prioritas Nasional ke-4 yang berbunyi " Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

b. Kebijakan Provinsi Jawa Barat terdiri dari 1 (satu) Program yaitu :
    - Program Pembinaan Perpustakaan;

Untuk program yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat sama dengan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah (PD) sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adapun untuk Kegiatan Provinsi Jawa Barat lebih banyak menyangkut ke Perumusan Kebijakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Dalam membantu pencapaian visi dan misi Kota Bogor, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor memiliki tujuan dan sasaran pelayanan yang terukur secara kuantitatif melalui indikator kinerja. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor (Diarpus) sebagai bagian integral dari posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan kearsipan dan perpustakaan yang memiliki peran dan yaitu **"Mewujudkan Kota Bogor Sebagai Kota Ramah Bagi Keluarga"** dengan Misi **"Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera"** sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor menjadi penentu dalam pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dari pencapaian visi melalui misi yang ke-2 yaitu mewujudkan Kota Bogor yang cerdas. Terkait hal di atas Dinas Arsip dan Perpustakaan mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas literasi masyarakat Kota Bogor;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip;

Adapun sasaran yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor adalah :

1. Meningkatnya Kuantitas Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Kota Bogor;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dinamis Kota Bogor;
3. Meningkatnya tata kelola Dinas arsip dan perpustakaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
4. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah periode jangka menengah tahun 2019- 2024

3.3 Program dan kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi terkait dalam rangka kerjasama dengan masyarakat yang merupakan partisipasi masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program yang telah dilaksanakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor adalah sebagai berikut:

a. Program pembinaan perpustakaan
b. Program pengelolaan arsip
c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah dilaksanakan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Program Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

Pengembangan Bahan Pustaka

Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
(DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN)

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Mebel

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif,yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunanKota Bogor, yaitu**"Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga".**Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kota Bogor ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, maka dapat ditelaah dari Misi ke 2 (dua) yaitu "Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Umum Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
3. pelaksanaan administrasi di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah, adalah sebagaimana tabel Berikut:

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2024

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN
1	2	3	4
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**380.288.200**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**		**380.288.200**
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	274.480.000
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	84.760.000
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	21.048.200
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**364.924.400**
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**364.924.400**
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	190.641.900
		Pengembangan Bahan Pustaka	174.282.500
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**10.670.468.741**
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**10.425.200**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.425.200
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**8.114.352.795**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.064.801.495
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	49.551.300
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**450.334.400**
		Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.004.200

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.832.600
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.852.500
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.748.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.047.100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.850.000
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**62.242.400**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin	59.726.400
		Pengadaan Mebel	2.516.000
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**1.243.009.346**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	427.868.330
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	815.141.016
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**790.104.600**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.030.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.700.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.280.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	513.094.600
TOTAL			**11.415.681.341**

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2024 yang selanjutnya disusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2024.

Selain itu, dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan ditujukan untuk meningkakan kualitas kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kearsipan dan Perpustakaan sehingga memposisikan arsip dan perpustakaan menjadi bagian integral dalam siklus Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk memperoleh hasil yang optimal dari perencanaan serta dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor maka rencana tindak lanjut yang perlu dicermati adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat;
2. Meningkatkan kompetensi SDM Perpustakaan;
3. Meningkatkan koleksi perpustakaan yang *up to date*;
4. Meningkatkan jejaring kemitraan perpustakaan baik negeri atau swasta;
5. Peningkatan Kualitas SDM dan sarana prasarana penunjang pelayanan kearsipan;
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kinerja pelayanan kearsipan;

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, jika dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Semoga Rencana Kerja Peubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dapat memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

O. DINAS TENAGA KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2019-2024 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan 2019-2024 (RPJMDP). Rencana Kerja memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan strategi, program, kegiatan pencapaian Rencana Strategis dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA – PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka mencapai visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah Kota Bogor yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kota Bogor secara keseluruhan.

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor yang merupakan perpecahan dari Dinas Tenaga Kerja yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja SKPD dapat dikerjakan secara stimultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD. Dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka peranan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan pemberian otonomi daerah sejak tahun 2001.

Salah satu tujuan pemberian otonomi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Untuk itu Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dituntut memahami secara lebih baik kebutuhan masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan.

Kewenangan dan tugas fungsi Dinas Tenaga Kerja harus dilaksanakan secara bertanggungjawab. Artinya sebagai konsekuensi dari pemberian hak dan kewenangan, penyelenggara pemerintahan dituntut melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional agar Visi dan Misi Kota Bogor dan Dinas dapat terwujud penuh. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya penyelenggara pemerintahan harus sadar untuk tidak hanya berorientasi pada hasil tetapi juga pada kebenaran dan kewajaran dalam proses pencapaiannya. Setiap upaya yang menggunakan sumberdaya masyarakat, perlu diselenggarakan secara transparan. Penyelenggaran pemerintahan daerah yang bertanggungjawab dan transparan akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada Pemerintah Daerah.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dituntut untuk bersikap profesional. Salah satu wujud dari sikap adalah adanya kepekaan (daya-tanggap) dari para aparat dalam mengkaji berbagai kebutuhan masyarakat. Sebaliknya masyarakat juga dituntut mempunyai daya tanggap yang tinggi dalam memantau berbagai tindakan kepemerintahan di Disnaker, sehingga informasi balik yang diberikannya mempunyai ketepatan yang tinggi dan dapat efektif.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor menyusun penjabaran dari Rencana Strategis Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Disnaker Tahun 2019-2024 berupa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2024, yang ditetapkan dalam Perwali No 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019-2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor mengusulkan anggaran pada APBD Kota Bogor Tahun 2024 sebesar Rp. 19.386.110.426 Dinas Tenaga Kerja dengan Urusan Ketenagakerjaan memiliki Program sebanyak 4 Program yaitu Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3 Kegiatan dan 3 sub kegiatan, Program

Penempatan Tenaga Kerja 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, Program Hubungan Industrial 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 6 Kegiatan dengan 13 Sub Kegiatan dan dimutakhirkan dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana kerja pembangunan daerah dan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Tenaga Kerja, Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 90 Tahun 2019 tentang Tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor No. 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor4 tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan;

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor No. 5 Tahun 2017 Seri E).
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor No. 5 Tahun 2017 Seri E).
24. Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018);
25. Peraturan Walikota Bogor No. 144 Tahun 2021 tentang tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Tenaga Kerja Kota Bogor.
26. Perda Kota Bogor No 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
27. Perwali No 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019-2024
28. Peraturan Walikota Bogor No. 172 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 172).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor disusun dengan maksud :

a. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis perangkat daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor;
b. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh bidang – bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2024 sesuai dengan target kinerja yangtelah ditetapkan;

c. Untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan Dinas Tenaga Kota Bogor yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor adalah:

a. Sebagai pedoman atau landasan operasional guna melaksanakan berbagai program – program dan kegiatan – kegiatan, sehingga program – program dan kegiatan – kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan (Penyesuaian target);
b. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor;
c. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor selama tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor

2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor

2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUGAS, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pencapaian RPJMD dan Janji Walikota Bogor Motekar (20.000 Kesempatan Kerja)

Tabel 2.1
Capaian Indikator Tujuan Tahun 2023 terhadap Target RPJMD 2019-2024

No	Indikator Tujuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	11,37%	10,78%	9,39%	8,11 %

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran.Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor tiap tahun terus melakukan upaya melalui Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam penanganan urusan ketenagakerjaan terutama terkait maslaah pengangguran dengan memberikan pelayanan AK I melalui aplikasi bogorkerja.kotabogor.go.id secara gratis, pemberian pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, pemagangan, bimbingan jabatan, pemberian kerja sementara, bursa kerja, pengiriman transmigrasi, pnyelesian perselisihan hubungan industrial dan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait, dengan pelaku usaha, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, sehingga diharapkan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor bisa tercapai, dan pada akhir target TPT RPJMD Kota Bogor 8,11% bisa terwujud.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dari susunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor pada Tahun 2024 telah membuat Rencana Kerja Perubahan dan anggaran untuk 4 Program dan 13 kegiatan 24 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target yang ingin dicapai selama 1 tahun yang diturunkan dari dokumen Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor 2019-204 (Perwali No 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019-2024). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
Pelayanan antar Kerja
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Job Fair/Bursa Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Setelah dilakukan pengukuran kinerja, dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor selama Tahun 2024.

Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Capaian akhir Renstra 2019-2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Nilai IRB Dinas Tenaga Kerja	Nilai	80,01	66,72	83,38	81.00	81.59	100.73	82,00

Jumlah Anggaran Tahun 2023	: Rp. 8.826.391.956,-
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023	: Rp. 8.259.423.839,-
Prosentase Anggaran Tahun 2023	: 93,58 %

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Pada Sasaran ini terdapat indikator kinerja berupa Tingkat Pencapaian penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Evaluasi LAKIP dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor serta Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), Informasi LPPD dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dengan target capaiannya sebesar 100% realisasi dengan poin 88.71 (A). Pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan, hal ini didukung oleh dokumen :

Tabel 2.3 Komponen Penilaian

No.	Komponen	Bobot (%)	Nilai			
			2021	2022	2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,68	27,60	28,04	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,00	26,10	25,00	25,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,08	11,55	12,91	12,60
4.	Evaluasi Internal	10	4,88	21,75	22,70	23,00
5.	Pencapaian Sasaran/	20	16,13			
	Jumlah	**100**	**77,77**	**87,00**	**88,65**	**88,71**

Pencapaian target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan berupa :

a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

   Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Kegiatan ini mempunyai out put berupa tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD berupa Laporan Tahunan sebanyak 8 Buku, Laporan Tahunan, LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA,SPIP,Rencana Strategis 2019 – 2024, .

   Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 8.078.760,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.950.000,- atau 98,41%.

b. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat**

   - **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah yaitu peralatan dan bahan pembersih, alat kelistrikan, dan alat tulis kantor.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 70.182.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.867.000,- atau 99,55%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasionl perangkat daerah yaitu makan minum kegiatan.

  Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 15.127.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.496.900,- atau 95,83%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah yaitu penggandaan/fotocopy dan kebutuhan barang cetak.

  Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 21.200.840,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.965.000,- atau 98,89%.

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan oeprasional perangkat daerah yaitu perjalanan dinas.

  Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 224.346.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 200.475.979,- atau 89,36%.

c. Kegiatan Pengadaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah yaitu layanan air, layanan internet, layanan listrik, dan layanan telepon.

  Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 203.640.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 160.912.602,- atau 79,02 %.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah yaitu tersedianya pelayanan umum kantor.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 613.117.920,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 609.843.851,- atau 99,47 %.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana prasarana aparatur yaitu pemeliharaan kendaraan dinas kantor

  Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 67.950.00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.515.900,- atau 94,95 %.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana prasarana aparatur yaitu pemeliharaan asset, computer/notebook, dan printer.

  Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 30.450.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.160.000,- atau 99,05 %.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana prasarana aparatur yaitu pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya.

  Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 14.280.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.000.000- atau 98,04 %.

Sasaran 2
Meningkatnya Kesempatan Kerja

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Kesempatan Kerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Capaian akhir Renstra 2019-2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Tingkat Kesempatan Kerja	%	92,20	89,22	97,51	92,25	90,61	97,96	92,81

Jumlah Anggaran Tahun 2023	: Rp. 1.566.835.500,-
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023	: Rp. 1.521.088.140 ,-
Presentase Anggaran Tahun 2023	: 97.08 %

Sasaran Tingkat Kesempatan Kerja pada Tahun 2023 dengan Realisasi 90,61% (jumlah yang bekerja 484.334 dibagi jumlah angkatan kerja 534.532 dikali 100%) dari Target 92,50, Indikator Sasaran Kinerja ini tidak mencapai Target namun bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 89,22% mengalami peningkatan dengan (jumlah yang bekerja 496.570 dibagi jumlah angkatan kerja 556.541 dikali 100%).

NO	PENDUDUK	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Angkatan Kerja	529.003	556.541	534.532
2	Penduduk yang Bekerja	466.645	496.570	484.334

Dari Tabel diatas Tingkat Kesempatan Kerja salah satunya dipengaruhi oleh Jumlah Angkatan Kerja yang Tersedia, dimana terdapat penurunan Angkatan Kerja dari Tahun 2022 ke 2023 sebesar 22.009 orang, peluang kesempatan Kerja bagi angkatan kerja menjadi bertambah, dan untuk menigkatkan tingkat kesempatan kerja untuk Tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor terus meningkatkan pelayanan urusan ketenagakerjaan melalui Program dan Kegiatan untuk capaian target.

Pencapaian target Sasaran strategis dengan indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Penyerapan tenaga kerja

Bogor Motekar yang menjadi salah satu Janji Politis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2019-2024, Menciptakan 20.000 kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara Pengusaha, UMKM, Perbankan dan Profesional, menjadi upaya Kota Bogor dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dimana tahun 2023 kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja baik formal dan informal sebanyak 6.729 pekerja, dimana telah dilaksanakan melalui kegiatan

padat karya kegiatan konstruksi dan non konstruksi bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan Pemerintah,Tenaga Kerja Mandiri, dan Pelatihan keterampilan bagi masyarakat sebanyak 3.309 pekerja (informal) dan penyerapan/kesempatan kerja melalui perusahaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pemagangan Mandiri sebanyak 3.420 (formal). Adapun capaian Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dalam mendukung Bogor Motekar pada Tahun 2020 Penyerapan/Kesempatan Kerja (Formal dan Informal) sebanyak 965 Orang, Tahun 2021 sebanyak 2.440, tahun 2022 sebanyak 7.005 Orang sehingga sampai Tahun 2023 penyerapan/kesempatan kerja mencapai 17.139 Orang dari Target Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor sebesar 12.500 Orang sampai Tahun 2024. Upaya Dinas dalam rangka menekan angka pengangguran di Kota Bogor salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, Pelatihan Keterampilan terbagi atas pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja yang masih berusia produktif berbasis kompetensi yang nantinya akan mengisi lowongan yang tersedia di Perusahaan yang bertempat di UPTD BLK dan Pelatihan berbasis masyarakat berupa pelatihan Bagi masyarakat di wilayah kelurahan yang memberikan pelatihan bagi masyarakat salah satu lokasi pelatihannya berada di lokasi P2WKSS. Baik peserta maupun hasil pelatihan tersebut dijadikan mitra bagi PKK kelurahan, tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan keterampilan bagi masyarakat untuk dapat berwirausaha sehingga dapat menambah penghasilan bagi keluarganya dan bukan untuk mengisi lowongan kerja di Perusahaan.
Pencapaian ini didukung oleh faktor antara lain:

- Pendidikan,
- Tingkat Upah,
- Nilai Produksi,
- Investasi

b) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran dapat didefinisikan sebagai seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja dan secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, namun tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya,penganggur terdiri dari: (a) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (b) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (c) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa

tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Adanya pengangguran dapat menyebabkan masalah-masalah lain seperti terganggunya stabilitas perekonomian dan sosial-politik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor pada tahun 2023 mencapai 9,39% dari target 10,56%, dengan capaian 112,56%, dan jika Dibandingkan dengan tahun 2022 dengan TPT sebesar 10,78%, maka capaian tahun 2023 mengalami peningklatan sebesar 1,39% dan jika dibandingkan dengan target akhir rencana jangka menengah (RPJMD) dengan target TPT 10,37%, disbanding capaian Tahun 2023 ini telah mencapai 110.45%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian TPT Provinsi Jawa Barat yang mencapai 7,44% serta capaian nasional sebesar 5,32

c) Pertumbuhan ekonomi,

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah (value added) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi secara total yaitu Domestik Bruto (PDB). Dalam ruang lingkup yang lebih kecil seperti provinsi dan kabupaten/kota, pertumbuhan produksi tersebut dapat dinyatakan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB dapat diukur atas dasar harga konstan atau atas dasar harga berlaku. Jika PDRB diukur atas dasar harga berlaku, maka nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan jika PDRB diukur atas dasar harga konstan, maka nilai tambah barang dan jasa tersebut ditunjukkan oleh perhitungan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dari Tahun

2022 PDRB Kota Bogor sebesar 33.372,48 dan Tahun 2023 meningkat menjadi 370.553.60.

d) Upah Minimum

Upah minimum didefinisikan sebagai suatu penerimaan bulanan terendah (minimum) sebagai imbalan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik bagi karyawan itu sendiri maupun keluarganya. Tujuan penetapan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman (social safety net) dan dimaksudkan agar upah tidak terus merosot sebagai akibat dari ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Penetapan upah minimum didasarkan pada tiga indikator, yakni: 1) Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan; 2) pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); dan 3) inflasi atau kecenderungan kenaikan harga-harga umum pada barang dan jasa yang terjadi secara terus menerus pada periode tertentu. Upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan negatif. Peningkatan upah minimum akan mengakibatkan biaya produksi ikut meningkat juga. Jika output yang dihasilkan perusahaan tidak mengimbangi input yang dikeluarkan, pengusaha memiliki dua pilihan, yakni menyesuaikan input yang dikeluarkan dengan cara mengurangi tenaga kerja yang dipekerjakan atau meningkatkan harga barang yang diproduksinya. Kedua pilihan ini pada akhirnya akan meningkatkan pengangguran, hal ini mempengaruhi TPT Kota Bogor, dimana adanya peningkatan UMK Kota Bogor 2023 sebesar Rp. 4.634.429 menjadi Rp 4.833.988 Tahun 2024

e) Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan produktif, baik aktif maupun non-aktif. Banyaknya pasokan angkatan kerja yang ada dalam perekonomian dapat dihitung dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan rasio perbandingan antara jumlah

angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengindikasikan besarnya presentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Untuk pencapaian indicator TPT ditahun mendatang, diupayakan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara salah antara lain:

- satunya membuka pintu investasi di sektor riil sehingga banyak orang berusaha membuka lapangan kerja;
- pemerintah perlu menekan tingkat inflasi dengan menjaga kestabilan tingkat produksi dan menjaga keseimbangan harga harga di pasar agar iklim bisnis di Provinsi Jawa Barat bisa stabil;
- pemerintah lebih memperhatikan perhitungan angka upah yang diterapkan saat di Provinsi Dalam penetapan besar upah,
- pemerintah juga harus memperhitungkan harga barang-barang kebutuhan masyarakat sehingga upah yang ditetapkan sesuai dengan tingkat upah yang ditetapkan dirasa sesuai.

Pelaksaan Program dan kegiatan dalam pencapaian target tersebut diatas dijelaskan melalui pelaksaannya sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

A. Pelayanan Antar Kerja

A.1.1 Penjajakan Lokasi Transmigrasi

1. JENIS KEGIATAN

Penjajakan Lokasi Transmigrasi untuk penempatan transmigrasi asal Kota Bogor, UPT Sigulai Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

2. WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN

07 s.d 11 November 2023

3. LOKASI TRANSMIGRASI

Penempatan Warga Transmigran asal Kota Bogor di UPT Sigulai Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

4. PELAKSANA KEGIATAN

a. Kepala Dinas Tenaga Kerja – Elia Buntang, S.PI., M.M.
b. Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan – Yulianto Tato, S.P., M.Si.
c. Pengantar Kerja Ahli Muda – Edwin Setyabudi, S.E.

d. Pengelola Ketransmigrasian & Bahan Penempatan & Perluasan – Maulana Ibrahim

5. ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan Dana APBD Perubahan Kota Bogor Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja.

6. HASIL PELAKSANAAN

1. Jarak Tempuh ke Lokasi
   a. Bogor-Jakarta (Bandara Soetta) - 54 Km
   b. Bandara Soetta – Bandara Kualanamu Medan – 1.450 Km
   c. Bandara Kualanamu Aceh – Bandara Salikin Simeulue Aceh – 545 Km
   d. Kabupaten Simeulue Aceh – UPT Sigulai - 74 Km
   2. Transportasi
   a. Bogor- Bandara Soetta (Kendaraan Roda 4)
   b. Bandara Soetta – Bandara Kualanamu Medan (Pesawat Terbang)
   c. Bandara Kualanamu Medan – Bandara Salikin Simeulue Aceh (Pesawat Terbang)
   d. Kabupaten Simeulue Aceh – UPT Sigulai (Kendaraan Roda Empat)
   3. Koordinasi Awal

   Tahapan awal kunjungan dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue untuk peninjauan lokasi tujuan dan lahan.

7. MASALAH DAN PEMECAHANNYA

a. Masalah

1. Minat bertransmigrasi masyarakat asal Kota Bogor untuk menjadi Calon Transmigran masih sangat kecil dibandingkan dengan daerah lain dikarenakan kurangnya informasi mengenai ketransmigrasian dan terbatasnya keterampilan yang dimiliki serta sikap mental yang kurang positif seperti dalam sebuah

ungkapan " makan tidak makan yang penting kumpul " .

2. Kurangnya koordinasi antar Dinas/Instansi yang terkait dalam program ketransmigrasian.
3. Pandangan Umum Masyarakat Kota Bogor bahwa transmigrasi itu adalah suatu pilihan jalan hidup yang paling terakhir.

b. Pemecahan Masalah

1. Perlu diupayakan Sosialisasi yang terus menerus untuk memberikan pemahaman kepada calon transmigran asal Kota Bogor bahwa wilayah NKRI sangat luas untuk menuju perubahan kehidupan yang lebih baik serta diperlukan semangat yang tinggi dan kerja keras.
2. Untuk menampung minat masyarakat dalam bertransmigrasi diperlukan sebuah program kegiatan yang berkesinambungan yang didukung oleh partisipasi semua pihak dan dengan dana yang cukup.
3. Perlu adanya informasi yang jelas kepada warga masyarakat dengan melalui perangkat wilayah RT, RW setempat.

A.1.2. Penempatan Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional dan merupakan salah satu solusi Pemerintah untuk memecahkan persoalan kemiskinan dan pengangguran dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan program transmigrasi di Kota Bogor, Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor melaksanakan kegiatan Penjajakan, Pengantaran dan Monitoring & Evaluasi, Penyelenggaraan kegiatan Pengantaran ke Lokasi Transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan sarana/pra sarana di unit permukiman transmigrasi dan menyampaikan informasi yang seluas-

luasnya kepada masyarakat tentang program transmigrasi yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Sosialisasi dan Rekruitmen serta Pembekalan Calon Transmigran.

Pemerintah Daerah Kota Bogor, Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam program transmigrasi, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya, dengan diperlukan kesiapan dan kekuatan mental dan spiritual, kemandirian, keahlian, keterampilan serta kinerja kerja dan jiwa entrepreneur dari calon transmigran untuk dapat berhasil. Pemerintah Kota Bogor senantiasa mencari solusi bagi masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dan pengganggguran.

Berbagai kegiatan dan program terus diupayakan terutama melalui program Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi yang merupakan salah satu solusi dari pemerintah untuk memecahkan persoalan kemiskinan dan pengangguran dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Penjajakan Ke Lokasi Transmigrasi dapat memberikan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan mengenai sarana/pra sarana di unit permukiman transmigrasi tersebut. Dengan keterampilan yang dimiliki `diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya, karena dengan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas nantinya akan mendapatkan hasil yang baik di lokasi transmigrasi sehingga dapat mengurangi jumlah keluarga miskin di Kota Bogor.

Maksud dan Tujuan

Dengan dilaksanakannya kegiatan Pengantaran Transmigran Ke Lokasi Transmigrasi, diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan mengenai sarana / pra sarana di unit permukiman transmigrasi tersebut sehingga memiliki minat untuk mengikuti transmigrasi dalam upaya mengurangi jumlah keluarga miskin, dengan keterampilan yang dimiliki

untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya serta kesejahteraan keluarga dan dapat berusaha mandiri sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Bogor.

Pelaksanaan kegiatan

1. **JENIS KEGIATAN**

   Pengantaran Transmigran ke Lokasi Transmigrasi untuk penempatan transmigrasi asal Kota Bogor, UPT Sigulai Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

2. **WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN**

   19 s.d 23 Desember 2023

3. **LOKASI TRANSMIGRASI**

   Penempatan Warga Transmigran asal Kota Bogor di UPT Sigulai Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

4. **PELAKSANA KEGIATAN**

a. Kepala Dinas Tenaga Kerja – **H. Sujatmiko Baliarto, Atd., M.M.**
b. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja – **Sahib Khan, S.STP., M P A**
c. Pengantar Kerja Pertama – **Widiar Wahyudi, S.Kom.**
d. Pengelola Ketransmigrasian & Bahan Penempatan & Perluasan – **Maulana Ibrahim**

5. **ANGGARAN**

   Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan Dana APBD Perubahan Kota Bogor Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja.

6. **HASIL PELAKSANAAN**

   1) Jarak Tempuh ke Lokasi
      a) Bogor-Jakarta (Bandara Soetta) - 54 Km
      b) Bandara Soetta – Bandara Kualanamu Medan – 1.450 Km
      c) Bandara Kualanamu Aceh – Bandara Salikin Simeulue Aceh – 545 Km
      d) Kabupaten Simeulue Aceh – UPT Sigulai - 74 Km
   2) Transportasi

a) Bogor- Bandara Soetta (Kendaraan Roda 4)
b) Bandara Soetta – Bandara Kualanamu Medan (Pesawat Terbang)
c) Bandara Kualanamu Medan – Bandara Salikin Simeulue Aceh (Pesawat Terbang)
d) Kabupaten Simeulue Aceh – UPT Sigulai (Kendaraan Roda Empat)

3) Koordinasi Awal

Tahapan awal, melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue untuk pengantaran transmigran.

Masalah da pemecahannya

A. Masalah

1. Minat bertransmigrasi masyarakat asal Kota Bogor untuk menjadi Calon Transmigran masih sangat kecil dibandingkan dengan daerah lain dikarenakan kurangnya informasi mengenai ketransmigrasian dan terbatasnya keterampilan yang dimiliki serta sikap mental yang kurang positif seperti dalam sebuah ungkapan " makan tidak makan yang penting kumpul " .
2. Kurangnya koordinasi antar Dinas/Instansi yang terkait dalam program ketransmigrasian.
3. Pandangan Umum Masyarakat Kota Bogor bahwa transmigrasi itu adalah suatu pilihan jalan hidup yang paling terakhir.

B. Pemecahan Masalah

1. Perlu diupayakan Sosialisasi yang terus menerus untuk memberikan pemahaman kepada calon transmigran asal Kota Bogor bahwa wilayah NKRI sangat luas untuk menuju perubahan kehidupan yang lebih baik serta diperlukan semangat yang tinggi dan kerja keras.
2. Untuk menampung minat masyarakat dalam bertransmigrasi diperlukan sebuah program kegiatan

yang berkesinambungan yang didukung oleh partisipasi semua pihak dan dengan dana yang cukup.

3. Perlu adanya informasi yang jelas kepada warga masyarakat dengan melalui perangkat wilayah RT, RW setempat.

A.1.3 Perluasan Kesempatan Kerja (DID Fiskal)-Kemiskinan Ekstream

a. Pelaksanaan

Agar dapat terlaksananya seluruh program Pemberian Kerja Sementara/Padat Karya (Dana Insentif Fiskal) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor telah membentuk susunan tim administrasi kegiatan terdiri dari :

- 1 (satu) PPTK
- 2 (dua) orang pelaksana Panitia Sosialisasi
- 6 (enam) orang Pengawas/Petugas Monitoring

b. Hasil Pelaksanaan

Pemberian Kerja Sementara/Padat Karya (Dana Insentif Fiskal) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dalam rangka mengatasi/menanggulangi masalah pengangguran maupun yang terkena dampak covid-19 dan Kemiskinan Ekstrem. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah pengganggur, tenaga kerja yang terkena dampak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), tenaga kerja yang dirumahkan karena terkena dampak Covid-19 dan masyarakat miskin ekstrem, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan.

c. Pelaksanaan Kegiatan

Pemberian Kerja Sementara/Padat Karya (Dana Insentif Fiskal) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2023 dilaksanakan di Kecamatan se-Kota Bogor dimulai Kegiatan Tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan 16 Desember 2023.

2) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

1. TUJUAN RAPAT

Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah untuk :

a. Terfasilitasinya para Penyandang Disabilitas dalam memperoleh manfaat pelindungan dan persamaan hak ketenagakerjaan
b. Tersampaikannya informasi pasar kerja dan pelatihan kerja
c. Terealisasinya pelaku usaha mempekerjakan para Penyandang Disabilitas

2. PELAKSANAAN

Rapat Koordinasi Dalam Rangka Fasilitasi ULD Ketenagakerjaan Kota Bogor pada Tanggal 20 Juli 2023 secara *hybrid* (daring dan luring) dihadiri oleh :

a. Pembukaan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor
b. Narasumber : Dinas Sosial, PT. Disabilitas Kerja Indonesia, Delimajaya Group, PT. Citra Abadi Sejati
c. Seluruh Kepala Bidang/ Perwakilan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor
d. Dinas Sosial Kota Bogor
e. BAPPEDA Kota Bogor
f. PT. Setia Anugrah Motor
g. PT. Supervulkanin Adijaya
h. PT Andalan Fluid Sistem
i. DPC PPDI Kota Bogor
j. PT. Nutrifood
k. RS. Azra

3. PEMBUKAAN

Sebagai pembukaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas
b. Sinkronisasi Keterpaduan Program bagi seluruh *stakeholder* terkait

c. Disnaker sebagai pelaksana Fungsi Monitoring dan Evaluasi

4. POKOK BAHASAN

a. Penyampaian *success story* Perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas
b. Penyampaian informasi sosialisasi/ fasilitasi Unit Layanan Disabilitas
c. Penyampaian informasi program-program kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor

5. HASIL

a. Tersampaikannya s*uccess story* PT. Disabilitas Kerja Indonesia dalam rangka pelaksanaan inklusivitas disabilitas di tempat kerja
b. Tersampaikannya informasi pasar kerja dan pelatihan kerja
c. Himbauan untuk para pelaku usaha agar dapat memberikan kesempatan kerja dan persamaan hak kepada para Penyandang Disabilitas

6. TINDAK LANJUT

a. Melakukan sinkronisasi keterpaduan program bagi seluruh stakeholder terkait
b. Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi
c. Melakukan Pendataan ASN dan Non ASN Penyandang Disabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor

7. KESIMPULAN

Rapat Koordinasi dalam rangka Fasilitasi ULD Ketenagakerjaan perlu diadakan secara rutin dalam rangka fungsi monitoring dan evaluasi serta pemutakhiran data penyerapan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

2) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

a) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini untuk mengurangi penganggur di Kota Bogor serta memberikan peluang bagi pencari kerja dan pengguna tenaga kerja untuk saling bersinergi, serta mendorong perusahaan untuk dapat menggarap tenaga kerja dari Kota Bogor lebih diprioritaskan sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan ini secara umum bertujuan :

1. Memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan, serta kualifikasi pendidikan.
2. Membantu Perusahaan pengguna tenaga kerja (pengusaha) untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan

profesional sesuai dengan kebutuhan Perusahaan secara efektif dan efesien.

3. Mengurangi angka pengangguran melalui perluasan dan pengembangan kesempatan kerja.
4. Melaksanakan kegiatan informasi pasar kerja dan pelaksanaan program Antar Kerja Lokal (AKL) , Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Untuk mencapai sasaran kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dapat terlaksana secara efektif dan efesien, maka secara teknis dalam pelaksanaan disusun perencanaan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
- Menyusun tim pelaksana
- Menyusun petunjuk pelaksanaan
- Menginventarisir data kebutuhan baik ATK, lowongan yang tersedia dan perusahaan yang terlibat.
- Mempersiapkan jobdesk pelaksanaan kegiatan

2. Tahap Pelaksanaan

Agar dapat terlaksananya seluruh program Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor telah membentuk susunan tim administrasi kegiatan terdiri dari:

- 1 (satu) Ketua
- 6 (enam) orang Anggota ASN
- 4 (empat) orang Anggota Non ASN

Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dalam rangka mengatasi/menanggulangi masalah pengangguran maupun yang terkena dampak covid-19. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah pengganggur, tenaga kerja yang terkena dampak PHK (Pemutusan

Hubungan Kerja), tenaga kerja yang dirumahkan karena terkena dampak Covid-19 sangat penting dalam rangka mempersiapkan calon tenaga kerja untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan memenuhi persyaratan kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya mereka diharapkan dapat menjadi tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan produktif.

Upgarding Website/Aplikasi

No.	Nama Aplikasi	Link	Sasaran
1.	Bogorkerja	https://bogorkerja.kotabogor.go.id/	Pencari Kerja (Masyarakat) Pemberi Kerja (Perusahaan) BKK

No.	Jenis Barang/Jasa	Volume
1.	Pemeliharaan Website BogorKerja	1 Tahun
a.	Pemeliharaan layanan akses web BogorKerja	
b.	Layanan informasi untuk operator	
c.	Perbaikan bug minor pada web aplikasi	
d.	Pemeliharaan layanan webmail API	
e.	Optimalisasi data API	
	- (API Integrasi Internal Data)	
	- (API Integrasi Kemnaker)	
	- (API Google Login)	

Jumlah Pencari Kerja : 3720 Orang
Jumlah Lowongan Pekerjaan : 1387 Lowongan
Jumlah Penempatan Kerja : 95 Orang

Jumlah Keberadaan Tenaga Kerja Asing : 39 TKA

Jumlah Keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia : 77 CPMI

Sasaran 3
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Capaian akhir Renstra 2019-2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/Pekerja/Tahun	65,54	71,00	108	71.00	75.60	107,75	72.50

Jumlah Anggaran Tahun 2023	: Rp. 1.709.882.837,-
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023	: Rp. 1.483.222.280,-
Prosentase Anggaran Tahun 2023	: 86.74%

Sasaran Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu Capaian kinerja nyata indikator "Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja" adalah sebesar 76,50 dari target sebesar 71,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 107,75 %. Tingkat produktivitas tenaga kerja dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan dibagi jumlah penduduk yang bekerja. Berdasarkan data hasil rilis Badan Pusat Statistik untuk Kota Bogot, nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar 37.055,36 dan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 484.334, sehingga diperoleh tingkat produktivitas tenaga kerja sebesar 75,60. Adapun pelaksanaan

kegiatan yang mendukung indikator sasaran ini adalah melalui pelatihan berbasis kompetensi berupa Pelatihan hidroponik, Pelatihan tata boga, Pelatihan tata kecantikan rambut, dan Pelatihan Desain Grafis dan dilanjutkan dengan uji kompetensi dengan jumlah peserta sebanyak 176 orang dan dilanjutkan dengan uji kompetensi

Adapun pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator sasaran ini adalah :

1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi ini yaitu berupa Pelatihan hidroponik, Pelatihan tata boga, Pelatihan tata rias, dan Pelatihan Desain Grafis dan dilanjutkan dengan uji kompetensi dengan jumlah peserta sebanyak 176 orang dan dilanjutkan dengan uji kompetensi sebagai berikut

No	Jenis Pelatihan	Lokasi	Jumlah Peserta	Jumlah
1	Pelatihan Desain Grafis	LPK El Rahma Education Center	40 Orang	2 Paket
2	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut	LPK John Van Tien dan LPK Kirana	40 Orang	2 Paket
4	Pelatihan Hidroponik	Kelurahan Katulampa dan Kayumanis	32 Orang	2 Paket
5	Pelatihan Tata Boga	LPK Kulinari De Chef	64 Orang	4 Paket

1. Kegiatan Pelatihan Desain Grafis (DBHCHT)

Pelatihan Desain grafis bekerja sama dengan LPK El Rahma Education Center dilaksanakan di LPK tersebut, terdiri dari 2 (dua) paket pelatihan dimana 1 (satu) paket terdiri dari 20 peserta sehingga jumlah peserta pelatihan Desain Grafis yang dilaksanakan tahun anggaran 2023 sebanyak 40 peserta.

- Kegiatan Pelatihan Desain Grafis dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan LPK EL Rahma Education Center dengan 2 Paket Pelatihan yang diikuti oleh 40 peserta dengan Program dan Kurikulum berdasarkan Unit Kompetensi inti dengan

jumlah pelatihan 240 Jam/Pelajaran terdiri dari teori dan praktek dengan rincian :

1. Mengaplikasikan prinsip dasar desain
2. Menerapkan prinsip dasar komunikasi
3. Menerapkan desain brief
4. Mengoperasikan perangkat lunak desain
5. Menciptakan karya desain
6. Mempresentasikan karya desain
7. Mengaplikasikan Digital Marketing

- Kegiatan Pelatihan Desain Grafis dilaksanakan selama 20 Hari Kerja dari Tanggal 12 Juni s.d 27 Juli 2023, dan dilanjutkan dengan Uji Kompetensi selama 2 hari kerja pada tanggal 28 Juli s.d 31 Juli 2023 dengan hasil semua perserta pelatihan Desain Grafis sebanyak 40 orang Kompeten.
- Peserta pelatihan Desain Grafis yang sudah bekerja sebanyak 13 orang, yang sudah berwira usaha 6 orang, yang sedang berkuliah 5 orang, yang belum bekerja ada 16 orang ini peserta sudah mengikuti job training di beberapa Perusahaan.

2. Pelatihan berbasis kompetensi untuk Pelatihan Tata Kecantikan Rambut

Pelatihan Tata kecantikan Rambut bekerja sama dengan LPK John Van Tien sebanyak 1 paket dengan jumlah peserta sebanyak 20 peserta dan pelatihan di LPK Kirana sebanyak 1 paket dengan jumlah peserta sebanyak 20 peserta, sehingga total peserta pelatihan Tata kecantikan Rambut berbasis kompetensi sebanya 40 peserta warga Kota Bogor.

- Kegiatan Pelatihan Tata Kecantikan Rambut dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan LPK John Van Tien dan LPK Kirana dengan masing-masing 1 Paket Pelatihan yang diikuti oleh 40 peserta dengan Program dan Kurikulum berdasarkan Unit Kompetensi inti dengan jumlah pelatihan 240 Jam/Pelajaran terdiri dari teori dan praktek dengan rincian :
  a. Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai prinsip kesehatan kerja.
  b. Melakukan persiapan kerja dan pengemasan

c. Melakukan komunikasi di tempat menerima tamu
d. Melakukan komunikasi dengan pelanggan
e. Mencuci rambut
f. Merawat kulit kepala dan rambut
g. Mengeringkan rambut dengan alat pengering
h. Memangkas rambut
i. Merawat dan membentuk hairpiece

- Kegiatan Pelatihan Tata Kecantikan Rambut dilaksanakan selama 30 Hari Kerja dengan tanggal pelaksanaan :
  1. Paket 1 LPK Jhon Van Tien Tanggal 23 Juni s.d 09 Agustus 2023, dan dilanjutkan dengan Uji Kompetensi selama 2 hari kerja pada tanggal 10 Agustus s.d 11 Agustus 2023 dengan hasil semua perserta pelatihan Tata Kecantikan Rambut Paket 1 sebanyak 20 orang Kompeten.
  2. Paket 1 LPK Kirana Tanggal 17 Juli s.d 29 Agustus 2023, dan dilanjutkan dengan Uji Kompetensi selama 2 hari kerja pada tanggal 30 Agustus s.d 31 Agustus 2023 dengan hasil semua perserta pelatihan Tata Kecantikan Rambut Paket 2 sebanyak 20 orang Kompeten.
     - Hasil pelatihan Tata Kecantikan Rambut ini sebagian besar peserta yang berprestasi di terima bekerja di LPK John Van Tien dan LPK Kirana

3. Pelatihan berbasis kompetensi untuk Pelatihan Hidroponik

Pelatihan hidroponik berbasis kompetensi di laksanakan Bekerjasama dengan PT. Lumina Agro Madania di 2 (dua) Kelurahan yaitu RT 01 RW 06 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal (Lokasi Penilaian P2WKSS tahun 2023) sebanyak 1 (satu) paket terdiri dari 16 peserta pelatihan.

Pelatihan Hidroponik di Kelurahan Katulampa yaitu RW 14 RT 01 Kecamatan Bogor Timur yaitu sebanyak 1 paket dengan jumlah peserta sebanyak 16 peserta pelatihan, sehingga total pelatihan Hidroponik berbasis kompetensi tahun 2023 sebanyak 32 peserta warga Kota Bogor.

- Kegiatan Pelatihan Hidroponik dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan PT. Lumina agro Madania dengan 2 Paket Pelatihan yang diikuti oleh 32 peserta dengan Program dan

Kurikulum berdasarkan Unit Kompetensi inti dengan jumlah pelatihan 40 Jam/Pelajaran terdiri dari teori dan praktek dengan rincian :

a. Mengoperasikan dan Merawat Peralatan Tangan
b. Mengenal Tanaman, Produu dan Perlakuannya
c. Mengenal Organisme Penganggu Tanaman dan Musuh Alami
d. Memilih Bahan-Bahan Kimia dan Biologi
e. Menerapkan Ketentuan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Tempat Kerja.
f. Menanam Bahan Tanam
g. Menyediakan Prasarana Persemaian Tanaman
h. Memanen Hasil Tanaman
i. Melakukan Penanganan Pasca Panen
j. Memelihara sistem hidroponik
k. Memonitor sistem hidroponik
l. Memasang sistem hidroponik

- Kegiatan Pelatihan Hidroponik dilaksanakan selama 5 Hari Kerja dengan tanggal pelaksanaan :
  a. Paket 1 Tanggal 05 Juli s.d 11 Juli 2023, dan dilanjutkan dengan Uji Kompetensi selama 2 hari kerja pada tanggal 14 Agustus s.d 15 Agustus 2023 dengan hasil semua perserta pelatihan Hidroponik Paket 1 sebanyak 16 orang Kompeten.
  b. Paket 2 Tanggal 31 Juli s.d 4 Agustus 2023, dan dilanjutkan dengan Uji Kompetensi selama 2 hari kerja pada tanggal 14 Agustus s.d 15 Agustus 2023 dengan hasil semua perserta pelatihan Hidroponik Paket 2 sebanyak 16 orang Kompeten.
     - Peserta Pelatihan Hidroponik diberi pelatihan tentang pemasaran dan pengelolaan adminsitrasi sederhana.
     - Hasil pelatihan Hidroponik ini sudah Berwirausaha dan bekerjasama langsung dengan PT. Lumina Agro Madania dalam proses pemasarannya.

4. Pelatihan Berbasis kompetensi untuk Pelatihan Tata Boga

Pelatihan Tata Boga berbasis kompetensi dilaksanakan bekerja sama dengan LPK Kulinari De Chef sebanyak 4 (empat) paket, dimana 1 paketnya terdiri dari 16 peserta sehingga jumlah peserta sebanyak 64 peserta warga Kota Bogor.

- Kegiatan Pelatihan Tata Boga dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan LPK Kulinari De Chef dengan 2 Paket Pelatihan yang diikuti oleh 64 peserta dengan Program dan Kurikulum berdasarkan Unit Kompetensi inti dengan jumlah

pelatihan 240 Jam/Pelajaran terdiri dari teori dan praktek dengan rincian :

a. Apakah anda dapat melakanakan prosedur keselamatan makanan
b. Apakah anda dapat membersihkan lokasi/area dan peralatan
c. Apakah anda dapat berkomunikasi secara efektif melalui telepon
d. Apakah anda dapat mengikuti prosedur kebersihan di tempat kerja
e. Apakah anda dapat menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja.
f. Apakah anda dapat memelihara pengetahuan tentang industri perhotelan
g. Apakah anda dapat melakukan prosedur administrasi
h. Apakah anda dapat melakukan prosedur dasar pertolongan pertama
i. Apakah anda dapat membaca dan menerjemahkan instruksi dasar, arahan dan atau diagram
j. Apakah anda dapat berkomunikasi secara lisan dalam bahasa inggris pada tingkat operasional dasar
k. Apakah anda dapat bekerjasama secara efektif dengan kolega dan pelanggan
l. Apakah anda dapat bekerja dalam lingkungan sosial yang berbeda
m. Apakah anda dapat melakukan tugas perlindungan anak yang ca aman dari makanan siap saji
n. Apakah anda dapat mempertahankan strategi penyimpanan yang aman dari makanan siap saji
o. Apakah anda dapat menyiapkan dan menyimpan makanan dengan cara yang aman dan bersih
p. Apakah anda dapat menyiapkan appetizer dan salad
q. Apakah anda dapat mencari dan mendapat data computer
r. Apakah anda dapat menangani dan menyelesaikan situasi konflik

- Kegiatan Pelatihan Tata Boga dilaksanakan selama 30 Hari Kerja dari Tanggal 14 Juni s.d 02 Agustus 2023,

dan dilanjutkan dengan Uji Kompetensi selama 2 hari kerja pada tanggal 27 September s.d 29 September 2023 dengan hasil semua perserta pelatihan Tata Boga sebanyak 32 orang Kompeten.

- Peserta pelatihan Tata Boga yang sudah bekerja sebanyak 31 orang, yang sudah berwira usaha 52 orang ini peserta sudah mengikuti job training di beberapa Perusahaan.

5. Kegiatan Dialog Pemagangan
   1. Kegiatan Dialog Pemagangan jumlah anggaran Rp. 8.160.000 (Delapan Juta seratus enam pupuh ribu rupiah) dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 7.250.000 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu ripiah), dimana dialog pemagangan dilaksanakan pada hari/tanggal Senin sd selasa tanggal 04 s/d 05 Desember 2023 bertempat di Aula Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, diikuti oleh 30 peserta dari perusahaan dan rumah sakit di Kota Bogor.
   2. Dengan Narasumber
      a. Niken Dwi Wijayanti, B.Eng.,M.S.E
         Perencana Ahli Muda
         Sub Koordiator Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri Dit. Binalovagan, Kementrian Tenaga Kerja
         Materi : Penyiapan Kompetensi Tenaga Kerja melalui Program Pemagangan Berkualitas dan Kelengkapan administrasi pemagangan
      b. Ir. Sukoco
         Pensiunan PT Unitex
         Materi : Produktivitas Kerja
   3. Maksud dan tujuan kegiatan adalah memberikan materi terkait pemagangan dan produktivitas kepada seluruh peserta yang diundang, sehingga dapat melaksanakan pemagangan yang berkualitas dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan

2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

1. Kegiatan Bimtek Metodologi LPK

   Kegiatan Bimtek Metodologi LPK dengan jumlah Anggaran Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) realisasi Rp. 9.990.000

(Sembilan juta sembilah ratus sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk **Pelaksanaan Bimbingan Teknis metodologi LPK** dimana dilaksanakan pada hari/tanggal Rabu sd Kamis tanggal 22 s/d 23 Februari 2023 bertempat di Aula Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, diikuti oleh 25 LPK di Kota Bogor.

2. Narasumber dan Materi Bimbingan Teknis

   a. Ir. Heni nurhaeni SPD, Mpd
      Instruktur LPK Henny's (LPK bergerak di bidang kecantikan) yang memiliki sertifikat kompetensi metodologi LPK)
      Materi :
      - Dasar-Dasar Produktivitas
      - Menentukan Kebutuan Pelatihan Individu
      - Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kerja
      - Menilai Kemajuan Kompetensi Peserta

   b. Ir. Rika Listikawati
      Instruktur LPK Henny's ((LPK bergerak di bidang kecantikan) yang memiliki sertifikat kompetensi metodologi LPK)
      Materi:
      - Menyusun Program Pelatihan
      - Merancang media pembelajaran
      - Panduan penyusunan Silabus dan Buku Materi
      - Template Perancangan Modul Pelatihan

3. Maksud dan tujuan kegiatan adalah memberikan materi terkait metodologi LPK untuk instruktur yang ada di LPK yang bertugas menyusun modul, sehingga dapat melaksanakan pelatihan kerja yang berkualitas dan dapat meningkatkan ketrampilan dan kompetensi peserta.

HASIL/KESIMPULAN

1. Pemaparan sekaligus pembukaan Kegiatan Bimtek Metodologi LPK oleh Kepala Dinas Tenaga kerja Kota Bogor
2. Laporan Panitia Penyelenggara Kegiatan Bimtek Metodologi LPK Tahun 2022 oleh Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

3. Peserta pelatihan atau Bimtek Metodologi LPK yang diikut sertakan terdiri dari 25 Lembaga Pelatihan kerja di Kota Bogor.
4. Pengenalan para peserta yang mewakili masing-masing lembaga pelatihan kerja di Kota Bogor.
5. Pemaparan Materi dilakukan oleh Narasumber sesuai dengan jadwal yang tertera pada Jadwal Kegiatan.
6. Peserta melakukan diskusi dan konsultasi dengan Narasumber terkait materi yang telah diberikan.
7. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan ditutup oleh Kabid Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

   Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.990.000,- atau 100%.

Sasaran 4
Meningkatnya Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.6

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		% Target	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pesentase kasus tenaga kerja yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100

Jumlah Anggaran Tahun 2023	: Rp. 54.799.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023	: Rp. 52.159.000 ,-
Prosentase Anggaran Tahun 2023	: 95.18 %

Sasaran Meningkatnya Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu Capaian kinerja indikator 1 "Pesentase kasus tenaga kerja yang

terselesaikan" adalah sebesar 100% dari target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % kasus yang masuk adalah 15 dan difasilitasi dan terselesaikan juga 15 kasus, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan..

Pencapaian target tersebut diatas di dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Persentase Kasus Ketengakerjaan yang terselesaikan

Penurunan Perselisihan industrial di kota Bogor pada Tahun 2023 mencapai 100% hal ini dimungkinkan karna didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang menciptakan keharmonisan pekerja dan perusahaan dan perselisihan / kasus yang masuk dapat diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama kedua belah pihak.

Pencapaian target program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan :

1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

- **Mayday**

Mayday dilaksanakan tanggal 25 Mei 2023 di Kampung Air Katulampa, Jl. Bendung Katulampa Raya No. 45, RT. 04/19, Katulampa, Bogor Timur, dengan Jumlah Peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Dengan tema “Merajut Kebersamaan Pekerja dan Pengusaha di Hari yang Fitri”, May Day 2023 menjadi momentum kebersamaan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. Pada kesempatan tersebut, ditekankan bahwa para pelaku usaha baik pekerja dan pengusaha harus memiliki pandangan jangka panjang akan keberlanjutan usaha. Tantangan ketenagakerjaan yang semakin berat, memerlukan antar pihak untuk saling bergandeng tangan agar kuat menghadapi segala bentuk tantangan sehingga mendorong keberlangsungan usaha yang tegak lurus dengan tumbuhnya peningkatan kesejahteraan pekerja.

Dalam kesempatan yang sama, pihak BPJS Ketenagakerjaan menambahkan bahwa seluruh pekerja/buruh wajib mendapat

perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dengan program-progamnya berpegang teguh dan aktif untuk membantu masyarakat dalam hal ini pekerja, untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak dan melanjutkan kehidupan ekonominya.

- **Pertemuan Tripartit**

Pertemuan Tripartit dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian pelaksanaan yakni:

1. Pertemuan Pertama

   Pelaksanaan

   Hari/tanggal : Jumat, 23 Juni 2023

   Tempat : Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor

   Materi : Rapat LKS Tripartit

   Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor

   Peserta Rapat : Unsur Pemerintah, Pengusaha dan Serikat pekerja

   Pokok pembahasan dan hasil rapat :

   a. Penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagai pekerja migran menjadi upaya alternatif pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran, namun di lain sisi terdapat kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, dimana salah satu kasusnya adalah kejahatan perdagangan orang;
   b. LKS Tripartit sebagai forum komunikasi atas masalah ketenagakerjaan, menyampaikan pandangannya terkait isu Tindak Pidana Perdagangan Orang atau disingkat TPPO;
   c. Pencegahan terhadap kejahatan perdagangan orang tentunya menjadi kepedulian dan peran serta bersama. Dengan adanya perluasan lapangan pekerjaan di dalam negeri, dapat menjadi langkah pengurangan angka pengangguran;
   d. Perluasan lapangan kerja di tengah kondisi pemulihan ekonomi menjadi tantangan tersendiri yang perlu dihadapi bersama.

2. Pertemuan Kedua

   Pelaksanaan

   Hari/tanggal : Selasa, 12 September 2023

Materi : Rapat LKS Tripartit

Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor

Peserta Rapat :Unsur Pemerintah, Pengusaha dan Serikat pekerja

Pokok pembahasan dan hasil rapat :

1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan;
2) Implikasi hukum atas berlakunya peraturan tersebut menjadi perhatian pembahasan;
3) Perlindungan hak-hak pekerja sebagai perhatian utama dari sudut pandang pekerja;
4) Dialog terbuka merupakan langkah krusial dalam memastikan kebijakan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Ketiga

Pelaksanaan

Hari/tanggal : Jumat, 3 November 2023

Tempat : Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor

Materi : Rapat LKS Tripartit

Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor

Peserta Rapat :Unsur Pemerintah, Pengusaha dan Serikat pekerja

Pokok pembahasan dan hasil rapat :

1) Keberadaan LKS Tripartit diharapkan dapat difungsikan untuk masyarakat, dengan menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui pemikiran inovasi yang membangun hubungan industrial dalam mengambil kebijakan, dimana tidak hanya mengurus permasalahan konflik;
2) Dorongan pembangunan dunia usaha dapat membawa kesejahteraan bersama, sehingga dapat memberi kebermanfaatan bagi masyarakat;
3) Usulan akan diadakannya program jaminan dari pemerintah bagi purna bhakti dan individu usia produktif, terlepas dari dasar berakhirnya hubungan kerja;

4) Pemamparan penggunaan aplikasi SIKHI (Sistem Informasi dan Konsultasi Hubungan Industrial) untuk pembuatan pelaporan pemutusan hubungan kerja secara *online*, bagi perusahaan maupun perorangan.

- **Rapat Dewan Pengupahan Kota**

Rapat Dewan Pengupahan Kota dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pertemuan yakni pada tanggal 7 November 2023, 17 November 2023, 21 November 2023 dan 24 November 2023 di Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dalam rangka menyusun dan menetapakan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bogor Tahun 2024 serta pada tanggal 11 Desember 2023 di Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dalam kaitannya atas pelaksanaan Sosialisasi UMK 2024.

Hasil Rapat tanggal 24 November 2023 telah dibuatkan Laporan dan Berita Acara yang ditanda tangani oleh semua pihak untuk kemudian dikeluarkan Rekomendasi UMK yang ditanda tangani Wali Kota Bogor pada 24 November 2023, Nomor: 500.15.14.1/6259-Disnaker, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi/Dewan Pengupahan Provinsi, Perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Bogor Tahun 2023 dengan Rekomendasi Penyesuaian Upah Minimum Kota Bogor Tahun 2023 sebesar Rp. 4.813.988 (Empat Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Pada tanggal 30 November 2023, keluar Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

- **Sosialisasi Upah Minimum Kota Bogor**

Selasa, 12 Desember 2023 dilaksanakan Sosialisasi Upah Minimum Kota Bogor Tahun 2024, bertempat di The Mirah Hotel Bogor, Jl. Pangrango No.9A, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan Jumlah Peserta sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) orang, Pukul 10.00 WIB – 14.30 WIB.

Tujuan utama kegiatan ini adalah menyampaikan besaran UMK Kota Bogor Tahun 2024 dan agar setiap perusahaan dapat

menerapkan upah minimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketetapan yang telah disampaikan.

2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- **Kegiatan Dialog dan Pemahaman Peraturan Ketenagakerjaan**

Kegiatan Dialog dan Pemahaman Peraturan Ketenagakerjaan dilaksanakan tanggal 7 September 2023 di Al Nassr Signature Rafting, JJl. Raya Sukabumi No. 1, Cimande Hilir, Caringin, Bogor, dengan Jumlah Peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang, Pukul 09.00 WIB – 16.30 WIB.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan. Implementasi atas berlakunya peraturan tersebut perlu dipahami oleh pelaku usaha dan pekerja, utamanya pada pengaplikasiaannya di pengaturan syarat kerja dalam hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dialog terbuka yang dihadirkan melalui kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku usaha dan pekerja untuk mengajukan pertanyaan dan aspirasi dalam memastikan kebijakan ketenagakerjaan, khususnya perlindungan hak-hak pekerja.

A. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor – faktor yang akan menjadi kekuatan dan kelemahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor. Kajian internal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di dalam Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor yang meliputi Kekuatan ***(Strength)*** dan Kelemahan ***(Weakness).***

1. Kekuatan *(Strength)*

- ❖ Memiliki konsistensi terhadap komitmen peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ❖ Memiliki rencana dan program kerja yang sudah tersusun dengan baik;
- ❖ Memiliki kerjasama dengan pihak lain;
- ❖ Melayani para pencari kerja;
- ❖ Memiliki Balai Latihan Kerja;
- ❖ Memiliki Informasi pasar kerja.

2. Kelemahan *(Weakness)*

a. Pelaksanaan program yang belum terlaksana;
b. Efektifitas komunikasi dan koordinasi antar bidang dan sub bidang belum berjalan dengan baik;
c. Masih kurangnya tenaga fungsional Instruktur, Pengantar Kerja, Pekerja, Mediator Hubungan Industrial;
d. Terbatasnya sarana dan prasarana.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi Dinas Tenaga kerja Kota Bogor. Kajian eksternal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di luar Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor yang meliputi Peluang ***(Opportunity)*** dan Ancaman ***(Threat).***

1. Peluang *(Opportunity)*

a. Tersedianya mitra kerja yang baik;
b. Tersedianya data dibidang Tenaga Kerja;
c. Tersedianya informasi pasar kerja dan lapangan kerja yang memadai;
d. Tersedianya tenaga kerja terlatih melalui Balai Latihan Kerja;
e. Tersedianya tenaga fungsional;

2. Ancaman (Threat)

a. Jumlah pencari kerja yang setiap saat meningkat dan tidak memiliki keahlian;
b. Pengelola Lembaga Latihan Swasta belum baik pengelolaannya;
c. Banyak perusahaan yang tidak beroperasi lagi dan tidak semua perusahaan dapat bekerjasama dengan baik.

A. Strategi Umum

Dari hasil analisis lingkungan strategis, dirumuskan beberapa strategi umum yang digunakan dalam merumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan. Perumusan strategi pada dasarnya mencakup strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, sebagai berikut :

(ALI) / **(ALE)**	**Kekuatan (S)** ❖ Memiliki konsistensi terhadap komitmen peraturan perundang-undangan yang berlaku. ❖ Memiliki rencana dan program kerja yang sudah tersusun dengan baik. ❖ Memiliki kerjsama yang baik dengan pihak lain ❖ Melayani para pencari kerja ❖ Memiliki Balai Latihan Kerja ❖ Memiliki Informasi pasar kerja	**Kelemahan (W)** ❖ Pelaksanaan program yang belum terlaksana ❖ Masih kurangnya tenaga fungsional Instruktur, Pengantar Kerja, Mediator Hubungan Industrial, ❖ Terbatasnya sarana dan prasarana
Peluang (O) ❖ Tersedianya mitra kerja yang baik ❖ Tersedianya data dibidang Tenaga Kerja ❖ Tersedianya informasi pasar kerja dan lapangan kerja yang memadai ❖ Tersedianya tenaga kerja terlatih melalui Balai Latihan Kerja ❖ Tersedianya Tenaga Fungsional	**Strategi (S- O)** (Menggunakan S untuk memanfaatkan O) ❖ Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi aparat dengan menggunakan peraturan yang jelas pada masyarakat dan perusahaan.	**Strategi (W - O)** (Penanggulangan W dengan memanfaatkan O) ❖ Meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaksanaan program untuk melayani masyarakat. ❖ Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan penyediaan data informasi yang jelas

Ancaman (T) ❖ Jumlah pencari kerja yang setiap saat meningkat dan tidak memiliki keahlian ❖ Pengelola Lembaga Latihan latihan swasta belum baik pengelolaanya ❖ Banyak perusahaan yang tidak beroperasi lagi dan tidak semua perusahaan dapat bekerjasama dengan baik	(Memanfaatkan S untuk menghadapi T) ❖ Memanfaatkan aparat dan mitra kerja dengan peraturan yang jelas pada masyarakat dan perusahaan. ❖ Meningkatkan komitmen pelaksanaan tugas dengan sosialisasi peraturan yang ada	Perkecil W untuk menghindari T) ❖ Meningkatkan pember- ❖ dayaan SDM petugas, pencari kerja dan pengelola lembaga. ❖ Menggunakan system informasi yang dimiliki untuk menyatukan pandangan / pemahaman. ❖ Meningkatkan kesadaran perusahaan dan pekerja mengenai pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan yang berasal dari masyarakat diperoleh dari hasil musrembang tingkat Kecamatan sampai Musrembang Kota Bogor, dan usulan tersebut disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor. Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor membuat program dan kegiatan yang merupakan kegiatan prioritas dinas, sehingga pada tahun berikutnya aspirasi masyarakat dapat terealisasikan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, maka penyelenggaraan Pemerintah secara umum di Kota Bogor mengalami perubahan paradigma terutama masalah Tenaga Kerja sehingga memberikan peluang untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan.

Program dan kebijakan nasional untuk Tahun 2019 - 2024 akan dilakukan berbagai upaya perbaikan kondisi ekonomi makro, yang meliputi upaya-upaya untuk stabilitasi ekonomi termasuk penciptaan lapangan kerja dan upaya penanggulangan kemiskinan. Secara umum pelaksanaan berbagai kegiatan di dalam ketiga klaster tersebut berjalan dengan baik. Ada delapan arah kebijakan resntra Kemnaker pada 2019-2024. Rinciannya adalah sebagai berikut ini.

1. mengembangkan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi.
2. meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millenial (pendidikan vokasi) dan soft skills.
3. pengembangan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah.
4. mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi tenaga kerja
5. menguatkan relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI).
6. meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru PMI di luar negeri.
7. peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik. Kedelapan, peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang baik.

Untuk tahun 2024 kebijakan Dinas Tenaga Kota Bogor sejalan dengan program tersebut diatas dengan upaya penurunan angka pengangguran guna peningkatan mutu sumber daya dan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan kebijakan nasional yang memprioritaskan perbaikan kondisi ekonomi makro, yang meliputi upaya-upaya untuk stabilitasi ekonomi termasuk penciptaan lapangan kerja dan upaya penanggulangan kemiskinan.

Secara eksplisit Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor tidak lepas dengan kewenangan yang ada yaitu pembenahan aspek Sumber Daya Manusia, berupa :

1) Peningkatan mutu, keahlian dan keterampilan kerja;
2) Menyediakan informasi pasar kerja;
3) Meningkatkan jumlah penempatan dan perluasan kerja;
4) Meningkatkan permintaan kesempatan kerja;

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan batas akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya karena tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Adapun tujuan Rencana Kerja tersebut adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan;
2. Meningkatkan kesempatan kerja;
3. Mewujudkan kondisi kerja yang aman dan sehat sehingga tercipta produktivitas dan kesejahteraan pekerja;
4. Meningkatkan ekonomi keluarga transmigran serta menekan jumlah pengangguran.

Sasaran Strategis sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tahunan. Dalam kondisi ideal penerapan sasaran akan sangat baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik , dapat diukur, dapat dicapai jangka panjang waktu penyampaiannya jelas , berorientasi pada hasil nyata.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan kemudian dirumuskan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi) berupa serangkaian kebijakan dan program, kebijakan merupakan serangkaian

keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai misi yang ada, maka kegiatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2019-2024 diarahkan kepada penurunan angka pengangguran, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan mutu tenaga kerja guna peningkatan sumber daya dan kesejahteraan sosial. Berikut ini akan dijelaskan keterkaitan dan keselarasan antara misi, sasaran serta pencapaiannya melalui kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dalam kurun waktu 2019-2024, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja serta sarana dan prasarana pelatihan kerja;
2. Meningkatkan perluasan kerja dan kesempatan kerja.
3. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dalam Hubungan Industrial
4. Meningkatkan kerjasama dengan daerah tujuan Transmigrasi agar lokasi tujuan Transmigrasi mempunyai akses yang baik dengan pusat perkonomian.

Indikator Tujuan Tahun 2024
terhadap Target RPJMD 2019-2024

No	Indikator Tujuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Target Akhir RPJMD
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	10,78%	9,39%	8.11%	8.11%

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatankerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran.Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif

mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2024, terus melakukan upaya melalui Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam penanganan urusan ketenagakerjaan terutama terkait maslaah pengangguran dengan memberikan pelayanan AK I melalui aplikasi bogorkerja.kotabogor.go.id secara gratis, pemberian pelaihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, pemaganagan, bimbingan jabatan, pemberian kerja sementara, bursa kerja, pengiriman transmigrasi, pnyelesian perselisihan hubungan industrial dan melakukan koordinasi dengan pelaku usaha, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, sehingga diharapkan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2023 sebesar 9.39 % bisa tercapai, dan pada akhir target Tingkat Pengangguran Terbuka RPJMD Kota Bogor 8.11 % bisa terwujud.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Dinas Tenaga Kerja	Nilai IRB di lingkungan Perangkat Daerah	82
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	92,81
3	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	76.50
4	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	Presentase Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	100

3.3. Program dan Kegiatan

Sejalan dengan dilaksanakannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah secara umum di Kota Bogor mengalami perubahan paradigma terutama masalah Tenaga Kerja sehingga memberikan peluang untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor maka diirumuskan cara

mencapai tujuan dan sasaran berupa serangkaian kebijakan dan Program.

Berikut ini akan dijelaskan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2024, sebagai berikut :

Program yang dibiayai oleh APBD Kota Bogor, antara lain :

a. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
   1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
   2. Pembinaan Lembaga Latihan Kerja Swasta
   3. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

b. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
   1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota
   2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

c. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
   1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota;

d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BOGOR
TAHUN 2024

Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(Outcome)*, Kegiatan *(Output)*, *Sub Kegiatan (Output)*	Satuan	Rencana Kerja		Unit Kerja PD Penanggung Jawab
				Thn 2024		
				Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**Nilai**	**A**	**11.133.399.980**	**Seluruh Bidang**
2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**Nilai**	**A**	**7.322.377**	
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7.322.377	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**	**Point**	**3,86**		
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**Persen**	**100**	**8.857.413.704**	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	39	8.817.223.704	
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	1	40.190.000	

2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**866.500.365**	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	135.380.700	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	19.998.400	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	57.655.000	
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	653.466.265	
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**889.152.448**	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	159.775.000	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	729.377.448	
2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**Persen**	**100**	**52.311.998**	
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	52.311.998	
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Persen**	**100**	**460.699.088**	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	5	141.380.000	

2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	34	68.060.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	251.259.088	
2.07.03	**Program : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase peserta pelatihan yang bersertfikat Kompetensi**	**%**	**100**	**4.370.474.716**	**Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**
		persentase perusahaan yang memiliki produktivitas tenaga kerja tinggi	**%**	**8**		
2.07.03.2.01	**Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan memiliki sertifikat kompetensi**	**orang**	**564**	**4.341.411.716**	
2.07.03.2.01.01	Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan dan uji kompetensi	orang	564	4.341.411.716	
2.07.03.2.02	**Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**%**	**100**	**9.627.900**	
2.07.03.2.02.01	Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	LPK	25	9.627.900	
2.07.03.2.04	**Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**%**	**100**	**19.435.100**	
2.07.03.2.04.0001	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	30	19.435.100	
2.07.04	**Program : PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Penyerapan Tenaga Kerja**	**%**	**91.95**	**3.752.135.930**	**Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja**

2.07.04.2.01	**Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah tenaga kerja yg berhasil ditempatkan dan berwirausaha**	**Orang**	**3.000**	**3.505.379.930**	
2.07.04.2.01.0001	Sub Kegiatan : Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan Antar Kerja Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL)	Orang	210	3.499.375.930	
2.07.04.2.01.0003	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	350	3.720.000	
2.07.04.2.01.0004	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Penyuluhan tentang Ketengakerjaan Khusus Penyandang Disabilitas yang berasal dari OPD/BUMD dan Perusahaan	Orang	50	2.284.000	
2.07.04.2.03	**Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah lowongan kerja yang diinformasikan di pasar kerja**	**Lowongan**	**95**	**246.756.000**	
2.07.04.2.03.0001	Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	50.000.000	
2.07.04.2.03.0002	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	3.050	192.280.000	
2.07.04.2.03.0003	Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job fair/Bursa Kerja	Orang	75	4.476.000	
2.07.05	**Program : PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase rekomendasi LKS tripartit yg ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**130.099.800**	**Bidang Hubungan Industrial**
		Penetapan Besaran UMK	**Rupiah**	**4.813.988**		

2.07.05.2.01.03	**Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**%**	**100**	**113.396.700**	
2.07.05.2.01.0003	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (HI) (Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Struktur Skala Upah, dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	113.396.700	
2.07.05.2.02	**Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi**	**%**	**100**	**16.703.100**	
2.07.05.2.02.0001	Sub Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	15	16.703.100	
TOTAL					**19.386.110.426**	

Rencana Kerja tahun 2024 memuat 1 (satu) urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Ketenagakerjaan dan 1 (satu) Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah.

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Secara menyeluruh prioritas urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu

Urusan Ketenagakerjaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. Urusan Ketenagakerjaan

Penanganan urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, melalui 4 Program yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Darah Kota/Kabupaten;
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
b. Program Penempatan Tenaga Kerja;
c. Program Hubungan Industrial.

Tiga program ini diurai dengan berbagai kegiatan untuk menjawab berbagai tantangan dalam penanganan masalah ketenagakerjaan. Pelaksanaan urusan ini berlandaskan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 5889 Tahun 2021.

Program – program dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 ini menyesuaikan dengan program yang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Kota Bogor Tahun 2019 – 2024.

Untuk lebih jelasnya pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dalam rangka mendukung Program Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

A. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sesuai dengan Keputusam Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, perangkat daerah melakukan pemetaani program dan kegiatan. Dalam rangka mendukung program tersebut, perangkat daerah telah melakukan pemetaan.

Program ini dilaksanakan dengan 3 Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 Sub Kegiatan yaitu :

a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

Kegiatan ini bermaksud membentuk sumberdaya manusia yang unggul, berkualitas dan berkompetensi dengan kebutuhan dalam dunia Industri, pasar kerja dan dapat menciptakan peluang usaha mandiri, tujuannya Agar Pelaku Industri dapat menyerap alumni peserta BLK sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan Agar Alumni BLK dapat membuka peluang usaha mandiri dengan rencana peserta 216 orang yang kemudian peserta pelatihan tersebut dilanjutkan dengan Uji Kompetensi untuk membentuk sumberdaya manusia yang unggul, berkualitas dan berkompetensi dengan kebutuhan dalam dunia Industri, pasar kerja dan dapat menciptakan peluang usaha mandiri, tujuannya Agar Pelaku Industri dapat menyerap alumni peserta BLK sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan Agar Alumni BLK dapat membuka peluang usaha mandiri. Kegiatan ini dilaksanakan setelah pelatihan selesai, tujuannya agar peserta yang telah mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat dari BNSP, jika dinyatakan kompeten sesuai dengan bidangnya kegunaan sertifikat tersebut sebagai penunjang untuk melamar pekerjaan dan membuka usaha mandiri dan dalam sub kegiatan ini terdapat anggaran DBCHT dengan perencanaan Anggaran sebesar Rp. 4.341.411.716,-.

b) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 Sub Kegiatan yaitu :

a) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Mutu Lembaga Latihan Swasta (LLS) guna menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan menekan angka pengangguran untuk 25 orang dengan anggaran Rp. 9.627.900,-.

c) Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 Sub Kegiatan yaitu :

a) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada perusahaan kecil tentang pelaksanaan konsultasi peningkatan produktivitas dengan anggaran Rp. 19.435.100,-

B. Program Penempatan Tenaga Kerja

Sesuai dengan Keputusam Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021, perangkat daerah melakukan pemetaani program dan kegiatan. Dalam rangka mendukung program tersebut, perangkat daerah telah melakukan pemetaan.

Program ini dilaksanakan dengan 2 Kegiatan sebagai berikut:

1) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 Sub Kegiatan yaitu :

a) Pelayanan Antar Kerja

Pelayanan Antar Kerja dilaksanakan dengan tujuan membentuk Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan, terlaksananya pembekalan tenaga kerja mandiri disektor wirausaha, serta Pemberian kerja sementara dan dilaksanakan juga pengiriman transmigran asal kota bogor, kerja sama antar daerah tujuan transmigrasi. Adapun peserta transmigrasi akan diberikan pelatihan dan keterampilan serta dilakukan pendampingan sampai ke lokasi transmigrasi, dengan anggaran Rp. 3.499.375.930,-.

b) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesiapan diri calon pencari kerja atau siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi Perguruan Tinggi memasuki dunia kerja. Membina pengurus Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada pada Lembaga Pendidikan baik Sekolah Menengah Kejuruan,Perguruan Tinggi maupun LPK dengan anggaran Rp. 3.720.000,-

c) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Informasi pelaksanaan/penerangan tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disablitas Dengan anggaran Rp. 2.284.000,-

2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 Sub Kegiatan yaitu :

a) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online dengan anggaran Rp. 50.000.000,-

b) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Kegiatan ini bertujuan pencarian lowongan pekerjaan ke perusahaan, lembaga pelayanan, penempatan tenaga kerja lain baik pemerintah maupun swasta dengan cara mengklarifikasikan kualifikasi pencari kerja menurut syarat jabatan, serta adanya pengembangan aplikasi bursa kerja. Pelaksanaan bursa kerja dengan target 50 Perusahaan dan tersedianya informasi data ketenagakerjaan, pembaharuan data serta menigkatan kesiapan diri calon pencari kerja atau siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi Perguruan Tinggi memasuki dunia kerja. Membina pengurus Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada pada lembaga pendidikan baik Sekolah Menengah Kejuruan, Perguruan Tinggi maupun LPK dengan anggaran Rp. 192.280.000,-.

c) Job Fair/Bursa Kerja

Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dengan pengguna jasa tenaga kerja dengan anggaran Rp. 4.476.000,-

C. Program Hubungan Industrial

Sesuai dengan Keputusam Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021, perangkat daerah melakukan pemetaani program dan kegiatan. Dalam rangka mendukung program tersebut, perangkat daerah telah melakukan pemetaan.

Program ini dilaksanakan dengan 2 Kegiatan sebagai berikut:

1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 Sub Kegiatan yaitu :

a) **Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Kegiatan ini bertujuan menciptakan kesamaan dan gerak langkah dari pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam memandang,memecahkan dan menyelesaikan serta menciptakan kerjasama dalam menangani masalah ketenagakerjaan. Kegiatan ini juga menyelenggarakan Sarasehan "Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis antara pekerja,pengusaha dan pemerintah" dengan tujuan melakukan sarasehan mayday, sarasehan tripartite, sosialisasi UMK Kota Bogor anggaran Rp. 113.396.700,-.

2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 Sub Kegiatan yaitu :

a) **Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota**

Kegiatan Pencegahan Penaganan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa Pekerja/Buruh yang dilaksanakan dengan melibatkan unsur pengusaha dan pekerja adalah dalam rangka menjalin kerjasama dan komunikasi yang berkesinambungan, sehingga Mogok Kerja dan Unjuk Rasa dapat dicegah dan dihindari dengan pendekatan persuasif dan terencana dengan baik. mendapatkan pemikiran dan ide dari semua unsur untuk dapat disusun sebagai rekomendasi dari pokok-pokok pikiran yang sudah disimpulkan. Kegiatan ini dilakukan pemilihan pekerja teladan tingkat kota bogor dengan anggaran Rp. 16.703.100 -.

D. Program Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Keputusam Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021, perangkat daerah melakukan pemetaani program dan kegiatan. Dalam rangka mendukung program tersebut, perangkat daerah telah melakukan pemetaan.

Program ini dilaksanakan dengan 6 Kegiatan sebagai berikut:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 Sub Kegiatan yaitu :

a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun, merencanakan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah. Laporan yang disusun terdiri dari LKPJ, LPPD, EPPD, RENJA, RENSTRA, dan Laporan Tahunan dengan anggaran Rp.7.322.377,-

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 Sub Kegiatan yaitu :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 8.817.223.704,-

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 40.190.000,-

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 Sub Kegiatan yaitu :

a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah yaitu peralatan dan bahan pembersih, alat kelistrikan, dan alat tulis kantor dengan anggaran Rp. 135.380.700,-

b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasionl perangkat daerah yaitu makan minum kegiatan dengan anggaran Rp. 19.998.400,-

c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah yaitu penggandaan/fotocopy dan kebutuhan barang cetak dengan anggaran Rp. 57.655.000,-

d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan oeprasional perangkat daerah yaitu perjalanan dinas dengan anggaran Rp. 653.466.265,-

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 Sub Kegiatan yaitu :

a) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
   Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah yaitu layanan air, layanan internet, layanan listrik, layanan surat kabar/majalah, layanan telepon dengan anggaran Rp. 159.775.000,-
b) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
   Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah yaitu tersedianya pelayanan umum kantor dengan anggaran Rp. 729.377.448,-

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 Sub Kegiatan yaitu :

a) **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
   Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana prasarana aparatur yaitu CCTV dan Kamera CCTV dengan anggaran Rp. 52.311.998,-

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 Sub Kegiatan yaitu :

a) **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
   Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana prasarana aparatur yaitu pemeliharaan kendaraan dinas kantor dengan anggaran Rp. 141.380.000,-
b) **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
   Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana prasarana aparatur yaitu pemeliharaan asset, computer/notebook, dan printer dengan anggaran Rp. 68.060.000,-
c) **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
   Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana prasarana aparatur yaitu pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 251.259.088,-

BAB IV
P E N U T U P

Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor untuk Tahun 2024 dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) telah mengupayakan menjabarkan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2019-2024. Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2024 merupakan kelanjutan Renstra-SKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2019-2024, namun dalam penyusunan program dan kegiatan mengalami perubahan disesuaikan dengan penerapan Kepmendagri No. 050/5889 Tahun 2021, dan target yang akan dicapai tetep mengaju pada Rentra 2019 - 2024. Renja 2024 ini dilakukan karena adanya perubahan pagu Anggaran kegiatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian termasuk target capaian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan adanya Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2024 maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan dibuat setelah tahun anggaran dapat lebih obyektif karena rencana tingkat capaian (target) kegiatan telah ditetapkan pada awal tahun kerja. Selanjutnya dengan adanya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor ini dapat memacu kinerja seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dan dapat bertanggungjawab untuk merealisasikan rencana tingkat capaian (target).

Demikian Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2024 ini disusun dengan harapan semoga segala yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan selalu mendapat ridho Allah SWT Amin.

LAMPIRAN

1935

1936

TABEL T-C.27. (2024)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BOGOR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(Outcome)*, Kegiatan *(Output)*, *Sub Kegiatan (Output)*	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Capaian			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024					
							2019	2020	2021	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Visi : Terwujudnya Kota Bogor yang Ramah Keluarga																			
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera																			
Tujuan 1 : Menurunnya				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,28	9,10	12,68	11,79	11,32	11	10,56		8,11		8,11			Kota Bo

tingkat pengangguran																		**gor**
	Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas tenaga kerja			**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**	**%**	**63,91**	**66,24**	**64,70**	**71,43**	**65,54**		**66,20**		**77,76**		**77,76**			
		2.07.03	**Program : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase peserta pelatihan yang bersertfikat Kompetensi**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**90**	**306.039.700**	**90**	**135.225.000**	**100**	**11.133.399.980**	**100**	**11.574.664.680**	**Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga**	

																	Kerja	
				persentase perusahaan yang memiliki produktivitas tenaga kerja tinggi	%	NA	NA	NA	NA	6		7		8		8		
		2.07.03.2.01	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan memiliki sertifikat kompetensi	orang	96	74	NA	76	20	250.539.700	0	125.225.000	240	4.341.411.716		4.717.176.416		

		2.07.03.2.01.01	Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan dan uji kompetensi	orang	96	74	NA	76	**20**	**93.314.700**								
				Jumlah Peserta keterampilan kerja sehingga pemagangan akan lebih mudah terserap kerja	Orang					**100**									

| | | |

				Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat	orang							24		324		348									
				Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pemagangan	orang							20				20									
				Jumlah Peserta keterampilan kerja sehingga pemagangan akan lebih mudah terserap kerja	orang									0		0									

		2.07.03.2.01.02	Sub Kegiatan : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat	Orang	50	60	40	60	50	157.225.000											

				Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga					**1**									
		2.07.03.2.02	**Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan**	**Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan**	%	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**15.000.000**	**100**	**10.000.000**	**100**	**9.627.900**	**100**	**34.627.900**		

			Kerja Swasta	**Kerja Swasta**															
		2.07.03.2.02.01	Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah peserta Bimtek Akreditasi LPK	LPK	NA	NA	NA	25	**15**	**15.000.000**								
				Jumlah Peserta Pelatihan Lembaga Latihan Swasta (LLS)guna menciptakan tenaga kerja yang siap	Orang	30	25	NA	25	**15**									

				pakaidan menekan angka pengangguran															
				Verifikasi Administrasi Akreditasi LPK	LPK	NA	NA	NA	10	**NA**										
				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	LPK					**25**		25	10.000.000	25	9.627.900	50	19.627.900		
		2.07.03.2.05	**Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah**	**Jumlah perusahaan yg diukur produktivitas tenaga kerjanya**	**Orang**					**NA**	**40.500.000**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**		

			Kabupaten/Kota																
		2.07.03.2.05.01	Sub Kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan Bimbingan Konsultasi Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	NA	NA	30 Orang		**20**	**40.500.000**								
				Jumlah Perusahaan Bimbingan konsultasi/shidakarya	Perusahaan	NA	NA	NA		**3**									

				Jumlah Perusahaan yang mengikuti Pelatihan UKM/Produktivitas	Perusahaan	10	20	30		**15**									
				Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen					**1**									
		2.07.03.2.04	**Kegiatan :Konsultasi Produktivitas pada Perusa**	**Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusa**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**100**	**0**	**100**	**19.435.100**	**100**	**19.435.100**		

			haan Kecil	**haan Kecil**														
		2.07.03.2.04.01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan					**NA**	**NA**	10	0	30	19.435.100	40	19.435.100		
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kesempa			**Tingkat Kesempatan Kerja**	**%**	**90,38**	**90,38**	**87,74**	**88,21**	**92,20**		**92,51**		**92,81**		**92,81**			

	tan Kerja																	
		2.07.04	Program : PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	56,53	58,76	21,11	67,18	63,50	246.663.800	64,7	155.255.700	91,95	3.752.135.930	91,95	4.154.055.430	Bidang Pemempatan dan Perluasan Kerja	Kota Bogor
		2.07.04.2.01	Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yg berhasil ditempatkan dan berwirausaha	Orang	2.189	2.590	965	2.440	2.500	174.431.400	2.500	130.023.300	3.000	3.505.379.930	13.000	3.809.834.630		

		2.07.04.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Perusahaan yang mengikuti bimbingan konsultasi / dialog kegiatan pemagangan	Perusahaan	NA	NA	30	30												
				Jumlah Peserta keterampilan kerja sehingga pemagangan akan lebih mudah terserap kerja	Orang	25	40	NA	100												

				Jumlah pembinaan forum komunikasi FKJP pemagangan	FKJP	NA	NA	NA	0										
		2.07.04.2.01.01	Sub Kegiatan : Pelayanan antar Kerja	Jumlah Monitoring Pelaporan Serta pemberian Bantuan Pengembangan Ekonomi Bagi Warga Transmigran	KK	NA	5	5	5	**5**	**164.408.100**								
				Jumlah Pelatihan WUB Bagi Calon Transmigrasi dan Lulusan	Orang	26	15	20	20	**20**									

				Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat																			
				Jumlah Kelurahan Sosialisasi , Rekrutmen dan Seleksi Calon Transmigrasi	Kelurahan	18	7	NA	0	**16**													
				Jumlah Tenaga Kerja Mandiri Yang Berjiwa Kewirausahaan dan Terlaksananya Pembekelan Tenaga	Orang	NA	20	20	20	**20**													

				Kerja Mandiri Di Sektor Wirausaha																			
				Jumlah pendampingan Pemberangkatanke Lokasi Transmigrasi	KK	NA	4	NA	2	**5**													
				Jumlah lokasi penjajakan Kawasan Permukiman Transmigrasi	Lokasi	NA	1	NA	1	**1**													
				Jumlah FGD	Orang	NA	NA	NA	NA	**25**													

				Jumlah kegiatan pemberian kerja sementara	Orang	40	36	60		**12**													
				Jumlah alat dan bahan kegiatan pemberian kerja sementara	Lokasi	3	2	2		**1**													
				Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan Antar Kerja Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL)	Orang					**1200**		210	120.000.000	220	3.499.375.930	430							

		2.07.04.2.01.03	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Penyuluhan dan terwujudnya BKK yang terampil memahami ketenagakerjaan	Orang	300	24 BKK	NA	NA														
				Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang									350	3.720.000	350							

		2.07.04.2.01.04	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Penyuluhan tentang Ketenagakerjaan Khusus Penyandang Disabilitas yang berasal dari OPD/BUMD dan Perusahaan	Orang	NA	NA	NA	0	**50**	**10.023.300**								
				Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang					**50**		50	10.023.300	50	2.284.000	100	12.307.300			

		2.07.04.2.03	**Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah lowongan kerja yang diinformasikan di pasar kerja**	**Lowongan**	**2.980**	**3.484**	**1.511**	**1.681**	**50**	**72.232.400**	**70**	**25.232.400**	**95**	**246.756.000**	**215**	**344.220.800**		
		2.07.04.2.03.01	Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pemeliharaan dan Update Aplikasi	Aplikasi	NA	NA	1	1										
				Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar	Dokumen									1	50.000.000	1	50.000.000		

				Kerja Online															
		2.07.04.2.03.02	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terlaksananya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	%	NA	NA	100	100	**100**	**72.232.400**								
				Jumlah Penyuluhan dan terwujudnya BKK yang terampil memahami ketenagakerjaan	Orang	300	24 BKK	NA		**325**									

				Jumlah Pemeliharaan dan Update Aplikasi	Aplikasi	NA	NA	1		**1**									
				Jumlah Perusahaan Bursa Kerja Expo	Perusahaan	30	23	NA		**25**									
				Jumlah kegiatan pemberian kerja sementara	Orang	40	36	60	38										
				Jumlah alat dan bahan kegiatan pemberian kerja sementara	Lokasi	3	2	2	2										

		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang					**3532 Pencari Kerja dan 7000 Pemberi Kerja**		3000 Pencari Kerja dan 5000 Pemberi Kerja	25.232.400	3000 Pencari Kerja dan 5000 Pemberi Kerja	192.280.000	6000 Pencari Kerja dan 10000 Pemberi Kerja	217.512.400	
2.07.04.2.03.03	Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Perusahaan Bursa Kerja Expo	Perusahaan	30	23	NA	0									
		Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job fair/Bursa Kerja	Orang									75	4.476.000	75	4.476.000	

	Sasaran 3 : Meningkatnya Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja			**Presentase Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**			
		2.07.05	**Program : PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Presentase rekomendasi LKS tripartit yg ditindaklanjuti**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**100**	**89.799.000**	**100**	**54.799.000**	**100**	**130.099.800**	**100**	**274.697.800**	**Bidang Hubungan Industrial**	

				Penetapan Besaran UMK	**Rupiah**	**3.557.146**	**3.557.146**	**4.169.806**	**4.169.806**	**4.330.249**		**4.634.429**		**4.813.988**		**4.813.988**			
		2.07.05.2.01.03	**Kegiatan :Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**%**	**NA**	**NA**	**NA**	**100**	**100**	**67.663.600**	**100**	**32.663.600**	**100**	**113.396.700**	**100**	**213.723.900**		

		2.07.05.2.01.03	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi UMK dan Tripartit	Kali	NA	NA	NA	4	**4**	67.663.600									
				Jumlah Peserta Saraseh an Mayday	Orang	50	50	NA	75	**50**										
				Jumlah Peserta sosialisasi UMK	Orang	125	125	NA	75	**50**										

				Kota Bogor															
				Jumlah Peserta Saraseh an Tripartit	Ora ng	21	21	NA	50	**50**									
				Jumlah Data dan Informa si Sarana Hubung an Industri al (HI) (Peratur an Perusah aan (PP)/Per janjian Kerja Bersam a (PKB), Struktu r Skala Upah, dan Lembag a Kerja	Lap ora n					**1**		1	32.66 3.600	1	113.3 96.70 0	1			

				Sama (LKS) Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan															
		2.07.05.2.02	**Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di**	**Presentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**22.135.400**	**100**	**22.135.400**	**100**	**16.703.100**	**100**	**60.973.900**		

			Daerah Kabupaten/Kota																
		2.07.05.2.02.01	Sub Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Beraki	Jumlah Peserta Pemilihan Pekerja Teladan Tingkat Kota Bogor	Orang	3	3	NA	0	**3**	**22.135.400**								

			bat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
				Jumlah Peserta Sarasehan Syarat Kerja	Orang	NA	NA	NA	75											
				Risalah mediasi/laporan penyelesaian kasus	Dokumen	NA	NA	NA	NA	**1**										

				Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara					**12**		15	22.135.400	15	16.703.100	30				

P. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) merupakan dasar atau acuan memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2023. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja pemerintah (RKP) Nassional dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 264 ayat (5) menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangann atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 343 menyebutkan perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan: dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2024. Hasil Evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukan adanya beberapa perubahan dan pengurangan anggaran sehingga menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan dan target kinerja.

Perubahan Renja Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Renja Disduklcapil Tahun 2024 yang diharapkan dapat memnberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor yaitu ***" Mewujudkan Kota Bogor Sebagai Kota Yang Sejahtera".*** Disamping itu dalam rangka penyelarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota Bogor dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan untuk dilakukannya perubahan dokumen Renja 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Disdukcapil Kota Bogor Tahum 2024.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusuan Renja Perubahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang PerubahanUndang-UndangNomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomnor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tara Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).

22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi data Administrasi Kependudukan Pemerintah Kota Bogor;
26.. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2019-2024 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2019-2024;
27. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
28. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 173 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 173);

1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Tahun 2024

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah bagi Disdukcapil Kota Bogor tahun 2024 dalam melaksanakan perubahan terhadap anggaran program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun

2024 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sampai dengan Triwulan 2 (dua) Tahun 2024;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah;serta;
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2024 dengan dokumen Perubahan Renja Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang Latar Belakang,Perubahan Renja Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Perubahan Renja , Sistematika Perubahan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA DISDUKCAPIL KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2 (DUA) TAHUN 2024

Memuat Kajian/Reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan 2 (dua) Tahun 2024

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DISDUKCAPIL TAHUN 2024

Memuat rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan mengenai perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dan tabel rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2024

BAB IV : PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa catatan penting dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2 (DUA) TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan 2 (dua) dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024, melaksanakan 5 Program Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 14.938.459.630,- dengan realisasai anggaran sampai triwulan 2 (dua) sebesar Rp. 9.408.653.833,- atau 62,98%. Masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan 2 (fdua) disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi anggarannya karena dianggarakan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan. Adapun capaian dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 sampai Triwulan 2 (dua)

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II		Realisasai Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	A Point	12.819.606.730	A Point	3.711.460.537	A Point	4.021.712.591	A Point	7.727.744.528	100%	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Lingkup Perangkat Daerah	3,78 Point		Point		Point		3,70Point		97%	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A Point	86.746.900	- Laporan	2.894.400	2 laporan	5.588.100	2 Laporan	8.482.500	2 Laporan	9,78%
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	86.746.900	- Laporan	2.894.400	2 Laporan	5.588.100	2 Laporan	8.482.500	2 Laporan	9,78%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan Tunjangan ASN	100%	9.588.294.582	60 Orang/Bulan	2.923.262.728	60 Orang/Bulan	3.029.051.915	60 Orang/Bulan	5.952.314.643	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	60 orang/Bulan	9.532.014.582	60 Orang/Bulan	2.915.554.628	60 orang/Bulan	3.013.831.615	60 Orang/Bulan	5.929.386.243	100%	62,20%

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Lap[oran Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	56.280.000	3 Laporan	7.708.100		15.220.300		22.928.400		40,74%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan operasional Perangkat Daerah	100%	676.807.500	-	230.060.000	-	182.948.214	-	413.008.214	-	0%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik /Penenrangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	17.499.800	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	30.469.100	Paket	1.193.300	Paket	4.943.600	Paket	6.136.900	Paket	20,14%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	244.593.500	1 Paket	177.396.800	1 Paket	48.407.000	1 Paket	225.803.800	1 Paket	92,98%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	21.612.000	-	-		-		-		0%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	102.184,800	3 Laporan	9.900.000	3 Laporan	17.030.400	6 Laporan	26.930.400	6 Laporan	26,35%
	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12		3		3		6		6	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	260.448.300	Laporan	41.569.900	Laporan	112.567.214	Laporan	154.137.114	Laporan	59,18%
	Kegiatan Penggandaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	100%	354.831.700	98 Unit	188.830.000	4 Unit	66.580.000	102 Unit	255.410.000	102 Unit	71,98%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	120 Unit	354.831.700	98 Unit	188.830.000	4 Unit	66.580.000	102 Unit	255.410.000	102 Unit	71,98%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.516.444.848	6 Laporan	353.532.409	6 Laporan	383.007.953	12 Laporan	736.540.362	12 Laporan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	275.412.520	3 Laporan	62.254.803	3 Laporan	70.599.824	6 Laporan	132.854.627	6 Laporan	48,24%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	12 Laporan	1.241.032.328	3 Laporan	291.277.606	3 Laporan	312.408.129	6 Laporan	603.685.735	6 Laporan	48,64%
	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup perangkat Daerah berkondisi baik	100%	596.481.200	Unit	12.881.000	Unit	354.536.409	Unit	367.417.409	Unit	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	188.090.000	Unit	7.200.000	Unit	74.899.860	Unit	82.099.860	Unit	43,65%

	Operasional atau Lapangan											
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	234.296.000	-	-	Unit	232.851.549	Unit	232.851.549	Unit	99,38%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	18 Unit	174.095.200	Unit	5.681.000	Unit	46.785.000	Unit	52.466.000	Unit	30,14%
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Telah terintegrasi	95.00%	340.376.400		194.777.730		21.000.000		215.777.730		
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tabf disediakan/disajikan , diolah dan dimutakhirkan secara berkala	2 Sistem Informasi	237.916.400	1 Sistem Informasi	139.130.730	-	-	1 Sistem Informasi	139.130.730	1 Sistem Informasi	97,54%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	23 Dokumen	95.276.400	-	-						0%
	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Laporan	142.640.000	1 Laporan	139.130.730			1 Laporan	139.130.730	1 Laporan	97,54%

	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Institusi dan Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	12 Laporan	102.460.000	Laporan	55.647.000	Laporan	21.000.000	Laporan	76.647.000	Laporan	74,81%
	Sub Kegiatan Komunikasi,Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi,Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	102.460.000	Laporan	55.647.000	Laporan	21.000.000	Laporan	76.647.000	Laporan	74,81%
III	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Wajb KTP yang memiliki E-KTP	99.50%	1.521.028.000		1.246.306.000		25.680.000		1.271.986.000		
		Persentase Penduduk yang memiliki KK	100%									
		Persentase anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	70%									
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan	99%	19.540.000		1.246.306.000		0		0		
	Sub Kegiatan Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kepenudukan	Jumlah Dokumen hasil Pendataan Penduduk Nomn Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	9.770.000	-	-		-		-		0%
	Sub Kegiatan Pencatatan,	Jumlah Dokumen hasil pencatatan,	2									0%

	Penatausahaandan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Penatausahaan dan Penerbitan dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	9.770.000	-	-		-		-		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan pelayanan administrasi Kependudukan	100%	1.501.488.000	97%	1.246.306.000		25.680.000	98%	1.271.986.000	98%	84,72%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lapotran Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1.501.488.000	1 Laporan	1.246.306.000	Laporan	25.680.000	Laporan	1.271.986.000	Laporan	84,72%
IV	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	98%	228.978.500	-	-		159.524.475		159.524.475		
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akte Perkawinan	55%									
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Akte Catatan Sipil	99%	112.840.000				45.000.000		45.000.000	Dokumen	58,03%
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	77.550.000	-	-	Dokumen	45.000.000	Dokumen	45.000.000	Dokumen	58,03%

	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	1 Layanan	35.290.000	-	-						0%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	116.138.500				114.524.475		114.524.475		98,61%
	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	116.138.500	-	-	1 Laporan	114.524.475	1 Laporan	114.524.475	1 Laporan	98,61%
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen profil kependudukan	100%	28.470.000				26.580.000		26.580.000		
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase elemen data kependudukan yang diolah	100%	28.470.000				26.580.000		26.580.000		93,36%
	Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	28.470.000	-	-	2 Dokumen	26.580.000	2 Dokumen	26.580.000	2 Dokumen	93,36%
JUMLAH				**14.938.459.630**		**5.152.544.267**		**4.254.497.066**		**9.407.041.333**		**62,98%**

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DISDUKCAPIL TAHUN 2024

3.1. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 berpedoman pada surat dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor (BAPERIDA), Nomor 000.7/0523-PPEPD Tanggal 29 Juli 2024 perihal Penyampaian Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 untuk segera Menyusun Renja Perubahan Tahun 2024, namun tidak lepas dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tahun 2019- 2024 sebagai pedoman program dan kegiatan lima tahunan. Penentuan penyusunan rancangan perubahan Renja pada program dan kegiatan Tahun 2024 memperhatikan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024. Disamping itu juga memperhatikan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Kedua, apakah target rencana lebih realistis dalam pencapaiannya dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan APBD, memperhatikan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Angaran 2024. Adapun Program dan kegiatan yang masuk dalam Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 sebagai berikut : Tahun 2024 Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran Penetapan sebesar Rp. 14.938.459.630,- dari Sumber Dana - Dana Alokasi

Umum (DAU). Adapun rincian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
    1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    4. Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    6. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2 Program Pendaftaran Penduduk
    1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
    1. Pelayanan Pencatatan Sipil
    2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
4. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    1 Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
    2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Pengelolaan Profil Kependudukan
    1 Penyusunan Profil Kependudukan

Berikut rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2024 dengan Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan sebelum dan

sesudah perubahan sebagaimana Rincian perubahan Renja terlampir dalam lampiran matrik renja tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1.Perubahan Program dan Kegiatan Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.14.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.14.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
									Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sblm	sesdh	sblm	sesudah	sblm	sesdh	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	12				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**											**14.938.459.630**	**16.692.612.033**					**15.720.053.833**
2	12	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**12.819.606.730**	**14.351.369.433**					
2	12	01	201		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											86.746.900	86.746.900					
2	12	01	201	0007	EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah		Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	A Point 3,55 Point	A Point 3,75 Point	8 Laporan	8 Laporan			86.746.900	86.746.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kepatuhan Anggaran, Persentase Penyampaian Laporan	100% 100% 11,5 Nilai 13 Nilai 22 Nilai 28,5	114.761.700

						Prangkat Daerah, Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyrakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah														Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan Secara Tepat Waktu	Nilai 29 Nilai 92,5 Nilai 93 Nilai 94% 96 Nilai 97,5 % 97,5 % 98,5 Nilai	
2	12	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9.588.294.582	11.025.808.729					
2	12	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjngan	Indeks Rformasi Birokrasi Lingkup Prangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	A Point 3,55 Point	A Point 3,75 Point	50 Orang /Bln	50 Orang / Bulan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan	9.532.014.582	10.975.548.729	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer		Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup	100 % 100 % 11,5 Nilai 13 Nilai 22 Nilai 28,5	10.313.609.137

						Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyara Kat Terhadap Pelayanan Lingkup Prangkat Daerah								Tunja Ngan 60 Orang/ bulan	Tunja Ngan 50 Orang/ bulan			Umum-Dana Alokasi Umum		Perangkat Daerah Nilai Sakip Aspek Pelaporan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Lingkup Perangkat Daerah, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM	Nilai 29 Nilai 92,5 Nilai 93 Nilai 94% 94% 96 Nilai 97,5 % 98,5 Nilai	

																				Aspek Pemenuhan Kualitas SDM, Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan, Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA, Rata-rata Nilai SKM Aspek Penangan an		

																			Pengaduan		
2	12	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyara Kat Terhadap Pelayanan Lingkup Prangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunnan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester SKPD		Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	A Point 3,55 Point	A Point 3,75 Point	12 Lapo ran	12 Laporan			56.280.000	50.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Nilai Sakip Aspek Pelaporan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan	100 % 100 % 11,5 Nilai 13 Nilai 22 Nilai 28,5 Nilai 29 Nilai 92,5 Nilai 93 Nilai 94% 94% 96 Nilai 97,5 % 98,5 Nilai	49.984.000

																				Kinerja Lingkup Perangkat Daerah, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM, Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur,		

																				Waktu, Tarif dan Standar Layanan, Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA, Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		
2	12	01	206	0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah											676.807.500	666.032.500					709.002.000
					Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Pembangunan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan		Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	3,55 Point A Point	3,79 Point A Point	1 Paket	1 Paket			17.499.800	17.499.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Nilai Sakip	100 % 100 % 11,5 Nilai 13 Nilai 22 Nilai 28,5 Nilai 29 Nilai 92,5 Nilai 93	17.499.500

						Rata Indeks Kepuasan Masyara Kat Terhadap Pelayanan Lingkup Prangkat Daerah														Aspek Pelaporan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Lingkup Perangkat Daerah, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM,	Nilai 94% 94% 96 Nilai 97,5 % 98,5 Nilai	

																				Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan, Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA, Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		

2	12	01	206	0003	Peyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyara Kat Terhadap Pelayanan Lingkup Prangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yand di sediakan		Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	A Point 3,55 Point	A Point 3,75 Point	1 Paket	1 Paket			30.469.100	30.469.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Nilai Sakip Aspek Pelaporan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Lingkup Perangkat	100 % 100 % 11,5 Nilai 13 Nilai 22 Nilai 28,5 Nilai 29 Nilai 92,5 Nilai 93 Nilai 94% 94% 96 Nilai 97,5 % 98,5 Nilai	42.491.400

																				Daerah, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM, Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan,		

																				Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA, Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		
2	12	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerint Ah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	Persen Tase pemenu Han Kebutuhan Operasi Onal Perang Kat Daerah	Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	A Point 3,55 Point	A Point 3,75 Point	1 Paket	1 Paket	100%		244.593.500	244.593.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Nilai Sakip Aspek Pelaporan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi	100 % 100 % 11,5 Nilai 13 Nilai 22 Nilai 28,5 Nilai 29 Nilai 92,5 Nilai 93 Nilai 94% 94% 96 Nilai	222.917.700

						Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Prangkat Daerah														Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Lingkup Perangkat Daerah, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM, Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola	97,5 % 98,5 Nilai	

																						sesuai dengan ketentuan, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan, Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA, Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		
2	12	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Persen Tase pemenu Han Kebutuhan Operasi Onal	Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	A Point 3,55 Point	A Point 3,75 Point	1 Paket	1 Paket	100%		21.612.000	21.612.000			Persentase Pnyampaian Laporan Keuangan Bulanan,	100 % 100 % 11,5 Nilai 13 Nilai	21.612.000

						Pemerint Ah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyara Kat Terhadap Pelayanan Lingkup Prangkat Daerah	disediakan	Perang Kat Daerah											Triwulan Smesteran Dan Tahunan Secara Tepat Waktu Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko Di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Nilai Sakip Aspek Pelaporan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi	22 Nilai 28,5 Nilai 29 Nilai 92,5 Nilai 93 Nilai 94% 94% 96 Nilai 97,5 % 98,5 Nilai	

																				Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Lingkup Perangkat Daerah, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM, Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola		

																					sesuai dengan ketentuan, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan, Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA, Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		
2	12	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan	Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	A Point 3,55	A Point 3,75 Point	12 Laporan	12 Laporan	100%		102.184.800	79.459.800			Persentase Pnyampaian Laporan	100 % 100 % 11,5 Nilai	74.850.000

						Instansi Pemerint Ah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyara Kat Terhadap Pelayanan Lingkup Prangkat Daerah		Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah		Point										Keuangan Bulanan, Triwulan Smesteran Dan Tahunan Secara Tepat Waktu Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko Di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Nilai Sakip Aspek Pelaporan	13 Nilai 22 Nilai 28,5 Nilai 29 Nilai 92,5 Nilai 93 Nilai 94% 94% 96 Nilai 97,5 % 98,5 Nilai	

																				Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Lingkup Perangkat Daerah, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM, Persentase		

																				Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan, Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA, Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		

2	1 2	0 1	2 0 6	0 0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Prangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	A Point 3,55 Point	A Point 3,75 Point	12 Laporan	12 Laporan			260.448.300	272.398.300			Persentase Pnyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan Smesteran Dan Tahunan Secara Tepat Waktu Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko Di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup	100 % 100 % 11,5 Nilai 13 Nilai 22 Nilai 28,5 Nilai 29 Nilai 92,5 Nilai 93 Nilai 94% 94% 96 Nilai 97,5 % 98,5 Nilai	329.631.400

																				Perangkat Daerah Nilai Sakip Aspek Pelaporan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Lingkup Perangkat Daerah, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana		

																					Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM, Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan, Persentase Realisasi Anggaran		

																				terhadap DPA, Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		
2	12	01	207		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											354.831.700	428.791.000					354.831.600
2	12	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	A Point 3,55 Point	A Point 3,75 Point	120 Unit	120 Unit	100%		354.831.700	428.791.000			Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Nilai Sakip Aspek Pelaporan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	100% 100% 11,5 Nilai 13 Nilai 22 Nilai 28,5 Nilai 29 Nilai 92,5 Nilai 93 Nilai 94% 94% 96 Nilai 97,5 %	354.831.600

						Terhadap Pelayanan Lingkup Prangkat Daerah														Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Lingkup Perangkat Daerah, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM, Persentase Pengelola	98,5 Nilai	

																				an BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan, Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA, Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		

2	12	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1.516.444.848	1.595.859.104					1.595.699.848
2	12	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyara Kat Terhadap Pelayanan Lingkup Prangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang	Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	A Point 3,55 Point	A Point 3,75 Point	12 Laporan	12 Laporan	100%		275.412.520	288.526.776			Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Nilai Sakip Aspek Pelaporan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan	100 % 100 % 11,5 Nilai 13 Nilai 22 Nilai 28,5 Nilai 29 Nilai 92,5 Nilai 93 Nilai 94% 94% 96 Nilai 97,5 % 98,5 Nilai	275.132.920

																				Kinerja Lingkup Perangkat Daerah, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM, Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur,		

																				Waktu, Tarif dan Standar Layanan, Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA, Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		
2	12	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang di sediakan	Persentase pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	A Point 3,55 Point	A Point 3,79 Point	12 Laporan	12 Laporan	100%		1.241.032.328	1.307.332.328			Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Nilai Sakip	100% 100% 11,5 Nilai 13 Nilai 22 Nilai 28,5 Nilai 29 Nilai 92,5 Nilai 93	1.320.566.928

						Rata Indeks Kepuasan Masyara Kat Terhadap Pelayanan Lingkup Prangkat Daerah														Aspek Pelaporan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Lingkup Perangkat Daerah, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas	Nilai 94% 94% 96 Nilai 97,5 % 98,5 Nilai	

																				SDM, Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan, Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA, Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		

2	12	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											596.481.200	548.131.200					575.023.737
2	12	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyara Kat Terhadap Pelayanan Lingkup Prangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang di Pelihara Dan di Bayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase BMD lingkup Perangkat Daerah Berkondisi baik	Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	A Point 3,55 Point	A Point 3,79 Point	5 Unit	5 Unit	100%		188.090.000	154.740.000			Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Nilai Sakip Aspek Pelaporan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP	100 % 100 % 11,5 Nilai 13 Nilai 22 Nilai 28,5 Nilai 29 Nilai 92,5 Nilai 93 Nilai 94% 94% 96 Nilai 97,5 % 98,5 Nilai	204.793.737

																				Aspek Perencanaan Kinerja Lingkup Perangkat Daerah, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM, Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan		

																				Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan, Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA, Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		
2	12	01	209	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/ Direhabilitasi	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi baik	Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	A Point 3,55 Point	A Point 3,79 Point	1 Unit	1 Unit	100%		234.296.000	234.296.000			Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah	100% 100% 11,5 Nilai 13 Nilai 22 Nilai 28,5 Nilai 29 Nilai 92,5	234.296.000

						Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyara Kat Terhadap Pelayanan Lingkup Prangkat Daerah														Nilai Sakip Aspek Pelaporan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Lingkup Perangkat Daerah, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek	Nilai 93 Nilai 94% 94% 96 Nilai 97,5 % 98,5 Nilai	

																			Pemenuhan Kualitas SDM, Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan, Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA, Rata-rata Nilai SKM Aspek		

																				Penanganan Pengaduan		
2	12	01	209	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Prangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara/ di rehabilitasi	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi baik	Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	A Point 3,55 Point	A Point 3,79 Point	120 Unit	120 Unit	100%		174.095.200	159.095.200			Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Nilai Sakip Aspek Pelaporan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP	100 % 100 % 11,5 Nilai 13 Nilai 22 Nilai 28,5 Nilai 29 Nilai 92,5 Nilai 93 Nilai 94% 94% 96 Nilai 97,5 % 98,5 Nilai	135.933.969

																				Aspek Perencanaan Kinerja Lingkup Perangkat Daerah, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM, Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan		

																				Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan, Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA, Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**											**1.521.028.000**	**1.811.257.900**					**1.521.027.900**
2	12	02	201		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduiduk											19.540.000	9.770.000					19.539.900
2	12	02	201	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KK, Persent	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk		Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	100 % 80 %	100 % 80% 99%	1 Dokumen	1 Dokumen			9.770.000	9.770.000			Persentase Cakupan Perekaman E-KTP Persentase	100 % 100 %	19.539.900

						ase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), Persentase Penduduk Wajib KTP Yang Memiliki E-KTP	Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan													Penduduk Yang Memiliki Kartu Keluarga		
2	12	02	201	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki KK, Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA),	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausa Haan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	100 % 80 %	100 % 80% 99%	2 Dokumen	2 Dokumen			9.770.000	0					0

						Persentase Penduduk Wajib KTP Yang Memiliki E-KTP																
2	12	02	203		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk										1.501.488.000	1.801.487.900					1.501.488.000
2	12	02	203	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki KK, Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), Persentase Penduduk Wajib KTP	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk		Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	80 % 100 %	100 % 80% 99%	1 Laporan	1 Laporan			1.501.488.000	1.801.487.900			Persentase Cakupan Perekaman E-KTP	100 %	1.501.488.000

						Yang Memiliki E-KTP Persentase Anak yang memiliki KIA Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga																
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**											**228.978.500**	**161.138.500**					**200.267.900**
2	12	03	201		Pelayanan Pencatatan Sipil											112.840.000	45.000.000					100.252.400
2	12	03	201	0001	Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Kelahiran Persentase	Jumlah Doku,men Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan		Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	99%	99% 60%	12 Dokumen	12 Dokumen			77.550.000	45.000.000			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akte Perkawinan Persentase	65% 99,20%	75.369.200

						Rumah Tangga Yang Memiliki Akta Perkawinan	Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting												Pendataan Akta Kelahiran 0-18 Tahun		
2	12	03	201	0002	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Kelahiran Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akta Perkawinan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil Yang di tingkatkan	Persentase Kepemilikan Dokumen Akte Catatan Sipil	Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	99 % 60 %	99% 60%	1 Layanan	1 Layanan			35.290.000	0			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akte Perkawinan Persentase Pendataan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	65% 99,20 %	24.883.200
2	12	03	202		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil											116.138.500	116.138.500					100.015.500
2	12	03	202	000	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase	Jumlah Laporan Hasil	Persentase	Kota Bogor, Bogor	99 %	99% 60%	1 Lapo	1 Laporan	100%		116.138.500	116.138.500			Persentase	65% 99,20	100.015.500

				6		Penduduk Yang Memiliki Akta Kelahiran Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akta Perkawinan	Fasilitasi Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Utara Tegal Gundil	60 %		ran							Rumah Tangga yang Memiliki Akte Perkawinan Persentase Pendataan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	%	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**											**340.376.400**	**340.376.200**					
2	12	04	201		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan , Penyajian Database Kependudukan											237.916.400	237.916.400					206.386.200
2	12	04	201	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang telah	Jumlah Dokumen Data Kependudu Kan yang Diolah dan disajikan		Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	100 %	95%	3 Dokumen	3 Dokumen			95.276.400	95.276.400			Persentase Penyajian data kependudu Kan yang Diperlukan OPD Sesuai Dengan SOP	61%	63.746.200

						terintegrasi														Kerjasama Pemanfatan Data		
2	12	04	201	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang telah terintegrasi	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	100 %	95%	1 Lapo ran	1 Lapo ran			142.640.000	142.640.000			Persentase Penyajian data kependduKan yang Diperlukan OPD Sesuai Dengan SOP Kerjasama Pemanfatan Data	61%	142.640.000
2	12	04	203		Penyelenggaraan Pengelolaan Infprmasi Administrasi Kependudukan											102.460.000	102.459.800					79.459.842
2	12	04	203	0007	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi Informasi Dan Edukasi	Jumlah Institusi dan Stakeholder Yang Memanfaat Kan data	Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	100 %	100 %	12 Institusi	12 Institusi			102.460.000	102.459.800			Persentase Penyajian data kependduKan yang Diperlukan	61%	79.459.842

						Kependudukan yang telah terintegrasi	Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat	Kependudukan												OPD Sesuai Dengan SOP Kerjasama Pemanfatan Data		
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**											28.470.000	28.470.000					**0**
2	12	05	201		Penyusunan Profil Kependudukan											28.470.000	28.470.000					0
2	12	05	201	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/ Kota		Kota Bogor, Bogor Utara Tegal Gundil	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen			28.470.000	28.470.000					0

Tabel 3.1.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan sebelum dan sesudah Perubahan Tahun 2024

No	URAIAN			PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER PENDANAAN
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.746.900	86.746.900	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.532.014.582	10.975.548.729	1.443.534.147	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	56.280.000	50.260.000	(6.020.000)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.499.800	17.499.800	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.469.100	30.469.100	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	244.593.500	244.593.500	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.612.000	21.612.000	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	102.184.800	79.459.800	(22.725.000)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.448.300	272.398.300	(11.950.000)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Penggandaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	354.831.700	428.791.000	73.959.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.412.520	288.526.776	13.114.245	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.241.032.328	1.307.332.328	66.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	188.090.000	154.740.000	(33.350.000)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

			Operasional atau Lapangan				
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	234.296.000	234.296.000	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Saranan dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.095.200	159.095.200	(15.000.000)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	9.770.000	9.770.000	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	9.770.000	0	(9.770.000)	Pendapatan Asli Daerah (PAD
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1.501.488.000	1.801.487.900	299.999.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD
	PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	77.550.000	45.000.000	(32.550.000)	Pendapatan Asli Daerah (PAD

			atas Pelaporan Peristiwa Penting				
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	35.290.000	0	(35.290.000)	Pendapatan Asli Daerah (PAD
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	116.138.500	116.138.500	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD
	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	95.276.400	95.276.400	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD
			Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	142.640.000	142.640.000		Pendapatan Asli Daerah (PAD
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	102.460.000	102.460.000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	28.470.000	28.470.000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	JUMLAH	**14.938.459.630**	**16.692.612.033**		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pada perubahan Renstra Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan hasil pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program kegiatan serta sub kegiatan Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2024 dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam mewujudkan misi ke-3 yaitu "***Mewujudkan Kota Bogor Sebagai Kota Yang Sejahtera"*** .

4.1. Catatan Penting Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024

Catatan Penting Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Beberapa permasalahan yang dialami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berkaitan dengan capaian kinerja, yang dapat menghambat dan sekaligus menjadi evaluasi di Tahun 2024 sebagai tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2026, antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan Penganggaran

   Adanya Penundaan Rencana Anggaran Kas (RAK), kegiatan yang semula sudah direncanakan untuk mendukung capaian kinerja harus tertunda sampai dengan adanya Perubahan Anggaran ; - Penyesuaian Anggaran karena Likuiditas Kas Daerah, harus merefokusing kegiatan yang mendukung capaian kinerja.
2. Masyarakat sebagai sasaran indikator kinerja

   Masih ada sebagian masyarakat yang belum paham tentang administrasi kependudukan, dalam mengurus dokumen kependudukan hanya untuk kebutuhan mendesak, kondisi ini menyebaban jika dokumen tidak dapat terselesaikan pada saat dibutuhkan maka akan dikomplain jika dalam memgurus dokumen

dengan waktu yang lama.. Masyarakat masih ada yang enggan untuk melaporkan setiap adanya perubahan baik perubahan peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan, bahkan pada saat melaporkan adanya perubahan, masyarakat tidak memberikan data yang dimiliki dengan benar dan lengkap sehingga menyebabkan data base kependudukan kurang akurat. - Perubahan Sistem yang semula manual menjadi online sebagian menyebabkan masyarakat yang tidak dapat mengoperasionalkan dalam mengurus dokumen kependudukan akan meminta bantuan jasa calo / makelar sehingga berdampak adanya biaya untuk mengurus dokumen tersebut padahal menurut Undang – Undang nomor 24 tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (dalam pasal 79 A) menyatakan untuk kepengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah sebagai strategi peningkatan kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor guna mencapai keberhasilan Sasaran, Program, dan Kegiatan Perubahan Anggaran mengingat waktu pelaksanaan tinggal beberapa bulan :

1. Merencanakan ulang Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Kas (RAK) disesuaikan kondisi waktu pelaksanaan, karena perubahan terbatas waktunya;
2. Memprioritaskan kegiatan pengadaan barang dan jasa karena waktu pelaksanaan perubahan terbatas (bulan pelaksanaan terbatas);
3. Mengoptimal Sumber Daya Manusia yang ada, dengan mengedapankan perkembangan teknologi dan informasi, terkait dengan pengelolaan *data base* dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.;
4. Menindaklajuti ketentuan – ketentuan / regulasi yang ada dan terus berkembang;
5. Berkomitmen tetap memberikan pelayanan prima kepada dengan meningkatkan inovasi pelayanan terintegrasi yang dapat memberikan pelayanan Prima kepada masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk perencanaan kegiatan /kinerja yang akan datang

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen Perubahan Renja merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan perubahan Renja sangat di tentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengoordinasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah semester II tahun 2024 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja semester II pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2024. Tahap penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landsan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

    Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Cara Penyusunan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6)
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;

26. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 33 Seri E);
27. Peraturan Wali kota Bogor Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 50 Seri E);
28. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 43 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020);
29. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021);
30. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 47 Tahun 2021, tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2024 untuk memberikan arahan dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada perubahan anggaran Bapperida Kota Bogor tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor secara berkesinambungan.

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan bapperida tahun 2024.
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah.

3. Mengakomodir perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa perubahan target kinerja, pengurangan dan pergeseran anggaran kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DPPKB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB IV. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPPKB

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPPKB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKB sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2024 dalam perumusannya mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor sampai dengan Triwulan II tahun 2024. Capaian pelaksanaan Renja tahun 2024 triwulan II disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BOGOR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	URUSAN WAJIB												
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.14	BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM											
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Point	A	7.691.793.006	-	2.193.026.564	-	2.017.253.657	-	4.210.280.221	- %	4.210.280.221
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Point	3,50		-		-		-		- %	
	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN											

2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**5.799.470.170**	**25**	**1.716.947.156**	**25**	**1.768.307.439**	**50**	**3.485.254.595**	**50 %**	**3.485.254.595**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28	5.711.066.170	28	1.704.977.156	28	1.748.707.039	28	3.453.684.195	100 %	3.453.684.195

Kode	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi**		**REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN**				**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)**	
						I		**II**					
				K	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	88.404.000	1	11.970.000	1	19.600.400	1	31.570.400	100 %	31.570.400

	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN											
2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**789.378.300**	**25**	**211.784.840**	**25**	**93.174.935**	**50**	**304.959.775**	**50 %**	**304.959.775**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	61.859.700	1	25.949.000	-	-	1	25.949.000	100 %	25.949.000
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	147.275.900	3	117.274.500	1	21.333.000	4	138.607.500	100 %	138.607.500
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	14.181.700	1	7.181.500	1	3.143.400	2	10.324.900	50 %	10.324.900
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	273.165.000	1	41.770.000	1	40.090.000	2	81.860.000	100 %	81.860.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.

2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	45.000.000	1	10.110.300	1	10.375.600	2	20.485.900	67 %	20.485.900
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	27	247.896.000	2	9.499.540	4	18.232.935	6	27.732.475	22 %	27.732.475
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional PD dalam mendukung Tugas dan Fungsi**	**%**	**100**	**459.264.536**	**25**	**128.675.432**	**25**	**101.298.983**	**50**	**229.974.415**	**50 %**	**229.974.415**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	71.695.000	3	17.810.428	3	16.753.979	6	34.564.407	50 %	34.564.407
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	387.569.536	1	110.865.004	1	84.545.004	1	195.410.008	100 %	195.410.008
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											

2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKBMD pemeliharaan**	**%**	**100**	**643.680.000**	**25**	**135.619.136**	**25**	**54.472.300**	**50**	**190.091.436**	**50 %**	**190.091.436**

Kode	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi**		**REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN**				**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)**	
						I		**II**					
				K	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	289.040.000	2	80.030.136	2	52.642.300	4	132.672.436	50 %	132.672.436
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	104.640.000	1	21.180.000	1	1.830.000	1	23.010.000	100 %	23.010.000
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	250.000.000	1	34.409.000	1	-	1	34.409.000	100 %	34.409.000

	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM											
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebijakan dan Program kerja daerah untuk pengendalian jumlah penduduk yang terimplementasi sesuai dengan rencana	%	75,00	660.720.000	18,75	14.937.919	18,75	165.629.536	37,50	180.567.455	50 %	180.567.455
		Persentase PIKR Aktif	%	62,29		-		-		-		0 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN											
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian	Dokumen	8	91.120.000	-	-	-	39.999.900	-	39.999.900	%	39.999.900

	Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Kuantitas Penduduk**											
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	200	51.120.000	-	-	-	-	-	-	0 %	-
2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	1	40.000.000	-	-	1	39.999.900	1	39.999.900	100 %	39.999.900
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan**	**Angka Kelahiran Total**	**% (anak per wanita)**	**2,135**	**569.600.000**	**-**	**14.937.919**	**-**	**125.629.636**	**-**	**140.567.555**	**- %**	**140.567.555**

	Daerah Kabupaten/Kota												
Kode	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi**		**REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN**				**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)**	
						I		**II**					
				K	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	1	166.275.000	-	-	-	-	-	-	0 %	-
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	12	58.860.000	3	842.919	3	1.119.636	6	1.962.555	50 %	1.962.555
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga	Dokumen	1	40.800.000	-	-	1	20.400.000	1	20.400.000	100 %	20.400.000
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dokumen	1	67.200.000	-	-	1	26.000.000	1	26.000.000	100 %	26.000.000

2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	50	66.000.000	12	3.850.000	12	14.780.000	24	18.630.000	48 %	18.630.000
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	30	127.415.000	12	10.245.000	12	63.330.000	24	73.575.000	80 %	73.575.000

Kode	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi**		**REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN**				**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)**	
						I		**II**					
				K	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**
2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	1	43.050.000	-	-	-	-	-	-	0 %	-

	(Bangga Kencana)												
	PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**											
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Peserta KB Metode Kontasepsi jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS)**	**%**	**20,45**	**3.960.348.480**	**-**	**138.960.520**	**-**	**582.417.170**	**-**	**721.377.690**	0 **%**	**721.377.690**
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Kegiatan**	**9**	**934.324.200**	**-**	**6.229.020**	**-**	**38.095.670**	**-**	**44.324.690**	0 **%**	**44.324.690**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	92.600.000	-	-	-	-	-	-	0 %	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	4	46.240.000	-	-	1	4.499.400	1	4.499.400	25 %	4.499.400
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, danKeluarga Berencana)	Laporan	1	59.200.000	1,00	6.229.020	1,00	13.781.270	1,00	20.010.290	100 %	20.010.290

2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) MelaluiRapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	90.000.000	-	-	-	-	-	-	0 %	-

Kode	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi**		**REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN**				**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)**	
						I		**II**					
				K	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media	Dokumen	1	100.000.000	-	-	1	15.550.000	1	15.550.000	100 %	15.550.000

		Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang											
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	2	546.284.200	-	-	1	4.265.000	1	4.265.000	50 %	4.265.000
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase kelurahan yang mempunyai IMP mandiri**	**%**	**85**	**338.400.000**	**21,25**	**15.400.000**	**21,25**	**72.200.000**	**42,5**	**87.600.000**	**50 %**	**87.600.000**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											

2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	68	326.400.000	68	13.400.000	68	68.200.000	68	81.600.000	100 %	81.600.000

Kode	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi**		**REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN**				**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)**	
						I		**II**					
				K	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	68	12.000.000	68	2.000.000	68	4.000.000	68	6.000.000	100 %	6.000.000
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi**	**%**	**90**	**1.515.170.280**	**10**	**41.741.500**	**10**	**324.171.500**	**-**	**365.913.000**	**0 %**	**365.913.000**

	di Daerah Kabupaten/Kota												
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	74	50.400.000	-	-	15	20.090.500	15	20.090.500	20 %	20.090.500

Kode	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi**		**REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN**				**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)**	
						I		**II**					
				K	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	Orang	2.000	1.335.572.280	530	41.741.500	529	304.081.000	1.059	345.822.500	53 %	345.822.500

	Panjang (MKJP)	Jangka Panjang (MKJP)											
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah jenis Sarana Penunjang Pelayanan KB (Vasektomi Kit)	Unit	2	94.998.000	-	-	-	-	-	-	0 %	-
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	-	34.200.000	-	-	-	-	-	-	0 %	-
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-**	**Jumlah kampung KB aktif**	**Kampung KB**	**34**	**1.172.454.000**	**-**	**75.590.000**	**-**	**147.950.000**	**-**	**223.540.000**	**0 %**	**223.540.000**

	KB												
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	3.750.000	-	-	-	-	-	-	0 %	-

Kode	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi**		**REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN**				**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)**	
						I		**II**					
				K	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung KB	68	1.168.704.000	68	75.590.000	68	147.950.000	68	223.540.000	100 %	223.540.000

	PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**											
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan) aktif**	**%**	**74,35**	**6.432.202.700**	**-**	**23.579.000**	**-**	**1.677.245.900**	**-**	**1.700.824.900**	**0 %**	**1.700.824.900**
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah kelompok kegiatan (poktan) aktif**	**Kelompok**	**514**	**5.840.178.400**	**-**	**-**	**-**	**1.282.235.000**	**-**	**1.282.235.000**	**0 %**	**1.282.235.000**
Kode	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi**		**REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN**				**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)**	
						I		**II**					
				K	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											

2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	100	300.000.000	-	-	-	-	-	-	0 %	-
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	2.412	5.065.200.000	-	-	2.361	1.054.550.000	2.361	1.054.550.000	98 %	1.054.550.000

2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok	425	378.150.000	-	-	425	189.000.000	425	189.000.000	100 %	189.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN											

2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	6	96.828.400	-	-	3	38.685.000	3	38.685.000	50 %	38.685.000
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											

2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Meningkatnya peran serta Organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**Kelompok**	**7**	**592.024.300**	**3**	**23.579.000**	**1**	**395.010.900**	**3**	**418.589.900**	**43 %**	**418.589.900**
Kode	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi**		**REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN**				**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)**	
						I		**II**					
				K	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**	**K**	**Rp.**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											

2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	72	592.024.300	30	23.579.000	6	395.010.900	36	50 % 418.589.900	418.589.900
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					**18.745.064.186**		**2.370.504.003**		**4.442.546.263**		**6.813.050.266**	**6.813.050.266**

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 36,34%. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :
    a. Mekanisme kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
    b. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
    c. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
2. Faktor Penghambat :
    a. Masih kurangnya jumlah SDM pada dinas, sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.
    b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan PD belum optimal.
    c. Terdapat anggaran kegiatan yang masih belum terserap karena terdapat penambahan anggaran dari APBN di pertengahan tahun yang jumlahnya cukup besar sehingga menyebabkan penyerapan belum maksimal.

d. Terdapat anggaran kegiatan tidak dapat diserap karena masa pandemi, namun hal tersebut tidak mengurangi pecapaian target kinerja.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 dapat dikatakan cukup berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya, namun dapat diatasi dengan melakukan pergesaran anggaran (pengurangan dan penambahan anggaran pada kegiatan tertentu) dalam rangka pencapaian output dan outcome kegiatan.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PENDANAAN DPPKB

Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor tahun 2024 meliputi pelaksanaan 4 (empat) program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp. 18.820.064.186,00 kemudian mengalami pergeseran menjadi sebesar Rp. 19.174.678.200,00, perubahan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1.
DAFTAR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN ANGGARAN
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BOGOR
TAHUN 2024

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			KET.
	RKPD 2024	APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**9.612.086.442**	**7.691.793.006**	**8.350.077.720**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5.471.140.742**	**5.799.470.170**	**6.494.843.884**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.382.736.742	5.711.066.170	6.416.499.884	Penambahan Pagu kekurangan gaji sebesar Rp. 705.433.714
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	88.404.000	88.404.000	78.344.000	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 10.060.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**2.850.680.500**	**789.378.300**	**752.289.300**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.859.700	61.859.700	61.859.700	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	482.519.500	147.275.900	147.275.900	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85.105.900	14.181.700	14.181.700	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.364.825.000	273.165.000	241.420.000	Pengurangan Pagu sebesar

				Rp. 31.745.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	142.400.400	45.000.000	45.000.000	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 5.344.000
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**KET.**
	RKPD 2024	**APBD 2024**	**APBD PERUBAHAN 2024**	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	713.970.000	247.896.000	242.552.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**288.859.720**	**459.264.536**	**459.264.536**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.695.000	71.695.000	71.695.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	208.164.720	387.569.536	387.569.536	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.001.405.480**	**643.680.000**	**643.680.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	285.280.000	289.040.000	289.040.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.650.480	104.640.000	104.640.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	611.475.000	250.000.000	250.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**1.531.785.000**	**8.793.140.000**	**660.720.000**	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**408.930.000**	**91.120.000**	**91.120.000**	
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	200.000.000	51.120.000	51.120.000	
Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	96.730.000	-	-	
Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	58.350.000	40.000.000	40.000.000	

Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	53.850.000	-	-	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**1.122.855.000**	**8.702.020.000**	**569.600.000**	
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**KET.**
	RKPD 2024	**APBD 2024**	**APBD PERUBAHAN 2024**	
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	412.170.000	166.275.000	166.275.000	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	123.540.000	8.365.280.000	58.860.000	Pergeseran Pagu DAK sebesar Rp. 8.306.420.000
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	-	-	40.800.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 40.800.000
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	67.200.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 67.200.000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24.950.000	-	66.000.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 66.000.000
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	496.445.000	127.415.000	127.415.000	
Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	65.750.000	43.050.000	43.050.000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**4.436.655.900**	**1.193.128.480**	**3.810.503.780**	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**2.050.643.200**	**355.124.200**	**934.324.200**	
Pengendalian Program KKBPK	12.600.000	12.600.000	92.600.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 80.000.000

Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	100.000.000	46.240.000	46.240.000	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	-	-	59.200.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 59.200.000
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	90.000.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 90.000.000
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**KET.**
	RKPD 2024	**APBD 2024**	**APBD PERUBAHAN 2024**	
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	249.200.000	-	100.000.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 100.000.000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	108.600.000	-	-	
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1.580.243.200	296.284.200	546.284.200	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 250.000.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**186.000.200**	**134.400.000**	**229.600.000**	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	163.200.000	122.400.000	217.600.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 95.200.000
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	22.800.200	12.000.000	12.000.000	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**1.169.648.500**	**342.400.280**	**1.515.170.280**	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	133.464.000	-	50.400.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 50.400.000

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	808.184.500	247.402.280	1.335.572.280	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 1.088.170.000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	94.998.000	94.998.000	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	34.200.000	
Peningkatan Kesertaan KB Pria	50.000.000	-	-	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			KET.
	RKPD 2024	APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	178.000.000	-	-	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**1.030.364.000**	**361.204.000**	**1.131.409.300**	
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	102.660.000	-	-	
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	-	3.750.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 3.750.000
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	927.704.000	361.204.000	1.127.659.300	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 766.455.300
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**1.693.472.900**	**1.067.002.700**	**6.353.376.700**	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**912.875.200**	**474.978.400**	**5.840.178.400**	

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	75.000.000	-	300.000.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 300.000.000
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	198.711.800	-	-	
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**KET.**
	RKPD 2024	**APBD 2024**	**APBD PERUBAHAN 2024**	
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-	-	5.065.200.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 5.065.200.000
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	489.750.000	378.150.000	378.150.000	
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	149.413.400	96.828.400	96.828.400	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**780.597.700**	**592.024.300**	**513.198.300**	

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	780.597.700	592.024.300	513.198.300	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 78.826.000
TOTAL ANGGARAN	**17.274.000.242**	**18.745.064.186**	**19.174.678.200**	

Tabel 3.2.

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH			
1.	**2.14.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat**	**3.50 A Point Point**	**7.691.793.006**	**8.363.365.385**						**10.193.404.000**	

			Daerah											
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah*	1	5.799.470.170	6.508.131.549			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	PNS Golongan I s.d IV pada Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana		6.088.404.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	5.711.066.170	6.429.787.549	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			6.000.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	88.404.000	78.344.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			88.404.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor*	1	789.378.300	752.289.300			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4.015.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	61.859.700	61.859.700	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			75.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	147.275.900	147.275.900	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.000.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	14.181.700	14.181.700	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			90.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	273.165.000	241.420.000	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.000.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	45.000.000	45.000.000	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan	247.896.000	242.552.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			650.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

							Kel/Desa							
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor*	1	459.264.536	459.264.536			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		90.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	71.695.000	71.695.000	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			90.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	387.569.536	387.569.536	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKBMD pemeliharaan*	1	643.680.000	643.680.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	289.040.000	289.040.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	104.640.000	104.640.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250.000.000	250.000.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2,	**37.301**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase PIK R Aktif Persentase Kebijakan dan Program kerja daerah untuk pengendalian jumlah penduduk yang terimplementasi sesuai dengan rencana**	**62,29 % 75,00 % %**	**8.793.140.000**	**660.720.000**							**1.675.000.000**	

	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*	8 Dokumen	91.120.000	91.120.000			-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat Kota Bogor		0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota												

			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	51.120.000	51.120.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan												

			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	50 Organisasi	0	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal												

			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	40.000.000	40.000.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal												

			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	3 Kegiatan	0	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Kelahiran Total*	2,135 anak per wanita	8.702.020.000	569.600.000			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor		1.675.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan												
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	166.275.000	166.275.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			600.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga												

			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	8.365.280.000	58.860.000	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga												
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen Dokumen	0	40.800.000	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga												

			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Dokumen Laporan	0	67.200.000	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB												
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	0	66.000.000	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain												

			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	24 Unit	127.415.000	127.415.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			700.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)												

			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	43.050.000	43.050.000	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			75.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3,	**37.666**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS)**	**20.45 Persentase**	**1.193.128.480**	**3.810.503.780**							**2.766.400.000**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan	*Jumlah kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai*	9 Kegiatan	355.124.200	934.324.200			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup	Masyarakat Kota Bogor		300.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

		Budaya Lokal	*Kearifan Budaya Lokal*							Masyarakat				
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK												
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	12.600.000	92.600.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana												

			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Unit	46.240.000	46.240.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			150.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana												
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	1 Laporan	0	59.200.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Keluarga Berencana)											
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)											
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi	1 Laporan	0	90.000.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)											
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang												
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak	1 Dokumen	0	100.000.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			dan Elektronik serta Media Luar Ruang											
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal												
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang	1 Dokumen	0	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			150.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			dilaksanakan											
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja												
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra	68 Organisasi	296.284.200	546.284.200	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Kerja											
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Persentase kelurahan yang mempunyai IMP mandiri*	1	134.400.000	229.600.000			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor		326.400.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)												

			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	68 Orang	122.400.000	217.600.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			326.400.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB											
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di	68 Organisasi	12.000.000	12.000.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Lini Lapangan oleh PKB/PLKB											
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi*	1	342.400.280	1.515.170.280			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor		1.370.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya												

			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	74 Laporan	0	50.400.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2119 Orang	247.402.280	1.335.572.280	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			920.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB											
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	94.998.000	94.998.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	-	- -			200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0 Laporan	0	34.200.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria											
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	30 Orang	0	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			60.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB											
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang	68 Orang	0	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			190.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Pelayanan KB											
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah kampung KB aktif*	34 Kampung KB	361.204.000	1.131.409.300			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor		770.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB												

			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4 Organisasi	0	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			150.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB												
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	0	3.750.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

										Masyarakat				
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas												
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	68 Kampung	361.204.000	1.127.659.300	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			620.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

4,	**38.031**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan) aktif**	**1**	**1.067.002.700**	**6.353.376.700**						**1.600.000.000**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah kelompok kegiatan (poktan) aktif*	514 Poktan	474.978.400	5.840.178.400			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor		1.000.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											

			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	100 Unit	0	300.000.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)												

			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	250 Orang	0	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			300.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)												

			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2412 Orang	0	5.065.200.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)												

			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	425 Kelompok	378.150.000	378.150.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)												

			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	6 Kelompok	96.828.400	96.828.400	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Meningkatnya peran serta Organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga*	7 Kelompok	592.024.300	513.198.300			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor		600.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)											

			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	72 Organisasi	592.024.300	513.198.300	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			600.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H				**18.745.064.186**	**19.187.965.865**							**16.234.804.000**	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor Tahun 2024.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan rujukan dalam pelaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2024 untuk menjawab atau meminimalisir isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dokumen renja menjadi arahan bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Bogor agar pegawai dapat konsistensi dan disiplin untuk merealisasikan Rencana Kerja ini.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tentunya berdasarkan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2019-2024 dan Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor 2019-2024.

Diharapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor dalam mewujudkan visi Kota Bogor yaitu “Mewujudkan Kota Bogor Sebagai Kota Ramah Keluarga”

R. DINAS PERHUBUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipasif dan top down/bottom up.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Bogor berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. Perencanaan pada RKPD memuat hubungan antara visi, misi dan sasaran tahunan yang diambil dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor. Perubahan perencanaan tahunan Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

3. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan disusun. Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024. Selanjutnya Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan, memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sudah mendasarkan pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam pra-RKPA Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Bogor :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 8);
21. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 54).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk :

1. Memberikan informasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024;
2. Menjabarkan perubahan indikator kinerja kegiatan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024;

3. Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja kegiatan yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan dan pagu indikatif kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan perubahan KUPA-PPASP Tahun 2024;
2. Sebagai dasar penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan DPA Tahun 2024;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan perubahan kegiatan Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Renja PD Sampai Dengan TRIWULAN II

Capaian Kinerja RKPD II Tahun 2024 Berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen Renja PD Tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2024. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2024, sedangkan jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019 – 2024, Visi Kota Bogor adalah "***Kota Bogor Menuju Kota Ramah Keluarga".***

Misi Kota Bogor adalah :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat
2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas
3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Dalam rangka mencapai mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kota Bogor khususnya urusan Perhubungan pada tahun 2024 melaksanakan 1 urusan, 2 program, 12 kegiatan, 25 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dakumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota

1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota

2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota

2.2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

2.3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

3) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota

2) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

2.5. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal

2) Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik Terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

2.6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.7. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2024 didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada Tabel I.

Tabel 2.1
Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2024
Berdasarkan Sasaran Strategi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja murni	Target kinerja Perubahan	Capaian s.d Triwulan II (%)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi	Rasio Kinerja Jaringan Jalan	0,60	0,60	-

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024
Berdasarkan Sasaran Strategis

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RKPD 2024	Target Renja 2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	A
	Nilai Rata- rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Poin	3,55	3,55
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan Lingkup Kota	Rasio	0,82	0,85
	Nilai V/C Ratio	Rasio	0,60	0,60

- Jumlah Pagu Anggaran Kegiatan/Belanja Langsung Murni Tahun 2024 : **Rp. 104.566.448.968,-**;
- Jumlah Pagu Anggaran Kegiatan/Belanja Langsung Perubahan Tahun 2024 : **Rp. 111.546.596.320,-**;

- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan sampai dengan bulan Juli Tahun 2024 : **Rp. 58.850.525.997,- (*56,28%)***

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah urusan Perhubungan dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah urusan Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
		URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN																						
I	Meningkatnya kualitas Kelola Pemerintahan yang efektif		Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perhubungan	82	152.485,23	80,05	46.541,73	81,00	50.407,20	-	8.300,51	-	14.330,78	-	-	-	-	-	22.631,29					

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV							
	, efisien dan akuntabel di lingkup Dinas Perhubungan																						
A		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai A	150,433	Nilai A	43,788	Nilai A	87,533	**-**	**19,702**	**-**	**24,525**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44,227**	**98.78**	**88,016**	**98.78**	**58.94**	

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
			Nilai Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,5 Point		2,93 Point		3,4 Point		-		-		-		-		-		**2.93**		**83.71**		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai A	393,8439	Nilai A	26,515	Nilai A	169,468	-	5,280	-	5,928	-	-	-	-	1	11,208	33.33	9.97	98.78	9.58	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	21 Dok	213,663	3	26,515	3 Dok	112,375	1	5,280		5,928	-	-	-	-	1	11,208	4	37,723	19.05	17.66	

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Perangkat Daerah	Perangkat Daerah																					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Lap	180,180	0	-	5	57,093		-													
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	103,797	100%	30,838	100%	32,640	25%	7,179		12,972	-	-	-	-	25	20,152	125	50,990	125.00	49.13	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	242 Orang /Bulan	103,511	217	30,838	224 Org / Bln	32,535	219	7,513		12,946	-	-	-	-	219	20,100	219	50,938	90.50	49.21	
		Koordinasi dan	Jumlah Laporan	36 Dok	285,586			19	105,468	4	26,164	-	26,100	-	-	-	-	4	52,264	4	52,264	11.11	18.30	

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan																					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	3,271	100%	734,386	100%	2,029	21,4%	59,517	-	185,751	-	-	-	-	21,4%	245,268	121.43	979,655	121.43	29.95	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	11 Paket	77,204	100	28,930	1	15.610	1	2,000	-	4,600	-	-	-	-	1	6,600	1	35,530	9,09	46,02	

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV							
		Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan																				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	719,3813	2	112,441	1	144,319		5,282	-	57,245	-	-	-	-		62,528	2	174,969	40.00	24.32	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	115,309	1	29,195	4	30,127	1	26,278	-	1,100	-	-	-	-	1	27,378	2	56,574	66.67	49.06	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	26,776	1	142,605	16	676,684	4	1,863	-	32,820	-	-	-	-	4	34,684	5	177,289	116.67	662.12	
		Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	36 Laporan	1,285	12	244,078	42	1,039	6	24,092	-	89,985	-	-	-	-	6	114,077	18	358,155	50.00	27.86	

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV							
		Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	31,554	100	9,723	100	49,042	25	11,878	-	11,417	-	-	-	-	25	23,296	125	33,019	125.00	104.64	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	747,511	12	171,365	48	40,129	12	9,108	-	9,147	-	-	-	-	12	18,256	24	18,427	66.67	2,465.24	

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 Laporan	30,806	12	9,552,	36	8,913	9	2,769	-	2,270	-	-	-	-	9	5,039	21	14,591	58.33	47.37	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	10,470	100	2,421	100	3,419	12.50	579,595,915	-	589,996	-	-	-	-	12.50	1,169	112.5	3,591	112.50	34.30	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 Unit	9,950	97	2,290	109	3,204	96	566,695	-	577,096	-	-	-	-	96	1,143	193	3,434	193.00	34,51	

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang dipeliharan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	36 Laporan	30,806	12	9,552	36	8,913	9	2,769	-	2,270	-	-	-	-	9	5,039	21	14,591	58.33	47.37	
	Meningkatnya kualitas pe-nyelenggara-an transportasi		Rasio Kinerja Jaringan Jalan	0,60	655.612,39	0,62	67.877,20	0,60	93.576,18	-	10.070,16	-	16.811,40	-	-	-	--	-	26.881					

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan Lingkup Kota	0,85	251,20	0,78	61,862	0,82	36,833	-	647,213	-	5,378	-	-	-	--	-	6,025	0.78	67,887	91.76	26.99	
			Nilai V/C Ratio	0,60		0,60		0,60		-		-		-	-	-	-	-		0.6		100.00		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan kota	92%	174,240	74.17	55,494	79.5	25,229	-	316,474	-	4,931	-	-	-	-	-	5,248	74.17	60,743	80.62	34.86	
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	22 Unit	16,380	6	162,150	14	827,908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,23	6	162,150	27.27	0.99	

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	33410 Unit	70,723	4673	16,012	1735	22,128	-	316,474	-	4.931	-	-	-	-	-	-	6	-	27.27	-	
		Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	**Persentase tingkat keterpenuhan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	50%	18,492	38,50 %	642,901	50 %	7,121	-	20,251	-	14,628	-	-	-	-	-	34,879		38.5	77.00	3.67	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi	2 Unit	18,492	1 Unit	642,901	1 Unit	7,121	1 Unit	20,251	-	14628	-	-	-	-	1 Unit	34,879	2	677,781	100.00	3.67	

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
			dan Dipelihara																					
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tingkat Kepatuhan Pemilik Kendaraan Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala	96%	6,028	92,34	628,998	93 %	11,67	25.94 %	110,751	-	114,545	-	-	-	-	25.94	225,296	118.28	854,294	124.51	14.17	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4 Unit	2,515	2 Unit	124,830	2 Unit	142,015	1	65,880	2 Unit	1,500	-	-	-	-	1 Unit	67,380	3	192,210	75.00	7.64	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian	13 Unit	1,701	13 Unit	449,705	13 Unit	592,577	-	44,871	-	43,781	-	-	-	-	-	88,6522	13	538,35725	100.00	31.65	

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV							
		Berkala Kendaraan Bermotor	Berkala Kend Bermotor yang Terpelihara																				
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kend. Bermotor	3 Laporan	137,000	1 Lap	54,4635	1 Lap	70	-	-	-	69,264	-	-	-	-	-	69,264	1	123,7275	33.33	90.31	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jln Kota	89,33 %	19,153	85.83 %	3,060.455252	86,67 %	2,561.920912	10,34 %	180,516	-	216,167	-	-	-	-	10,34	396,683	96,16849	3,457.139104	107.66	18.05	

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen Rekayasa dan Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dlm rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10580 Unit	18,064	760 Unit	2.602.331772	84 Unit	2,233.534712	-	179.4665	-	216.167352	-	-	-	-	-	395.633852	760	2,997.965224	7.18	16.60	
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas & Angk Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	36 Laporan	131,601	9	14,2984	12 Lap	16,70	1 Lap	1,05	-	-	-	-	-	-	1	1.05	10	15.3994	27.78	11.66	

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Audit & Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	12 Dok	1.135.983	23	358,650	12 Dok	205,800	2 Lap	17,2	-	17,2	-	-	-	-	2	34,4	25	393.05	208.33	34.60	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	158 Laporan	350.310	33 Lap	101,550	20	51,9	2Lap	4,3	-	4,3	-	-	-	-	2	8,6	35	110,150	22.15	31.44	
		Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik Terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	352 Laporan	785,673	84 Lap	257,1	60	153,9	2 Lap	4,3	-	12,9	-	-	-	-	2	25,8	86	282,9	24	36.01	

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor																						
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum yang beroperasi untuk Jasa Angk. Org dan/atau Barang Antar Kota dlm 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota	2.650 Unit	20,189.912	3.114 Unit	1,166.3617	2.711 Unit	359.514992	3,064 Unit	2,02	-	83,530	-	-	-	-	3,064	85,550	6178	1,251.9117	233.12	6.20	

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Daerah Kab/Kota yang Tersedia	2589 UNit	20,189.912	3.071 Unit	1,026.6606	2650 Unit	17.609,79	3,064	-	-	85,530	-	-	-	-	3,064	85,55	3,064	1,122.2106	86.49	5.56	
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Trayek Angkutan Perkotaan di Kota	27 Tryk	728.7798	24 Tryk	183.269225	25 Trayek	188.4608	24	-	-	-	-	-	-	-	24 Tryk	-	48	183.269225	177.78	25.15	

NO	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN RPJMD DAN RENSTRA	INDIKATOIR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN 2023 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Kabupaten/Kota																						
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Dok	728.7798	3 Dok	183.269225	2 Dok	188.4608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	183.269225	37.50	25.15	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan Pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Kerja Dinas Perhubungan Kota Bogor tahun 2024 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 dan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama misi 2 dan 3).

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bogor tahun 2024 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini:

3.1 Program dan kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kota Bogor khususnya urusan Perhubungan pada tahun 2024 melaksanakan 1 urusan, 2 Program, 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan dan berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangakat Daerah

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota

2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota

2.2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

2.3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

3) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota
2) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

2.5. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

2.6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.7. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan adalah 2 Program, terdiri 1 Program Urusan penunjang dan 1 Program Urusan wajib dengan total kegiatan 12 kegiatan dan 25 Sub kegiatan.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Perhubungan Kota Bogor**
Jumlah Pagu Anggaran **:** **Rp. 111.546.596.320,-**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				BERTAMBAHG/ BERKURANG	PERKIRAAN MAJU	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**											
2.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**											
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	Dishub Kota Bogor	79.853.051.925	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	Dishub Kota Bogor	88.264.845.017	8.411.793.092	-	87.152.945.183
		Nilai Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,5			Nilai Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,5					
2.15.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	Dishub Kota Bogor	76.373.000	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	Dishub Kota Bogor	20.369.000	(55.977.000)	-	34.997.200
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Dishub Kota Bogor	20.369.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Dishub Kota Bogor	26.700.000	-	5 Dokumen	19.997.200
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Dishub	55.977.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dishub	-	55.977.000	7 Laporan	15.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				BERTAMBAHG/ BERKURANG	PERKIRAAN MAJU	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
				Kota Bogor				Kota Bogor				
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan gaji & tunjangan ASN	100%	Dishub Kota Bogor	32.996.404.879	Persentase pemenuhan gaji & tunjangan ASN	100%	Dishub Kota Bogor	36.919.571.697	3.923.166.818	-	36.444.051.120
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Org/Bln	Dishub Kota Bogor	32.891.560.879	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Org/Bln	Dishub Kota Bogor	36.919.571.697	3.923.166.818	250 Org/Bln	36.319.813.120
2.15.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	19 Dokumen	Dishub Kota Bogor	104.844.000	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	19 Dokumen	Dishub Kota Bogor	104.844.000	-	31 Laporan	124.238.000
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	Kota Bogor	343.339.900	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	Dishub Kota Bogor	403.255.100	59.915.200	100%	669.818.211
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Bogor	12.042.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Bogor	12.042.000	-	2 Paket	12.690.198
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Bogor	63.562.400	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Bogor	63.562.400	-	2 Paket	99.311.800

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				BERTAMBAHG/ BERKURANG	PERKIRAAN MAJU	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Bogor	36.213.300	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Bogor	36.213.300	-	2 Paket	29.999.700
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	Kota Bogor	43.658.200	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	Kota Bogor	77.073.400	33.415.200	2 Paket	312.616.513
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	42 Laporan	Kota Bogor	187.864.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	42 Laporan	Kota Bogor	214.364.000	26.500.000	12 laporan	215.200.000
2.15.01.2.07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%	Kota Bogor	43.180.562.646	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%	Kota Bogor	47.665.250.720	4.484.688.074	**100%**	**46.601.096.835**
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Kota Bogor	33.557.163.921	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Kota Bogor	38.072.651.995	4.515.488.074	12 Laporan	36.892.716.800
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	Kota Bogor	9.623.298.725	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	Kota Bogor	9.592.598.725	(30.800.000)	48 Laporan	9.708.380.035
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	Kota Bogor	3.256.371.500	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	Kota Bogor	3.256.371.500	-	100%	3.402.981.817,00
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	109 Unit	Kota Bogor	3.204.536.300	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	109 Unit	Kota Bogor	3.204.536.300	-	85 Unit	3.203.336.300

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				BERTAMBAHG/ BERKURANG	PERKIRAAN MAJU	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kota Bogor	51.835.200	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kota Bogor	51.835.200	-	20 unit	199.645.517
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan Lingkup Kota	0,85	Kota Bogor	24,713,397,043	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan Lingkup Kota	0,85	Kota Bogor	24,947,700,763	234,303,720	-	84.994.305.738
		Nilai V/C Ratio	0,60			Nilai V/C Ratio	0,60				-	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan kota	92%	Kota Bogor	22,290,293,534	Persentase Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan kota	92%	Kota Bogor	23,339,512,554	49,219,020	92,5%	24.955.747.276
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	26 Unit	Kota Bogor	87,552,200	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	26 Unit	Kota Bogor	136,771,220	49,219,020	2 unit	195.747.276
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1.735 Unit	Kota Bogor	23,202,741,334	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1.735 Unit	Kota Bogor	23,202,741,334	-	5.831 Unit	24.760.000.000
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase tingkat keterpenuhan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	50%	Kota Bogor	61,479,400	**Persentase tingkat keterpenuhan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	50%	Kota Bogor	61,479,400	-	-	80.000.000
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Kota Bogor	61,479,400	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Kota Bogor	61,479,400	-	1 Unit	80.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				BERTAMBAHG/ BERKURANG	PERKIRAAN MAJU	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Tingkat Kepatuhan Pemilik Kendaraan Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala	95%	Kota Bogor	710.233.458	Tingkat Kepatuhan Pemilik Kendaraan Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala	95%	Kota Bogor	472,067,200	(2,510,000)		450.742.400
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	Kota Bogor	175.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	Kota Bogor	71,000,000	-	2 Unit	79.995.800
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	15 Unit	Kota Bogor	476.516.758	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	15 Unit	Kota Bogor	331,067,200	(2,510,000)	12 Unit	319.052.400
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Kota Bogor	58.716700	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Kota Bogor	70,000,000	-	1 Laporan	51.694.200
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota**	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota	89,33 %	Kota Bogor	3.885.453.980	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota	89,33 %	Kota Bogor	712,439,409	43,287,900		610.848.225,00
2.15.02.2.06.04	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	84 Dokumen	Kota Bogor	3.387.911.080	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	84 Dokumen	Kota Bogor	706,139,409	45,387,900	18 Dokumen	600.992.225,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				BERTAMBAHG/ BERKURANG	PERKIRAAN MAJU	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
	rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						
2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	12 Laporan	Kota Bogor	18.089.400	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	12 Laporan	Kota Bogor	6,300,000	(2,100,000)	4 Laporan	9.856.000,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	12 Dokumen	Kota Bogor	404.400.000	Jumlah Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	12 Dokumen	Kota Bogor	57,800,000	23,400,000	12 Dokumen	122.160.000,00
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	60 Laporan	Kota Bogor	302.850.000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	60 Laporan	Kota Bogor	49,200,000	23,400,000	16 Laporan	40.880.000,00
2.15.02.2.08.09	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	60 Laporan	Kota Bogor	8,600,000	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	60 Laporan	Kota Bogor	8,600,000	-	24 Laporan	81.280.000,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum yang beroperasi untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	2.650 Unit	Kota Bogor	3.526.982.410	Jumlah Angkutan Umum yang beroperasi untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	2.650 Unit	Kota Bogor	210,006,800	121,586,800	2.821 Unit	58.630.323.837

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				BERTAMBAHG/ BERKURANG	PERKIRAAN MAJU	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.15.02.2.09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.650 Unit	Kota Bogor	3.383.879.500	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.650 Unit	Kota Bogor	210,006,800	121,586,800	2.821 Unit	58.630.323.837
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek Angkutan Perkotaan di Kota	27 Trayek	Kota Bogor	187.698.000	Jumlah Trayek Angkutan Perkotaan di Kota	27 Trayek	Kota Bogor	94,395,400	(680,000)	**1 Dokumen**	**144.484.000**
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Bogor	187.698.000	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Bogor	94,395,400	(680,000)	1 Dokumen	144.484.000
TOTAL PAGU ANGGARAN					104,566,448,968				113,212,545,780	8,646,096,812		172.147.250.921

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2024 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Perangkat Daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kota Bogor serta berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan WaliKota Bogor Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019 – 2024. Perubahan Renja Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing – masing.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DP3A Kota Bogor Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2023. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

DP3A Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja DP3A Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan dan target kinerja.

Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Renja DP3A Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor yaitu "Mewujudkan Kota Bogor yang Ramah Keluarga". Disamping itu dalam rangka penyelarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota bogor dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DP3A Kota Bogor tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2024 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi DP3A Kota Bogor Tahun 2024 dalam melaksanakan perubahan terhadap anggaran program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2024 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2024.

Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2024 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan DP3A Kota Bogor sampai dengan triwulan dua tahun 2024.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wuju,0 sd pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2024 dengan dokumen Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2024.

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DP3A Kota Bogor Tahun 2023 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang PerubahanUndang-UndangNomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan PPRG di daerah;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tara Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
27. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor.
28. Peraturan Perwali Nomor 170 tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor;
29. Peraturan WaliKota Bogor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 32)

1.4 Sistematika Perubahan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD
1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.3 Dasar Hukum Perubahan RKPD

1.4 Sistematika Perubahan RKPD

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3A Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja DP3A Tahun 2024

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3A TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2024 melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melaksanakan 6 program dengan anggaran sebesar Rp. 15.698.939.545,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 6.312.936.585,- atau 40,2%. Masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan. Adapun capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor Kota Bogor 2024 s/d TRW II

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMBERDAYAAN , PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**A point**	**9.172.698.810**	**- point**	**2.185.159.726**	**A point**	**2.935.287.859**	**A point**	**5.120.447.585**	**100%**	**55,8%**
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup DP3A	**3,54 point**		**- point**		**3,45 point**		**3,45 point**		**97%**	
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**A point**	**20.134.600**	**point**	**357.000**	**A point**	**8.106.500**	**A point**	**8.463.500**	**100%**	**42,0%**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	20.134.600	2 dokumen	357.000	- dokumen	8.106.500	2 dokumen	8.463.500	40%	42,0%

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100 %**	**6.757.412.370**	**25 %**	**1.967.449.819**	**25 %**	**2.149.236.225**	**50 %**	**4.116.686.044**	**50%**	**60,9%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/ bulan	6.691.412.370	30 orang/ bulan	1.954.949.819	30 orang/ bulan	2.127.836.225	30 orang/ bulan	4.082.786.044	100%	61,0%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	66.000.000	3 laporan	12.500.000	3 laporan	21.400.000	6 laporan	33.900.000	50%	51,4%
3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100 %**	**968.704.100**	**25 %**	**114.481.040**	**25 %**	**204.523.486**	**50 %**	**319.004.526**	**50%**	**32,9%**

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.222.100	- paket	0	1 paket	3.222.100	1 paket	3.222.100	100%	100,0 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	143.109.300	1 paket	63.927.400	1 paket	621.800	2 paket	64.549.200	67%	45,1%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	19.438.900	2 paket	17.759.200	- paket	1.225.500	2 paket	18.984.700	67%	97,7%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	607.855.000	0 paket	17.759.200	paket	149.095.800	- paket	166.855.000	0%	27,4%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.058.800	0 paket	840.000	paket	1.864.400	- paket	2.704.400	0%	26,9%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	185.020.000	4 laporan	14.195.240	4 laporan	48.493.886	8 laporan	62.689.126	32%	33,9%

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dan Konsultasi SKPD											
4	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100 %**	**126.219.100**	**25 %**	**0**	**25 %**	**16.000.000**	**50 %**	**16.000.000**	**50%**	**12,7%**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	126.219.100	0 unit	0	2 unit	16.000.000	2 unit	16.000.000	11%	12,7%
5	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**902.652.640**	**25 %**	**60.013.383**	**%**	**341.094.348**	**25 %**	**401.107.731**	**25%**	**44,4%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	139.212.400	0 laporan	20.886.503	laporan	38.953.309	- laporan	59.839.812	0%	43,0%

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	763.440.240	0 laporan	39.126.880	laporan	302.141.039	laporan -	341.267.919	0%	44,7%
6	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100 %**	**397.576.000**	**25 %**	**42.858.484**	**25 %**	**216.327.300**	**% 50**	**259.185.784**	**50%**	**65,2%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	17.500.000	2 unit	188.000	unit	1.448.800	unit 2	1.636.800	12%	9,4%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 unit	243.550.000	7 unit	42.670.484	25 unit	78.432.500	unit 32	121.102.984	46%	49,7%

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	136.526.000	0 unit	0	1 unit	136.446.000	unit 1	136.446.000	100%	99,9%
2	**Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**	**100 %**	**735.715.700**	**% -**	**4.120.000**	**%**	**235.454.100**	**% -**	**239.574.100**	**0%**	**32,6%**
		Persentase Perempuan berpolitik	**22 %**		**% 22**		**22 %**		**% 22**		**100%**	
1	**Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah program yang dilaksanakan oleh PD yang Responsif Gender**	**51 program**	**71.846.000**	**- program**	**0**	**program**	**16.352.000**	**program -**	**16.352.000**	**0%**	**22,8%**

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 PD	71.846.000	PD -	0	PD	16.352.000	PD -	**16.352.000**	0%	22,8%
2	**Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah perempuan yang duduk di DPRD dan kepengurusan partai politik**	**11 orang**	**301.086.100**	**11 orang**	**4.120.000**	**orang**	**129.161.000**	**orang 11**	**133.281.000**	**100%**	**44,3%**

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 organisasi	301.086.100	30 organisasi	4.120.000	organisasi	129.161.000	30 organisasi	133.281.000	100%	44,3%
3	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**65 %**	**362.783.600**	**10 %**	**0**	**5 %**	**89.941.100**	**15 %**	**89.941.100**	**23%**	**24,8%**
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	450 orang	362.783.600	orang	0	100 orang	89.941.100	100 orang	**89.941.100**	22%	24,8%

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**	**81 %**	**735.430.200**	**%**	**25.433.000**	**%**	**164.817.600**	**% -**	**190.250.600**	**0%**	**25,9%**
		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	**% 0,0090**		**%**	**0**	**%**		**% -**			
1	**Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan**	**0,0090 %**	**56.526.000**	**%**	**0**	**%**	**41.847.600**	**% -**	**41.847.600**		**74,0%**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	56.526.000	- dokumen	0	1 dokumen	41.847.600	1 dokumen	**41.847.600**	33%	74,0%

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan**	**2 layanan**	**678.904.200**	**0,00 layanan**	**25.433.000**	**2 layanan**	**122.970.000**	**100 %**	**148.403.000**	**100%**	**21,9%**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	75 orang	678.904.200	- orang	25.433.000	orang	122.970.000	- orang	**148.403.000**	0%	21,9%
4	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Indeks Ketahanan Keluarga**	**85,5 point**	**4.392.877.135**	**85,2 point**	**7.960.000**	**85,2 point**	**235.580.000**	**85,2 point**	**243.540.000**	**99,6 %**	**5,5%**

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah alumni sekolah ibu yang mendapatkan peningkatan pengetahuan keluarga dalam meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak**	**335 orang**	**79.075.709**	**0 orang**	**680.000**	**orang**	**0**	**orang -**	**680.000**	**0%**	**0,9%**
	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 laporan	79.075.709	laporan -	680.000	laporan	0	laporan -	680.000	0%	0,9%

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**35 %**	**4.313.801.426**	**1 %**	**7.280.000**	**1 %**	**235.580.000**	**2 %**	**242.860.000**	**6%**	**5,6%**
	Sub Kegiatan Advokasi Kabijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	6 lembaga	1.023.328.426	2 lembaga	7.280.000	lembaga	42.649.200	2 lembaga	49.929.200	100%	4,9%

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga kewenangan kanupaten/ kota	68 orang	3.087.540.000	-				orang	0	0%	0,0%
	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	202.933.000	1 dokumen	0	1 dokumen	192.930.800	dokumen 2	192.930.800	67%	95,1%
5	**Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak**	**100 %**	**112.706.500**	**% -**	**4.420.000**	**%**	**27.981.200**	**% -**	**32.401.200**	**0%**	**28,7%**

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Data gender dan anak**	**35 PD**	**112.706.500**	**- PD**	**4.420.000**	**PD**	**27.981.200**	**- PD**	**32.401.200**	**0%**	**28,7%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang tersedia	2 dokumen	112.706.500	- dokumen	4.420.000	dokumen	27.981.200	- dokumen	**32.401.200**	0%	28,7%
6	**Pemenuhan Hak Anak**	**Predikat Kota Layak Anak**	**Utama predikat**	**549.511.200**	**- predikat**	**402.382.900**	**Nindya predikat**	**84.340.200**	**Nindya predikat**	**486.723.100**	**100%**	**88,6%**
1	**Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya pendampingan pemenuhan hak anak terhadap organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha**	**70 %**	**41.245.400**	**20 %**	**1.604.100**	**20 %**	**21.069.200**	**40 %**	**22.673.300**	**57%**	**55,0%**

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 organisasi	41.245.400	7 organisasi	1.604.100	18 organisasi	21.069.200	25 orang	**22.673.300**	71%	55,0%
1	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**35 %**	**508.265.800**	**35 %**	**400.778.800**	**%**	**63.271.000**	**35 %**	**464.049.800**	**100%**	**91,3%**

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TRW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	orang 52.500	127.365.800	orang 15.200	19.878.800	orang 18.925	63.271.000	orang 34.125	83.149.800	65%	65,3%
	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	380.900.000	dokumen 4	380.900.000	dokumen -	0	dokumen 4	380.900.000	100%	100,0 %
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**15.698.939.545**		**2.629.475.626**		**3.683.460.959**		**6.312.936.585**		**40,2%**

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DP3A TAHUN 2024

3.1 Unsur Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor menjalankan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan pengurangan anggaran yang diajukan dalam renja perubahan Tahun Anggaran 2024 DP3A sebesar Rp. 794.736.422,- dengan rincian sub kegiatannya adalah sebagai berikut;

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp.8.495.000,- (pengurangan penyelengaraan kota layak anak);

2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG berkurang sebesar Rp. 4.000.000,- (pengurangan pelaksanaan bimbingan teknis PPRG);

3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi berkurang sebesar Rp. 1.800.000,- (pengurangan kegiatan pemberdayaan perempuan);

4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bertambah sebesar Rp. 394.488.858,- (kekurangan TPP ASN DP3A);

5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor berkurang sebesar Rp. 15.155.100,- (pengurangan makan minum rapat);

6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD berkurang sebesar Rp. 33.000,- (fotocopy) ;

7. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp. 9.930.280,- (pengurangan pelatihan bagi Rumah Tangga Sasaran/ RTS);

8. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp. 680.000,- ;

9. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp. 1.149.132.000,-;

Rincian perubahan renja terlampir dalam lampiran matrik renja.

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bogor
Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.10.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.10.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											15.698.939.545	14.904.203.123					18.311.201.845
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											9.172.698.810	9.551.999.668					9.546.515.127
2	08	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											20.134.600	20.134.600					6.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	A Poin t 3,55 Poin t	A Poin t 3,58 Poin t	5 Dokumen	5 Dokumen	82 nilai	87,52 nilai	20.134.600	20.134.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.000.000
2	**08**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**6.757.412.370**	**7.151.901.228**					**6.927.016.80**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	A Point 3,55 Point	A Point 3,58 Point	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	82 nilai	87,52 nilai	6.691.412.370	7.085.901.228	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Persentase realisasi rencana	27,01 nilai 26,55 nilai 12,48 nilai 21,97 nilai 100 % 100 % 94% 100 % 95% 94% 88,75 nilai 91,5 nilai 88,75 nilai 90,5 nilai	6.839.896.807

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				sesuai dengan ketentuan Persentase Kepatuhan Anggaran Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	A Poin t 3,55 Poin t	A Poin t 3,58 Poin t	1 Lapo ran	1 Lapo ran	82 nilai	87,52 nilai	66.000.000	66.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Persentase realisasi rencana	27,01 nilai 26,55 nilai 12,48 nilai 21,97 nilai 100 % 100 % 94% 100 % 95% 94% 88,75 nilai 91,5 nilai 88,75 nilai 90,5 nilai	87.120.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				sesuai dengan ketentuan Persentase Kepatuhan Anggaran Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	**08**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**968.704.100**	**953.516.100**					**1.081.851.200**
2	08	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	A Point 3,55 Point	A Point 3,58 Point	1 Paket	1 Paket	82 nilai	87,52 nilai	3.222.100	3.222.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Persentase realisas	27,01 nilai 26,55 nilai 12,48 nilai 21,97 nilai 100 % 100 % 94% 100 % 95% 94% 88,75 nilai 91,5 nilai 88,75 nilai 90,5 nilai	3.500.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				i rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Pengelolaan BMD		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Kepatuhan Anggaran Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				Pengaduan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	A Point 3,55 Point	A Point 3,58 Point	3 Paket	3 Paket	82 nilai	87,52 nilai	143.109.300	143.109.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Persentase realisasi rencana	27,01 nilai 26,55 nilai 12,48 nilai 21,97 nilai 100 % 100 % 94% 100 % 95% 94% 88,75 nilai 91,5 nilai 88,75 nilai 90,5 nilai	143.232.100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				sesuai dengan ketentuan Persentase Kepatuhan Anggaran Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	A Poin t 3,55 Poin t	A Poin t 3,58 Poin t	3 Paket	3 Paket	82 nilai	87,52 nilai	19.438.900	19.438.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Persentase realisasi rencana	27,01 nilai 26,55 nilai 12,48 nilai 21,97 nilai 100 % 100 % 94% 100 % 95% 94% 88,75 nilai 91,5 nilai 88,75 nilai 90,5 nilai	20.491.100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				sesuai dengan ketentuan Persentase Kepatuhan Anggaran Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	A Poin t 3,55 Poin t	A Poin t 3,58 Poin t	1 Paket	1 Paket	82 nilai	87,52 nilai	607.855.000	592.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Persentase realisasi rencana	27,01 nilai 26,55 nilai 12,48 nilai 21,97 nilai 100 % 100 % 94% 100 % 95% 94% 88,75 nilai 91,5 nilai 88,75 nilai 90,5 nilai	700.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				sesuai dengan ketentuan Persentase Kepatuhan Anggaran Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	A Poin t 3,55 Poin t	A Poin t 3,58 Poin t	1 Paket	1 Paket	82 nilai	87,52 nilai	10.058.800	10.058.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Persentase realisasi rencana	27,01 nilai 26,55 nilai 12,48 nilai 21,97 nilai 100 % 100 % 94% 100 % 95% 94% 88,75 nilai 91,5 nilai 88,75 nilai 90,5 nilai	9.273.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				sesuai dengan ketentuan Persentase Kepatuhan Anggaran Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	A Point 3,55 Point	A Point 3,58 Point	25 Laporan	25 Laporan	82 nilai	87,52 nilai	185.020.000	184.987.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Persentase realisasi rencana	27,01 nilai 26,55 nilai 12,48 nilai 21,97 nilai 100 % 100 % 94% 100 % 95% 94% 88,75 nilai 91,5 nilai 88,75 nilai 90,5 nilai	20.280.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				sesuai dengan ketentuan Persentase Kepatuhan Anggaran Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	**08**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**126.219.100**	**126.219.100**					**172.703.000**
2	08	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	A Point 3,55 Point	A Point 3,58 Point	18 Unit	18 Unit	82 nilai	87,52 nilai	126.219.10	126.219.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Persentase realisas	27,01 nilai 26,55 nilai 12,48 nilai 21,97 nilai 100 % 100 % 94% 100 % 95% 94% 88,75 nilai 91,5 nilai 88,75 nilai 90,5 nilai	172.703.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				i rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Pengelolaan BMD		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Kepatuhan Anggaran Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				Pengaduan		
2	08	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											855.391.240	902.652.640					907.364.120

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	A Point 3,55 Point	A Point 3,58 Point	1 Laporan	1 Laporan	82 nilai	87,52 nilai	139.212.400	139.212.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Persentase realisasi rencana	27,01 nilai 26,55 nilai 12,48 nilai 21,97 nilai 100 % 100 % 94% 100 % 95% 94% 88,75 nilai 91,5 nilai 88,75 nilai 90,5 nilai	144.711.560

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				sesuai dengan ketentuan Persentase Kepatuhan Anggaran Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	A Point 3,55 Point	A Point 3,58 Point	1 Laporan	1 Laporan	82 nilai	87,52 nilai	763.440.240	763.440.240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Persentase realisasi rencana	27,01 nilai 26,55 nilai 12,48 nilai 21,97 nilai 100 % 100 % 94% 100 % 95% 94% 88,75 nilai 91,5 nilai 88,75 nilai 90,5 nilai	762.652.560

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				sesuai dengan ketentuan Persentase Kepatuhan Anggaran Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	**08**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**397.576.000**	**397.576.000**					**451.580.000**
2	08	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	A Point 3,55 Point	A Point 3,58 Point	17 Unit	17 Unit	82 nilai	87,52 nilai	17.500.000	17.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Persentase realisas	27,01 nilai 26,55 nilai 12,48 nilai 21,97 nilai 100 % 100 % 94% 100 % 95% 94% 88,75 nilai 91,5 nilai 88,75 nilai 90,5 nilai	13.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				i rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Pengelolaan BMD		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Kepatuhan Anggaran Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				Pengaduan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	A Point 3,55 Point	A Point 3,58 Point	76 Unit	76 Unit	82 nilai	87,52 nilai	243.550.000	243.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Persentase realisasi rencana	27,01 nilai 26,55 nilai 12,48 nilai 21,97 nilai 100 % 100 % 94% 100 % 95% 94% 88,75 nilai 91,5 nilai 88,75 nilai 90,5 nilai	238.080.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
																				tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				sesuai dengan ketentuan Persentase Kepatuhan Anggaran Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	A Point 3,55 Point	A Point 3,58 Point	1 Unit	1 Unit	82 nilai	87,52 nilai	136.526.000	136.526.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Persentase realisasi rencana	27,01 nilai 26,55 nilai 12,48 nilai 21,97 nilai 100 % 100 % 94% 100 % 95% 94% 88,75 nilai 91,5 nilai 88,75 nilai 90,5 nilai	200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				sesuai dengan ketentuan Persentase Kepatuhan Anggaran Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
																			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**											**735.715.700**	**729.915.700**				**1.253.341.000**
2	**08**	**02**	**2,01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**											**71.846.000**	**67.846.000**				**253.341.000**
2	08	02	2,01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Persentase perempuan berpolitik (%)	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan Kebijakan dan Pendampingan PUG dan PPRG	Indeks Pemberdayaan Gender	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 22,00 %	100 % 22,00 %	36 PD	36 PD	73.5 Point	73.5 Point	71.846.000	67.846.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender	100 %	253.341.000
2	**08**	**02**	**2,02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**301.086.100**	**299.286.100**				**600.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
2	08	02	2,02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Persentase perempuan berpolitik (%)	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	100 % 22,00 %	100 % 22,00 %	30 Organisasi	30 Organisasi	73.5 Point	73.5 Point	301.086.100	299.286.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender	84,00 % 22,00 %	600.000.000
2	**08**	**02**	**2,03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**362.783.600**	**362.783.600**				**557.904.200**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	02	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Persentase perempuan berpolitik (%)	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi, dan ketentraman ketertiban masyarakat (Indeks Pemberdayaan Gender)	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 22,00 %	100 % 22,00 %	450 Orang	450 Orang	73.5 Point	73.5 Point	362.783.600	345.831.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender	84,00 % 22,00 %	285.000.000
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**											**735.430.200**	**735.430.200**					**557.904.200**
2	**08**	**03**	**2,01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**56.526.000**	**56.526.000**					**285.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	03	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan (%) Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 22,00 %	100 % 22,00 %	3 Dokumen	3 Dokumen	73.5 Point	73.5 Point	56.526.000	56.526.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %	285.000.000
2	**08**	**03**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**											**678.904.200**	**678.904.200**					**272.904.200**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
2	08	03	2,02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan (%) Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Indeks Pemberdayaan Gender	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 22,00 %	100 % 22,00 %	75 Orang	73.5 Point	73.5 Point	73.5 Point	678.904.200	678.904.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD DAK (Dana Alokasi Khusus)		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %	272.904.200
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**											**4.392.877.135**	**550.210.600**					**6.782.294.698**
2	**08**	**04**	**2,01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**79.075.709**	**69.145.429**					**197.881.580**
2	08	04	2,01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Indeks Ketahanan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,2 Point	85,2 Point	6 laporan	6 laporan	85,2 Point	85,2 Point	79.075.709	69.145.429	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Dimensi Kualitas Legal Struktur Nilai Dimensi Kualitas Ketaha	79,9 point 78,27 point 68,35 point 62,91 point	197.881.580

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota														nan Fisik Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya	66,61 point	
2	**08**	**04**	**2,02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**4.313.801.426**	**3.163.989.426**					**6.584.413.118**
2	08	04	2,02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengemba	Indeks Ketahanan Keluarga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Indeks Ketahanan Keluarga	Kota Bogor, Semua Keca	85,2 Point	85,2 Point	6 Lembaga	6 Lembaga	85,2 Point	85,2 Point	1.023.328.426	1.023.328.426	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Dimensi Kualitas Legal Struktur	79,9 point 78,27 point	149.328.098

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					ngan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan		matan, Semua Kelurahan											Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya	68,35 point 62,91 point 66,61 point	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	04	2,02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,2 Point	85,2 Point	68 Orang	68 Orang	85,2 Point	85,2 Point	3.087.540.000	1.938.408.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Dimensi Kualitas Legal Struktur Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi Nilai Dimensi Kualitas Ketaha	79,9 point 78,27 point 68,35 point 62,91 point 66,61 point	6.197.344.660

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				nan Sosial-Budaya		
2	08	04	2,02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,2 Point	85,2 Point	3 Dokumen	3 Dokumen	85,2 Point	85,2 Point	202.933.000	202.253.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Dimensi Kualitas Legal Struktur Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi Nilai Dimensi Kualita	79,9 point 78,27 point 68,35 point 62,91 point 66,61 point	237.740.360

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				s Ketahanan Sosial-Psikologi Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya		
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**											**112.706.500**	**112.706.500**					**111.800.00**
2	**08**	**05**	**2,01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**112.706.500**	**112.706.500**					**111.800.00**
2	08	05	2,01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Indeks Pemberdayaan Gender	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	100,00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	72.5 Point	72.5 Point	112.706.500	93.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak	100 %	111.800.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**08**	**06**	**2.01**		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**											**549.511.200**	**541.016.200**					**59.346.820**
2	**08**	**06**	**2,01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**											**41.245.400**	**36.101.900**					**59.346.820**
2	08	06	2,01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	Predikat Kota Layak Anak	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Utama Peringkat	Utama Peringkat	35 organisasi	35 organisasi	Utama Peringkat	Utama Peringkat	41.245.400	36.101.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor pada Klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan) KLA Skor pada Klaster 2 (Perlindungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) KLA. Skor pada klaster 3 (Kesehatan Dasar dan	101 nilai 130 nilai 144 nilai 102 nilai	59.346.820

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Dunia Usaha													Kesejahteraan) KLA Skor pada Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) KLA		
2	**08**	**06**	**2,02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**											**508.265.800**	**504.914.300**					0
2	08	06	2,02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupate	Predikat Kota Layak Anak	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Utama Peringkat	Utama Peringkat	52.500 Orang	52.500 Orang	Utama Peringkat	Utama Peringkat	127.365.800	124.014.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor pada Klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan) KLA Skor pada Klaster 2 (Perlind	101 nilai 130 nilai 144 nilai 102 nilai	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							n/Kota													ungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) KLA. Skor pada klaster 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) KLA Skor pada Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) KLA		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	06	2,02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Predikat Kota Layak Anak	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Utama Peringkat	Utama Peringkat	3 Dokumen	3 Dokumen	Utama Peringkat	Utama Peringkat	380.900.000	380.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor pada Klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan) KLA Skor pada Klaster 2 (Perlindungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) KLA. Skor pada klaster 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) KLA Skor pada Klaster	101 nilai 130 nilai 144 nilai 102 nilai	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) KLA		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pada Perubahan Renstra DP3A Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan hasil pelaksanaan Renja DP3A Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor

Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan progran kegiatan serta sub kegiatan DP3A Kota Bogor Tahun 2024 dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor dalam mewujudkan Visi yaitu ***"MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA RAMAH KELUARGA".***

BAB I
PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 169 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor mempunyai tugas menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib, tidak terlepas dari peran aktif koordinasi dengan instansi Pemerintah lainnya sebagai Perangkat Daerah, yang mempunyai fungsi yang sama dan pelaksana teknis dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Polisi Pamong Praja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 169 Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan produk hukum, dan pembinaan masyarakat dan anggota Satuan.
b. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah Kota serta kebijakan perlindungan masyarakat.
d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan instansi terkait lainnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
f. Pelaksanaan administrasi umum Satuan.
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Satuan.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa dalam era reformasi yang berkembang saat ini, mendesak kita bekerja secara terukur dan akuntabel sesuai dengan cita-cita reformasi sehingga fungsi Pemerintahan dapat berjalan dengan baik dengan taat azas maka perlu adanya konsistensi dalam menjalankan tugas yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Untuk menjalankan roda Pemerintahan yang baik, terukur dan akuntabel telah ditetapkan RPJMD Kota Bogor yang ditindak lanjuti dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor maka RPJMD tersebut sebagai acuannya. Dengan demikian maka untuk melaksanakan program 1 (satu) tahun ke depan maka disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perubahan sebagai rencana operasional kegiatan 2024. Rencana Kerja tersebut sebagai implementasi strategis jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor. Dokumen Renja Perangkat Daerah dan Renja Perubahan pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk mensikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam bentuk program dan kegiatan perangkat daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1. Prioritas Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2024 diarahkan pada Program

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2024 Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2. Peraturan Walikota Bogor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor tahun 2023 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

7. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Kabupaten/Kota.
8. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
10. Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.
12. Peraturan Walikota Bogor Nomor 169 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.
13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2024.
14. Peraturan Walikota Bogor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (P-RKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2024 untuk memberikan gambaran tentang rencana kerja perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor selama Tahun 2024 berupa penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan.

Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan rencana kerja perubahan, rencana capaian kinerja perubahan yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Gambaran Umum
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Kerangka Ekonomi Daerah
3.2 Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

BAB VI PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2024 meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program, kegiatan dan realisasi.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
Tujuan 1											
Terwujudnya penegakkan perda dan perkada serta ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase Penanganan gangguan Trantibum Linmas	90%	3.062.118.400	90%	829.558.798	90%	1.696.759.612	100%	52.6 %	Sangat Tinggi
		Persentase Penegakan Perda	90%		100%		100%		111%		
Sasaran 1											
Meningkatnya kepatuhan pelanggar perda dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kawasan perkotaan		Persentase pelanggar perda yang ditertibkan	100%	3.062.118.400	100%	829.558.798	100%	1.696.759.612	111%	52.6%	Sangat Tinggi

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	100%	3.062.118.400	100%	829.558.798	100%	1.696.759.612	100%	52.6 %	Sangat Tinggi
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%		100%		100%		100%		
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	100%	1.995.456.000	100%	607.827.800	100%	1.154.609.600	100%	57.8%	Sangat Tinggi
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.315.563.800	1 Dokumen	542.861.400	1 Dokumen	925.946.000	100%	70,3%	Sangat Tinggi

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	24.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	- %	- %	Sangat Rendah
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	330 Orang	320.553.000	125 Orang	2.106.400	196 Orang	15.441.400	58.4%	4.8%	Rendah

	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	150.959.800	1 Dokumen	18.390.000	1 Dokumen	148.604.000	100%	99%	Sangat Tinggi

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	

	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 Laporan	100.499.800	1 Laporan	44.470.000	1 Laporan	56.870.000	100%	56.5%	Sangat Tinggi
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	78.899.600	- Laporan	-	1 Laporan	7.748.200	100%	9.8%	Sangat Tinggi

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	10 Laporan	5.000.000	- Laporan	-	- Laporan	-	100%	-	Tidak ada warga negara yang terkena dampak penegakan perda dan perkada
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase tindaklanjut penegakan perda dan perkada	100%	1.211.427.198	100%	221.730.998	100%	542.150.012	100%	44.7%	Sangat Tinggi
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	470.632.118	1 Laporan	189.125.000	1 Laporan	394.218.214	100%	83,7%	Sangat Tinggi

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	735.795.180	1 Laporan	32.605.998	1 Laporan	143.817.798	100%	19.5%	Sangat Tinggi
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	4.999.900	1 Laporan	-	1 Laporan	4.114.000	100%	82.2%	Sangat Tinggi

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	90%	15.000.000	-	-	-	-	- %	-%	Sangat Rendah
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	15.000.000	- Laporan	-	- Laporan	-	- %	-%	Sangat Rendah

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
Tujuan 2											
Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah kota bogor Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	A	40.394.323.213	-	12.338.171.695	-	24.287.430.040	-	60,1%	Rendah
Sasaran 1											
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkup perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	82	40.394.323.213	-	12.338.171.695	-	24.287.430.040	-	60,1%	Rendah

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup perangkat daerah	A	40.394.323.	-	12.338.171.695	-	24.287.430.040	-	60,1%	Rendah
		Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan lingkup perangkat daerah	3,50		-		3.54		101%		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup perangkat daerah	A	5.999.800	-	4.249.900	-	4.249.900	101%	70.8%	Sangat Tinggi
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	100%	100%	Sangat Tinggi

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	3.499.800	4 Laporan	1.749.900	4 Laporan	1.749.900	66%	50%	Sedang
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	32.575.752.382	100%	9.845.628.655	100%	19.899.283.808	100%	61.1%	Sangat Tinggi
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang	32.575.752.382	200 Orang	9.845.628.655	200 Orang	19.899.283.808	100%	61.1%	Sangat Tinggi

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	606.292.100	100%	209.869.240	100%	436.190.431	100%	71.9%	Sangat Tinggi
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	123.636.000	1 Paket	76.171.000	1 Paket	89.721.000	100%	72.5%	Sangat Tinggi
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	29.995.900	1 Paket	4.949.600	1 Paket	14.624.600	100%	48.71%	Sangat Tinggi

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	221.580.000	1 Paket	63.490.000	1 Paket	177.230.000	100%	79,9%	Sangat Tinggi
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	91.722.200	1 Paket	44.104.400	1 Paket	88.681.400	100%	96.8%	Sangat Tinggi
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1 Dokumen	41.600.000	1 Dokumen	9.100.000	1 Dokumen	21.980.000	100%	42.8%	Sangat Tinggi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	97.758.000	1 Laporan	12.054.240	1 Laporan	43.953.431	100%	44.9%	Sangat Tingg

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	100%	58.851.400	100%	58.400.000	100%	58.400.000	100%	99.4%	Sangat Tinggi
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6 Unit	58.851.400	6 Unit	58.400.000	6 Unit	58.400.000	100%	99.4%	Sangat Tinggi
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.325.736.531	100%	1.667.249.519	100%	2.888.275.620	100%	54.2%	Sangat Tinggi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	221.675.155	1 Laporan	32.543.191	1 Laporan	64.903.419	100%	29.21%	Sangat Tinggi

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.104.061.376	1 Laporan	1.634.706.328	1 Laporan	2.823.372.201	100%	55.3%	Sangat Tinggi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	1.821.691.000	100%	552.774.381	100%	1.001.030.281	100%	54.9%	Sangat Tinggi
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78 Unit	1.708.841.200	24 Unit	510.385.300	36 Unit	931.517.000	48,7%	54.5%	Sangat Rendah

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	82.249.800	24 Unit	12.324.600	42 Unit	39.448.800	49.4%	47.9%	Sangat Rendah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.600.000	1 Unit	30.064.481	1 Unit	30.064.481	100%	99.8%	Sangat Tinggi

Penjelasan dari tabel 2.1 adalah sebagai berikut :

- Kolom 4 merupakan kondisi target kinerja capaian pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2024
- Kolom 6 merupakan kondisi realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sub kegiatan triwulan I tahun 2024.
- Kolom 8 merupakan kondisi realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sub kegiatan triwulan II tahun 2024.
- Kolom 10 merupakan realisasi capaian target renja perangkat daerah s/d triwulan II tahun berjalan 2024, merupakan tahun akhir Renstra dan RPJMD periode 2019-2024.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Namun disisi lain juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

2.2. ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

Gambaran pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri No.121 Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Kunci sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2020. Dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Persentase Penegakan Perda	-	90%	90%	90%	90%	-	100%	100%	100%	-	-
2	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas	-	-	85%	87%	90%	-	-	85%	87%	-	-
3	Persentase Pelanggar Perda yang ditertibkan	-	-	90%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	-
4	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	-	90%	90%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	-
5	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	-	-	3.40	3.40	3.50	-	3.30	3.54	3.54	-	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	-	-	BB	A	A	A	B	BB	A	-	-
7	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	-	29	29	10	29	-	-	-	-	-
8	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
9	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
10	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	-	3739	3739	3739	3739	3739	3739	1049	1049	1049	-

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

Keberadaan Satpol PP Kota Bogor, sebagai entitas wilayah Kota di Propinsi Jawa Barat tentu tidak terlepas dari keterkaitan dengan lembaga pusat dan lembaga daerah Propinsi. Sehingga untuk menghindari duplikasi program maupun tidak terakomodasi beberapa kegiatan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka Rencana Kerja Satpol PP Kota Bogor perlu disinergikan dengan Rencana Kerja Kementerian dan Rencana Kerja Propinsi Jawa Barat. Hal ini penting sebagai upaya menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang timbul dari Rencana Kerja kedua entitas tersebut (Pusat dan Propinsi) dalam pelayanan Satpol PP di Kota Bogor.

Berkenaan dengan Misi Kedua Kota Bogor yaitu mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas, dimana tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, semestinya dimulai dengan kesatuan arah dan gerak yang saling mendukung. Selanjutnya faktor pendorong terhadap pelayanan Satpol PP Kota Bogor, yaitu mengenai kesamaan penegasan terhadap urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dimana Rencana Kerja yang disusun memprioritaskan urusan ini dalam ranah kebutuhan utama daerah. Dengan demikian mendorong kemudahan sinkronisasi tugas dan koordinasi antara Satpol PP Kota Bogor dengan Satpol PP Propinsi Jawa Barat serta dukungan atas penyelenggaraan bidang urusan ini oleh Kementerian terkait.

Dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satpol PP yang belum terpenuhi, akibat adanya pengaruh beberapa faktor internal maupun eksternal. Adapun permasalahan pelayanan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan faktor faktor yang mempengaruhinya dapat dipaparkan sebagai berikut.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi beberapa permasalahan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dibutuhkannya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan standar pelayanan minimal
		Belum optimalnya pengetahuan masyarakat mengenai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta produk hukum daerah	Perlunya sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Upaya pencapaian visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, secara prinsip manajemen pemerintahan sangat ditentukan oleh dukungan perangkat daerah. Hal ini mengingat kedudukan organisasi perangkat daerah merupakan operasional administrasi penyelenggaraan visi dan misi tersebut. Keberadaan perangkat daerah ini sebagai instrumen yang menjembatani implementasi program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Oleh karena itu keberhasilan implementasi visi, misi dan program kepala daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah menterjemahkannya kedalam operasional yang tertuang dalam tugas dan fungsi setiap organisasi. Dengan demikian sinkronisasi program kepala daerah terpilih dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah akan memudahkan pencapaian visi yang ditetapkan tersebut.

Visi Kepala Daerah terpilih yaitu **“Terwujudnya Kota Bogor Yang Ramah Keluarga”**.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka pemerintah daerah harus menetapkan misi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan dirumuskannya misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui keberadaan dan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi

pemerintah daerah harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi menggambarkan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pernyataan misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024, Misi Kota Bogor adalah :

(1) Mewujudkan Kota yang Sehat
(2) Mewujudkan Kota yang Cerdas
(3) Mewujudkan Kota yang Sejahtera

Adapun Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah Di Kota Bogor Tahun 2019-2024, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia
2. Pembangunan Ekonomi
3. Pembangunan Sosial dan Budaya serta Perlindungan Masyarakat
4. Pembangunan Infrastruktur dan kualitas lingkungan
5. Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Dari isu strategis diatas terdapat beberapa fakor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang dapat mempengaruhi tercapainya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bogor.

Tabel 2.3.2
Faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Satpol PP Kota Bogor untuk pencapaian sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

Sasaran RPJMD Kota Bogor 2019-2024	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
1. Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi dan ketentraman ketertiban masyarakat 2. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 2. Belum optimalnya pengetahuan masyarakat mengenai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta produk hukum daerah	1. Keterbatasan sumber daya anggota yang kompeten dalam segi jumlah dan kualitas 2. Keterbatasan sarana prasarana dan anggaran yang memadai 3. Pola koordinasi antar sektor, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal	1. Lingkungan kerja yang kondusif didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP 2. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan Kota

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KERANGKA EKONOMI DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rencana pembangunan daerah tahunan yang memuat Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah tahun 2024 yang meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro menggambarkan arah dan kebijakan ekonomi Kota Bogor tahun 2024 berdasarkan analisa dan proyeksi dengan berdasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2022. Dalam perumusan kebijakan perekonomian tersebut mempertimbangkan pula kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat, Nasional dan Global.

Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah yang memeberikan gambaran kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan tahun 2024. Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut akan dirumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2024 beserta proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan tahun 2024, termasuk di dalamnya perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor. Kerangka pendanaan menjadi dasar dalam kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip untuk penyelesaian berbagai permaslahan kota yang tertuang dalam isu strategis dan program prioritas, serta perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Kondisi perkonomian Kota Bogor tahun 2022 tidak bisa terlepas dari kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, yang mana berupaya untuk mengembangkan kesempatan kerja bagi masyarakat dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi yang tidak terpusat serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. Pembangunan ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan peningkatan ekonomi baik secara individu maupun kelompok. Hal ini tentunya dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan yang akan berpengaruh positif bagi pembangunan ekonomi daerah Kota Bogor salah satunya dalam program perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi serta daya tarik potensi ekonomi daerah Kota Bogor.

Arah Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kota Bogor tentunya harus dilakukan penyelarasan dengan Arah Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat agar sinergis dalam pencapaian pembangunan. Selain menyelaraskan terhadap arah kebijakan tersebut, seluruhnya mengarah pada pencapaian visi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu untuk “mewujudkan Kota Bogor sebagai kota yang ramah keluarga” dan visi RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 yaitu “mewujudkan kota jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan yang amanah”.

Pada tahapan tahun kelima dalam rencana pembangunan jangka menengah kota Bogor tahun 2019-2024 ini, fokus pembangunan kota Bogor diarahkan kepada “Membangun Kemandirian Daerah”. Membangun Kemandirian Daerah mengandung makna menumbuhkan

inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah dan berkeadilan sosial, menciptakan kemampuan daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kemandirian sumber daya daerah dan menciptakan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Kebijakan makro ekonomi yang dilakukan kota Bogor pada Tahun 2024 dalam membangun kemandirian daerah adalah sebagai berikut :

a. Memberikan stimulus untuk peningkatan daya saing ekonomi masyarakat terutama di bidang jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
b. Mendorong pemerataan pembangunan daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi disetiap wilayah yang mendorong pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
c. Meningkatkan daya tarik investasi dengan melakukan deregulasi dan integrasi perizinan investasi dalam rangka membuka kesempatan kerja seluas luasnya bagi masyarakat kota Bogor.
d. Mendorong untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal kepada investor yang menanamkan modalnya di Kota Bogor.
e. Penguatan di sektor UMKM dengan mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta meningkatkan upaya strategis yang mampu menaikkan kelas UMKM ke dalam supply chain regional, nasional, dan internasional.
f. Penguatan SDM berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasional.
g. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi kreatif

3.2 KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dalam menganalisa penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Analisa Standar Biaya merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang - undangan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

Belanja Daerah Perangkat daerah diarahkan untuk mendanai pelaksanaan program/kegiatan yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja 3 (tiga) Misi, 5 (lima) Tujuan dan 17 (tujuh belas) Sasaran pembangunan Kota Bogor pada Tahun 2024, dengan program prioritas dan kegiatan prioritas sesuai dengan pembagian: Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) urusan, unsur pemerintahan pilihan sejumlah 5 (lima) urusan, Unsur pendukung urusan pemerintahan sejumlah 2 (dua) urusan, unsur penunjang urusan pemerintahan sejumlah 5 (lima) urusan, unsur pengawasan urusan pemerintahan sejumlah 1 (satu) urusan, unsur Kewilayahan sejumlah 1 (satu) urusan dan Unsur Pemerintahan Umum sejumlah 1 (satu) urusan, serta untuk

mendukung pembiayaan program/kegiatan prioritas untuk mewujudkan janji politis walikota yang terdiri dari :

a. BOGOR LANCAR
   - Konversi Angkot
   - Pembangunan jalan protokol alternatif
   - Penataan kawasan stasiun kereta api
   - Pembangunan gedung parkir di pusat kota

b. BOGOR MERENAH
   - Pembangunan jalur pedestrian yang terintegrasi di pusat kota
   - Pembangunan kampung wisata
   - Revitalisasi pasar tradisional
   - Kampungku bersih dan hijau
   - Pembangunan pusat kuliner di setiap kecamatan

c. BOGOR KASOHOR
   - Pembangunan museum
   - Pembangunan Gedung Olah Raga Di setiap Kecamatan

d. BOGOR MOTEKAR
   - Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & professional
   - Festival seni & Helaran Budaya

e. BOGOR SAMAWA
   - Beasiswa tiap tahun bagi pelajar berprestasi
   - Pemberian insentif bagi guru ngaji

f. #AbdiBogor
   - Mall pelayanan Publik
   - Kunjungan dokter ke keluarga
   - Konseling & Call Center 24 Jam
   - RSUD Unggul

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dokumen RKPD memuat prioritas pembangunan daerah yang baik janji politik Wali Kota Bogor serta prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, sebagai daya ungkit kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan Tahun 2024 dilakukan melalui proses evaluasi permasalahan pembangunan daerah yang dihubungkan dengan program pembangunan daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Bogor didasarkan pada Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Prioritas pembangunan Kota Bogor disusun berdasarkan analisis atas :

a. Permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan keselarasannya dengan Permasalahan dan Isu Strategis yang berkembang di tingkat Provinsi Jawa Barat dan di tingkat Nasional.
b. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.
c. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
d. Arah Kebijakan pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025, prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2019-2024.
e. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Bogor yang tertuang dalam dokumen perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 sesuai target rencana tahun 2024.

f. Hasil Evaluasi Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2022.
g. Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kerangka Pendanaan Kota Bogor Tahun 2024.

Dalam upaya mewujudkan Visi Kota Bogor sebagai Kota yang ramah keluarga, oleh karenanya pemerintah kota harus dapat memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik keluarga pada khususnya dan masyarakat kota Bogor pada umumnya dapat terpenuhi dengan layak dan berkualitas.

Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

a. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

   Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

   Dalam rangka pencapaian misi 1, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Gambar 4.1

Tujuan dan Sasaran Misi 1 : Mewujudkan Kota Yang Sehat

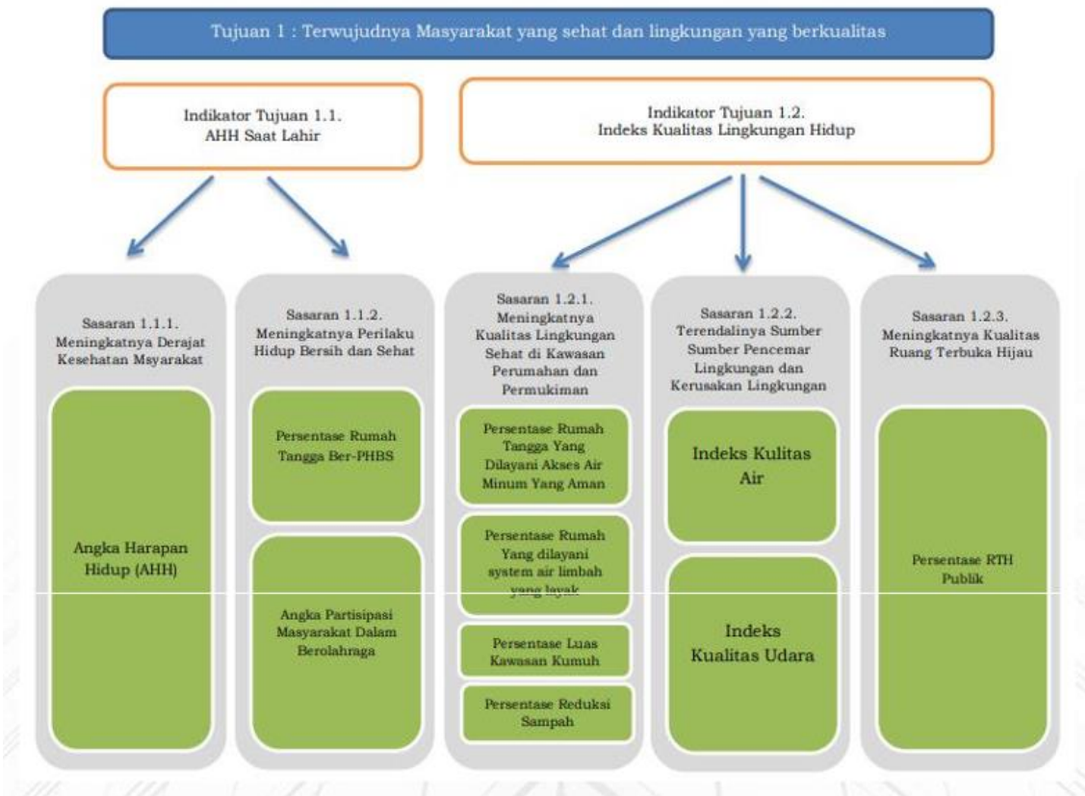

b. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota. Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (understanding), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kota Cerdas bukan “kota” ditambah “teknologi” namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

Dalam rangka pencapaian misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel

yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 4.2

Tujuan dan Sasaran Misi 2 : Mewujudkan Kota Yang Cerdas

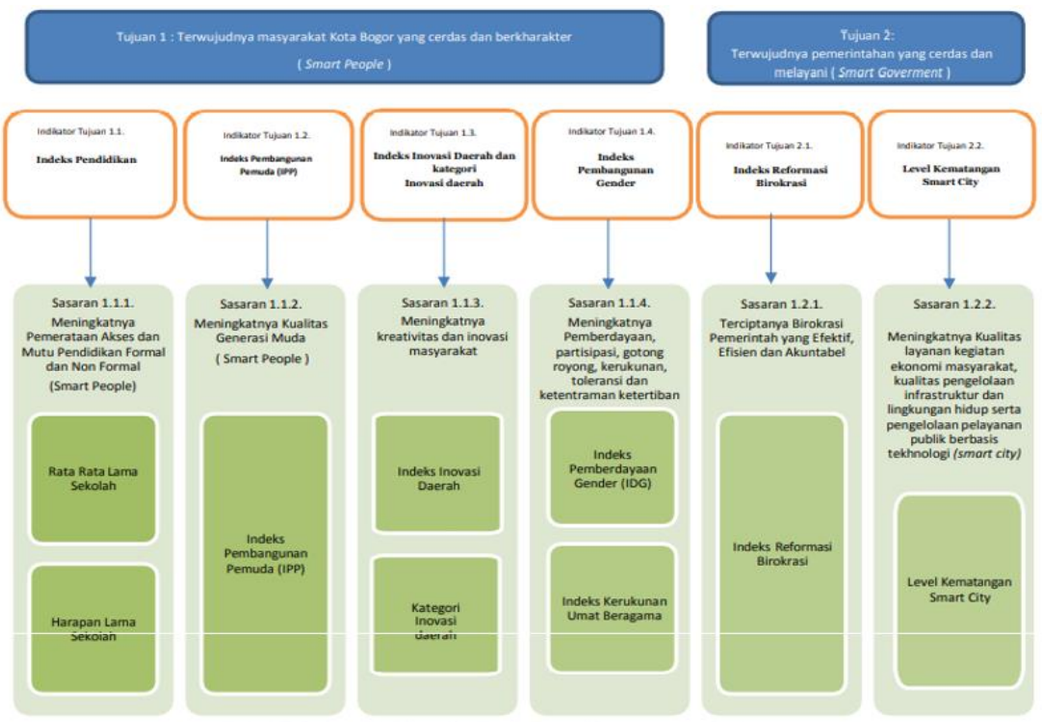

c. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera. Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Dalam rangka pencapaian misi 3, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel

yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 4.3

Tujuan dan Sasaran Misi 3 : Mewujudkan Kota Yang Sejahtera

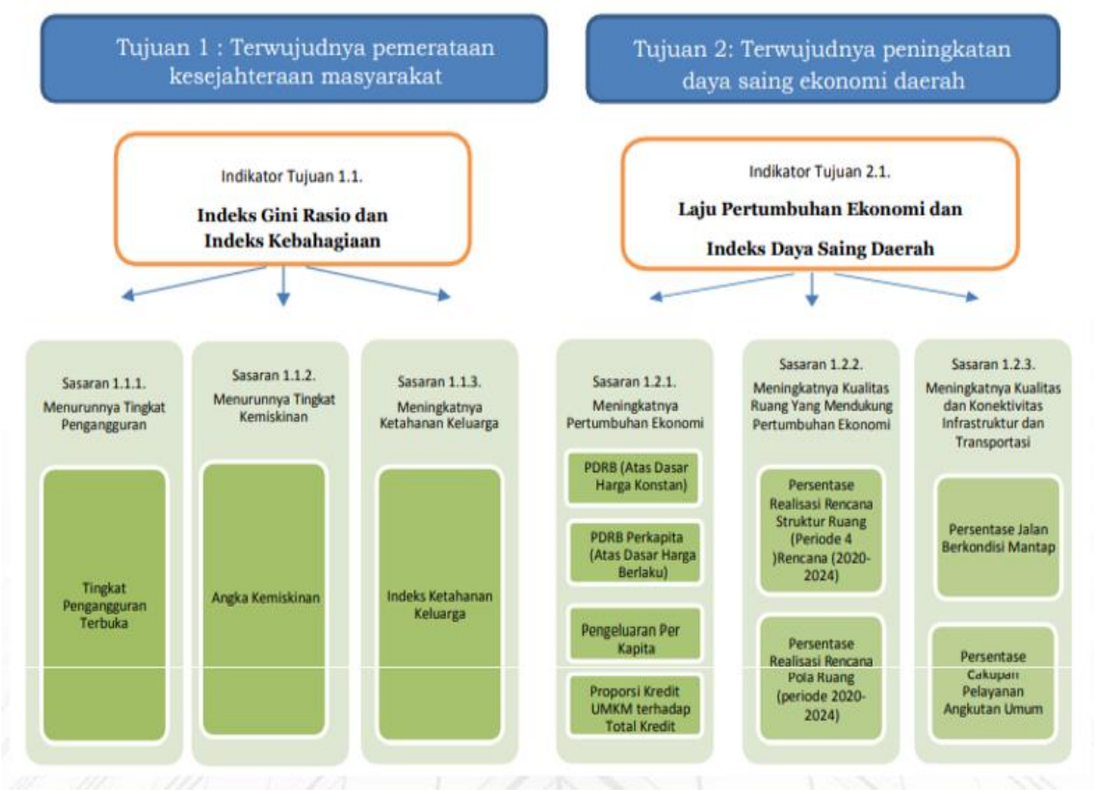

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab V fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang berpedoman pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (P RKPD). Rencana Kerja Perubahan disusun memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Dalam Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2024 terdapat 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2024 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan Aset Tetap Lainnya

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

A. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
   2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
   3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
   4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
   5) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

B. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
3) Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

C. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Berikut disajikan pada tabel 3.1 rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024
dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	RKPD 2024 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**								
105	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**				**43.616.206.411**				**49.030.153.075**
105.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup perangkat daerah**		**A**	**40.394.323.213**	**APBD Kota Bogor**		**A**	**45.207.484.038**
		Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan lingkup perangkat daerah		**3.50**				**3.50**	
105.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup perangkat daerah**		**A**	**5.999.800**	**APBD Kota Bogor**		**A**	**5.999.800**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	RKPD 2024 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	2 Dokumen	2.500.000	APBD Kota Bogor		2 Dokumen	2.500.000
105.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bogor	6 Laporan	3.499.800	APBD Kota Bogor		6 Laporan	3.499.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	RKPD 2024 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**		**100%**	**32.575.752.382**	**APBD Kota Bogor**		**100%**	**36.380.918.578**
105.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	200 Orang	32.575.752.382	APBD Kota Bogor		185 Orang	36.380.918.578

105.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**		**100%**	**606.292.100**	**APBD Kota Bogor**		**100%**	**1.611.033.300**
105.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	123.636.000	APBD Kota Bogor		1 Paket	123.636.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	RKPD 2024 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	29.995.900	APBD Kota Bogor		1 Paket	29.995.900
105.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	221.580.000	APBD Kota Bogor		2 Paket	1.226.321.200
105.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	91.722.200	APBD Kota Bogor		1 Paket	91.722.200
105.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Kota Bogor	1 Dokumen	41.600.000	APBD Kota Bogor		1 Dokumen	41.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	RKPD 2024 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	1 Laporan	97.758.000	APBD Kota Bogor		1 Laporan	97.758.000
105.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**58.851.400**	**APBD Kota Bogor**		**100%**	**58.851.400**
105.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	6 Unit	58.851.400	APBD Kota Bogor		6 Unit	58.851.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	RKPD 2024 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**100%**	**5.325.736.531**	**APBD Kota Bogor**		**100%**	**5.328.989.960**
105.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	1 Laporan	221.675.155	APBD Kota Bogor		1 Laporan	221.675.155
105.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1 Laporan	5.104.061.376	APBD Kota Bogor		1 Laporan	5.107.314.805
105.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**		**100%**	**1.821.691.000**	**APBD Kota Bogor**		**100%**	**1.821.691.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	RKPD 2024 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bogor	78 Unit	1.708.841.200	APBD Kota Bogor		78 Unit	1.708.841.200
105.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bogor	85 Unit	82.249.800	APBD Kota Bogor		85 Unit	82.249.800
105.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bogor	1 Unit	30.600.000	APBD Kota Bogor		1 Unit	30.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	RKPD 2024 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.02	**Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penegakan Perda**		**100%**	**3.221.883.198**	**APBD Kota Bogor**		**100%**	**3.822.669.037**
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		**100%**				**100%**	
105.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dan terselesaikan**		**100%**	**1.995.456.000**	**APBD Kota Bogor**		**100%**	**1.908.545.100**
105.02.2.01.003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1.315.563.800	APBD Kota Bogor		1 Dokumen	1.315.563.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	RKPD 2024 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.02.2.01.004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bogor	1 Dokumen	24.000.000	APBD Kota Bogor		1 Dokumen	185.730.000
105.02.2.01.005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Bogor	330 Orang	320.533.000	APBD Kota Bogor		330 Orang	266.803.000
105.02.2.01.006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kota Bogor	1 Dokumen	150.959.800	APBD Kota Bogor		1 Dokumen	150.959.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	RKPD 2024 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Bogor	1 Laporan	100.499.800	APBD Kota Bogor		1 Laporan	100.499.800
105.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Bogor	1 Laporan	78.899.600	APBD Kota Bogor		1 Laporan	45.718.700
105.02.2.01.0018	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota Bogor	10 Laporan	5.000.000	APBD Kota Bogor		10 Laporan	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	RKPD 2024 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase tindaklanjut penegakan perda dan perkada**		**100%**	**1.211.427.198**	**APBD Kota Bogor**		**100%**	**1.899.123.937**
105.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bogor	1 Laporan	470.632.118	APBD Kota Bogor DBHCHT		1 Laporan	754.706.813
105.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kota Bogor	1 Laporan	735.795.180	APBD Kota Bogor DBHCHT		1 Laporan	1.148.417.224

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	RKPD 2024 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bogor	1 Laporan	4.999.900	APBD Kota Bogor		1 Laporan	4.999.900
105.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Bogor yang dibina**		**90%**	**15.000.000**	**APBD Kota Bogor**		**90%**	**15.000.000**
105.02.2.03.006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kota Bogor	1 Laporan	15.000.000	APBD Kota Bogor		1 Laporan	15.000.000

BAB VI
P E N U T U P

Rencana Kerja Perubanan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya

Demikian Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2024 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan serta sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

U. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (UU 25/2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap daerah menyusun dokumen perencanaan yang antara lain terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yakni dokumen perencanaan jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat operasional dan berjangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah tersebut masing-masing dijabarkan oleh perangkat daerah melalui turunannya yakni Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), dimana Renstra merupakan turunan dari RPJMD dan Renja merupakan turunan dari RKPD.

Sebagai turunan dari RKPD, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan pedoman kerja selama tahun 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor merupakan bagian urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahkan Kelompok Substansi Pengelolaan Perumahan, Kelompok Substansi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, Kelompok Substansi Prasarana, Sarana, dan Utilitas dan Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati membawahkan Kelompok Substansi Perencanaan dan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati, Kelompok Substansi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Keanekaragaman Hayati, Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Taman Keanekaragaman

Hayati serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman berpedoman pada Renstra yang dalam hal ini telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bogor Nomor 75 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan juga mengacu pada rancangan awal RKPD. Dengan kata lain Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Prioritas Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2024 diarahkan pada Urusan bagian urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan rincian program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, , Program Kawasan Permukiman , dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan memperhatikan Hasil Program Pengembangan Perumahan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 serta sasaran pelaksanaan Tahun 2024.

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 208 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Bogor Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 83 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Tahun 2024 untuk memberikan gambaran berupa penjabaran dari program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan juga sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor tahun 2024. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Memberikan gambaran berupa penjabaran dari program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan daerah

2. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor yang akuntabel, partisipatif, dan tepat sasaran;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna.

Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.2 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor

Berisikan uraian mengenai:

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.2 Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor

Sesuai dengan tatacara penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kajian yang dimaksud pada bab ini adalah hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) yang dalam hal ini adalah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) atau tahun 2024 dan mengacu pada APBD Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor untuk Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 serta ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun yang bersangkutan.

Program - program yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2023, evaluasi yang dapat dipaparkan diantaranya:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dalam pelaksanaan Renja 2023 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain:

Tabel 2.1

Pagu Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran			Lebih / (Kurang)	
			Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	5	6	7 = 6 - 3	8
4	**PENDAPATAN DAERAH**					
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	2.334.841.500,00	2.616.168.228,00	2.616.168.228,00	281.326.728,00	112,05
4.1.02	Retribusi Daerah	2.334.750.000,00	2.580.186.750,00	2.580.186.750,00	245.436.750,00	110,51
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	630.270.000,00	636.841.750,00	636.841.750,00	6.571.750,00	101,04
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	630.270.000,00	636.841.750,00	636.841.750,00	6.571.750,00	101,04
4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran / Pengabuan Mayat	630.270.000,00	636.841.750,00	636.841.750,00	6.571.750,00	101,04
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.704.480.000,00	1.943.345.000,00	1.943.345.000,00	238.865.000,00	114,01
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.704.480.000,00	1.943.345.000,00	1.943.345.000,00	238.865.000,00	114,01
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.704.480.000,00	1.943.345.000,00	1.943.345.000,00	238.865.000,00	114,01
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	91.500,00	35.981.478,00	35.981.478,00	35.889.978,00	39.324,02
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	10.178,00	10.178,00	10.178,00	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	10.178,00	10.178,00	10.178,00	0,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	10.178,00	10.178,00	10.178,00	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	91.500,00	35.971.300,00	35.971.300,00	35.879.800,00	39.312,90
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	91.500,00	45.750,00	45.750,00	(45.750,00)	50,00
4.1.04.13.01.0003	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	91.500,00	45.750,00	45.750,00	(45.750,00)	50,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	35.925.550,00	35.925.550,00	35.925.550,00	0,00
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	35.925.550,00	35.925.550,00	35.925.550,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.334.841.500,00	2.616.168.228,00	2.616.168.228,00	281.326.728,00	112,05
5	**BELANJA DAERAH**					
5.1	**BELANJA OPERASI**	205.652.317.035,00	195.334.978.128,00	195.334.978.128,00	(10.317.338.907,00)	94,98
5.1.01	Belanja Pegawai	14.502.138.556,00	13.886.851.718,00	13.886.851.718,00	(615.286.838,00)	95,76
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.618.873.208,00	6.441.631.312,00	6.441.631.312,00	(177.241.896,00)	97,32
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.364.525.795,00	4.345.658.200,00	4.345.658.200,00	(18.867.595,00)	99,57
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.328.749.805,00	4.310.060.200,00	4.310.060.200,00	(18.689.605,00)	99,57
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	35.775.990,00	35.598.000,00	35.598.000,00	(177.990,00)	99,50
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	495.384.455,00	493.017.842,00	493.017.842,00	(2.366.613,00)	99,52
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	492.276.155,00	489.932.682,00	489.932.682,00	(2.343.473,00)	99,52
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.108.300,00	3.085.160,00	3.085.160,00	(23.140,00)	99,26
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	116.410.000,00	116.410.000,00	116.410.000,00	0,00	100,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	116.410.000,00	116.410.000,00	116.410.000,00	0,00	100,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	54.851.950,00	54.730.000,00	54.730.000,00	(121.950,00)	99,78
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	51.535.450,00	51.430.000,00	51.430.000,00	(105.450,00)	99,80
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.316.500,00	3.300.000,00	3.300.000,00	(16.500,00)	99,50
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	195.198.800,00	194.055.000,00	194.055.000,00	(1.143.800,00)	99,41
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	195.198.800,00	194.055.000,00	194.055.000,00	(1.143.800,00)	99,41
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	314.822.825,00	313.361.340,00	313.361.340,00	(1.461.485,00)	99,54
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	312.490.176,00	311.043.900,00	311.043.900,00	(1.446.276,00)	99,54

5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.332.649,00	2.317.440,00	2.317.440,00	(15.209,00)	99,35
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	616.085.481,00	467.133.207,00	467.133.207,00	(148.952.274,00)	75,82
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	616.085.481,00	467.133.207,00	467.133.207,00	(148.952.274,00)	75,82
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	70.193,00	53.369,00	53.369,00	(16.824,00)	76,03
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69.466,00	52.933,00	52.933,00	(16.533,00)	76,20
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	727,00	436,00	436,00	(291,00)	59,97
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	425.620.767,00	421.490.885,00	421.490.885,00	(4.129.882,00)	99,03
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	422.814.220,00	418.759.749,00	418.759.749,00	(4.054.471,00)	99,04
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.806.547,00	2.731.136,00	2.731.136,00	(75.411,00)	97,31
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.975.829,00	8.930.363,00	8.930.363,00	(45.466,00)	99,49
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.889.961,00	8.844.923,00	8.844.923,00	(45.038,00)	99,49
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	85.868,00	85.440,00	85.440,00	(428,00)	99,50
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	26.927.113,00	26.791.106,00	26.791.106,00	(136.007,00)	99,49
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26.669.523,00	26.534.798,00	26.534.798,00	(134.725,00)	99,49
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	257.590,00	256.308,00	256.308,00	(1.282,00)	99,50
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.348.395.348,00	6.993.630.406,00	6.993.630.406,00	(354.764.942,00)	95,17
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.534.673.492,00	2.410.864.067,00	2.410.864.067,00	(123.809.425,00)	95,12
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.513.199.046,00	2.391.694.838,00	2.391.694.838,00	(121.504.208,00)	95,17
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	21.474.446,00	19.169.229,00	19.169.229,00	(2.305.217,00)	89,27
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.029.479.682,00	981.478.774,00	981.478.774,00	(48.000.908,00)	95,34
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.029.479.682,00	981.478.774,00	981.478.774,00	(48.000.908,00)	95,34
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.784.242.174,00	3.601.287.565,00	3.601.287.565,00	(182.954.609,00)	95,17
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.784.242.174,00	3.601.287.565,00	3.601.287.565,00	(182.954.609,00)	95,17
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	534.870.000,00	451.590.000,00	451.590.000,00	(83.280.000,00)	84,43
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	534.870.000,00	451.590.000,00	451.590.000,00	(83.280.000,00)	84,43
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	317.850.000,00	257.010.000,00	257.010.000,00	(60.840.000,00)	80,86
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	217.020.000,00	194.580.000,00	194.580.000,00	(22.440.000,00)	89,66
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.299.263.479,00	135.415.461.410,00	135.415.461.410,00	(8.883.802.069,00)	93,84
5.1.02.01	Belanja Barang	28.126.536.664,00	25.691.415.309,00	25.691.415.309,00	(2.435.121.355,00)	91,34
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.037.989.664,00	25.609.626.309,00	25.609.626.309,00	(2.428.363.355,00)	91,34
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	373.256.500,00	368.043.890,00	368.043.890,00	(5.212.610,00)	98,60
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	119.532.000,00	118.340.000,00	118.340.000,00	(1.192.000,00)	99,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.245.858.400,00	1.735.904.024,00	1.735.904.024,00	(509.954.376,00)	77,29
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	600.585.900,00	592.596.798,00	592.596.798,00	(7.989.102,00)	98,67
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	217.952.600,00	184.154.000,00	184.154.000,00	(33.798.600,00)	84,49

5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	225.871.200,00	220.979.700,00	220.979.700,00	(4.891.500,00)	97,83
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	728.993.310,00	703.466.492,00	703.466.492,00	(25.526.818,00)	96,50
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	94.590.800,00	93.883.940,00	93.883.940,00	(706.860,00)	99,25
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11.142.400,00	11.033.000,00	11.033.000,00	(109.400,00)	99,02
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	48.634.000,00	47.638.016,00	47.638.016,00	(995.984,00)	97,95
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	106.030.100,00	105.389.800,00	105.389.800,00	(640.300,00)	99,40
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	582.385.725,00	571.482.195,00	571.482.195,00	(10.903.530,00)	98,13
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	215.785.500,00	208.435.800,00	208.435.800,00	(7.349.700,00)	96,59
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir / Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	39.600.000,00	37.977.415,00	37.977.415,00	(1.622.585,00)	95,90
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	21.613.384.529,00	19.838.992.049,00	19.838.992.049,00	(1.774.392.480,00)	91,79
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	10.378.200,00	5.664.000,00	5.664.000,00	(4.714.200,00)	54,58
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	72.000.000,00	37.350.000,00	37.350.000,00	(34.650.000,00)	51,88
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	459.150.000,00	459.090.000,00	459.090.000,00	(60.000,00)	99,99
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	147.100.000,00	144.913.800,00	144.913.800,00	(2.186.200,00)	98,51
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	67.850.000,00	67.526.390,00	67.526.390,00	(323.610,00)	99,52
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	17.108.500,00	16.805.000,00	16.805.000,00	(303.500,00)	98,23
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas / Safari	40.800.000,00	39.960.000,00	39.960.000,00	(840.000,00)	97,94
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	88.547.000,00	81.789.000,00	81.789.000,00	(6.758.000,00)	92,37
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	88.547.000,00	81.789.000,00	81.789.000,00	(6.758.000,00)	92,37
5.1.02.02	Belanja Jasa	29.729.993.717,00	27.216.381.507,00	27.216.381.507,00	(2.513.612.210,00)	91,55
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.970.984.835,00	18.293.650.870,00	18.293.650.870,00	(677.333.965,00)	96,43
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	57.850.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	(8.350.000,00)	85,57
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	86.600.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	(42.600.000,00)	50,81
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	697.500.000,00	643.500.000,00	643.500.000,00	(54.000.000,00)	92,26
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.364.800.000,00	1.334.000.000,00	1.334.000.000,00	(30.800.000,00)	97,74
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	613.600.000,00	596.490.000,00	596.490.000,00	(17.110.000,00)	97,21
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.601.693.560,00	13.488.080.122,00	13.488.080.122,00	(113.613.438,00)	99,16
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	687.936.000,00	685.272.096,00	685.272.096,00	(2.663.904,00)	99,61
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit / Surveillance ISO	79.975.500,00	79.032.000,00	79.032.000,00	(943.500,00)	98,82
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	85.000.000,00	84.715.200,00	84.715.200,00	(284.800,00)	99,66
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	25,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	36.000.000,00	10.555.065,00	10.555.065,00	(25.444.935,00)	29,32
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	384.599.700,00	278.594.300,00	278.594.300,00	(106.005.400,00)	72,44

5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	597.767.975,00	511.412.667,00	511.412.667,00	(86.355.308,00)	85,55
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	18.000.000,00	10.794.500,00	10.794.500,00	(7.205.500,00)	59,97
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi / Keanggotaan	7.412.100,00	0,00	0,00	(7.412.100,00)	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	414.250.000,00	248.704.920,00	248.704.920,00	(165.545.080,00)	60,04
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	1.185.112.782,00	1.165.635.481,00	1.165.635.481,00	(19.477.301,00)	98,36
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.105.282.800,00	1.086.710.928,00	1.086.710.928,00	(18.571.872,00)	98,32
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	35.479.992,00	35.077.578,00	35.077.578,00	(402.414,00)	98,87
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	44.349.990,00	43.846.975,00	43.846.975,00	(503.015,00)	98,87
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	27.756.000,00	25.229.000,00	25.229.000,00	(2.527.000,00)	90,90
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	27.756.000,00	25.229.000,00	25.229.000,00	(2.527.000,00)	90,90
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.136.329.790,00	6.426.104.562,00	6.426.104.562,00	(1.710.225.228,00)	78,98
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	102.027.000,00	101.432.910,00	101.432.910,00	(594.090,00)	99,42
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.204.478.000,00	2.099.396.280,00	2.099.396.280,00	(105.081.720,00)	95,23
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	877.406.000,00	807.537.210,00	807.537.210,00	(69.868.790,00)	92,04
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	1.110.617.790,00	1.100.280.840,00	1.100.280.840,00	(10.336.950,00)	99,07
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.121.000,00	19.993.320,00	19.993.320,00	(127.680,00)	99,37
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	930.145.000,00	677.623.081,00	677.623.081,00	(252.521.919,00)	72,85
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.514.980.000,00	1.028.268.531,00	1.028.268.531,00	(486.711.469,00)	67,87
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.376.555.000,00	591.572.390,00	591.572.390,00	(784.982.610,00)	42,97
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.409.810.310,00	1.305.761.594,00	1.305.761.594,00	(104.048.716,00)	92,62
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	167.900.000,00	69.472.494,00	69.472.494,00	(98.427.506,00)	41,38
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi	95.500.000,00	95.404.500,00	95.404.500,00	(95.500,00)	99,90

	Layanan-Jasa Survei					
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.146.410.310,00	1.140.884.600,00	1.140.884.600,00	(5.525.710,00)	99,52
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	85.502.770.098,00	81.667.238.791,00	81.667.238.791,00	(3.835.531.307,00)	95,51
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.457.909.000,00	1.259.573.569,00	1.259.573.569,00	(198.335.431,00)	86,40
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.330.000,00	30.707.482,00	30.707.482,00	(7.622.518,00)	80,11
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	793.860.000,00	700.631.515,00	700.631.515,00	(93.228.485,00)	88,26
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	74.760.000,00	72.332.639,00	72.332.639,00	(2.427.361,00)	96,75
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	253.400.000,00	172.224.000,00	172.224.000,00	(81.176.000,00)	67,97
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman / Ikan / Ternak	86.409.000,00	85.252.000,00	85.252.000,00	(1.157.000,00)	98,66
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	25.000.000,00	24.682.000,00	24.682.000,00	(318.000,00)	98,73
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	(800.000,00)	94,67
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	59.170.000,00	52.518.899,00	52.518.899,00	(6.651.101,00)	88,76
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	50.000.000,00	49.866.750,00	49.866.750,00	(133.250,00)	99,73
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	48.180.000,00	44.735.484,00	44.735.484,00	(3.444.516,00)	92,85
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.800.000,00	12.422.800,00	12.422.800,00	(1.377.200,00)	90,02
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.612.308.103,00	11.444.612.777,00	11.444.612.777,00	(167.695.326,00)	98,56
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.577.893.400,00	3.566.975.303,00	3.566.975.303,00	(10.918.097,00)	99,69
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	8.034.414.703,00	7.877.637.474,00	7.877.637.474,00	(156.777.229,00)	98,05

5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.432.552.995,00	68.963.052.445,00	68.963.052.445,00	(3.469.500.550,00)	95,21
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	44.901.333.618,00	43.193.326.756,00	43.193.326.756,00	(1.708.006.862,00)	96,20
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	880.471.515,00	575.142.234,00	575.142.234,00	(305.329.281,00)	65,32
5.1.02.03.04.0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	1.899.803.312,00	1.873.489.271,00	1.873.489.271,00	(26.314.041,00)	98,61
5.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	24.538.408.102,00	23.110.926.784,00	23.110.926.784,00	(1.427.481.318,00)	94,18
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	212.536.448,00	210.167.400,00	210.167.400,00	(2.369.048,00)	98,89
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	939.963.000,00	840.425.803,00	840.425.803,00	(99.537.197,00)	89,41
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	939.963.000,00	840.425.803,00	840.425.803,00	(99.537.197,00)	89,41
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	178.372.000,00	132.211.803,00	132.211.803,00	(46.160.197,00)	74,12
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.655.000,00	27.405.000,00	27.405.000,00	(5.250.000,00)	83,92
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	571.526.000,00	534.949.000,00	534.949.000,00	(36.577.000,00)	93,60
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	157.410.000,00	145.860.000,00	145.860.000,00	(11.550.000,00)	92,66
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	46.850.915.000,00	46.032.665.000,00	46.032.665.000,00	(818.250.000,00)	98,25
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	46.850.915.000,00	46.032.665.000,00	46.032.665.000,00	(818.250.000,00)	98,25
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	46.850.915.000,00	46.032.665.000,00	46.032.665.000,00	(818.250.000,00)	98,25
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	46.850.915.000,00	46.032.665.000,00	46.032.665.000,00	(818.250.000,00)	98,25
5.2	**BELANJA MODAL**	13.962.128.465,00	12.975.742.366,00	12.975.742.366,00	(986.386.099,00)	92,94
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.593.214.951,00	1.148.047.760,00	1.148.047.760,00	(445.167.191,00)	72,06
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.593.214.951,00	1.148.047.760,00	1.148.047.760,00	(445.167.191,00)	72,06
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.593.214.951,00	1.148.047.760,00	1.148.047.760,00	(445.167.191,00)	72,06
5.2.01.01.03.0013	Belanja Modal Tanah untuk Taman	1.593.214.951,00	1.148.047.760,00	1.148.047.760,00	(445.167.191,00)	72,06
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.615.064.298,00	6.193.668.626,00	6.193.668.626,00	(421.395.672,00)	93,63
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.867.545.000,00	5.542.613.000,00	5.542.613.000,00	(324.932.000,00)	94,46
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.867.545.000,00	5.542.613.000,00	5.542.613.000,00	(324.932.000,00)	94,46
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	438.672.000,00	381.723.000,00	381.723.000,00	(56.949.000,00)	87,02
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.428.873.000,00	5.160.890.000,00	5.160.890.000,00	(267.983.000,00)	95,06
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	210.742.598,00	126.183.138,00	126.183.138,00	(84.559.460,00)	59,88
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	210.742.598,00	126.183.138,00	126.183.138,00	(84.559.460,00)	59,88
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman / Ikan / Ternak	210.742.598,00	126.183.138,00	126.183.138,00	(84.559.460,00)	59,88

5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	222.094.300,00	214.577.250,00	214.577.250,00	(7.517.050,00)	96,62
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	31.417.700,00	30.656.000,00	30.656.000,00	(761.700,00)	97,58
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	31.417.700,00	30.656.000,00	30.656.000,00	(761.700,00)	97,58
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	83.988.600,00	79.459.150,00	79.459.150,00	(4.529.450,00)	94,61
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	55.000.000,00	50.620.000,00	50.620.000,00	(4.380.000,00)	92,04
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	10.323.600,00	10.230.000,00	10.230.000,00	(93.600,00)	99,09
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.665.000,00	18.609.150,00	18.609.150,00	(55.850,00)	99,70
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	106.688.000,00	104.462.100,00	104.462.100,00	(2.225.900,00)	97,91
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	6.752.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00	(92.000,00)	98,64
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	29.401.000,00	29.082.000,00	29.082.000,00	(319.000,00)	98,92
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	51.750.000,00	50.782.500,00	50.782.500,00	(967.500,00)	98,13
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	18.785.000,00	17.937.600,00	17.937.600,00	(847.400,00)	95,49
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	113.671.200,00	111.317.238,00	111.317.238,00	(2.353.962,00)	97,93
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	113.671.200,00	111.317.238,00	111.317.238,00	(2.353.962,00)	97,93
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	81.335.400,00	79.187.400,00	79.187.400,00	(2.148.000,00)	97,36
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	32.335.800,00	32.129.838,00	32.129.838,00	(205.962,00)	99,36
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	33.738.200,00	33.522.000,00	33.522.000,00	(216.200,00)	99,36
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	33.738.200,00	33.522.000,00	33.522.000,00	(216.200,00)	99,36
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System / Power Supply	33.738.200,00	33.522.000,00	33.522.000,00	(216.200,00)	99,36
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	167.273.000,00	165.456.000,00	165.456.000,00	(1.817.000,00)	98,91
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	167.273.000,00	165.456.000,00	165.456.000,00	(1.817.000,00)	98,91
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	167.273.000,00	165.456.000,00	165.456.000,00	(1.817.000,00)	98,91
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.755.613.176,00	1.742.455.045,00	1.742.455.045,00	(13.158.131,00)	99,25
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.755.613.176,00	1.742.455.045,00	1.742.455.045,00	(13.158.131,00)	99,25
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.755.613.176,00	1.742.455.045,00	1.742.455.045,00	(13.158.131,00)	99,25
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.755.613.176,00	1.742.455.045,00	1.742.455.045,00	(13.158.131,00)	99,25
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.998.236.040,00	3.891.570.935,00	3.891.570.935,00	(106.665.105,00)	97,33
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.127.027.988,00	2.025.201.061,00	2.025.201.061,00	(101.826.927,00)	95,21
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	1.831.597.244,00	1.827.588.317,00	1.827.588.317,00	(4.008.927,00)	99,78
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.831.597.244,00	1.827.588.317,00	1.827.588.317,00	(4.008.927,00)	99,78
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	295.430.744,00	197.612.744,00	197.612.744,00	(97.818.000,00)	66,89
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	295.430.744,00	197.612.744,00	197.612.744,00	(97.818.000,00)	66,89
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.871.208.052,00	1.866.369.874,00	1.866.369.874,00	(4.838.178,00)	99,74
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.871.208.052,00	1.866.369.874,00	1.866.369.874,00	(4.838.178,00)	99,74
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	621.954.978,00	619.874.400,00	619.874.400,00	(2.080.578,00)	99,67
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.249.253.074,00	1.246.495.474,00	1.246.495.474,00	(2.757.600,00)	99,78
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**219.614.445.500,00**	**208.310.720.494,00**	**208.310.720.494,00**	**(11.303.725.006,00)**	**94,85**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki 2 indikator Nilai Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah dan Nilai rata rata indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah. Presentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 8 Kegiatan dan 22 Sub kegiatan dengan capaian kinerja untuk indikator Nilai Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah adalah A dan Nilai rata rata indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah adalah 3,81 point dan realisasi keuangan sebesar 95.02%.

2. Program Pengembangan Perumahan

Program ini memiliki 2 indikator yakni Persentase penyediaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota dan Persentase tingkat hunian rumah susun Presentase Capaian Kinerja Program Pengembangan Perumahan dilaksanakan melalui 6 Kegiatan dan 16 Sub kegiatan dengan capaian kinerja untuk indikator Persentase penyediaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota adalah 100% dan indikator Persentase tingkat hunian rumah susun 90% dan realisasi keuangan sebesar 96.95%.

Program Pengembangan Perumahan mendukung Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor terdiri dari :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kota

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN
1	**Penyediaan & Rehabitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Korban bencana Kab/Kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	**218**	**218**	**100%**	
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana				70	70	100%	
	2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana				148	148	100%	2,301,580,000
	3. Pembanguran kembali rumah bagi korban bencana							
	4. Pembanguran baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.							
2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Petunjuk Tekhnis atau Tata cara Pemenuhan Standar	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	**AKAN DILAKSANAKAN TAHUN 2024**			
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Perguasaan Tanah dan/atau Bangunan							
	2. Subsidi uang sewa							
	3. Penyediaan rumah layak huni							

3. Program Kawasan Permukiman

Program ini memiliki 1 indikator yakni Luas Kawasan Kumuh yang belum tertangani. Presentase Capaian Kinerja Program Kawasan Permukiman melalui 3 Kegiatan dan 7 Sub kegiatan dengan capaian Kinerja untuk indikator Luas Kawasan Kumuh adalah 224.99 Ha dan realisasi keuangan sebesar 94.87%.

3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini memiliki 1 indikator yakni Persentase Rumah Layak Huni. Presentase Capaian Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melalui 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan capaian kinerja untuk indikator Persentase Rumah Layak Huni adalah 92.82% dan realisasi keuangan sebesar 98.26%.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini memiliki 1 indikator Persentase Perumahan dan permukiman dengan PSU yang berkondisi baik dan Persentase Makam Umum per satuan Penduduk melalui 1 Kegiatan dan 4 Sub kegiatan dengan capaian kinerja untuk indicator Persentase Perumahan dan permukiman dengan PSU yang berkondisi baik adalah 87.92% dan capaian kinerja untuk indicator Persentase Makam Umum per satuan Penduduk adalah 9.42% realisasi keuangan sebesar 93.20%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sebagai pelaksana pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Bogor Nomor 142 tahun 2022 tentang uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.

mempunyai fungsi:

1. urusan Perumahan dan Permukiman
2. urusan Lingkungan Hidup

Secara umum, kedua urusan tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkup perumahan dan permukiman;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perumahan dan permukiman;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang terbuka hijau dan penyediaan taman keanekaragaman hayati
6. Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan di lingkup pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan taman keanekaragaman hayati.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
8. Secara rinci, tugas dan pokok masing-masing jabatan struktural pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor adalah sebagai berikut:
9. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

   a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan permukiman;

   b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perumahan dan permukiman;

   c. pelaksanaan teknis operasional di bidang perumahan dan permukiman;

d. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana, dan prasarana Dinas;

e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan permukiman; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di lingkup Dinas;

b. pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Dinas;

c. pelaksanaan tugas administrasi Barang Milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;

b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Dinas;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penyusunan dokumen perencanaan lingkup Dinas;

b. pengkoordinasian dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen Perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan perubahan DPA-SKPD lingkup Dinas;

c. pengoordinasian dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja lingkup Dinas;

d. penyusunan rencana anggaran gaji dan tunjangan pegawai Dinas;

e. pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;

f. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas; dan

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. penyusunan rencana kerja di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati mempunyai fungsi:

a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati;

b. penyusunan rencana kerja di Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati;

c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati;

d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas UPTD Pemakaman Kelas A mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja UPTD Pemakaman;

b. pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD Pemakaman;

c. pelaksanaan koordinasi pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana tempat pemakaman umum;

d. pelaksanaan pengelolaan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum dan tanah makam wakaf; dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pengelolaan administrasi umum,administrasi keuangan, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan; dan

c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas Rumah Susun Kelas A mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja UPTD Rumah Susun;

b. pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD Rumah Susun;

c. pelaksanaan koordinasi pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana rumah susun; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pengelolaan administrasi umum,administrasi keuangan, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan; dan

c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas. Rencana kebutuhan jabatan fungsional meliputi jumlah, jenis, dan jenjangnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Uraian Tugas dan Penetapan Sub Koordinator Jabatan Fungsional Sub Koordinator Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sub Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional, maka pejabat fungsional dengan jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

Pelayanan utama pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal, cepat, tepat, efesien dan efektif.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 75 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor 2019-2024 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya lingkungan sehat perumahan dan kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota	%	1.77
2	Terwujudnya pemerataan akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	%	92.91
3	Terwujudnya ruang-ruang terbuka hijau publik yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik	%	4.25
4	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	A/82

1. Terwujudnya lingkungan sehat perumahan dan kawasan Permukiman dengan indikator kinerja Persentase luasan kawasan kumuh kewenangan kota target capaian untuk tahun 2024 adalah 1.77%
2. Terwujudnya pemerataan akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni dengan indikator kinerja Persentase Rumah Layak Huni target capaian untuk tahun 2024 adalah 92.91
3. Terwujudnya ruang-ruang terbuka hijau public yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dengan indicator Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik target capaian untuk tahun 2024 adalah 4.25
4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan indicator Indeks Reformasi Birokrasi nilai target capaian untuk tahun 2024 adalah A.

Tabel 2.4 (T-C.30.)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor

Kota Bogor

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyediaan rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota		95.00	%	75,00	80.00	85.00	90.00	95.00	75,00	80.00	85.00	90.00	95.00	75,00	80.00	85.00	90.00	100
2	Persentase tingkat hunian rumah susun		90.00	%	77.75	85.00	90.00	90.00	90.00	77.75	85.00	90.00	90.00	90.00	77.75	85.00	90.00	90.00	90.00
3	Jumlah rekomendasi teknis pendukung kebijakan yang dikeluarkan		1	%	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	Luas Kawasan Kumuh yang belum tertangani		192,24	%	272.00	375,86	313,68	252,71	192,24	272.00	375,86	313,68	252,71	192,24	272.00	375,86	313,68	252,71	192,24
5	Persentase Rumah Layak Huni		82,74	%	77,03	76,79	78,77	80.76	82,74	77,03	76,79	78,77	80.76	82,74	77,03	76,79	78,77	80.76	82,74
6	Persentase Perumahan dan permukiman dengan PSU yang berkondisi baik		89,69	%	76,29	81,65	84,33	87.01	89,69	76,29	81,65	84,33	87.01	89,69	76,29	81,65	84,33	87.01	89,69
7	Persentase Makam Umum per satuan Penduduk		11,38	%	12,00	11,38	11,40	11.41	11,38	12,00	11,38	11,40	11.41	11,38	12,00	11,38	11,40	11.41	11,38

8	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)		0,80	%	465,93	1,70	1,00	0.80	0,80	465,93	1,70	1,00	0.80	0,80	465,93	1,70	1,00	0.80	1.01
9	Luas RTH Publik yang terkelola dengan baik (Ha)		47,29	%	43,44	43,49	45,29	46.29	47,29	43,44	43,49	45,29	46.29	47,29	43,44	43,49	45,29	46.29	48.97
10	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah		A	Nilai	BB	BB	A	A	A	BB	BB	A	A	A	BB	BB	A	A	A
11	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah		3.50	poin	3.34	3.35	3.40	3.52	3.57	3.34	3.35	3.40	3.40	3.50	3.34	3.35	3.40	3.40	3.57

Target Program

Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Target Awal	Target Kesepakatan
Misi 1	**Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat**							
Tujuan 1	**Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas**							
Sasaran 3	**Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman**							
Program 1.1.3.5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	Persentase penyediaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota	%	90.00	100.00	95.00	100
		2	Persentase tingkat hunian rumah susun	%	90.00	90.00	90.00	90
		3	Jumlah rekomendasi teknis pendukung kebijakan yang dikeluarkan	dokumen	0.00	0.00	1.00	1,00
Program 1.1.3.6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	Luas Kawasan Kumuh yang belum tertangani	Ha	252.71	224.99	192.24	192.24
Program 1.1.3.7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	Persentase Perumahan dan permukiman dengan PSU yang berkondisi baik	%	87.01	87.92	89.69	89.69
		2	Persentase Makam Umum per satuan Penduduk	%	11.41	9.74	11.38	11.38
Sasaran 5	**Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan**							
Program 1.1.5.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)	Ha	0.80	1.01	0.80	1.01

Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Target Awal	Target Kesepakatan
		2	Luas RTH Publik yang terkelola dengan baik (Ha)	Ha	46.29	47.96	47.29	48.97
Misi 2	**Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas**							
Tujuan 2	**Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government)**							
Sasaran 1	**Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel**							
Program 2.2.1.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Point	3.52	3.57	3.55	3,57
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Point	A	A	A	A
Misi 3	**Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera**							
Tujuan 1	**Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat**							
Sasaran 3	**Meningkatnya ketahanan keluarga**							
Program 3.1.3.2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1	Persentase Rumah Layak Huni	%	82.19	92.82	82.19	92.91

Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target Awal	Target Kesepakatan
III	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
A	**FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**					
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
	PEKERJAAN UMUM					
13	persentase areal kawasan kumuh kewenangan kota	Persen	1.94	2.02	1.77	1,77
15	rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	13.50	9.74	14.00	14.00
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					
1	rasio rumah layak huni	persen	18.52	21.16	23.52	23.52
2	rasio pemukiman layak huni	persen	96.46	89.13	96.78	96.78
3	cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	96.46	92.82	96.78	96.78
4	persentase lingkungan pemukiman kumuh kewenangan kota	persen	1.94	2.02	1.77	1,77
5	persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (kewenangan kota, provinsi, pusat)	persen	2.27	5.68	1.73	1,73
6	proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	persen	1.01	0.987	0.99	0.99
7	cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen	97.74	99.59	98.50	99,60
8	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota	Persen	90	100	95	100
9	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten / Kota	Persen	100	100	100	100
10	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang ditangani	Persen	74.17	72.36	67.57	67,57
11	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)	Persen	19.25	7.18	17.26	7.18
12	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Persen	13.10	12.04	14.29	14.29

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor memiliki isu strategis (*strategic issued*) yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di bidang perumahan dalam rangka tercapainya target Rumah Layak Huni dan terjangkau serta penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai.
2. Keterbatasan kapasitas pengembang yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
3. Rendahnya keterjangkauan (affordability MBR baik membangun atau membeli rumah) salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (potensi perumahan dan permukiman kumuh).

Berdasarkan uraian isu strategis tersebut, perlu diformulasikan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti terutama terkait petunjuk teknis dan payung hukum sebagai dasar rujukan pelayanan di setiap bidang/aspek sehingga tercipta keseragaman produk pelayanan.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2024

Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up

1. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja) Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD.

Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu

b. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini

c. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD

d. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan

e. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah)

f. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan OPD berbasis kinerja

g. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal

h. Tolok ukur dan target kinerja keluaran

i. Tolok ukur dan target kinerja hasil

j. Pagu indikatif program dan kegiatan.

k. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya

l. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran

2. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD

b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan Keputusan

c. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan

d. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal

e. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD

f. Pelibatan media

g. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif

h. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas program

3. Pendekatan Politis Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah

b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD

c. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses penyusunan RKPD

d. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD

e. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD

4. Pendekatan Bottom-up Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih

b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah

c. Mempertimbangkan hasil Forum OPD

5. Pendekatan Top-down Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L

b. Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD

c. Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD

d. Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan system

e. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan sebagainya.

2.4 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bogor menerima usulan program dan kegiatan dari yang bersifat mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu wadah untuk penyampaian usulan-usulan dari masyarakat, dimana tahapan atau proses musrenbang berlangsung mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota pada saat pelaksanaan Rapat Kerja (Forum) OPD dan telah diakomodir dalam rumusan Rencana Kerja.

Rekapitulasi Data Usulan Kegiatan Musrenbang

Nama Pengusul	kamus	uraian usulan	bidang	kecamatan	alamat	RT	RW	volume	satuan	perangkat daerah	pagu biaya		sub kegiatan
Aan	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	8RM9+6PJ, RT.03/RW.09, Rancamaya, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia	3	9	108	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	197,320,681	197,320,681	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Abd.Rasyid Nasution	Pembangunan Jalan Lingkungan	perbaikan jalan setapak	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	Jl Gardu Tinggi Rt.03 rw.04	3	4	600	m1	Dinas Perumahan dan Permukiman	81,408,702	81,408,702	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Abdul Wahab	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Gg. H. Rota'I No.N0 71, RT.02/RW.02, Pamoyanan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16136, Indonesia	2	2	138	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	198,746,751	198,746,751	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Abdul Wahab Syaroni	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perbaikan Jalan menggunakan Perkeresan Rigid/Beton	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Cilubang Tonggoh No.6, RT.03/RW.02, Situgede, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16115, Indonesia	3	2	640	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	198,764,119	198,764,119	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
acep suryadi	Pembangunan Jembatan Permukiman	mengganti pipa relling jembatan yang sudah rusak	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	9R7R+5P7, RT.01/RW.11, Sindangrasa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16145, Indonesia	4	11	40	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
ACHMAD LUTHFI	Pembangunan Jalan Lingkungan	Jalan Rusak sehingga mengakibatkan jalan tersebut suka macet yang melalui jalan tersebut	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Villa Mutiara Bogor RT 002 RW 012 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor 16168	2	12	2500	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
ADE WIJAYA	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Kp. Rawa Jamun	5	4	96	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
agung dwi cahyono	Pembangunan Drainase Lingkungan	pembuatan saluran darinase	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	Baranangsiang indah RT.12/RW.05, Katulampa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16144, Indonesia	12	5	1000	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
agung kurniawan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jembatan jalan Permukiman.	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	RT.04/RW.06, Cipaku, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16133, Indonesia	4	6	198	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	172,701,301	172,701,301	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
AGUS	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan Drainase Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	RT.01/RW.12, Bubulak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16115, Indonesia	1	12	200	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	185,496,964	185,496,964	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Agus	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	RT.02/RW.08, Genteng, Bogor Selatan, Bogor.	2	8	63	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	103,233,831	103,233,831	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
AGUS SALIM	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Perbaikan Jalan Lingkungan	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Komp. Bumi Kencana Permai RW.10, Kencana, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16167, Indonesia	5	10	1113	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	198,755,569	198,755,569	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
AGUS SUGIONO	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan Drainase Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Babakan Pasirmas RT.01/RW.08, Pasirkuda, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Indonesia	1	8	200	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	185,496,964	185,496,964	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Ahmad	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perbaikan jalan setapak	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Kedung halang sentral	3	5	200	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2,713,623,491	27,136,234	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Ahmad	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl. Desa Sukaresmi No.32, RT.03/RW.05, Sukaresmi, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16165, Indonesia	3	5	80	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	140.112.540	140,112,540	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Ahmad Baedowi	Pembangunan Drainase Lingkungan	saluran air tidak memadai kalau hujan	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	RT 01 RW 01 Kelurahan Tajur	1	1	100	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	92,748,482	92,748,482	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Ahmad Junaedi	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Cipinang Gading Gg. Rambutan No.5, RT.02/RW.06, Ranggamekar, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16136, Indonesia	2	6	30	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	54,811,300	54,811,300	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Anas Subarnas	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perlu adanya perbaikan drainase di Jl. Cempaka baik dari sisi kiri maupun kanan, saluran drainase sudah banyak yang rusak/jebol	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl. Cemp. II No.12, RW.07, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161, Indonesia	2	7	215	m'	Dinas Perumahan dan Permukiman	199,409,236	199,409,236	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
andriyanto	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Pemakaman	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Kedung Halang Blok Asem rt.03 rw.02 Kel. Sukaresmi Kec. Tanah Sareal Kota Bogor	3	2	150	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	331,378,480	331,378,480	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Asep Ahmad js	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Cipinang Gading Gg. Masjid Jami Al-Huda No.15, RT.01/RW.03, Ranggamekar, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16136, Indonesia	1	3	50	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	110,459,493	110,459,493	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
ASEP JALALUDIN	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	RT.001 RW.006, Harjasari, Bogor Selatan, Bogor City, West Java	1	6	90	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	198,827,088	198,827,088	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
ASEP SUHENDAR	Pembangunan TPT Permukiman	Sudah terjadi longsor, Perlu segera di bangun TPT agar tidak terjadi longsor susulan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Kp. Buntar, RT.01/RW.08, Muarasari, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16137, Indonesia	1	8	192	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
ASIPUDIN	Pembangunan Jalan Lingkungan	Belum terdapat saluran di lokasi tersebut sehingga ketika hujan, air mengalir ke jalan dan menyebabkan banjir pada permukiman dan jalan setempat yang membuat aksesbilitas warga terhambat.	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Kp. Kelapa Tiga RT 003 RW 004 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor 16168	3	4	80	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	74,198,785	74,198,785	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Asruli Rohman	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Drainase	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl.KH Muhidin No.6 RT.04 RW.02 Kel. Kencana	4	2	600	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
Atang Swarsa RW 06 Sempur	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Dikarenakan jalan sudah lama maka perlu diperbaiki	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Lebak Kantin No.60, RT.02/RW.06, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	2	6	312	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	1,314,578,772	55,740,888	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Atieq Zaenal Muttaqien	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase RW. 03 RT. 01, 02, 03 dan 04	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Ciranjang, RT.01/RW.03, Pamoyanan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16136, Indonesia	1	3	215	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	199,409,235	199,409,235	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Barja	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	8RFP+PH5, RT.02/RW.01, Bojongkerta, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16139, Indonesia	2	1	150	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	139,122,722	139,122,722	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
BINTANG JHS RW02	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Sempur Lama, RT.02/RW.02, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129	2	2	26.4	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	117,885,943	117,885,943	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Budi Resmanto	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Komp. Bogor Raya Permai No.Blok FD6/16D, RT.03/RW.12, Kp. Parung Jambu, Curug, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16113, Indonesia	3	12	100	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	195,131,946	195,131,946	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

BUDI WALUYO	Pemeliharaan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Jalan Stapak	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	SUKAWARNA	1	3	336	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
Budi Warsito	Pemeliharaan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	Jl. Rimba 1 No.26, RT.04/RW.06, Tajur, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16141, Indonesia	4	6	50	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	274,056,502	274,056,502	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Catur Dilli	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Agar Segera terealisasi	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Anggrek Raya No.4, RT.04/RW.06, Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16151, Indonesia	4	6	800	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	108,544,936	108,544,936	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
cecep hermawan	Pembangunan Drainase Lingkungan	pemeliharaan drainase lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	Jl. Raya Tajur Gg. Babadak No.32, RT.02/RW.04, Sindangrasa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16145, Indonesia	2	4	200	M1	Dinas Perumahan dan Permukiman	185,496,964	185,496,964	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Chandra Hayat	Pemeliharaan TPT Permukiman	Pembangunan TPT permukiman	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Merdeka Gg. Muha RT.01/RW.14, Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16111, Indonesia	1	14	48	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	99,995,076	99,995,076	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Cucum Suminta	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Kp Dekeng RT.03/RW.03, Genteng, Bogor Selatan, Bogor.	3	3	78	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	103,233,831	103,233,831	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
DADANG ISKANDAR	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	RT.04/RW.05, Batutulis, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16133, Indonesia	4	5	135	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	194,426,170	194,426,170	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
DADANG RUKMANA	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Aria Surialaga RT.04/RW.03, Kel. Pasir Kuda, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Indonesia	4	3	58	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	99,995,076	99,995,076	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Dadang Sutarsa	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pengaspalan	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	Sukamulya	3	3	1000	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	135,681,170	135,681,170	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
DADEN FIKRUZZAMAN	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perbaikan Jalan Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Bojong Baru RT.05/RW.02, Pasirkuda, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Indonesia	5	2	750	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	

Daman hidayat	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan tpt penahan jalan	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	9RRF+9VP, Cikondang, RT.11/RW.04, Katulampa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16144, Indonesia	11	4	30	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
dani roliana	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Setapak Paving Block	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Lawang Gintung No.30, RT.03/RW.04, Lawanggintung, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16134, Indonesia	3	4	525	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	195,369,069	195,369,069	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Dani sukirman	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Raya Pajajaran Blok Mohammad Amin No.13, RT.03/RW.01, Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16151, Indonesia	3	1	210	M1	Dinas Perumahan dan Permukiman	194,771,812	194,771,812	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Darmawan	Pembangunan TPT Permukiman	Pembuatan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Manunggal Gg. Kayu Manis, RT.03/RW.15 Menteng, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16111, Indonesia	3	15	93	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	194,042,789	194,042,789	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Dede Dachlan zainal	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan.	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jln raya tajur rt 01, rt 02, rt 03 - rw 07 kelurahan muarasari	1	7	1000	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	135,681,174	135,681,174	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Dede Mulyadi	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	perbaikan jalan lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	JALAN ADI SAHID, JALAN LURAH DAN JALAN PESANTREN RW 03 KELURAHAN TAJUR	1	3	1000	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	178,656,690	178,656,690	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
dedi mulyana	Pembangunan Drainase Lingkungan	pembangunan drainase yang merupakan hulu pembuangan air rumah tangga dan hujan dari perumahan warga	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	9R9H+89P, RT.04/RW.06, Sindangrasa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16141, Indonesia	4	6	120	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
Dedi Setiadi	Pembangunan Jembatan Permukiman	Pengajuan pembangunan Jembatan penghubung menuju TPU di RT.01 RW.02. Pengajuan berupa pembangunan jalan dan TPT tebing sebagai penunjang jembatan.	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Kp. Bojong Kidul RT 001 RW 002 Kel. Bojongkerta Kec. Bogor Selatan Kota Bogor 16139 (Jalan Menuju Tempat Pemakaman Umum)	1	2	3	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	55,671,892	55,671,892	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
DENNY JOHAR MANIK	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan Drainase	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	RT.01/RW.07, Kencana, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16167, Indonesia	1	7	215	M1	Dinas Perumahan dan Permukiman	199,409,236	199,409,236	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
deny yudiana	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan turap daerah rawan longsor	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl. Keramat/ Mbah Dalam No.88, RT.02/RW.13, Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16164, Indonesia	2	13	112	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		

Dita Mirwandi	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Curug Mekar No.23, RT.06/RW.09, Curug Mekar, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16114, Indonesia	6	9	168	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	306,943,283	306,943,283	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
DJUNAEDI W. P	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Peerbaikan Jalan Setapak	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Jabaru I RT.02/RW.05, Kel. Pasir Kuda, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Indonesia	2	5	475	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	64,448,558	64,448,558	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Drs Pepen Jusuf Effendy	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan Drainase	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Mesjid, RT.03/RW.03, Pasirmulya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16118	3	3	100	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	120,005,109	120,005,109	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Dudi iskandar	Pembangunan TPT Permukiman	Tebing tanah sekolah MI AZAHRA yg cukup curam sudah beberapa kali mengalami longsor	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	9Q6V+7CF, RT.02/RW.06, Mulyaharja, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16135, Indonesia	2	6	240	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
dwi anggraeni	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Layungsari III No.9, RT.04/RW.04, Empang, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia	4	4	200	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	185,496,963	185,496,963	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Dwi karyaningsih	Pembangunan Drainase Lingkungan	Minta di perbaiki agar selokan bisa di gunakan sebagai mana mestinya	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	Ciheuleut	1	8	150	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	139,122,723	139,122,723	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Eda Rahardja	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pengaspalan kembali jalan eksisting.	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl. Taman Cengkeh No.35 A, RT.5/RW.01, Kedung Waringin, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16164, Indonesia	5	1	1103	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	196,969,002	196,969,002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Edi Sanjaya	Pembangunan Drainase Lingkungan	pembuatan saluran air / drainase	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	Jl. Talas Ujung No.27, RT.01/RW.09, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia	1	9	200	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	185,496,964	185,496,964	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
EDI SOMA	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jalan Lolongok Timur RT 01 / RW 05, Empang, Bogor Selatan, RT.02/RW.05, Empang, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia	1	5	105	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
Edy	Pembangunan TPT Permukiman	Turap dibuat lebih tinggi dari turap awal dan dibuat pagar di atas turap	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	RT.08/RW.02, Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16164, Indonesia	8	2	NaN	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	

Elika Astriani	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pemeliharaan dan perbaikan Drainase di wilayah gg. Cibalok I	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Gg. Pabaton No.69, RT.02/RW.3, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121, Indonesia	2	3	138.112	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	1,648,438,428	198,908,054	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Ely Elayati	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembuatan Gorong Gorong di jl. Perwira	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Re. Martadinata No.55, RT.02/RW.05, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121, Indonesia	1	5	124	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
EMAN SULAEMAN	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan dan pembuatan saluran drainase	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jalan Curug Mekar No. 1, Curugmekar, RT.02/RW.01, Curug, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16113	2	1	200	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
Emse Ponijan	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan Drainase Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Beruang 80, RT.02/RW.05, Pasirmulya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16118	2	5	300	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	54,082,990	54,082,990	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Encep iwan	Pembangunan Jembatan Permukiman	Perbaikan Jembatan Akses Roda 4	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	RT.03 RW. 06, Kel. Curug, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia	3	6	90	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	199,967,715	199,967,715	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Enda	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perbaikan Jalan Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Srikandi Ujung No.71, RT.05/RW.11, Balumbangjaya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16116, Indonesia	5	11	1100	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	196,522,360	196,522,360	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Endang Kurniawan	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Perbaikan gedung serbaguna yang selama ini digunakan untuk Posyandu Sunan Ambu, Ciung Wanara dan Posbindu	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	Jl. Sukasari III, RT.04/RW.06, Sukasari, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16142, Indonesia	4	6	132	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
ENDANG KUSNANDAR	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Sirnasari RT. 05 dan RT. 06/RW.14, Empang, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia	5	14	96	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	192,260,437	192,260,437	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Endang sumarna	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jln. Darma Bakti, RT. 03 RW. 05 Kel. Curug, Kec. Bogor Barat Kota Bogor	3	5	75	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	137,028,251	137,028,251	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Ermeilus Rahman	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Sedap Malam I, RT.01/RW.08, Curug Mekar, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16113, Indonesia	1	8	1100	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	196,522,360	196,522,360	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Erwin	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pemeliharaan jalan	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	Jl Manggis 1 dan manggis 3	5	5	1200	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	214,388,028	214,388,028	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
EUIS SULISTYOWATY, S.Pd, M.Pd	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	1. Mushola yang tidak memadai, selain itu jumlah siswa yang tidak sebanding dengan luasan musola. Jumlah siswa 165 orang sedangkan luas musola hanya 2m x 3m. 2. Tidak adanya ruang untuk kegiatan ANBK	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	SDN 03 Loji, RT.02/RW.05, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Indonesia	2	5	110	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
FACHLEVI SUNGKAR	Pembangunan TPT Permukiman	TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Pinus No.23, RT.02/RW.07, Situgede, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16115, Indonesia	2	7	102	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	199,990,152	199,990,152	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
GANI ABDUL	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	RT.006 RW.008	6	8	96	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	200,302,233	200,302,233	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
H. BADRI	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Perlu dilakukan perbaikan jalan setapak dengan pengaspalan	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	Kp. Wangun Atas RT.06 RW.01, Kel. Sindangsari, Kec. Bogor Timur. Kota Bogor 16146	6	1	300	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	40,704,351	40,704,351	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
H. Eman Sulaeman	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	perbaikan jalan setapak RT 4 dan 5 RW 13	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	Jl. Pajajaran Indah V No.22, RT.04/RW.13, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia	4	13	1200	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	162,817,404	162,817,404	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
H. IWAN PERMANA	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Aspal	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Pahlawan No.159, RT.02/RW.06, Bondongan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia	2	6	600	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	81,408,704	81,408,704	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
H. SARIGUNA HARAHAP	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan dan pelebaran selokan	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl. A. Yani No.30, RT.02/RW.03, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161, Indonesia	2	3	120	m'	Dinas Perumahan dan Permukiman	111,298,178	111,298,178	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Happy Alamsyah	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan lingkungan banyaknya yang rusak, lingkungan terlihat kumuh pada saat hujan banyak jalan licin	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Padasuka No.18, RT.03/RW.03, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	3	3	300	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	908,963,460	53,597,007	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Hendra Gunawan	Pembangunan Drainase Lingkungan	pemeliharaan saluran air	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	kp. muara babadak rt. 01 rw. 12 kelurahan sindangrasa kecamatan bogor timur	1	12	200	M1	Dinas Perumahan dan Permukiman	185,496,964	185,496,964	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
HENI BENARTI	Pembangunan Drainase Lingkungan	Renovasi Saluran Drainase untuk Kelancaran Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga dan Air Hujan	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Manunggal RT.01- RT. 02 /RW.3, Menteng, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16111, Indonesia	1	3	120	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	111,298,178	111,298,178	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
HERRY SISWANTO	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perbaikan Jalan Lingkungan	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl. Taman Griya Kencana RW.08, Kencana, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16167, Indonesia	3	8	180	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	32,158,204	32,158,204	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
HIDAYAT	Pembangunan TPT Permukiman	Sangat berbahaya bagi ke amanan yang berada di lokasi sekitar	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	RT.03/RW.01, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153, Indonesia	3	1	25	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
Hj.Erny	Pemeliharaan TPT Permukiman	PEMBANGUNAN TURAP	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jalan KS. Tubun, Kp. Pangkalan, RT.01/RW.10, Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16151, Indonesia	1	10	25	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	87,570,338	87,570,338	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Hj. Nur Sayekti Prayoto	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pengajuan pembangunan jalan lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Melati 1 No.5, RT.01/RW.02, Pakuan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16134, Indonesia	1	1	1100.16	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	196,522,360	196,522,360	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Hj. Nur Sayekti Prayoto	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pengaspalan jalan lingkungan di Jl. Seruni I RT.02 RW.02	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Seruni I No.16, RT.02/RW.02, Pakuan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16134, Indonesia	2	1	999	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	178,656,691	178,656,691	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Hoerudin	Pembangunan TPT Permukiman	Pembanguann TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Kp. Bojong RT. 003 RW.08, Pamoyanan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16136, Indonesia	2	8	36	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	62,948,745	62,948,745	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Ibrahim ketua RW. 002	Pembangunan Jembatan Permukiman	Banyaknya masyarakat Rw. 002 khususnya, masyarakat Kebon Pedes dan Tanah Sareal umumnya yang menyebrang Rel kereta api dari Jalan Pondok Rumput 2 menuju Jl. Pemuda begitu sebaliknya	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl. Pondok Rumput II RT.02/RW.02, Kb. Pedes, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162, Indonesia	2	2	72	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	############	##########	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
IBROHIM	Pemeliharaan TPT Permukiman	LOKASI RAWAN LONGSOR PERSIS DIBAWAH GEDUNG SEKOLAH DASAR SDN BUBULAK 2	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Raya Cifor No.33, RT.03/RW.02, Bubulak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16115 (SDN Bubulak 02)	3	2	90	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	164,433,902	164,433,902	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk

													Menunjang Fungsi Hunian
IDA KUSMIATI	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	JALAN SETAPAK RUSAK RT.01 s/d RT.04 RW.11	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	JL. PESANTREN RT.002 RW.011 Kel. Kedunghalang SAID MUHAMAD MOHAN Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor	1	11	850	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	115,328,994	115,328,994	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
iis	Pembangunan Jalan Lingkungan	betonisasi	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Otista Iskandar Blok Lebak Pasar No.14, RT.01/RW.03, Babakan Ps., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16126, Indonesia	1	3	1500	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	4,842,302,850	502,655,257	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Indra Permana, S.H., M.H.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Pelebaran bangunan Kelurahan (penambahan ruangan aula)	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Kantor Kelurahan Mulyaharja Jl. Raya Cibeuruem No.13, RT.03/RW.03, Sukamantri, Kec. Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16610, Indonesia	3	3	200	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
IWAN RIDWAN	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan Drainase U-Ditch 30x40	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Kp. Bubulak RT.01 RW. 08 Kel. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor	1	8	100	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	92,748,482	92,748,482	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Iwan Setiawan	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan saluran drainase U-ditch di sepanjang jalan	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Cilendek Timur Raya No.7, RTO3,RT 04, RT 05/ RW.08, Cilendek Timur, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	3	8	480	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
Jamaludin	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Kondisi jalan rusak sedang, sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan penambahan (overlay) aspal	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Gg. H. Soleh No.7, RT.01/RW.06, Kedung Waringin, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16164, Indonesia	1	6	1080	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	189,443,345	189,443,345	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
junaedi rw	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	RT 04/RW 07 Kampung Pasir Kelurahan Katulampa	4	7	600	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
JUREMI	Pemeliharaan TPT Permukiman	SELOKAN TERLALU KECIL YANG MENYEBABKAN BANJIR KE RUMAH WARGA	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Mandala II No.49, RT.04/RW.02, Ciparigi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16157, Indonesia	4	2	80	M1	Dinas Perumahan dan Permukiman	115,215,508	115,215,508	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
kamaludin	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Setapak Aspal	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	RT.03/RW.03, Kertamaya, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16139, Indonesia	3	3	240	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	29,849,858	29,849,858	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
KETUA LPM	Pembangunan TPT Permukiman	PEMBUATAN SEPTIC TANK PERORANGAN KOMUNAL (PENANGANAN ODF) DI RW 1 SAMPAI 11	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jalan Boulevard No. 1 Villa Indah Blok CC, RT.06/RW.13, Ciparigi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16157, Indonesia	1	1	6000	ORANG	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	

Ketua RT.02 RW.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pengaspalan Jalan	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Palupuh 1,5,6, RT.02/RW.02, Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152, Indonesia	2	2	660	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	117,913,415	117,913,415	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Ketua RT 01 RW 14 Kel. Kedunghalang Kota Bogor	Pembangunan Jalan Lingkungan	Mohon segera dilakukan perbaikan dan pengaspalan	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Nothosaurus No.24, Kedunghalang, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16710, Indonesia	1	14	1095	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	195,629,076	195,629,076	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
KETUA RT 02 RW 08	Pembangunan Drainase Lingkungan	DRAINASE JALAN LINGKUNGAN	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Cimahpar No.Rt.02/08, Cimahpar, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16155, Indonesia	2	8	215	M1	Dinas Perumahan dan Permukiman	199,409,236	199,409,236	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Ketua RW	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Perintis Kemerdekaan Blok Kebon Jahe No.8, RT.01/RW.03, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	1	3	18.6	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	244,602,385	244,602,385	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Ketua RW	Pembangunan Jalan Lingkungan	Betonisasi Jalan Setapak (Tangga)	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	CQ5M+7PV, kp Jl. Kb. Kopi, RT.04/RW.06, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	4	6	400	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	1,446,680,760	134,041,402	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Ketua RW	Pembangunan TPT Permukiman	Peningkatan TPT	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Veteran Blok Barja No.14, RT.03/RW.02, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	2	2	14.1	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	137,309,446	137,309,446	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Ketua RW	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perbaikan atau Pengecoran Tangga (Jalan Setapak)	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Warung bu heni panaragan bakbis NO.6, RT.02/RW.05, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	2	5	330	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	1,193,511,627	110,584,156	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
KETUA RW,06	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pemeliharaan Jalan	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Pajajaran No.16, RT.3/RW.06, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16128, Indonesia	3	6	700	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
Ketua RW.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Rehablitasi Jalan Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Sancang No. 22 A RT 002/002, Babakan, Bogor Tengah, Bogor City, West Java 16128, Indonesia	2	2	300	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	908,963,460	908,963,460	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Ketua RW. 05	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Villa Citra , RT.04/RW.05, Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152, Indonesia	4	5	17	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	108,310,960	108,310,960	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk

													Menunjang Fungsi Hunian
KETUA RW.07	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pemeliharaan Jalan	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Sancang Dalam No.4, RT.2/RW.07, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16128, Indonesia	2	7	400	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	1,226,914,080	71,462,676	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Ketua RW.11	Pemeliharaan TPT Permukiman	Pembangunan TPT dibelakang Posyandu Kelapa A	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Villa Citra RT.02/RW.11, Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152, Indonesia	2	11	36	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	197,320,682	197,320,682	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
KETUA RW 01	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Perbaikan jalan dengan Pengaspalan	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Babakan Gunung Gede	3	1	500	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	1,533,642,600	89,328,346	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
KETUA RW05	Pembangunan TPT Permukiman	TPT PERMUKIMAN	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Cimahpar No.9, RT.04/RW.05, Cimahpar, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16155, Indonesia	4	5	12	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	150,226,675	150,226,675	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
KETUA RW 7	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	PENINGKATAN JALAN	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Palayu V No.19, RT.04/RW.07, Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152, Indonesia	4	7	850	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	151,858,186	151,858,186	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
KETUA RW 12	Pembangunan Jalan Lingkungan	PEMELIHARAAN JALAN SETAPAK	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Palayu Ujung, RT.03/RW.12, Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152, Indonesia	3	12	700	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	94,976,819	94,976,819	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Ketua RW 13	Pembangunan Jembatan Permukiman	Pembangunan jembatan penyeberangan yg dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda dua	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	RT 04 RW 13	4	13	36	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	1,747,625,000	374,038,744	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
KHAERUL ANSORI RW 03 SEMPUR	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Perbaikan tangga Jalan lingkungan dan Railing	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Lebak Pilar (gang mesjid) Rt 01 /03, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	1	3	150	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	101,400,796	101,400,796	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Kosim	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl.Sawo, RT.03/RW.13, Sukadamai, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16165, Indonesia	3	13	4000	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		

KUSARDI	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan jalan setapak akses menuju RW. 09	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Cifor Batuhulung No.79, RT.01/RW.06, Bubulak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16115, Indonesia	1	6	510	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	189,787,096	189,787,096	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
M. Toha	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan jalan setapak	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	FQ2X+XXJ, RT.05/RW.03, Sukaresmi, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16165, Indonesia	4	3	150	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2,035,217,618	20,352,176	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
M. YUSUP	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pengerukan/Normalisasi Drainase yang ada dan Perbaikan drainase	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Cilubang RT.04/RW.04 Kel. Balumbangjaya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16116, Indonesia	4	4	400	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	169,398,958	169,398,958	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
MAD ADI	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Lawang Gintung No.20, RT.03/RW.03, Lawanggintung, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16134, Indonesia	3	3	138	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	198,746,751	198,746,751	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
MAKSUM	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Parung Jambu, RT.02/RW.10, Empang, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia	2	10	64	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
margajaya_rw_02	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perbaikan Jalan	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Radar Baru 10-49, RT.03/RW.02, Margajaya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16116, Indonesia	3	2	1000.5	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
margajaya_rw_04	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perbaikan Jalan	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Lonceng Indah 18, RT. 01 RW. 04, Margajaya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia	1	4	1100	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	196,522,360	196,522,360	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
margajaya_rw_05	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	torn sudah lama masa pakainya dan untuk mingingkatkan kebersihan dan kesehatan	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Dramaga kaum , RT.02/RW.05, Margajaya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia	2	5	1	tower/ torn	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
MARHALI	Pembangunan Drainase Lingkungan	Belum terdapat saluran di lokasi tersebut sehingga ketika hujan, air mengalir ke jalan dan menyebabkan banjir pada permukiman dan jalan setempat yang membuat aksesbilitas warga terhambat dan menimbulkan banyak penyakit.	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Kp. Cimanggis RT 004 RW 001 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor 16168	4	1	215	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	199.409.235	199,409,235	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Misjaya	Pembangunan Jalan Lingkungan	Menghambat mobilitas warga	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl. Palem 1 No.4, RT.01/RW.11, Kedung Waringin, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16164, Indonesia	1	11	1080	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	189,443,345	189,443,345	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

muhamad ramdhany	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Perumahan Bogor Permai, RT. 02 RW. 04 Kel. Curug, Kec. Bogor Barat	2	4	90	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	198,827,088	198,827,088	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Muhamad Sakolen	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Sering terjadi banjir di sebabkan dampak drenase yang buruk dan tidak ter buka nya got pada permukaan	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	JL DURIAN 2 RT03/RW05 Kel Baranangsiang	3	5	250	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	44,664,173	44,664,173	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
MUHAMAD YUSUP	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl.KH Muhidin RT.01 RW.05 Kel. Kencana	1	5	240	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
Muhammad edwin rachman (RW 01 SEMPUR)	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembanguan Draianase Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Sempur Kidul RT.02/RW.01, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	2	1	28.5	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	566,459,741	164,182,099	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Muhammad ukat sukatma	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	No., Jl. Dekeng No.22, RT.01/RW.09, Genteng, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16137, Indonesia	1	9	420	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	56,986,093	56,986,093	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Muhidin Payumi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Renovasi MCK RT 2 RW 8 Kelurahan Tegallega	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	RT.02/RW.08, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	2	8	1	unit	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
MULYANA	Pembangunan TPT Permukiman	Pembuatan TPT makam	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Wr. Jambu No.24, RT.03/RW.06, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16151, Indonesia	3	6	800	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
nanahermana	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pengajuan pengaspalan jalan setapak	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	TPS 3R Kertamaya, No, Jl. Marga Bhakti No.32, RT.01/RW.08, Kertamaya, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16138, Indonesia	1	8	1000	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	135,681,174	135,681,174	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
NANA SURYANA, SE	Pembangunan Drainase Lingkungan	PEMBUATAN DRAINASE SEPANJANG -+ 370M UNTUK MENORMALISASIKAN KALI CIERENG	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Balitvet Bawah, RT.03/RW.11, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	3	11	548.95	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	3,723,608,836	532,871,726	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Nasrum	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	Jl.Sukasari 3 Rt.07 Rw.01	7	1	20	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	139,886,100	139,886,100	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Nasrum	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Perbaikan lapangan serbaguna dan penyediaan fasilitas tempat bermain anak	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	Jl.Sukasari Rt.07 Rw.01	7	1	150	m2	Dinas Perumahan	-		

										dan Permukiman			
Nining Sabartini	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	RT.04/RW.02, Cikaret, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia	4	2	10	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	110,459,493	110,459,493	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Nunung Ule	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pengajuan Pembangunan Jalan Setapak Paving Block	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	RT.05/RW.02, Bojongkerta, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16139, Indonesia	5	2	480	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	178,623,148	178,623,148	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
NURHADI	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Gg. Sapin Jl. Ahmad Yani No.29, RT.03/RW.02, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161, Indonesia	3	2	300	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	40,704,352	40,704,352	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Ojeh	Pembangunan Drainase Lingkungan	pembangunan drainase jalan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Raya Cipaku No.12, RT.01/RW.07, Genteng, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16137, Indonesia	1	7	40	m1	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
Oji Apandi AEWO	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Perbaikan Jalan Kanstin Agro Eduwisata Organik Mulyaharja	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	9Q2P+6CR, Jl. Ciharasas Cibeureum, RT.06/RW.01, Mulyaharja, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16135, Indonesia	6	1	300	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
Oman Sulaeman	Pembangunan TPT Permukiman	TPT	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl.Sukadamai Rt 03 Rw 02,kelurahan sukadamai kecamatan tanah sareal,16165	3	2	30	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
Omardani	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pengajuan Pembangunan Jalan Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Cikaret No.41, RT.05/RW.01, Cikaret, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia	5	1	360	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	48,845,222	48,845,222	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
ONDE MUNJIR	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan Baru	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	FQCP+8GP, Jl. KH Muhidin, RT.01/RW.04, Kencana, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16167, Indonesia	1	4	90	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	198.827.088	198,827,088	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Opik rw	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan drainase	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	RT.05/RW.09, Katulampa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16144, Indonesia	5	9	150	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	139,122,723	139,122,723	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
PRAYITNO	Pembangunan Drainase Lingkungan	Dilakukan normalisasi saluran mulai pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan saluran U-Ditch 40x60 dan pengangkatan sedimen.	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Pakis Raya No.08, RT.04/RW.09, Cilendek Timur, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	4	9	135	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	194,426,170	194,426,170	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Puji. S	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Asrama pusdikzi blok 4 RT04 RW02, Jl. Lawang Gintung No.50, RT.04/RW.02, Lawanggintung, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16134, Indonesia	4	2	1350	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	183,169,585	183,169,585	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RAHMAT HIDAYAT Ketua RW.09	Pembangunan Jalan Lingkungan	PERMOHONAN PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	KEBON PEDES RT 01,02,03,04,05,06 RW 09 KELURAHAN KEBON PEDES KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR JAWA BARAT	1	9	1050	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	187,589,526	187,589,526	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RASTA SUJONO	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan TPT Sungai	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Siti Hasanah No.44B, RT.02/RW.07, Kel. Pasir Kuda, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Indonesia	2	7	30	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
Rodiah	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Aspal	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Lawanggintung skip rt 002/006 no 22, RT.03/RW.06, Lawanggintung, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16134, Indonesia	2	6	400	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	54,272,470	54,272,470	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Roni	Pemeliharaan TPT Permukiman	Pembuatan Tembok Penahan Tanah	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	9RC4+VPX, RT.03/RW.07, Ranggamekar, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia	3	7	36	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	62,948,745	62,948,745	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
ROSANTI	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan Drainase	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Purbasari No.170, RT.05/RW.03, Gunungbatu, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16118, Indonesia	5	3	150	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	139,122,723	139,122,723	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Rosyid Yusuf	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Anggrek III No.20, RT.01/RW.06, Lawanggintung, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16134, Indonesia	1	6	108	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	197,320,681	197,320,681	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RT.05 RW.12	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	PEMELIHARAAN/PERBAIKAN JALAN SETAPAK	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	JLN. PESANTREN RT.05 RW.12 KEDUNGHALANG BOGOR UTARA JAWA BARAT INDONESIA 16158	5	12	900	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	122,113,053	122,113,053	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RT 01 RW 08	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	berharap untuk bisa di aspal kembali dari RT.01 s/d RT.06 RW.08	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Raya Jakarta-Bogor No.32, RT.01/RW.08, Kedunghalang, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16151, Indonesia	1	8	1470	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	199,451,320	199,451,320	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Rt 04/09	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pengaspalan Jalan	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl.Portigi dan Jl.Borobudur Rt 04/09	4	9	1106	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	197,594,300	197,594,300	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk

													Menunjang Fungsi Hunian
RT 2 RW 3	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perbaikan Jalan menggunakan Paving Block & Hotmix	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Sindang Barang Pengkolan RT.02/RW.03, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Indonesia	2	3	710	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	122,343,176	122,343,176	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Ruslan Supriadi	Pembangunan Drainase Lingkungan	Sering terjadi Banjir dan Sampah Menyangkut	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Bogor, RT.03/RW.09, Ranggamekar, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16136, Indonesia	3	9	100	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	144,019,385	144,019,385	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Rustanto	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan Drainase sepanjang jalan Kp. Perapatan Rw 02	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Kp. Perapatan RT.01-03 RW. 02 Kelurahan Cibadak Tanah Sareal Kota Bogor	1	2	637	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
RW. 001 PASIRJAYA	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perbaikan Jalan Setapak	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Raya Gn. Batu No.2, RT.02/RW.01, Pasir Jaya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Indonesia	2	1	400	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	54,272,470	54,272,470	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RW. 006 PASIRJAYA	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perbaikan Jalan Setapak	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Gg. Minjan 31-32, RT.03/RW.06, Pasir Jaya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16119	3	6	500	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	67,840,587	67,840,587	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RW. 008 PASIRJAYA	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Muara, RT.02/RW.08, Pasir Jaya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Indonesia	2	8	96	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	199,990,152	199,990,152	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Rw. 01 Kampung Karamat Panaragan	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	CQ2Q+HGR, Jl. Mantarena Lb., RT.02/RW.02, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	2	1	103.1	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	320,312,647	320,312,647	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Rw. 01 Kampung Karamat Panaragan	Pembangunan TPT Permukiman	pembangunan Turap dilokasi rawan longsor	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Blok Beton, Jl. Paledang RT.05/RW.01, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	5	1	132	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	427,083,529	427,083,529	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RW. 013 PASIRJAYA	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Sungai	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Muara Landbau RT.02/RW.13, Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor	2	13	40	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
RW. 015 PASIRJAYA	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan Drainase Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl.Muara-Jl.Ama Sandi RT.01/RW.15, Kel. Pasir Jaya, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Indonesia	1	15	300	M	Dinas Perumahan	-	-	

										dan Permukiman			
Rw. 05 Panaragan Kidul	Pembangunan Jembatan Permukiman	pembangunan jembatan penyebrangan	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Panaragan Kidul No.60, RT.05/RW.05, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	5	5	100	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	880,693,059	880.693.059	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RW 003	Pembangunan Drainase Lingkungan	Agar tidak membahayakan warga sekitar	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Raya Bogor No.36, RT.6/RW.03, Kedunghalang, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16158, Indonesia	6	3	12	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
RW 01	Pembangunan Jembatan Permukiman	PENINGKATAN JEMBATAN JALAN LINGKUNGAN	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Rancamaya No.100, RT.02/RW.1, Rancamaya, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16139, Indonesia	2	1	6	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	34,606,462	34,606,462	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RW 01	Pembangunan Drainase Lingkungan	pembangunan drainase	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl. Sukadamai, RT.01/RW.01, Sukadamai, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16165, Indonesia	1	1	206	M1	Dinas Perumahan dan Permukiman	191,061,873	191,061,873	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RW 01	Pembangunan TPT Permukiman	pembangunan TPT	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl. Sukadamai, RT.02/RW.01, Sukadamai, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16165, Indonesia	2	1	15	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	209,829,150	209,829,150	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RW 02 Kelurahan Rancamaya.	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan.	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	KP. RANCAMAYA PABUARAN RT 03 RW 02 Kelurahan Rancamaya.	3	2	100	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	198,421,522	198,421,522	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
rw03	Pembangunan TPT Permukiman	pembangunan TPT	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Abesin No.57, RT.02/RW.03, Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	2	3	111	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	374,739,174	374,739,174	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RW 03	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Kondisi jalan rusak sedang, sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan penambahan (overlay) aspal	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jalan Cimanggu Kaum No.42, RT.04/RW.03, Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16164, Indonesia	4	8	1425	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	193,345,674	193,345,674	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RW 04	Pembangunan TPT Permukiman	Pemukiman diatas tanah rawan longsor / tebingan tanah	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	CQ7V+P9G, RT.04/RW.04, Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	4	4	460	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	1,451,721,226	951,435,611	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

RW 05	Pembangunan TPT Permukiman	agar segera di TPT menghindari dari longsor di akibatkan hujan	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Ardio Jl. Ardio 5 No.28, RT.04/RW.05, Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	4	5	250	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	982,382,856	982,382,856	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RW 05	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	LEGOK MUNCANG RANCAMAYA RT02/RW 05	2	5	45	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	82,216,950	82,216,950	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RW 05 Nanang	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perbaikan Jalan Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Babakan Lb. 4 24-23, RT.03/RW.05, Balumbangjaya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16116	3	5	1100	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	196,522,360	196,522,360	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RW 06	Pembangunan TPT Permukiman	pembangunan TPT untuk rawan longsor	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Ardio 2 Blok Ardio 2 No.7A, RT.02/RW.06, Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	2	6	716.3	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	2,383,260,217	2.383.260.217	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RW 06	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Rawan Longsor	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jalan Gang Texan Blok Texan/Tarmidi No.35, RT.03/RW.06, Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	3	6	78	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	252,367,540	252,367,540	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Rw 06	Pemeliharaan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Kp sawah RT 03/06 no 16, RT.02/RW.06, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154, Indonesia	3	6	30	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	164,433,902	164,433,902	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RW 07	Pemeliharaan TPT Permukiman	Perbaikan dan Pemeliharaan Turab yang sifatnya sudah darurat	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Batam, RT.04/RW.07, Ciluar, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16156, Indonesia	4	7	25	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	137,028,251	137,028,251	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RW 07 Hadi Saputra	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan drainase lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Babakan Lio No.6, RT.02/RW.07, Balumbangjaya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16116, Indonesia	2	7	800000	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
rw8	Pemeliharaan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	RT.02/RW.08, Ciparigi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16157, Indonesia	2	8	15	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	104,914,575	104,914,575	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
RW 10	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan saluran dan pedalaman saluran air. Saluran sitemix dengan penutup	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	CQGH+7H8, Gg. Mesjid, RT.02/RW.10, Cilendek Timur, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	2	10	138	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	

RW 10 Cilendek Barat	Pemeliharaan TPT Permukiman	Pembuatan TPT di sepanjang tebing (Balagantrang)	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Blok E No.132, RT.03/RW.10, Cilendek Barat, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia (Balagantrang)	3	10	1,875	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	414,223,100	414,223,100	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
SAMIN	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pengaspalan Jalan Gang RW. 04 RT. 02, 03 dan 04	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Kp. Wangun Sari No.40, RT.02/RW.04, Pamoyanan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16136, Indonesia	2	4	1440	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	195,380,891	195,380,891	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Sana Sanjaya	Pembangunan TPT Permukiman	Terjadinya Tanah Longsor	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	9RJ2+769, Jl. Jayasari, RT.03/RW.05, Ranggamekar, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16136, Indonesia	3	5	72	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	144,000,157	144,000,157	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Sartinah	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Kp Sukajaya	3	1	55	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	79,210,662	79,210,662	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Selly Nodiyah	Pemeliharaan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Gg. Rd. Kosasih RT.03/RW.01 Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor	3	1	90	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	187,783,344	187,783,344	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Setia budi ketua RW 01	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT TEBING/ Permukiman	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl. Bubulak Gg lurah, RT.01/RW.01, Kb. Pedes, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162, Indonesia	1	1	176	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	465.379.258	465,379,258	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
SLAMET RIYANTO	Pembangunan TPT Permukiman	TPT	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	9RH4+G29, Jl. Jaya Tunggal, RT.04/RW.03, Batutulis, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16133, Indonesia	4	3	10	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
SMPN 2 Bogor	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase di Gg. Mekah samping SMPN 2 Bogor	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Gg. Mekah No.368, RT.02/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121, Indonesia	2	1	900	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
Sopian	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	8RXP+79C, Jl. Balubur Sari, RT.03/RW.05, Muarasari, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16137, Indonesia	3	5	150	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
SOPIAN RAHMAT	Pembangunan Drainase Lingkungan	Sebagian titik sudah terdapat saluran (dimensi saluran perlu diperbesar) dan sebagian titik lagi belum terdapat saluran sehingga ketika hujan, air meluap/melimpas ke jalan dan menyebabkan banjir pada permukiman dan jalan setempat yang membuat aksesbilitas warga terhambat dan menyebabkan banyak penyakit.	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Kp. Pabuaran RT 002 RW 002 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor 16168	2	2	210	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	194,771,812	194,771,812	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Subiyanto	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Perbaikan Jalan Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	CQ2F+QPP, Jl. Pasir Mulya 7, RT.02/RW.07, Pasirmulya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16118	2	7	600	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	107,194,015	107,194,015	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Subur	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan drainase	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Panorama, RT.03/RW.05, Sindangbarang, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Indonesia	3	5	220	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
Sudrajat	Pembangunan TPT Permukiman	Terjadi longsor	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Gg. H. Ghoni No.21, RT.06/RW.07, Sukaresmi, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16165, Indonesia	6	7	320	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
Suganda	Pembangunan Drainase Lingkungan	pembangunan saluran air/ drainase di beberapa rt di wilayah rw. 7	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	Jl. Desa Sindangrasa No.60299237, RT.03/RW.07, Sindangrasa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16145, Indonesia	1	7	200	M1	Dinas Perumahan dan Permukiman	185,496,964	185,496,964	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Sugiyanto RW11	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Bumi menteng asri, Jl. Pemutihan, RT.04/RW.11, Menteng, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16111, Indonesia	4	11	90	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	187,783,344	187,783,344	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Suhanda	Pembangunan Jembatan Permukiman	Jembatan penyeberangan	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Pulo geulis	4	4	75	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	880,693,059	880,693,059	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Suharyono	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Pamoyanan kp. Lebaksari RT.01/RW.14, Kel. Pamoyanan Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16136, Indonesia	1	14	1450	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	196,737,703	196,737,703	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
SUHENDAR	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Gg. Bengkong RT.02,04 RW.10 Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor	2	10	200	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	185,496,964	185,496,964	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Suherman	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Ciawi Girang No.29, RT.02/RW.06, Bojongkerta, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16139, Indonesia	2	6	33	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
Suheru Agus	Pembangunan TPT Permukiman	Pengajuan TPT di Belakang Masjid Jami Al Hidayah	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Babakan Sirna RT.03/RW.09, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	3	9	102	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	330,019,091	330,019,091	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Sujono	Pembangunan TPT Permukiman	Pengajuan Tembok Penahan Tanah RT 5 RW 3	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Tegal Manggah RT.05/RW.03, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	5	3	75	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	245,595,714	245,595,714	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
sukardi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Pengajuan Perbaikan Posronda di Kp. Anyar Gg. Mesjid	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Gg. Mesjid Blok Masjid No.3, RT.02/RW.02, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121, Indonesia	3	3	12	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	-		
SULAR	Pembangunan TPT Permukiman	pembangunan TPT pemukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	8RX7+MX6, RT.02/RW.10, Genteng, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16137, Indonesia	2	10	30	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	82,216,950	82,216,950	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
SULAR	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan dan Normalisasi Drainase Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	8RX8+RGC, RT.02/RW.05, Genteng, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16137, Indonesia	2	10	100	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	144,019,385	144,019,385	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
SULISTORO	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Perbaikan Jalan Setapak di RW.03	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Pangeran Sogiri No.175, RT.03/RW.03, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154, Indonesia	3	3	800	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	108,544,936	108,544,936	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Supadma B Eneb	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Lemah Duhur RT. 01/01, RT.02/RW.01, RT. 03/01, RT.04/RW.01, Mulyaharja, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16135, Indonesia	4	1	968	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	197,009,065	197,009,065	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
SUPRIYADI	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Pinus No.8, RT.01/RW.05, Situgede, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16115, Indonesia	1	5	93	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	194,042,789	194,042,789	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Supriyanto	Pembangunan TPT Permukiman	pengajuan pembangunan TPT	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Malabar Gg Mexindo RT 001 Rw 05	1	5	161	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	619,238,677	619,238,677	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
SURYANTO	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Kp.Babakan RT.04/RW.11, Bubulak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16115, Indonesia	4	11	400	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	
Syaiful B. Ismail	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perbaikan Jalan Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Komplek Selakopi Hijau Blok D14, RT.05/RW.06, Pasirmulya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16118	5	6	1100	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	196,522,360	196,522,360	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Syarifudin	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT menggunakan Batu Kali	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Pabuaran,RT.01/RW.06, Cilendek Timur, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16111, Indonesia	1	6	60	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	104,914,575	104,914,575	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
tatangsuhendar	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	8RRJ+PPW, RT.01/RW.06, Kertamaya, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16138, Indonesia	1	6	90	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	198,827,088	198,827,088	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
TB. ADANG RACHMAT JP RW 05 Sempur	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Pemukiman	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Lebak Kantin No.1 (tangga yunsin) RT.03/RW.05, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	3	5	120	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	403,851,311	403,851,311	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Teddy	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Lawang Gintung No.50, RT.01/RW.04, Lawanggintung, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16134, Indonesia	1	4	200	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	185,496,963	185,496,963	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
TONNY SOELISTYO WAHYUDIN	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Permohonan perbaikan jalan di wilayah RT.05/RW.14	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jalan Samiaji IV .RT 05/RW.14, Bantarjati, Kel. Bantarjati ,Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153, Indonesia	5	14	350	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	62,529,842	62,529,842	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
ujang abdurahman	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Pabuaran Pamoyanan Blok Masjid, RT.001/RW.011, Pamoyanan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16136, Indonesia	1	11	1200	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	162,817,409	162,817,409	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
UKAT ENDIH	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan.	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Gg. Sempurna No.17, RT.05/RW.06, Kp. Parung Jambu, Batutulis, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16133, Indonesia	5	6	450	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	8,039,551,105	80,395,511	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
UKAT ENDIH	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Lawang Gintung No.67, RT.01/RW.06, Batutulis, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16133, Indonesia	1	6	120	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	17,638,552	17,638,552	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Upang Supardi	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pengajuan pembangunan jalan lingkungan	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Kp. Tajur Rt. 004/006 Kel. Pakuan Kec. Kota, RT.04/RW.06, Pakuan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16134, Indonesia	4	6	1000	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	152,871,381	152,871,381	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Usep Darussalam	Pembangunan Drainase Lingkungan	Sering Terdampak Banjir	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	9R94+76J, RT.01/RW.02, Ranggamekar, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16136, Indonesia	1	2	200	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	185,496,963	185,496,963	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Wariyono Ketua Rw. 008	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan drainase lingkungan di wilayah RT.05-06/ RW.08 Kel. Kebon Pedes.	Fisik	KEC. TANAH SAREAL	Jl. Manunggal Jaya Blok Juana, RT.05/RW.08, Kb. Pedes, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162, Indonesia	5	8	190	M1	Dinas Perumahan dan Permukiman	176,222,115	176,222,115	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
wari_rw	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan saluran air RT 1, RT 2, RT 3 dan RT 4	Fisik	KEC. BOGOR TIMUR	9RFJ+F4P, RT.01/RW.14, Katulampa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16144, Indonesia	1	14	200	m	Dinas Perumahan dan Permukiman	218,804,100	218,804,100	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Wartono, S.Pd.I	Pemeliharaan TPT Permukiman	Pembangunan TPT Permukiman	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Raya Gn. Batu No.58, RT.02/RW.02, Gunungbatu, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16118, Indonesia	2	2	96	M3	Dinas Perumahan dan Permukiman	192,260,437	192,260,437	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
WAWAN BAHTIAR	Pembangunan Jembatan Permukiman	Pembangunan jembatan	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Kp. Bubulak RT. 03 RW. 07 Kel. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor	3	7	30	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	155,849,477	155,849,477	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
WAWAN MULYANA	Pembangunan TPT Permukiman	AKIBAT TANAH LONGSOR	Fisik	KEC. BOGOR TENGAH	Jl. Cimanggu Kecil Blok Aster No.20, RT.02/RW.07, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	2	7	92.4	m3	Dinas Perumahan dan Permukiman	321,956,923	321,956,923	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Wawan Sumantri	Pembangunan Drainase Lingkungan	Dampak dari Usulan ini dapat mengurai debit Air dan rumah warga tidak akan kebanjiran lagi	Fisik	KEC. BOGOR SELATAN	Jl. Cipinang Gading Blok Masjid No.52, RT.02/RW.04, Ranggamekar, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16136, Indonesia	2	4	120	M	Dinas Perumahan dan Permukiman	172,823,262	172,823,262	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
WIWIN JAENUDIN	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan drainase	Fisik	KEC. BOGOR UTARA	Jl. Ciremei Ujung No.10, RT.03/RW.13, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153, Indonesia	3	13	215	M1	Dinas Perumahan dan Permukiman	199,409,236	199,409,236	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
yana konfiana	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perbaikan jalan menggunakan Paving Block.	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Gg. Sirna Galih, RT.01/RW.07, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117	1	7	450	M2	Dinas Perumahan dan Permukiman	167,459,202	167,459,202	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
YAYAN SOFHYAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Pembangunan Balai Warga	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Kebun Raya Residence RT.01/RW.09, Kel. Pasir Kuda, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Indonesia	1	9	600	M2	Dinas Perumahan	-		

										dan Permukiman			
Yudha	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase menggunakan U-Ditch 30x40	Fisik	KEC. BOGOR BARAT	Jl. Cilendek Blok Istiqomah No.76, RT.1/RW.04, Cilendek Timur, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	1	4	81	M1	Dinas Perumahan dan Permukiman	74,996,960	74,996,960	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

RENCANA PSU HUNIAN 2024	PERBAIKAN JALAN		DRAINASE		TPT		JPO		JUMLAH TOTAL	
LOKASI	JUMLAH PAKET	NILAI ANGGARAN	JUMLAH PAKET	NILAI ANGGARAN	JUMLAH PAKET	NILAI ANGGARAN	JUMLAH PAKET	NILAI ANGGARAN	JUMLAH PAKET	NILAI ANGGARAN
INFRASTRUKTUR PERKMUKIMAN									**688**	
KOTA BOGOR	**282**	**33.109.923.305**	**128**	**20.285.175.516**	**161**	**27.237.733.412**	**13**	**2.048.499.745**	**584**	**82.681.331.978**
Pokir - PL	268	32.297.922.385	126	20.035.165.620	61	10.636.431.667	3	401.013.731	**458**	63.370.533.403
Pokir - Lelang					2	700.005.740			**2**	700.005.740
Pokir - KDP	2	250.001.445							**2**	250.001.445
Musrenbang					10	1.992.852.834			**10**	1.992.852.834
Musrenbang - Lelang					2	699.850.410			**2**	699.850.410
Usdis PL	5	100.001.045	2	250.009.896	38	3.385.617.060	9	1.097.444.033	**54**	4.833.072.034
Usdis - KDP	7	461.998.430							**7**	461.998.430
Usdis - /Lelang Prioritas					1	177.941.610	1	550.041.981	**2**	727.983.591
Usdis - /Lelang (WAWALI)					1	500.007.270			**1**	500.007.270
BTT Pasca Bencana (Pergeseran 2)					31	5.847.891.449			**31**	5.847.891.449
BTT Pasca Bencana (Pergeseran 3)					15	3.297.135.372			**15**	3.297.135.372
JUMLAH KONSTRUKSI INFRASTRUKTUR	**282**	**33.109.923.305**	**128**	**20.285.175.516**	**161**	**27.237.733.412**	**13**	**2.048.499.745**	**584**	**82.681.331.978**

PAKET PEKERJAAN STRATEGIS KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
9	Pembangunan Taman Lapangan Genteng	APBD Kota Bogor	Rp2.666.705.403,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Taman Lapangan Genteng		Rp169.770.000,00	

Berdasarkan Keputusan Walikota nomor : 000.3/Kep.332-Bag.PBJ/2023 tanggal 24 November 2023 ditetapkan paket pekerjaan strategis pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kualitas rencana pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan di sektor wilayah, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2024, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goal's* (SDGs).

Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2024, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kota diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 Kota Bogor memiliki Visi*: "Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga"."* Kemudian diturunkan menjadi 3 (tiga) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat.
2. Mewujudkan Kota Bogor Cerdas.
3. Mewujudkan Kota Bogor Sejahtera.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor adalah sebagai Perangkat Daerah yang Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor menjalankan misi ke-satu Kota Bogor, yaitu "Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat", menjalankan misi ke-dua yaitu " Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas "dan menjalankan misi ke-tiga Kota Bogor yaitu "Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera". Demi terwujudnya Visi Misi Kota Bogor dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 serta untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, Dalam mendukung visi Kota Bogor tersebut Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor menjabarkan dalam 3 tujuan, 3 sasaran strategis dan 5 indikator sasaran strategis.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor

Misi 1	**Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat**
Tujuan 1 RPJMD	Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas
Indikator Tujuan 1 RPJMD	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara
Sasaran 3 Tujuan 1 RPJMD	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman
Indikator Sasaran 3 Tujuan 1 RPJMD	Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan Kota
Tujuan Renstra	Lingkungan Sehat Perumahan
Indikator Tujuan Renstra	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Kota
	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Propinsi
	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Pusat
	Persentase Jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik
Sasaran 6 Tujuan 1 RPJMD	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan
Indikator Sasaran 6 Tujuan 1 RPJMD	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik
Tujuan Renstra	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Indikator Tujuan Renstra	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)
	Luas RTH Publik yang terkelola dengan baik (Ha
Tujuan Renstra	Pengelolaan Areal Pemakaman
Indikator Tujuan Renstra	Luas TPU Hijau yang terkelola dengan baik (Ha)
Misi 2	**Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**

Tujuan 2 RPJMD	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government),
Indikator Tujuan 2 RPJMD	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 1 Tujuan 2 RPJMD	Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
Indikator Sasaran 1 Tujuan 2 RPJMD	Indeks Reformasi Birokrasi
Tujuan Renstra	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
Indikator Tujuan Renstra	Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN Tujuan 2 RENSTRA	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah
Indikator Sasaran Tujuan 2 Renstra	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Kecamatan
Misi 3 Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera	
Tujuan 1 RPJMD	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
Indikator Tujuan 1 RPJMD	Indeks Gini Rasio Indeks Kebahagiaan
Sasaran 2 Tujuan 1 RPJMD	Menurunnya tingkat kemiskinan
Indikator Sasaran 2 Tujuan 1 RPJMD	Angka Kemiskinan
Tujuan Renstra	Lingkungan Sehat Perumahan
Indikator Tujuan Renstra	Persentase RTLH
Tujuan Renstra	Lingkungan Sehat Perumahan
Indikator Tujuan Renstra	Persentase Rumah Layak Huni
Tujuan Renstra	Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan
Indikator Tujuan Renstra	Persentase peningkatan jumlah hunian rusunawa
IKU	
Terwujudnya lingkungan sehat perumahan dan kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota
Terwujudnya pemerataan akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni	Persentase Rumah Layak Huni
Terwujudnya ruang-ruang terbuka hijau publik yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi
Misi 2	Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas
Tujuan 2 RPJMD	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government),
Indikator Tujuan 2 RPJMD	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 1 Tujuan 2 RPJMD	Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
Indikator Sasaran 1 Tujuan 2 RPJMD	Indeks Reformasi Birokrasi
Tujuan Renstra	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
Indikator Tujuan Renstra	Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN Tujuan 2 RENSTRA	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah
Indikator Sasaran Tujuan 2 Renstra	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Kecamatan
Misi 3	Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Tujuan 1 RPJMD	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
Indikator Tujuan 1 RPJMD	Indeks Gini Rasio Indeks Kebahagiaan
Sasaran 2 Tujuan 1 RPJMD	Menurunnya tingkat kemiskinan
Indikator Sasaran 2 Tujuan 1 RPJMD	Angka Kemiskinan
Tujuan Renstra	Lingkungan Sehat Perumahan
Indikator Tujuan Renstra	Persentase RTLH
Tujuan Renstra	Lingkungan Sehat Perumahan
Indikator Tujuan Renstra	Persentase Rumah Layak Huni
Tujuan Renstra	Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan
Indikator Tujuan Renstra	Persentase peningkatan jumlah hunian rusunawa
IKU	
Terwujudnya lingkungan sehat perumahan dan kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota
Terwujudnya pemerataan akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni	Persentase Rumah Layak Huni
Terwujudnya ruang-ruang terbuka hijau publik yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dirumuskan rencana program dan kegiatan Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada program ini terdapat 8 kegiatan dan 19 Sub kegiatan. Rinciannya sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan:
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan:
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, sub kegiatan:
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan:
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

e. Kegiatan Administrasi Umum, sub kegiatan:
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan :
   - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Perumahan pada program ini terdapat 3 kegiatan dan 9 Sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, sub kegiatan sebagai berikut:
      - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani

- Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
- Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, sub kegiatan sebagai berikut:
   - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
   - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, sebagai berikut:
   - Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
   - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
   - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

3. Program Kawasan Permukiman, pada program ini terdapat 2 kegiatan dan 4 Sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sub kegiatan sebagai berikut:
      - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
      - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh

   b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sub kegiatan sebagai berikut:
      - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
      - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan :
   a. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan :
   a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, sub kegiatan sebagai berikut :
      - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
      - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
      - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan :
   a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, sub kegiatan sebagai berikut :
      - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
      - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
      - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
      - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
      - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini akan menjabarkan program, kegiatan, indikator kinerja beserta target dari masing-masing indikator dan juga pagu indikatif dari masing-masing kegiatan serta prakiraan maju tahun selanjutnya. Tabel pada bab ini disajikan berdasarkan hasil input dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dimana program dan kegiatan sesuai Perda Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 telah dilakukan pemetaan berdasarkan nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 050-5889 tahun 2021. Rinciannya sebagai berikut:

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			Nasional
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							273,990,511,228	180,436,402,541	200,670,936,604			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							242,332,930,944	163,726,837,345	185,646,047,871			
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							242,332,930,944	163,726,837,345	185,646,047,871			
100	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah				3.50 A Poin	3.57 Poin A Poin	38,781,859,529	40,838,131,381	41,482,330,383			
	1	*04*	*01*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah*	-			*A Nilai*	*A Nilai*	*107,142,220*	*107,142,220*	*107,142,220*			*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5,152,800.00	5,152,800.00	5,152,800	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	98,839,420.00	98,839,420.00	98,839,420	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	*04*	*01*	*2.02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase pemenuhan adminstrasi dan laporan keuangan perangkat daerah*	-			*100 %*	*100 %*	*14,423,617,138*	*14,415,110,786*	*15,314,508,688*			*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	14,297,026,238.00	14,288,519,886.00	15,187,917,788	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,259,600.00	1,259,600.00	1,259,600	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	125,331,300.00	125,331,300.00	125,331,300	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	*04*	*01*	*2.03*		*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase tercatatnya Barang Milik daerah Sesuai Kebutuhan*	-			*100 %*	*100 %*	*279,622,800.00*	*279,622,800.00*	*0*			*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	279,622,800.00	279,622,800.00	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	*04*	*01*	*2.05*		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah*	-			*100 %*	*100 %*	*156,338,500*	*156,338,500*	*156,338,500*			*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	156,338,500.00	156,338,500.00	156,338,500	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	*04*	*01*	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Prosentase pemenuhan bahan dan peralatan pendukung pelayanan administrasi perangkat daerah*	-			*100 %*	*100 %*	*975,792,100*	*662,768,000*	*481,650,000*			*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,987,500.00	11,987,500.00	11,987,500	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	174,217,800.00	174,217,800.00	174,217,800	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40,428,800.00	40,428,800.00	40,428,800	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	87,449,900.00	84,836,900.00	84,836,900	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	72,000,000.00	0	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	589,708,100.00	351,298,000.00	170,179,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*

	1	***04***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daearh***	-			***100 %***	***100 %***	***1,185,009,800***	***1,376,332,124***	***1,880,125,024***			*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*	
	1	04	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1,185,009,800.00	1,376,332,124.00	1,376,332,124	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*	
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				37 Unit	37 Unit	576.528.700,00	503.792.900,00	503,792,900	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*	
	1	***04***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor***	-			***100 %***	***100 %***	***16,627,784,671***	***18,998,031,151***	***18,699,781,151***			*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*	
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,087,082,315.00	1,081,082,315.00	1,081,082,315	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*	
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15,540,702,356.00	17,916,948,836.00	17,618,698,836	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*	
	1	***04***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berkondisi baik***	-			***100 %***	***100 %***	***5,026,552,300***	***4,842,784,800***	***4,842,784,800***			*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*	
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				115 Unit	115 Unit	4,440,340,100.00	4,320,112,600.00	4,320,112,600	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*	
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				138 Unit	138 Unit	226,120,000.00	162,580,000.00	162,580,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*	
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	360,092,200.00	360,092,200.00	360,092,200	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*	

101	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah rekomendasi teknis pendukung kebijakan yang dikeluarkan Persentase tingkat hunian rumah susun Persentase penyediaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota				1 Dokumen 90,00 % 95,00 %	1 Dokumen 90,00 % 100,00 %	11,268,745,594	6,336,685,880	5,247,333,354			
	1	*04*	*02*	*2.01*		*Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase pemenuhan penyediaan data rumah korban bencana yang akan direhabilitasi atau direlokasi*	-			*100 %*	*100 %*	*292,577,700*	*292,577,700*	*292,577,700*			*Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayana Dasar*
	1	04	02	2.01	0003	Pensurnsukan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani												
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	97,525,900.00	97,525,900.00	97,525,900	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana												
							Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	97,525,900.00	97,525,900.00	97,525,900	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota												
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	97,525,900.00	97,525,900.00	97,525,900	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
	1	*04*	*02*	*2.03*		*Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diintervensi oleh Pemerintah*	-			*95.00 %*	*95.00 %*	*4,698,881,094*	*1,496,646,680*	*952,268,654*			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana												
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				50 Unit Rumah	50 Unit Rumah	1,005,137,500.00	0	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
	1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota												
							Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				25 Unit Rumah	25 Unit Rumah	3,693,743,594.00	1,896,646,680.00	952,268,654	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
	1	*04*	*02*	*2.05*		*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	*Persentase pemenuhan pelayanan administrasi rusunawa Kota Bogor*	-			*100 %*	*100 %*	*6,230,286,900*	*4,100,461,600*	*4,000,461,100*			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun												
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	1 Laporan	1,204,382,400.00	358,725,800.00	358,725,800	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus												
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				2 Dokumen	2 Dokumen	5,025,904,500.00	3,741,735,800.00	3,641,735,300	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
	1	*04*	*02*	*2.06*		*Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*	*Jumlah rekomendasi teknis yang dikeluarkan*	-			*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*46,999,900*	*46,999,900*	*2,025,900*			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan												
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	46,999,900.00	46,999,900.00	2,025,900	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
102	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Kumuh yang belum				192,24 Ha	192,24 Ha	8,373,903,400.00	5,207,549,800.00	4,984,132,900			

	1	*04*	*03*	*2.02*		*Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha (kewenangan kota) yang belum ditangani*	-			*192,24 %*	*192,24 %*	*133,283,000.00*	*133,283,000.00*	*133,283,000*			Memperkuat I Untuk Mendukı Pengembanga Dan Pelayana
	1	04	03	2.02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh												
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	77,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat I Untuk Mendukı Pengembanga Dan Pelayana
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh												
							Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	56,283,000.00	56,283,000.00	56,283,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat I Untuk Mendukı Pengembanga Dan Pelayana
	1	*04*	*03*	*2.03*		*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani*	-			*20.52 Ha*	*20.52 Ha*	*8,240,620,400*	*5,074,266,800*	*4,850,849,900*			Memperkuat I Untuk Mendukı Pengembanga Dan Pelayana
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh												
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	97,000,000.00	97,000,000.00	97,000,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat I Untuk Mendukı Pengembanga Dan Pelayana
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh												
							Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				20.52 Ha	20.52 Ha	8,143,620,400.00	4,977,266,800.00	4,753,849,900	Kota Bogor, Bogor Barat Cilendek timur Kota Bogor, Bogor Barat, curug mekar Kota Bogor, Bogor Barat Pasir Kuda Kota Bogor, Bogor Barat balumbang jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Sindangbarang Kota Bogor, Tanah Sareal sukadamai Kota Bogor, Bogor Tengah, Panaragan Kota Bogor, Bogor Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat I Untuk Mendukı Pengembanga Dan Pelayana

103	1	04	04			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**				**82,74 %**	**92.91%**	**54,823,736,000**	**29,048,527,000**	**33,980,562,000**			
	1	***04***	***04***	***2.01***		***Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase RTLH yang diintervensi pemerintah***	-			***17.26 %***	***17.26 %***	***54,823,736,000***	***29,048,527,000***	***33,980,562,000***			*Memperkuat Infrastruktur untu Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasa*
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha												
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				4500 Unit Rumah	4628 Unit Rumah	54,823,736,000.00	29,048,527,000.00	33,980,562,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
104	1	04	05			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Makam Umum per satuan Penduduk** **Persentase Perumahan dan permukiman dengan PSU yang berkondisi baik**				**11,38 %** **89,69 %**	**11,38 %** **89,69 %**	**129,084,686,421**	**82,295,943,284**	**99,951,689,234**			
	1	***04***	***05***	***2.01***		***Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan***	***Persentase Lingkungan perumahan dan permukiman Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU*** ***Persentase Makam Umum per satuan Penduduk***	-			***89,69 %*** ***11,38 %***	***89,69 %*** ***11,38 %***	***129,084,686,421***	***82,295,943,284***	***99,951,689,234***			***Memperkuat Infrastruktur Un Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pe Dasar***
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	97,525,900.00	92,025,900.00	92,025,900	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infra Untuk Mendukung Pengembangan E Dan Pelayanan D
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian												
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				500 Lokasi	500 Lokasi	128,844,900,521.00	82,061,757,384.00	99,717,503,334	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infra Untuk Mendukung Pengembangan E Dan Pelayanan D
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan												
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				7 Laporan	7 Laporan	142,260,000.00	142,160,000.00	142,160,000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infra Untuk Mendukung Pengembangan E Dan Pelayanan D

	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							31,657,580,284	16,709,565,196	15,024,888,733				
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							31,657,580,284	16,709,565,196	15,024,888,733				
105	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha) Luas RTH Publik yang terkelola dengan baik (Ha)				0,80 Ha 47,29 Ha	1,01 Ha 48,97 Ha	31,657,580,284	16,709,565,196	15,024,888,733				
	2	*11*	*04*	*2.01*		*Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*	*Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan RTHP dan Taman Kehati lainnya* *Luas RTH Publik dan taman kehati lainnya yang berkondisi baik* *Luas RTH Publik dan taman kehati lainnya yang terbangun* *Persentase sarana prasarana penunjang pengelolaan RTHP dan taman kehati lainnya berkondisi baik*				*200 orang* *47,29 Ha* *2,12 Ha* *100 %*	*200 orang* *48,97 Ha* *1,01 Ha* *100 %*	*31,657,580,284*	*16,709,565,196*	*15,024,888,733*			*Membangun Lingkungan Hidu Meningkatkan Ketahanan Benc dan Perubahan I*
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati													
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				5 Dokumen	3 Dokumen	1,384,999,900.00	599,925,600.00	298,637,700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Ik*
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				46,89 Ha	48,97 Ha	11,507,049,962.00	5,448,588,853.00	4,810,899,316	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim*
	2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati													
							Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				200 Orang	150 Orang	266,462,500.00	190,116,500.00	112,009,300	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim*
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				30 Unit	30 Unit	4,100,207,922.00	3,004,834,000.00	3,151,929,300	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim*
	2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya													
							Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Unit	9 Unit	14,398,860,000.00	7,466,100,243.00	6,651,413,117	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim*

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2024 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**,** yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama tahun 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2024, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2024 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bogor.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 merupakan bentuk implementasi pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas berpedoman pada RKPD Kota Bogor Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor untuk periode perencanaan pembangunan Tahun 2019-2024,sehingga sebagai dasar acuan adalah RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 serta RKPD Perubahan Kota Bogor Tahun 2024.

Secara umum, substansi Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang disusun berisi prioritas program dan kegiatan yang merupakan hasil dari pendekatan perencanaan teknokratik, *bottom up* dan *top down* yang dihimpun secara partisipatif dan politis serta melalui proses sinkronisasi dalam Forum Perangkat Daerah. Dengandemikian, berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan daerah, Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dalam tahapan penganggaran sampai ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Kota Bogor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Bogor Tahun 2024.

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Pakaian Aparatur Pemadam Kebakaran;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/permen/1980 tentang Syarat- syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;

12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186/kepmen/ 1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Ketentuan- ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Bogor Tahun 2019 - 2024;

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PembentukanDan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Walikota Bogor Nomor 177 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran.

17. Peraturan Walikota Bogor Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KotaBogor Tahun 2024 adalah dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2019 - 2024 dan hubungannya dengan RKPD Kota Bogor. Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Bogor.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahun 2024;
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan/sasaran dan indikator- indikatornya selama 1 tahun oleh SKPD;
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/ kebijakan tugas- tugas sesuai dengan kewenangannya;
4. Memberi arah dan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pemimpin dan staf, agar melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab;
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD tahun lalu

Berdasarkan amanat konstitusi, salah satu tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa. Secara implisit berarti menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk rasa aman dari bencana kebakaran. Sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor yang sangat sentral yaitu memberikan pelayanan yang sangat urgent dan tidak bisa ditiadakan. Petugas teknis lapangan atau lebih sering disebut Pasukan Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor merupakan ujung tombak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pasukan inilah yang secara langsung akan dinilai masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan, apakah pelayanan yang diberikan sudah optimal atau belum. Petugas teknis lapangan ini juga yang membangun stigma pada masyarakat terhadap kualitas pelayanan kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan karena petugas teknis lapanganlah yang menentukan baik atau buruknya kualitas pelayanan yang diberikan. Institusi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu organisasi publik yang melayani masyarakat selama 1 x 24 jam sama halnya seperti institusi TNI-POLRI dan Pelayanan Rumah Sakit.

Bagi institusi pemadam kebakaran dan penyelamatan tidak mengenal hari libur, baik hari minggu, tanggal merah, ataupun hari besar keagamaan seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan hari natal. Guna untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas maka diwajibkan kepada seluruh anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan di Indonesia termasuk di Kota Bogor agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jam kerja 1x24 jam ini merupakan sebuah konsekuensi logis apabila seseorang memutuskan untuk menjadi seorang Ksatria Biru atau pasukan Yudha Brama Jaya atau yang lebih popular dengan sebutan anggota pemadam kebakaran. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor hingga akhir tahun 2021

masih bergabung satu atap dengan kantor Satpol PP dalam melaksanakan kegiatannya.

Rencana Program Kerja Perubahan tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor yang sifatnya supporting program terhadap program utama. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

No.			**Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif Tahun 2024 (Perubahan)**	**Keterangan**
1.			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Rp.15.169.006.203,-**	
	1.1		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Rp.9.168.400**,-	
		a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.9.168.400,-	
		b.	Koordinasi dan Penyampaian LaporanCapaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Tidak dianggarkan
	1.2		Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	**Rp.13.163.938.925,-**	
		a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.13.110.658.925,-	
		b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp.53.280.000,-	
	1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rp.118.599.500,-**	
		a.	Pengadaan Pakaian Dinas BesertaAtribut kelengkapannya	Rp.118.599.500,-	
	1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp.379.320.900.-**	
		a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.40.151.500.-	
		b.	Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Tidak dianggarkan
		c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.23.306.400,-	
		d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.28.515.000,-	
		e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Tidak dianggarkan
		f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Rp.287.348.000,-	
		g.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Tidak dianggarkan
	1.5		Pengadaan BMD Penunjang UrusanPemerintah Daerah	**Rp.59.263.500,-**	Tidak dianggarkan
		a.	Pengadaan Mebel	-	Tidak dianggarkan
		b.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	Tidak dianggarkan
		c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.59.263.500,-	
	1.6		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	**Rp.1.287.816.378,-**	

		a.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.101.986.290,-	
		b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1.185.830.088,-	
	1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp.1.508.986.000**,-	
		a.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinasjabatan	Rp.1.111.480.000,-	
		b.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.0,-	Tidak dianggarkan
		c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.38.720.000,-	
		d.	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	-	Tidak dianggarkan
		e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.358.786.000,-	
2.			**PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Rp.970.087.800**,-	
	2.1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Rp.276.477.800,-**	
		a.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Tidak dianggarkan
		b.	Pemadaman dan PengendalianKebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Tidak dianggarkan
		c.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	-	Tidak dianggarkan
		d.	Penanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Tidak dianggarkan
		e.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	Tidak dianggarkan
		f.	Pengadaan Sarana dan PrasaranaPencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan APD	Rp.105.279.300,-	
		g.	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Rp.171.198.500,-	
		h.	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan(SKIK)	-	Tidak dianggarkan
		i.	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalamPencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	Tidak dianggarkan

	2.2		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	
		a.	Pendataan Sarana Prasarana ProteksiKebakaran	-	Tidak dianggarkan
		b.	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Tidak dianggarkan
	2.3		Investigasi Kejadian Kebakaran	-	Tidak dianggarkan
		a.	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian PenyebabKejadian Kebakaran	-	Tidak dianggarkan
	2.4		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Rp. 492.054.800,-**	
		a.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp. 269.999.700,-	
		b.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp. 123.081.100,-	
		c.	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Rp. 98.974.000,-	
	2.5		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap KondisiMembahayakan Manusia	**Rp. 201.555.200,-**	
		a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadapKondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Rp. 201.555.200,-	
		b.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadapKondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	-	Tidak dianggarkan
		c.	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	Tidak dianggarkan

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Walikota Bogor Nomor 177 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan **urusan pemerintahan bidang tramtibumlinmas sub urusan kebakaran** yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sedangkan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, dan Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemadam Kebakaran;
h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
i. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas danfungsinya.

Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a) Keterbatasan sarana, prasarana dan SDM, sehingga sulit untuk mewujudkan kondisi yang ideal dalam mengelola wilayah manajemen kebakaran;

b) Penambahan fungsi penyelamatan belum diimbangi dengan kualitas standar kompetensi SDM maupun peralatan penyelamatan guna pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

c) Infrastruktur Daerah yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran, hidran kota tidak berfungsi, sumur pemadam yang kondisi air belum memenuhi kebutuhan serta kondisi jalan yang sempit, bak tandon yang jumlahnya belum sesuai yang diharapkan;

d) Belum lengkapnya sarana dan perlengkapan di pos induk maupun pos pembantu serta rusaknya peralatan pemadam yang tidak sebanding dengan pengadaan baru berdampak pada kurang optimalnya kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan;

e) Belum lengkapnya sarana dan perlengkapan di pos induk maupun pos pembantu serta rusaknya peralatan pemadam yang tidak sebanding dengan pengadaan baru berdampak pada kurang optimalnya kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan;

f) Masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan Perda Nomor 2 tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kotamadya Dati II Bogor, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana;

g) Koordinasi antar instansi terkait belum efektif.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada, maka sasaran/target yang akan dicapai selama 1 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran melalui :

   - Kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran (warga di tingkat Kelurahan, instansi pemerintah, siswa sekolah dan pasar di Kota Bogor);

   - Pengembangan dan Pemberdayaan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang sudah dan akan dibentuk di tingkat Kelurahan sebanyak 68 kelompok REDKAR di Kota Bogor;

2. Meningkatkan pengawasan dalam pemasangan instalasi proteksi kebakaran pada bangunan, mulai dari gambar rencana pemasangan, proses pembangunan, sampai pada kelayakan operasional setelah instalasi proteksi kebakaran tersebut terpasang;

3. Melaksanakan pengkajian lebih mendalam sesuai peraturan perundang- undangan dalam memeriksa sarana dan prasarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung melalui kegiatan koordinasi perijinan dan pemanfaatan gedung;

4. Mengeluarkan surat rekomendasi pemasangan sarana proteksi kebakaranyang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bangunan tinggi, sedang, vital, dan industri sebagai persyaratan IMB, Ijin gangguan (HO),dokumen UKL UPL/AMDAL dll;
5. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran melalui kegiatan Gladi Lapang Menghadapi Musim Kemarau;
6. Meningkatkan keterampilan dan keahlian personil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor dengan cara:
   - Mengikutsertakan personil aparatur pemadam mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar kualifikasi;
   - ♣ Mengikutsertakan personil aparatur pemadam untuk mengikuti lomba ketrampilan pencegahan bahaya kebakaran baik ditingkat Propinsi maupunNasional.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan pengadaan peralatan PMK berupa Pompa Portabel, Flashlight dan pengadaan APD berupa masker, baju tahan panas, breathing apparatus dan kaos tangan kebakaran.
8. Melakukan pendataan dan pelaporan secara rutin kejadian kebakaran di KotaBogor

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menentukan usulan program dan kegiatan untuk bahan penyusunan Renja-SKPD, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang ataupun Pokok-pokok Pikiran DPRD. Berdasarkan hasil Musrenbang dan Pokir, usulan kegiatan masyarakat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa:

a) Pelatihan cara mengatasi kebakaran; dan

b) Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran.

c) Bantuan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (APAR, PompaPortable, Pompa Apung dan Peralatan lainnya.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD) disusun berdasarkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Namun berdasarkan pagu indikatif yang diterima Dinas Pemadam Kebakaran dan berdasarkan permasalahan yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta alokasi anggaran terdapat kekurangan anggaran untuk

kebutuhan pembayaran Gaji dan tunjangan yang dipandang perlu dan mendesak maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rancangan Awal RKPD. Beberapa kegiatan yang mengalami perubahan antara lain :

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp.10.830.935.327,-** mengalami perubahan anggaran menjadi **Rp.13.163.938.925,-**

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp.586.777.800,-** mengalami perubahan anggaran menjadi **Rp. 379.320.900,-**

c) Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp.567.229.900,-** mengalami perubahan anggaran menjadi **Rp.59.263.500,-**

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp.1.311.430.160,-** mengalami perubahan anggaran menjadi **Rp.1.287.816.378,-**

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp.1.585.392.400,-** mengalami perubahan anggaran menjadi **Rp.1.508.986.000,-**

f) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dari sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp.2.069.250.800,-** mengalami perubahan anggaran menjadi **Rp.276.477.800,-**

g) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dari sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp.622.294.400,-** mengalami perubahan anggaran menjadi **Rp.492.054.800,-**

h) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dari sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp.370.486.500,-** mengalami perubahan anggaran menjadi **Rp.201.555.200,-**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Nihil

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis stratejik. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang akan dicapai adalah:

a. Terwujudnya kemampuan SDM (*Human Resources Capability*) yang profesional.

b. Terwujudnya peningkatan pelayanan Penanggulangan bencana kebakaran danbencana lain

c. Terwujudnya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencanalainnya yang memadai.

d. Terinventarisasinya data daerah rawan kebakaran.

e. Berupaya meningkatkan kenyamanan dan kelancaran tugas di tempat bekerja.

f. Terwujudnya Peraturan Daerah (bidang kebakaran dan bidang bencana) tentangpenanggulangan bahaya kebakaran.

g. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran.

h. Terwujudnya kerja sama antar instansi terkait dalam penanggulangan bahayakebakaran.

Sasaran Kota Bogor sebagai Kota Jasa mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga permasalahan kebakaran dan bencana diperlukan penanganan profesional (cepat dan tepat) agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar baik harta maupun jiwa. Untuk itu menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat kota Bogor untuk menciptakan rasa aman, ketentraman, tertib, teratur dengan dilandasi dengan kesadaran tinggi, menuju berlangsungnya seluruh aktifitas pembangunan dan melindungi hasil pembangunan maupun aset pemerintah Kota Bogor baik sebelum, sedang berlangsung maupun pasca pembangunan. Usaha- usaha yang akan dilakukan untuk memenuhi sasaran tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
2. Mengembangkan dan memberdayakan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di tingkat Kelurahan;
3. Meningkatkan pengawasan dalam pemasangan instalasi proteksi kebakaran padabangunan baru, mulai dari gambar rencana pemasangan, proses pembangunan, sampai pada kelayakan operasional setelah instalasi proteksi kebakaran tersebut terpasang;
4. Mengeluarkan surat rekomendasi pemasangan sarana proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, sedang, vital, dan industri sebagai persyaratan IMB, Ijin gangguan (HO), dokumen UKL UPL/AMDAL dll;
5. Mengurangi hambatan saat pelaksanaan pemadaman kebakaran, seperti: penertiban gapura, portal, patok, polisi tidur dll.
6. Mempertahankan respon time pertolongan kebakaran pada masyarakat 15 menit dengan cara pengajuan permohonan kepada instansi yang bersangkutan untuk penambahan pos pembantu, sarana dan prasarana, dan personil Dinas PemadamKebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor.
7. Meningkatkan keterampilan dan keahlian personil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor dengan cara mengikutsertakan dalam Diklat Kebakaran

Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, maka strategi pencegahan bahaya kebakaran diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran baik peningkatan kesiapsiagaan pada personil aparatur pemadam kebakaran maupun pada peningkatan kesiapsiagaan pada masyarakat Kota Bogor. Berdasarkan kebijakan strategi yang diterapkan dalam Rencana Strategis SKPD maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor membuat Rencana Program dan kegiatan di Perubahan tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

No.			**Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**
1.			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**
	1.1		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
	1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya
	1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		b.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.5		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		a.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
		b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATANKEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN**
	2.1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakarandan APD
		b.	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
	2.2		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

		a.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
		b.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
		c.	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
	2.3		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
		a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan pada Dinas Pemadam Kebakaran di tahun 2024

No.			Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Perubahan)	Keterangan
1.			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Rp.15.169.006.203,-**	
	1.1		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Rp.9.168.400**,-	
		a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.9.168.400,-	
		b.	Koordinasi dan Penyampaian LaporanCapaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Tidak dianggarkan
	1.2		Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	**Rp.13.163.938.925,-**	
		a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.13.110.658.925,-	
		b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp.53.280.000,-	
	1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rp.118.599.500,-**	
		a.	Pengadaan Pakaian Dinas BesertaAtribut kelengkapannya	Rp.118.599.500,-	
	1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp.379.320.900.-**	
		a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.40.151.500.-	
		b.	Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Tidak dianggarkan
		c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.23.306.400,-	
		d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.28.515.000,-	
		e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Tidak dianggarkan
		f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Rp.287.348.000,-	
		g.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Tidak dianggarkan
	1.5		Pengadaan BMD Penunjang UrusanPemerintah Daerah	**Rp.59.263.500,-**	Tidak dianggarkan
		a.	Pengadaan Mebel	-	Tidak dianggarkan

		b.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	Tidak dianggarkan
		c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.59.263.500,-	
	1.6		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	**Rp.1.287.816.378,-**	
		a.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.101.986.290,-	
		b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1.185.830.088,-	
	1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp.1.508.986.000**,-	
		a.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinasjabatan	Rp.1.111.480.000,-	
		b.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.0,-	Tidak dianggarkan
		c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.38.720.000,-	
		d.	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	-	Tidak dianggarkan
		e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.358.786.000,-	
2.			**PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Rp.970.087.800**,-	
	2.1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Rp.276.477.800,-**	
		a.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Tidak dianggarkan
		b.	Pemadaman dan PengendalianKebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Tidak dianggarkan
		c.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	-	Tidak dianggarkan
		d.	Penanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Tidak dianggarkan
		e.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	Tidak dianggarkan
		f.	Pengadaan Sarana dan PrasaranaPencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan APD	Rp.105.279.300,-	
		g.	Pembinaan Aparatur Pemadam	Rp.171.198.500,-	

			Kebakaran		
		h.	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan(SKIK)	-	Tidak dianggarkan
		i.	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalamPencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	Tidak dianggarkan
	2.2		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	
		a.	Pendataan Sarana Prasarana ProteksiKebakaran	-	Tidak dianggarkan
		b.	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Tidak dianggarkan
	2.3		Investigasi Kejadian Kebakaran	-	Tidak dianggarkan
		a.	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian PenyebabKejadian Kebakaran	-	Tidak dianggarkan
	2.4		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Rp. 492.054.800,-**	
		a.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp. 269.999.700,-	
		b.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp. 123.081.100,-	
		c.	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Rp. 98.974.000,-	
	2.5		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap KondisiMembahayakan Manusia	**Rp. 201.555.200,-**	
		a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadapKondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Rp. 201.555.200,-	
		b.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadapKondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	-	Tidak dianggarkan
		c.	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	Tidak dianggarkan

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BOGOR
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							18.072.105.187,00	16.168.444.437,00	17.480.536.403,00							24.611.035.318,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.072.105.187,00	16.168.444.437,00	17.480.536.403,00							24.611.035.318,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							18.072.105.187,00	16.168.444.437,00	17.480.536.403,00							24.611.035.318,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah				3,50 A Point Point	3,50 A Point Point	15.010.073.487,00	15.198.356.637,00	16.527.093.603,00							19.411.035.318,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			5 laporan	5 laporan	9.168.400,00	9.168.400,00	9.168.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan		10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	9.168.400,00	9.168.400,00	9.168.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	-			100 Persen N/A N/A	100 Persen	10.830.935.327,00	11.725.411.959,00	11.725.411.959,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11.533.327.318,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	73 Orang/bulan	10.777.258.727,00	11.672.131.959,00	13.110.658.925,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			11.283.327.318,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	53.676.600,00	53.280.000,00	53.280.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	-			90 Persen	90 Persen	118.599.500,00	118.599.500,00	118.599.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan		250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	118.599.500,00	118.599.500,00	118.599.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	-			90 Persen	90 Persen	586.777.800,00	412.450.900,00	412.450.900,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan		1.350.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	40.072.900,00	40.151.500,00	40.151.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi			600.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	63.814.900,00	36.306.400,00	23.306.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	99.990.000,00	32.115.000,00	28.515.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	382.900.000,00	303.878.000,00	287.348.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Dinas	-			90 Persen	90 Persen	567.229.900,00	59.263.500,00	59.263.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan		650.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	29 Unit	567.229.900,00	59.263.500,00	59.263.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi			650.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			90 Persen	90 Persen	1.311.430.160,00	1.287.816.378,00	1.287.816.378,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		2.200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	189.575.000,00	101.986.290,00	101.986.290,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.121.855.160,00	1.185.830.088,00	1.185.830.088,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Reformasi Birokrasi			2.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah lingkup perangkat Daerah berkondisi baik	-			90 Persen	90 Persen	1.585.932.400,00	1.585.646.000,00	1.585.646.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan		3.417.708.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				

								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	1.188.140.000,00	1.188.140.000,00	1.111.480.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			1.300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi			1.500.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	39.006.400,00	38.720.000,00	38.720.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	358.786.000,00	358.786.000,00	358.786.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi			557.708.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran Rata-Rata Respon time penanganan kebakaran				15 7,35 Menit %	7,35 15 % Menit	3.062.031.700,00	970.087.800,00	953.442.800,00							5.200.000.000,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-			30 orang	20 Orang	2.069.250.800,00	276.477.800,00	276.477.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan		4.050.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
								Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				30 Orang	30 Orang	203.503.700,00	171.198.500,00	171.198.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		

								Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	1 Unit	1.865.747.100,00	105.279.300,00	105.279.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			3.800.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran di Kelurahan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran di Kelurahan Terselenggaranya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	-			10 kelurahan 25 kelurahan	10 kelurahan 25 kelurahan	622.294.400,00	492.054.800,00	492.054.800,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan			750.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																				
						Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				100 Orang	85 Orang	269.999.800,00	269.999.700,00	269.999.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																				
						Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				68 Desa/Kelurahan	68 Desa/Kelurahan	252.794.600,00	123.081.100,00	110.561.100,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			75.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																				
						Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				12 Dokumen	9 Dokumen	99.500.000,00	98.974.000,00	98.974.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			375.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Barang milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	-			90 Persen	90 Persen	370.486.500,00	201.555.200,00	201.555.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kota Bogor		400.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				50 Unit	50 Unit	370.486.500,00	201.555.200,00	197.430.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			400.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	J U M L A H	18.072.105.187,00	16.168.444.437,00	17.480.536.403,00							24.611.035.318,00	

BAB V
PENUTUP

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor tahun 2024 dapat tersusun dan dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan di bidang kebakaran dan bencana lainnya. Untuk mencapai berbagai indikator sasaran pembangunan di bidang kebakaran dan bencana yang telah termuat di dalam Renja Perubahan ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan pembangunan bidang kebakaran dan bencana. Oleh karena itu Rencana Kerja Perubahan ini perlu disosialisasikan kepada *stakeholder* agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaannya.

Walaupun dalam Rencana Kerja Perubahan ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada berbagai kekurangan, mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat, kompleks, dan tidak menentu. Oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Rencana Kerja Perubahan ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan ini dapat dicapai melalui semangat pengabdian, kerjasama yang baik dan berkesinambungan yang saling menguatkan.

Dengan semangat pengabdian yang tinggi dan kerja keras kita semua, Insya Allah masyarakat Kota Bogor akan merasakan keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, karena apa yang kita harapkan tercipta dengan memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat terhadap bahayakebakaran dan bencana lainnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya serta semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, kesehatan, dan keselamatan pada kita semua.

W. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai Pedoman Kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam Perencanaan Tahunan yang Sifatnya Lebih Operasional.

Sebagai sebuah Dokumen Resmi Perangkat Daerah, Renja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang Strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai Implementasi Pelaksanaan Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan sangat ditentukan oleh Kualitas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Kota Bogor Tahun 2024 secara garis besar memuat Program Prioritas, Kegiatan yang akan di lakukan di 2024, Target Kinerja sampai Ahir RPJMD, Janji Politik yang belum tercapai dan Usulan Pagu untuk Program

Prioritas sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah Dokumen resmi, Renja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang Strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai Implementasi Pelaksanaan Strategis Jangka Menengah (RPJMD) Daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, serta digunakan sebagai Dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rencana Kerja Perubahan, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rencana Kerja dan Tahap Penetapan Renja Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor **Nomor 3 Tahun 2021** Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara republik Indoensia Tahun 2015 Nomr 58, Tambahan embaran Negara republik Indonesia Nomor 5679)

6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323;

13 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);.

22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi jawa barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 237);

23 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

24 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D;

25 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005– 2025 (Lembaran daerah kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

26 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

27 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;

28 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144;

29 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019– 2024 Kota Bogor (Lembar Daerah Kota Bogor Nomor 11 Seri E);

30 Peraturan Walikota Bogor Nomor 164 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;

31 Peraturan Walikota Bogor Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2024 untuk memberikan gambaran tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor selama Tahun 2024 berupa penjabaran dari Program Prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2019- 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2024 dan Perencanaan Program/Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuannya adalah sebagai Pedoman dalam melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 berupa Rencana Kinerja yang mencakup Rencana Capaian Kinerja Tahun 2024 untuk Program Prioritas, Target Kinerja sampai Ahir RPJMD, Janji Politik yang belum tercapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Perubahan DPMPTSP Kota Bogor Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan DPMPTSP Kota Bogor Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Bogor
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Bogor
- 2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Bogor
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA BOGOR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bogor

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA BOGOR

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor pada Tahun 2023 mengacu pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2024.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor133 tahun2021, tanggal 8 November 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor188 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor , Tahun 2023 mengelola anggaran sebesar **Rp. 14.423.015.770.-** ***(Empat Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah)*** sampai dengan Triwulan II Realisasi sebesar **Rp. 6.767.774.051.-** ***(Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Lima Puluh Satu Rupiah)*** atau sebesar **46.92 %.**

Evaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dimulai dengan Pengukuran Kinerja yang mencakup Penetapan Indikator Kinerja maupun Capaian Indikator dari 6 (Enam) Program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

A. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A	A	100
	Nilai Kata Rata Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.52	3.39	96.30

Program ini di Laksanakan melalui Kegiatan :

1. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

   Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi merupakan Kegiatan Rutin yang dilakukan setiap Tahun dengan Tujuan memberikan Arahan serta Acuan dalam Proses Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan/Evaluasi Kegiatan di Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, demi Tercapainya itu semua perlu dilaksanakan Sub Kegiatan :

   a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut :**

      Merupakan Sub Kegiatan yang bertujuan untuk

Menyusun Dokumen Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, secara Sistimatis dengan RPJMD Kota Bogor.

Output Sub Kegiatan ini :

- Tersusunnya Laporan Kinerja LKIP, DPMPTSP Kota Bogor.
- Tersusunnya Laporan Kinerja LKPJ, DPMPTSP Kota Bogor.
- Tersusunnya Laporan Kinerja LPPD, DPMPTSP Kota Bogor.
- Tersusunnya Laporan Kinerja RENJA, DPMPTSP Kota Bogor

- Tersusunnya Laporan Kinerja RENSTRA, DPMPTSP Kota Bogor
- Tersusunnya Laporan Kinerja PMPRB, DPMPTSP Kota Bogor
- Tersusunnya Laporan Kinerja MCP, DPMPTSP Kota Bogor
- Tersusunnya Laporan Kinerja STANDAR PELAYANAN, DPMPTSP Kota Bogor
- Tersusunnya Laporan Kinerja SOP, DPMPTSP Kota Bogor

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah, mempunyai Peranan yang Penting untuk Mengelola Penatausahaan Keuangan yang meliputi : Pengelolaan Kegiatan– kegiatan Keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah. Seluruh aktivitas Penatausahaan Keuangan akan diukur dari sisi Akuntabilitas Kinerjanya, yang meliputi Kinerja Instansi dan Kinerja Individu, dengan Sub Kegiatan:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkungan DPMPTSP Kota Bogor

Output Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah, merupakan Kegiatan yang Rutin, yang bersifat Wajib Mengikat, dan harus di Laksanakan setiap Tahunnya, demi tercapainya itu semua, perlu dalaksanakan Sub Kegiatan :

a. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut :

- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

b. **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Rumah Tangga pada DPMPTSP, guna meningkatkan Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas.

Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut :

- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
- Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dan Perlengkapan Dapur

c. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk Menunjang Pelaksanaan Pelayanan DPMPTSP terkait Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dengan menyediakan Bahan Logistik Kantor

Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut :

- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- Terpenuhinya Biaya Rekening Air, Telepon dan Surat kabar Pada Perangkat Daerah
- Terpenuhinya Kebutuhan Logistik perangkat Daerah

d. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Sub Kegiatan ini berisikan Pelaksanaan Rapat

Koordinasi, Konsultasi SKPD dan Perjalanan Dinas Luar Daerah DPMPTSP Kota Bogor

Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut :

- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Terpenuhinya Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat/Pelaksanaan Kegiatan
- Terpenuhinya Perjalanan Dinas Luar Daerah

4. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota**

Maksud dan Tujuan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah adalah untuk Menunjang Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja pada DPMPTSP Kota Bogor, sehingga Pelaksanaan Tugas dapat Berjalan dengan Lancar, meluputi Sub Kegiatan :

a. **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana, untuk Mendukung Aktivitas Perangkat Daerah.

Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut :

- Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor

5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk Memenuhi Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah, berupa Penyediaan Tenaga Non ASN, meliputi Sub Kegiatan:

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pegawai Non ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadi Satu Pintu Kota Bogor, seperti : Customer Service, IT, Tenaga Administrasi, Scurity, OB.

Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik

Daerah dimaksudkan untuk Mendukung Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, demi tercapainya itu semua, perlu dalaksanakan Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas.

Dalam Pelaksanaan Tugas di Perlukan Sarana Kerja yang memadai, Salah Satunya adalah Kendaraan Dinas, agar Kendaraan Dinas dapat di manfaatkan secara Maksimal perlu Pemeliharaan secara Rutin, baik Service maupun Perpanjangan STNK, dengan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, diharapkan, dapat meningkatkan Kinerja Karyawan dalam Pelaksanaan Tugas.

Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut :

- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sangat Penting, untuk Menunjang Pelaksanaan Tugas, agar Peralatan dan Mesin Kantor, selalu dalam Kondisi Baik untuk di Gunakan, maka di Perlukan Pemeliharaan secara Rutin dan Berkala.

Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut :

- Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk Pemeliharaan/Perawatan Gedung Kantor yang Tujuannya adalah Kerapihan, Keindahan,

Kebersihan dan Kenyamanan bagi Karyawan Dan Karyawati di lingkungan DPMPTSP Kota Bogor

Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut :

- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
- Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor

B. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasi	100	100	100

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota,

Kegiatan ini bertujuan :

- Memberikan Gambaran Komprehensif dan Detail kepada Calon Investor atau Pelaku Usaha dan *Stakeholders* mengenai Kelayakan Investasi di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.
- Menganalisis Kelayakan Investasi di Kecamatan Bogor Selatan dengan memperhatikan Keunggulan Kompetitif dan Komparatif dalam Upaya Pemerataan Ekonomi di Kota Bogor.
- Merumuskan Usulan Tindak Lanjut, Strategi, Rekomendasi, Program dan Kebijakan serta Insentif Khusus kepada Pemerintah Kota Bogor dalam Rangka Pengembangan Penanaman Modal di Kota Bogor, demi tercapainya itu semua, perlu dalaksanakan Sub Kegiatan :

- **Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota**

Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut:

- Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi	2.58	1.934.967.980.187	75

1. **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal untuk dapat dikembangkannya potensi daerah, peluang investasi serta sektor-sektor unggulan sehingga dapat ditawarkan kepada investor untuk menjalin kerjasama dengan dunia usaha yang dapat meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat, demi tercapainya itu semua, perlu dilaksanakan Sub Kegiatan :

a. **Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota**

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan tentang Potensi dan Peluang serta Iklim Penanaman Modal kepada Investor yang ada di Kota Bogor

Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota

b. **Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan ini bertujuan.....

Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut:

- Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN

	PROGRAM	2023	2023	(%)
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepat waktu	100	100	100

1. **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini bertujuan untuk :

- Meningkatkan Capaian Realisasi Penanaman Modal di Propinsi dan Kabupaten/ Kota.
- Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usahadalam Melaksanakan Kegiatan Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
- Meningkatkan Pemahaman Pelaku Usahamengenai Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Meningkatkan minat Investor untuk Melakukan Penanaman Modal di Daerah, demi tercapainya itu semua, perlu dalaksanakan Sub Kegiatan:

a. **Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal**

Sub Kegiatan ini bertujuan melakukan Pembinaan dan Bimbingan kepada Pelaku Usaha mengenai Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSSRBA)

Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut :

- Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

b. **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal**

Sub Kegiatan ini bertujuan melakukan Pengawasan Aktivitas Usaha, agar sesuai dengan Peraturan Daerah.

Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut :

- Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

E. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi	100	100	100

1. **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan ini bertujuan Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Aplikasi bertujuan agar semua berfungsi dan berjalan normal serta memastikan pelaksanaan permohonan perizinan secara online di kota Bogor dapat berjalan dengan baik dan lancar, demi tercapainya itu semua, perlu dalaksanakan Sub Kegiatan :

   - **Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

     Tujuan Sub Kegiatan ini.....

     Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut :

     - Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

F. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	REALISASI (%)
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	95	85.44	85.44

1. **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan ini bertujuan Mempermudah Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor, demi tercapainya itu semua, perlu dalaksanakan Sub Kegiatan :

   - **Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

     Output Sub Kegiatan ini sebagai berikut :

     - Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dijelaskan dalam Realisasi Keuangan, dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pada DPMPTSP sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA DPMPTSP dan Capaian RENSTRA DPMPTSP s/d Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes(/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA DPMPTSP Tahun 2019 –2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Target Program dan Kegiata RENJA DPMPTSP Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA DPMPTSP sd Tahun Berjalan	
				Target RENJA DPMPTSP tahun 2022	Realisasi RENJA DPMPTSP Tahun 2022	Tingkat Realisas(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sd Th Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**			**A**	**BB**	**79.11**	**A**	**A**	**100**
Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah			90	90	100	100	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100	100	100	100	100	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			100	100	100	100	100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-	-	-	1 Paket	1 Paket	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	-	-	41 Laporan	41 Laporan	100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional dan Sarana Prasarana Perangkat Daerah			-	-	-	100	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes(/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program RENSTRA DPMPTSP Tahun 2019 –2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Target Program dan Kegiata RENJA DPMPTSP Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA DPMPTSP sd Tahun Berjalan	
				Target RENJA DPMPTSP tahun 2022	Realisasi RENJA DPMPTSP Tahun 2022	Tingkat Realisas(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sd Th Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor			-	-	-	90	90	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	100	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik			100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			-	-	-	30 Unit	30 Unit	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor			-	-	-	1 Paket	1 Paket	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			100	100	100	1 Unit	1 Unit	100

Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN			100	100	100	100	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes(/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program RENSTRA DPMPTSP Tahun 2019 –2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Target Program dan Kegiata RENJA DPMPTSP Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA DPMPTSP sd Tahun Berjalan	
				Target RENJA DPMPTSP tahun 2022	Realisasi RENJA DPMPTSP Tahun 2022	Tingkat Realisas(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sd Th Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN			100	100	100	100	100	100
	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			42	42	42	43	43	100
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah Lingkup Perangkat Daerah			A	BB	79.11	A	A	100
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (LKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, SAKIP, PMPRB, MCP, STANDAR PELAYANAN, SOP, PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK, PENILAIAN OMBUDSMEN, MANAJEMEN RESIKO)			99 Buku	99 Buku	100	84 Buku	84 Buku	100
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang sudah Terintegrasi			100	100	100	100	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes(/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program RENSTRA DPMPTSP Tahun 2019 –2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Target Program dan Kegiata RENJA DPMPTSP Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA DPMPTSP sd Tahun Berjalan	
				Target RENJA DPMPTSP tahun 2022	Realisasi RENJA DPMPTSP Tahun 2022	Tingkat Realisas(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sd Th Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
Pengelolaan Data Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistim Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			1 Lokasi	1 Lokasi	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Laporan Pengendalian Penanaman Modal yang Tersedia Tepat Waktu			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Investasi Yang Tersedia Tepat Waktu			1 Laporan	1 Laporan	100	100	100	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			253 Pelaku Usaha	416 Pelaku Usaha	164.42	530 Pelaku Usaha	536 Pelaku Usaha	101
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan			16 Kegiatan Usaha	0	0	14 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	7.14

Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP			**95**	**95**	**100**	**100**	**100**	**100**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes(/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program RENSTRA DPMPTSP Tahun 2019 –2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Target Program dan Kegiata RENJA DPMPTSP Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA DPMPTSP sd Tahun Berjalan	
				Target RENJA DPMPTSP tahun 2022	Realisasi RENJA DPMPTSP Tahun 2022	Tingkat Realisas(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sd Th Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penerima layanan perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan			95	95	100	100	100	100
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	100	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	100
Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang MenjadiKewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang telah di Promosikan			100	100	100	100	100	100
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			1 Kali	1 Kali	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasi			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes(/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program RENSTRA DPMPTSP Tahun 2019 –2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Target Program dan Kegiata RENJA DPMPTSP Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA DPMPTSP sd Tahun Berjalan	
				Target RENJA DPMPTSP tahun 2022	Realisasi RENJA DPMPTSP Tahun 2022	Tingkat Realisas(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sd Th Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	**Jumlah Potensi dan Peluang Investasi yang Terealisasi**			100	100	100	100	100	100
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			1 Kajian	1 Kajian	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan DPMPTSP

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023, disimpulkan Capaian Kinerja Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Dari 6 (Enam) Program dengan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan pada tahun 2023, terdapat 5 Indikator Kinerja Program yang mencapai Target dan 2 Indikator Kinerja Program yang tidak mencapai Target yang telah ditetapkan.
2. Terdapat 11 (Sebelas) Kegiatan dan 18 (Delapan Belas) Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Sejalan dengan hal tersebut Capaian Indikator Kinerja dapat dinilai dari Capaian Indikatornya. Indikator Sasaran dan Program RENSTRA sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator DPMPTSP Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Per Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Misi 2 Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas								
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor		Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB	A	A	A
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	NA	NA	NA	80.01	81	82
Misi 3 Mewujudkan Kota bogor yang sejahtera								
Tujuan 1 : Terwujudnya penanaman modal yang mudah dan memiliki kepastian		Realisasi investasi	2.60	2,50	2,53	2,55	2,58	2,60
	Sasaran 1 : Meningkatnya daya Tarik penanaman modal di Kota Bogor	Prosentase Kebijakan Penanaman Modal dalam Pencapaian Realisasi Investasi	100	100	100	100	100	100

Sumber : Capaian Kinerja RPJMD

Dari Indikator Sasaran ke satu sampai dengan keenam, rata- rata telah mencapai target. Nilai Realisasi Investasi dari target 2.58 Trilyun Rupiah, tahun 2023 tercapai 1.934.967.980.187 Trilliun Rupiah atau mencapai 75 Satu indikator yang tidak mencapai target yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Target A tercapai A atau 100.

Capaian Kinerja Program berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.3 Capaian Kinerja Program berdasarkan Kinerja RPJMD

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota	4 (Empat) Aspek Pelayanan Publik	Point	A	A	100
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPTSP	Aplikasi SMART	Poin	3.52	3.39	96.30 %
2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Kebijakan dan Program Kerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Terimplementasi	Jumlah Kebijakan yang di hasilkan pada Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persen	100	100	100
3	Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi	Jumlah Modal yang direalisasikan oleh Perusahaan PMA dan PMDN dalam setahun	Trilliun	2.58	1.934.967.980.187	75
4	Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan sesuai SOP	Jumlah Izin yang sesuai SOP dibagi jumlah Izin terbit dikali 100%	Persen	95	85.44	85.44
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Laporan Pengendalian Penanaman Modal yang Tersedia Tepat Waktu	Realisasi di bagi Pagu Anggaran di Kali 100 %	Persen	100	100	100

6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistim Informasi	Realisasi di bagi Pagu Anggaran di Kali 100 %	Persen	100	100	100

Pelayanan Perizinan dilaksanakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku Penanaman Modal sehingga membuat masyarakat bahagia. Sesuai Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dan berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Bogor

Berikut Isu-isu Strategis yang memiliki Sinergi terhadap Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Bogor:

Isu Strategis Kota	Isu Strategis Dinas
1. Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Pada Potensi Lokal	1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 2. Menumbuhkan Iklim Investasi yang Kondusif untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi 3. Sinergitas Perencanaan Penanaman Modal dengan Memfasilitasi Kerjasama Pelaku UMKM dengan PMA & PMDN
2. Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.	1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan yang mempertimbangkan Daya Dukung Lahan dan Daya Dukung Lingkungan. 2. Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Peraturan Zonasi.

3. Reformasi Birokrasi	1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah Dan Tepat Waktu (SMART) dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Sumber : Hasil Analisis DPMPTSP Kota Bogor

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Perencanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Bogor tentunya mendasarkan pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD yang telah disusun karena menjadi acuan dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah Strategis guna pelaksanaan fungsi dan tugas DPMPTSP Kota Bogor. Dimana Renstra PD berpedoman pada Dokumen Perencanaan pembangunan RPJMD dan RKPD. Program dan Kegiatan yang diusulkan tersebut dalam upaya mengakomodir rencana kerja DPMPTSP Kota Bogor guna mendukung fungsi pembentukan Produk Hukum Daerah, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan terhadap penegakkan Peraturan Daerah maupun kebijakan daerah yang lain. Rencana Program Kegiatan DPMPTSP Kota Bogor pada tahun 2024 secara umum sama dengan Program Kegiatan yang telah disusun dalam RKPD Kota Bogor.

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan DPMPTSP Kota Bogor tahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2024 yang berisi Program dan Kegiatan sebagai Pedoman Perencanaan Pembangunan. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sehingga menghasilkan Program Prioritas dalam Pembangunan Kota Bogor. Pada Rencana Kerja tahun 2024 akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kota Bogor sehingga menjadi Rumusan Program dan Kegiatan yang definitive untuk dijadikan Rencana Kerja tahun 2024. Berikut ini adalah tebel review Rancangan Renja Perubahan DPMPTSP Kota Bogor Tahun 2024

Adapun Program yang akan dilaksanakan di tahun 2024 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Tabel 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 DPMPTSP

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						KUPA - PPAS 2024				
NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota	Kota Bogor	A Point	10.593.669.726	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota	Kota Bogor	A Point	10.593.669.726
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.40 Point			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.40 Point	
2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasi	Kota Bogor	100 %	164.665.800	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasi	Kota Bogor	100 %	164.665.800
3	Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi	Kota Bogor	2.60 Trilliun	121.016.000	Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi	Kota Bogor	2.60 Trilliun	121.016.000

4	Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan sesuai SOP	Kota Bogor	100 Persen	2.592.983.784	Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan sesuai SOP	Kota Bogor	100 Persen	2.592.983.784

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						KUPA - PPAS 2024				
NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepatwaktu	Kota Bogor	100 Persen	450.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepatwaktu	Kota Bogor	100 Persen	450.000.000
6	Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi	Kota Bogor	100 Persen	300.000.000	Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal	Prosentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistim Informasi	Kota Bogor	100 Persen	300.000.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 164 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Pelaksanaan teknis operasional di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bogor

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 Kota Bogor memiliki Visi: ***"Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga"*** Kemudian diturunkan menjadi 3 (tiga) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat.
2. Mewujudkan Kota Bogor Cerdas.
3. Mewujudkan Kota Bogor Sejahtera.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut konsisten dengan pelaksanaan tupoksi, yang kemudian akan menjadi arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai kedepan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas/kegiatan. Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan tujuan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor adalah : Mewujudkan Penanaman Modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Setelah ditetapkannya tujuan maka untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi harus ditetapkan pula sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional.

Demi terwujudnya Visi Misi Kota Bogor dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024 serta untuk menjawab Isu dan Permasalahan dalam Urusan Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Trpadu Satu Pintu Kota Bogor, memiliki **2 Tujuan :**

Tujuan 1 : ***Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor*** dengan ***Indikator Kinerja Tujuan :***

1. Indeks Reformasi Birokrasi

   Untuk mencapai Tujuan tersebut, maka di tetapkan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, sesuai RENSTRA 2019 - 2024 adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ***Indikator Kinerja Sasaran :***

- Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah

Tujuan 2 : Terwujudnya Penanaman Modal yang mudah dan memiliki kepastian dengan ***Indikator Kinerja Tujuan :***

2. Realisasi Investasi

Untuk mencapai Tujuan tersebut, maka di tetapkan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, sesuai RENSTRA 2019 - 2024 adalah :

Sasaran 2 : Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal di Kota Bogor dengan ***Indikator Kinerja Sasaran :***

- Prosentase Kebijakan Penanaman Modal dalam Pencapaian Realisasi Investasi

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke...				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor		Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif Efisien Dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah	NA	NA	80.01	81	82
2	Terwujudnya Penanaman Modal yang mudah dan memiliki		Realisasi Investasi	2.50	2.53	2.55	2.58	2.60

	kepastian							

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke...				
		Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal di Kota Bogor.	Prosentase Kebijakan Penanaman Modal dalam Pencapaian Realisasi Investasi	100	100	100	100	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2024, seperti di Uraikan dalam BAB sebelumnya, maka di rumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, beserta Indikatornya yang akan di Laksanakan di Tahun 2024 :

3.1. Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Indikator Kinerja Program :
   - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota, adapun Kegiatannya adalah :
     1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
        - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Nilai Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah, adapun Kegiatannya adalah :
     1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
        - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
        - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.
     2) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
        - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Promosi Penanaman Modal, dengan Indikator Kinerja Program Nilai Investasi, Adapun Kegiatannya adalah :

1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan Indikator Kinerja Program Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepat waktu, Adapun Kegiatannya adalah :

1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal.

4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan Indikator Kinerja Persentase Jumlah Kebijakan dan Program Kerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   yang Terimplementasi, Adapun Kegiatannya adalah :
   1) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
      - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/ Kota.
   2) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan indikator Kinerja Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi, Adapun Kegiatannya adalah :
   1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
      - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
6. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan Indikator Kinerja Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP, Adapun Kegiatannya adalah:
   1) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub

Kegiatan :

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel 3.2.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor

Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan			RencanaTahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								15.391.430.747					20.338.837.732
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasi	Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasi		Kota Bogor	100 Persen			162.811.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasi	100	500.000.000
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang PenanamanModal yang menjadi Kewenangan Daerah		Kajian Fasilitas/ Insentif di BidangPenanaman Modal	Prosentase Kebijakan PenanamanModal dalam Pencapaian Realisasi Investasi	Kota Bogor		1 Kajian	100 Persen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kajian Fasilitas/ Insentif diBidang Penanaman Modal	1 Kajian	250.000.000

					Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan			RencanaTahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiata	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentifdan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Kota Bogor		1 Dokumen		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	250.000.00
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta PotensiInvestasi Kabupaten/ Kota**		Jumlah potensi danpeluanginvestasi yang terealisasi	Prosentase Kebijakan Penanaman Modal dalam Pencapaian Realisasi	Kota Bogor		100 Persen	100 Persen	**142,330,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Kebijakan Penanaman Modal dalam Pencapaian Realisasi	100 Persen	**250.000.00**
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Kota Bogor		1 Dokumen		142,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peta Potensi Investasidan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Nilai Investasi	Nilai Investasi		Kota Bogor	2.58 Trilliun			**39,302,300**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Investasi	2.60 Trilliun	**400.000.00**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang MenjadiKewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		Persentase potensi dan peluanginvestasi yang telah dipromosikan	Prosentase Kebijakan Penanaman Modal dalam Pencapaian	Kota Bogor		100 %	100 Persen	**39,302,300**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase potensi dan peluang investasi yang telahdipromosikan	100 %	**400.000.00**

								Realisasi											

Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan			RencanaTahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif(Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		JumlahDokumen HasilKegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		Kota Bogor		1 Dokumen		39,302,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen HasilKegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000.000
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Prosentase Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan sesuai SOP	Prosentase Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan sesuai SOP		Kota Bogor	100 Persen			**1,855,615,944**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan sesuai SOP		**2,870,256,778**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan SecaraTerpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		Persentase penerima layananperizinan dan non perizinanBerbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Prosentase Kebijakan PenanamanModal dalam Pencapaian Realisasi	Kota Bogor		95 Persen	100 Persen	**1,855,615,944**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerima layananperizinan dan non perizinanBerbasis Sistem Pelayanan Perizinan	100 Persen	**2,870,256,778**
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yangMendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi		Kota Bogor		3 Pelaku Usaha		1,855,615,944	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Jumlah pelayananpublik di mallpelayanan publik	3 Pelaku Usaha	2,870,256,778

Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah DanProgram/ Kegiatan			RencanaTahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan /Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Prosentase Laporan Pengendalian Penanaman Modalyang Tersedia Tepat Waktu	Prosentase Laporan Pengendalian Penanaman Modalyang Tersedia TepatWaktu			100Persen			**415.178.000**	DANA ALOKASI KHUSUS(DAK)		Prosentase Laporan Pengendalian Penanaman ModalyangTersedia Tepat Waktu	100Persen	**344.300.00**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Laporan Investasiyang tersedia tepatwaktu	Prosentase Kebijakan Penanaman Modal dalam Pencapaian Realisasi	Kota Bogor		100Persen	100 Persen	**415.178.000**	DANA ALOKASI KHUSUS(DAK)		Jumlah Laporan Investasiyang tersedia tepat waktu	100Persen	**344.300.00**
2	18	05	2.01	02	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Kota Bogor		Pelaku Usaha		405,678,000	DANA ALOKASI KHUSUS(DAK)		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	319.727.60
					Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usahadari Pelaku Usahayang Melakukan Koordinasidan Sinkronisasi Pengawasan		Kota Bogor		Kegiatan Usaha		9,500,000			Jumlah Kegiatan Usahadari Pelaku Usahayang Melakukan Koordinasidan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	24.572.40
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATADAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase data dan informasi perizinandan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi	Persentase data dan informasiperizinan dan non perizinan yangterintegrasidalam sistem informasi		Kota Bogor	100Persen			**100.000.000**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yangterintegrasidalam sistem informasi	100Persen	**750.000.00**

Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan DaerahDan Program/ Kegiatan	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah DanProgram/ Kegiatan			RencanaTahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dan		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**18**	06	2.01		**Pengelolaan Data dan InformasiPerizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang sudah terintegrasi	Prosentase Kebijakan Penanaman Modal dalam Pencapaian Realisasi	Kota Bogor		100Persen	100 Persen	**100.000.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang sudah terintegrasi	100Persen	**750.000.000**
2	**18**	**06**	**2.01**	**0002**	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Datadan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secar		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikajidan Dimanfaatkan		Kota Bogor		100 Persen		100.000.000			Belanja Sewa Data Center (C Location)	100Persen	750.000.000
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TingkatKota		Kota Bogor	APoin			**12.722.931.886**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TingkatKota	APoin	**12.070.902.59**
						Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Penanaman modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu–	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			3.40Point						Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.40Point	

Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah DanProgram/ Kegiatan			RencanaTahun 2024						Catatan Pent	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dan		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif (Rp
										Program	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah Lingkup Perangkat Daerah	NilaiIndeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	Kota Bogor		A Point	82 Point	**33.175.600**	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah Lingkup Perangkat Daerah	A Point	**50.000.0**
2	18	01	2.01	0001	PenyusunanDokumen EvaluasiPerangkatDaerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(LKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, RENSTRA, PMPRB, MCP, STANDAR PELAYANAN, SOP		Kota Bogor		63 Buku		33.175.60	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (LKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, RENSTRA, PMPRB, MCP, STANDAR PELAYANAN,SOP	63 Buku	50..000.000
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase Pemenuhangaji dan tunjangan ASN	NilaiIndeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah			100Persen	81Point	**11.092.493.626**			Persentase Pemenuhan gajidan tunjangan ASN	100Persen	**10.370.902.59**
2	18	01	2.02	0001	PenyediaanGaji danTunjangan ASN		Jumlah Orangyang menerima Gajidan Tunjangan ASN				43Orang		11,044,463,626			Jumlah Orang yang menerima Gaji danTunjangan ASN	42Orang	10,320,902,599

Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah DanProgram/ Kegiatan			RencanaTahun 2024						CatatannPent	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif (Rp
										Program	Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ SemesteranSKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD				1Laporan		48,030,00			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD		50.000.00
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum**		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	NilaiIndeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat	Kota Bogor		100Persen	81Point	**310.215.900**			Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100Persen	**600.000.0**
2	18	01	2.06	000	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan				1 Paket		60,330,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangDisediakan	1 Paket	100.000.00
2	18	01	2.06	000	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yangDisediakan		Kota Bogor		1 Paket		42,848,60	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.00
2	18	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan				1 Paket		14,812,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	1 Paket	50.000.00

2	18	01	2.06	0009	Penyediaan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD		Terpenuhinya Perjalanan Dinas Luar Daerah				12 Bulan		192,225,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)		Terpenuhinya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan	350.000.00

Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah DanProgram/ Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	RencanaTahun 2024							Catatan Pent	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
					Capaian Program	Keluaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif (Rp
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase BMD lingkup perangkatdaerah berkondisi baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Bogor		100Persen	A Pointsen	**259.910.00**			Persentase BMD lingkup perangkatdaerah berkondisi baik	100 Persen	**600.000.0**
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny		Kota Bogor		30 Unit		227,340,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD))		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	30 Unit	400.000.0
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor		Kota Bogor		1 Paket		32,570,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH(PAD)		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	1 Paket	100.000.0
2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor		Kota Bogor		1 Unit			PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)		**P**emeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	100.000.0
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjangurusan pemerintahan daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah			100 Persen	81Point	**1.027.136.76**			Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjangurusan pemerintahan daerah	100 Persen	**450.000.0**
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						8,706,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH(PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		50.000.0

Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah DaProgram/ Kegiatan	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah DanProgram/ Kegiatan			RencanaTahun 2024						Catatan Pent	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif (Rp)
										Program	Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1,018,430,76	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		400.000.000

BAB V

PENUTU

P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2024. Seluruh elemen pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian Sasaran Program- program yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 ini. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 ini merupakan salah satu alat untuk Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses Pembangunan Pemerintah Daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Pelaksanaan semua Kegiatan, baik dalam Kerangka Regulasi maupun dalam Kerangka Anggaran, mensyaratkan pentingnya Koordinasi dan Sinkronisasi antar Kegiatan, baik di antara Kegiatan dalam Satu Program maupun Kegiatan antar Program, dalam Satu Bidang dan Lintas Bidang, dengan tetap memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Program dan Kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 ini merupakan Program dan Kegiatan yang bersifat

Indikatif, sehingga dalam Pelaksanaanya akan sangat tergantung pada Kondisi, Regulasi serta ketersediaan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran bersangkutan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 ini belum sempurna, oleh karena itu Saran dan Masukan sangat kami harapkan agar dalam Penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Sebagai sebuah Dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang Strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai Implementasi Pelaksanaan Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Demikian Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor yang disusun sebagai salah satu bahan dalam Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023.

X. BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah, sebagai implementasi dari pentahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Daerah ini disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024 Perubahan dan sebagai bagian dari Rencana Strategis Perubahan, maka Pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2019-2024 telah menetapkan Visi dan Misi, dengan visi yaitu **"Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga"**, yang dapat diartikan :

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, pendidikan, sosial masyarakat serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor

pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019- 2024 yaitu :

Misi Pertama : Mewujudkan Kota yang Sehat

Misi Kedua : Mewujudkan Kota Yang Cerdas

Misi Ketiga : Mewujudkan Kota yang Sejahtera

Mengacu kepada RPJMD dan Visi Misi Kota Bogor, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menjabarkan dua Misi kedalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor 2019–2024, antara lain :

Misi Kedua : Mewujudkan Kota Yang Cerdas

Misi Ketiga : Mewujudkan Kota yang Sejahtera

Misi-misi tersebut yang memuat sasaran strategis dan target. Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dituangkan dalam suatu Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah, dengan mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Bogor.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2024 disusun berdasarkan RPJMD Perubahan Kota Bogor dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor 2019-2024 dengan melihat isu-isu, permasalahan dan tantangan terkini untuk mencapai Visi Kota Bogor dan tujuan Perangkat Daerah seperti tertera pada Rencana Strategis Perubahan.

Pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu kiranya Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk memasukan kajian-kajian maupun telaahan yang terjadi di sekitar Kota Bogor.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan Pemerintahan Daerah terkait bidang Pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 07 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 08 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 03 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembara Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 06);

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 05 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 118);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 130);
29. Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
30. Peraturan Walikota Bogor Nomor 181 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 181).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2024 yaitu untuk penyelarasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu 1 tahun yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Perubahan dan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 Perubahan.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyelarasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2024 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Perubahan serta Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bogor Tahun 2019-2024);

2. Penyelarasan tolok ukur dan target kinerja Badan Pendapatan Daerah khusus dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LKIP, LKPJ dan LPPD tahunan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2024, terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA TAHUN 2022
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM BAPENDA
1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda
3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

Sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144). Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E). Peraturan Walikota Bogor Nomor 181 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 181).

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang telah disusun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2022 ada 2 (Dua) program, yaitu sbb :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    1) Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
        (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
        (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
        (3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
        (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
        (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
    3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
        (1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
        (2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
        (3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
        (4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
        (5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
        (6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan

(7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   (1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
   (2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
   (3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   (2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
   (3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   (4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
   (5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
      (1) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
      (2) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
      (3) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
      (4) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
      (5) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
      (6) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      (7) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah;

(8) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
(9) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
(10) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah; dan
(11) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja Sasaran Strategis. Penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam laporan ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Perubahan maupun Rencana Kerja Tahun 2022.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Perangkat Daerah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 Perubahan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja

Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Nilai Pajak Daerah	Dalam Juta	565.600	624.784	110,46	754.175	744.960	98,78
		Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dalam Juta	914.550	1.075.240	117,57	1.150.887	1.147.623	99,72
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23

Data hasil audit BPK

A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022

Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebanyak 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Staregis

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	80,01	73,87	92,33
2	Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah	Persentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	%	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	1	1	100
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	33,34	31,71	95,11
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	19,08	18,74	98,23

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Target Sasaran

No.	Misi	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran					
				Melampuai Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi Kedua	Sasaran 1	1	-	-	-	-	1	92,33
2	Misi Ketiga	Sasaran 1	1	-	-	1	100	-	-
3	Misi Ketiga	Sasaran 2	1	-	-	1	100	-	-
4	Misi Ketiga	Sasaran 3	2	-	-	-	-	2	96,67

Dari 4 Sasaran dengan 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Jumlah	%
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Sesuai Target	2	40,00
3	Tidak Mencapai target	3	60,00

B. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Program Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebanyak 2 Program dengan 6 indikator kinerja yang ditetapkan, dengan capaian kinerja program sebagai berikut :

Tabel 3.5

Pencapaian Indikator Kinerja Program

No.	Program	Indikator Kinerja	Sat.	2021			2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100	A	BB	99,12
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Poin	3,35	3,44	102,69	3,40	3,71	110
2		Nilai Pajak Daerah	Rp.	565.600.000.000,00	624.784.886.145,00	110,46	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78

	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	914.550.650.320,00	1.075.240.926.213,00	117,57	1.150.887.225.486,00	1.147.619.218.758,92	99,72
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23

Realisasi capaian kinerja pada akhir tahun 2022 menunjukan bahwa dari 6 (enam) Indikator Kinerja Program ini, 1 (satu) Indikator Kinerja tercapai dan 5 (lima) Indikator Kinerja belum tercapai, antara lain :

1. Capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah sebesar 99,12. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah mendapatkan Nilai BB dari target A yang ditetapkan pada tahun 2022.
2. Capaian kinerja Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah sebesar 110. Capaian kinerja Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah mendapatkan Poin 3,71 dari target 3,40 yang ditetapkan pada tahun 2022.
3. Capaian kinerja Nilai Pajak Daerah sebesar 98,78. Realisasi Nilai Pajak Daerah sebesar Rp. 744.960.592.537,00 dari target 754.175.900.000,00 yang ditetapkan pada tahun 2022.
4. Capaian kinerja Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah sebesar 95,11. Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah terealisasi sebesar 31,71% dari target 33,34% yang ditetapkan pada tahun 2022
5. Capaian kinerja Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 99,72. Realisasi Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.147.619.218.758,92 dari target 1.150.887.225.486,00 yang ditetapkan pada tahun 2022.
6. Capaian kinerja Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 98,23. Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 18,74% dari target 19,08% yang ditetapkan pada tahun 2022.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Dari target Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 sebesar Rp. 1.150.887.225.486,00 realisasi sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp. 1.147.619.218.758,92 (99,72%), namun mengalami peningkatan sebesar

6,73% apabila dibandingan dengan tahun 2021 sebesar Rp. 1.075.240.926.213,11 (117,57%) dari target sebesar Rp. 914.550.650.320,00 dengan perincian :

No.	Uraian PAD	2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	565.600.000.000,00	624.784.886.145,00	110,46	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78
2	Retribusi Daerah	31.609.433.495,00	36.033.010.539,00	113,99	37.834.007.000,00	23.942.828.414,00	63,28
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	32.420.552.150,00	32.420.552.150,00	100,00	32.169.497.964,00	32.170.048.280,00	100
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	284.920.664.675,00	382.002.477.379,11	134,07	326.707.820.522,00	346.545.749.527,92	106,07
Jumlah PAD		**914.550.650.320,00**	**1.075.240.926.213,11**	**117,66**	**1.150.887.225.486,00**	**1.147.619.218.758,92**	**99,72**

Adapun Penerimaan Pajak Daerah meliputi 9 jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari sisi pendapatan Pajak Daerah, penyesuaian target sepanjang 2022 dilakukan sebanyak 2 kali, target pajak Tahun 2022 menurut RPJMD yaitu sebesar Rp. 716.175.000.000,00 APBD Tahun 2022 ditetapkan sebesar sebesar Rp. 775.675.900.000,00 akan tetapi dalam APBD Perubahan ditetapkan target pajak sebesar Rp. 754.175.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 744.960.592.537,00 (98,78).

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target Pajak Daerah ini antara lain Perencanaan Target BPHTB ditargetkan jauh melampaui laju pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan kenaikannya 5%, BPHTB 2022 ditatgetkan sebesar 237.245.900.000,00 dengan ketercapaian 208.240.798.617,00 (87,77%), meningkat dibanding dengan realisasi BPHTB 2021 sebesar 206.719.639.939,00.

Adapun ketidaktercapaian BPHTB ini karena saat penyusunan perencanaan terdapat potensi BPHTB dari pemasukan dalam perseroan yaitu penambahan penyertaan modal dari Kementrian Pertanian ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan Nusantara III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 dengan nilai potensi BPHTB sebesar ± Rp. 50 M. Namun proses penyertaan modal tersebut tidak selesai sampai dengan akhir 2022 sehingga BPHTB belum terutang.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.6

Pencapaian Target Program

No.	Sasaran	Program	Jumlah Indikator Program	Pencapaian Indikator Program					
				Melampuai Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	Program 1	2	1	110	-	-	1	99,12
2	Sasaran 2, 3, 4	Program 2	4	-	-	-	-	4	97,96

Dari 2 Program dengan 6 indikator kinerja, pencapaian kinerja Program Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Pencapaian Indikator Kinerja Program

No.	Kategori	Jumlah Indikator	%
1	Melebihi/Melampaui Target	1	16,67
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	5	83,33

Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebanyak 7 Kegiatan dengan 16 indikator kinerja yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.8

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	B	BB	105	A	BB	99,12
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	100	100	100	100	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	%	100	100	100	100	100	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100
7	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	%	100	117,57	117,57	100	99,72	99,72

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Persentase Service Level Agreement (SLA) atas Layanan Sistem Pajak	%	-	-	-	95	95	100
		Persentase Realisasi PAD dibandingkan Target	%	100	117,57	117,57	100	99,72	99,72

		Persentase Keberatan Pajak Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Penambahan Wajib Pajak Baru	WP	224	425	189,73	247	247	100
		Persentase Capaian Target PAD dari Sektor PBB dan BPHTB	%	100	112,02	112,02	100	94,45	94,45
		Persentase Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Yang Ditetapkan Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penurunan Jumlah Piutang Pajak Daerah	%	N/A	N/A	-	5	7,41	148,20
		Persentase Wajib Pajak (Self Assesment) Yang Diperiksa	%	N/A	N/A	-	2,5	2,5	100
		Persentase Wajib Pajak (Self Assesment) Yang Diawasi	%	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.9
Pencapaian Target Kegiatan

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Indikator Kegiatan	Pencapaian Indikator Program					
				Melampuai Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Program 1	Kegiatan 1	1	-	-	-	-	1	99,12
		Kegiatan 2	1	-	-	1	100	-	-
		Kegiatan 3	1	-	-	1	100	-	-
		Kegiatan 4	1	-	-	1	100	-	-
		Kegiatan 5	1	-	-	1	100	-	-
		Kegiatan 6	1	-	-	1	100	-	-
2	Program 2	Kegiatan 1	10	1	148,20	6	100	3	97,96

Dari 7 Kegiatan dengan 16 indikator kinerja, pencapaian kinerja Program Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Kategori	Jumlah Indikator	%
1	Melebihi/Melampaui Target	1	6,25
2	Sesuai Target	11	68,75
3	Tidak Mencapai Target	4	25,00

Evaluasi ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

C. Kerangka Pengukuran

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Bogor.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Setelah dilakukan pengukuran kinerja, dilakukan analisis kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor 2019-2024 perubahan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	80,01	73,87	92,33
2	Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah	Persentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	%	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	-	-	-	1	1	100
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23

Realisasi pada akhir tahun 2022 menunjukan bahwa dari 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran ini, 2 (dua) Indikator Kinerja tercapai dan 3 (tiga) Indikator Kinerja belum tercapai. Salah satu yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja ini antara lain Perencanaan Target BPHTB ditargetkan jauh melampaui laju pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan kenaikannya 5%, BPHTB 2022 ditatgetkan sebesar 237.245.900.000,00 dengan ketercapaian 208.240.798.617,00 (87,77%), meningkat dibanding dengan realisasi BPHTB 2021 sebesar 206.719.639.939,00.

Adapun ketidaktercapaian BPHTB ini karena saat penyusunan perencanaan terdapat potensi BPHTB dari pemasukan dalam perseroan yaitu penambahan penyertaan modal dari Kementrian Pertanian ke dalam modal

saham Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan Nusantara III berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2019 dengan nilai potensi BPHTB sebesar ± Rp. 50 M. Namun proses penyertaan modal tersebut tidak selesai sampai dengan akhir 2022 sehingga BPHTB belum terutang.

Jumlah Anggaran Tahun 2022	Rp. 49.033.649.714,00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2022	Rp. 47.236.315.199,00
Persentase Anggaran Tahun 2022	96,33%

Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2022

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Pagu	Realisasi	%
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**45.421.974.174,00**	**43.850.797.979,00**	**96,54**
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		27.870.000,00	27.576.150,00	98,95
		1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.582.100,00	1.559.000,00	98,54
		2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.807.900,00	25.538.950,00	98,96
		3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	480.000,00	478.200,00	99,63
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		38.940.584.518,00	37.720.562.901,00	96,87
		1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.939.544.518,00	37.719.543.301,00	96,87
		2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.040.000,00	1.019.600,00	98,04
	3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.444.836.010,00	1.372.856.604,00	95,02
		1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	64.079.000,00	64.079.000,00	100,00
		2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	251.375.410,00	250.373.785,00	99,60
		3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.494.800,00	44.018.600,00	92,68
		4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.780.000,00	2.665.000,00	95,86
		5)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	364.628.800,00	308.331.890,00	84,56
		6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.000.000,00	98.900.000,00	99,90
		7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	615.478.000,00	604.488.329,00	98,21
	4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.205.549.300,00	1.173.247.500,00	97,32
		1)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.114.249.300,00	1.084.547.500,00	97,33
		2)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.300.000,00	88.700.000,00	97,15
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.787.162.376,00	2.609.728.707,00	93,63
		1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.480.000,00	7.480.000,00	59,94
		2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	813.585.600,00	754.786.381,00	92,77
		3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.961.096.776,00	1.847.462.326,00	94,21
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.015.971.970,00	946.826.117,00	93,19
		1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.539.170,00	224.151.470,00	95,17
		2)	Pemeliharaan Mebel	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
		3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	511.380.800,00	503.272.000,00	98,41
		4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	228.052.000,00	178.402.647,00	78,23
		5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Pagu	Realisasi	%
II	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**			**3.611.675.540,00**	**3.385.517.220,00**	**93,74**
	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		3.611.675.540,00	3.385.517.220,00	93,74
		1)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	373.189.600,00	345.974.500,00	92,71

		2)	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	406.516.400,00	406.202.520,00	99,92
		3)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	896.084.740,00	879.060.000,00	98,10
		4)	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	208.946.100,00	132.193.200,00	63,27
		5)	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	333.280.500,00	310.200.100,00	93,07
		6)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	333.280.500,00	332.680.300,00	99,82
		7)	Penetapan Wajib Pajak Daerah	80.770.600,00	77.411.400,00	95,84
		8)	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	48.565.000,00	48.355.000,00	99,57
		9)	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	343.672.000,00	267.107.600,00	77,72
		10)	Penagihan Pajak Daerah	499.936.600,00	499.936.600,00	100,00
		11)	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	87.433.500,00	86.396.000,00	98,81
Jumlah				**49.033.649.714,00**	**47.236.315.199,00**	**96,33**

D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2022 yang mendukung kepada pencapaian Misi Kedua, antara lain :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	80,01	73,87	92,33

Capaian kinerja Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah sebesar 92,33. Nilai IRB di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mendapatkan Nilai 73,87 dari target 80,01 yang ditetapkan pada tahun 2022.

Untuk mendukung Sasaran Strategis ini pada tahun 2022 dialokasikan anggaran melalui Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100	A	BB	99,12
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Poin	3,35	3,44	102,69	3,40	3,71	110

Jumlah Anggaran Program Tahun 2022	Rp.	27.870.000,00
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2022	Rp.	25.576.150,00
Persentase Anggaran Program Tahun 2022	98,95%	

Capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah sebesar 99,12. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mendapatkan Nilai BB dari target A yang ditetapkan pada tahun 2022.

Untuk merealisasikan Indikator Pertama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah. Kegiatan ini bertujuan agar penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu dan tepat data.

   Melalui kegiatan ini dihasilkan 1 (satu) Dokumen antara lain Rencana Kerja (Renja), dan 4 (empat) Laporan antara lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).

   Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :

   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Buku Rencana Kerja (RENJA)	1 Dokumen	1 Dokumen	100

   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100
2	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	1 Laporan	1 Laporan	100
3	Buku Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ)	1 Laporan	1 Laporan	100
4	Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Laporan	1 Laporan	100

   3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Buku Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	1 Laporan	1 Laporan	100

   Permasalahan yang dihadapi antara lain :

   a. Belum efektifnya system pengumpulan data dan informasi yang menyebabkan kurangnya informasi dan data yang dimiliki oleh tim penyusunan laporan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);

b. Hasil Audit BPK terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 setiap tahun akan berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya sehingga angka realisasi PAD masih merupakan angka yang belum final dan masih bisa berubah sampai dengan keluarnya Hasil Aduit BPK. Maka untuk pengisian data capaian kinerja tahun 2022 baik LKPJ, LKIP maupun Laporan keuangan masih menggunakan data yang terdapat dalam SIMRAL pertanggal 31 Desember 2022;
c. Masih banyaknya permasalahan SIPD dalam penyusunan anggaran anggaran tahun 2023.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

a. Monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing PPTK secara berkala;
b. Membuat laporan realisasi capaian pada setiap triwulan tahun berjalan yang berisi hasil rekon internal untuk menyandingkan realisasi Sub Kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi barang jasa bersama Bendahara Pengeluaran dengan SIMRAL;
c. Angka realisasi PAD masih menggunakan angka yang belum final dan masih bisa berubah sampai dengan keluarnya Hasil Audit BPK;
d. Koordinasi dengan BKAD Kota Bogor.

Dengan anggaran kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 27.870.000,00 realisasi keuangan sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp. 25.576.150,00 (98,95%), sisa anggaran yang tidak terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 293.850,00 (1,05%) merupakan efisiensi Kegiatan.

Capaian kinerja Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah sebesar 110. Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah mendapatkan Poin 3,71 dari target 3,40 poin yang ditetapkan pada tahun 2022.

Untuk merealisasikan Indikator Kedua Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN. Melalui kegiatan ini dihasilkan 1 (satu) Laporan antara lain Laporan Keuangan.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/ Bulan	87 Orang/ Bulan	100
2	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	1 Tahun	100
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	1 Tahun	100
4	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	1 Tahun	100
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	1 Tahun	100
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	1 Tahun	100
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	1 Tahun	100
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	1 Tahun	100
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	1 Tahun	100
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	1 Tahun	100
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	1 Tahun	100
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	1 Tahun	100
13	Belanja Insentiv Pemungutan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100

Dengan anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 38.940.584.518,00 realisasi keuangan sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp. 37.720.562.901,00 (96,87%), sisa anggaran yang tidak terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.220.021.617,00 (3,13%).

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah. kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan rumah tangga dalam rangka mendukung pencapaian tupoksi yang menjadi beban tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1 Tahun	1 Tahun	100

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
3	Tabung Gas	1 Tahun	1 Tahun	100
4	Tabung Pemadam Kebakaran	1 Tahun	1 Tahun	100

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2	Belanja Spanduk	9 Buah	9 Buah	100

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2	Tersedianya Blanko SPPT dan Barang Koasi Incomer se-Kota Bogor	1 Tahun	1 Tahun	100

6) Fasilitasi Kunjungan Tamu

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Terpenuhinya Makan dan Minum Tamu	1 Tahun	1 Tahun	100

7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100
3	Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100

Dari anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.444.836.010,00 realisasi keuangan sampai Desember 2022 sebesar

Rp. 1.372.856.604,00 (95,02%), sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 71.979.406,00 (4,98%).

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD sebesar 100%, realisasi tahun 2022 sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa Sub Kegiatan, antara lain :
   1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	29 Unit	29 Unit	100
2	Laptop	10 Unit	10 Unit	100
3	PC	10 Unit	10 Unit	100
4	Printer	5 Buah	5 Buah	100
5	Scanner	1 Buah	1 Buah	100
6	Smart TV	1 Unit	1 Unit	100
7	Tangga Serbaguna	2 Buah	2 Buah	100

   2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100
2	Pintu Kaca Geser Otomatis	1 Paket	1 Paket	100

   Dari anggaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.205.549.300,00 realisasi keuangan sampai Desember 2022 sebesar Rp. 1.173.247.500,00 (97,32%), sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 32.301.800,00 (2,68%).

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa Sub Kegiatan, antara lain :
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Belanja Surat Kabar	1 Tahun	1 Tahun	100

   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja

1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor (Telepon, Internet, Listrik dan Air)	1 Tahun	1 Tahun	100

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	3 Orang	3 Orang	100
3	Honorarium Non ASN	1 Orang	1 Orang	100
4	Outsourching Tenaga Khusus Kehumasan/Design Grafis	2 Orang	2 Orang	100
5	Tenaga Outsourching Customer Service Pajak Daerah	8 Orang	8 Orang	100
6	Tenaga Outsourching IT	6 Orang	6 Orang	100
7	Tenaga Outsourching Keamanan	12 Orang	12 Orang	100
8	Tenaga Outsourching Kebersihan	7 Orang	7 Orang	100
9	Tenaga Outsourching Uji Potensi Pajak Daerah	6 Orang	6 Orang	100

Dari anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 2787162376,00 realisasi keuangan sampai Desember 2022 sebesar Rp. 2609728707,00 (93,63%), sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 177.433.669,00 (6,37%) merupakan efisiensi.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Dari target indikator kinerja Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik sebesar 100%, realisasi sebesar 100%. Tujuannya untuk menjaga agar perlengkapan/peralatan kantor dan gedung kantor tetap dalam kondisi baik dan layak pakai Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa Sub Kegiatan, antara lain :
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	51 Unit	100
2	Pajak Kendaraan	1 Tahun	1 Tahun	100
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	1 Tahun	100

2) Pemeliharaan Mebel

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100
2	Terpeliharanya Mebel Inventaris Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	105 Unit	100
2	Terpeliharanya AC Presisi	5 Unit	5 Unit	100
3	Terpeliharanya Air Conditioner	98 Unit	98 Unit	100
4	Terpeliharanya Genset	2 Unit	2 Unit	100
5	Terpeliharanya Lift	1 Unit	1 Unit	100
6	Terpeliharanya Mesin Perporasi	2 Unit	2 Unit	100
7	Terpeliharanya Pompa Air	1 Unit	1 Unit	100

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100
2	Penataan Ruang Pelayanan	1 Paket	1 Paket	100
3	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100

5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100
2	Terpeliharanya Jaringan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	100

Dari anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 1.015.971.970,00 realisasi keuangan sampai Desember 2022 sebesar Rp. 946.826.117,00 (93,19%), sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 69.145.853,00 (6,81%).

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah	Persentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	%	100	100	100	100	100	100

Capaian kinerja Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak sebesar 100%. Dari target Persentase Tindak

Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak sebesar 100%, realisasi tahun 2022 sebesar 100%.

Untuk mendukung Sasaran Strategis ini pada tahun 2022 dialokasikan anggaran melalui Program sebagai berikut :

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja	Sat.	2021			2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Pajak Daerah	Rp.	565.600.000.000,00	624.784.886.145,00	110,46	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78
		Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	914.550.650.320,00	1.075.240.926.213,00	117,57	1.150.887.225.486,00	1.147.619.218.758,92	99,72
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23

Jumlah Anggaran Program Tahun 2022	Rp.	48.565.000,00
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2022	Rp.	48.355.000,00
Persentase Anggaran Program Tahun 2022	99,57%	

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   1) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan	100
2	Sertifikasi ISO 9001:2015	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100

Maksud dari kegiatan ini adalah pelayanan prima terhadap masyarakat, dengan tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan prima yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pelayanan pajak daerah.

Melalui kegiatan ini juga telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor bekerjasama dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor.

Hasil survey secara umum menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah sangat memuaskan dengan tingkat kepuasan sebesar 93,67. Selain itu telah dilaksanakan juga telah dilaksanakan juga :

a. Pelayanan PBB dan BPHTB kepada wajib pajak dengan hasil pelayanan :
   1) Pelayanan PBB sejumlah 5.581 berkas dengan rincian :

- Keberatan : 16 berkas
- Pengurangan : 524 berkas
- Restitusi : 6 berkas
- Daftar baru : 522 berkas
- Mutasi : 3.482 berkas
- Pembetulan : 724 berkas
- Pembatalan : 56 berkas
- Penerbitan kembali : 188 berkas

2) Pelayanan BPHTB sebanyak 1.260 berkas.

Dari anggaran Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah sebesar Rp. 48.565.000,00 realisasi keuangan sampai Desember 2022 sebesar Rp. 48.355.000,00 (99,57%), sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 210.000,00 (0,43%) merupakan efisiensi.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	-	-	-	1	1	100

Capaian kinerja Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah sebesar 100%. Dari target Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 1 Inovasi, realisasi tahun 2022 sebanyak 1 Inovasi.

Untuk mendukung Sasaran Strategis ini pada tahun 2022 dialokasikan anggaran melalui Program sebagai berikut :

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja	Sat.	2021			2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Pajak Daerah	Rp.	565.600.000.000,00	624.784.886.145,00	110,46	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78
		Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	914.550.650.320,00	1.075.240.926.213,00	117,57	1.150.887.225.486,00	1.147.619.218.758,92	99,72
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23

Jumlah Anggaran Program Tahun 2022	Rp.	896.084.740,00
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2022	Rp.	879.060.000,00
Persentase Anggaran Program Tahun 2022	98,10%	

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit	100
2	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi E-Retribusi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
3	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Perkantoran	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
4	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perpajakan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
5	Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Lapak On	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
6	Terlaksananya Pemeliharaan Printer, High Speed Printer dan Plotter	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	
7	Terlaksananya Pemeliharaan Server, Komputer, Leptop, Mesin Antrian, Mesin Absensi, Mini PC, Mesin Anjungan, UPS	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	100
8	Terlaksananya Sewa Colocation	1 Paket	1 Paket	100
9	Terlaksananya SMS Gateway	1 Paket	1 Paket	100
10	Terlaksananya Pengadaan Internet Dedicated	1 Paket	1 Paket	100

Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan pengembangan, pembuatan atau pemeliharaan aplikasi/system informasi yang digunakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengelolaan Pajak Daerah Kota Bogor. Melalui kegiatan ini system dikembangkan dan/atau dipelihara sehingga dapat mendukung semua proses bisnis pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan, dan aplikasi yang digunakan dalam konteks pelaksanaan aktivitas perkantoran seperti e-SPPT dikembangkan dan/atau dipelihara.

Melalui kegiatan ini juga dilaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana system informasi yang digunakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengelolaan Pajak Daerah Kota Bogor

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya semua kebutuhan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sehingga Pengelolaan Pajak Daerah Kota Bogor dapat terlaksana dengan optimal.

Dari anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah sebesar Rp. 896.084.740,00 realisasi keuangan sampai Desember 2022 sebesar Rp. 879.060.000,00 (98,10%), sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 17.024.740,00 (1,90%) merupakan efisiensi.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	2021			2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23

Capaian kinerja Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah sebesar 95,11%. Dari target sebesar 33,34%, realisasi Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah tahun 2022 sebesar 31,71%.

Sedangkan Capaian kinerja Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 98,23%. Dari target sebesar 19,08%, realisasi Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah tahun 2022 sebesar 18,74%.

Untuk mendukung Sasaran Strategis ini pada tahun 2022 dialokasikan anggaran melalui Program sebagai berikut :

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja	Sat.	2021			2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Pajak Daerah	Rp.	565.600.000.000,00	624.784.886.145,00	110,46	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78
		Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	914.550.650.320,00	1.075.240.926.213,00	117,57	1.150.887.225.486,00	1.147.619.218.758,92	99,72
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23

Jumlah Anggaran Program Tahun 2022	Rp. 2.667.025.800,00
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2022	Rp. 2.458.102.220,00
Persentase Anggaran Program Tahun 2022	92,17%

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00
2	Terlaksananya Kajian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan judul kajian “Kajian Rumusan Pendapatan Asli Daerah”.	1 Kali	1 Kali	100,00
3	Terlaksananya Kajian Produk Hukum Pajak Daerah dengan judul kajian “Naskah Akademik Penyusunan Raperda Pajak daerah dan Retribusi Daerah”.	1 Kali	1 Kali	100,00

4	Terlaksananya Rakor PAD	2 Kali	2 Kali	100,00
5	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bapenda dengan PPAT dan BPN	1 Kali	1 Kali	100,00

Selain lima output tersebut diatas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2022, Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan melaksanakan kegiatan :

1. Memfasilitasi penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melaksanakan asistensi DPA Pendapatan;
2. Memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

No.	PKS/Kesepakatan Bersama	No. PKS/Kesepakatan Bersama & Tanggal Penandatanganan
1	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk Cabang Bogor tentang Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah	Nomor : 119/Perj.33-Bapenda/ 2022 Nomor : 005/BOG-PKS/2022
2	Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan PT. Bima Sakti Altera tentang Pemasangan Tapping Apps	Nomor : 119/Perj.47-Bapenda/ 2022 Nomor : 095/ADD-BSA/BimaPHR/ v/2022

Selain yang tersebut diatas, beberapa rumusan kerjasama antara pihak ketiga yang masih berlanjut yaitu :

1. PKS dengan PT Ayopop sebagai tindaklanjut kesepakatan bersama tentang Kerjasama Perluasan Digitalisasi Pelayanan Publik Kota Bogor;
2. PKS dengan PT Shoopee Indonesia sebagai tindaklanjut dengan telah PT Shoopee sebagai chanelling pembayaran PBB;
3. PKS dengan PT Bimasakti Altera tentang Pemasangan alat perekam transaksi.
4. PKS dengan STAN tentang pengadaan ASN yang berasal dari lulusan STAN;
5. PKS dengan Bank Kota Bogor tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bogor;
6. PKS dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat UP3 Bogor tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kota Bogor.

3. Memfasilitasi penyusunan kebijakan kepala daerah yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Sepanjang Tahun 2022, telah diterbitkan :

No.	Judul Peraturan	Nomor/Tanggal
1	Keputusan Wali Kota Bogor tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bogor Tahun 2022	195/Kep.9-Bapenda/ 2022 4 Januari 2022
2	Keputusan Wali Kota Bogor tentang Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022	195/Kep.10-Bapenda/ 2022 4 Januari 2022
3	Keputusan Wali Kota Bogor Tentang Penetapan Arah Kebijakan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Daerah Kota Bogor	973/Kep.65-Bapenda/2022 1 Maret 2022
4	Peraturan Wali Kota Bogor Tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun 2017 dan Tahun 2022, Serta Pengahapusan Sanksi Administrasi Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak sampai dengan Tahun 2021 Sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Bogor	7 Tahun 2022 24 Januari 2022
5	Keputusan Wali Kota Bogor Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020-2021	973/Kep.104-Bapenda/2022 25 Maret 2022
6	Peraturan Wali Kota Bogor tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa	66 Tahun 2022 3 Juli 2022
7	Peraturan Wali Kota Bogor Tentang Pengurangan Pajak Terhutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 Tahun 2022 di Kota Bogor.	87 Tahun 2022 3 Agustus 2022
8	Peraturan Wali Kota Bogor Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak sampai dengan Tahun 2022	103 Tahun 2022 27 September 2022

Dari anggaran Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah sebesar Rp. 373.189.600,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 345.974.500,00 (92,71%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 27.215.100,00 (7,29%) merupakan efisiensi.

2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Himbauan melalui Rollup Banner	91 Buah	91 Buah	100
3	Himbauan tentang PBB P2 melalui Spanduk	1.652 Meter	1.652 Meter	100
4	Pembuatan Video Profil dan Sosialisasi Bapenda Kota Bogor	1 Paket	1 Paket	100
5	Penyelenggaraan Gebyar Pajak Daerah	50 WP	50 WP	100
6	Sosialisasi Langsung Kepada Wajib Pajak	9 Kali	17 Kali	188,89
7	Sosialisasi melalui Leaflet	4.000 Lembar	4.000 Lembar	100
8	Sosialisasi Pengelolaan Pajak melalui Media Cetak Lokal	58 Kali	58 Kali	100
9	Sosialisasi Pengelolaan Pajak melalui Media Online Lokal	114 Kali	114 Kali	100

Kegiatan Sosialisasi Langsung kepada Wajib Pajak Daerah Lainnya dilakukan sebanyak 17 kali, yaitu pada Bulan Juni 1 kali, Bulan September 6 kali, Bulan Oktober 1 kali, Bulan November 2 kali, Bulan Desember 7 kali.

Dari anggaran Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah sebesar Rp. 406.516.400,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 406.202.520,00 (99,92%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 313.880,00 (0,08%).

3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Terlaksananya Akurasi Data Wajib Pajak Daerah	1.500 OP	1.514 OP	100,93
3	Terlaksananya Pendatan Wajib Pajak	247 WP	287 WP	116,19

Maksud dari kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah ini adalah sebagai upaya ekstensifikasi pajak untuk mencari informasi terkait objek dan subyek pajak yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah untuk kemudian dilakukan pengawasan serta pembinaan melalui kegiatan sosialisasi sampai mereka terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah.

Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah ditujukan untuk menggali dan menambah potensi baru Pajak Daerah di Kota Bogor sebagai upaya peningkatan Pajak Daerah yang bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 melalui kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan hasil sebagai berikut :

Penambahan Wajib Pajak 2022

Per-Jenis Pajak

No.	Jenis Pajak	Jumlah WP Tahun 2021	Penambahan Jumlah WP Tahun 2022					% Penambahan Jumlah WP
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahun 2022	
1	Hotel	257	9	0	0	1	10	3,89%
2	Restoran	1.440	52	51	70	65	238	16,53%
3	Hiburan	159	5	0	3	3	11	6,92%
4	Reklame	5.384	68	53	48	53	222	4,12%
5	Parkir	563	4	8	1	7	20	3,55%
6	Air Tanah	221	1	2	2	3	8	3,62%
7	PPJ	1	0	0	0	0	0	0,00%
Jumlah		**8.025**	**139**	**114**	**124**	**132**	**509**	**6,34%**

Penambahan Wajib Pajak 2022

Per-Triwulan

PERIODE	TARGET JUMLAH WP	JUMLAH WP	PERSENTASE
TRIWULAN 1	247	139	56,28%
TRIWULAN 2	247	114	46,15%
TRIWULAN 3	247	124	50,20%
TRIWULAN 4	247	132	53,44%
TAHUN 2022	**247**	**509**	**206,07%**

Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah secara target per tahun dapat tercapai sebesar 206,07% (Dua Ratus Enam Koma Nol Tujuh Persen), pencapaian terendah terjadi pada Triwulan Kedua yaitu sebesar 46,15% (Empat Puluh Enam Koma Lima Belas Persen).

Pelaksanaan Pekerjaan Uji Potensi Wajib Pajak pada tahun 2022 digantikan metodenya dari penungguan Wajib Pajak menjadi implementasi dan monitoring Alat Fiskal Elektronik terhadap 97 Wajib Pajak (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir) (Tabel Kegiatan Implementasi dan Monitoring Sistem/Alat Fiskal Elektronik).

Selain itu juga Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor juga menjalin kerjasama dengan Bank BJB untuk untuk penyediaan Sistem/Alat Fiskal Elektronik dengan menunjuk PT. Subaga Mitra Solusi sebagai Pelaksana Teknis Pemasangan Alat/Sistem Fiskal Elektronik dimaksud.

Dengan kegiatan pemasangan Sistem/Alat Fiskal Elektronik pada Wajib Pajak Daerah Kota Bogor tersebut dapat menggantikan

pelaksanaan pekerjaan Uji Potensi Wajib Pajak Daerah dimana tujuan kedua kegiatan tersebut adalah sama-sama dalam rangka upaya untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran pajak serta meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah Kota Bogor.

Kegiatan Implementasi dan Monitoring Sistem/Alat Fiskal Elektronik sesuai jadwal dilaksanakan pada bulan April 2022 dan sampai dengan Desember 2022 terhadap 97 Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Kegiatan Implementasi dan Monitoring Sistem/Alat Fiskal Elektronik

JENIS PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK TERMONITORING
RESTORAN	70
HOTEL	19
PARKIR	5
HIBURAN	3
JUMLAH	**97**

Permasalahan yang dihadapi :

1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan daerah
2. Penolakan oleh Calon Wajib Pajak untuk didaftarkan sebagai Wajib Pajak

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain :

1. Sosialisasi terkait pajak daerah kepada Wajib Pajak
2. Pemberian Surat Himbauan dan Teguran Pendaftaran Wajib Pajak

Dari anggaran Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebesar Rp. 208.946.100,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 132.193.200,00 (63,27%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 76.752.900,00 (36,73%). Anggaran sebesar Rp. 60.776.300,00 pada Paket Pekerjaan Pemutakhiran Data Wajib Pajak tidak terserap, dikarenakan penyesuaian Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan anggaran sebesar Rp. 13.600.000,00 tidak terserap karena Rekening Anggaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Bogor Spesifikasi : Non ASN Kota

Bogor dan ASN Diluar Pemkot Bogor dianggarkan Juga dalam Pagu Anggaran Satpol PP Provinsi Jawa Barat.

4) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Terlaksananya Pemeliharaan Basis Data PBB P2	25.726 Objek Pajak	22.120 Objek pajak	85,98
3	Terlaksanya Pemetaan Objek Pajak	25.726 Objek Pajak	22.120 Objek pajak	85,98

Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor melaksanakan Kegiatan Pemutakhiran Basis Data PBB P2 Spasial khususnya di wilayah Kecamatan Bogor Tengah dengan target sebanyak 25.726 NOP tersebar di 11 Kelurahan.

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan pemetaan dan basis data PBB tahun 2022 adalah sebanyak 22.120 Objek Pajak yang berhasil dipetakan (86%), 1.894 Objek Pajak adalah Fasos Fasum, 1.373 Objek Pajak Tidak Diketahui/Ditemukan, 339 Objek dapat diusulkan untuk dihapuskan karena *double anslagh* atau masalah lain. Pencapaian kinerja pemeliharaan basis data di tahun 2022 bisa terlaksana dengan baik dikarenakan adanya koordinasi antar *stakeholder* terkait.

Penyebab kegagalan dan terhambatnya ditahun 2022 antara lain Peran serta masyarakat Wajib Pajak PBB terutama ketika diminta melengkapi data-data administrasi pendukung yang terkadang kurang begitu antusias atau tidak memiliki data pendukung yg diminta sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan data yang diolah tidak optimal.

Upaya yang telah dilaksanakan yaitu mensosialisasikan kegiatan pemeliharaan basis data PBB P2 kepada Masyarakat dengan cara diadakannya Workshop di masing-masing kelurahan setempat, dan memberikan bekal ilmu kepada petugas-petugas pendata Objek Pajak dan menjalin kerja sama terhadap stakeholder terkait.

Alternatif untuk tahun 2022 yaitu dengan melakukan sosialisasi di setiap Kelurahan dan melakukan sosialisasi melalui media publik

lainnya seperti mengiklankan di sosial media facebook, Instagram dan Twitter begitu juga sosialisasi melalui papan reklame di tempat umum.

REKAPITULASI

KEGIATAN PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB-P2 TAHUN 2022

No.	Kelurahan	Jumlah Objek Pajak			Uraian Jumlah Objek Pajak							Hasil Input di Aplikasi Dalang
		DHR	SPPT	Hasil Pemetaan & Verlap	OP Individu	OP Fasum	OP Tidak Diketahui di DHR	OP Hapus	OP Ter-petakan	Mutasi	Data Baru	
1	Babakan	2.196	1.983	2.196	0	214	250	36	1.696	0	0	777
2	Sempur	1.557	1.423	1.557	0	119	99	42	1.297	61	1	536
3	Tegal Lega	3.628	3.422	3.628	0	191	339	17	3.081	27	12	1.041
4	Babakan Pasar	3.616	2.121	3.616	1.229	253	103	22	2.009	0	0	397
5	Gudang	1.832	1.639	1.832	0	184	259	39	1.350	0	0	178
6	Paledang	3.786	3.506	3.786	1.862	204	102	60	1.558	0	0	920
7	Panaragan	1.270	1.222	1.270	0	38	39	10	1.183	30	0	471
8	Pabaton	1.040	955	1.040	0	79	35	11	915	0	0	834
9	Kebon Kelapa	3.448	2.874	3.448	1.072	244	16	19	2.097	0	0	440
10	Cibogor	1.693	1.393	1.693	0	295	22	38	1.338	49	0	791
11	Ciwaringin	1.660	1.523	1.660	0	73	109	44	1.434	0	0	1.238
Total Objek Pajak		**25.726**	**22.074**	**25.726**	**4.163**	**1.894**	**1.373**	**338**	**17.958**	**167**	**13**	**7.623**

Permasalahan yang dihadapi :

a. Subjek Pajak tidak berada di tempat sehingga menyulitkan petugas pendata dalam melakukan pendataan terhadap suatu objek pajak PBB P2;
b. Jumlah personil (SDM) petugas pendata yang terbatas dengan kemampuan terhadap pemahaman dalam penyelesaian masalah atau hambatan di lapangan.
c. Kondisi cuaca dan ketepatan waktu (momen) yang tepat untuk bertemu dengan Wajib Pajak/Pihak yang berkompeten yang tidak dapat dipastikan diawal waktu menjadi hambatan terutama terhadap konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan alokasi waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain :

a. Melakukan sosialisasi secara komprehensif terhadap wajib pajak melalui surat edaran, brosur dan pengumuman-pengumuman yang bersifat informatif;
b. Penambahan bantuan penambahan personil dari aparat kelurahan setempat.

Dari anggaran Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah sebesar Rp. 333.280.500,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp.

310.200.100,00 (93,07%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 23.080.400,00 (6,93%) merupakan efisiensi.

5) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	5 Objek Pajak	13 Objek Pajak	260
2	Tersedianya Hasil Penilaian Objek Pajak Non Standar	5 Objek Pajak	13 Objek Pajak	260
3	Kegiatan Penelitian Penyesuaian NJOP PBB P2 Kota Bogor	1 Paket	1 Paket	100

Maksud dari kegiatan ini antara lain tersedianya harga penawaran tanah dan bangunan, tersedianya data harga transaksi atas tanah dan bangunan serta tersedianya hasil Penilaian Objek Pajak Non Standar.

Tujuannya adalah :

a. Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui penyesuaian NJOP PBB P2;
b. Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui Penilaian Objek Pajak Non Standar.

Dari anggaran Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 333.280.500,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 332.680.300,00 (99,82%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 600.200,00 (0,18%) merupakan efisiensi.

6) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	Tercetaknya Buku DHKP PBB	320 Buku	320 Buku	100,00
3	Terlaksananya Cetak Massal PBB	262.000 Lembar	272.900 Lembar	104,16

Maksud dari kegiatan ini adalah memastikan kebenaran penghitungan ketetapan pajak daerah. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan tertib administrasi pelaporan pajak daerah sesuai

dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bogor.

Melalui kegiatan ini tahun 2022 dilaksanakan juga kegiatan-kegiatan :

a. Penetapan Pajak Reklame sebanyak 4.189 Dokumen
b. Penetapan Pajak Air Tanah sebanyak 1.237 Dokumen
c. Penetapan PBB-P2 Cetak Massal, PBB-P2 Daftar Baru dan Penerbitan Kembali, antara lain :
    1) PBB-P2 Ketetapan Cetak Massal : 272.900 SPPT
    2) Penetapan PBB NOP Baru dan Penerbitan Kembali : 482 Dokumen
    3) Mencetak DHKP PBB-P2 : 68 Dokumen

Dari anggaran Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah sebesar Rp. 80.770.600,- realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 77.411.400,- (99,57%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.359.200,- (4,16%).

7) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	Terlaksananya Monitoring, Profilling dan maintenance Alat Fiskal Elektronik	1 Paket	1 Paket	100,00
3	Terlaksananya Penetapan Pajak Air Tanah	213 Ketetapan	276 Ketetapan	129,58
4	Terlaksananya Penetapan Pajak Reklame	4.945 Ketetapan	4.189 Ketetapan	84,71
5	Terlaksananya Validasi BPHTB	6.000 Berkas	6.092 Berkas	101,53
6	Terlaksananya Verifikasi dan Penghitungan Pajak Hiburan	162 Wajib Pajak	328 Wajib Pajak	202,47
7	Terlaksananya Verifikasi dan Penghitungan Pajak Hotel	248 Wajib Pajak	577 Wajib Pajak	232,66
8	Terlaksananya Verifikasi dan Penghitungan Pajak Parkir	566 Wajib Pajak	1.357 Wajib Pajak	239,75
9	Terlaksananya Verifikasi dan Penghitungan Pajak Penerangan Jalan	1 Wajib Pajak	1 Wajib Pajak	100,00
10	Terlaksananya Verifikasi dan Penghitungan Pajak Restoran	1.269 Wajib Pajak	2.811 Wajib Pajak	221,51
11	Terpenuhinya Data Kuota Alat Fiskal Elektronik	1 Paket	1 Paket	100,00

Maksud dari kegiatan ini adalah memastikan kesesuaian SPTPD dan SSPD yang dibayarkan dan memverifikasi kewajaran pelaporan pajak daerah. Tujuannya adalah meningkatkan tertib administrasi pelaporan pajak daerah.

Melalui Kegiatan ini dilaksanakan juga kegiatan-kegiatan :

a. Verifikasi Pajak Daerah Lainnya (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, PPJ) yang dilaksanakan pada januari sampai dengan Desember 2022 terhadap pelaporan omset wajib pajak antara lain :
   1) Pajak Restoran : 11.231 Dokumen
   2) Pajak Hotel : 2.218 Dokumen
   3) Pajak Hiburan : 1.114 Dokumen
   4) Pajak Parkir : 5.163 Dokumen
   5) Pajak Penerangan Jalan : 12 Dokumen
   6) SKPDKB Pajak Daerah Lain : 2 SKPDKB
b. Monitoring Alat Perekam Data Secara Elektronik yang dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Desember 2022 antara lain :
   1) Alat Perekam Data Secara Elektronik yang sudah termonitoring dan terprofiling sebanyak 97 Device;
   2) Maintenance Alat Perekam Data Secara Elektronik sebanyak 97 Device.
c. Penelitian BPHTB yang dilaksanakan pada Januari sampai dengan Desember 2022 terhadap berkas validasi BPHTB antara lain :
   1. BPHTB yang sudah diaproval : 5.031 Dokumen
   2. BPHTB yang diklarifikasi wajib pajak : 964 Dokumen
   3. BPHTB terdapat kurang bayar : 19 Dokumen
   4. STPD denda pelaporan bulanan PPAT : 90 STPD
   5. STPD denda PPAT 7.5 juta : 1 STPD
   6. STPD sanksi administrasi BPHTB : 3 STPD
   7. SKPDLB BPHTB : 2 SKPD

Masih adanya dampak pandemi covid 19 dan isu resesi global mempengaruhi keadaan ekonomi di seluruh negeri termasuk di Indonesia. Kota Bogor sendiri merasakan dampak dari pandemi dan resesi tersebut di masyarakat, diantaranya berdampak pada daya beli masyarakat menjadi berkurang yang berpengaruh juga pada Pendapatan Pajak.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Berkurangnya daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan pendapatan pajak;
2. Server Alat Perekam Data Secara Elektronik rusak;
3. Kerusakan pada beberapa device Alat Perekam Data Secara Elektronik;
4. Device Alat Perekam Data Secara Elektronik kadang dalam kondisi mati di wajib pajak;
5. WP tutup permanen;
6. Wajib Pajak banyak yang melakukan perubahan pada sistem cash registernya yang berakibat pada berubahnya layout struk tanda bukti penjualan;
7. Kurangnya SDM Verifikator BPHTB;
8. Proses Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame terkendala persyaratan Bank Garansi dan PPTR;
9. Pembuatan Sistem Informasi Bank Data Harga Pasar Tanah dan Bangunan;
10. Sering terlambatnya pengesahan NPA dari dinas ESDM provinsi jawa barat;
11. Mesin Printronik untuk Cetak Massal PBB-P2 terkadang rusak.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini antara lain :

1. Dihapuskannya denda keterlambatan pembayaran pajak.
2. Relaksasi pajak berupa penghapusan denda pajak dan pemberian diskon pajak akan dilanjutkan pada Tahun 2022.
3. Perbaikan server Alat Perekam Data Secara Elektronik, Install ulang server Alat Perekam Data Secara Elektronik, Backup server Alat Perekam Data Secara Elektronik;
4. Melakukan maintenance hardware maupun software device baru Alat Perekam Data Secara Elektronik;
5. Melakukan pengecekan lapangan ke Wajib Pajak;
6. Melakukan Profiling ulang.
7. Koordinasi dengan DPMPTSP, Dinas PUPR dan BJB.
8. Koordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan Dinas ESDM provinsi Jawa Barat.
9. Melakukan maintenance mesin Printronix.

Dari anggaran Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah sebesar Rp. 343.672.000,00 realisasi sampai

dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 267.107.600,00 (77,72%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 76.564.400,00 (22,28%) merupakan Anggaran Kuota Data yang tidak terserap sebanyak 50 buah dikarenakan dari rencana pemasangan alat Tapping Box dengan simcard sebanyak 97 buah pada bulan januari s/d juni baru terpasang alat dengan simcard aktif 47 buah dan Anggaran Komunikasi tidak digunakan dikarenakan adanya personil dari pihak penyedia yang standby di kantor Bapenda sehingga dapat berkomuniasi secara langsung.

8) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Diterimanya SPPT PBBP2 oleh Wajib Pajak	90.000 Lembar	90.000 Lembar	100
3	Operasi Gabungan Pemasangan Plang Pengawasan PBB P2	2 Kali	2 Kali	100
4	Operasi Gabungan Penertiban Reklame Permanen	2 Kali	2 Kali	100
5	Terlaksananya Koordinasi Bantuan Hukum dengan Kejaksaan bagi wajib pajak yang tidak patuh	6 Kali	6 Kali	100
6	Terlaksananya Layanan Mobil Keliling Pajak Daerah	5 Bulan	5 Bulan	100
7	Terlaksananya Penagihan Piutang Pajak Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100
8	Terlaksananya Penertiban Reklame Non Permanen	144 Kali	144 Kali	100

Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Bogor Nomor 93 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, dimana didalam kegiatan ini dilakukan upaya-upaya penindakan yang dilaksanakan baik berupa teguran lisan, tertulis, penutupan sampai dengan tindakan pembongkaran.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame di Kota Bogor, serta mengamankan PAD khususnya dari pajak reklame. Para Wajib Pajak diharapkan disiplin dan patuh terhadap ketentuan penyelenggaraan reklame di Kota Bogor dan khususnya dalam kewajiban perpajakan di Kota Bogor.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan :

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada wajib pajak secara tepat dan cepat. Penyebaran SPPT secara elektronik merupakan salah satu upaya perbaikan kinerja penyebaran SPPT PBB P2, diharapkan dengan peningkatan jumlah E-SPPT maka lebih memudahkan wajib pajak dalam menerima SPPT PBB P2. Tujuannya agar Wajib Pajak secara langsung dapat mengetahui jumlah yang harus dibayar dan Wajib Pajak dapat segera membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo.
2. Penertiban Pajak terhadap 6 jenis pajak antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame;
3. Operasi Gabungan Penertiban Reklame Permanen dengan menertibkan sebanyak 20 buah reklame;
4. Koordinasi Bantuan Hukum dengan Kejaksaan bagi wajib pajak yang tidak patuh;
5. Layanan Mobil Keliling Pajak Daerah;
6. Penagihan Piutang Pajak Daerah dan Penertiban Reklame Non Permanen sebanyak 144 kali (100%) dengan menertibkan sebanyak 4.538 lembar reklame non permanen.

Selain itu telah dilaksanakan juga :

1. Penagihan secara pasif berupa Surat Teguran Pajak Reklame, dan Pajak Daerah Lainnya untuk wajib pajak yang telah jatuh tempo. Selama Tahun 2022 ini telah dilakukan pemberian surat teguran sebanyak 396 surat teguran terhadap wajib pajak reklame dengan nilai sebesar Rp. 1.761.566.481,00 dan realisasi pembayaran atas surat teguran sebesar Rp. 1.662.087.449,00. Untuk Pajak Daerah Lainnya (PDL) telah dilakukan pemberian surat teguran terhadap 1.015 Wajib Pajak dengan nilai Rp. 34.477.634.269,00 dan realisasi pembayaran sebesar Rp. 23.535.624.833,00.
2. Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor kaitan penyelesaian piutang PBB P2 dan Pajak Daerah Lainnya yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor No : 119/KK.20-Bag.Huk./2020, 08/M.2.12/Gs/12/2020 tanggal 28 Desember 2020. Melalui kerjasama ini telah dilakukan upaya penagihan

piutang wajib pajak sebanyak 40 Wajib Pajak dengan nilai sebesar Rp. 7.719.651.237,00 dan realisasi Rp. 561.782.304,00.

3. Pemasangan Plang Dalam Pengawasan terhadap 11 Wajib Pajak PBB dengan jumlah piutang sebesar Rp. 3.976.332.065,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp. 139.518.000,00.
4. Upaya untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar PBB, Bapenda Kota Bogor melaksanakan pelayanan Mobil Keliling Pembayaran PBB P2 di Kelurahan-Kelurahan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID 19. Hasil pelayanan Mobling pelayanan pembayaran PBB P2 sebesar Rp. 1.617.449.996,00 dengan jumlah 6.303 NOP.
5. Penertiban Reklame Permanen dan Non Permanen dengan hasil sebagai berikut :

Penertiban Reklame Non Permanen			
No.	**Jenis Reklame**	**Jumlah**	**Keterangan**
	Spanduk	1.640	
	Banner	89	
	Pamflet	735	
	Umbul-umbul	2.074	
Jumlah		**4.538**	
Penertiban Reklame Permanen			
	Pembongkaran	20	

Capaian kinerja pada tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pandemic Covid 19 yang sudah berangsur pulih sehingga secara langsung dapat meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan pajak daerah.

Terdapat penurunan jumlah operasi reklame non permanen karena menyesuaikan dengan kebijakan daerah untuk mengurangi area pemasangan reklame non permanen dan beralih ke reklame permanen dan videotrone.

Adapun dalam kegiatan penagihan piutang terdapat permasalahan yang dihadapai antara lain :

a. Objek dan Subjek Pajak tidak jelas;
b. Objek Pajak masih bermasalah;SPPT Double;
c. Penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti tidak berijin, tidak membayar pajak, melakukan pemasangan reklame tidak pada tempat yang semestinya yang

dapat membahayakan orang lain dan tidak sesuai estetika (menyalahi K3);

d. Wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak dan melakukan pemasangan tanpa ijin yang dilakukan pada hari libur kerja;

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut :

a. Koordinasi dengan aparat Kelurahan setempat;
b. Laporan penyampaian SPPT PBB P2 harus dengan menggunakan aplikasi penyampaian struk agar dapat dimonitor progress setiap harinya;
c. Menyampaikan laporan SPPT PBB P2 tidak disampaikan kepada wajib pajak karena masih bermasalah kepada bidang terkait agar dapat ditindaklanjuti;
d. Melakukan tindakan penertiban reklame yang meliputi penutupan dan pembongkaran terhadap reklame yang melanggar ketentuan;
e. Melakukan kegiatan lembur penertiban reklame pada hari libur kerja;
f. Melakukan peneguran terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban dan menghimbau agar segera melaksanakan kewajibannya baik mengurus perijinan ataupun membayar pajak, dengan menutup sementara reklame tersebut.
g. Mendata serta mendaftarkan secara langsung wajib pajak PBB P2 melalui aplikasi e-SPPT agar pada tahun berikutnya SPPT dapat disampaikan secara elektronik.

Dari anggaran Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah sebesar Rp. 499.936.600,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 499.936.600,00 (100 %).

9) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Kajian Pemetaan Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Resiko Ketidakpatuhan	1 Kajian	1 Kajian	100
3	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak	2 Kali	2 Kali	100

4	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	200 Wajib Pajak	226 Wajib Pajak	113

Sistem pemungutan pajak terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk pajak yang dibayar sendiri, Wajib Pajak memiliki kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Konsekuensi dari sistem ini adalah kemungkinan pelaporan dan pembayaran pajak yang tidak benar, baik akibat dari salah hitung atau unsur ketidakpatuhan dari Wajib Pajak. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki kewajiban untuk mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berupa pelaporan dan pembayaran pajak. Pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dalam kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan kepada wajib pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan BPHTB, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Pembuatan Kajian Pemetaan Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Resiko Kepatuhan;
b. Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan dengan narasumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 3 dan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
c. Pengawasan/Klarifikasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
d. Pemeriksaan kepada wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Pajak Daerah;
e. Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang tutup dan dihapus Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) nya;
f. Pemeriksaan kepada wajib pajak yang mengajukan restitusi kompensasi.

Hasil Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah tahun 2022 atas kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan kurang bayar pajak sebesar Rp. 9.991.771.426,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengawasan/Klarifikasi kepada 35 Wajib Pajak Restoran, dengan pengakuan kurang bayar Rp. 1.852.822.142,00;

b. Pemeriksaan kepada 4 Wajib Pajak Restoran dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebesar Rp. 6.567.776.025,00;
c. Pengawasan/Klarifikasi kepada 14 Wajib Pajak Hotel, dengan kurang bayar sebesar Rp. 623.231.643,00, sebanyak 10 Wajib Pajak Hotel akan diteruskan proses klarifikasi dan pemeriksaan di tahun 2023;
d. Pengawasan/Klarifikasi kepada 4 Wajib Pajak Parkir, dengan kurang bayar sebesar Rp. 764.693.00,00;
e. Pemeriksaan kepada 36 Wajib Pajak BPHTB dengan jumlah kurang bayar sebesar Rp. 183.248.616,00;
f. Pemeriksaan kepada 120 Wajib Pajak untuk penghapusan NPWPD yaitu kepada :
    1) Wajib Pajak Restoran yang dihapuskan sebanyak 87 WP;
    2) Wajib Pajak Hiburan yang dihapuskan sebanyak 11 WP;
    3) Wajib Pajak Parkir yang dihapuskan sebanyak 21 WP;
    4) Wajib Pajak Hotel yang dihapuskan sebanyak 1 WP.
g. Pemeriksaan dalam Rangka Tujuan Lain yaitu pengajuan restitusi dan kompensasi kepada 14 Wajib Pajak BPHTB, 1 Wajib Pajak Reklame dan 5 Wajib Pajak PBB.

Hasil pengawasan dan pemeriksaan pajak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnnya baik dari jumlah Wajib Pajak maupun dari jumlah kurang bayar pajak, tetapi kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan masih masih cukup banyak diantaranya adalah :
a. Masih kecilnya rasio jumlah pemeriksa pajak dibandingkan dengan jumlah wajib pajak;
b. Masih kurangnya kompetensi pemeriksa pajak;
c. Tidak adanya fungsional pemeriksa pajak;
d. Tidak ada pemeriksa yang memiliki kemampuan untuk audit system informasi;
e. Tidak diakomodirnya anggaran untuk melaksanakan observasi lapangan dan profiling data Wajib Pajak;

Dari anggaran Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah sebesar Rp. 87.433.500,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 86.396.000,00 (98,81%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.037.500,00 (1,19%) merupakan efisiensi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM BAPENDA

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth, pro-job, pro-poor,* dan *pro-environment* serta pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan melalui :

1. Klaster 1 (pertama) Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga
2. Klaster 2 (kedua) Program Pemberdayaan Masyarakat
3. Klaster 3 (ketiga) Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro
4. Klaster 4 (keempat) Program Pro Rakyat.

Prioritas Pembangunan Kota Bogor yaitu Peningkatan Kualitas Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Reformasi Birokrasi sejalan dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan suatu pendanaan. Disinilah tugas Badan Pendapatan Daerah Sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Dibutuhkan kerja keras Badan Pendapatan Daerah sebagai pendongkrak Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan Prioritas Kota Bogor.

2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mencakup Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 Perubahan. Sedangkan program disajikan sebagai strategi relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), Manfaat (*Benefit*) dan Dampak (*Impact*).

Tujuan adalah suatu hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang menggambarkan arah strategis dan meletakkan kerangka prioritas pencapaian misi. Tujuan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi berdasarkan analisis lingkungan serta faktor-faktor penentu keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam waktu tahunan. Pada kondisi ideal penetapan sasaran akan sangat baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, jangka waktu pencapaiannya jelas. Berorientasi pada Hasil (*Outcome*) nyata, serta mengandung prinsip efektif dan efisien dari isu strategis.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan kemudian dirumuskan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategis) berupa serangkaian kebijakan dan program.

Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya. Dari uraian tersebut di atas, maka hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Cara Mencapainya (Kebijakan dan Program) yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Tujuan merupakan penjabaran dari misi organisasi untuk pencapaian target yang telah ditetapkan dan merupakan ukuran kinerja sebagai faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya tujuan, maka arah organisasi akan lebih jelas dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Tujuan adalah suatu hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategis dan meletakkan kerangka prioritas pencapaian misi.

Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah dari pada misi kedua dan ketiga Pemerintah Kota Bogor yaitu Misi ke 2 ***Mewujudkan Kota Yang Cerdas*** dan Misi ke 3 ***Mewujudkan Kota Yang Sejahtera.***

Tujuan dan sasaran yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Sebagai penjabaran tujuan dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam waktu tahunan. Penetapan sasaran akan sangat baik, apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, jangka waktu pencapaiannya jelas, berorientasi pada hasil (*outcome*) nyata, serta mengandung prinsip efektif dan efisien.

Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang.

Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan antara lain :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari misi Kota yang telah ditetapkan dan dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Dari uraian tersebut di atas, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor menetapkan sasaran dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. **Misi Kedua :** Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas, dan tertuang di dalam tujuan pertama Badan Pendapatan Daerah yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan indikator kinerja tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

   Sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah.
2. **Misi Ketiga :** Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera dan tertuang di dalam tujuan Badan Pendapatan Daerah yaitu :
   a. Tujuan Kedua : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Dalam Pelayanan Pajak Daerah dengan indikator kinerja tujuan Kenaikan Nilai IKM

      Sasarannya antara lain :

1) Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah dengan indikator kinerja sasaran Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak;
2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak melalui Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (*Smart City*) dengan indikator kinerja sasaran Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah.

b. Tujuan Ketiga : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja tujuan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sasarannya adalah Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator kinerja sasaran :

1) Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah;
2) Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Program dan Kegiatan

Program adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi penetapan kebijakan, Program operasional, dan Kegiatan/aktivitas. Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam RPJMD 2019-2024 Perubahan.

Dalam upaya mencapai tujuan, rencana program merupakan aplikasi arah kebijakan dan cara mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Adapun rencana program Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah Spesifik, Terukur, Agresif, Berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu.

Adapun kegiatan yang sudah direncanakan untuk mendukung keberhasilan program yang telah ditetapkan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan :
    1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
        1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
        2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
        3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
        1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
        2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
        3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.
    3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
        1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
        2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
        3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
        4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
        5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
        6. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
        7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
    4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
        1. Pengadaan Mebel;
        2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
    5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
        1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
        2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
        3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
    6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pemeliharaan Mebel;
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Kegiatan :
    1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
        1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
        2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
        3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
        4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
        5. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
        6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
        7. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
        8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
        9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
        10. Penagihan Pajak Daerah;
        11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Dari uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, masing-masing kegiatan memiliki pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, namun besaran dari pendanaan tersebut akan disesuaikan dengan kekuatan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing Tahun Anggaran.

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 berisi Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Jumlah seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebanyak 2 Program, 7 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang terdiri dari Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Total Kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 47.431.728.608,-. Nilai Total anggaran tersebut di alokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2024 akan dirinci pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan ekternal.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan pedoman dasar untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam mencapai Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebijakan pada tahun yang ditetapkan dalam merealisasikan Visi dan Misi Walikota Bogor.

Dengan demikian, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan rencana diatasnya (Renstra PD, RKPD dan RPJMD Kota Bogor) serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk mempersiapkan diri agar dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Kebutuhan Anggaran Belanja untuk pencapaian program-program yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun 2024 sebesar Rp. 47.431.728.608,- dengan 2 Program, 7 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan;

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri 1 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor menerapkan manajemen strategis sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki Tujuan dan Sasaran yang selaras dengan apa yang dituangkan dalam Rencana Strategis dengan program dan kegiatan yang realistis sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian jika program dan kegiatan yang diusulkan memang secara prinsip harus disesuaikan. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang lebih baik.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Tujuan Daerah.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Daerah (Bapperida) Kota Bogor merupakan Badan yang memiliki Tugas dan Fungsi dalam melaksanakan penyusunan kebijakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, serta termasuk melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan.

Prioritas Renja Bapperida Tahun 2025 diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Penelitian dan Pengembangan dengan memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 serta sasaran pelaksanaan Tahun 2024.

Sistematika Penyusunan Renja Bapperida Kota Bogor Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;

13) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

20) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
21) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
22) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
23) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
24) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
25) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 33 Seri E);
26) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
27) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;
28) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
29) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;

30) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025
31) Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 060.45-295 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bogor.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025 untuk memberikan gambaran tentang Rencana Kerja Bapperida Kota Bogor selama Tahun 2025 berupa penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2026.

Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 berupa rencana kinerja yang mencakup rencana capaian kinerja Tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bapperida Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida,

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapperida

2.4 Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bapperida

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPPERIDA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor pada tahun 2023 mengelola anggaran sebesar **Rp. 21.973.582.783.- (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah**) dengan realisasi sebesar Rp. **21.154.340.135.- (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah)** atau sebesar **96,27%** atau kategori **Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Kegiatan Tahun 2023

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	PERENCANAAN	**19.668.195.243,00**	**18.929.237.435,00**	**96,24**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**177.709.800,00**	**149.666.700,00**	**84,22**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.308.400,00	106.547.900,00	92,40
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.193.600,00	21.649.800,00	56,68
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.207.800,00	21.469.000,00	88,69
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.297.690.954,00**	**11.955.035.336,00**	**97,21**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.259.340.754,00	11.916.790.736,00	97,21
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.914.200,00	14.914.200,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	23.436.000,00	23.330.400,00	99,55
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**902.661.381,00**	**868.388.295,00**	**96,20**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.959.800,00	12.940.600,00	99,85
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.754.200,00	66.486.845,00	98,13
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.528.800,00	17.087.900,00	97,48
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.350.200,00	23.334.615,00	99,93
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	12.330.000,00	82,20
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	766.068.381,00	736.208.335,00	96,10

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**274.425.900,00**	**267.502.350,00**	**97,48**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	274.425.900,00	267.502.350,00	97,48
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.165.527.200,00**	**1.133.566.828,00**	**97,26**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.213.520,00	138.306.097,00	92,07
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.015.313.680,00	995.260.731,00	98,02
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**658.942.200,00**	**555.759.326,00**	**84,34**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	266.066.400,00	218.104.112,00	81,97
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.999.800,00	96.635.400,00	99,62
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	295.876.000,00	241.019.814,00	81,46
7	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1.474.121.500,00**	**1.448.028.600,00**	**98,23**
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	102.232.000,00	100.105.800,00	97,92
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	50.000.000,00	48.938.400,00	97,88
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	555.540.000,00	551.007.400,00	99,18
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	766.349.500,00	747.977.000,00	97,60
8	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**467.492.400,00**	**442.616.400,00**	**94,68**
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	397.580.000,00	382.740.200,00	96,27
	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	69.912.400,00	59.876.200,00	85,64
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	**271.260.400,00**	**267.790.500,00**	**98,72**
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	271.260.400,00	267.790.500,00	98,72
11	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**796.549.200,00**	**745.756.000,00**	**93,62**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	378.240.600,00	353.118.200,00	93,36

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	418.308.600,00	392.637.800,00	93,86
12	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**1.181.814.308,00**	**1.095.127.100,00**	**92,66**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	583.977.400,00	545.526.400,00	93,42
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	532.082.908,00	494.762.500,00	92,99
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	65.754.000,00	54.838.200,00	83,40
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**2.305.387.540,00**	**2.225.102.700,00**	**96,52**
13	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**847.695.200,00**	**839.236.160,00**	**99,00**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	182.632.125,00	178.176.300,00	97,56
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	124.226.700,00	123.367.360,00	99,31
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	540.836.375,00	537.692.500,00	99,42
14	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**1.110.385.140,00**	**1.072.613.840,00**	**96,60**
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100.000.000,00	98.511.550,00	98,51
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	269.645.011,00	269.561.950,00	99,97
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	171.758.304,00	151.411.200,00	88,15
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	473.374.625,00	460.598.540,00	97,30
	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	95.607.200,00	92.530.600,00	96,78
16	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**347.307.200,00**	**313.252.700,00**	**90,19**
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	298.648.200,00	295.077.700,00	98,80
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	48.659.000,00	18.175.000,00	37,35
JUMLAH		**21.973.582.783,00**	**21.154.340.135,00**	**96,27**

Table 1 Anggaran dan Realisasi Kegiatan Tahun 2023

Capaian Program pada tahun 2023 sebesar 63,16%, dari 19 Indikator kegiatan terdapat 12 indikator program yang mencapai target sedangakan 7 indikator tidak tercapai, dengan rincian sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	A	100
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,52	3,58	101,68

Table 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.15.476.957.435, dengan realisasi sebesar Rp.14.929.918.835, atau sebesar 96,47% yang diintervensi oleh 6 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun dengan tujuan memberikan arahan serta acuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring evaluasi kinerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor. Pada tahun 2023 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 177.709.800, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.666.700, atau sebesar 84,22%, Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah secara sistematis, komprehensif dan sinergi dengan arah pembangunan, penyusunan dokumen perencanaan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini, yaitu :

- Dokumen Ranwal Rencana Strategis tahun 2025 – 2026.
- Dokumen Rencana Kerja tahun 2024.
- Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tauhn 2023.
- Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMANJA) Bappeda

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD bertujuan untuk menyusun dokumen pelaporan capaian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik serta yang diatur lebih lanjut oleh Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah, output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini, yaitu:

- Laporan LKIP tahun 2022.
- Laporan LKPJ tahun 2022.
- Laporan LPPD tahun 2022.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah bertujuan untuk menyusun dokumen evaluasi kinerja Bapperida, yang digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun berikutnya, output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini yaitu, Dokumen Manajemen Risiko tahun 2024.

2. Administrasi Keuangan

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah merupakan kegiatan rutin pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan organisasi. Pada tahun 2023 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.297.690.954, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.955.035.336, atau sebesar 97,21%, Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah selama satu tahun anggaran secara efektif dan efisien, output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini yaitu, pemenuhan gaji dan tunjangan ASN.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD bertujuan untuk mengakomodir pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dalam rangka menunjang tatakelola keuangan, output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini yaitu, tersusunnya laporan keuangan tahun 2023.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD bertujuan untuk mengakomodir pelaksanaan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semester Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dalam rangka menunjang tatakelola keuangan, output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini yaitu:

- Laporan keuangan bulanan tahun 2023.
- Laporan keuangan triwulanan tahun 2023.
- Laporan keuangan semesteran tahun 2023

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum merupakan serangkaian kegiatan rutin yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu hubungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang didalamnya terdapat aktifitas mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, pengetikan, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan. Pada tahun 2023 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 177.709.800, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.666.700, atau sebesar 84,22%, Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan

setiap tahun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Bapperida Kota Bogor berupa Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Bapperida Kota Bogor.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, bertujuan untuk mendukung terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan Alat Tulis dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, bertujuan untuk pemenuhan bahan logistik kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas Bapperida

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, bertujuan untuk melaksanakan penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan, seperti cetak spanduk, penggandaan dan penjilidan.

e. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, bertujuan untuk memberikan penyediaan makan minum dalam rangka fasilitasi kunjungan tamu dari instansi luar ke Bapperida yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, baik yang sifatnya studi banding/studi tiru/koordinasi/konsultasi dan bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun,, bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan rapat seperti rapat koordinasi, konsultasi dan diskusi yang dilaksanakan di kantor Bapperida. Substansi dalam rapat tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan dan kelitbangan yang bisa digunakan sebagai referensi/data dan informasi, masukan/ saran. Serta untuk mengakomodir

penyelenggaraan undangan rapat yang dilaksanakan di luar Kota Bogor, dalam rangka penambahan wawasan/pengetahuan.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan pembelian/perolehan Barang atas beban APBD berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Pada tahun 2023 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 274.425.900, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 267.502.350, atau sebesar 97,48%, Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, bertujuan untuk mendukung terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan peralatan kantor seperti personal komputer, laptop, printer, AC dan lainnya.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan Jasa Penunjang seperti penyediaan jasa sumber daya air, listrik, komunikasi, petugas kebersihan, petugas keamanan, SDM pelayanan dan lainnya dalam pelaksanaan operasional kantor. Pada tahun 2023 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.165.527.200, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.133.566.828, atau sebesar 97,26%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, bertujuan untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat dimana setiap tahun harus dianggarkan sesuai dengan kebutuhan organisasi guna menunjang pelaksanaan tugas pada Bapperida.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai Non ASN pada Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor seperti petugas kebersihan/pramu bakti, satpam, pengemudi dan tenaga administrasi sesuai dengan kebutuhan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada masing masing jabatan lingkup Bapperida.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengelola barang milik daerah. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kualitas barang milik daerah agar selalu dalam kondisi optimal dan siap pakai. Pada tahun 2023 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 658.942.200, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 555.759.326, atau sebesar 84,34%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, bertujuan untuk memelihara/menjaga agar Kendaraan Dinas dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pemeliharaan kendaraan dinas yang dilakukan berupa pemberian biaya BBM, servis berkala, penggantian suku cadang dan perpanjangan STNK.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, bertujuan untuk pemeliharaan/perawatan secara rutin peralatan dan mesin kantor sangat penting untuk menunjang pelaksanaan tugas. Dengan adanya peralatan dan mesin kantor banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat, dengan hasil yang memuaskan. Namun adakalanya keberadaan peralatan dan mesin kantor justru mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kantor

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, bertujuan untuk pemeliharaan/perawatan gedung kantor sehingga gedung kantor Bappeda selalu dalam keadaan

terawat/terpelihara dengan baik, bersih, dan nyaman untuk digunakan oleh pegawai ataupun tamu yang berkunjung ke kantor Bapperida

B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	25	24,05	96,20
	Keterwakilan Masyarakat Dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	27,5	25,70	93,45
	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	97,5	95	97,44
	Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	35,77	36,50	102,04
	Persentase ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	80,65	67.74	83,99

Table 3 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Data Capaian sementara

Dalam pelaksanaan Program Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada tahun 2023, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 2.212.874.300, dengan realisasi sebesar Rp. 2.158.435.500 atau sebesar 97,54% yang diintervensi oleh 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan adalah kegiatan yang berisikan proses penyusunan dokumen perencanaan mulai dari tahapan Konsultasi Publik hingga penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2023 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.474.121.500, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.448.028.600, atau sebesar 98,23%, Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Konsultasi Publik RKPD 2024 ini dilakukan untuk mendapat masukan dari pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rancangan awal RKPD.

b. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah merupakan acara dialog antara perangkat daerah yang menjadi tujuan usulan Musrenbang dan Pokir DPRD Tahun 2024 dengan perwakilan Masyarakat dan perwakilan DPRD. Dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini terdapat kesepakatan yang kemudian di tuangkan kedalam berita acara yang di tandatangani oleh Ketua Kelompok Diskusi, Unsur DPRD, Unsur Bappeda, Unsur Perangkat Daerah, Perwakilan dari 6 Kecamatan dan Perwakilan LPM dari 6 Kecamatan.

c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Musrenbang Kota merupakan kegiatan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif. Pendekatan partisipatif diperlukan untuk mengetahui dan menampung berbagai permasalahan, keinginan dan kebutuhan yang ada di masyarakat dan para pemangku kepentingan, yang selanjutnya dijadikan salah satu bahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

d. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota memiliki output dianntaranya Perwali RKPD Kota Bogor Tahun 2024, Perwali RKPD Perubahan Kota Bogor Tahun 2023, Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor 2025-2026, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor 2025-2045, Renstra Perangkat Daerah 2025-2026. dan Renja Perangkat Daerah 2024

2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap program-program pembangunan daerah. Pada tahun 2023 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 467.492.400, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 442.616.400, atau sebesar 94,68%, Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Kegiatan pengendalian dan evaluasi di dalam siklus perencanaan pembangunan sangatlah penting karena hasil pengendalian dan evaluasi dapat digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RKPD dengan RPJMD dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

b. Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat daerah pada umumnya. Bapperida Kota Bogor dalam hal ini berperan sebagai Sekretariat Tim Fasilitasi TJSLP Kota Bogor. Dalam pelaksanaan tugasnya diantaranya adalah melaksanakan fasilitasi TJSLP di Kota Bogor.

3. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan adalah suatu kegiatan yang melakukan proses pengolahan data dan informasi yang bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan di Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah. Pada tahun 2023 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 271.260.400, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 267.790.500, atau sebesar 98,72%, Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Salah satu bentuk pengelolaan data yakni terlaksananya kegiatan Forum Satu Data di Kota Bogor. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Forum Satu Data ini. BPS dan Badan Informasi Geospasial Kota Bogor bertindak sebagai pembina data, Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai walidata, Bappeda bertindak sebagai Sekretariat serta Perangkat Daerah lainnya sebagai produsen data.

C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Capaian 2023	Capaian (%)
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	82	86,97	106,06
	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia	80	69,44	86,80
	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	82	87,82	107,10
	Persentase ketercapaian target Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	78,38	74	94,41
	Persentase keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	82	92,10	100

	Persentase ketercapaian target Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	75,32	76,67	101,79
	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	82	91,23	111,26
	Persentase ketercapaian target Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	71	71,67	100,94

Table 4 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2023, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.978.363.508, dengan realisasi sebesar Rp. 1.840.883.100 atau sebesar 93,05% yang diintervensi oleh 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**

   Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah kegiatan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dengan alokasi aggaran sebesar Rp. 796.549.200, dengan realisasi sebesar Rp. 745.756.000 atau sebesar 93,62%. Kegaitan ini di dukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

   a. **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

      Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) memiliki output dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bogor.

   b. **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

      Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, RKPD) memiliki output dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Kota Bogor.

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah kegiatan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Kewilayahan. Pada tahun 2023 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.181.814.308, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.095.127.100, atau sebesar 92,66%, Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) merupakan sub kegiatan yang didalamnya melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Feasibility Study Utilitas Terpadu.

b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) merupakan sub kegiatan yang didalamnya melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Air Limbah

c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan merupakan sub kegiatan yang didalamnya melaksanakan Pekerjaan Fasilitasi Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman (Pokja PKP) dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Forum PKP) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.

D. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	85	100	117,65
	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di implementasikan dan berkelanjutan	90	63	70
	Persentase inovasi masyarakat yang menunjang visi misi Kota Bogor	96,50	96,70	100,21
	Jumlah kampung tematik/kampung wisata	2	7	350

Table 5 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dalam pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2023, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 2.305.387.540, dengan realisasi sebesar Rp. 2.225.102.700 atau sebesar 96,52% yang diintervensi oleh 3 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Kegaitan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 847.695.200, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 839.236.160, atau sebesar 99%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial

Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk Menyusun kajian kesejahteraan keluarga dari aspek Kesehatan remaja, tujuan dari pelaksanaan kajian ini yaitu :

- Mengetahui profil remaja yang meliputi karakteristik keluarga, karakteristik remaja, gaya pengasuhan, interaksi teman sebaya, resiliensi, kenakalan remaja, kesehatan fisik dan gangguan mental remaja.
- Menganalisis hubungan karakteristik keluarga dan karateristik remaja dengan gaya pengasuhan, hubungan antara gaya pengasuhan, interaksi teman sebaya dengan kenakalan, resiliensi remaja dan gangguan kesehatan mental remaja.

- Menganalisis pengaruh karakteristik keluarga dan karateristik remaja gaya pengasuhan, interaksi teman sebaya, akses media sosial, kenakalan terhadap gangguan kesehatan mental remaja.
- Menganalisis berbagai kebijakan dan program bagi remaja di Kota Bogor.
- Menyusun model untuk mewujudkan remaja yang sehat secara fisik dan mental untuk mendukung terwujudnya generasi emas Kota Bogor.

b. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dilaksanakan melalui Kajian Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Komunitas. Usulan kajian ini didasarkan aspirasi komunitas yang ada dalam masyarakat Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. Mereka menilai wilayah mereka memiliki 3 (tiga) potensi wisata untuk dikembangkan, Yang pertama adalah sebagai Kampung Ketupat yang berada RW 04 dengan jumlah anggota komunitas pengrajin ketupat mencapai 40 orang, Yang kedua adalah Kampung Aci di RW 04, sebagai penghasil aci/tapioka dengan kualitas yang baik dan telah dikenal di luar Kota Bogor. Selain itu, Kelurahan Cimahpar juga memiliki komunitas yang berbasis industri turunan aci/tapioka dengan produk cireng, cilok, cilok kotak, basreng, aneka kue basah dan kue kering dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Kampung Wisata Air.

c. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja

Sub Kegiatan ini berisikan Kajian Tenaga Kerja yang merupakan gambaran kecil tentang kondisi tenaga kerja di Kota Bogor, yang diawali adanya proses Perencanaan Tenaga Kerja yang menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program ketenagakerjaan yang berkesinambungan, Kajian ini dilaksanakan bekerjasama dengan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan (IBIK) Bogor. Tujuan penyusunan kajian ini adalah :

- Menggambarkan situasi ketenagakerjaan Kota Boogor saat ini dan dampak perekonomian terhadap penciptaan kesempatan kerja dengan berbagai karakteristik.
- Memperkirakan persediaan tenaga kerja Kota Bogor tahun 2023-2027 dengan berbagai karakteristik.

- Memperkirakan Proyeksi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bogor tahun 2023-2028.
- Memperkirakan Proyeksi Angkatan Kerja Kota Bogor tahun 2023-2028.
- Memperkirakan Proyeksi Penduduk Yang Bekerja Kota Bogor tahun 2023-2028.
- Menyusun rekomendasi kebijakan, strategi, dan program dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Kota Bogor.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kajian yaitu tersedianya data tentang kondisi ketenagakerjaan di Kota Bogor serta menjadi rekomendasi awal dalam mengatasi pengangguran di Kota Bogor.

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Meliputi sub kegiatan sebagai berikut

a. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Sub kegiatan ini memiliki output berupa Kajian Penyusunan Dokumen Rancang Lansekap Kampung Tematik di dua lokasi yaitu Kampung Lauk di Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat dan Kampung Bebek di Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara. Pelaksanaan Sub Kegiatan ini didanai anggaran sebesar Rp. 145.290.000, dengan realisasi sebesar 130.938.700 atai sebesar 90,12%.

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegaitan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.110.385.140, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.072.613.840, atau sebesar 96,6%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut

a. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Sub Kegiatan ini memiliki output: berupa Kajian Model Urban Farming Menuju “Food Security” di Kota Bogor. Kajian ini bertujuan untuk :

- Menganalisis distribusi kawasan urban farming yang berpotensi sebagai kawasan pangan di Kota Bogor.
- Menganalisis struktur, fungsi, dan dinamika urban farming di Kota Bogor.
- Menganalisis keberlanjutan pengelolaan urban farming di Kota Bogor.
- Mengidentifikasi skenario kebijakan pengelolaan urban farming di Kota Bogor.
- Membuat model kebijakan dalam pengelolaan urban farming di Kota Bogor.

Kajian ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pusat Kajian Ekologi Konservasi dan Lingkungan LPPM Unindra PGRI.

b. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup memiliki output berupa Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Bogor Tahun 2023-2027 dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Bogor Tahun 2024-2028, tujuan dari penyusunan kajian ini adalah :

- Melakukan analisis bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko bahaya.
- Menyusun rencana aksi penanggulangan bencana di Kota Bogor.
- Menyusun draft Peraturan Wali Kota Bogor tentang KRB dan RPB.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana maka pemerintah Kota Bogor maupun pihak terkait diharapkan dapat melegalkan dokumen kajian risiko bencana ini sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Selain itu, dokumen kajian risiko bencana yang legal dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) di Kota Bogor.

c. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Transportasi dengan judul paket pekerjaan “antisipasi dampak sosial ekonomi akibat pembangunan di kawasan Jalan OTISTA Kota Bogor terhadap pergerakan lalu lintas dan pelayanan angkutan umum orang, barang

dan jasa". Tujuan dari kajian ini adalah menyusun rekomendasi kebiakan untuk antisipasi dampak sosial ekonomi akibat pembangunan di kawasan Jalan OTISTA Kota Bogor terhadap pergerakan lalu lintas dan pelayanan angkutan umum orang, barang dan jasa.

d. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Transportasi dengan judul paket pekerjaan "Kajian Strategi Kebijakan Pengelolaan Agroforestry Perkotaan Di Kota Bogor". Maksud dari kajian ini adalah membuat desain kebijakan pengelolaan agroforestri perkotaan di Kota Bogor, Tujuan dari kajian ini adalah mencapai tujuan utama penelitian ini antara lain :

- Menganalisis kondisi eksisting pemanfaatan lahan non terbangun di Kota Bogor, meliputi: kondisi biofisik lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan.
- Menganalisis kesesuaian/ketersediaan lahan dan menentukan *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan lahan non terbangun sebagai agroforestri di Kota Bogor.
- Menentukan status keberlanjutan pengelolaan lahan non terbangun sebagai agroforestri di Kota Bogor.
- Menganalisis elemen kunci dan menyusun rekomendasi kebijakan pengelolaan agroforestri di Kota Bogor.

e. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan permasalahan di Kota Bogor, Dimana Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan organisasi Fanator sebagai organisasi resmi yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor, selain itu Pengurus Fanator kesulitan menemukan rekam jejak pengurus sebelumnya terkait informasi kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh pengurus sebelumnya dan kurangnya aspirasi dari anggota Fanator untuk dapat mengintegrasikan informasi layanan publik yang ada di pemerintah Kota Bogor yang berkaitan dengan anak/pemenuhan hak anak. Tujuan dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya *Website* Forum Anak Kota Bogor yang menyediakan fitur-fitur interaktif sehingga memudahkan anak Kota Bogor untuk mempe*role*h informasi

terkait Kota Layak Anak dan mendukung tugas Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Bogor dalam sosialisasi dan advokasi kebijakan.

4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi adalah kegiatan penyusunan kebijakan teknis tentang penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 347.307.200, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 313.252.700, atau sebesar 90,19%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:

a. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

Sub kegiatan ini memiliki output berupa Laporan Hasil Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif serta melakukan perhitungan indeks-indeks sebagai berikut :

- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
- Indeks Inovasi Daerah.
- Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

b. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tindak lanjut dari hasil pelaksanaan Lomba Bogor Innovation Award (BIA) Tahun 2023, hasil *assessment* BRIN terdapat 36 inovasi yang layak untuk difasilitasi sertifikasi HKI. Inovator yang mengajukan fasilitasi HKI sebanyak 13 inovasi, berdasarkan hasil *assessment* oleh Kemenkum dan HAM 13 inovasi tersebut lolos untuk mendapatkan sertifikat HKI.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Capaian Renstra Bappeda s/d tahun 2023

Kota Bogor

Urusan/Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program Renstra Bappeda tahun 2019 - 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (N-2)			Target Program dan kegiatan Renja Bapeda tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Bappeda sd tahun berjalan	
				Target Renja Bappeda tahun 2023	Realisasi Renja Bappeda tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PERENCANAAN									
Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten Kota	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**A**	**A**	**A**	**A**	**100**	**A**	**A**	**100**
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	**3,52**	**3,41**	**3,52**	**3,58**	**101,70**	**3,52**	**3,56**	**101,14**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah**	**A**	**A**	**A**	**A**	**100**	**A**	**A**	**100**
	Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	**100**	**100**	**100**	**3,58**	**100**	**100**	**100**	**100**
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	3	100	3	1	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	4	100	4	4	100
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	100	-	-	-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	-	-
	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	47	45	45	100	45	45	100

Urusan/Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program Renstra Bappeda tahun 2019 - 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (N-2)			Target Program dan kegiatan Renja Bapeda tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Bappeda sd tahun berjalan	
				Target Renja Bappeda tahun 2023	Realisasi Renja Bappeda tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	-	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17	17	17	17	100	17	5	29,41
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	1
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	6	6	6	100	6	3	50
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	2	2	100	1	-	-
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan penyediaan BMD sesuai RKBMD**	100	90	100	100	100	100	100	100
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	26	14	14	100	8	1	13
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	-	-

Urusan/Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program Renstra Bappeda tahun 2019 - 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (N-2)			Target Program dan kegiatan Renja Bapeda tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Bappeda sd tahun berjalan	
				Target Renja Bappeda tahun 2023	Realisasi Renja Bappeda tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	3	3	2	67
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik**	**100**	**100**	**90**	**100**	**111,11**	**100**	**-**	**-**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	34	34	34	100	8	8	100
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	133	133	133	133	100	133	27	20
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	1	100
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota**	**26**	**23,70**	**25**	**24,05**	**96,2**	**26**	**-**	**-**
	Keterwakilan Masyarakat Dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	**30**	**18**	**27,5**	**25,7**	**93,45**	**30**	**60,71**	**-**
	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	**100**	**100**	**97,5**	**95**	**97,44**	**100**	**-**	**-**
	Persentase ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	**83,87**	**77,42**	**80,65**	**67,74**	**83,99**	**83,87**	**-**	**-**
	Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	**39,42**	**32,12**	**25,77**	**36,5**	**141,64**	**39,42**	**-**	**-**
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) secara tepat waktu dan sesuai regulasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Jumlah Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang	**3299**	**2850**	**2000**	**2850**	**142,50**	**3299**	**6498**	**196,97**
Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	1	1	1	100	2	2	100
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	36	36	36	36	100	36	36	100

Urusan/Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program Renstra Bappeda tahun 2019 - 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (N-2)			Target Program dan kegiatan Renja Bapeda tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Bappeda sd tahun berjalan	
				Target Renja Bappeda tahun 2023	Realisasi Renja Bappeda tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	9	4	4	4	100	9	9	100
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	5	4	4	4	100	5	1	20
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah indikator sasaran perencanaan pembangunan daerah yang tercapai**	**29**	**23**	**26**	**21**	**81**	**29**	**-**	**-**
	Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang didanai dari TJLSP/CSR	**54**	**44**	**19**	**50**	**263**	**54**	**-**	**-**
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	9	11	11	11	100	9	2	22
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	1	1	1	100	1	1	100
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	**Jumlah elemen data dan Informasi pembangunan daerah yang dikelola**	**5**	**3**	**3**	**3**	**100**	**5**	**-**	**-**
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	5	3	3	3	100	5	-	-
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah**	**-**	**74,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah indikator sasaran perencanaan pembangunan daerah yang tercapai	**-**	**-**	**21**	**24**	**114,29**	**22**	**-**	**-**
	Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang didanai dari TJLSP/CSR	**-**	**-**	**17**	**44**	**258,82**	**18**	**-**	**-**
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Tahunan capaian kinerja RPJMD 2019_2024	-	1	-	-	-	-	-	-
	Laporan triwulan realisasi DAK dan bankeu	-	4	-	-	-	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program Renstra Bappeda tahun 2019 - 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (N-2)			Target Program dan kegiatan Renja Bapeda tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Bappeda sd tahun berjalan	
				Target Renja Bappeda tahun 2023	Realisasi Renja Bappeda tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
	Laporan triwulan RKPD Tahun 2021	-	4	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	11	11	100	1	-	-
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	-	-	-	-	-	1	-	-
Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	**Jumlah elemen data dan Informasi pembangunan daerah yang dikelola**	-	-	-	-	-	**5**	-	-
Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	-	-	-	-	-	2	-	-
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perncanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD**	**87**	**79**	**79**	**79**	**100**	**87**	-	-
	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia	**82,67**	**77,72**	**80**	**69,44**	**86,80**	**82,67**	-	-
	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	**87,9**	**79**	**82**	**87,82**	**107,10**	**87,9**	-	-
	Persentase ketercapaian target Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	**81,08**	**78,45**	**78,38**	**74**	**94,41**	**81,08**	-	-
	Persentase keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	**92,5**	**79**	**82**	**92,1**	**112,32**	**92,5**	-	-
	Persentase ketercapaian target Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	**80,52**	**71,2**	**75,32**	**76,67**	**101,79**	**80,52**	-	-
	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	**91,5**	**79**	**82**	**91,23**	**111,26**	**91,5**	-	-

Urusan/Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program Renstra Bappeda tahun 2019 - 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (N-2)			Target Program dan kegiatan Renja Bapeda tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Bappeda sd tahun berjalan	
				Target Renja Bappeda tahun 2023	Realisasi Renja Bappeda tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
	Persentase ketercapaian target Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**73**	**66,27**	**71**	**71,67**	**100,94**	**73**	**-**	**-**
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Jumlah Program Bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD**	**46**	**40**	**46**	**-**	**-**	**46**	**-**	**-**
	Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang mencapai target	**55**	**35**	**55**	**-**	**-**	**55**	**-**	**-**
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	**-**	**-**	1	1	100	**-**	**-**	**-**
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	**-**	**-**	1	1	100	**-**	**-**	**-**
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Jumlah Program Bidang Infrastruktur yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD**	**12**	**10**	**12**	**12**	**-**	**12**	**-**	**-**
	Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur yang mencapai target	**24**	**10**	**23**	**23**	**100,00**	**24**	**-**	**-**
	Jumlah Program Bidang Kewilayahan yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	**6**	**5**	**5**	**5**	**100**	**6**	**-**	**-**
	Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan yang mencapai target	**9**	**26**	**8**	**8**	**100**	**9**	**-**	**-**
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	**-**	**-**	1	1	100	1	**-**	**-**

Urusan/Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program Renstra Bappeda tahun 2019 - 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (N-2)			Target Program dan kegiatan Renja Bapeda tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Bappeda sd tahun berjalan	
				Target Renja Bappeda tahun 2023	Realisasi Renja Bappeda tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	1	1	1	100	2	-	-
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	-	1	2	2	100	1	-	-
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
Program Penelitian dan Pengembangan	**Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan**	-	**80**	**85**	**100**	**117,65**	**100**	-	-
	Jumlah kampung tematik/kampung wisata	**2**	**3**	**2**	**7**	**350**	**2**	-	-
	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di implementasikan dan berkelanjutan	-	**87**	**90**	**63**	**70,00**	**92,5**	-	-
	Persentase inovasi masyarakat yang menunjang visi misi Kota Bogor	-	**95,41**	**96,5**	**96,7**	**100,21**	**97,5**	-	-
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Jumlah Hasil litbang bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklajuti jadi kebijakan**	**2**	**1**	**1**	**1**	**100**	**2**	-	-
	Jumlah kampung tematik /kampung wisata	**1**	**3**	**2**	**7**	**350**	**1**	-	-
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan	-	1	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	1	-	-	-	-	1	-	-
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tersusunnya dokumen ilustrasi perencanaan satu kampung tematik	-	1	-	-	-	-	-	-
	Tersusunnya dokumen Lokasi-lokasi prioritas pembangunan kampung tematik	-	1	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	2	-	2	2	100	2	-	-

Urusan/Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program Renstra Bappeda tahun 2019 - 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (N-2)			Target Program dan kegiatan Renja Bapeda tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Bappeda sd tahun berjalan	
				Target Renja Bappeda tahun 2023	Realisasi Renja Bappeda tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1	-	-	-	-	1	-	-
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Jumlah Hasil litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti jadi kebijakan**	-	-	**1**	**1**	**100**	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	1	1	1	100	-	-	-
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	-	1	1	100	-	-	-
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	-	-	1	1	100	-	-	-
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	1	1	100	-	-	-
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	-	-	1	1	100	-	-	-
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan dan berkelanjutan**	**72**	-	**70**	**84**	**120**	**72**	-	-
	Jumlah Inovasi yang diterapkan oleh masyarakat	**69**	-	**64**	**127**	**198,4375**	**69**	-	-
Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	-	2	2	100	1	-	-
Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	2	1	1	100	1	-	-

Table 6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023, dapat dilihat capaian kinerja target dan realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023, sebagai berikut :

1) Dari 4 (Empat) Program dengan 19 (Sembilan Belas) Indikator kinerja Program yang dilaksanakan pada tahun 2023, terdapat 12 indikator kinerja Program yang mencapai Target dan 7 indikator kinerja Program yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

2) Terdapat 16 (Enam Belas) kegiatan dan 40 (Empat Puluh) Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda

Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida Kota Bogor didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019-2024, terdapat 6 (enam) indikator Kinerja Sasaran, Dimana 2 (dua) Indikator sasran yang tidak mencapai target dan 4 (empat) indikator sasaran yang mencapai target, yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kota Bogor

Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi OPD	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Capaian Tahun ke				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kategori Inovasi Daerah			Inovatif	Inovatif	Inovatif		Inovatif	Inovatif	Inovatif		
2	Indeks Kualitas Kebijakan				Sedang				Baik			
3	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan			50	85	90		80	100	100		
4	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota			24	25	26		23,7	24,05	26		
5	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target			69	80,65	83,87		77,42	67,74	83,87		
6	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah			80,01	81	82		73,17	89,8	89,98		

Table 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kota Bogor

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapperida, telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Bogor tahun 2019-2024, telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bogor, maka diperoleh isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kota Bogor, yaitu :

a. Penguatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis kinerja;
b. Penguatan perencanaan partisipatif yang melibatkan Masyarakat dan stakeholder;
c. Penguatan peran riset dan inovasi dalam perumusan kebijakan guna memberikan kontribusi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
d. Penguatan SDM Perencana, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp. 26.373.180.000, yang terdiri dari 4 Program, 16 kegiatan dan 50 Sub

Kegiatan. Setelah dilakukan analisis Kembali kebutuahn pagu Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025 berubah menjadi Rp. 24.129.250.390, yang terdiri dari 4 Program, 16 kegiatan dan 49 Sub Kegiatan, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.

Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kota Bogor

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.1	PERENCANAAN										
5.1.1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten Kota		Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja	27,25 Point	19.788.180.000	Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten Kota		Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja	27,25 Point	18.326.564.490	
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja	26,55 Point				Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja	26,55 Point		
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja	12,48 Point				Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja	12,48 Point		
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	23,6 Point				Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	23,6 Point		
			Persentase realisasi rencana tindak lanjut pengendalian risiko di lingkungan perangkat daerah	100%				Persentase realisasi rencana tindak lanjut pengendalian risiko di lingkungan perangkat daerah	100%		
			Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan secara tepat waktu	100%				Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan secara tepat waktu	100%		
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94%				Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94%		
			Persentase kepatuhan penganggaran	100%				Persentase kepatuhan penganggaran	100%		
			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	≥ 95 %				Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	≥ 95 %		
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%				Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		
			Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	76,51 Point				Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	76,51 Point		
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100%	30.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100%	31.493.600	
			Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	75%				Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	75%		
			Persentase Realisasi fisik kegiatan dilingkup perangkat daerah	100%				Persentase Realisasi fisik kegiatan dilingkup perangkat daerah	100%		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Realisasi anggaran kegiatan dilingkup perangkat daerah	**≥95 %**				**Persentase Realisasi anggaran kegiatan dilingkup perangkat daerah**	**≥95 %**		
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	19.985.800	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	11.507.800	
5.1.1.202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA**	**98%**	**15.140.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA**	**98%**	**14.123.017.907**	
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100%**				**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100%**		
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang	15.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang	14.026.207.907	
5.1.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	140.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 Laporan	96.810.000	
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**150.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**149.999.826**	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	149.999.826	
5.1.1.206	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Oprasional Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**1.626.110.000**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Oprasional Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**1.392.425.738**	
5.1.1.206.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.397.600	
5.1.1.206.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	140.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	124.888.800	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.1.206.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	36.636.438	
5.1.1.206.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	41.110.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	34.999.700	
5.1.1.206.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.072.200	
5.1.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Bulanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.403.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Bulanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.169.431.000	
5.1.1.207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD**	**100%**	**959.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD**	**100%**	**740.720.400**	
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1Unit	650.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1Unit	616.834.000	
5.1.1.207.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	90.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	61.943.200	
5.1.1.207.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	219.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	61.943.200	
5.1.1.208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.130.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.176.789.786**	
5.1.1.208.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	160.386.995	
5.1.1.208.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	980.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.016.402.791	
5.1.1.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik**	**100%**	**753.070.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik**	**100%**	**712.117.233**	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.1.209.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	266.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	306.071.149	
5.1.1.209.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	86.270.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	150.942.084	
5.1.1.209.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	255.104.000	
5.1.2	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**		**Rasio Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang (Per 10.000 penduduk)**	**27,5 Rasio**	**3.195.000.000**	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**		**Rasio Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang (Per 10.000 penduduk)**	**27,5 Rasio**	**2.000.898.500**	
			Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	**100 Persen**				**Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan**	**100 Persen**		
			Persentase Ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	**75 Persen**				**Persentase Ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah**	**75 Persen**		
			Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari TJSLP	**37,5 Persen**				**Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari TJSLP**	**37,5 Persen**		
5.1.2.201	**Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Kota Bogor**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) secara tepat waktu dan sesuai regulasi**	**100%**	**2.370.000.000**	**Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Kota Bogor**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) secara tepat waktu dan sesuai regulasi**	**100%**	**1.550.898.500**	
			Jumlah Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik pada tahapan penyusunan RPJPD,RPD,RPJMD dan RKPD	**3050 orang**				**Jumlah Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik pada tahapan penyusunan RPJPD,RPD,RPJMD dan RKPD**	**3050 orang**		
5.1.2.201.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	300.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	149.999.800	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.2.201.0004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	400.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	150.000.000	
5.1.2.201.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	700.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	399.842.700	
5.1.2.201.0007	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	970.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	851.056.000	
5.1.2.202	**Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemrintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		**Jumlah data dan Informasi pembangunan daerah yang dikelola**	**647 Elemen Data**	**300.000.000**	**Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemrintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		**Jumlah data dan Informasi pembangunan daerah yang dikelola**	**647 Elemen Data**	**200.000.000**	
5.1.2.202.0001	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	54.166.400	
5.1.2.202.0001	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Dokumen	200.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Dokumen	145.833.600	
5.1.2.203	**Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kota Bogor**	**Jumlah indikator sasaran perencanaan pembangunan daerah yang tercapai**	**24 Indikator**	**525.000.000**	**Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kota Bogor**	**Jumlah indikator sasaran perencanaan pembangunan daerah yang tercapai**	**24 Indikator**	**250.000.000**	
			Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang didanai dari TJLSP/CSR	**44 Program**				**Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang didanai dari TJLSP/CSR**	**44 Program**		
5.1.2.203.0001	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	150.000.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	150.000.000	
5.1.2.203.0002	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	375.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	100.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,88 Point	1.090.000.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Bogor	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,88 Point	2.076.787.400	
			Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,21 Point				Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,21 Point		
			Persentase Ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80,60 %				Persentase Ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80,60 %		
			Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA	28,34 Point				Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA	28,34 Point		
			Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA	27,47 Point				Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA	27,47 Point		
			Persentase ketercapaian target Program Pembangunan Daerah urusan Perekonomian dan SDA	80,60 %				Persentase ketercapaian target Program Pembangunan Daerah urusan Perekonomian dan SDA	80,60 %		
			Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan	28,48 Point				Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan	28,48 Point		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan	**26,80 Point**				**Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan**	**26,80 Point**		
			Persentase ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	**80,60 %**				**Persentase ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**80,60 %**		
5.1.3.201	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Kota Bogor**	**Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point**	**90%**	**375.000.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Kota Bogor**	**Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point**	**90%**	**764.787.600**	
			Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point	**90%**				**Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point**	**90%**		
			Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mencapai target	**133 Indikator**				**Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mencapai target**	**133%**		
5.1.3.201.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	5.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	5.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.3.201.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	5.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	7.500.000	
5.1.3.201.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	5.000.000	
5.1.3.201.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	350.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	737.287.600	
5.1.3.201.0006	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	5.000.000	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	5.000.000	
5.1.3.201.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	5.000.000	
5.1.3.202	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		**Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point.**	**100%**	**190.000.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		**Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point.**	**100%**	**237.999.500**	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point.	**100%**				**Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point.**	**100%**		
			Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang mencapai target.	**42 Indikator**				**Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang mencapai target.**	**42 Indikator**		
5.1.3.202.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	175.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	124.999.800	
5.1.3.202.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	5.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	5.000.000	
5.1.3.202.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	5.000.000	
5.1.3.202.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	102.999.700	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.3.203	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan**	**Kota Bogor**	**Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point.**	**100%**	**750.000.000**	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan**	**Kota Bogor**	**Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point.**	**100%**	**1.311.999.800**	
			Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point.	**100%**				**Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point.**	**100%**		
			Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mencapai target.	**42 Indikator**				**Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mencapai target.**	**42 Indikator**		
5.1.3.203.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	650.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	424.999.900	
5.1.3.203.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	5.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	5.000.000	
5.1.3.203.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	5.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.3.203.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	5.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	799.999.900	
5.1.3.203.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	85.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	77.000.000	
5.1	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										
5.5.2	**Program Penelitian dan Pengembangan**		**Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n**	**36,11 %**	**2.300.000.000**	**Program Penelitian dan Pengembangan**		**Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n**	**36,11 %**	**1.725.000.000**	
			Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	**100%**				**Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan**	**100%**		
			Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi	**10%**				**Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi**	**10%**		
			Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah	**30%**				**Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah**	**30%**		
5.5.2.201	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Kota Bogor**	**Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindak lanjuti menjadi kebijakan**	**90%**	**850.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Kota Bogor**	**Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindak lanjuti menjadi kebijakan**	**90%**	**775.000.000**	
5.5.2.201.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	200.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	200.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5.2.201.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	300.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	300.000.000	
5.5.2.201.00012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5 Laporan	250.000.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5 Laporan	200.000.000	
5.5.2.201.00014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan data dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan.	1 Laporan	100.000.000	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan data dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan.	1 Laporan	75.000.000	
5.5.2.203	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Kota Bogor**	**Jumlah Hasil litbang bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklajuti jadi kebijakan**	**1 Hasil Kelitbangan**	**600.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Kota Bogor**	**Jumlah Hasil litbang bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklajuti jadi kebijakan**	**1 Hasil Kelitbangan**	**400.000.000**	
5.5.2.203.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	400.000.000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3 Dokumen	400.000.000	
5.5.2.203.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	200.000.000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0 Dokumen	-	
5.5.2.204	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Kota Bogor**	**Jumlah perangkat daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun ke n**	**10 Perangkat Daerah**	**850.000.000**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Kota Bogor**	**Jumlah perangkat daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun ke n**	**10 Perangkat Daerah**	**550.000.000**	
			Persentase inovasi yang di fasilitasi HAKI	**20%**				**Persentase inovasi yang di fasilitasi HAKI**	**20%**		
5.5.2.204.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	750.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	500.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5.2.204.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	50.000.000	
JUMLAH					**26.373.180.000**	**JUMLAH**				**24.129.250.390**	

Table 8 Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil pengumpulan informasi, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2025 tidak terdapat usulan yang di tujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor baik pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum PD), maupun Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bogor.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20252029. Pada 5 (lima) tahun pertama yaitu Tahun 2025-2029 menjadi tahapan yang penting dalam RPJPN Tahun 2025-2045 untuk meletakan dasar-dasar transformasi menjadi basis Tingkat pertumbuhan pada tahap berikuitnya serta menjadi pemicu untuk *engine of growth* yang baru yaitu: industri biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi sampai dengan produk akhir, dan industry hijau.

Sasaran visi Pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu Pendapatan perkapita setara negara maju, Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission.*

Tema besar pembangunan tahun 2025-2029 yaitu: penguatan fondasi transformasi dilaksanakan melalui penguatan 5 transformasi yaitu:

1. Transformasi sosial
   meliputi Kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas dan merata, dan perlindungan sosial yang adaptif
2. Transformasi ekonomi
   Meliputi Industri, pariwisata, ekonomi biru, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, BUMN, percepatan transisi energi, ekonomi sirkular industri, tenaga kerja hijau, pengelolaan hutan lestari, digital, integrasi ekonomi domestik dan global, dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Transformasi Tata Kelola
   Meliputi transformasi dan digitalisasi pelayanan publik, system penggajian tunggal, kualitas regulasi, manajemen talenta, integrasi proses bisnis, sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan, dan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Meliputi stabilitas makro, politik luar negeri, pertahanan, hukum, keamanan, dan demokrasi.
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi

Meliputi: isu agama, isu budaya, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif, pangan, kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, dan energi.

Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda ransformasi.

Tema RKP Tahun 2025 yaitu *"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".* Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan. Berikut adalah tabel target indikator sasaran Pembangunan Tahun 2025:

Terget Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Nasional Tahun 2025

Uraian	Capaian		Target
	2022	2023	2025
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,31	5,05	5,3-5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,99	5,32	4,5-5,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	9,36	7,0-8,0
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,388	0,379-0,382
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,77	74,39	0
Indeks Modal Manusia	0	0,53	0,56
Penurunan Emisi GRK (%)	28,49	34,09	38,6
Nilai Tukar Petani (NTP)	109	105,21	113-115
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102,51	0	104-105

Table 9 Terget Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Nasional Tahun 2025

Arah pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 dibagi berdasarkan wilayah, untuk wilayah pulau Jawa tema Pembangunan dikhususkan menjadi “Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan

Berkelanjutan". Provinsi Jawa Barat (Jabar) difokuskan menjadi "Pusat *cutting-edge industry*, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional" dengan indikator makro seperti gambar dibawah ini:

Target Makro Provinsi Jawa Barat 2025-2029

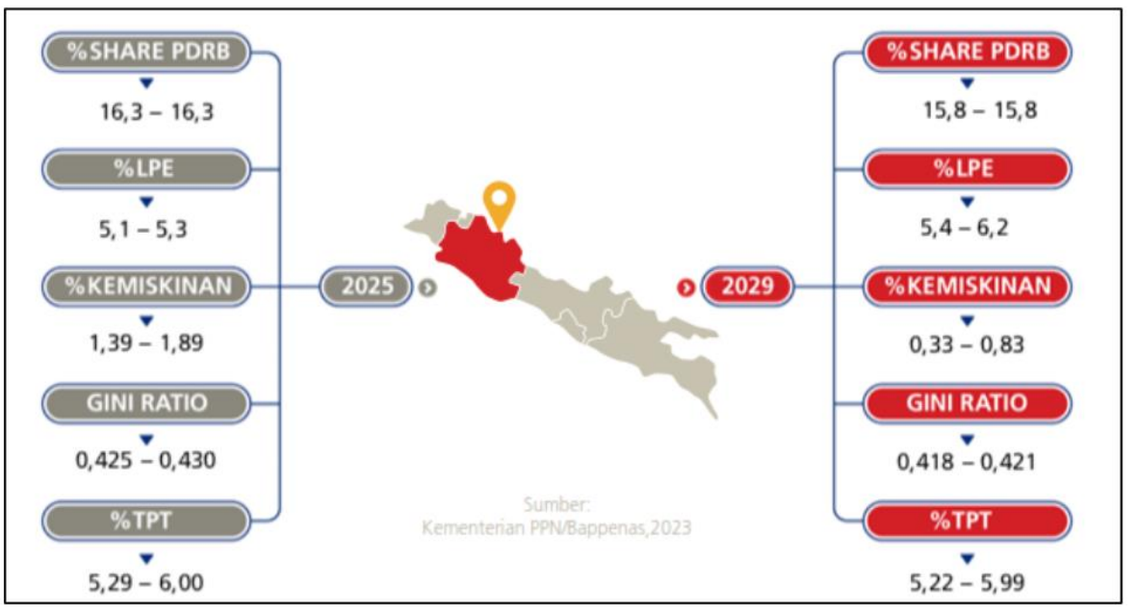

Figure 1 Target Makro Provinsi Jawa Barat 2025-2029

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 memuat tujuan dan sasaran Pembangunan jawa Barat sebagai berikut :

Tujuan 1 Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan anak, serta Pembangunan pemuda;
5. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Tujuan 2 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan;

2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum;
4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Tujuan 3 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur;
2. Meningkatnya Kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana;
6. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan.

Tujuan 4 Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas Lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam Pembangunan.

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar, serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah, dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada tema RPJPD I (2025-2029), yaitu penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi dan tata Kelola serta Tema RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, yaitu “meningkatkan kemandirian Masyarakat Jawa Barat” maka tema Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah :

“**Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat”.**

3.2 Tujuan dan Sasaran Bapperida Kota Bogor.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pembangunan daerah Kota Bogor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu Tahun 2025-2026. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Kinerja tujuan dan sasaran dapat diukur dan selanjutnya dievaluasi dengan indikator yang ditetapkan. Indikator berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact), namun secara khusus indikator yang pada bagian ini merupakan alat ukur pencapaian kinerja hasil (outcome), dampak (impact). Penentuan indikator berfungsi untuk memberikan batasan pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki. Perumusan tujuan, sasaran, dan indikator merupakan tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh.

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)nya Berakhir Tahun 2024, penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 harus memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kota Tahun 2025- 2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka sinergitas penjenjangan kinerja pembangunan daerah dengan kinerja perangkat daerah, maka pada bagian ini akan dijelaskan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis Bapperida Tahun 2025-2026.

Demi terwujudnya Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 serta untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, dan penelitian dan pengembangan, Badan Prencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah Kota Bogor **memiliki 3 Tujuan** :

TUJUAN 1 :" Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas" dengan ***Indikator Kinerja Tujuan*** sebagai berikut:

1. Predikat SAKIP Bapperida;
2. Indeks Kepuasan Layanan Bapperida.

Untuk mencapai tujuan sebagai mana di tetapkan, didukung dengan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya akuntablitas kinerja dan keuangan Bapperida, dengan Indikator Kinerja Sasaran:
   a. Nilai SAKIP Bapperida;
   b. Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/ITDA;
   c. Nilai Hasil Survey Kepuasan Layanan Bapperida.

TUJUAN 2 :" Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang holistik, sinergis, partisipatif dan berkelanjutan", dengan ***Indikator Kinerja Tujuan*** sebagai berikut:

1. Capaian kinerja SAKIP Tingkat Kota Aspek Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

Untuk mencapai tujuan sebagai mana di tetapkan, didukung dengan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran:
   a. Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Perencanaan Kinerja;
   b. Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja.

TUJUAN 3 :"Terwujudnya Pelaksanaan Litbang Jirap, Invensi dan Inovasi yang Memperkuat Iptek Sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor", dengan ***Indikator Kinerja Tujuan*** sebagai berikut:

1. Kategori Inovasi Daerah;
2. IKK dimensi Perencanaan Kebijakan;
3. IKK Dimensi Pemanfaatan Kebijakan.

Untuk mencapai tujuan sebagai mana di tetapkan, didukung dengan Sasaran yaitu :

1. Termanfaatkannya hasil litbang jirap, serta invensi dan inovasi sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran:
   a. Persentase Inovasi yang berkelanjutan;
   b. Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan;
   c. Persentase Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Satuan	Target Kinerja	
					2025	2026
1	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas**		**Predikat SAKIP Bapperida**	**Predikat**	**A**	**AA**
			Indeks Kepuasan Layanan Bapperida	**point**	**3,62**	**3,66**
		Meningkatnya akuntablitas kinerja dan keuangan Bapperida	Nilai SAKIP Bapperida	point	89,88	90,81
			Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/ITDA	Persen (%)	100	100
			Nilai Hasil Survey Kepuasan Layanan Bapperida	point	90,37	91,28
2	**Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang holistik, sinergis, partisipatif dan berkelanjutan**		**Capaian kinerja SAKIP Tingkat Kota Aspek Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja**	**Persen (%)**	**82,67**	**83,58**
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Perencanaan Kinerja	point	24,55	24,85
			Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja	point	25,05	25,3
3	**Terwujudnya Pelaksanaan Litbang Jirap, Invensi dan Inovasi yang Memperkuat Iptek Sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor**		**Kategori Inovasi Daerah**	**predikat**	**Inovatif**	**Inovatif**
			IKK dimensi Perencanaan Kebijakan	**point**	**31,5**	**33,75**
			IKK Dimensi Pemanfaatan Kebijakan	**point**	**38,5**	**41,25**
		Termanfaatkannya hasil litbang jirap, serta invensi dan inovasi sebagai landasan perencanaan	Persentase Inovasi yang berkelanjutan	Persen (%)	70	73
			Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan	Persen (%)	10%	10%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Satuan	Target Kinerja	
					2025	2026
		pembangunan daerah	dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan			
			Persentase Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	Persen (%)	10%	10%

Table 10 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025 sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, maka dirumuskan Program dan Kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program (1) Transparansi pengelolaan keuangan daerah; (2) Persentase kepatuhan penganggaran; (3) Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan Prasarana; (4) Nilai SAKIP aspek pelaporan kinerja di lingkup perangkat daerah; (5) Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM; (6) Nilai SAKIP aspek evaluasi internal di lingkup perangkat daerah; (7) Persentase pengelolaan BMD di lingkup perangkat daerah; (8) Nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah; (9) Persentase realisasi anggaran terhadap DPA; (10) Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan; (11) Nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja di lingkup perangkat daerah; (12) Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan., Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah :

   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      I. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      II. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      I. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      II. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD

   3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      I. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

   4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      I. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

II. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

III. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

IV. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

V. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

VI. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

I. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

II. Pengadaan Mebel

III. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

II. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

II. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

III. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, dengan indikator kinerja program (1) Rasio Keterwakilan masyarakat dalam musrenbamg (Per 10000 penduduk); (2) Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan; (3) Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari TJSLP; (4) Persentase Ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah. Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah :

1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

I. Pelaksanaan Konsultasi Publik

II. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

III. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

IV. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

2) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

I. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

II. Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

3) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

I. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

II. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencaan Pembanguan Daerah, dengan indikator kinerja program (1) Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan perekonomian dan SDA; (2) Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan perekonomian dan SDA; (3) Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan insfrastruktur dan kewilayahan; (4) Persentase ketercapaian target program perencanaan Pembangunan daerah urusan pemerintahan dan pembangunan manusia; (5) Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan pemerintahan dan Pembangunan manusia; (6) Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan manusia; (7) Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan insfrastruktur dan kewilayahan. Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah :

1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

I. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

II. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

III. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

IV. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

V. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

VI. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

I. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

II. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

III. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

IV. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

I. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

II. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

III. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

IV. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

V. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan indikator kinerja program (1) Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan; (2) Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah; (3) Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun N; (4) Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi. Adapun kegiatannya adalah :

   1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

      I. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

      II. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi

      III. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

      IV. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

   2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

      I. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

   3) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

      I. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

      II. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH						24.463.725.890,00							25.279.560.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						24.463.725.890,00							25.279.560.000,00	
	5 01	PERENCANAAN						22.738.725.890,00							23.979.560.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														Prioritas						
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase kepatuhan penganggaran Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan Prasarana Nilai SAKIP aspek pelaporan kinerja di lingkup perangkat daerah Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Nilai SAKIP aspek evaluasi internal di lingkup perangkat daerah Persentase pengelolaan BMD di lingkup perangkat daerah Nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan	100Persen 100Persentase 98,69Nilai 100Persentase 97,93Nilai 23,65Nilai 13,00Nilai 89,25Nilai 100Persentase 95Persentase 87,87Nilai 26,82Nilai 94Persentase 27,34Nilai			100 Persen 100 Persentase 87,11 Nilai 12,48 Nilai 88,75 Nilai 23,60 Nilai 94 Persentase 26,55 Nilai 95 Persentase 96,96 Nilai 27,25 Nilai 97,72 Nilai	18.423.040.490,00						100Persen 100Persentase 98,69Nilai 100Persentase 97,93Nilai 23,65Nilai 13,00Nilai 89,25Nilai 100Persentase 95Persentase 87,87Nilai 26,82Nilai 94Persentase 27,34Nilai	20.394.560.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja di lingkup perangkat daerah Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu Persentase Realisasi anggaran kegiatan dilingkup perangkat daerah Persentase Realisasi fisik kegiatan dilingkup perangkat daerah	87,5 % 100 % 95% 100 %			75 % 100 % 95 % 100 %	31.493.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Bapperida Kota Bogor	87,5 % 100 % 95% 100 %	25.000.000,00	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen			9 Dokumen	19.985.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Bapperida Kota Bogor	7 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Laporan			25 Laporan	11.507.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Bapperida Kota Bogor	25 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	99% 100%			100% 98%	14.123.017.907,00			Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	99% 100%	16.390.000.000,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan			47 Orang/bulan	14.026.207.907,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan	-	49 Orang/bulan	16.250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														- DANA ALOKASI UMUM	Pelayanan Publik	Tata Kelola Pelayanan Publik				DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan			18 Laporan	96.810.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	18 Laporan	140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %			100 %	149.999.826,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	150.000.000,00	
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180 Orang			90 Orang	149.999.826,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	90 Orang	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Oprasional Perangkat Daerah	100 %			100 %	1.392.425.738,00			Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	1.735.610.000,00	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	11.397.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan	-	1 Paket	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Pelayanan Publik	Tata Kelola Pelayanan Publik				DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	124.888.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Paket	140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	36.636.438,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Paket	17.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	34.999.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Paket	43.110.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket			3 Paket	15.072.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	3 Paket	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan			12 Laporan	1.169.431.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daer	-	12 Laporan	1.505.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Pabaton		Transformasi Pelayanan Publik	ah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik				DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	100 %			100 %	837.196.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	90.000.000,00	
	5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	616.834.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	0 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit			0 Unit	61.943.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	20 Unit	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit			17 Unit	158.419.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	0 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			100 %	1.176.789.786,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan	-	100 %	1.150.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Pelayanan Publik	Tata Kelola Pelayanan Publik				
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan			12 Laporan	160.386.995,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Laporan	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan			12 Laporan	1.016.402.791,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	100 %			100 %	712.117.233,00			Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	853.950.000,00	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	64 Unit			32 Unit	306.071.149,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	32 Unit	266.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	362 Unit			181 Unit	150.942.084,00	Kota Bogor, Bogor Tengah,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daer	-	181 Unit	87.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Paba ton		Transformasi Pelayanan Publik	ah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik				DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	255.104.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paba ton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Unit	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rasio Keterwakilan masyarakat dalam musrenbamg (Per 10000 penduduk) Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan Persentase	30Rasio 80Persentase 38Persentase 100Persentase			27,5 Rasio 100 Persentase 37.5 Persentase 75 Persentase	2.000.898.500,00						30Rasio 80Persentase 38Persentase 100Persentase	2.525.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														Prioritas						
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							program pembangunan daerah yang didanai dari TJSLP Persentase Ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah														
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik pada tahapan penyusunan RPJPD,RPD,RPJMD dan RKPD Persentase ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) secara tepat waktu dan sesuai regulasi	100Persentase 3250Orang			3050 Orang 100 Persentase	1.550.898.500,00			Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	100Persentase 3250Orang	1.550.000.000,00	
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara			2 Berita Acara	149.999.800,00	Kota Bogor, Bogo	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mempekuat Stabilitas	Inovasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota	1 Berita Acara	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													r Tengah, Pabaton	(PAD)	Pelukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Bogor			BANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara			1 Berita Acara	150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Pelukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	1 Berita Acara	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara			2 Berita Acara	399.842.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Pelukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola	Masyarakat Kota Bogor	1 Berita Acara	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Publik	Pelayanan Publik				
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen			3 Dokumen	851.056.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	2 Dokumen	850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah yang dikelola	647 Data			647 Data	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	647 Data	300.000.000,00	
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen			1 Dokumen	54.166.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2 Orang			1 Orang	145.833.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Orang	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Jumlah indikator sasaran perencanaan pembangunan daerah yang tercapai Jumlah program pembangunan daerah	25Indikator 45Program			24 Indikator 44 Program	250.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan	-	25Indikator 45Program	675.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Daerah	dalam RPJMD yang didanai dari TJLSP/CSR								Pelayanan Publik	Tata Kelola Pelayanan Publik				
	5	01	02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah														
							Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	2 Kerja Sama			1 Kerja Sama	150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Kerja Sama	525.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan			2 Laporan	100.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Laporan	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan perekonomian dan SDA Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan perekonomian dan SDA Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan insfrastruktur dan kewilayahan Persentase ketercapaian target program perencanaan Pembangunan daerah urusan pemerintahan dan pembangunan manusia Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan pemerintahan dan Pembangunan manusia Rata-rata	27.75nilai 83.87Persentase 83.87Persentase 83.87Persentase 26.8nilai 26.47nilai 28.77nilai 27.14Persentase 28.62nilai			27.47nilai 28.34nilai 28.48nilai 80.6Persentase 26.21nilai 26.88Persentase 26.8nilai	2.314.786.900,00						27.75nilai 83.87Persentase 83.87Persentase 83.87Persentase 26.8nilai 26.47nilai 28.77nilai 27.14Persentase 28.62nilai	1.060.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan manusia Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan insfrastruktur dan kewilayahan													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mencapai target Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point	139Indikator 95Persentase 95Persentase			133 Indikator 90 Persentase 90 Persentase	764.787.600,00			Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	139Indikator 95Persentase 95Persentase	375.000.000,00	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen			3 Dokumen	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	3 Dokumen	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan			2 Laporan	7.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	2 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen			4 Dokumen	737.287.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia															
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan			2 Laporan	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.	00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				01	07																
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang mencapai target Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point Persentase Perangkat Daerah lingkup	100 % 44Indikator 100 %			42 Indikator 100 % 100 %	237.999.500,00			Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 % 44Indikator 100 %	190.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point													
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen			1 Dokumen	124.999.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan			2 Laporan	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
							-	18 Laporan			-	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan			1 Laporan	102.999.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola	-	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Publik	Pelayanan Publik				
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mencapai target Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point	100 % 100 % 43Indikator			42 Indikator 100 % 100 %	1.311.999.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 % 100 % 43Indikator	495.000.000,00	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen			1 Dokumen	424.999.900,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan			2 Laporan	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencan	4 Laporan			2 Laporan	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daer	-	2 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														Prioritas						
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							aan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						Pabaton		Transformasi Pelayanan Publik	ah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik				DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen			2 Dokumen	799.999.900,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	0 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan			1 Laporan	77.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Laporan	85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.725.000.000,00							1.300.000.000,00	
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi	50Persentase 41.66Persentase 10Persentase 100Perseentase			100 Persentase 30 Persentase 36.11 Persentase 10 Persentase	1.725.000.000,00						50Persentase 41.66Persentase 10Persentase 100Perseentase	1.300.000.000,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindak lanjuti menjadi kebijakan	100 %			90 %	775.000.000,00			Mempekuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berk	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	-	100 %	400.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															eadilan	serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi				
	5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing eko	-	0 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Prioritas					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																nomi berbasis riset dan inovasi				
	5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan			1 Laporan	300.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	-	0 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	10 Laporan			5 Laporan	200.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	-	5 Laporan	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan			1 Laporan	75.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Laporan	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di tindak lanjuti menjadi kebijakan	100 %			90 %	400.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berk	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	-	100 %	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															eadilan	serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi				
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen			1 Dokumen	400.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing eko	-	0 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																nomi berbasis riset dan inovasi				
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah perangkat daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun ke n Persentase inovasi yang di fasilitasi HAKI	25% 15Perangkat Daerah			10 Perangkat Daerah 20 %	550.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	-	25% 15Perangkat Daerah	900.000.000,00	
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targret RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														Prioritas						
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	6 Laporan			3 Laporan	500.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	-	3 Laporan	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	2 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem	-	1 Laporan	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi				DAERAH
	JUMLAH											**24.463.725.890,00**							**25.279.560.000,00**	

Table 11 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Bapperida Tahun 2025 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**,**yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Bapperida Kota Bogor Tahun 2025, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Bapperida pada Tahun 2025 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Bapperida dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh *stakeholders,* serta dasar dalam mengukur keberhasilan Bapperida Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Z. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan / pedoman kerja dari setiap perangkat daerah yang memuat kebijakan. program dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Proses perumusan Renja Perubahan PD didasarkan pada kebutuhan. penjabaran dari visi misi Walikota. aspirasi dari DPRD. penjaringan aspirasi (bottom up) melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan dan Kecamatan serta usulan aspirasi melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perubahan PD yang merupakan sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). dimana RKPD merupakan implementasi/turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah terpiilih. Selain itu Renja PD juga harus mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan. sasaran. program dan kegiatan setiap perangkat daerah yang berpedoman kepada RPJMD. Dari hal tersebut telihat bahwa Renja Perubahan PD merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang lebih operasional.

Produk Renja Perubahan PD ditentukan dari Tugas Pokok dan Fungsi yang diamanatkan kepada Perangkat Daerah tersebut. Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian. pendidikan dan pelatihan harus menyusun kebijakan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian. pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Bogor. Renja Perubahan BKPSDM harus disusun secara terpadu. partisipatif dan demokratis sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dijadikan dasar dalam peyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor sehingga program dan kegiatan yang bersifat operasional dapat dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Bogor.

Penyusunan dokumen Renja Perubahan BKPSDM Kota Bogor Tahun 2024 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Di dalam penyusunan Renja Perubahan BKPSDM Kota Bogor Tahun 2024 mengacu pada peraturan perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku. yaitu:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang pembentukan Kota-Kota besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021);
26. Peraturan Walikota Bogor Nomor 179 Tahun 2021 tentang Tugas. Fungsi. Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor;
27. Peraturan Walikota Bogor Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Walikota Bogor Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran tentang rencana kerja BKPSDM di Tahun 2024 berupa kegiatan yang berasal dari penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis BKPSDM Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Tujuan yang hendak dicapai adalah tersusunnya dokumen sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 berupa rencana kinerja 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Perubahan BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I berisi uraian pendahuluan. yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renja PD. landasan hukum penyusunan Renja PD. maksud dan tujuan disusunnya Renja PD dan sistematika penulisan penyusunan Renja PD.

Bab II berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu. yang terdiri atas uraian evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD. analisa kinerja pelayanan PD. isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD serta revieuw terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III berisi uraian yang menjelaskan tujuan. sasaran PD yaitu uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional. tujuan dan sasaran Renja Perubahan PD dan penjelasan mengenai Program dan Kegiatan.

Bab IV berisi rencana kerja dan pendanaan perubahan perangkat daerah.

Bab V berisi uraian penutup yang menguraikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun masalah ketersedian anggaran yang tidak sesuai kebutuhan. uraian kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) atau tahun 2022 dan perkiraan capaian rencana strategis Perangkat Daerah tahun berjalan (tahun n-1) atau tahun 2023. ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. mengidentifikasi realisasi pencapaian target Kinerja Program dan Kegiatan Renstra BKPSDM di tahun 2022 dan 2023. serta mengidentifikasi hambatan dan pemasalahan yang dihadapi. Evaluasi didasarkan atas laporan hasil pelaksanaan Renja BKPSDM tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD tahun berjalan yang baru disahkan.

Sesuai dengan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang diamanatkan di dalam Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana terjadi perubahan nama Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pada tahun 2021 indikator kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan masih mendasarkan pada Renstra BKPSDM 2019-2024.

Terdapat 3 Program pada urusan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan dari BKPSDM kota Bogor. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan. dapat diuraikan sebagai berikut :

1. <u>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</u>

Pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja program dengan hasil sebagai berikut :

a. Target Indikator Kinerja Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah adalah BB dan realisasi pencapaian Kinerja A. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan.

   Adapun pelaksanaan Sub Kegiatan yang masuk dalam kegiatan ini adalah :

   i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Output dari sub kegiatan ini adalah penyusunan dokumen renstra dan dokumen renja.

   ii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Output dari sub kegiatan ini adalah penyusunan dokumen- dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah berupa dokumen LPPD. LKPJ. LKIP. Selain itu diselesaikan juga pelaksanaan Resertifikasi ISO 9001:2015. pembuatan kajian pelayanan kepegawaian pelaksanaan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat). Hasil dari pelaksanaan SKM Tahun 2023 ini sebesar 3.89 dimana hasil tersebut melebihi dari target SKM Tahun 2022 sebesar 3.42.

b. Target Indikator Kinerja Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN adalah 100 % dan realisasi pencapaian sebesar 100% ASN di BKPSDM dapat terpenuhi gaji dan tunjangannya. Hal ini terlaksana dari hasil pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berupa Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan.

   Adapun pelaksanaan sub kegiatan yang masuk dalam kegiatan ini adalah :

   i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Ouput dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN selama tahun 2023 untuk seluruh Pegawai BKPSDM.

ii. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Output dari sub kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan. Semester dan Tahunan Perangkat Daerah.

c. Target persentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Realisasi tersebut dihasilkan dari pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa pemenuhan kebutuhan operasional kantor.

Adapun output dari pelaksanaan sub kegiatan yang masuk dalam dua kegiatan tersebut adalah :

i. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Ouput dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor seperti kertas. tinta. alat tulis. amplop. dan sebagainya yang terpenuhi selama 1 tahun.

ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Ouput dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan logistik kantor seperti. air minum. gas elpiji dan bahan bakar minyak kendaraan operasional dinas selama periode 1 tahun.

iii. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan barang cetakan berupa blangko dinas. blangko SK. map dinas. spanduk. banner selama 1 tahun.

iv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah pegawai

BKPSDM serta PNS Pemerintah Kota Bogor yang ditugaskan untuk mengikuti diklat. workshop atau sosialisasi. Selain itu juga pemenuhan kebutuhan makan minum untuk rapat. workshop. sosialisasi serta kebutuhan paket meeting fullday. fullboard pengembangan kompetensi.

v. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik

Output dari Sub Kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan tagihan listrik. air PDAM. telpon. surat kabar dan langganan akses internet selama 1 tahun.

vi. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Ouput dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan tenaga kebersihan. keamanan. supir dan administrasi kantor selama 1 tahun.

d. Target dari Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur ditetapkan 100% dengan tingkat realisasi kinerja 100%. Hal ini terlaksana dari pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pegawai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari di kantor selama 1 (satu) tahun. Adapun pemenuhan sarana dan prasarana aparatur tersebut dihasilkan dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun output dari sub kegiatan yang masuk pada dua kegiatan tersebut adalah :

i. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output dari sub kegiatan ini adalah pengadaan peralatan dan mesin penunjang sarana prasarana kantor. Pengadaan tersebut berupa pembelian CCTV. Whiteboard. projector. vacum cleaner. Komputer. Printer dan Scanner.

ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Output dari sub kegiatan ini adalah pemeliharaan rutin dari kendaran mobil

dinas serta pembayaran pajak kendaraan roda dua dan roda empat yang menjadi inventaris BKPSDM.

iii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dari inventaris kantor yang sudah ada seperti pemeliharaan alat alat komputer. Penyejuk ruangan (AC) serta penyedian pengharum ruangan.

iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Ouput dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dari bangunan kantor agar dapat terpelihara dengan baik dan menunjang aktivitas pelayanan kepegawaian.

2. <u>Program Kepegawaian Daerah</u>

Pelaksanaan program Kepegawaian Daerah ini memiliki 3 indikator kinerja dengan hasil sebagai berikut :

a. Target kinerja Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%. Hal ini terlaksana dari pelayanan administrasi. data dan informasi kepegawaian untuk aparatur pada kegiatan Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Hasil output dari sub kegiatan tersebut adalah :

i. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Output dari sub kegiatan ini adalah kegiatan berupa kegiatan Pengadaan ASN dalam hal ini seleksi PPPK Formasi 2023 sebanyak 1112 Formasi. Pengambilan sumpah janji PNS Seleksi 2019. Penyusunan dokumen rencana kebutuhan pegawai.

ii. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Output dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pemberkasan pensiun untuk 344 pegawai.

iii. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

Output dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan HUT Korpri ke- 50 Tahun 2023 dengan rangkaian acara berupa tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Dreded. Upacara HUT Korpri di Balaikota Bogor dan Jalan Sehat bagi ASN.

iv. Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN

Output dari sub kegiatan ini adalah pemprosesan berkas administrasi pegawai seperti Kartu Pegawai. Kartu Istri. Kartu Suami. Konversi NIP. Usulan Cuti dan Pendampingan pemeriksaan kesehatan bagi pegawai yang tidak sehat jasmani dan/atau rohani. Hasil dari pemeriksaan kesehatan ini menjadi dasar rekomendasi untuk pegawai yang sedang sakit apakah dapat diberikan cuti sakit atau pensiun dini.

v. Pengelolaan Data Kepegawaian

Output dari sub kegiatan ini adalah pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dari penyiapan data kepegawaian. penyiapan aplikasi kepegawaian, Pemeliharaan server dan penambahan inovasi aplikasi kepegawaian. Untuk Data kepegawaian pengajuan Karsu sebanyak 69 orang. Karis sebanyak 75 orang. Pencetakan ID Card 982 buah. Usulan perubahan tunjangan keluarga 1.007 orang. Proses cuti PNS 17.173 orang. usulan konversi NIP 21 Orang. dan Pemeriksaan dan Uji Kesehatan ASN yang sakit bekelanjutan. tidak cakap jasmani dan/atau rohani 4 Orang.

b. Target kinerja Persentase Penempatan Aparatur yang Sesuai dengan Syarat Jabatan pada tahun 2023 sebesar 89% dan realisasi kinerja sebesar 98.85 %. Realisasi dari kinerja ini dilaksanakan dari pelaksanaan penempatan aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan serta aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai

kebutuhan dari pelaksanaan kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dan kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Adapun output sub kegiatan dari pelaksanaan dua kegiatan tersebut adalah :

i. Pengelolaan Mutasi ASN

Output dari sub kegiatan ini adalah penempatan aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan dan kompetensi dasarnya dengan melaksanakan Seleksi Jabatan Tinggi Pratama Eselon 2 sebanyak 2 (dua) Jabatan yaitu jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman dan jabatan Kepala Bappeda. Selain itu juga dilaksanakan pelantikan jabatan struktural sebanyak 6 (enam) kali kegiatan pelantikan. BKPSDM Kota Bogor juga melakukan seleksi mutasi pegawai dari luar Pemerintah Kota Bogor yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan yang diikuti oleh 43 (empat puluh tiga) pegawai dari luar Pemerintah Kota Bogor.

ii. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Output dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pemberkasan kenaikan pangkat untuk 1048 pegawai. pemberkasan kenaikan gaji berkala untuk 1548 pegawai serta pelaksanaan ujian dinas untuk 156 pegawai.

iii. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Output dari sub kegiatan ini adalah fasilitasi dari proses administrasi pendidikan lanjutan pegawai dan pemberian bantuan/bea siswa untuk pegawai yang melaksanakan ijin belajar ataupun tugas belajar.

iv. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Output dari sub kegiatan ini adalah terselenggaranya pembinaan bagi jabatan fungsional dengan dilaksanakannya Sosialisasi Penyederhanaan Birokrasi Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor di Hotel Salak Bogor pada tanggal 30 November 2021 yang dilaksanakan secara tatap muka dan online zoom meeting. Selain itu

juga dilaksanakan pelantikan Pejabat Fungsional pada tanggal 31 Desember 2021 hasil dari Penyederhaan Birokrasi.

c. Target kinerja Persentase Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat pada tahun 2021 sebesar 92 % dan realisasi pelaksanaan sebesar 100 %. Realisasi dari kinerja ini didapatkan dari pelaksanaan pembinaan disiplin, evaluasi kinerja dan pelaporan LHKPN dari pelaksanaan Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Adapun output dari sub kegiatan tersebut adalah :

i. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Output dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja bagi 37 Perangkat Daerah. dimana dilihat kesesuain antara SKP dengan kinerja harian tiap pegawai.

ii. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

Output dari sub kegiatan ini adalah fasilitasi pengajuan penghargaan Satya Lencana ke Kementrian Dalam Negeri sebanyak 545 pegawai.

iii. Pembinaan Disiplin ASN

Output dari sub kegiatan ini adalah pemprosesan 2 (dua) pelanggaran disiplin pegawai. monitoring kehadiran masuk kerja melalui aplikasi Simpeg Mobile. pemprosesan 18 (delapan belas) pengajuan perceraian dan fasilitasi pelaporan LHKPN untuk 134 pegawai yang termasuk wajib LHKPN. Selain itu juga tersusunnya dokumen Kajian Penegakan Disiplin ASN.

3. <u>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</u>

Pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut memiliki dua target kinerja yaitu :

a. Target kinerja Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun 2021 sebesar 89 % dengan realisasi sebesar 94.4 %. Realisasi dari kinerja

ini dihasilkan dari pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan ouput dari sub kegiatannya adalah :

i. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum. Inti. dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren. Perangkat Daerah Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum

   Output dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan berbagai diklat teknis dan fungsional untuk 318 aparatur. diantaranya diklat kepamongprajaan, diklat calon kepala sekolah. Pelatihan dan Sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa serta diklat lainnya.

ii. Pembinaan. Pengoordinasian. Fasilitasi. Pemantauan. Evaluasi. dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum. Inti. dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren. Perangkat Daerah Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum

   Output dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan berbagai pengembangan kompetensi untuk pegawai seperti talent pool dan uji kompetensi untuk 209 pegawai.

b. Target kinerja Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan sebesar 40 % dan realisasi sebesar 58.10 %. Realisasi dari kinerja tersebut di dapatkan dari pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan.

   Output dari sub kegiatan ini adalah Penyelenggaraan PKN sebanyak 1 orang. Penyelenggaraan PKA sebanyak 2 orang dan Penyelenggaran PKP sebanyak 4 orang serta pelaksanaan Latihan Dasar CPNS sebanyak 290 orang CPNS Formasi 2019.

Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian tahun berjalan 2023. yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 dan Pencapaian Renstra PD tahun 2023

No	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran			Satuan		Realisasi			Capaian Kinerja (%)
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		Awal	Prbhn	2021	2022	2023	
1	Terpenuhinya aparatur sesuai kebutuhan organisasi	Terciptanya manajemen ASN yang memiliki kualifikasi. kompetensi. dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Persentase kesesuaian aparatur dengan kebutuhan	Indeks Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi. Manajemen Kinerja. Disiplin dan Penghargaan	%	poin t	98.85	333.5	344	NA
			Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi		Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian	%		94.4	96		
	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian		Persentase aparatur yang terlayani administrasi kepegawaian		Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai. Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	%		100	100		

	Meningkatnya inovasi aparatur yang berkelanjutan		Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan		Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan. Evaluasi dan Penyelenggaraan Diklat	%		58.1	60		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Badan	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	IKA (Indeks Kepuasan Aparatur)	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup BKPSDM Kota Bogor	Nilai SKM Pelayanan BKPSDM	point	point	3.38	3.42		NA
			Nilai AKIP		Nilai LAKIP BKPSDM	%		83	84.20		
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti			%		100	100		

1. Faktor Penghambat :

a. Kebutuhan personil di BKPSDM yang dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja belum memadai dan seimbang.
b. Ketersediaan anggaran yang belum mencukupi untuk malaksanakan pengembangan kompetensi ke seluruh ASN membuat peningkatan profesionalitas ASN Kota Bogor terhambat.

Melihat analisis diatas. dapat dilihat bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja Program dan Kegiatan secara umum dapat dikatakan berjalan sesuai Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis BKPSDM Kota Bogor Tahun 2019-2024. Namun dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi terutama dalam meminimalisir hambatan agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi.

2. Analisis Perbandingan Capaian Pencapaian kinerja BKPSDM Kota Bogor

Didasarkan oleh target dari indikator sasaran strategis yang ingin dicapai sehingga dapat menunjang pencapaian visi misi Kepala Daerah pada urusan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan. Target kinerja tahun 2023 yang ingin dicapai tersebut telah dijabarkan di dalam dokumen Perubahan Renstra BKPSDM Kota Bogor Tahun 2019-2024. dimana terjadi perubahan sasaran strategis dan indikator sasaran beserta target yang ingin dicapai. Perubahan tersebut disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 serta perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat terkait perencanaan. pembangunan dan keuangan daerah.

Perubahan sasaran strategis yang baru tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pencapaian dari sasaran strategis yang lama agar sesuai dengan standar nasional dan regulasi terbaru. Sehingga target-target yang ingin dicapai di dalam indikator sasaran strategis yang baru dapat dihitung sesuai regulasi yang ada.

Perbandingan antara capaian kinerja BKPSDM Kota Bogor yang sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis BKPSDM Kota Bogor Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Indikator Program Terbaru	Satuan		Real. Sasaran			Realisasi Program	Capaian Kinerja Program
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		Awal	prbhn	2021	2022	2023		
1	Terpenuhinya aparatur sesuai kebutuhan organisasi	Terciptanya manajemen ASN yang memiliki kualifikasi. kompetensi. dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Persentase kesesuaian aparatur dengan kebutuhan	Indeks Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi. Manajemen Kinerja. Disiplin dan Penghargaan	%	point	98.85	125	344	150	NA
			Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi		Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian	%		94.4	44		44	
2	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian		Persentase aparatur yang terlayani administrasi kepegawaian		Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai. Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	%		100	131		112	
3	Meningkatnya inovasi aparatur yang berkelanjutan		Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan		Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan. Evaluasi dan Penyelenggaraan Diklat	%		58.1	33.5		38	
4	Meningkatnya akuntabili	Meningkatnya Kualitas	IKA (Indeks Kepuasan Aparatur)	Indeks Reformasi	Nilai SKM Pelayanan BKPSDM	point	point	3.38	3.42	86.79	3.89	114.41%

No	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Indikator Program Terbaru	Satuan		Real. Sasaran			Realisasi Program	Capaian Kinerja Program
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		Awal	prbhn	2021	2022	2023		
	tas kinerja dan pelayanan Badan	Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Birokrasi Lingkup BKPSDM Kota Bogor	Nilai LAKIP BKPSDM	%		83	84.2		86.85	103.15%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti			%		100	100			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Analisis kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan yang dibutuhkan telah sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan perangkat daerah tersebut. Selain itu dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masa yang akan datang akan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah digunakan beberapa indikator. antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini sesuai denga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. dengan sasaran target sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut dan hasil analisis standar kebutuhan Pelayanan.

Adapun untuk rekapitulasi pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kota Bogor dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Bogor

No	Indikator program	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan			1	2	2	2	2	20	20	20
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			92.50 %	93%	93.50 %	94%	94.4	95.59 %	96%	96.25 %
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural			77.50 %	52%	55%	57%	51.50 %	35.31 %	575%	57.5 %
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah			34	35	35	35	35	35	35	35
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah			150	150	150	150	150	150	150	150
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah			3710	3720	3730	3740	4015	4723	4723	4723
7	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah			105%	105 %	110%	115 %	132.78 %	58.83 %	58.83 %	60%

No	Indikator program	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025
	dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan (terdapat perubahan pada pembagi)										
8	Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan			12%	24%	25%	26%	21.16 %	21.16 %	21.16 %	22%
9	Rasiopegawai fungsional bersetifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan			13%	31%	33%	35%	13.64 %	57.76 %	57.76 %	58%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Dari hasil kajian evaluasi pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah. dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan permasalahan atau hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya serta capaian kinerja rencana strategis perangkat daerah.

Isu-isu strategis yang dapat diambil dari hasil evaluasi rencana kerja dan rencana strategis tahun sebelumnya adalah :

1. Membangun sistem pembinaan karier yang berkelanjutan. yang dimulai sejak ASN diterima menjadi pegawai sampai mereka mengakhiri masa jabatannya. agar dapat menjalankan tugas secara profesional.
2. Mengembangkan manajemen kinerja untuk memastikan masing-masing pegawai dapat mencapai target yang telah diturunkan dari visi. misi dan tujuan instansi.
3. Menyusun kebijakan penggajian. penghargaan yang dikaitkan dengan kinerja dan disiplin sehingga menjadi reward and punishment yang efektif dalam mendorong kinerja serta membentuk budaya kerja yang lebih produktif.
4. Peningkatan kapasitas untuk para calon pemimpin dengan membangun sistem talent pool yang berkesinambungan
5. Mengatasi kesenjangan jumlah ASN dengan jumlah formasi berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja akibat pensiun. alih tugas ke daerah lain maupun jumlah ketersediaan formasi CPNS baru.
6. Peningkatan kompetensi ASN berupa pelaksanaan kegiatan Diklat. Workshop dan Tugas Belajar untuk mendukung profesionalitas ASN

7. Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan administrasi kepegawaian dan peningkatan kompetensi ASN berupa Teknologi Informasi maupun gedung diklat

Menyikapi berbagai permasalahan pelayanan Kepegawaian di atas. harus disikapi juga perubahan regulasi yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran seperti yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi yang berisi penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. yang salah satu tujuan dari regulasi ini adalah menyamakan kode dan nomenklatur dari program. kegiatan dan sub kegiatan untuk dapat digunakan oleh semua Pemerintah Daerah.

Kaitannya dengan tugas pokok BKPSDM adalah regulasi ini membagi urusan BKPSDM menjadi dua yaitu urusan Kepegawaian dan urusan Pendidikan dan Pelatihan. Sehingga BKPSDM Kota Bogor sebagai unsur Penunjang Pemerintah memiliki 3 (tiga) Program yaitu Program Kepegawaian Daerah. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari pembagian dua urusan ini. menjadikan adanya revisi terhadap perubahan susunan organisasi. tugas dan fungsi dari BKPSDM pada Kota Bogor pada tahun 2021 yang sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan. Susunan. Organisasi. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Hal lain yang harus disikapi adalah kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah dengan dilakukan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional agar terwujud birokrasi yang agile. efetif dan efisien. Regulasi yang secara umum memangkas jumlah struktural yang beralih menjadi fungsional. yang akan berimbas kepada pola karir ASN. pengembangan

kompetensi. peningkatan kapasitas aparatur dan hal lain yang menyangkut layanan kepegawaian.

Untuk mengatasi kendala-kendala diatas. terdapat peluang yang bisa didapatkan diantaranya adalah :

1. Aturan-aturan kepegawaian di dalam penyederhanaan birokrasi sudah banyak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sehingga tujuan menjadikan ASN yang profesional lebih terstruktur dan berkelanjutan.
2. Prosedur pelayanan di kepegawaian yang sudah banyak dibantu oleh Teknologi Informasi sehingga pelayanan bisa dapat lebih ditingkatkan.
3. Besarnya atensi dari setiap aparatur untuk meningkatkan kompetensi SDM teknis. fungsional maupun manajerial.
4. Adanya komitmen dari stakeholder untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan diimbangi dengan menigkatnya disiplin dan kinerja ASN.

Dari kendala dan peluang yang didapatkan di atas. dapat ditentukan kebijakan umum dari BKPSDM Kota Bogor untuk dijadikan rencana kerja tahun 2023 diantaranya adalah :

1. Implementasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi ditinjau dari kebijakan Pola Karir Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Jabatan Administasi dan Jabatan Fungsional serta Pelaksana
2. Pengembangan kompetensi ASN untuk menyiapkan aparatur sesuai talenta yang dimiliki.
3. Pemberian reward dan punnishment untuk ASN. pembinaan disiplin serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian secara cepat. tepat dan akurat memanfaatkan teknologi informasi.
5. Peningkatan sarana prasarana BKPSDM Kota Bogor serta peningkatan kompetensi aparatur yang melayani administrasi kepegawaian.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal dan Perubahan RKPD

Review terhadap rancangan awal dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program atau kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan. indikator kinerja program dan kegiatan. tolak ukur atau target sasaran program atau kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Review terhadap rancangan awal dan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2024 pada BKPSDM Kota Bogor disajikan pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal dan Perubahan RKPD tahun 2024 Kota Bogor

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai A	20.450.126.993	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai A	19.704.333.409	
			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3.55 point				Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3.90 point		
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja	Kota Bogor	Tersusunnya Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100 %	90.364.000	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Tersusunnya Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100 %	87.964.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perangkat Daerah							dan Sesuai Peraturan			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100 %	16.819.748.289	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100 %	15.887.885.341	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	100 %	2.155.601.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	100 %	1.948.792.664	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	379.162.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	379.162.900	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	100 %	680.741.504	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	100 %	674.471.504	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan Daerah	Kota Bogor				Pemerintahan Daerah	Kota Bogor				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	324.508.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	726.057.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai. Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	132 point	1.959.669.900	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai. Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	132 point	1.784.307.850	
			Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi	44 point				Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi	44 point		
			Indeks Sistem Merit Aspek					Indeks Sistem Merit Aspek			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Promosi Mutasi. Manajemen Kinerja. Disiplin dan Penghargaan	126 point				Promosi Mutasi. Manajemen Kinerja. Disiplin dan Penghargaan	150 point		
	Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Bogor	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	132 point	935.117.800	Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Bogor	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	132 point	908.567.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Bogor	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi	50 point	248.277.900	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Bogor	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi	62.5 point	222.277.900	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Bogor	Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi ASN	44 point	654.997.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Bogor	Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi ASN	44 point	583.997.000	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Bogor	Indeks Sistem Merit Aspek Manajemen Kinerja. Disiplin dan Penghargaan	76 point	121.277.200	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Bogor	Indeks Sistem Merit Aspek Manajemen Kinerja. Disiplin dan Penghargaan	87.5 point	69.465.150	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER		Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan.	34 point	2.328.720.518	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER		Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan.	38 point	2.227.220.518	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DAYA MANUSIA		Evaluasi dan Penyelenggaraan Diklat			DAYA MANUSIA		Evaluasi dan Penyelenggaraan Diklat			
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Bogor	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan dan Evaluasi Diklat	10.5 point	1.092.420.730	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Bogor	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan dan Evaluasi Diklat	20 point	991.970.730	
	Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Bogor	Indeks Sistem Merit Aspek Penyelenggaraan Diklat	23.5 point	1.236.299.788	Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan	Kota Bogor	Indeks Sistem Merit Aspek Penyelenggaraan Diklat	18 point	1.235.249.788	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Fungsional					

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian. pendidikan dan pelatihan. maka BKPSDM tidak mengakomodir usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepegawaian di BKPSDM Kota Bogor menjadi lebih baik. maka program dan kegiatan yang ada harus selaras dengan program nasional di Kementrian PAN-RB. Badan Kepegawaian Nasonal maupun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. dijabarkan visi. misi. tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Visi Kementrian PAN-RB adalah mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian. bersih dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Misi Kementrian PAN-RB adalah :

1. Mengembangkan Transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
2. Membangun SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif
3. Menciptakan Pemerintahan yang efektif dan efisien
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Reformasi Birokrasi

Tugas Kementrian PAN-RB adalah menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sasaran Kementrian PAN-RB adalah :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Terwujudnya SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif
3. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih. akuntabel dan berkinerja tinggi
4. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas
5. Terwujudnya aparatur Kementrian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Sedangkan pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional. memiliki Visi BKN dalam Renstra 2020-2024. yaitu: "Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat. mandiri. dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Profesional artinya. (a) pengelola ASN melaksanakan kewenangan. tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien. sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas. profesional. netral dan bebas dari intervensi politik. bersih dari praktik koprupsi. kolusi. dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. (b) pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik. yaitu transparan. partisipatif. akuntabel. adil. dan setara. Berintegritas itu ada dua dimensi arti. yaitu 1) berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan. tugas dan fungsinya. pengelola ASN bersih dari praktik korupsi. kolusi. dan nepotisme; 2) pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan. tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik. yaitu transparan. partisipatif. akuntabel. adil. dan setara..

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut. serta Mengacu pada tugas. fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Kepegawaian negara dan penjabaran dari misi Memberikan

kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN. serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit. maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN.
2. Penyelenggaraan manajemen ASN.
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN.
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma. Standar. Prosedur. dan Kriteria Manajemen ASN.
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKN. Tujuan BKN dalam Renstra 2020-2024 adalah:

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik. yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi. promosi. penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian. tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial).
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana Mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma standar dan prosedur (NSP) kepegawaian di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan. tugas pokok dan fungsi unit kerjanya

3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan talent pool); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (on-line);
4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Indikasi tercapainya tujuan ini adalah penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Lebih jauh dari itu. indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN akan membuat manajemen ASN berjalan sesuai NSPK yang akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan good governance; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif. Efisien. Dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Permerintah yang Baik. Opini WTP BPK. tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN. ketersediaan layanan informasi publik. penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

Untuk Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat. menetapkan Visi berupa “Terwujudnya Aparatur yang Baik dan Sejahtera”. Penjabaran dari ‘Baik dan Sejahtera” adalah Bermutu. Akuntabel. Inovatif. Kreatif dan Sejahtera. Penjabaran dari Visi tersebut adalah :

1. Bermutu. memiliki kualitas yang memenuhi atau melebihi standar kualitas yang telah ditentukan
2. Akuntabel. dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah/kegiatan yang telah dilaksanakan
3. Inovatif. memiliki sifat memperkenalkan/menampilkan sesuatu pembaharuan (kreasi baru)

4. Kreatif. memenuhi daya cipta atau memiliki kemampuan menciptakan seusatu yang bermanfaat.
5. Sejahtera. memiliki rasa aman. nyaman dan tentram baik secara lahir/materi maupun bathin/jiwa.

Sedangkan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang ingin dicapai dari Visi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisne pegawai
2. Mewujudkan modernisasi sistem kepegawaian
3. Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja.

Berdasarkan telaahan Renstra Kementrian PAN-RB. BKN dan BKD Provinsi Jawa Barat yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kota Bogor. berikut ini dapat ditarik beberapa hal yang menjadi faktor- faktor yang mempengaruhi pelayanan BKPSDM Kota Bogor ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian/Lembaga sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih. efektif dan efisien dengan aparatur yang bersih. akuntabel dan berkinerja tinggi
2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berkualitas baik dengan aparatur yang inovatif dan kreatif yang harus diimbangi dengan kesejateraan aparatur.
3. Manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien disertai peningkatan sarana prasarana ASN agar tercipta aparatur yang kompeten dan kompetitif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Mencermati berbagai Visi Misi dari Kementrian PANRB. BKN maupun BKD Provinsi Jawa Barat. dapat diambil kesamaan persepsi yaitu keinginan mewujudkan aparatur negara yang bersih. kompeten. profesional. inovatif dan berorientasi pelayanan prima serta aparatur yang sejahtera. Hal ini juga sejalan dengan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Bogor pada Misi kedua untuk Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas dengan menetapkan Tujuan dari Misi Kedua yaitu Terwujudnya Pemerintah Yang Cerdas dan Melayani (Smart Government) sehingga diharapkan akan tercapai sasaran dari tujuan tersebut yaitu terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif. efisien dan akuntabel yang ditandai dengan Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi di akhir tahun 2024 di katagori Nilai A.

Sejalan dengan tujuan dari Misi Kedua Walikota Bogor tersebut. maka BKPSDM Kota Bogor yang memiliki urusan/kewenangan di bidang kepegawaian. pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan pada Rencana Strategis 2019-2024 yaitu **Meningkatnya Profesionalitas ASN.** Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu membangun aparatur sipil negara yang profesional yang dapat diukur dari Kualifikasi Aparatur. Kompetensi. Kinerja (target dan pencapaian) dan Disiplin Pegawai.

Di dalam mencapai tujuan meningkatnya Profesionalitas ASN. maka diperlukan penjabaran dari tujuan berupa Sasaran yang dapat diukur dengan standar yang jelas dalam ukuran kuantitatif. Sasaran ini mempunyai kerangka waktu dalam pencapaian target yang hendak dicapai dalam jangka waktu tahunan. semesteran. triwulanan dan bulanan. Penetapan sasaran ini merupakan penjabaran dari masalah pokok dan isu strategis yang telah diidentifikasi oleh BKPSDM Kota Bogor. dengan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya manajemen ASN yang memiliki kualifikasi. kompetensi. dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi yang ditandai dengan pencapaian Indeks Sistem Merit.
2. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah yang ditandai dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah.

Berikut ini tabel 3.1 keselarasan antara tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDM Kota Bogor beserta indikator kinerja :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM

Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke...							
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas					2020	2021	2022		2023		2024	
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Awal	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
Tujuan 1 : Meningkatnya profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	84	85	86	55	87	57	88	60
	Terpenuhinya aparatur sesuai kebutuhan organisasi	Terciptanya manajemen ASN yang memiliki kualifikasi. kompetensi. dan kinerja yang	Persentase kesesuaian aparatur dengan kebutuhan (%)	Indeks Sistem Merit	87%	89%	91%	300	93%	336	95%	344
			Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi		87%	89%	91%		93%		95%	
	Terlaksananya		Persentase aparatur yang		100%	100%	100%		100%		100 %	

Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke...							
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas					2020	2021	2022		2023		2024	
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Awal	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
	pelayanan administrasi kepegawaian	diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.	terlayani administrasi kepegawaian									
	Meningkatnya inovasi aparatur yang berkelanjutan		Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan		35%	40%	45%		50%		55%	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Badan	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di	IKA (Indeks Kepuasan Aparatur)	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	3.32	3.35	3.4	80	3.45	81	3.5	86.79
			Nilai AKIP		85%	86%	87%		88%		89%	
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%		100%		100 %	

Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke...							
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas					2020	2021	2022		2023		2024	
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Awal	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
		lingkup Perangkat Daerah										

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tujuan organisasi yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan tersebut harus selalu berkesinambungan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Untuk itu. agar menjamin kesinambungan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor pada tahun-tahun mendatang sebagai upaya pencapaian tujuan. sasaran dan kebijakan. BKPSDM Kota Bogor mengusulkan Rencana Kerja Tahun 2023 sejumlah 3 (tiga) program. 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan total kebutuhan dana atau pagu indikatif yang direncanakan sebesar Rp. 24.738.517.411.- (dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus sebelas rupiah) berubah menjadi Rp. 23.715.861.777,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) setelah perubahan anggaran tahun 2024.

Secara umum rincian program. kegiatan dan pagu indikatif BKPSDM tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan yang semula senilai Rp. 20.450.126.993.- (dua puluh milyar empat ratus lima puluh juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) menjadi Rp. 19.704.333.409,- (sembilan belas milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) setelah perubahan anggaran tahun 2024.

2. Program Kepegawaian Daerah yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan yang semula senilai Rp. 1.959.669.900.- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp. 1.784.307.850,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah perubahan anggaran tahun 2024.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang semula senilai Rp. 2.328.720.518.- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) menjadi Rp. 2.227.220.518,- (dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus delapan belas ribu rupiah) setelah perubahan anggaran tahun 2024.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan BKPSDM Tahun 2024 setelah perubahan dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2 Rumusan Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2024	Target Perubahan2024	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**				**24.738.517.411**	**23.715.861.777**
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A point	A Point	**20.450.126.993**	**19.704.333.409**
						Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3.55 point	33.90 Point		
5	**3**	**1**	**2:01**		**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100 %	100 %	**90.364.000**	**87.964.000**
5	3	1	2:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.000	2.700.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2024	Target Perubahan2024	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan
5	3	1	2:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	87.664.000	85.264.000
5	**3**	**1**	**2:02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100%	100%	**16.819.748.289**	**15.887.885.341**
5	3	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ bulan	95 Orang/ bulan	16.751.288.289	15.835.265.341
5	3	1	2:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	68.460.000	52.620.000
5	**3**	**1**	**2:06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	100 %	100 %	**2.155.601.800**	**1.948.792.664**
5	3	1	2:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	160.457.600	160.457.600
5	3	1	2:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	76.461.700	76.461.700

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2024	Target Perubahan2024	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan
5	3	1	2:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	92.764.500	92.764.500
5	3	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.825.918.000	1.619.108.864
5	**3**	**1**	**2:07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	**379.162.900**	**379.162.900**
5	3	1	2:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	39.827.100	39.827.100
5	3	1	2:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	14 Unit	339.335.800	339.335.800
5	**3**	**1**	**2:08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	100 %	100 %	**680.741.504**	**674.471.504**
5	3	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	252.553.720	252.553.720

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2024	Target Perubahan2024	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan
5	3	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	428.187.784	421.917.784
5	**3**	**1**	**2:09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100%	**324.508.500**	**726.057.000**
5	3	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	16 Unit	184.230.000	184.230.000
5	3	1	2:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	147 Unit	147 Unit	38.278.700	38.150.000
5	3	1	2:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	101.999.800	503.677.000
5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai. Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	126 Point	132 Point	**1.959.669.900**	**1.784.307.850**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2024	Target Perubahan2024	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan
						Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi	44 Point	44 Point		
						Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi. Manajemen Kinerja. Disiplin dan Penghargaan	126 Point	150 Point		
5	**3**	**2**	**2:01**		**Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Indeks Sistem Merit Aspek Pengadaan. Informasi dan Pelayanan Kepegawaian	132 point	112 Point	**935.117.800**	**908.567.800**
5	3	2	2:01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	486.982.400	465.032.400
5	3	2	2:01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	30.998.100	30.998.100
5	3	2	2:01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	104.277.300	103.277.300
5	3	2	2:01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	288.870.000	286.170.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2024	Target Perubahan2024	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan
5	3	2	2:01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	23.990.000	23.090.000
5	**3**	**2**	**2:02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi	150 point	62.5 Point	**248.277.900**	**222.277.900**
5	3	2	2:02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	141.500.000	115.500.000
5	3	2	2:02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	106.777.900	106.777.900
5	**3**	**2**	**2:03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi ASN	44 point	44 point	**654.997.000**	**583.997.000**
5	3	2	2:03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	129.817.000	129.817.000
5	3	2	2:03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	60 Orang	60 Orang	525.180.000	454.180.000
5	**3**	**2**	**2:04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Indeks Sistem Merit Aspek Manajemen	66 point	87.5 Point	**121.277.200**	**69.465.150**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2024	Target Perubahan2024	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan
						Kinerja. Disiplin dan Penghargaan				
5	3	2	2:04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	12 Dokumen	54.323.050	54.323.050
5	3	2	2:04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	36 Orang	36 Orang	8.702.100	8.702.100
5	3	2	2:04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	6985Orang	6985Orang	58.252.050	6.440.000
5	**4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**2.328.720.518**	**2.227.220.518**
5	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan. Evaluasi dan Penyelenggaraan Diklat	30.5 point	38 Point	**2.328.720.518**	**2.227.220.518**
5	**4**	**2**	**2:01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan dan Evaluasi Diklat	10.5 point	20 Point	**1.092.420.730**	**991.970.730**
5	4	2	2:01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum. Inti. dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren.	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum. Inti. dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	16.350.000	15.900.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2024	Target Perubahan2024	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan
					Perangkat Daerah Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren. Perangkat Daerah Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				
5	4	2	2:01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum. Inti. dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren. Perangkat Daerah Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang	200 Orang	1.076.070.730	976.070.730
5	**4**	**2**	**2:02**		**Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Indeks Sistem Merit Aspek Penyelenggaraan Diklat	23.5 point	18 Point	**1.236.299.788**	**1.235.249.788**
5	4	2	2:02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi. Pengelolaan Kelembagaan. Tenaga Pengembang Kompetensi. Sumber Belajar. Kerja Sama. Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Kepemimpinan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi. Pengelolaan Kelembagaan. Tenaga Pengembang Kompetensi. Sumber Belajar. Kerja Sama. Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah. Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.850.000	16.800.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2024	Target Perubahan2024	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan
					dan Prajabatan. serta Jabatan Fungsional	Pimpinan Tinggi. Kepemimpinan dan Prajabatan.Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				
5	4	2	2:02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. dan Prajabatan	1 Laporan	1 Laporan	1.218.449.788	1.218.449.788
TOTAL									**24.738.517.411**	**23.715.861.777**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara detail rumusan rencana kerja. program. kegiatan dan Sub kegiatan serta pendanaan anggaran BKPSDM Kota Bogor Tahun 2024 disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kota Bogor Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**										
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup		A point	A Point	**20.450.126.993**	**19.704.333.409**		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup	A point	**22.678.857.696**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
						Perangkat Daerah							Perangkat Daerah		
						Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah		3.55 point	33.89 Point				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3.55 point	
5	**3**	**1**	**2:01**		**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan		100 %	100 %	**90.364.000**	**87.964.000**		Tersusunnya Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan	100 %	**150.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
						Sesuai Peraturan							Sesuai Peraturan		
5	3	1	2:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.000	2.700.000	APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000
5	3	1	2:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	6 Laporan	6 Laporan	87.664.000	85.264.000	APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	145.000.000
5	3	1	2:02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD		100%	100%	**16.819.748.289**	**15.887.885.341**		Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD	100 %	**17.068.460.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
						Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan							Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan		
5	3	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	95 Orang/ bulan	95 Orang/ bulan	16.751.288.289	15.835.265.341	APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ bulan	17.000.000.000
5	3	1	2:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	1 Laporan	1 Laporan	68.460.000	52.620.000		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	1 Laporan	68.460.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
													wulanan/Semesteran SKPD		
5	3	1	2:06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor		100 %	100 %	**2.155.601.800**	**1.948.792.664**		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	100 %	**3.210.832.691**
5	3	1	2:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	1 Paket	160.457.600	160.457.600	APBD	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 Paket	176.503.360
5	3	1	2:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	3 Paket	3 Paket	76.461.700	76.461.700	APBD	Terpenuhinya Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas. Tabung Gas Elpiji dan Air Minum Galon Kantor	1 Paket	86.723.670

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5	3	1	2:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	12 Laporan	92.764.500	92.764.500	APBD	Terpenuhinya Barang Cetakan Blanko Dinas dan Publikasi BKPSDM	1 Paket	102.040.950
5	3	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	12 Laporan	12 Laporan	1.825.918.000	1.619.108.864	APBD	Terpenuhinya Kebutuhan Mamin rapat. tamu. seminar pelatihan sosialisasi. Terpenuhinya Kebutuhan Perjadin. Penyelenggaraan Rapat. Sosialisasi (Fullday. Fullboard)	12 Laporan	2.845.564.711
5	3	1	2:07		**Pengadaan Barang Milik Daerah**	Persentase Pemenuhan		100 %	100 %	**379.162.900**	**379.162.900**		Persentase Penyediaan	100 %	**1.041.640.831**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sarana dan Prasarana Aparatur							Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5	3	1	2:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bogor	1 Unit	1 Unit	39.827.100	39.827.100	APBD	Terpenuhinya kebutuhan Air. Listrik. Surat Kabar. Internet dan Telephone	1 Unit	116.325.000
5	3	1	2:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	27 Unit	14 Unit	339.335.800	339.335.800	APBD	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kebersihan. Keamanan dan Administrasi Kantor	38 Unit	925.315.831
5	3	1	2:08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan		100 %	100 %	**680.741.504**	**674.471.504**		Persentase Penyediaan Jasa	100 %	**747.741.174**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Pemerintahan Daerah	Operasional Kantor							Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5	3	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	12 Laporan	252.553.720	252.553.720	APBD	Terpenuhinya kebutuhan Air. Listrik. Surat Kabar. Internet dan Telephone	12 Laporan	277.809.092
5	3	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	12 Laporan	428.187.784	421.917.784	APBD	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kebersihan. Keamanan dan Administrasi Kantor	12 Laporan	469.932.082
5	3	1	2:09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Persentase Pemenuhan		100 %	100%	**324.508.500**	**726.057.000**		Persentase Pemeliharaan		**460.183.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Aparatur							Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	
5	3	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	17 Unit	16 Unit	184.230.000	184.230.000	APBD	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan Dinas	6 Unit	202.653.000
5	3	1	2:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bogor	55 Unit	147 Unit	38.278.700	38.150.000	APBD	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	163 Unit	57.530.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5	3	1	2:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bogor	1 Unit	1 Unit	101.999.800	503.677.000	APBD	Terpenuhinya Pemeliharaan Bangunan Kantor	1 Unit	200.000.000
5	3	2			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai. Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan		126 Point	132 Point	**1.959.669.900**	**1.784.307.850**		Indek Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai. Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan.	112 Point	**3.355.000.000**
						Indeks Sistem		44 Point	44 Point				Indeks Sistem Merit Aspek	44 Point	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
						Merit Aspek Pengembangan Kompetensi							Promosi Mutasi. Manajemen Kinerja. Disiplin dan Penghargaan		
						Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi. Manajemen Kinerja. Disiplin dan Penghargaan		126 Point	130 Point				Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian	157.5 Point	
5	3	2	2:01		**Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Indeks Sistem Merit Aspek Pengadaan. Informasi dan Pelayanan Kepegawaian		132 point	112 Point	**935.117.800**	**908.567.800**		Persentase CASN yang terseleksi sesuai dengan formasi	95%	**1.565.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
													Jumlah Formasi ASN yang diterima	440 Formasi	
													Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	95%	
5	3	2	2:01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Bogor	1 Dokumen	1 Dokumen	486.982.400	465.032.400	APBD	Terlaksananya Seleksi CPNS dan PPPK. Terlaksananya Penetapan Formasi. Terlaksananya Sumpah Janji CPNS dan PPPK	2 Dokumen	700.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5	3	2	2:01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Bogor	1 Dokumen	1 Dokumen	30.998.100	30.998.100	APBD	Jumlah ASN yang Pensiun	1 Dokumen	175.000.000
5	3	2	2:01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kota Bogor	1 Lembaga	1 Lembaga	104.277.300	103.277.300	APBD	Terlaksananya Kegiatan HUT Korpri	1 Lembaga	300.000.000
5	3	2	2:01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Bogor	12 Dokumen	12 Dokumen	288.870.000	286.170.000	APBD	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	350.000.000
													Jumlah Fitur Aplikasi yang	1 Aplikasi	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
													terbangun pada SIMPEG		
5	3	2	2:01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Bogor	12 Dokumen	12 Dokumen	23.990.000	23.090.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	40.000.000
													Terlaksananya Tes Kesehatan PNS yang Tidak Cakap Jasmani dan Rohani	12 orang	
5	3	2	2:02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi		150 point	52.5 Point	**248.277.900**	**222.277.900**		Persentase pegawai yang sudah ditempatkan sesuai dengan kualifikasi	80%	**600.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
													dan kompetensinya		
													Jumlah Pengisian Jabatan ASN berdasarkan Manajemen Talenta	35 Jabatan	
													Jumah PNS yang mendapatkan SK Kenaikan Pangkat tepat waktu	850 SK	
													Persentase PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian penyesuaian Ijazah	90%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5	3	2	2:02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Bogor	4 Dokumen	4 Dokumen	141.500.000	115.500.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	400.000.000
5	3	2	2:02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Bogor	2 Dokumen	2 Dokumen	106.777.900	106.777.900	APBD	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	200.000.000
5	3	2	2:03		**Pengembangan**	Indeks Sistem Merit Aspek Pengembanga		44 point	44 point	**654.997.000**	**583.997.000**		Persentase ASN yang sudah	50%	**910.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Kompetensi ASN	n Kompetensi ASN							mengikuti Assesment		
													Persentase ASN yang mendapat fasilitasi Pendidikan lanjutan yang memenuhi persyaratan	90%	
5	3	2	2:03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kota Bogor	1 Dokumen	1 Dokumen	129.817.000	129.817.000	APBD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	280.000.000
5	3	2	2:03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kota Bogor	60 Orang	60 Orang	525.180.000	454.180.000	APBD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	65 Orang	630.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5	3	2	2:04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Indeks Sistem Merit Aspek Manajemen Kinerja. Disiplin dan Penghargaan		**66 point**	**77.5 Point**	**121.277200**	**69.465.150**		Persentase ASN yang berkinerja sesuai ekspektasi	95%	**280.000.000**
													Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan setiap tahun	319 Orang	
													Persentase ASN yang mendapatkan Hukuman Disiplin	0.05%	
5	3	2	2:04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi	Kota Bogor	12 Dokumen	12 Dokumen	54.323.050	54.323.050	APBD		5 Dokumen	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
						Kinerja Aparatur									
5	3	2	2:04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Bogor	36 Orang	36 Orang	8.702.100	8.702.100	APBD	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	400 Orang	80.000.000
5	3	2	2:04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kota Bogor	6985 Orang	6985 Orang	58.252.050	6.440.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8000 Pegawai	100.000.000
5	4				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**2.328.720.518**	**2.227.220.518**		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		**4.989.574.463**
5	4	2			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER**	Indeks Sistem Merit Aspek		30.5 point	38 Point	**2.328.720.518**	**2.227.220.518**		Indeks Sistem Merit Aspek	40.5 point	**4.989.574.463**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					DAYA MANUSIA	Perencanaan. Evaluasi dan Penyelenggaraan Diklat							Perencanaan. Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat		
5	4	2	2:01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan dan Evaluasi Diklat		10.5 point	20 Point	**1.092.420.730**	**991.970.730**		Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis Per Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya	76.60%	**2.114.333.818**
5	4	2	2:01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum. Inti. dan Pilihan bagi	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum. Inti.	Kota Bogor	1 Dokumen	1 Dokumen	16.350.000	15.900.000	APBD	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum. Inti.	1 Dokumen	40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren. Perangkat Daerah Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum	dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren. Perangkat Daerah Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun							dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren. Perangkat Daerah Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		
5	4	2	2:01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum. Inti. dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Bogor	200 Orang	200 Orang	1.076.070.730	976.070.730	APBD	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang	2.074.333.818

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Pemerintahan Konkuren. Perangkat Daerah Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum										
5	4	2	2:02		**Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Indeks Sistem Merit Aspek Penyelenggaraan Diklat		23.5 point	18 Point	**1.236.299.788**	**1.235.249.788**		Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Per Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya	1.30%	**2.875.240.645**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5	4	2	2:02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi. Pengelolaan Kelembagaan. Tenaga Pengembang Kompetensi. Sumber Belajar. Kerja Sama. Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Kepemimpinan dan Prajabatan. serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi. Pengelolaan Kelembagaan. Tenaga Pengembang Kompetensi. Sumber Belajar. Kerja Sama. Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Kepemimpinan dan Prajabatan.Serta Jabatan	Kota Bogor	1 Dokumen	1 Dokumen	17.850.000	16.800.000	APBD	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi. Pengelolaan Kelembagaan. Tenaga Pengembang Kompetensi. Sumber Belajar. Kerja Sama. Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Kepemimpinan dan Prajabatan.Se	1 Dokumen	40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
						Fungsional yang Disusun							rta Jabatan Fungsional yang Disusun		
5	4	2	2:02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. dan Prajabatan	Kota Bogor	1 Laporan	1 Laporan	1.218.449.788	1.218.449.788	APBD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. dan Prajabatan	1 Laporan	2.835.240.645

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Awal	Target Perubahan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
TOTAL						24.738.517.411	23.715.861.777				31.023.432.159

BAB V PENUTUP

Sebagai upaya mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mewajibkan Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun maka Dokumen Renja Perubahan BKPSDM Kota Bogor ini disusun sebagai implementasi operasional pelaksanaan Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor dan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Bogor yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bogor. Dokumen Renja ini dapat dijadikan bahan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BKPSDM tahun 2024 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM tahun 2024 yang menjadi acuan dan arahan operasional kegiatan di lingkup BKPSDM Kota Bogor Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan BKPSDM tahun 2024 ini memuat indikator tolak ukur kinerja. target kinerja. kode rekening. uraian belanja serta jumlah anggaran tahun 2024 dan dapat dijadikan dasar pengukuran dan mengevaluasi kinerja berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sekaligus Laporan Kinerja Keuangan BKPSDM tahun 2024. Sehingga dengan tersusunnya Renja Perubahan BKPSDM tahun 2024 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk konsisiten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah agar pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. target program dan kegiatan dapat lebih fokus. terintegrasi serta dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum khususnya ASN di Pemerintah Kota Bogor.

Z. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perubahan atas perencanaan awal Perangkat Daerah yang telah disusun untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Selanjutnya, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Kemudian, Perubahan Rencana Kerja BKAD Tahun 2024 yang disusun akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan BKAD Tahun 2024 dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan BKAD Tahun 2024 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237); Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);

22) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
23) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
24) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
25) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
26) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
27) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
28) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 180 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 180);
29) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 32).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKAD Kota Bogor Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2024 adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu perubahan untuk anggaran perubahan yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BKAD Kota Bogor memiliki 3 program yang sampai dengan triwulan II tahun 2024 memiliki target sebesar Rp18.645.354.908 dengan realisasi sebesar Rp15.787.138.776 atau 84,67% dari target triwulan II. Sedangkan, jika dibandingkan dengan keseluruhan pagu sebelum perubahan yang sebesar Rp69.852.419.968 maka realisasi sampai dengan triwulan II baru mencapai 22,6%. Rendahnya nilai realisasi tersebut disebabkan karena kegiatan yang dijadwalkan untuk direalisasikan di triwulan III dan IV lebih banyak dibandingkan dengan triwulan I dan II sehingga beberapa kegiatan pada dasarnya memang belum dilaksanakan yang menyebabkan realisasi anggaran sampai triwulan II masih terhitung rendah. Berikut adalah tabel capaian target dan realisasi penyelenggaraan rencana kerja BKAD Kota Bogor sampai dengan triwulan II tahun 2024.

TABEL II.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
											I			II								
								K		Rp.	K			K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	5			6			7			8			9		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
	5	02				KEUANGAN				177.204.832.019			6.233.256.623			9.553.882.153			15.787.138.776			8,91
	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	Poin	129.318.743.119	-	Poin	5.596.499.423	A	Poin	4.312.213.052	-	Poin	9.908.712.475	-	%	7,66
							Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,5	Poin		-	Poin		-	Poin		3,997	Poin	-	-	%	
	5	02	01	2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				229.520.800			741.800			370.900			1.112.700			0,48
							Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	Poin		-	Poin		A	Poin		A	Poin		-	%	
	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				229.520.800			741.800			370.900			1.112.700			0,48
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		-	%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
											I			II								
								K		Rp.	K			K		Rp.				K		Anggaran (%)
1	2					3	4	5			6			7			8			9		
	5	02	01	2.02		**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**24.983.372.579**			**3.329.941.914**			**3.531.441.589**			**6.861.383.503**			**27,46**
							Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	**100**	**%**		**25**	**%**		**25**	**%**		**50**	**%**		**50,00**	**%**	
	5	**02**	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.867.320.579			3.321.571.914			3.522.560.389			**6.844.132.303**			**27,52**
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540	Orang/Tahun		141	Orang/Tahun		144	Orang/Tahun		**285**	**Orang/Tahun**		**52,78**	**%**	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				116.052.000			8.370.000			8.881.200			**17.251.200**			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		3	Laporan		3	Laporan		**6**	**Laporan**				
	5	**02**	**01**	**2.06**		**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**2.665.669.040**			**753.609.495**			**364.848.426**			**1.118.457.921**			**41,96**
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100	%		**25**	**%**		**25**	**%**		**50**	**%**		**50,00**	**%**	
	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				31.301.838			-			19.651.329			**19.651.329**			**62,78**
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		0	Paket		1	Paket		**1**	**Paket**		**100,00**	**%**	
	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				487.021.020			423.681.925			1.500.000			**425.181.925**			**87,30**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
											I			II								
								K		Rp.	K			K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	5			6			7			8			9		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket		1	Paket		0	Paket		**1**	**Paket**		**100,00**	%	
	5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				240.983.282			39.493.245			86.454.792			**125.948.037**			**52,26**
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket		0	Paket		1	Paket		**1**	**Paket**		**100,00**	%	
	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				116.854.500			97.722.000			166.400			**97.888.400**			**83,77**
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		1	Paket		0	Paket		**1**	**Paket**		**100,00**	%	
	5	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12.000.000			3.000.000			3.000.000			**6.000.000**			**50,00**
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen		3	Dokumen		3	Dokumen		**6**	**Dokumen**		**50,00**	%	
	5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				387.359.400			68.455.000			67.838.000			**136.293.000**			**35,19**
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan		3	Laporan		3	Laporan		**6**	**Laporan**		**50,00**	%	
	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.390.149.000			121.257.325			186.237.905			**307.495.230**			**22,12**
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		3	Laporan		3	Laporan		**6**	**Laporan**		**50,00**	%	
	5	**02**	**01**	**2.07**		**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100.541.612.500**			**1.170.243.000**			**-**			**1.170.243.000**			**1,16**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
											I			II								
								K		Rp.	K			K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	5			6			7			8			9		
							Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**		**200**	**%**		**200,00**	**%**	
	5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel				69.222.500			-			-			-			-
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit		0	Unit		0	Unit		**0**	**Unit**		-		
	5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				176.740.000			154.320.000			-			**154.320.000**			**87,31**
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit		6	Unit		0	Unit		**6**	**Unit**		**100,00**	**%**	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				99.998.560.000			-			-			-			-
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		0	Unit		0	Unit		**0**	**Unit**		-	**%**	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				297.090.000			1.015.923.000			-			**1.015.923.000**			**341,96**
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit		2	Unit		0	Unit		**2**	**Unit**		**100,00**	**%**	
	5	**02**	**01**	**2.08**		**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**346.007.200**			**244.484.932**			**133.081.352**			**377.566.284**			**109,12**
							Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**100**	**%**		**25**	**%**		**25**	**%**		**50**	**%**		**50,00**	**%**	
	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				114.750.000			73.779.020			655.000			**74.434.020**			**64,87**
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3	Laporan		3	Laporan		**6**	**Laporan**		**50,00**	**%**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
											I			II								
								K		Rp.	K			K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	5			6			7			8			9		
	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				231.257.200			170.705.912			132.426.352			**303.132.264**			**131,08**
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3	Laporan		3	Laporan		**6**	**Laporan**		**50,00**	%	
	5	**02**	**01**	**2.09**		**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**552.561.000**			**97.478.282**			**282.470.785**			**379.949.067**			**68,76**
							Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	**100**	**%**		**25**	**%**		**25**	**%**		**50**	**%**		**50,00**	**%**	
	5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				265.930.000			59.405.732			98.194.185			**157.599.917**			**59,26**
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit		1	Unit		2	Unit		**3**	**Unit**		**42,86**	%	
	5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				286.631.000			38.072.550			184.276.600			**222.349.150**			**77,57**
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit		7	Unit		7	Unit		**14**	**Unit**		**46,67**	%	
	5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**38.847.821.900**			**294.573.000**			**3.368.248.362**			**3.662.821.362**			**9,43**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
											I			II								
								K		Rp.	K			K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	5			6			7			8			9		
							Persentase Penyediaan Dokumen Perencaan Anggaran (KUA PPAS, APBD, dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	**100**	**%**		**25**	**%**		**25**	**%**		**50**	**%**		**50,00**	**%**	
	5	**02**	**02**	**2.01**		**Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**				**818.012.800**			**15.578.000**			**153.294.000**			**168.872.000**			**20,64**
							Tingkat Ketepatwaktuan Penyusunan Rancangan KUA PPAS	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu**		**-**	**Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu**		**-**	**Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu**		**-**	**Waktu/Tidak Tepat**		**-**	**%**	
							Tingkat Ketepatwaktuan Penyusunan Bahan RKA	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu**		**-**	**Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu**		**-**	**Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu**		**-**	**Waktu/Tidak Tepat**		**-**	**%**	
							Tingkat Ketepatwaktuan Penyusunan RAPBD	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu**		**-**	**Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu**		**-**	**Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu**		**-**	**Waktu/Tidak Tepat**		**-**	**%**	
	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				186.969.600			-			146.110.000			**146.110.000**			**78,15**
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		**0**	**Dokumen**		**-**	**%**	
	5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				7.269.600			-			-			-			-
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		**0**	**Dokumen**		**-**	**%**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
											I			II								
								K		Rp.	K			K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	5			6			7			8			9		
	5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				79.520.000			-			-			-			-
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		**0**	**Dokumen**		-	%	
	5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				72.130.000			-			-			-			-
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		**0**	**Dokumen**		-	%	
	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				175.717.300			11.443.000			-			**11.443.000**			**6,51**
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3	Dokumen		1	Dokumen		0	Dokumen		**1**	**Dokumen**		**33,33**	%	
	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				168.528.300			4.135.000			7.184.000			**11.319.000**			**6,72**
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6	Dokumen		2	Dokumen		1	Dokumen		**3**	**Dokumen**		**50,00**	%	
						Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				26.510.000			-			-						

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
											I			II								
								K		Rp.	K			K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	5			6			7			8			9		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Orang		-	Orang		0	Orang							
	5	02	02	2.01	13	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				101.368.000			-			-			-			-
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen		**0**	**Dokumen**		-	%	
	5	**02**	**02**	**2.03**		**Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**				**705.584.600**			**212.135.000**			**73.141.100**			**285.276.100**			**40,43**
							Tingkat Ketepatwaktuan Penyampaian LKPD kepada BPK	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu**		**100,00**	%	
							Jumlah Perangkat Daerah sasaran Monitoring Laporan Keuangan	**36**	**PD**		**36**	**PD**		**36**	**PD**		**72**	**PD**		**100,00**	%	
	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran				208.200.000			48.450.000			48.450.000			**96.900.000**			**46,54**
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	12	Laporan		3	Laporan		3	Laporan		**6**	**Laporan**		**50,00**	%	
	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				228.600.000			163.685.000			15.185.000			**178.870.000**			**78,25**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
											I			II								
								K		Rp.	K			K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	5			6			7			8			9		
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7	Laporan		7	Laporan		0	Laporan		**7**	**Laporan**		**100,00**	%	
	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			24.540.000			-			9.506.100			**9.506.100**			**38,74**
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		**0**	**Dokumen**		-	%	
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				244.244.600			-			-							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	405	Orang		0	Orang		0	Orang							

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
											I			II								
								K		Rp.	K			K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	5			6			7			8			9		
	5	**02**	**02**	**2.04**		**Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**37.324.224.500**			**66.860.000**			**3.141.813.262**			**3.208.673.262**			**8,60**
							Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Bunga	**80**	**%**		**-**	**%**		**40**	**%**		**40**	**%**		**50,00**	**%**	
							Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan	**80**	**%**		**-**	**%**		**40**	**%**		**40**	**%**		**50,00**	**%**	
							Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga	**80**	**%**		**-**	**%**		**40**	**%**		**40**	**%**		**50,00**	**%**	
	5	02	02	2.04	02	Analisis investasi Pemerintah Daerah				364.860.000			58.400.000			58.400.000			**116.800.000**			**32,01**
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1	Laporan		-	Laporan		-	Laporan		**0**	**Laporan**		-	**%**	
	5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				7.089.364.500			7.560.000			3.083.413.262			**3.090.973.262**			**43,60**
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1	Laporan		-	Laporan		-	Laporan		**0**	**Laporan**		-	**%**	
	5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1.870.000.000			-			-			**-**			**-**
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	Laporan		-	Laporan		-	Laporan		**0**	**Laporan**		-	**%**	
	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				28.000.000.000			900.000			-			**900.000**			**0,00**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
											I			II								
								K		Rp.	K			K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	5			6			7			8			9		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan		-	Laporan		-	Laporan		**0**	**Laporan**		-	%	
	5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**				**9.038.267.000**			**342.184.200**			**1.873.420.739**			**2.215.604.939**			**24,51**
							Persentase administrasi pengeloaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	**84**	**%**		-	**%**		-	**%**		**0**	**%**		-	%	
	5	**02**	**03**	**2.01**		**Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**9.038.267.000**			**342.184.200**			**1.873.420.739**			**2.215.604.939**			**24,51**
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	**1**	**Laporan**		**-**	**Laporan**		**-**	**Laporan**		**0**	**Laporan**		-	%	
							Jumlah Sertifikat per Tahun	**250**	**Sertifikat**		**28**	**Sertifikat**		**47**	**Sertifikat**		**75**	**Sertifikat**		**30,00**	%	
							Jumlah Draft Keputusan Wali Kota tentang Standar Harga	**2**	**Draft Keputusan**		**-**	**Draft**		**-**	**Draft**		**0**	**Draft Keputusan**		-	%	
							Jumlah Draft Keputusan Wali Kota tentang Kebutuhan Barang Milik Daerah	**2**	**Draft Keputusan**		**-**	**Draft**		**-**	**Draft**		**0**	**Draft Keputusan**		-	%	
							Jumlah Draft Keputusan Sekretaris Daerah tentang Dokumen RKBMD dan Perubahan RKBMD Kota Bogor	**2**	**Draft Keputusan**		**-**	**Draft**		**-**	**Draft**		**0**	**Draft Keputusan**		-	%	
	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga				662.000.000			54.325.000			64.575.000			**118.900.000**			**17,96**
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	8	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		**4**	**Dokumen**		**50,00**	%	
	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah				572.757.500			109.044.000			12.750.000			**121.794.000**			
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	8	Laporan		-	Laporan		-	Laporan		**0**	**Laporan**		-	%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
											I			II								
								K		Rp.	K			K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	5			6			7			8			9		
	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah				6.705.557.500			166.215.200			1.733.995.739			**1.900.210.939**			**28,34**
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	400	Laporan		46	Laporan		30	Laporan		**76**	**Laporan**		**19,00**	%	
	5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah				351.000.000			12.600.000			36.900.000			**49.500.000**			**14,10**
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	Laporan		-	Laporan		1	Laporan		**1**	**Laporan**		**50,00**	%	
	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				608.150.000			-			-			-			-
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtan ganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	24	Dokumen		-	Dokumen		0	Dokumen		**0**	**Dokumen**		-	%	
	5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				138.802.000			-			25.200.000			**25.200.000**			**18,16**
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	341	Orang		-	Orang		-	Orang		**0**	**Orang**		-	%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan urusan dan kewenangan dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bogor, Badan Keuangan dan Aset Daerah berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangannya sebagai berikut:

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah		NA	NA	100 %	100 %	100 %	NA	NA	100 %	100 %	100 %	100%	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah		NA	NA	100 %	100 %	100 %	NA	NA	100 %	100 %	100 %	100%	
3	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)		NA	NA	100 %	100 %	100 %	NA	NA	100 %	100 %	100 %	100%	
4	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan		NA	NA	100 %	100 %	100 %	NA	NA	100 %	100 %	100 %	100%	

Adapun beberapa faktor pendorong yang mendukung keberhasilan capaian target BKAD Kota Bogor serta beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan misi BKAD Kota Bogor. Faktor-faktor berikut adalah

1. Faktor Pendorong
    a) Digitalisasi beberapa penyelenggaraan kegiatan, seperti pelaksanaan verifikasi RKA-SKPD/RKAP-SKPD dan DPA-SKPD/DPPPA-SKPD, juga pencairan atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilakukan secara *online* menggunakan sistem informasi e-office BKAD.
    b) Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas
    c) Sarana dan prasarana yang mendukung
2. Kendala
    a) Perubahan peraturan dan kebijakan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
    b) Kuantitas pegawai yang kurang dari nilai ideal
    c) Kurangnya komitmen dari pemangku kepentingan yang dapat turut menghambat capaian target dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKAD Kota Bogor

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah, BKAD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKAD Kota Bogor didukung oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan juga diberikan kewenangan penuh dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, BKAD Kota Bogor juga memiliki sistem IT yang memadai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Namun demikian masih terdapat masalah-masalah yang dihadapi, yaitu:

- Ketepatwaktuan dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Kurangnya kuantitas dan perlu ditingkatkan lagi kualitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah. Ada kalanya hal ini menyebabkan terjadi kesalahan dan atau keterlambatan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan;
- Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan aset-aset daerah, saat ini masih banyak dijumpai aset milik Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat Serta Kementerian Lembaga yang berlokasi di Kota Bogor sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kota;

- Data barang milik daerah (BMD) kurang akurat dan Legalitas kepemilikan Pemerintah Kota Bogor atas beberapa barang milik daerah masih lemah.

Apabila dievaluasi lebih jauh, permasalahan pokok sebagaimana diatas disebabkan karena:

a. Pengembangan teknologi untuk belum maksimal terkait Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan;
b. Kurangnya jumlah personil dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ASN yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi dan IT;
c. Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi masih rendah;
d. Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah;
e. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
f. Masih Lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar legalitas kepemilikan Pemerintah Kota Bogor.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan capaian program nasional. Masih adanya program dan kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target Indikator kinerja berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja BKAD Kota Bogor pada masa mendatang, tantangan yang akan dihadapi BKAD adalah

1. Pola pelaksanaan *change management* khususnya pengelolaan reformasi birokrasi dan Agen Perubahan belum sepenuhnya berhasil mengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara signifikan;

2. Pelaksanaan penilaian kepuasan terhadap pelayanan baru dilakukan 1 kali dalam setahun;
3. Adanya kendala pada sistem aplikasi sehingga memungkinkan perangkat daerah terlambat dalam penyusunan dokumen anggaran, laporan keuangan dan laporan BMD;
4. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat;
5. BMD masih dalam proses inventarisasi sehingga pemanfaatan, penggunaan, pemeliharaan, penjualan dan pemusnahan BMD tidak berjalan secara optimal.

Sedangkan peluang bagi BKAD Kota Bogor dalam melaksanakan tugasnya adalah

1. Melaksanakan tahapan penyusunan dokumen anggaran secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan amanat perundang-undangan
3. Peningkatan kapasitas SDM bagi penyusun laporan keuangan dan penyusunan laporan BMD pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
4. Sistem informasi memudahkan proses penyusunan dokumen anggaran, penatausahaan keuangan, laporan keuangan dan pengelolaan BMD
5. Pengadministrasian BMD terus dioptimalkan

Isu penting yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adalah kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang masih terus perlu ditingkatkan dalam rangka percepatan pencapaian visi misi kepala daerah.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh BKAD Kota Bogor dalam Rencana Kerja Perubahan pada dasarnya mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 yang telah disusun dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKAD Kota Bogor. Renstra yang disusun tersebut berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan, yakni RPJMD dan RKPD Kota Bogor. Program dan kegiatan yang diusulkan oleh BKAD Kota Bogor dalam

Rencana Kerja Perubahan secara umum tidak banyak yang berubah dibandingkan dengan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKPD Kota Bogor. Berikut program yang akan dilaksanakan di tahun 2024 perubahan adalah: (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dan (3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perangkat daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja dengan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Adapun Perubahan Rencana Kerja PD tetap berpedoman pada Renstra dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah, baik yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah secara langsung maupun yang ditempuh dengan dorongan peran/partisipasi masyarakat.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja BKAD Kota Bogor pada dasarnya dibahas dalam forum Perangkat Daerah untuk menyelaraskan rumusan rancangan renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan. Terdapat 7 (tujuh) tahapan penyusunan rencana kerja, yaitu (1) Pembentukan Tim Penyusun RKPD/Renja PD, (2) Penyusunan Awal Rancangan RKPD dan Rancangan Awal Renja PD, (3) Musrenbang Desa/Kelurahan, (4) Musrenbang Kecamatan, (5) Forum PD Kabupaten/Kota, (6) Musrenbang Kabupaten/Kota, dan (7) Perumusan Rancangan Akhir RKPD dan Renja PD. Melalui pembahasan Forum Perangkat Daerah, didapatkan usulan program dan kegiatan masyarakat yang kemudian usulan-usulan tersebut akan disesuaikan dan dikaitkan dengan isu-isu penting yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Jika usulan-usulan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan isu penting, tugas pokok, dan fungsi suatu Perangkat Daerah maka program dan kegiatan yang diusulkan tersebut akan dicantumkan sebagai program dan kegiatan yang kemudian dilaksanakan dalam tahun berjalan oleh Perangkat Daerah tersebut. Dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BKAD Kota Bogor baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan Perguruan Tinggi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang akan ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Tema pembangunan tersebut adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, lalu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 yakni (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan (8) pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2024 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran Nasional Pembangunan Tahun 2024 adalah

1. Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI);
4. Terjaganya pertumbuhan ekonomi di tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)
5. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
6. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
7. Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
8. Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
9. Meningkatnya Aset Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin dan Rentan;
10. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;
11. Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;
12. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;
13. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
14. Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;

15. Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkukuh Karakter Bangsa;
16. Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;
17. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;
18. Meningkatnya Konektivitas Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Akses Menuju Pelayanan Dasar;
19. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perkotaan;
20. Meningkatnya Layanan Energi dan Ketenagalistrikan;
21. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
22. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
23. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
24. Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas.

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat intas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Tujuan, Sasaran dan target Indikator Kinerja ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda;
5. Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk.

Tujuan 2: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum;
4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Tujuan 3: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur;
2. Meningkatnya Kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana;
6. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan.

Tujuan 4: Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Selain hal tersebut diatas, telah ditetapkan isu strategis Pembangunan Provinsi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebagai berikut: Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar, serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD

Tujuan dan Sasaran Renja BKAD Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra BKAD Tahun 2019-2025, yang merupakan pelaksanaan Visi dan Misi RPJMD Kota Bogor 2019-2024, yaitu **VISI**: **“Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah**

Keluarga”, dan Misi ke-2 RPJMD Kota Bogor 2019-2024, yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor menetapkan tujuan Dan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Tujuan:

   Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

2. Sasaran:
   - Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah;
   - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
   - Meningkatnya kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tabel III.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKAD Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
1	**Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor**		Indeks Reformasi Birokrasi	A
		Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	88,7
		Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP
		Meningkatnya kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	85

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah melalui 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan sesuai dengan RKPD Perubahan yang dirumuskan bersama. Semua kegiatan dilaksanakan di Kota Bogor dengan total anggaran Rp65.501.687.353 dengan sumber pendanaan dari APBD. Adapun Program/Kegiatan di maksud adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator program adalah sebagai berikut:

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah
- Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah

Kegiatan:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja Kegiatan: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja Kegiatan: Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator kinerja: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja Kegiatan: Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator kinerja: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator kinerja: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator kinerja: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

6) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator kinerja: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja: Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD

Sub Kegiatan:

1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator kinerja: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator kinerja: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator kinerja: Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator kinerja: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator kinerja: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator kinerja: Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik
Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator kinerja: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator kinerja: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator kinerja: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator program adalah Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%).

Kegiatan:

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Indikator kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

- Tingkat ketepatwaktuan Penyusunan Rancangan KUA PPAS
- Tingkat ketepatwaktuan Penyusunan bahan RKA
- Tingkat ketepatwaktuan Penyusunan RAPBD

Sub Kegiatan:

1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Indikator kinerja: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun

2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Indikator kinerja kinerja: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun

3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Indikator kinerja: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi

4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Indikator kinerja: Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi

5) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Indikator kinerja: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

6) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Indikator kinerja: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

7) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Indikator kinerja: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

b. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Indikator kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

- Tingkat ketepatwaktuan Penyampaian LKPD kepada BPK
- Jumlah Perangkat Daerah sasaran Monitoring laporan keuangan

Sub Kegiatan:

1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Indikator kinerja: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

3) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Indikator kinerja: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan adalah sebagai berikut:

- Persentase penyerapan anggaran belanja bantuan keuangan
- Persentase penyerapan anggaran belanja bantuan tidak terduga
- Persentase penyerapan anggaran belanja bunga

Sub Kegiatan:

1) Analisis Investasi Pemerintah Daerah
   Indikator kinerja: Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah
2) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
   Indikator kinerja: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
3) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
   Indikator kinerja: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
4) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
   Indikator kinerja: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator Program adalah Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan.

Kegiatan:

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

   Indikator kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

   - Jumlah Laporan Barang Milik Daerah
   - Jumlah draft Keputusan Sekretaris Daerah tentang Dokumen RKBMD dan Perubahan RKBMD Kota Bogor
   - Jumlah draft Keputusan Wali Kota Tentang Standar Harga
   - Jumlah draft Keputusan Wali Kota Tentang Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
   - Jumlah sertifikat per tahun

   Sub Kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

   1) Penyusunan Standar Harga
      Indikator kinerja: Jumlah Standar Harga yang Disusun
   2) Penatausahaan Barang Milik Daerah
      Indikator kinerja: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
   3) Pengamanan Barang Milik Daerah

Indikator kinerja: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah

4) Penilaian Barang Milik Daerah

   Indikator kinerja: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah

5) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

   Indikator kinerja: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

6) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

   Indikator kinerja: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah dokumen penyesuaian atas perencanaan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk periode 1 (satu) tahun yang bermula dari pemikiran strategis tentang pencapaian tujuan dan sasaran dari suatu organisasi dengan menggunakan strategi yang telah diatur dalam suatu kebijakan. Untuk itu harus dipahami terlebih dahulu nilai-nilai strategis yang melekat pada organisasi tersebut dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Bogor dengan tujuan "Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor" mempunyai sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah;
b. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program yang telah ditetapkan untuk Renja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Kota Bogor tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) program, 10 kegiatan dan 37 sub kegiatan, yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan:

   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan:

   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan:

   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan:

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan:

1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

6) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
7) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan:

1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

c. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan:

1) Analisis Investasi Pemerintah Daerah
2) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
3) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
4) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan:

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan:

1) Penyusunan Standar Harga
2) Penatausahaan Barang Milik Daerah
3) Pengamanan Barang Milik Daerah
4) Penilaian Barang Milik Daerah
5) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
6) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKAD Kota Bogor Tahun 2024 Perubahan dan Prakiraan Maju Tahun 2025 BKAD Kota Bogor untuk sumber dana APBD Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
BKAD Kota Bogor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**177.204.832.019,00**	**128.994.823.911,00**	**65.501.687.353,00**	**-111.703.144.666,00**							**81.822.274.209,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**177.204.832.019,00**	**128.994.823.911,00**	**65.501.687.353,00**	**-111.703.144.666,00**							**81.822.274.209,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**177.204.832.019,00**	**128.994.823.911,00**	**65.501.687.353,00**	**-111.703.144.666,00**							**81.822.274.209,00**	
1,	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**				**3,50 A Point Point**	**3,50 A Point Point**	**129.318.743.119,00**	**20.441.795.328,00**	**24.412.810.206,00**	**-99.514.422.540,00**							**29.804.320.579,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah Lingkup Perangkat Daerah*				A poin	A poin	229.520.800,00	229.520.800,00	56.140.800,00	-173.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	ASN BKAD		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	229.520.800,00	229.520.800,00	56.140.800,00	-173.380.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN*				100 %	100 %	24.983.372.579,00	14.837.469.323,00	17.979.724.973,00	-7.003.647.606,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	ASN BKAD		24.997.320.579,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	49 Orang/bulan	24.867.320.579,00	14.765.937.323,00	17.945.392.973,00	-6.921.927.606,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			24.867.320.579,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	116.052.000,00	71.532.000,00	34.332.000,00	-81.720.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			130.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah*				100 %	100 %	2.665.669.040,00	2.780.999.725,00	2.833.710.525,00	168.041.485,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	ASN BKAD		2.717.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.301.838,00	29.587.400,00	29.587.400,00	-1.714.438,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	487.021.020,00	449.506.100,00	448.146.100,00	-38.874.920,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	240.983.282,00	240.829.425,00	275.878.225,00	34.894.943,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	116.854.500,00	132.450.000,00	132.450.000,00	15.595.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	91.935.000,00	79.935.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	387.359.400,00	436.922.800,00	303.272.800,00	-84.086.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.390.149.000,00	1.479.704.000,00	1.552.441.000,00	162.292.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*				100 %	100 %	100.541.612.500,00	1.192.685.800,00	1.873.593.300,00	-98.668.019.200,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	ASN BKAD		560.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	297.090.000,00	1.018.513.000,00	1.018.513.000,00	721.423.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	69.222.500,00	0,00	0,00	-69.222.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	176.740.000,00	174.172.800,00	855.080.300,00	678.340.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			185.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	99.998.560.000,00	0,00	0,00	-99.998.560.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	346.007.200,00	769.029.680,00	754.640.608,00	408.633.408,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	ASN BKAD		380.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	114.750.000,00	160.600.000,00	160.396.000,00	45.646.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			130.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	231.257.200,00	608.429.680,00	594.244.608,00	362.987.408,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik*				100 %	100 %	552.561.000,00	632.090.000,00	915.000.000,00	362.439.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	ASN BKAD		900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	265.930.000,00	269.690.000,00	269.690.000,00	3.760.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	286.631.000,00	362.400.000,00	362.400.000,00	75.769.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	282.910.000,00	282.910.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2,	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)**				**100,00 %**	**100,00 %**	**38.847.821.900,00**	**102.595.724.483,00**	**35.222.799.448,00**	**3.220.720.230,00**							**42.068.542.130,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Tingkat ketepat waktuan Penyusunan bahan RKA Tingkat ketepat waktuan Penyusunan Rancangan KUA PPAS Tingkat ketepat waktuan Penyusunan RAPBD*				tepat waktu tepat waktu/ tidak tepat waktu	tepat waktu tepat waktu/ tidak tepat waktu	818.012.800,00	700.030.600,00	688.030.600,00	-129.982.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Semua OPD		891.542.130,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	186.969.600,00	162.353.500,00	156.353.500,00	-30.616.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	7.269.600,00	4.543.500,00	4.543.500,00	-2.726.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	79.520.000,00	59.620.000,00	56.620.000,00	-22.900.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	72.130.000,00	51.600.000,00	48.600.000,00	-23.530.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				3 Dokumen	3 Dokumen	175.717.300,00	153.917.300,00	153.917.300,00	-21.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			190.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				3 Dokumen	3 Dokumen	168.528.300,00	166.628.300,00	166.628.300,00	-1.900.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			185.381.130,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	101.368.000,00	101.368.000,00	101.368.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			112.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	0 Orang	26.510.000,00	0,00	0,00	-26.510.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			29.161.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Monitoring laporan keuangan SKPD Penyampaian LKPD kepada BPK tepat waktu*				Maret Bulan Seluruh PD PD	Maret Bulan Seluruh PD PD	705.584.600,00	458.940.000,00	441.610.000,00	-263.974.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Semua OPD		777.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	208.200.000,00	205.800.000,00	205.800.000,00	-2.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			230.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				7 Laporan	7 Laporan	228.600.000,00	228.600.000,00	211.270.000,00	-17.330.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				8 Dokumen	8 Dokumen	24.540.000,00	24.540.000,00	24.540.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			27.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				80 Orang	0 Orang	244.244.600,00	0,00	0,00	-244.244.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			270.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase penyerapan anggaran belanja bantuan keuangan Persentase penyerapan anggaran belanja bantuan tidak terduga Persentase penyerapan anggaran belanja bunga*				80 %	80 %	37.324.224.500,00	101.436.753.883,00	34.093.158.848,00	-3.231.065.652,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab. Bogor		40.400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	364.860.000,00	364.860.000,00	350.400.000,00	-14.460.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7.089.364.500,00	7.089.364.500,00	7.082.008.848,00	-7.355.652,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			8.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	1.870.000.000,00	1.870.000.000,00	1.660.750.000,00	-209.250.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	28.000.000.000,00	92.112.529.383,00	25.000.000.000,00	-3.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			30.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3,	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase administrasi pengeloaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan**				**85,00 %**	**85,00 %**	**9.038.267.000,00**	**5.957.304.100,00**	**5.866.077.699,00**	**911.144.500,00**							**9.949.411.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*jumlah draft Keputusan Sekretaris Daerah tentang Dokumen RKBMD dan Perubahan RKBMD Kota Bogor* *jumlah draft Keputusan Walikota Tentang Standar Harga* *jumlah draft Keputusan Walikota Tentang Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah* *jumlah Laporan Barang Milik Daerah* *Jumlah sertifikat per tahun*				1 laporan 250 sertifikat 2 Draft keputusan	1 laporan 250 sertifikat 2 Draft keputusan	9.038.267.000,00	5.957.304.100,00	5.866.077.699,00	-3.172.189.301,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Semua OPD		9.949.411.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				7 Dokumen	7 Dokumen	662.000.000,00	622.000.000,00	622.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			728.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				8 Laporan	8 Laporan	572.757.500,00	623.805.000,00	712.804.999,00	140.047.499,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			630.033.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				-	2 Laporan	6.705.557.500,00	4.171.200.100,00	3.993.973.700,00	-2.711.583.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			7.376.113.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				16 Laporan	16 Laporan	351.000.000,00	218.000.000,00	215.000.000,00	-136.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			386.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				24 Dokumen	24 Dokumen	608.150.000,00	197.400.000,00	197.400.000,00	-410.750.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			668.965.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				341 Orang	341 Orang	138.802.000,00	124.899.000,00	124.899.000,00	-13.903.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			160.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	JUMLAH								**3.296.300.834.844,00**	**3.117.067.773.487,00**	**3.316.640.492.980,00**	**20.339.658.136,00**							**2.153.902.851.786,00**	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan, dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (*stakeholder*) dan dinamika perubahan lingkungan yang dinamis. Perubahan Rencana Kerja ini berkedudukan dan berfungsi antara lain menyesuaikan acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan bidang keuangan dan aset sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh Perangkat Daerah, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan bidang keuangan dan aset dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Demikian Rencana Perubahan Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor tahun 2024 ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan kebijakan Pemerintah Kota Bogor dalam menyusun RKPD Perubahan dan RAPBD Perubahan serta khususnya dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Bogor.

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Perubahan Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen Perubahan Renja Perubahan merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan perubahan Renja Perubahan sangat di tentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengoordinasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Perangkat Daerah tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan

yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Perubahan Renja Perubahan Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah semester I tahun 2024 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja semester I pada Renja Perubahan Bakesbangpol Kota Bogor Tahun 2024. Tahap penetapan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Bakesbangpol Kota Bogor Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4664)
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5430)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5968)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 31)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kerja sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1053)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122)
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6177)
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109)
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194)

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8)
25. Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365)

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892)

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777)

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 577)

33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86)

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2023; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590

35. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan

Pengibar Bendera Pusaka; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748)

36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2024 untuk memberikan arahan dan pedoman penentuan program dan kegiatan pada perubahan anggaran Bakesbangpol Kota Bogor Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Bogor secara berkesinambungan.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perubahan tahun 2024 adalah:

1. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Bakesbangpol tahun 2024.
2. menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah.
3. mengakomodir perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa perubahan pengurangan dan pergeseran aggaran kegiatan.
4. menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN BAKESBANGPOL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN PERUBAHAN DAN PENDANAAN BAKESBANGPOL KOTA BOGOR
BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN BAKESBANGPOL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor sebagai Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor pada Tahun 2024 mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2024.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Bakesbangpol Kota Bogor tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Bakesbangpol Kota Bogor tahun 2024 sampai dengan triwulan II, juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Bakesbangpol Kota Bogor sampai dengan triwulan II tahun 2024 sesuai dengan RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024.

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perubahan dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Bakesbangpol Kota Bogor

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perubahan tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2019-2024 Bakesbangpol Kota Bogor sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Bakesbangpol Kota Bogor
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										K
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
	08.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										0					
	08.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah**				**A**		**8.505.000.000**	**9.639.208.735**	**0**	**8.505.000.000**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			
			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah									0		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			

	8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**				**A**		**30.000.000**	**22.836.000**	**0**	**30.000.000**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			
	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan		30.000.000	-		30.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**				**100%**		**6.000.000.000**	**5.781.837.519**	**0**	**6.000.000.000**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/Bulan		6.000.000.000			6.000.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**				**100%**		**1.455.000.000**	**2.030.463.600**	**0**	**1.455.000.000**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			

	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		150.000.000	266.063.400		150.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket		30.000.000			30.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		140.000.000	331.779.200		140.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen		25.000.000	12.000.000		25.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan		110.000.000	249.000.000		110.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan		1.000.000.000	1.171.621.000		1.000.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD**				**100%**		**200.000.000**	**1.234.185.700**	**0**	**200.000.000**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			

	8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-		-	601.040.000		#VALUE!		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit		200.000.000	128.666.800		200.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								504.478.900							
	8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100%**		**350.000.000**	**283.785.916**	**0**	**350.000.000**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		75.000.000	283.785.916		75.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		275.000.000	-		275.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			

	8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dilingkup Bakesbangpol berkodisi baik**				**100%**		**470.000.000**	**286.100.000**	**0**	**470.000.000**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						250.000.000	242.850.000		250.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						70.000.000	43.250.000		70.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						150.000.000	-		150.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	08.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk**				**13,50 Rasio**		**550.000.000**	**1.179.058.650**	**0**	**550.000.000**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			

	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah msyarakat yang memperoleh penyeluhan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang di implementasikan**				**81.600 Orang**		**550.000.000**	**1.179.058.650**	**0**	**550.000.000**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			
	8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen		200.000.000	-		200.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				136 Orang		350.000.000	1.179.058.650		350.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			

	08.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Partisipasi Partai Politik dalam Pemilu**				**100**		**10.200.000.000**	**43.288.188.200**	**0**	**10.200.000.000**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			
			Persentase Partisipasi Perempuan sebagai anggota legeslatif				22					0		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			

	8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase kebijakan teknis Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**				**100%**		**10.200.000.000**	**43.288.188.200**	**0**	**10.200.000.000**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			
	8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen		9.800.000.000	43.288.188.200		9.800.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			

	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				350 Orang		400.000.000	-		400.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	08.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif dan berdaya**				**40%**		**3.900.000.000**	**967.521.600**	**0**	**3.900.000.000**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			
	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**100%**		**3.900.000.000**	**967.521.600**	**0**	**3.900.000.000**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			

	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan		3.900.000.000	967.521.600		3.900.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	08.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Penurunan jumlah Pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika persatuan penduduk melalui upaya deteksi dini**				**0,0005**		**260.000.000**	**248.721.100**	**0**	**0**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			

	8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah Forum Masyarakat di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**				**2**		**260.000.000**	**248.721.100**	**0**	**0**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			
	8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen		160.000.000	-	0	0		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			

	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				175 Orang		100.000.000	248.721.100		100.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			
	08.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Potensi Konflik Sara yang Tertangani**				**100%**		**34.150.000.000**	**24.732.958.185**	**0**	**34.150.000.000**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			
	8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase kebijakan teknis dalam rangka Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				**100 Orang**		**34.150.000.000**	**24.732.958.185**	**0**	**34.150.000.000**		**Pendapatn Asli Daerah (PAD)**			

	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah				19 Orang		34.000.000.000	24.732.958.185		34.000.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)			

	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan		150.000.000	-		150.000.000		Pendapatn Asli Daerah (PAD)				
	JUMLAH									18.533.367.346	12.931.006.847	13.017.209.024	5.516.158.322						

Dari data tabel 2.1 di atas evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024 Bakesbangpol Kota Bogor masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan yang menyebabkan masih belum terlihatnya progres pancapaian target indikator program.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Bakesbangpol sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Bakesbangpol Kota Bogor Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bakesbangpol Kota Bogor sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersaji pada tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Bakesbangpol Kota Bogor
sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran 2024	Realisasi Pagu
			Qty	Satuan		
1	3	4	5		6	7
	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN				**11.857.556.547**	**6.281.784.138**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai hasil evaluasi LKIP Perangkat Daerah**	**A**	**point**	**9.380.645.741**	**4.570.889.767**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan**	**100**	**persen**	**1.500.000**	**0**
1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*5*	*dokumen*	1.500.000	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan**	**100**	**persen**	**7.853.007.166**	**4.546.377.363**
2	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*36*	*Orang/ bulan*	*7.783.611.166*	*4.518.294.363*
3	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*12*	*laporan*	*69.396.000*	*28.083.000*
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**persen**	**566.910.000**	**259.448.209**
4	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	*1*	*paket*	*97.139.100*	*64.472.600*
5	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1*	*paket*	*16.470.900*	*12.325.000*
6	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1*	*dokumen*	*12.000.000*	*4.750.000*

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran 2024	Realisasi Pagu
			Qty	Satuan		
1	3	4	5		6	7
7	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1*	*laporan*	*441.300.000*	*177.900.609*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan penyediaan BMD sesuai RKBMD**	**100**	**persen**	**115.787.200**	**108.069.000**
8	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*5*	*unit*	*115.787.200*	*108.069.000*
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**persen**	**1.042.629.981**	**338.206.182**
9	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1*	*laporan*	*348.003.785*	*86.914.734*
10	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1*	*laporan*	*694.626.196*	*251.291.448*
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	**85**	**persen**	**419.723.800**	**266.247.076**
11	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*15*	*Unit*	*192.690.000*	*77.196.300*
12	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*105*	*unit*	*89.500.800*	*52.830.000*
13	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi*	*1*	*unit*	*137.533.000*	*136.220.776*
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri / Lomba/ Sayembara Karyaseni**	**42**	**event**	**952.463.400**	**437.364.308**
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan**	**2**	**kegiatan**	**326.360.000**	**0**
14	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	*2*	*objek*	*226.360.000*	*0*
15	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*50*	*orang*	*100.000.000*	*0*
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan**	**1**	**kegiatan**	**626.103.400**	**437.364.308**
16	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*	*2*	*objek*	626.103.400	437.364.308
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional**	**76,64**	**persen**	**40.795.000**	**40.590.000**
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah pelaku dan lembaga seni yang dibina/ difasilitasi**	**20**	**orang/ lembaga**	**40.795.000**	**40.590.000**
17	*Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*20*	*lembaga*	40.795.000	40.590.000
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**Jumlah ketersediaan SDM Pembinaan Sejarah**	**50**	**orang**	**31.642.000**	**0**
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah	**Jumlah pelaku sejarah yang terbina**	**50**	**orang**	**31.642.000**	**0**

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran 2024	Realisasi Pagu
			Qty	Satuan		
1	3	4	5		6	7
	Kabupaten/Kota					
18	*Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota*	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*	*30*	*orang*	31.642.000	0
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan**	**32**	**objek**	**650.678.000**	**193.610.000**
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	**Jumlah cagar budaya yang dilestarikan**	**32**	**objek**	**650.678.000**	**193.610.000**
19	*Pelindungan Cagar Budaya*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi*	*32*	*objek*	650.678.000	193.610.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Persentase peningkatan kunjungan ke museum**	**55,72**	**%**	**182.420.000**	**91.886.000**
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Jumlah kunjungan masyarakat ke museum**	**202.436**	**Orang**	**182.420.000**	**91.886.000**
20	*Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi*	*1*	*unit*	182.420.000	91.886.000
	BIDANG URUSAN PARIWISATA				**1.073.450.300**	**495.986.086**
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Tingkat Hunian akomodasi**	**70,46**	**%**	**109.999.900**	**0**
		Persentase Kunjungan Wisatawan	**23,67**	**%**		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	**Jumlah daya tarik wisata baru**	**1**	**daya tarik wisata**	**109.999.900**	**0**
21	*Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota*	*1*	*dokumen*	109.999.900	-
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Jumlah Kunjungan wisatawan**	**6.399.090**	**wisatawan**	**464.190.700**	**139.131.800**
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Kunjungan wisatawan**	**6.399.090**	**wisatawan**	**464.190.700**	**139.131.800**
22	*Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik&Media Lainnya Baik Dalam & Luar Negeri*	*1*	*dokumen*	*186.489.100*	*3.850.000*
23	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	*4*	*laporan*	*228.898.000*	*91.633.800*
24	*Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*1*	*dokumen*	*48.803.600*	*43.648.000*
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	**Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar**	**67**	**produk**	**14.684.800**	**0**
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**Jumlah kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kraetif**	**1**	**kegiatan**	**14.684.800**	**0**
25	*Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif*	*1*	*laporan*	14.684.800	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**persentase SDM pariwisata yang disertifikasi**	**0,83**	**persen**	**484.574.900**	**356.854.286**
		jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	**67**	**orang**		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya**	**100**	**orang**	**463.849.400**	**356.854.286**
		Jumlah SDM ekraf yang ditingkatkan kualitasnya	**30**	**orang**		

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran 2024	Realisasi Pagu
			Qty	Satuan		
1	3	4	5		6	7
26	*Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*100*	*Orang*	*150.895.200*	*45.538.830*
28	*Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI*	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*	*100*	*orang*	*51.009.900*	*50.554.900*
29	*Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata*	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata*	*100*	*orang*	*211.944.300*	*211.260.556*
30	*Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*1*	*laporan*	*50.000.000*	*49.500.000*
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi**	**100**	**orang**	**20.725.500**	**0**
31	*Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	*40*	*orang*	*20.725.500*	*0*
J U M L A H					**12.931.006.847**	**6.777.784.224**

Dari tabel 2.2 menggambarkan bahwa total pagu Bakesbangpol Kota Bogor senilai Rp. 12.931.006.847. dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 6.777.784.224.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kota Bogor

Penyelenggaraan pelayanan Bakesbangpol adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 166 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor.

Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kota Bogor didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Kota Bogor
Triwulan II Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Capaian s.d Triwulan II Tahun 2024
Terwujudnya pelestarian	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam	Presentase peningkatan jumlah	76,54 %	76,52 %

budaya	pelestarian seni dan budaya	pelaku seni/ budaya		
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Bakesbangpol	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah	82 Nilai	-
Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor	Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor	Persentase kunjungan wisatawan	23,67 %	17,62 %
		Jumlah Kunjungan wisatawan	6.339.090 Orang	2.620.081 orang
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Bogor	Jumlah Pelaku ekonomi Kreatif baru	67 pelaku	9 pelaku

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersebut di atas masih belum ada yang tercapai sehingga masih membutuhkan upaya untuk mencapai terget yang telah di tentukan, begitu juga dengan indikator kinerja program masih perlu upaya untuk mencapai target, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Program Bakesbangpol Kota Bogor
Triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Target	Capaian s.d Triwulan II
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup perangkat daerah	A Nilai	A Nilai
	Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lingkup perangkat daerah	3.52 poin	3,47 poin
Pengembangan Kebudayaan	Jumlah keragaman jenis event/ festival/ pasanggiri/ lomba/ sayembara karyaseni	42 event	31 event
Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional	76,54 %	76,52 %
Pembinaan Sejarah	Jumlah ketersediaan SDM pembinaan sejarah	50 orang	-
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	32 unit	32 unit
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	70,46 %	60,74 %
	Persentase kunjungan wisatawan	23,67 %	17,62 %
Program Pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	6.399.090 orang	2.620.081 orang
Program pengembangan	Jumlah jenis produk ekonomi	67 produk	40 produk

ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	kreatif yang terserap pasar		
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	0,83 %	0,14 %
	Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru	67 pelaku	9 pelaku

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya.

Berdasarkan Perubahan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Bakesbangpol Kota Bogor Tahun 2024

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan Perubahan 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**15.991.890.746**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**12.127.845.024**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah** **Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan lingkup Perangkat Daerah**	**A poin** **3.50 poin**	**9.533.480.646**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah** **Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan lingkup Perangkat Daerah**	**A poin** **3.74 poin**	**10.589.718.624**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**A poin**	**1.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**A poin**	**-**
1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*5 dokumen*	*1.500.000*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*5 dokumen*	*-*
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**100 %**	**7.210.942.281**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**100 %**	**8.561.466.913**
2	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*35 orang/ bulan*	*7.141.546.281*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*36 orang/ bulan*	*8.492.703.913*
3	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*12 laporan*	*69.396.000*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*12 laporan*	*68.763.000*
3	**Administrasi Umum Perangkat**		**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional**	**100 %**	**777.306.100**	**Administrasi Umum Perangkat**		**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional**	**100 %**	**506.110.400**

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan Perubahan 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Daerah		**perangkat daerah**			**Daerah**		**perangkat daerah**		
4	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	*1 paket*	*108.339.400*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	*1 paket*	*95.599.100*
5	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 paket*	*19.790.700*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 paket*	*16.470.900*
6	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 dokumen*	*12.000.000*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 dokumen*	*12.000.000*
7	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 laporan*	*27.495.000*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*1 laporan*	-
8	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 laporan*	*609.681.000*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 laporan*	*382.040.400*
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase pemenuhan penyediaan BMD sesuai RKBMD**	**95 %**	**182.335.800**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase pemenuhan penyediaan BMD sesuai RKBMD**	**95 %**	**115.787.200**
9	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*4 unit*	*182.335.800*	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*4 unit*	*115.787.200*
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100 %	**933.074.665**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100 %	**986.630.311**
10	*Penyediaan Jasa*	*Kota Bogor,*	*Jumlah Laporan Penyediaan*	*1 laporan*	*372.003.785*	*Penyediaan Jasa*	*Kota Bogor,*	*Jumlah Laporan*	*1 laporan*	*292.004.115*

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan Perubahan 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*			*Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		
11	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 laporan*	*561.070.880*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 laporan*	*694.626.196*
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	100 %	**428.321.800**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	100 %	**419.723.800**
12	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*15 unit*	*189.930.000*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*15 unit*	*192.690.000*
13	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*105 unit*	*101.858.800*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*105 unit*	*89.500.800*
14	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi*	*2 unit*	*137.533.000*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi*	*2 unit*	*137.533.000*
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		**jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri / Lomba/ Sayembara Karyaseni**	**21 event**	**1.724.483.600**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		**jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri / Lomba/ Sayembara Karyaseni**	**42 event**	**877.463.400**
7	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan**	**2 kegiatan**	**326.360.000**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan**	**2 kegiatan**	**251.360.000**
15	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	*2 objek*	*226.360.000*	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	*2 objek*	*151.360.000*

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan Perubahan 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*50 orang*	*100.000.000*	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*50 orang*	*100.000.000*
8	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan**	**3 kegiatan**	**1.398.123.600**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan**	**3 kegiatan**	**626.103.400**
17	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*	*3 kegiatan*	*1.398.123.600*	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*	*3 kegiatan*	*626.103.400*
IV	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		**Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional**	**10 %**	**80.595.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		**Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional**	**76,65 %**	**40.795.000**
9	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pelaku dan lembaga seni yang dibina/ difasilitasi**	**20 orang/ Lembaga**	**80.595.000**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pelaku dan lembaga seni yang dibina/ difasilitasi**	**20 orang/ Lembaga**	**40.795.000**
18	*Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*20 Lembaga*	*80.595.000*	*Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*20 Lembaga*	*40.795.000*
V	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**		**Jumlah Ketersediaan SDM pembinaan sejarah**	**50 orang**	**31.642.000**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**		**Jumlah Ketersediaan SDM pembinaan sejarah**	**50 orang**	**31.642.000**
10	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		***Jumlah pelaku sejarah yang terbina***	**50 orang**	**31.642.000**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		***Jumlah pelaku sejarah yang terbina***	**50 orang**	**31.642.000**
19	*Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*	*50 orang*	*31.642.000*	*Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*	*50 orang*	*31.642.000*
VI	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		**Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan**	**25 unit**	**650.711.500**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		**Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan**	**32 unit**	**495.806.000**
11	**Pengelolaan Cagar Budaya**		**Jumlah cagar budaya yang**	**25 objek**	**650.711.500**	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat**		**Jumlah cagar budaya**	**32 objek**	**495.806.000**

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan Perubahan 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Peringkat Kabupaten/ Kota		**dilestarikan**			**Kabupaten/ Kota**		**yang dilestarikan**		
20	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi*	*20 objek*	650.711.500	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi*	*32 objek*	495.806.000
VII	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**		**Persentase peningkatan kunjungan ke museum**	**25 %**	**3.970.978.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**		**Persentase peningkatan kunjungan ke museum**	**55,72 %**	**92.420.000**
12	**Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota**		**Jumlah kunjungan masyarakat ke museum**	**130.000 orang**	**3.970.978.000**	**Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota**		**Jumlah kunjungan masyarakat ke museum**	**130.000 orang**	**92.420.000**
21	*Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang di Revitalisasi*	*1 unit*	3.970.978.000	*Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang di Revitalisasi*	*1 unit*	92.420.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				**2.541.476.600**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**889.364.000**
VIII	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**Tingkat Hunian akomodasi**	**70 %**	**692.449.600**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**Tingkat Hunian akomodasi**	**70,46 %**	**100.679.900**
			Persentase Kunjungan Wisatawan	**10 %**				**Persentase Kunjungan Wisatawan**	**23,67 %**	
13	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah daya Tarik wisata baru**	**1 daya Tarik wisata**	**109.999.900**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah daya Tarik wisata baru**	**1 daya Tarik wisata**	**100.679.900**
22	*Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota*	1 dokumen	109.999.900	*Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota*	1 dokumen	100.679.900
14	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata**	**1 kawasan**	**199.999.900**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata**	**1 kawasan**	**-**
23	*Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*1 dokumen*	*199.999.900*	*Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*1 dokumen*	-

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan Perubahan 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola**	**1 destinasi**	**132.449.900**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola**	**1 destinasi**	**-**
24	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*1 laporan*	*132.449.900*	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*1 laporan*	-
16	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah pelaku usaha yang dibina dan difasilitasi**	***30 pelaku***	**250.000.000**	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah pelaku usaha yang dibina dan difasilitasi**	***30 pelaku***	**-**
25	*Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/ kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah usaha yang dibina dan diawasi*	*1 usaha*	*250.000.000*	*Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/ kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah usaha yang dibina dan diawasi*	*1 usaha*	-
IX	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**Jumlah kunjungan wisatawan**	**5.062.449 orang**	**869.612.500**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**Jumlah kunjungan wisatawan**	**5.062.449 orang**	**354.724.700**
16	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Kunjungan wisatawan**	**5.062.449 orang**	**869.612.500**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Kunjungan wisatawan**	**5.062.449 orang**	**354.724.700**
25	*Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*1 Dokumen*	335.620.900	*Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*1 Dokumen*	97.868.700
26	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	*2 Kegiatan*	385.188.000	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	*2 Kegiatan*	209.646.000
27	*Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik*	*2 Promosi*	148.803.600	*Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik*	*2 Promosi*	47.210.000

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan Perubahan 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dan Luar Negeri	Kelurahan	*Dalam dan Luar Negeri*			*dan Luar Negeri*	Kelurahan	*Dalam dan Luar Negeri*		
X	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**		**Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar**	**40 Produk**	**14.684.900**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**		**Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar**	**40 Produk**	**14.110.000**
17	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**		***Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi HKI***	**12 Pelaku**	**14.684.900**	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**		***Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi HKI***	**12 Pelaku**	**14.110.000**
28	*Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif*	*1 laporan*	14.684.900	*Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif*	*1 laporan*	14.110.000
XI	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**persentase SDM pariwisata yang disertifikasi**	**0,83 %**	**964.729.600**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**persentase SDM pariwisata yang disertifikasi**	**0,83 %**	**419.849.400**
			jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	**30 pelaku**				**jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru**	**30 pelaku**	
18	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya**	**750 orang**	**921.219.000**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya**	**750 orang**	**419.849.400**
			Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru	**30 pelaku**				**Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru**	**30 pelaku**	
29	*Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*1 laporan*	339.344.200	*Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*1 laporan*	106.895.200
30	*Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*	*95 orang*	281.325.100	*Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*	*95 orang*	51.009.900
31	*Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata*	*150 orang*	250.549.700	*Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata*	*150 orang*	211.944.300

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Perubahan Perubahan 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
32	*Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*30 orang*	50.000.000	*Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*30 orang*	50.000.000
19	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**		**Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi**	**200 orang**	**43.510.600**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**		**Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi**	**200 orang**	**-**
33	*Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	*40 orang*	43.510.600	*Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	*40 orang*	-
					18.533.367.346					**13.017.209.024**

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN PERUBAHAN DAN PENDANAAN BAKESBANGPOL KOTA BOGOR

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2024 sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, maka dirumuskan Program dan Kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan indikator kinerja program (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah (2) Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan lingkup Perangkat Daerah, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan indikator kinerja program Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
   2) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
   1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

C. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dengan indikator kinerja program Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

D. Program Pembinaan Sejarah, dengan indikator kinerja program Jumlah Ketersediaan SDM pembinaan sejarah, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota

E. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan indikator kinerja program Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya

F. Program Pengelolaan Permuseuman, dengan indikator kinerja program Persentase peningkatan kunjungan ke museum, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

G. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan indikator kinerja program (1) tingkat hunian akomodasi (2) Persentase kunjungan wisatawan, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

H. Program Pemasaran Pariwisata, dengan indikator kinerja program Jumlah Kunjungan Wisatawan, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
   2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota
   3) Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

I. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan indikator kinerja program (1) Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi (2) Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
    1) Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
    2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
    3) Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
    4) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
    1) Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Tabel 4.1.
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**18.533.367.346**	**12.931.006.847**	**13.017.209.024**	**-5.516.158.322**							**17.146.020.515**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.991.890.746**	**11.857.556.547**	**12.127.845.024**	**-3.864.045.722**							**14.346.020.515**	
	2,22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**15.991.890.746**	**11.857.556.547**	**12.127.845.024**	**-3.864.045.722**							**14.346.020.515**	
1	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya**				**21 Event**	**42 Event**	**1.724.483.600**	**952.463.400**	**877.463.400**	**-847.020.200**							**1.900.000.000**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan*				2 kegiatan	2 kegiatan	326.360.000	326.360.000	251.360.000	-75.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pelaku seni budaya dan masyarakat		400.000.000	BADA KESA BANC POLIT
	2.22.02.2.01.0001	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*				*2 Objek*	*2 Objek*	*226.360.000*	*226.360.000*	*151.360.000*	*-75.000.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*250.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	2.22.02.2.01.0002	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*				*50 Orang*	*50 Orang*	*100.000.000*	*100.000.000*	*100.000.000*	*0*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*150.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan*				3 kegiatan	3 kegiatan	1.398.123.600	626.103.400	626.103.400	-772.020.200			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor		1.500.000.000	BADA KESA BANC POLIT
	2.22.02.2.02.0001	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*				*2 Objek*	*2 Objek*	*1.398.123.600*	*626.103.400*	*626.103.400*	*-772.020.200*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*1.500.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
2	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional**				**10,00%**	**76,65%**	**80.595.000**	**40.795.000**	**40.795.000**	**-39.800.000**							**100.000.000**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaku dan lembaga seni yang dibina/ difasilitasi*				20 orang/ lembaga	20 orang/ lembaga	80.595.000	40.795.000	40.795.000	-39.800.000			Revolusi Mental dan	Peningkatan Kualitas	para pelaku seni budaya		100.000.000	BADA KESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
															Pembangunan Kebudayaan	Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor			BANC POLIT
	2.22.03.2.01.0003	*Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				*20 lembaga*	*20 lembaga*	*80.595.000*	*40.795.000*	*40.795.000*	*-39.800.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*100.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
3	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah Ketersediaan SDM pembinaan sejarah**				**50 orang**	**50 orang**	**31.642.000**	**31.642.000**	**31.642.000**	**0**							**50.000.000**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaku sejarah yang terbina*				50 orang	50 orang	31.642.000	31.642.000	31.642.000	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pelestari peninggalan sejarah		50.000.000	BADA KESA BANC POLIT
	2.22.04.2.01.0001	*Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota*	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*				*50 Orang*	*50 Orang*	*31.642.000*	*31.642.000*	*31.642.000*	*0*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*50.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
4	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan**				**25 unit**	**32 unit**	**650.711.500**	**650.678.000**	**495.806.000**	**-154.905.500**							**800.000.000**	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	*Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan*				25 objek	32 objek	650.711.500	650.678.000	495.806.000	-154.905.500			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor		800.000.000	BADA KESA BANC POLIT
	2.22.05.2.02.0001	*Pelindungan Cagar Budaya*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi*				*25 Objek*	*32 Objek*	*650.711.500*	*650.678.000*	*495.806.000*	*-154.905.500*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*800.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
5	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase peningkatan kunjungan ke museum**				**25,00%**	**55,72%**	**3.970.978.000**	**182.420.000**	**92.420.000**	**-3.878.558.000**							**0**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	*Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota*				130000 orang	130000 orang	3.970.978.000	182.420.000	92.420.000	-3.878.558.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat kota bogor dan luar kota bogor		0	BADA KESA BANC POLIT
	2.22.06.2.01.0005	*Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi*				*1 Unit*	*1 Unit*	*3.970.978.000*	*182.420.000*	*92.420.000*	*-3.878.558.000*	*Kota Bogor, Semua*	*PENDAPATAN ASLI*	*Revolusi Mental dan*	*Peningkatan Kualitas*			*0*	*BADA KESA*

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
													Kecamatan, Semua Kel/ Desa	*DAERAH (PAD)*	*Pembangunan Kebudayaan*	*Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*				*BANC POLIT*
6	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**				**A Point**	**A Point**	**9.533.480.646**	**9.999.558.147**	**10.589.718.624**	**1.056.237.978**							**11.496.020.515**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah*				A point	A point	1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Bakesbangpol Kota Bogor		3.000.000	BADA KESA BANC POLIT
	3.26.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*1.500.000*	*1.500.000*	*0*	*-1.500.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*3.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN*				100%	100%	7.210.942.281	7.853.007.166	8.561.466.913	1.350.524.632			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Bakesbangpol Kota Bogor		8.656.020.515	BADA KESA BANC POLIT
	3.26.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				*35 Orang/ bulan*	*35 Orang/ bulan*	*7.141.546.281*	*7.783.611.166*	*8.492.703.913*	*1.351.157.632*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*8.581.020.515*	*BADA KESA BANC POLIT*
	3.26.01.2.02.0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*				*12 Laporan*	*12 Laporan*	*69.396.000*	*69.396.000*	*68.763.000*	*-633.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*75.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah*				100%	100%	777.306.100	566.910.000	506.110.400	-271.195.700			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Bakesbangpol Kota Bogor		837.000.000	BADA KESA BANC POLIT
	3.26.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				*1 Paket*	*1 Paket*	*108.339.400*	*97.139.100*	*95.599.100*	*-12.740.300*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*150.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	3.26.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang*				*1 Paket*	*1 Paket*	*19.790.700*	*16.470.900*	*16.470.900*	*-3.319.800*	*Kota Bogor, Semua*	*PENDAPATAN ASLI*	*Memperkuat Stabilitas*	*Reformasi Birokrasi*			*25.000.000*	*BADA KESA*

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Disediakan										*Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*DAERAH (PAD)*	*Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi*				*BANC POLIT*
	3.26.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*12.000.000*	*12.000.000*	*12.000.000*	*0*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*12.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	3.26.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				*1 Laporan*	*1 Laporan*	*27.495.000*	*0*	*0*	*-27.495.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*50.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	3.26.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				*1 Laporan*	*1 Laporan*	*609.681.000*	*441.300.000*	*382.040.400*	*-227.640.600*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*600.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*				100%	100%	182.335.800	115.787.200	115.787.200	-66.548.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Bakesbangpol Kota Bogor		200.000.000	BADA KESA BANC POLIT
	3.26.01.2.07.0011	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				*15 Unit*	*15 Unit*	*182.335.800*	*115.787.200*	*115.787.200*	*-66.548.600*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*200.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah*				100%	100%	933.074.665	1.042.629.981	986.630.311	53.555.646			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Bakesbangpol Kota Bogor		1.200.000.000	BADA KESA BANC POLIT
	3.26.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				*1 Laporan*	*1 Laporan*	*372.003.785*	*348.003.785*	*292.004.115*	*-79.999.670*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*500.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	3.26.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				*1 Laporan*	*1 Laporan*	*561.070.880*	*694.626.196*	*694.626.196*	*133.555.316*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*700.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	*Persentase BMD lingkup*				100%	100%	428.321.800	419.723.800	419.723.800	-8.598.000			Memperkuat	Reformasi	Bakesbangpol		600.000.000	BADA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Pemerintahan Daerah	*Perangkat Daerah berkondisi baik*												Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi Reformasi Birokrasi	Kota Bogor			KESA BANG POLIT
	3.26.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				*16 Unit*	*16 Unit*	*188.930.000*	*192.690.000*	*192.690.000*	*3.760.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*250.000.000*	*BADA KESA BANG POLIT*
	3.26.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				*85 Unit*	*85 Unit*	*101.858.800*	*89.500.800*	*89.500.800*	*-12.358.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*150.000.000*	*BADA KESA BANG POLIT*
	3.26.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				*1 Unit*	*1 Unit*	*137.533.000*	*137.533.000*	*137.533.000*	*0*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*	*Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi*			*200.000.000*	*BADA KESA BANG POLIT*
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.541.476.600**	**1.073.450.300**	**889.364.000**	**-1.652.112.600**							**2.800.000.000**	
	3,26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**2.541.476.600**	**1.073.450.300**	**889.364.000**	**-1.652.112.600**							**2.800.000.000**	
1	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase kunjungan wisatawan**				**10,00%**	**23,67%**	**692.449.600**	**109.999.900**	**100.679.900**	**-591.769.700**							**780.000.000**	
			Tingkat Hunian Akomodasi				**70,00%**	**70,46%**												
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah daya tarik uisata baru*				1 daya tarik	1 daya tarik	109.999.900	109.999.900	100.679.900	-9.320.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	pemangku kepentingan kepariwisataan		150.000.000	BADA KESA BANG POLIT
	3.26.02.2.01.0009	*Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota*				*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*109.999.900*	*109.999.900*	*100.679.900*	*-9.320.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan*			*150.000.000*	*BADA KESA BANG POLIT*

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal				
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	*Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata*				1 kawasan	1 kawasan	199.999.800	0	0	-199.999.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	pemangku kepentingan kepariwisataan		220.000.000	BADA KESA BANC POLIT
	3.26.02.2.02.0002	*Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota*				*2 Dokumen*	*1 Dokumen*	*199.999.800*	*0*	*0*	*-199.999.800*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal*			*220.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola*				2 destinasi	2 destinasi	132.449.900	0	0	-132.449.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	pemangku kepentingan kepariwisataan		135.000.000	BADA KESA BANC POLIT
	3.26.02.2.03.0006	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat*				*1 Laporan*	*1 Laporan*	*132.449.900*	*0*	*0*	*-132.449.900*	*Kota Bogor, Semua*	*PENDAPATAN ASLI*	*Meningkatkan Sumber Daya*	*Pembangunan Infrastruktur*			*135.000.000*	*BADA KESA*

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota										*Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*DAERAH (PAD)*	*Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal*				*BANC POLIT*
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah pelaku usaha yang dibina dan difasilitasi*				30 pelaku	30 pelaku	250.000.000	0	0	-250.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Pelaku usaha pariwisata		275.000.000	BADA KESA BANC POLIT
	3.26.02.2.04.0007	*Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/ kota*	*Jumlah usaha yang dibina dan diawasi*				*1 Usaha*	*1 Usaha*	*250.000.000*	*0*	*0*	*-250.000.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal*			*275.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
2	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah kunjungan wisatawan**				**5.062.449 orang**	**6.399.090 orang**	**869.612.500**	**464.190.700**	**354.724.700**	**-514.887.800**							**925.000.000**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	*Jumlah Kunjungan Wisatawan*				5062449 orang	6.399.090 orang	869.612.500	464.190.700	354.724.700	-514.887.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan	Wisatawan nusantara dan mancanegara		925.000.000	BADA KESA BANC POLIT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal				
	3.26.03.2.01.0003	*Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*				*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*335.620.900*	*186.489.100*	*97.868.700*	*-237.752.200*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal*			*350.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	3.26.03.2.01.0006	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*				*2 Kegiatan*	*2 Kegiatan*	*385.188.000*	*228.898.000*	*209.646.000*	*-175.542.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal*			*400.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	3.26.03.2.01.0007	*Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*				*2 Promosi*	*2 Promosi*	*148.803.600*	*48.803.600*	*47.210.000*	*-101.593.600*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal*			*175.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
3	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK**	**Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar**				**40 Produk**	**67 Produk**	**14.684.900**	**14.684.800**	**14.110.000**	**-574.900**							**20.000.000**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		KEKAYAAN INTELEKTUAL																		
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi HKI*				12 Pelaku	12 Pelaku	14.684.900	14.684.800	14.110.000	-574.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Pelaku ekonomi kreatif		20.000.000	BADA KESA BANC POLIT
	3.26.04.2.02.0003	*Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif*				*1 Laporan*	*1 Laporan*	*14.684.900*	*14.684.800*	*14.110.000*	*-574.900*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal*			*20.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
4	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**persentase SDM pariwisata yang disertifikasi**				**0,83%**	**0,83%**	**964.729.600**	**484.574.900**	**419.849.400**	**-544.880.200**							**1.075.000.000**	
			jumlah pelaku ekonomi kreatif baru				**30 orang**	**67 orang**												
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya*				750 orang	750 orang	921.219.000	463.849.400	419.849.400	-501.369.600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif		1.025.000.000	BADA KESA BANC POLIT
	3.26.05.2.01.0005	*Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*				*1 Laporan*	*1 Laporan*	*339.344.200*	*150.895.200*	*106.895.200*	*-232.449.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*350.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	3.26.05.2.01.0008	*Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI*	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*				*95 Orang*	*30 Orang*	*281.325.100*	*51.009.900*	*51.009.900*	*-230.315.200*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas*			*300.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERA DA PENA JA
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																Hidup Masyarakat				
	3.26.05.2.01.0009	*Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata*	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata*				*150 Orang*	*40 Orang*	*250.549.700*	*211.944.300*	*211.944.300*	*-38.605.400*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*300.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	3.26.05.2.01.0010	*Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*				*30 Orang*	*30 Orang*	*50.000.000*	*50.000.000*	*50.000.000*	*0*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*75.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi*				200 orang	200 orang	43.510.600	20.725.500	0	-43.510.600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pelaku ekonomi kreatif		50.000.000	BADA KESA BANC POLIT
	3.26.05.2.02.0001	*Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*				*40 Orang*	*30 Orang*	*43.510.600*	*20.725.500*	*0*	*-43.510.600*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*			*50.000.000*	*BADA KESA BANC POLIT*
	JUMLAH								**18.533.367.346**	**12.931.006.847**	**13.017.209.024**	**-5.516.158.322**							**17.146.020.515**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2024 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Pemerintah Daerah, yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2024, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor pada Tahun 2024 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor.

CC. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Prioritas Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2024 diarahkan pada 1) Program Penanggulangan Bencana; dan 2) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2024 mengikuti sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 4 Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana Daerah
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tanggap Bencana;

17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah Madrasah Aman dari Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor;
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 89 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi sert Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor;
31. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana;
32. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 79 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2024 untuk memberikan arahan dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada perubahan anggaran BPBD Kota Bogor tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kota Bogor secara berkesinambungan.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024.
2. Mewujudkan pencapaian sasaran penanggulangan bencana tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024.
3. Menetapkan Strategi, arah kebijakan dan prioritas penanggulangan bencana serta program dan kegiatan Tahun 2024.
4. Mewujudkan keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan
5. Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 nsampai dengan Triwulan II Tahun 2024 BPBD Kota Bogor

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor pada Tahun 2024 mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2024

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor tahun 2024 sampai dengan semester satu, juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor sampai dengan semester dua tahun 2024 sesuai dengan RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024.

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 BPBD Kota Bogor

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Kota Bogor

sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
												I		II					
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*7*		*8*		*9*		*12= 8+9+10+11*		*13 = 12/7 x 100%*	
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
	1	05				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**9.804.600.000**		**8.707.930.442**		**1.884.091.905**		**4.829.812.352**		**6.713.904.257**		**77%**
	1	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup perangkat daerah**	**A**	**7.025.600.000**	**A**	**7.563.241.042**	**BB Point**	**1.789.675.205**		**4.072.597.202**		**5.862.272.407**		**78%**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
												I		II					
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*7*		*8*		*9*		*12= 8+9+10+11*		*13 = 12/7 x 100%*	
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*
							Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan lingkup perangkat daerah	**3.55**		**3.55**		**3.44 Point**							
	1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup perangkat daerah**	**A**	**4.600.000**	**A**	**4.629.600**	**BB**	**-**		**2.300.000**		**2.300.000**		**50%**
	1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	4.600.000	8	4.629.600		-		2.300.000		2.300.000		
																	Rata - rata capaian kinerja Kegiatan (%)		
																	Predikat Kinerja		
	1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**3.206.000.000**	**100%**	**3.393.744.982**	**28%**	**963.804.370**		**1.964.821.630**		**2.928.626.000**		**86%**
	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	3.206.000.000	18	3.393.744.982	18 Orang	950.484.370		1.938.181.630	19 Orang	2.888.666.000		
	1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Orang yang menerima Honorarium PA, PPK SKPD dan Bengpeng	3	44.400.000	3	44.400.000	3 Orang	13.320.000		26.640.000				
																	Rata - rata capaian kinerja Kegiatan (%)		
																	Predikat Kinerja		
	1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**255.000.000**	**100%**	**202.809.800**	**100%**	**2.420.000**		**194.076.710**		**196.496.710**		**97%**
	1	05	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapaannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1	255.000.000	1	202.809.800	1 Paket	2.420.000		194.076.710	Paket	196.496.710		
																	Rata - rata capaian kinerja Kegiatan (%)		
																	Predikat Kinerja		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
												I		II					
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*7*		*8*		*9*		*12= 8+9+10+11*		*13 = 12/7 x 100%*	
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*
	1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100%**	**673.000.000**	**100%**	**511.063.700**	**19%**	**99.131.109**		**193.902.309,00**		**293.033.418**		**57%**
	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	13.000.000	1	8.915.100	1 Paket	1.431.600		3.706.600				
	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	70.000.000	10	66.713.100	1 Paket	15.776.100		28.676.000	1 Paket	44.452.100		
	1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	21.000.000	5	17.269.100	1 Paket	4.313.000		8.547.500	1 Paket	12.860.500		
	1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	140.000.000	4	116.603.800	1 Paket	21.743.000		51.053.000	1 Paket	72.796.000		
	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	70.000.000	3	26.822.600	1 Paket	1.648.100		4.423.100	1 Paket	6.071.200		
	1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	15.000.000	3	12.000.000	1 Dokumen	2.985.000		5.970.000	1 Dokumen	8.955.000		
	1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	37.000.000	12									
	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	320.000.000	3	262.740.000	1 Laporan	51.234.309		91.526.109	1 Laporan	142.760.418		
																	Rata - rata capaian kinerja Kegiatan (%)		
																	Predikat Kinerja		
	1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**150.000.000**	**100%**	**194.531.000**		**-**		**133.096.460**		**133.096.460**		**68%**
	1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	150.000.000	100	89.439.900				88.178.400		88.178.400		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
												I		II					
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*7*		*8*		*9*		*12= 8+9+10+11*		*13 = 12/7 x 100%*	
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*
	1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	100	150.000.000	100									
	1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50	300.000.000	50	105.091.100				44.918.060				
	1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	20	100.000.000	20									
																Rata - rata capaian kinerja Kegiatan (%)			
																Predikat Kinerja			
	1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1.692.000.000**	**100%**	**2.165.896.360**	**29%**	**638.086.848**		**1.128.834.562**		**1.766.921.410**		**82%**
	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	150.000.000	12	140.085.000	3 Laporan	35.287.868		68.343.906	1 Laporan	103.631.774		
	1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.542.000.000	12	2.025.811.360	3 Laporan	602.798.980		1.060.490.656	1 Laporan	1.663.289.636		
																Rata - rata capaian kinerja Kegiatan (%)			
																Predikat Kinerja			
	1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100%**	**1.300.000.000**	**100%**	**1.090.565.600**	**8%**	**86.232.878**		**455.565.531**		**541.798.409**		**50%**
	1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	38.330.000	1	42.090.000	2 Unit	3.450.000		16.900.700		20.350.700	**1**	**05**

01

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
												I		II					
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*7*		*8*		*9*		*12= 8+9+10+11*		*13 = 12/7 x 100%*	
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*
	1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	650.000.000	20	682.402.000	19 Unit	71.726.078		223.916.474	16 Unit	295.642.552		
	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250	400.000.000	250	170.985.600	110 Unit	11.056.800		20.921.800	21 Unit	31.978.600		
	1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	250.000.000	1	195.088.000	1			193.826.557				
Rata - rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			
Predikat Kinerja																			
Rata - rata capaian kinerja Program (%)																			
Predikat Kinerja																			
	1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Presentase ketersediaan informasi kebencanaan berbasis teknologi informasi**	**100%**	**305.000.000**	**100%**	**76.820.000**	**6%**	**5.200.000**		**8.500.000**		**13.700.000**		**18%**
	1	**05**	**02**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan**	**80%**	**305.000.000**	**80%**	**76.820.000**	**6%**	**5.200.000**		**8.500.000**		**13.700.000**		
	1	05	02	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1	250.000.000							1 Dokumen	-		
	1	05	02	2.04	06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1	55.000.000	1	76.820.000	Dokumen	5.200.000		8.500.000		13.700.000		
Rata - rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			
Predikat Kinerja																			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
												I		II					
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*7*		*8*		*9*		*12= 8+9+10+11*		*13 = 12/7 x 100%*	
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*
	1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Presentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan**	**100%**	**829.000.000**	**100%**	**599.953.900**	**13%**	**81.586.700**		**435.326.650**		**516.913.350**		**86%**
	1	**05**	**02**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban**	**Presentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan**	**100%**	**829.000.000**	**100%**	**599.953.900**	**13%**	**81.586.700**		**435.326.650**		**516.913.350**		
	1	05	02	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5	250.000.000										
	1	05	02	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	260	200.000.000	260	196.973.800		15.132.750		102.122.700		117.255.450		
	1	05	02	2.03	02	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	260	379.000.000	260	402.980.100		66.453.950		333.203.950		399.657.900		
																Rata - rata capaian kinerja Kegiatan (%)			
																Predikat Kinerja			
	1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Presentase kelurahan tangguh bencana**	**50%**	**1.645.000.000**	**41%**	**467.915.500**	**1%**	**7.630.000**		**313.388.500**		**321.018.500**		**69%**
							Presentase sekolah aman bencana	**6%**		**5%**		**1%**							
	1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Masyarakat yang terlatih terhadap bencana**	**100%**	**1.645.000.000**	**100%**	**467.915.500**		**7.630.000**		**313.388.500**		**321.018.500**		
	1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan	2	75.000.000								0		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
												I		II					
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*7*		*8*		*9*		*12= 8+9+10+11*		*13 = 12/7 x 100%*	
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*
							Bencana yang Dilegalisasi												
	1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100	550.000.000	400	271.223.500		7.630.000		119.388.500		127.018.500		
	1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	7	170.000.000	7	196.692.000				194.000.000		194.000.000		
	1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	150	150.000.000								0		
	1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	8	150.000.000								0		
	1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100	200.000.000								0		
	1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2	150.000.000								0		
	1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100	100.000.000								0		
	1	05	03	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan	300	100.000.000								0		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
												I		II					
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*7*		*8*		*9*		*12= 8+9+10+11*		*13 = 12/7 x 100%*	
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*
							Keluarga Tanggap Bencana Alam												
Rata - rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			72%
Predikat Kinerja																			
Rata - rata capaian kinerja Program (%)																			63%
Predikat Kinerja																			

Dari data tabel 2.1 di atas bahwa evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 sampai dengan semester satu tahun 2024, progress pencapaian target indikator program masih belum bisa terlihat karena sebagian besar kegiatan belum selesai pelaksanaannya dan hampir seluruh indikator program baru dapat diukur pada akhir tahun.

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 BPBD Kota Bogor

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan realisasi anggaran Bapperida sampai dengan triwulan II atau semester 1 tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bapperida Kota Bogor sampai dengan semester satu tahun 2024 tersaji pada tabel 2.2. sebagai berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan BPBD Kota Bogor sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN			REALISASI SEMESTER I
	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**Nilai A**	**7.607.641.042**	**7.492.041.042**	**(115.600.000)**	**4.072.597.202**
	Nilai Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	**3.52 Point**				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**Nilai A**	**4.629.600**	**4.629.600**	**-**	***2.300.000***
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*11 Dokumen*	*4.629.600*	*4.629.600*	-	***2.300.000***
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**3.438.144.982**	**3.438.144.982**	**-**	**1.964.821.630**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*18 Orang/Bulan*	*3.393.744.982*	*3.393.744.982*	-	***1.938.181.630***
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD*	*12 Laporan*	*44.400.000*	*44.400.000*	-	***26.640.000***
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah**	***100%***	***202.809.800***	***202.809.800***	-	**194.076.710**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut*	*1 Paket*	*202.809.800*	*202.809.800*	-	***194.076.710***
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100%**	**511.063.700**	**511.063.700**	**-**	**193.902.309**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*8.915.100*	*8.915.100*	-	***3.706.600***
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*10 Paket*	*66.713.100*	*66.713.100*	-	***28.676.000***
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*5 Paket*	*17.269.100*	*17.269.100*	-	***8.547.500***
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*4 Paket*	*116.603.800*	*116.603.800*	-	***51.053.000***
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan*	*3 Paket*	*26.822.600*	*26.822.600*	-	***4.423.100***

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN			REALISASI SEMESTER I
	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	*12.000.000*	*12.000.000*	-	***5.970.000***
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*262.740.000*	*262.740.000*	-	***91.526.109***
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD***	**100%**	***194.531.000***	***194.531.000***	-	**133.096.460**
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*100 Unit*	*89.439.900*	*89.439.900*	-	***88.178.400***
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*50 Unit*	*105.091.100*	*105.091.100*	-	***44.918.060***
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**2.165.896.360**	**2.165.896.360**	-	**1.128.834.562**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*140.085.000*	*140.085.000*	-	***68.343.906***
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	2.025.811.360	2.025.811.360	-	***1.060.490.656***
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100%**	**1.090.565.600**	**974.965.600**	**(115.600.000)**	**455.565.531**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*1 Unit*	*42.090.000*	*42.090.000*	-	***16.900.700***
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*10 Unit*	*682.402.000*	*646.802.000*	(35.600.000)	***223.916.474***
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*240 Unit*	*170.985.600*	*90.985.600*	(80.000.000)	***20.921.800***
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	*1 Unit*	*195.088.000*	*195.088.000*	-	***193.826.557***
Program Penanggulangan Bencana	**Presentase kelurahan tangguh bencana**	**50%**	**1.144.689.400**	**1.068.499.400**	**(76.190.000)**	**757.215.150**
	Presentase sekolah aman bencana	**10,50%**				
	Presentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan	**100%**				
	Pelayanan informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	**100%**				
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase Masyarakat yang terlatih terhadap bencana**	**100%**	**467.915.500**	**447.545.500**	**(20.370.000)**	**313.388.500**
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana*	*100 Orang*	*271.223.500*	*250.853.500*	(20.370.000)	***119.388.500***
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota*	*7 Dokumen*	*196.692.000*	*196.692.000*	-	***194.000.000***
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Presentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan**	**100%**	**599.953.900**	**599.953.900**	-	**435.326.650**
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana*	*260 Orang*	*196.973.800*	*196.973.800*	-	***102.122.700***
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	*260 Orang*	*402.980.100*	*402.980.100*	-	***333.203.950***

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN			REALISASI SEMESTER I
	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Persentase Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan**	**100%**	**76.820.000**	**21.000.000**	**(55.820.000)**	**8.500.000**
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)*	*1 Dokumen*	*76.820.000*	*21.000.000*	(55.820.000)	***8.500.000***
TOTAL			**8.752.330.442**	**8.560.540.442**	**(191.790.000)**	**4.829.812.352**

Dari tabel 2.2 menggambarkan bahwa total pagu murni BPBD Kota Bogor senilai Rp. 8.752.330.442,00 berkurang menjadi Rp. 191.790.000,00 sehingga total pagu perubahan menjadi Rp. 8.560.540.442,00.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan terdiri atas sebagai berikut :

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

3) Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Bencana

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Bogor
Semester I Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	CAPAIAN SD SEMESTER I TAHUN 2024	PREDIKAT
Terwujudnya pelayanan penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, efektif dan terkoordinasi berbasis teknologi		Presentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan kebencanaan	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana berbasis teknologi yang handal	Presentase ketersediaan informasi kebencanaan berbasis teknologi informasi	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	CAPAIAN SD SEMESTER I TAHUN 2024	PREDIKAT
Terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinir dan komprehensif guna mencegah terjadinya kemiskinan akibat dari dampak bencana		Presentase peningkatan sistem penanggulangan bencana yang efektif	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
	Rata-rata respon time penanganan bencana	Rata-rata respon time penanganan bencana	<24 Jam	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
Terwujudnya ketahanan keluarga terhadap bencana		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
	Meningkatnya peran serta keluarga di dalam masyarakat untuk pengurangan risiko bencana	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	100	--	Hasil pengukuran di akhir tahun
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor		Indeks Reformasi Birokrasi	A Poin	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
	Meningkatnya KualitasTatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	82	-	Hasil pengukuran di akhir tahun

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan semester satu tahun 2024 tersebut di atas masih belum dapat diukur ketercapaiannya, begitu juga dengan indikator kinerja program yang masih belum dapat diukur ketercapaiannya, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Program BPBD Kota Bogor
Semester I Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	CAPAIAN S.D. SEMESTER I 2024
Penanggulangan Bencana	Pelayanan informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	100 %	-
	Presentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan	100 %	-
	Presentase kelurahan tangguh bencana	50%	-
	Presentase sekolah aman bencana	6.27%	-
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	BB

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	CAPAIAN S.D. SEMESTER I 2024
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,5	-

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Perubahan Bapperida Kota Bogor Tahun 2024 38

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kota Bogor yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dari hasil evaluasi terdapat beberapa indikator tujuan, sasaran, dan program yang realisasinya pada tahun 2023 telah mencapai target yang telah di tetapkan pada RPJMD 2019-2024, sehingga perubahan RKPD dan Renja tahun 2024 ini perlu adanya penyesuaian target kinerja IKU, IKK, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Untuk lebih jelasnya reviu perubahan Renja Bapperida Kota Bogor tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2024

BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD 2024			PERUBAHAN RENJA BPBD TAHUN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**Nilai A**	**7.607 .641.042**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**Nilai A**	**7.492 .041.042**
		Nilai Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	**3. 52 Point**		**Nilai Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**	**3.55 Point**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**Nilai A**	**4.629.60 0**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**Nilai A**	**4.629.60 0**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*11 Dokumen*	*4.629.600*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*11 Dokumen*	*4.629.600*
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**3.438.14 4.982**	**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**3.438.14 4.982**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*18 Orang /Bulan*	*3.393.744. 982*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*18 Orang /Bulan*	*3.393.744. 982*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*12 Laporan*	*44.400.00 0*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*12 Laporan*	*44.400.00 0*
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian**	**100%**	***202.809. 800***	**Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian**	***100%***	***202.809. 800***

BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD 2024			PERUBAHAN RENJA BPBD TAHUN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
		perangkat daerah			**perangkat daerah**		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut*	*1 Paket*	*202.809.800*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut*	*1 Paket*	*202.809.800*
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100%**	**511.063.700**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100%**	**511.063.700**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*8.915.100*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*8.915.100*
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*10 Paket*	*66.713.100*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*10 Paket*	*66.713.100*
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*5 Paket*	*17.269.100*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*5 Paket*	*17.269.100*
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*4 Paket*	*116.603.800*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*4 Paket*	*116.603.800*
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan*	*3 Paket*	*26.822.600*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan*	*3 Paket*	*26.822.600*
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	*12.000.000*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*1 Dokumen*	*12.000.000*
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*262.740.000*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*262.740.000*
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD***	**100%**	***194.531.000***	***Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD***	**100%**	***194.531.000***
Pengadaan Mebel	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*100 Unit*	*89.439.900*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*100 Unit*	*89.439.900*
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*50 Unit*	*105.091.100*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*50 Unit*	*105.091.100*
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang**	**100%**	**2.165.896.360**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan**	**100%**	**2.165.896.360**

BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD 2024			PERUBAHAN RENJA BPBD TAHUN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
		urusan pemerintahan daerah			**pemerintahan daerah**		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*140.085.000*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*140.085.000*
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	2.025.811.360	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	2.025.811.360
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100%**	**1.090.565.600**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100%**	**974.965.600**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*1 Unit*	*42.090.000*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*1 Unit*	*42.090.000*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*24 Unit*	*682.402.000*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*10 Unit*	*646.802.000*
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*250 Unit*	*170.985.600*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*240 Unit*	*90.985.600*
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*195.088.000*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*195.088.000*
Program Penanggulangan Bencana		**Presentase kelurahan tangguh bencana**	**50%**	**1.144.689.400**	**Presentase kelurahan tangguh bencana**	**50%**	**1.068.499.400**
		Presentase sekolah aman bencana	**6,27%**		**Presentase sekolah aman bencana**	**10,50 %**	
		Presentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan	**100%**		**Presentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan**	**100%**	
		Pelayanan informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	**100%**		**Pelayanan informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat**	**100%**	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**Persentase Masyarakat yang terlatih terhadap bencana**	**100%**	**467.915.500**	**Persentase Masyarakat yang terlatih terhadap bencana**	**100%**	**447.545.500**

BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD 2024			PERUBAHAN RENJA BPBD TAHUN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Bogor	*Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana*	*100 Orang*	*271.223.500*	*Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana*	*100 Orang*	*250.853.500*
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Bogor	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota*	*7 Dokumen*	*196.692.000*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota*	*7 Dokumen*	*196.692.000*
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		**Presentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan**	**100%**	**599.953.900**	**Presentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan**	**100%**	**599.953.900**
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Bogor	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana*	*260 Orang*	*196.973.800*	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana*	*260 Orang*	*196.973.800*
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Bogor	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	*260 Orang*	*402.980.100*	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	*260 Orang*	*402.980.100*
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		**Persentase Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan**	**100%**	**76.820.000**	**Persentase Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan**	**100%**	**21.000.000**
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Bogor	*Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)*	*1 Dokumen*	*76.820.000*	*Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)*	*1 Dokumen*	*21.000.000*
JUMLAH				**8.752.330.442**			**8.560.540.442**

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Renas PB merupakan dokumen perencanaan yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada di Indonesia dalam kurun waktu antara 2019-2024 dan rencana pemerintah untuk mengurangi risiko tersebut melalui program-program kegiatan. Visi yang ingin dicapai dalam upaya penanggulangan bencana adalah :

"Terwujudnya Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan"

Untuk mencapai visi tersebut, BNPB merumuskan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem dan strategi penanggulangan bencana yang handal dan implementatif.
2. Mengembangkan upaya pencegahan bencana di daerah rawan bencana.
3. Mengembangkan sistem penanganan darurat bencana secara cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi.
4. Menyelenggarakan pemulihan pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang handal.
6. Mewujudkan reformasi birokrasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Tujuan dari pelaksanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang (2019-2024) adalah

1. Terwujudnya sistem dan strategi penanggulangan bencana yang handal dan implementatif.
2. Terwujudnya upaya pencegahan bencana yang terpadu di daerah rawan bencana.
3. Terwujudnya sistem penanganan darurat bencana secara cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi.
4. Terwujudnya pemulihan pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

5. Terwujudnya peningkatan pengelolaan sumber daya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang handal.
6. Terwujudnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan BNPB.

Untuk mencapai tujuan tersebut BNPB merumuskan Sasarnan Strategis BNPB sebagai berikut:

1. Meningkatnya kolaborasi implementasi penanggulangan bencana.
2. Meningkatnya kebijakan pembangunan berwawasan PRB.
3. Meningkatnya upaya pencegahan bencana di wilayah rawan bencana.
4. Meningkatnya kualitas sistem kedaruratan dalam merespon kejadian bencana
5. Meningkatnya kualitas layanan kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat terdampak pada pascabencana.
6. Meningkatnya kualitas manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang handal.
7. Terselenggaranya birokrasi BNPB yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Indikator Kinerja Utama BNPB yang telah ditetapkan adalah:

1. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam sistem terintegrasi pada penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2. Persentase pemangku kepentingan yang memasukkan kebijakan PRB dalam perencanaan pembangunan.
3. Peningkatan indeks pencegahan bencana di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan indeks kualitas penanganan darurat.
5. Peningkatan indeks pemulihan pascabencana.
6. Peningkatan indeks logistik dan peralatan PB.
7. Nilai Reformasi Birokrasi BNPB

Arah kebijakan nasional yang akan diwujudkan melalui Renas PB 2019-2024 adalah sebagai berikut:

a. Penanggulangan bencana diarahkan pada sistem dan strategi yang terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan.
b. Penanggulangan bencana harus menyiapkan sumberdaya yang memadai dalam rangka pencegahan untuk menghadapi bencana.

c. Penanggulangan bencana harus mengutamakan penyelamatan sebanyak mungkin nyawa dan meminimalisir kerusakan fisik dan kerugian ekonomi.

d. Penanggulangan bencana harus diikuti dengan pemulihan kembali masyarakat menjadi lebih baik dan lebih aman.

e. Pembinaan dalam rangka membangun kemandirian penanggulangan bencana daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance.

Untuk mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan penanggulangan bencana, maka strategi yang akan ditempuh dalam Renas PB 2019-2024 adalah sebagai berikut:

a. Pemantapan koordinasi, komando, dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana

b. Peningkatan tata kelola, Pembinaan, dan Pengawasan

c. Pengarusutamaan Gender, inklusif disabilitas dan berketahanan bencana

d. Perencanaan dan penganggaran yang terpadu

e. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Dalam Renas PB 2019-2024 hanya memuat 1 (satu) program, yaitu “Program Penanggulangan Bencana” dan dengan 10 (sepuluh) fokus prioritas sebagai berikut berikut ini (Tabel 3.1):

Tabel 3.1
Keterkaitan Program, Fokus Prioritas dan Sasaran PB

Program	Fokus Prioritas	Sasaran
Penanggulangan bencana	Pengembangan sistem dan strategi penanggulangan bencana yang handal dan implementatif	Meningkatnya kolaborasi implementasi penanggulangan bencana
	Pengembangan upaya pencegahan bencana di daerah rawan bencana	Meningkatnya kebijakan pembangunan berwawasan PRB.
	Meningkatnya upaya pencegahan bencana di wilayah rawan bencana	
	Pengembangan sistem penanganan darurat bencana secara cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi	Meningkatnya kualitas sistem kedaruratan dalam merespon kejadian bencana

Program	Fokus Prioritas	Sasaran
	Meningkatnya kualitas layanan kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat terdampak pada pascabencana.	
	pengelolaan sumber daya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang handal	Meningkatnya kualitas manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang handal.
	Terselenggaranya birokrasi BNPB yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.	
	Penyelenggaraan pemulihan pascabencana yang lebih baik dan lebih aman	Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara mandiri, efektif dan bermartabat.
	Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	
	Mewujudkan reformasi birokrasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah penyelenggara penanggulangan bencana BPBD dituntut untuk merespon dengan cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana. Untuk itu Visi BPBD Kota Bogor dirumuskan dengan memperhatikan visi kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 yaitu:

"Mewujudkan Kota Bogor Yang Ramah Keluarga"

Dalam rangka mendukung visi tersebut, maka BPBD Kota Bogor mendukung pada dua Misi Walikota Bogor 2019-2024 yaitu:

1) Misi 2: Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas

Tujuan BPBD Kota yang mendukung misi ke 2 (dua) RPJMD Kota Bogor adalah:

a. Terwujudnya tata kelola urusan pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel.

b. Terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh.

2) Misi 3: Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera

Tujuan BPBD Kota yang mendukung misi ke 3 (tiga) RPJMD Kota Bogor adalah:

a. Terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinir dan komprehensif guna mencegah terjadinya kemiskinan akibat dari dampak bencana.

b. Terwujudnya ketahanan keluarga terhadap bencana.

Dalam Renja tahun 2024 ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor merencanakan 2 (Dua) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) sub kegiatan dengan jumlah total pagu sebesar Rp. 8.550.891.690 dengan lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kota Bogor.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor khususnya urusan Trantibumlinmas pada tahun 2024 melaksanakan 1 urusan, 2 Program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah dilakukan Pemutakhiran

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1	Program Penanggulangan Bencana	1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
				2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
		2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
		5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor
				11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17	Pengadaan Mebel
				18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**8.503.560.678,00**	**8.752.330.442,00**	**8.560.540.442,00**	**56.979.764,00**							**9.294.574.682,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.503.560.678,00**	**8.752.330.442,00**	**8.560.540.442,00**	**56.979.764,00**							**9.294.574.682,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN**							**8.503.560.678,00**	**8.752.330.442,00**	**8.560.540.442,00**	**56.979.764,00**							**9.294.574.682,00**	

		MASYARAKAT																	
1,	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan lingkup pemerintah daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**				**3.50 A Point Poin**	**3.55 A Point Poin**	**7.101.797.578,00**	**7.607.641.042,00**	**7.492.041.042,00**	**808.962.604,00**							**7.910.760.182,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	4.599.900,00	4.629.600,00	4.629.600,00	29.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		4.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	4.599.900,00	4.629.600,00	4.629.600,00	29.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			4.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN*				100 %	100 %	3.226.772.378,00	3.438.144.982,00	3.438.144.982,00	211.372.604,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		3.443.744.982,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	18 Orang/bulan	3.172.742.378,00	3.393.744.982,00	3.393.744.982,00	221.002.604,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			3.393.744.982,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	54.030.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	-9.630.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pakaian DInas Beserta Atribut Kelengkapan*				80 Orang	80 Orang	290.692.700,00	202.809.800,00	202.809.800,00	-87.882.900,00			Mempekuat Stabilitas Polhukhankam	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		305.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

														Dan Transformasi Pelayanan Publik					
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	8 Paket	290.692.700,00	202.809.800,00	202.809.800,00	-87.882.900,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			305.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	582.501.700,00	511.063.700,00	511.063.700,00	-71.438.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Tra	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		594.242.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

														nsformasi Pelayanan Publik					
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.915.100,00	8.915.100,00	8.915.100,00	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			9.915.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	66.713.100,00	66.713.100,00	66.713.100,00	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			68.710.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

														Dan Transformasi Pelayanan Publik					
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	17.269.100,00	17.269.100,00	17.269.100,00	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			18.273.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	137.529.200,00	116.603.800,00	116.603.800,00	-20.925.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukh	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			137.080.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

														ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.813.200,00	26.822.600,00	26.822.600,00	-2.990.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				6 Dokumen	6 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas	Reformasi Birokrasi Reformasi			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

			yang Disediakan									Kayu Manis		Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi				DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	301.262.000,00	262.740.000,00	262.740.000,00	-38.522.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			301.263.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				64 Unit	64 Unit	316.966.500,00	194.531.000,00	194.531.000,00	-122.435.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		330.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	107.547.400,00	89.439.900,00	89.439.900,00	-18.107.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	209.419.100,00	105.091.100,00	105.091.100,00	-104.328.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.568.458.800,00	2.165.896.360,00	2.165.896.360,00	597.437.560,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		2.245.085.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	140.085.000,00	140.085.000,00	140.085.000,00	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			145.085.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

	08.0004																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.428.373.800,00	2.025.811.360,00	2.025.811.360,00	597.437.560,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kebutuhan operasional Perangkat Daerah*				80 Unit	80 Unit	1.111.805.600,00	1.090.565.600,00	974.965.600,00	-136.840.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		988.088.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.330.000,00	42.090.000,00	42.090.000,00	3.760.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				23 Unit	23 Unit	682.402.000,00	682.402.000,00	646.802.000,00	-35.600.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas	Reformasi Birokrasi Reformasi			650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

			Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									Kayu Manis		Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi				DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				66 Unit	66 Unit	195.985.600,00	170.985.600,00	90.985.600,00	-105.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	195.088.000,00	195.088.000,00	195.088.000,00	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			198.088.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2,	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Pelayanan informasi Kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan Persentase Kelurahan Tangguh Bencana Persentase Sekolah aman bencana**				**50,00 6,27 100,00 100,00 % % % %**	**100,00 100,00 50,00 6,27 % % % %**	**1.401.763.100,00**	**1.144.689.400,00**	**1.068.499.400,00**	**-17.948.600,00**							**1.383.814.500,00**	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaa	*Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam*				100 Persentase	100 Persentase	652.489.200,00	467.915.500,00	447.545.500,00	-204.943.700,00			-	Reformasi Birokrasi Refor	Kelurahan dan Sekolah		660.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN

		n Terhadap Bencana	*Pengurangan Resiko Bencana*												masi Birokrasi				BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				579 Kawasan	250 Kawasan	312.489.200,00	271.223.500,00	250.853.500,00	-61.635.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			315.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																	
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di				1 laporan	1 laporan	340.000.000,00	196.692.000,00	196.692.000,00	-143.308.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transforma	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			345.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

			kawasan tempat tinggalnya											si Pelayanan Publik					
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Terlaksananya sub kegiatan pada kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*				3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	672.453.900,00	599.953.900,00	599.953.900,00	-72.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor		698.814.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	100 Orang	196.973.800,00	196.973.800,00	196.973.800,00	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfo	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			198.814.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

														rmasi Pelayanan Publik					
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	475.480.100,00	402.980.100,00	402.980.100,00	-72.500.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Terlaksananya sub kegiatan pada kegiatan penataan sistem dasar penangulangan bencana*				2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	76.820.000,00	76.820.000,00	21.000.000,00	-55.820.000,00			Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidu	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

														Pelayanan Publik	p Masyarakat				
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	76.820.000,00	76.820.000,00	21.000.000,00	-55.820.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempekuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H								**8.503.560.678,00**	**8.752.330.442,00**	**8.560.540.442,00**	**56.979.764,00**							**9.294.574.682,00**	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi serta memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya guna mendukung tercapainya target perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan-usulan dari para pemangku kepentingan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan dan mengimplementasikannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

DD. KECAMATAN BOGOR TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Bogor Tengah Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan

adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan,.

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2024 Disusun Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Tengah Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor yaitu "Mewujudkan kota bogor yang ramah keluarga". Disamping itu dalam rangka penyelarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota bogor dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2024 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2024 dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2024 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2024.

1.2.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2024 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor sampai dengan triwulan dua tahun 2024.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2024 dengan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2024.

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Renja Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2024 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 184 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan

23. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor ..... Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor ..... Seri .....);

1.4 Sistematika Perubahan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan Renja
1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan
1.3 Dasar Hukum Perubahan Renja
1.4 Sistematika Perubahan Renja

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Tengah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Kecamatan Bogor Tengah Tahun 2024

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOGOR TENGAH TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Renja Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2024 sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan Kecamatan Bogor Tengah. Dalam pelaksanaan program dengan anggaran sebesar Rp. 32.869.067.126,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 18.101.405.932,- atau 55,07 %, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan III sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Juni 2024 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan. Adapun Capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR

TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD))			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja TA 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
													I			II																
1	2	3	4	5			6			7			8			9			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100%		14 = 6+12			15 = 14/5*100%			16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp		K		Rp		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																													
	7.01.01	KECAMATAN																													
		BIDANG URUSAN																													
		PROGRAM																													
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga kemasyarakatan (LPM, RW, RT) tingkat kecamatan yang aktif	75	%	6.600.000	65	%	6.000.000	75	%	6.600.000	25	%	1.650.000	50	%	1.650.000	75	%	3.300.000	50,00%		9.300.000			140,91 %	Camat	

		KEGIATAN															%													
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW, RT) Tingkat Kecamatan**	**75**	%	**6.600.000**	**65**	**%**	**6.000.000**	**75**	%	**6.600.000**	**25**	%	**1.650.000**	**50**	%	**1.650.000**	**75**	%	**3.300.000**	**50,00%**			**9.300.000**			140,91 %	**Kasi Pemerintahan**	
		SUB KEGIATAN															%													
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	6.600.000	1	Lembaga	6.000.000	75	%	6.600.000	25	%	1.650.000	**50**	%	1.650.000	75	%	3.300.000	**50,00%**			9.300.000			140,91 %	Kasi Pemerintahan	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																			**25**	**%**										
Predikat kinerja																			**25**	**%**										
		PROGRAM																												

	7.01 .01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**	**3,4**	**Point**	**27.909.320.866**	**3,9**	**Point**	**21.856.442.609**	**100**	**%**	**27.909.320.866**	25	%	**7.656.952.939**	**50**	**%**	**7.437.134.623**	**25**	%	**15.094.087.562 -**	**54,08%**			**36.950.530.171**			132,39 %	Sekcam	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	**A**	**Nilai**		**BB**	**Nilai**																					Sekcam	
		KEGIATAN																												
	7.01 .01. 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Kepuasan Masyarakat**	**A**	**Nilai**	**20.480.500**	**BB**	**Nilai**	**36.660.000**	**A**	**Nilai**	**20.480.500**	**A**	**Nilai**	**4.002.250**			**5.213.100**			**9.215.350**	**45,00%**			**45.875.350**			**####**	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	
				A	**Nilai**		**BB**	**Nilai**		**A**	**Nilai**		**A**	**Nilai**																
		SUB KEGIATAN																												
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	4.713.000	6	dokumen	2.870.000	6	dokumen	4.713.000	25	%	1.010.700	50	%	980.925	75	%	1.991.625	42,26%			4.861.625			#####	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	

	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	15.767.500	6	laporan	33.790.000	6	laporan	15.767.500	25	%	2.991.550	50	%	4.232.175	75		7.223.725	45,81%			41.013.725			#####	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	
		KEGIATAN																											
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	**19.035.008.073**	100	%	**18.166.930.979**	100	**%**	**19.035.008.073**	25	%	**5.766.253.100**	50	%	**5.887.839.591**	**25**	**%**	**11.654.092.691**	**61,22%**			**29.821.023.670**			156,66%	**Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan**	
		SUB KEGIATAN																						-					
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98	Orang	18.959.945.573	97	**Orang**	18.166.510.979	98	Orang	18.959.945.573	25	bulan	5.749.949.700	50	%	5.868.990.766	25	%	11.618.940.466	61,28%			29.785.451.445			157,10%	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	5.629.500	2	laporan	420.000	2	Laporan	5.629.500	25	%	1.326.750	50	%	1.292.175	25	%	2.618.925	46,52%			3.038.925			53,98%	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1	Laporan	69.433.000	-	-	-	1	laporan	69.433.000	25	Bulan	14.976.650	50	%	17.556.650	25		32.533.300	46,86%			32.533.300			46,86%	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	
		KEGIATAN																											

	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**3.318.055.700**	**100**	**%**	**1.603.257.800**	**100**	**%**	**3.318.055.700**	**25**	%	**1.004.325.500**	**50**	%	**921.459.700**	**58**	**%**	**1.925.785.200**	**58,04%**			**3.529.043.000**				**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	
		SUB KEGIATAN																												
	7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**12**	**Paket**	**58.250.000**	**12**	**Paket**	**43.600.500**	**12**	**Paket**	**58.250.000**	**25**	**%**	**22.464.600**	**50**	%	**12.821.000**	**61**	**%**	**35.285.600**	**60,58%**			**78.886.100**			**###**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Seklur 11 Kelurahan**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	34.308.500	1	Paket	27.339.000	1	Paket	34.308.500	25	%	10.091.100	50	%	8.921.900	55	%	19.013.000	55,42%			46.352.000			135,10 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Babakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.594.000	1	Paket	1.258.000	1	Paket	1.594.000	25	%	1.594.000	50	%	-	100		1.594.000	100,00 %			2.852.000			178,92 %	Seklur Babakan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Cibogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.823.200	1	Paket	710.800	1	Paket	3.823.200	25	%	1.236.200	50	%	936.100	57		2.172.300	56,82%			2.883.100			75,41 %	Seklur Cibogor	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Ciwaringin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.202.500	1	Paket	105.200	1	Paket	1.202.500	25	%	1.202.500	50	%	-	100		1.202.500	100,00 %			1.307.700			108,75 %	Seklur Ciwaringin	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Gudang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.202.500	1	Paket	871.800	1	Paket	1.202.500	25	%	713.400	50	%	-	59	%	713.400	59,33%			1.585.200			131,83 %	Seklur Gudang	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Kebon Kalapa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	644.400	1	Paket	2.186.600	1	Paket	644.400	25	%	169.600	50	%	205.200	58	%	374.800	58,16%			2.561.400			397,49 %	Seklur Kebon Kalapa	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Paledang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.233.300	1	Paket	1.009.700	1	Paket	3.233.300	25	%	1.448.700	50	%	-	45		1.448.700	44,81%			2.458.400			76,03 %	Seklur Paledang	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Tegallega	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.594.600	1	Paket	2.673.400	1	Paket	3.594.600	25	%	-	50	%	2.065.400	57		2.065.400	57,46%			4.738.800			131,83 %	Seklur Tegllega	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Sempur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.694.600	1	Paket	749.000	1	Paket	3.694.600	25	%	1.749.100	50	%	-	47		1.749.100	47,34%			2.498.100			67,61 %	Seklur Sempur	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Babakan Pasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.850.000	1	Paket	970.100	1	Paket	1.850.000	25	%	1.850.000	50	%	-	100		1.850.000	100,00 %			2.820.100			152,44 %	Seklur Babakan Pasar	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Panaragan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.202.500	1	Paket	4.232.600	1	Paket	1.202.500	25	%	510.100	50	%	692.400	100	%	1.202.500	100,00 %			5.435.100			451,98 %	Seklur Panaragan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Pabaton	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.899.900	1	Paket	1.494.300	1	Paket	1.899.900	25	%	1.899.900	50	%	-	100		1.899.900	100,00 %			3.394.200			178,65 %	Seklur Pabaton	

	7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**12**	**Paket**	**1.117.178.200**	**12**	**Paket**	**144.266.400**	**12**	**Paket**	**1.117.178.200**	**25**	**%**	**509.251.500**	**50**	**%**	**190.719.200**	**63**	**%**	**699.970.700**	62,66%			**844.237.100**			**75,57 %**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Seklur 11 Kelurahan**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.010.319.600	1	Paket	68.809.000	1	Paket	1.010.319.600	25	%	480.263.900	50	%	156.606.200	63	%	636.870.100	63,04%			705.679.100			69,85 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Babakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	15.325.900	1	Paket	11.141.000	1	Paket	15.325.900	25	%	4.103.300	50	%	5.440.400	62	%	9.543.700	62,27%			20.684.700			134,97 %	Seklur Babakan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Cibogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.301.400	1	Paket	9.006.000	1	Paket	14.301.400	25	%	3.590.800	50	%	5.437.600	63		9.028.400	63,13%			18.034.400			126,10 %	Seklur Cibogor	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Ciwaringin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.714.100	1	Paket	4.416.500	1	Paket	8.714.100	25	%	3.782.800	50	%	1.060.900	56		4.843.700	55,58%			9.260.200			106,27 %	Seklur Ciwaringin	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Gudang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.714.100	1	Paket	5.593.800	1	Paket	8.714.100	25	%	2.764.800	50	%	1.863.900	53	%	4.628.700	53,12%			10.222.500			117,31 %	Seklur Gudang	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kebon Kalapa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.803.000	1	Paket	8.567.800	1	Paket	6.803.000	25	%	1.950.300	50	%	5.081.900	103	%	7.032.200	103,37 %			15.600.000			229,31 %	Seklur Kebon Kalapa	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Paledang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.157.500	1	Paket	7.238.500	1	Paket	12.157.500	25	%	-	50	%	5.081.900	42		5.081.900	41,80%			12.320.400			101,34 %	Seklur Paledang	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Tegallega	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	7.834.000	1	Paket	5.643.200	1	Paket	7.834.000	25	%	2.187.400	50	%	1.730.200	50	%	3.917.600	50,01%			9.560.800			122,04 %	Seklur Tegllega	

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sempur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	13.918.800	1	Paket	7.457.100	1	Paket	13.918.800	25	%	3.958.000	50	%	3.958.000	57	%	7.916.000	56,87%			15.373.100			110,45 %	Seklur Sempur	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Babakan Pasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.250.000	1	Paket	5.687.200	1	Paket	4.250.000	25	%	1.430.200	50	%	-	34		1.430.200	33,65%			7.117.400			167,47 %	Seklur Babakan Pasar	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Panaragan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.714.100	1	Paket	7.320.800	1	Paket	8.714.100	25	%	2.824.000	50	%	2.580.600	62	%	5.404.600	62,02%			12.725.400			146,03 %	Seklur Panaragan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Pabaton	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.125.700	1	Paket	3.385.500	1	Paket	6.125.700	25	%	2.396.000	50	%	1.877.600	**70**		4.273.600	69,77%			7.659.100			125,03 %	Seklur Pabaton	
	7.01.01.2.06.03	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**12**	**Paket**	**89.645.500**	**12**	**Paket**	**54.748.900**	**12**	**Paket**	**89.645.500**	**25**	**%**	**23.129.300**	**50**	%	**19.863.400**	**48**	%	**42.992.700**	47,96%			**97.741.600**			**####**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Seklur 11 Keluraha n**	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	30.776.800	1	Paket	23.409.200	1	Paket	30.776.800	25	%	6.093.600	50	%	6.093.600	40	%	12.187.200	39,60%			35.596.400			115,66 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Babakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	3.576.100	1	Paket	2.856.500	1	Paket	3.576.100	25	%	-	50	%	-	-		-	0,00%			2.856.500			79,88 %	Seklur Babakan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Cibogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	5.976.500	1	Paket	3.801.200	1	Paket	5.976.500	25	%	1.741.900	50	%	1.549.300	55	%	3.291.200	55,07%			7.092.400			118,67 %	Seklur Cibogor	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Ciwaringin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	6.565.800	1	Paket	99.000	1	Paket	6.565.800	25	%	1.426.000	50	%	1.426.000	43		2.852.000	43,44%			2.951.000			44,95 %	Seklur Ciwaringin	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Gudang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	6.565.800	1	Paket	2.168.600	1	Paket	6.565.800	25	%	2.757.100	50	%	1.479.400	65	%	4.236.500	64,52%			6.405.100			97,55 %	Seklur Gudang	

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Kebon Kalapa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.761.200	1	Paket	2.502.600	1	Paket	1.761.200	25	%	256.600	50	%	653.200	52	%	909.800	51,66%			3.412.400			193,75 %	Seklur Kebon Kalapa	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Paledang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	6.474.700	1	Paket	4.487.100	1	Paket	6.474.700	25	%	1.635.300	50	%	1.827.400	53		3.462.700	53,48%			7.949.800			122,78 %	Seklur Paledang	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Tegallega	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	8.520.800	1	Paket	6.712.100	1	Paket	8.520.800	25	%	1.334.500	50	%	3.236.800	54		4.571.300	53,65%			11.283.400			132,42 %	Seklur Tegllega	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Sempur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	6.041.400	1	Paket	1.196.600	1	Paket	6.041.400	25	%	1.970.200	50	%	1.970.200	65	%	3.940.400	65,22%			5.137.000			85,03 %	Seklur Sempur	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Babakan Pasar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.500.000	1	Paket	1.680.600	1	Paket	1.500.000	25	%	-	50	%	-	**-**		-	0,00%			1.680.600			112,04 %	Seklur Babakan Pasar	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Panaragan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	6.565.800	1	Paket	4.391.700	1	Paket	6.565.800	25	%	593.500	50	%	1.627.500	**34**		2.221.000	33,83%			6.612.700			100,71 %	Seklur Panaragan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Pabaton	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	5.320.600	1	Paket	1.443.700	1	Paket	5.320.600	25	%	5.320.600	50	%	-	**100**		5.320.600	100,00 %			6.764.300			127,13 %	Seklur Pabaton	
	7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**12**	**Paket**	**1.059.604.500**	**12**	**Paket**	**804.055.000**	**12**	**Paket**	**1.059.604.500**	**25**	**%**	**226.690.500**	**50**	%	**239.485.500**	**44**	%	**466.176.000**	44,00%			**1.270.231.000**			**###**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Seklur 11 Kelurahan**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	263.539.500	1	Paket	265.090.000	1	Paket	263.539.500	25	%	42.490.500	50	%	40.795.500	32	%	83.286.000	31,60%			348.376.000			132,19 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Babakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	74.220.000	1	Paket	39.800.000	1	Paket	74.220.000	25	%	14.100.000	50	%	18.975.000	45	%	33.075.000	44,56%			72.875.000			98,19 %	Seklur Babakan	

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Cibogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	63.000.000	1	Paket	42.150.000	1	Paket	63.000.000	25	%	10.425.000	50	%	19.575.000	48	%	30.000.000	47,62%			72.150.000			114,52 %	Seklur Cibogor	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Ciwaringin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	72.570.000	1	Paket	52.500.000	1	Paket	72.570.000	25	%	13.650.000	50	%	16.320.000	41	%	29.970.000	41,30%			82.470.000			113,64 %	Seklur Ciwaringin	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Gudang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	72.570.000	1	Paket	50.355.000	1	Paket	72.570.000	25	%	19.320.000	50	%	19.290.000	53	%	38.610.000	53,20%			88.965.000			122,59 %	Seklur Gudang	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Kebon Kalapa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	78.075.000	1	Paket	49.765.000	1	Paket	78.075.000	25	%	17.970.000	**50**	%	20.940.000	50	%	38.910.000	49,84%			88.675.000			113,58 %	Seklur Kebon Kalapa	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Paledang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	75.840.000	1	Paket	55.380.000	1	Paket	75.840.000	25	%	18.960.000	50	%	18.960.000	50	%	37.920.000	50,00%			93.300.000			123,02 %	Seklur Paledang	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Tegallega	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	78.150.000	1	Paket	51.345.000	1	Paket	78.150.000	25	%	19.335.000	50	%	18.570.000	49	%	37.905.000	48,50%			89.250.000			114,20 %	Seklur Tegllega	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Sempur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	62.625.000	1	Paket	42.195.000	1	Paket	62.625.000	25	%	15.780.000	50	%	15.615.000	50	%	31.395.000	50,13%			73.590.000			117,51 %	Seklur Sempur	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Babakan Pasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	70.200.000	1	Paket	39.900.000	1	Paket	70.200.000	25	%	15.750.000	50	%	18.000.000	48	%	33.750.000	48,08%			73.650.000			104,91 %	Seklur Babakan Pasar	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Panaragan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	72.570.000	1	Paket	59.400.000	1	Paket	72.570.000	25	%	18.300.000	50	%	18.300.000	50	%	36.600.000	50,43%			96.000.000			132,29 %	Seklur Panaragan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Pabaton	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	76.245.000	1	Paket	56.175.000	1	Paket	76.245.000	25	%	20.610.000	50	%	14.145.000	46	%	34.755.000	45,58%			90.930.000			119,26 %	Seklur Pabaton	
	7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**12**	**Paket**	**50.575.400**	**12**	**Paket**	**25.941.000**	**12**	**Paket**	**50.575.400**	**25**	**%**	**11.711.600**	50	%	**9.501.600**	**42**	%	**21.213.200**	41,94%			**47.154.200**			**93,24 %**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Seklur 11**	

																												Kelurahan	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	9.660.300	-	0	-	1	Paket	9.660.300	25	%	1.647.000	50	%	1.415.000	32		**3.062.000**	31,70%			3.062.000			31,70 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Babakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	0	-	-	-	-	25	%	-	50	%	-	-		**-**	0,00%			-			#VALUE!	Seklur Babakan	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Cibogor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	5.223.900	1	Paket	2.242.000	1	Paket	5.223.900	25	%	1.216.800	50	%	1.216.800	47		**2.433.600**	46,59%			4.675.600			89,50 %	Seklur Cibogor	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Ciwaringin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.617.600	1	Paket	1.334.000	1	Paket	3.617.600	25	%	988.900	50	%	765.900	49		**1.754.800**	48,51%			3.088.800			85,38 %	Seklur Ciwaringin	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Gudang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.617.600	1	Paket	3.120.800	1	Paket	3.617.600	25	%	830.700	50	%	765.900	44	%	1.596.600	44,13%			4.717.400			130,40 %	Seklur Gudang	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Kebon Kalapa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.786.000	1	Paket	3.492.600	1	Paket	2.786.000	25	%	759.200	50	%	653.800	51	%	1.413.000	50,72%			4.905.600			176,08 %	Seklur Kebon Kalapa	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Paledang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	5.773.200	1	Paket	1.790.200	1	Paket	5.773.200	25	%	717.000	50	%	-	12		717.000	12,42%			2.507.200			43,43 %	Seklur Paledang	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tegallega	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	6.525.600	1	Paket	6.191.400	1	Paket	6.525.600	25	%	1.591.200	50	%	1.046.400	40	%	2.637.600	40,42%			8.829.000			135,30 %	Seklur Tegllega	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Paket	5.220.200	1	Paket	1.639.800	1	Pak	5.220.200	25	%	1.339.800	50	%	1.327.800	51	%	2.667.600	51,10%			4.307.400			82,51 %	Seklur Sempur	

		Kelurahan Sempur	yang Disediakan								et																		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Babakan Pasar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.500.000	1	Paket	1.372.800	1	Paket	1.500.000	25	%	-	50	%	1.500.000	100		1.500.000	100,00%			2.872.800			191,52%	Seklur Babakan Pasar	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Panaragan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.617.600	1	Paket	3.492.600	1	Paket	3.617.600	25	%	1.215.000	50	%	810.000	56	%	2.025.000	55,98%			5.517.600			152,52%	Seklur Panaragan	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Pabaton	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.033.400	1	Paket	1.264.800	1	Paket	3.033.400	25	%	1.406.000	50	%	-	46		1.406.000	46,35%			2.670.800			88,05%	Seklur Pabaton	
	7.01.01.2.06.06	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**5**	**Dokumen**	**21.600.000**	**5**	**Dokumen**	**9.060.000**	**5**	**Dokumen**	**21.600.000**	**25**	**%**	**2.265.000**	50	%	**2.265.000**	**21**		4.530.000	20,97%			**13.590.000**			62,92%	**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	
	7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD**	**2**	**Laporan**	**921.202.100**	**2**	**Laporan**	**521.586.000**	**2**	**Laporan**	**921.202.100**	**25**	**%**	**208.813.000**	50	%	**446.804.000**	**71**	%	**655.617.000**	71,17%			**1.177.203.000**			127,79%	**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	
		KEGIATAN																			-				-					
	7.01.01.2.07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemenuhan sarana Prasarana Aparatur**	**100**	**%**	**2.286.146.493**	**100**	**%**	**1.851.534.630**	**100**	**%**	**2.286.146.493**	**25**	**%**	**668.773.589**	50	%	**537.665.652**	**53**	%	**1.206.439.241**	**52,77%**			**3.057.973.871**			**133,76%**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	
		SUB KEGIATAN																			-				-					
	7.01.01.2.07.05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	199.999.925	36	Laporan	192.610.472	36	Laporan	199.999.925	25	%	56.915.727	50	%	56.041.399	56	%	112.957.126	56,48%			305.567.598			152,78%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

	7.01.01.2.07.10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.086.146.568	12	Laporan	1.658.924.158	12	Laporan	2.086.146.568	25	%	611.857.862	50	%	481.624.253	52	%	1.093.482.115	52,42%			2.752.406.273			131,94 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		KEGIATAN																												
	7.01.01.2.08	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**3.102.195.800**	**100**	**%**	**198.059.200**	**100**	**%**	**3.102.195.800**	**25**	**%**	**66.274.000**	50	%	**84.956.580**	**4,9**	**%**	**151.230.580**	4,87%			**349.289.780**			**11,26 %**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	
		SUB KEGIATAN																												
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	188.750.000	6	Unit	144.247.000	6	Unit	188.750.000	25	%	20.094.400	50	%	30.851.580	27	%	50.945.980	26,99%			195.192.980			103,41 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	55.250.000	5	Unit	53.812.200	5	Unit	55.250.000	25	%	11.925.000	50	%	10.125.000	40	%	22.050.000	39,91%			75.862.200			137,31 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	2.858.195.800	-	-	-	3	Unit	2.858.195.800	25	%	34.254.600	50	%	43.980.000	3		78.234.600	2,74%			78.234.600			2,74%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		KEGIATAN																												
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	100	%	**147.434.300**	-	-	-	100	%	**147.434.300**	100	%	147.324.500			-	100		147.324.500	99,93%			147.324.500			99,93 %	**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	
		SUB KEGIATAN																												

		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel disediakan	71	Unit	147.434.300	-	0	0	72	Unit	147.434.300	25	%	147.324.500	50	%	-	100		147.324.500	99,93%			147.324.500			99,93%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
																		Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**25**	%											
																		Predikat kinerja	**25**	%											
		PROGRAM																															
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Pelayanan administrasi di tingkat kecamatan**	**100**	**%**	**215.500.000**	**100**	**%**	**136.380.000**	**100**	**%**	**215.500.000**			**92.882.800**			**37.566.900**	**61**	**%**	**130.449.700**	**60,53%**			**266.829.700**			**####**	**Camat**	
			Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan	**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**																				
		KEGIATAN																							-								
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**100**	**%**	**135.500.000**	**100**	**%**	**96.615.000**	**100**	**%**	**135.500.000**	**25**	**%**	**45.700.800**	**50**	**%**	**33.947.900**	**59**	**%**	**79.648.700**	**58,78%**			**176.263.700**			**####**	**Kasi Pemerintahan**	
		SUB KEGIATAN																							-								

	7.01.02.2.02.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	Laporan	135.500.000	100	%	96.615.000	100	%	135.500.000	25	%	45.700.800	50	%	33.947.900	59	%	79.648.700	58,78%			**176.263.700**			130,08%	**Kasi Pemerintahan**	
		KEGIATAN																															
	7.01.02.2.04	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Pelayanan masyarakat di Kecamatan**	**100**	**%**	**80.000.000**	**100**	**%**	**39.765.000**	**100**	**%**	**80.000.000**	**25**	**%**	**47.182.000**	50	%	**3.619.000**	**64**	**%**	**50.801.000**	63,50%			**90.566.000**			**113,21%**	**Kasi Dalbang**	
		SUB KEGIATAN																															
	7.01.02.2.04.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1	Dokumen	60.000.000	-	0	0	1	Dokumen	60.000.000	25	%	47.182.000	50	%	3.619.000	85		50.801.000	84,67%			**50.801.000**			84,67%	Kasi Dalbang	
	7.01.02.2.04.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	20.000.000	1	Laporan	39.765.000	1	Laporan	20.000.000	25	%	-	50	%	-	-	%	-	0,00%			39.765.000			198,83%	Kasi Dalbang	
																			Rata-rata capaian kinerja Program (%)			**43**	%									
																			Predikat kinerja			43										
		PROGRAM																															

	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan**	**100**	**%**	**4.677.146.260**	**100**	**%**	**3.047.618.366**	**100**	**%**	**4.677.146.260**	25	%	**972.183.950**	50	%	**1.374.674.806**	1	%	**2.346.858.756**	**50,18%**			**5.394.477.122**			**115,34 %**	**Camat**	
			Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan	**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**		25	%		50	%													
			Optimalisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**		25	%		50	%													
		KEGIATAN																											
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**%**	**407.881.000**	**100**	**%**	**143.963.000**	**100**	**%**	**407.881.000**	**25**	%	**48.018.900**	50	%	**136.546.200**	0		**184.565.100**	**45,25%**			**328.528.100**			**80,55 %**		
		SUB KEGIATAN																											
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	25	%	5.015.600	50	%	14.617.200	39		19.632.800	39,27%			19.632.800			39,27 %	Kasi Kemasyarakatan	

		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Lembaga Kemasyarakatan	309.070.800	2	Lembaga Kemasyarakatan	139.163.000	2	Lembaga Kemasyarakatan	309.070.800	25	%	43.003.300	50	%	118.919.000	52	%	161.922.300	52,39%			301.085.300			97,42 %	Kasi Kemasyarakatan	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	Laporan	20.547.800	3	Laporan	-	3	Laporan	20.547.800	25	%	0	50	%	-	-		-	0,00%			-				Kasi Ekonomi	
		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	28.262.400	1	Laporan	4.800.000	1	Laporan	28.262.400	25	%	0	50	%	3.010.000	**11**	%	3.010.000	10,65%			7.810.000			27,63 %	Kasi Ekonomi	
		KEGIATAN																											
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan**	**100**	**%**	**4.269.265.260**			**2.903.655.366**	**100**	**%**	**4.269.265.260**	25	%	**924.165.050**	50	%	**1.238.128.606**	**1**	**%**	**2.162.293.656**	50,65%			**5.065.949.022**			**118,66 %**	**Kelurahan**	
		SUB KEGIATAN																							-					

	7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**11**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**53.378.700**	**11**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**41.129.100**	**11**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**53.378.700**	25	%	**2.700.000**	50	%	**2.700.000**	**0**		**5.400.000**	10,12%			**46.529.100**			**87,17 %**		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Babakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	1.312.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	4.944.500	1	Lembaga Kemasyarakatan	1.312.000	25	%	-	50	%	-	-		-	0,00%			4.944.500			376,87 %	Kasi Ekbang Babakan	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cibogor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.675.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.090.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.675.000	25	%	-	50	%	-	-		-	0,00%			2.090.000			56,87 %	Kasi Ekbang Cibogor	

										tan																			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ciwaringin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.330.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.109.500	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.330.000	25	%	-	50	%	-	-		-	0,00%			2.109.500			63,35 %	Kasi Ekbang Ciwaringin	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gudang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.330.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.125.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.330.000	25	%	-	50	%	-	-		-	0,00%			10.125.000			304,05 %	Kasi Ekbang Gudang	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebon Kalapa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	5.930.400	1	Lembaga Kemasyarakatan	5.476.200	1	Lembaga Kem	5.930.400	25	%	-	50	%	-	-		-	0,00%			5.476.200			92,34 %	Kasi Ekbang Kebon Kalapa	

										asyarakatan																			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Paledang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	4.521.300	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.094.500	1	Lembaga Kemasyarakatan	4.521.300	25	%	-	50	%	-	-		-	0,00%			2.094.500			46,33 %	Kasi Ekbang Paledang	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tegallega	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.375.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.925.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.375.000	25	%	-	50	%	-	-		-	0,00%			2.925.000			86,67 %	Kasi Ekbang Tegallega	

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sempur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	4.095.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000	25	%	-	50	%	-	-		-	0,00%			4.095.000			91,00 %	Kasi Ekbang Sempur	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Babakan Pasar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	16.700.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.094.400	1	Lembaga Kemasyarakatan	16.700.000	25	%	2.700.000	50	%	2.700.000	0		5.400.000	32,34%			7.494.400			44,88 %	Kasi Ekbang Babakan Pasar	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Panaragan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Panaragan	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.330.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.025.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.330.000	25	%	-	50	%	-	-		-	0,00%			2.025.000			60,81 %	Kasi Ekbang Panaragan	

										tan																			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pabaton	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.375.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.150.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.375.000	25	%	-	50	%	-	-		-	0,00%			3.150.000			93,33 %	Kasi Ekbang Pabaton	
	7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	9	Unit	**1.710.528.260**	9	Unit	**651.783.666**	9	Unit	**1.710.528.260**	25	%	**315.504.950**	50	%	**595.496.606**	**1**		**911.001.556**	53,26%			**1.562.785.222**			91,36 %		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Babakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	139.900.010	1	Unit	72.944.430	1	Unit	139.900.010	25	%	-	50	%	-	-		-	0,00%			72.944.430			52,14 %	Kasi Ekbang Babakan	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cibogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	131.523.500	1	Unit	74.040.999	1	Unit	131.523.500	25	%	-	50	%	131.200.000	**100**		131.200.000	99,75%			205.240.999			156,05 %	Kasi Ekbang Cibogor	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciwaringin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	139.534.720	2	Unit	73.667.259	2	Unit	139.534.720	25	%	17.821.050	50	%	118.428.856	**1**		136.249.906	97,65%			209.917.165			150,44 %	Kasi Ekbang Ciwaringin	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gudang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	196.823.570	2	Unit	-	2	Unit	196.823.570	25	%	103.106.700	50	%	-	**1**		103.106.700	52,39%			103.106.700			52,39 %	Kasi Ekbang Gudang	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebon Kalapa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	125.654.400	1	Unit	74.029.791	1	Unit	125.654.400	25	%	-	50	%	-	**-**		-	0,00%			74.029.791			58,92 %	Kasi Ekbang Kebon Kalapa	

		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paledang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	310.794.860	1	Unit	74.573.824	1	Unit	310.794.860	25	%	-	50	%	34.292.700	**11**		34.292.700	11,03%			108.866.524			35,03 %	Kasi Ekbang Paledang	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegallega	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	192.567.500	0	Unit	70.265.220	0	Unit	192.567.500	25	%	45.613.900	50	%	146.823.600	**1**		192.437.500	99,93%			262.702.720			136,42 %	Kasi Ekbang Tegallega	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	114.884.000	1	Unit	58.100.000	1	Unit	114.884.000	25	%	70.715.700	50	%	-	**1**		70.715.700	61,55%			128.815.700			112,13 %	Kasi Ekbang Sempur	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Babakan Pasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	150.587.900	0	Unit	33.870.000	0	Unit	150.587.900	25	%	-	50	%	136.285.500	**91**		136.285.500	90,50%			170.155.500			112,99 %	Kasi Ekbang Babakan Pasar	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Panaragan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	129.831.100	2	Unit	53.693.586	2	Unit	129.831.100	25	%	-	50	%	28.465.950	**22**		28.465.950	21,93%			82.159.536			63,28 %	Kasi Ekbang Panaragan	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pabaton	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	78.426.700	1	Unit	66.598.557	1	Unit	78.426.700	25	%	78.247.600	50	%	-	**1**		78.247.600	99,77%			**144.846.157**			184,69 %	Kasi Ekbang Pabaton	
		SUB KEGIATAN																							-						
	7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**33**	**Pokmas / Ormas**	**2.505.358.300**	**33**	**Pokmas /Ormas**	**2.210.742.600**	**33**	**Pokmas/Ormas**	**2.505.358.300**	**25**	**%**	**605.960.100**	50	%	**639.932.000**	**50**	**%**	**1.245.892.100**	49,73%			**3.456.634.700**			**####**	Kasi Pemtrantib	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Babakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	192.600.000	3	Pokmas / Ormas	163.417.600	3	Pokmas/Ormas	192.600.000	25	%	48.150.000	50	%	48.150.000	50	%	96.300.000	50,00%			259.717.600			**####**	Kasi Pemtrantib Babakan	

		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibogor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	156.600.000	3	Pokmas / Ormas	134.700.000	3	Pokmas/Ormas	156.600.000	25	%	39.150.000	50	%	39.150.000	50	%	78.300.000	50,00%			213.000.000			####	Kasi Pemtrantib Cibogor	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciwaringin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	256.200.000	3	Pokmas / Ormas	218.400.000	3	Pokmas/Ormas	256.200.000	25	%	64.050.000	50	%	64.050.000	50	%	128.100.000	50,00%			346.500.000			####	Kasi Pemtrantib Ciwaringin	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gudang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	321.591.400	3	Pokmas / Ormas	313.565.000	3	Pokmas/Ormas	321.591.400	25	%	72.450.000	50	%	72.450.000	45	%	144.900.000	45,06%			458.465.000			####	Kasi Pemtrantib Gudang	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebon Kalapa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	268.588.800	3	Pokmas / Ormas	212.400.000	3	Pokmas/Ormas	268.588.800	25	%	61.350.000	50	%	71.864.000	50	%	133.214.000	49,60%			345.614.000			####	Kasi Pemtrantib Kebon Kalapa	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Paledang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	320.400.000	3	Pokmas / Ormas	277.200.000	3	Pokmas/Ormas	320.400.000	25	%	78.560.100	50	%	81.639.900	50	%	160.200.000	50,00%			437.400.000			####	Kasi Pemtrantib Paledang	

		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegallega	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	273.600.000	3	Pokmas / Ormas	236.400.000	3	Pokmas/Ormas	273.600.000	25	%	68.400.000	50	%	68.400.000	50	%	136.800.000	50,00%			373.200.000			####	Kasi Pemtrantib Tegallega	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	199.178.100	3	Pokmas / Ormas	163.440.000	3	Pokmas/Ormas	199.178.100	25	%	44.700.000	50	%	65.078.100	55	%	109.778.100	55,12%			273.218.100			**137,17%**	Kasi Pemtrantib Sempur	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Babakan Pasar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	224.400.000	3	Pokmas / Ormas	238.020.000	3	Pokmas/Ormas	224.400.000	25	%	56.100.000	50	%	56.100.000	50	%	112.200.000	50,00%			350.220.000			####	Kasi Pemtrantib Babakan Pasar	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panaragan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	187.200.000	3	Pokmas / Ormas	162.000.000	3	Pokmas/Ormas	187.200.000	25	%	46.800.000	50	%	46.800.000	50	%	93.600.000	50,00%			255.600.000			####	Kasi Pemtrantib Panaragan	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pabaton	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	105.000.000	3	Pokmas / Ormas	91.200.000	3	Pokmas/Ormas	105.000.000	25	%	26.250.000	50	%	26.250.000	50	%	52.500.000	50,00%			143.700.000			####	Kasi Pemtrantib Pabaton	

																		Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**12**	**%**					-					
																		Predikat kinerja	**12**	%					-					
		PROGRAM																								-					
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan**	86	%	**60.500.000**	**86**	**%**	**12.000.000**	**86**	**%**	**60.500.000**	25	%	**11.634.600**	50	%	**16.876.400**	**47**	**%**	**28.511.000**	**47,13%**			**40.511.000**			66,96 %	**Camat**	
		KEGIATAN																								-					
	7.01.04.2.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	86	%	**60.500.000**	86	%	**12.000.000**	86	%	**60.500.000**	25	%	**11.634.600**	50	%	**16.876.400**	**47**	**%**	**28.511.000**	**47,13%**			**40.511.000**			66,96 %	**Kasi Trantib**	
		SUB KEGIATAN																								-					
	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	60.500.000	2	Laporan	12.000.000	2	Laporan	60.500.000	25	%	11.634.600	50	%	16.876.400	**47**	**%**	28.511.000	47,13%			40.511.000			66,96 %	**Kasi Trantib**	
																		Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**19**										
																		Predikat kinerja	**19**										
						32.869.067.126			**25.058.440.975**			**32.869.067.126**			**8.735.304.289**			**8.867.902.729**	**1**	**%**	**17.603.207.018**	**53,56%**								

JUMLAH																															
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										**25**	**%**								**1**	**%**											
Predikat kinerja										**25**	**%**																				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)										**25**	**%**																				
Predikat Kinerja										**25**	**%**																				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: Penyerapan sudah sesuai dengan target Rencana Anggaran Kas
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: Ada beberapa Anggaran Belanja yang harus dilakukan Pergeseran dan Perubahan Anggaran
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Melakukan Monev Capaian Kinerja
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Melakukan Monev Capaian Kinerja

BAB III
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BOGOR TENGAH TAHUN 2024

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rebnja Kecamatan Bogor Tengah Tahun 2024. Bahwa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor tambahan Anggaran yang diajukan dalam Renja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp. 35.194.193.136,- dengan Rincian Sub Kegiatan sebagai Berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.502.718.310
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan LIstrik sebesar Rp. 12.000.000
c. Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 24.000.000,- (Sewa Kantor Kelurahan Ciwaringin)

Dengan Rincian Perubahan Renja sebagaimana terlampir dalam Lampiran Matrik Renja.

KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN BOGOR TENGAH							22.813.284.201,00	27.573.152.966,00	29.898.278.976,00							32.254.380.167,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00							6.930.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00							6.930.000,00	
1	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RT, RW) Tingkat Kecamatan yang aktif				75 %	75 %	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00							6.930.000,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan	-			100 %	100 %	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kecamatan Bogor Tengah		6.930.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			6.930.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							22.806.684.201,00	27.566.552.966,00	29.891.678.976,00							32.247.450.167,00	
	7	01				KECAMATAN							22.806.684.201,00	27.566.552.966,00	29.891.678.976,00							32.247.450.167,00	
2	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah				A Poin	A Poin	22.356.574.001,00	26.882.671.966,00	29.298.664.976,00							31.724.059.457,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Dokumen, Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kecamatan secara tepat Waktu dan sesuai regulasi	-			100 %	100 %	20.480.500,00	20.480.500,00	20.480.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Tengah		21.504.525,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	4.713.000,00	4.713.000,00	4.413.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			4.948.650,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.767.500,00	15.767.500,00	15.467.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			16.555.875,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	18.577.306.276,00	19.035.008.073,00	19.035.008.073,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Tengah		23.667.954.246,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/bulan	98 Orang/bulan	18.518.563.776,00	18.959.945.573,00	21.462.663.883,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			23.608.930.271,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.629.500,00	5.629.500,00	5.278.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			5.910.975,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	53.113.000,00	69.433.000,00	67.713.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			53.113.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	1.873.365.000,00	2.291.406.800,00	2.291.406.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Tengah		2.050.776.945,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.308.500,00	34.308.500,00	32.724.500,00	Kota Bogor,	PENDAPATAN ASLI DAE	Memperkuat Stabilitas Polhuk	Reformasi Birokrasi			40.885.950,00	KECAMATAN BOGOR

																Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RAH (PAD)	hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					TENGAH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	997.535.200,00	1.010.319.600,00	990.565.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			1.153.499.130,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.776.800,00	30.776.800,00	24.870.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			32.315.640,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	263.539.500,00	263.539.500,00	190.129.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			276.716.475,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82.020.000,00	9.660.300,00	9.010.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			105.115.500,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	9.100.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			22.680.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

															/Desa							
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	443.585.000,00	921.202.100,00	824.172.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			419.564.250,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	-			100 persen	100 persen	147.434.300,00	147.434.300,00	147.434.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Tengah		203.159.775,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	147.434.300,00	147.434.300,00	147.434.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			203.159.775,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	952.887.925,00	2.286.146.493,00	2.286.146.493,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Tengah		2.314.196.086,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	199.999.925,00	199.999.925,00	211.999.925,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			233.199.918,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	752.888.000,00	2.086.146.568,00	2.080.346.568,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Aloksi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			2.080.996.168,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik	-			100 %	100 %	785.100.000,00	3.102.195.800,00	3.102.195.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhuk	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bo		3.466.467.880,00	KECAMATAN BOGOR

																	hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		gor Tengah			TENGAH
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	122.050.000,00	188.750.000,00	188.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			122.050.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	63.050.000,00	55.250.000,00	53.830.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			66.202.500,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	600.000.000,00	2.858.195.800,00	2.980.195.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Se	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			3.278.215.380,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

															mua Kel/Desa								
3	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan				100 %	100 %	130.000.000,00	215.500.000,00	154.800.000,00							180.800.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-			100 %	100 %	50.000.000,00	135.500.000,00	135.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Tengah		96.800.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	135.500.000,00	96.820.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			96.800.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	-			100 %	100 %	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Tengah		84.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	57.980.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			63.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			21.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
4	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan				100 %	100 %	259.610.200,00	407.881.000,00	377.714.000,00							272.590.710,00	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			100 %	100 %	259.610.200,00	407.881.000,00	407.881.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kecamatan Bogor Tengah		272.590.710,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	39.065.400,00	Kota Bo	PENDAPATAN	Revolusi Mental	Peningkatan			52.500.000,00	KECAMATAN

											Kemasyarakatan	Kemasyarakatan				gor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD)	dan Pembangunan Kebudayaan	Kualitas Hidup Masyarakat				BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	160.000.000,00	309.070.800,00	309.070.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			168.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	20.547.800,00	20.547.800,00	20.547.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			21.575.190,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	29.062.400,00	28.262.400,00	9.030.000,00	Kota Bogor,	PENDAPATAN ASLI DAE	Revolusi Mental dan Pemba	Peningkatan Kualitas			30.515.520,00	KECAMATAN BOGOR

																Bogor Tengah, Pabaton	RAH (PAD)	ngunan Kebudayaan	Hidup Masyarakat				TENGAH
5	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan				90 %	90 %	60.500.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00							70.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	-			90 %	85 %	60.500.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kecamatan Bogor Tengah		70.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	60.500.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			70.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
						KELURAHAN BABAKAN							428.527.875,00	428.528.010,00	428.528.010,00							432.273.700,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							96.000.000,00	94.716.000,00	94.716.000,00							97.673.700,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							96.000.000,00	94.716.000,00	94.716.000,00							97.673.700,00	
6	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.50 Poin	96.000.000,00	94.716.000,00	94.716.000,00							97.673.700,00	

	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	96.000.000,00	94.716.000,00	94.716.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Babakan		97.673.700,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.594.000,00	1.594.000,00	1.594.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			1.673.700,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.609.900,00	15.325.900,00	15.325.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			17.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.576.100,00	3.576.100,00	3.576.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	74.220.000,00	74.220.000,00	74.220.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

															/Desa							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							332.527.875,00	333.812.010,00	333.812.010,00						334.600.000,00	
	7	01				KECAMATAN							332.527.875,00	333.812.010,00	333.812.010,00						334.600.000,00	
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan				100 %	100 %	332.527.875,00	333.812.010,00	333.812.010,00						334.600.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	100 %	332.527.875,00	333.812.010,00	333.812.010,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Babakan		334.600.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	138.615.875,00	139.900.010,00	139.900.010,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			140.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	192.600.000,00	192.600.000,00	192.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			192.600.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
						KELURAHAN CIBOGOR							384.123.600,00	384.123.500,00	384.123.500,00							396.100.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.325.000,00	92.325.000,00	92.325.000,00							95.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							92.325.000,00	92.325.000,00	92.325.000,00							95.000.000,00	
8	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.50 Poin	92.325.000,00	92.325.000,00	92.325.000,00							95.000.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	92.325.000,00	92.325.000,00	92.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Cibogor		95.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.823.200,00	3.823.200,00	3.823.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

															Kel/Desa							
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.301.400,00	14.301.400,00	14.301.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.976.500,00	5.976.500,00	5.976.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			64.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

															Kel/Desa							
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.223.900,00	5.223.900,00	5.223.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							291.798.600,00	291.798.500,00	291.798.500,00							301.100.000,00	
	7	01				KECAMATAN							291.798.600,00	291.798.500,00	291.798.500,00							301.100.000,00	
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan				100 %	100 %	291.798.600,00	291.798.500,00	291.798.500,00							301.100.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	100 %	291.798.600,00	291.798.500,00	291.798.500,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Cibogor		301.100.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			4.500.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	127 Unit	131.523.600,00	131.523.500,00	131.523.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			140.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	156.600.000,00	156.600.000,00	156.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			156.600.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
						KELURAHAN CIWARINGIN							491.734.720,00	491.734.720,00	491.734.720,00							495.200.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.670.000,00	92.670.000,00	92.670.000,00							95.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							92.670.000,00	92.670.000,00	92.670.000,00							95.000.000,00	
10	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.50 Poin	92.670.000,00	92.670.000,00	92.670.000,00							95.000.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	92.670.000,00	92.670.000,00	92.670.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Ciwaringin		95.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	Kota Bogor,	PENDAPATAN ASLI DAE	Memperkuat Stabilitas Polhuk	Reformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN BOGOR

																Bogor Tengah, Ciwaringin	RAH (PAD)	hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					TENGAH
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.714.100,00	8.714.100,00	8.714.100,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			9.500.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.565.800,00	6.565.800,00	6.565.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.570.000,00	72.570.000,00	72.570.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			73.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.617.600,00	3.617.600,00	3.617.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							399.064.720,00	399.064.720,00	399.064.720,00							400.200.000,00	
	7	01				KECAMATAN							399.064.720,00	399.064.720,00	399.064.720,00							400.200.000,00	
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan				100 %	100 %	399.064.720,00	399.064.720,00	399.064.720,00							400.200.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	100 %	399.064.720,00	399.064.720,00	399.064.720,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Ciwaringin		400.200.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			4.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	139.534.720,00	139.534.720,00	139.534.720,00	Kota Bogor	DAU Tambahan Duku	-	Peningkatan Kuali			140.000.000,00	KECAMATAN BOG

																, Bogor Tengah, Ciwaringin	ngan Pendanaan Bagi Kelurahan		tas Hidup Masyarakat				OR TENGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	256.200.000,00	256.200.000,00	256.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			256.200.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
						KELURAHAN GUDANG							520.698.156,00	614.414.970,00	614.414.970,00							564.034.464,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.670.000,00	92.670.000,00	92.670.000,00							97.303.500,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							92.670.000,00	92.670.000,00	92.670.000,00							97.303.500,00	
12	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.50 Poin	92.670.000,00	92.670.000,00	92.670.000,00							97.303.500,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	92.670.000,00	92.670.000,00	92.670.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Gudang		97.303.500,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	Kota Bogor, Bogor Teng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Reformasi Birokrasi			1.262.625,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

																ah, Gu da ng		Pelayan an Publik				
	2	1 3	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.714.100,0 0	8.714.100,0 0	8.714.100,0 0	Ko ta Bo gor , Bo gor Te ng ah, Gu da ng	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	Meme rkuat Stabilit as Polhuk hanka m Dan Transfo rmasi Pelayan an Publik	Refor masi Birok rasi			9.149.805,00	KECA MATA N BOG OR TENG AH
	2	1 3	0 1	2.0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.565.800,0 0	6.565.800,0 0	6.565.800,0 0	Ko ta Bo gor , Bo gor Te ng ah, Gu da ng	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	Meme rkuat Stabilit as Polhuk hanka m Dan Transfo rmasi Pelayan an Publik	Refor masi Birok rasi			6.894.090,00	KECA MATA N BOG OR TENG AH
	2	1 3	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.570.000, 00	72.570.000, 00	72.570.000, 00	Ko ta Bo gor , Bo gor Te ng ah, Gu da ng	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	Meme rkuat Stabilit as Polhuk hanka m Dan Transfo rmasi Pelayan an Publik	Refor masi Birok rasi			76.198.500,00	KECA MATA N BOG OR TENG AH
	2	1 3	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.617.600,0 0	3.617.600,0 0	3.617.600,0 0	Ko ta Bo gor , Bo gor	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	Meme rkuat Stabilit as Polhuk hanka m Dan	Refor masi Birok rasi			3.798.480,00	KECA MATA N BOG OR TENG AH

																Tengah, Gudang		Transformasi Pelayanan Publik				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							428.028.156,00	521.744.970,00	521.744.970,00						466.730.964,00	
	7	01				KECAMATAN							428.028.156,00	521.744.970,00	521.744.970,00						466.730.964,00	
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan				100 %	100 %	428.028.156,00	521.744.970,00	521.744.970,00						466.730.964,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	100 %	428.028.156,00	521.744.970,00	521.744.970,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Gudang		466.730.964,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			3.496.500,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	126 Unit	134.898.156,00	196.823.570,00	196.823.570,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			141.643.064,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	289.800.000,00	321.591.400,00	321.591.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			321.591.400,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
						KELURAHAN KEBON KALAPA							490.243.200,00	490.243.200,00	490.243.200,00							502.485.360,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							90.069.600,00	90.069.600,00	90.069.600,00							94.573.080,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							90.069.600,00	90.069.600,00	90.069.600,00							94.573.080,00	
14	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.50 Poin	90.069.600,00	90.069.600,00	90.069.600,00							94.573.080,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	90.069.600,00	90.069.600,00	90.069.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kebon Kalapa		94.573.080,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	644.400,00	644.400,00	644.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			676.620,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

															a Kel/Desa							
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.799.800,00	6.803.000,00	6.803.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			7.139.790,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.761.200,00	1.761.200,00	1.761.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Kebon Kalapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			1.849.260,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	78.075.000,00	78.075.000,00	78.075.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Kebon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			81.978.750,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

															Kalapa							
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.789.200,00	2.786.000,00	2.786.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			2.928.660,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							400.173.600,00	400.173.600,00	400.173.600,00							407.912.280,00	
	7	01				KECAMATAN							400.173.600,00	400.173.600,00	400.173.600,00							407.912.280,00	
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan				100 %	100 %	400.173.600,00	400.173.600,00	400.173.600,00							407.912.280,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	100 %	400.173.600,00	400.173.600,00	400.173.600,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Kebon Kalapa		407.912.280,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.930.400,00	5.930.400,00	5.930.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			6.226.920,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

																Semua Kel/Desa							
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	108 Unit	148.843.200,00	125.654.400,00	125.654.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Kebon Kalapa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			156.285.360,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	245.400.000,00	268.588.800,00	268.588.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Kebon Kalapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			245.400.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
						KELURAHAN PALEDANG							609.666.260,00	739.194.860,00	739.194.860,00							624.129.574,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							103.478.700,00	103.478.700,00	103.478.700,00							108.652.636,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							103.478.700,00	103.478.700,00	103.478.700,00							108.652.636,00	
16	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.50 Poin	103.478.700,00	103.478.700,00	103.478.700,00							108.652.636,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	103.478.700,00	103.478.700,00	103.478.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhuk	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Pal		108.652.636,00	KECAMATAN BOGOR

																	hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		edang			TENGAH
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.233.300,00	3.233.300,00	3.233.300,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			3.394.965,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.157.500,00	12.157.500,00	12.157.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			13.249.216,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.474.700,00	6.474.700,00	6.474.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paled	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			8.414.070,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

															ang							
	2	1 3	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.840.000,00	75.840.000,00	75.840.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			77.364.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	1 3	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.773.200,00	5.773.200,00	5.773.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			6.230.385,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							506.187.560,00	635.716.160,00	635.716.160,00							515.476.938,00	
	7	0 1				KECAMATAN							506.187.560,00	635.716.160,00	635.716.160,00							515.476.938,00	
17	7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan				100 %	100 %	506.187.560,00	635.716.160,00	635.716.160,00							515.476.938,00	
	7	0 1	0 3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	100 %	506.187.560,00	635.716.160,00	635.716.160,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Paledang		515.476.938,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	0 1	0 3	2.0 2	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.521.300,00	4.521.300,00	4.521.300,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			4.747.365,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	64 Unit	181.266.260,00	310.794.860,00	310.794.860,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			190.329.573,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	320.400.000,00	320.400.000,00	320.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			320.400.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
						KELURAHAN TEGALLEGA							574.167.500,00	574.167.500,00	574.167.500,00							589.167.928,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							104.625.000,00	104.625.000,00	104.625.000,00							109.856.250,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							104.625.000,00	104.625.000,00	104.625.000,00							109.856.250,00	

18	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.50 Poin	104.625.000,00	104.625.000,00	104.625.000,00							109.856.250,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	104.625.000,00	104.625.000,00	104.625.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tegalega		109.856.250,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.594.600,00	3.594.600,00	3.594.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Tegalega	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			3.774.330,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.834.000,00	7.834.000,00	7.834.000,00	Kota Bogor, Bo	PENDAPATAN ASLI DAE	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Reformasi Birokrasi			8.225.700,00	KECAMATAN BOGOR

															gor Tengah, Tegalega	RAH (PAD)	m Dan Transformasi Pelayanan Publik					TENGAH
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.520.800,00	8.520.800,00	8.520.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Tegalega	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			8.946.840,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	78.150.000,00	78.150.000,00	78.150.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Tegalega	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			82.057.500,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.525.600,00	6.525.600,00	6.525.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Tegalega	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			6.851.880,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							469.542.500,00	469.542.500,00	469.542.500,00							479.311.678,00	

	7	01				KECAMATAN								469.542.500,00	469.542.500,00	469.542.500,00								479.311.678,00	
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan				100 %	100 %	469.542.500,00	469.542.500,00	469.542.500,00								479.311.678,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	100 %	469.542.500,00	469.542.500,00	469.542.500,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Tegalega			479.311.678,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Tegalega	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			3.548.750,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	107 Unit	192.567.500,00	192.567.500,00	192.567.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			202.162.928,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	273.600.000,00	273.600.000,00	273.600.000,00	Kota Bogor	PENDAPATAN ASLI	-	Peningkatan Kuali			273.600.000,00	KECAMATAN BOG

																, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)		tas Hidup Masyarakat				OR TENGAH
						KELURAHAN SEMPUR							410.062.320,00	410.062.100,00	410.062.100,00							421.625.706,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							91.500.000,00	91.500.000,00	91.500.000,00							96.075.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							91.500.000,00	91.500.000,00	91.500.000,00							96.075.000,00	
20	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.50 Poin	91.500.000,00	91.500.000,00	91.500.000,00							96.075.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	91.500.000,00	91.500.000,00	91.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sempur		96.075.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.694.600,00	3.694.600,00	3.694.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			3.879.330,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.918.800,00	13.918.800,00	13.918.800,00	Kota Bogor, Se	PENDAPATAN ASLI DAE	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Reformasi Birokrasi			14.614.740,00	KECAMATAN BOGOR

																mua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RAH (PAD)	m Dan Transformasi Pelayanan Publik					TENGAH
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.041.400,00	6.041.400,00	6.041.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			6.343.470,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.625.000,00	62.625.000,00	62.625.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			65.772.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.220.200,00	5.220.200,00	5.220.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			5.465.460,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							318.562.320,00	318.562.100,00	318.562.100,00							325.550.706,00	
	7	01				KECAMATAN							318.562.320,00	318.562.100,00	318.562.100,00							325.550.706,00	
21	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan				100 %	100 %	318.562.320,00	318.562.100,00	318.562.100,00							325.550.706,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	100 %	318.562.320,00	318.562.100,00	318.562.100,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Sempur		325.550.706,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			4.725.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	165 Unit	135.262.320,00	114.884.000,00	114.884.000,00	-	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			142.025.706,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	178.800.000,00	199.178.100,00	199.178.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			178.800.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
						KELURAHAN BABAKAN PASAR							470.987.900,00	470.987.900,00	470.987.900,00							483.317.295,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							79.300.000,00	79.300.000,00	79.300.000,00							83.265.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							79.300.000,00	79.300.000,00	79.300.000,00							83.265.000,00	
22	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.50 Poin	79.300.000,00	79.300.000,00	79.300.000,00							83.265.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	79.300.000,00	79.300.000,00	79.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Babakan Pasar		83.265.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			1.942.500,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			4.462.500,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			1.575.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.200.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			73.710.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			1.575.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							391.687.900,00	391.687.900,00	391.687.900,00							400.052.295,00	
	7	01				KECAMATAN							391.687.900,00	391.687.900,00	391.687.900,00							400.052.295,00	
23	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan				100 %	100 %	391.687.900,00	391.687.900,00	391.687.900,00							400.052.295,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	100 %	391.687.900,00	391.687.900,00	391.687.900,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Bebas Pasar		400.052.295,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			17.535.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	59 Unit	150.587.900,00	150.587.900,00	150.587.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			158.117.295,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	224.400.000,00	224.400.000,00	224.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			224.400.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
						KELURAHAN PANARAGAN								413.031.100,00	413.031.100,00	413.031.100,00							424.323.285,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								92.670.000,00	92.670.000,00	92.670.000,00							97.303.500,00	

	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						92.670.000,00	92.670.000,00	92.670.000,00								97.303.500,00	
24	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.50 Poin	92.670.000,00	92.670.000,00	92.670.000,00								97.303.500,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	92.670.000,00	92.670.000,00	92.670.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Panaragan		97.303.500,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Panaragan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			1.262.625,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.714.100,00	8.714.100,00	8.714.100,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Panaragan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			9.149.805,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.565.800,00	6.565.800,00	6.565.800,00	Kota Bogor, Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Reformasi Birokrasi			6.894.090,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

															Tengah, Panaragan		Transformasi Pelayanan Publik					
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.570.000,00	72.570.000,00	72.570.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Panaragan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			76.198.500,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.617.600,00	3.617.600,00	3.617.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Panaragan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			3.798.480,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							320.361.100,00	320.361.100,00	320.361.100,00							327.019.785,00	
	7	01				KECAMATAN							320.361.100,00	320.361.100,00	320.361.100,00							327.019.785,00	
25	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan				100 %	100 %	320.361.100,00	320.361.100,00	320.361.100,00							327.019.785,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	100 %	320.361.100,00	320.361.100,00	320.361.100,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Panaragan		327.019.785,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			3.496.500,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	129.831.100,00	129.831.100,00	129.831.100,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Panaragan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			136.323.285,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	187.200.000,00	187.200.000,00	187.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			187.200.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
						KELURAHAN PABATON							279.426.784,00	279.426.300,00	279.426.300,00							287.892.026,00	

	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.624.800,00	92.624.600,00	92.624.600,00							97.256.040,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							92.624.800,00	92.624.600,00	92.624.600,00							97.256.040,00	
26	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.50 Poin	92.624.800,00	92.624.600,00	92.624.600,00							97.256.040,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	92.624.800,00	92.624.600,00	92.624.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Pabaton		97.256.040,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.899.900,00	1.899.900,00	1.899.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			1.994.895,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.125.700,00	6.125.700,00	6.125.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			6.431.985,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

															Kel/Desa							
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.320.600,00	5.320.600,00	5.320.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			5.586.630,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	76.250.000,00	76.245.000,00	76.245.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			80.062.500,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.028.600,00	3.033.400,00	3.033.400,00	Kota Bogor, Semua Keca	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	Reformasi Birokrasi			3.180.030,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

																matan, Semua Kel/Desa		an Publik						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							186.801.984,00	186.801.700,00	186.801.700,00							190.635.986,00	
	7	01				KECAMATAN							186.801.984,00	186.801.700,00	186.801.700,00							190.635.986,00	
27	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan				100 %	100 %	186.801.984,00	186.801.700,00	186.801.700,00							190.635.986,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	100 %	186.801.984,00	186.801.700,00	186.801.700,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Pabaton		190.635.986,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			3.543.750,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	44 Unit	78.426.984,00	78.426.700,00	78.426.700,00	Kota Bogor, Semua Ke	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masy			82.092.236,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

																camatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan		araka t				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			105.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	JUMLAH												**27.885.953.616**	**32.869.067.126.00**	**35,194,193,136,00**							**37.474.929.505**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2024 merupakan tindaklanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Tengah Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan progran kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2024 dalam menjalankan peran dan fungsinya.

EE. KECAMATAN BOGOR SELATAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bogor SelatanKota Bogor Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
c. Kecamatan Bogor SelatanKota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Bogor SelatanTahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan

kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan,.

Perubahan Renja Kecamatan Bogor SelatanKota Bogor Tahun 2024 Disusun Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor SelatanTahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor yaitu "Mewujudkan kota bogor yang ramah keluarga". Disamping itu dalam rangka penyelarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota bogor dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor SelatanKota Bogor tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor SelatanKota Bogor Tahun 2024 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Kecamatan Bogor SelatanKota Bogor Tahun 2024 dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2024 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2024.

1.2.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor SelatanKota Bogor Tahun 2024 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor SelatanKota Bogor sampai dengan triwulandua tahun 2024.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2024 dengan dokumen Perubahan Renja

Kecamatan Bogor SelatanKota Bogor Tahun 2024.

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Renja Kecamatan Bogor SelatanKota Bogor Tahun 2024 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa SelatanNomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa SelatanTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa SelatanTahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa SelatanNomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa SelatanNomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa SelatanNomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa SelatanTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa SelatanTahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa SelatanNomor

236);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa SelatanNomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa SelatanTahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa SelatanTahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa SelatanNomor 237);
17. Peraturan Gubernur Jawa SelatanNomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa SelatanTahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa SelatanTahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 3);
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 184 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
26. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor ..... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kota

Bogor Tahun 2023 Nomor …… Seri ……);

1.4 Sistematika Perubahan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.3 Dasar Hukum Perubahan RKPD

1.4 Sistematika Perubahan RKPD

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Kecamatan Bogor selatan Tahun 2024

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOGOR SELATANTAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Renja Kecamatan Bogor selatan Kota Bogor Tahun 2024 sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan Kecamatan Bogor Selatan.

Dalam pelaksanaan Urusan urusan wajib non pelayanan dasar melaksanakan 5 program dengan anggaran sebesar Rp**. 43,584,989,680 ,-** dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. **22,814,347,490**,- atau **52,34%,** masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan III sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Juni 2024 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan. Adapun Capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah		
KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR		
TRIWULAN II TAHUN 2024		
Tujuan 1	:	Terwujudnya Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
Indikator Tujuan 1	:	Presentase keterlibatan Gender dalam pemberdayaan masyarakat untuk mendukung perencanaan pembangunan wilayah
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat
Indikator Sasaran 1	:	Persentase tingkat partisipasi pemberdayaan masyarakat aktif
Tujuan 2		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
Indikator Tujuan 2	:	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 2	:	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yqng efektif, efisien dan akuntabel di lingkup kecamatan
Indikator Sasaran 2	:	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Kecamatan

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)				Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja TA 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II												
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp	%	K		K	Rp	
1	2	3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11				13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16		
	32.0000	KECAMATAN																		
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												-						

I	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	**100**	**%**	**34,611,548,810**	**25**	**%**	**9,019,115,696**	**50**	**%**	**9,474,998,706**			**18,494,114,402**	**53.43**	**44,662,966,207**			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah				**25**			**50**										
1	**5-2.13.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**16**		**35,000,000**	**-**		**2,612,600**	**4**		**26,385,000**	**4**		**28,997,600**	**82.85**	**50,645,000**			**Kecamatan Bogor Selatan**
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	16		28,935,300	-		1,010,000	4		26,385,000	4		**27,395,000**	94.68	50,645,000			
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Dokumen Laporan Kinerja Bulanan	12 Dok		6,064,700			1,602,600						**1,602,600**					

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
											Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**94.68**							
											Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**							
2	**5-2.13.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**		**26,118,177,907**	**100 %**		**7,560,540,165**	**6 Bulan**		**7,950,656,127**	**25%**		**15,511,196,292**	**59.39**	**39,919,182,136**			**Kecamatan Bogor Selatan**
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100 %		26,051,526,907	100 %		7,546,329,365	6 Bulan		7,937,876,127	25%		15,484,205,492	59.44	39,919,182,136			
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	12 Dok		66,651,000			14,210,800			12,780,000			26,990,800					
											Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**59.44**							
											Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**							
3	**5-2.13.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	**1 Tahun**		**2,532,954,800**			**543,545,600**	**6 Bulan**		**553,500,634**			**1,097,046,234**	**43.31**	**281,168,600**			**Kecamatan Bogor Selatan**
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan sarana prasara	100 %		96,700,000	100 %		23,046,500	6 Bulan		21,875,000	25%		**44,921,500**	46.45	281,168,600			Kecamatan Bogor Selatan

			na aparatur																
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %		20,000,000	100 %		5,447,900	6 Bulan		4,819,800	25%		**10,267,700**	51.3385	16,267,700			Lurah Batutulis
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %		20,000,000	100 %		3,660,000	6 Bulan		5,384,300	25%		**9,044,300**	45.22	15,306,600			Lurah Bojongkerta
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %		19,914,200	100 %		19,914,200	6 Bulan			25%		**19,914,200**	100.00	33,187,800			Lurah Bondongan
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %		20,000,000	100 %		4,885,400	6 Bulan		5,011,900	25%		**9,897,300**	49.49	13,897,300			Lurah Cikaret
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %		20,000,000	100 %		5,142,700	6 Bulan		2,779,200	25%		**7,921,900**	39.61	16,831,100			Lurah Cipaku
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %		20,000,000	100 %		7,923,800	6 Bulan		5,528,300	25%		**13,452,100**	67.26	18,819,000			Lurah Empang
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %		20,000,000	100 %		6,295,800	6 Bulan		4,368,400	25%		**10,664,200**	53.32	14,143,500			Lurah Genteng
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %		20,000,000	100 %		6,138,800	6 Bulan			25%		**6,138,800**	30.69	10,138,800			Lurah Harjasari
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %		20,000,000	100 %		4,206,200	6 Bulan		5,335,000	25%		**9,541,200**	47.71	22,157,500			Lurah Kertamaya
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %		20,000,000	100 %		5,392,700	6 Bulan		2,849,900	25%		**8,242,600**	41.21	12,281,600			Lurah Lawanggintung
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %		20,000,000	100 %		6,816,900			11,121,200	25%		**17,938,100**	89.69	23,008,800			Lurah Muarasari
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		100 %		9,922,000	100 %		3,545,00	6 Bulan		2,232,000	25%		**5,777,000**	58.22	12,024,500			Lurah Mulyaharja

		Kantor							0										
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %		20,000,000	100 %		6,282,900	6 Bulan		5,094,300	25%		**11,377,200**	56.89	19,820,100			Lurah Pakuan
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %		19,999,300	100 %		9,948,200	6 Bulan		5,071,000	25%		**15,019,200**	75.10	21,678,300			Lurah Pamoyanan
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %		19,998,600	100 %		5,554,800	6 Bulan		4,863,900	25%		**10,418,700**	52.10	28,574,900			Lurah Rancamaya
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %		20,000,000	100 %		2,723,900	6 Bulan		2,840,500	25%		**5,564,400**	27.82	10,398,700			Lurah Ranggamekar
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 %		57,964,000	100 %			6 Bulan			25%		-	-	58,015,800			Kecamatan Bogor Selatan
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %		5,000,000	100 %		1,701,800	6 Bulan		1,087,600	25%		**2,789,400**	55.79	4,789,400			Lurah Batutulis
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %		7,000,000	100 %		895,300	6 Bulan		1,189,200	25%		**2,084,500**	29.78	4,324,300			Lurah Bojongkerta
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %		6,616,200	100 %		4,889,000				25%		**4,889,000**	73.89	17,580,400			Lurah Bondongan
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %		7,000,000	100 %		2,380,200			1,699,200	25%		**4,079,400**	58.28	6,329,400			Lurah Cikaret
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %		7,000,000	100 %						25%		**-**	-	1,486,200			Lurah Cipaku

	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %		7,000,000	100 %					3,421,900	25%		**3,421,900**	48.88	4,560,900			Lurah Empang
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %		7,000,000	100 %		2,767,300	6 Bulan		2,056,800	25%		**4,824,100**	68.92	6,758,200			Lurah Genteng
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %		7,000,000	100 %		2,750,800	6 Bulan			25%		**2,750,800**	39.30	4,750,800			Lurah Harjasari
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %		7,000,000	100 %			6 Bulan		966,600	25%		**966,600**	13.81	3,690,200			Lurah Kertamaya
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %		5,000,000	100 %			6 Bulan		2,139,400	25%		**2,139,400**	42.79	3,761,900			Lurah Lawanggintung
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %		5,000,000	100 %					2,359,500	25%		**2,359,500**	47.19	7,920,100			Lurah Muarasari
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %		2,359,000	100 %		1,414,000	6 Bulan		909,000	25%		**2,323,000**	98.47	4,096,400			Lurah Mulyaharja
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %		5,000,000	100 %		1,064,700	6 Bulan		1,450,700	25%		**2,515,400**	50.31	6,786,400			Lurah Pakuan
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %		6,982,000	100 %		4,845,400	6 Bulan		1,139,800	25%		**5,985,200**	85.72	9,154,000			Lurah Pamoyanan
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %		5,000,000	100 %		1,409,400	6 Bulan		1,120,800	25%		**2,530,200**	50.60	7,454,700			Lurah Rancamaya
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %		7,000,000	100 %		756,900	6 Bulan		513,000	25%		**1,269,900**	18.14	3,905,900			Lurah Ranggamekar
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan sarana prasara	100 %		590,850,000	100 %		139,613,200	6 Bulan		79,141,200	25%		218,754,400	37.02	797,454,400			Kecamatan Bogor Selatan

			na aparatur																
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %		58,860,000	100 %		16,802,000	6 Bulan		16,788,000	25%		**33,590,000**	57.07	80,500,000			Lurah Batutulis
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %		68,000,000	100 %		14,910,000	6 Bulan		9,780,000	25%		**24,690,000**	36.31	80,790,000			Lurah Bojongkerta
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %		67,995,000	100 %		16,600,000	6 Bulan		13,500,000	25%		**30,100,000**	44.27	62,635,000			Lurah Bondongan
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %		68,000,000	100 %		17,010,000	6 Bulan		21,595,000	25%		**38,605,000**	56.77	95,855,000			Lurah Cikaret
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %		67,575,000	100 %		14,800,000	6 Bulan		17,620,000	25%		**32,420,000**	47.98	87,410,000			Lurah Cipaku
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %		66,900,000	100 %		13,770,000	6 Bulan		17,230,000	25%		**31,000,000**	46.34	95,150,000			Lurah Empang
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %		68,000,000	100 %		13,740,000	6 Bulan		12,845,000	25%		**26,585,000**	39.10	79,825,000			Lurah Genteng
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %		68,000,000	100 %		10,160,000	6 Bulan		24,580,000	25%		**34,740,000**	51.09	108,990,000			Lurah Harjasari
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %		80,000,000	100 %		15,620,000	6 Bulan		21,785,000	25%		**37,405,000**	46.76	87,530,000			Lurah Kertamaya
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %		58,995,000	100 %		12,430,000	6 Bulan		15,160,000	25%		**27,590,000**	46.77	78,210,000			Lurah Lawanggintung
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %		58,965,000	100 %		17,280,000	6 Bulan		14,185,000	25%		**31,465,000**	53.36	86,190,000			Lurah Muarasari
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik		100 %		94,350,000	100 %		21,123,0			24,310,000	25%		**45,433,000**	48.15	116,863,000			Lurah Mulyaharja

		Kantor							00											
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %		58,970,000	100 %		12,670,000	6 Bulan		15,820,000	25%		**28,490,000**	48.31	72,540,000			Lurah Pakuan
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %		79,980,000	100 %		16,510,000	6 Bulan		16,576,000	25%		**33,086,000**	41.37	89,061,000			Lurah Pamoyanan
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %		58,980,000	100 %		11,535,000	6 Bulan		12,270,000	25%		**23,805,000**	40.36	51,845,000			Lurah Rancamaya
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %		68,000,000	100 %		18,750,000	6 Bulan		15,290,000	25%		**34,040,000**	50.06	92,420,000			Lurah Ranggamekar
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 %		84,426,900	100 %		1,800,000	6 Bulan		60,541,134	25%		62,341,134	73.84	81,968,134			Kecamatan Bogor Selatan
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %		2,140,000	100 %		642,500	6 Bulan		427,500	25%		**1,070,000**	50.00	3,160,000			Lurah Batutulis
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %		3,000,000	100 %		632,400	6 Bulan		463,200	25%		**1,095,600**	36.52	3,369,900			Lurah Bojongkerta
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %		3,474,600	100 %			6 Bulan			25%		-	-	7,000,000			Lurah Bondongan
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %		3,000,000	100 %		712,000	6 Bulan		390,000	25%		**1,102,000**	36.73	4,602,000			Lurah Cikaret
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %		3,425,000	100 %		3,000				25%		**3,000**	0.09	2,903,400			Lurah Cipaku

	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %		3,000,000	100 %			6 Bulan		3,000,000	25%		**3,000,000**	100.00	4,109,800			Lurah Empang
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %		3,000,000	100 %		630,000	6 Bulan		630,000	25%		**1,260,000**	42.00	11,284,800			Lurah Genteng
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %		3,000,000	100 %			6 Bulan			25%		-	-	1,250,000			Lurah Harjasari
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %		3,000,000	100 %		600,000	6 Bulan		600,000	25%		**1,200,000**	40.00	4,875,600			Lurah Kertamaya
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %		2,000,000	100 %			6 Bulan		772,800	25%		**772,800**	38.64	1,496,800			Lurah Lawanggintung
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %		2,000,000	100 %			6 Bulan			25%		-	-	889,200			Lurah Muarasari
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %		3,369,000	100 %		727,500	6 Bulan		928,500	25%		**1,656,000**	49.15	4,102,600			Lurah Mulyaharja
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %		2,000,000	100 %		133,200			513,500	25%		**646,700**	32.34	1,563,300			Lurah Pakuan
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %		3,000,000	100 %		600,000			1,200,000	25%		**1,800,000**	60.00	3,043,800			Lurah Pamoyanan
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %		2,000,000	100 %		306,300			659,300	25%		**965,600**	48.28	2,723,200			Lurah Rancamaya
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %		3,000,000	100 %		675,000	6 Bulan		675,000	25%		**1,350,000**	45.00	3,775,000			Lurah Ranggamekar
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan sarana prasara	100 %		160,244,000	100 %		960,000	6 Bulan		24,996,300	25%		25,956,300	16.20	147,667,226			Kecamatan Bogor Selatan

			na aparatur																	
											Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**46.00**							
											Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**							
4	**5-2.13.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**1,725,293,800**			**-**			**79,790,000**			**79,790,000**	**0%**	**-**			**Kecamatan Bogor Selatan**
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 %		492,807,400	100 %				100 %	79,790,000			**79,790,000**	0%	266,056,200			Kecamatan Bogor Selatan
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 %		796,046,400	100 %								-	0%	186,266,200			Kecamatan Bogor Selatan
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sewa/ Kontrak Kantor Kelurahan Pakuan	100 %		436,440,000	100 %								-	0%	186,266,200			Kecamatan Bogor Selatan
											Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**0%**							
											Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**							
5	**5-2.13.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha**		**1 Tahun**		**2,891,672,303**	**100 %**		**858,445,331**	**6 Bulan**		**686,204,245**	**25%**		**1,544,649,576**	**53.42**	**3,846,029,071**			**Kecamatan Bogor Selatan**

		n Daerah																	
	2.13.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %		298,643,375	100 %		78,522,479	6 Bulan		86,980,873	25%		**165,503,352**	25%	435,813,332			Kecamatan Bogor Selatan
	2.13.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %		2,593,028,928	100 %		779,922,852	6 Bulan		599,223,372	25%		**1,379,146,224**	25%	3,410,215,739			Kecamatan Bogor Selatan
											Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**25%**							
											Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**							
6	**5-2.13.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur**	**12 Bulan**		**1,308,450,000**			**53,972,000**			**178,462,700**			**232,434,700**	**17.76**	**565,941,400**			**Kecamatan Bogor Selatan**
	2.13.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	12 Bulan		236,100,000	3 Bulan		39,772,000	6 Bulan		34,843,000	3 Bulan		**74,615,000**	31.60	233,632,300			Kecamatan Bogor Selatan

	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	12 Bulan		95,400,000	3 Bulan		14,200,000	6 Bulan		11,360,000	3 Bulan		**25,560,000**	26.79	93,408,500			Kecamatan Bogor Selatan
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12 Bulan		976,950,000	3 Bulan		-	6 Bulan		132,259,700	3 Bulan		**132,259,700**	13.54	238,900,600			Kecamatan Bogor Selatan
											Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**23.98**							
											Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**							
											Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**53.43**							
											Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**							
II	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		65	%	**6,600,000**	16.25	%	**1,650,000**	32.5	%	**1,650,000**	65.00	%	**3,300,000**	**50.00**	**42,414,200**			
7	**5-2.13.05.2.01**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/K**	**Persentase lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang aktif**	65	%	**6,600,000**	16.25	%	**1,650,000**	32.5	%	**1,650,000**	**65.00**	**%**	**3,300,000**	**50.00**	**42,414,200**			**Kecamatan Bogor Selatan**

		ota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Belanja Operasional FK LPM, Belanja Barang Cetakan	1	Lembaga	6,600,000	1	Lembaga	1,650,000	32.50	%	1,650,000	1	Lembaga	**3,300,000**	50.00	42,414,200			
		Honorarium (BOP) FK LPM Kecamatan		12	Bulan		3	Bulan					3.00	Bulan		25.00%				
											Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**50.00**								
											Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**								
											Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**50.00**								
											Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**								
III	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhada**	**3.2 Point**		**339,660,900**			**262,617,850**			**20,853,900**			**283,471,750**	**83.46**	**3.2 Point**			

		PUBLIK	**p pelayan an Paten di kecama tan**																
8	**5-7.01.02.2.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**249,160,900**			**190,504,350**			**20,853,900**			**211,358,250**	84.83	**211,358,250**			**Kecamatan Bogor Selatan**
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				249,160,900			190,504,350	1 Dok		20,853,900			**211,358,250**	84.83	211,358,250			Kecamatan Bogor Selatan
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													-					Kecamatan Bogor Selatan
9	**5-7.01.02.2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		1 Keg		**90,500,000**			**72,113,500**			-			**72,113,500**	79.68	115,840,150			
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1 Keg		90,500,000	1 Keg		72,113,500	1 Dok			1 Keg		**72,113,500**	79.68	115,840,150			Kecamatan Bogor Selatan

											Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**79.68**									
											Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**									
											Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**83.46**									
											Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**									
IV	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**8,507,180,970**			**1,405,588,790**			**2,528,039,548**			**3,933,628,338**	**46.24**	**9,200,476,964**				
10	**7.01.03.2.02**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**8,060,763,970**			**1,369,568,790**			**2,357,764,648**			**3,727,333,438**	46.24	**8,503,778,064**				
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1 Kegiatan		10,000,000			-						-	-	3,000,000				Lurah Batutulis
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1 Kegiatan		10,000,000			-						-	-	4,772,000				Lurah Bojongkerta
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1 Kegiatan		10,000,000			-						-	-	6,500,000				Lurah Bondongan
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah		1 Kegiatan		10,000,000			-						-	-	5,000,000				Lurah Cikaret

		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1 Kegiatan		10,000,000			-						-	4,669,500			Lurah Cipaku
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1 Kegiatan		10,000,000			-						-	3,737,800			Lurah Empang
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1 Kegiatan		10,000,000			-						-	3,321,800			Lurah Genteng
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1 Kegiatan		10,000,000			-						-	2,500,000			Lurah Harjasari
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1 Kegiatan		10,000,000			-						-	2,859,500			Lurah Kertamaya
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah		1 Kegiatan		10,000,000			-						-	2,994,500			Lurah Lawanggintung

		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1 Kegiatan		10,000,000			-						-	2,089,500			Lurah Muarasari
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1 Kegiatan		10,000,000			-						-	2,094,500			Lurah Mulyaharja
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1 Kegiatan		10,000,000			-						-	2,319,500			Lurah Pakuan
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1 Kegiatan		10,000,000			-						-	4,953,300			Lurah Pamoyanan
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1 Kegiatan		10,000,000			-						-	7,121,700			Lurah Rancamaya
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah		1 Kegiatan		10,000,000			-						-	3,724,700			Lurah Ranggamekar

		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan		148,800,000			-			21,380,100			**21,380,100**	**14.37**	**95,819,767**			Lurah Batutulis
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan		196,900,000			-						-	-	73,813,846			Lurah Bojongkerta
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan		357,950,000			173,804,390	6 Bulan		125,913,242			**299,717,632**	83.73	374,098,432			Lurah Bondongan
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan		214,400,000			-						-	-	73,891,799			Lurah Cikaret
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan		193,750,000			-			32,250,700			**32,250,700**	16.65	104,595,999			Lurah Cipaku
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan		203,200,000			-	6 Bulan		34,585,900			**34,585,900**	17.02	109,096,005			Lurah Empang
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan		328,384,000			3,179,800	6 Bulan		187,235,238			**190,415,038**	57.99	264,682,729			Lurah Genteng
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan		190,100,000			-			188,677,799			**188,677,799**	99.25	262,878,201			Lurah Harjasari
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan		223,550,000			-	6 Bulan		13,911,200			**13,911,200**	6.22	88,463,151			Lurah Kertamaya
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan		126,500,000			-	6 Bulan		62,784,257			**62,784,257**	49.63	136,913,569			Lurah Lawanggintung
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan		171,963,970			2,880,000	6 Bulan		25,098,660			**27,978,660**	16.27	106,122,459			Lurah Muarasari

	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan		321,700,000			28,352,600	6 Bulan		208,524,329			**236,876,929**	73.63	311,307,085			Lurah Mulyaharja
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan		136,800,000			-	6 Bulan		136,209,236			**136,209,236**	99.57	210,087,636			Lurah Pakuan
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan		230,600,000			680,000	6 Bulan		158,151,337			**158,831,337**	68.88	232,547,136			Lurah Pamoyanan
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan		162,900,000			-	6 Bulan					**-**	-	74,477,750			Lurah Rancamaya
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan		209,750,000			-			17,473,400			**17,473,400**	8.33	91,782,950			Lurah Ranggamekar
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %		232,800,000	100 %		58,200,000	6 Bulan		58,200,000	25%		**116,400,000**	50.00	317,700,000			Lurah Batutulis
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %		160,800,000	100 %		40,200,000	6 Bulan		40,200,000	25%		**80,400,000**	50.00	219,600,000			Lurah Bojongkerta
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %		513,000,000	100 %		184,022,000	6 Bulan		109,500,000	25%		**293,522,000**	57.22	432,722,000			Lurah Bondongan
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %		340,200,000	100 %		85,050,000	6 Bulan		85,050,000	25%		**170,100,000**	50.00	464,100,000			Lurah Cikaret
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %		360,000,000	100 %		88,950,000	6 Bulan		88,950,000	25%		**177,900,000**	49.42	489,900,000			Lurah Cipaku
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %		568,200,000	100 %		142,050,000	6 Bulan		142,050,000	25%		**284,100,000**	50.00	774,900,000			Lurah Empang
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %		264,316,000	100 %		51,150,000	6 Bulan		110,569,250	25%		**161,719,250**	61.18	339,319,250			Lurah Genteng

	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %		265,800,000	100 %		66,450,000	6 Bulan		66,450,000	25%		**132,900,000**	50.00	363,300,000			Lurah Harjasari
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %		160,200,000	100 %		40,050,000	6 Bulan		40,050,000	25%		**80,100,000**	50.00	219,300,000			Lurah Kertamaya
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %		201,000,000	100 %		50,250,000	6 Bulan		50,250,000	25%		**100,500,000**	50.00	274,500,000			Lurah Lawanggintung
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %		192,600,000	100 %		48,150,000	6 Bulan		48,150,000	25%		**96,300,000**	50.00	263,100,000			Lurah Muarasari
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %		319,200,000	100 %		79,800,000	6 Bulan		79,800,000	25%		**159,600,000**	50.00	435,600,000			Lurah Mulyaharja
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %		145,200,000	100 %		36,300,000	6 Bulan		36,300,000	25%		**72,600,000**	50.00	198,600,000			Lurah Pakuan
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %		300,600,000	100 %		75,150,000	6 Bulan		75,150,000	25%		**150,300,000**	50.00	410,700,000			Lurah Pamoyanan
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %		172,800,000	100 %		43,200,000	6 Bulan		43,200,000	25%		**86,400,000**	50.00	236,400,000			Lurah Rancamaya
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %		286,800,000	100 %		71,700,000	6 Bulan		71,700,000	25%		**143,400,000**	50.00	391,800,000			Lurah Ranggamekar
												Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)			**46.24**					
												Predikat kinerja			**Sangat Tinggi**					
11	**5-7.01.03.2.03**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Perseta se Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan**	**12 Bulan**		**446,417,000**			**36,020,000**	**3 Bulan**		**170,274,900**			**206,294,900**	**46.21**	**835,898,900**			**Kecamatan Bogor Selatan**

	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Operasional PKK	12 Bulan		242,910,000			36,020,000	3 Bulan		51,210,000			**87,230,000**	35.91	262,460,000			Kecamatan Bogor Selatan
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		12 Bulan			3 Bulan			6 Bulan		53,823,000	3 Bulan		**53,823,000**		433,023,000			
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	MTQ Tk. Kecamatan	12 Bulan		60,107,000			-			-			**-**	-	56,049,000			
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		12 Bulan		123,400,000			-			53,681,900			**53,681,900**	43.50	65,206,900			
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan		20,000,000			-			11,560,000			**11,560,000**	57.80	19,160,000			Kecamatan Bogor Selatan
												Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)			**46.21**					
												Predikat kinerja			**Sangat Tinggi**					
V	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**119,999,000**			**72,620,000**			**27,213,000**			**99,833,000**	**83.19**	**140,142,000**			
12	**5-7.01.04.2.01**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**1 Tahun**		**119,999,000**	**3 Bulan**		**72,620,000**	**6 Bulan**		**27,213,000**	**3 Bulan**		**99,833,000**	**83.19**	**140,142,000**			**Kecamatan Bogor Selatan**

	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pembinaan dan pelatihan Linmas	1 Tahun		119,999,000	3 Bulan		72,620,000	6 Bulan		27,213,000	3 Bulan		**99,833,000**	83.19		140,142,000			Kecamatan Bogor Selatan
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												**83.19**								
Predikat kinerja												**Sangat Tinggi**								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												**83.19**								
Predikat kinerja												**Sangat Tinggi**								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												**70.66**								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												**Sangat Tinggi**								
						43,584,989,680			**10,761,592,336**			**12,052,755,154**			**22,814,347,490**	**52.34**		**57,564,801,731**		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**52.34**	**%**												

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BOGOR SELATANTAHUN 2024

3.1 Unsur Pemerintahan Umum

Bahwa Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor menjalankan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Dengan tambahan Anggaran yang diajukan dalam renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp. 27.385.032.059,- dengan rincian sub kegiatannya adalah sebagai berikut;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 29.332.987.482.-
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp. 54.661.000.-
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 72.805.200
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 525.600.000
e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 120.000.000,-
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 160.244.000-
g. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Rp. 233.560.900,-
h. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp. 217.710.000,-
i. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Rp. 84.445.800,-

Dengan Rincian Perubahan Renja Sebagaimana terlampir dalam lampiran matrik renja.

.

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR

TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		KECAMATAN BOGOR SELATAN							48.221.719.978,00	33.981.455.810,00	36.804.323.385,00							51.303.788.938,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							47.531.346.378,00	33.075.378.910,00	35.978.000.685,00							50.323.788.938,00	
	2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							47.531.346.378,00	33.075.378.910,00	35.978.000.685,00							50.323.788.938,00	
1	2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase lembaga kemasyarat yg aktif di kelurahan				75 %	75 %	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00							7.200.000,00	

	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan Yang aktif	-			100 %	100 %	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kecamatan Bogor Selatan		7.200.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			7.200.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
2	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah				A Point	A Point	47.524.746.378,00	33.068.778.910,00	35.971.400.685,00							50.316.588.938,00	
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan secara tepat waktu dan sesuai regulasi	-			100 %	100 %	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Selatan		47.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17 Dokumen	17 Dokumen	28.935.300,00	28.935.300,00	28.935.300,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAER	-	Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	KECAMATAN BOGOR

																	AH (PAD)					SELATAN
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	6.064.700,00	6.064.700,00	6.064.700,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	24.624.420.843,00	26.118.177.907,00	26.118.177.907,00			-	Reformasi Birokrasi	-		25.895.500.378,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				134 Orang/bulan	134 Orang/bulan	24.557.769.843,00	26.051.526.907,00	29.332.987.482,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Reformasi Birokrasi			25.825.500.378,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	66.651.000,00	66.651.000,00	54.661.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	975.533.900,00	990.184.900,00	990.184.900,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Selatan		910.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	96.700.000,00	96.700.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	57.964.000,00	57.964.000,00	72.805.200,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	553.500.000,00	590.850.000,00	525.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	84.426.900,00	84.426.900,00	84.426.900,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	179.643.000,00	160.244.000,00	160.244.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			175.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	-			100 %	100 %	19.364.686.900,00	1.725.293.800,00	1.725.293.800,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Selatan		19.480.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				292 Unit	277 Unit	450.930.500,00	492.807.400,00	492.807.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			450.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				144 Unit	145 Unit	793.756.400,00	796.046.400,00	796.046.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			900.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	18.120.000.000,00	436.440.000,00	120.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			18.130.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	1.183.324.735,00	2.891.672.303,00	2.891.672.303,00			-	Reformasi Birokrasi	-		2.364.088.560,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	265.313.375,00	298.643.375,00	298.643.375,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			333.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	918.011.360,00	2.593.028.928,00	2.593.028.928,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Reformasi Birokrasi			2.031.088.560,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik	-			100 %	100 %	1.341.780.000,00	1.308.450.000,00	1.308.450.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Selatan		1.620.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	236.100.000,00	236.100.000,00	236.100.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				140 Unit	140 Unit	95.400.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAER	-	Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	KECAMATAN BOGOR

																AH (PAD)							SELATAN
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	1.010.280.000,00	976.950.000,00	976.950.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			1.100.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							690.373.600,00	906.076.900,00	826.322.700,00							980.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							690.373.600,00	906.076.900,00	826.322.700,00							980.000.000,00	
3	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan Pelayanan administrasi di tingkat kecamatan				100 100 % %	100 100 % %	210.590.600,00	339.660.900,00	324.060.900,00							275.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-			100 %	100 %	120.590.600,00	249.160.900,00	249.160.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Selatan		125.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	120.590.600,00	249.160.900,00	233.560.900,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			125.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	-			100 %	100 %	90.000.000,00	90.500.000,00	90.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Selatan		150.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	90.500.000,00	90.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
4	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan				100 %	100 %	359.783.000,00	446.417.000,00	382.262.800,00							555.000.000,00	

						KELURAHAN																
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	-			100 %	100 %	359.783.000,00	446.417.000,00	446.417.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kecamatan Bogor Selatan		555.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	166.110.000,00	242.910.000,00	217.710.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			250.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	73.673.000,00	60.107.000,00	60.107.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			160.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	123.400.000,00	84.445.800,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAER	-	Peningkatan Kualitas Hidu			120.000.000,00	KECAMATAN BOGOR

							Ekonomi Masyarakat										AH (PAD)		p Masyarakat				SELATAN
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
5	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan				90 %	90 %	120.000.000,00	119.999.000,00	119.999.000,00							150.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	-			90 %	90 %	120.000.000,00	119.999.000,00	119.999.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kecamatan Bogor Selatan		150.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara				3 Laporan	3 Laporan	120.000.000,00	119.999.000,00	119.999.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masy			150.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

							Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												arakat				
						KELURAHAN BATUTULIS						477.607.440,00	477.600.000,00	477.600.000,00							486.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00							86.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00							86.000.000,00	
6	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3,50 Point	3,50 Point	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00							86.000.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00			-		Reformasi Birokrasi	Kelurahan Batutulis		86.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAER	-		Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN BOGOR

																AH (PAD)						SELATAN
	2	13	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59.000.000,00	58.860.000,00	58.860.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			59.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							391.607.440,00	391.600.000,00	391.600.000,00							400.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							391.607.440,00	391.600.000,00	391.600.000,00							400.000.000,00	
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan Pelayanan administrasi ditingkat kelurahan				100 100 % %	100 100 % %	391.607.440,00	391.600.000,00	391.600.000,00							400.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	391.607.440,00	391.600.000,00	391.600.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Batutulis		400.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	148.807.440,00	148.800.000,00	148.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			150.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	232.800.000,00	232.800.000,00	232.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			240.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
						KELURAHAN BOJONGKERTA									465.710.710,00	465.700.000,00	465.700.000,00						612.520.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00						103.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00						103.000.000,00	

8	2	1 3	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3,50 Point	3,50 Point	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00							103.000.000,00	
	2	1 3	0 1	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bojongkerta		103.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	1 3	0 1	2. 0 6	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	1 3	0 1	2. 0 6	0 0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	1 3	0 1	2. 0 6	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			68.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

	2	1 3	0 1	2. 0 6	0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							367.710.710,00	367.700.000,00	367.700.000,00							509.520.000,00	
	7	0 1				KECAMATAN							367.710.710,00	367.700.000,00	367.700.000,00							509.520.000,00	
9	7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi ditingkat kelurahan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan				100 100 % %	100 100 % %	367.710.710,00	367.700.000,00	367.700.000,00							509.520.000,00	
	7	0 1	0 3	2. 0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	367.710.710,00	367.700.000,00	367.700.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Bojongkerta		509.520.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	0 1	0 3	2. 0 2	0 0 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	3 Unit	196.910.710,00	196.900.000,00	196.900.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			329.520.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	160.800.000,00	160.800.000,00	160.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			170.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
						KELURAHAN BONDONGAN							728.979.348,00	978.950.000,00	978.950.000,00							861.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00							191.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00							191.000.000,00	
10	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3,50 Point	3,50 Point	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00							191.000.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bondongan		191.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.914.200,00	19.914.200,00	19.914.200,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.616.200,00	6.616.200,00	6.616.200,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			14.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	67.995.000,00	67.995.000,00	67.995.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			130.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.474.600,00	3.474.600,00	3.474.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							630.979.348,00	880.950.000,00	880.950.000,00							670.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							630.979.348,00	880.950.000,00	880.950.000,00							670.000.000,00	

11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan Pelayanan administrasi ditingkat kelurahan				100 100 % %	100 100 % %	630.979.348,00	880.950.000,00	880.950.000,00						670.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	630.979.348,00	880.950.000,00	880.950.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Bondongan		670.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			20.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	182.979.348,00	357.950.000,00	357.950.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Penda	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			200.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

																naan Bagi Kelurahan						
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	438.000.000,00	513.000.000,00	513.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			450.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
						KELURAHAN CIKARET							662.599.190,00	662.600.000,00	662.600.000,00							688.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00							102.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00							102.000.000,00	
12	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3,50 Point	3,50 Point	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00							102.000.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Cikaret		102.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAER	-	Reformasi Birokrasi			21.000.000,00	KECAMATAN BOGOR

																	AH (PAD)						SELATAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			69.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							564.599.190,00	564.600.000,00	564.600.000,00							586.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							564.599.190,00	564.600.000,00	564.600.000,00							586.000.000,00	
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan				100 %	100 %	564.599.190,00	564.600.000,00	564.600.000,00							586.000.000,00	

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	564.599.190,00	564.600.000,00	564.600.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Cikaret		586.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			11.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	214.399.190,00	214.400.000,00	214.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			225.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	340.200.000,00	340.200.000,00	340.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			350.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

						KELURAHAN CIPAKU							661.742.800,00	661.750.000,00	661.750.000,00										711.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00										109.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00										109.000.000,00	
14	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3,50 Point	3,50 Point	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00										109.000.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Cipaku				109.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi				25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi				9.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	67.575.000,00	67.575.000,00	67.575.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.425.000,00	3.425.000,00	3.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							563.742.800,00	563.750.000,00	563.750.000,00							602.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							563.742.800,00	563.750.000,00	563.750.000,00							602.000.000,00	
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan Pelayanan administrasi ditingkat kelurahan				100 100 % %	100 100 % %	563.742.800,00	563.750.000,00	563.750.000,00							602.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	563.742.800,00	563.750.000,00	563.750.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Cipaku		602.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			12.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	193.742.800,00	193.750.000,00	193.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			220.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			370.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
						KELURAHAN EMPANG							878.291.000,00	878.300.000,00	878.300.000,00							928.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							96.900.000,00	96.900.000,00	96.900.000,00							118.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							96.900.000,00	96.900.000,00	96.900.000,00							118.000.000,00	
16	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup				3,50 Point	3,50 Point	96.900.000,00	96.900.000,00	96.900.000,00							118.000.000,00	

						KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah																
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	96.900.000,00	96.900.000,00	96.900.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Empang		118.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	66.900.000,00	66.900.000,00	66.900.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			73.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							781.391.000,00	781.400.000,00	781.400.000,00							810.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							781.391.000,00	781.400.000,00	781.400.000,00							810.000.000,00	
17	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi ditingkat kelurahan				100 %	100 %	781.391.000,00	781.400.000,00	781.400.000,00							810.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	781.391.000,00	781.400.000,00	781.400.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Empang		810.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	203.191.000,00	203.200.000,00	203.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			220.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	568.200.000,00	568.200.000,00	568.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			575.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
						KELURAHAN GENTENG							500.713.800,00	700.700.000,00	700.700.000,00							545.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00							120.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00							120.000.000,00	
18	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3,50 Point	3,50 Point	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00							120.000.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Genteng		120.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							402.713.800,00	602.700.000,00	602.700.000,00							425.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							402.713.800,00	602.700.000,00	602.700.000,00							425.000.000,00	
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan				100 %	100 %	402.713.800,00	602.700.000,00	602.700.000,00							425.000.000,00	

						DAN KELURAHAN																
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	402.713.800,00	602.700.000,00	602.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Genteng		425.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	188.113.800,00	328.384.000,00	328.384.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			200.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

																	Kelurahan						
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	204.600.000,00	264.316.000,00	264.316.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			215.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
						KELURAHAN HARJASARI							563.902.900,00	563.900.000,00	563.900.000,00							588.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00							102.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00							102.000.000,00	
20	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3,50 Point	3,50 Point	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00							102.000.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Harjasari		102.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI	-	Reformasi Birokrasi			21.000.000,00	KECAMATAN BOGO

							Kantor yang Disediakan										DAERAH (PAD)						R SELATAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			69.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							465.902.900,00	465.900.000,00	465.900.000,00							486.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							465.902.900,00	465.900.000,00	465.900.000,00							486.000.000,00	
21	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi ditingkat kelurahan				100 %	100 %	465.902.900,00	465.900.000,00	465.900.000,00							486.000.000,00	

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	465.902.900,00	465.900.000,00	465.900.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Harjasari		486.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			11.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	190.102.900,00	190.100.000,00	190.100.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			200.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				59 Pokmas / Ormas	59 Pokmas / Ormas	265.800.000,00	265.800.000,00	265.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			275.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

						KELURAHAN KERTAMAYA							503.739.600,00	503.750.000,00	503.750.000,00												555.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00												124.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00												124.000.000,00	
22	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3,50 Point	3,50 Point	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00												124.000.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00			-		Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kertamaya					124.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Reformasi Birokrasi					25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Reformasi Birokrasi					10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																						

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			85.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							393.739.600,00	393.750.000,00	393.750.000,00							431.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							393.739.600,00	393.750.000,00	393.750.000,00							431.000.000,00	
23	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan Pelayanan administrasi ditingkat kelurahan				100 100 % %	100 100 % %	393.739.600,00	393.750.000,00	393.750.000,00							431.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	393.739.600,00	393.750.000,00	393.750.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Kertamaya		431.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			11.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	223.539.600,00	223.550.000,00	223.550.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			250.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	160.200.000,00	160.200.000,00	160.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			170.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
						KELURAHAN LAWANG GINTUNG							423.442.776,00	423.495.000,00	423.495.000,00							512.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							85.995.000,00	85.995.000,00	85.995.000,00							112.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							85.995.000,00	85.995.000,00	85.995.000,00							112.000.000,00	
24	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup				3,50 Point	3,50 Point	85.995.000,00	85.995.000,00	85.995.000,00							112.000.000,00	

						KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah																
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	85.995.000,00	85.995.000,00	85.995.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Lawang Gintung		112.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.995.000,00	58.995.000,00	58.995.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							337.447.776,00	337.500.000,00	337.500.000,00							400.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							337.447.776,00	337.500.000,00	337.500.000,00							400.000.000,00	
25	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi ditingkat kelurahan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan				100 100 % %	100 100 % %	337.447.776,00	337.500.000,00	337.500.000,00							400.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	337.447.776,00	337.500.000,00	337.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Lawang Gintung		400.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	126.447.776,00	126.500.000,00	126.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			175.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	201.000.000,00	201.000.000,00	201.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			210.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
						KELURAHAN MUARASARI							460.543.670,00	460.528.970,00	460.528.970,00							518.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							85.965.000,00	85.965.000,00	85.965.000,00							101.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							85.965.000,00	85.965.000,00	85.965.000,00							101.000.000,00	
26	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3,50 Point	3,50 Point	85.965.000,00	85.965.000,00	85.965.000,00							101.000.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	85.965.000,00	85.965.000,00	85.965.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Muarasari		101.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.965.000,00	58.965.000,00	58.965.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			65.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							374.578.670,00	374.563.970,00	374.563.970,00							417.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							374.578.670,00	374.563.970,00	374.563.970,00							417.000.000,00	
27	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Pelayanan administrasi ditingkat kelurahan				100 %	100 %	374.578.670,00	374.563.970,00	374.563.970,00							417.000.000,00	

						DAN KELURAHAN																
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	374.578.670,00	374.563.970,00	374.563.970,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Muarasari		417.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			12.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	171.978.670,00	171.963.970,00	171.963.970,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			200.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	192.600.000,00	192.600.000,00	192.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAER	-	Peningkatan Kualitas Hidu			205.000.000,00	KECAMATAN BOGOR

							Masyarakat di Kelurahan										AH (PAD)		p Masyarakat				SELATAN
						KELURAHAN MULYAHARJA						760.888.270,00	760.900.000,00	760.900.000,00							808.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00							121.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00							121.000.000,00	
28	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3,50 Point	3,50 Point	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00							121.000.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Mulyaharja		121.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.922.000,00	9.922.000,00	9.922.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.359.000,00	2.359.000,00	2.359.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

	2	1 3	0 1	2. 0 6	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	94.350. 000,00	94.350. 000,00	94.350. 000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	Refor masi Birok rasi			100.000 .000,00	KECA MATA N BOGO R SELAT AN
	2	1 3	0 1	2. 0 6	0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.369.0 00,00	3.369.0 00,00	3.369.0 00,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	Refor masi Birok rasi			4.000.0 00,00	KECA MATA N BOGO R SELAT AN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							650.888 .270,00	650.900 .000,00	650.900 .000,00							687.000 .000,00	
	7	0 1				KECAMATAN							650.888 .270,00	650.900 .000,00	650.900 .000,00							687.000 .000,00	
2 9	7	0 1	0 3			PROGRA M PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DESA DAN KELURA HAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan				100 %	100 %	650.888 .270,00	650.900 .000,00	650.900 .000,00							687.000 .000,00	
	7	0 1	0 3	2. 0 2		Kegiatan Pemberd ayaan Keluraha n	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	650.888 .270,00	650.900 .000,00	650.900 .000,00			-	Penin gkata n Kuali tas Hidu p Masy arak at	Kelur ahan Mulya harja		687.000 .000,00	KECA MATA N BOGO R SELAT AN
	7	0 1	0 3	2. 0 2	0 0 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			12.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	321.688.270,00	321.700.000,00	321.700.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			350.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	319.200.000,00	319.200.000,00	319.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			325.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
						KELURAHAN PAKUAN							377.981.800,00	377.970.000,00	377.970.000,00							406.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							85.970.000,00	85.970.000,00	85.970.000,00							90.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							85.970.000,00	85.970.000,00	85.970.000,00							90.000.000,00	
30	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup				3,50 Point	3,50 Point	85.970.000,00	85.970.000,00	85.970.000,00							90.000.000,00	

						KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah																
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	85.970.000,00	85.970.000,00	85.970.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Pakuan		90.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			21.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.970.000,00	58.970.000,00	58.970.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							292.011.800,00	292.000.000,00	292.000.000,00							316.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							292.011.800,00	292.000.000,00	292.000.000,00							316.000.000,00	
31	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan				100 %	100 %	292.011.800,00	292.000.000,00	292.000.000,00							316.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	292.011.800,00	292.000.000,00	292.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Pakuan		316.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			11.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	136.811.800,00	136.800.000,00	136.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			150.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	145.200.000,00	145.200.000,00	145.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			155.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
						KELURAHAN PAMOYANAN							651.147.508,00	651.161.300,00	651.161.300,00							705.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							109.961.300,00	109.961.300,00	109.961.300,00							130.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							109.961.300,00	109.961.300,00	109.961.300,00							130.000.000,00	
32	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3,50 Point	3,50 Point	109.961.300,00	109.961.300,00	109.961.300,00							130.000.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	109.961.300,00	109.961.300,00	109.961.300,00			-	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Pamoyanan		130.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.999.300,00	19.999.300,00	19.999.300,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.982.000,00	6.982.000,00	6.982.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	79.980.000,00	79.980.000,00	79.980.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			85.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							541.186.208,00	541.200.000,00	541.200.000,00							575.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							541.186.208,00	541.200.000,00	541.200.000,00							575.000.000,00	
33	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Pelayanan administrasi ditingkat kelurahan Partisipasi masyarakat dalam				100 100 % %	100 100 % %	541.186.208,00	541.200.000,00	541.200.000,00							575.000.000,00	

						DAN KELURAHAN	pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan																
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	541.186.208,00	541.200.000,00	541.200.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Pamoyanan		575.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				32 Unit	32 Unit	230.586.208,00	230.600.000,00	230.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			250.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	300.600.000,00	300.600.000,00	300.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			310.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
						KELURAHAN RANCAMAYA							431.168.000,00	431.678.600,00	431.678.600,00							472.500.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							85.978.600,00	85.978.600,00	85.978.600,00							102.500.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							85.978.600,00	85.978.600,00	85.978.600,00							102.500.000,00	
34	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3,50 Point	3,50 Point	85.978.600,00	85.978.600,00	85.978.600,00							102.500.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	85.978.600,00	85.978.600,00	85.978.600,00			-	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Rancamaya		102.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.998.600,00	19.998.600,00	19.998.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	58.980.000,00	58.980.000,00	58.980.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			65.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			2.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							345.189.400,00	345.700.000,00	345.700.000,00							370.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							345.189.400,00	345.700.000,00	345.700.000,00							370.000.000,00	
35	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan Pelayanan administrasi ditingkat kelurahan				100 100 % %	100 100 % %	345.189.400,00	345.700.000,00	345.700.000,00							370.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	345.189.400,00	345.700.000,00	345.700.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masy	Kelurahan Rancamaya		370.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

																			arakat				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	162.389.400,00	162.900.000,00	162.900.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			175.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	172.800.000,00	172.800.000,00	172.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			180.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
						KELURAHAN RANGGAMEKAR									604.575.200,00	604.550.000,00	604.550.000,00						636.100.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00						105.100.000,00	

	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00											105.100.000,00	
36	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3,50 Point	3,50 Point	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00											105.100.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Ranggamekar			105.100.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi				21.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi				12.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAER	-	Reformasi Birokrasi				69.000.000,00	KECAMATAN BOGOR

																	AH (PAD)						SELATAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			3.100.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							506.575.200,00	506.550.000,00	506.550.000,00							531.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							506.575.200,00	506.550.000,00	506.550.000,00							531.000.000,00	
37	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan				100 %	100 %	506.575.200,00	506.550.000,00	506.550.000,00							531.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	506.575.200,00	506.550.000,00	506.550.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Ranggamekar		531.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan				1 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masy			11.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

							Pembangunan di Kelurahan												arakat				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	209.775.200,00	209.750.000,00	209.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			225.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	286.800.000,00	286.800.000,00	286.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			295.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
											J U M L A H		**48.221.719.978,00**	**33.981.455.810,00**	**36.804.323.385,00**							**51.303.788.938,00**	

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Tahun 2024 merupakan tindaklanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Bogor SelatanKota Bogor Tahun 2019-2024 dan hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor SelatanTahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor

Perubahan Renja Kecamatan Bogor SelatanKota Bogor Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan progran kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Bogor SelatanKota Bogor Tahun 2024 dalam menjalankan peran dan fungsinya

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Bogor Barat Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan

adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan,.

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2024 Disusun Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Barat Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor yaitu "Mewujudkan kota bogor yang ramah keluarga". Disamping itu dalam rangka penyelarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota bogor dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2024 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2024 dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2024 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2024.

1.2.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2024 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor sampai dengan triwulan dua tahun 2024.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2024 dengan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2024.

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Renja Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2024 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 184 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan

23. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor ..... Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor ..... Seri .....);

1.4 Sistematika Perubahan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan Renja
1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan
1.3 Dasar Hukum Perubahan Renja
1.4 Sistematika Perubahan Renja

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Barat Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Kecamatan Bogor Barat Tahun 2024

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOGOR BARAT TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Renja Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2024 sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan Kecamatan Bogor Barat. Dalam pelaksanaan program dengan anggaran sebesar Rp. 42.361.935.170,00,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 25.275.801.001,- atau 59,67 %, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan III sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Juni 2024 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan. Adapun Capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah

KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR

TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										1		II		IV													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9				12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100%		16	17
	2.13	PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBER																									

		DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																											
1	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kecamatan yang aktif**	**70**	**%**	**25.749.400**			**-**						**18.389.400**															
			Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah																												
	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyara**	**Persentase partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW, RT) Tingkat Kecamatan**	**100**	**%**	**25.749.400**			**42.530.000**						**18.389.400**			**20.039.400**							**64.178.200**		249,2%	Kasi Pemerintahan	

		kat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																											
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Dimiliki	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	25.749.400	5	Lembaga	42.530.000	1	Lembaga	25.749.400	1	Lembaga	18.389.400,00	1	Lembaga	20.039.400		5	Lembaga	38.428.800	149,24%	149,24%		64.178.200		249,2%		
			Honorarium (BOP) FK LPM Kecamatan	12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan			24	Bulan									

		Hukum Adat	Sosialisasi Bagi Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan Tingkat Kecamatan	2	Kegiatan		2	Kegiatan		2	Kegiatan		2	Kegiatan		2	Kegiatan			4	Kegiatan											
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																							**49,75 %**									
Predikat kinerja																							**Sangat Rendah**									
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																							**49,75 %**									
Predikat kinerja																							**Sangat Rendah**									
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan**	**100**	**%**	**8.509.700.210**			**7.120.397.883**																	**12.144.151.192**		**142,71 %**		
			Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan	**100**	**%**																									
			Optimalisasi pemberdayaan masyarakat	**100**	**%**																									

			tingkat kecamatan																										
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan**	**100**	**%**	**7.957.114.910**			**6.159.169.083**			**7.957.114.910**			**1.202.952.200**			**3.436.365.309**								**10.798.486.592**		**135,71 %**		
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	3.915.800	1	Lembaga Kemasyarakatan	5.816.800	6	Pokmas / Ormas	3.915.800	6	Pokmas / Ormas	0	6	Lembaga Kemasyarakatan	-		12	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00 %	0,00 %		5.816.800		148,5 %	Lurah Balumbang Jaya	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	185.558.500	2	Unit	110.999.916	2	Unit	185.558.500	2	Unit	0	2	Unit	184.753.550		4	Unit	184.753.550	99,57%	99,57%		295.753.466			Lurah Balumbang Jaya	

	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	265.800.000	1	Pokmas / Ormas	230.400.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	265.800.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	66450000	3	Pokmas / Ormas	132.900.000		6	Pokmas / Ormas	199.350.000	75,00%	75,00%		429.750.000		161,7%	Lurah Balumbang Jaya	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	11.040.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	11.789.900	6	Pokmas / Ormas	11.040.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	0	6	Lembaga Kemasyarakatan	-		12	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		11.789.900		106,8%	Lurah Bubulak	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	150.000.000	1	Unit	94.937.177	2	Unit	150.000.000	2	Unit	0	2	Unit	26.418.000		4	Unit	26.418.000	17,61%	17,61%		121.355.177			Lurah Bubulak	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Lembaga Kemasyarakatan	357.397.300	1	Pokmas / Ormas	248.400.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	357.397.300	5	Pokmas / Ormas	71700000	5	Pokmas / Ormas	152.400.000		10	Pokmas / Ormas	224.100.000	62,70%	62,70%		472.500.000		132,2%	Lurah Bubulak	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	4.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.807.200	6	Pokmas / Ormas	4.500.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	0	6	Lembaga Kemasyarakatan	-		12	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		7.807.200		173,5%	Lurah Cilendek Barat	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	206.917.600	2	Unit	164.548.422	2	Unit	206.917.600	2	Unit	0	2	Unit			4	Unit	-	0,00%	0,00%		164.548.422		79,5%	Lurah Cilendek Barat	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	444.256.200	1	Pokmas / Ormas	372.000.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	444.256.200	3	Pokmas / Ormas	1078500000	3	Pokmas / Ormas	226.163.000		6	Pokmas / Ormas	334.013.000	75,18%	75,18%		706.013.000		158,9%	Lurah Cilendek Barat	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	4.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	4.350.000	6	Pokmas / Ormas	4.500.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	0	6	Lembaga Kemasyarakatan	-		12	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		4.350.000		96,7%	Lurah Cilendek Timur	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	200.900.000	1	Unit	145.253.292	2	Unit	200.900.000	2	Unit	0	2	Unit	13.264.500		4	Unit	13.264.500	6,60%	6,60%		158.517.792		78,9%	Lurah Cilendek Timur	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	327.600.000	1	Pokmas / Ormas	283.168.100	3	Lembaga Kemasyarakatan	327.600.000	3	Pokmas / Ormas	81900000	3	Pokmas / Ormas	163.800.000		6	Pokmas / Ormas	245.700.000	75,00%	75,00%		528.868.100		161,4%	Lurah Cilendek Timur	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	9.750.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	9.950.000	6	Pokmas / Ormas	9.750.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	0	6	Lembaga Kemasyarakatan	-		12	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		9.950.000		102,1%	Lurah Curug	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	150.000.000	1	Unit	129.056.922	2	Unit	150.000.000	2	Unit	0	2	Unit	126.069.977,00		4	Unit	126.069.977	84,05%	84,05%		255.126.899		170,1%	Lurah Curug	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	339.748.800	1	Pokmas / Ormas	260.400.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	339.748.800	3	Pokmas / Ormas	79875000	3	Pokmas / Ormas	166.375.000		6	Pokmas / Ormas	246.250.000	72,48%	72,48%		506.650.000		149,1%	Lurah Curug	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	3.915.800	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.878.600	6	Pokmas / Ormas	3.915.800	6	Lembaga Kemasyarakatan	0	6	Lembaga Kemasyarakatan	-		12	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		3.878.600		99,1%	Lurah Curug Mekar	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	179.511.500	1	Unit	144.350.955	2	Unit	179.511.500	2	Unit	0	2	Unit	24.217.670		4	Unit	24.217.670	13,49%	13,49%		168.568.625		93,9%	Lurah Curug Mekar	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	308.400.000	1	Pokmas / Ormas	266.400.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	308.400.000	3	Pokmas / Ormas	77100000	3	Pokmas / Ormas	154.200.000		6	Pokmas / Ormas	231.300.000	75,00%	75,00%		497.700.000		161,4%	Lurah Curug Mekar	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	4.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000	6	Pokmas / Ormas	4.500.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	0	6	Lembaga Kemasyarakatan	-		12	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		4.500.000		100,0%	Lurah Gunung Batu	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	217.850.000	3	Unit	154.636.828	2	Unit	217.850.000	2	Unit	0	2	Unit	13.131.300		4	Unit	13.131.300	6,03%	6,03%		167.768.128		77,0%	Lurah Gunung Batu	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	359.400.000	1	Pokmas / Ormas	310.800.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	359.400.000	3	Pokmas / Ormas	89850000	3	Pokmas / Ormas	179.700.000		6	Pokmas / Ormas	269.550.000	75,00%	75,00%		580.350.000		161,5%	Lurah Gunung Batu	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	8.034.200	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.489.800	3	Pokmas / Ormas	8.034.200	3	Lembaga Kemasyarakatan	0	3	Lembaga Kemasyarakatan	-		6	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00 %	0,00 %		7.489.800		93,2%	Lurah Loji	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	136.001.200	2	Unit	142.306.988	2	Unit	136.001.200	2	Unit	0	2	Unit	17.935.380		4	Unit	17.935.380	13,19%	13,19%		160.242.368		117,8 %	Lurah Loji	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	340.968.700	1	Pokmas / Ormas	252.000.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	340.968.700	3	Pokmas / Ormas	81032500	3	Pokmas / Ormas	170.346.000		6	Pokmas / Ormas	251.378.500	73,72%	73,72%		503.378.500		147,6 %	Lurah Loji	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	4.790.600	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.118.800	6	Pokmas / Ormas	4.790.600	6	Lembaga Kemasyarakatan	0	6	Lembaga Kemasyarakatan	-		12	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00 %	0,00 %		6.118.800		127,7 %	Lurah Marga Jaya	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	111.740.600	1	Unit	40.954.804	1	Unit	111.740.600	1	Unit	0	1	Unit	111.361.650		2	Unit	111.361.650	99,66%	99,66%		152.316.454		136,3 %	Lurah Marga Jaya	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	183.359.300	1	Pokmas / Ormas	140.400.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	183.359.300	3	Pokmas / Ormas	40500000	3	Pokmas / Ormas	94.855.400		6	Pokmas / Ormas	135.355.400	73,82%	73,82%		275.755.400		150,4 %	Lurah Marga Jaya	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	7.558.200	1	Lembaga Kemasyarakatan	5.400.000	6	Pokmas / Ormas	7.558.200	6	Lembaga Kemasyarakatan	0	6	Lembaga Kemasyarakatan	-		12	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		5.400.000		71,4%	Lurah Menteng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	175.954.940	1	Unit	185.471.240	2	Unit	175.954.940	2	Unit	0	2	Unit	18.037.500		4	Unit	18.037.500	10,25%	10,25%		203.508.740		115,7%	Lurah Menteng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	433.800.000	1	Pokmas / Ormas	375.600.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	433.800.000	3	Pokmas / Ormas	10845000	3	Pokmas / Ormas	216.900.000		6	Pokmas / Ormas	325.350.000	75,00%	75,00%		700.950.000		161,6%	Lurah Menteng	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Pokmas / Ormas	5.042.300	1	Lembaga Kemasyarakatan	13.163.000	1	Pokmas / Ormas	5.042.300	1	Lembaga Kemasyarakatan	0	1	Lembaga Kemasyarakatan			2	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00 %	0,00 %		13.163.000		261,1 %	Lurah Pasir Jaya	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	211.001.200	1	Unit	199.359.913	3	Unit	211.001.200	3	Unit		3	Unit	92.922.402		6	Unit	92.922.402	44,04%	44,04%		292.282.315		138,5 %	Lurah Pasir Jaya	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	365.039.100	1	Pokmas / Ormas	304.800.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	365.039.100	3	Pokmas / Ormas	84350000	3	Pokmas / Ormas	171.500.000		6	Pokmas / Ormas	255.850.000	70,09%	70,09%		560.650.000		153,6 %	Lurah Pasir Jaya	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	9.262.400	1	Lembaga Kemasyarakatan	9.050.000	6	Pokmas / Ormas	9.262.400	6	Lembaga Kemasyarakatan	0	6	Lembaga Kemasyarakatan	-		12	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		9.050.000		97,7%	Lurah Pasir Kuda	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	183.154.470	3	Unit	136.380.356	2	Unit	183.154.470	2	Unit	22222200	2	Unit	182.684.732,00		4	Unit	204.906.932	111,88%	111,88%		341.287.288		186,3%	Lurah Pasir Kuda	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	316.222.500	1	Pokmas / Ormas	272.400.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	316.222.500	3	Pokmas / Ormas	82122500	3	Pokmas / Ormas	159.822.500		6	Pokmas / Ormas	241.945.000	76,51%	76,51%		514.345.000		162,7%	Lurah Pasir Kuda	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	3.102.300	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.900.000	6	Pokmas / Ormas	3.102.300	6	Lembaga Kemasyarakatan	0	6	Lembaga Kemasyarakatan	-		12	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00 %	0,00 %		3.900.000		125,7 %	Lurah Pasir Mulya	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	111.499.000	1	Unit	52.890.821	1	Unit	111.499.000	1	Unit	0	1	Unit	109.964.898		2	Unit	109.964.898	98,62%	98,62%		162.855.719		146,1 %	Lurah Pasir Mulya	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	143.994.000	1	Pokmas / Ormas	118.800.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	143.994.000	3	Pokmas / Ormas	3420000	3	Pokmas / Ormas	68.400.000		6	Pokmas / Ormas	102.600.000	71,25%	71,25%		221.400.000		153,8 %	Lurah Pasir Mulya	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	9.749.900	1	Lembaga Kemasyarakatan	5.750.000	6	Pokmas / Ormas	9.749.900	6	Lembaga Kemasyarakatan	0	6	Lembaga Kemasyarakatan	-		12	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		5.750.000		59,0%	Lurah Semplak	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	138.080.500	2	Unit	103.805.436	2	Unit	138.080.500	2	Unit	0	2	Unit	17.982.000		4	Unit	17.982.000	13,02%	13,02%		121.787.436		88,2%	Lurah Semplak	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	364.099.100	1	Pokmas / Ormas	201.600.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	364.099.100	3	Pokmas / Ormas	58200000	3	Pokmas / Ormas	116.400.000		6	Pokmas / Ormas	174.600.000	47,95%	47,95%		376.200.000		103,3%	Lurah Semplak	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	8.435.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	4.892.000	6	Pokmas / Ormas	8.435.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	0	6	Lembaga Kemasyarakatan			12	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		4.892.000		58,0%	Lurah Sindang Barang	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	144.794.000	1	Unit	110.814.619	2	Unit	144.794.000	2	Unit	0	2	Unit	24.120.300		4	Unit	24.120.300	16,66%	16,66%		134.934.919		93,2%	Lurah Sindang Barang	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	394.728.800	1	Pokmas / Ormas	229.200.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	394.728.800	3	Pokmas / Ormas	66300000	3	Pokmas / Ormas	132.600.000		6	Pokmas / Ormas	198.900.000	50,39%	50,39%		428.100.000		108,5%	Lurah Sindang Barang	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	3.735.900	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.529.900	6	Pokmas / Ormas	3.735.900	6	Lembaga Kemasyarakatan	0	6	Lembaga Kemasyarakatan	-		12	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00 %	0,00 %		6.529.900		174,8 %	Lurah Situ Gede	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	150.000.000	1	Unit	90.247.294	2	Unit	150.000.000	2	Unit	0	2	Unit	26.423.550		4	Unit	26.423.550	17,62%	17,62%		116.670.844		77,8%	Lurah Situ Gede	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	257.505.200	1	Pokmas / Ormas	176.400.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	257.505.200	3	Pokmas / Ormas	50850000	3	Pokmas / Ormas	140.716.000		6	Pokmas / Ormas	191.566.000	74,39%	74,39%		367.966.000		142,9 %	Lurah Situ Gede	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																							**37,00 %**						
Predikat kinerja																							**Sangat Rendah**						
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemberday**	**0,3**	**%**	**552.585.300**			**961.228.800**			**552.585.300**													**1.345.664.600**		**243,52 %**		

		Tingkat Kecamatan	**aan Pembangunan Wilayah**																								
			Terlaksananya pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	**3,4**	**Point**									**113.563.400**			**270.872.400**										
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga Kemasyarakatan	454.699.700	1	Lembaga Kemasyarakatan	415.600.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	454.699.700	1	Lembaga Kemasyarakatan	79.580.700	1	Lembaga Kemasyarakatan	214.755.700		2	Lembaga Kemasyarakatan	294.336.400	64,73%	64,73%		709.936.400		156,1%	Kasi Kemasyarakatan	
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	504.419.600	1	Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	15.894.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	29.004.000		2	Lembaga Kemasyarakatan	44.898.000	74,83%	74,83%		549.317.600		915,5%	Kasi Kemasyarakatan	

	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	23.112.700	1	Laporan	23.209.400	1	Laporan	23.112.700	1	Laporan	15.588.700	1	Laporan	23.112.700		2	Laporan	38.701.400	167,45 %	167,45 %		61.910.800		267,9 %	Kasi Perekonomian	
	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	14.772.900	1	Laporan	17.999.800	1	Laporan	14.772.900	1	Laporan	2.500.000	1	Laporan	4.000.000		2	Laporan	6.500.000	44,00%	44,00%		24.499.800		165,8 %	Kasi Perekonomian	
																	Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)					**87,75 %**								
																	Predikat kinerja					**Tinggi**								
																	Rata-rata capaian kinerja Program (%)					**87,75 %**								
																	Predikat kinerja					**Tinggi**								
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan**	**0,88**	**%**	**126.803.900**			**100.799.400**			**126.803.900**			**36.143.525**			**62.165.450**								**199.108.375**					
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan**	**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di**	**3,4**	**Point**	**126.803.900**			**100.799.400**																	**199.108.375**		**157,02 %**			

		Ketertiban Umum	**wilayah Kecamatan**																										
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	126.803.900	1	Laporan	100.799.400	1	Laporan	126.803.900	1	Laporan	36.143.525	1	Laporan	62.165.450		2	Laporan	98.308.975	77,53%	77,53%		199.108.375		157,02%	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**77,53%**							
Predikat kinerja																						**Tinggi**							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																						**77,53%**							
Predikat kinerja																						**Tinggi**							

4	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**A**	**Point**	**33.591.141.660**	**100**	**%**	**30.487.241.474**																	**59.180.694.648**		**0,02 %**	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	
			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	**3,4**	**Point**										**2.443.400**			**4.071.500**												
	7.01.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja kecamatan secara tepat waktu**	**100**	**%**	**9.999.800**			**16.781.500**			**9.999.800**													**23.296.400**				
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	6.999.800	2	Dokumen	11.789.500	1	Dokumen	6.999.800	1	Dokumen	2.443.400	1	Dokumen	2.443.400		2	Dokumen	4.886.800	69,81%	69,81%		16.676.300		238,24%		

	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	3.000.000	1	Dokumen	4.992.000	1	Laporan	3.000.000	1	Laporan	-	1	Laporan	1.628.100		2	Dokumen	1.628.100	54,27%	54,27%		6.620.100		220,67%		
	Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**62,04%**							
	Predikat kinerja																						**Sangat Rendah**							
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**26.537.508.948**	**100**	**%**	**25.097.173.169**			**26.537.508.948**			**7.730.612.869**			**15.620.091.794**							**48.411.377.632**		**182,43%**	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133	orang/bulan	26.486.582.348			25.095.726.169	133	orang/bulan	26.486.582.348	##	Orang/bulan	7.717.826.269	133	Orang/bulan	15.597.825.194		###	Orang/bulan	23.315.651.463	88,03%	88,03%		48.411.377.632		182,78%		

	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.230.000			1.447.000	1	Laporan	1.230.000	1	Laporan	-	1	Laporan	-		2	Laporan	-	0,00%	0,00%		1.447.000		117,64%		
	7.01.01.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	orang/bulan	49.696.600				1	orang/bulan	49.696.600	1		12.786.600	1		22.266.600		2	Laporan	35.053.200	70,53%	70,53%		35.053.200		70,53 %		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																							**44,01 %**								
Predikat kinerja																							**Sangat Rendah**								

	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**%**	**3.404.848.200**	**100**	**%**	**2.849.170.369**			**3.404.848.200**			**609.809.800**			**2.057.155.560**							**5.516.135.729**		**162,01 %**		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.962.400	1	Paket	48.323.000	1	Paket	11.962.400	1	Paket	11.962.400	1	Paket	11.962.400,00		2	Paket	23.924.800	200,00 %	200,00 %		72.247.800		603,96%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	960.104.400	1	Paket	973.151.364	12	Paket	960.104.400	12	Paket	69.527.100	12	Paket	735.850.260,00		24	Paket	805.377.360	83,88%	83,88%		1.778.528.724		185,24%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	28.188.500	1	Paket	58.240.443	1	Paket	28.188.500	1	Paket	28.188.500	1	Paket	28.188.500,00		2	Paket	56.377.000	200,00 %	200,00 %		114.617.443		406,61%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	152.400.000	1	Paket	267.847.800	1	Paket	152.400.000	1	Paket	17.100.000	1	Paket	17.100.000,00		2	Paket	34.200.000	22,44%	22,44%		302.047.800		198,19%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	32.356.800	1	Paket	43.341.600	1	Paket	32.356.800	1	Paket	900.000	1	Paket	7.394.900,00		2	Paket	8.294.900	25,64%	25,64%		51.636.500		159,58%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	36.000.000	1	Dokumen	59.660.000	4	Dokumen	36.000.000	4	Dokumen	5.600.000	4	Dokumen	11.400.000		8	Dokumen	17.000.000	47,22%	47,22%		76.660.000		212,94%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	570.097.000	1	Laporan	206.470.962	1	Laporan	570.097.000	1	Laporan	69.690.000	1	Laporan	427.104.000		2	Laporan	496.794.000	87,14%	87,14%		703.264.962		123,36%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.975.500	1	Paket	1900500	1	Paket	3.975.500	1	Paket	1.350.600	1	Paket	2.025.900,00		2	Paket	3.376.500	84,93%	84,93%		5.277.000		132,74%	Lurah Balumbang Jaya	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.003.000	1	Paket	9.857.200	1	Paket	14.003.000	1	Paket	4.660.200	1	Paket	6.990.300,00		2	Paket	11.650.500	83,20%	83,20%		21.507.700		153,59%	Lurah Balumbang Jaya	

	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	9.940.900	1	Paket	10.166.600	1	Paket	9.940.900	1	Paket	3.152.300	1	Paket	5.495.000,00		2	Paket	8.647.300	86,99%	86,99%		18.813.900		189,26%	Lurah Balumbang Jaya	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	66.450.000	1	Paket	47.295.000	1	Paket	66.450.000	1	Paket	12.590.000	1	Paket	31.570.000,00		2	Paket	44.160.000	66,46%	66,46%		91.455.000		137,63%	Lurah Balumbang Jaya	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.983.300	1	Paket	5.303.200	1	Paket	1.983.300	1	Paket	495.000	1	Paket	990.000,00		2	Paket	1.485.000	74,88%	74,88%		6.788.200		342,27%	Lurah Balumbang Jaya	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.311.600	1	Paket	1.078.900	1	Paket	2.311.600	1	Paket	1.008.500	1	Paket	1.351.700,00		2	Paket	2.360.200	102,10%	102,10%		3.439.100		148,78%	Lurah Bubulak	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	15.703.400	1	Paket	15.393.700	1	Paket	15.703.400	1	Paket	4.309.500	1	Paket	8.040.200,00		2	Paket	12.349.700	78,64%	78,64%		27.743.400		176,67%	Lurah Bubulak	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	12.000.000	1	Paket	9.274.600	1	Paket	12.000.000	1	Paket	5.234.800	1	Paket	8.307.500,00		2	Paket	13.542.300	112,85%	112,85%		22.816.900		190,14%	Lurah Bubulak	

			yang Disediakan																									
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	76.555.000	1	Paket	67.485.000	1	Paket	76.555.000	1	Paket	16.565.000	1	Paket	36.415.000,00		2	Paket	52.980.000	69,21%	69,21%		120.465.000		157,36%	Lurah Bubulak	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.400.000	1	Paket	4.377.600	1	Paket	2.400.000	1	Paket	467.400	1	Paket	1.145.700,00		2	Paket	1.613.100	67,21%	67,21%		5.990.700		249,61%	Lurah Bubulak	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.818.400	1	Paket	2655900	1	Paket	3.818.400	1	Paket	3.798.000	1	Paket	3.798.000,00		2	Paket	7.596.000	198,93%	198,93%		10.251.900		268,49%	Lurah Cilendek Barat	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.885.800	1	Paket	11.907.400	1	Paket	14.885.800	1	Paket	12.342.500	1	Paket	14.580.500,00		2	Paket	26.923.000	180,86%	180,86%		38.830.400		260,86%	Lurah Cilendek Barat	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	5.081.800	1	Paket	4.209.400	1	Paket	5.081.800	1	Paket	4.920.800	1	Paket	4.920.800,00		2	Paket	9.841.600	193,66%	193,66%		14.051.000		276,50%	Lurah Cilendek Barat	

	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	78.175.000	1	Paket	60.060.000	1	Paket	78.175.000	1	Paket	18.675.000	1	Paket	36.660.000,00		2	Paket	55.335.000	70,78%	70,78%		115.395.000		14 7,61%	Lurah Cilendek Barat	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.539.000	1	Paket	5.065.000	1	Paket	1.539.000	1	Paket	150.000	1	Paket	721.800,00		2	Paket	871.800	56,65%	56,65%		5.936.800		385,76%	Lurah Cilendek Barat	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.480.000	1	Paket	1894000	1	Paket	4.480.000	1	Paket	1.074.000	1	Paket	1.074.000,00		2	Paket	2.148.000	47,95%	47,95%		4.042.000		90,22%	Lurah Cilendek Timur	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.757.800	1	Paket	10.207.500	1	Paket	14.757.800	1	Paket	3.765.000	1	Paket	7.345.500,00		2	Paket	11.110.500	75,29%	75,29%		21.318.000		144,45%	Lurah Cilendek Timur	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	6.195.000	1	Paket	4.667.000	1	Paket	6.195.000	1	Paket	1.637.000	1	Paket	3.039.000,00		2	Paket	4.676.000	75,48%	75,48%		9.343.000		150,82%	Lurah Cilendek Timur	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	1	Paket	75.750.000	1	Paket	64530000	1	Paket	75.750.000	1	Paket	18.900.000	1	Paket	36.375.000,00		2	Paket	55.275.000	72,97%	72,97%		119.805.000		158,16%	Lurah Cilendek Timur	

			Kantor yang Disediakan																									
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.317.200	1	Paket	1.506.600	1	Paket	2.317.200	1	Paket	-	1	Paket	669.000,00		2	Paket	669.000	28,87%	28,87%		2.175.600		93,89%	Lurah Cilendek Timur	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	992.000	1	Paket	930.000	1	Paket	992.000	1	Paket	992.000	1	Paket	992.000,00		2	Paket	1.984.000	200,00%	200,00%		2.914.000		293,75%	Lurah Curug	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.254.300	1	Paket	12.193.100	1	Paket	11.254.300	1	Paket	2.691.000	1	Paket	4.485.000,00		2	Paket	7.176.000	63,76%	63,76%		19.369.100		172,10%	Lurah Curug	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	3.534.000	1	Paket	7.917.500	1	Paket	3.534.000	1	Paket	883.500	1	Paket	1.472.500,00		2	Paket	2.356.000	66,67%	66,67%		10.273.500		290,70%	Lurah Curug	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	64.265.000	1	Paket	52.200.000	1	Paket	64.265.000	1	Paket	14.970.000	1	Paket	33.855.000,00		2	Paket	48.825.000	75,97%	75,97%		101.025.000		157,20%	Lurah Curug	

	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	4.184.700	1	Paket	2.767.800	1	Paket	4.184.700	1	Paket	948.600	1	Paket	1.948.600,00		2	Paket	2.897.200	69,23%	69,23%		5.665.000		135,37%	Lurah Curug	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.114.500	1	Paket	1914000	1	Paket	3.114.500	1	Paket	-	1	Paket	1.494.300,00		2	Paket	1.494.300	47,98%	47,98%		3.408.300		109,43%	Lurah Curug Mekar	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.704.900	1	Paket	9.831.500	1	Paket	20.704.900	1	Paket	5.171.100	1	Paket	10.342.200,00		2	Paket	15.513.300	74,93%	74,93%		25.344.800		122,41%	Lurah Curug Mekar	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	12.232.300	1	Paket	13.088.900	1	Paket	12.232.300	1	Paket	2.938.300	1	Paket	6.036.300,00		2	Paket	8.974.600	73,37%	73,37%		22.063.500		180,37%	Lurah Curug Mekar	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	65.760.000	1	Paket	45.945.000	1	Paket	65.760.000	1	Paket	15.750.000	1	Paket	37.350.000,00		2	Paket	53.100.000	80,75%	80,75%		99.045.000		150,62%	Lurah Curug Mekar	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1	Paket	2.272.500	1	Paket	2.690.000	1	Paket	2.272.500	1	Paket	567.900	1	Paket	1.135.800,00		2	Paket	1.703.700	74,97%	74,97%		4.393.700		193,34%	Lurah Curug Mekar	

		Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan																										
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.991.300	1	Paket	4.034.400	1	Paket	4.991.300	1	Paket	2.345.200	1	Paket	2.345.200,00		2	Paket	4.690.400	93,97%	93,97%		8.724.800		174,80%	Lurah Gunung Batu	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.199.300	1	Paket	19.847.600	1	Paket	12.199.300	1	Paket	4.434.800	1	Paket	8.065.900,00		2	Paket	12.500.700	102,47%	102,47%		32.348.300		265,17%	Lurah Gunung Batu	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	4.368.200	1	Paket	7.270.000	1	Paket	4.368.200	1	Paket	3.208.000	1	Paket	4.368.200,00		2	Paket	7.576.200	173,44%	173,44%		14.846.200		339,87%	Lurah Gunung Batu	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	78.360.000	1	Paket	58.800.000	1	Paket	78.360.000	1	Paket	16.790.000	1	Paket	33.100.000,00		2	Paket	49.890.000	63,67%	63,67%		108.690.000		138,71%	Lurah Gunung Batu	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.518.500	1	Paket	3.017.800	1	Paket	3.518.500	1	Paket	317.700	1	Paket	1.619.200,00		2	Paket	1.936.900	55,05%	55,05%		4.954.700		140,82%	Lurah Gunung Batu	

	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.976.000	1	Paket	892.800	1	Paket	2.976.000	1	Paket	992.000	1	Paket	1.984.000,00		2	Paket	2.976.000	100,00%	100,00%		3.868.800		130,00%	Lurah Loji	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.885.600	1	Paket	11.617.400	1	Paket	10.885.600	1	Paket	3.723.000	1	Paket	5.435.900,00		2	Paket	9.158.900	84,14%	84,14%		20.776.300		190,86%	Lurah Loji	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	4.429.800	1	Paket	3.706.200	1	Paket	4.429.800	1	Paket	1.632.100	1	Paket	1.632.100,00		2	Paket	3.264.200	73,69%	73,69%		6.970.400		157,35%	Lurah Loji	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	74.375.000	1	Paket	41.625.000	1	Paket	74.375.000	1	Paket	17.355.000	1	Paket	34.710.000,00		2	Paket	52.065.000	70,00%	70,00%		93.690.000		125,97%	Lurah Loji	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.409.300	1	Paket	1.597.200	1	Paket	2.409.300	1	Paket	602.100	1	Paket	1.204.200,00		2	Paket	1.806.300	74,97%	74,97%		3.403.500		141,27%	Lurah Loji	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene	1	Paket	4.649.500	1	Paket	1913500	1	Paket	4.649.500	1	Paket	2.852.500	1	Paket	4.649.500,00		2	Paket	7.502.000	161,35%	161,35%		9.415.500		202,51%	Lurah Marga Jaya	

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	rangan Bangunan Kantor yang Disediakan																									
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	16.591.200	1	Paket	9.844.800	1	Paket	16.591.200	1	Paket	4.147.800	1	Paket	8.295.600,00		2	Paket	12.443.400	75,00%	75,00%		22.288.200		134,34%	Lurah Marga Jaya	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	5.322.000	1	Paket	7.875.000	1	Paket	5.322.000	1	Paket	1.330.500	1	Paket	2.661.000,00		2	Paket	3.991.500	75,00%	75,00%		11.866.500		222,97%	Lurah Marga Jaya	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	60.125.000	1	Paket	48.780.000	1	Paket	60.125.000	1	Paket	15.335.000	1	Paket	36.065.000,00		2	Paket	51.400.000	85,49%	85,49%		100.180.000		166,62%	Lurah Marga Jaya	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.236.700	1	Paket	3.440.900	1	Paket	3.236.700	1	Paket	809.400	1	Paket	1.618.500,00		2	Paket	2.427.900	75,01%	75,01%		5.868.800		181,32%	Lurah Marga Jaya	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.492.700	1	Paket	3421800	1	Paket	2.492.700	1	Paket	712.200	1	Paket	1.254.400,00		2	Paket	1.966.600	78,89%	78,89%		5.388.400		216,17%	Lurah Menteng	

	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.740.500	1	Paket	11.216.000	1	Paket	14.740.500	1	Paket	4.521.800	1	Paket	7.205.600,00		2	Paket	11.727.400	79,56%	79,56%		22.943.400		155,65%	Lurah Menteng	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.298.800	1	Paket	8.510.700	1	Paket	1.298.800	1	Paket	324.700	1	Paket	489.700,00		2	Paket	814.400	62,70%	62,70%		9.325.100		717,98%	Lurah Menteng	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	87.570.000	1	Paket	77.175.000	1	Paket	87.570.000	1	Paket	14.625.000	1	Paket	35.325.000,00		2	Paket	49.950.000	57,04%	57,04%		127.125.000		145,17%	Lurah Menteng	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.840.800	1	Paket	6.784.600	1	Paket	2.840.800	1	Paket	680.000	1	Paket	1.373.300,00		2	Paket	2.053.300	72,28%	72,28%		8.837.900		311,11%	Lurah Menteng	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.816.800	1	Paket	2299600	1	Paket	4.816.800	1	Paket	1.262.400	1	Paket	2.408.400,00		2	Paket	3.670.800	76,21%	76,21%		5.970.400		123,95%	Lurah Pasir Jaya	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengk	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa	1	Paket	18.684.400	1	Paket	11.116.500	1	Paket	18.684.400	1	Paket	4.638.900	1	Paket	9.469.700,00		2	Paket	14.108.600	75,51%	75,51%		25.225.100		135,01%	Lurah Pasir Jaya	

		apan Kantor	n Kantor yang Disediakan																										
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	9.169.800	1	Paket	4.324.700	1	Paket	9.169.800	1	Paket	1.701.000	1	Paket	4.017.800,00		2	Paket	5.718.800	62,37%	62,37%		10.043.500		109,53%	Lurah Pasir Jaya	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	70.950.000	1	Paket	42.695.000	1	Paket	70.950.000	1	Paket	16.680.000	1	Paket	36.765.000,00		2	Paket	53.445.000	75,33%	75,33%		96.140.000		135,50%	Lurah Pasir Jaya	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.336.700	1	Paket	1.806.600	1	Paket	2.336.700	1	Paket	862.400	1	Paket	1.443.600,00		2	Paket	2.306.000	98,69%	98,69%		4.112.600		176,00%	Lurah Pasir Jaya	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	998.200	1	Paket	2.790.000	1	Paket	998.200	1	Paket	289.800	1	Paket	579.600,00		2	Paket	869.400	87,10%	87,10%		3.659.400		366,60%	Lurah Pasir Kuda	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.715.000	1	Paket	17.106.400	1	Paket	12.715.000	1	Paket	3.893.400	1	Paket	6.539.400,00		2	Paket	10.432.800	82,05%	82,05%		27.539.200		216,59%	Lurah Pasir Kuda	

	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	4.775.600	1	Paket	7.889.000	1	Paket	4.775.600	1	Paket	1.365.700	1	Paket	2.617.500,00		2	Paket	3.983.200	83,41%	83,41%		11.872.200		248,60%	Lurah Pasir Kuda	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	82.155.000	1	Paket	49.950.000	1	Paket	82.155.000	1	Paket	16.995.000	1	Paket	42.015.000,00		2	Paket	59.010.000	71,83%	71,83%		108.960.000		132,63%	Lurah Pasir Kuda	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.278.800	1	Paket	3.275.800	1	Paket	2.278.800	1	Paket	450.000	1	Paket	1.108.800,00		2	Paket	1.558.800	68,40%	68,40%		4.834.600		212,16%	Lurah Pasir Kuda	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.991.800	1	Paket	701.400	1	Paket	2.991.800	1	Paket	782.500	1	Paket	1.371.100,00		2	Paket	2.153.600	71,98%	71,98%		2.855.000		95,43%	Lurah Pasir Mulya	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	13.980.500	1	Paket	8.045.800	1	Paket	13.980.500	1	Paket	3.984.600	1	Paket	7.430.300,00		2	Paket	11.414.900	81,65%	81,65%		19.460.700		139,20%	Lurah Pasir Mulya	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	5.371.400	1	Paket	4.442.400	1	Paket	5.371.400	1	Paket	1.460.200	1	Paket	2.915.300,00		2	Paket	4.375.500	81,46%	81,46%		8.817.900		164,16%	Lurah Pasir Mulya	

			yang Disediakan																									
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	68.710.000	1	Paket	29.250.000	1	Paket	68.710.000	1	Paket	14.475.000	1	Paket	33.765.000,00		2	Paket	48.240.000	70,21%	70,21%		77.490.000		112,78%	Lurah Pasir Mulya	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.824.000	1	Paket	1.870.400	1	Paket	1.824.000	1	Paket	511.800	1	Paket	1.008.600,00		2	Paket	1.520.400	83,36%	83,36%		3.390.800		185,90%	Lurah Pasir Mulya	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	992.000	1	Paket	1.041.600	1	Paket	992.000	1	Paket	198.400	1	Paket	396.800,00		2	Paket	595.200	60,00%	60,00%		1.636.800		165,00%	Lurah Semplak	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.254.300	1	Paket	12.950.300	1	Paket	11.254.300	1	Paket	2.837.000	1	Paket	5.156.700,00		2	Paket	7.993.700	71,03%	71,03%		20.944.000		186,10%	Lurah Semplak	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	3.534.000	1	Paket	10.251.400	1	Paket	3.534.000	1	Paket	744.200	1	Paket	1.577.700,00		2	Paket	2.321.900	65,70%	65,70%		12.573.300		355,78%	Lurah Semplak	

	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	78.265.000	1	Paket	28.575.000	1	Paket	78.265.000	1	Paket	18.840.000	1	Paket	38.130.000,00		2	Paket	56.970.000	72,79%	72,79%		85.545.000		109,30%	Lurah Semplak	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	4.184.700	1	Paket	5.366.400	1	Paket	4.184.700	1	Paket	1.050.000	1	Paket	2.130.000,00		2	Paket	3.180.000	75,99%	75,99%		8.546.400		204,23%	Lurah Semplak	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	7.758.000	1	Paket	7.031.500	1	Paket	7.758.000	1	Paket	3.445.600	1	Paket	4.635.600,00		2	Paket	8.081.200	104,17%	104,17%		15.112.700		194,80%	Lurah Sindang Barang	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.166.000	1	Paket	12.324.000	1	Paket	11.166.000	1	Paket	3.657.000	1	Paket	5.762.000,00		2	Paket	9.419.000	84,35%	84,35%		21.743.000		194,73%	Lurah Sindang Barang	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	5.851.000	1	Paket	4.005.700	1	Paket	5.851.000	1	Paket	1.535.200	1	Paket	2.973.800,00		2	Paket	4.509.000	77,06%	77,06%		8.514.700		145,53%	Lurah Sindang Barang	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	1	Paket	82.440.000	1	Paket	48.150.000	1	Paket	82.440.000	1	Paket	20.565.000	1	Paket	41.130.000,00		2	Paket	61.695.000	74,84%	74,84%		109.845.000		133,24%	Lurah Sindang Barang	

			Kantor yang Disediakan																									
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	4.350.000	1	Paket	4.342.200	1	Paket	4.350.000	1	Paket	1.087.200	1	Paket	2.174.400,00		2	Paket	3.261.600	74,98%	74,98%		7.603.800		174,80%	Lurah Sindang Barang	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.462.400	1	Paket	3.886.000	1	Paket	2.462.400	1	Paket	615.600	1	Paket	1.231.200,00		2	Paket	1.846.800	75,00%	75,00%		5.732.800		232,81%	Lurah Situ Gede	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	18.612.700	1	Paket	9.187.600	1	Paket	18.612.700	1	Paket	5.162.500	1	Paket	10.130.500,00		2	Paket	15.293.000	82,16%	82,16%		24.480.600		131,53%	Lurah Situ Gede	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2.739.400	1	Paket	3.159.700	1	Paket	2.739.400	1	Paket	1.732.900	1	Paket	2.739.400,00		2	Paket	4.472.300	163,26%	163,26%		7.632.000		278,60%	Lurah Situ Gede	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	77.425.000	1	Paket	30.750.000	1	Paket	77.425.000	1	Paket	18.540.000	1	Paket	41.040.000,00		2	Paket	59.580.000	76,95%	76,95%		90.330.000		116,67%	Lurah Situ Gede	

	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.929.500	1	Paket	3.866.600	1	Paket	2.929.500	1	Paket	731.700	1	Paket	1.463.400,00		2	Paket	2.195.100	74,93%	74,93%		6.061.700		206,92%	Lurah Situ Gede	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																							**85,50 %**							
Predikat kinerja																							**Tinggi**							
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	**100**	**%**	**184.000.000**	**85**	**%**	**48.000.000**			**184.000.000**			**84.000.000**			**84.000.000**								**216.000.000**		**117,39 %**		
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	184.000.000	1	Unit	48.000.000	1	Unit	184.000.000	1	Unit	84.000.000,00	1	Unit	84.000.000		2	Unit	168.000.000	91,30%	91,30%		216.000.000		117,39%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																							**91,30 %**							
Predikat kinerja																							**Sangat Tinggi**							

	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.781.458.712**	**100**	**%**	**2.226.855.780**			**2.781.458.712**			**786.542.470**			**1.398.697.731**								**4.412.095.981**		**158,63%**		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	283.067.000	1	Laporan	207.535.737	1	Laporan	283.067.000	1	Laporan	62.062.618,00	1	Laporan	125.251.491		2	Laporan	187.314.109	66,17%	66,17%		394.849.846		139,49%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	2.498.391.712	1	Laporan	2.019.320.043	1	Laporan	2.498.391.712	1	Laporan	724.479.852,00	1	Laporan	1.273.446.240		2	Laporan	1.997.926.092	79,97%	79,97%		4.017.246.135		160,79%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**73,07%**							
	Predikat kinerja																						**Sangat Rendah**							
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**%**	**673.326.000**	**85**	**%**	**249.260.656**			**673.326.000**														**601.788.906**		**89,38%**		

		ahan Daerah																									
			Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	**100**	**%**									**58.754.300**			**293.773.950**										
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	Unit	191.750.000	1	Unit	183.218.236	45	Unit	191.750.000	45	Unit	44.744.300,00	45	Unit	86.632.700		90	Unit	131.377.000	68,51%	68,51%		314.595.236		164,07%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	214	Unit	81.200.000	1	Unit	66.042.420	214	Unit	81.200.000	##	Unit	14.010.000,00	214	Unit	37.000.000		428	Unit	51.010.000	62,82%	62,82%		117.052.420		144,15%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	7.01.01.2.09.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	Unit	400.376.000				5	Unit	400.376.000	5	Unit	0	5	Unit	170.141.250		10	Unit	170.141.250	42,50%	42,50%		170.141.250		42,50%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
																						Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**57,9**							

			Vertikal Terkait																										
			Presentase Pelayanan Administrasi Lingkup Kecamatan Terlaksana Tepat Waktu	**90**	**%**																								
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	38.540.000	1	Laporan	31.647.600	1	Laporan	38.540.000	1	Laporan	-	1	Laporan	13.500.000		2	Laporan	13.500.000	35,03%	35,03%		45.147.600		117,14%	Kasi Pemerintahan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																							**35,03 %**						
Predikat kinerja																							**Sangat Rendah**						

	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**IKM terhadap penyelenggaraan musrenbang di tingkat kecamatan**	**3,4**	**Point**	**70.000.000**			-			**70.000.000**			**69.801.500**			**69.801.500**								**203.990.100**		**34,32%**		
			Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Pembangunan Wilayah	**35**	**%**																									
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1	Dokumen	70.000.000	1	Dokumen	64.387.100	1	Dokumen	70.000.000	1	Dokumen	69.801.500,00	1	Dokumen	69.801.500,00		2	Dokumen	139.603.000	199,43%	199,43%		203.990.100		291,41%	Kepala Seksi Pengendalian Pembangunan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																							##########							
Predikat kinerja																							**Sangat Tinggi**							

Rata-rata capaian kinerja Program (%)																			**####### #**										
Predikat kinerja																			**Sangat Tinggi**										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																			**78,04 %**										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																			**Tinggi**										
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN			**42.361.935.170**			**37.780.961.037**			**42.361.935.170**			**10.713.012.864**			**23.330.534.594**				**34.043.547.458**		**80,36 %**		**71.569.101.815**		**59,19%**				

Faktor penghambat pencapaian kinerja : pelaksanakan kegiatan kurang tepat waktu, Kurang meratanya kapasitas dan kualitas SDM, Kurang tersedianya data-data yang diperlukan yang tersusun secara sistematis dan akurat, kurang optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): agar mentaati jadwal yang telah dicantumkan dalam Rencana angaran Kerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya): .....**

BAB III
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BOGOR BARAT TAHUN 2024

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Barat Tahun 2024

Bahwa Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tambahan Anggaran yang diajukan dalam renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp. **45,143,398,383.00** dengan rincian sub kegiatannya adalah sebagai berikut;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ANS sebesar Rp. 28.294.706.011.-
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 2.96.134.550.-
c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Rp 969.654.000,-

Dengan Rincian Perubahan Renja Sebagaimana terlampir dalam lampiran matrik renja.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA BOGOR

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN BOGOR BARAT							29.447.922.240,00	32.791.081.160,00	36.672.644.373,00							5.806.900.472,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							25.749.400,00	25.749.400,00	25.749.400,00							25.750.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							25.749.400,00	25.749.400,00	25.749.400,00							25.750.000,00	
316	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase lembaga kemasyarat (lpm, Rt,rw) Tingkat kecamatan yang aktif (Bobar)	75	88:38:00	100	75,00 %	100	25.749.400,00	25.749.400,00	25.749.400,00							25.750.000,00	

	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW, RT) Tingkat Kecamatan	100	100	100	100 %	100	25.749.400,00	25.749.400,00	25.749.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		25.750.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																	

C							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembag a	1 Lembag a	1 Lembag a	1 Lembag a		25.749.4 00,00	25.749.4 00,00	25.749.400,00	Kota Bogo r, Bogo r Barat , Loji	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	Revolu si Mental dan Pemba ngunan Kebud ayaan	Refor masi Birokr asi			25.750. 000,00	KECA MATA N BOG OR BARA T
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							29.422.1 72.840,0 0	32.765.3 31.760,0 0	36.222.012.82 3,00							5.781.1 50.472, 00	
	7	0 1				KECAMATAN							29.422.1 72.840,0 0	32.765.3 31.760,0 0	36.222.012.82 3,00							5.781.1 50.472, 00	
3 1 7	7	0 1	0 1			PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 B Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	28.682.2 60.240,0 0	31.977.4 02.560,0 0	34.435.960.42 3,00							4.991.3 77.272, 00	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	9.999.800,00	9.999.800,00	9.999.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	-		10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.999.800,00	6.999.800,00	6.999.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

							Realisasi Kinerja SKPD															
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	24.899.401.200,00	26.537.508.948,00	28.975.632.611			-	Reformasi Birokrasi	-		136.994.780,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/ bulan	134 Orang/ bulan	134 Orang/ bulan	134 Orang/ bulan	134 Orang/ bulan	24.833.564.400,00	26.486.582.348,00	28.924.706.011	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.249.800,00	1.230.000,00	1.230.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			66.994.780,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	64.587.000,00	49.696.600,00	49.696.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.986.113.800,00	1.791.109.100,00	1.673.988.900,00			-	Reformasi Birokrasi	-		2.504.696.492,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.962.400,00	11.962.400,00	11.962.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			12.019.600,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	1.553.536.100,00	960.104.400,00	960.104.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			1.642.696.652,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	28.188.500,00	28.188.500,00	28.188.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			28.317.500,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	152.400.000,00	152.400.000,00	69.375.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			152.400.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	32.356.800,00	32.356.800,00	28.356.600	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7					NON URUSAN							29.422.172.840,00	32.765.331.760,00	36.222.012.823,00							5.781.150.472,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							29.422.172.840,00	32.765.331.760,00	36.222.012.823,00							5.781.150.472,00	
318	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	28.682.260.240,00	31.977.402.560,00	34.435.960.423,00							4.991.377.272,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.986.113.800,00	1.791.109.100,00	1.673.988.900,00			-	-	-		2.504.696.492,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							29.422.172.840,00	32.765.331.760,00	36.222.012.823,00							5.781.150.472,00	

	7	01				KECAMATAN								29.422.172.840,00	32.765.331.760,00	36.222.012.823,00							5.781.150.472,00	
319	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	28.682.260.240,00	31.977.402.560,00	34.435.960.423,00							4.991.377.272,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.986.113.800,00	1.791.109.100,00	1.673.988.900,00			-	Reformasi Birokrasi	-		2.504.696.492,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			36.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	171.670.000,00	570.097.000,00	540.002.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			600.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	184.000.000,00	184.000.000,00	84.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		184.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	184.000.000,00	184.000.000,00	84.000.000	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			184.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.079.971.440,00	2.781.458.712,00	2.794.526.262			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan		1.370.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

																					Instansi Vertikal Terkait			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	360.002.000,00	283.067.000,00	296.134.550	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7					NON URUSAN							29.422.172.840,00	32.765.331.760,00	36.222.012.823,00								5.781.150.472,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							29.422.172.840,00	32.765.331.760,00	36.222.012.823,00								5.781.150.472,00	
320	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	28.682.260.240,00	31.977.402.560,00	34.435.960.423,00							4.991.377.272,00	

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.079.971.440,00	2.781.458.712,00	36.306.012.823			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		1.370.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							29.422.172.840,00	32.765.331.760,00	36.222.012.823,00							5.781.150.472,00	
	7	01				KECAMATAN							29.422.172.840,00	32.765.331.760,00	36.222.012.823,00							5.781.150.472,00	
321	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	28.682.260.240,00	31.977.402.560,00	34.435.960.423,00							4.991.377.272,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.079.971.440,00	2.781.458.712,00	2.794.526.262			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamata		1.370.000.000,00	KECAMATAN BOG

						Pemerintahan Daerah	urusan pemerintahan daerah														n, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait				OR BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	719.969.440,00	2.498.391.712,00	2.498.391.712	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Reformasi Birokrasi			1.000.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	522.774.000,00	673.326.000,00	1.222.304.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		785.686.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.09	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				

					02																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	45 Unit	45 Unit	45 Unit	45 Unit	191.750.000,00	191.750.000,00	191.750.000	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	214 Unit	214 Unit	214 Unit	214 Unit	214 Unit	81.200.000,00	81.200.000,00	60.900.000	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			85.260.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	249.824.000,00	400.376.000,00	969.654.000	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			400.426.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
322	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelayanan administrasi di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	93.450.000,00	108.540.000,00	108.540.000,00							118.616.600,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	23.450.000,00	38.540.000,00	38.540.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		38.540.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.450.000,00	38.540.000,00	38.540.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			38.540.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat di kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		80.076.600,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			80.076.600,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

323	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	547.462.700,00	552.585.300,00	535.935.600							552.812.700,00	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	547.462.700,00	552.585.300,00	535.935.600			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		552.812.700,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	454.699.900,00	454.699.700,00	454.699.700	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi			454.700.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	60.000.000,00	58.123.200	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			60.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		17.989.800,00	23.112.700,00	23.112.700	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			23.112.700,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.773.000,00	14.772.900,00	14.772.900	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
324	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan	0,90 %	0,86%	0,90 %	0,90 %	0,90 %	98.999.900,00	126.803.900,00	126.803.900,00							118.343.900,00	

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	90 %	86%	90 %	90 %	90 %	98.999.900,00	126.803.900,00	126.803.900,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		118.343.900,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan		98.999.900,00	126.803.900,00		Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			118.343.900,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
						KELURAHAN BALUMBANG JAYA							551.687.000,00	551.627.000,00	551.627.000,00							567.637.850,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							551.687.000,00	551.627.000,00	551.627.000,00							567.637.850,00	
	7	01				KECAMATAN							551.687.000,00	551.627.000,00	551.627.000,00							567.637.850,00	

325	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	96.412.700,00	96.352.700,00	96.352.700,00							112.224.200,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96.412.700,00	96.352.700,00	96.352.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		112.224.200,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.975.500,00	3.975.500,00	3.975.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			3.975.500,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14.003.000,00	14.003.000,00	14.003.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			22.767.200,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.940.900,00	9.940.900,00	9.940.900,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			13.498.200,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	66.510.000,00	66.450.000,00	66.450.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

																mbang Jaya							
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.983.300,00	1.983.300,00	1.983.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			1.983.300,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
326	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	455.274.300,00	455.274.300,00	455.274.300,00							455.413.650,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	455.274.300,00	455.274.300,00	455.274.300,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		455.413.650,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.915.800,00	3.915.800,00	3.915.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			3.915.800,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	185.558.500,00	185.558.500,00	185.558.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			185.697.850,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	265.800.000,00	265.800.000,00	265.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			265.800.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

															g Jaya							
						KELURAHAN BUBULAK							627.397.300,00	627.407.300,00	627.407.300,00						399.560.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							627.397.300,00	627.407.300,00	627.407.300,00						399.560.000,00	
	7	01				KECAMATAN							627.397.300,00	627.407.300,00	627.407.300,00						399.560.000,00	
327	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	108.960.000,00	108.970.000,00	108.970.000,00							134.560.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	108.960.000,00	108.970.000,00	108.970.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		134.560.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.311.600,00	2.311.600,00	2.311.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.703.400,00	15.703.400,00	15.703.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			16.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			13.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	76.545.000,00	76.555.000,00	76.555.000,00	Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			99.160.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			3.400.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
328	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	518.437.300,00	518.437.300,00	518.437.300,00							265.000.000,00	

					KELURAHAN																	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	518.437.300,00	518.437.300,00	518.437.300,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		265.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.040.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			250.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	357.397.300,00	357.397.300,00	357.397.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
						KELURAHAN CILENDEK BARAT							759.173.800,00	759.173.800,00	759.173.800,00							759.173.800,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							759.173.800,00	759.173.800,00	759.173.800,00							759.173.800,00	
	7	01				KECAMATAN							759.173.800,00	759.173.800,00	759.173.800,00							759.173.800,00	
329	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	103.500.000,00	103.500.000,00	103.500.000,00							103.500.000,00	

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	103.500.000,00	103.500.000,00	103.500.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	aparatur kelurahan		103.500.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.818.400,00	3.818.400,00	3.818.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi			3.818.400,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14.885.800,00	14.885.800,00	14.885.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi			14.885.800,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.106.500,00	5.081.800,00	5.081.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi			5.081.800,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	78.150.000,00	78.175.000,00	78.175.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi			78.175.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.539.300,00	1.539.000,00	1.539.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi			1.539.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
330	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	655.673.800,00	655.673.800,00	655.673.800,00							655.673.800,00	

					DESA DAN KELURAHAN	tingkat kelurahan																
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	v			100 %		655.673.800,00	655.673.800,00	655.673.800,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		655.673.800,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			4.500.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	206.917.600,00	206.917.600,00	206.917.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekono			206.917.600,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

																			mi daerah berbasis potensi lokal					
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	444.256.200,00	444.256.200,00	444.256.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Reformasi Birokrasi			444.256.200,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
						KELURAHAN CILENDEK TIMUR							636.507.700,00	636.500.000,00	636.500.000,00							637.187.810,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							636.507.700,00	636.500.000,00	636.500.000,00							637.187.810,00	
	7	01				KECAMATAN							636.507.700,00	636.500.000,00	636.500.000,00							637.187.810,00	
331	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	103.500.000,00	103.500.000,00	103.500.000,00							104.180.000,00	

						Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah																
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	103.500.000,00	103.500.000,00	103.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		104.180.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			4.880.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14.757.800,00	14.757.800,00	14.757.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			14.757.800,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			6.195.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	75.750.000,00	75.750.000,00	75.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			75.760.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.317.200,00	2.317.200,00	2.317.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			2.587.200,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
332	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	533.007.700,00	533.000.000,00	533.000.000,00							533.007.810,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	533.007.700,00	533.000.000,00	533.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		533.007.810,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			4.500.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	200.907.700,00	200.900.000,00	200.900.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			200.907.810,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	327.600.000,00	327.600.000,00	327.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			327.600.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

															Kel/ Desa							
						KELURAHAN CURUG							576.666.200,00	583.728.800,00	583.728.800,00						583.541.200,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							576.666.200,00	583.728.800,00	583.728.800,00						583.541.200,00	
	7	01				KECAMATAN							576.666.200,00	583.728.800,00	583.728.800,00						583.541.200,00	
333	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	91.380.000,00	84.230.000,00	84.230.000,00							98.250.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	91.380.000,00	84.230.000,00	84.230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		98.250.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	992.000,00	992.000,00	992.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			992.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.254.300,00	11.254.300,00	11.254.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			11.254.300,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.534.000,00	3.534.000,00	3.534.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			3.534.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	71.415.000,00	64.265.000,00	64.265.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			78.285.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.184.700,00	4.184.700,00	4.184.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			4.184.700,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
334	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	485.286.200,00	499.498.800,00	499.498.800,00							485.291.200,00	

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	485.286.200,00	499.498.800,00	499.498.800,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		485.291.200,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			9.750.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis			150.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

																			potensi lokal				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	325.536.200,00	339.748.800,00	339.748.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			325.541.200,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
						KELURAHAN CURUG MEKAR							595.911.500,00	595.911.500,00	595.911.500,00							596.101.920,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							595.911.500,00	595.911.500,00	595.911.500,00							596.101.920,00	
	7	01				KECAMATAN							595.911.500,00	595.911.500,00	595.911.500,00							596.101.920,00	
335	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	104.084.200,00	104.084.200,00	104.084.200,00							104.084.200,00	

						Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah																
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	104.084.200,00	104.084.200,00	104.084.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		104.084.200,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.114.500,00	3.114.500,00	3.114.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			3.114.500,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.704.900,00	20.704.900,00	20.704.900,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			20.704.900,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.232.300,00	12.232.300,00	12.232.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			12.232.300,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	65.760.000,00	65.760.000,00	65.760.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			65.760.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.272.500,00	2.272.500,00	2.272.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			2.272.500,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
336	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	491.827.300,00	491.827.300,00	491.827.300,00							492.017.720,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	491.827.300,00	491.827.300,00	491.827.300,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		492.017.720,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.915.800,00	3.915.800,00	3.915.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			3.915.800,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	179.511.500,00	179.511.500,00	179.511.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			179.701.920,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	308.400.000,00	308.400.000,00	308.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			308.400.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

															Mekar							
						KELURAHAN GUNUNG BATU							646.985.300,00	685.187.300,00	685.187.300,00						580.400.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							646.985.300,00	685.187.300,00	685.187.300,00						580.400.000,00	
	7	01				KECAMATAN							646.985.300,00	685.187.300,00	685.187.300,00						580.400.000,00	
337	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	103.437.300,00	103.437.300,00	103.437.300,00							116.500.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	103.437.300,00	103.437.300,00	103.437.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		116.500.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.991.300,00	4.991.300,00	4.991.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			5.500.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.199.300,00	12.199.300,00	12.199.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.368.200,00	4.368.200,00	4.368.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			5.500.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	78.360.000,00	78.360.000,00	78.360.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			85.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.518.500,00	3.518.500,00	3.518.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			5.500.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
338	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	543.548.000,00	581.750.000,00	581.750.000,00							463.900.000,00	

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	543.548.000,00	581.750.000,00	581.750.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		463.900.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			4.500.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	179.648.000,00	217.850.000,00	217.850.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			100.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	

					03																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	359.400.000,00	359.400.000,00	359.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			359.400.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
						KELURAHAN LOJI								580.089.800,00	580.079.800,00	580.079.800,00							580.104.900,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								580.089.800,00	580.079.800,00	580.079.800,00							580.104.900,00	
	7	01				KECAMATAN								580.089.800,00	580.079.800,00	580.079.800,00							580.104.900,00	
339	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	95.085.700,00	95.075.700,00	95.075.700,00							95.100.700,00	

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95.085.700,00	95.075.700,00	95.075.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		95.100.700,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.976.000,00	2.976.000,00	2.976.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			2.976.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.885.600,00	10.885.600,00	10.885.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			10.885.600,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.429.800,00	4.429.800,00		Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			4.429.800,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	74.385.000,00	74.375.000,00	74.375.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			74.400.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.409.300,00	2.409.300,00	2.409.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			2.409.300,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
340	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	485.004.100,00	485.004.100,00	485.004.100,00							485.004.200,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	485.004.100,00	485.004.100,00	485.004.100,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		485.004.200,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.034.200,00	8.034.200,00	8.034.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			8.034.200,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

							Pembangunan di Kelurahan																
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	136.001.200,00	136.001.200,00	136.001.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			136.001.200,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	340.968.700,00	340.968.700,00	340.968.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Penda	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			340.968.800,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

																	naan Bagi Kelurahan						
						KELURAHAN MARGAJAYA							369.735.600,00	389.814.900,00	389.814.900,00							412.432.460,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							369.735.600,00	389.814.900,00	389.814.900,00							412.432.460,00	
	7	01				KECAMATAN							369.735.600,00	389.814.900,00	389.814.900,00							412.432.460,00	
341	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	91.204.400,00	89.924.400,00	89.924.400,00							91.209.400,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	91.204.400,00	89.924.400,00	89.924.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		91.209.400,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.649.500,00	4.649.500,00	4.649.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			4.649.500,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	16.591.200,00	16.591.200,00	16.591.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			16.591.200,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.322.000,00	5.322.000,00	5.322.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			5.322.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	61.405.000,00	60.125.000,00	60.125.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			61.410.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.236.700,00	3.236.700,00	3.236.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			3.236.700,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

342	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	278.531.200,00	299.890.500,00	299.890.500,00							321.223.060,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	278.531.200,00	299.890.500,00	299.890.500,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		321.223.060,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.790.600,00	4.790.600,00	4.790.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			4.790.600,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	111.740.600,00	111.740.600,00	111.740.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			133.073.160,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	162.000.000,00	183.359.300,00	183.359.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			183.359.300,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
						KELURAHAN MENTENG							717.375.940,00	726.255.940,00	726.255.940,00							283.721.240,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							717.375.940,00	726.255.940,00	726.255.940,00							283.721.240,00	
	7	01				KECAMATAN							717.375.940,00	726.255.940,00	726.255.940,00							283.721.240,00	

343	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	100.062.800,00	108.942.800,00	108.942.800,00							100.208.100,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100.062.800,00	108.942.800,00	108.942.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		100.208.100,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.492.700,00	2.492.700,00	2.492.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			2.492.700,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14.740.500,00	14.740.500,00	14.740.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			14.885.800,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.298.800,00	1.298.800,00	1.298.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			1.298.800,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	78.690.000,00	87.570.000,00	87.570.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			78.690.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.840.800,00	2.840.800,00	2.840.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			2.840.800,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
344	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	617.313.140,00	617.313.140,00	617.313.140,00							183.513.140,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	617.313.140,00	617.313.140,00	617.313.140,00			-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi		183.513.140,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

																				Vertikal Terkait				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.558.200,00	7.558.200,00	7.558.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.558.200,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	175.954.940,00	175.954.940,00	175.954.940,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			175.954.940,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	433.800.000,00	0,00	433.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	433.800.000,00	433.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
						KELURAHAN PASIR JAYA							687.040.300,00	687.040.300,00	687.040.300,00							365.039.100,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							687.040.300,00	687.040.300,00	687.040.300,00							365.039.100,00	
	7	01				KECAMATAN							687.040.300,00	687.040.300,00	687.040.300,00							365.039.100,00	
345	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	105.957.700,00	105.957.700,00	105.957.700,00							0,00	

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	105.957.700,00	105.957.700,00	105.957.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	aparatur kelurahan		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.816.800,00	4.816.800,00	4.816.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	18.684.400,00	18.684.400,00	18.684.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.169.800,00	9.169.800,00	9.169.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	70.950.000,00	70.950.000,00	70.950.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.336.700,00	2.336.700,00	2.336.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
346	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	581.082.600,00	581.082.600,00	581.082.600,00							365.039.100,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	581.082.600,00	581.082.600,00	581.082.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		365.039.100,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.042.300,00	5.042.300,00	5.042.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

							Pembangunan di Kelurahan									Pasir Jaya		Kebudayaan						
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	211.001.200,00	211.001.200,00		Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	365.039.100,00	365.039.100,00	365.039.100,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Penda	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			365.039.100,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

																naan Bagi Kelurahan						
						KELURAHAN PASIR KUDA							611.561.970,00	611.561.970,00	611.561.970,00						721.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							611.561.970,00	611.561.970,00	611.561.970,00						721.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							611.561.970,00	611.561.970,00	611.561.970,00						721.000.000,00	
347	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	102.922.600,00	102.922.600,00	102.922.600,00							114.000.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	102.922.600,00	102.922.600,00	102.922.600,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		114.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	998.200,00	998.200,00	998.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.715.000,00	12.715.000,00	12.715.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.775.600,00	4.775.600,00	4.775.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	82.155.000,00	82.155.000,00	82.155.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.278.800,00	2.278.800,00	2.278.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
348	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	508.639.370,00	508.639.370,00	508.639.370,00							607.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	508.639.370,00	508.639.370,00	508.639.370,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		607.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.062.400,00	9.262.400,00	9.262.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	183.154.470,00	183.154.470,00	183.154.470,00	-	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			200.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	320.422.500,00	316.222.500,00	316.222.500,00	Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Penda	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			400.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

																Kel/ Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	naan Bagi Kelurahan						
						KELURAHAN PASIR MULYA							351.473.000,00	351.473.000,00	351.473.000,00							377.070.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							351.473.000,00	351.473.000,00	351.473.000,00							377.070.000,00	
	7	01				KECAMATAN							351.473.000,00	351.473.000,00	351.473.000,00							377.070.000,00	
349	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	92.877.700,00	92.877.700,00	92.877.700,00							94.167.700,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	92.877.700,00	92.877.700,00	92.877.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelaya	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		94.167.700,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

																	nan Publik					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.991.800,00	2.991.800,00	2.991.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			2.991.800,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.980.500,00	13.980.500,00	13.980.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			13.980.500,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.371.400,00	5.371.400,00	5.371.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			5.371.400,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	68.710.000,00	68.710.000,00	68.710.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.824.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			1.824.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
350	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	258.595.300,00	258.595.300,00	258.595.300,00							282.902.300,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	258.595.300,00	258.595.300,00	258.595.300,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		282.902.300,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.102.300,00	3.102.300,00	3.102.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			3.102.300,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

							Pembangunan di Kelurahan								Mulya							
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	111.499.000,00	111.499.000,00	111.499.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			125.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	143.994.000,00	143.994.000,00	143.994.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Penda	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			154.800.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

																naan Bagi Kelurahan						
						KELURAHAN SEMPLAK							517.492.100,00	610.159.500,00	610.159.500,00						616.065.500,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							517.492.100,00	610.159.500,00	610.159.500,00						616.065.500,00	
	7	01				KECAMATAN							517.492.100,00	610.159.500,00	610.159.500,00						616.065.500,00	
351	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	98.235.000,00	98.230.000,00	98.230.000,00							98.235.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98.235.000,00	98.230.000,00	98.230.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		98.235.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	992.000,00	992.000,00	992.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			992.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.254.300,00	11.254.300,00	11.254.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Semu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			11.254.300,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

															a Kel/ Desa								
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.534.000,00	3.534.000,00	3.534.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			3.534.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	78.270.000,00	78.265.000,00	78.265.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			78.270.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.184.700,00	4.184.700,00	4.184.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			4.184.700,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
352	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	419.257.100,00	511.929.500,00	511.929.500,00							517.830.500,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	419.257.100,00	511.929.500,00	511.929.500,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		517.830.500,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.750.000,00	9.749.900,00	9.749.900,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			9.750.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	138.080.500,00	138.080.500,00	138.080.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			138.080.500,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	271.426.600,00	364.099.100,00	364.099.100,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			370.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
						KELURAHAN SINDANG BARANG							571.930.600,00	659.522.800,00	659.522.800,00							340.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							571.930.600,00	659.522.800,00	659.522.800,00							340.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							571.930.600,00	659.522.800,00	659.522.800,00							340.000.000,00	
353	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	111.555.000,00	111.565.000,00	111.565.000,00							0,00	

						Perangkat Daerah																
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	111.555.000,00	111.565.000,00	111.565.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.758.000,00	7.758.000,00	7.758.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.166.000,00	11.166.000,00	11.166.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.851.000,00	5.851.000,00	5.851.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	82.430.000,00	82.440.000,00		Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
354	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	460.375.600,00	547.957.800,00	547.957.800,00							340.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	460.375.600,00	547.957.800,00	547.957.800,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		340.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.435.000,00	8.435.000,00	8.435.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	186.740.600,00	144.794.000,00	144.794.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	265.200.000,00	394.728.800,00	394.728.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			340.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
						KELURAHAN SITU GEDE							515.415.100,00	515.410.100,00	515.410.100,00							257.623.150,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							515.415.100,00	515.410.100,00	515.410.100,00							257.623.150,00	
	7	01				KECAMATAN							515.415.100,00	515.410.100,00	515.410.100,00							257.623.150,00	
355	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	3.50 A Poin Poin	3.89 BB Poin Poin	3.81 A Poin Poin	3.50 A Poin Poin	3.81 A Poin Poin	104.174.000,00	104.169.000,00	104.169.000,00							0,00	

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	104.174.000,00	104.169.000,00	104.169.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.462.400,00	2.462.400,00	2.462.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	18.612.700,00	18.612.700,00	18.612.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.739.400,00	2.739.400,00	2.739.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	77.430.000,00	77.425.000,00	77.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.929.500,00	2.929.500,00	2.929.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
356	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	411.241.100,00	411.241.100,00	411.241.100,00							257.623.150,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	411.241.100,00	411.241.100,00	411.241.100,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		257.623.150,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.735.900,00	3.735.900,00	3.735.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

							Pembangunan di Kelurahan								Semua Kel/ Desa								
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	257.505.200,00	257.505.200,00	257.505.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Penda	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			257.623.150,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

																	naan Bagi Kelurahan					
	J U M L A H											**40.097.733.734**	**42.361.935.170**	**45,143,398,383.00**								

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2024 merupakan tindaklanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Barat Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan progran kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2024 dalam menjalankan peran dan fungsinya.

GG. KECAMATAN BOGOR UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Bogor Utara Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024,

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan,.

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2024 di susun Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Utara Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian Visi Kota Bogor yaitu "Mewujudkan kota bogor yang ramah keluarga". Disamping itu dalam rangka penyelarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota bogor dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2024 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2024 dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2024 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2024.

1.2.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2024 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sampai dengan triwulan dua tahun 2024.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan Pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta

5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2024 dengan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2024.

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Renja Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2024 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 3);

22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 184 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan
23. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor ..... Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor ..... Seri .....);

1.4 Sistematika Perubahan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan Renja
1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan
1.3 Dasar Hukum Perubahan Renja
1.4 Sistematika Perubahan Renja

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Utara Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Kecamatan Bogor Utara Tahun 2024

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOGOR UTARA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Renja Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2024 sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan Kecamatan Bogor Utara. Dalam pelaksanaan program dengan anggaran sebesar Rp. 27.385.032.059,00,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 14.688.301.295,00,- atau 53,64%, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan III sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Juni 2024 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan. Adapun Capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Evaluasi Hasil Renja Triwulan II
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2024

Tujuan 1 : Terwujudnya Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
Indikator Tujuan 1 : Presentase keterlibatan Gender dalam pemberdayaan masyarakat untuk mendukung perencanaan pembangunan wilayah
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat
Indikator Sasaran 1 : Persentase tingkat partisipasi pemberdayaan masyarakat aktif
Tujuan 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
Indikator Tujuan 2 : Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yqng efektif, efisien dan akuntabel di lingkup kecamatan
Indikator Sasaran 2 : Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Kecamatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
													I			II														
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100%		14 = 6+12			15 = 14/5*100%		16	17
	2.13	PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																												
1	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kecamatan yang aktif	75	%	6,600,000	75	%	6,000,000	75	%	6,600,000	3	Bulan	1,500,000	3	Bulan	1,250,000	3	Bulan	2,750,000	100.00%	41.67%			8,750,000					
			Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah																												
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kecamatan yang aktif	75	%	6,600,000	75	%	6,000,000	75	%	6,600,000	3	Bulan	1,500,000	3	Bulan	1,250,000	3	Bulan	2,750,000	100.00%	41.67%			8,750,000		132.58%	Kasi Pemerintahan	
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	6,600,000	1	Lembaga	6,000,000	1	Lembaga	6,600,000	1	Lembaga	1,500,000	1	Lembaga	1,250,000	1	Lembaga	2,750,000	100.00%	41.67%			8,750,000		132.58%		
			Honorarium (BOP) FK LPM Kecamatan	12	Bulan					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		100.00%								
																					Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100.00%						
																					Predikat kinerja		Sangat Tinggi						
																					Rata-rata capaian kinerja Program (%)		100.00%						
																					Predikat kinerja		Sangat Tinggi						
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan	100	%	4,879,676,232			4,026,343,207			5,784,794,900			1,020,250,830			1,748,672,789			2,766,923,919					6,050,666,826		124.00%		
			Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan	100	%																									
			Optimalisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	100	%																									
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	100	%	4,451,545,022			3,812,543,210			5,410,495,800			955,246,130			1,666,483,189			2,621,729,319					5,689,672,529		127.81%		
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Bantarjati	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	32,710,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	8,838,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	9,907,300	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	100.00%	0.00%			8,838,000		27.0%	Lurah Bantarjati	
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1	Kegiatan					1	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan		100.00%			-				
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	197,755,452	1	Unit	75,680,000	1	Unit	224,294,800	1	Unit	-	0	Unit	68,779,748	1	Unit	68,779,748	100.00%	30.66%			144,459,748			Lurah Bantarjati	
			Pembangunan Spitank Komunal RW 01							45	M1		0	M1		0	M1		45	M1		100.00%			-				

	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/ Ormas	342,000,000	3	Pokmas/ Ormas	415,605,000	3	Pokmas/O rmas	415,605,000	3	Pokmas/Orm as	103,800,000	0	Pokmas / Ormas	205,921,200	3	Pokmas / Ormas	309,721,200	100.00%	74.52%			725,326,200		212.1%	Lurah Bantarjati	
			Belanja Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan (RT, RW, LPM)	12	Bulan		3			3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		1	Bulan		33.33%								
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Cibuluh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	9,900,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	9,900,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	11,038,200	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	100.00%	0.00%			9,900,000		100.0%	Lurah Cibuluh	
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1	Kegiatan					1	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan		100.00%								
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	185,421,810	1	Unit	75,000,000	1	Unit	324,043,400	0	Unit	-	1	Unit	114,198,600	1	Unit	114,198,600	100.00%	35.24%			189,198,600			Lurah Cibuluh	
			Pembangunan Spitank Komunal							0	M1		0	M1		83	M1		0	M1		#DIV/0!								
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/ Ormas	226,800,000	3	Pokmas/ Ormas	226,800,000	3	Pokmas/O rmas	307,576,500	3	Pokmas/Orm as	75,450,000	0	Pokmas / Ormas	77,826,200	3	Pokmas / Ormas	153,276,200	100.00%	49.83%			380,076,200		167.6%	Lurah Cibuluh	
			Belanja Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan (RT, RW, LPM)	12	Bulan					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%								
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Cimahpar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	12,070,170	1	Lembaga Kemasyarakatan	9,000,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	13,218,000	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan		1	Lembaga Kemasyarakatan	-	100.00%	0.00%			9,000,000		74.6%	Lurah Cimahpar	
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1	Kegiatan					1	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan		100.00%								
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	302,998,500	1	Unit	170,828,447	2	Unit	150,099,900	0	Unit	26,392,470	1	Unit	122,348,472	2	Unit	148,740,942	100.00%	99.09%			319,569,389		105.5%	Lurah Cimahpar	
			Pembangunan Spitank Komunal							91	M2		0	M2		0	M2		91	M2		100.00%								
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/ Ormas	324,000,000	3	Pokmas/ Ormas	324,000,000	3	Pokmas/O rmas	533,100,000	3	Pokmas/Orm as	120,730,000	0	Pokmas / Ormas	113,955,000	1	Pokmas / Ormas	234,685,000	33.33%	44.02%			558,685,000		172.4%	Lurah Cimahpar	
			Belanja Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan (RT, RW, LPM)	12	Bulan					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%								
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Ciparigi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	23,479,890	1	Lembaga Kemasyarakatan	8,862,100	1	Lembaga Kemasyarakatan	8,862,100	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan		2	Lembaga Kemasyarakatan	-	200.00%	0.00%			8,862,100		37.7%	Lurah Ciparigi	
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1	Kegiatan					1	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan		100.00%								
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	205,117,500	1	Unit	75,000,000	1	Unit	225,000,000	0	Unit	-	1	Unit	39,077,550	1	Unit	39,077,550	100.00%	17.37%			114,077,550		55.6%	Lurah Ciparigi	
			Pembangunan Spitank Komunal							227	M2		0	M2		##	M2		227	M2		100.00%								
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/ Ormas	355,200,000	3	Pokmas/ Ormas	368,400,000	3	Pokmas/O rmas	405,900,000	3	Pokmas/Orm as	97,500,000	0	Pokmas / Ormas	104,475,000	1	Pokmas / Ormas	201,975,000	33.33%	49.76%			570,375,000		160.6%	Lurah Ciparigi	
			Belanja Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan (RT, RW, LPM)	12	Bulan					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%								
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Giluar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	11,781,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	9,000,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10,800,000	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan		1	Lembaga Kemasyarakatan	-	100.00%	0.00%			9,000,000		76.4%	Lurah Giluar	
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1	Kegiatan					1	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan		100.00%								
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	170,000,000	1	Unit	112,797,814	1	Unit	139,450,000	0	Unit	1,725,000	0	Unit	67,488,000	1	Unit	69,213,000	100.00%	49.63%			182,010,814		107.1%	Lurah Giluar	
			Pembangunan Spitank Komunal							120	M1		0	M1		0	M1		120	M1		100.00%								
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/ Ormas	237,600,000	3	Pokmas/ Ormas	237,600,000	3	Pokmas/O rmas	349,050,000	3	Pokmas/Orm as	68,700,000	0	Pokmas / Ormas	92,436,000	1	Pokmas / Ormas	161,136,000	33.33%	46.16%			398,736,000		167.8%	Lurah Giluar	
			Belanja Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan (RT, RW, LPM)	12	Bulan					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%								
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kedung Halang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	14,467,950	1	Lembaga Kemasyarakatan	9,000,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10,357,500	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan		1	Lembaga Kemasyarakatan	-	100.00%	0.00%			9,000,000		62.2%	Lurah Kedung Halang	
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1	Kegiatan					1	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan		100.00%								
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	175,854,000			164,731,567	1	Unit	366,268,100	0	Unit	104,961,910	0	Unit	197,755,805	1	Unit	302,717,715	100.00%	82.65%			467,449,282		265.8%	Lurah Kedung Halang	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/ Ormas	355,200,000			355,200,000	3	Pokmas/O rmas	430,800,000	3	Pokmas/Orm as	105,450,000	0	Pokmas / Ormas	108,150,000	1	Pokmas / Ormas	213,600,000	33.33%	49.58%			568,800,000		160.1%	Lurah Kedung Halang	
			Belanja Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan (RT, RW, LPM)	12	Bulan					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%								
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	119,589,750	1	Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	6,750,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan		1	Lembaga Kemasyarakatan	-	100.00%	0.00%			50,000,000		41.8%	Lurah Tanah Baru	
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1	Kegiatan					1	Kegiatan		1	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan		100.00%								
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	116,214,000			91,260,282	1	Unit	225,000,000	1	Unit	13,236,750	1	Unit	74,523,799	1	Unit	87,760,549	100.00%	39.00%			179,020,831		154.0%	Lurah Tanah Baru	
			Pembangunan Spitank Komunal																												
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/ Ormas	325,200,000	3	Pokmas/ Ormas	325,200,000	3	Pokmas/O rmas	438,850,000	3	Pokmas/Orm as	100,200,000	0	Pokmas / Ormas	114,765,000	1	Pokmas / Ormas	214,965,000	33.33%	48.98%			540,165,000		166.1%	Lurah Tanah Baru	
			Belanja Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan (RT, RW, LPM)	12	Bulan					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%								
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Tegal Gundil	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	52,185,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	38,330,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	12,375,000	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan		1	Lembaga Kemasyarakatan	-	100.00%	0.00%			38,330,000		73.5%	Lurah Tegal Gundil	
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1	Kegiatan					1	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan										
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	200,000,000			195,510,000	1	Unit	225,000,000	1	Unit	-	1	Unit	13,282,815	1	Unit	13,282,815	100.00%	5.90%			208,792,815		104.4%	Lurah Tegal Gundil	
			Pembangunan Spitank Komunal																			0.00%								
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/ Ormas	456,000,000	3	Pokmas/ Ormas	456,000,000	3	Pokmas/O rmas	567,150,000	3	Pokmas/Orm as	137,100,000			151,500,000			288,600,000									
			Belanja Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan (RT, RW, LPM)	12	Bulan																										
																					Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	#DIV/0!								
																					Predikat kinerja	Sangat Tinggi								
																					Rata-rata capaian kinerja Program (%)	#DIV/0!								
																					Predikat kinerja	Sangat Tinggi								

	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**%**	**428,131,210**			**213,799,997**			**374,299,100**			**65,004,700**			**82,189,600**			**145,194,600**					**360,994,297**		**84.32%**		
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga Kemasyarakatan	157,500,210	1	Lembaga Kemasyarakatan	91,300,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	274,299,700	1	Lembaga Kemasyarakatan	38,220,000	0	Lembaga Kemasyarakatan	55,170,000	2	Lembaga Kemasyarakatan	93,390,000	100.00%	25.00%			184,690,000		117.3%	Kasi Kemasyarakatan	
			Belanja Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan	12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		100.00%	25.00%			-				
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			200,000,000			69,999,997	1	Lembaga Kemasyarakatan	49,999,800	1	Lembaga Kemasyarakatan	10,364,700	0	Lembaga Kemasyarakatan	11,940,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	22,304,700	100.00%	25.00%			92,304,697		46.2%	Kasi Kemasyarakatan	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			50,631,000			37,500,000	1	Laporan	39,999,900	1	Laporan	16,420,000	0	Laporan	13,079,900	1	Laporan	29,499,900	100.00%	25.00%			66,999,900		132.3%	Kasi Perekonomian	
			Pendataan Pelaku UMKM							1	Kegiatan		-	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		100.00%				-				
	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			20,000,000			15,000,000	1	Laporan	9,999,700	1	Laporan	0	0	Laporan	1,999,700	1	Laporan	1,999,700	100.00%	20.00%			16,999,700		85.0%	Kasi	
			Honor Posyantek							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		25.00%								
			Sosialisasi TTG							1	Kegiatan		1	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan		100.00%								
																					Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**90.63%**								
																					Predikat kinerja	**100.00%**								
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan**	**88**	**%**	**150,000,000**			**150,000,100**			**98,999,700**	**3**		**11,407,000**			**4,000,000**			**15,407,000**					**165,407,100**				
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan**	**88**	**%**	**150,000,000**			**150,000,100**			**98,999,700**			**11,407,000**			**4,000,000**			**15,407,000**					**165,407,100**		**110.27%**		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			150,000,000			150,000,100	1	Laporan	98,999,700	0	Laporan	11,407,000	0	Laporan	4,000,000	1	Laporan	15,407,000	100.00%	15.56%			165,407,100		110.27%	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
																					Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**100.00%**								
																					Predikat kinerja	**Tinggi**								
																					Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100.00%**								
																					Predikat kinerja	**Tinggi**								
4	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	**A**	**Point**	**25,709,306,606**	**100**	**%**	**18,039,536,899**	**-**	-	**21,235,829,759**			**3,313,398,190**			**7,765,946,941**			**3,313,398,190**					**17,235,900**		**103.61%**	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan	
			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	**3.5**	**Point**																										
	7.01.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**A**	**Point**	**17,857,900**			**10,000,000**			**12,312,200**			**5,377,800**			**3,888,500**			**7,235,900**					**17,235,900**				
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12,607,900			5,000,000	2	Dokumen	7,235,900	0	Dokumen	5,377,800	0	Dokumen	1,858,100	2	Dokumen	7,235,900	100.00%	100.00%			12,235,900		97.05%		
			Rencana Kerja Tahun 2023 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022							2	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		2	Dokumen		100.00%				-				
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5,250,000			5,000,000	1	Laporan	5,076,300	0	Laporan	-	0	Laporan	2,030,400	1	Dokumen	-	100.00%	0.00%			5,000,000		95.24%		
			Dokumen Laporan Capaian Kinerja (LKPJ, LKIP, SKM, Analisis Risiko dan Laporan Tahunan)							5	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		5	Dokumen		100.00%								
																					Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**100.00%**								
																					Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**								
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	**A**	**Point**	**16,457,870,629**			**14,829,958,741**			**15,002,218,373**			**2,540,928,053**			**6,606,873,635**			**9,147,801,688**					**23,951,731,529**		**145.53%**	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan	
			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	**3.4**	**Point**																										
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	**100**	**%**	16,452,870,629	**100**	**%**	14,828,338,741	100	%	14,948,843,273	25	%	2,528,731,853	25	%	6,594,660,935	6	Bulan	9,123,392,788	6.00%	61.03%			23,951,731,529		145.58%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	NA			NA			48,817,800	1	Laporan	12,196,200			12,212,700	1	Laporan	24,408,900		50.00%								
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	5,000,000			1,620,000	2	Laporan	4,557,300	1	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	-	50.00%	0.00%			1,620,000		32.40%		
			Dokumen Laporan Keuangan							2	Dokumen		2	Dokumen		0	Dokumen		-	Dokumen		0.00%								
																					Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**18.67%**								
																					Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**								

	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**%**	**4,685,439,557**	**100**	**%**	**987,862,600**			**2,428,684,700**			**121,740,850**			**606,670,820**			**121,740,850**					**2,264,477,220**		**48.33%**			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			15,000,000			8,912,200	1	Paket	10,346,000	1	Paket	2,222,000	0	Paket	-	1	Paket	2,222,000	100.00%	21.48%			11,134,200		74.23%	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			Belanja Alat Listrik							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-					
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2,792,926,600			26,526,000	1	Paket	956,800,600	0	Paket	451,946,350	0	Paket	255,905,000	1	Paket	707,851,350	100.00%	73.98%			734,377,350		26.29%	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			Belanja ATK							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		9	Bulan		75.00%				-					
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			52,080,000			12,328,000	1	Paket	12,007,800	0	Paket	3,412,600	0	Paket	-	1	Paket	3,412,600	100.00%	28.42%			15,740,600		30.22%	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-					
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			600,000,000			167,805,000	1	Paket	335,595,000	0	Paket	29,070,000	0	Paket	87,443,000	1	Paket	116,513,000	100.00%	34.72%			284,318,000		47.39%	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			94,393,200			37,631,600	1	Paket	22,733,000	0	Paket	7,474,900	0	Paket	3,038,100	1	Paket	10,513,000	100.00%	46.25%			48,144,600		51.00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			24,000,000			6,000,000	1	Dokumen	12,000,000	0	Dokumen	1,155,000	0	Dokumen	770,000	1	Dokumen	1,925,000	100.00%	16.04%			7,925,000		33.02%	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			Belanja Surat Kabar Kecamatan dan Kelurahan							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-					
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			250,000,000			79,291,000	1	Laporan	229,300,000	0	Laporan	860,000	0	Laporan	22,209,020	1	Laporan	23,069,020	100.00%	10.06%			102,360,020		40.94%	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Bantarjati	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3,543,120			3,636,200	1	Paket	3,608,000	0	Paket	-	0	Paket	1,983,400	1	Paket	1,983,400	100.00%	54.97%			5,619,600		158.61%	Lurah Bantarjati		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			16,563,540			7,868,000	1	Paket	9,563,300	0	Paket	0	0	Paket	5,568,600	1	Paket	5,568,600	100.00%	58.23%			13,436,600		81.12%			
			Belanja Alat Tulis Kantor							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan	-	100.00%				-					
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			14,726,145			4,995,000	1	Paket	7,763,500	0	Paket	0	0	Paket	1,898,000	1	Paket	1,898,000	100.00%	24.45%			6,893,000		46.81%			
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan	-	100.00%				-					
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			59,062,500			55,650,000	1	Paket	84,785,400	0	Paket	20,685,000	0	Paket	22,485,000	1	Paket	43,170,000	100.00%	50.92%			98,820,000		167.31%			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan	-	100.00%				-					
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6,635,790			2,393,400	1	Paket	3,644,400	0	Paket	902,700	0	Paket	902,700	1	Paket	1,805,400	100.00%	49.54%			4,198,800		63.28%			
			Belanja Dokumentasi, Penggandaan dan Penjilidan							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-					
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Cibuluh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1,199,100			4,994,000	1	Paket	3,089,400	0	Paket	781,600	0	Paket	1,150,000	1	Paket	1,931,600	100.00%	62.52%			6,925,600		577.57%	Lurah Cibuluh		
			Belanja Alat Listrik (Lampu)							12	Bulan		12	Buah		0	Buah		12	Buah		100.00%				-					
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			15,960,840			9,993,400	1	Paket	7,567,200	0	Paket	1,445,500	0	Paket	2,269,700	1	Paket	3,715,200	100.00%	49.10%			13,708,600		85.89%			
			Belanja Alat Tulis Kantor							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-					
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			7,333,200			4,992,100	1	Paket	3,566,400	0	Paket	1,488,000	0	Paket	-	1	Paket	1,488,000	100.00%	41.72%			6,480,100		88.37%			
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-					
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			79,978,500			29,995,000	1	Paket	77,550,000	0	Paket	19,410,000	0	Paket	19,410,000	1	Paket	38,820,000	100.00%	50.06%			68,815,000		86.04%			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-					
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			5,505,465			3,225,000	1	Paket	5,156,700	0	Paket	1,289,050	0	Paket	1,288,800	1	Paket	2,577,850	100.00%	49.99%			5,802,850		105.40%			
			Belanja Dokumentasi, Penggandaan dan Penjilidan							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-					
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Cimahpar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2,763,495			1,481,600.00	1	Paket	977,600	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	-	100.00%	0.00%			1,481,600		53.61%	Lurah Cimahpar		
			Belanja Alat Listrik (Lampu)							12	Bulan		3	Bulan		3	Buah		12	Buah		100.00%				-					
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			13,525,575			7,684,900.00	1	Paket	19,972,900	0	Paket	0	0	Paket	-	1	Paket	-	100.00%	0.00%			7,684,900		56.82%			
			Belanja Alat Tulis Kantor							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-					
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			3,815,070			3,621,000	1	Paket	6,429,700	0	Paket	1,698,300	0	Paket	849,700	1	Paket	2,548,000	100.00%	39.63%			6,169,000		161.70%			
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-					

	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			63,063,000			60,090,000	1	Paket	74,600,000	0	Paket	7,010,000	0	Paket	22,380,000	1	Paket	29,390,000	100.00%	39.40%			89,480,000		141.89%		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4,186,980			1,038,200	1	Paket	4,786,500	0	Paket	531,000	0	Paket	1,600,500	1	Paket	2,131,500	100.00%	44.53%			3,169,700		75.70%		
			Belanja Dokumentasi, Penggandaan dan Penjilidan							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Ciparigi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1,873,620			5,278,600	1	Paket	4,236,000	0	Paket	0	0	Paket	-	1	Paket	-	100.00%	0.00%			5,278,600		281.73%	Lurah Ciparigi	
			Belanja Alat Listrik (Lampu)							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			14,528,737			10,051,400	1	Paket	23,519,500	0	Paket	3,972,400	0	Paket	11,839,500	1	Paket	15,811,900	100.00%	67.23%			25,863,300		178.01%		
			Belanja Alat Tulis Kantor							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			10,129,455			5,160,100	1	Paket	10,599,800	0	Paket	1,129,800	0	Paket	2,842,100	1	Paket	3,971,900	100.00%	37.47%			9,132,000		90.15%		
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			71,316,000			32,625,000	1	Paket	67,320,000	0	Paket	22,155,000	0	Paket	17,205,000	1	Paket	39,360,000	100.00%	58.47%			71,985,000		100.94%		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2,138,010			5,086,000	1	Paket	5,462,600	0	Paket	784,500	0	Paket	1,569,000	1	Paket	2,353,500	100.00%	43.08%			7,439,500		347.96%		
			Belanja Dokumentasi, Penggandaan dan Penjilidan							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Ciluar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			979,500			2,430,000	1	Paket	1,689,000	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	-	100.00%	0.00%			2,430,000		248.09%	Lurah Ciluar	
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Neon)							25	Buah		0	Buah		12	Buah		25	Buah		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			15,876,830			10,334,000	1	Paket	14,244,000	0	Paket	1,040,000	0	Paket	4,612,000	1	Paket	5,652,000	100.00%	39.68%			15,986,000		100.69%		
			Belanja Alat Tulis Kantor							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			11,892,615			1,018,800	1	Paket	1,281,000	0	Paket	1,260,000	0	Paket	-	1	Paket	1,260,000	100.00%	0.00%			2,278,800		19.16%		
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			85,900,500			60,150,000	1	Paket	75,120,000	0	Paket	12,030,000	0	Paket	21,030,000	1	Paket	33,060,000	100.00%	44.01%			93,210,000		108.51%		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2,951,550			6,282,000	1	Paket	4,866,000	0	Paket	486,600	0	Paket	1,459,800	1	Paket	1,946,400	100.00%	40.00%			8,228,400		278.78%		
			Belanja Dokumentasi, Penggandaan dan Penjilidan							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kedung Halang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3,865,260			8,614,100	1	Paket	1,187,000	0	Paket	0	0	Paket	-	1	Paket	-	100.00%	0.00%			8,614,100		222.86%	Lurah Kedung Halang	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			15,237,180			17,154,100	1	Paket	12,926,200	0	Paket	3,418,200	0	Paket	3,426,000	1	Paket	6,844,200	100.00%	52.95%			23,998,300		157.50%		
			Belanja Alat Tulis Kantor							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan	-	100.00%				-				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			15,303,855			8,254,400	1	Paket	3,843,600	0	Paket	783,300	0	Paket	870,500	1	Paket	1,653,800	100.00%	43.03%			9,908,200		64.74%		
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan	-	100.00%				-				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			45,360,000			99,740,000	1	Paket	88,620,000	0	Paket	19,230,000	0	Paket	25,080,000	1	Paket	44,310,000	100.00%	50.00%			144,050,000		317.57%		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan	-	100.00%				-				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3,188,745			4,249,600	1	Paket	3,073,200	0	Paket	516,600	0	Paket	1,536,600	1	Paket	2,053,200	100.00%	66.81%			6,302,800		197.66%		
			Belanja Dokumentasi, Penggandaan dan Penjilidan							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4,582,830			121,500	1	Paket	1,689,000	0	Paket	900,000	0	Paket	750,000	1	Paket	1,650,000	100.00%	97.69%			1,771,500		38.66%	Lurah Tanah Baru	
			Penyediaan Komponen Instalasi/Listrik							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,587,925			8,468,400	1	Paket	14,244,000	0	Paket	2,774,500	0	Paket	4,072,500	1	Paket	6,847,000	100.00%	48.07%			15,315,400		121.67%		
			Belanja Alat Tulis Kantor							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			6,014,505			1,309,600	1	Paket	1,158,300	0	Paket	1,142,500	0	Paket	-	1	Paket	1,142,500	100.00%	98.64%			2,452,100		40.77%		
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			128,268,000			71,470,000	1	Paket	86,820,000	0	Paket	18,870,000	0	Paket	24,540,000	1	Paket	43,410,000	100.00%	50.00%			114,880,000		89.56%		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4,558,050			640,500	1	Paket	7,348,500	0	Paket	1,336,200	0	Paket	2,004,300	1	Paket	3,340,500	100.00%	45.46%			3,981,000		87.34%		
			Belanja Dekorasi, Penggandaan dan Penjilidan							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Tegal Gundil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1,701,000			5,569,200	1	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	-	100.00%	0.00%			-		0.00%	Lurah Tegal Gundil	
			Belanja Alat Listrik (Lampu)							24	Buah		4	Buah		8	Buah		24	Buah		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			15,750,210			11,060,700	1	Paket	13,035,900	0	Paket	3,708,000	0	Paket	2,652,000	1	Paket	6,360,000	100.00%	48.79%			17,420,700		110.61%		
			Belanja Alat Tulis Kantor							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			9,503,760			5,713,600	1	Paket	1,363,600	0	Paket	1,335,500	0	Paket	-	1	Paket	1,363,600	100.00%	100.00%			7,077,200		74.47%		
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			72,765,000			60,930,000	1	Paket	86,010,000	0	Paket	25,530,000	0	Paket	28,230,000	1	Paket	53,760,000	100.00%	62.50%			114,690,000		157.62%		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2,904,300			5,999,400	1	Paket	7,184,100	0	Paket	1,699,800	0	Paket	1,800,000	1	Paket	3,499,800	100.00%	48.72%			9,499,200		327.07%		
			Belanja Dokumentasi, Penggandaan dan Penjilidan							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
																					Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**99.72%**								
																					Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**								
																					Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**100.00%**								
																					Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**								

	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**2,721,508,520**	**100**	**%**	**1,892,365,558**			**2,116,048,486**			**597,053,513**			**499,261,340**			**1,096,314,853**					**2,988,680,411**		**109.82%**		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			447,216,525			300,004,750	1	Laporan	196,593,670	0	Laporan	46,970,434	0	Laporan	77,576,201	1	Laporan	124,546,635	100.00%	63.35%			424,551,385		94.93%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Belanja Listrik, Telepon dan Air Kecamatan dan Kelurahan							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%				-				
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2,274,291,995			1,592,360,808	1	Laporan	1,919,454,816	0	Laporan	550,083,079	0	Laporan	421,685,139	1	Laporan	971,768,218	100.00%	50.63%			2,564,129,026		112.74%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakan Kerja (52 Orang)							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%								
			Belanja Iuran Jaminan Kematian (52 Orang)							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%								
			Belanja Premi BPJS Kesehatan (10 Orang)							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100.00%								
			Front Office Kecamatan (2 Orang)							13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		13	Bulan		100.00%								
			Front Office Kelurahan (10 Orang)							13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		13	Bulan		100.00%								
			Pengemudi (2 Orang)							13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		13	Bulan		100.00%								
			Tenaga Keamanan Kecamatan (2 oang)							13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		13	Bulan		100.00%								
			Tenaga Keamanan Kelurahan (10 orang)							13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		13	Bulan		100.00%								
			Tenaga Kebersihan Kecamatan (2 orang)							13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		13	Bulan		100.00%								
			Tenaga Kebersihan Kelurahan (8 orang)							13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		13	Bulan		100.00%								
			Tenaga Pendukung Administrasi Kecamatan (10 Orang)							13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		13	Bulan		100.00%								
																					Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**100.00%**							
																					Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**							
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**%**	**1,826,630,000**	**85**	**%**	**319,350,000**			**1,676,566,000**			**48,297,974**			**49,252,646**			**97,550,620**	**58,18%**				**573,504,415**		**31.40%**		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			360,550,000			216,160,000	1	Unit	179,200,000	0	Unit	36,117,974	0	Unit	37,072,646		Unit	73,190,620	**58,18%**	40.84%			289,350,620		80.25%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Belanja Jasa Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua							1	Tahun		0	Tahun		1	Tahun		1	Tahun		100.00%				-				
			Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua							25	unit		0	unit		0	unit		25	unit		100.00%				-				
			Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat							5	unit		2	unit		1	unit		5	unit		100.00%				-				
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			140,450,000			82,790,000	1	Unit	60,820,000	0	Unit	12,180,000	0	Unit	12,180,000	1	Unit	24,360,000	**58,18%**	40.05%			107,150,000		76.29%	Kasubag Umum	
			Pemeliharaan AC							45	unit		0	unit		16	unit		45	unit		100.00%				-				
			Pemeliharaan Komputer							40	unit		0	unit		0	unit		40	unit		100.00%				-				
			Pemeliharaan Printer dan Scanner							20	unit		5	unit		3	unit		20	unit		100.00%				-				
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,325,630,000			20,400,000	9	Unit	1,436,546,000	0	Unit	-	0	Unit	156,603,795	9	Unit	156,603,795	10.90%	10.90%			177,003,795		13.35%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan							9	unit		-	unit		0	unit		9	unit		0.00%								
																					Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**76.36%**							
																					Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**							
																					Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**92.12%**							
																					Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**							

5	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Pelayanan administrasi di tingkat kecamatan**	**100**	**%**	**412,445,000**	**3.46**	**Point**	**65,000,000**			**258,807,700**			**210,821,500**			**4,402,400**			**215,223,900**	**83.15%**				**187,396,900**		**45.44%**	
			Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan	**100**	**%**																									
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**100**	**%**	**279,000,000**			**20,000,000**			**208,950,900**			**162,994,500**			**4,402,400**			**167,396,900**	**83.15%**				**187,396,900**		**148.88%**	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			279,000,000			20,000,000	1	Laporan	208,950,900	0	Laporan	162,994,500	0	Laporan	4,402,400	1	Laporan	167,396,900	83.15%	80.11%			187,396,900		67.17%	Kasi Pemerintahan
			Penilaian Kinerja Kelurahan							1	Kegiatan		-	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		83.15%							
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan							1	Kegiatan		-	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan		83.15%							
			Sosialisasi Pertanahan							1	Kegiatan		-	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan		83.15%							
																					Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**83.15%**							
																					Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**							
																					Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**61.05%**							
																					Predikat kinerja	**Sedang**							
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**IKM terhadap penyelenggaraan musrenbang di tingkat kecamatan**	**3.3**	**Point**	**133,445,000**			**45,000,000**			**49,856,800**			**47,827,000**						**47,827,000**					**92,827,000**		**143.76%**	
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			78,805,000			43,000,000	1	Dokumen	47,857,000	0	Dokumen	47,827,000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	47,827,000	100.00%	99.94%			90,827,000		115.26%	Kepala Seksi Pengendalian
			Musrenbang Tingkat Kecamatan							1	Kegiatan		1	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan		100.00%					-			
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			54,640,000			2,000,000	1	Laporan	1,999,800	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	-	100.00%	0.00%			2,000,000		3.66%	Kepala Seksi Pengendalian Pembangunan
			Monev Pembangunan Sarpras							8	Kelurahan		-	Kelurahan		16	Kelurahan		8	Kelurahan		100.00%							
			Penyebarluasan Informasi Perizinan Pembangunan							8	Kelurahan		-	Kelurahan		0	Kelurahan		8	Kelurahan		100.00%							
																					Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**100.00%**							
																					Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**							
																					Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100.00%**							
																					Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**							
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	**53.64%**							
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	**Rendah**							
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN						**31,158,027,838**			**22,286,880,206**			**27,385,032,059**			**7,123,207,846**			**7,565,093,449**			**14,688,301,295**		**53.64%**			**6,429,456,726**			

BAB III
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BOGOR UTARA TAHUN 2024

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Utara Tahun 2024

Bahwa Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor tambahan Anggaran yang diajukan dalam renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp. **29.117.655.175.00** dengan rincian sub kegiatannya adalah sebagai berikut;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ANS sebesar Rp. 16.815.370.759.-
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 276.960.300.-

Dengan Rincian Perubahan Renja Sebagaimana terlampir dalam lampiran matrik renja.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BOGOR UTARA KOTA BOGOR
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN BOGOR UTARA							**19.136.972.711,00**	**21.124.633.959,00**	**22.757.923.758,00**	**3.620.951.047,00**							**22.551.600.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**0,00**							**6.600.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**0,00**							**6.600.000,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**persentase lembaga kemasyarat yg aktif di kelurahan**				**75 %**	**75 %**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**0,00**							**6.600.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RT,RW) Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Utara		6.600.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			6.600.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**19.130.372.711,00**	**21.118.033.959,00**	**22.751.323.758,00**	**3.620.951.047,00**							**22.545.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**19.130.372.711,00**	**21.118.033.959,00**	**22.751.323.758,00**	**3.620.951.047,00**							**22.545.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**				**A Point**	**A Point**	**18.555.115.111,00**	**20.385.927.459,00**	**22.055.923.758,00**	**3.162.884.889,00**							**21.718.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Pelaksanaan Penyusunan Dokumen, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan secara tepat waktu*				100 %	100 %	12.312.200,00	12.312.200,00	10.312.200,00	-2.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Utara		30.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA

	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	7.235.900,00	7.235.900,00	7.235.900,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.076.300,00	5.076.300,00	3.076.300,00	-2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN*				100 %	100 %	14.393.616.066,00	15.002.218.373,00	16.807.136.042,00	2.413.519.976,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Utara		16.055.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/bulan	75 Orang/bulan	14.342.434.866,00	14.948.843.273,00	16.753.760.942,00	2.411.326.076,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			16.000.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.557.300,00	4.557.300,00	4.557.300,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	46.623.900,00	48.817.800,00	48.817.800,00	2.193.900,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.829.794.300,00	1.578.782.400,00	1.478.250.400,00	-351.543.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Utara		2.113.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.346.000,00	10.346.000,00	10.346.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.362.198.900,00	956.800.600,00	961.300.600,00	-400.898.300,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.600.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.007.800,00	12.007.800,00	12.007.800,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			18.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	335.595.000,00	335.595.000,00	296.595.000,00	-39.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.646.600,00	22.733.000,00	22.733.000,00	86.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	4.700.000,00	-7.300.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	229.300.000,00	170.568.000,00	95.568.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah*				100 %	100 %	829.370.545,00	2.116.048.486,00	2.101.459.116,00	1.272.088.571,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Utara		1.705.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	196.574.305,00	196.593.670,00	276.960.300,00	80.385.995,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			205.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	632.796.240,00	1.919.454.816,00	1.824.498.816,00	1.191.702.576,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.500.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.490.022.000,00	1.676.566.000,00	1.658.766.000,00	168.744.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bogor Utara		1.815.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	179.200.000,00	179.200.000,00	161.400.000,00	-17.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				66 Unit	66 Unit	60.820.000,00	60.820.000,00	60.820.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			65.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	1.250.002.000,00	1.436.546.000,00	1.436.546.000,00	186.544.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.500.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan Pelayanan administrasi di tingkat kecamatan**				**100 100 % %**	**100 100 % %**	**101.958.700,00**	**258.807.700,00**	**222.101.200,00**	**163.041.300,00**							**265.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait*				100 %	100 %	52.101.900,00	208.950.900,00	172.244.400,00	120.142.500,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kecamatan Bogor Utara		200.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	52.101.900,00	208.950.900,00	172.244.400,00	120.142.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			200.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Pelayanan masyarakat di kecamatan*				100 %	100 %	49.856.800,00	49.856.800,00	49.856.800,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kecamatan Bogor Utara		65.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	47.857.000,00	47.857.000,00	47.857.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			60.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	1.999.800,00	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			5.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Optimalisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**374.299.200,00**	**374.299.100,00**	**374.299.100,00**	**67.700.800,00**							**442.000.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	374.299.200,00	374.299.100,00	374.299.100,00	-100,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kecamatan Bogor Utara		442.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	274.299.800,00	274.299.700,00	274.299.700,00	-100,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			300.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	49.999.800,00	49.999.800,00	49.999.800,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			70.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	39.999.900,00	39.999.900,00	39.999.900,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			60.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	9.999.700,00	9.999.700,00	9.999.700,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			12.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan di Tingkat Kecamatan**				**90.00 %**	**90.00 %**	**98.999.700,00**	**98.999.700,00**	**98.999.700,00**	**21.000.300,00**							**120.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan*				90 %	90 %	98.999.700,00	98.999.700,00	98.999.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kecamatan Bogor Utara		120.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	98.999.700,00	98.999.700,00	98.999.700,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			120.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA

		KELURAHAN TEGAL GUNDIL						**912.178.600,00**	**912.118.600,00**	**912.118.600,00**	**-60.000,00**							**1.029.073.450,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**128.203.600,00**	**107.593.600,00**	**107.593.600,00**	**-20.610.000,00**							**141.173.450,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**128.203.600,00**	**107.593.600,00**	**107.593.600,00**	**-20.610.000,00**							**141.173.450,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**				**3.50 Point**	**3.50 Point**	**128.203.600,00**	**107.593.600,00**	**107.593.600,00**	**12.969.850,00**							**141.173.450,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	128.203.600,00	107.593.600,00	107.593.600,00	-20.610.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tegal Gundil		141.173.450,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.035.900,00	13.035.900,00	13.035.900,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			14.339.490,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.363.600,00	1.363.600,00	1.363.600,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.499.960,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	106.620.000,00	86.010.000,00	86.010.000,00	-20.610.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			117.414.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.184.100,00	7.184.100,00	7.184.100,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			7.920.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**783.975.000,00**	**804.525.000,00**	**804.525.000,00**	**20.550.000,00**							**887.900.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**783.975.000,00**	**804.525.000,00**	**804.525.000,00**	**20.550.000,00**							**887.900.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**783.975.000,00**	**804.525.000,00**	**804.525.000,00**	**103.925.000,00**							**887.900.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	783.975.000,00	804.525.000,00	804.525.000,00	20.550.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Tegal Gundil		887.900.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	39.375.000,00	12.375.000,00	12.375.000,00	-27.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			50.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	2 Unit	225.000.000,00	225.000.000,00	224.834.500,00	-165.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			247.500.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	519.600.000,00	567.150.000,00	567.315.500,00	47.715.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			590.400.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
		KELURAHAN BANTARJATI							**759.171.800,00**	**759.171.700,00**	**759.171.600,00**	**-200,00**							**848.948.980,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**119.969.500,00**	**109.364.600,00**	**109.364.600,00**	**-10.604.900,00**							**131.966.450,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**119.969.500,00**	**109.364.600,00**	**109.364.600,00**	**-10.604.900,00**							**131.966.450,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**				**3.50 Point**	**3.50 Point**	**119.969.500,00**	**109.364.600,00**	**109.364.600,00**	**11.996.950,00**							**131.966.450,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	119.969.500,00	109.364.600,00	109.364.600,00	-10.604.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bantarjati		131.966.450,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.608.000,00	3.608.000,00	3.608.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			3.968.800,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.563.300,00	9.563.300,00	9.563.300,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			10.519.630,00	KECAMATAN BOGOR UTARA

	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.763.500,00	7.763.500,00	7.763.500,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			8.539.850,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	95.370.200,00	84.785.400,00	84.785.400,00	-10.584.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			104.907.220,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.664.500,00	3.644.400,00	3.644.400,00	-20.100,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			4.030.950,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**639.202.300,00**	**649.807.100,00**	**649.807.000,00**	**10.604.700,00**							**716.982.530,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**639.202.300,00**	**649.807.100,00**	**649.807.000,00**	**10.604.700,00**							**716.982.530,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**639.202.300,00**	**649.807.100,00**	**649.807.000,00**	**77.780.230,00**							**716.982.530,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	639.202.300,00	649.807.100,00	649.807.000,00	10.604.700,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Bantarjati		716.982.530,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	19.527.300,00	9.907.300,00	9.907.300,00	-9.620.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			21.480.030,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	224.275.000,00	224.294.800,00	224.294.700,00	19.700,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			246.702.500,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	395.400.000,00	415.605.000,00	415.605.000,00	20.205.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			448.800.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
		KELURAHAN CIBULUH							**585.201.000,00**	**739.587.800,00**	**739.587.800,00**	**154.386.800,00**							**669.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**108.000.000,00**	**96.929.700,00**	**96.929.700,00**	**-11.070.300,00**							**121.600.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**108.000.000,00**	**96.929.700,00**	**96.929.700,00**	**-11.070.300,00**							**121.600.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**				**3.50 Point**	**3.50 Point**	**108.000.000,00**	**96.929.700,00**	**96.929.700,00**	**13.600.000,00**							**121.600.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	108.000.000,00	96.929.700,00	96.929.700,00	-11.070.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Kelurahan Cibuluh		121.600.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.089.400,00	3.089.400,00	3.089.400,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.567.500,00	7.567.200,00	7.567.200,00	-300,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.566.400,00	3.566.400,00	3.566.400,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			4.100.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	88.620.000,00	77.550.000,00	77.550.000,00	-11.070.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.156.700,00	5.156.700,00	5.156.700,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**477.201.000,00**	**642.658.100,00**	**642.658.100,00**	**165.457.100,00**							**547.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**477.201.000,00**	**642.658.100,00**	**642.658.100,00**	**165.457.100,00**							**547.600.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**477.201.000,00**	**642.658.100,00**	**642.658.100,00**	**70.399.000,00**							**547.600.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	477.201.000,00	642.658.100,00	642.658.100,00	165.457.100,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Cibuluh		547.600.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA

	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.013.200,00	11.038.200,00	11.038.200,00	-33.975.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			50.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	169.987.800,00	324.043.400,00	324.043.400,00	154.055.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			200.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	262.200.000,00	307.576.500,00	307.576.500,00	45.376.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			297.600.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
		KELURAHAN KEDUNG HALANG							**775.807.500,00**	**917.075.600,00**	**975.780.500,00**	**199.973.000,00**							**976.330.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**120.000.000,00**	**109.650.000,00**	**109.650.000,00**	**-10.350.000,00**							**110.200.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**120.000.000,00**	**109.650.000,00**	**109.650.000,00**	**-10.350.000,00**							**110.200.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**				**3.50 Point**	**3.50 Point**	**120.000.000,00**	**109.650.000,00**	**109.650.000,00**	**-9.800.000,00**							**110.200.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	120.000.000,00	109.650.000,00	109.650.000,00	-10.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kedung Halang		110.200.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.400.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.926.200,00	12.926.200,00	12.926.200,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			13.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.843.600,00	3.843.600,00	3.843.600,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	98.970.000,00	88.620.000,00	88.620.000,00	-10.350.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			88.700.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.073.200,00	3.073.200,00	3.073.200,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			3.100.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**655.807.500,00**	**807.425.600,00**	**866.130.500,00**	**210.323.000,00**							**866.130.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**655.807.500,00**	**807.425.600,00**	**866.130.500,00**	**210.323.000,00**							**866.130.500,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**655.807.500,00**	**807.425.600,00**	**866.130.500,00**	**210.323.000,00**							**866.130.500,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	655.807.500,00	807.425.600,00	866.130.500,00	210.323.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Kedung Halang		866.130.500,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	19.807.500,00	10.357.500,00	10.357.500,00	-9.450.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			10.357.500,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	4 Unit	225.000.000,00	366.268.100,00	424.973.000,00	199.973.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			424.973.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA

	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	411.000.000,00	430.800.000,00	430.800.000,00	19.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			430.800.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
		KELURAHAN CIPARIGI							**750.883.900,00**	**750.900.000,00**	**750.900.000,00**	**16.100,00**							**556.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**120.000.000,00**	**111.137.900,00**	**111.137.900,00**	**-8.862.100,00**							**130.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**120.000.000,00**	**111.137.900,00**	**111.137.900,00**	**-8.862.100,00**							**130.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**				**3.50 Point**	**3.50 Point**	**120.000.000,00**	**111.137.900,00**	**111.137.900,00**	**10.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	120.000.000,00	111.137.900,00	111.137.900,00	-8.862.100,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Kelurahan Ciparigi		130.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.894.900,00	4.236.000,00	4.236.000,00	341.100,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.198.500,00	23.519.500,00	23.519.500,00	5.321.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.213.400,00	10.599.800,00	10.599.800,00	386.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	81.750.000,00	67.320.000,00	67.320.000,00	-14.430.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.943.200,00	5.462.600,00	5.462.600,00	-480.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**630.883.900,00**	**639.762.100,00**	**639.762.100,00**	**8.878.200,00**							**426.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**630.883.900,00**	**639.762.100,00**	**639.762.100,00**	**8.878.200,00**							**426.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**630.883.900,00**	**639.762.100,00**	**639.762.100,00**	**-204.883.900,00**							**426.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	630.883.900,00	639.762.100,00	639.762.100,00	8.878.200,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Ciparigi		426.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	26.683.900,00	8.862.100,00	8.862.100,00	-17.821.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			0,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			0,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	379.200.000,00	405.900.000,00	405.900.000,00	26.700.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			426.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
		KELURAHAN CILUAR							**596.518.000,00**	**596.500.000,00**	**596.500.000,00**	**-18.000,00**							**641.700.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**108.000.000,00**	**97.200.000,00**	**97.200.000,00**	**-10.800.000,00**							**106.900.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**108.000.000,00**	**97.200.000,00**	**97.200.000,00**	**-10.800.000,00**							**106.900.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**				**3.50 Point**	**3.50 Point**	**108.000.000,00**	**97.200.000,00**	**97.200.000,00**	**-1.100.000,00**							**106.900.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	108.000.000,00	97.200.000,00	97.200.000,00	-10.800.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Kelurahan Ciluar		106.900.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA

	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.689.000,00	1.689.000,00	1.689.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.244.000,00	14.244.000,00	14.244.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.900.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	84.120.000,00	75.120.000,00	75.120.000,00	-9.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.666.000,00	4.866.000,00	4.866.000,00	-1.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**488.518.000,00**	**499.300.000,00**	**499.300.000,00**	**10.782.000,00**							**534.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**488.518.000,00**	**499.300.000,00**	**499.300.000,00**	**10.782.000,00**							**534.800.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**488.518.000,00**	**499.300.000,00**	**499.300.000,00**	**46.282.000,00**							**534.800.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	488.518.000,00	499.300.000,00	499.300.000,00	10.782.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Ciluar		534.800.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	75.150.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-64.350.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			20.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	2 Unit	138.568.000,00	139.450.000,00	139.450.000,00	882.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			140.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	274.800.000,00	349.050.000,00	349.050.000,00	74.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciuar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			374.800.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
		KELURAHAN TANAH BARU							**781.909.800,00**	**781.859.800,00**	**781.859.800,00**	**-50.000,00**							**822.087.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**119.659.800,00**	**111.259.800,00**	**111.259.800,00**	**-8.400.000,00**							**131.087.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**119.659.800,00**	**111.259.800,00**	**111.259.800,00**	**-8.400.000,00**							**131.087.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**				**3.50 Point**	**3.50 Point**	**119.659.800,00**	**111.259.800,00**	**111.259.800,00**	**11.427.200,00**							**131.087.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	119.659.800,00	111.259.800,00	111.259.800,00	-8.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tanah Baru		131.087.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.689.000,00	1.689.000,00	1.689.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.244.000,00	14.244.000,00	14.244.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.158.300,00	1.158.300,00	1.158.300,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	95.220.000,00	86.820.000,00	86.820.000,00	-8.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			103.587.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA

	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.348.500,00	7.348.500,00	7.348.500,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			9.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**662.250.000,00**	**670.600.000,00**	**670.600.000,00**	**8.350.000,00**							**691.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**662.250.000,00**	**670.600.000,00**	**670.600.000,00**	**8.350.000,00**							**691.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**662.250.000,00**	**670.600.000,00**	**670.600.000,00**	**28.750.000,00**							**691.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	662.250.000,00	670.600.000,00	670.600.000,00	8.350.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Tanah Baru		691.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	56.250.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	-49.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			60.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			250.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	381.000.000,00	438.850.000,00	438.850.000,00	57.850.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			381.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
		KELURAHAN CIMAHPAR							**803.184.500,00**	**803.184.600,00**	**803.184.600,00**	**100,00**							**925.300.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**123.516.500,00**	**106.766.700,00**	**106.766.700,00**	**-16.749.800,00**							**150.500.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**123.516.500,00**	**106.766.700,00**	**106.766.700,00**	**-16.749.800,00**							**150.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**				**3.50 Point**	**3.50 Point**	**123.516.500,00**	**106.766.700,00**	**106.766.700,00**	**26.983.500,00**							**150.500.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	123.516.500,00	106.766.700,00	106.766.700,00	-16.749.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		150.500.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	977.600,00	977.600,00	977.600,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.195.900,00	19.972.900,00	19.972.900,00	-6.223.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.429.700,00	6.429.700,00	6.429.700,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	84.570.000,00	74.600.000,00	74.600.000,00	-9.970.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.343.300,00	4.786.500,00	4.786.500,00	-556.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**679.668.000,00**	**696.417.900,00**	**696.417.900,00**	**16.749.900,00**							**774.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**679.668.000,00**	**696.417.900,00**	**696.417.900,00**	**16.749.900,00**							**774.800.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**679.668.000,00**	**696.417.900,00**	**696.417.900,00**	**95.132.000,00**							**774.800.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	679.668.000,00	696.417.900,00	696.417.900,00	16.749.900,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Cimahpar		774.800.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA

	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**679.668.000,00**	**696.417.900,00**	**696.417.900,00**	**16.749.900,00**							**774.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**679.668.000,00**	**696.417.900,00**	**696.417.900,00**	**16.749.900,00**							**774.800.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**679.668.000,00**	**696.417.900,00**	**696.417.900,00**	**95.132.000,00**							**774.800.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	679.668.000,00	696.417.900,00	696.417.900,00	16.749.900,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Kelurahan Cimahpar		774.800.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	141.468.000,00	13.218.000,00	13.218.000,00	-128.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			150.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	150.099.900,00	244.689.900,00	94.689.900,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			200.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	388.200.000,00	533.100.000,00	438.510.000,00	50.310.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			424.800.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	J U M L A H								**19.136.972.711,00**	**21.124.633.959,00**	**22.757.923.758,00**	**3.620.951.047,00**							**22.551.600.000,00**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2024 merupakan tindaklanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Utara Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor.

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan progran kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2024 dalam menjalankan peran dan fungsinya.

HH. KECAMATAN BOGOR TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (UU 25/2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap daerah menyusun dokumen perencanaan yang antara lain terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yakni dokumen perencanaan jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat operasional dan berjangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah tersebut masing-masing dijabarkan oleh perangkat daerah melalui turunannya yakni Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), dimana Renstra merupakan turunan dari RPJMD dan Renja merupakan turunan dari RKPD.

Sebagai turunan dari RKPD, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah yang merupakan pedoman kerja selama tahun 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari suatu daerah dan merupakan salah satu perangkat daerah di Pemerintah Kota Bogor yang memiliki Tugas untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Proses penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Bogor Timur berpedoman pada Renstra yang dalam hal ini telah ditetapkan melalui

Peraturan Walikota Bogor Nomor 75 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bogor Timur Tahun 2019-2024 dan juga mengacu pada rancangan awal RKPD. Dengan kata lain Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Prioritas Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Bogor Timur Tahun 2024 diarahkan pada Urusan Kewilayahan dengan rincian program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 serta sasaran pelaksanaan Tahun 2024.

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bogor Timur Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RKPD Perubahan Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); .

17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah);
21. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 184 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan;
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2024 Tanggal 22 Agustus 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Tahun 2024 adalah menetapkan penyesuaian atas dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan periode 1 (satu) tahun. Renja juga menggambarkan keterkaitan sub kegiatan, kegiatan, program dengan sasaran dan tujuan yang ditransformasikan ke dalam Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Terakhir, Renja sebagai wadah sinkronisasi untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta program-program dalam RKPD Kota Bogor Tahun 2024 dengan memperhatikan isu-isu strategis.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Tahun 2024 adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dalam menentukan prioritas program/ kegiatan/ sub kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk monitoring dan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;
4. Sebagai acuan pimpinan dan seluruh ASN lingkup Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Bogor Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOGOR TIMUR TAHUN 2024

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BOGOR TIMUR TAHUN 2024

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Timur Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Renja Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Tahun 2024 sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan Kecamatan Bogor Timur. Dalam pelaksanaan program dengan anggaran sebesar Rp. 23,356,299,891,00,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 11,679,499,506,- atau 54,39 %, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bogor Timur untuk Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 serta ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun yang bersangkutan.

Program - program yang dilaksanakan Kecamatan Bogor Timur pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
5. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan III sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Juni 2024 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan. Adapun Capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah
KECAMATAN BOGOR TIMUR
TRIWULAN II TAHUN 20224

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	7	UNSUR KEWILAYAHAN											
	7.01.01	KECAMATAN		100	21,474,557,578		5,945,542,069		5,733,957,437		11,679,499,506		54.39
		BIDANG URUSAN											
		PROGRAM											
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kecamatan yang Aktif	100	6,600,000		1,650,000		1,650,000		3,300,000		50.00
		KEGIATAN											

	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kecamatan**	**100**	**6,600,000**		**1,650,000**		**1,650,000**		**3,300,000**		**50.00**
		SUB KEGIATAN										
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	100	6,600,000		1,650,000		1,650,000		3,300,000		50.00
												Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**50.00**
												Predikat kinerja	
		PROGRAM											
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai rata-rata Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**	**100**	**17,192,983,944**		**5,007,554,123**		**4,808,815,788**		**9,816,369,911**		**57.10**
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah										

		KEGIATAN											
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**		**47,199,000**		**20,220,300**		**9,039,500**		**29,259,800**		**61.99**
		SUB KEGIATAN											
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	2,850,000		2,850,000		-		2,850,000		100.00
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	44,349,000		17,370,300		9,039,500		26,409,800		59.55
		KEGIATAN											
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**	**100**	**11,468,756,164**		**3,551,701,383**		**3,591,881,584**		**7,143,582,967**		**62.29**
		SUB KEGIATAN											
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	11,416,398,464		3,539,911,383		3,578,893,384		7,118,804,767		62.36

	7.01.01.2.02.05	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	2,801,000		-		-		-		0.00
	7.01.01.2.02.06	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		100	49,556,700		11,790,000		12,988,200		24,778,200		50.00
		KEGIATAN											
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**	**100**	**2,944,901,100**		**880,944,200**		**777,568,400**		**1,658,512,600**		**56.32**
		SUB KEGIATAN											
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	11,588,500		-		-		-		0.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Baranangsiang		100	4,766,800		-		4,766,800		4,766,800		100.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sukasari		100	1,008,800		570,400		438,400		1,008,800		100.00

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Katulampa		100	3,262,800		962,000		878,400		1,840,400		56.41
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tajur		100	1,357,000		1,357,000		-		1,357,000		100.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sindangrasa		100	3,998,900		2,747,100		-		2,747,100		68.70
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sindangsari		100	836,000		836,000				836,000		100.00
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	1,100,923,600		371,950,000		402,050,000		774,000,000		70.30
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Baranangsiang		100	6,218,200		3,640,700		-		3,640,700		58.55
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sukasari		100	6,471,300		1,259,100		1,510,100		2,769,200		42.79
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Katulampa		100	8,157,300		5,320,900		-		5,320,900		65.23
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Tajur		100	1,268,700		970,300		298,400		1,268,700		100.00

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sindangrasa		100	7,998,600		4,300,100		-		4,300,100		53.76
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sindangsari		100	4,594,000		4,594,000				4,594,000		100.00
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	18,345,400		-		-		-		0.00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Baranangsiang		100	2,754,500		1,880,700		-		1,880,700		68.28
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sukasari		100	1,288,900		171,800		640,000		811,800		62.98
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga katulampa		100	1,826,200		910,300		-		910,300		49.85
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tajur		100	2,348,100		1,365,900		982,200		2,348,100		100.00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sindangrasa		100	9,994,100		2,257,300		3,670,800		5,928,100		59.32
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sindangsari		100	1,491,000		1,491,000				1,491,000		100.00
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	474,510,400		93,766,200		42,785,100		136,551,300		28.78
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Baranangsiang		100	95,420,000		21,495,000		21,075,000		42,570,000		44.61

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Sukasari		100	81,355,000		18,210,000		19,980,000		38,190,000		46.94
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Katulampa		100	93,270,000		24,750,000		22,330,000		47,080,000		50.48
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Tajur		100	78,810,000		24,765,000		18,015,000		42,780,000		54.28
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Sindangrasa		100	72,205,000		19,305,000		15,415,000		34,720,000		48.09
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Sindangsari		100	78,000,000		16,260,000		20,580,000		36,840,000		47.23
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	40,877,300		4,995,500		24,487,400		29,482,900		72.13
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Baranangsiang		100	3,165,300		1,550,400		-		1,550,400		48.98
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sukasari		100	1,457,700		364,500		364,500		729,000		50.01
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Katulampa		100	1,688,700		488,700		450,000		938,700		55.59
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tajur		100	2,216,200		1,003,000		300,000		1,303,000		58.79
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sindangrasa		100	4,303,800		1,077,300		1,075,500		2,152,800		50.02

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sindangsari		100	1,079,000		1,079,000		-		1,079,000		100.00
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100	12,000,000		1,340,000		2,280,000		3,620,000		30.17
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulltasi SKPD	100	704,044,000		243,910,000		173,195,800		417,105,800		59.24
		KEGIATAN											
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**	**100**	**1,807,744,680**		**508,858,240**		**363,326,704**		**872,184,944**		**48.25**
		SUB KEGIATAN											
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	231,480,000		52,218,960		51,571,684		103,790,644		44.84
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	100	1,576,264,680		456,639,280		311,755,020		768,394,300		48.75
		KEGIATAN											
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**	**100**	**924,383,000**		**45,830,000**		**66,999,600**		**112,829,600**		**12.21**
		SUB KEGIATAN											

	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pajak kendaraan dinas operasional	100	333,419,000		21,880,000		54,099,600		75,979,600		22.79
			Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Operasiona										
			Tersedianya BBM Kendaraan operasional										
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya AC	100	51,450,000		23,950,000		12,900,000		36,850,000		71.62
			Terpeliharanya Komputer dan laptop										
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	539,514,000				-		-		0.00
											Rata-rata capaian kinerja Program (%)		**57.10**
											Predikat kinerja		
		PROGRAM											
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan**	**100**	**165,623,600**		**109,013,000**		**22,466,200**		**131,479,200**		**79.38**
		KEGIATAN											
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan**	**100**	**43,150,000**		**2,626,900**		**16,073,600**		**18,700,500**		**43.34**
		SUB KEGIATAN											

	7.01.02.2.02.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Pembinaan RT, RW dan LPM	100	43,150,000		2,626,900		16,073,600		18,700,500		43.34
			Terlaksananya Sosialisasi PATEN										
			Terpenuhinya Kebutuhan Kegiatan Pemerintahan										
		KEGIATAN											
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan**	**100**	**122,473,600**		**106,386,100**		**6,392,600**		**112,778,700**		**92.08**
		SUB KEGIATAN											
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Musrenbang Tk Kecamatan	100	100,000,000		100,000,000		-		100,000,000		100.00
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Monev Sarpras, Pengendalian Pembangunan , dan Updating Data Sarpras	100	22,473,600		6,386,100		6,392,600		12,778,700		56.86
											Rata-rata capaian kinerja Program (%)		**79.38**
											Predikat kinerja		
		PROGRAM											
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100**	**4,035,350,234**		**808,910,821**		**885,619,674**		**1,694,530,495**		**41.99**
		KEGIATAN											

	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kelurahan**	**100**	**3,796,277,534**		**774,493,621**		**777,659,274**		**1,552,152,895**		**40.89**
		SUB KEGIATAN											
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Baranangsiang		100	7,675,000		-		-		-		0.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukasari		100	4,418,300		-				-		0.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Katulampa		100	11,795,000		-				-		0.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tajur		100	10,000,000		-				-		0.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sindangrasa		100	9,500,000		-				-		0.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sindangsari		100	10,000,000		-				-		0.00
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baranangsiang		1 Paket	308,007,900		8,880,000		52,475,680		61,355,680		19.92

		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukasari		1 Paket	517,899,726		-		16,456,400		16,456,400		3.18
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Katulampa		1 Paket	380,050,000		-		61,277,300		61,277,300		16.12
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tajur		1 Paket	129,450,000		60,295,700		9,704,300		70,000,000		54.07
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindangrasa		1 Paket	204,650,100		1,230,000		86,749,000		87,979,000		42.99
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindangsari		1 Paket	318,831,508		234,437,921		81,696,594		316,134,515		99.15
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baranangsiang		100	430,800,000		107,700,000		107,350,000		215,050,000		49.92
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukasari		100	204,000,000		51,000,000		51,000,000		102,000,000		50.00
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Katulampa		100	636,600,000		157,800,000		157,800,000		315,600,000		49.58
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tajur		100	144,000,000		36,000,000		36,000,000		72,000,000		50.00
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangrasa		100	289,800,000		72,450,000		72,450,000		144,900,000		50.00

		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangsari		100	178,800,000		44,700,000		44,700,000		89,400,000		50.00
		KEGIATAN											
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100**	**239,072,700**		**34,417,200**		**107,960,400**		**142,377,600**		**59.55**
		SUB KEGIATAN											
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Bina Wilayah PKK Kecamatan	100	77,914,800		18,200,000		18,203,000		36,403,000		46.72
			Terlaksananya Bina Wilayah PKK Kelurahan										
			Terpenuhinya Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	80,685,000		-		45,471,300		45,471,300		56.36
			Terselenggaranya Kegiatan STQ Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Bogor										
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengadaan Festival Bazar Ramadhan	100	60,804,700		3,140,000		44,286,100		47,426,100		78.00
			Pengadaan Festival Pelaku UMKM										
			Pengadaan Hari Jadi Bogor										

			TerlaksananyaPembinaan Pelaku Usaha / UMKM										
			Terlaksananya Sosialisasi Pelaku Usaha / UMKM										
	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	Terlaksananya Pemanfaatan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna	100	19,668,200		13,077,200		-		13,077,200		66.49
			Terlaksananya Pemberdayaan Lemabaga Masyarakat										
											Rata-rata capaian kinerja Program (%)		**41.99**
											Predikat kinerja		
		PROGRAM											
	7,01,04	**Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketretiban Umum yang diselesaikan di Tingkat Kecamatan**		**73,999,800**		**18,414,125**		**15,405,775**		**33,819,900**		**45.70**
		KEGIATAN											
	7,01,04,2,01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban umum**	**Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketretiban Umum yang diselesaikan di Tingkat Kecamatan**		**73,999,800**		**18,414,125**		**15,405,775**		**33,819,900**		**45.70**
		SUB KEGIATAN											

	7,01,04,2,01,01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	73,999,800		18,414,125		15,405,775		33,819,900		45.70
											Rata-rata capaian kinerja Program (%)		**45.70**
											Predikat kinerja		
					21,474,557,578		**5,945,542,069**		**5,733,957,437**		**11,679,499,506**		**54.39**
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**54.39**
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bogor Timur

Kecamatan Bogor Timur sebagai pelaksana pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 184 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan aturan tersebut menjelaskan bahwa Kecamatan mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota;
j. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota dan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan dipimpin oleh camat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Camat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Kecamatan;
b. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Kecamatan;
c. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

d. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
f. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
g. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
h. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan di tingkat Kelurahan;
i. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
j. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di tingkat Kecamatan;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan kecamatan dalam mewujudkan Pelayanan Utama adalah Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan memiliki sasaran Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di Lingkup Kecamatan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Kecamatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal, cepat, tepat, efisien dan efektif terutama dalam hal pemberian pelayanan perijinan dan non perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan pelayanan tersebut bertujuan agar mudah terjangkau oleh warga masyarakat sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat dan untuk mendukung perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan Bogor Timur memiliki Terwujudnya Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan di Lingkup Perangkat Daerah dengan indikator Presentase keterlibatan Gender sasaran Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator Persentase tingkat partisipasi pemberdayaan masyarakat aktif di Kecamatan.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bogor Timur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bogor Timur Tahun 2019-2024 adalah terkait Persentase tingkat partisipasi pemberdayaan masyarakat aktif, dan Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah. Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bogor Timur:

Tabel 2.4 (T-C.30.)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bogor Timur

Kota Bogor

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Indikator Tujuan 1 Renstra**																		
	Persentase keterlibatan Gender dalam pemberdayaan masyarakat untuk mendukung perencanaan pembangunan wilayah			%	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100
2	**Indikator Sasaran 1 Renstra**																		
	Persentase tingkat partisipasi pemberdayaan masyarkat			%	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100
3	**Indikator Program Tujuan dan Sasaran 1**																		

	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RT, RW) Tingkat Kecamatan yang aktif			%	NA	NA	65	70	75	NA	NA	65	100	100	NA	NA	65	100	100
	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan			%	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100
	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan			%	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100
	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan			%	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100
	Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan			%	NA	NA	86	88	90	NA	NA	86	88	90	NA	NA	86	88	90
4	**Indikator Tujuan 2 Renstra**																		
	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	BB	BB	A	A	A	BB	BB	A	A	A	BB	BB	A	A	A
5	**Indikator Sasaran 2 Renstra**																		
	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup PD			Nilai	NA	NA	80.01	81	82	NA	NA	80.01	81.50	82	NA	NA	80.01	81.50	82
6	**Indikator Program Tujuan dan Sasaran 2**																		

	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah			Nilai	BB	BB	A	A	A	BB	BB	A	A	A	BB	BB	A	A	A
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah			poin	3.34	3.35	3.40	3.40	3.50	3.34	3.35	3.40	3.64	3.65	3.34	3.35	3.40	3.64	3.65
	Pelayanan administrasi di tingkat kecamatan			%	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100
	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan			%	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bogor Timur

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Kecamatan Bogor Timur memiliki isu strategis (*strategic issued*) yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Aspek Pelayanan Publik, isu strategisnya antara lain:
    a. Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat perlu ditingkatkan
    b. Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan perlu ditingkatkan melalui pelatihan/workshop baik yang diselenggarakan oleh kecamatan maupun perangkat daerah teknis
    c. Daya dukung infrastruktur dan fasilitas penunjang pelayanan publik perlu ditingkatkan
2. Aspek Kelembagaan Masyarakat, isu strategisnya antara lain:
    a. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
    b. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi tugasnya bersama lurah/kelurahan
3. Aspek Ekonomi Unggulan, isu strategisnya antara lain:
    a. Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk
    b. Kurangnya keterlibatan *stakeholder* dan pelaku ekonomi terkait
    c. Penguatan potensi ekonomi lokal sehingga menumbuhkan daya saing perekonomian
4. Aspek Kualitas Lingkungan Hidup, isu strategisnya antara lain:
    a. Lemahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
    b. Perlunya meningkatkan cakupan layanan persampahan
    c. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di semua elemen masyarakat

5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, isu strategisnya antara lain:
    a. Penurunan angka kemiskinan serta ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran miskin terhadap garis kemiskinan
    b. Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan uraian isu strategis tersebut, perlu diformulasikan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti terutama terkait petunjuk teknis dan payung hukum sebagai dasar rujukan pelayanan di setiap bidang/aspek sehingga tercipta keseragaman produk pelayanan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2024

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kota Bogor dilaksanakan dengan berbagai tahapan diantaranya penyusunan rancangan awal dimana dilakukan pembahasan Bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan yang dirumuskan dalam sebuah berita acara kesepakatan yang ditandatangani pihak yang terkait.

Secara umum gambaran tema penyusunan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2024 adalah terkait pemantapan kualitas hidup masyarakat dengan bertumpu pada 3 prioritas pembangunan daerah, yakni:

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang didukung melalui aspek:
    a. Pendidikan
    b. Kesehatan
    c. Kualitas Lingkungan
    d. Penurunan Tingkat Pengangguran
    e. Penanganan Kemiskinan
2. Pembangunan infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal, yang didukung melalui aspek:
    a. Infrastruktur Terintegrasi dan Terstandarisasi
    b. Penataan Transportasi
    c. Kampung Tematik
3. Reformasi Birokrasi
    a. Penataan Organisasi/ Kelembagaan
    b. Penguatan SAKIP
    c. Peningkatan Inovasi Daerah
    d. Penguatan Layanan Pengaduan Masyarakat
    e. Pemberian Reward dan Punishment.

Berdasarkan program prioritas tersebut, setiap perangkat daerah harus berupaya mendukung pencapaian dan perwujudan prioritas pembangunan tersebut.

2.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan Daerah memiliki berbagai pendekatan dalam prosesnya, pendekatan itu diantaranya teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*buttom-up*).

Pendekatan bawah-atas atau *buttom-up* merupakan salah satu perwujudan Pemerintah Daerah yang mendorong partisipasi masyarakat, sebab ide pembangunan untuk saat ini tidak hanya dari pemerintah kepada masyarakat (*top-down*) tetapi juga yang bersifat mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu wadah untuk penyampaian usulan-usulan dari masyarakat, dimana tahapan atau proses musrenbang berlangsung mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota. Kecamatan Bogor Timur melaksanakan musrenbang baik di tingkat kelurahan melalui 6 kelurahan se-Kecamatan Bogor Timur dan juga di tingkat kecamatan. Adapun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pelaksanaan musrenbang di kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan.
2. Camat melaksanakan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan setelah berkoordinasi dengan BAPPEDA kabupaten/kota.
3. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
4. Tata cara pengajuan daftar usulan desa/kelurahan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pembangunan desa.
5. Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.
6. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana

kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.

7. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup:
   a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/ kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
   b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
   c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.
8. Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan Perubahan RKPD kabupaten/kota.

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan tahun 2024 untuk rencana pembangunan tahun 2024 telah menetapkan sub kegiatan pada pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan baik untuk kegiatan yang bersumber dari APBD Kota maupun APBN harus berdasarkan usulan masyarakat yang mana dimusyawarahkan melalui musrenbang. Adapun pagu dari masing-masing kegiatan juga telah ditentukan oleh Bappeda sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan yakni sebesar 10% dari pagu belanja program/kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2024.

Kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Tingkat urgensi penanganan
b. Pemenugan Pelayanan wajib dasar (pendidikan, kesehatan, PUPR, Perumkim, Sosial dan Penanganan Bencana)
c. Mendorong percepatan prioritas pembangunan dalam RPJMD (Peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi)

Berikut daftar usulan masyarakat yang diakomodir oleh 6 kelurahan se-Kecamatan Bogor Timur melalui kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kelurahan serta kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan:

DATA PRIORITAS USULAN MUSRENBANG
TINGKAT KECAMATAN BOGOR TIMUR
TAHUN 2024

no	prioritas	nama pengusul	kamus	uraian usulan	bidang	kelurahan	alamat	RT	RW	volume	satuan	perangkat daerah	tanggal pengusulan	status
1	**P-1**	Suparyono	Pembangunan Drainase Kota	Pengajuan pembuatan drainase ukuran besar	1.Fisik	KEL. TAJUR	9RGC+FHC, Jl. Pd. Tajur Indah, RT.03/RW.01, Tajur, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16134, Indonesia	3	1	130	m2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2022-11-16 11:11:30	Lanjut Musrenbang Kecamatan
2	**P-2**	Ahmad Baedowi	Pembangunan Drainase Lingkungan	saluran air tidak memadai kalau hujan	1.Fisik	KEL. TAJUR	RT 01 RW 01 Kelurahan Tajur	1	1	50	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-23 07:10:48	Lanjut Musrenbang Kecamatan
3	**P-3**	cecep hermawan	Pembangunan Drainase Lingkungan	pemeliharaan drainase lingkungan	1.Fisik	KEL. SINDANGRASA	Jl. Raya Tajur Gg. Babadak No.32, RT.02/RW.04, Sindangrasa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16145, Indonesia	2	4	450	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-24 08:32:34	Lanjut Musrenbang Kecamatan
4	**P-4**	dedi mulyana	Pembangunan Drainase Lingkungan	pembangunan drainase yang merupakan hulu pembuangan air rumah tangga dan hujan dari perumahan warga	1.Fisik	KEL. SINDANGRASA	9R9H+89P, RT.04/RW.06, Sindangrasa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16141, Indonesia	4	6	120	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-28 15:41:05	Lanjut Musrenbang Kecamatan

5	**P-5**	Hendra Gunawan	Pembangunan Drainase Lingkungan	pemeliharaan saluran air	1.Fisik	KEL. SINDANGRASA	kp. muara babadak rt. 01 rw. 12 kelurahan sindangrasa kecamatan bogor timur	1	12	500	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-23 14:25:59	Lanjut Musrenbang Kecamatan
6	**P-6**	Suganda	Pembangunan Drainase Lingkungan	pembangunan saluran air/ drainase di beberapa rt di wilayah rw. 7	1.Fisik	KEL. SINDANGRASA	Jl. Desa Sindangrasa No.60299237, RT.03/RW.07, Sindangrasa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16145, Indonesia	1	7	1200	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-26 22:20:08	Lanjut Musrenbang Kecamatan
7	**P-7**	H. BADRI	Pemeliharaan Drainase Kota	Perlu dilakukan pembuatan saluran air pemukiman dengan memperbesar kapasitas debit aliran air	1.Fisik	KEL. SINDANGSARI	Kp. Wangun Atas RT.06 RW.01, Kel. Sindangsari, Kec. Bogor Timur. Kota Bogor 16146	6	1	73,5	m2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2022-11-23 16:25:56	Lanjut Musrenbang Kecamatan
8	**P-8**	H. SUPRAPTO	Pemeliharaan Drainase Kota	Perlu dilakukan pembuatan saluran air pemukiman dengan memperbesar kapasitas debit aliran air	1.Fisik	KEL. SINDANGSARI	Kp. Wangun Tengah RT.01 RW.03, Kel. Sindangsari, Kec. Bogor Timur. Kota Bogor 16146	1	3	73,5	m2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2022-11-23 16:25:56	Lanjut Musrenbang Kecamatan
9	**P-9**	Ayi Makmun	Pemeliharaan Drainase Kota	Perbaikan drainase dengan tutup agar tidak masuk sampah	1.Fisik	KEL. SUKASARI	Jl.Sukasari 1 Rt.06 Rw.02	6	2	200	m2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2022-11-29 11:43:49	Lanjut Musrenbang Kecamatan
10	**P-10**	Dwi karyaningsih	Pembangunan Drainase Lingkungan	Minta di perbaiki agar selokan bisa di gunakan sebagai mana mestinya	1.Fisik	KEL. BARANANGSIANG	Ciheuleut	1	8	24	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-23 17:14:21	Lanjut Musrenbang Kecamatan

11	**P-11**	Edi Sanjaya	Pembangunan Drainase Lingkungan	pembuatan saluran air / drainase	1.Fisik	KEL. BARANANGSIANG	Jl. Talas Ujung No.27, RT.01/RW.09, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia	1	9	241,25	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-19 21:28:48	Lanjut Musrenbang Kecamatan
12	**P-12**	agung dwi cahyono	Pembangunan Drainase Lingkungan	pembuatan saluran darinase	1.Fisik	KEL. KATULAMPA	Baranangsiang indah RT.12/RW.05, Katulampa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16144, Indonesia	12	5	1000	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-29 15:19:34	Lanjut Musrenbang Kecamatan
13	**P-13**	Opik rw	Pembangunan Drainase Lingkungan	Pembangunan drainase	1.Fisik	KEL. KATULAMPA	RT.05/RW.09, Katulampa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16144, Indonesia	5	9	350	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-22 15:35:24	Lanjut Musrenbang Kecamatan
14	**P-14**	wari_rw	Pembangunan Drainase Lingkungan	Perbaikan saluran air RT 1, RT 2, RT 3 dan RT 4	1.Fisik	KEL. KATULAMPA	9RFJ+F4P, RT.01/RW.14, Katulampa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16144, Indonesia	1	14	500	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-14 21:23:07	Lanjut Musrenbang Kecamatan
15	**P-15**	Nasrum	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	1.Fisik	KEL. SUKASARI	Jl.Sukasari 3 Rt.07 Rw.01	7	1	60	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-12-01 09:49:41	Lanjut Musrenbang Kecamatan
16	**P-16**	Budi Warsito	Pemeliharaan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	1.Fisik	KEL. TAJUR	Jl. Rimba 1 No.26, RT.04/RW.06, Tajur, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16141, Indonesia	4	6	150	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-21 13:19:50	Lanjut Musrenbang Kecamatan

17	**P-17**	Daman hidayat	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan tpt penahan jalan	1.Fisik	KEL. KATULAMPA	9RRF+9VP, Cikondang, RT.11/RW.04, Katulampa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16144, Indonesia	11	4	30	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-14 14:56:24	Lanjut Musrenbang Kecamatan
18	**P-18**	junaedi rw	Pembangunan TPT Permukiman	Pembangunan TPT	1.Fisik	KEL. KATULAMPA	RT 04/RW 07 Kampung Pasir Kelurahan Katulampa	4	7	600	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-24 17:09:49	Lanjut Musrenbang Kecamatan
19	**P-19**	H. Eman Sulaeman	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	perbaikan jalan setapak RT 4 dan 5 RW 13	1.Fisik	KEL. BARANANGSIANG	Jl. Pajajaran Indah V No.22, RT.04/RW.13, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia	4	13	1200	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-29 15:22:25	Lanjut Musrenbang Kecamatan
20	**P-20**	Erwin	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pemeliharaan jalan	1.Fisik	KEL. BARANANGSIANG	Jl Manggis 1 dan manggis 3	5	5	1200	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-25 22:06:49	Lanjut Musrenbang Kecamatan
21	**P-21**	Muhamad Sakolen	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Sering terjadi banjir di sebabkan dampak drenase yang buruk dan tidak ter buka nya got pada permukaan	1.Fisik	KEL. BARANANGSIANG	JALAN DURIAN 2	3	5	250	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-25 21:07:10	Lanjut Musrenbang Kecamatan
22	**P-22**	Dede Mulyadi	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	perbaikan jalan lingkungan	1.Fisik	KEL. TAJUR	JALAN ADI SAHID, JALAN LURAH DAN JALAN PESANTREN RW 03 KELURAHAN TAJUR	1	3	500	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-23 13:15:02	Lanjut Musrenbang Kecamatan
23	**P-23**	Abd.Rasyid Nasution	Pembangunan Jalan Lingkungan	perbaikan jalan setapak	1.Fisik	KEL. SUKASARI	Jl Gardu Tinggi Rt.03 rw.04	3	4	600	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-17 08:55:08	Lanjut Musrenbang Kecamatan

24	**P-24**	Dadang Sutarsa	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pengaspalan	1.Fisik	KEL. SUKASARI	Sukamulya	3	3	1000	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-12-01 10:15:53	Lanjut Musrenbang Kecamatan
25	**P-25**	H. SUPRAPTO	Pemeliharaan Jalan Kota	Perlu dilakukan perbaikan jalan lingkungan dengan pengaspalan	1.Fisik	KEL. SINDANGSARI	Kp. Wangun Tengah RT.04 RW.03, Kel. Sindangsari, Kec. Bogor Timur. Kota Bogor 16146	3	750	m2	m2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2022-11-23 16:25:56	Lanjut Musrenbang Kecamatan
26	**P-26**	H. BADRI	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Perlu dilakukan perbaikan jalan setapak dengan pengaspalan	1.Fisik	KEL. SINDANGSARI	Kp. Wangun Atas RT.06 RW.01, Kel. Sindangsari, Kec. Bogor Timur. Kota Bogor 16146	1	300	m2	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-23 16:25:56	Lanjut Musrenbang Kecamatan
27	**P-27**	acep suryadi	Pembangunan Jembatan Permukiman	mengganti pipa relling jembatan yang sudah rusak	1.Fisik	KEL. SINDANGRASA	9R7R+5P7, RT.01/RW.11, Sindangrasa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16145, Indonesia	4	11	40	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-23 16:25:56	Lanjut Musrenbang Kecamatan
28	**P-28**	Tri Budiyanto	Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Perlu 10 TITIK segera	1.Fisik	KEL. TAJUR	9RFF+P79, Jalan Raya, RT.02/RW.02, Tajur, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16141, Indonesia	2	1	10	Buah	Dinas Perhubungan	2022-11-14 09:52:27	Lanjut Musrenbang Kecamatan
29	**P-29**	IWAN JUANDA	Pembangunan Septic Tank Komunal	Perlu dibangunkan IPAL KOMUNAL dalam penanganan BABS agar limbah rumah tangga tersebut dapat ditanani dengan benar	1.Fisik	KEL. SINDANGSARI	Kp. Lebaksari RT.002 RW.006, Kel. Sindangsari, Kec. Bogor Timur. Kota Bogor 16146	6	1	Unit	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2022-11-23 16:25:56	Lanjut Musrenbang Kecamatan

30	**P-30**	Endang Kurniawan	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Perbaikan gedung serbaguna yang selama ini digunakan untuk Posyandu Sunan Ambu, Ciung Wanara dan Posbindu	1.Fisik	KEL. SUKASARI	Jl. Sukasari III, RT.04/RW.06, Sukasari, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16142, Indonesia	4	6	132	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-11-19 14:42:01	Lanjut Musrenbang Kecamatan
31	**P-31**	Nasrum	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Perbaikan lapangan serbaguna dan penyediaan fasilitas tempat bermain anak	1.Fisik	KEL. SUKASARI	Jl.Sukasari Rt.07 Rw.01	7	1	150	m2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2022-12-01 10:40:06	Lanjut Musrenbang Kecamatan
32	**P-32**	Opik rw	Pelatihan Tanggap Kebakaran	Pelatihan tanggap kebakaran	2.Pemerintahan	KEL. KATULAMPA	RT.03/RW.09, Katulampa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16144, Indonesia	3	9	30	warga	Dinas Pemadam Kebakaran	2022-12-08 17:01:38	Lanjut Musrenbang Kecamatan
33	**P-33**	IWAN JUANDA	Pelatihan Wirausaha Pemuda	Perlu adanya pelatihan dan pembekalan ilmu pengetahuan dalam diri pemuda supaya dapat menumbuhkan kreativitas untuk bisa membuka lapangan usaha	2.Pemerintahan	KEL. SINDANGSARI	Kp. Lebaksari RW.06, Kel. Sindangsari, Kec. Bogor Timur. Kota Bogor 16146	6	1	Pelatihan	Pelatihan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2022-11-23 16:25:56	Lanjut Musrenbang Kecamatan
34	**P-34**	Abd. Rasyid. Nasution	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran	Karna kendaraan pemadam kebakaran tidak masuk ke lokasi	2.Pemerintahan	KEL. SUKASARI	Jln gardu tinggi. Rt 02.Rw.04.Sukasari, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16142, Indonesia	2	4	8	unit	Dinas Pemadam Kebakaran	2022-11-16 11:34:43	Lanjut Musrenbang Kecamatan

35	**P-35**	Undang Umar	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran	Pembuatan Hydran Air dengan ukuran 2,5" x 30m mrk USA di beberapa rw di kelurahan sindangrasa	2.Pemerintahan	KEL. SINDANGRASA	Jl. Muara No.149, RT.02/RW.10, Sindangrasa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16145, Indonesia	2	10	10	Titik	Dinas Pemadam Kebakaran	2022-12-05 09:57:31	Lanjut Musrenbang Kecamatan
36	**P-36**	Aldi Rizki Kuswara Rw. 04	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran	Pengadaan Hydran dan Perlengkapannya Termasuk Wilayah RT 1 s/d 7 RW 4	2.Pemerintahan	KEL. BARANANGSIANG	Kp, Jl. Ciburial Indah No.104, RT.03/RW.04, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia	3	4	30	Unit	Dinas Pemadam Kebakaran	2022-11-19 16:59:59	Lanjut Musrenbang Kecamatan
37	**P-37**	Dwi Tony Sutiyono	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran	Mengingat padatnya jumlah warga diwilayah jika terjadi sesuatu hal semisal kebakaran	2.Pemerintahan	KEL. BARANANGSIANG	Jl. Teratai No.1A, RT.09/RW.06, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia	9	6	3	Unit	Dinas Pemadam Kebakaran	2022-11-19 14:08:42	Lanjut Musrenbang Kecamatan
38	**P-38**	TAUFIK	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran	Pengadaan Hidrant	2.Pemerintahan	KEL. BARANANGSIANG	9RM9+PJC, RT.05/RW.07, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia	5	7	2	unit	Dinas Pemadam Kebakaran	2022-12-01 15:01:04	Lanjut Musrenbang Kecamatan
39	**P-39**	Ujang Sukarma	Penyediaan Alat Olahraga	penyediaan alat olahraga berupa lapangan tenis meja	2.Pemerintahan	KEL. TAJUR	RT 02 RW 05 KELURAHAN TAJUR	2	5	7	Paket	Dinas Pemuda dan Olahraga	2022-11-23 13:00:43	Lanjut Musrenbang Kecamatan
40	**P-40**	tati martati	Pelatihan Budidaya Ikan	pelatihan budidaya ikan/ lele dan cara pengolahan nya di kawasan ktd	3.Ekonomi	KEL. SINDANGRASA	kp. muara RT.02/RW.03, Sindangrasa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16145, Indonesia	1	3	50	orang	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2022-11-29 16:20:15	Lanjut Musrenbang Kecamatan

41	**P-41**	zaenuddin rw	Pelatihan Keterampilan	Pelatihan keterampilan	3.Ekonomi	KEL. KATULAMPA	RT.02/RW.16, Katulampa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16144, Indonesia	2	16	10	warga	Dinas Tenaga Kerja	2022-11-22 18:11:51	Lanjut Musrenbang Kecamatan
42	**P-42**	H. SUPRAPTO	Pendukung Sarana Pertanian	Perlu adanya upaya atau tempat atau agen pangan yang dapat memenuhi ketersediaan pangan yang murah dan terjangkau harganya dan mudah di dapatkan	3.Ekonomi	KEL. SINDANGSARI	Kp. Wangun Tengah RT.01 RW.03, Kel. Sindangsari, Kec. Bogor Timur. Kota Bogor 16146	3	1	Unit	Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2022-11-23 16:25:56	Lanjut Musrenbang Kecamatan
43	**P-43**	Dadang Sutarsa	Prasarana Bibit Hewan dan Tanaman	Membutuhkan permodalan juga tempat pembesaran hewan/kandang	3.Ekonomi	KEL. SUKASARI	Sukamulya	7	3	50	bibit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2022-11-16 11:57:30	Lanjut Musrenbang Kecamatan
44	**P-44**	Ujang Sukarma	Pelatihan UMKM	pelatihan umkm	3.Ekonomi	KEL. TAJUR	RT 02 RW 05 KELURAHAN TAJUR	2	5	50	Per Orang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2022-11-23 12:56:27	Lanjut Musrenbang Kecamatan
45	**P-45**	Ujang Sukarma	Sarana Pendidikan SD	perbaikan sarana dan prasarana SD TAJUR 1 KOTA BOGOR	4.Sosial Budaya	KEL. TAJUR	Gg. Balai Desa No.12, RT.01/RW.05, Tajur, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16141, Indonesia	1	5	1	PAKET	Dinas Pendidikan	2022-11-21 12:56:09	Lanjut Musrenbang Kecamatan
46	**P-46**	BUNYAMIN	Pembangunan Posyandu	Perlunya pembangunan gedung Posyandu agar masyarakat dapat memeriksakan kesehatan dengan dekat	4.Sosial Budaya	KEL. SINDANGSARI	Kp. Lebakkongsi RW.07, Kel. Sindangsari, Kec. Bogor Timur. Kota Bogor 16146	7	40	m2	m2	Dinas Kesehatan	2022-11-23 16:25:56	Lanjut Musrenbang Kecamatan

47	**P-47**	Oding	Penyediaan Alat Kesehatan	pengadaan peralatan sapras kesehatan di pustu sindangrasa sebagai fasilitas pelayanan kesehatan meliputi 1 mobil siaga/ ambulance,kursi, meja dll	4.Sosial Budaya	KEL. SINDANGRASA	9R7Q+G7Q, RT.02/RW.09, Sindangrasa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16145, Indonesia	1	9	25	unit	Dinas Kesehatan	2022-11-28 12:39:56	Lanjut Musrenbang Kecamatan
48	**P-48**	zaenuddin rw	Penyediaan Alat Kesehatan	Penyediaan alat kesehatan posyandu	4.Sosial Budaya	KEL. KATULAMPA	RT 001/016, RT.04/RW.16, Katulampa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16144, Indonesia	1	16	1	posyandu	Dinas Kesehatan	2022-11-22 18:16:47	Lanjut Musrenbang Kecamatan

BAB III

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BOGOR TIMUR TAHUN 2024

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Timur Tahun 2024

Bahwa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor tambahan Anggaran yang diajukan dalam renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp. 23,356,299,891.00 dengan rincian sub kegiatannya adalah sebagai berikut;

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ANS sebesar Rp. 13.556.322.377,-
b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 43.972.200,-
c) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 937.933.300.-
d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 7.200.000,-
e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 673.964.000,-
f) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 273.484.500,-

Dengan Rincian Perubahan Renja Sebagaimana terlampir dalam lampiran matrik renja.

Tabel 2.7 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bogor Timur Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN BOGOR TIMUR							15.260.851.530,00	17.095.668.144,00	18.977.410.457,00							19.377.137.577,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00							6.600.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00							6.600.000,00	
1	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase lembaga kemasyarat (lpm, Rt,rw) Tingkat kecamatan yang aktif (Botim)				75,00 %	100 %	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00							6.600.000,00	

	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW, RT) Tingkat Kecamatan	-			100 %	100 %	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	FK LPM Kecamatan Bogor Timur		6.600.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			6.600.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

	7					UNSUR KEWILAYAHAN							15.254.251.530,00	17.089.068.144,00	18.970.810.457,00								19.370.537.577,00	
	7	01				KECAMATAN							15.254.251.530,00	17.089.068.144,00	18.970.810.457,00								19.370.537.577,00	
2	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.65 Poin	14.765.555.330,00	16.610.372.044,00	18.492.114.357,00								18.881.840.977,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	-			A Point	A Point	47.199.000,00	47.199.000,00	47.199.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		47.199.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			2.850.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan				5 Laporan	5 Laporan	44.349.000,00	44.349.000,00	43.972.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			44.349.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

							Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	-			100 %	100 %	10.611.107.630,00	11.468.756.164,00	11.468.756.164,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		13.608.680.077,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ bulan	56 / 12 Orang/ bulan	10.559.046.630,00	11.416.398.464,00	13.556.322.377,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Reformasi Birokrasi			13.556.322.377,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				1 Laporan	1 Laporan	2.801.000,00	2.801.000,00	2.801.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			2.801.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

							Keuangan Akhir Tahun SKPD																
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	49.260.000,00	49.556.700,00	49.556.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			49.556.700,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	2.413.776.100,00	2.362.289.200,00	2.362.289.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		2.411.344.100,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.588.500,00	11.588.500,00	11.588.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	Reformasi Birokrasi			11.588.500,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

																		an Publik					
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19 Paket	1.554.096.800,00	1.100.923.600,00	937.933.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			1.110.690.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.345.400,00	18.345.400,00	18.345.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			18.345.400,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	464.700.400,00	474.510.400,00	474.510.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	Reformasi Birokrasi			474.600.400,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	79.995.000,00	40.877.300,00	40.877.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			80.071.800,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	7.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	273.050.000,00	704.044.000,00	673.964.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi			704.048.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	651.621.600,00	1.807.744.680,00	1.807.744.680,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal		1.772.766.800,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	282.540.000,00	231.480.000,00	231.480.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			282.540.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	369.081.600,00	1.576.264.680,00	1.576.264.680,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Reformasi Birokrasi			1.490.226.800,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik	-			100 %	100 %	1.041.851.000,00	924.383.000,00	924.383.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		1.041.851.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	366.769.000,00	333.419.000,00	273.484.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			366.769.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	65 Unit	51.450.000,00	51.450.000,00	51.450.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			51.450.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	623.632.000,00	539.514.000,00	539.514.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			623.632.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

3	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat Kecamatan Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan				100 100 % %	100 100 % %	165.623.600,00	165.623.600,00	165.623.600,00							165.623.600,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	-			100 %	100 %	43.150.000,00	43.150.000,00	43.150.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		43.150.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	43.150.000,00	43.150.000,00	43.150.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi			43.150.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Presentase Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	-			3.5 Point	100 %	122.473.600,00	122.473.600,00	122.473.600,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal		122.473.600,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

						di Kecamatan													Terkait			
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	22.473.600,00	22.473.600,00	22.473.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			22.473.600,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
4	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	249.072.800,00	239.072.700,00	239.072.700,00							249.073.000,00	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	-			100 %	100 %	249.072.800,00	239.072.700,00	239.072.700,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		249.073.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	77.914.800,00	77.914.800,00	77.914.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			77.915.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	90.685.000,00	80.685.000,00	80.685.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			90.685.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	60.804.800,00	60.804.700,00	60.804.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			60.804.800,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				4 Laporan	4 Laporan	19.668.200,00	19.668.200,00	19.668.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			19.668.200,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
5	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di				90 %	90 %	73.999.800,00	73.999.800,00	73.999.800,00							74.000.000,00	

						KETERTIBAN UMUM	tingkat kecamatam															
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan	-			90 %	90 %	73.999.800,00	73.999.800,00	73.999.800,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		74.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	73.999.800,00	73.999.800,00	73.999.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			74.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
						KELURAHAN BARANANGSIANG							850.179.800,00	858.807.700,00	858.807.700,00							848.014.700,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							112.324.800,00	112.324.800,00	112.324.800,00							101.339.800,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							112.324.800,00	112.324.800,00	112.324.800,00							101.339.800,00	
6	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.65 Poin	112.324.800,00	112.324.800,00	112.324.800,00							101.339.800,00	

	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	112.324.800,00	112.324.800,00	112.324.800,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		101.339.800,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.766.800,00	4.766.800,00	4.766.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Barangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.218.200,00	6.218.200,00	6.218.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Barangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.754.500,00	2.754.500,00	2.754.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Barangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			2.754.500,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	95.420.000,00	95.420.000,00	95.420.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur,	PENDAPATAN ASLI DAER	-	Reformasi Birokrasi			95.420.000,00	KECAMATAN BOGO

																Barangsiang	AH (PAD)					R TIMUR
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.165.300,00	3.165.300,00	3.165.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Barangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			3.165.300,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							737.855.000,00	746.482.900,00	746.482.900,00							746.674.900,00	
	7	01				KECAMATAN							737.855.000,00	746.482.900,00	746.482.900,00							746.674.900,00	
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan Administrasi di Tingkat Kelurahan				100 %	100 %	737.855.000,00	746.482.900,00	746.482.900,00							746.674.900,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	737.855.000,00	746.482.900,00	746.482.900,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		746.674.900,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.675.000,00	7.675.000,00	7.675.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Barangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			7.675.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	299.380.000,00	308.007.900,00	308.007.900,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Barangsiang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Reformasi Birokrasi			308.199.900,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	430.800.000,00	430.800.000,00	430.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Barangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			430.800.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
						KELURAHAN SUKASARI							467.886.870,00	817.899.726,00	817.899.726,00							839.879.826,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							91.581.700,00	91.581.700,00	91.581.700,00							111.480.100,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							91.581.700,00	91.581.700,00	91.581.700,00							111.480.100,00	
8	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.65 Poin	91.581.700,00	91.581.700,00	91.581.700,00							111.480.100,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	91.581.700,00	91.581.700,00	91.581.700,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal		111.480.100,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

																			Terkait			
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.008.800,00	1.008.800,00	1.008.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			1.008.800,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.471.300,00	6.471.300,00	6.471.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			6.471.300,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.288.900,00	1.288.900,00	1.288.900,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	81.235.000,00	81.355.000,00	81.355.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.577.700,00	1.457.700,00	1.457.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR

																						TIMUR
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							376.305.170,00	726.318.026,00	726.318.026,00							728.399.726,00	
	7	01				KECAMATAN							376.305.170,00	726.318.026,00	726.318.026,00							728.399.726,00	
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan Administrasi di Tingkat Kelurahan				100 %	100 %	376.305.170,00	726.318.026,00	726.318.026,00							728.399.726,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	376.305.170,00	726.318.026,00	726.318.026,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		728.399.726,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	4.418.300,00	4.418.300,00	4.418.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			6.500.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	167.886.870,00	517.899.726,00	517.899.726,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Reformasi Birokrasi			517.899.726,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	204.000.000,00	204.000.000,00	204.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			204.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
						KELURAHAN KATULAMPA							1.136.472.700,00	1.136.650.000,00	1.136.650.000,00							1.136.650.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							108.205.000,00	108.205.000,00	108.205.000,00							108.205.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							108.205.000,00	108.205.000,00	108.205.000,00							108.205.000,00	
10	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.65 Poin	108.205.000,00	108.205.000,00	108.205.000,00							108.205.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	108.205.000,00	108.205.000,00	108.205.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi		108.205.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

																			Vertikal Terkait			
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.262.800,00	3.262.800,00	3.262.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			3.262.800,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.157.300,00	8.157.300,00	8.157.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			8.157.300,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.826.200,00	1.826.200,00	1.826.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			1.826.200,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	93.270.000,00	93.270.000,00	93.270.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			93.270.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.688.700,00	1.688.700,00	1.688.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			1.688.700,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.028.267.700,00	1.028.445.000,00	1.028.445.000,00							1.028.445.000,00	
	7	01				KECAMATAN							1.028.267.700,00	1.028.445.000,00	1.028.445.000,00							1.028.445.000,00	
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan Administrasi di Tingkat Kelurahan				100 %	100 %	1.028.267.700,00	1.028.445.000,00	1.028.445.000,00							1.028.445.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	1.028.267.700,00	1.028.445.000,00	1.028.445.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		1.028.445.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.795.000,00	11.795.000,00	11.795.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			11.795.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	379.872.700,00	380.050.000,00	380.050.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Reformasi Birokrasi			380.050.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	636.600.000,00	636.600.000,00	636.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			636.600.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
						KELURAHAN TAJUR							369.116.700,00	369.450.000,00	369.450.000,00							369.450.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00							86.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00							86.000.000,00	
12	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.65 Poin	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00							86.000.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		86.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			1.357.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.268.700,00	1.268.700,00	1.268.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			1.268.700,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.348.100,00	2.348.100,00	2.348.100,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			2.348.100,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	78.810.000,00	78.810.000,00	78.810.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			78.810.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.216.200,00	2.216.200,00	2.216.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			2.216.200,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

	7					UNSUR KEWILAYAHAN							283.116.700,00	283.450.000,00	283.450.000,00								283.450.000,00	
	7	01				KECAMATAN							283.116.700,00	283.450.000,00	283.450.000,00								283.450.000,00	
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kelurahan				100 %	100 %	283.116.700,00	283.450.000,00	283.450.000,00								283.450.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	283.116.700,00	283.450.000,00	283.450.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		283.450.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	129.116.700,00	129.450.000,00	129.450.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Reformasi Birokrasi			129.450.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			144.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
						KELURAHAN SINDANGRASA							602.402.500,00	602.450.500,00	602.450.500,00							602.415.100,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							98.465.000,00	98.500.400,00	98.500.400,00							98.465.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							98.465.000,00	98.500.400,00	98.500.400,00							98.465.000,00	
14	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 Poin	3.65 Poin	98.465.000,00	98.500.400,00	98.500.400,00							98.465.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	98.465.000,00	98.500.400,00	98.500.400,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		98.465.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.998.900,00	3.998.900,00	3.998.900,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			3.998.900,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.998.600,00	7.998.600,00	7.998.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			7.998.600,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.994.100,00	9.994.100,00	9.994.100,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			9.994.100,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.205.000,00	72.205.000,00	72.205.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			72.205.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.268.400,00	4.303.800,00	4.303.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			4.268.400,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							503.937.500,00	503.950.100,00	503.950.100,00							503.950.100,00	
	7	01				KECAMATAN							503.937.500,00	503.950.100,00	503.950.100,00							503.950.100,00	
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Pelayanan Administrasi di Tingkat Kelurahan				100 %	100 %	503.937.500,00	503.950.100,00	503.950.100,00							503.950.100,00	

						KELURAHAN																
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	503.937.500,00	503.950.100,00	503.950.100,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		503.950.100,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			9.500.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	14 Unit	204.637.500,00	204.650.100,00	204.650.100,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Reformasi Birokrasi			204.650.100,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	289.800.000,00	289.800.000,00	289.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur,	PENDAPATAN ASLI DAER	-	Reformasi Birokrasi			289.800.000,00	KECAMATAN BOGOR

							Masyarakat di Kelurahan									Sindangrasa	AH (PAD)						TIMUR
						KELURAHAN SINDANGSARI						431.380.900,00	593.631.508,00	593.631.508,00							593.629.008,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						85.997.500,00	86.000.000,00	86.000.000,00							85.997.500,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						85.997.500,00	86.000.000,00	86.000.000,00							85.997.500,00	
16	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkata Daerah				3.50 Point	3.65 Point	85.997.500,00	86.000.000,00	86.000.000,00							85.997.500,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	85.997.500,00	86.000.000,00	86.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		85.997.500,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	836.000,00	836.000,00	836.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			836.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan				1 Paket	1 Paket	4.594.000,00	4.594.000,00	4.594.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur,	PENDAPATAN ASLI DAER	-	Reformasi Birokrasi			4.594.000,00	KECAMATAN BOGO

							Kantor yang Disediakan									Sindangsari	AH (PAD)						R TIMUR
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			1.491.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			78.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.076.500,00	1.079.000,00	1.079.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			1.076.500,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							345.383.400,00	507.631.508,00	507.631.508,00							507.631.508,00	
	7	01				KECAMATAN							345.383.400,00	507.631.508,00	507.631.508,00							507.631.508,00	
17	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan Administrasi di Tingkat Kelurahan				100 %	100 %	345.383.400,00	507.631.508,00	507.631.508,00							507.631.508,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan	-			100 %	100 %	345.383.400,00	507.631.508,00	507.631.508,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur Kecamatan, Kelur		507.631.508,00	KECAMATAN BOGOR

							Pembangunan di Kelurahan													ahan dan Instansi Vertikal Terkait			TIMUR
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	7 Unit	156.583.400,00	318.831.508,00	318.831.508,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Reformasi Birokrasi			318.831.508,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	178.800.000,00	178.800.000,00	178.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			178.800.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

	J U M L A H	**15.260.851.530,00**	**21,474,557,800**	**23,356,299,891.00**							**19.377.137.577,00**	

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bogor Timur Tahun 2024 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**,** yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama tahun 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bogor Timur Tahun 2024, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2024 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bogor.

II. KECAMATAN TANAH SAREAL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Tanah Sareal Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program

dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan,.

Perubahan Renja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2024 Disusun Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanah Sareal Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor yaitu "Mewujudkan kota bogor yang ramah keluarga". Disamping itu dalam rangka penyelarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota bogor dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2024 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2024 dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2024 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2024.

1.2.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2024 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor sampai dengan triwulan dua tahun 2024.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam

mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta

5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2024 dengan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2024.

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Renja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2024 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 184 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan
23. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor ..... Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor ..... Seri .....);

1.4 **Sistematika Perubahan**

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan Renja
1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan
1.3 Dasar Hukum Perubahan Renja
1.4 Sistematika Perubahan Renja

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanah Sareal Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Kecamatan Tanah Sareal Tahun 2024

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TANAH SAREAL TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Renja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2024 sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan Kecamatan Bogor Barat. Dalam pelaksanaan program dengan anggaran sebesar Rp. 36.936.145.009,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 51.485.831.489,- atau 52,49 %, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan III sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Juni 2024 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan. Adapun Capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah
KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR
TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD))			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja TA 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5			6			7			8			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100 %		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																							
	7.01.01	KECAMATAN																							
		BIDANG URUSAN																							
		PROGRAM																							

		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT **KEGIATAN**	**Presentase Lembaga kemasyarakatan (LPM, RW, RT) tingkat kecamatan yang aktif**	**75**	%	**6.600.000**	**65**	**%**	**6.000.000**	**75**	%	**6.600.000**	**25,00**	%	**1.650.000**	**25,00**	%	**1.650.000**	**100 %**	**25 %**		**7.650.000**			115,91%	**Camat**	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW, RT) Tingkat Kecamatan**	**75**	%	**6.600.000**	**65**	**%**	**6.000.000**	**75**	%	**6.600.000**	**25,00**	%	**1.650.000**	**25,00**	%	**1.650.000**	**100 %**	**25 %**		**7.650.000**			115,91%	**Kasi Pemerintahan**	
		SUB KEGIATAN																				-					
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	18.880.900	1	Lembaga	20.900.000	75	%	18.880.900	50,00	%	1.650.000	50,00	%	1.650.000	**100 %**	**25 %**		22.550.000			119,43%	Kasi Pemerintahan	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)															**25,00**	%									
Predikat kinerja															**25,00**	%									

		PROGRAM																								
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**	**3,4**	**Point**	**28.360.754.587**	**3,9**	**Point**	**47.012.817.499**	**100**	**%**		25,00	%	**13.985.064.848**	**25,00**	%	**13.985.064.848**	**100 %**	**57,21 %**		**60.997.882.347**			215,08%	Sekcam	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	**A**	**Nilai**		**BB**	**Nilai**				**24.446.935.053**														Sekcam	
		KEGIATAN																								
		KEGIATAN																								
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	**19.496.199.354**	100	%	**18.318.863.776**	100	**%**	**19.496.199.354**	50,00	%	**11.722.134.727**	**25,00**	**%**	**#REF!**	**100,00**	25,00%		**#REF!**			#REF!	**Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan**	
		SUB KEGIATAN											50,00									-				
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98	Orang	19.366.324.354	97	**Orang**	18.269.323.776	98	Orang	19.366.324.354	50,00	bulan	11.664.490.727	25,00	%	11.664.490.727	100,00	25,00%		29.933.814.503			154,57%	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	

	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	129.875.000	2	laporan	49.540.000	2	Laporan	129.875.000	50,00	%	57.644.000	25,00	%	57.644.000	100,00	25,00%		107.184.000			82,53%	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	
		KEGIATAN																								
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**2.405.052.558**	**100**	**%**	**644.401.920**	**100**	**%**	**2.457.566.290**	**50,00**	%	**1.014.425.414**	**41,64**	**%**	**1.023.283.414**	**41,64**	%		**1.667.685.334**				**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	
		SUB KEGIATAN																				-					
	7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**12**	**Paket**	**60.071.017**	**12**	**Paket**	**32.980.000**	**12**	**Paket**	**67.502.117**	**50,00**	**%**	**58.965.200**	**87,35**	**%**	**58.965.200**	**100,00**	87,35%		**91.945.200**			**155,93%**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Seklur 11 Kelurahan**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	28.931.817	1	Paket	13.858.700	1	Paket	28.931.817	50,00	%	16.279.000	56,27	%	16.279.000	100,00	25,00%		30.137.700			104,17%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Tanah Sareal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.147.800	1	Paket	2.139.500	1	Paket	2.147.800	50,00	%	21.478.000	1.000,00		21.478.000	100,00	100,00%		23.617.500			1099,61%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1	Paket	2.235.600	1	Paket	2.159.500	1	Paket	2235600	50,00	%	1.357.600	61		1.357.600	100,00	32,33%		3.517.100			#VALUE!		

		Kantor Kelurahan kebon pedes	Kantor yang Disediakan																						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Kedung Badak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.677.500	1	Paket	748.300	1	Paket	2667500	50,00	%	940.800	35,27		940.800	100,00	100,00 %		1.689.100			#VALUE!	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan kedung jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.812.800	1	Paket	1.451.700	1	Paket	6.812.800	50,00	%	2.357.600	34,61	%	2.357.600	100,00	59,33%		3.809.300			55,91%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Kedung waringin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.528.000	1	Paket		1	Paket	2528000	50,00	%	2.528.000	100,00	%	2.528.000	100,00	26,32%		2.528.000			#VALUE!	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan sukadamai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.465.700	1	Paket	2.130.200	1	Paket	3.465.700	50,00	%	1.913.300	55,21		1.913.300	100,00	44,81%		4.043.500			116,67%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan sukaresmi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.111.600	1	Paket	4.059.000	1	Paket	4.111.600	50,00	%	2.572.800	62,57		2.572.800				6.631.800			161,29%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan cibadak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.623.200	1	Paket	2.661.000	1	Paket	2.623.200	50,00	%	2.623.200	100,00		2.623.200	100,00	47,34%		5.284.200			201,44%	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan kencana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.985.600	1	Paket		1	Paket	4.985.600	50,00	%	4.974.500	99,78		4.974.500	100,00	100,00 %		4.974.500			99,78%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Mekarwangi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.756.000	1	Paket	3.772.100	1	Paket	3.756.000	50,00	%	1.940.400	51,66	%	1.940.400	100,00	42,42%		5.712.500			152,09%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Kayumanis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.236.500	1	Paket		1	Paket	3.236.500	50,00	%		-		-	100,00	100,00 %		-			0,00 %		
	7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**12**	**Paket**	**321.001.288**	**12**	**Paket**	**106.652.850**	**12**	**Paket**	**321.001.288**	**50,00**	**%**	**163.981.844**	**53,84**	%	**172.839.844**	**100,00**	**53,84 %**		**279.492.694**			**87,07%**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Seklur 11 Kelurahan**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	151.626.888	1	Paket	31.320.800,00	1	Paket	151.626.888	50,00	%	75.679.794	49,91	%	75.679.794	100,00	47,54%		107.000.594			70,57%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Tanah sareal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.309.400	1	Paket	4.536.750	1	Paket	10.309.400	50,00	%	6.554.400	63,58	%	6.554.400	100,00	26,77%		11.091.150			107,58%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan kebon pedes	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.931.800	1	Paket	4.072.300	1	Paket	12.931.800	50,00	%	7.995.400	61,83		7.995.400	100,00	25,11%		12.067.700			93,32%		

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kedung Badak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.408.000	1	Paket	4.072.300	1	Paket	30.408.000	50,00	%	16.863.700	55,46		16.863.700	100,00	43,41%		20.936.000			68,85%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan kedung Jaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.071.400	1	Paket	5.430.000	1	Paket	12.071.400	50,00	%	4.808.500	39,83	%	4.808.500	100,00	31,73%		10.238.500			84,82%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kedung Waringin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	15.690.400	1	Paket	7.366.800	1	Paket	15.690.400	50,00	%	7.621.700	48,58	%	7.621.700	100,00	28,67%		14.988.500			95,53%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan sukadamai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	13.819.300	1	Paket	6.271.600	1	Paket	13.819.300	50,00	%	8858000	64,10		8.858.000	-			15.129.600			109,48%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sukaresmi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	9.737.200	1	Paket	6.178.400	1	Paket	9.737.200	50,00	%	6.506.500	66,82	%	6.506.500	100,00	27,92%		12.684.900			130,27%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan cibadak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.781.300	1	Paket	7.216.400	1	Paket	14.781.300	50,00	%	10.527.400	71,22	%	10.527.400	100,00	28,44%		17.743.800			120,04%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan kencana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	19.532.600	1	Paket	10.468.300	1	Paket	19.532.600	50,00	%	9.858.700	50,47		9.858.700	100,00	33,65%		20.327.000			104,07%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan mekarwangi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.560.400	1	Paket	8.752.800	1	Paket	10.560.400	50,00	%	4.509.600	42,70	%	4.509.600	100,00	32,41%		13.262.400			125,59%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kayumanis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	19.532.600	1	Paket	10.966.400	1	Paket	19.532.600	50,00	%	13.056.150	**66,84**		13.056.150	100,00	39,11%		24.022.550			122,99%	Seklur Pabaton	
	7.01.01.2.06.03	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**12**	**Paket**	**141.617.692**	**12**	**Paket**	**19.386.400**	**12**	**Paket**	**141.617.692**	50,00	**%**	**105.525.600**	**74,51**	%	**105.525.600**	**100,00**	74,51%		**124.912.000**			**88,20%**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	

																								dan Seklur 11 Kelurahan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	97.895.892	1	Paket		1	Paket	97.895.892	50,00	%	76.107.000	77,74	%	76.107.000	100,00	19,80%		76.107.000			77,74%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Tanah Sareal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	11.248.100	1	Paket	2.165.800	1	Paket	11.248.100	50,00	%	5.898.400	52,44		5.898.400				8.064.200			71,69%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Kebon pedes	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	3.038.200	1	Paket	2.508.800	1	Paket	3.038.200	50,00	%	1.519.100	50,00	%	1.519.100	100,00	29,15%		4.027.900			132,58%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan kedung badak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.010.400	1	Paket	3.226.400	1	Paket	1.010.400	50,00	%	1.010.400	100,00		1.010.400	100,00	21,72%		4.236.800			419,32%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan kedung jaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	3.524.000	1	Paket	-	1	Paket	3.524.000	50,00	%	1.803.000	51,16	%	1.803.000	100,00	41,99%		1.803.000			51,16%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Kedung waringin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2.915.400	1	Paket	2.500.200	1	Paket	2.915.400	50,00	%	2.915.400	100,00	%	2.915.400	100,00	14,57%		5.415.600			185,76%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan sukadamai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	4.164.500	1	Paket	1.636.000	1	Paket	4.164.500	50,00	%	2.281.800	54,79		2.281.800	100,00	25,26%		3.917.800			94,08%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan sukaresmi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.967.000	1	Paket	-	1	Paket	1.967.000	50,00	%	610.000	31,01		610.000	100,00	15,66%		610.000			31,01%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan cibadak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	4.402.000	1	Paket	4.369.600	1	Paket	4.402.000	50,00	%	4.402.000	100,00	%	4.402.000	100,00	32,61%		8.771.600			199,26%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan kencana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2.811.200	1	Paket	2.979.600	1	Paket	2.811.200	50,00	%	2.811.200	**100,00**		2.811.200				5.790.800			205,99%		
		Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah	1	Paket	4.833.400	1	Paket	-	1	Paket	4.833.400	50,00	%	2.416.700	**50,00**		2.416.700	100,00	9,04%		2.416.700			50,00%		

		Tangga Kelurahan mekarwangi	Tangga yang Disediakan																						
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan kayumanis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	3.807.600	1	Paket	-	1	Paket	3.807.600	50,00	%	3.750.600	**98,50**		3.750.600	100,00	100,00 %		3.750.600			98,50%		
	7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**12**	**Paket**	**1.142.911.748**	**12**	**Paket**	**316.722.670**	**12**	**Paket**	**1.141.911.748**	50,00	**%**	**428.411.910**	**37,52**	%	**428.411.910**	**100,00**	37,52%		**745.134.580**			**65,20%**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Seklur 11 Kelurahan**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	291.896.748	1	Paket	90.382.900	1	Paket	291.896.748	50,00	%	53.836.000	18,44	%	53.836.000	100,00	16,12%		144.218.900			49,41%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Tanah sareal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	58.515.000	1	Paket	18.329.400	1	Paket	58.515.000	50,00	%	28.320.000	48,40	%	28.320.000	100,00	19,00%		46.649.400			79,72%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan kebon pedes	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	94.620.000	1	Paket	24.318.250	1	Paket	94.620.000	50,00	%	19.800.000	20,93	%	19.800.000	100,00	16,55%		44.118.250			46,63%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan kedung badak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	76.275.000	1	Paket	4.146.200	1	Paket	76.275.000	50,00	%	35.861.000	47,02	%	35.861.000	100,00	18,18%		40.007.200			52,45%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahankedung Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	63390000	1	Paket	9.512.500	1	Paket	62390000	50,00	%	27.500.000	44,08	%	27.500.000	100,00	26,62%		37.012.500			58,39%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Kedung waringin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	86.210.000	1	Paket	20.457.500	1	Paket	86.210.000	50,00	%	41.445.000	48,07	%	41.445.000	100,00	23,02%		61.902.500			71,80%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan sukadamai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	67.995.000	1	Paket	21.358.000	1	Paket	67.995.000	50,00	%	33.235.000	48,88	%	33.235.000	100,00	25,00%		54.593.000			80,29%		

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan sukaresmi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	76.860.000	1	Paket	26.360.000	1	Paket	76.860.000	50,00	%	36.195.000	47,09	%	36.195.000	100,00	24,74%		62.555.000			81,39%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Cibadak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	81.510.000	1	Paket	25.407.800	1	Paket	81.510.000	50,00	%	36.814.910	45,17	%	36.814.910	100,00	25,20%		62.222.710			76,34%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan kencana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	77.850.000	1	Paket	27.352.800	1	Paket	77.850.000	50,00	%	35.530.000	45,64	%	35.530.000	100,00	22,44%		62.882.800			80,77%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan mekarwangi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	8246500	1	Paket	25.792.320	1	Paket	8246500	50,00	%	38.270.000	46,41	%	38.270.000	100,00	25,22%		64.062.320			77,68%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Kayumanis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	85.325.000	1	Paket	23.305.000	1	Paket	85.325.000	50,00	%	41.605.000	48,76	%	41.605.000	100,00	27,03%		64.910.000			76,07%		
	7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**12**	**Paket**	**126.573.313**	**12**	**Paket**	**25.941.000**	**12**	**Paket**	**172.655.945**	50,00	**%**	**65.192.700**	**37,76**	%	**65.192.700**	**100,00**	37,76%		**91.133.700**			**72,00%**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Seklur 11 Kelurahan**	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	74.434.713	-	0	-	1	Paket	41.777.560	50,00	%	37.771.000	90,41		**37.771.000**	100,00	17,05%		37.771.000			50,74%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tanah Sareal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.342.400	-	0	-	-	-	2.694.500	50,00	%	1.864.800	69,21		**1.864.800**	-			1.864.800			79,61%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Kebon Pedes	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	6.033.000	1	Paket	2.242.000	1	Paket	17.642.200	50,00	%	2.702.400	44,79		**2.702.400**	100,00	23,29%		4.944.400			81,96%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	921600	1	Paket	1.334.000	1	Paket	13.999.700,00	50,00	%	460.800	50,00		**460.800**	100,00	17,34%		1.794.800			194,75%		

		Kelurahan Kedung Badak																							
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Kedung Jaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2713800	1	Paket	3.120.800	1	Paket	3.979.200	50,00	%	1.260.500	46,45	%	1.260.500	100,00	22,96%		4.381.300			161,45%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Kedung Waringin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.713.800	1	Paket	3.492.600	1	Paket	17.267.900	50,00	%	3.982.000	146,73	%	3.982.000	100,00	27,25%		7.474.600			275,43%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan sukadamai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	6895700	1	Paket	1.790.200	1	Paket	19.904.600	50,00	%	3.542.400	51,37		3.542.400	100,00	12,42%		5.332.600			77,33%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sukaresmi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	4.287.200	1	Paket	6.191.400	1	Paket	4.363.000	50,00	%	2.142.100	49,97	%	2.142.100	100,00	24,38%		8.333.500			194,38%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Cibadak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	7.857.200	1	Paket	1.639.800	1	Paket	15.444.084	50,00	%	3.955.200	50,34	%	3.955.200	100,00	25,67%		5.595.000			71,21%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Kencana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	5.371.100	1	Paket	1.372.800	1	Paket	13.475.000	50,00	%	2.177.000	40,53		2.177.000				3.549.800			66,09%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Mekarwangi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	7.745.800	1	Paket	3.492.600	1	Paket	14.000.000	50,00	%	3.457.000	44,63	%	3.457.000	100,00	33,59%		6.949.600			89,72%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Kayumanis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	5.257.000	1	Paket	1.264.800	1	Paket	8.108.201	50,00	%	1.877.500	35,71		1.877.500	100,00	46,35%		3.142.300			59,77%		
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen		5	Dokumen		5	Dokumen			%				-	100,00			-			#DIV/0!	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	612.877.500	2	Laporan	142.719.000	2	Laporan	612.877.500	50,00	%	192.348.160	31,38	%	192.348.160	100,00	22,67%		335.067.160			54,67%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		KEGIATAN																-				-					
	7.01.01.2.07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemenuhan sarana Prasarana Aparatur**	**100**	**%**	**1.837.793.856**	**100**	**%**	**1.537.229.950**	**100**	**%**	**1.568.193.856**	**50,00**	**%**	**923.284.599**	**50,24**	%	**923.284.599**	**100,00**	58,88%		**2.460.514.549**			**133,88%**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	
		SUB KEGIATAN																-				-					
	7.01.01.2.07.05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	269600000	36	Laporan	214.750.150	36	Laporan	269.600.000	50,00	%	110.052.521	**40,82**	%	110.052.521	100,00	28,46%		324.802.671			120,48%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	7.01.01.2.07.10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.568.193.856	12	Laporan	1.322.479.800	12	Laporan	1.568.193.856	50,00	%	813.232.078	51,86	%	813.232.078	100,00	29,33		2.135.711.878			136,19%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		KEGIATAN																				-					
	7.01.01.2.08	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**262.556.340**	**100**	**%**	**2.065.386.800**	**100**	**%**	**586.274.536**	**50,00**	**%**	**177.895.608**	**30,34**	**%**	**177.895.608**	**100,00**	30,34%		**2.243.282.408**			**854,40%**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	
		SUB KEGIATAN																-				-					

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	190.500.000	6	Unit	190.500.000	6	Unit	190.500.000	50,00	%	58.000.000	30,45	%	58.000.000	100,00	10,65%		248.500.000			130,45%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	33.990.000	5	Unit	177.720.000	5	Unit	197.887.268	50,00	%	81.829.268	41,35	%	81.829.268	100,00	21,58%		259.549.268			763,60%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	38.066.340	-	-	1.697.166.800	3	Unit	197.887.268	50,00	%	38.066.340	19,24		38.066.340	100,00	1,20%		1.735.233.140			4558,44%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
KEGIATAN																													
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	100	%	**4.359.152.479**	-	-	-	100	%	**338.701.017**	50,00	%	147.324.500	43,50		147.324.500	100,00	99,93%		147.324.500			3,38%	**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	
SUB KEGIATAN													50,00																
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel disediakan	71	Unit	338.701.017	-	0	0	72	Unit	338.701.017	50,00	%	147.324.500	43,50		147.324.500	100,00	99,93%		147.324.500			43,50%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yg disediakan	70	unit	871.848.462		0				871.848.462	50,00	%	414.175.000	47,51		414.175.000	100,00	99,93%		414.175.000					
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		**1**	**unit**	3.148.603.000		0				3.148.603.000	50,00	%	108.163.890	3,44		108.163.890	100,00	99,93%		108.163.890					

																Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**25,00**	%									
																Predikat kinerja	**25,00**	%									
		PROGRAM																									
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Pelayanan administrasi di tingkat kecamatan**	**100**	**%**	**277.532.100**	**100**	**%**	**79.530.000**	**100**	**%**	**277.532.100**			**173.862.000**	**62,65**	**%**	**173.862.000**	**100,00**	62,65%		**253.392.000**			**91,30%**	**Camat**	
			Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan	**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**																
		KEGIATAN																				-					
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**100**	**%**	**206.507.100**	**100**	**%**	**39.765.000**	**100**	**%**	**206.507.100**	25,00	%	**102.837.000**	49,80	%	**102.837.000**	**100,00**	49,80%		**142.602.000**			**69,05%**	**Kasi Pemerintahan**	
		SUB KEGIATAN																				-					

	7.01.02.2.02.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	Laporan	206507100	100	%	**39.765.000**	100	%	206507100	50,00	%	102.837.000	49,80	%	102.837.000	100,00	33,73%		**142.602.000**			69,05%	**Kasi Pemerintahan**	
		KEGIATAN																									
	7.01.02.2.04	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Pelayanan masyarakat di Kecamatan**	**100**	**%**	**71.025.000**	**100**	**%**	**39.765.000**	**100**	**%**	**71.025.000**	**50,00**	**%**	**71.025.000**	**100,00**	**%**	**71.025.000**	**100,00**	100,00%		**110.790.000**			**155,99%**	**Kasi Dalbang**	
		SUB KEGIATAN																				**-**					
	7.01.02.2.04.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1	Dokumen	71.025.000	-	0	0	1	Dokumen	71.025.000	50,00	%	71.025.000	100,00		71.025.000	100,00	100,00%		**71.025.000**			100,00%	Kasi Dalbang	
	7.01.02.2.04.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan		1	Laporan	39.765.000	1	Laporan		50,00	%	-		%	-	-	%		39.765.000			#DIV/0!	Kasi Dalbang	
															Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**43,1**	%									
															Predikat kinerja	43,1										
		PROGRAM																									

	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan**	**100**	**%**	**7.476.798.995**	**100**	**%**	**4.299.213.990**	**100**	**%**	**7.210.698.995**	50,00	%	**2.593.655.636**	35,97%	%	**2.593.655.636**	**100,00%**	35,97%		**6.892.869.626**			**92,19%**	**Camat**	
			Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan	**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**		50,00	%													
			Optimalisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**		50,00	%													
		KEGIATAN																									
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**%**	**706.267.790**	**100**	**%**	**214.257.690**	**100**	**%**	**440.167.790**	**50,00**	%	**158.605.000**	36,03%		**158.605.000**	**100,00**	36,03%		**372.862.690**			**52,79%**		
		SUB KEGIATAN																									
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga Kemasyarakatan	273.660.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	122.040.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.560.000	50,00	%	102.620.000	1357 40,74 %		102.620.000	100,00	10,03%		224.660.000			82,09%	Kasi Kemasyarakatan	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Lembaga Kemasyarakatan	369.557.790	2	Lembaga Kemasyarakatan	85.017.690	2	Lembaga Kemasyarakatan	369.557.790	50,00	%	41.250.000	11,16	%	41.250.000	100,00	13,91%		126.267.690			34,17%	Kasi Kemasyarakatan	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	Laporan	43.050.000	3	Laporan		3	Laporan	43.050.000	50,00	%	11.735.000	27,26	%	11.735.000				11.735.000				Kasi Ekonomi	

		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	20.000.000	1	Laporan	7.200.000	1	Laporan	20.000.000	50,00	%	3.000.000	15,00	%	3.000.000				10.200.000			51,00%	Kasi Ekonomi	
		KEGIATAN																								
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan**	**100**	**%**	**6.770.531.205**			**4.084.956.300**	**100**	**%**	**6.770.531.205**	50,00	%	**2.435.050.636**	**35,97%**	**%**	**2.435.050.636**	**100,00**	35,97%		**6.520.006.936**			**96,30%**	**Kelurahan**	
		SUB KEGIATAN																				**-**					
	7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**11**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**103.458.600**	**11**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**27.676.300**	**11**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**103.458.600**	50,00	%	**-**	**0,00%**		**-**	**100,00**	0,00%		**27.676.300**			**26,75%**		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanah sareal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.897.100	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.094.500	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.897.100	50,00	%	-	**-**		-	-	0,00%		2.094.500			19,22%		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebon Pedes	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.501.400	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.094.500	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.501.400	50,00	%	-	**-**		-	-	0,00%		2.094.500			27,92%		

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedung Badak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	8.684.600	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.094.500	1	Lembaga Kemasyarakatan	8.684.600	50,00	%	-	-		-	-	0,00%		2.094.500			24,12%		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedung Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.488.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.094.500	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.488.000	50,00	%	-	-		-	-	0,00%		2.094.500			27,97%		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedung Waringin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	11.614.800	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.094.500	1	Lembaga Kemasyarakatan	11.614.800	50,00	%	-	-		-	-	0,00%		2.094.500			18,03%		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sukadamai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	11.014.800	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.094.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	11.014.800	50,00	%	-	-		-	-	0,00%		2.094.000			19,01%		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukaresmi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	11.037.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.094.500	1	Lembaga Kemasyarakatan	11.037.000	50,00	%	-	-		-	-	0,00%		2.094.500			18,98%		

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cibadak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	8.826.300	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.076.300	1	Lembaga Kemasyarakatan	8.826.300	50,00	%	-	-		-	-	0,00%		2.076.300			23,52%		
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kencana	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	9.364.200	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.094.500	1	Lembaga Kemasyarakatan	9.364.200	50,00	%		0,00%		-	100,00	0,00%		2.094.500			22,37%		
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan mekarwangi	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Panaragan	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.664.400	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.094.500	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.664.400	50,00	%	-	-		-	-	0,00%		2.094.500			19,64%		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kayumanis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.366.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.750.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.366.000	50,00	%	-	-		-	-	0,00%		6.750.000			106,03%		
	7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	9	Unit	**2.799.853.605**	9	Unit	**825.680.000**	9	Unit	**2.799.853.605**	50,00	%	**567.100.635**	**20,25 %**		**567.100.635**	**100,00**	20,25%		**1.392.780.635**			49,74%		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Sareal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	152.250.000	1	Unit	75.680.000	1	Unit	152.250.000	50,00	%	18.847.965	**12,38 %**		18.847.965	-			94.527.965			62,09%		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan kebon Pedes	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	363.391.200	1	Unit	75.000.000	1	Unit	363.391.200	50,00	%	82.881.800	**22,81 %**		82.881.800	-			157.881.800			43,45%		

		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedung Badak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	298.980.900	2	Unit	75.000.000	2	Unit	298.980.900	50,00	%	30.348.686	**10,15 %**		30.348.686	100,00	10,15%		105.348.686			35,24%		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedung jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	166.349.945	2	Unit	75.000.000	2	Unit	166.349.945	50,00	%	23.498.500	**14,13 %**		23.498.500	100,00	14,13%		98.498.500			59,21%		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedung waringin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	243.389.000	1	Unit	75.000.000	1	Unit	243.389.000	50,00	%	18.217.497	**7,48 %**		18.217.497	-			93.217.497			38,30%		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sukadamai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	388.907.070	1	Unit	75.000.000	1	Unit	388.907.070	50,00	%	126.816.588	**32,61 %**		126.816.588	-			201.816.588			51,89%		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sukaresmi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	183.270.090	0	Unit	75.000.000	0	Unit	183.270.090	50,00	%	182.455.129	**99,56 %**		182.455.129	100,00	23,69%		257.455.129			140,48%		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cibadak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	279.700.000	1	Unit	75.000.000	1	Unit	279.700.000	50,00	%		**0,00 %**		-	100,00	61,55%		75.000.000			26,81%		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kencana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	250.565.400	1	Unit	75.000.000	1	Unit	250.565.400	50,00	%	34.757.000	**13,87 %**		34.757.000	-			109.757.000			43,80%		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mekarwangi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	249.100.000	2	Unit	75.000.000	2	Unit	249.100.000	50,00	%	28.949.970	**11,62 %**		28.949.970	-			103.949.970			41,73%		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayumanis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	223.950.000	1	Unit	75.000.000	1	Unit	223.950.000	50,00	%	20.327.500	**9,08 %**		20.327.500	100,00	99,77%		**95.327.500**			42,57%		
		SUB KEGIATAN																				**-**					

	7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**33**	**Pokmas / Ormas**	**3.867.219.000**	**33**	**Pokmas /Ormas**	**3.231.600.000**	**33**	**Pokmas / Ormas**	**3.867.219.000**	**50,00**	**%**	**1.867.950.001**	**48,30**	**%**	**1.867.950.001**	**100,00**	48,30%		**5.099.550.001**			**131,87%**	Kasi Pemtrantib	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Sareal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	195.600.000	3	Pokmas / Ormas	169.200.000	3	Pokmas / Ormas	195.600.000	50,00	%	97.800.000	50,00	%	97.800.000	100,00	50,00%		267.000.000			**136,50%**		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebon Pedes	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	447.498.000	3	Pokmas / Ormas	334.800.000	3	Pokmas / Ormas	447.498.000	50,00	%	193.450.000	43,23	%	193.450.000	100,00	43,23%		528.250.000			**118,05%**		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kedung Badak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	498.000.000	3	Pokmas / Ormas	429.600.000	3	Pokmas / Ormas	498.000.000	50,00	%	249.000.000	50,00	%	249.000.000	100,00	50,00%		678.600.000			**136,27%**		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Jaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	227.400.000	3	Pokmas / Ormas	196.800.000	3	Pokmas / Ormas	227.400.000	50,00	%	113.350.000	49,85	%	113.350.000	100,00	49,85%		310.150.000			**136,39%**		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Waringin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	391.200.000	3	Pokmas / Ormas	338.400.000	3	Pokmas / Ormas	391.200.000	50,00	%	195.600.000	50,00	%	195.600.000	100,00	50,00%		534.000.000			**136,50%**		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukadamai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	378.321.000	3	Pokmas / Ormas	267.600.000	3	Pokmas / Ormas	378.321.000	50,00	%	154.500.000	40,84	%	154.500.000	100,00	40,84%		422.100.000			**111,57%**		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukaresmi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	201.000.000	3	Pokmas / Ormas	174.000.000	3	Pokmas / Ormas	201.000.000	50,00	%	100.500.000	50,00	%	100.500.000	100,00	50,00%		274.500.000			**136,57%**		

		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibadak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	398.400.000	3	Pokmas / Ormas	344.400.000	3	Pokmas / Ormas	398.400.000	50,00	%	198.850.001	49,91	%	198.850.001	100,00	49,91%		543.250.001			**136,36%**		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Babakan Kencana	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	442.800.000	3	Pokmas / Ormas	382.800.000	3	Pokmas / Ormas	442.800.000	50,00	%	221.400.000	50,00	%	221.400.000	100,00	50,00%		604.200.000			**136,45%**		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mekarwangi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	393.000.000	3	Pokmas / Ormas	339.600.000	3	Pokmas / Ormas	393.000.000	50,00	%	196.500.000	50,00	%	196.500.000	100,00	50,00%		536.100.000			**136,41%**		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayumanis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	294.000.000	3	Pokmas / Ormas	254.400.000	3	Pokmas / Ormas	294.000.000	50,00	%	147.000.000	50,00	%	147.000.000	100,00	50,00%		401.400.000			**136,53%**		
														Rata-rata capaian kinerja Program (%)		**11,77**	**%**					-				
														Predikat kinerja		**11,77**	%					-				
		PROGRAM																				-				
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan**	**86**	%	**125.786.500**	**86**	**%**	**88.270.000**	**86**	**%**	**125.786.500**	25,00	%	**76.951.500**	**61,18**	**%**	**76.951.500**	**100,00**	19,23%		**165.221.500**		131,35%	**Camat**	
		KEGIATAN																				-				
	7.01.04.2.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	86	%	**125.786.500**	86	%	**88.270.000**	86	%	**125.786.500**	25,00	%	**76.951.500**	**61,18**	**%**	**76.951.500**	**100,00**	19,23%		**165.221.500**		131,35%	**Kasi Trantib**	

		SUB KEGIATAN																		-					
	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	125.786.500	2	Laporan	88.270.000	2	Laporan	125.786.500	25,00	%	76.951.500	**61,18**	**%**	76.951.500	100,00	19,23%		165.221.500		131,35%	**Kasi Trantib**	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)															**19,23**										
Predikat kinerja															**19,23**										
						36.247.472.182			**51.485.831.489**			**32.067.552.648**			**16.831.183.984**	**52,49 %**	**%**	**16.831.183.984**	**52,49**	**%**						
JUMLAH																									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												**50,00 %**			**52,49 %**	**%**									
Predikat kinerja												**50,00 %**													
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												**50,00 %**													
Predikat Kinerja												**50,00 %**													

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: Penyerapan sudah sesuai dengan target Rencana Anggaran Kas
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: Ada beberapa Anggaran Belanja yang harus dilakukan Pergeseran dan Perubahan Anggaran
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Melakukan Monev Capaian Kinerja
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Melakukan Monev Capaian Kinerja

BAB III
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN TANAH SAREAL TAHUN 2024

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Tanah Sareal Tahun 2024

Bahwa Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tambahan Anggaran yang diajukan dalam renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Tanah Sareal sebesarRp.36.936.145.009,- dengan rincian sub kegiatannya adalah sebagai berikut;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ANS sebesar Rp. 21.477.527.714,00.-
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD sebesar 119.555.000,00.-
c. Penyedia Bahan Logistik Kantor sebesar Rp.142.046.748,00,-
d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp.553.899.000,-
e. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp.254.600.000,-
f. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp.735.066.290,-
g. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp.244.720.000,-
h. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sebesar 200.337.199,-
i. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan sebesar 100.586.500,-
j. Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan Kedung Badak sebesar Rp. 298.744.700,-
k. Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan Kedung Badak sebesar Rp. 298.744.700,-

Dengan Rincian Perubahan Renja Sebagaimana terlampir dalam lampiran matrik renja.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						KECAMATAN TANAH SAREAL							27.865.713.219,00	29.007.984.604,00	31.247.875.144,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.880.900,00	18.880.900,00	18.880.900,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							18.880.900,00	18.880.900,00	18.880.900,00		
1	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RT, RW) Tingkat Kecamatan yang aktif				75 %	100 %	18.880.900,00	18.880.900,00	18.880.900,00		
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, RT, RW) Tingkat kecamatan yang aktif	-			100 %	100%	18.880.900,00	18.880.900,00	18.880.900,00		
	2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				3 Unit	3 Unit	18.880.900,00	18.880.900,00	18.880.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							27.846.832.319,00	28.989.103.704,00	31.228.994.244,00		
	7	01				KECAMATAN							27.846.832.319,00	28.989.103.704,00	31.228.994.244,00		
2	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 point	3.57 Point	27.289.242.763,00	28.074.268.805,00	30.386.868.445,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Presentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	18.513.375.237,00	19.496.199.354,00	19.496.199.354,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/bulan	97 Orang/bulan	18.381.046.737,00	19.366.324.354,00	21.313.573.094,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	132.328.500,00	129.875.000,00	119.555.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	1.520.864.210,00	1.257.663.558,00	1.257.663.558,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28.931.817,00	28.931.817,00	28.931.817,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	190.051.425,00	151.626.888,00	151.626.888,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	227.310.684,00	97.895.892,00	97.895.892,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	457.706.316,00	291.896.748,00	142.046.748,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	125.276.968,00	74.434.713,00	74.434.713,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	491.587.000,00	612.877.500,00	568.899.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	-			100 %	100 %	5.530.108.070,00	4.359.158.479,00	4.359.158.479,00		
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	605.736.465,00	338.707.017,00	338.707.017,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	1.664.034.605,00	871.848.462,00	871.848.462,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.260.337.000,00	3.148.603.000,00	3.148.603.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	462.905.420,00	1.837.793.856,00	1.837.793.856,00		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	269.600.000,00	269.600.000,00	254.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	193.305.420,00	1.568.193.856,00	1.568.193.856,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik	-			100 %	100 %	1.261.989.826,00	1.123.453.558,00	1.123.453.558,00		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	190.500.000,00	190.500.000,00	190.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	336.423.536,00	197.887.268,00	197.887.268,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	735.066.290,00	735.066.290,00	1.319.565.690,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelayanan administrasi di tingkat kecamatan				100 %	100 %	100.091.100,00	278.432.100,00	278.432.100,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-			100 %	100 %	43.007.100,00	206.507.100,00	206.507.100,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	43.007.100,00	206.507.100,00	206.507.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	-			100 %	100 %	57.084.000,00	71.925.000,00	71.925.000,00		
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan											

							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	57.084.000,00	71.925.000,00	71.925.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan				100 %	100 %	381.115.456,00	510.616.299,00	463.107.199,00		
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			100 %	100 %	381.115.456,00	510.616.299,00	510.616.299,00		
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				0 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	235.980.000,00	273.660.000,00	244.720.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	120.335.456,00	218.906.299,00	200.337.199,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0 Laporan	1 Laporan	18.800.000,00	12.050.000,00	12.050.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

5	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan				90 %	90 %	76.383.000,00	125.786.500,00	100.586.500,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	-			90 %	90 %	76.383.000,00	125.786.500,00	125.786.500,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	76.383.000,00	125.786.500,00	100.586.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN TANAH SAREAL							443.073.960,00	443.309.800,00	443.309.800,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							84.562.700,00	84.562.700,00	84.562.700,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							84.562.700,00	84.562.700,00	84.562.700,00		
6	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.5 point	3.5 point	84.562.700,00	84.562.700,00	84.562.700,00		
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	84.562.700,00	84.562.700,00	84.562.700,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.147.800,00	2.147.800,00	2.147.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.309.400,00	10.309.400,00	10.309.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.248.100,00	11.248.100,00	11.248.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	0 0	58.515.000,00	58.515.000,00	58.515.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.342.400,00	2.342.400,00	2.342.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							358.511.260,00	358.747.100,00	358.747.100,00		
	7	01				KECAMATAN							358.511.260,00	358.747.100,00	358.747.100,00		
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan				100 %	100 %	358.511.260,00	358.747.100,00	358.747.100,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	100 %	358.511.260,00	358.747.100,00	358.747.100,00		

	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.897.100,00	10.897.100,00	10.897.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	152.014.160,00	152.250.000,00	152.250.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	195.600.000,00	195.600.000,00	195.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN KEBON PEDES							730.245.700,00	937.249.200,00	937.249.200,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							112.498.600,00	118.858.600,00	118.858.600,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							112.498.600,00	118.858.600,00	118.858.600,00		
8	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 point	3.50 point	112.498.600,00	118.858.600,00	118.858.600,00		
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	112.498.600,00	118.858.600,00	118.858.600,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.235.600,00	2.235.600,00	2.235.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.931.800,00	12.931.800,00	12.931.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.038.200,00	3.038.200,00	3.038.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	88.260.000,00	94.620.000,00	94.620.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.033.000,00	6.033.000,00	6.033.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							617.747.100,00	818.390.600,00	818.390.600,00		
	7	01				KECAMATAN							617.747.100,00	818.390.600,00	818.390.600,00		
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan				100 %	100 %	617.747.100,00	818.390.600,00	818.390.600,00		

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	617.747.100,00	818.390.600,00	818.390.600,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	7.501.400,00	7.501.400,00	7.501.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	222.645.700,00	363.391.200,00	363.391.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	387.600.000,00	447.498.000,00	447.498.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN KEDUNG BADAK							916.980.900,00	916.958.000,00	916.721.800,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							111.315.400,00	111.292.500,00	111.292.500,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							111.315.400,00	111.292.500,00	111.292.500,00		
10	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 point	3.50 point	111.315.400,00	111.292.500,00	111.292.500,00		

	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	111.315.400,00	111.292.500,00	111.292.500,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.677.500,00	2.677.500,00	2.677.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.415.900,00	30.408.000,00	30.408.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.010.400,00	1.010.400,00	1.010.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	76.290.000,00	76.275.000,00	76.275.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	921.600,00	921.600,00	921.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							805.665.500,00	805.665.500,00	805.429.300,00		
	7	01				KECAMATAN							805.665.500,00	805.665.500,00	805.429.300,00		

11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan				100 %	100 %	805.665.500,00	805.665.500,00	805.429.300,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	100 %	805.665.500,00	805.665.500,00	805.665.500,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.684.600,00	8.684.600,00	8.684.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	298.980.900,00	298.980.900,00	298.744.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	498.000.000,00	498.000.000,00	498.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN KEDUNG JAYA							488.964.280,00	489.749.945,00	489.749.945,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							88.512.000,00	88.512.000,00	88.512.000,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							88.512.000,00	88.512.000,00	88.512.000,00		

12	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah				3.50 A poin poin	3.50 A poin poin	88.512.000,00	88.512.000,00	88.512.000,00		
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	88.512.000,00	88.512.000,00	88.512.000,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.812.800,00	6.812.800,00	6.812.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.071.400,00	12.071.400,00	12.071.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.524.000,00	3.524.000,00	3.524.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	63.390.000,00	63.390.000,00	63.390.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.713.800,00	2.713.800,00	2.713.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							400.452.280,00	401.237.945,00	401.237.945,00		
	7	01				KECAMATAN							400.452.280,00	401.237.945,00	401.237.945,00		
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan				100 %	100 %	400.452.280,00	401.237.945,00	401.237.945,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	400.452.280,00	401.237.945,00	401.237.945,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	7.488.000,00	7.488.000,00	7.488.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	165.564.280,00	166.349.945,00	166.349.945,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	227.400.000,00	227.400.000,00	227.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN KEDUNG WARINGIN							760.905.200,00	762.585.200,00	762.585.200,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							116.371.400,00	116.381.400,00	116.381.400,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							116.371.400,00	116.381.400,00	116.381.400,00		
14	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 point	3.50 point	116.371.400,00	116.381.400,00	116.381.400,00		
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	116.371.400,00	116.381.400,00	116.381.400,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.528.000,00	2.528.000,00	2.528.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.690.400,00	15.690.400,00	15.690.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.915.400,00	2.915.400,00	2.915.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	86.200.000,00	86.210.000,00	86.210.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.037.600,00	9.037.600,00	9.037.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							644.533.800,00	646.203.800,00	646.203.800,00		
	7	01				KECAMATAN							644.533.800,00	646.203.800,00	646.203.800,00		
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan				100 %	100 %	644.533.800,00	646.203.800,00	646.203.800,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	644.533.800,00	646.203.800,00	646.203.800,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	11.014.800,00	11.614.800,00	11.614.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	242.319.000,00	243.389.000,00	243.389.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	391.200.000,00	391.200.000,00	391.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN SUKADAMAI							624.578.070,00	874.583.070,00	874.583.070,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							96.985.200,00	96.340.200,00	96.340.200,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							96.985.200,00	96.340.200,00	96.340.200,00		
16	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 point	3.50 point	96.985.200,00	96.340.200,00	96.340.200,00		
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	96.985.200,00	96.340.200,00	96.340.200,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.465.700,00	3.465.700,00	3.465.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13.819.300,00	13.819.300,00	13.819.300,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.164.500,00	4.164.500,00	4.164.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	68.795.000,00	67.995.000,00	67.995.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.740.700,00	6.895.700,00	6.895.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							527.592.870,00	778.242.870,00	778.242.870,00		
	7	01				KECAMATAN							527.592.870,00	778.242.870,00	778.242.870,00		
17	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan				100 %	100 %	527.592.870,00	778.242.870,00	778.242.870,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	527.592.870,00	778.242.870,00	778.242.870,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.014.800,00	11.014.800,00	11.014.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	2 Unit	207.578.070,00	388.907.070,00	388.907.070,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	309.000.000,00	378.321.000,00	378.321.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN SUKARESMI							492.270.090,00	492.270.090,00	492.270.090,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							96.963.000,00	96.963.000,00	96.963.000,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							96.963.000,00	96.963.000,00	96.963.000,00		
18	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 point	3.50 point	96.963.000,00	96.963.000,00	96.963.000,00		
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	96.963.000,00	96.963.000,00	96.963.000,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.111.600,00	4.111.600,00	4.111.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.737.200,00	9.737.200,00	9.737.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.967.000,00	1.967.000,00	1.967.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	76.860.000,00	76.860.000,00	76.860.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.287.200,00	4.287.200,00	4.287.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							395.307.090,00	395.307.090,00	395.307.090,00		
	7	01				KECAMATAN							395.307.090,00	395.307.090,00	395.307.090,00		
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan				100 %	100 %	395.307.090,00	395.307.090,00	395.307.090,00		

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	395.307.090,00	395.307.090,00	395.307.090,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	11.037.000,00	11.037.000,00	11.037.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	1 Unit	183.270.090,00	183.270.090,00	183.270.090,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	201.000.000,00	201.000.000,00	201.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN CIBADAK							797.936.490,00	798.100.000,00	798.100.000,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							111.173.700,00	111.173.700,00	111.173.700,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							111.173.700,00	111.173.700,00	111.173.700,00		
20	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 point	3.50 point	111.173.700,00	111.173.700,00	111.173.700,00		

	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	111.173.700,00	111.173.700,00	111.173.700,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.623.200,00	2.623.200,00	2.623.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	14.781.300,00	14.781.300,00	14.781.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.402.000,00	4.402.000,00	4.402.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	81.510.000,00	81.510.000,00	81.510.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.857.200,00	7.857.200,00	7.857.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							686.762.790,00	686.926.300,00	686.926.300,00		
	7	01				KECAMATAN							686.762.790,00	686.926.300,00	686.926.300,00		

21	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan				100 %	100 %	686.762.790,00	686.926.300,00	686.926.300,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	686.762.790,00	686.926.300,00	686.926.300,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	8.826.300,00	8.826.300,00	8.826.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	2 Unit	279.536.490,00	279.700.000,00	279.700.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	398.400.000,00	398.400.000,00	398.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN MEKARWANGI							762.126.270,00	762.125.000,00	762.125.000,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							109.335.600,00	109.360.600,00	109.360.600,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							109.335.600,00	109.360.600,00	109.360.600,00		

22	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 point	3.50 point	109.335.600,00	109.360.600,00	109.360.600,00		
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	109.335.600,00	109.360.600,00	109.360.600,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.756.000,00	3.756.000,00	3.756.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.720.300,00	10.560.400,00	10.560.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.833.400,00	4.833.400,00	4.833.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82.440.000,00	82.465.000,00	82.465.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.585.900,00	7.745.800,00	7.745.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							652.790.670,00	652.764.400,00	652.764.400,00		
	7	01				KECAMATAN							652.790.670,00	652.764.400,00	652.764.400,00		
23	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan				100 %	100 %	652.790.670,00	652.764.400,00	652.764.400,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	100 %	652.790.670,00	652.764.400,00	652.764.400,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.664.400,00	10.664.400,00	10.664.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	249.126.270,00	249.100.000,00	249.100.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	393.000.000,00	393.000.000,00	393.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN KENCANA							813.340.100,00	813.280.100,00	813.280.100,00		

	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							110.610.500,00	110.550.500,00	110.550.500,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							110.610.500,00	110.550.500,00	110.550.500,00		
24	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 point	3.50 point	110.610.500,00	110.550.500,00	110.550.500,00		
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	100 %	110.610.500,00	110.550.500,00	110.550.500,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.985.600,00	4.985.600,00	4.985.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.532.600,00	19.532.600,00	19.532.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.811.200,00	2.811.200,00	2.811.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	77.910.000,00	77.850.000,00	77.850.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.371.100,00	5.371.100,00	5.371.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							702.729.600,00	702.729.600,00	702.729.600,00		
	7	01				KECAMATAN							702.729.600,00	702.729.600,00	702.729.600,00		
25	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan				100 %	100 %	702.729.600,00	702.729.600,00	702.729.600,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	100 %	702.729.600,00	702.729.600,00	702.729.600,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	9.364.200,00	9.364.200,00	9.364.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	250.565.400,00	250.565.400,00	250.565.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	442.800.000,00	442.800.000,00	442.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN KAYUMANIS							637.938.560,00	637.950.000,00	637.950.000,00		

	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							113.634.000,00	113.634.000,00	113.634.000,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							113.634.000,00	113.634.000,00	113.634.000,00		
26	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah				3.50 point	3.50 point	113.634.000,00	113.634.000,00	113.634.000,00		
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	113.634.000,00	113.634.000,00	113.634.000,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.236.500,00	3.236.500,00	3.236.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.007.900,00	16.007.900,00	16.007.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.807.600,00	3.807.600,00	3.807.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	85.325.000,00	85.325.000,00	85.325.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.257.000,00	5.257.000,00	5.257.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							524.304.560,00	524.316.000,00	524.316.000,00		
	7	01				KECAMATAN							524.304.560,00	524.316.000,00	524.316.000,00		
27	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan				100 %	100 %	524.304.560,00	524.316.000,00	524.316.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	-			100 %	100 %	524.304.560,00	524.316.000,00	524.316.000,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	6.366.000,00	6.366.000,00	6.366.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	223.938.560,00	223.950.000,00	223.950.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	294.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
												J U M L A H	**27.865.713.219,00**	**29.007.984.604,00**	**31.247.875.144,00**		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2024 merupakan tindaklanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tanah Sareal Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor

Perubahan Renja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan progran kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2024 dalam menjalankan peran dan fungsinya.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan yang diakibatkan oleh perkembangan keadaaan sehingga mengharuskan dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja. Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2024 dilakukan karena jumlah pendapatan, penambahan jumlah tempat tidur yang meningkat dan antusias warga bogor terhadap pelayanan RSUD sehingga memacu motivasi RSUD untuk berbenah. Mengingat hal tersebut dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD perubahan tahun 2024 dan dijadikan dasar penyusunan RKA perubahan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahm dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 tahun 2019 tentang klasisifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Percepatan penanganan COVID-19 dilingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran klasisifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
23. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2021 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2021 dalam rangka penanganan COVID-19, serta Pengaman Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambhan Lembaran Daerah Nomor 45);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019;
32. Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2019-2024.
33. Peraturan Walikota Bogor Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2019-2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Penyusunan Rencana Kerja Perubahan RSUD Kota Bogor tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman kerja tahun 2024 sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dengan melihat Renstra Perubahan RSUD Kota Bogor tahun 2019-2024 dan mengacu kepada RKPD perubahan Kota Bogor tahun 2024.
2. Tujuan

   Penyusunan Rencana Kerja Perubahan RSUD Kota Bogor Tahun 2024 bertujuan untuk:
   - Mengetahui capaian kinerja pada semester I tahun 2024 terhadap rencana kerja dan rencana strategis yang telah ditetapkan.
   - Memberikan landasan penyusunan KUPA dan PPAS tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2024
   - Memperkirakan capaian kinerja tahun 2024 terhadap rencana kerja dan rencana strategis yang telah ditetapkan.
   - Dasar bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
   - Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RENJA PERUBAHAN RSUD Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja Perubahan, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA

Memuat hasil evaluasi Renja semester I tahun 2023 dan capaian Renstra RSUD Kota Bogor, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Pereangkat Daerah, review terhadap RKPD perubahan serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi terhadap kebijakan daerah dan, tujuan dan sasaran Renja Perengkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi uraian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Perangkat Daerah, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung prioritas pembangunan RKPD Perubahan, Rumusan program kegiatan serta pendanaan perubahan tahun

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh RSUD Kota Bogor pada triwulan II Tahun Anggaran 2024, dilakukan untuk mengetahui realisasi program/kegiatan sampai dengan semester I terhadap target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, mengetahui faktor faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan serta kendala yang dihadapi dan menentukan perkiraan pencapaian target kinerja hasil/keluaran pada akhir tahun.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA

Evaluasi pelaksanaan renja RSUD Kota Bogor triwulan II tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi capaian kinerja terhadap indikator sasaran Renja dan Renstra dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja triwulan II tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra RSUD Kota Bogor.

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kota Bogor Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kota Bogor Tahun 2024 (Semester I)

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM	SATUAN	TARGET		REALISASI	
					K	Rp.	K	Rp.
Misi: Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT								
Tujuan: Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor			Indeks Reformasi Birokrasi	Point	A	-	-	10.063.993.141
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor			Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	82	-	-	10.063.993.141
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Point	3,55	18.314.948.047	3,72	10.063.993.141
	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	%	100	18.314.948.047	100	10.063.993.141
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	220	18.314.948.047	219	10.063.993.141
Tujuan: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kuratif			Angka Harapan Hidup saat lahir	Point	74,18		-	180.395.038.393
Sasaran:			Net Death Rate (NDR)	‰	≤ 24		34,05	180.395.038.393

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM	SATUAN	TARGET		REALISASI	
					K	Rp.	K	Rp.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan								
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pasien yang dilayani	%	100	310.344.190.247	100	180.395.038.393
	a	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKP Kewenangan Daerah	%	85,25	39.459.190.247	89,22	-
	-	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	70	39.459.190.247	-	-
	b	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Kota Bogor	%	94	270.885.000.000	92,84	180.395.038.393
	-	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	2	270.885.000.000	1	180.395.038.393

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Persentase Pasien yang Dilayani Tahun 2024 (Semester I)

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pasien yang dilayani	100%	100%	100%

Tabel 2.3 Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 (s.d Semester I)

No	Indikator SPM	Target 2024	Capaian	Hasil	Permasalahan
1	**IGD**				
a	Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat < 5 menit	90%	100%	Tercapai	-
b	Pemberi pelayanan medis kegawatdaruratan yang bersertifikat ACLS/ATLS (khusus Dokter IGD)	96%	100%	Tercapai	
2	**Rawat Jalan**				
a	Waktu tunggu Rawat Jalan (WTRJ) < 60 menit	88%	91,56 %	Tercapai	
b	Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan	90%	93,3%	Tercapai	
c	Presentase pasien TB berisiko TB-HIV yang dikonseling (PTBP)	90%	100%	Tercapai	
3	**Rawat Inap**				
a	Net Death Rate (NDR) 2 x 24 jam	≤24%	34,05 %	Belum Tercapai	Pasien datang dengan kondisi yang sudah gawat
b	Bed Occupancy Rate (BOR) Non Covid	88%	70,65 %	Belum Tercapai	• Peningkatan jumlah pasien rawat inap
c	Kepuasan Pelanggan Rawat Inap	90%	93%	Tercapai	
d	TB berisiko TB-HIV yang dikonseling	90%	100	Tercapai	
4	**Bedah**				
a	Waktu tunggu operasi elektif < 7 hari	92%	96,05 %	Tercapai	-
5	**Persalinan dan Perinatologi**				
a	Kejadian kematian Ibu Persalinan karena Pendarahan	≤1%	0%	Tercapai	
b	Kejadian kematian Ibu Persalinan karena pre eklamsi/eklamsi	≤30%	0%	Tercapai	-
c	Kejadian kematian Ibu Persalinan karena sepsis	≤0,2%	0%	Tercapai	
d	Pemberi pelayanan persalinan dengan Tindakan Operasi (Dokter Anak Pendamping SC)	100%	100%	Tercapai	

No	Indikator SPM	Target 2024	Capaian	Hasil	Permasalahan
e	Presentase kemampuan menangani BBLSR < 1500 - 2500 gr	100%	86,41 %	Belum Tercapai	Kondisi pasien yang sudah gawat
6	**Pelayanan Intensif**				
a	Follow Up Pasien Pre-Operasi dokter anastesi	100%	100%	Tercapai	-
b	Lama Perawatan Intensif untuk kembali ke ruangan perawatan biasa ≤ 5 hari	50%	100%	Tercapai	-
7	**Lab Patologi Klinik**				
a	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium PK untuk pemeriksaan Kimia Klinik dan darah rutin < 140 menit	90%	87,09 %	Belum Tercapai	Banyaknya sampel yang diperiksa karena lonjakan kasus Covid-19
b	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Laboratorium	100%	100%	Tercapai	
8	**Lab Patologi Anatomi**				
a	Waktu tunggu hasil diagnosa PA				
	1. Biasa max 7 hari	80%	91,39 %	Tercapai	
	2. Kasus sulit max 14 hari	80%	99%	Tercapai	
b	Jumlah permintaan tinjau ulang dari klinisi dalam satu tahun < 5 kasus	80%	100%	Tercapai	
9	**Radiologi**				
a	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax kurang dari 3 jam	80%	82,52 %	Tercapai	
b	Kejadian kegagalan pelayanan radiologi	≤2%	0,35%	Tercapai	
c	Pembatalan pemeriksaan radiologi yang dijadwalkan	≤10%	0%	Tercapai	
10	**Farmasi**				
a	Waktu tunggu pelayanan				
	1) Obat jadi < 45 menit	80%	82,09 %	Tercapai	
	2) Obat racikan < 1 jam	80%	81,98 %	Tercapai	
b	Ketersediaan obat yang terstandarisasi	85%	100%	Tercapai	
11	**Gizi**				
a	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien yang sudah terjadwal	100%	100%	Tercapai	
b	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	94%	Belum Tercapai	Kurangnya ketelitian petugas dalam pemberian makanan
12	**Rekam Medik**				
a	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	90%	98,5%	Belum Tercapai	
b	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	100%	98,6%	Belum Tercapai	• Masih ditemukan status yang belum lengkap
13	**Medical Check Up (MCU)**				
a	Waktu tunggu penyelesaian pemeriksaan test kesehatan 1 x 24 jam	90%	100	Tercapai	
	Manajemen				

No	Indikator SPM	Target 2024	Capaian	Hasil	Permasalahan
1	**Bagian Umum dan Hukum**				
	Sub Bag Umum dan Rumah Tangga				
a	Ketepatan kalibrasi internal alat -alat kesehatan	100%	100%	Tercapai	
b	Genset running secara automatis	100%	100%	Tercapai	
c	Kecepatan Respon Perbaikan Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	97,50 %	Belum Tercapai	Perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan ketersediaan barang
	Sub Bag Hukum				
a	Jumlah pembuatan / penyusunan produk hukum RSUD Kota Bogor	100%	100%	Tercapai	
2	**Bagian Keuangan**				
	Sub Bag Akuntansi				
a	Ketepatan waktu penyusunan laporan berkala sebelum tanggal 10 (sepuluh)	100%	100%	Tercapai	
	Subag Pembendaharaan				
a	Penagihan tunggakan pasien	100%	60%	Belum Tercapai	•Masih banyaknya pasien yang belum memenuhi tunggakannya
b	Terwujudnya efisiensi anggaran	70%	70%	Tercapai	
3	**Bagian pembiayaan dan Jaminan Kesehatan**				
	Sub Bag Jaminan Kesehatan				
a	Ketepatan Waktu Klaim	100%	100%	Tercapai	
	Sub Bag Pembiayaan dan Investasi				
a	Kecepatan Penagihan dan Kelengkapan administrasi	100%	100%	Tercapai	
4	**Bidang Sumber Daya Manusia dan Diklat**				
	Seksi Administrasi Sumber Daya Manusia				
a	Ketepatan waktu kehadiran pegawai	90%	92%	Tercapai	
b	Pelayanan Adm. Kepegawaian	100%	100%	Tercapai	
	Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian				
a	Jumlah Staff Nakes di Area Kritis RS yang mengikuti pelatihan >20 jam per tahun	60%	53%	Belum Tercapai	• Melakukan pelatihan untuk staff yang ada di ara kritis
b	Ketepatan Pelaporan Hasil Kegiatan Diklat	60%	60%	Tercapai	
5	**Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit**				
	Seksi Perencanaan, Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan				
a	Ketepatan Waktu Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Sesuai Jadwal	100%	100%	Tercapai	

No	Indikator SPM	Target 2024	Capaian	Hasil	Permasalahan
b	Persentase kesesuaian kegiatan tahunan dengan Rencana Strategis (Renstra) 5 Tahunan	100%	100%	Tercapai	
c	Ketepatan Waktu Pengumpulan Bahan RBA	100%	100%	Tercapai	
	Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit				
a	Persentase Kesesuian informasi yang ada di modul dengan kebutuhan informasi unit	88%	94%	Tercapai	
6	**Bidang Pengembangan Bisnis dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit**				
	Seksi Hubungan Masyarakat, Pemasaran dan Pengembangan Bisnis				
a	Kecepatan respon terhadap komplain (KRK)	95%	95%	Tercapai	
b	Target viewers youtube	100%	100%	Tercapai	
c	Realisasi terhadap kerjasama pemasaran	100%	80%	Tercapai	
	Sub Bid Pengendalian Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit				
a	Kepuasan Pelanggan (Indeks Kepuasan Masyarakat)	89%	92,93 %	Tercapai	
b	Kepuasaan Pelanggan (Survey Kepuasan Pelanggan	88%	94,26 %	Tercapai	
7	**Bidang Pelayanan Medik**				
	Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap				
a	Tindak lanjut komplain pelayanan medik rawat inap < 24 jam	95%	100%	Tercapai	
b	Visite Dokter Spesialis rawat inap	98%	71,58 %	Belum Tercapai	• Sosialisasi Jam Visite kepada seluruh Dokter
c	Diversifikasi pelayanan Rawat Inap	100%	100%	Tercapai	
	Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan				
a	Tindak lanjut komplain pelayanan medik Rawat Jalan < 24 jam	95%	100%	Tercapai	
b	Visite Dokter Spesialis Rawat Jalan	98%	98%	Tercapai	
c	Diversifikasi pelayanan Rawat Jalan	100%	100%	Tercapai	
8	**Bidang pelayanan Penunjang**				
	Seksi Sarana dan Penunjang Medik				
a	Respont time Tindak Lanjut kerusakan pada alat kesehatan < 1 X 24 Jam	98%	100%	Tercapai	
b	Respont time Tindak Lanjut kerusakan pada alat kesehatan yang	98%	100%	Tercapai	

No	Indikator SPM	Target 2024	Capaian	Hasil	Permasalahan
	memerlukan pergantian spare part < 1-3 bulan				
	Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja				
a	Baku Mutu Limbah Cair	96%	99,69 %	Tercapai	
b	Pemeriksaan follow up dan pemberian seri Vaksin untuk petugas yang tertusuk jarum	100%	100%	Tercapai	
9	**Bidang Pelayanan Keperawatan**				
	Seksi Keperawatan Rawat Inap				
a	Hasil Audit Standar Asuhan Keperawatan (SAK) Rawat Inap	84%	85%	Tercapai	
b	Pelaksanaan Metode Pelayanan Keperawatan Profesional (MPKP) Rawat Inap	84%	85%	Tercapai	
c	Ketepatan pelaksanaan case conference 1 (satu) bulan sekali Rawat Inap	84%	85%	Tercapai	
	Bidang Keperawatan				
1	**Seksi Keperawatan Rawat Jalan**				
a	Hasil audit standar asuhan keperawatan (SAK)	84%	85%	Tercapai	
b	Pelaksanaan metode pelayanan keperawatan profesional (MPKP) Rawat Jalan	84%	85%	Tercapai	
a	Ketepatan Pelaksanaan case conference 1 bulan sekali Rawat Jalan	84%	85%	Tercapai	

Tabel 2.4 Realisasi Persentase Kepuasan Pelanggan pada Triwulan II Tahun 2024

No	Unit	Kepuasan Pelanggan Triwulan II 2024				
		Puas	%	Tidak Puas	%	Jumlah
1	Rawat Jalan	91	92,9%	7	7,1%	98
2	Rawat Inap	64	94,1%	4	5,9%	68
3	Bedah	43	93,5%	3	6,5%	46
4	Penunjang					
	• Hemodialisa	33	97,1%	1	2,9%	34
	• Laboratorium	29	90,6%	3	9,4%	32
	• Fisioterapi	29	90,6%	3	9,4%	32
	• Radiologi	29	90,6%	3	9,4%	32
	• Kemoterapi	32	97%	1	3%	33
	• MCU	30	96,8%	1	3,2%	31
5	Farmasi	95	96,9%	3	3,1%	98
6	IGD	88	96,7%	3	3,3%	91
7	IGD PONEK	28	90,3%	3	9,7%	31
8	Gizi	96	96%	4	4%	100
9	*Cleaning Service*	45	90%	5	10%	50
Total Kepuasan Secara Keseluruhan		**732**	**94,32**	**44**	**5,68**	**776**

Persentase Kepuasan Pelanggan pada Triwulan II Tahun 2024 adalah 94,32%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD KOTA BOGOR

Jumlah pasien yang dilayani di RSUD Kota Bogor Tahun 2024 hingga semester 1 berjumlah 186.916 Pasien, dengan rincian pasien BPJS berjumlah 175.696 Pasien atau 94% dan Non BPJS berjumlah 11.220 Pasien atau 6%. Rincian Pasien RSUD Kota Bogor Tahun 2023 dan Tahun 2024 (semester 1) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Distribusi Kunjungan Pasien RSUD Kota Bogor
Tahun 2020-2024 (Semester I)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	Juni 2024
1	IGD	28.154	12.105	52.745	71.952	48.392
2	Rawat Jalan	112.699	86.664	176.939	220.551	122.760
3	Rawat Inap	15.219	11.130	22.238	27.379	15.764
GRAND TOTAL		**156.072**	**109.899**	**251.922**	**319.882**	**186.916**

Rincian kunjungan Poliklinik Rawat Jalan Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Kunjungan Poliklinik Rawat Jalan RSUD Kota Bogor Tahun 2023

No	Bulan	Pasien		Jumlah	Jenis Pembayaran				Jumlah
		Baru	Lama		Umum	Perusahaan	BPJS	Karyawan	
1	Januari	1.063	16.570	17.633	1.279	110	16.234	10	17.633
2	Februari	942	16.048	16.990	1.166	124	15.697	3	16.990
3	Maret	881	17.199	18.080	1.221	182	16.673	4	18.080
	Triwulan I	**2.886**	**49.817**	**52.703**	**3.666**	**416**	**48.604**	**17**	**52.703**
4	April	779	13.459	14.238	1.317	115	12.801	5	14.238
5	Mei	1.009	17.819	18.828	1.470	230	17.121	7	18.828
6	Juni	837	15.398	16.235	1.033	151	15.045	6	16.235
	Triwulan II	**5.511**	**96.493**	**102.004**	**7.486**	**912**	**93.571**	**35**	**102.004**
7	Juli	951	17.741	18.692	992	158	17.538	4	18.692
8	Agustus	1.066	18.654	19.720	1.075	154	18.488	3	19.720
9	September	1.162	18.480	19.642	1.278	122	18.236	6	19.642
	Triwulan III	**8.690**	**151.368**	**160.058**	**10.831**	**1.346**	**147.833**	**48**	**160.058**
10	Oktober	1.423	19.358	20.781	1.526	129	19.122	4	20.781
11	November	1.005	19.266	20.271	1.033	126	19.104	8	20.271
12	Desember	933	18.468	19.401	1.018	166	18.214	3	19.401

No	Bulan	Pasien		Jumlah	Jenis Pembayaran				Jumlah
		Baru	Lama		Umum	Perusahaan	BPJS	Karyawan	
	Triwulan IV	**12.051**	**208.460**	**220.511**	**14.408**	**1.767**	**204.273**	**63**	**220.511**
Total		10,746	12.051	208.460	220.551	14.408	1.767	204.273	63
Persentase		**6%**	**5%**	**95%**	**100%**	**7%**	**1%**	**93%**	**0%**

Tabel 2. 7 Kunjungan Poliklinik Rawat Jalan RSUD Kota Bogor Tahun 2024 (Semester I)

No	Bulan	Pasien		Jumlah	Jenis Pembayaran					Jumlah
		Baru	Lama		Umum	Perusahaan	BPJS	Karyawan	Jamkesda	
1	Januari	1.122	19.183	20.305	1.076	163	19.059	4	3	20.305
2	Februari	935	18.292	19.227	951	190	18.084	2	0	19.227
3	Maret	948	19.726	20.674	1.049	209	19.409	7	0	20.674
	Triwulan I	**3.005**	**57.201**	**60.206**	**3.076**	**562**	**56.552**	**13**	**3**	**60.206**
4	April	977	17.781	18.758	1.176	187	17.387	8	0	18.758
5	Mei	1.080	21.197	22.277	974	293	21.004	6	0	22.277
6	Juni	981	20.538	21.519	854	256	20.406	3	0	21.519
	Triwulan II	**3.038**	**59.516**	**62.554**	**3.004**	**736**	**58.797**	**17**	**0**	**62.554**
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Triwulan III	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Triwulan IV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total		**6.043**	**116.717**	**122.760**	**6.080**	**1.298.**	**115.349**	**30**	**3**	**122.760**
Persentase		**3%**	**95%**	**100%**	**5%**	**1%**	**94%**	**0%**	**0%**	**100%**

Rincian kunjungan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2023 dan semester I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2023

No	Bulan	Pasien		Jumlah	Jenis Pembayaran					Jumlah
		Baru	Lama		Umum	Perusahaan	BPJS	Gratis	Karyawan	
1	Januari	1.779	3.355	5.134	64	4.650	0	4	5.134	64
2	Februari	1.815	3.447	5.262	74	4.696	0	2	5.262	74
3	Maret	1.744	3.627	5.371	461	101	4.808	0	1	461

No	Bulan	Pasien		Jumlah	Jenis Pembayaran					Jumlah
		Baru	Lama		Umum	Perusahaan	BPJS	Gratis	Karyawan	
	Triwulan I	**5.338**	**10.429**	**15.767**	**239**	**14.154**	**0**	**7**	**15.767**	**239**
4	April	1.700	3.256	4.956	115	4.369	0	11	4.956	115
5	Mei	2.048	3.878	5.926	204	5.159	0	5	5.926	204
6	Juni	1.955	3.585	5.540	81	5.007	0	2	5.540	81
	Triwulan II	**11.041**	**21.148**	**32.189**	**639**	**28.689**	**0**	**25**	**32.189**	**639**
7	Juli	1.955	3.837	5.792	90	5.284	0	3	5.792	90
8	Agustus	2.085	4.216	6.301	73	5.765	0	6	6.301	73
9	September	2.132	4.571	6.703	83	6.231	0	2	6.703	83
	Triwulan III	**17.213**	**33.772**	**50.985**	**885**	**45.969**	**0**	**36**	**50.985**	**885**
10	Oktober	2.397	4.880	7.277	92	6.774	0	0	7.277	92
11	November	2.173	4.194	6.367	84	5.896	0	0	6.367	84
12	Desember	2.351	4.972	7.323	77	6.780	0	1	7.323	77
	Triwulan IV	**24.134**	**47.818**	**71.952**	**1.138**	**65.419**	**0**	**37**	**71.952**	**1.138**
Total		**19,358**	24.134	47.818	71.952	1.138	65.419	0	37	71.952
Persentase		**36,70%**	**36,70%**	**63,30%**	**100,00%**	**3%**	**86%**	**0%**	**0%**	**100%**

Tabel 2. 9 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2024 (Semester I)

No	Bulan	Pasien		Jumlah	Jenis Pembayaran						Jumlah
		Baru	Lama		Umum	Perusahaan	Jamkesda	BPJS	Gratis	Karyawan	
1	Januari	2.537	4.986	7.523	442	26	55	6.994	0	6	7.523
2	Februari	2.981	5.830	8.811	538	36	96	8.136	0	5	8.811
3	Maret	3.041	6.195	9.236	547	25	16	8.644	0	4	9.236
	Triwulan I	**8.559**	**17.011**	**25.570**	**1.527**	**87**	**167**	**23.774**	0	**15**	**25.570**
4	April	2.647	5.462	8.109	482	22	6	7.597	0	2	8.109
5	Mei	2.289	5.572	7.861	392	21	27	7.419	0	2	7.861
6	Juni	1.880	4.972	6.852	341	19	21	6.465	0	6	6.852
	Triwulan II	**6.816**	**16.006**	**22.822**	**1.215**	**62**	**54**	**21.481**	0	**10**	**22.822**
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Triwulan III	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Triwulan IV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
Total		**15.375**	**33.017**	**48.392**	**2.742**	**149**	**221**	**45.255**	0	**0**	**48.392**
Persentase		**31,77%**	**68,23%**	**100%**	**6%**	**0%**	**0%**	**94%**	**0%**	**0%**	**100%**

Rincian kunjungan Rawat Inap Tahun 2023 dan semester I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10 Kunjungan Rawat Inap RSUD Kota Bogor Tahun 2023

No	Bulan	Pasien		Jumlah	Jenis Pembayaran						Jumlah
					Umum	Perusahaan	BPJS	Karyawan	Jamkesda		
		Baru	Lama						Kota	Kab	
1	Januari	61	2.090	2.151	51	25	2.030	2	5	38	2.151
2	Februari	51	1.909	1.960	51	27	1.838	0	2	42	1.960
3	Maret	64	2.047	2.111	49	49	1.960	0	4	49	2.111
	Triwulan I	**176**	**6.046**	**6.222**	**151**	**101**	**5.828**	**2**	**11**	**129**	**6.222**
4	April	71	1.877	1.948	66	93	1.749	1	1	38	1.948
5	Mei	76	2.288	2.364	59	106	2.133	0	4	62	2.364
6	Juni	68	2.108	2.176	58	54	2.027	1	1	35	2.176
	Triwulan II	**391**	**12.319**	**12.710**	**334**	**354**	**11.737**	**4**	**17**	**264**	**12.710**
7	Juli	47	2.227	2.274	43	31	2.146	0	5	49	2.274
8	Agustus	63	2.294	2.357	65	12	2.235	1	4	40	2.357
9	September	55	2.295	2.350	56	16	2.226	1	3	48	2.350
	Triwulan III	**556**	**19.135**	**19.691**	**498**	**413**	**18.344**	**6**	**29**	**401**	**19.691**
10	Oktober	60	2.555	2.615	64	16	2.476	0	3	56	2.615
11	November	67	2.511	2.578	51	21	2.455	0	1	50	2.578
12	Desember	64	2.431	2.495	72	31	2.354	0	3	35	2.495
	Triwulan IV	**747**	**26.632**	**27.379**	**685**	**481**	**25.629**	**6**	**36**	**542**	**27.379**
Total		**1,443**	**747**	**26.632**	**27.379**	**685**	**481**	**25.629**	**6**	**36**	**542**
Persentase		**6%**	**3%**	**97%**	**100%**	**3%**	**2%**	**94%**	**0%**	**0%**	**2%**

Tabel 2. 11 Kunjungan Rawat Inap RSUD Kota Bogor Tahun 2024 (Semester I)

No	Bulan	Pasien		Jumlah	Jenis Pembayaran						Jumlah
					Umum	Perusahaan	BPJS	Karyawan	Jamkesda		
		Baru	Lama						Kota	Kab	
1	Januari	60	2.558	2.618	39	16	2.507	0	3	53	2.618
2	Februari	49	2.483	2.532	73	10	2.384	0	3	62	2.532
3	Maret	67	2.764	2.831	80	9	2.726	0	4	12	2.831
	Triwulan I	**176**	**7.805**	**7.981**	**192**	**35**	**7.617**	**0**	**10**	**127**	**7.981**
4	April	76	2.433	2.509	89	11	2.401	1	2	5	2.509
5	Mei	83	2.631	2.714	69	15	2.603	0	4	23	2.714
6	Juni	76	2.484	2.560	60	7	2.471	1	5	16	2.560
	Triwulan II	**235**	**7.548**	**7.783**	**218**	**33**	**7.475**	**2**	**11**	**44**	**7.783**
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Triwulan III	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

No	Bulan	Pasien		Jumlah	Jenis Pembayaran						Jumlah
					Umum	Perusahaan	BPJS	Karyawan	Jamkesda		
		Baru	Lama						Kota	Kab	
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Triwulan IV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total		**411**	**15.353**	**15.764**	**410**	**68**	**15.092**	**2**	**21**	**171**	**15.764**
Persentase		**3%**	**97%**	**100%**	**3%**	**0%**	**96%**	**0%**	**0%**	**1%**	**100%**

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor merupakan Rumah Sakit Kelas B dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. Keberadaan RSUD Kota Bogor sudah jalan 5 Tahun. Masih banyak yang harus diperbaiki terkait sarana, prasaran, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan tuntutan masyarakat akan menjadi isu penting dalam pengelolaan rumah sakit maupun pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa kebijakan pemerintah dan tuntutan yang akan menjadi perhatian RSUD Kota Bogor dalam pengelolaan manajerial rumah sakit dan pengelolaan pelayanan rumah sakit :

a. Akreditasi Rumah Sakit

   Kebijakan Kementerian Kesehatan ini menjadi mutlak yang harus dipenuhi. RSUD Kota Bogor sendiri saat ini belum meraih sertifikat Akreditasi sehingga perencanaan anggaran dan kegiatan harus mengarah ke pencapaian raihan sertifikat akreditasi.

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

   Sebagai Rumah Sakit peralihan dari Rumah Sakit swasta yang sudah beroperasional dari Tahun 1984, kondisi sarana, prasarana, dan alat kesehatannya tentu sebagian sudah mengalami kerusakan sehingga diperlukan anggaran besar untuk mengganti sarana prasarana dan alat kesehatan yang sudah mulai rusak dan untuk memenuhi standar sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014.

c. Era Jaminan Kesehatan Nasional.

   Pengelolaan Rumah Sakit di era JKN memerlukan pengawasan yang ketat. Semua tarif pelayanan dan tindakan telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan sehingga diperlukan penyesuaian antara yang dikeluarkan dengan tarif INA CBG's.

d. Persiapan Penerapan Global Budget

   Global budget itu merupakan salah satu sistem pembayaran rumah sakit berdasarkan pada sejumlah besaran anggaran atau biaya dari hasil negosiasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, untuk jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan dalam kurun waktu tiga tahun sebelumnya, rencana yang akan dilakukan dan kinerja dari rumah sakit tersebut.

e. Pengembangan Rumah Sakit

   RSUD Kota Bogor sudah memiliki Rencana Induk Pengembangan Rumah Sakit dimana bahwa Gedung RSUD Kota Bogor akan dilakukan Revitalisasi untuk membuat ruang pelayanan RSUD Kota Bogor lebih representatif dan mampu menampung lebih banyak masyarakat Kota Bogor yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan RSUD Kota Bogor. Saat ini sedang dilakukan revitalisasi Blok I dan Blok IV, dimana anggaran tersebut berasal dari DAK dan Banprov.

f. Pemenuhan Kebutuhan SDM

   Meningkatnya tuntutan masyarakat maupun mutu pelayanan rumah sakit membutuhkan penambahan dokter spesialis, perawat, dan tenaga keteknisian medis.

g. Penggunaan Sistem Informasi

   Beberapa tahun belakangan ini, telah terjadi perkembangan yang cukup cepat untuk penggunaan sistem informasi. Dengan penggunaan sistem informasi di rumah sakit dapat meningkatkan kinerja dan menurunkan penggunaan kertas-kertas sehingga dapat menurunkan belanja terhadap kebutuhan kertas dan alat-alat tulis kantor. Investasi sistem informasi rumah sakit membutuhkan anggaran yang cukup besar.

2.4 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2024

Tabel 2. 12 Review Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 RSUD Kota Bogor (versi SIPD)

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	KET
1	**Program**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**18.314.948.047**	**18.767.746.326**	**452.798.279**	
A	**Kegiatan**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.314.948.047	18.767.746.326	452.798.279	
	Sub Kegiatan	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	18.314.948.047	16.299.299.644	452.798.279	
2	**Program**	**Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**270.885.000.000**	**363.998.494.920**	**93.113.494.920**	
A	**Kegiatan**	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	39.459.190.247	39.459.190.247	
	Sub Kegiatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	39.459.190.247	39.459.190.247	
B	**Kegiatan**	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	270.885.000.000	324.539.304.673	53.654.304.673	
	Sub Kegiatan	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	270.885.000.000	324.539.304.673	53.654.304.673	
		Jumlah	**289.199.948.047**	**382.766.241.246**	**93.566.293.199**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang akan dituangkan ke dalam pelayanan kesehatan perorangan merupakan telaahan dari usulan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bagian dari keikut sertaan masyarakat dalam memberikan berkontribusi dalam pembangunan

kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Bogor sebagai berikut:

a. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat.
b. Tuntutan untuk ketersediaan jumlah tempat tidur lebih banyak di RSUD. Jumlah kunjungan pasien rawat inap mengalami peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya, hal ini dikarenakan RSUD Kota Bogor merupakan satu-satunya rumah sakit umum daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor.
c. Tuntutan masyarakat terkait sarana prasarana (ketersediaan obat, bahan habis pakai, alat kesehatan, lahan parkir. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem perencanaan yang matang oleh manajemen rumah sakit serta fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan melalui BLUD.
d. Penambahan anggaran pada sub kegiatan Operasional Pelayanan RS (BLUD) merupakan prognosa dari pendapatan hingga akhir tahun 2024 dan silpa tahun 2023.
e. Penambahan anggaran sub kegiatan baru yaitu sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp39.459.190.247 merupakan alokasi keuangan dari pusat (DAK) dan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat.
f. Penambahan anggaran pada sub kegiatan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN merupakan oenyesuaian terhadap gaji/tunjangan PNS dan PPPK.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI

A. Telahaan Kebijakan Nasional

Dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024, Visi Pembangunan Nasional adalah "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh** berlandaskan **keunggulan kompetitif di berbagai wilayah** yang didukung oleh **SDM berkualitas** dan berdaya saing. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, terkait dengan pembangunan di Bidang Kesehatan masuk NAW CITA ke-5 yaitu " Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia".

Arah Kebijakan dan Strategi meliputi 5 hal yaitu : Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian masyarakat, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan dan penguatan pelaksanaan jaminan sosial. Pada strategi peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan pada point penguatan pelayanan dasar dan kesehatan rujukan difokuskan pada:

1. **Penyempurnaan sistem akreditasi** pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang digunakan sebagai acuan pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Pengembangan rencana induk nasional penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan system **rujukan *online*** termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk daerah dengan karakteristik geografis tertentu

(**kepulauan dan pegunungan**), perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan ***telemedicine*****,** dan **digitalisasi rekam medis** dan **rekam medis *online***;

4. perluasan pelayanan kesehatan bergerak (***flying health care***) dan gugus pulau; dan
5. perbaikan pengelolaan **limbah medis** fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada strategi peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan pada point penguatan pelayanan dasar dan kesehatan rujukan difokuskan pada point penguatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan pada:

1. Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas daerah;
2. **Pendampingan** perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM kesehatan;
3. Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi **sistem informasi kesehatan** pusat dan daerah termasuk penerapan sistem *single entry*;
4. Inovasi dan pemanfaatan **teknologi digital** untuk pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan termasuk *big data*;
5. Riset operasional untuk inovasi dan **evaluasi efektivitas** intervensi kesehatan;
6. Peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti;
7. Pengembangan **sumber pembiayaan baru** seperti penerapan *earmark* cukai dan pajak, kerjasama pemerintah dan swasta; dan
8. Peningkatan **kemandirian** pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah.

B. Telahaan Kebijakan Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat mempunyai Visi “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**”.** Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut: Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri. Inovasi:

pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

- Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
- Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
- Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
- Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai Visi Provinsi Jawa Barat, telah dibuat sebanyak 5 Misi, dimana Bidang Kesehatan mendukung Misi Pertama Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. Dengan Tujuan Misi Pertama adalah Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya dan Sasarannya adalah Meningkatnya kualitas

layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata.

Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia; (2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) Reformasi birokrasi.

Permasalahan pelayanan kesehatan di Jawa Barat pada saat ini menunjukan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan Indeks Kesehatan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan, dengan capaian sebesar 80,72 poin pada tahun 2017, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita per satuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukan dengan 1 dari 4 anak usia 0-59 bulan di Provinsi Jawa Barat mengalami stunting.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA RSUD KOTA BOGOR

Dokumen Rencana Kerja Tahunan merupakan dokumen turunan dari Rencana Strategi Bisnis RSUD Kota Bogor yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan demikian Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Kota Bogor mengacu pada Dokumen Rencana Strategi Bisnis RSUD Kota Bogor yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan RSUD Kota Bogor Tahun 2024, tujuan dan sasaran masih mengacu pada Rencana Strategis Perubahan RSUD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan berpedoman pada sasaran daerah dan prioritas pada RKPD Perubahan 2024.

Prioritas dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan RSUD Kota Bogor tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kota Bogor Tahun 2024 berdasarkan Renstra Perubahan RSUD Kota Bogor 2019-2024

TUJUAN		SASARAN				
No	**Tujuan**	**Sasaran**		**Indikator**		**Tahun 2024**
1.	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat melalui pelayanan kuratif			Angka Harapan Hidup saat lahir		74,18
		1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1	Net Death Rate (NDR)	≤ 24‰
2.	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor			Indeks Reformasi Birokrasi		A Point
		2	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor	2	Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	82

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perubahan dan pendanaan Perangkat Daerah tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah.

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KOTA BOGOR TAHUN 2024

A. Sinkronisasi Progam Dan Kegiatan Antar SKPD

Untuk mencapai Kinerja Pemerintah Kota Bogor dan Prioritas Pembangunan, maka diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. RSUD Kota Bogor sebagai Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya mendukung tercapainya Misi pertama Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat. Tujuannya Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas. Tabel sinkronisasi tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini :

Tabel 4.1 Target Kinerja Pemerintah Kota Bogor dan Sinkronisasi Program Antar SKPD

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2024	PROGRAM	PELAKSANA
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	a. Net Death Rate (NDR)	≤24‰	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD dan Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor	b. Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD

B. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program dan Kegiatan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran beserta Indikatornya. Mengingat telah ditetapkannya Pagu Anggaran bersumber APBD untuk RSUD Kota Bogor sebesar **Rp382.226.936.573**,-. Berikut ini adalah program dan kegiatan yang dalam Renstra Perubahan Tahun 2019-2024.

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebelum dan Setelah Perubahan

RSUD Kota Bogor Tahun 2024

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan	Sumber dana	Lokasi	Anggaran Sebelum Perubahan			Anggaran Setelah Perubahan			Penambahan/ Pengurangan
									Target		Anggaran	Target		Anggaran	
1	02	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	APBD	RSUD Kota Bogor	3.50	Point	18.314.948.047	3.72	Point	18.767.746.326	452.798.279
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD	RSUD Kota Bogor	100	%	18.314.948.047	100	%	18.767.746.326	452.798.279
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	APBD	RSUD Kota Bogor	289	Orang / Bulan	18.314.948.047	289	Orang / Bulan	18.767.746.326	452.798.279
1	02	02			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase Pasien yang Dilayani	APBD, BLUD, DAK	RSUD Kota Bogor	100	%	270.885.000.000	100	%	363.998.494.920	93.113.494.920
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKP Kewenangan Daerah	APBD, DAK	RSUD Kota Bogor	-	-	-	85,25	%	39.459.190.247	39.459.190.247
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	DAK	RSUD Kota Bogor	-	-	--	70	Unit	39.459.190.247	39.459.190.247
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang	BLUD	RSUD Kota Bogor	94	%	270.885.000.000	94	%	324.539.304.673	53.654.304.673

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan	Sumber dana	Lokasi	Anggaran Sebelum Perubahan			Anggaran Setelah Perubahan			Penambahan/ Pengurangan
									Target		Anggaran	Target		Anggaran	
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	BLUD	RSUD Kota Bogor	2	Dok	270.885.000.000	2	Dok	324.539.304.673	53.654.304.673

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor ini kami sampaikan. Harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan RSUD Bogor Kota Bogor Tahun 2024, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Kota Bogor pada Tahun 2024 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan RSUD Kota Bogor dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh *stakeholders,* serta dasar dalam mengukur keberhasilan RSUD Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Salinan sesuai

KOTA BOGOR

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (HAN)
Pembina Tk.I

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI